



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada:
 - a. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, dan kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada:
 - a. rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda Litbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renja Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda Litbang.

BAB VI
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Agustus 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

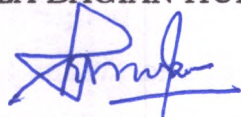
Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja SKPD memuat pedoman pembangunan daerah tahunan yang berupa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan pedoman tersebut dapat menjamin terwujudnya pembangunan daerah yang terarah, berkesinambungan, efektif serta efisien untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan mengangkat Isu Strategis:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan, sehingga daya tampung sekolah belum terpenuhi;
2. Terbatasnya kompetensi guru khususnya di bidang teknologi informasi;
3. Terbatasnya tenaga pendidik yang telah tersertifikasi;
4. Terbatasnya SDM pengelola kebudayaan di Kota Balikpapan.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan akhir RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
20. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan target kinerja pada Sustainable Development Goals Support (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2025 meliputi :

	BAB I. PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	. 1.2 Landasan Hukum
BAB II	. 1.3 Maksud dan Tujuan
HASIL EVALUASI	. 1.4 Sistematika Penulisan
PELAKSANAAN	
RENCANA KERJA	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DINAS	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
PENDIDIKAN DAN	. Capaian Renstra Perangkat Daerah
KEBUDAYAAN	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
TAHUN 2023	. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.1 Evaluasi	. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pelaksanaan	
Rencana Kerja	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Perangkat	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Daerah Tahun	. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
2023 dan	. 3.3 Program dan Kegiatan
Capaian	
Renstra	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Perangkat	BAB V. PENUTUP
Daerah.	

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja periode sebelumnya yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam mengemban Visi dan Misi Kota Balikpapan. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi kinerja berfungsi untuk :

1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi
2. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026 yang pada saat disusun mengacu pada ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang secara garis besar terdiri atas Kegiatan-Kegiatan yang mempedomani Renstra yang merupakan penjabaran dari Program-program di urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum di dalam RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026, dimana keseluruhannya berpedoman kepada Peraturan dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam melihat tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, maka dibutuhkan proses reviu. Reviu dilakukan dengan menganalisa Tingkat Realisasi Capaian Kinerja yang menggambarkan seberapa jauh suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat mencapai Target Kinerja yang telah direncanakan. Review terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan keterkaitannya dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini yang tersaji ke dalam tiga kriteria yaitu :

1. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan secara keseluruhan (tabel 2.1.1);
2. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (tabel 2.1.2);
3. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan (tabel 2.1.3);

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Renstra																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	nilai	89,18	2.025.447.312.150	85,89	4.091.170.686	86,18	15.335.758.735	85,89	14.571.363.414	99,66	95,02	85,89	18.662.534.100	96,31	0,92
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	86,03	885.000.000	78,03	112.954.541	80,03	450.000.000	78,03	445.918.224	97,50	99,09	78,03	558.872.765	90,70	63,15
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			12	112.954.541	21	450.000.000	21	445.918.224	100,00	99,09				
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	nilai	88,75	4.372.679.295	87,32	671.755.711	87,55	760.000.000	87,32	706.468.181	99,74	92,96	87,32	1.378.223.892	98,39	31,52
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen			140	671.755.711	13	760.000.000	13	706.468.181	100,00	92,96				

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelaksanaan Tugas ASN															
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	87,21	9.636.170.843	86,09	1.574.648.288	85,71	9.049.046.735	84,69	8.648.177.825	98,81	95,57	84,69	10.222.826.113	97,11	106,09
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	100.000.000	100	39.624.000	12	60.000.000	12	38.295.000	100,00	63,83			0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	367.514.281	82	427.410.400	4	6.549.046.735	4	6.344.513.325	100,00	96,88			0,00	0,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	80,00	500.000.000	86	514.871.100	80	825.000.000	80	794.100.500	100,00	96,25			0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	167.040.000	4	166.160.000	4	380.000.000	4	243.858.000	100,00	64,17			0,00	0,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	30.000.000	4	166.160.000	4	35.000.000	3	27.600.000	75,00	78,86			0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	500,00	250.000.000	750	399.102.788	750	900.000.000	750	900.000.000	100,00	100,00			0,00	0,00
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	Dokumen	1	550.000.000	-	0	1	300.000.000	1	299.811.000	100,00	99,94			0	0

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<i>Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>															
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	88,04	1.172.835.490	87,25	840.683.410	86,84	1.295.000.000	83,88	1.065.547.090	96,59	82,28	83,88	1.906.230.500	95,27	162,53
<i>1.01.01.2.08.02</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>3,00</i>	<i>560.835.490</i>	<i>4</i>	<i>307.322.881</i>	<i>3</i>	<i>570.000.000</i>	<i>3</i>	<i>393.839.090</i>	<i>100,00</i>	69,09			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.01.01.2.08.04</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>2,00</i>	<i>612.000.000</i>	<i>1.028</i>	<i>533.360.529</i>	<i>2</i>	<i>725.000.000</i>	<i>2</i>	<i>671.708.000</i>	<i>100,00</i>	92,65			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	84,47	1.170.094.000	82,66	891.128.736	82,97	3.781.712.000	82,66	3.705.252.094	99,63	97,98	82,66	4.596.380.830	97,86	392,82
<i>1.01.01.2.09.01</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Unit</i>	<i>67,00</i>	<i>523.094.000</i>	<i>67</i>	<i>346.574.279</i>	<i>78</i>	<i>611.712.000</i>	<i>78</i>	<i>559.986.338</i>	<i>100,00</i>	91,54			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.01.01.2.09.06</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin</i>	<i>Unit</i>	<i>7,00</i>	<i>354.000.000</i>	<i>100</i>	<i>301.843.855</i>	<i>207</i>	<i>470.000.000</i>	<i>207</i>	<i>456.218.202</i>	<i>100,00</i>	97,07			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<i>Lainnya yang Dipelihara</i>															
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	293.000.000	1	242.710.602	3	2.700.000.000	3	2.689.047.554	100,00	99,59			0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)		87,33	432.545.858.631	90,81	413.334.772.961	87,03	430.614.148.265	90,81	391.053.558.226	104,34	90,81	90,81	#####	103,98	185,97
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		91,50	190.016.460.180	88,73	188.074.418.782	89,40	174.592.437.015	88,73	168.688.613.168	99,25	96,62	88,73	#####	96,97	187,75
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1808	7500000000	-	-	6	800.000.000	1	792.794.820	16,67	99,10			0	0
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	162,00	1.000.000.000	-	-	151	200.000.000	151	199.050.000	100,00	99,53			0,00	0,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	164,00	1.000.000.000	3	597.593.913	2	400.000.000	2	398.040.500	100,00	99,51			0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	216,00	1.820.000.000			20	4.445.189.500	25	4.430.841.500	125,00	99,68			0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1.782	5.600.000.000			57	19.193.071.150	64	18.914.404.204	112,28	98,55			0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	216	600000000			1	200.311.510	2	199.112.925	200,00	99,40			0	0
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	154	600000000			1	53.491.200	0	-	0,00	0,00			0	0
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	156	600000000			1	65.544.150	1	65.230.000	100,00	99,52			0	0
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	216	600000000			1	77.413.350	1	77.100.000	100,00	99,60			0	0
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	400	4.000.000.000			13000	11.590.495.000	13.000	11.490.731.150	100,00	99,14			0,00	0,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	400	240.000.000	192	86.400.000	170	90.000.000	170	88.933.100	100,00	98,81			0,00	0,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket			2	10.454.266.740	3	375.000.000	3	296.835.000	100,00	79,16				

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	221	700.000.000			192	32.819.947.465	192	32.684.274.544	100,00	99,59			0,00	0,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	221	1.500.000.000	213	108.900.900	192	137.812.000	192	124.234.800	100,00	90,15			0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	21.619	1.750.000.000	5	559.388.900	5349	517.700.250	5.349	506.323.000	100,00	97,80			0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	3.310	11.607.500.000	3.310	6.506.307.377	2960	7.590.000.000	2.515	7.225.586.245	84,97	95,20			0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	213	1.200.000.000			192	1.088.740.800	192	1.007.630.368	100,00	92,55			0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	189	105.440.960.180			214	94.537.718.500	214	89.981.078.184	100,00	95,18			0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang			5	1.041.247.592	1	257.700.690	1	206.412.828	100,00	80,10				
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Ruang					1	152.301.450	0	-	0,00	0,00				
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		98,46	187.809.647.840	95,26	184.256.136.556	96,06	184.474.620.950	95,26	163.094.455.072	99,16	88,41	95,26	##### ##	96,75	184,95
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	96	56.000.000.000			2	49.500.000.000	2	39.369.114.886	100,00	79,53			0,00	0,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1.177	7.500.000.000			2	800.000.000	2	628.727.435	100,00	78,59			0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	146	1.000.000.000	2	1.445.313.952	2	1.435.811.000	2	1.144.201.253	100,00	79,69			0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	91	5.000.000.000			20	5.625.000.000	20	5.573.231.140	100,00	99,08			0,00	0,00
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/ Berat	Unit	91	3.000.000.000			21	8.800.000.000	21	8.732.690.309	100,00	99,24			0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3.000	4.500.000.000	714	5.991.237.160	2963	13.700.000.000	2.963	13.604.119.075	100,00	99,30			0,00	0,00
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	300	3.000.000.000	12.224	10.478.829.208	37500	11.132.415.000	37.500	11.094.803.700	100,00	99,66			0,00	0,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	400	300.000.000	380	263.375.000	400	300.000.000	400	300.000.000	100,00	100,00			0,00	0,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	23.829	475.264.000			30.278	20.418.264.000	30.278	20.275.103.313	100,00	99,30			0,00	0,00
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	91	1.500.000.000	77	181.656.000	76	170.000.000	76	139.421.700	100,00	82,01			0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	17.730	1.000.000.000	5	417.966.517	1000	500.000.000	1.000	429.176.600	100,00	85,84			0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan	Orang	1.679	9.157.500.000	1.125	5.232.281.960	1679	7.200.000.000	762	5.296.605.550	45,38	73,56			0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi															
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	91	500.000.000			91	880.200.000	91	614.882.729	100,00	69,86			0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	75	69.171.133.840			74	64.012.930.950	67	55.892.377.382	90,54	87,31			0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		31,30	29.197.775.684	36,62	15.369.497.645	29,80	42.042.810.000	36,62	34.883.208.838	122,89	82,97	36,62	50.252.706.483	117,00	172,11
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang telah di bangun	Ruang	532	2.000.000.000			1,00	144.019.000	1	143.179.000	100,00	99,42	#N/A	143.179.000		7,16
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah di bangun	Ruang	532	300.000.000			8,00	1.265.657.000	8	1.258.678.900	100,00	99,45	#N/A	1.258.678.900		419,56
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Unit	532	400000000			526	350.000.000	1	276.926.458	0,19	79,12	#N/A	276.926.458		69,23
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	532	400000000			6	400.000.000	6	382.063.100	100,00	95,52	#N/A	382.063.100		95,52

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	340	750000000			2298	5.020.500.000	2298	5.000.694.571	100,00	99,61	#N/A	5.000.694.571		666,76
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang tersedia	Paket					7	9.850.000.000	7	9.222.419.057	100,00	93,63	#N/A	9.222.419.057		
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	726	110.000.000	486	55.840.000	50	110.000.000	50	106.507.500	100,00	96,83	#N/A	162.347.500		147,59
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2.096	19.296.440.300	1.803	3.828.225.000	2096	14.741.593.700	2.096	10.815.026.680	100,00	73,36	#N/A	14.643.251.680		75,89
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	601	651.057.650	498	446.493.150	556	1.264.392.300	146	1.193.035.022	26,26	94,36	#N/A	1.639.528.172		251,83
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	-	-	-	-	477	8.846.648.000	353	7.838.615.529	74,00	88,61				

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	526	50.000.000	526	5.657.600.000	35	50.000.000	25	47.920.921	71,43	95,84			0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi		100	25.521.974.927	63,64	25.634.719.977	78,57	29.504.280.300	63,64	24.387.281.148	81,00	82,66	63,64	50.022.001.125	63,64	196,00
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	108	500.000.000			3	460.000.000	3	456.923.000	100,00	99,33			0,00	0,00
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	10.500	3.707.325.300	1.995	3.939.409.986	3686	3.800.000.000	3.686	3.682.019.819	100,00	96,90			0,00	0,00
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	19	118.150.000	14	68.668.400	18	83.000.000	18	79.818.500	100,00	96,17			0,00	0,00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2.586	10.676.765.300	153	230.905.200	2586	13.502.722.300	2.232	12.855.960.180	86,31	95,21			0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	98	116.000.000	17	55.641.000	98	7.019.460.000	98	6.528.873.824	100,00	93,01			0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	-	-			1	4.639.098.000	1	800.485.825	100,00	93,90				
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1		92,95	8.394.166.476	95,16	1.036.413.997	91,45	3.322.750.500	95,16	3.129.650.942	104,06	94,19	95,16	4.166.064.939	102,38	49,63
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		71,75	8.394.166.476	94,00	1.036.413.997	70,70	3.322.750.500	94,00	3.129.650.942	132,96	94,19	94,00	4.166.064.939	131,01	49,63
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar,	Dokumen	2	1.441.470.081	9	1.036.413.997	2	3.322.750.500	2	3.129.650.942	100,00	94,19			0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan															
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	2.884	485.608.738.779			2.510	398.438.855.038	2.510	313.260.506.084	100,00	78,62			0,00	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan		78	7.047.245.447	22,90	631.788.941	45,00	1.600.000.000	22,90	1.296.309.640	50,89	81,02	22,90	1.928.098.581	29,33	27,36
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina		60	558.224.776	12,00	119.589.445	30,00	125.000.000	14,00	122.918.360	46,67	98,33	14,00	242.507.805	23,33	43,44
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	6	63.224.776	1	14.321.940	3	65.000.000	3	63.436.000	100,00	97,59			0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	40	70.000.000	3	105.267.505	40	60.000.000	40	59.482.360	100,00	99,14			0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya		90,91	6.012.746.694	56,37	479.641.131	80,00	1.200.000.000	56,37	1.173.391.280	70,46	97,78	56,37	1.653.032.411	62,01	27,49
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	250	1.197.000.000	4	479.641.131	220	1.200.000.000	196	1.173.391.280	89,09	97,78			0,00	0,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif		83,33	476.273.977	6,03	32.558.365	25,00	275.000.000	18,09	273.775.000	72,36	99,55	18,09	306.333.365	21,71	64,32
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	30	100.000.000	3	32.558.365	10	275.000.000	10	273.775.000	100,00	99,55			0,00	0,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni		39,80	1.730.767.258	24,87	2.212.257.271	27,36	305.000.000	24,87	286.502.488	90,90	93,94	24,87	2.498.759.759	62,49	144,37
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	Persentase pelaku seni yang dibina		60	385.561.077	40,00	2.212.257.271	45,00	305.000.000	40,00	286.502.488	88,89	93,94	40,00	2.498.759.759	66,67	648,08

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Daerah Kabupaten/Kota																
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	130	240.000.000	3	164.146.271	100	180.000.000	100	178.503.000	100,00	99,17			0,00	0,00
2.22.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	20	104.572.916	1	48.111.000	10	125.000.000	10	107.999.488	100,00	86,40			0,00	0,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal		80	247.776.959	26,66	145.033.900	33,33	60.000.000	26,66	59.532.000	79,99	99,22	26,66	204.565.900	33,33	82,56
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		75	247.776.959	50,00	145.033.900	60,00	60.000.000	50,00	59.532.000	83,33	99,22	50,00	204.565.900	66,67	82,56
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	40	247.776.959	105	145.033.900	25	60.000.000	25	59.532.000	100,00	99,22			0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 ()		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 ()	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		100	1.589.201.333	85,63	1.101.001.127	95,59	990.000.000	85,63	944.461.190	89,58	95,40	85,63	2.045.462.317	85,63	128,71
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		100	239.201.333	75,86	78.239.150	95,59	76.500.000	75,86	75.777.660	79,36	99,06	75,86	154.016.810	75,86	64,39
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	2	118.451.008	145	42.900.000	2	30.000.000	2	29.684.500	100,00	98,95			0,00	0,00
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	136	120.750.325	145	35.339.150	130	46.500.000	129	46.093.160	99,23	99,13			0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya		28,57	1.350.000.000	19,97	1.022.761.977	21,43	913.500.000	19,97	868.683.530	93,19	95,09	19,97	1.891.445.507	69,89	140,11
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	136	707.000.000	120	640.774.285	130	763.500.000	129	725.920.530	99,23	95,08			0,00	0,00
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	72	356.000.002	4	234.267.683	66	150.000.000	66	142.763.000	100,00	95,18			0,00	0,00

Tabel 2.1.2

Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Renstra						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,18	15.335.758.735	85,89	14.571.363.414	99,66%	95,02%
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,03	450.000.000	78,03	445.918.224	97,50%	99,09%
<i>1.01.01.2.01.07</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>21</i>	<i>450.000.000</i>	<i>21</i>	<i>445.918.224</i>	<i>100,00%</i>	<i>99,09%</i>
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	87,55	760.000.000	87,32	706.468.181	99,74%	92,96%
<i>1.01.01.2.02.02</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>13</i>	<i>760.000.000</i>	<i>13</i>	<i>706.468.181</i>	<i>100,00%</i>	<i>92,96%</i>
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,71	9.049.046.735	84,69	8.648.177.825	98,81%	95,57%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	60.000.000	12	38.295.000	100,00%	63,83%
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	6.549.046.735	4	6.344.513.325	100,00%	96,88%
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	825.000.000	80	794.100.500	100,00%	96,25%
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	380.000.000	4	243.858.000	100,00%	64,17%
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	35.000.000	3	27.600.000	75,00%	78,86%
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750	900.000.000	750	900.000.000	100,00%	100,00%
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	300.000.000	1	299.811.000	100,00%	99,94%
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,84	1.295.000.000	83,88	1.065.547.090	96,59%	82,28%
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	570.000.000	3	393.839.090	100,00%	69,09%
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	725.000.000	2	671.708.000	100,00%	92,65%
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,97	3.781.712.000	82,66	3.705.252.094	99,63%	97,98%
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	611.712.000	78	559.986.338	100,00%	91,54%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	207	470.000.000	207	456.218.202	100,00%	97,07%
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2.700.000.000	3	2.689.047.554	100,00%	99,59%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,03	430.614.148.265	90,81	391.053.558.226	104,34%	90,81%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	89,40	174.592.437.015	88,73	168.688.613.168	99,25%	96,62%
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	800.000.000	1	792.794.820	16,67%	99,10%
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	151	200.000.000	151	199.050.000	100,00%	99,53%
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	400.000.000	2	398.040.500	100,00%	99,51%
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20	4.445.189.500	25	4.430.841.500	125,00%	99,68%
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	57	19.193.071.150	64	18.914.404.204	112,28%	98,55%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	200.311.510	2	199.112.925	200,00%	99,40%
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	53.491.200	0	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	65.544.150	1	65.230.000	100,00%	99,52%
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1	77.413.350	1	77.100.000	100,00%	99,60%
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13000	11.590.495.000	13.000	11.490.731.150	100,00%	99,14%
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	170	90.000.000	170	88.933.100	100,00%	98,81%
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	375.000.000	3	296.835.000	100,00%	79,16%
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	192	32.819.947.465	192	32.684.274.544	100,00%	99,59%
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	192	137.812.000	192	124.234.800	100,00%	90,15%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5349	517.700.250	5.349	506.323.000	100,00%	97,80%
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2960	7.590.000.000	2.515	7.225.586.245	84,97%	95,20%
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	192	1.088.740.800	192	1.007.630.368	100,00%	92,55%
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	214	94.537.718.500	214	89.981.078.184	100,00%	95,18%
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1	257.700.690	1	206.412.828	100,00%	80,10%
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	152.301.450	0	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96,06	184.474.620.950	95,26	163.094.455.072	99,16%	88,41%
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2	49.500.000.000	2	39.369.114.886	100,00%	79,53%
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	800.000.000	2	628.727.435	100,00%	78,59%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	1.435.811.000	2	1.144.201.253	100,00%	79,69%
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20	5.625.000.000	20	5.573.231.140	100,00%	99,08%
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	21	8.800.000.000	21	8.732.690.309	100,00%	99,24%
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2963	13.700.000.000	2.963	13.604.119.075	100,00%	99,30%
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	37500	11.132.415.000	37.500	11.094.803.700	100,00%	99,66%
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400	300.000.000	400	300.000.000	100,00%	100,00%
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	30.278	20.418.264.000	30.278	20.275.103.313	100,00%	99,30%
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	76	170.000.000	76	139.421.700	100,00%	82,01%
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000	500.000.000	1.000	429.176.600	100,00%	85,84%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1679	7.200.000.000	762	5.296.605.550	45,38%	73,56%
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	91	880.200.000	91	614.882.729	100,00%	69,86%
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	74	64.012.930.950	67	55.892.377.382	90,54%	87,31%
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	29,80	42.042.810.000	36,62	34.883.208.838	122,89%	82,97%
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah di bangun	1,00	144.019.000	1	143.179.000	100,00%	99,42%
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah di bangun	8,00	1.265.657.000	8	1.258.678.900	100,00%	99,45%
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	526	350.000.000	1	276.926.458	0,19%	79,12%
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6	400.000.000	6	382.063.100	100,00%	95,52%
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2298	5.020.500.000	2298	5.000.694.571	100,00%	99,61%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang tersedia	7	9.850.000.000	7	9.222.419.057	100,00%	93,63%
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50	110.000.000	50	106.507.500	100,00%	96,83%
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2096	14.741.593.700	2.096	10.815.026.680	100,00%	73,36%
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	556	1.264.392.300	146	1.193.035.022	26,26%	94,36%
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	477	8.846.648.000	353	7.838.615.529	74,00%	88,61%
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	35	50.000.000	25	47.920.921	71,43%	95,84%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	78,57	29.504.280.300	63,64	24.387.281.148	81,00%	82,66%
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3	460.000.000	3	456.923.000	100,00%	99,33%
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	3686	3.800.000.000	3.686	3.682.019.819	100,00%	96,90%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	18	83.000.000	18	79.818.500	100,00%	96,17%
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2586	13.502.722.300	2.232	12.855.960.180	86,31%	95,21%
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	98	7.019.460.000	98	6.528.873.824	100,00%	93,01%
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1	4.639.098.000	1	800.485.825	100,00%	93,90%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91,45	3.322.750.500	95,16	3.129.650.942	104,06%	94,19%
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70,70	3.322.750.500	94,00	3.129.650.942	132,96%	94,19%
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2	3.322.750.500	2	3.129.650.942	100,00%	94,19%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2.22.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.510	398.438.855.038	2.510	313.260.506.084	100,00%	78,62%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	45,00	1.600.000.000	22,90	1.296.309.640	50,89%	81,02%
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	30,00	125.000.000	14,00	122.918.360	46,67%	98,33%
2.22.02.2.01.01	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>	3	65.000.000	3	63.436.000	100,00%	97,59%
2.22.02.2.01.02	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	40	60.000.000	40	59.482.360	100,00%	99,14%
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	80,00	1.200.000.000	56,37	1.173.391.280	70,46%	97,78%
2.22.02.2.02.01	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>	220	1.200.000.000	196	1.173.391.280	89,09%	97,78%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	25,00	275.000.000	18,09	273.775.000	72,36%	99,55%
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	10	275.000.000	10	273.775.000	100,00%	99,55%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	27,36	305.000.000	24,87	286.502.488	90,90%	93,94%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	45,00	305.000.000	40,00	286.502.488	88,89%	93,94%
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100	180.000.000	100	178.503.000	100,00%	99,17%
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10	125.000.000	10	107.999.488	100,00%	86,40%
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	33,33	60.000.000	26,66	59.532.000	79,99%	99,22%
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00	60.000.000	50,00	59.532.000	83,33%	99,22%
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	25	60.000.000	25	59.532.000	100,00%	99,22%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	95,59	990.000.000	85,63	944.461.190	89,58%	95,40%
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	95,59	76.500.000	75,86	75.777.660	79,36%	99,06%
2.22.05.2.01.01	<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>	2	30.000.000	2	29.684.500	100,00%	98,95%
2.22.05.2.01.02	<i>Penetapan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>	130	46.500.000	129	46.093.160	99,23%	99,13%
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21,43	913.500.000	19,97	868.683.530	93,19%	95,09%
2.22.05.2.02.01	<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>	130	763.500.000	129	725.920.530	99,23%	95,08%
2.22.05.2.02.03	<i>Pemanfaatan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>	66	150.000.000	66	142.763.000	100,00%	95,18%

Faktor penyebab realisasi kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tidak tercapai dari yang direncanakan secara umum selain yang dijelaskan di tabel di atas adalah :

1. Masih kurangnya kerja sama beberapa pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.
2. Masih kurangnya pemahaman dari beberapa pejabat dalam substansi kinerja dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Kemudian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut: :

Tabel 2.1.3

Realisasi capaian kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,03	430.614.148.265	90,81	391.053.558.226	104,34%	90,81%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	89,40	174.592.437.015	88,73	168.688.613.168	99,25%	96,62%
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	29,80	42.042.810.000	36,62	34.883.208.838	122,89%	82,97%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	78,57	29.504.280.300	63,64	24.387.281.148	81,00%	82,66%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91,45	3.322.750.500	95,16	3.129.650.942	104,06%	94,19%
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70,70	3.322.750.500	94,00	3.129.650.942	132,96%	94,19%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	45,00	1.600.000.000	22,90	1.296.309.640	50,89%	81,02%

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	30,00	125.000.000	14,00	122.918.360	46,67%	98,33%
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	80,00	1.200.000.000	56,37	1.173.391.280	70,46%	97,78%
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	25,00	275.000.000	18,09	273.775.000	72,36%	99,55%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	27,36	305.000.000	24,87	286.502.488	90,90%	93,94%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	45,00	305.000.000	40,00	286.502.488	88,89%	93,94%
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	33,33	60.000.000	26,66	59.532.000	79,99%	99,22%
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00	60.000.000	50,00	59.532.000	83,33%	99,22%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	95,59	990.000.000	85,63	944.461.190	89,58%	95,40%
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	95,59	76.500.000	75,86	75.777.660	79,36%	99,06%
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21,43	913.500.000	19,97	868.683.530	93,19%	95,09%

Faktor yang menyebabkan beberapa capaian kinerja melebihi dari target yang telah direncanakan adalah :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan internal Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan juga pihak-pihak eksternal yang terkait dalam pencapaian target kinerja.
2. Adanya tambahan dana diluar anggaran Renja awal yaitu Dana Alokasi Khusus terutama pada bidang DAK Fisik pada anggaran Dinas Pendidikan, hal ini sangat mendongkrak angka pencapaian kinerja seperti contoh pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
3. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam mencapai Sasaran.
4. Penetapan target kinerja yang terlalu rendah pada saat penyusunan Renstra maupun Renja tahun berjalan.
5. Efek berakhirnya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan antusiasisme peserta didik meningkat.

Kebijakan/tindakan perlu diambil untuk mengantisipasi adanya realisasi capaian kinerja beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023 yang tidak mencapai dari target yang telah direncanakan :

1. Mendorong pemerintah pusat untuk menyempurnakan regulasi menyangkut perencanaan dan evaluasi pembangunan agar pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengevaluasi capaian Tujuan dan Sasarannya dengan baik.
2. Perbaiki atas penentuan indikator dan target capaian kinerja terutama pada penyusunan Renstra periode 2021-2026.
3. Mendorong terciptanya kerja sama antar seluruh pihak yang terkait dalam memanfaatkan kondisi berakhirnya pandemi wabah Covid-19 agar suasana yang kondusif dapat secepatnya kembali normal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional sebagai penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan periode 2021-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi

dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi yang dimaksud yaitu :

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Visi tersebut mempunyai 6 Misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;**
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi;**
- 3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;**
- 4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan;**
- 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melaksanakan misi ke-2 yakni **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi”** dimana misi tersebut mempunyai Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut :

Tujuan Misi :

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing.

Sasaran Misi :

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Akseibilitas Pendidikan**
- 2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat**
- 3. Meningkatkan Kualitas Literasi Masyarakat**
- 4. Meningkatkan Kualitas Pemuda**
- 5. Meningkatkan Kelestarian Warisan Budaya Daerah**
- 6. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender**

Dari ke 6 (enam) Sasaran Misi tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mengemban pelaksanaan dari Sasaran Misi ke 1 (Satu) yaitu **“Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas Pendidikan”** dan ke 5 (Lima) yaitu **“Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah”**. Amanah pelaksanaan kedua Sasaran Misi tersebut dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dengan menetapkannya sebagai **Tujuan Perangkat Daerah** yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa **Sasaran Strategis Perangkat Daerah** yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah
berdasarkan Sasaran Misi Kepala Daerah

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1.1.	<i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</i>
		1.2.	<i>Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</i>
2	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	2.1.	<i>Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan</i>

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	75,01 ≤ 90	Tinggi
3	65,01 ≤ 75	Sedang
4	50,01 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pendukung pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencaangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2021 – 2026 di dalam RPJMD Kota Balikpapan yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, secara teknis adalah dengan mengalokasikan pendanaan tahunan diluar anggaran reguler dari Pemerintah Pusat (DAK Fisik/Non Fisik)/Provinsi (Bankeuprov). Program Prioritas berbasis anggaran mandiri tersebut adalah :

a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah jenjang SD/SMP sederajat.

Pengalokasian dana diberikan untuk 195 SD Negeri/Swasta, 78 SMP Negeri/Swasta dan 26 MI serta 15 MTs di Balikpapan dengan perhitungan pengalokasian dana sebesar Rp. 200.000,-/Siswa/Tahun SD Negeri, Rp. 500.000,-/Siswa/Tahun SD Swasta-Sederajat, Rp. 300.000,-/Siswa/Tahun SMP Negeri, Rp. 850.000,-/Siswa/Tahun SMP Swasta-Sederajat. Dana ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kelancaran proses Belajar-Mengajar di sekolah karena Dana DAK Non Fisik BOS Pusat dirasa masih belum memadai.

b. Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/Sederajat;

Dana ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya yang bersekolah di sekolah swasta jenjang SD/SMP sederajat. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 75.000,-/Siswa/Bulan untuk SD Swasta/Sederajat dan Rp. 110.000,-/Siswa/Bulan untuk SMP Swasta-Sederajat dan diberikan selama 12 bulan penuh. Untuk tahun 2025 telah dialokasikan untuk sebanyak 64.223 Siswa SD Negeri/Swasta, 30.241 siswa SMP Negeri/Swasta dan 10.104 siswa MI/MTs.

c. Pemberian Beasiswa terhadap Tenaga Pendidik Non PNS di sekolah SD/SMP Swasta/Sederajat;

Dana ini diberikan sebagai stimulus agar para Tenaga Pendidik termotivasi meningkatkan kompetensi pendidikannya. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 2.500.000,-/Orang/Tahun. Tahun 2025 telah dialokasikan untuk 50 orang Tenaga Pendidik SD dan 20 orang Tenaga Pendidik SMP. Sampai dengan tahun 2022 Tenaga Pendidik yang memenuhi persyaratan berpendidikan minimal DIV/S1 untuk jenjang PAUD 56,30; jenjang SD 97,80 dan jenjang SMP 98,30.

d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri;

Dana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Agama yang berstatus PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri. Besaran yang diberikan adalah Rp. 1.365.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan

golongan IV dan Rp. 1.275.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan III dan Rp. 1.200.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan II.

e. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD/SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat;

Dana ini diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS sehingga diharapkan kualitas pembelajaran agar lebih baik. Besaran yang diberikan adalah Rp. 850.000,-/Orang/Bulan diberikan selama 12 Bulan. Untuk tahun 2025 telah dialokasikan dana untuk 7500 guru SD dan 480 guru MI dan 7860 orang guru SMP/MTs. Untuk Tenaga Pendidik jenjang pendidikan PAUD adalah sebagai berikut :

- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan SMA/SMK Sederajat : 718 Orang x Rp. 650.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan Diploma : 74 Orang x Rp. 700.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 Non PAUD : 250 Orang x Rp. 750.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 PAUD : 810 Orang x Rp. 850.000 x 12 bulan

f. Pemberian Seragam Sekolah kepada kelas I dan VII;

Pemberian seragam ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Siswa yang diberi seragam adalah siswa baru kelas I (SD) dan kelas VII (SMP). Seragam yang diberikan sebanyak 3 stel/siswa berupa Seragam Batik, Nasional dan Pramuka dimana untuk tahun 2024 telah dialokasikan untuk 13.150 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas I (SD) dan 12.625 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas VII (SMP).

2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal Kesetaraan dalam meningkatkan nilai Akreditasinya dan koordinasi yang intens ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal di Samarinda. Kondisi akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Kondisi Akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

JENJANG	Akreditasi A		Akreditasi B		Akreditasi C		Belum Akreditasi	
	Jumlah	()	Jumlah	()	Jumlah	()	Jumlah	()
SD	151	77,84	32	16,49	3	1,55	8	4,12
SMP	45	58,44	18	23,38	5	6,49	9	11,69
PAUD	43	9.82	229	52,28	137	31,28	29	6,62
Kesetaraan	1	5,00	4	50,00	8	40,00	7	35,00

Dari tabel di atas terlihat masih terdapat beberapa Satuan Pendidikan yang berstatus “*Belum Terakreditasi*” yaitu sebesar 4,12 Satuan Pendidikan SD; 11,69 Satuan Pendidikan SMP; 26,08 Satuan Pendidikan PAUD dan 35,00 Satuan Pendidikan Kesetaraan. Sesuai dengan Permendikbudristek. Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditargetkan bahwa akreditasi minimal untuk Satuan Pendidikan adalah “*Akreditasi C*”.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

1. Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, untuk menambahkan daya tampung sekolah;
2. Penambahan Kompetensi guru khususnya di bidang teknologi informasi;
3. Peningkatan tenaga pendidik telah tersertifikasi;
4. Penambahan pengelola kebudayaan di Kota Balikpapan

Tingkat kinerja Perangkat Daerah dapat diukur melalui nilai “*Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)*” yang juga menjadi indikator kinerja Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan seperti yang tercantum pada “*Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan*” pada Kegiatan-Kegiatan yang termasuk di dalam “*Program Pengelola Pendidikan Urusan Pendidikan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*” dengan resume sebagai berikut :

Tabel 2.5. Nilai Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023) K
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	90,81
1.01.02.2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88,73
1.01.02.2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	36,62
1.01.02.2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	63,64
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	95,16
1.01.04.2.0 1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	94,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai dari Program Pengelolaan Pendidikan dengan Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APrS) 90,81 dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Indikator Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 95,16 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,35.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan di Balikpapan tidak seluruhnya dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yaitu untuk Satuan Pendidikan yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Agama Cabang Balikpapan (RA/MI/MTs), tetapi dalam hal pencapaian kinerja secara nasional tetap menjadi ukuran pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;

2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang kurang mengakomodir kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sampai saat ini masih belum mencapai tingkat ratio yang ideal;
3. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang cepat berubah tanpa memperhatikan proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan baik itu dalam hal Perencanaan dan Kepegawaian;
4. Belum optimalnya pengalokasian penganggaran terhadap Perencanaan Pembangunan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan bidang pendidikan, terutama pengalokasian Pokok Pikiran DPRD;
5. Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja yang masih terdapat kerancuan dalam pelaksanaan teknisnya sehingga terjadi tumpang tindih antar Bidang;
6. Masih kurangnya koordinasi antar Bidang dalam mencapai Tujuan Sasaran Perangkat Daerah;
7. Masih banyaknya Aparatur Sipil Negara baik itu Pejabat/Jabatan Fungsional ataupun Pelaksana yang kurang memahami kewajibannya berdasar Tugas Pokok dan Fungsi jabatan yang diembannya;
8. Masih kurangnya Etos Kerja ASN secara keseluruhan;
9. Kurangnya pemahaman ASN terhadap arti pentingnya Indikator Kinerja yang telah ditetapkan mulai dari Tujuan – Sasaran Strategis sampai dengan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan, hal ini berdampak pada capaian kinerja Perangkat Daerah;
10. Masih kurangnya kemampuan dan motivasi ASN dalam implementasi Perencanaan Berbasis Data, sehingga perencanaan yang dihasilkan kurang tepat sasaran dan kurang menunjang capaian kinerja Perangkat Daerah;
11. Masih adanya pengalokasian anggaran yang kurang memperhatikan prioritas pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan secara umum;

Hal-hal tersebut di atas menyebabkan kurang optimalnya pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan juga terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ataupun *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang secara substansi berisi pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur maka otomatis menjadikan hal ini suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam usaha mempersiapkan diri untuk peningkatan pelayanan dalam dunia pendidikan yang merupakan urusan

wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan baik nasional maupun pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Kota Balikpapan yang dipersiapkan menjadi salah satu kota penyangga calon Ibu Kota Negara tentu akan semakin kompleks di seluruh aspek kehidupan termasuk dalam aspek bidang pendidikan. Secara teknis pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut masih menunggu regulasi turunan dari Undang-undang tersebut di atas sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses membandingkan antara program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada rancangan Awal RKPD Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan pada saat penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dimana dokumen tersebut merupakan suatu analisa kebutuhan dan apa yang harus dilakukan dalam lima tahun kedepan, secara khusus terhadap indikator dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan-perubahan hanya dapat dimungkinkan dalam hal penentuan pagu anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan dan target capaian kinerja. Perubahan-perubahan yang dimaksud berpedoman pada hasil-hasil pembahasan/analisa pada tahapan-tahapan perencanaan pembangunan sesuai yang diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2025, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			763.204.807.000,00		763.204.807.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			394.642.436.831,00		394.642.436.831,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			394.642.436.831,00		394.642.436.831,00
1,	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	88.18 %	6.263.688.600,00	88.18 %	6.263.688.600,00
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	84.03 %	150.000.000,00	84.03 %	150.000.000,00
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	21 Laporan	150.000.000,00	21 Laporan	150.000.000,00
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	88.35 %	50.000.000,00	88.35 %	50.000.000,00
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	163 Dokumen	25.000.000,00	163 Dokumen	25.000.000,00
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	163 Laporan	25.000.000,00	163 Laporan	25.000.000,00
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	83.49 %	25.000.000,00	83.49 %	25.000.000,00
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	25.000.000,00	4 Laporan	25.000.000,00
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	86.93 %	25.000.000,00	86.93 %	25.000.000,00
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	443 Orang	25.000.000,00	443 Orang	25.000.000,00
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	86.71 %	2.768.688.600,00	86.71 %	2.768.688.600,00
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket	60.000.000,00	17 Paket	60.000.000,00
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	41458 Paket	1.523.688.600,00	41458 Paket	1.523.688.600,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	300.000.000,00	4 Paket	300.000.000,00
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	3334 Dokumen	35.000.000,00	3334 Dokumen	35.000.000,00
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 Laporan	500.000.000,00	100 Laporan	500.000.000,00
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	2 Dokumen	350.000.000,00	2 Dokumen	350.000.000,00
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	87.64 %	842.000.000,00	87.64 %	842.000.000,00
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	8 Laporan	842.000.000,00	8 Laporan	842.000.000,00
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	83.97 %	2.403.000.000,00	83.97 %	2.403.000.000,00
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	55 Unit	700.000.000,00	55 Unit	700.000.000,00
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	175 Unit	510.000.000,00	175 Unit	510.000.000,00
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	1.193.000.000,00	2 Unit	1.193.000.000,00
2,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	384.109.551.285,00	87,23 %	384.109.551.285,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.8 %	197.060.306.268,00	90.8 %	197.060.306.268,00
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	20.000.000.000,00	1 Unit	20.000.000.000,00
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	300.000.000,00	2 Ruang	300.000.000,00
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	200.000.000,00	1 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	200.000.000,00	1 Ruang	200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	200.000.000,00	1 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	200.000.000,00	1 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	200.000.000,00	1 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah					
			<i>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</i>	75 Paket	200.000.000,00	75 Paket	200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>	75 Paket	200.000.000,00	75 Paket	200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	22008 Peserta Didik	1.500.000.000,00	22008 Peserta Didik	1.500.000.000,00
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	195 Orang	20.000.000,00	195 Orang	20.000.000,00
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	2889 Orang	9.144.100.000,00	2889 Orang	9.144.100.000,00
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>	220 Satuan Pendidikan	423.831.240,00	220 Satuan Pendidikan	423.831.240,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	220 Satuan Pendidikan	87.116.860.180,00	220 Satuan Pendidikan	87.116.860.180,00
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam</i>	639 Orang	100.000.000,00	639 Orang	100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>				
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	200.000.000,00	2 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	137 Ruang	200.000.000,00	137 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah					
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>	137 Unit	100.000.000,00	137 Unit	100.000.000,00
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	195 Orang	20.000.000,00	195 Orang	20.000.000,00
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>	1 Konten Digital	20.000.000,00	1 Konten Digital	20.000.000,00
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	195 Orang	20.000.000,00	195 Orang	20.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	195 Dokumen	40.000.000,00	195 Dokumen	40.000.000,00
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>	195 Komunitas	20.000.000,00	195 Komunitas	20.000.000,00
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>	1 Kegiatan	20.000.000,00	1 Kegiatan	20.000.000,00
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>	1 Buku	20.000.000,00	1 Buku	20.000.000,00
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	13000 Paket	12.932.873.948,00	13000 Paket	12.932.873.948,00
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	1882 Ruang	600.000.000,00	1882 Ruang	600.000.000,00
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1882 Unit	10.600.000.000,00	1882 Unit	10.600.000.000,00
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	195 Orang	20.000.000,00	195 Orang	20.000.000,00
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	195 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	195 Satuan Pendidikan	700.000.000,00
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	195 Ruang	200.000.000,00	195 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	650 Peserta Didik	17.424.100.000,00	650 Peserta Didik	17.424.100.000,00
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>	137 Paket	33.498.540.900,00	137 Paket	33.498.540.900,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>	97.66 %	131.546.644.425,00	97.66 %	131.546.644.425,00
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	200.000.000,00	1 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	100.000.000,00	1 Ruang	100.000.000,00
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium					
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	100.000.000,00	1 Ruang	100.000.000,00
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula					
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	100.000.000,00	1 Ruang	100.000.000,00
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah					
			<i>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun</i>	17 Unit	100.000.000,00	17 Unit	100.000.000,00
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir					
			<i>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun</i>	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah					
			<i>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun</i>	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>	5 Unit	6.000.000.000,00	5 Unit	6.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
			<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	17 Ruang	3.000.000.000,00	17 Ruang	3.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Ruang	200.000.000,00	2 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Ruang	200.000.000,00	2 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium					
			<i>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Ruang	200.000.000,00	2 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula					
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>	2 Ruang	200.000.000,00	2 Ruang	200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir					
			<i>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	3 Unit	200.000.000,00	3 Unit	200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah					
			<i>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	4 Unit	3.600.000.000,00	4 Unit	3.600.000.000,00
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah					
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>	200 Paket	500.000.000,00	200 Paket	500.000.000,00
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>	300 Paket	300.000.000,00	300 Paket	300.000.000,00
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	10900 Peserta Didik	14.675.889.425,00	10900 Peserta Didik	14.675.889.425,00
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	1200 Peserta Didik	900.000.000,00	1200 Peserta Didik	900.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	78 Orang	51.000.000,00	78 Orang	51.000.000,00
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	950 Orang	6.000.000.000,00	950 Orang	6.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>	78 Satuan Pendidikan	525.000.000,00	78 Satuan Pendidikan	525.000.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	93 Satuan Pendidikan	48.512.420.000,00	93 Satuan Pendidikan	48.512.420.000,00
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	93 Orang	500.000.000,00	93 Orang	500.000.000,00
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	100 Orang	20.000.000,00	100 Orang	20.000.000,00
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>	78 Konten Digital	20.000.000,00	78 Konten Digital	20.000.000,00
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	100 Orang	20.000.000,00	100 Orang	20.000.000,00
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	78 Dokumen	300.000.000,00	78 Dokumen	300.000.000,00
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	4 Dokumen	200.000.000,00	4 Dokumen	200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>	78 Komunitas	20.000.000,00	78 Komunitas	20.000.000,00
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>	2 Kegiatan	20.000.000,00	2 Kegiatan	20.000.000,00
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar</i>	78 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	78 Satuan Pendidikan	350.000.000,00
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru					
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	24 Ruang	19.500.000.000,00	24 Ruang	19.500.000.000,00
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	78 Orang	50.000.000,00	78 Orang	50.000.000,00
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>	400 Buku	20.000.000,00	400 Buku	20.000.000,00
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	11989 Paket	9.758.335.000,00	11989 Paket	9.758.335.000,00
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	200.000.000,00	1 Ruang	200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>	249 Paket	14.204.000.000,00	249 Paket	14.204.000.000,00
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD</i>	30.80 %	27.881.911.300,00	30.80 %	27.881.911.300,00
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD					
			<i>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia</i>	420 Paket	395.109.550,00	420 Paket	395.109.550,00
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD					
			<i>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia</i>	25 Paket	2.599.600.000,00	25 Paket	2.599.600.000,00
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					
			<i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	13508 Peserta Didik	1.500.000.000,00	13508 Peserta Didik	1.500.000.000,00
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD</i>	25 Orang	20.000.000,00	25 Orang	20.000.000,00
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	1800 Orang	15.431.875.000,00	1800 Orang	15.431.875.000,00
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					
			<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	420 Satuan Pendidikan	1.300.000.000,00	420 Satuan Pendidikan	1.300.000.000,00
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD					
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	30 Orang	50.000.000,00	30 Orang	50.000.000,00
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	40 Orang	100.000.000,00	40 Orang	100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>	30 Konten Digital	100.000.000,00	30 Konten Digital	100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	35 Orang	100.000.000,00	35 Orang	100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	30 Dokumen	130.000.000,00	30 Dokumen	130.000.000,00
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	50 Dokumen	275.000.000,00	50 Dokumen	275.000.000,00
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>	90 Komunitas	250.000.000,00	90 Komunitas	250.000.000,00
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru					
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	1 Ruang	200.000.000,00	1 Ruang	200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca					
			<i>Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata</i>	5 Ruang	0,00	5 Ruang	0,00
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik					
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	100 Peserta didik	100.000.000,00	100 Peserta didik	100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>	1 Kegiatan	50.000.000,00	1 Kegiatan	50.000.000,00
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	180 Orang	300.000.000,00	180 Orang	300.000.000,00
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	13508 Paket	4.054.200.600,00	13508 Paket	4.054.200.600,00
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD					
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia</i>	5 Paket	276.126.150,00	5 Paket	276.126.150,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>	1 Ruang	0,00	1 Ruang	0,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Persentase spnf yang terakreditasi</i>	92.86 %	27.620.689.292,00	92.86 %	27.620.689.292,00
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	5708 Peserta Didik	3.187.768.792,00	5708 Peserta Didik	3.187.768.792,00
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	25 Orang	20.000.000,00	25 Orang	20.000.000,00
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	3075 Orang	11.744.650.000,00	3075 Orang	11.744.650.000,00
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	25 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	25 Satuan Pendidikan	100.000.000,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	5 Satuan Pendidikan	0,00	5 Satuan Pendidikan	0,00
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>	50 Orang	275.500.000,00	50 Orang	275.500.000,00
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	25 Orang	20.000.000,00	25 Orang	20.000.000,00
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>	25 Konten Digital	50.000.000,00	25 Konten Digital	50.000.000,00
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	25 Orang	50.000.000,00	25 Orang	50.000.000,00
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	25 Dokumen	100.000.000,00	25 Dokumen	100.000.000,00
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	25 Dokumen	50.000.000,00	25 Dokumen	50.000.000,00
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>	25 Komunitas	50.000.000,00	25 Komunitas	50.000.000,00
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>	1 Kegiatan	50.000.000,00	1 Kegiatan	50.000.000,00
	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi</i>	25 Orang	20.000.000,00	25 Orang	20.000.000,00
	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca					
			<i>Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata</i>	5 Ruang	0,00	5 Ruang	0,00
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik					
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	100 Peserta Didik	100.000.000,00	100 Peserta Didik	100.000.000,00
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	500 Paket	4.925.560.500,00	500 Paket	4.925.560.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	250.000.000,00	1 Ruang	250.000.000,00
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru					
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	1 Ruang	260.000.000,00	1 Ruang	260.000.000,00
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>	1410 Paket	4.024.710.000,00	1410 Paket	4.024.710.000,00
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	4 Unit	212.500.000,00	4 Unit	212.500.000,00
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	25 Orang	100.000.000,00	25 Orang	100.000.000,00
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium					
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	250.000.000,00	1 Ruang	250.000.000,00
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium					
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	250.000.000,00	1 Ruang	250.000.000,00
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah					
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>	2365 Paket	500.000.000,00	2365 Paket	500.000.000,00
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>	4 Unit	0,00	4 Unit	0,00
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan					
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia</i>	5 Paket	580.000.000,00	5 Paket	580.000.000,00
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	5 Ruang	250.000.000,00	5 Ruang	250.000.000,00
3,	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	94.44 %	499.954.465,00	94.44 %	499.954.465,00
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	77.78 %	499.954.465,00	77.78 %	499.954.465,00
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>	5 Dokumen	499.954.465,00	5 Dokumen	499.954.465,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
4,	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	3.587.944.285,00	-	3.587.944.285,00
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	71.40 %	3.587.944.285,00	71.40 %	3.587.944.285,00
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	12 Dokumen	3.132.925.185,00	12 Dokumen	3.132.925.185,00
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	1 Laporan	455.019.100,00	1 Laporan	455.019.100,00
5,	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	<i>Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)</i>	99.13 %	181.298.196,00	99.13 %	181.298.196,00
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	89.21 %	97.354.385,00	89.21 %	97.354.385,00
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	1 Dokumen	17.668.530,00	1 Dokumen	17.668.530,00
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	1 Dokumen	79.685.855,00	1 Dokumen	79.685.855,00
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	97.00 %	83.943.811,00	97.00 %	83.943.811,00
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	1 Dokumen	23.750.000,00	1 Dokumen	23.750.000,00
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	1 Dokumen	60.193.811,00	1 Dokumen	60.193.811,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.616.893.832,00		3.616.893.832,00
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.616.893.832,00		3.616.893.832,00
1,	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase pengembangan kebudayaan</i>	67.98 %	1.880.000.000,00	67.98 %	1.880.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina</i>	50 %	780.000.000,00	50 %	780.000.000,00
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>	3 Objek	700.000.000,00	3 Objek	700.000.000,00
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	35 Orang	80.000.000,00	35 Orang	80.000.000,00
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya</i>	87.27 %	1.100.000.000,00	87.27 %	1.100.000.000,00
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>	240 Objek	1.000.000.000,00	240 Objek	1.000.000.000,00
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>	5 Laporan	0,00	5 Laporan	0,00
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					
			<i>Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan</i>	10 Sertifikat	100.000.000,00	10 Sertifikat	100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga adat yang aktif</i>	66.67 %	0,00	66.67 %	0,00
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat					
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>	2 Objek	0,00	2 Objek	0,00
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat					
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina</i>	10 Orang	0,00	10 Orang	0,00
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat					
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi</i>	4 Unit	0,00	4 Unit	0,00
2,	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	<i>Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni</i>	37.31 %	350.000.000,00	37.31 %	350.000.000,00
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaku seni yang dibina</i>	55 %	350.000.000,00	55 %	350.000.000,00
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>	120 Orang	250.000.000,00	120 Orang	250.000.000,00
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi</i>	17 Sertifikat	100.000.000,00	17 Sertifikat	100.000.000,00
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional					
			<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	15 Lembaga	0,00	15 Lembaga	0,00
3,	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	<i>Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal</i>	60 %	99.800.000,00	60 %	99.800.000,00
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah</i>	71.43 %	99.800.000,00	71.43 %	99.800.000,00
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i>	35 Orang	99.800.000,00	35 Orang	99.800.000,00
4,	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan</i>	98.53 %	1.287.093.832,00	98.53 %	1.287.093.832,00
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota</i>	98.53 %	187.000.000,00	98.53 %	187.000.000,00
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya					
			<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>	2 Objek	77.000.000,00	2 Objek	77.000.000,00
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya					
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>	3 Objek	110.000.000,00	3 Objek	110.000.000,00
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengelolaan cagar budaya</i>	24.60 %	1.100.093.832,00	24.60 %	1.100.093.832,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya					
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>	134 Objek	850.000.000,00	134 Objek	850.000.000,00
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya					
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan</i>	5 Objek	61.693.832,00	5 Objek	61.693.832,00
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya					
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>	70 Objek	188.400.000,00	70 Objek	188.400.000,00
	X	NON URUSAN			364.945.476.337,00		364.945.476.337,00
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			364.945.476.337,00		364.945.476.337,00
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	88.18 %	364.945.476.337,00	88.18 %	364.945.476.337,00
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)</i>	88.35 %	360.581.247.867,00	88.35 %	360.581.247.867,00
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4670 Orang/bulan	359.806.991.367,00	4670 Orang/bulan	359.806.991.367,00
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	13 Dokumen	774.256.500,00	13 Dokumen	774.256.500,00
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	86.71 %	3.087.964.152,00	86.71 %	3.087.964.152,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	3.087.964.152,00	10 Paket	3.087.964.152,00
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	84.29 %	623.466.318,00	84.29 %	623.466.318,00
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	2 Unit	623.466.318,00	2 Unit	623.466.318,00
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	87.64 %	652.798.000,00	87.64 %	652.798.000,00
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	652.798.000,00	4 Laporan	652.798.000,00
		SDN 001 BALIKPAPAN UTARA			562.068.000,00		562.068.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			562.068.000,00		562.068.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			562.068.000,00		562.068.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	562.068.000,00	87.23 %	562.068.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	562.068.000,00	90.80 %	562.068.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	562.068.000,00	1 Satuan Pendidikan	562.068.000,00
		SDN 002 BALIKPAPAN UTARA			623.954.000,00		623.954.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			623.954.000,00		623.954.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			623.954.000,00		623.954.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	623.954.000,00	87.23 %	623.954.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	623.954.000,00	90.80 %	623.954.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	623.954.000,00	1 Satuan Pendidikan	623.954.000,00
		SDN 003 BALIKPAPAN UTARA			639.354.000,00		639.354.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			639.354.000,00		639.354.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			639.354.000,00		639.354.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	639.354.000,00	-	639.354.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	639.354.000,00	90.80 %	639.354.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	639.354.000,00	1 Satuan Pendidikan	639.354.000,00
		SDN 004 BALIKPAPAN UTARA			706.478.000,00		706.478.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			706.478.000,00		706.478.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			706.478.000,00		706.478.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	706.478.000,00	87.23 %	706.478.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	706.478.000,00	90.80 %	706.478.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	706.478.000,00	1 Satuan Pendidikan	706.478.000,00
		SDN 005 BALIKPAPAN UTARA			142.848.000,00		142.848.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			142.848.000,00		142.848.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			142.848.000,00		142.848.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	142.848.000,00	87,23 %	142.848.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	142.848.000,00	90.80 %	142.848.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	142.848.000,00	1 Satuan Pendidikan	142.848.000,00
		SDN 006 BALIKPAPAN UTARA			250.372.000,00		250.372.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			250.372.000,00		250.372.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			250.372.000,00		250.372.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	250.372.000,00	87,23 %	250.372.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	250.372.000,00	90.80 %	250.372.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	250.372.000,00	1 Satuan Pendidikan	250.372.000,00
		SDN 007 BALIKPAPAN UTARA			301.934.000,00		301.934.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			301.934.000,00		301.934.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			301.934.000,00		301.934.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	301.934.000,00	87,23 %	301.934.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	301.934.000,00	90.80 %	301.934.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	301.934.000,00	1 Satuan Pendidikan	301.934.000,00
		SDN 008 BALIKPAPAN UTARA			129.048.000,00		129.048.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.048.000,00		129.048.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			129.048.000,00		129.048.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	87,23 %	129.048.000,00	87,23 %	129.048.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	129.048.000,00	90.80 %	129.048.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	129.048.000,00	1 Satuan Pendidikan	129.048.000,00
		SDN 009 BALIKPAPAN UTARA			509.982.000,00		509.982.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			509.982.000,00		509.982.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			509.982.000,00		509.982.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.23 87.23	509.982.000,00	87.23 87.23	509.982.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	509.982.000,00	90.80 %	509.982.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	509.982.000,00	1 Satuan Pendidikan	509.982.000,00
		SDN 010 BALIKPAPAN UTARA			174.848.000,00		174.848.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			174.848.000,00		174.848.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			174.848.000,00		174.848.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	174.848.000,00	87,23 %	174.848.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	174.848.000,00	90.80 %	174.848.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	174.848.000,00	1 Satuan Pendidikan	174.848.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
		SDN 011 BALIKPAPAN UTARA			338.658.000,00		338.658.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			338.658.000,00		338.658.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			338.658.000,00		338.658.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	338.658.000,00	87,23 %	338.658.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	338.658.000,00	90.80 %	338.658.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	338.658.000,00	1 Satuan Pendidikan	338.658.000,00
		SDN 012 BALIKPAPAN UTARA			196.210.000,00		196.210.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			196.210.000,00		196.210.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			196.210.000,00		196.210.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	196.210.000,00	87,23 %	196.210.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	196.210.000,00	-	196.210.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	196.210.000,00	1 Satuan Pendidikan	196.210.000,00
		SDN 013 BALIKPAPAN UTARA			195.410.000,00		195.410.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			195.410.000,00		195.410.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			195.410.000,00		195.410.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)</i>	87,23 %	195.410.000,00	87,23 %	195.410.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	195.410.000,00	90.80 %	195.410.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	195.410.000,00	1 Satuan Pendidikan	195.410.000,00
		SDN 014 BALIKPAPAN UTARA			285.096.000,00		285.096.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			285.096.000,00		285.096.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			285.096.000,00		285.096.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)</i>	87,23 %	285.096.000,00	87,23 %	285.096.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	285.096.000,00	90.80 %	285.096.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	285.096.000,00	1 Satuan Pendidikan	285.096.000,00
		SDN 015 BALIKPAPAN UTARA			351.020.000,00		351.020.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			351.020.000,00		351.020.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			351.020.000,00		351.020.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)</i>	87,23 %	351.020.000,00	87,23 %	351.020.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	351.020.000,00	90.80 %	351.020.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	351.020.000,00	1 Satuan Pendidikan	351.020.000,00
		SDN 016 BALIKPAPAN UTARA			276.496.000,00		276.496.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			276.496.000,00		276.496.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			276.496.000,00		276.496.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)</i>	87,23 %	276.496.000,00	87,23 %	276.496.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	276.496.000,00	90.80 %	276.496.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	276.496.000,00	1 Satuan Pendidikan	276.496.000,00
		SDN 017 BALIKPAPAN UTARA			187.010.000,00		187.010.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			187.010.000,00		187.010.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			187.010.000,00		187.010.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)</i>	87,23 %	187.010.000,00	87,23 %	187.010.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	187.010.000,00	90.80 %	187.010.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	187.010.000,00	1 Satuan Pendidikan	187.010.000,00
		SDN 018 BALIKPAPAN UTARA			256.934.000,00		256.934.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			256.934.000,00		256.934.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			256.934.000,00		256.934.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP) Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 % 87,23 %	256.934.000,00	87,23 % 87,23 %	256.934.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	256.934.000,00	90.80 %	256.934.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	256.934.000,00	1 Satuan Pendidikan	256.934.000,00
		SDN 019 BALIKPAPAN UTARA			189.210.000,00		189.210.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			189.210.000,00		189.210.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			189.210.000,00		189.210.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	189.210.000,00	87,23 %	189.210.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	189.210.000,00	90.80 %	189.210.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	189.210.000,00	1 Satuan Pendidikan	189.210.000,00
		SDN 020 BALIKPAPAN UTARA			700.916.000,00		700.916.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			700.916.000,00		700.916.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			700.916.000,00		700.916.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	700.916.000,00	87,23 %	700.916.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	700.916.000,00	90.80 %	700.916.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	700.916.000,00	1 Satuan Pendidikan	700.916.000,00
		SDN 021 BALIKPAPAN UTARA			260.934.000,00		260.934.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			260.934.000,00		260.934.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			260.934.000,00		260.934.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	260.934.000,00	87,23 %	260.934.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	260.934.000,00	90.80 %	260.934.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	260.934.000,00	1 Satuan Pendidikan	260.934.000,00
		SDN 022 BALIKPAPAN UTARA			511.144.000,00		511.144.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			511.144.000,00		511.144.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			511.144.000,00		511.144.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	511.144.000,00	87,23 %	511.144.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	511.144.000,00	90.80 %	511.144.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	511.144.000,00	1 Satuan Pendidikan	511.144.000,00
		SDN 023 BALIKPAPAN UTARA			104.686.000,00		104.686.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			104.686.000,00		104.686.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			104.686.000,00		104.686.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	104.686.000,00	87,23 %	104.686.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	104.686.000,00	90.80 %	104.686.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	104.686.000,00	1 Satuan Pendidikan	104.686.000,00
		SDN 024 BALIKPAPAN UTARA			388.382.000,00		388.382.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			388.382.000,00		388.382.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			388.382.000,00		388.382.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	87,23 %	388.382.000,00	87,23 %	388.382.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	388.382.000,00	90.80 %	388.382.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	388.382.000,00	1 Satuan Pendidikan	388.382.000,00
		SDN 025 BALIKPAPAN UTARA			267.334.000,00		267.334.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			267.334.000,00		267.334.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			267.334.000,00		267.334.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	267.334.000,00	87,23 %	267.334.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	267.334.000,00	90.80 %	267.334.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	267.334.000,00	1 Satuan Pendidikan	267.334.000,00
		SDN 026 BALIKPAPAN UTARA			188.772.000,00		188.772.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			188.772.000,00		188.772.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			188.772.000,00		188.772.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.23 %	188.772.000,00	87.23 %	188.772.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	188.772.000,00	90.80 %	188.772.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	188.772.000,00	1 Satuan Pendidikan	188.772.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
		SDN 027 BALIKPAPAN UTARA			413.020.000,00		413.020.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			413.020.000,00		413.020.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			413.020.000,00		413.020.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	413.020.000,00	87.23 %	413.020.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	413.020.000,00	90.80 %	413.020.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	413.020.000,00	1 Satuan Pendidikan	413.020.000,00
		SDN 028 BALIKPAPAN UTARA			168.210.000,00		168.210.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			168.210.000,00		168.210.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			168.210.000,00		168.210.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	168.210.000,00	87.23 %	168.210.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	168.210.000,00	90.80 %	168.210.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	168.210.000,00	1 Satuan Pendidikan	168.210.000,00
		SDN 029 BALIKPAPAN UTARA			414.944.000,00		414.944.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			414.944.000,00		414.944.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			414.944.000,00		414.944.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	414.944.000,00	87.23 %	414.944.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	414.944.000,00	90.80 %	414.944.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	414.944.000,00	1 Satuan Pendidikan	414.944.000,00
		SDN 030 BALIKPAPAN UTARA			510.944.000,00		510.944.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			510.944.000,00		510.944.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			510.944.000,00		510.944.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	510.944.000,00	87.23 %	510.944.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	510.944.000,00	90.80 %	510.944.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	510.944.000,00	1 Satuan Pendidikan	510.944.000,00
		SDN 031 BALIKPAPAN UTARA			280.334.000,00		280.334.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			280.334.000,00		280.334.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			280.334.000,00		280.334.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	280.334.000,00	87,23 %	280.334.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	280.334.000,00	90.80 %	280.334.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	280.334.000,00	1 Satuan Pendidikan	280.334.000,00
		SDN 032 BALIKPAPAN UTARA			169.810.000,00		169.810.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			169.810.000,00		169.810.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			169.810.000,00		169.810.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	169.810.000,00	87.23 %	169.810.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	169.810.000,00	90.80 %	169.810.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	169.810.000,00	1 Satuan Pendidikan	169.810.000,00
		SDN 033 BALIKPAPAN UTARA			604.230.000,00		604.230.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			604.230.000,00		604.230.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			604.230.000,00		604.230.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	604.230.000,00	87.23 %	604.230.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	604.230.000,00	90.80 %	604.230.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	604.230.000,00	1 Satuan Pendidikan	604.230.000,00
		SDN 001 BALIKPAPAN KOTA			639.954.000,00		639.954.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			639.954.000,00		639.954.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			639.954.000,00		639.954.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	639.954.000,00	-	639.954.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	639.954.000,00	-	639.954.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	639.954.000,00	1 Satuan Pendidikan	639.954.000,00
		SDN 002 BALIKPAPAN KOTA			176.372.000,00		176.372.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			176.372.000,00		176.372.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			176.372.000,00		176.372.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	176.372.000,00	-	176.372.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	176.372.000,00	-	176.372.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	176.372.000,00	1 Satuan Pendidikan	176.372.000,00
		SDN 003 BALIKPAPAN KOTA			420.820.000,00		420.820.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			420.820.000,00		420.820.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			420.820.000,00		420.820.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	420.820.000,00	-	420.820.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	420.820.000,00	-	420.820.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	420.820.000,00	1 Satuan Pendidikan	420.820.000,00
		SDN 004 BALIKPAPAN KOTA			215.572.000,00		215.572.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			215.572.000,00		215.572.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			215.572.000,00		215.572.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	215.572.000,00	-	215.572.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	215.572.000,00	-	215.572.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	215.572.000,00	1 Satuan Pendidikan	215.572.000,00
		SDN 005 BALIKPAPAN KOTA			417.582.000,00		417.582.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			417.582.000,00		417.582.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			417.582.000,00		417.582.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	417.582.000,00	-	417.582.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	417.582.000,00	-	417.582.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	417.582.000,00	1 Satuan Pendidikan	417.582.000,00
		SDN 006 BALIKPAPAN KOTA			171.010.000,00		171.010.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			171.010.000,00		171.010.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			171.010.000,00		171.010.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	171.010.000,00	-	171.010.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	171.010.000,00	-	171.010.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	171.010.000,00	1 Satuan Pendidikan	171.010.000,00
		SDN 007 BALIKPAPAN KOTA			237.534.000,00		237.534.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			237.534.000,00		237.534.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			237.534.000,00		237.534.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	237.534.000,00	-	237.534.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	237.534.000,00	-	237.534.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	237.534.000,00	1 Satuan Pendidikan	237.534.000,00
		SDN 008 BALIKPAPAN KOTA			338.696.000,00		338.696.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			338.696.000,00		338.696.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			338.696.000,00		338.696.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	338.696.000,00	-	338.696.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	338.696.000,00	-	338.696.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	338.696.000,00	1 Satuan Pendidikan	338.696.000,00
		SDN 009 BALIKPAPAN KOTA			163.610.000,00		163.610.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			163.610.000,00		163.610.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			163.610.000,00		163.610.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	163.610.000,00	-	163.610.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	163.610.000,00	-	163.610.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	163.610.000,00	1 Satuan Pendidikan	163.610.000,00
		SDN 010 BALIKPAPAN KOTA			211.772.000,00		211.772.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			211.772.000,00		211.772.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			211.772.000,00		211.772.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	211.772.000,00	-	211.772.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	211.772.000,00	-	211.772.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	211.772.000,00	1 Satuan Pendidikan	211.772.000,00
		SDN 011 BALIKPAPAN KOTA			317.296.000,00		317.296.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			317.296.000,00		317.296.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			317.296.000,00		317.296.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	317.296.000,00	-	317.296.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	317.296.000,00	-	317.296.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	317.296.000,00	1 Satuan Pendidikan	317.296.000,00
		SDN 012 BALIKPAPAN KOTA			326.458.000,00		326.458.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			326.458.000,00		326.458.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			326.458.000,00		326.458.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	326.458.000,00	-	326.458.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	326.458.000,00	-	326.458.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	326.458.000,00	1 Satuan Pendidikan	326.458.000,00
		SDN 013 BALIKPAPAN KOTA			399.058.000,00		399.058.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			399.058.000,00		399.058.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			399.058.000,00		399.058.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	399.058.000,00	-	399.058.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	399.058.000,00	-	399.058.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	399.058.000,00	1 Satuan Pendidikan	399.058.000,00
		SDN 014 BALIKPAPAN KOTA			163.010.000,00		163.010.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			163.010.000,00		163.010.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			163.010.000,00		163.010.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	163.010.000,00	-	163.010.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	163.010.000,00	-	163.010.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	163.010.000,00	1 Satuan Pendidikan	163.010.000,00
		SDN 015 BALIKPAPAN KOTA			213.934.000,00		213.934.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			213.934.000,00		213.934.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			213.934.000,00		213.934.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	213.934.000,00	-	213.934.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	213.934.000,00	-	213.934.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	213.934.000,00	1 Satuan Pendidikan	213.934.000,00
		SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN			454.820.000,00		454.820.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			454.820.000,00		454.820.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			454.820.000,00		454.820.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	454.820.000,00	-	454.820.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	454.820.000,00	-	454.820.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	454.820.000,00	1 Satuan Pendidikan	454.820.000,00
		SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN			545.268.000,00		545.268.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			545.268.000,00		545.268.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			545.268.000,00		545.268.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	545.268.000,00	-	545.268.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	545.268.000,00	-	545.268.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	545.268.000,00	1 Satuan Pendidikan	545.268.000,00
		SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN			352.696.000,00		352.696.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			352.696.000,00		352.696.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			352.696.000,00		352.696.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	352.696.000,00	-	352.696.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	352.696.000,00	-	352.696.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	352.696.000,00	1 Satuan Pendidikan	352.696.000,00
		SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN			660.954.000,00		660.954.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			660.954.000,00		660.954.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			660.954.000,00		660.954.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	660.954.000,00	-	660.954.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	660.954.000,00	-	660.954.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	660.954.000,00	1 Satuan Pendidikan	660.954.000,00
		SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN			414.782.000,00		414.782.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			414.782.000,00		414.782.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			414.782.000,00		414.782.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	414.782.000,00	-	414.782.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	414.782.000,00	-	414.782.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	414.782.000,00	1 Satuan Pendidikan	414.782.000,00
		SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN			332.496.000,00		332.496.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			332.496.000,00		332.496.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			332.496.000,00		332.496.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	332.496.000,00	-	332.496.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	332.496.000,00	-	332.496.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	332.496.000,00	1 Satuan Pendidikan	332.496.000,00
		SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN			359.458.000,00		359.458.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			359.458.000,00		359.458.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			359.458.000,00		359.458.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	359.458.000,00	-	359.458.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	359.458.000,00	-	359.458.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	359.458.000,00	1 Satuan Pendidikan	359.458.000,00
		SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN			195.610.000,00		195.610.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			195.610.000,00		195.610.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			195.610.000,00		195.610.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	195.610.000,00	-	195.610.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	195.610.000,00	-	195.610.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	195.610.000,00	1 Satuan Pendidikan	195.610.000,00
		SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN			314.896.000,00		314.896.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			314.896.000,00		314.896.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			314.896.000,00		314.896.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	314.896.000,00	-	314.896.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	314.896.000,00	-	314.896.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	314.896.000,00	1 Satuan Pendidikan	314.896.000,00
		SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN			710.116.000,00		710.116.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			710.116.000,00		710.116.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			710.116.000,00		710.116.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	710.116.000,00	-	710.116.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	710.116.000,00	-	710.116.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	710.116.000,00	1 Satuan Pendidikan	710.116.000,00
		SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN			388.382.000,00		388.382.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			388.382.000,00		388.382.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			388.382.000,00		388.382.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	388.382.000,00	-	388.382.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	388.382.000,00	-	388.382.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	388.382.000,00	1 Satuan Pendidikan	388.382.000,00
		SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN			342.258.000,00		342.258.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			342.258.000,00		342.258.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			342.258.000,00		342.258.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	342.258.000,00	-	342.258.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	342.258.000,00	-	342.258.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	342.258.000,00	1 Satuan Pendidikan	342.258.000,00
		SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN			661.192.000,00		661.192.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			661.192.000,00		661.192.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			661.192.000,00		661.192.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	661.192.000,00	-	661.192.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	661.192.000,00	-	661.192.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	661.192.000,00	1 Satuan Pendidikan	661.192.000,00
		SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN			489.506.000,00		489.506.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			489.506.000,00		489.506.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			489.506.000,00		489.506.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	489.506.000,00	-	489.506.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	489.506.000,00	-	489.506.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	489.506.000,00	1 Satuan Pendidikan	489.506.000,00
		SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN			696.592.000,00		696.592.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			696.592.000,00		696.592.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			696.592.000,00		696.592.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	696.592.000,00	-	696.592.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	696.592.000,00	-	696.592.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	696.592.000,00	1 Satuan Pendidikan	696.592.000,00
		SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH			489.106.000,00		489.106.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			489.106.000,00		489.106.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			489.106.000,00		489.106.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	489.106.000,00	-	489.106.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	489.106.000,00	-	489.106.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	489.106.000,00	1 Satuan Pendidikan	489.106.000,00
		SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH			806.040.000,00		806.040.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			806.040.000,00		806.040.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			806.040.000,00		806.040.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	806.040.000,00	-	806.040.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	806.040.000,00	-	806.040.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	806.040.000,00	1 Satuan Pendidikan	806.040.000,00
		SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH			594.030.000,00		594.030.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			594.030.000,00		594.030.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			594.030.000,00		594.030.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	594.030.000,00	-	594.030.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	594.030.000,00	-	594.030.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	594.030.000,00	1 Satuan Pendidikan	594.030.000,00
		SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH			194.372.000,00		194.372.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			194.372.000,00		194.372.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			194.372.000,00		194.372.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	194.372.000,00	-	194.372.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	194.372.000,00	-	194.372.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	194.372.000,00	1 Satuan Pendidikan	194.372.000,00
		SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH			413.220.000,00		413.220.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			413.220.000,00		413.220.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			413.220.000,00		413.220.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	413.220.000,00	-	413.220.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	413.220.000,00	-	413.220.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	413.220.000,00	1 Satuan Pendidikan	413.220.000,00
		SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH			313.296.000,00		313.296.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			313.296.000,00		313.296.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			313.296.000,00		313.296.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	313.296.000,00	-	313.296.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	313.296.000,00	-	313.296.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	313.296.000,00	1 Satuan Pendidikan	313.296.000,00
		SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH			342.858.000,00		342.858.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			342.858.000,00		342.858.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			342.858.000,00		342.858.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	342.858.000,00	-	342.858.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	342.858.000,00	-	342.858.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	342.858.000,00	1 Satuan Pendidikan	342.858.000,00
		SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH			146.848.000,00		146.848.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			146.848.000,00		146.848.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			146.848.000,00		146.848.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	146.848.000,00	-	146.848.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	146.848.000,00	-	146.848.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	146.848.000,00	1 Satuan Pendidikan	146.848.000,00
		SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH			190.172.000,00		190.172.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			190.172.000,00		190.172.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			190.172.000,00		190.172.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	190.172.000,00	-	190.172.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	190.172.000,00	-	190.172.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	190.172.000,00	1 Satuan Pendidikan	190.172.000,00
		SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH			279.896.000,00		279.896.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			279.896.000,00		279.896.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			279.896.000,00		279.896.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	279.896.000,00	-	279.896.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	279.896.000,00	-	279.896.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	279.896.000,00	1 Satuan Pendidikan	279.896.000,00
		SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH			352.620.000,00		352.620.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			352.620.000,00		352.620.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			352.620.000,00		352.620.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	352.620.000,00	-	352.620.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	352.620.000,00	-	352.620.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	352.620.000,00	1 Satuan Pendidikan	352.620.000,00
		SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH			289.096.000,00		289.096.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			289.096.000,00		289.096.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			289.096.000,00		289.096.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	289.096.000,00	-	289.096.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	289.096.000,00	-	289.096.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	289.096.000,00	1 Satuan Pendidikan	289.096.000,00
		SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH			399.182.000,00		399.182.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			399.182.000,00		399.182.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			399.182.000,00		399.182.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	399.182.000,00	-	399.182.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	399.182.000,00	-	399.182.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	399.182.000,00	1 Satuan Pendidikan	399.182.000,00
		SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH			235.448.000,00		235.448.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			235.448.000,00		235.448.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			235.448.000,00		235.448.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	235.448.000,00	-	235.448.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	235.448.000,00	-	235.448.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	235.448.000,00	1 Satuan Pendidikan	235.448.000,00
		SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH			167.410.000,00		167.410.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			167.410.000,00		167.410.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			167.410.000,00		167.410.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	167.410.000,00	-	167.410.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	167.410.000,00	-	167.410.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	167.410.000,00	1 Satuan Pendidikan	167.410.000,00
		SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH			282.096.000,00		282.096.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			282.096.000,00		282.096.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			282.096.000,00		282.096.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	282.096.000,00	-	282.096.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	282.096.000,00	-	282.096.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	282.096.000,00	1 Satuan Pendidikan	282.096.000,00
		SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH			179.010.000,00		179.010.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			179.010.000,00		179.010.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			179.010.000,00		179.010.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	179.010.000,00	-	179.010.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	179.010.000,00	-	179.010.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	179.010.000,00	1 Satuan Pendidikan	179.010.000,00
		SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH			226.334.000,00		226.334.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			226.334.000,00		226.334.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			226.334.000,00		226.334.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	226.334.000,00	-	226.334.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	226.334.000,00	-	226.334.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	226.334.000,00	1 Satuan Pendidikan	226.334.000,00
		SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH			311.858.000,00		311.858.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			311.858.000,00		311.858.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			311.858.000,00		311.858.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	311.858.000,00	-	311.858.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	311.858.000,00	-	311.858.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	311.858.000,00	1 Satuan Pendidikan	311.858.000,00
		SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH			206.972.000,00		206.972.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			206.972.000,00		206.972.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			206.972.000,00		206.972.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	206.972.000,00	-	206.972.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	206.972.000,00	-	206.972.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	206.972.000,00	1 Satuan Pendidikan	206.972.000,00
		SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH			194.772.000,00		194.772.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			194.772.000,00		194.772.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			194.772.000,00		194.772.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	194.772.000,00	-	194.772.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	194.772.000,00	-	194.772.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	194.772.000,00	1 Satuan Pendidikan	194.772.000,00
		SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH			218.134.000,00		218.134.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			218.134.000,00		218.134.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			218.134.000,00		218.134.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	218.134.000,00	-	218.134.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	218.134.000,00	-	218.134.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	218.134.000,00	1 Satuan Pendidikan	218.134.000,00
		SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH			181.810.000,00		181.810.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			181.810.000,00		181.810.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			181.810.000,00		181.810.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	181.810.000,00	-	181.810.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	181.810.000,00	-	181.810.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	181.810.000,00	1 Satuan Pendidikan	181.810.000,00
		SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH			205.572.000,00		205.572.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			205.572.000,00		205.572.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			205.572.000,00		205.572.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	205.572.000,00	-	205.572.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	205.572.000,00	-	205.572.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	205.572.000,00	1 Satuan Pendidikan	205.572.000,00
		SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH			219.372.000,00		219.372.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			219.372.000,00		219.372.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			219.372.000,00		219.372.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	219.372.000,00	-	219.372.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	219.372.000,00	-	219.372.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	219.372.000,00	1 Satuan Pendidikan	219.372.000,00
		SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH			180.772.000,00		180.772.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			180.772.000,00		180.772.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			180.772.000,00		180.772.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	180.772.000,00	-	180.772.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	180.772.000,00	-	180.772.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	180.772.000,00	1 Satuan Pendidikan	180.772.000,00
		SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH			380.420.000,00		380.420.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			380.420.000,00		380.420.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			380.420.000,00		380.420.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	380.420.000,00	-	380.420.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	380.420.000,00	-	380.420.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	380.420.000,00	1 Satuan Pendidikan	380.420.000,00
		SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH			153.610.000,00		153.610.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			153.610.000,00		153.610.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			153.610.000,00		153.610.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	153.610.000,00	-	153.610.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	153.610.000,00	-	153.610.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	153.610.000,00	1 Satuan Pendidikan	153.610.000,00
		SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH			164.810.000,00		164.810.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			164.810.000,00		164.810.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			164.810.000,00		164.810.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	164.810.000,00	-	164.810.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	164.810.000,00	-	164.810.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	164.810.000,00	1 Satuan Pendidikan	164.810.000,00
		SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH			244.172.000,00		244.172.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			244.172.000,00		244.172.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			244.172.000,00		244.172.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	244.172.000,00	-	244.172.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	244.172.000,00	-	244.172.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	244.172.000,00	1 Satuan Pendidikan	244.172.000,00
		SDN 001 BALIKPAPAN BARAT			694.154.000,00		694.154.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			694.154.000,00		694.154.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			694.154.000,00		694.154.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	694.154.000,00	-	694.154.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	694.154.000,00	-	694.154.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	694.154.000,00	1 Satuan Pendidikan	694.154.000,00
		SDN 002 BALIKPAPAN BARAT			600.230.000,00		600.230.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			600.230.000,00		600.230.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			600.230.000,00		600.230.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	600.230.000,00	-	600.230.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	600.230.000,00	-	600.230.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	600.230.000,00	1 Satuan Pendidikan	600.230.000,00
		SDN 003 BALIKPAPAN BARAT			258.534.000,00		258.534.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			258.534.000,00		258.534.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			258.534.000,00		258.534.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	258.534.000,00	-	258.534.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	258.534.000,00	-	258.534.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	258.534.000,00	1 Satuan Pendidikan	258.534.000,00
		SDN 004 BALIKPAPAN BARAT			461.344.000,00		461.344.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			461.344.000,00		461.344.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			461.344.000,00		461.344.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	461.344.000,00	-	461.344.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	461.344.000,00	-	461.344.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	461.344.000,00	1 Satuan Pendidikan	461.344.000,00
		SDN 005 BALIKPAPAN BARAT			372.420.000,00		372.420.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			372.420.000,00		372.420.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			372.420.000,00		372.420.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	372.420.000,00	-	372.420.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	372.420.000,00	-	372.420.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	372.420.000,00	1 Satuan Pendidikan	372.420.000,00
		SDN 006 BALIKPAPAN BARAT			348.658.000,00		348.658.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			348.658.000,00		348.658.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			348.658.000,00		348.658.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	348.658.000,00	-	348.658.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	348.658.000,00	-	348.658.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	348.658.000,00	1 Satuan Pendidikan	348.658.000,00
		SDN 007 BALIKPAPAN BARAT			286.058.000,00		286.058.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			286.058.000,00		286.058.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			286.058.000,00		286.058.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	286.058.000,00	-	286.058.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	286.058.000,00	-	286.058.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	286.058.000,00	1 Satuan Pendidikan	286.058.000,00
		SDN 008 BALIKPAPAN BARAT			210.172.000,00		210.172.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			210.172.000,00		210.172.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			210.172.000,00		210.172.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	210.172.000,00	-	210.172.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	210.172.000,00	-	210.172.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	210.172.000,00	1 Satuan Pendidikan	210.172.000,00
		SDN 009 BALIKPAPAN BARAT			602.868.000,00		602.868.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			602.868.000,00		602.868.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			602.868.000,00		602.868.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	602.868.000,00	-	602.868.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	602.868.000,00	-	602.868.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	602.868.000,00	1 Satuan Pendidikan	602.868.000,00
		SDN 010 BALIKPAPAN BARAT			350.620.000,00		350.620.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			350.620.000,00		350.620.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			350.620.000,00		350.620.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	350.620.000,00	-	350.620.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	350.620.000,00	-	350.620.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	350.620.000,00	1 Satuan Pendidikan	350.620.000,00
		SDN 011 BALIKPAPAN BARAT			329.820.000,00		329.820.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			329.820.000,00		329.820.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			329.820.000,00		329.820.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	329.820.000,00	-	329.820.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	329.820.000,00	-	329.820.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	329.820.000,00	1 Satuan Pendidikan	329.820.000,00
		SDN 012 BALIKPAPAN BARAT			159.082.000,00		159.082.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			159.082.000,00		159.082.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			159.082.000,00		159.082.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	159.082.000,00	-	159.082.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	159.082.000,00	-	159.082.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	159.082.000,00	1 Satuan Pendidikan	159.082.000,00
		SDN 013 BALIKPAPAN BARAT			239.172.000,00		239.172.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			239.172.000,00		239.172.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			239.172.000,00		239.172.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	239.172.000,00	-	239.172.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	239.172.000,00	-	239.172.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	239.172.000,00	1 Satuan Pendidikan	239.172.000,00
		SDN 014 BALIKPAPAN BARAT			276.696.000,00		276.696.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			276.696.000,00		276.696.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			276.696.000,00		276.696.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	276.696.000,00	-	276.696.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	276.696.000,00	-	276.696.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	276.696.000,00	1 Satuan Pendidikan	276.696.000,00
		SDN 015 BALIKPAPAN BARAT			125.648.000,00		125.648.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			125.648.000,00		125.648.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			125.648.000,00		125.648.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	125.648.000,00	-	125.648.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	125.648.000,00	-	125.648.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	125.648.000,00	1 Satuan Pendidikan	125.648.000,00
		SDN 016 BALIKPAPAN BARAT			278.096.000,00		278.096.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			278.096.000,00		278.096.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			278.096.000,00		278.096.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	278.096.000,00	-	278.096.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	278.096.000,00	-	278.096.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	278.096.000,00	1 Satuan Pendidikan	278.096.000,00
		SDN 017 BALIKPAPAN BARAT			314.658.000,00		314.658.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			314.658.000,00		314.658.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			314.658.000,00		314.658.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	314.658.000,00	-	314.658.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	314.658.000,00	-	314.658.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	314.658.000,00	1 Satuan Pendidikan	314.658.000,00
		SDN 018 BALIKPAPAN BARAT			347.458.000,00		347.458.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			347.458.000,00		347.458.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			347.458.000,00		347.458.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	347.458.000,00	-	347.458.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	347.458.000,00	-	347.458.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	347.458.000,00	1 Satuan Pendidikan	347.458.000,00
		SDN 019 BALIKPAPAN BARAT			487.744.000,00		487.744.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			487.744.000,00		487.744.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			487.744.000,00		487.744.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	487.744.000,00	-	487.744.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	487.744.000,00	-	487.744.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	487.744.000,00	1 Satuan Pendidikan	487.744.000,00
		SDN 020 BALIKPAPAN BARAT			478.944.000,00		478.944.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			478.944.000,00		478.944.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			478.944.000,00		478.944.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	478.944.000,00	-	478.944.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	478.944.000,00	-	478.944.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	478.944.000,00	1 Satuan Pendidikan	478.944.000,00
		SDN 021 BALIKPAPAN BARAT			130.848.000,00		130.848.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			130.848.000,00		130.848.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			130.848.000,00		130.848.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	130.848.000,00	-	130.848.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	130.848.000,00	-	130.848.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	130.848.000,00	1 Satuan Pendidikan	130.848.000,00
		SDN 022 BALIKPAPAN BARAT			156.210.000,00		156.210.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			156.210.000,00		156.210.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			156.210.000,00		156.210.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	156.210.000,00	-	156.210.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	156.210.000,00	-	156.210.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	156.210.000,00	1 Satuan Pendidikan	156.210.000,00
		SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR			363.696.000,00		363.696.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			363.696.000,00		363.696.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			363.696.000,00		363.696.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	363.696.000,00	-	363.696.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	363.696.000,00	-	363.696.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	363.696.000,00	1 Satuan Pendidikan	363.696.000,00
		SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR			359.058.000,00		359.058.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			359.058.000,00		359.058.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			359.058.000,00		359.058.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	359.058.000,00	-	359.058.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	359.058.000,00	-	359.058.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	359.058.000,00	1 Satuan Pendidikan	359.058.000,00
		SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR			267.734.000,00		267.734.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			267.734.000,00		267.734.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			267.734.000,00		267.734.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	267.734.000,00	-	267.734.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	267.734.000,00	-	267.734.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	267.734.000,00	1 Satuan Pendidikan	267.734.000,00
		SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR			128.448.000,00		128.448.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			128.448.000,00		128.448.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			128.448.000,00		128.448.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	128.448.000,00	-	128.448.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	128.448.000,00	-	128.448.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	128.448.000,00	1 Satuan Pendidikan	128.448.000,00
		SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR			486.182.000,00		486.182.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			486.182.000,00		486.182.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			486.182.000,00		486.182.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	486.182.000,00	-	486.182.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	486.182.000,00	-	486.182.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	486.182.000,00	1 Satuan Pendidikan	486.182.000,00
		SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR			503.982.000,00		503.982.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			503.982.000,00		503.982.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			503.982.000,00		503.982.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	503.982.000,00	-	503.982.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	503.982.000,00	-	503.982.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	503.982.000,00	1 Satuan Pendidikan	503.982.000,00
		SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR			195.772.000,00		195.772.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			195.772.000,00		195.772.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			195.772.000,00		195.772.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	195.772.000,00	-	195.772.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	195.772.000,00	-	195.772.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	195.772.000,00	1 Satuan Pendidikan	195.772.000,00
		SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR			104.248.000,00		104.248.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			104.248.000,00		104.248.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			104.248.000,00		104.248.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	104.248.000,00	-	104.248.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	104.248.000,00	-	104.248.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	104.248.000,00	1 Satuan Pendidikan	104.248.000,00
		SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR			155.410.000,00		155.410.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			155.410.000,00		155.410.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			155.410.000,00		155.410.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	155.410.000,00	-	155.410.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	155.410.000,00	-	155.410.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	155.410.000,00	1 Satuan Pendidikan	155.410.000,00
		SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR			257.972.000,00		257.972.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			257.972.000,00		257.972.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			257.972.000,00		257.972.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	257.972.000,00	-	257.972.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	257.972.000,00	-	257.972.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	257.972.000,00	1 Satuan Pendidikan	257.972.000,00
		SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR			446.220.000,00		446.220.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			446.220.000,00		446.220.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			446.220.000,00		446.220.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	446.220.000,00	-	446.220.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	446.220.000,00	-	446.220.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	446.220.000,00	1 Satuan Pendidikan	446.220.000,00
		SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR			984.650.000,00		984.650.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			984.650.000,00		984.650.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			984.650.000,00		984.650.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	984.650.000,00	-	984.650.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	984.650.000,00	-	984.650.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	984.650.000,00	1 Satuan Pendidikan	984.650.000,00
		SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR			304.296.000,00		304.296.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			304.296.000,00		304.296.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			304.296.000,00		304.296.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	304.296.000,00	-	304.296.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	304.296.000,00	-	304.296.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	304.296.000,00	1 Satuan Pendidikan	304.296.000,00
		SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR			152.010.000,00		152.010.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			152.010.000,00		152.010.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			152.010.000,00		152.010.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	152.010.000,00	-	152.010.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	152.010.000,00	-	152.010.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	152.010.000,00	1 Satuan Pendidikan	152.010.000,00
		SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR			240.810.000,00		240.810.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			240.810.000,00		240.810.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			240.810.000,00		240.810.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	240.810.000,00	-	240.810.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	240.810.000,00	-	240.810.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	240.810.000,00	1 Satuan Pendidikan	240.810.000,00
		SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR			152.610.000,00		152.610.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			152.610.000,00		152.610.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			152.610.000,00		152.610.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	152.610.000,00	-	152.610.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	152.610.000,00	-	152.610.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	152.610.000,00	1 Satuan Pendidikan	152.610.000,00
		SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR			332.820.000,00		332.820.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			332.820.000,00		332.820.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			332.820.000,00		332.820.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	332.820.000,00	-	332.820.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	332.820.000,00	-	332.820.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	332.820.000,00	1 Satuan Pendidikan	332.820.000,00
		SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR			226.572.000,00		226.572.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			226.572.000,00		226.572.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			226.572.000,00		226.572.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	226.572.000,00	-	226.572.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	226.572.000,00	-	226.572.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	226.572.000,00	1 Satuan Pendidikan	226.572.000,00
		SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR			278.296.000,00		278.296.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			278.296.000,00		278.296.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			278.296.000,00		278.296.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	278.296.000,00	-	278.296.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	278.296.000,00	-	278.296.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	278.296.000,00	1 Satuan Pendidikan	278.296.000,00
		SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR			261.934.000,00		261.934.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			261.934.000,00		261.934.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			261.934.000,00		261.934.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	261.934.000,00	-	261.934.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	261.934.000,00	-	261.934.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	261.934.000,00	1 Satuan Pendidikan	261.934.000,00
		SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR			240.772.000,00		240.772.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			240.772.000,00		240.772.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			240.772.000,00		240.772.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	240.772.000,00	-	240.772.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	240.772.000,00	-	240.772.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	240.772.000,00	1 Satuan Pendidikan	240.772.000,00
		SMPN 1 BALIKPAPAN			1.082.688.000,00		1.082.688.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.082.688.000,00		1.082.688.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.082.688.000,00		1.082.688.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.082.688.000,00	-	1.082.688.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.082.688.000,00	-	1.082.688.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.082.688.000,00	1 Satuan Pendidikan	1.082.688.000,00
		SMPN 2 BALIKPAPAN			831.778.000,00		831.778.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			831.778.000,00		831.778.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			831.778.000,00		831.778.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	831.778.000,00	-	831.778.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	831.778.000,00	-	831.778.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	831.778.000,00	1 Satuan Pendidikan	831.778.000,00
		SMPN 3 BALIKPAPAN			976.264.000,00		976.264.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			976.264.000,00		976.264.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			976.264.000,00		976.264.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	976.264.000,00	-	976.264.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	976.264.000,00	-	976.264.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	976.264.000,00	1 Satuan Pendidikan	976.264.000,00
		SMPN 4 BALIKPAPAN			1.465.784.000,00		1.465.784.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.465.784.000,00		1.465.784.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.465.784.000,00		1.465.784.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.465.784.000,00	-	1.465.784.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.465.784.000,00	-	1.465.784.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.465.784.000,00	1 Satuan Pendidikan	1.465.784.000,00
		SMPN 5 BALIKPAPAN			1.061.464.000,00		1.061.464.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.061.464.000,00		1.061.464.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.061.464.000,00		1.061.464.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.061.464.000,00	-	1.061.464.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.061.464.000,00	-	1.061.464.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.061.464.000,00	1 Satuan Pendidikan	1.061.464.000,00
		SMPN 6 BALIKPAPAN			973.116.000,00		973.116.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			973.116.000,00		973.116.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			973.116.000,00		973.116.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	973.116.000,00	-	973.116.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	973.116.000,00	-	973.116.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	973.116.000,00	1 Satuan Pendidikan	973.116.000,00
		SMPN 7 BALIKPAPAN			907.340.000,00		907.340.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			907.340.000,00		907.340.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			907.340.000,00		907.340.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	907.340.000,00	-	907.340.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	907.340.000,00	-	907.340.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	907.340.000,00	1 Satuan Pendidikan	907.340.000,00
		SMPN 8 BALIKPAPAN			1.186.412.000,00		1.186.412.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.186.412.000,00		1.186.412.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.186.412.000,00		1.186.412.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.186.412.000,00	-	1.186.412.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.186.412.000,00	-	1.186.412.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.186.412.000,00	1 Satuan Pendidikan	1.186.412.000,00
		SMPN 9 BALIKPAPAN			1.125.812.000,00		1.125.812.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.125.812.000,00		1.125.812.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.125.812.000,00		1.125.812.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.125.812.000,00	-	1.125.812.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.125.812.000,00	-	1.125.812.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.125.812.000,00	1 Satuan Pendidikan	1.125.812.000,00
		SMPN 10 BALIKPAPAN			812.954.000,00		812.954.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			812.954.000,00		812.954.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			812.954.000,00		812.954.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	812.954.000,00	-	812.954.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	812.954.000,00	-	812.954.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	812.954.000,00	1 Satuan Pendidikan	812.954.000,00
		SMPN 11 BALIKPAPAN			862.416.000,00		862.416.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			862.416.000,00		862.416.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			862.416.000,00		862.416.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	862.416.000,00	-	862.416.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	862.416.000,00	-	862.416.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	862.416.000,00	1 Satuan Pendidikan	862.416.000,00
		SMPN 12 BALIKPAPAN			1.198.974.000,00		1.198.974.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.198.974.000,00		1.198.974.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.198.974.000,00		1.198.974.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.198.974.000,00	-	1.198.974.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.198.974.000,00	-	1.198.974.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.198.974.000,00	1 Satuan Pendidikan	1.198.974.000,00
		SMPN 13 BALIKPAPAN			595.268.000,00		595.268.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			595.268.000,00		595.268.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			595.268.000,00		595.268.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	595.268.000,00	-	595.268.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	595.268.000,00	-	595.268.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	595.268.000,00	1 Satuan Pendidikan	595.268.000,00
		SMPN 14 BALIKPAPAN			1.147.488.000,00		1.147.488.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.147.488.000,00		1.147.488.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.147.488.000,00		1.147.488.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.147.488.000,00	-	1.147.488.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.147.488.000,00	-	1.147.488.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.147.488.000,00	1 Satuan Pendidikan	1.147.488.000,00
		SMPN 15 BALIKPAPAN			776.654.000,00		776.654.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			776.654.000,00		776.654.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			776.654.000,00		776.654.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	776.654.000,00	-	776.654.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	776.654.000,00	-	776.654.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	776.654.000,00	1 Satuan Pendidikan	776.654.000,00
		SMPN 16 BALIKPAPAN			476.844.000,00		476.844.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			476.844.000,00		476.844.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			476.844.000,00		476.844.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	476.844.000,00	-	476.844.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	476.844.000,00	-	476.844.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	476.844.000,00	1 Satuan Pendidikan	476.844.000,00
		SMPN 17 BALIKPAPAN			801.440.000,00		801.440.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			801.440.000,00		801.440.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			801.440.000,00		801.440.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	801.440.000,00	-	801.440.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	801.440.000,00	-	801.440.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	801.440.000,00	1 Satuan Pendidikan	801.440.000,00
		SMPN 18 BALIKPAPAN			834.516.000,00		834.516.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			834.516.000,00		834.516.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			834.516.000,00		834.516.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	834.516.000,00	-	834.516.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	834.516.000,00	-	834.516.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	834.516.000,00	1 Satuan Pendidikan	834.516.000,00
		SMPN 19 BALIKPAPAN			739.354.000,00		739.354.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			739.354.000,00		739.354.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			739.354.000,00		739.354.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	739.354.000,00	-	739.354.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	739.354.000,00	-	739.354.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	739.354.000,00	1 Satuan Pendidikan	739.354.000,00
		SMPN 20 BALIKPAPAN			400.082.000,00		400.082.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			400.082.000,00		400.082.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			400.082.000,00		400.082.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	400.082.000,00	-	400.082.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	400.082.000,00	-	400.082.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	400.082.000,00	1 Satuan Pendidikan	400.082.000,00
		SMPN 21 BALIKPAPAN			115.948.000,00		115.948.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			115.948.000,00		115.948.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			115.948.000,00		115.948.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	115.948.000,00	-	115.948.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	115.948.000,00	-	115.948.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	115.948.000,00	1 Satuan Pendidikan	115.948.000,00
		SMPN 22 BALIKPAPAN			777.592.000,00		777.592.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			777.592.000,00		777.592.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			777.592.000,00		777.592.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	777.592.000,00	-	777.592.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	777.592.000,00	-	777.592.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	777.592.000,00	1 Satuan Pendidikan	777.592.000,00
		SMPN 23 BALIKPAPAN			620.506.000,00		620.506.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			620.506.000,00		620.506.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			620.506.000,00		620.506.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	620.506.000,00	-	620.506.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	620.506.000,00	-	620.506.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	620.506.000,00	1 Satuan Pendidikan	620.506.000,00
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA			1.000.582.000,00		1.000.582.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.000.582.000,00		1.000.582.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.000.582.000,00		1.000.582.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.000.582.000,00	-	1.000.582.000,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.000.582.000,00	-	1.000.582.000,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	1.000.582.000,00	1 Satuan Pendidikan	1.000.582.000,00
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH			964.122.000,00		964.122.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			964.122.000,00		964.122.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			964.122.000,00		964.122.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	964.122.000,00	-	964.122.000,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	964.122.000,00	-	964.122.000,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	964.122.000,00	1 Satuan Pendidikan	964.122.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR			923.054.000,00		923.054.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			923.054.000,00		923.054.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			923.054.000,00		923.054.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	923.054.000,00	-	923.054.000,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	923.054.000,00	-	923.054.000,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	923.054.000,00	1 Satuan Pendidikan	923.054.000,00
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN			1.172.100.000,00		1.172.100.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.172.100.000,00		1.172.100.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.172.100.000,00		1.172.100.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.172.100.000,00	-	1.172.100.000,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.172.100.000,00	-	1.172.100.000,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	1.172.100.000,00	1 Satuan Pendidikan	1.172.100.000,00
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT			813.960.000,00		813.960.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			813.960.000,00		813.960.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			813.960.000,00		813.960.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	813.960.000,00	-	813.960.000,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	813.960.000,00	-	813.960.000,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	813.960.000,00	1 Satuan Pendidikan	813.960.000,00
		TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN			183.572.000,00		183.572.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			183.572.000,00		183.572.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			183.572.000,00		183.572.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	183.572.000,00	-	183.572.000,00
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	183.572.000,00	-	183.572.000,00
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD					
			<i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	183.572.000,00	1 Satuan Pendidikan	183.572.000,00
		SDN 034 BALIKPAPAN UTARA			477.706.000,00		477.706.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			477.706.000,00		477.706.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			477.706.000,00		477.706.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	477.706.000,00	-	477.706.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	477.706.000,00	-	477.706.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	477.706.000,00	1 Satuan Pendidikan	477.706.000,00
		SMPN 24 BALIKPAPAN			321.634.000,00		321.634.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			321.634.000,00		321.634.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			321.634.000,00		321.634.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	321.634.000,00	-	321.634.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	321.634.000,00	-	321.634.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	321.634.000,00	1 Satuan Pendidikan	321.634.000,00
		SMPN 25 BALIKPAPAN			734.240.000,00		734.240.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			734.240.000,00		734.240.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			734.240.000,00		734.240.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	734.240.000,00	-	734.240.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	734.240.000,00	-	734.240.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA RENJA		HASIL ANALIS KEBUTUHAN'	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	8	9
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	734.240.000,00	1 Satuan Pendidikan	734.240.000,00
	J U M L A H				834.714.999.000,00		834.714.999.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menyamakan pandangan tentang bagaimana penyusunan Renja SKPD yang komprehensif dan dapat sesuai dengan kebutuhan lokal, selain itu agar perencanaan dapat tepat guna dan tepat sasaran, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, maka perlu adanya penelaahan terhadap usulan masyarakat atau dalam konteks perencanaan disebut dengan perencanaan "*bottom up*".

Usulan dari masyarakat ini diakomodir melalui kegiatan musrenbang secara berjenjang, yang selanjutnya di rekapitulasi untuk dimasukkan dalam renja SKPD sesuai dengan tahapan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain dari peraturan menteri tersebut Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan wajib melakukan proses usulan masyarakat tersebut melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan suatu aplikasi resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Secara garis besar usulan masyarakat yang masuk sampai dengan penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 ini terdiri dari Hibah/Bansos dan Non Hibah/Bansos, dimana perlakuan atas kedua jenis usulan ini berbeda-beda sesuai dengan pedoman perundangan yang berlaku.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BALIKPAPAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan Nasional dengan Pembangunan, Provinsi dan Kota Balikpapan, maka berdasarkan Renja 2025 terdapat hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 3.1
Keterkaitan Renstra Kementrian, RPJMD Provinsi dengan Kota;

RENSTRA KEMENDIKBUD	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD KOTA BALIKPAPAN
2020 - 2024	2019 - 2024	2021-2026
mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global	Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat	Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman
M1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.	Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi
M2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.		

RENSTRA KEMENDIKBUD	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD KOTA BALIKPAPAN
2020 - 2024	2019 - 2024	2021-2026
M3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.		

Berdasarkan identifikasi keterkaitan berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada Visi, misi, tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan serta telaahan Rencana Strategis Dinas pendidikan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja tahun 2025 merupakan tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 yaitu :

- a. Visi Walikota : TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN
- b. Misi Walikota : M2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi
- c. Tujuan SKPD : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- d. Sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan
 2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM Pemajuan Kebudayaan
 3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sesuai dengan arah pembangunan Kota Balikpapan periode 2021 – 2026. RKPD 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026 dan merupakan tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005 –2025 dengan visinya “ **MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA 5 DIMENSI (JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN) DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN** ”

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan menyesuaikan Kepmendari nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran, Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memegang Dua Urusan Wajib, yaitu :

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025, program dan kegiatan tahun 2025 disusun berdasarkan ;

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota Balikpapan
2. Berkorelasi dan bersinergi dengan Kebijakan Nasional
3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai ikhtiar untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dibagi dalam 1 (satu) program Prioritas dan 7 (Delapan) program penunjang dari 8 (sembilan) Program keseluruhan. Masing-masing program tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN;
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM;
3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN;
5. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL;
6. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH;
7. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA;

8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

Tabel 4.1
*Rumusan Rencana Program dan
 Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026*

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			763.204.807.000,00				938.745.107.844,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			394.642.436.831,00				498.301.542.612,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			394.642.436.831,00				498.301.542.612,00
1,	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	88.18 %	6.263.688.600,00			88.18 %	6.753.162.386,00
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	84.03 %	150.000.000,00			-	200.000.000,00
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	21 Laporan	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	88.35 %	50.000.000,00			-	350.000.000,00
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	163 Dokumen	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	163 Laporan	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	83.49 %	25.000.000,00			-	250.000.000,00
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	86.93 %	25.000.000,00			-	339.635.786,00
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	443 Orang	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		339.635.786,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semua Kel/Desa			
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	86.71 %	2.768.688.600,00			-	2.843.526.600,00
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	17 Paket	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000,00
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	41458 Paket	1.523.688.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.756.486.600,00
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		167.040.000,00
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	3334 Dokumen	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 Laporan	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	2 Dokumen	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	87.64 %	842.000.000,00			-	970.000.000,00
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	8 Laporan	842.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		970.000.000,00
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	83.97 %	2.403.000.000,00			-	1.800.000.000,00
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	55 Unit	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	175 Unit	510.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	1.193.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000.000,00
2,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	384.109.551.285,00			87,23 %	484.981.839.780,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.8 %	197.060.306.268,00			-	182.137.451.780,00
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	20.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000.000,00
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.820.000.000,00
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah							
			<i>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</i>	75 Paket	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.500.000.000,00
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>	75 Paket	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>	1 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	22008 Peserta Didik	1.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	195 Orang	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	2889 Orang	9.144.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.758.900.000,00
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>	220 Satuan Pendidikan	423.831.240,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	220 Satuan Pendidikan	87.116.860.180,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		105.440.960.180,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semua Kel/Desa			
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	639 Orang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		794.231.600,00
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	137 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah							
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>	137 Unit	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	195 Orang	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 20.00
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>	1 Konten Digital	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 50.00
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	195 Orang	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	195 Dokumen	40.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		370.000.000,00
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 50.00
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>	195 Komunitas	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 50.00
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>	1 Kegiatan	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 20.00
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>	1 Buku	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 20.00
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	13000 Paket	12.932.873.948,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.933.360.000,00
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	1882 Ruang	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.700.000.000,00
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1882 Unit	10.600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.100.000.000,00
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	195 Orang	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	195 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		700.000.000,00
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	195 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.600.000.000,00
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	650 Peserta Didik	17.424.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>	137 Paket	33.498.540.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>	97.66 %	131.546.644.425,00			-	215.024.501.424,00
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula							
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah							
			<i>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun</i>	17 Unit	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir							
			<i>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun</i>	2 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.600.000.000,00
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah							
			<i>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun</i>	2 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.800.000.000,00
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>	5 Unit	6.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>	17 Ruang	3.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.600.000.000,00
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium							
			<i>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>	2 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>	2 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir							
			<i>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>	3 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah							
			<i>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat</i>	4 Unit	3.600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah							
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>	200 Paket	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.500.000.000,00
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>	300 Paket	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	10900 Peserta Didik	14.675.889.425,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.197.520.000,00
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	1200 Peserta Didik	900.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	78 Orang	51.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	950 Orang	6.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.900.000,00
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>	78 Satuan Pendidikan	525.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	93 Satuan Pendidikan	48.512.420.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54.273.613.840,00
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	93 Orang	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	100 Orang	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>	78 Konten Digital	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	100 Orang	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	78 Dokumen	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	4 Dokumen	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>	78 Komunitas	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>	2 Kegiatan	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar</i>	78 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		475.264.000,00
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	24 Ruang	19.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	78 Orang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>	400 Buku	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	11989 Paket	9.758.335.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.777.203.584,00
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>	249 Paket	14.204.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.000.000.000,00
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD</i>	30.80 %	27.881.911.300,00			-	57.964.095.084,00
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD							
			<i>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia</i>	420 Paket	395.109.550,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.950.000.000,00
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD							
			<i>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia</i>	25 Paket	2.599.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.250.000.000,00
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD							
			<i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	13508 Peserta Didik	1.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.656.220.084,00
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD</i>	25 Orang	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	1800 Orang	15.431.875.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18.601.875.000,00
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
			<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	420 Satuan Pendidikan	1.300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	30 Orang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	40 Orang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>	30 Konten Digital	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semua Kel/Desa			
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	35 Orang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	30 Dokumen	130.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	50 Dokumen	275.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		275.000.000,00
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>	90 Komunitas	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	1 Ruang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca							
			<i>Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata</i>	5 Ruang	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik							
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	100 Peserta didik	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000,00
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	180 Orang	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000.000,00
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	13508 Paket	4.054.200.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>	1 Unit	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD							
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia</i>	5 Paket	276.126.150,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		510.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>	1 Ruang	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Persentase spnf yang terakreditasi</i>	92.86 %	27.620.689.292,00			-	29.855.791.492,00
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	5708 Peserta Didik	3.187.768.792,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.877.931.492,00
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	25 Orang	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	3075 Orang	11.744.650.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.494.650.000,00
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	25 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		116.000.000,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	5 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>	50 Orang	275.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	25 Orang	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 20.00
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>	25 Konten Digital	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 50.00
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	25 Orang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	25 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120.000.000,00
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	25 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 50.00
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>	25 Komunitas	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 50.00
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.000,00 50.00
	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi</i>	25 Orang	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.00 0.000,00
	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca							
			<i>Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata</i>	5 Ruang	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik							
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	100 Peserta Didik	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	500 Paket	4.925.560.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.162.000.000,00
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
			<i>Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	1 Ruang	260.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>	1410 Paket	4.024.710.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.825.210.000,00
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	4 Unit	212.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	25 Orang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium							
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium							
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah							
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>	2365 Paket	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>	4 Unit	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan							
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia</i>	5 Paket	580.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	5 Ruang	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
3,	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	<i>Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal</i>	94.44 %	499.954.465,00			94.44 %	540.000.000,00
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	77.78 %	499.954.465,00			-	540.000.000,00
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>	5 Dokumen	499.954.465,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		540.000.000,00
4,	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	3.587.944.285,00			-	5.762.291.500,00
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	71.40 %	3.587.944.285,00			-	5.762.291.500,00
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	12 Dokumen	3.132.925.185,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.262.291.500,00
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	1 Laporan	455.019.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
5,	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	<i>Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)</i>	99.13 %	181.298.196,00			99.13 %	264.248.946,00
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	89.21 %	97.354.385,00			-	133.196.210,00
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	1 Dokumen	17.668.530,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.165.530,00
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	1 Dokumen	79.685.855,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		108.030.680,00
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	97.00 %	83.943.811,00			-	131.052.736,00
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	1 Dokumen	23.750.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	1 Dokumen	60.193.811,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81.052.736,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.616.893.832,00				5.205.000.000,00
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.616.893.832,00				5.205.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase pengembangan kebudayaan</i>	67.98 %	1.880.000.000,00			67.98 %	2.677.000.000,00
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina</i>	50 %	780.000.000,00			-	900.000.000,00
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>	3 Objek	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan							
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	35 Orang	80.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya</i>	87.27 %	1.100.000.000,00			-	1.427.000.000,00
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya							
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>	240 Objek	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.167.000.000,00
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>	5 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan							
			<i>Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan</i>	10 Sertifikat	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga adat yang aktif</i>	66.67 %	0,00			-	350.000.000,00
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat							
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>	2 Objek	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat							
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina</i>	10 Orang	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi</i>	4 Unit	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
2,	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	<i>Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni</i>	37.31 %	350.000.000,00			37.31 %	605.000.000,00
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaku seni yang dibina</i>	55 %	350.000.000,00			-	605.000.000,00
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional							
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>	120 Orang	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan							
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi</i>	17 Sertifikat	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional							
			<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	15 Lembaga	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		155.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3,	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	60 %	99.800.000,00			60 %	265.000.000,00
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah</i>	71.43 %	99.800.000,00			-	265.000.000,00
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i>	35 Orang	99.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		265.000.000,00
4,	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	98.53 %	1.287.093.832,00			98.53 %	1.658.000.000,00
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota</i>	98.53 %	187.000.000,00			-	187.000.000,00
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya							
			<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>	2 Objek	77.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		77.000.000,00
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya							
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>	3 Objek	110.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengelolaan cagar budaya</i>	24.60 %	1.100.093.832,00			-	1.471.000.000,00
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya							
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>	134 Objek	850.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		850.000.000,00
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya							
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan</i>	5 Objek	61.693.832,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		275.000.000,00
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya							
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>	70 Objek	188.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		346.000.000,00
	X	NON URUSAN			364.945.476.337,00				435.238.565.232,00
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			364.945.476.337,00				435.238.565.232,00
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	88.18 %	364.945.476.337,00			88.18 %	435.238.565.232,00
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)</i>	88.35 %	360.581.247.867,00			-	433.218.675.674,00
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4670 Orang/bulan	359.806.991.367,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		432.444.419.174,00
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	13 Dokumen	774.256.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		774.256.500,00
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	86.71 %	3.087.964.152,00			-	1.000.000.000,00
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	3.087.964.152,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	84.29 %	623.466.318,00			-	558.889.558,00
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	2 Unit	623.466.318,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		558.889.558,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	87.64 %	652.798.000,00			-	461.000.000,00
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	652.798.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		461.000.000,00
		SDN 001 BALIKPAPAN UTARA			562.068.000,00				567.688.680,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			562.068.000,00				567.688.680,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			562.068.000,00				567.688.680,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	562.068.000,00			87.23 %	567.688.680,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	562.068.000,00			-	567.688.680,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	562.068.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		567.688.680,00
		SDN 002 BALIKPAPAN UTARA			623.954.000,00				630.193.540,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			623.954.000,00				630.193.540,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			623.954.000,00				630.193.540,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.23 %	623.954.000,00			87.23 %	630.193.540,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	623.954.000,00			-	630.193.540,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	623.954.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		630.193.540,00
		SDN 003 BALIKPAPAN UTARA			639.354.000,00				645.747.540,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			639.354.000,00				645.747.540,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			639.354.000,00				645.747.540,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	639.354.000,00			-	645.747.540,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	639.354.000,00			-	645.747.540,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	639.354.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		645.747.540,00
		SDN 004 BALIKPAPAN UTARA			706.478.000,00				713.542.780,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			706.478.000,00				713.542.780,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			706.478.000,00				713.542.780,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	706.478.000,00			87.23 %	713.542.780,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	706.478.000,00			-	713.542.780,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	706.478.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		713.542.780,00
		SDN 005 BALIKPAPAN UTARA			142.848.000,00				144.276.480,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			142.848.000,00				144.276.480,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			142.848.000,00				144.276.480,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	142.848.000,00			87,23 %	144.276.480,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	142.848.000,00			-	144.276.480,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	142.848.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		144.276.480,00
		SDN 006 BALIKPAPAN UTARA			250.372.000,00				250.372.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			250.372.000,00				250.372.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			250.372.000,00				250.372.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	250.372.000,00			87,23 %	250.372.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	250.372.000,00			-	250.372.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	250.372.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.372.000,00
		SDN 007 BALIKPAPAN UTARA			301.934.000,00				304.953.340,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			301.934.000,00				304.953.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			301.934.000,00				304.953.340,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	301.934.000,00			87,23 %	304.953.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	301.934.000,00			-	304.953.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	301.934.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		304.953.340,00
		SDN 008 BALIKPAPAN UTARA			129.048.000,00				130.338.480,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.048.000,00				130.338.480,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			129.048.000,00				130.338.480,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	87,23 %	129.048.000,00			87,23 %	130.338.480,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	129.048.000,00			-	130.338.480,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	129.048.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130.338.480,00
		SDN 009 BALIKPAPAN UTARA			509.982.000,00				509.982.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			509.982.000,00				509.982.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			509.982.000,00				509.982.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 87.23	509.982.000,00			87.23 87.23	509.982.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	509.982.000,00			-	509.982.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	509.982.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		509.982.000,00
		SDN 010 BALIKPAPAN UTARA			174.848.000,00				174.848.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			174.848.000,00				174.848.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			174.848.000,00				174.848.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	174.848.000,00			87,23 %	174.848.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	174.848.000,00			-	174.848.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	174.848.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		174.848.000,00
		SDN 011 BALIKPAPAN UTARA			338.658.000,00				342.044.580,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			338.658.000,00				342.044.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			338.658.000,00				342.044.580,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	338.658.000,00			87,23 %	342.044.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	338.658.000,00			-	342.044.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	338.658.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		342.044.580,00
		SDN 012 BALIKPAPAN UTARA			196.210.000,00				198.172.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			196.210.000,00				198.172.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			196.210.000,00				198.172.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	196.210.000,00			87,23 %	198.172.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	196.210.000,00			-	198.172.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	196.210.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		198.172.100,00
		SDN 013 BALIKPAPAN UTARA			195.410.000,00				197.364.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			195.410.000,00				197.364.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			195.410.000,00				197.364.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	87,23 %	195.410.000,00			87,23 %	197.364.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	195.410.000,00			-	197.364.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	195.410.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		197.364.100,00
		SDN 014 BALIKPAPAN UTARA			285.096.000,00				287.946.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			285.096.000,00				287.946.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			285.096.000,00				287.946.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)</i>	87,23 %	285.096.000,00			87,23 %	287.946.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	285.096.000,00			-	287.946.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	285.096.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		287.946.960,00
		SDN 015 BALIKPAPAN UTARA			351.020.000,00				354.530.200,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			351.020.000,00				354.530.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			351.020.000,00				354.530.200,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	87,23 %	351.020.000,00			87,23 %	354.530.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	351.020.000,00			-	354.530.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	351.020.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		354.530.200,00
		SDN 016 BALIKPAPAN UTARA			276.496.000,00				279.260.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			276.496.000,00				279.260.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			276.496.000,00				279.260.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	87,23 %	276.496.000,00			87,23 %	279.260.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	276.496.000,00			-	279.260.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	276.496.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		279.260.960,00
		SDN 017 BALIKPAPAN UTARA			187.010.000,00				188.880.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			187.010.000,00				188.880.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			187.010.000,00				188.880.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	87,23 %	187.010.000,00			87,23 %	188.880.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	187.010.000,00			-	188.880.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	187.010.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		188.880.100,00
		SDN 018 BALIKPAPAN UTARA			256.934.000,00				259.503.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			256.934.000,00				259.503.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			256.934.000,00				259.503.340,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP) Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 % 87,23 %	256.934.000,00			87,33 87,33 % 87,33 Perse n	259.503.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	256.934.000,00			-	259.503.340,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	256.934.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		259.503.340,00
		SDN 019 BALIKPAPAN UTARA			189.210.000,00				191.102.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			189.210.000,00				191.102.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			189.210.000,00				191.102.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	189.210.000,00			87,23 %	191.102.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	189.210.000,00			-	191.102.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	189.210.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		191.102.100,00
		SDN 020 BALIKPAPAN UTARA			700.916.000,00				700.916.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			700.916.000,00				700.916.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			700.916.000,00				700.916.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	700.916.000,00			87,23 %	700.916.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	700.916.000,00			-	700.916.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	700.916.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		700.916.000,00
		SDN 021 BALIKPAPAN UTARA			260.934.000,00				263.543.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			260.934.000,00				263.543.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			260.934.000,00				263.543.340,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	260.934.000,00			87,23 %	263.543.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	260.934.000,00			-	263.543.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	260.934.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		263.543.340,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		SDN 022 BALIKPAPAN UTARA			511.144.000,00				516.255.440,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			511.144.000,00				516.255.440,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			511.144.000,00				516.255.440,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	511.144.000,00			87,23 %	516.255.440,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	511.144.000,00			-	516.255.440,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	511.144.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		516.255.440,00
		SDN 023 BALIKPAPAN UTARA			104.686.000,00				105.732.860,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			104.686.000,00				105.732.860,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			104.686.000,00				105.732.860,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87,23 %	104.686.000,00			87,23 %	105.732.860,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	104.686.000,00			-	105.732.860,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	104.686.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		105.732.860,00
		SDN 024 BALIKPAPAN UTARA			388.382.000,00				420.545.820,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			388.382.000,00				420.545.820,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			388.382.000,00				420.545.820,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	87,23 %	388.382.000,00			87,23 %	420.545.820,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	388.382.000,00			-	420.545.820,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	388.382.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		420.545.820,00
		SDN 025 BALIKPAPAN UTARA			267.334.000,00				270.007.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			267.334.000,00				270.007.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			267.334.000,00				270.007.340,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	267.334.000,00			87,23 %	270.007.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	267.334.000,00			-	270.007.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	267.334.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		270.007.340,00
		SDN 026 BALIKPAPAN UTARA			188.772.000,00				190.659.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			188.772.000,00				190.659.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			188.772.000,00				190.659.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.23 %	188.772.000,00			87.23 %	190.659.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	188.772.000,00			-	190.659.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	188.772.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		190.659.720,00
		SDN 027 BALIKPAPAN UTARA			413.020.000,00				417.150.200,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			413.020.000,00				417.150.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			413.020.000,00				417.150.200,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.23 %	413.020.000,00			87.23 %	417.150.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	413.020.000,00			-	417.150.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	413.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		417.150.200,00
		SDN 028 BALIKPAPAN UTARA			168.210.000,00				169.892.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			168.210.000,00				169.892.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			168.210.000,00				169.892.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.23 %	168.210.000,00			87.23 %	169.892.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	168.210.000,00			-	169.892.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	168.210.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		169.892.100,00
		SDN 029 BALIKPAPAN UTARA			414.944.000,00				419.093.440,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			414.944.000,00				419.093.440,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			414.944.000,00				419.093.440,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>	87.23 %	414.944.000,00			87.23 %	419.093.440,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.80 %	414.944.000,00			-	419.093.440,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	414.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		419.093.440,00
		SDN 030 BALIKPAPAN UTARA			510.944.000,00				516.053.440,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			510.944.000,00				516.053.440,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			510.944.000,00				516.053.440,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.23 %	510.944.000,00			87.23 %	516.053.440,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	510.944.000,00			-	516.053.440,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	510.944.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		516.053.440,00
		SDN 031 BALIKPAPAN UTARA			280.334.000,00				283.137.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			280.334.000,00				283.137.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			280.334.000,00				283.137.340,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23 %	280.334.000,00			87,23 %	283.137.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	280.334.000,00			-	283.137.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	280.334.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		283.137.340,00
		SDN 032 BALIKPAPAN UTARA			169.810.000,00				171.508.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			169.810.000,00				171.508.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			169.810.000,00				171.508.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.23 %	169.810.000,00			87.23 %	171.508.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	169.810.000,00			-	171.508.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	169.810.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		171.508.100,00
		SDN 033 BALIKPAPAN UTARA			604.230.000,00				610.272.300,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			604.230.000,00				610.272.300,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			604.230.000,00				610.272.300,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.23 %	604.230.000,00			87.23 %	610.272.300,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.80 %	604.230.000,00			-	610.272.300,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	604.230.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		610.272.300,00
		SDN 001 BALIKPAPAN KOTA			639.954.000,00				639.954.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			639.954.000,00				639.954.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			639.954.000,00				639.954.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	639.954.000,00			-	639.954.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	639.954.000,00			-	639.954.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	639.954.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		639.954.000,00
		SDN 002 BALIKPAPAN KOTA			176.372.000,00				178.135.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			176.372.000,00				178.135.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			176.372.000,00				178.135.720,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	176.372.000,00			-	178.135.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	176.372.000,00			-	178.135.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	176.372.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		178.135.720,00
		SDN 003 BALIKPAPAN KOTA			420.820.000,00				420.820.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			420.820.000,00				420.820.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			420.820.000,00				420.820.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	420.820.000,00			-	420.820.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	420.820.000,00			-	420.820.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	420.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		420.820.000,00
		SDN 004 BALIKPAPAN KOTA			215.572.000,00				217.727.720,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			215.572.000,00				217.727.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			215.572.000,00				217.727.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	215.572.000,00			-	217.727.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	215.572.000,00			-	217.727.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	215.572.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		217.727.720,00
		SDN 005 BALIKPAPAN KOTA			417.582.000,00				421.757.820,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			417.582.000,00				421.757.820,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			417.582.000,00				421.757.820,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	417.582.000,00			-	421.757.820,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	417.582.000,00			-	421.757.820,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	417.582.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		421.757.820,00
		SDN 006 BALIKPAPAN KOTA			171.010.000,00				172.720.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			171.010.000,00				172.720.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			171.010.000,00				172.720.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	171.010.000,00			-	172.720.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	171.010.000,00			-	172.720.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	171.010.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		172.720.100,00
		SDN 007 BALIKPAPAN KOTA			237.534.000,00				239.909.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			237.534.000,00				239.909.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			237.534.000,00				239.909.340,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	237.534.000,00			-	239.909.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	237.534.000,00			-	239.909.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	237.534.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		239.909.340,00
		SDN 008 BALIKPAPAN KOTA			338.696.000,00				342.082.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			338.696.000,00				342.082.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			338.696.000,00				342.082.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	338.696.000,00			-	342.082.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	338.696.000,00			-	342.082.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	338.696.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		342.082.960,00
		SDN 009 BALIKPAPAN KOTA			163.610.000,00				165.246.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			163.610.000,00				165.246.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			163.610.000,00				165.246.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	163.610.000,00			-	165.246.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	163.610.000,00			-	165.246.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	163.610.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		165.246.100,00
		SDN 010 BALIKPAPAN KOTA			211.772.000,00				213.889.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			211.772.000,00				213.889.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			211.772.000,00				213.889.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	211.772.000,00			-	213.889.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	211.772.000,00			-	213.889.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	211.772.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		213.889.720,00
		SDN 011 BALIKPAPAN KOTA			317.296.000,00				320.468.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			317.296.000,00				320.468.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			317.296.000,00				320.468.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	317.296.000,00			-	320.468.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	317.296.000,00			-	320.468.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	317.296.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320.468.960,00
		SDN 012 BALIKPAPAN KOTA			326.458.000,00				329.722.580,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			326.458.000,00				329.722.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			326.458.000,00				329.722.580,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	326.458.000,00			-	329.722.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	326.458.000,00			-	329.722.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	326.458.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		329.722.580,00
		SDN 013 BALIKPAPAN KOTA			399.058.000,00				403.048.580,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			399.058.000,00				403.048.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			399.058.000,00				403.048.580,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	399.058.000,00			-	403.048.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	399.058.000,00			-	403.048.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	399.058.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		403.048.580,00
		SDN 014 BALIKPAPAN KOTA			163.010.000,00				164.640.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			163.010.000,00				164.640.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			163.010.000,00				164.640.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	163.010.000,00			-	164.640.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	163.010.000,00			-	164.640.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	163.010.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		164.640.100,00
		SDN 015 BALIKPAPAN KOTA			213.934.000,00				216.073.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			213.934.000,00				216.073.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			213.934.000,00				216.073.340,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	213.934.000,00			-	216.073.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	213.934.000,00			-	216.073.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	213.934.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		216.073.340,00
		SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN			454.820.000,00				459.368.200,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			454.820.000,00				459.368.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			454.820.000,00				459.368.200,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	454.820.000,00			-	459.368.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	454.820.000,00			-	459.368.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	454.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		459.368.200,00
		SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN			545.268.000,00				550.720.680,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			545.268.000,00				550.720.680,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			545.268.000,00				550.720.680,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	545.268.000,00			-	550.720.680,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	545.268.000,00			-	550.720.680,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	545.268.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		550.720.680,00
		SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN			352.696.000,00				356.222.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			352.696.000,00				356.222.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			352.696.000,00				356.222.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	352.696.000,00			-	356.222.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	352.696.000,00			-	356.222.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	352.696.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		356.222.960,00
		SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN			660.954.000,00				667.563.540,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			660.954.000,00				667.563.540,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			660.954.000,00				667.563.540,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	660.954.000,00			-	667.563.540,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	660.954.000,00			-	667.563.540,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	660.954.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		667.563.540,00
		SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN			414.782.000,00				418.929.820,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			414.782.000,00				418.929.820,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			414.782.000,00				418.929.820,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	414.782.000,00			-	418.929.820,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	414.782.000,00			-	418.929.820,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	414.782.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		418.929.820,00
		SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN			332.496.000,00				335.820.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			332.496.000,00				335.820.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			332.496.000,00				335.820.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	332.496.000,00			-	335.820.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	332.496.000,00			-	335.820.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	332.496.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		335.820.960,00
		SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN			359.458.000,00				363.052.580,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			359.458.000,00				363.052.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			359.458.000,00				363.052.580,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	359.458.000,00			-	363.052.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	359.458.000,00			-	363.052.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	359.458.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		363.052.580,00
		SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN			195.610.000,00				197.566.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			195.610.000,00				197.566.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			195.610.000,00				197.566.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	195.610.000,00			-	197.566.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	195.610.000,00			-	197.566.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	195.610.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		197.566.100,00
		SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN			314.896.000,00				318.044.960,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			314.896.000,00				318.044.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			314.896.000,00				318.044.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	314.896.000,00			-	318.044.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	314.896.000,00			-	318.044.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	314.896.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		318.044.960,00
		SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN			710.116.000,00				717.217.160,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			710.116.000,00				717.217.160,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			710.116.000,00				717.217.160,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	710.116.000,00			-	717.217.160,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	710.116.000,00			-	717.217.160,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	710.116.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		717.217.160,00
		SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN			388.382.000,00				392.265.820,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			388.382.000,00				392.265.820,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			388.382.000,00				392.265.820,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	388.382.000,00			-	392.265.820,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	388.382.000,00			-	392.265.820,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	388.382.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		392.265.820,00
		SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN			342.258.000,00				345.680.580,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			342.258.000,00				345.680.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			342.258.000,00				345.680.580,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	342.258.000,00			-	345.680.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	342.258.000,00			-	345.680.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	342.258.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		345.680.580,00
		SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN			661.192.000,00				667.803.920,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			661.192.000,00				667.803.920,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			661.192.000,00				667.803.920,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	661.192.000,00			-	667.803.920,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	661.192.000,00			-	667.803.920,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	661.192.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		667.803.920,00
		SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN			489.506.000,00				494.401.060,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			489.506.000,00				494.401.060,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			489.506.000,00				494.401.060,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	489.506.000,00			-	494.401.060,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	489.506.000,00			-	494.401.060,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	489.506.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		494.401.060,00
		SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN			696.592.000,00				703.557.920,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			696.592.000,00				703.557.920,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			696.592.000,00				703.557.920,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	696.592.000,00			-	703.557.920,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	696.592.000,00			-	703.557.920,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	696.592.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		703.557.920,00
		SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH			489.106.000,00				493.997.060,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			489.106.000,00				493.997.060,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			489.106.000,00				493.997.060,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	489.106.000,00			-	493.997.060,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	489.106.000,00			-	493.997.060,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	489.106.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		493.997.060,00
		SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH			806.040.000,00				814.100.400,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			806.040.000,00				814.100.400,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			806.040.000,00				814.100.400,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	806.040.000,00			-	814.100.400,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	806.040.000,00			-	814.100.400,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	806.040.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		814.100.400,00
		SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH			594.030.000,00				599.970.300,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			594.030.000,00				599.970.300,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			594.030.000,00				599.970.300,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	594.030.000,00			-	599.970.300,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	594.030.000,00			-	599.970.300,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	594.030.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		599.970.300,00
		SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH			194.372.000,00				196.315.720,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			194.372.000,00				196.315.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			194.372.000,00				196.315.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	194.372.000,00			-	196.315.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	194.372.000,00			-	196.315.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	194.372.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		196.315.720,00
		SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH			413.220.000,00				417.352.200,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			413.220.000,00				417.352.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			413.220.000,00				417.352.200,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	413.220.000,00			-	417.352.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	413.220.000,00			-	417.352.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	413.220.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		417.352.200,00
		SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH			313.296.000,00				316.428.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			313.296.000,00				316.428.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			313.296.000,00				316.428.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	313.296.000,00			-	316.428.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	313.296.000,00			-	316.428.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	313.296.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		316.428.960,00
		SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH			342.858.000,00				346.286.580,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			342.858.000,00				346.286.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			342.858.000,00				346.286.580,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	342.858.000,00			-	346.286.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	342.858.000,00			-	346.286.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	342.858.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		346.286.580,00
		SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH			146.848.000,00				148.316.480,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			146.848.000,00				148.316.480,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			146.848.000,00				148.316.480,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	146.848.000,00			-	148.316.480,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	146.848.000,00			-	148.316.480,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	146.848.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		148.316.480,00
		SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH			190.172.000,00				192.073.720,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			190.172.000,00				192.073.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			190.172.000,00				192.073.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	190.172.000,00			-	192.073.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	190.172.000,00			-	192.073.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	190.172.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		192.073.720,00
		SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH			279.896.000,00				282.694.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			279.896.000,00				282.694.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			279.896.000,00				282.694.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	279.896.000,00			-	282.694.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	279.896.000,00			-	282.694.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	279.896.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		282.694.960,00
		SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH			352.620.000,00				356.146.200,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			352.620.000,00				356.146.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			352.620.000,00				356.146.200,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	352.620.000,00			-	356.146.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	352.620.000,00			-	356.146.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	352.620.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		356.146.200,00
		SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH			289.096.000,00				291.986.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			289.096.000,00				291.986.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			289.096.000,00				291.986.960,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	289.096.000,00			-	291.986.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	289.096.000,00			-	291.986.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	289.096.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		291.986.960,00
		SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH			399.182.000,00				399.182.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			399.182.000,00				399.182.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			399.182.000,00				399.182.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	399.182.000,00			-	399.182.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	399.182.000,00			-	399.182.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	399.182.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		399.182.000,00
		SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH			235.448.000,00				237.802.480,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			235.448.000,00				237.802.480,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			235.448.000,00				237.802.480,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	235.448.000,00			-	237.802.480,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	235.448.000,00			-	237.802.480,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	235.448.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		237.802.480,00
		SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH			167.410.000,00				169.084.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			167.410.000,00				169.084.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			167.410.000,00				169.084.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	167.410.000,00			-	169.084.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	167.410.000,00			-	169.084.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	167.410.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		169.084.100,00
		SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH			282.096.000,00				284.916.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			282.096.000,00				284.916.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			282.096.000,00				284.916.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	282.096.000,00			-	284.916.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	282.096.000,00			-	284.916.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	282.096.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		284.916.960,00
		SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH			179.010.000,00				180.800.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			179.010.000,00				180.800.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			179.010.000,00				180.800.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	179.010.000,00			-	180.800.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	179.010.000,00			-	180.800.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	179.010.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180.800.100,00
		SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH			226.334.000,00				228.597.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			226.334.000,00				228.597.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			226.334.000,00				228.597.340,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	226.334.000,00			-	228.597.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	226.334.000,00			-	228.597.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	226.334.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		228.597.340,00
		SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH			311.858.000,00				314.976.580,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			311.858.000,00				314.976.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			311.858.000,00				314.976.580,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	311.858.000,00			-	314.976.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	311.858.000,00			-	314.976.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	311.858.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		314.976.580,00
		SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH			206.972.000,00				209.041.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			206.972.000,00				209.041.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			206.972.000,00				209.041.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	206.972.000,00			-	209.041.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	206.972.000,00			-	209.041.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	206.972.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		209.041.720,00
		SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH			194.772.000,00				196.719.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			194.772.000,00				196.719.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			194.772.000,00				196.719.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	194.772.000,00			-	196.719.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	194.772.000,00			-	196.719.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	194.772.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		196.719.720,00
		SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH			218.134.000,00				220.315.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			218.134.000,00				220.315.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			218.134.000,00				220.315.340,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	218.134.000,00			-	220.315.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	218.134.000,00			-	220.315.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	218.134.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220.315.340,00
		SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH			181.810.000,00				183.628.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			181.810.000,00				183.628.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			181.810.000,00				183.628.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	181.810.000,00			-	183.628.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	181.810.000,00			-	183.628.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	181.810.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		183.628.100,00
		SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH			205.572.000,00				207.627.720,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			205.572.000,00				207.627.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			205.572.000,00				207.627.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	205.572.000,00			-	207.627.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	205.572.000,00			-	207.627.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	205.572.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		207.627.720,00
		SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH			219.372.000,00				221.565.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			219.372.000,00				221.565.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			219.372.000,00				221.565.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	219.372.000,00			-	221.565.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	219.372.000,00			-	221.565.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	219.372.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		221.565.720,00
		SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH			180.772.000,00				182.579.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			180.772.000,00				182.579.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			180.772.000,00				182.579.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	180.772.000,00			-	182.579.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	180.772.000,00			-	182.579.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	180.772.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		182.579.720,00
		SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH			380.420.000,00				384.224.200,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			380.420.000,00				384.224.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			380.420.000,00				384.224.200,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	380.420.000,00			-	384.224.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	380.420.000,00			-	384.224.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	380.420.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		384.224.200,00
		SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH			153.610.000,00				155.146.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			153.610.000,00				155.146.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			153.610.000,00				155.146.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	153.610.000,00			-	155.146.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	153.610.000,00			-	155.146.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	153.610.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		155.146.100,00
		SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH			164.810.000,00				166.458.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			164.810.000,00				166.458.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			164.810.000,00				166.458.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	164.810.000,00			-	166.458.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	164.810.000,00			-	166.458.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	164.810.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		166.458.100,00
		SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH			244.172.000,00				246.613.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			244.172.000,00				246.613.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			244.172.000,00				246.613.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	244.172.000,00			-	246.613.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	244.172.000,00			-	246.613.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	244.172.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		246.613.720,00
		SDN 001 BALIKPAPAN BARAT			694.154.000,00				701.095.540,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			694.154.000,00				701.095.540,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			694.154.000,00				701.095.540,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	694.154.000,00			-	701.095.540,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	694.154.000,00			-	701.095.540,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	694.154.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		701.095.540,00
		SDN 002 BALIKPAPAN BARAT			600.230.000,00				606.232.300,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			600.230.000,00				606.232.300,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			600.230.000,00				606.232.300,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	600.230.000,00			-	606.232.300,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	600.230.000,00			-	606.232.300,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	600.230.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		606.232.300,00
		SDN 003 BALIKPAPAN BARAT			258.534.000,00				261.119.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			258.534.000,00				261.119.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			258.534.000,00				261.119.340,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	258.534.000,00			-	261.119.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	258.534.000,00			-	261.119.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	258.534.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		261.119.340,00
		SDN 004 BALIKPAPAN BARAT			461.344.000,00				465.957.440,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			461.344.000,00				465.957.440,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			461.344.000,00				465.957.440,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	461.344.000,00			-	465.957.440,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	461.344.000,00			-	465.957.440,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	461.344.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		465.957.440,00
		SDN 005 BALIKPAPAN BARAT			372.420.000,00				376.144.200,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			372.420.000,00				376.144.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			372.420.000,00				376.144.200,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	372.420.000,00			-	376.144.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	372.420.000,00			-	376.144.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	372.420.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		376.144.200,00
		SDN 006 BALIKPAPAN BARAT			348.658.000,00				352.144.580,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			348.658.000,00				352.144.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			348.658.000,00				352.144.580,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	348.658.000,00			-	352.144.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	348.658.000,00			-	352.144.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	348.658.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		352.144.580,00
		SDN 007 BALIKPAPAN BARAT			286.058.000,00				288.918.580,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			286.058.000,00				288.918.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			286.058.000,00				288.918.580,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	286.058.000,00			-	288.918.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	286.058.000,00			-	288.918.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	286.058.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		288.918.580,00
		SDN 008 BALIKPAPAN BARAT			210.172.000,00				212.273.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			210.172.000,00				212.273.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			210.172.000,00				212.273.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	210.172.000,00			-	212.273.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	210.172.000,00			-	212.273.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	210.172.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		212.273.720,00
		SDN 009 BALIKPAPAN BARAT			602.868.000,00				608.896.680,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			602.868.000,00				608.896.680,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			602.868.000,00				608.896.680,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	602.868.000,00			-	608.896.680,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	602.868.000,00			-	608.896.680,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	602.868.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		608.896.680,00
		SDN 010 BALIKPAPAN BARAT			350.620.000,00				354.126.200,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			350.620.000,00				354.126.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			350.620.000,00				354.126.200,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	350.620.000,00			-	354.126.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	350.620.000,00			-	354.126.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	350.620.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		354.126.200,00
		SDN 011 BALIKPAPAN BARAT			329.820.000,00				333.118.200,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			329.820.000,00				333.118.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			329.820.000,00				333.118.200,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	329.820.000,00			-	333.118.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	329.820.000,00			-	333.118.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	329.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		333.118.200,00
		SDN 012 BALIKPAPAN BARAT			159.082.000,00				160.672.820,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			159.082.000,00				160.672.820,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			159.082.000,00				160.672.820,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	159.082.000,00			-	160.672.820,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	159.082.000,00			-	160.672.820,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	159.082.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160.672.820,00
		SDN 013 BALIKPAPAN BARAT			239.172.000,00				239.172.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			239.172.000,00				239.172.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			239.172.000,00				239.172.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	239.172.000,00			-	239.172.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	239.172.000,00			-	239.172.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	239.172.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		239.172.000,00
		SDN 014 BALIKPAPAN BARAT			276.696.000,00				279.462.960,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			276.696.000,00				279.462.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			276.696.000,00				279.462.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	276.696.000,00			-	279.462.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	276.696.000,00			-	279.462.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	276.696.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		279.462.960,00
		SDN 015 BALIKPAPAN BARAT			125.648.000,00				126.904.480,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			125.648.000,00				126.904.480,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			125.648.000,00				126.904.480,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	125.648.000,00			-	126.904.480,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	125.648.000,00			-	126.904.480,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	125.648.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		126.904.480,00
		SDN 016 BALIKPAPAN BARAT			278.096.000,00				280.876.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			278.096.000,00				280.876.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			278.096.000,00				280.876.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	278.096.000,00			-	280.876.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	278.096.000,00			-	280.876.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	278.096.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		280.876.960,00
		SDN 017 BALIKPAPAN BARAT			314.658.000,00				317.804.580,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			314.658.000,00				317.804.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			314.658.000,00				317.804.580,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	314.658.000,00			-	317.804.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	314.658.000,00			-	317.804.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	314.658.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		317.804.580,00
		SDN 018 BALIKPAPAN BARAT			347.458.000,00				350.932.580,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			347.458.000,00				350.932.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			347.458.000,00				350.932.580,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	347.458.000,00			-	350.932.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	347.458.000,00			-	350.932.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	347.458.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.932.580,00
		SDN 019 BALIKPAPAN BARAT			487.744.000,00				492.621.440,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			487.744.000,00				492.621.440,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			487.744.000,00				492.621.440,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	487.744.000,00			-	492.621.440,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	487.744.000,00			-	492.621.440,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	487.744.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		492.621.440,00
		SDN 020 BALIKPAPAN BARAT			478.944.000,00				483.733.440,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			478.944.000,00				483.733.440,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			478.944.000,00				483.733.440,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	478.944.000,00			-	483.733.440,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	478.944.000,00			-	483.733.440,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	478.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		483.733.440,00
		SDN 021 BALIKPAPAN BARAT			130.848.000,00				132.156.480,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			130.848.000,00				132.156.480,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			130.848.000,00				132.156.480,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	130.848.000,00			-	132.156.480,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	130.848.000,00			-	132.156.480,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	130.848.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		132.156.480,00
		SDN 022 BALIKPAPAN BARAT			156.210.000,00				157.772.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			156.210.000,00				157.772.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			156.210.000,00				157.772.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	156.210.000,00			-	157.772.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	156.210.000,00			-	157.772.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	156.210.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		157.772.100,00
		SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR			363.696.000,00				367.332.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			363.696.000,00				367.332.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			363.696.000,00				367.332.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	363.696.000,00			-	367.332.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	363.696.000,00			-	367.332.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	363.696.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		367.332.960,00
		SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR			359.058.000,00				362.648.580,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			359.058.000,00				362.648.580,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			359.058.000,00				362.648.580,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	359.058.000,00			-	362.648.580,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	359.058.000,00			-	362.648.580,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	359.058.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		362.648.580,00
		SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR			267.734.000,00				270.411.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			267.734.000,00				270.411.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			267.734.000,00				270.411.340,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	267.734.000,00			-	270.411.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	267.734.000,00			-	270.411.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	267.734.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		270.411.340,00
		SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR			128.448.000,00				129.732.480,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			128.448.000,00				129.732.480,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			128.448.000,00				129.732.480,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	128.448.000,00			-	129.732.480,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	128.448.000,00			-	129.732.480,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	128.448.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		129.732.480,00
		SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR			486.182.000,00				491.043.820,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			486.182.000,00				491.043.820,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			486.182.000,00				491.043.820,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	486.182.000,00			-	491.043.820,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	486.182.000,00			-	491.043.820,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	486.182.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		491.043.820,00
		SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR			503.982.000,00				509.021.820,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			503.982.000,00				509.021.820,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			503.982.000,00				509.021.820,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	503.982.000,00			-	509.021.820,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	503.982.000,00			-	509.021.820,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	503.982.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		509.021.820,00
		SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR			195.772.000,00				197.729.720,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			195.772.000,00				197.729.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			195.772.000,00				197.729.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	195.772.000,00			-	197.729.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	195.772.000,00			-	197.729.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	195.772.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		197.729.720,00
		SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR			104.248.000,00				105.290.480,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			104.248.000,00				105.290.480,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			104.248.000,00				105.290.480,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	104.248.000,00			-	105.290.480,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	104.248.000,00			-	105.290.480,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	104.248.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		105.290.480,00
		SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR			155.410.000,00				156.964.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			155.410.000,00				156.964.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			155.410.000,00				156.964.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	155.410.000,00			-	156.964.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	155.410.000,00			-	156.964.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	155.410.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		156.964.100,00
		SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR			257.972.000,00				260.551.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			257.972.000,00				260.551.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			257.972.000,00				260.551.720,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	257.972.000,00			-	260.551.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	257.972.000,00			-	260.551.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	257.972.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		260.551.720,00
		SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR			446.220.000,00				450.682.200,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			446.220.000,00				450.682.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			446.220.000,00				450.682.200,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	446.220.000,00			-	450.682.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	446.220.000,00			-	450.682.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	446.220.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.682.200,00
		SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR			984.650.000,00				994.496.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			984.650.000,00				994.496.500,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			984.650.000,00				994.496.500,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	984.650.000,00			-	994.496.500,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	984.650.000,00			-	994.496.500,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	984.650.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		994.496.500,00
		SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR			304.296.000,00				307.338.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			304.296.000,00				307.338.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			304.296.000,00				307.338.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	304.296.000,00			-	307.338.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	304.296.000,00			-	307.338.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	304.296.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		307.338.960,00
		SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR			152.010.000,00				152.010.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			152.010.000,00				152.010.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			152.010.000,00				152.010.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	152.010.000,00			-	152.010.000,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	152.010.000,00			-	152.010.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	152.010.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		152.010.000,00
		SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR			240.810.000,00				243.218.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			240.810.000,00				243.218.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			240.810.000,00				243.218.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	240.810.000,00			-	243.218.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	240.810.000,00			-	243.218.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	240.810.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		243.218.100,00
		SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR			152.610.000,00				154.136.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			152.610.000,00				154.136.100,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			152.610.000,00				154.136.100,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	152.610.000,00			-	154.136.100,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	152.610.000,00			-	154.136.100,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	152.610.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		154.136.100,00
		SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR			332.820.000,00				336.148.200,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			332.820.000,00				336.148.200,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			332.820.000,00				336.148.200,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	332.820.000,00			-	336.148.200,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	332.820.000,00			-	336.148.200,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	332.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		336.148.200,00
		SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR			226.572.000,00				228.837.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			226.572.000,00				228.837.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			226.572.000,00				228.837.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	226.572.000,00			-	228.837.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	226.572.000,00			-	228.837.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	226.572.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		228.837.720,00
		SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR			278.296.000,00				281.078.960,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			278.296.000,00				281.078.960,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			278.296.000,00				281.078.960,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	278.296.000,00			-	281.078.960,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	278.296.000,00			-	281.078.960,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	278.296.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		281.078.960,00
		SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR			261.934.000,00				264.553.340,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			261.934.000,00				264.553.340,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			261.934.000,00				264.553.340,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	261.934.000,00			-	264.553.340,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	261.934.000,00			-	264.553.340,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	261.934.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		264.553.340,00
		SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR			240.772.000,00				243.179.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			240.772.000,00				243.179.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			240.772.000,00				243.179.720,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	240.772.000,00			-	243.179.720,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	240.772.000,00			-	243.179.720,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	240.772.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		243.179.720,00
		SMPN 1 BALIKPAPAN			1.082.688.000,00				1.082.688.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.082.688.000,00				1.082.688.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.082.688.000,00				1.082.688.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.082.688.000,00			-	1.082.688.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.082.688.000,00			-	1.082.688.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.082.688.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.082.688.000,00
		SMPN 2 BALIKPAPAN			831.778.000,00				840.095.780,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			831.778.000,00				840.095.780,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			831.778.000,00				840.095.780,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	831.778.000,00			-	840.095.780,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	831.778.000,00			-	840.095.780,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	831.778.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		840.095.780,00
		SMPN 3 BALIKPAPAN			976.264.000,00				986.026.640,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			976.264.000,00				986.026.640,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			976.264.000,00				986.026.640,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	976.264.000,00			-	986.026.640,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	976.264.000,00			-	986.026.640,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	976.264.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		986.026.640,00
		SMPN 4 BALIKPAPAN			1.465.784.000,00				1.480.441.840,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.465.784.000,00				1.480.441.840,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.465.784.000,00				1.480.441.840,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.465.784.000,00			-	1.480.441.840,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.465.784.000,00			-	1.480.441.840,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.465.784.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.480.441.840,00
		SMPN 5 BALIKPAPAN			1.061.464.000,00				1.072.078.640,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.061.464.000,00				1.072.078.640,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.061.464.000,00				1.072.078.640,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.061.464.000,00			-	1.072.078.640,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.061.464.000,00			-	1.072.078.640,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.061.464.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.072.078.640,00
		SMPN 6 BALIKPAPAN			973.116.000,00				973.116.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			973.116.000,00				973.116.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			973.116.000,00				973.116.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	973.116.000,00			-	973.116.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	973.116.000,00			-	973.116.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	973.116.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		973.116.000,00
		SMPN 7 BALIKPAPAN			907.340.000,00				916.413.400,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			907.340.000,00				916.413.400,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			907.340.000,00				916.413.400,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	907.340.000,00			-	916.413.400,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	907.340.000,00			-	916.413.400,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	907.340.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		916.413.400,00
		SMPN 8 BALIKPAPAN			1.186.412.000,00				1.198.276.120,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.186.412.000,00				1.198.276.120,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.186.412.000,00				1.198.276.120,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.186.412.000,00			-	1.198.276.120,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.186.412.000,00			-	1.198.276.120,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.186.412.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.198.276.120,00
		SMPN 9 BALIKPAPAN			1.125.812.000,00				1.137.070.120,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.125.812.000,00				1.137.070.120,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.125.812.000,00				1.137.070.120,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.125.812.000,00			-	1.137.070.120,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.125.812.000,00			-	1.137.070.120,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.125.812.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.137.070.120,00
		SMPN 10 BALIKPAPAN			812.954.000,00				812.954.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			812.954.000,00				812.954.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			812.954.000,00				812.954.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	812.954.000,00			-	812.954.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	812.954.000,00			-	812.954.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	812.954.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		812.954.000,00
		SMPN 11 BALIKPAPAN			862.416.000,00				862.416.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			862.416.000,00				862.416.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			862.416.000,00				862.416.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	862.416.000,00			-	862.416.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	862.416.000,00			-	862.416.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	862.416.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		862.416.000,00
		SMPN 12 BALIKPAPAN			1.198.974.000,00				1.210.963.740,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.198.974.000,00				1.210.963.740,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.198.974.000,00				1.210.963.740,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.198.974.000,00			-	1.210.963.740,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.198.974.000,00			-	1.210.963.740,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.198.974.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.210.963.740,00
		SMPN 13 BALIKPAPAN			595.268.000,00				601.220.680,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			595.268.000,00				601.220.680,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			595.268.000,00				601.220.680,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	595.268.000,00			-	601.220.680,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	595.268.000,00			-	601.220.680,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	595.268.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		601.220.680,00
		SMPN 14 BALIKPAPAN			1.147.488.000,00				1.147.488.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.147.488.000,00				1.147.488.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.147.488.000,00				1.147.488.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.147.488.000,00			-	1.147.488.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.147.488.000,00			-	1.147.488.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	1.147.488.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.147.488.000,00
		SMPN 15 BALIKPAPAN			776.654.000,00				784.420.540,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			776.654.000,00				784.420.540,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			776.654.000,00				784.420.540,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	776.654.000,00			-	784.420.540,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	776.654.000,00			-	784.420.540,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	776.654.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		784.420.540,00
		SMPN 16 BALIKPAPAN			476.844.000,00				481.612.440,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			476.844.000,00				481.612.440,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			476.844.000,00				481.612.440,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	476.844.000,00			-	481.612.440,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	476.844.000,00			-	481.612.440,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	476.844.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		481.612.440,00
		SMPN 17 BALIKPAPAN			801.440.000,00				809.454.400,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			801.440.000,00				809.454.400,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			801.440.000,00				809.454.400,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	801.440.000,00			-	809.454.400,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	801.440.000,00			-	809.454.400,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	801.440.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		809.454.400,00
		SMPN 18 BALIKPAPAN			834.516.000,00				842.861.160,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			834.516.000,00				842.861.160,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			834.516.000,00				842.861.160,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	834.516.000,00			-	842.861.160,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	834.516.000,00			-	842.861.160,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	834.516.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		842.861.160,00
		SMPN 19 BALIKPAPAN			739.354.000,00				739.354.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			739.354.000,00				739.354.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			739.354.000,00				739.354.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	739.354.000,00			-	739.354.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	739.354.000,00			-	739.354.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	739.354.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		739.354.000,00
		SMPN 20 BALIKPAPAN			400.082.000,00				404.082.820,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			400.082.000,00				404.082.820,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			400.082.000,00				404.082.820,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	400.082.000,00			-	404.082.820,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	400.082.000,00			-	404.082.820,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	400.082.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		404.082.820,00
		SMPN 21 BALIKPAPAN			115.948.000,00				115.948.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			115.948.000,00				115.948.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			115.948.000,00				115.948.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	115.948.000,00			-	115.948.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	115.948.000,00			-	115.948.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	115.948.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115.948.000,00
		SMPN 22 BALIKPAPAN			777.592.000,00				785.367.920,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			777.592.000,00				785.367.920,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			777.592.000,00				785.367.920,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	777.592.000,00			-	785.367.920,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	777.592.000,00			-	785.367.920,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	777.592.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		785.367.920,00
		SMPN 23 BALIKPAPAN			620.506.000,00				626.711.060,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			620.506.000,00				626.711.060,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			620.506.000,00				626.711.060,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	620.506.000,00			-	626.711.060,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	620.506.000,00			-	626.711.060,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	620.506.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		626.711.060,00
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA			1.000.582.000,00				1.010.587.820,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.000.582.000,00				1.010.587.820,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.000.582.000,00				1.010.587.820,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.000.582.000,00			-	1.010.587.820,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.000.582.000,00			-	1.010.587.820,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	1.000.582.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.010.587.820,00
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH			964.122.000,00				974.090.460,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			964.122.000,00				974.090.460,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			964.122.000,00				974.090.460,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	964.122.000,00			-	974.090.460,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	964.122.000,00			-	974.090.460,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	964.122.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		974.090.460,00
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR			923.054.000,00				932.284.540,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			923.054.000,00				932.284.540,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			923.054.000,00				932.284.540,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	923.054.000,00			-	932.284.540,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	923.054.000,00			-	932.284.540,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	923.054.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		932.284.540,00
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN			1.172.100.000,00				1.183.821.000,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.172.100.000,00				1.183.821.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.172.100.000,00				1.183.821.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	1.172.100.000,00			-	1.183.821.000,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.172.100.000,00			-	1.183.821.000,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	1.172.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.183.821.000,00
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT			813.960.000,00				822.099.600,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			813.960.000,00				822.099.600,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			813.960.000,00				822.099.600,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	813.960.000,00			-	822.099.600,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	813.960.000,00			-	822.099.600,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	813.960.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		822.099.600,00
		TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN			183.572.000,00				185.407.720,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			183.572.000,00				185.407.720,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			183.572.000,00				185.407.720,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	183.572.000,00			-	185.407.720,00
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	183.572.000,00			-	185.407.720,00
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
			<i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	183.572.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		185.407.720,00
		SDN 034 BALIKPAPAN UTARA			477.706.000,00				482.483.060,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			477.706.000,00				482.483.060,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			477.706.000,00				482.483.060,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	477.706.000,00			-	482.483.060,00
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	477.706.000,00			-	482.483.060,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	477.706.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		482.483.060,00
		SMPN 24 BALIKPAPAN			321.634.000,00				321.634.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			321.634.000,00				321.634.000,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			321.634.000,00				321.634.000,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	321.634.000,00			-	321.634.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	321.634.000,00			-	321.634.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	321.634.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		321.634.000,00
		SMPN 25 BALIKPAPAN			734.240.000,00				741.582.400,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			734.240.000,00				741.582.400,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			734.240.000,00				741.582.400,00
1,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	734.240.000,00			-	741.582.400,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	734.240.000,00			-	741.582.400,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	1 Satuan Pendidikan	734.240.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		741.582.400,00
J U M L A H						834.714.999.000,00			1.010.903.580.464,00

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, sehingga Visi dan Misi Walikota Balikpapan serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Daerah tahun 2025. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja tahun 2025
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tatacara Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.

B. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk arah bagi program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam pembangunan bidang kesehatan Kota Balikpapan. Sebagai suatu dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan, maka wajar apabila Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja perangkat daerah diikuti proses pemantauan, evaluasi dan review bertahap atas pelaksanaannya/implementasinya.

Rencana Kerja merupakan juga komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target – target capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit organisasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus sinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra OPD.

Dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kerjasasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan perlu menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2025. Penetapan Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2025.

I.2 Landasan Hukum

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui pembangunan bidang kesehatan yang akan menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu perlu disusun rencana pembangunan bidang kesehatan yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran dengan

tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 –2021;
19. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Nomor 050/0460/Bappeda tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tanggal 09 Juli 2024;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancanagn Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan bagi masyarakat agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan saat penyusunanRKPD.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan target kinerja pada Sustainable Development Goals Support (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Penulisan penyusunan renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2023

Berisikan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Berisikan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan serta Program dan Kegiatan Usulan 2023

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

Berisikan kesimpulan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan saran Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun yang lalu

Dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025, diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan yakni Tahun 2024 yang diuraikan dalam tabel T.C 29 dan tabel T.C 30 yakni rekapitulasi hasil realisasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan pencapaian Renstra OPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam mengukur keberhasilan Program dan Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran.

Program dan kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap program dan kegiatan, antara lain :

Tabel T.C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kota Balikpapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
1.	02.											
1.	02.	01.			84,10	81,00	84,00	82,00	97,62%	84,05%	84,05%	100,00%
1.	02.	01.	2.	01.		85,61	-	-	-	85,50	85,50	100,00%
1.	02.	01.	2.	01.	0001.	1	-	-	-	1	1	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	01.	2.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,13		86,00	86,00	100,00%	87,13	87,13	100,00%
1.	02.	01.	2.	02.	0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinkes dan Puskesmas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.160		1.287	1.287	100,00%	23.702	23.702	100,00%
1.	02.	01.	2.	02.	0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Beriman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.100	1.875	89,29%	2.954	2.954	100,00%
1.	02.	01.	2.	02.	0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RS Sayang Ibu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			80	80	100,00%	1.680	1.680	100,00%
1.	02.	01.	2.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,05	83,96	84,00	84,00	100,00%	84,05	84,05	100,00%
1.	02.	01.	2.	06.	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	5	10	10	100,00%	5	5	100,00%
1.	02.	01.	2.	06.	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	16	10	10	100,00%	15	15	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	01.	2.	06.	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	-	8	8	100,00%	5	5	100,00%
1.	02.	01.	2.	06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	4	5	5	100,00%	4	4	100,00%
1.	02.	01.	2.	06.	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	9	10	10	100,00%	9	9	100,00%
1.	02.	01.	2.	06.	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	01.	2.	06.	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1	-	-	-	-	-	-
1.	02.	01.	2.	06.	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	300	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	01.	2.	06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	128	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	01.	2.	06.	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	01.	2.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,63		82,00	82,00	100,00%	81,63	81,63	100,00%
1.	02.	01.	2.	07.	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	-	6	6	100,00%	6	6	100,00%
1.	02.	01.	2.	07.	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21	3	1	1	100,00%	7	7	100,00%
1.	02.	01.	2.	07.	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	5	-	-	-	5	5	100,00%
1.	02.	01.	2.	07.	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	-	-	-	-	10	10	100,00%
1.	02.	01.	2.	07.	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	-	4	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kantor atau Bangunan Lainnya								
1.	02.	01.	2.	07.	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	3	-	-	-	-	-	#VALUE!
1.	02.	01.	2.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,69		86,00	82,00	95,35%	86,69	86,69	100,00%
1.	02.	01.	2.	08.	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	36	36	100,00%	12	12	100,00%
1.	02.	01.	2.	08.	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	100,00%	3	3	100,00%
1.	02.	01.	2.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	82,18	6,00	84,00	82,00	97,62%	82,18	82,18	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.	02.	01.	2.	09.	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	1	6	6	100,00%	6	6	100,00%
1.	02.	01.	2.	09.	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	294	137	243	243	100,00%	170	170	100,00%
1.	02.	01.	2.	09.	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	5	1	1	100,00%	5	5	100,00%
1.	02.	01.	2.	09.	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1	2	2	100,00%	1	1	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	01.	2.	09.	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	9	2	2	100,00%	4	4	100,00%
1.	02.	01.	2.	09.	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1	-	-	-	-	-	-
1.	02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
1.	02.	01.	2.	10.	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	30	30	30	30	100,00%	30	30	100,00%
1.	02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84,00	81,00	83,00	102,47%	82	82	100,00%
1.	02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan	100%	100%	96%	93%	96,88%	100%	100%	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Presentase Supras memenuhi Standar Kesehatan	65%	65,0%	65%	72%	110,77%	65%	65%	100,00%
1.	02.	02.	2.	01.	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	0,00	1	0	0,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	01.	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2	-	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	01.	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	-	-	-	-	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dikembangkan	-	1	1	1	100,00%	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3	2	2	2	100,00%	5	5	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	01.	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	4	4	100,00%	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	7	2	3	3	100,00%	6	6	100,00%
1.	02.	02.	2.	01.	0012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	-	3	3	3	100,00%	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.	0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	-	5	7	7	100,00%	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes dan RS)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20	28	797	797	100,00%	27	27	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	01.	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center	20	2	5	5	100,00%	2	2	100,00%
1.	02.	02.	2.	01.	0016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)	-	10	6	6	100,00%	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.	0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Paket)	-	11	11	11	100,00%	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.	0018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)	-	0,00	2	2	100,00%	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.	0019	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)	-	3	2	2	100,00%	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	01.	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20	5	1.267	1.019	80,43%	10	10	100,00%
1.	02.	02.	2.	01.	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4	-	-	-	-	6	6	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11935	10.880	10.944	10.838	99,03%	10904	10904	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11882	9.934	10.446	10.346	99,04%	10409	10409	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	02.	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11386	10.028	9.949	10.252	103,05%	9913	9913	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57826	48.918	49.030	48.157	98,22%	48775	48775	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100698	23.231	84.814	84.632	99,79%	84246	84246	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345358	338.586	440.792	391.273	88,77%	441073	441073	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42679	32.493	37.301	35.812	96,01%	39453	39453	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	02.	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64603	132.970	64.082	63.242	98,69%	64603	64603	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17552	22.233	17.412	19.279	110,72%	17552	17552	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	859	611	698	668	95,70%	718	718	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15184	12.361	14.580	15.885	108,95%	16794	16794	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19275	15.686	18.246	18.775	102,90%	16538	16538	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	02.	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	10.000	10	10	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	100	11	11	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	100	7	7	100,00%	2	2	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	2	4	4	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	34	3	3	100,00%	1	1	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	02.	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	60	5	5	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	70	4	4	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	60	7	7	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5000	100	5.000	2.584	51,68%	5000	5000	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40	100	33	56	169,70%	35	35	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Orang)	-	7	21	16	76,19%	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	02.	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	100	10	10	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	100	5	5	100,00%	2	2	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	100	12	12	100,00%	12	12	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah	-	18				-	-	-
1.	02.	02.	2.	02.	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	9	4	44,44%	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	02.	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	-	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2	8	8	8	100,00%	2	2	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27	27	27	27	100,00%	27	27	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	3	9	9	100,00%	3	3	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	28	0,00	28	24	85,71%	3	3	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	0,00	-	-	-	-	-	-
1.	02.	02.	2.	02.	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dari Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dari Pemberian Obat Massal)	-	-	16	6	37,50%	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	02.	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	-	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200	-	2489	2924	117,48%	1200	1200	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	180	-	-	-	-	180	180	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	300	-	300	300	100,00%	300	300	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	02.	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	5	-	4	4	100,00%	4	4	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	-	-	-	-	4	4	100,00%
1.	02.	02.	2.	02.	0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	-	-	-	-	-	-	-
1.	02.	02.	2.	02.	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	-	-	-	-	-	-	-
1.	02.	02.	2.	03.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	61,54%	54%	62%	62%	100,00%	61,54%	61,54%	100,00%
1.	02.	02.	2.	03.	0001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen)	-	300	1	1	100,00%	-	-	-
1.	02.	02.	2.	03.	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	20	9	9	100,00%	1	1	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	03.	0003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan (Unit)	-	5	5	5	100,00%	-	-	-
1.	02.	02.	2.	04.		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
1.	02.	02.	2.	04.	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	15	4	15	15	100,00%	15	15	100,00%
1.	02.	02.	2.	04.	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	28	4	28	28	100,00%	28	28	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	02.	2.	04.	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	28	10	28	28	100,00%	28	28	100,00%
1.	02.	02.	2.	04.	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	2	2	2	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	03.				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	88%	82%	84%	100%	119,05%	86%	86%	100,00%
1.	02.	03.	2.	01.		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)	88%	82%	84%	100%	119,05%	86%	86%	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	03.	2.	01.	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	4	2	2	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	03.	2.	01.	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	4	4	4	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	03.	2.	02.		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMK yang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMK yang kuantitasnya sesuai dengan standar)	85%	70%	75%	99%	132,00%	80%	80%	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	03.	2.	02.	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	2	2	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	03.	2.	02.	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10	1	10	10	100,00%	15	15	100,00%
1.	02.	03.	2.	02.	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	2	2	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	03.	2.	03.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)	78%	72%	74%	100%	135,14%	76%	76%	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	04.	2.	01.	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	45	3	3	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	04.	2.	01.	0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Sarana)	-	0	100	100	100,00%	-	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	04.	2.	01.	0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin (Sarana)	-	4	100	100	100,00%	-	-	-
1.	02.	04.	2.	02.		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan	90%	50%	-	-	-	88%	88%	100,00%
1.	02.	04.	2.	02.	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	2	-	-	-	1	1	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	04.	2.	02.	0002	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	-	3	-	-	-	-	-	-
1.	02.	04.	2.	03.		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	04.	2.	03.	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	5	6	6	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	04.	2.	04.		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan	90%	75%	80%	77%	96,25%	85%	85%	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	04.	2.	04.	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	100	8	8	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	04.	2.	05.		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	100%	100,00	100,00	70,00	70,00%	100%	100%	100,00%
1.	02.	04.	2.	05.	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	3,00	1,00	1,00	100,00%	1	1	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	04.	2.	06.		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa	90%	75%	80%	100%	125,00%	85%	85%	100,00%
1.	02.	04.	2.	06.	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	4	150	150	100,00%	150	150	100,00%
1.	02.	04.	2.	06.	0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (dokumen)	-	1	-	-	-	-	-	-
1.	02.	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	88%	80%	84,00	100,00	119,05%	86%	86%	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	05	2.	01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %	84%	100%	82,00	70,00	85,37%	83%	83%	100,00%
1.	02.	05	2.	01.	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	4	4	4	100,00%	3	3	100,00%
1.	02.	05	2.	02.		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS	100%	100%	100,00	100,00	100,00%	100%	100%	100,00%
1.	02.	05	2.	02.	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	79	2	2	100,00%	1	1	100,00%
1.	02.	05	2.	03.		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	100%	100%	100,00	100,00	100,00%	100%	100%	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02.	05	2.	03.	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1.040	1	1	100,00%	1	1	100,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Merujuk pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, terdapat beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi dalam proses pelaksanaan segenap program dan kegiatan, antara lain :

a. Masih belum optimalnya Capaian Indikator Derajat Kesehatan

1. Meningkatnya Angka Kematian Ibu

Terjadi peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana penyebab utama kematiannya adalah Hipertensi dimana dipengaruhi pada saat kehamilan ibu hamil dengan Kurang energi Kronis, Anemia, Perdarahan , tuberkulosis.

Tingginya angka kematian bayi (AKB) di Kota Balikpapan disebabkan oleh beberapa penyakit kondisi perinatal, pneumonia, diare, kelainan kongenital jantung, kelainan kongenital lainnya, dan penyakit saraf.

Rendahnya status gizi masyarakat di Kota Balikpapan disebabkan karena masih belum optimalnya penanganan kesehatan ibu dan anak. Masih rendahnya cakupan ASI eksklusif, cakupan bayi baru lahir mendapat IMD, cakupan bayi mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) juga menjadi penyebab rendahnya status gizi masyarakat. Selain itu rendahnya kualitas kesehatan lingkungan terutama air bersih dan jamban juga mempengaruhi status gizi masyarakat. Terjadi peningkatan prevalensi kasus gizi kurang dan kasus gizi buruk dari target, hal ini karena selama masa pandemi kegiatan posyandu tidak dilaksanakan sebagai upaya pengendalian penyebaran virus.

Pemantauan pertumbuhan dilakukan secara mandiri oleh orang tua balita sehingga kemungkinan juga adanya kesalahan pengukuran pencatatan.

2. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit

Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Balikpapan pada tahun 2023 ini mengalami penurunan, dimana insiden Rate Kasus DBD kota Balikpapan pada tahun 2023 adalah 138/100.000 turun dari 162/100.000 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan tetap dalam kondisi yang bersih melalui kegiatan 3 M plus yang optimal. Pemerintah Kota Balikpapan juga berkomitmen menyediakan tes diagnostik cepat Dengue NS1 yang didistribusikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam menstabilkan Angka Bebas Jentik (ABJ) juga berinovasi menerapkan Program 1 Rumah 1 Pengawas Jentik dari anggota keluarga masing-masing.

Untuk pengendalian penyakit TB baru pada tahun 2023 mengalami peningkatan karena adanya peningkatan upaya yaitu alat pendeteksi penambahan mesin TCM sehingga meningkatkan sensitivitas diagnosis TB Paru dipuskesmas, selain itu juga dilakukan penyisiran missing case di rs swasta yg juga berkontribusi meningkatkan capaian penemuan kasus.

Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat diatasi dengan Penguatan Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), peningkatan deteksi dini Testing Lacak Isolasi, penguatan surveilans, peningkatan kompetensi petugas kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan dukungan pemerintah/lintas sektor serta peningkatan upaya promotif dan preventif.

3. Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.

Rencana relokasi dan pembangunan Dinas Kesehatan serta Puskesmas. Puskesmas yang akan direlokasi yaitu Puskesmas Margasari, Puskesmas Gunung Sari Ulu dan Puskesmas Gunung Sari Ilir. Puskesmas yang akan dilakukan pembangunan yaitu Puskesmas Gunung Bahagia. Untuk Puskesmas Klandasan Ilir, Puskesmas Baru Ilir (Pembangunan dan Perluasan), dan Puskesmas yang dilakukan pembangunan baru yaitu Puskesmas Sepinggian Baru. Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu belum terpenuhinya IPAL di setiap puskesmas, masih belum cukupnya daya listrik dan jaringan internet di setiap puskesmas, masih belum cukupnya meubelair di setiap puskesmas, belum terpenuhinya sarana TPS di setiap puskesmas, dan belum terpenuhinya bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang sesuai standar, serta rumah dinas tenaga kesehatan di setiap puskesmas, serta Penguatan sistem penanganan kegawatdaruratan dan penyediaan sarana prasarana PSC 119.

Presentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas tidak mencapai target dikarenakan di Aplikasi ASPAK, jika ada 1 alat yang tidak bisa terpenuhi maka tidak bisa diadakan, dan ini mempengaruhi ketersediaan Sarana dan Prasarana baik Rumah Sakit maupun Puskesmas

Presentase Ketersediaan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang tidak mencapai target dikarenakan Rumah Sakit milik Pemerintah yang ada di kota Balikpapan belum memenuhi syarat Ketersediaan SDM minimal 4 Spesialis Dasar (Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kandungan, Spesialis Bedah, Spesialis Anak) dan 2 Spesialis Penunjang (Spesialis Patologi Klinik dan Spesialis Radiologi). RSKB Sayang Ibu belum memenuhi syarat tersebut, itu yang membuat tidak tercapainya target.

4. Untuk Perencanaan kebutuhan obat, vaksin, dan BHMP sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Penyediaannya menggunakan E katalog, jika tidak bisa dengan E katalog maka di lakukan Penunjukan langsung ataupun Tender sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Untuk pemenuhan alat kesehatan baik di Puskesmas maupun di Puskesmas Pembantu harus sesuai dengan Rencanan Kebutuhan Barang Unit (RKBU) yang diusulkan oleh Puskesmas. Selama semua alat kesehatan yang di perlukan oleh Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu ada di dalam RKBU ,maka Alat kesehatan yang diperlukan akan disediakan.

6. Pengelolaan sistem informasi kesehatan di puskesmas sudah optimal dengan menggunakan sistem e Puskesmas yang sudah terintegrasi
7. Masih beredarnya sediaan farmasi, makanan minuman yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikarenakan masih kurangnya tenaga pengawas serta kurangnya kemampuan petugas pengawas (DFI/PKP).
8. Monitoring Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi sudah selesai semua dilakukan , semua Puskesmas sudah melakukan reakreditasi. Begitu juga dengan Akreditasi Rumah Sakit.

b. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencapai UHC.

1. Melalui program prioritas Walikota terpilih Kota Balikpapan, Pemberian Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kelas III pada pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 26 membuat kota Balikpapan dapat mencapai UHC, yaitu 99,94% per Desember 2023
2. Belum optimalnya pemutakhiran Data Penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kota Balikpapan terkait perubahan status kependudukan serta perubahan status kesejahteraan.
3. Masih ditemukan penduduk yang seharusnya masuk dalam DTKS namun belum terdata karena belum memiliki Dokumen Kependudukan (KK dan KTP) yang umumnya adalah penduduk pendatang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yaitu berdasarkan indikator kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, seperti pada tabel TC.30 berikut:

Tabel T.C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Catatan Analisis				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	99,03%	100%	100%	100%	100%	99,03%	100%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	99,04%	100%	100%	100%	100%	99,04%	100%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	98,22%	100%	100%	100%	100%	98,22%	100%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan Pada	100%	99,79%	100%	100%	100%	100%	99,79%	100%	100%	100%	100%	Belum Tercapai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Berdasarkan hasil review capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 dan faktor - faktor yang mempengaruhinya, kajian Renstra Kementerian Kesehatan RI, kajian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan kajian RTRW dan KLHS Kota Balikpapan, maka isu - isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

a. Derajat Kesehatan Yang Belum Optimal

▪ Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu di Kota Balikpapan selama lima tahun terakhir (2016 - 2020) berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan sampai pada tahun 2020, namun mengalami peningkatan kembali dengan beberapa kasus kematian ibu hamil dan bersalin yang terpapar Covid - 19 khususnya pada tahun 2021. Kematian ibu yang berfluktuasi pada tahun 2021-2023 berjalan jauh melewati target Renstra Dinas Kesehatan disebabkan oleh perdarahan, eklamsi dan infeksi sebagai penyebab langsung serta gangguan sistem peredaran darah dan gangguan metabolic, namun yang harus diwaspadai adalah meningkatnya jumlah kematian karena penyakit tidak menular yang dialami oleh ibu hamil dan bersalin di samping adanya pandemi Covid - 19 yang berdampak pada beberapa kematian ibu hamil dan ibu bersalin. Kurangnya sarana dan prasarana persalinan khusus ibu bersalin dengan covid 19, antara lain kurangnya kamar bersalin khusus covid 19, ruang operasi khusus covid 19, dan ketakutan ibu hamil untuk melakukan Antenatal Care selama pandemic covid 19 karena takut tertular virus covid 19 juga menjadi prnyumbang kasus kematian ibu bersalin di Kota Balikpapan. Kematian juga didominasi oleh ibu usia produktif dan juga tinggi pada ibu dengan paritas antara 1-3, begitu pun tempat terjadinya kematian yang jauh lebih tinggi di RS dibanding dengan di puskesmas atau pun di rumah. Pergeseran penyebab kematian yang terjadi di Kota Balikpapan disebabkan karena lemahnya pengelolaan pada determinan antara maupun determinan jauh dari penyebab kematian ibu. Faktor 3 (tiga) terlambat juga masih menjadi penyebab utama. Pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan bertahap dilakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, hal ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan ibu nifas

▪ Angka Kematian Bayi

Kematian bayi di Kota Balikpapan juga masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 - 2021). Jumlah kematian bayi di Tahun 2023 sebanyak 39 kasus atau 3,8/1.000 KH pada Angka Kematian Bayi, yang mana jauh lebih tinggi dari target Angka Kematian Bayi pada Renstra Dinas Kesehatan yaitu 1/1.000 KH. Penyebab kematian bayi karena BBLR, asfiksia, peneumonia, sepsis, kelainan

congenital dan lain-lain. Kualitas kehamilan seorang ibu sangat menentukan kualitas janin yang dikandungnya. Begitu pun pemilihan pelayanan kesehatan mulai hamil hingga bersalin dan nifas, sangat menentukan kesehatan dan keselamatan bayinya. Oleh karena itu, faktor pengetahuan ibu, faktor gizi, kesehatan lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan dan faktor pendukung lainnya menjadi penting dalam upaya menurunkan kematian bayi.

- Morbiditas (kesakitan) pada Penyakit

Kondisi kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 - 2020) cukup memprihatinkan dengan beban ganda penyakit. Saat penyakit menular masih tinggi, di saat yang sama penyakit tidak menular juga semakin meningkat. Hal ini terjadi karena kondisi lingkungan yang belum kondusif untuk hidup sehat, disertai dengan perilaku hidup masyarakat yang tidak sehat. Bahkan beberapa kasus kematian ibu yang terjadi di Kota Balikpapan, bukan disebabkan oleh kehamilannya, tetapi akibat penyakit tidak menular yang dideritanya, seperti Penyakit Jantung, Diabetes Mellitus dan Hipertensi.

Untuk Tahun 2023 angka kesakitan mengalami peningkatan dari 78,88% pada tahun 2022 menjadi 83,82% pada tahun 2023 dikarenakan beberapa factor, salah satunya adalah Pandemi Covid 19 yang sudah melandai menyebabkan masyarakat memeriksakan kesehatannya, tetapi selain itu bisa juga dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatannya dengan penerapan protocol kesehatan yang sangat baik selama masa pandemic ini menjadi penyumbang terbesar juga dalam menurunkan angka kesakitan

- Status Gizi

Kondisi kurang gizi pada Balita di Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 - 2020) berfluktuasi dan Cakupan bayi dan balita dibawah garis merah dibandingkan dengan bayi dan balita yang datang ke posyandu (BGM/D) pada tahun 2023 sebesar 12,37%, meningkat signifikan bila dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah balita dengan berat badan kurang, dalam hal ini perlu mengintensifkan sosialisasi terkait pemberian Makan Bayi dan Anak serta Pola Asuh bagi anak Balita agar jumlah BGM dapat menurun

b. Komitmen Global dan Nasional dan Daerah pada bidang kesehatan

- Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari Milenium Development Goals (MDGs). SDGs berisi 17 tujuan transformative yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali dan terdapat 3 tujuan yang sangat terkait dengan kesehatan yaitu :

Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, termasuk di dalamnya mengatasi Gizi buruk.

Tujuan 3: Kesehatan untuk semua lapisan penduduk (usia).

Tujuan 6: Ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Saat ini Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalensi AIDS dan HIV, oleh karena itu SDGs menjadi suatu yang penting dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

▪ Balikpapan Kota Beriman

Secara umum kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan di bidang Kesehatan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan dan program prioritas sangat mendukung pembangunan kesehatan dan juga sangat berkesesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik aspek tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program strategis.

c. Sumber Daya Kesehatan yang masih kurang

Sumber daya manusia kesehatan di Kota Balikpapan masih menjadi masalah, dimana presentase Ketersediaan SDM RS yang tidak mencapai target dikarenakan RS milik Pemerintah yang ada di kota Balikpapan belum memenuhi syarat Ketersediaan SDM minimal 4 Spesialis Dasar (Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kandungan, Spesialis Anak dan Spesialis Bedah) dan 2 Spesialis Penunjang (Spesialis Patologi Klinik dan Spesialis Radiologi)

RSKB Sayang Ibu belum memenuhi syarat tersebut, itu yang membuat tidak tercapainya target. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan spesifik seperti dokter, dokter gigi, tenaga kefarmasian/apoteker, tenaga ahli gizi (nutrisionis), tenaga ahli sanitasi (sanitarian), tenaga laboratorium (analisis kesehatan), tenaga kesehatan masyarakat (penyuluh kesehatan masyarakat) dan lainnya. Persoalan berikutnya adalah distribusi tenaga tertentu yang kurang merata, tidak bersedia ditugaskan ke wilayah yang jauh dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Penyebab ketiga adalah tenaga yang tersedia, sebagian besar berstatus tenaga honorarium daerah, yang mempunyai hak berbeda dengan ASN, mereka diberi kewenangan terbatas padahal pada beberapa puskesmas seperti puskesmas perawatan lebih didominasi oleh jenis tenaga honorarium daerah tersebut. Selain itu, kompetensi tenaga dan juga kualitas sumber daya kesehatan kesehatan masih kurang.

d. Peran serta stakholder pada bidang kesehatan

Upaya meningkatkan peran serta stakeholder membutuhkan kualitas dan kuantitas petugas Promosi Kesehatan . Sumber daya Manusia Tenaga Promosi Kesehatan sudah tersedia di semua Puskesmas. Oleh karena itu perlu penambahan tenaga promosi kesehatan sebagai penggerak pemberdaya masyarakat

e. Kinerja dan akuntabilitas serta reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar

lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional, sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind-set*) dan pola budaya (*culture-set*) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

f. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Upaya peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dapat diatasi dengan penguatan Surveilans, penguatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan deteksi dini Testing, Lacak, Isolasi, peningkatan kompetensi petugas kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah / lintas sector serta peningkatan upaya promotive dan preventif

g. Jaminan Kesehatan Masyarakat (*Universal Health Coverage*)

Untuk kota Balikpapan dengan adanya Peraturan Wali kota No 26 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan kelas III, membuat kota Balikpapan bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 99,94% per Desember 2023.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan Kepala Daerah sesuai prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Beberapa sub kegiatan sesuai analisis kebutuhan mengalami perbedaan besaran pagu diantaranya adalah :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Besaran pagu sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN mengalami perbedaan karena menyesuaikan dengan perhitungan hasil analisis kebutuhan gaji dan tunjangan ASN

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Besaran pagu sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami

perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Besaran pagu sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD disesuaikan dengan realisasi tahun lalu dan estimasi kebutuhan tahun 2025

d. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Besaran pagu sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berkurang karena mempertimbangkan prioritas jumlah kendaraan dinas operasional yang harus diadakan

e. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Besaran pagu sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya berkurang karena pada tahun 2025 proses pembangunan masih diutamakan pada pembangunan RS Balikpapan Barat sedangkan RS Balikpapan Timur diperkirakan masih dalam proses pemenuhan dokumen administrasi pembangunan Rumah Sakit

f. Pembangunan Puskesmas

Besaran pagu sub kegiatan Pembangunan Puskesmas bertambah karena direncanakan ada penambahan satu puskesmas, yaitu Puskesmas Margasari.

g. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes dan RS Sayang Ibu)

Besaran pagu sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkurang karena pengadaan Alkes RS Sayang Ibu masih akan diutamakan pada alat-alat gawat darurat dan pengadaan alat kesehatan akan dilanjutkan ketika pembangunan RS akan selesai

h. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Besaran pagu Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan mengalami pengurangan karena pengadaan Vaksin DBD yang rencananya akan dilanjutkan pada tahun 2025 ditunda dan menunggu hasil reviu efektivitas pelaksanaan vaksin DBD 2024 dibandingkan dengan insiden rate kasus DBD.

Review rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2022 adalah seperti pada tabel T.C 31 berikut ini :

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,10 Nilai	317.277.360.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,10 Nilai	310.290.640.000	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	85,61 Nilai	200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN	85,61 Nilai	200.000.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,13 Nilai	169.200.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,13 Nilai	163.200.000.000	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1160 Orang/bulan	169.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1160 Orang/bulan	163.200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Tunjangan ASN					
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.05 Nilai	2.865.290.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.05 Nilai	2.449.255.000	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	15.000.000	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	270.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	270.000.000	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	600.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	500.000.000	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	350.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	283.965.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	30.000.000	
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.250.000.000	
9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.290.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.290.000	
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.63 Nilai	5.520.070.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.63 Nilai	4.949.385.000	
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	6 Unit	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	6 Unit	650.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Jabatan yang Disediakan			Kendaraan Dinas Jabatan		Jabatan yang Disediakan			
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 Unit	770.070.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 Unit	199.385.000	
3.	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000	
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	450.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	450.000.000	
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	2.650.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	2.650.000.000	
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.69 Nilai	1.650.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.69 Nilai	1.650.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	500.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.150.000.000	
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.18 Nilai	4.482.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.18 Nilai	4.482.000.000	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	294 Unit	2.200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	294 Unit	2.200.000.000	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	200.000.000	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	882.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	882.000.000	
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.050.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.050.000.000	
VII	Peningkatan Pelayanan BLUD	Balikpapan	Presentase komplain yang ditangani	100%	133.360.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Balikpapan	Presentase komplain yang ditangani	100%	133.360.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	30 Unit Kerja	133.360.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	30 Unit Kerja	133.360.000.000	
B.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai	415.760.832.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai	306.683.960.000	
I.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan	100%	247.309.519.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan	100%	156.693.968.000	
			Presentase Saprasmemenuhi Standar Kesehatan	65%				Presentase Saprasmemenuhi Standar Kesehatan	65%		
1.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	150.000.000.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	80.000.000.000	
2.	Pembangunan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	15.000.000.000	Pembangunan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	30.500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	6.000.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	6.000.000.000	
4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	4.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	4.500.000.000	
5.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	7 Unit	4.500.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	7 Unit	4.000.000.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes dan RS Sayang Ibu)	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	46.459.519.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	23.543.968.000	
7.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Balikpapan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	20 Unit	350.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Balikpapan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	20 Unit	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Regional/ Regional Maintainance Center					Regional/ Regional Maintainance Center			
8.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	800.000.000	
9.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	20.000.000.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	7.000.000.000	
II.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	166.451.313.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	148.164.992.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Balikpapan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11935 Orang	978.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Balikpapan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11935 Orang	650.000.000	
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Balikpapan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11882 Orang	250.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Balikpapan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11882 Orang	250.000.000	
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Balikpapan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11386 Orang	450.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Balikpapan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11386 Orang	450.000.000	
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balikpapan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57826 Orang	890.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balikpapan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57826 Orang	500.000.000	
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Balikpapan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100698 Orang	2.200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Balikpapan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100698 Orang	800.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Balikpapan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345358 Orang	2.437.096.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Balikpapan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345358 Orang	700.000.000	
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Balikpapan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42679 Orang	1.930.725.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Balikpapan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42679 Orang	700.000.000	
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Balikpapan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64603 Orang	275.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Balikpapan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64603 Orang	275.000.000	
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Balikpapan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17552 Orang	1.455.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Balikpapan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17552 Orang	600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	859 Orang	315.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	859 Orang	300.000.000	
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Balikpapan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15184 Orang	3.000.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Balikpapan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15184 Orang	850.000.000	
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Balikpapan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19275 Orang	647.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Balikpapan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19275 Orang	400.000.000	
13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	150.000.000	
15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	800.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	6.800.000.000	
16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	400.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	400.000.000	
17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	500.000.000	
18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	210.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	200.000.000	
20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	340.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	275.000.000	
21.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5000 Orang	315.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5000 Orang	315.000.000	
22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	150.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	150.000.000	
23.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca	1 Dokumen	125.000.000	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca	1 Dokumen	125.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Krisis Kesehatan			Pasca Krisis Kesehatan		Krisis Kesehatan			
24.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	2.150.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	2.000.000.000	
25.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	95.408.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	80.000.000.000	
26.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	300.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	300.000.000	
27.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	15.399.992.000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	15.399.992.000	
28.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen	25.175.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen	25.175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	4.950.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	4.950.000.000	
30.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	28 Unit	300.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	28 Unit	300.000.000	
31.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Balikpapan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1.750.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Balikpapan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1.750.000.000	
32.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Balikpapan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 Orang	300.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Balikpapan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 Orang	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Balikpapan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	180 Orang	200.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Balikpapan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	180 Orang	200.000.000	
34.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	300 Orang	200.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	300 Orang	150.000.000	
35.	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Balikpapan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	5 Tatanan	200.000.000	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Balikpapan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	5 Tatanan	200.000.000	
36.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	350.000.000	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	300.000.000	
37.	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	350.000.000	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	350.000.000	
38.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	250.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
III.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Balikpapan	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	61,54%	1.000.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Balikpapan	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	61,54%	1.000.000.000	
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.000.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.000.000.000	
IV.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	100%	1.000.000.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	100%	825.000.000	
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	15 Unit	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	15 Unit	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	28 Unit	100.000.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	28 Unit	100.000.000	
3.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	28 Unit	425.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	28 Unit	375.000.000	
4.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	375.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	250.000.000	
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Balikpapan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	88%	1.680.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Balikpapan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	88%	1.430.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memiliki Izin	90%		MANUSIA KESEHATAN		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memiliki Izin	90%		
I.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)	88%	230.000.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)	88%	230.000.000	
1.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	80.000.000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	80.000.000	
2.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	150.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMK yang ada di fasilitas kesehatan / Jumlah SDMK yang kuantitasnya sesuai dengan standar)	85%	200.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMK yang ada di fasilitas kesehatan / Jumlah SDMK yang kuantitasnya sesuai dengan standar)	85%	200.000.000	
1.	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	70.000.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	70.000.000	
2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	20.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	110.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	110.000.000	
III.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase SDM yang berkualitas (Jumlah SDM yang berkualitas/Jumlah SDM Keseluruhan)	78%	1.250.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase SDM yang berkualitas (Jumlah SDM yang berkualitas/Jumlah SDM Keseluruhan)	78%	1.000.000.000	
1.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	1.250.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	1.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
D.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Balikpapan	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	100%	1.440.000.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Balikpapan	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	100%	1.415.000.000	
I.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan -	100%	475.000.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan -	100%	450.000.000	
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	475.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	450.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II.	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan	90%	250.000.000	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan	90%	250.000.000	
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	250.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
III.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Balikpapan	Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK	100%	350.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Balikpapan	Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK	100%	350.000.000	
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	1 Dokumen	350.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	1 Dokumen	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			oleh Industri Rumah Tangga			Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		oleh Industri Rumah Tangga			
IV.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Balikpapan	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan	90%	90.000.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Balikpapan	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan	90%	90.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	90.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	90.000.000	
V.	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Balikpapan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	100%	75.000.000	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Balikpapan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	100%	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	75.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	75.000.000	
VI.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Balikpapan	Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa	90%	200.000.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Balikpapan	Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa	90%	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Balikipapan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 unit	200.000.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Balikipapan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 unit	200.000.000	
E.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Balikipapan	Persentase UKBM Aktif	88%	4.180.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Balikipapan	Persentase UKBM Aktif	88%	3.180.400.000	
I.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikipapan	Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %	84%	3.000.000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikipapan	Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %	84%	2.100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	3.000.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	2.100.000.000	
II.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Kebijakan GERMAS	100%	600.000.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Kebijakan GERMAS	100%	550.000.000	
1.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	600.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	550.000.000	
III.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	100%	580.400.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Balikpapan	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	100%	530.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Kabupaten/Kota					
1.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	580.400.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	530.400.000	
					740.338.592.000					623.000.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna (pelayanan kesehatan primer), peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Usulan ini diperoleh selain dari saran dan masukan melalui kotak saran yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, juga melalui rekapitulasi data pengaduan layanan yang berada pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, juga melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Forum OPD. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan terlihat pada tabel T.C 32 berikut:

Tabel T-C. 32**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Rencana dialokasikan di tahun 2025 karena mengikuti kemampuan keuangan daerah
2	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Margasari	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Rencana dialokasikan di tahun 2025 karena mengikuti kemampuan keuangan daerah
3	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Rencana dialokasikan di tahun 2026 karena mengikuti kemampuan keuangan daerah
4	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Rencana dialokasikan di tahun 2026 karena mengikuti kemampuan keuangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7
						daerah
5	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Gunung Sari Ilir	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Anggaran Pembangunan belum di alokasikan di Tahun Anggaran 2025, yang dianggarkan hanya Anggaran untuk Studi Kelayakan dan Dokumen Rancang Bangun Rinci
6	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Gunung Sari Ilir	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Anggaran Pembangunan belum di alokasikan di Tahun Anggaran 2025, yang dianggarkan hanya Anggaran untuk Studi Kelayakan dan Dokumen Rancang Bangun Rinci

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7
7	Pembangunan PSC	Kelurahan Mekarsari	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	1 Paket	6.000.000.000	Rencana Akan dialokasikan di Tahun Anggaran 2025
1	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	15.000.000.000	Rencana dialokasikan di tahun 2025 karena mengikuti kemampuan keuangan daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang kesehatan (RPJPK) 2005 – 2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat , bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi – tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu dan menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita.

Strategi pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan 2005 – 2025 adalah :

- Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan;
- Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah ;
- Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan;
- Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan.

RPJMN 2020 – 2024, sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan misi “ Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas”, Arah dan kebijakan provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tahun 2019-2023, pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga Kesehatan sesuai standar;
2. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta wabah sejak dini dengan penguatan sistem surveilliance melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
4. Peningkatan pencapaian derajat Kesehatan melalui promosi kesehatan dan

- membangun kemitraan dengan lintas sektor;
5. Peningkatan kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menindak lanjuti perwujudan visi dan misi tersebut sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan lebih terarah dan mengetahui hal – hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

3.2.2 Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, dirumuskan beberapa sasaran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) terdiri dari dua (2) yaitu :

1. Meningkatnya Angka Harapan Hidup
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan akhir Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024.

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Balikpapan

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
									623.000.000.000,00				796.688.896.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		84,1	310.326.640.000,00			84,15	350.155.096.000,00
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN		85,61	200.000.000,00			85,72	370.000.000,00
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	200.000.000,00			1	220.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
													9	10
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	0	-			0	-	
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Balikpapan	0	-			0	-	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Balikpapan	0	-			0	-	
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	0	-			0	-	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	0	-			0	-
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	0	-			1	150.000.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		87,13	163.200.000.000,00			87,55	186.120.000.000,00
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan		163.200.000.000,00	APBD			186.120.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		85,01	-			85,28	1.000.000.000,00
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikpapan	0	-	APBD		1000	1.000.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		84,05	2.485.255.000,00			84,08	3.151.819.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	2	15.000.000,00	APBD		2	16.500.000,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	4	270.000.000,00	APBD		5	297.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balikpapan	2	20.000.000,00	APBD		2	22.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	2	536.000.000,00	APBD		3	660.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	4	283.965.000,00	APBD		5	385.000.000,00
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Balikpapan	3	30.000.000,00	APBD		3	33.000.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	1	50.000.000,00	APBD		1	55.000.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	1	1.250.000.000,00	APBD		1	1.650.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	1	30.290.000,00	APBD		1	33.319.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		81,63	4.949.385.000,00			81,66	6.072.077.000,00
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Balikpapan	6	650.000.000,00	APBD		6	715.000.000,00
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikpapan	21	199.385.000,00	APBD		20	847.077.000,00
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Balikpapan	2	1.000.000.000,00	APBD		2	1.100.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Balikpapan	10	450.000.000,00	APBD		10	495.000.000,00
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Balikpapan	24	2.650.000.000,00	APBD		25	2.915.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,69	1.650.000.000,00			87,19	1.815.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	3	500.000.000,00	APBD		3	550.000.000,00
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	3	1.150.000.000,00			3	1.265.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD		82,18	4.482.000.000,00			82,43	4.930.200.000,00
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	6	150.000.000,00	APBD		6	165.000.000,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Balikpapan	294	2.200.000.000,00	APBD		305	2.420.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan	10	200.000.000,00	APBD		10	220.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	3	882.000.000,00	APBD		3	970.200.000,00
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	3	1.050.000.000,00	APBD		3	1.155.000.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Hasil Penilaian Kinerja BLUD		100	133.360.000.000,00			100	146.696.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.10	01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	28	29.360.000.000,00	APBD		28	32.296.000.000,00
1	02	01	2.10	01	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Beriman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1	92.000.000.000,00	APBD		1	101.200.000.000,00
1	02	01	2.10	01	Peningkatan Pelayanan BLUD RS Sayang Ibu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1	12.000.000.000,00	APBD		1	13.200.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		84	306.647.960.000,00			85	438.088.800.000,00
1	02	02	2,01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan		100	156.693.968.000,00			100	255.335.000.000,00
						Presentase Saprasmemnuhi Standar Kesehatan		65			70		
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	Balikpapan	2	80.000.000.000,00	APBD		2	165.000.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	Balikpapan	2	30.500.000.000,00	APBD	PKM Sepinggian Baru, PKM Margasari	1	16.500.000.000,00
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Balikpapan	1	6.000.000.000,00	APBD	PSC 119	0	-
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	Balikpapan	3	4.500.000.000,00	APBD		3	4.400.000.000,00
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	Balikpapan	7	4.000.000.000,00	APBD		8	4.950.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	Balikpapan	20	7.000.000.000,00	APBD		25	11.000.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSIA Sayang Ibu	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	Balikpapan	20	16.543.968.000,00	APBD		20	30.000.000.000,00
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	Balikpapan	20	350.000.000,00	APBD		20	385.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	Balikpapan	20	800.000.000,00	APBD		20	1.100.000.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan (Paket)	Balikpapan	4	7.000.000.000,00	APBD		4	22.000.000.000,00
1	02	02	2,02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan		100	148.128.992.000,00			100	180.528.800.000,00
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	11.935	650.000.000,00	APBD		11.935	1.075.800.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	11.882	250.000.000,00	APBD		11.882	275.000.000,00
1	02	02	2,02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	11.386	450.000.000,00	APBD		11.386	495.000.000,00
1	02	02	2,02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	57.826	500.000.000,00	APBD		57.826	979.000.000,00
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	100.698	800.000.000,00	APBD		100.698	2.420.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	345.358	700.000.000,00	APBD		345.358	2.680.000.000,00
1	02	02	2,02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	42.679	700.000.000,00	APBD		42.679	2.125.000.000,00
1	02	02	2,02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	64.603	275.000.000,00	APBD		64.603	302.500.000,00
1	02	02	2,02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	17.552	600.000.000,00	APBD		17.552	1.600.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	859	300.000.000,00	APBD		859	346.500.000,00
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	15.184	850.000.000,00	APBD		15.184	3.300.000.000,00
1	02	02	2,02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	Balikpapan	19.275	400.000.000,00	APBD		19.275	715.000.000,00
1	02	02	2,02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	Balikpapan	1	150.000.000,00	APBD		1	165.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi PendudukTerdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar (Dokumen)	Balikpapan	1	150.000.000,00	APBD		1	165.000.000,00
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	Balikpapan	1	6.800.000.000,00	APBD		1	880.000.000,00
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	Balikpapan	1	364.000.000,00	APBD		1	450.000.000,00
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	Balikpapan	1	500.000.000,00	APBD		1	550.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	1.000.000.000,00	APBD		1	1.300.000.000,00
1	02	02	2,02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Balikpapan	1	200.000.000,00	APBD		1	250.000.000,00
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	275.000.000,00	APBD		1	250.000.000,00
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	Balikpapan	5000	315.000.000,00	APBD		5000	350.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	Balikpapan	40	150.000.000,00	APBD		40	175.000.000,00
1	02	02	2,02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	125.000.000,00	APBD		1	150.000.000,00
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	Balikpapan	3	2.000.000.000,00	APBD		3	2.250.000.000,00
1	02	02	2,02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	Balikpapan	1	80.000.000.000,00	APBD		1	98.000.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Balikpapan	1	300.000.000,00	APBD		1	330.000.000,00
1	02	02	2,02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Balikpapan	1	12.499.992.000,00	APBD		1	15.000.000.000,00
1	02	02	2,02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSIA Sayang Ibu)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	Balikpapan	1	2.900.000.000,00	APBD		1	3.500.000.000,00
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	27	25.175.000.000,00	APBD		27	30.000.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	Balikpapan	3	4.950.000.000,00	APBD		3	6.000.000.000,00
1	02	02	2,02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Balikpapan	28	300.000.000,00	APBD		28	400.000.000,00
1	02	02	2,02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Balikpapan	1	1.750.000.000,00	APBD		1	1.850.000.000,00
1	02	02	2,02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	1200	300.000.000,00	APBD		1200	350.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	180	200.000.000,00	APBD		180	250.000.000,00
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Balikpapan	300	150.000.000,00	APBD		300	250.000.000,00
1	02	02	2,02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Balikpapan	5	200.000.000,00	APBD		5	250.000.000,00
1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Balikpapan	1	300.000.000,00	APBD		1	400.000.000,00
1	02	02	2,02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Balikpapan	1	350.000.000,00	APBD		1	400.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Balikpapan	1	250.000.000,00	APBD		1	300.000.000,00
1	02	02	2,03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		61,54	1.000.000.000,00			61,54	1.100.000.000,00
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	1.000.000.000,00	APBD		1	1.100.000.000,00
1	02	02	2,04		PENERBITAN IZIN RS KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan		100	825.000.000,00			100	1.125.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
													9	10
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	02	02	2,04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	Balikpapan	15	100.000.000,00	APBD		15	125.000.000,00	
1	02	02	2,04	0002	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	Balikpapan	28	100.000.000,00	APBD		28	150.000.000,00	
1	02	02	2,04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	Balikpapan	28	375.000.000,00	APBD		28	450.000.000,00	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2,04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	Balikpapan	1	250.000.000,00	APBD		1	400.000.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin		86	1.430.000.000,00			90	2.010.000.000,00
1	02	03	2,01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KAB/KOTA	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang diterbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)		88	230.000.000,00			90	275.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	2,01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	80.000.000,00	APBD		1	100.000.000,00
1	02	03	2,01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	150.000.000,00	APBD		1	175.000.000,00
1	02	03	2,02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMK yang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMK yang kuantitasnya sesuai dengan standar)		85	200.000.000,00			90	235.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	2,02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	70.000.000,00	APBD		1	85.000.000,00
1	02	03	2,02	0002	Pemenuhan Kebutuhan SDMK sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	Balikpapan	10	20.000.000,00	APBD		1	25.000.000,00
1	02	03	2,02	0003	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Balikpapan	1	110.000.000,00	APBD		1	125.000.000,00
1	02	03	2,03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SDMK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/ Jumlah SDMK Keseluruhan)		78	1.000.000.000,00			80	1.500.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	2,03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	Balikpapan	300	1.000.000.000,00	APBD		300	1.500.000.000,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan		100	1.415.000.000,00			100	1.585.000.000,00
1	02	04	2,01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, UMOT yang diterbitkan		100	450.000.000,00			100	500.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	04	2,01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	Balikpapan	1	450.000.000,00	APBD		1	500.000.000,00
1	02	04	2,02		PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS I TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS I TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA	Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan		90	250.000.000,00			90	300.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	04	2,02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	Balikpapan	1	250.000.000,00	APBD			300.000.000,00
1	02	04	2,03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR PIRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK		100	350.000.000,00			100	375.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	04	2,03	01	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	Balikpapan	1	350.000.000,00	APBD		1	375.000.000,00
1	02	04	2,04		PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan		90	90.000.000,00			95	110.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	04	2,04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	Balikpapan	1	90.000.000,00	APBD		1	110.000.000,00
1	02	04	2,05		PENERBITAN STICKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan		100	75.000.000,00			100	100.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	04	2,05	0001	Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	Balikpapan	1	75.000.000,00	APBD		1	100.000.000,00
1	02	04	2,06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa		90	200.000.000,00			95	200.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	04	2,06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri RumahTangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangkaTindak Lanjut Pengawasan (Unit)	Balikpapan	100	200.000.000,00	APBD		100	200.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif		86	3.180.400.000,00			90	4.850.000.000,00
1	02	05	2,01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN< KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %		84	2.100.000.000,00			85	3.500.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	05	2,01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	Balikpapan	1	2.100.000.000,00	APBD		1	3.500.000.000,00
1	02	05	2,02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS		100	550.000.000,00			100	750.000.000,00
1	02	05	2,02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	Balikpapan	1	550.000.000,00	APBD		1	750.000.000,00
1	02	05	2,03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya		100	530.400.000,00			100	600.000.000,00

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	Balikpapan	1	530.400.000,00	APBD		1	600.000.000,00

Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian target bidang kesehatan agar tetap sejalan dengan yang diuraikan pada SDG's, SPM, RPJMN, RPJMD Kota Balikpapan. Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2025. Harapan yang ingin dicapai adalah agar segenap program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian status kesehatan di Kota Balikpapan.

BAB IV

PENUTUP

Status kesehatan dan faktor penentu status kesehatan mengindikasikan berbagai area masalah kesehatan masyarakat yang harus memperoleh prioritas dalam pembangunan kesehatan. Rumusan Strategi dan Program yang berhasil dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan senantiasa dapat mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi antar unit-unit kerja jajaran kesehatan untuk mencapai tujuan Program Pembangunan khususnya bidang Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja merupakan hal penting yang perlu terus diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Rencana Kerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025.

.

.

C. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen rencana kerja yang disuse oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Penyusuna Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keungan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Perangkat Daerah disusun guna mengoperasionalkan Renstra Perangkat Daerah tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksud agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 terutama berpedoman Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Perangkat Daerah Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 Kota Balikpapan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-undang (lembar Negara RI nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 tahun 2024, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menguraikan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Balikpapan Nomor : 188.45-919/2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat dilihat pada pada Tabel 2-1

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja kinerja Sumber daya Air	%	57,48	60,43	105,13
2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	46,80	46,53	100,58
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	97,93	97,11	99,16

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	81,25	79,92	98,36
5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	65	94	144,62
6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	30,72	29,73	96,78
7	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	83,03	83,03	100

Sumber : LKjIP DPU Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran IKU dapat disimpulkan bahwa **rata-rata capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023 sebesar 106,38%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **“SANGAT TINGGI”** .

2.1.2 PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024, dan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2-2**.

TABEL 2-2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
KOTA BALIKPAPAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Poin	83,38	122.781.908.400	82,98	28.515.296.557	83,03	20.897.823.300	83,03	18.423.662.188	100%	88,16%	83,03	46.938.958.745	100%	38,23%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	88	111.481.908.400	80	28.515.296.557	82	20.897.823.300	82	18.423.662.188	100%	88,16%	82	18.423.662.188	93,18%	16,53%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan	Nilai	85,95	56.273.323.200	69	9.506.597.421	65	10.526.675.600	65	9.688.129.664	100%	92,03%	65	19.194.727.085	75,63%	34,11%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang	69	56.273.323.200	69	9.506.597.421	65	10.526.675.600	65	9.688.129.664	100%	92,03%	65	19.194.727.085	94,20%	34,11%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	83,48	0	83,5	0	70	195.000.000	70	169.895.000	100%	87,13%	70	169.895.000	83,85%	0,00%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Orang	350	50.000.000	0	0	70	50.000.000	100	49.895.000	143%	99,79%	100	49.895.000	28,57%	99,79%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Orang	70	150.000.000	0	0	70	145.000.000	70	120.000.000	100%	82,76%	70	120.000.000	100,00%	80,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai	85,7	8.846.919.000	100,00%	953.448.888	85,55	3.102.811.100	85,55	2.788.140.522	100%	89,86%	85,55	3.741.589.410	99,82%	42,29%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	45	125.000.000	9	24.194.500	6	24.984.800	8	22.869.330	133%	91,53%	8	47.063.830	17,78%	37,65%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	20	500.000.000	0	0	13	1.051.726.600	13	958.122.426	100%	91,10%	13	958.122.426	65,00%	191,62%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	242	2.175.000.000	6	411.003.565	61	721.617.500	153	649.907.630	251%	90,06%	153	1.060.911.195	63,22%	48,78%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	36	650.505.000	10	121.220.650	8	127.851.000	13	119.650.674	163%	93,59%	13	240.871.324	36,11%	37,03%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman Fasilitasi Kunjungan Tamu	Porsi	1.625	75.000.000	220	6.776.000	330	14.984.500	330	14.984.500	100%	100,00%	330	21.760.500	20,31%	29,01%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Kali	450	1.821.414.000	60	390.254.173	100	1.161.646.700	100	1.022.605.962	100%	88,03%	100	1.412.860.135	22,22%	77,57%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	Nilai	82,20	26.750.000.000	3	14.177.612.904	82,05	2.637.240.000	82,05	1.734.100.000	100%	65,75%	82,05	15.911.712.904	99,82%	59,48%
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	4	16.000.000.000	1	12.068.225.438	1	837.240.000	1	835.000.000	100%	0,00%	1	12.903.225.438	25,00%	80,65%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	125	2.750.000.000	35	640.841.950	25	1.800.000.000	25	899.100.000	100%	49,95%	25	1.539.941.950	20,00%	56,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Nilai	85,65	10.586.666.200	4	2.065.391.307	85,5	2.431.888.200	85,5	2.273.430.208	100%	93,48%	85,5	4.338.821.515	99,82%	40,98%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	48	2.081.616.000	36	333.916.395	48	494.480.500	48	454.000.665	100%	91,81%	48	787.917.060	100,00%	37,85%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	Orang	42	7.505.050.200	1	1.731.474.912	42	1.937.407.700	39	1.819.429.543	93%	39	3.550.904.455	92,86%		
			Jumlah Tenaga Profesional	Orang	3		1	3	3		100%		3	100,00%				
			Luasan Gedung Kantor yang dilayani	M2	2004,8		42	2004,8	2004,8		100%		2004,80	100,00%				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Nilai	81,25	9.025.000.000	5	1.812.246.037	81,1	2.004.208.400	81,1	1.769.966.794	100%	88,31%	81,1	3.582.212.831	99,82%	39,69%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	1.250.000.000	81	80.674.944	53	61.929.000	46	61.030.857	87%	98,55%	46	141.705.801	766,67%	11,34%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	58	2.250.000.000	45	546.767.348	53	665.639.832	53	452.346.772	100%	67,96%	53	999.114.120	91,38%	44,41%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	6	2.250.000.000	16	296.418.175	5	387.829.568	12	386.117.390	240%	99,56%	12	682.535.565	200,00%	30,33%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	8	1.550.000.000	19	345.715.350	9	388.810.000	9	372.747.545	100%	95,87%	9	718.462.895	112,50%	46,35%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.000.000.000	3	542.670.220	1	400.000.000	2	398.391.440	200%	99,60%	2	941.061.660	200,00%	94,11%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jenis	2	1.000.000.000	3	542.670.220	2	100.000.000	4	99.332.790	200%	99,33%	4	642.003.010	200,00%	64,20%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air			%	62,56	919.335.000.000	55,79	11.292.290.226	57,48%	44.790.295.000	60,43%	35.950.390.015	105%	80,26%	60,43%	35.950.390.015	0,97%	3,91%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%	70,59 %	919.335.000.000	55,88%	11.292.290.226	61,76%	44.790.295.000	67,65%	35.950.390.015,00	110%	80,26%	67,65 %	35.950.390.015	95,83%	3,91%
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	%	100%	904.335.000.000	79,17%	11.292.290.226	87,50%	44.790.295.000	95,83%	35.950.390.015,00	110%	80,26%	95,83 %	35.950.390.015	95,83%	3,98%
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	9	514.935.000.000	1	151.500.119	2	1.112.600.000	2	516.118.283,00	100%	46,39%	2	667.618.402	22,22%	0,13%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	Unit	4	246.000.000.000	1	2.155.652.000	1	32.100.000.000	1	23.992.187.886	100%	74,74%	1	26.147.839.886	25,00%	10,63%
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang dinormalisasi/restorasi	Titik	100	46.500.000.000	25	5.919.349.805	40	9.617.000.000	40	9.574.305.350	100%	99,56%	40	15.493.655.155	40,00%	33,32%
		Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	36	13.750.000.000	8	2.889.815.866	6	1.960.695.000	18	1.867.778.496	300%	95,26%	18	4.757.594.362	50,00%	34,60%
3	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir			%	45,48	1.630.827.500.000	47,25	103.411.282.505	46,80%	262.701.455.000	46,53%	210.983.687.582	99%	80,31%	46,53%	314.394.970.087	1,02%	19,28%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	54,26 %	1.630.827.500.000	53,06%	103.411.282.505	53,09%	262.701.455.000	53,47%	210.983.687.582	101%	80,31%	53,47 %	210.983.687.582	98,54%	12,94%
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	72,11 %	1.630.827.500.000	70,51%	103.411.282.505	70,56%	262.701.455.000	71,05%	210.983.687.582	101%	80,31%	71,05 %	210.983.687.582	98,53%	12,94%
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	8	15.050.000.000	23	5.576.404.664	5	980.000.000	5	885.345.960	100%	90,34%	5	6.461.750.624	62,50%	42,94%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Meter	12000	887.362.000.000	2.400	19.871.857.156	2250	172.620.000.000	2.250	132.788.886.008	100%	76,93%	2.250	152.660.743.164	18,75%	17,20%
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Meter	4800	425.750.000.000	4.800	12.819.560.749	1000	23.540.000.000	1.000	14.904.009.901	100%	63,31%	1.000	27.723.570.650	20,83%	6,51%
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	0	0	250	6.811.286.776	850	5.620.000.000	850	5.354.485.985	100%	95,28%	850	12.165.772.761	0,00%	0,00%
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (UPTD)	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	454000	112.000.000.000	86.000	10.907.315.849	83000	11.925.755.000	119.704	11.598.816.586	144%	97,26%	119.704	22.506.132.435	26,37%	20,09%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	6000	45.982.500.000	7.421	14.097.984.270	2250	20.557.250.000	2.250	19.172.917.492	100%	93,27%	2.250	33.270.901.762	37,50%	72,36%
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Meter	6000	49.707.500.000	2.000	21.391.916.356	1500	27.458.450.000	1.500	26.279.225.650	100%	95,71%	1.500	47.671.142.006	25,00%	95,90%
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor kesehatan lingkungan			%	98,53	721.500.000.000	98,53	13.447.714.184	97,93	31.280.163.300	97,11	29.266.823.652	99%	93,56%	97,11	42.714.537.836	98,56%	5,92%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	%	99,29%	660.000.000.000	98,54%	9.077.301.200	98,54%	15.288.459.000	99,51%	14.404.921.123	101%	94,22%	99,51%	14.404.921.123	100,22%	2,18%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	%	82,69 %	660.000.000.000	81,87%	9.077.301.200	82,05%	15.288.459.000	86,06%	14.404.921.123	105%	94,22%	86,06 %	14.404.921.123	104,08%	2,18%
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	7	3.200.000.000	2	924.246.837	7	798.959.000	3	407.658.909	43%	51,02%	3	1.331.905.746	42,86%	41,62%
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikakan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dokumen	4	600.000.000	0	0	5	595.750.000	15	592.693.075	300%	99,49%	15	592.693.075	375,00%	98,78%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaa n atau SPAM Tematik Tertentu	SR	2650	26.500.000.000	0	8.153.054.363	400	13.893.750.000	400	13.404.569.139	100%	96,48%	400	13.404.569.139	15,09%	50,58%
		PROGRAM PENGEMBA NGAN SISTEM DAN PENGELOLA AN PERSAMPAH AN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampaha n	%	98,36 %	41.900.000.000	97,82%	855.438.591	97,82%	9.704.131.400	97,96%	9.056.202.928	100%	93,32%	97,96 %	9.056.202.928	99,59%	21,61%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	%	71,16 %	41.900.000.000	41,82%	855.438.591	48,88%	9.704.131.400	45,22%	9.056.202.928,00	92%	93,32%	45,22 %	9.056.202.928	63,54%	21,61%
		Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	1.000.000.000	0,00	3.019.331	5	830.208.000	9	759.068.694	180%	91,43%	9	762.088.025	450,00%	76,21%
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	500.000.000	0,00	0	4	96.875.000	6	95.789.263	150%	98,88%	6	95.789.263	600,00%	19,16%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	2000	100.000.000	0	0	2000	8.777.048.400	2.000	8.201.344.971	100%	93,44%	2.000	8.201.344.971	100,00%	8201,34%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	97,53%	19.600.000.000	97,18%	3.514.974.393	97,10%	6.287.572.900	93,32%	4.183.959.193,00	96%	66,54%	93,32%	4.183.959.193	95,68%	21,35%
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)	%	92,98%	19.600.000.000	92,27%	3.514.974.393	92,29%	6.287.572.900	96,56%	4.183.959.193,00	105%	66,54%	96,56%	4.183.959.193	103,85%	21,35%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0,00%	0	0,00%	0	5	1.470.208.000	10	1.331.140.732	200%	90,54%	10	1.331.140.732	200,00%	0,00%
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	1051	2.900.000.000	88	405.165.277	350	3.446.875.000	350	3.255.235.213,00	100%	94,44%	350	3.660.400.490	33,30%	126,22%
		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	250	3.000.000.000	309	3.109.809.115	100	1.053.614.900	160	928.723.980,00	160%	88,15%	160	4.038.533.095	64,00%	134,62%
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	40	150.000.000	0	0	150	150.000.000	150	126.459.530,00	100%	84,31%	150	126.459.530	375,00%	84,31%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	4	450.000.000	0	0	2	166.875.000	4	164.140.146,00	200%	98,36%	4	164.140.146	100,00%	36,48%
5	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan			%	84,91	918.916.622.000	79,95	323.242.374.303	81,25%	501.037.720.019	79,92%	482.933.641.990	98%	96,39%	79,92%	806.176.016.293	0,94%	87,73%
		PROGRAM PENGEMBA NGAN PERMUKIM AN	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	%	81,82%	170.948.000.000	79,00%	219.970.531.176	76,36%	258.153.923.469	79,45%	253.678.448.967	104%	98,27%	79,45%	253.678.448.967	97,10%	148,40%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	67,74 %	170.948.000.000	77,41%	219.970.531.176	57,42%	258.153.923.469	62,16%	253.678.448.967	108%	98,27%	62,16 %	253.678.448.967	91,76%	148,40%
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	92.650	153.448.000.000	88,85	201.379.163.676	25000	180.257.470.000	25.000	177.219.399.852	100%	98,31%	25.000	378.598.563.528	26,98%	246,73%
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	7.385	10.000.000.000	11,6	18.122.346.500	3100	77.896.453.469	3.100	76.459.049.115	100%	98,15%	3.100	94.581.395.615	41,98%	945,81%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	20	67.356.000.000	13	2.519.515.224	18	6.561.628.000	16	1.960.433.977,00	89%	29,88%	20	4.479.949.201	100,00%	6,65%
		Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	10	3.300.000.000	2	524.765.820	2	637.500.000	2	619.592.340,00	100%	97,19%	10	1.144.358.160	100,00%	34,68%
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2,5	52.700.000.000	0	0	3,50	2.222.934.400	3,50	2.206.529.545,00	100%	99,26%	3	2.206.529.545	100,00%	4,19%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	8,70	97.350.000.000	1,53	11.137.305.622	8,55	35.084.375.000	8,05	33.934.503.632,00	94%	96,72%	9	45.071.809.254	100,00%	46,30%
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	8,50	109.191.622.000	8,89	32.640.492.676	12,8	89.236.732.000	15,46	84.970.468.063,00	121%	95,22%	9	117.610.960.739	100,00%	107,71%
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	17,65	63.100.000.000	6,50	11.800.501.381	31,4	75.384.375.000	58,65	73.055.675.848,00	187%	96,91%	18	84.856.177.229	100,00%	134,48%
		Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Meter	25150	29.450.000.000	3,65	4.689.287.652	6178	6.283.112.150	6.178,00	5.939.244.115,00	100%	94,53%	6.178	10.628.531.767	25%	36,09%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Meter	6	17.000.000.000	0,00	0	74	24.534.375.000	230	23.847.423.174,00	311%	97,20%	230	23.847.423.174	3833,33 %	140,28%
		Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Meter	18	29.800.000.000	3	3.586.836.993	8	6.984.375.000	0	0	0%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD)	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	Meter	220	2.750.000.000	45	638.044.075	40	509.000.000	40	491.669.459,00	100%	96,60%	40	1.129.713.534	18,18%	41,08%
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	44	23.330.000.000	7	519.913.975	12	2.429.765.000	14	2.229.652.870,00	117%	91,76%	14	2.749.566.845	31,82%	11,79%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	Meningkatnya keandalan bangunan gedung			Unit	125	316.110.000.000	68	57.745.676.697	65	173.920.334.600	94	164.039.015.631	145%	94,32%	94	221.784.692.328	75,20%	70,16%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan yang memiliki ijin	%	94,91%	316.110.000.000	92,80%	57.745.676.697	93,39%	173.920.334.600	92,57%	164.039.015.631	99%	94,32%	92,57%	164.039.015.631	97,54%	51,89%
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	97,77%	316.110.000.000	12,90%	57.745.676.697	96,11%	173.920.334.600	95,31%	164.039.015.631	99%	94,32%	95,31%	164.039.015.631	97,49%	51,89%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Penyelenggaraa n Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaran Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dokumen	5.100	2.410.000.000	129	518.408.197	1000	566.636.100	300	529.377.850	30%	93,42%	300	1.047.786.047	5,88%	43,48%
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan , Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/K ota	Dokumen	12	195.650.000.000	4	39.053.456.309	12	149.196.411.254	12	141.811.689.884	100%	95,05%	12	180.865.146.193	100,00%	92,44%
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/K ota yang Dilakukan Rehabilitasi,	Unit	38	77.650.000.000	65	15.259.382.091	5	20.061.379.246	5	17.650.683.797	100%	87,98%	5	32.910.065.888	13,16%	42,38%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
			Renovasi dan Ubahsui																
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	195	40.400.000.000	29	2.914.430.100	40	4.095.908.000	40	4.047.264.100	100%	98,81%	40	6.961.694.200	20,51%	17,23%	
7	Meningkatkanya pelayanan jasa konstruksi			%	37,90	8.050.000.000	29,12	588.957.920	30,72	1.952.375.000	29,73	1.816.105.925,00	97%	93,02%	29,73	2.405.063.845	78,43%	29,88%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100%	8.050.000.000	100,00%	588.957.920	100%	1.952.375.000	100,00%	1.816.105.925,00	100%	93,02%	100,00 %	1.816.105.925	100,00%	22,56%
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	17,20 %	7.050.000.000	5,49%	550.000.000	7,62%	1.754.875.000	6,33%	1.620.872.025,00	83%	92,36%	6,33%	1.620.872.025	36,82%	22,99%
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang	Orang	2000	5.800.000.000	200	300.000.000	300	895.000.000	300	893.652.300	100%	99,85%	300	1.193.652.300	15,00%	0,00%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1			Mengikuti Pelatihan															
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	500	1.250.000.000	100	250.000.000	100	859.875.000	100	727.219.725	100%	84,57%	100	977.219.725	100,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi jenis data dan informasi jasa konstruksi yang tersedia	%	100%	1.000.000.000	-	0	40%	197.500.000	50%	195.233.900,00	125%	98,85%	50%	195.233.900	50%	19,52%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2023 (APBD-PERUBAHAN)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraa n Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaran Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	10	1.000.000.000	-	0	2	197.500.000	3	195.233.900	150%	98,85%	3	195.233.900	150,00%	0,00%

Penentuan target kinerja dari program kegiatan didasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan tahun 2024, yaitu:

VISI KOTA	MISI KOTA
TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi 3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai 4. Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang Berwawasan Lingkungan 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Sumber : RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026

Misi Pertama : Pada hakikatnya pemerintahan yang baik mencakup beberapa prinsip utama yakni: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, kesempatan yang sama, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi yang strategis. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan perbedaan di antara mereka. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan berbagai upaya dari seluruh pemangku kepentingan khususnya sektor pemerintah itu sendiri. Dalam konteks ini tidak hanya pemerintah, namun meliputi tiga domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM. Mewujudkan daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram dengan tetap memprioritaskan perbaikan yang signifikan dalam sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan berjalannya reformasi birokrasi;

Misi Kedua : Pembangunan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, dimulai sejak individu berada pada usia dini sampai dengan usia produktif. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu diupayakan guna melahirkan dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mandiri, berdaya saing dan mengembangkan ekonomi lokal melalui kewirausahaan.

Misi Ketiga : Infrastruktur adalah kelengkapan dasar fisik kota. Infrastruktur perkotaan meliputi, antara lain, sistem drainase atau pengendalian banjir, air bersih atau air minum, persampahan, sanitasi atau limbah, jaringan jalan dan transportasi umum, listrik, gas, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan penting bagi masyarakat luas, kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur amat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari dan karenanya sangat penting bagi ekonomi perkotaan.

Misi Keempat : Nyaman dihuni adalah kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman menandakan kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta berwawasan lingkungan. Mewujudkan kota yang nyaman dihuni dan berwawasan lingkungan dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (green city) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (zero waste) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).

Misi Kelima : Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengolah sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Ekonomi kreatif adalah sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan jangka panjang. Industri kreatif ini dapat menjadi pilar utama dalam pembentukan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif ini sangatlah penting bagi Indonesia karena diyakini ekonomi kreatif akan memberikan dampak positif bagi kehidupan dan bernegara. Industri kreatif perlu dikembangkan karena industri kreatif dapat memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan dan menciptakan iklim bisnis yang positif.

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah :

- a. Kenaikan Indeks Satuan Barang
- b. Masih minimnya Rekanan yang mampu dari segi financial dan memiliki sarana peralatan yang lengkap.
- d. Masih minimnya tenaga sumber daya manusia yang berkualitas di Dinas Pekerjaan Umum
- e. Masih minimnya alat berat yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- f. Masih minimnya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tentang ke PU- an bagi Pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

2.1.4 Kebijakan/Tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak tercapainya kinerja program/kegiatan

- a. Diupayakan anggaran yang cukup dari berbagai sumber untuk membiayai kegiatan pembangunan
- b. Diupayakan penambahan tenaga SDM yang terampil untuk lingkup Dinas Pekerjaan umum
- c. Diupayakan penambahan alat berat untuk Dinas Pekerjaan Umum.
- d. Memperketat proses pengadaan barang dan jasa
- e. Mengupayakan pengiriman Pegawai untuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bidang ke PU-an

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan sektor pekerjaan umum dapat dilihat pada table 2-3. Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022, terdapat 1 target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan belum sesuai pencapaiannya dengan apa yang di tuangkan dalam RPJMD sedangkan 6 target indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan umum Kota Balikpapan telah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 KOTA BALIKPAPAN

No	Indikator	SFM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA DPU Kota Balikpapan			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum			82,03	83,00	84,00	78,73	77,71	78,78	
2	Presentase Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Air			54,02	55,79	57,48	54,02	54,41%	60,43	
3	Presentase Infrastruktur Sektor Penyehatan Lingkungan dalam Kondisi Baik			97,54	97,85	97,93	70	97,96%	97,11	
4	Presentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik			78,92	79,95	81,25	74,41	82,18%	79,92	
5	Jumlah Bangunan yang Memiliki SLF			6	45	65	15	68	94	
6	Presentase Pelayanan Jasa Konstruksi			27,32	29,12	30,72	27,92	28,37%	29,73	
7	Nilai SAKIP OPD			76,65	77	78	N/A	78,87	69	
8	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			N/A	27,00	28,75	N/A	27	27	
9	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan			55,88%	61,76	61,76	55,85	55,88%	67,65	
10	Presentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota			52,15%	53,09	53,09	52,15	53,06%	53,47	
11	Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak			96,79%	97,10	97,1	81,27	97,18%	93,39	
12	Presentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan			97,98%	98,54	98,54	98,36	98,54%	99,51	
13	Presentase Penyediaan Sarana Persampahan			97,82%	97,82	97,82	98,54	97,82%	97,96	
14	Presentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab			85,11%	87,36	87,36	89,25	85,36%	80	
15	Presentase Pelayanan Jalan Lingkungan			80%	76	78,18	81	79,00%	79,45	
16	Presentase Bangunan yang Memiliki Izin			92,38%	93,39	93,9	92,38%	92,80%	92,57	
17	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi			100%	100	100	100	100%	100	
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			78	82	82	78	82	82	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup dan budaya. Salah satu isu strategis yang dihadapi saat ini adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan, antara Kecamatan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Secara teoritik, kota merupakan mesin pertumbuhan ekonomi (the engine of economic growth), sehingga proses pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang lalu diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Isu dan permasalahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang akan dihadapi antara lain :

1. Penyediaan Prasarana Jalan
 - a. Kuantitas dan kualitas jalan: luas penyediaan jalan Kota Balikpapan masih kurang dari luas total wilayah kota. Fly over/underpasss belum terbangun pada persimpangan jalan yang padat. Selain itu, desain jalan dan persimpangan serta pedestrian yang memenuhi prinsip-prinsip jalan yang berkeselamatan (road safety) pun harus menjadi perhatian.
 - b. Konfigurasi jalan: jaringan jalan primer masih terganggu dan jaringan jalan sekunder belum terintegrasi.
 - c. Kondisi fisik jalan: cukup banyak ruas jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan, dari sisi lebar maupun pengaturan aksesnya.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kota Balikpapan sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kota Balikpapan saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/ genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir/ genangan adalah berkurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan

sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase dan desain teknis drainase yang bermasalah. Hingga tahun 2022, teridentifikasi sebanyak 88 titik yang masih berpotensi terjadi genangan. Untuk menangani permasalahan tersebut telah dilakukan intervensi program dan kegiatan, sehingga pada 88 titik telah dapat tertangani dengan menurunnya waktu genangan menjadi rata-rata di bawah 2 jam.

3. Masih Adanya deficit Air Baku untuk pemenuhan Air Minum sebesar 1000 liter/detik. Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum di Kota Balikpapan.
4. Terjadinya abrasi pantai di Kelurahan Manggar, Manggar Baru dan Sepinggian, untuk menanggulangi keadaan tersebut dibutuhkan Penyusunan Kajian Penyebab Abrasi dan Pembangunan Bangunan Penahan Abrasi.
5. Terdapat sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi rusak sebanyak 62,15%, dibutuhkan revitalisasi sarana dan prasarana persampahan.
6. Masih terdapat 4,40% atau 10.043 KK/RT yang melakukan praktek BABS (Buang Air Besar Sembarangan) sehingga dibutuhkan pembangunan Sarana dan prasarana sanitasi air limbah.
7. 7,62% bangunan belum memiliki izin, untuk itu diperlukan sosialisasi dan penyelenggaraan bangunan Gedung.
8. 27,42 Gedung Pemerintah yang sudah tidak layak karena kondisi atau status sewa.
9. Belum Optimalnya pembinaan Jasa Konstruksi di Kota Balikpapan, sehingga Kota Balikpapan tidak memiliki data-data penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen

perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dan untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan.

Dalam tahapan RPJMD tahun 2021-2026, RKPD tahun 2025 merupakan penggalan tahun kedua dari tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan. Dengan demikian, segala kebijakan yang akan dirumuskan pada tahun 2025 ini akan sangat mempengaruhi capaian pembangunan pada akhir periode RPJMD. Dengan adanya penekanan tersebut diharapkan program prioritas pada tahun 2025 akan memberikan fondasi dan dukungan yang positif pada pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan terbatasnya kemampuan fiskal keuangan daerah Kota Balikpapan, maka pada tahun 2025, penyusunan proram dan kegiatan prioritas harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan keuangan daerah. Oleh karena itu, program-program prioritas yang disertai target dan pagu indikatif sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran yang sejalan dengan tema pembangunan pada RKPD Tahun 2025. Untuk lebih jelas tentang Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhannya dapat terlihat pada Tabel 2.4. Tentang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 pada lampiran.

Tabel 2-4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Balikpapan

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan Berkualitas		Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan Berkualitas	86	1.214.514.646.000	Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan Berkualitas		Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan Berkualitas	86	943.927.420.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Balikpapan	IS 1: Presentase Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Air	60,87%	37.550.000.000	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Balikpapan	IS 1: Presentase Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Air	60,87%	27.320.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Balikpapan	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	67,65%	37.550.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Balikpapan	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	67,65%	27.320.500.000
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	95,83%	32.550.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	95,83%	22.050.000.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Balikpapan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman	1	4.500.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Balikpapan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman	1	5.000.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
			Pantai yang Disusun					Pantai yang Disusun		
	Pembebasan Lahan Bendali Wonorejo (Lanjutan)				1.000.000.000	Pembebasan Lahan Bendali Wonorejo (Lanjutan)				1.500.000.000
	Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Ampal				3.500.000.000	Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Ampal				3.500.000.000
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	50.000.000	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	50.000.000
	Honorarium Petugas Lapangan Alat Curah Hujan Kota Balikpapan				50.000.000	Honorarium Petugas Lapangan Alat Curah Hujan Kota Balikpapan				50.000.000
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Balikpapan	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	1	1.000.000.000	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Balikpapan	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	1	-
	Pengadaan Tanah Embung Aji raden (Tahap Persiapan)				1.000.000.000	Pengadaan Tanah Embung Aji raden (Tahap Persiapan)				-
	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Balikpapan	Jumlah polder/kolam retensi yang ditingkatkan	1	6.000.000.000	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Balikpapan	Jumlah polder/kolam retensi yang ditingkatkan	1	6.000.000.000
	Peningkatan Bendali Perumdis Kel. Gunung Samarinda Baru				3.500.000.000	Peningkatan Bendali Perumdis Kel. Gunung Samarinda Baru				3.500.000.000
	Peningkatan Bendali Wonorejo				2.500.000.000	Peningkatan Bendali Wonorejo				-
						Peningkatan Bendali Gang Kantil (Lanjutan)				2.500.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Balikpapan	Panjang sungai yang dinormalisasi/dir estorasi	3	10.000.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Balikpapan	Panjang sungai yang dinormalisasi/dir estorasi	3	8.000.000.000
	Padat Karya				3.000.000.000	Padat Karya				5.000.000.000
	Normalisasi Swakelola Karya Bakti TNI (Saluran Primer Ampal,				2.000.000.000	Normalisasi Swakelola Karya Bakti TNI (Saluran Sekunder 2 Manggar Kanan, Saluran Primer Lamaru dan Saluran Sekunder Sumber 13)				2.000.000.000
	Normalisasi Saluran se kota balikpapan				5.000.000.000	Normalisasi Saluran Sekunder Balikpapan Baru dan Normalisasi Saluran Sekunder Inhutani				1.000.000.000
						Normalisasi Saluran Sekota Balikpapan				6.478.867.000
						Normalisasi Drainase Jl. Mulawarman				
						Normalisasi Saluran Primer Puspyudo				
						Normalisasi Saluran Tersier Straat I				
						Normalisasi Bendali Blok II				
						Normalisasi Saluran Primer Sepingga I				
						Normalisasi Saluran Sekunder Pondok Karya Agung				
						Normalisasi Saluran Primer Manggar Kecil				
						Normalisasi Saluran Sekunder Straat 3				
						Normalisasi Saluran Sekunder Sepingga Besar				
						Normalisasi Saluran Sekunder Baru				
						Normalisasi Saluran Sekunder Taman Sepingga				
						Normalisasi Saluran Sekunder Perhubungan				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Normalisasi Saluran Primer Batakan Kecil				
						Normalisasi Drainase Jl. Ruhui Rahayu II				
						Normalisasi Drainase Jl. Asnawi Arbain				
						Normalisasi Saluran Primer Teritip				
						Normalisasi Drainase RT. 45 Kel. Graha Indah				
						Normalisasi Saluran Sekunder Sumber 14A				
						Normalisasi Drainase Jl. APT Pranoto				
						Normalisasi Saluran Kelurahan Klandasan Ilir				
						Normalisasi Saluran Lingkungan Kelurahan Karang Rejo				
						Normalisasi Drainase Jl. Jend. A. Yani dan Jl. Mayjend Sutoyo				
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Balikpapan	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	4	8.000.000.000	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Balikpapan	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	4	-
	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)	Balikpapan	Jumlah polder/kolam retensi yang terpelihara	8	3.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)	Balikpapan	Jumlah polder/kolam retensi yang terpelihara	8	3.000.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	58%	5.000.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	58%	5.270.500.000
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Balikpapan	Panjang Jaringan Irigasi yang Dibangun	58	5.000.000.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Balikpapan	Panjang Jaringan Irigasi yang Dibangun	58%	5.270.500.000
	Pembangunan Jaringan D.I Binjai				5.000.000.000	Pembangunan Jaringan D.I Binjai				5.000.000.000
	Supervisi Pembangunan Jaringan D.I Binjai				-	Supervisi Pembangunan Jaringan D.I Binjai				270.500.000
	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Tergenang Banjir	Balikpapan	IS 2: Presentase Penurunan Luas Genangan Banjir	45,92%	162.050.000.000	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Tergenang Banjir	Balikpapan	IS 2: Presentase Penurunan Luas Genangan Banjir	45,92%	147.554.883.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Balikpapan	Presentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53,58	162.050.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Balikpapan	Presentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53,58	147.554.883.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase drainase dalam kondisi baik	71,56	162.050.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase drainase dalam kondisi baik	71,56	147.554.883.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1	350.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1	578.670.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Dokumen Kajian Operasi dan Pemeliharaan Bangunan SDA Kota Balikpapan				350.000.000	Dokumen Kajian Operasi dan Pemeliharaan Bangunan SDA Kota Balikpapan				-
	Survey Kondisi Drainase Sekota Balikpapan				-	Survey Kondisi Drainase Sekota Balikpapan				429.550.000
						DED Drainase Jl. Letjend Soepratto				99.120.000
						Administrasi Perkantoran				50.000.000
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Balikpapan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2300	102.000.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Balikpapan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2300	42.000.000.000
	Saluran Sekunder Depsos Bawah				10.000.000.000	Saluran Sekunder Depsos Bawah				-
	Pembangunan Rumah Pompa Pengendalian Banjir Saluran Primer Klandasan				35.000.000.000	Pembangunan Rumah Pompa Pengendalian Banjir Saluran Primer Klandasan				35.000.000.000
	Saluran Sekunder Teritip I				5.000.000.000	Saluran Sekunder Teritip I				-
	Saluran Tersier Beller (Lanjutan)				2.500.000.000	Saluran Tersier Beller (Lanjutan)				2.500.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Saluran Sekunder Balikpapan Baru (Lanjutan)				40.000.000.000	Saluran Sekunder Balikpapan Baru (Lanjutan)				-
	Saluran Primer Sepinggan I				5.000.000.000	Saluran Primer Sepinggan I				-
	Saluran Primer Telindung				2.000.000.000	Saluran Primer Telindung				-
	Saluran Tersier Bangun Reksa (Lanjutan)				1.000.000.000	Saluran Tersier Sepala (Lanjutan)				1.097.110.000
	Saluran Tersier SD Negeri 24				1.500.000.000	Saluran Tersier Bangun Reksa (Lanjutan)				1.615.520.000
						Saluran Tersier SD Negeri 24				1.687.370.000
						Administrasi Kegiatan'				100.000.000
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Balikpapan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	800	6.500.000.000	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Balikpapan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	800	52.198.213.000
	Drainase Jl. Mulawarman				5.000.000.000	Drainase Jl. Mulawarman				-
	Saluran Tersier Pattimura				1.500.000.000	Saluran Tersier Pattimura				-
						Drainase Jl. A. Yani				10.000.000.000
						Supervisi Drainase Jl. A. Yani				449.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Saluran Sekunder Inhutani				10.000.000.000
						Supervisi Saluran Sekunder Inhutani				449.000.000
						Saluran Sekunder Depsos Bawah				5.000.000.000
						Supervisi Saluran Sekunder Depsos Bawah				270.500.000
						Drainase Jl. Mulawarman				4.000.000.000
						Supervisi Drainase Jl. Mulawarman				233.360.000
						Saluran Sekunder PE Kum				4.361.560.000
						Supervisi Saluran Sekunder PE Kum				233.360.000
						Drainase Jl. Sultan Hasanuddin (Lanjutan)				3.000.000.000
						Supervisi Drainase Jl. Sultan Hasanuddin (Lanjutan)				211.610.000
						Saluran Sekunder Selili				3.000.000.000
						Supervisi Saluran Sekunder Selili				211.610.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						PL Pokira (Konsolidasi 1M)				
						Saluran Tersier At-thoriq				5.000.000.000
						Supervisi Saluran Tersier At-thoriq				272.740.000
						Saluran Tersier Wonorejo				3.000.000.000
						Supervisi Saluran Tersier Wonorejo				187.740.000
						Drainase RT. 07 Kel. Damai Bahagia dan Saluran Tersier Tesoro				2.000.000.000
						Supervisi Drainase RT. 07 Kel. Damai Bahagia dan Saluran Tersier Tesoro				137.733.000
						AP				180.000.000
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Balikipapan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0	-	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Balikipapan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0	4.150.000.000
	PL Rehabilitasi Drainase				-	PL Rehabilitasi Drainase				-
						Saluran Primer Klandasan Kecil				1.628.820.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Supervisi Saluran Primer Klandasan Kecil				126.960.000
						Saluran Primer Sepinggan				1.000.000.000
						Supervisi Saluran Primer Sepinggan				97.110.000
						Drainase Jl. Yos Sudarso, Saluran Tersier RSS Damai dan Drainase RT. 34 Kel. Gn Sari Ilir				1.150.000.000
						Supervisi Drainase Jl. Yos Sudarso dan Saluran Tersier RSS Damai				97.110.000
						Administrasi Perkantoran				50.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (UPTD)	Balikpapan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	95000	23.200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (UPTD)	Balikpapan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	95000	16.675.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Balikpapan	Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun	1000	15.000.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Balikpapan	Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun	1000	26.715.000.000
						Kec. Balikpapan Utara				
						Drainase RT. 67, 25, 22, 21, 44, 39 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 67 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 25 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 22 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 21 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 44 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 39 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 32 Kel. Gunung Samarinda Baru				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase Jl. Padat Karya dan RT. 87 Kel. Muara rapak				
						Drainase RT. 87 Kel. Muara Rapak				
						Drainase Jl. Padat Karya Kel. Muara Rapak				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 1				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 1				
						Drainase RT. 07, 12, 54, 52, 51, 25, 40 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 07 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 07 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 12 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 54 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 52 Kel. Batu Ampar				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 51 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 25 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 40 Kel. Batu Ampar				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 2				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 2				
						Kec. Balikpapan Selatan				
						Drainase RT. 08, 10, 19 Kel. Damai Baru dan Drainase RT. 06 Kel. Sungai Nangka				
						Drainase RT. 06 Kel. Sungai Nangka				
						Drainase RT. 19 Kel. Damai Baru				
						Drainase RT. 08 dan RT. 10 Kel. Damai Baru				
						Drainase RT. 45 Kel. Sungai Nangka				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 49 Kel. Sepinggan Baru				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 3				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 3				
						Kec. Balikpapan Timur				
						Drainase RT. 02, 19, 26, 34 Kel. Lamaru				
						Drainase RT. 34 Kel. Lamaru				
						Drainase RT. 26 Kel. Lamaru				
						Drainase RT. 02 Kel. Lamaru				
						Drainase RT. 19 Kel. Lamaru				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 4				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 4				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 01, 11, 15, 31, 43 Kel. Manggar Baru				
						Drainase RT. 01 Kel. Manggar Baru				
						Drainase RT. 31 Kel. Manggar Baru				
						Drainase RT. 15 Kel. Manggar Baru				
						Drainase RT. 43 Kel. Manggar Baru				
						Drainase RT. 11 Kel. Manggar Baru				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 4				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 4				
						Drainase RT. 38 Kel. Manggar Baru				
						DED Drainase RT. 38 Kel. Manggar Baru				
						Supervisi Drainase RT. 38 Kel. Manggar Baru				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 4				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 4				
						Drainase RT. 22 Kel. Manggar				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 5				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 5				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 6				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket 6				
						PL PEMBANGUNAN SDA 2025				
						POKIR 2025				
						Abdulloh (6.775.000.000)				
						Drainase RT. 02 Kel. Batu Ampar				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 41 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 57 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 72 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 30 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 75 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 31 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 37 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 19 Kel. Batu Ampar				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket I				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket I				
						Drainase RT. 18 Kel. Batu Ampar				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 58 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 04 Kel Batu Ampar				
						Drainase RT. 73 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 68 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 70 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 29 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 50 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 32 Kel. Batu Ampar				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket II				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket II				
						Drainase RT. 69 Kel. Batu Ampar				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 07 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 54 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 15 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 36 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 52 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 20 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 59 Kel. Batu Ampar				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket III				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket III				
						Drainase RT. 32 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 23 Kel. Graha Indah				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 03 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 63 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 47 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 26 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 61 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 36 Kel. Batu Ampar				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket IV				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket IV				
						Alwi Al Qadri (1.075.000.000)				
						Drainase RT. 40 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 16 Kel. Kariangau				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 24 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 29 Kelurahan Baru Ulu				
						Drainase RT. 04 Kel. Kariangau				
						Drainase Jl. Mastora Kel. Kariangau				
						H. Haris (175.000.000)				
						Drainase RT. 24 Kel. Margo Mulyo				
						Hj. Suwarni (175.000.000)				
						Drainase RT. 02 Kel. Sepinggan				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket V				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket V				
						Andi Arif Agung (1.275.000.000)				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 47 Kel. Gunung Sari Ilir				
						Drainase RT. 46 Kel. Gunung Sari Ilir				
						Drainase RT. 44 Kel. Sumber Rejo				
						Drainase RT. 38 Kel. Gunung Sari Ilir				
						Drainase RT. 26 Kel. Sumber Rejo				
						Drainase RT. 17 Kel. Mekar Sari				
						Drainase RT. 24 Kel. Gunung Sari Ilir				
						Taufik Qul Rahman (350.000.000)				
						Drainase RT. 61 Kelurahan Baru Ilir				
						Drainase RT. 37 Kel. Baru Tengah				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket VI				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket VI				
						Doris Eko Rian Desyanto (525.000.000)				
						Drainase RT. 45 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 01 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 42 Kel. Klandasan Ulu				
						Fadlianoor (750.000.000)				
						Drainase RT. 46 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 34 Kelurahan Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 27 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 36 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Hj. Fitriati (350.000.000)				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 23 Kel. Baru Tengah				
						Drainase RT. 50 Kel. Margo Mulyo				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket VII				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket VII				
						Drs. Syarifuddin Oddang, MH (900.000.000)				
						Drainase RT. 24 dan 26 Kel. Muara Rapak				
						Drainase RT. 35 Kel. Muara Rapak				
						Drainase RT. 85 Kel. Muara Rapak				
						Drainase RT. 57 Kel. Graha Indah				
						Drainase Blok M2 RT. 13 Kel. Graha Indah				
						Suriani (800.000.000)				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 11 Kel. Manggar Baru				
						Drainase RT. 19 Kel. Lamaru				
						Drainase RT. 24 Kel. Manggar				
						Drainase RT. 87 Kel. Manggar				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket VIII				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Paket VIII				
						POKIR				
						Drainase RT. 47, 49 Kel. Sepinggan				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan I				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan I				
						Drainase RT. 52 Kel. Graha Indah				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan II				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan II				
						Drainase RT. 35, 31, 19, 44, 26 Kel. Batu Ampar dan Drainase RT. 32 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 35 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 31 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 19 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 44 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 32 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 26 Kel. Batu Ampar				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan III				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan III				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 16, 04 Kel. Kariangau, RT. 33, 29 Kel. Baru Ulu dan RT. 21 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 16 Kel. Kariangau				
						Drainase RT. 33 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 29 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 21 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 16 Kel. Kariangau				
						Drainase RT. 04 Kel. Kariangau				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan IV				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan IV				
						Saluran Sekunder Guntur Damai dan Drainase RT. 46 Kel. Gn Sari Ilir				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan V				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 18, 65 Kel. Batu Ampar, RT. 62 Kel. Klandasan Ilir, RT. 38 Kel. Gn Bahagia dan RT. 08 Kel. Sungai Nangka				
						Drainase RT. 62 Kel. Klandasan Ilir				
						Drainase RT. 18 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 65 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 38 Kel. Gn Bahagia				
						Drainase RT. 08 Kel. Sungai Nangka				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan VI				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan VI				
						Drainase RT. 61, 33, 56, 35 Kel. Baru Ilir dan RT. 30, 12 Kel. Margo Mulyo				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 61 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 33 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 56 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 35 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 30 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 12 Kel. Margo Mulyo				
						DED Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan VII				
						Supervisi Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan VII				
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Balikpapan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang ditingkatkan	1000	15.000.000.000	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Balikpapan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang ditingkatkan	1000	21.913.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 39, 24 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 39 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 24 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 27 Kel. Marga Sari				
						Drainase RT. 45, 40 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 45 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 40 Kel. Margo Mulyo				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 1				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 1				
						Drainase RT. 08, 17, 21 Kel. Sepinggan Baru				
						Drainase RT. 21 Kel. Sepinggan Baru				
						Drainase RT. 17 Kel. Sepinggan Baru				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 08 Kel. Sepinggan Baru				
						Drainase RT. 54, 15, 66, 10 Kel. Sepinggan				
						Drainase RT. 54 Kel. Sepinggan				
						Drainase RT. 15 Kel. Sepinggan				
						Drainase RT. 66 Kel. Sepinggan				
						Drainase RT. 10 Kel. Sepinggan				
						Drainase RT. 21 Kel. Sepinggan				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 2				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 2				
						Drainase RT. 35, 41, 07 Kel. Damai Bahagia				
						Drainase RT. 35 Kel. Damai Bahagia				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 41 Kel. Damai Bahagia				
						Drainase RT. 07 Kel. Damai Bahagia				
						Drainase RT. 05 dan RT. 06 Kel. Damai Baru				
						Drainase RT. 11, 04, 23 Kel. Sepinggan Raya				
						Drainase RT. 11 Kel. Sepinggan Raya				
						Drainase RT. 36 Kel. Sepinggan				
						Drainase RT. 04 Kel. Sepinggan				
						Drainase RT. 04 Kel. Sepinggan Raya				
						Drainase RT. 32 Kel. Sepinggan Raya				
						Drainase RT. 23 Kel. Sepinggan Raya				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 2				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 2				
						Drainase RT. 44, 02, 46 Kel. Teritip				
						Drainase RT. 44 Kel. Teritip				
						Drainase RT. 02 Kel. Teritip				
						Drainase RT. 46 Kel. Teritip				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 3				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 3				
						Drainase RT. 38, 27, 69, 83, 66 Kel. Manggar				
						Drainase RT. 38 Kel. Manggar				
						Drainase RT. 27 Kel. Manggar				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 69 Kel. Manggar				
						Drainase RT. 31 Kel. Teritip				
						Drainase RT. 83 Kel. Manggar				
						Drainase RT. 66 Kel. Manggar				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 4				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 4				
						Drainase RT. 03, 05 Kel. Damai				
						Drainase RT. 03 Kel. Damai				
						Drainase RT. 05 Kel. Damai				
						Drainase RT. 14 Kel. Damai				
						Drainase RT. 23 Kel. Damai				
						Drainase RT. 33, 35, 28, 29 Kel. Prapatan				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 33 Kel. Prapatan				
						Drainase RT. 34 Kel. Prapatan				
						Drainase RT. 35 Kel. Prapatan				
						Drainase RT. 28 Kel. Prapatan				
						Drainase RT. 29 Kel. Prapatan				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 6				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 6				
						Drainase RT. 34 Kel. Telaga Sari dan Drainase RT. 58 Kel. Klandasan Ilir				
						Drainase RT. 34 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 58 Kel. Klandasan Ilir				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 24, 26, 39, 12 Kel. Klandasan Ulu				
						Drainase RT. 24 dan RT. 26 Kel. Klandasan Ulu				
						Drainase RT. 39 Kel. Klandasan Ulu				
						Drainase RT. 12 Kel. Klandasan Ulu				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 5				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 5				
						Drainase RT. 21, 30, 33 Kel. Mekar Sari				
						Drainase RT. 21 Kel. Mekar Sari				
						Drainase RT. 30 Kel. Mekar Sari				
						Drainase RT. 33 Kel. Mekar Sari				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 01 Kel. Mekar Sari dan Penutup Drainase Jl. Jend. A. Yani				
						Drainase RT. 01 Kel. Mekar Sari				
						Penutup Drainase Jl. Jend. A. Yani				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 6				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 6				
						Drainase RT. 16, 25, Jl. Gn Rejo Kel. Gunung Sari Ulu				
						Drainase RT. 16 Kel. Gunung Sari Ulu				
						Drainase RT. 25 Kel. Gunung Sari Ulu				
						Drainase Jl. Gn Rejo Kel. Gunung Sari Ulu				
						Drainase RT. 59, 21, 17 Kel. Sumber Rejo				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 59 Kel. Sumber Rejo				
						Drainase RT. 21 Kel. Sumber Rejo				
						Drainase RT. 17 Kel. Sumber Rejo				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 7				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket 7				
						PL PENINGKATAN SDA 2025				
						POKIR 2025				
						Drainase RT. 43 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 55 Kel . Batu Ampar				
						Drainase RT. 76 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 51 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 46 Kel. Batu Ampar				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 22 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 12 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 60 Kel. Batu Ampar				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket I				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket I				
						Drainase RT. 42 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 13 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 09 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 16 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 52 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 21 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 44 Kel. Batu Ampar				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket II				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket II				
						Drainase RT. 17 Kel. Kariangau				
						Drainase RT. 40 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 40 Kel Baru Ulu				
						Drainase RT. 40 Kelurahan Baru Ulu				
						Drainase RT. 40 Kelu. Baru Ulu				
						Drainase RT. 18 Kel. Margasari				
						Drainase RT. 27 Kel. Margasari				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket III				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket III				
						Drainase RT. 04 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 33 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 16 Kel. Margasari				
						Drainase RT. 29 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 21 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 16 Kel. Kariangau				
						Drainase RT. 16 Kelurahan Kariangau				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket IV				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket IV				
						Drainase RT. 21 Kel. Gunung Sari Ilir				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 31 Kel. Gunung Sari Ilir				
						Drainase RT. 34 Kel. Gunung Sari Ilir				
						Drainase RT. 01 Kel. Gunung Sari Ulu				
						Drainase RT. 34 Kel. Gunung Sari Ulu				
						Drainase RT. 81 Kel. Karang Rejo				
						Drainase RT. 04 dan 13 Kel. Karang Jati				
						Drainase RT. 28 Kel. Mekar Sari				
						Drainase RT. 26 Kel. Mekar Sari				
						Drainase RT. 01 Kel. Mekar Sari				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket V				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket V				
						Drainase RT. 51 Kel. Sumber Rejo				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 47 Kel. Sepinggan				
						Drainase RT. 18 Kel. Damai				
						Drainase RT. 24 Kelurahan Telaga Sari				
						Drainase RT. 63 Kel. Klandasan Ilir				
						Drainase RT. 48 Kel. Klandasan Ilir				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket VI				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket VI				
						Drainase RT. 36 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 45 Kel. Klandasan Ilir				
						Drainase RT. 39 Kel. Klandasan Ulu				
						Drainase RT. 24 Kel. Telaga Sari				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 28 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 29 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 02 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 04 Kel. Telaga Sari				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket VII				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket VII				
						Drainase RT. 25 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 38 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 42 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 08 Kel. Klandasan Ulu				
						Drainase RT. 34 Kel. Klandasan Ulu				
						Drainase RT. 22 Kel. Klandasan Ulu				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 26 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 62 Kel. Klandasan Ilir				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket IX				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket IX				
						Drainase RT. 49 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 34 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 11 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 68 Kel. Graha indah				
						Drainase RT. 30 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 41 Kel. Graha Indah				
						Drainase Blok K1 RT. 13 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 64 Kel. Graha Indah				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket X				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket X				
						Drainase RT. 09 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 33 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 28 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 32 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 06 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 06 Kelurahan Baru Ulu				
						Drainase RT. 28 Kelurahan Gunung Samarinda Baru				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 04 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XI				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XI				
						Drainase RT. 07 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 31 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 32 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 34 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 04 Kelurahan Gunung Samarinda Baru				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 07 Kelurahan Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 31 Kelurahan Gunung Samarinda Baru				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XII				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XII				
						Drainase RT. 32 Kelurahan Gunung Samarinda Baru				
						Drainase RT. 36 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Drainase Jl. Rambai Kel. Gunung Samarinda				
						Drainase RT. 64 Kel. Karang Joang				
						Drainase RT. 35 Kel. Gunung Samarinda Baru				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 31 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Drainase Jl. Waduk Wonorejo Kel. Gunung Samarinda Baru				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XIII				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XIII				
						Drainase RT. 10 Kel. Sumber Rejo				
						Drainase RT. 50 Kel. Sumber Rejo				
						Drainase RT. 14 Kel. Damai				
						Drainase RT. 11 Kel. Damai				
						Drainase RT. 33 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 54 Kel. Sumber Rejo				
						Drainase RT. 18 Kel. Batu Ampar				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 30 Kel. Batu Ampar				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XIV				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XIV				
						Drainase RT. 58 Kel. Sepinggan				
						Drainase RT. 46 Kel. Sungai Nangka				
						Drainase RT. 32 Kel. Sepinggan Baru				
						Drainase RT. 46 Kel. Gunung Bahagia				
						Drainase RT. 29 Kel. Sepinggan Baru				
						Drainase RT. 33 Kel. Karang Rejo				
						Drainase RT. 17 Kel. Sumber Rejo				
						Drainase RT. 13 Kel. Mekar Sari				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XV				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XV				
						Drainase RT. 12 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 61 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 33 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 12 Kelurahan Baru Ilir				
						Drainase RT. 49 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 33 Kelurahan Baru Ilir				
						Drainase RT. 28 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 28 Kelurahan Baru Ilir				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XVI				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XVI				
						Drainase RT. 56 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 16 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 35 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 24 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 27 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 27 Kelurahan Baru Ilir				
						Drainase RT. 41 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 25 Kel. Baru Ilir				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XVII				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XVII				
						Drainase RT. 18 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 18 Kelurahan Margo Mulyo				
						Drainase RT. 18 Kel Margo Mulyo				
						Drainase RT. 30 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 37 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 18 Kelu. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 18 Kelur. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 18 Kelura. Margo Mulyo				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XVIII				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XVIII				
						Drainase RT. 18 Kelurahan. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 25 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 48 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 48 Kelurahan Margo Mulyo				
						Drainase RT. 30 Kelurahan Margo Mulyo				
						Drainase RT. 48 Kel Margo Mulyo				
						Drainase RT. 37 Kelurahan Baru Ilir				
						Drainase RT. 12 Kel. Margo Mulyo				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XIX				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Paket XIX				
						Saluran Sekunder Sepinggan Baru (Lanjutan)				
						Drainase RT. 05 dan RT. 06 Kel. Damai Baru				
						Drainase RT. 07 dan RT. 22 Kel. Sungai Nangka				
						Saluran Tersier Wonorejo				
						Supervisi Saluran Sekunder Sepinggan Baru (Lanjutan)				
						POKIR				
						Drainase RT. 45 Kel. Klandasan Ilir, RT. 39, 42, 08, 34, 22 Kel. Klandasan Ulu, RT. 24, 02, 04, 38 Kel. Telaga Sari dan Saluran Tersier Gunung Pasir RT. 17				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 45 Kel. Klandasan Ilir				
						Drainase RT. 39 Kel. Klandasan Ulu				
						Drainase RT. 24 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 02 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 04 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 38 Kel. Telaga Sari				
						Drainase RT. 42 Kel. Klandasan Ulu				
						Drainase RT. 08 Kel. Klandasan Ulu				
						Drainase RT. 34 Kel. Klandasan Ulu				
						Drainase RT. 22 Kel. Klandasan Ulu				
						Saluran Tersier Gunung Pasir RT. 17				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan I				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan I				
						Drainase RT. 04, 73, 42, 52, 54, 27, 67 Kel. Batu Ampar dan RT. 23 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 04 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 73 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 42 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 52 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 54 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 27 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 67 Kel. Batu Ampar				
						Drainase RT. 23 Kel. Graha Indah				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan II				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan II				
						Drainase RT. 17 Kel. Kariangau, RT. 40 Kel. Baru Ulu, RT. 18, 16 Kel. Marga Sari, RT. 47, 21 Kel. Gn Sari Ilir dan RT. 14 Kel. Mekar Sari				
						Drainase RT. 17 Kel. Kariangau				
						Drainase RT. 40 Kel. Baru Ulu				
						Drainase RT. 18 Kel. Marga Sari				
						Drainase RT. 16 Kel. Marga Sari				
						Drainase RT. 47 Kel. Gn Sari Ilir				
						Drainase RT. 21 Kel. Gn Sari Ilir				
						Drainase RT. 14 Kel. Mekar Sari				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan III				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan III				
						Drainase RT. 11, 13, 28 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 11, 13 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 28 Kel. Graha Indah				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan IV				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan IV				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 51 Kel. Klandasan Ilir, RT. 18 Kel. Damai, RT. 12 Kel. Karang Rejo, RT. 17 Kel. Muara Rapak, RT. 23, 20 Kel. Graha Indah, RT. 33 Kel. Karang Rejo, RT. 13 Kel. Mekar Sari dan Penutup Drainase RT. 45 Kel. Gn Samarinda				
						Drainase RT. 51 Kel. Klandasan Ilir				
						Drainase RT. 18 Kel. Damai				
						Drainase RT. 12 Kel. Karang Rejo				
						Drainase RT. 17 Kel. Muara Rapak				
						Penutup Drainase RT. 45 Ke. Gn Samarinda				
						Drainase RT. 23 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 20 Kel. Graha Indah				
						Drainase RT. 33 Kel. Karang Rejo				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 13 Kel. Mekar Sari				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan V				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan V				
						Drainase RT. 56 Kel. Gn Bahagia, RT. 38 Kel. Karang Rejo, RT. 12, 28, 24, 27 Kel. Baru Ilir, dan RT. 18, 48 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 56 Kel. Gn Bahagia				
						Drainase RT. 38 Kel. Karang Rejo				
						Drainase RT. 12 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 28 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 24 Kel. Baru Ilir				
						Drainase RT. 27 Kel. Baru Ilir				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Drainase RT. 18 Kel. Margo Mulyo				
						Drainase RT. 48 Kel. Margo Mulyo				
						DED Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan VI				
						Supervisi Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan VI				
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan	Balikpapan	IS 3: Presentase infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	98,31%	76.950.000.000	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan	Balikpapan	IS 3: Presentase infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	98,31%	49.725.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Balikpapan	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	97,39%	9.850.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Balikpapan	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	97,39%	8.650.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses dan sanitasi)	92,76%	9.850.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses dan sanitasi)	92,76%	8.650.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Balikpapan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	7	1.200.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Balikpapan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	7	2.450.000.000
	Kajian Lingkungan IPAL Komunal Sepinggian Raya				500.000.000	Kajian Lingkungan IPAL Komunal Sepinggian Raya				800.000.000
	Kajian Lingkungan Pembangunan IPAL Graha Indah				100.000.000	Kajian Lingkungan Pembangunan IPAL Graha Indah				-
	Kajian Lingkungan IPAL Sumber				500.000.000	Kajian Lingkungan IPAL Sumber				800.000.000
	Kajian Lingkungan Pembangunan IPAL KM.7				100.000.000	Kajian Lingkungan Pembangunan IPAL KM.7				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	DED Pembangunan IPAL Graha Indah				-	DED Pembangunan IPAL Graha Indah				-
	DED Pembangunan IPAL KM.7				-	DED Pembangunan IPAL KM.7				-
						Masterplan IPAL Komunal Perumahan Balikpapan Baru				-
						DED Pembangunan SPALDS Se Kota Balikpapan (timur selatan, barat tengah, utara kota)				-
						Pendataan SPM Air Limbah dan Air Minum (Swakelola)				450.000.000
						Pembuatan Aplikasi Pendataan SPM				100.000.000
						Naskah Akademik Revisi Perda Air Limbah				-
						AP				-
						Kajian RISPALD				-
						Penyusunan Jakstrada Air Limbah Domestik Kota Balikpapan				300.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Balikpapan	Jumlah Penambahan Rumah Tangga yang Terlayani melalui SPALD-T Skala Permukiman	50	1.550.000.000	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Balikpapan	Jumlah Penambahan Rumah Tangga yang Terlayani melalui SPALD-T Skala Permukiman	50	-
	Peningkatan IPAL Margasari				1.250.000.000	Peningkatan IPAL Margasari				-
	Supervisi Peningkatan IPAL Margasari				300.000.000	Supervisi Peningkatan IPAL Margasari				-
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Balikpapan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	100	3.600.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Balikpapan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	100	900.000.000
	Pembangunan IPAL KM. 7				1.500.000.000	Pembangunan IPAL KM. 7				-
	Pembangunan IPAL Graha Indah				1.500.000.000	Pembangunan IPAL Graha Indah				800.000.000
	Supervisi Pembangunan IPAL KM. 7				300.000.000	Supervisi Pembangunan IPAL KM. 7				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Supervisi Pembangunan IPAL Graha Indah				300.000.000	Supervisi Pembangunan IPAL Graha Indah				100.000.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Balikpapan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100	200.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Balikpapan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100	200.000.000
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Balikpapan	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	150	3.300.000.000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Balikpapan	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	150	5.100.000.000
	Pembangunan Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)				3.000.000.000	Pembangunan Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)				4.800.000.000
	Supervisi Pembangunan Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)				300.000.000	Supervisi Pembangunan Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)				300.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Balikpapan	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	99,05%	5.700.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Balikpapan	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	99,05%	1.350.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Balikpapan	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	82,49%	5.700.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Balikpapan	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	82,49%	1.350.000.000
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Balikpapan				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Balikpapan			100.000.000
						Pembangunan instalasi pemanenan air hujan (Karya Bakti)				100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	3	900.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	3	700.000.000
	Perencanaan Jaringan Distribusi Air Minum Berdasarkan Cakupan Wilayah Sesuai Dengan Kapasitas Air Bersih yang Diterima dari Waduk Sepaku Semoi				400.000.000	Perencanaan Jaringan Distribusi Air Minum Berdasarkan Cakupan Wilayah Sesuai Dengan Kapasitas Air Bersih yang Diterima dari Waduk Sepaku Semoi				-
	DPPT Pembebasan Lahan IPA dan Reservoar Sepaku-Semoi				500.000.000	DPPT Pembebasan Lahan IPA dan Reservoar Sepaku-Semoi				-
	DED Jaringan Sumur Dalam Sepinggian (Lokasi Perkim)				-	DED Jaringan Sumur Dalam Sepinggian (Lokasi Perkim)				100.000.000
	Revisi RISPAM				-	Revisi RISPAM				300.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Kajian Kapasitas Sumur Dalam (Hibah ESDM)				-	Kajian Kapasitas Sumur Dalam (Hibah ESDM)				300.000.000
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Balikpapan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	400	4.800.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Balikpapan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	400	650.000.000
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Perum Bukit Batuah				4.600.000.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Perum Bukit Batuah				-
	Supervisi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Perum Bukit Batuah				200.000.000	Supervisi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Perum Bukit Batuah				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Peningkatan Jaringan SPAM Sumur Dalam Kel.GSU				-	Peningkatan Jaringan SPAM Sumur Dalam Kel.GSU				550.000.000
	Supervisi Peningkatan Jaringan SPAM Sumur Dalam Kelurahan Gunung Sari Ulu				-	Supervisi Peningkatan Jaringan SPAM Sumur Dalam Kelurahan Gunung Sari Ulu				100.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Balikpapan	Presentase penyediaan sarana persampahan	98%	61.400.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Balikpapan	Presentase penyediaan sarana persampahan	98%	39.725.000.000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase kapasitas sarana persampahan	63,82%	61.400.000.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase kapasitas sarana persampahan	63,82%	39.725.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	11	1.600.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	6	375.000.000
	Kajian Lingkungan TPST Kelurahan Graha Indah				100.000.000	Kajian Lingkungan TPST Kelurahan Graha Indah				-
	Kajian Lingkungan TPST Kecamatan Balikpapan Kota				100.000.000	Kajian Lingkungan TPST Kecamatan Balikpapan Kota				-
	Kajian Lingkungan Pembangunan/Pengembangan Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk/Rumah Kompos/TPS3R/TPST di Kota Balikpapan				100.000.000	Kajian Lingkungan Pembangunan/Pengembangan Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk/Rumah Kompos/TPS3R/TPST di Kota Balikpapan				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Kajian Lingkungan Pembangunan TPS Limbah B3				100.000.000	Kajian Lingkungan Pembangunan TPS Limbah B3				-
	Kajian Optimalisasi Pengembangan Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk/Rumah Kompos/TPS3R/TPST di Kota Balikpapan				500.000.000	Kajian Optimalisasi Pengembangan Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk/Rumah Kompos/TPS3R/TPST di Kota Balikpapan				-
	DED TPST Kelurahan Graha Indah				100.000.000	DED TPST Kelurahan Graha Indah				
	DED TPST Kecamatan Balikpapan Kota				100.000.000	DED TPST Kecamatan Balikpapan Kota				
	DED Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan				100.000.000	DED Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan				-
	DED Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan				100.000.000	DED Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	DED Pembangunan/Pengembangan Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk/Rumah Kompos/TPS3R/TPST di Kota Balikpapan				100.000.000	DED Pembangunan/Pengembangan Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk/Rumah Kompos/TPS3R/TPST di Kota Balikpapan				75.000.000
	Pra Desain Pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kawasan Perkantoran Jl. Ruhui Rahayu I				200.000.000	Pra Desain Pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kawasan Perkantoran Jl. Ruhui Rahayu I				-
	Kajian Lingkungan MRF Gunung Bahagia				-	Kajian Lingkungan MRF Gunung Bahagia				-
	FS TPST Kecamatan Balikpapan Timur				-	FS TPST Kecamatan Balikpapan Timur				-
	DED TPS dan Landasan Kontainer Kota Balikpapan (Base on Usulan Warga)				-	DED TPS Kota Balikpapan (Base on Usulan Warga)				100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	DED Rehab Workshop TPA Manggar				-	DED Landasan Kontainer Kota Balikpapan (Base on Usulan Warga)				100.000.000
						DED Rehab Workshop TPA Manggar				-
						DED Posko Kebersihan Kota Balikpapan				100.000.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Balikpapan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100	200.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Balikpapan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Rakernis Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				200.000.000	Rakernis Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				-
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Balikpapan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000	33.500.000.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Balikpapan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000	28.350.000.000
	TPST / PDU Kelurahan Graha Indah				12.000.000.000	TPST / PDU Kelurahan Graha Indah				10.000.000.000
	TPST Kecamatan Balikpapan Kota				20.000.000.000	TPST Kecamatan Balikpapan Kota				13.150.000.000
	Pembangunan/Pengembangan Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk/Rumah Kompos/TPS3R/TPST di Kota Balikpapan				1.000.000.000	Pembangunan/Pengembangan Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk/Rumah Kompos/TPS3R/TPST di Kota Balikpapan				-
	Supervisi TPST Kelurahan Graha Indah				200.000.000	Supervisi TPST Kelurahan Graha Indah				250.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Supervisi TPST Kecamatan Balikpapan Kota				200.000.000	Supervisi TPST Kecamatan Balikpapan Kota				250.000.000
	Supervisi Pembangunan/Pengembangan Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk/Rumah Kompos/TPS3R/TPST di Kota Balikpapan				100.000.000	Supervisi Pembangunan/Pengembangan Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk/Rumah Kompos/TPS3R/TPST di Kota Balikpapan				-
	Pembangunan MRF Gunung Bahagia				-	Pembangunan MRF Gunung Bahagia				4.500.000.000
	Supervisi Pembangunan MRF Gunung Bahagia				-	Supervisi Pembangunan MRF Gunung Bahagia				200.000.000
	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Balikpapan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	15300	26.100.000.000	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Balikpapan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	15300	11.000.000.000
	TPS Limbah B3 di TPA Manggar				4.000.000.000	TPS Limbah B3 di TPA Manggar				
	Pembangunan Rumah Kompos di TPA Manggar				800.000.000	Pembangunan Rumah Kompos di TPA Manggar				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Optimalisasi Kolam Lindi di TPA Manggar				1.000.000.000	Optimalisasi Kolam Lindi di TPA Manggar				500.000.000
	Pembangunan Taman Bermain di TPA Manggar				750.000.000	Pembangunan Taman Bermain di TPA Manggar				
	Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan				1.000.000.000	Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan				500.000.000
	Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan				1.000.000.000	Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan				1.000.000.000
	TPST Kelurahan Karang Joang (KM.12) (Lanjutan)				10.000.000.000	TPST Kelurahan Karang Joang (KM.12) (Lanjutan)				8.400.000.000
	Pembangunan Workshop dan Pagar di Pool Kendaraan TPA Manggar (Lanjutan)				6.000.000.000	Pembangunan Workshop dan Pagar di Pool Kendaraan TPA Manggar (Lanjutan)				
	Supervisi TPS Limbah B3 di TPA Manggar				200.000.000	Supervisi TPS Limbah B3 di TPA Manggar				
	Supervisi Pembangunan Rumah Kompos di TPA Manggar				50.000.000	Supervisi Pembangunan Rumah Kompos di TPA Manggar				100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Supervisi Pembangunan Taman Bermain di TPA Manggar				50.000.000	Supervisi Pembangunan Taman Bermain di TPA Manggar				-
	Supervisi Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan				150.000.000	Supervisi Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan				100.000.000
	Supervisi Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan				150.000.000	Supervisi Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan				100.000.000
	Supervisi Lanjutan PDU Kelurahan Karang Joang (KM.12)				400.000.000	Supervisi Lanjutan PDU Kelurahan Karang Joang (KM.12)				200.000.000
	Supervisi Pembangunan Workshop dan Pagar di Pool Kendaraan TPA Manggar				400.000.000	Supervisi Pembangunan Workshop dan Pagar di Pool Kendaraan TPA Manggar				-
	Supervisi Optimalisasi Kolam Lindi di TPA Manggar				150.000.000	Supervisi Optimalisasi Kolam Lindi di TPA Manggar				100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Balikpapan	IS 4: Presentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	83,76%	673.025.000.000	Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Balikpapan	IS 4: Presentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	83,76%	446.802.393.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Balikpapan	Presentase jalan dalam kondisi mantab	91,47%	673.025.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Balikpapan	Presentase jalan dalam kondisi mantab	91,47%	446.802.393.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase jalan dalam kondisi baik	76,30%	626.525.000.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Presentase jalan dalam kondisi baik	76,30%	410.302.393.000
			Presentase jembatan dalam kondisi baik	93%	46.500.000.000			Presentase jembatan dalam kondisi baik	93%	36.500.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5	31.200.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5	61.700.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	DED Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Balikpapan				1.000.000.000	DED Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Balikpapan				1.000.000.000
	Studi Kelayakan Jalan Daksa Tembus Perumahan Paradiso				200.000.000	Studi Kelayakan Jalan Daksa Tembus Perumahan Paradiso				200.000.000
	Pembebasan Lahan Jalan Soeprapto				10.000.000.000	Pembebasan Lahan Jalan Soeprapto				20.000.000.000
	Pembebasan Lahan Jembatan Penghubung Sumber-Kariangau				20.000.000.000	Pembebasan Lahan Jembatan Penghubung Sumber-Kariangau				10.000.000.000
	Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Stadion-SMP 23				-	Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Stadion-SMP 23				30.000.000.000
	Kajian Trase Jalan Tembus Gunung Binjai-KM.23				-	Kajian Trase Jalan Tembus Gunung Binjai-KM.23				500.000.000
	Pengelolaan Leger Jalan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1	1.000.000.000	Pengelolaan Leger Jalan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1	-
	Leger Jalan Kota Balikpapan				1.000.000.000	Leger Jalan Kota Balikpapan				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	10	5.800.000.000	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	10	5.800.000.000
	Supervisi Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Balikpapan				5.800.000.000	Supervisi Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Balikpapan				5.800.000.000
	Penggantian Jembatan	Balikpapan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Penggantian	20	8.000.000.000	Penggantian Jembatan	Balikpapan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Penggantian	10	9.000.000.000
	Penggantian Jembatan Gang Mandor KM. 17				4.000.000.000	Penggantian Jembatan Gang Mandor Km. 17				-
	Penggantian Jembatan Jalan Persatuan				4.000.000.000	Pembuatan Jembatan dan Perbaikan Gang Api				4.000.000.000
						Penggantian Jembatan Jalan Persatuan				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Penggantian Jembatan Jalan Pandan Arum				4.000.000.000
						Pemeliharaan Jembatan MTSN 1 Balikpapan				150.000.000
						Pemeliharaan Jembatan RT 39 Kel. Graha Indah				520.000.000
						Pemeliharaan Jembatan depan Dome				200.000.000
						Administrasi Kegiatan				130.000.000
	Pembangunan Jalan	Balikpapan	Panjang Jalan yang Dibangun	2	4.300.000.000	Pembangunan Jalan	Balikpapan	Panjang Jalan yang Dibangun	2	3.500.000.000
	Karya Bhakti				4.300.000.000	Karya Bhakti				3.500.000.000
	Rekonstruksi Jalan	Balikpapan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	9,69	244.050.000.000	Rekonstruksi Jalan	Balikpapan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	8,81	97.600.000.000
	Peningkatan Jalan Mukmin Faisyal Tembus Jalan Mulawarman				37.100.000.000	Peningkatan Jalan Mukmin Faisyal Tembus Jalan Mulawarman				8.000.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Peningkatan Jalan Mukmin Faisyal				58.150.000.000	Peningkatan Jalan Mukmin Faisyal				10.000.000.000
	Peningkatan Jalan PJHI				5.000.000.000	Peningkatan Jalan PJHI				5.000.000.000
	Peningkatan Jalan Prona 3 tembus Perumahan HER Sepinggang (bukan jalan karya bakti 2024)				9.800.000.000	Peningkatan Jalan Prona 3 tembus Perumahan HER Sepinggang (bukan jalan karya bakti 2024)				5.000.000.000
	Peningkatan Jalan Asnawi Arbain				1.500.000.000	Peningkatan Jalan Asnawi Arbain				1.000.000.000
	Pokir Komisi 3				15.000.000.000	Peningkatan Jalan Swadaya (menuju tanjung bayur)				2.500.000.000
	Peningkatan Jalan Swadaya (menuju tanjung bayur)				15.000.000.000	Rekonstruksi Jalan Zainal Arifin				-
	Rekonstruksi Jalan Zainal Arifin				35.000.000.000	Peningkatan Jalan Mako Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kaltim (hibah)				3.000.000.000
	Peningkatan Jalan Mako Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kaltim (hibah)				3.000.000.000	Perbaikan Duicker Jalan Jend Sudirman				1.000.000.000
	Perbaikan Duicker Jalan Jend Sudirman				1.000.000.000	Peningkatan Jalan RT. 21 Kel. Batu Ampar (hibah)				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Peningkatan Jalan RT. 21 Kel. Batu Ampar (hibah)				2.500.000.000	Peningkatan Jalan depan RS Balikpapan Baru				8.000.000.000
	Peningkatan Jalan depan RS Balikpapan Baru				2.000.000.000	Peningkatan Jalan Tjutjup Suparna				5.000.000.000
	Peningkatan Jalan Tjutjup Suparna				2.000.000.000	Rekonstruksi Jalan DI. Panjaitan				-
	Rekonstruksi Jalan DI. Panjaitan				7.000.000.000	Pembangunan Jalan Akses SMP Regency				-
	Pembangunan Jalan Akses SMP Regency				15.000.000.000	Pembangunan alternatif jalan tembus balikpapan regensi borneo paradiso				-
	Pembangunan alternatif jalan tembus balikpapan regensi borneo paradiso				35.000.000.000	Peningkatan Jalan RT. 32 Kel. Manggar (alternatif tembus stadion-smpn 23)				5.000.000.000
	Peningkatan Jalan RT. 32 Kel. Manggar (alternatif tembus stadion-smpn 23)				-	Jalan Hasanuddin				12.000.000.000
	PL (15 paket konsolidasi 1M perpaket)				-	KPIK				10.000.000.000
	Jalan Hasanuddin				-	PL (15 paket konsolidasi 1M perpaket)				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	KPIK				-	DED Peningkatan Jalan Paket II				99.120.000
	AP				-	DED Peningkatan Jalan Paket III				99.120.000
						Supervisi Peningkatan Jalan Paket II				97.110.000
						Supervisi Peningkatan Jalan Paket III				97.110.000
						DED Peningkatan Jalan Bhayangkara Kel. Graha Indah				67.635.000
						Supervisi Peningkatan Jalan RT. 68 Kel. Graha Indah				69.267.000
						Peningkatan Jalan Bhayangkara Kel. Graha Indah				10.000.000.000
						Peningkatan Jalan RT. 68 Kel. Graha Indah				1.200.000.000
						Peningkatan Jalan RT 08 Graha Indah				1.089.600.000
						Peningkatan Jalan RT. 01 Kel. Damai				200.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Peningkatan Jalan RT. 38 Kel. Batu Ampar				500.000.000
						Peningkatan Jalan RT. 44 Kel. Sepinggan				200.000.000
						Peningkatan Jalan RT. 52 Kel. Sepinggan				200.000.000
						Peningkatan Jalan Lingkungan Terminal Damai (BP)				1.081.038.000
						Pokir Komisi 3				
						Peningkatan Jalan Pipa PDAM RT. 36 Kel. Gunung Samarinda Baru				1.000.000.000
						Peningkatan Jalan Sungai Wain RT. 33 Kel. Karang Jaoang				1.000.000.000
						Peningkatan Jalan Malioboro RT. 37 Kel. Gunung Bahagia				800.000.000
						Peningkatan Jalan RT. 59 Kel. Sepinggan Baru				700.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Peningkatan Jalan RT. 16 Kel. Kariangau				500.000.000
						Peningkatan Jalan RT. 09 Kel. Teritip				503.770.000
						Peningkatan Jalan RT. 30 Kel. Teritip				500.000.000
						Peningkatan Jalan RT. 64 Kel. Manggar				500.000.000
						Peningkatan Jalan RT. 08 Kel. Kariangau				500.000.000
						Peningkatan Jalan RT. 08 Kel. Karang Joang				800.000.000
						DED Peningkatan Jalan Paket I				99.120.000
						Supervisi Peningkatan Jalan Paket I				97.110.000
						AP				100.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Balikpapan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		150.000.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Balikpapan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		166.585.455.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan Paket 1 (Overlay)				50.000.000.000	Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan Paket 1 (Overlay)				30.000.000.000
	Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan Paket 2 (Overlay)				-	Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan Paket 2 (Overlay)				29.765.425.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan RS. Tentara (hibah)				5.000.000.000	Penataan Trotoar Jalan Tjutjup Suparna				5.002.283.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kantor Polres Balikpapan (hibah)				5.000.000.000	Peningkatan Jalan dan Drainase RT. 17 Kel. Batu Ampar				300.000.000
	Peningkatan Jalan Lingkungan (pokir)				90.000.000.000	Peningkatan Jalan Lingkungan 40 : Jalan RT.08 Kel. Tritip, Jalan RT. 24 Kel. Tritip, Jalan RT. 45 Kel. Graha Indah, Jalan RT. 35 Kel. Tritip. Jalan RT. 31 Kel. Gunung Sari Ulu				1.058.062.000
	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan (pokir)				-	Supervisi Penataan Trotoar Kota Balikpapan				97.110.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	DED Peningkatan Jalan Lingkungan (pokir)				-	Penataan Pedestrian Jalan MT Haryono				2.892.940.000
						Pemeliharaan Jalan Lingkungan RS. Tentara (hibah)				5.000.000.000
						Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kantor Polres Balikpapan (hibah)				4.000.000.000
						Peningkatan Jalan Lingkungan (pokir)				88.469.635.000
						Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan (pokir)				-
						DED Peningkatan Jalan Lingkungan (pokir)				-
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Balikpapan	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar	4,7	89.000.000.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Balikpapan	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar	0,8	7.500.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Pelebaran Jalan depan SMA 4				5.000.000.000	Pelebaran Jalan depan SMA 4				5.000.000.000
	Pelebaran Jalan Indrakilla				49.000.000.000	Pelebaran Jalan Indrakilla				-
	Perbaiki Simpang Jalan Ruhui Rahayu I - Jl. Syarifuddin Yoes				5.000.000.000	Perbaiki Simpang Jalan Ruhui Rahayu I - Jl. Syarifuddin Yoes				-
	Pelebaran Jalan Ksatrian				25.000.000.000	Pelebaran Jalan Ksatrian				-
	Pelebaran Simpang Karang Anyar dan Pasar Kebun Sayur				5.000.000.000	Pelebaran Simpang Karang Anyar dan Pasar Kebun Sayur				-
						Pembangunan Jembatan RT. 01 Kel. Baru Tengah				2.500.000.000
	Rehabilitasi Jembatan	Balikpapan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	20	16.500.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Balikpapan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	20	4.500.000.000
	Rehabilitasi Jembatan Jalan Pandan Arum				4.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan Jalan Pandan Arum				-
	Rehabilitasi Jembatan Jalan Mayjen Sutoyo				8.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan Jalan Mayjen Sutoyo				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Perbaikan jembatan RT. 19 Kel. Batu Ampar				2.000.000.000	Perbaikan jembatan RT. 19 Kel. Batu Ampar				2.000.000.000
	Rehabilitasi Jembatan Jalan Tepo				2.500.000.000	Rehabilitasi Jembatan Jalan Tepo				2.500.000.000
	Pembangunan Jembatan	Balikpapan	Panjang jembatan yang akan dibangun	0,2	20.000.000.000	Pembangunan Jembatan	Balikpapan	Panjang jembatan yang akan dibangun	0,2	22.000.000.000
	Pembangunan Jembatan Atas Air (Lanjutan sampai TPI)				20.000.000.000	Pembangunan Jembatan Atas Air (Lanjutan sampai TPI)				22.000.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Balikpapan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	3	1.000.000.000	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Balikpapan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	3	-
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Balikpapan	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan	2	275.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Balikpapan	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan	2	275.000.000
	Penguatan Database dan Pembaharuan Data Kondisi Jalan				175.000.000	Penguatan Database dan Pembaharuan Data Kondisi Jalan				175.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Penguatan Database dan Pembaharuan Data Kondisi Jembatan				100.000.000	Penguatan Database dan Pembaharuan Data Kondisi Jembatan				100.000.000
	Rehabilitasi Jalan	Balikpapan	Panjang jalan yang direhabilitasi	7,7	93.400.000.000	Rehabilitasi Jalan	Balikpapan	Panjang jalan yang direhabilitasi	7	59.641.938.000
	Rehabilitasi Jalan Kota Balikpapan				15.000.000.000	Rehabilitasi Jalan Kota Balikpapan				-
	Rehabilitasi Jalan MT. Haryono (Roti Tiam-Jalan Zainal Arifin)				25.000.000.000	Rehabilitasi Jalan MT. Haryono (Roti Tiam-Jalan Zainal Arifin)				-
	Penataan Jalan MT Haryono (lanjutan)				-	Penataan Jalan MT Haryono (lanjutan)				26.000.000.000
	Perbaikan jalan dan siring RT. 30 Kel. Gunung Sari Ulu				200.000.000	Perbaikan jalan dan siring RT. 30 Kel. Gunung Sari Ulu				-
	Perbaikan jalan RT. 17 Kel. Gunung Sari Ilir				200.000.000	Perbaikan jalan RT. 17 Kel. Gunung Sari Ilir				-
	Perbaikan jalan RT. 31 Kel. Gunung Sari Ulu				200.000.000	Perbaikan jalan RT. 31 Kel. Gunung Sari Ulu				-
	Perbaikan jalan dan siring RT. 30 kel. Gunung sari ulu				200.000.000	Perbaikan jalan dan siring RT. 30 kel. Gunung sari ulu				-

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Perbaikan jalan rt.17 kel. Gunung sari ilir				200.000.000	Perbaikan jalan rt.17 kel. Gunung sari ilir				-
	Perbaikan jalan rt. 31 kel. Gunung sari ulu				200.000.000	Perbaikan jalan rt. 31 kel. Gunung sari ulu				-
	Perbaikan jalan rt. 75 Kel. Manggar				200.000.000	Perbaikan jalan rt. 75 Kel. Manggar				-
	Rehabilitasi Jalan RT. 18 dan 20 Kel. Margasari				2.000.000.000	Rehabilitasi Jalan RT. 18 dan 20 Kel. Margasari				-
	Usulan Musrenbang				50.000.000.000	Usulan Musrenbang				33.641.938.000
						Rehabilitasi Jalan Manuntung RT. 41 Kel. Batu Ampar				
						Rehabilitasi Jalan Pipa PDAM RT. 36 Kel. Gunung Samarinda Baru				
						Rehabilitasi Turap Jalan Soekarno Hatta KM. 20 RT. 40 Kel. Karang Joang				
						Rehabilitasi Turap Jl. Giri Mulyo KM. 14 RT. 23 Gg. Damai Kel. Karang Joang				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Rehabilitasi Turap Jalan Km. 5,5-Km. 13 Kel. Karang Joang				
						Rehabilitasi Jalan Perumahan Guru RT. 13 Kel. Marga Sari				
						Rehabilitasi Jalan Pandan Sari RT. 16 Kel. Marga Sari				
						Rehabilitasi Jalan Gang PLN RT. 37, 38 dan 39 Kel. Gunung Bahagia				
						Pembangunan Trotoar Jalan Menuju SMPN 18 Kel. Sepinggan Baru				
						Rehabilitasi Jalan Manuntung I RT. 14 Kel. Sepinggan Baru				
						Rehabilitasi Turap Jalan Mulawarman RT. 30 Kel. Sepinggan Raya				
						Rehabilitasi Trotoar Jalan Mayjen Sutoyo				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Rehabilitasi Jalan Serobong Kel. Prapatan				
						Rehabilitasi Trotoar Jalan RT. 24 Kel. Prapatan				
						Rehabilitasi Turap RT. 45 Kel. Telaga Sari				
						Rehabilitasi Turap Jalan Pemuda Gang Gasali RT. 69 Kel. Manggar				
						Rehabilitasi Turap Jalan Pemuda Batakan RT. 68 Kel. Manggar				
						Rehabilitasi Jalan Persatuan RT. 47 Kel. Manggar Baru				
						Rehabilitasi Jalan RT. 04 Kel. Gunung Sari Ulu				
						Rehabilitasi Turap RT. 09 Kel. Gunung Sari Ulu				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Rehabilitasi Turap Jalan Karang Jati Dalam RT. 14 Kel. Karang Jati				
						Rehabilitasi Turap Jalan Sultan Alauddin RT. 02 Kel. Karang Jati				
						Rehabilitasi Turap Jalan Jend. A. Yani RT. 24 Kel. Karang Rejo				
						Rehabilitasi Turap Jalan Karang Rejo II RT. 09 Kel. Karang Rejo				
						Rehabilitasi Turap Jalan RE. Martadinata RT. 10 Kel. Mekar Sari				
						Rehabilitasi Turap Jalan RE. Martadinata RT. 15 Kel. Mekar Sari				
						Rehabilitasi Jalan Cempaka RT. 17 Kel. Gunung Sari Ilir				

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Rehabilitasi Jalan Dahlia RT. 30 Kel. Gunung Sari Ilir				
						Rehabilitasi Jembatan Jalan Pattimura Gg. Bambu Kuning RT. 48 Kel. Batu Ampar				
						Rehabilitasi Jembatan Jalan Batu Ratna KM. 11 RT. 57 Kel. Karang Joang				
						Rehabilitasi Jembatan Jalan Inpres IV dan V RT. 19 Kel. Muara Rapak				
						Rehabilitasi Jembatan Jalan Jend. Sudirman RT. 5 Kel. Klandasan Ulu				
						Rehabilitasi Jembatan Jalan Tanjung Kelor RT. 26 Kel. Manggar Baru				
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Balikipapan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4950	7.500.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Balikipapan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4950	7.700.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Balikpapan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	40	1.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Balikpapan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	40	1.000.000.000
	Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung	Balikpapan	IS 5: Jumlah Bangunan yang Memiliki SLF	105	231.319.646.000	Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung	Balikpapan	IS 5: Jumlah Bangunan yang Memiliki SLF	105	213.921.787.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Balikpapan	Presentase bangunan yang memiliki ijin	94,41%	231.319.646.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Balikpapan	Presentase bangunan yang memiliki ijin	94,41%	213.921.787.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Balikpapan	Presentase bangunan layak teknis	97,21%	231.319.646.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Balikpapan	Presentase bangunan layak teknis	97,21%	213.921.787.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Balikpapan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300	1.000.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Balikpapan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300	1.200.000.000
	Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5	213.056.506.000	Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5	177.250.000.000
	Pembangunan BKPSDM				50.000.000.000	Pembangunan BKPSDM				36.716.065.000
	Pembangunan Gedung Balikpapan Smart City Center				36.732.000.000	Pembangunan Gedung Balikpapan Smart City Center				56.965.000.000
	Penyelesaian Kantor DPRD Tahap III				50.000.000.000	Penyelesaian Kantor DPRD Tahap III				51.456.496.000
	Pembangunan Gedung Gabungan DP3 dan Disdag				51.283.650.000	Pembangunan Gedung Gabungan DP3 dan Disdag				-
	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah				25.040.856.000	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah				16.963.750.000
						Pembangunan Pagar Road Race Balikpapan				14.975.172.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota di Jalan Ruhui Rahayu 1				173.517.000
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4	17.263.140.000	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4	35.471.787.000
	Renovasi Gedung Kantor Kelurahan Klandasan Ulu				9.404.100.000	Renovasi Gedung Kantor Kelurahan Klandasan Ulu				-
	Peningkatan Pagar BIC				1.597.050.000	Peningkatan Pagar BIC				1.600.000.000
	Penataan Pagar Perpustakaan Kota				561.810.000	Penataan Pagar Perpustakaan Kota				571.787.000
	Renovasi Gedung Kantor Kelurahan Sungai Nangka				700.180.000	Peningkatan Gedung Stadion Batakan				10.000.000.000
	Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah				5.000.000.000	Renovasi Gedung Kantor Kelurahan Sungai Nangka				-
	AP				-	Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah				5.000.000.000
	Peningkatan Gedung Mapolresta Balikpapan (lanjutan)				-	AP				
	Peningkatan Kantor Koramil Utara				-	Peningkatan Gedung Mapolresta Balikpapan (lanjutan)				10.000.000.000
	Peningkatan Kantor Koramil Timur				-	Peningkatan Kantor Koramil Utara				350.000.000
	Peningkatan Ruang Transit Makodim				-	Peningkatan Kantor Koramil Timur				350.000.000
	Canopy Aula Kodim				-	Peningkatan Ruang Transit Makodim				350.000.000
	Rehab Media Center, Ruad Podcast, dan Ruang Asintel Kodam				-	Canopy Aula Kodim				500.000.000
	Peningkatan Gedung Kejaksaan Negeri Balikpapan (Lanjutan)				-	Rehab Media Center, Ruad Podcast, dan Ruang Asintel Kodam				750.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Peningkatan Gedung Kejaksaan Negeri Balikpapan (Lanjutan)				5.000.000.000
						Usulan Pokir 2025				1.000.000.000,00
	Meningkatnya Pelayanan Jasa Konstruksi	Balikpapan	IS 6: Presentase Pelayanan Jasa Konstruksi	35,51%	4.000.000.000	Meningkatnya Pelayanan Jasa Konstruksi	Balikpapan	IS 6: Presentase Pelayanan Jasa Konstruksi	35,51%	4.000.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Balikpapan	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	4.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Balikpapan	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	4.000.000.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Balikpapan	Presentase Tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	14,01%	3.700.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Balikpapan	Presentase Tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	14,01%	3.700.000.000
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Balikpapan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	500	2.500.000.000	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Balikpapan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	500	2.500.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Balikpapan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	100	1.200.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Balikpapan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	100	1.200.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Balikpapan	Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia	80%	300.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Balikpapan	Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia	80%	300.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	2	300.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	2	300.000.000
	NON URUSAN					NON URUSAN				
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	DPU	IS 7: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum	32,25	29.620.000.000	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	DPU	IS 7: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum	32,25	31.348.990.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPU	IKM Internal Perangkat Daerah	86	29.620.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPU	IKM Internal Perangkat Daerah	86	31.348.990.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPU	Nilai SAKIP DPU	2	188.750.000
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				188.750.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPU	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan	85,9	13.250.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPU	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan	85,9	14.250.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.250.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.250.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPU	Jumlah dokumen dan layanan kepegawaian perangkat daerah	83,65	700.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPU	Jumlah dokumen dan layanan kepegawaian perangkat daerah	83,65	1.000.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				200.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				500.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				800.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPU	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	85,65	3.470.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPU	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	85,65	3.250.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.600.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.600.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				650.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				650.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				175.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				175.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				125.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				125.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				150.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPU	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	82,15	6.840.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPU	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	82,15	6.279.608.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.440.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.704.608.000
	Pengadaan Alat Besar				4.800.000.000	Pengadaan Alat Besar				-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				600.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.575.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPU	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,6	3.510.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPU	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,6	4.330.632.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				510.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				972.392.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.358.240.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,2	1.850.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,2	2.050.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				850.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.050.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				400.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				400.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
N O	TUJUAN/SASARAN/PROGR AM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000
	TOTAL USULAN RENJA 2025				1.214.514.646.000	TOTAL USULAN RENJA 2025				943.927.420.000

Sesuai dengan table 2-4 diatas, Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 845.000.000.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Milyar Rupiah)** berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 050/0734/Bappeda-Litbang tanggal 05 Mei 2023 tentang Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dan program kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, baik dari masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan lapangan, serta dari pelaksanaan musrenbang.

Dalam hal ini DPU memperoleh usulan pemangku kepentingan dari musrenbang, reses dewan, proposal dan surat pengajuan masyarakat, penelitian dan pengamatan lapangan.

Usulan pemangku kepentingan yang telah diajukan kepada DPU baik melalui musrenbang, reses dewan dan proposal/surat pengajuan dari masyarakat akan disurvey serta dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan disesuaikan dengan Kriteria Penentuan Skala Prioritas Perencanaan, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan DPU Kota Balikpapan. Berdasarkan beberapa hal tersebut kemudian akan disusun urutan prioritas penanganan bagi masing-masing usulan untuk akuntabilitas pemilihan usulan yang dilaksanakan. Sekitar 30% hasil usulan masyarakat melalui forum MUSRENBANG akan menjadi bagian dari pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang usulan prioritasnya mempertimbangkan prioritas usulan dari kewilayahan serta kemudian dilakukan pengurutan melalui perhitungan bobot dan nilai sebagai penentu urutan prioritas dalam penanganan, sisanya didasarkan pada perhitungan teknis dan program *topdown* yang telah dituangkan di dalam dokumen RPJMD.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan *bottom-up* di mana suara masyarakat bisa secara aktif mempengaruhi rencana

anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Balikpapan

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
1	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL. Manuntung RT.41 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	-
2	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	JL. Pattimura Gg. Bambu Kuning RT.48 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	-
3	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Soekarno Hatta Km 6 Gang Perdana RT 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	-
4	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	JL Sunan Kalijaga Km 9 RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	-
5	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL. Pipa PDAM RT. 36 gang tirta alam (samping SDIT As Salam) : 1.2336521,116.8705185, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda Baru	-
6	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	JL. SOEKARNO HATTA KM. 20 RT. 40 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Kembalikan Usulan, Lengkapi Dokumen
7	Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 57 , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	OK Lengkapi Dokumen, Jembatan karang joang
8	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	JL. GIRI MULYO KM. 14 RT. 23 GG. DAMAI, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Kembalikan Usulan, Lengkapi Dokumen
9	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	JL AMD RT 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Kembalikan Usulan, Lengkapi Dokumen
10	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 7 dan RT. 88 Jl. Padat Karya Perum Cluster Nusa Indah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat: - 1.2233015,116.8373238, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	Tidak mencantumkan proposal dan dokumentasi pendukung kurang
11	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT. 19,Jl. Inpres IV dan V Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
12	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Sultan Hasanuddin, RT 39 Kota Balikpapan Mulai Dari Gorong2 Arah Ke Rt 43 Sampai Belokan Gunung Manunggal” , Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	Tidak mentantumkan proposal
13	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 24, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan “Drainase Jalan Raya Gunung Manunggal Depan Kelurahan Sampai Perbatasan Rt 27 Perumahan Guru Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat” , Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	tidak melampirkan proposal
14	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perumahan Guru RT. 13 Jalan Semoi, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	-
15	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Pandan Sari RT. 16 (depan rumah no. 5 s.d no. 14), Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	-
16	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. AMD L-III RT.35; -1.260575, 116.869233, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	-
17	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Letjend ZA Maulani RT.41, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	-
18	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Blok G, E4 (RT.5) dan Blok G2 (RT.6) , Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Baru	-
19	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah	Jalan Ruhui Rahayu RT 15, Kantor Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	-
20	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	GG PLN RT 38 DAN 39 (MOHON DILAKUKAN PENGASPALAN), Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	-
21	Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar	Samping Lapangan LPM RT 23, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	-
22	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 14,Jl. Manuntung I blok A 1 , Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	dikembalikan, cek 154embali apakah termasuk fasum

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
23	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggian Raya	-
24	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jln. Mulawarman RT. 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggian Raya	CEK FASUM
25	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Blora RT. 58, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	-
26	Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar	Jl. Mayjend Sutoyo (Lampu merah nuansa elektronik s/d sekolah pelita hati), Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	-
27	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. Masjid RT. 24 dan RT. 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	-
28	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jl. Jendral Sudirman RT. 5, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	-
29	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan serobong No. 20 (Depan Rumah Ibu Purwati)- No. 9 (Depan Rumah Ibu Emy), Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	-
30	Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar	RT. 24 Kel. Prapatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Prapatan	-
31	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 45 KELURHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	-
32	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 34 Kel Telaga Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	lokasi di RT yang sama akan dikerjakan tahun 2024
33	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jln. Mulawarman RT.34, Parit Handil 1, berbatasan dengan RT.30,14,32,16,06,17 (P : 1500 M, L : 1,5 M , T : 1 M) , Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Lamaru	-
34	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	JL. PEMUDA GANG GASALI RT. 69, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	-
35	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	JL. PEMUDA BATAKAN RT. 68, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	-
36	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	SDN 006 RT. 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
37	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jl. Tanjung Kelor RT.26, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	-
38	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Persatuan RT.47, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	-
39	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Mulawarman RT 44 Kelurahan Teritip -1.162236, 117.004454, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	-
40	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah	Jlaan Gunung Binjai RT 12 -1.140272, 116.991376, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Teritip	Pemanfaatan lahan aset bukan kewenangan DPU
41	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.04 , -1.261440, 116.846274, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	-
42	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT.09 , -1.260591, 116.840813, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	-
43	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jl. Karang Jati Dalam RT. 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	-
44	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jl. Sultan Alauddin RT. 02 No. 55, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	-
45	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	JL JEND. A. YANI RT. 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	-
46	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	JL. KARANG REJO II RT.09, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	-
47	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jl.RE Martadinata RT.10 Gg.An Nur, - 1.25594,116.83652, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	-
48	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jl.RE Martadinata RT.15, - 1.256353,116.835098, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	-
49	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Cempaka RT. 17 , Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	OK, Butuh dokumen pendukung seperti foto dan proposal
50	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Dahlia RT.30, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	OK, Butuh dokumen pendukung seperti foto dan proposal

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari POKIR Tahun 2025 Kota Balikpapan

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
1	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. XX Telaga Sari, Kota Balikpapan	PROPSAL BLM STEMPEL DAN TTD
2	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan soekarno Hatta Km 23 RT 42 kelurahan karang Joang Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	CEK FASUM
3	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan tepo gg Kelapa Samboyo Rt 9 Kelurahan karang joang Balikpapan Utara kalimantan Timur , Kota Balikpapan	CEK FASUM
4	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jalan rt 14 damai kelurahan damai, Kota Balikpapan	ADA FOTO
5	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jalan rt 31 damai kelurahan damai, Kota Balikpapan	ADA FOTO
6	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	jln rt 10 damai kelurahan damai, Kota Balikpapan	ADA FOTO
7	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	rt 45 klandasan ulu kelurahan kland ulu, Kota Balikpapan	ADA FOTO
8	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	rt 21 kland ulu kelurahan kland ulu, Kota Balikpapan	ADA FOTO
9	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 9 kland ulu kelurahan kland ulu, Kota Balikpapan	ADA FOTO
10	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 22 damai , Kota Balikpapan	ADA FOTO

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
11	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	jln rt 14 damai, Kota Balikpapan	-
12	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	rt 11 damai, Kota Balikpapan	-
13	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 26 sepingan baru, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
14	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jln rt 26 gunung bahagia, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
15	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	rt 9 klandasan ulu, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
16	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 49 manggar baru, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
17	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 48 manggar baru, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
18	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 45 teritip, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
19	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	rt 44 manggar baru, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
20	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	rt 2 teritip, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
21	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 3 teritip, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
22	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 4 teritip, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
23	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 7 lamaru, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
24	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 10 manggar, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
25	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 17 lamaru, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
26	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	rt 24 manggar, Kota Balikpapan	BELUM ADA FOTO
27	Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jalan agrowisata RT 42 Kelurahan KarangJoang Balikpapan Utara Kalimantan Timur, Kota Balikpapan	CEK FASUM
28	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	jalan agrowisata Km 42 (sesudah jembatan kayu) Kelurahan karang Joang Balikpapan Utara kalimantan Timur, Kota Balikpapan	CEK FASUM
29	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jl. Berlian XI, RT. XXX, Samping Posyandu, Kelurahan Sepinggan Baru, Keamatan Balikpapan Selatan, Titik Koordinat....., Kota Balikpapan	-
30	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Indrakila, Gn Samarinda , Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (contoh isi selengkapnya), Kota Balikpapan	-
31	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 42 TERITIP, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
32	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 41 TERITIP, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
33	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 29 LAMARU, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
34	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 31 TERITIP, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
35	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 32 LAMARU, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
36	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 33 LAMARU, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
37	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 34 LAMARU, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
38	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 34 TERITIP, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
39	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 35 TERITIP, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
40	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 37 MANGGAR, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
41	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 50 MANGGAR BARU, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
42	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 49 MANGGAR BARU, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO DALAM BENTUK jpg
43	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara kalimantan Timur (Jalan menuju SDN 013 Balikpapan Utara) No CP : 0816285950, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
44	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Soekarno Hatta RT 26 kelurahan Muara Rapak Balikpapan Utara Kalimantan Timur (perbatasan RT 26 dan Rt 24 jalan Inpres) NO CP : 0816285950, Kota Balikpapan	-
45	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jalan soekarno Hatta RT 63 Kelurahan Graha Indah Balikpapan utara Kalimantan Timur, Kota Balikpapan	CEK FASUM
46	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan soekarno Hatta RT 35 kelurahan Muara Rapak Balikpapan Utara (jalan Inpres 2 No 8) No CP : Bonny (085754459097), Kota Balikpapan	-
47	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan wirausaha Perumahan Griya Prima Lestari RT 49 Kelurahan Graha Indah kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur, Kota Balikpapan	MASIH LAYAK
48	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perumahan Griya Prima Lestari RT 49 Kelurahan Graha Indah kecamatan Balikpapan utara Kalimantan Timur , Kota Balikpapan	-
49	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perum Batu Ampar Permai RT 34 kelurahan Graha Indah kecamatan Balikpapan utara Kalimantan Timur, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
50	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perum Batu ampar permai Rt 34 kelurahan Graha Indah kecamatan balikpapan utara Kalimantan Timur, Kota Balikpapan	-
51	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perumahan PGRI Blok M RT 11 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan timur. No Cp ;Rasyid (081253137787), Kota Balikpapan	-
52	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perumahan PGRI Blok N Rt 11 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan utara Kalimantan Timur. No cp :Rasyid (081253137787), Kota Balikpapan	-
53	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan PDAM No 45 RT 68 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kalimantan Timur. No Cp ; arianto (085752601433), Kota Balikpapan	-
54	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN RT 29 DAMAI, Kota Balikpapan	-
55	Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 35 DAMAI, Kota Balikpapan	-
56	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 43 TERITIP, Kota Balikpapan	CEK FASUM

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
57	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 44 TERITIP, Kota Balikpapan	-
58	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 81 MANGGAR, Kota Balikpapan	-
59	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 28 TERITIP, Kota Balikpapan	-
60	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT93 MANGGAR, Kota Balikpapan	-
61	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 45 MANGGAR BARU, Kota Balikpapan	-
62	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 30 MANGGAR BARU, Kota Balikpapan	-
63	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT31 LAMARU, Kota Balikpapan	-
64	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 37 TERITIP, Kota Balikpapan	-
65	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 30 TERITIP, Kota Balikpapan	-
66	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 18 LAMURA, Kota Balikpapan	-
67	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Batu Butok Komplek BIPD RT 85 kelurahan Muara Rapak kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. No cp : Budi (082152077179), Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
68	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	JL, Komplek Bangun Reksa Asri Blok CK NO 40 RT 57 Kelurahan Graha Indah Kecamatan balikpapan Utara Kalimantan Timur. No cp : Handoko(081348991244), Kota Balikpapan	-
69	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jaaln Wono agung no 26 RT 30 Kelurahan graha indah kecamatan balikpapan utara kalimantan timur. No cp : Muyoto (085246821104), Kota Balikpapan	-
70	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	jalan Taman Sari Km 6 RT 41 Kelurahan Graha Indah kecamatan Balikpapan Utara kalimantan timur , No cp : H, Samsul (081346245133), Kota Balikpapan	-
71	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 12 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	-
72	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 02 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	-
73	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 16 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	-
74	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 17 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
75	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 20 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	-
76	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 33 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	-
77	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 51 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	-
78	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 86 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	-
79	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 17 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	-
80	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 19 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	-
81	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 21 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	-
82	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 22 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	-
83	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 45 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	-
84	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 29 Kel. Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
85	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 09 Kel. Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	-
86	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 13 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan	-
87	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Ketua RT.09 Perum Wika Cluster Mahogany 2 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kota Balikpapan	-
88	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perumahan Graha Indah Blok K1 RT 13 kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
89	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perumahan graha Indah Blok N2 RT 13 Kelurahan graha Indah kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
90	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Perumahan Graha Indah Blok M2 RT 13 Kelurahan graha indah Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan	-
91	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln.Prona III RT. 19 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
92	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Perum Regency RT. 39 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
93	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. RT. 16 Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
94	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Marsma R iswahyudi RT. 20 Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
95	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Perum Melati RT.49 Blok. 02 Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
96	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Berlian RT. 34 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
97	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. RT. 09 Kelurahan Sungai nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
98	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. RT. 59 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
99	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Perum Regency RT. 61 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
100	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Her I Tembus polda RT. 50 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
101	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Marsma R. Iswahyudi RT.6 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
102	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 05 Kelurahan Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
103	Pembangunan/Perbaiki Turap/Siring Lingkungan	Jln. Syarifudin Yos RT. 53 Kelurahan Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
104	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 04 Kelurahan Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
105	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 40 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
106	Pemeliharaan / Perbaiki Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL. TAMAN SEPINGGAN RT. 51 KELURAHAN SEPINGGAN KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
107	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	jalan mangga RT.58 Kelurahan sepinggan, Kota Balikpapan	-
108	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	jalan marsma r iswahyudi RT.46 kelurahan sungai angka kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	-
109	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	sepinggan RT.05 Kelurahan sepinggan, Kota Balikpapan	-
110	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.64 Kelurahan sepinggan kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	-
111	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.05 Kelurahan sepinggan kecamatan balikpapan selatan. , Kota Balikpapan	-
112	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Lingkungan RT. 047 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	-
113	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Lingkungan RT. 047 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
114	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Jend. A. Yani Gg. Prevab Lingkungan RT. 054 Kelurahan Gunung Sari Ilir. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
115	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Mekar Sari RT. 021 Kel. Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
116	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Lingkungan RT. 031 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
117	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Milono (arah Panti Asuhan RT.046 Kelurahan Gunung Sari Ilir - Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
118	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jalan Lingkungan RT. 019 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
119	Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT.57 Kelurahan sepinggan Kecamatan Balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
120	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Joko Tole I RT.044 Kelurahan Sumber Rejo - Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
121	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.30 Kelurahan sungai angka Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
122	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Joko Tole I Rt.044 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
123	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. Wijaya Kesuma RT.034 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
124	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.34 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
125	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT. 47 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan	-
126	Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT. 40 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	FOTO KURANG UNTUK MENGBARKAN LOKASI
127	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 24 KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
128	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 45 KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
129	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.17 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	-
130	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 39 KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
131	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JALAN HANDIL TARUN RT. 33 TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
132	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.32 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	-
133	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT. 73 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
134	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.32 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	LAMPIRKAN FOTO JPG
135	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Lingkungan RT. 038 Gg. Sama'i Kel. Gunung Sari Ulu. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
136	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 65 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
137	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Lingkungan RT. 028 Kelurahan Gunung Sari Ulu- Kecamatan Balikpapan Tengah. (1.256414,116.846590) , Kota Balikpapan	-
138	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase Lingkungan RT. 01 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah -1.263225,116.849008, Kota Balikpapan	-
139	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase Lingkungan RT. 034 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah. 1.2519522699553234,116.84636971029323, Kota Balikpapan	-
140	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 08 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	Mohon perbaiki tahun pada proposal usulan
141	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 09 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	Mohon perbaiki tahun pada proposal usulan
142	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.46 Kelurahan sepinggan Kecamatan Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	-
143	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl A. Wahab Syahrani RT 03 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
144	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Podomoro 2 RT 75 Kelurahan Batu Ampar Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
145	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perumahan Batu Ampar Lestari RT 60 Kelurahan Batu Ampar Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	DI PISAH USULAN JALAN DAN RAINASE
146	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.09 Taman sari Bukit Mutiara , Cluster Mahogani 2 Blok M13 No.12A, kode Pos 76125 Kecamatan Bpp Utara, Kota Balikpapan	-
147	Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jl AW Syahrani Gang Argowilis RT 31 Kelurahan Batu Ampar Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
148	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perum Pesona Bukit Batuah RT 70 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
149	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Rukun Tetangga 09 Taman Sari Bukit Mutiara, Cluster Mahogani 2 Blok M13 No.12 A, kode Pos 76124 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kota Balikpapan	-
150	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Sangga Buana II Gg Family (depan rumah bapak Didi) RT 52 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
151	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Rukun Tetangga 33 Jl.Perjuangan RT,33 Telp.087834677579 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
152	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl.Perjuangan RT.33 Telp.087834677579 Rukun Tetangga 33 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
153	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Rukun Tetangga 28 Jl.Indrakila GG Taufik Telp.082158025480 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
154	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Rukun Tetangga 28 Jl.Indrakila GG .Taufik Telp.082158025480 Kelurahan Gn.Samarinda Baru,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
155	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perum Pesona Bukit Batuah Blok K RT 39 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
156	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perum Pesona Bukit Batuah RT 25 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
157	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perum Pesona Bukit Batuah menuju Perumahan Madina RT 72 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
158	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Taman Sari Vip 2 RT 24 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
159	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Telindung Gg Puncak RT 87 Kelurahan Muara Rapak Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
160	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Giri Mulyo RT 24 Kelurahan Karang Joang Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
161	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Jl Tengah RT 46 Kelurahan Karang Joang Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
162	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Giri Rejo KM 15 RT 27 Kelurahan Karang Joang Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
163	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Swadaya RT 41 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	-
164	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 30 Kelurahan Teritip Kelurahan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
165	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 35 Kelurahan Teritip Kelurahan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
166	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl PDAM RT 47 Kelurahan Teritip Kelurahan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
167	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Mulawarman RT 48 Kelurahan Teritip Kelurahan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
168	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 42 Kelurahan Damai Bahagia Kelurahan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
169	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Berkah RT 10 Kelurahan Sungai Nangka Kelurahan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
170	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Sultan Hasanuddin RT 17 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
171	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 78 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
172	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Pemuda Perumahan Bukit Batakan Permai RT 77 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
173	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 61 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
174	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Hasanuddin Gang I (Ujung) Masjid Al Ishlah Griya Kariangau Baru RT 12 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
175	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 39 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
176	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL Perumahan Bukit Batakan Permai RT 80 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
177	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Sultan Hasanuddin (Komplek Perumahan Guru) RT 39 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
178	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Gang Beringin 2 RT 10 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
179	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 30 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
180	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
181	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Mulawarman PJHI Dalam RT 83 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
182	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 28 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
183	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 67 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
184	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 88 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
185	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Lingkungan RT.062 Kelurahan Gunung Sari Ilir. Kecamatan Balikpapan Tengah. 1.261914115 116.83456061 , Kota Balikpapan	-
186	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT. 11 KELURAHAN MANGGAR BARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
187	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 15 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
188	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 91 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
189	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 3 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
190	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT. 19 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
191	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Karang Jati Dalam No.19 RT.17 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Kode Pos 76123. 1.261914115 116.83456061 , Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
192	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 80 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
193	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 47 KELURAHAN MANGGAR BARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
194	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 11 KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
195	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Lingkungan RT. 081 Kelurahan Karang Rejo. Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	-
196	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Lingkungan RT. 04 Gang Janur Sari dan Gang Optik, Kelurahan Karang Jati. Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	-
197	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	JL. DI Panjaitan No. 06 RT. 026 TLP.081350721484 Kelurahan Sumber Rejo. Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	-
198	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 74 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
199	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 26 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
200	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 33 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
201	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 23 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
202	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 85 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
203	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jln. Perumnas Blok VI RT.18, Kelurahan Batu ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
204	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.50 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
205	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. RT. 87 Kelurahan Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
206	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.18 Kelurahan sepinggan raya Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
207	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. RT. 29 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
208	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.24 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	-
209	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. RT. 38 Kelurahan Graha indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
210	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. RT. 29 Kelurahan Batu ampat, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
211	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.56 Ke;urahan sepinggan baru Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
212	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Perum Batuah RT. 71 ke akses jalan RT. 72 Kel. Graha indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
213	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.53 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	-
214	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.07 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
215	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.60 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
216	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.46 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan	-
217	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.17 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
218	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 89 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
219	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 95 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
220	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang I (Ujung) Masjid Al Ishlah Griya Kariangau Baru RT.12 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
221	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.17 Jl.Perum DRM RT.17 Kariangau Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
222	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Perum DRM RT.17 Kariangau, Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
223	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.40 Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan	-
224	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT.40 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
225	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.40 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
226	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.40 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barta, Kota Balikpapan	-
227	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.40 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
228	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sumber Makmur 1 RT.16 Balikpapan, Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
229	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl.Sumber Makmur 1 RT.16 Balikpapan, Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
230	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Pandan Barat RT.30 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
231	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT. 24 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
232	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jl.Pandan Barat RT.30 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
233	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Pandan Sari RT.18 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
234	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.27 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
235	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.70 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
236	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Taman Sari Perumahan Pesona Bukit Batuah Blok CQ No.8 RT.71, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
237	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Lingkungan RT. 017 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
238	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Lingkungan RT. 017 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
239	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Jend. A. Yani Gang Optik Indra & Gang Keramik RT. 04 & RT. 013 Kelurahan Karang Jati. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
240	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Taman Sari Perumahan Pesona Bukit Batuah RT.72 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
241	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Batu Ratna RT.14 Kelurahan Karang Joang Km.XI Kode Pos 76127 Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
242	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Kesatrian Km.8, RT.38 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
243	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Tepo, Gang Mujahidin II & III, RT.08 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
244	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perumahan Bhumi Nirwana City, Jln. Valencia II Blok J NO.6 Telepon 08125837384, Rukun Tetangga 47 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
245	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Wonosari RT. 024 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	-
246	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Rt.61 Kelurahan Karang rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	-
247	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Wahab Syahrani RT 02 No 53 (SDN 031 Balikpapan Utara) Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
248	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Manuntung KM 4 RT 41 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
249	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT 43 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
250	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Soekarno Hatta Gang KUA RT 57 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
251	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Rt.04 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	-
252	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT 72 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
253	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Disamping rumah Bapak H.Jaenuri Perumahan Bhumi Nirwana City, Jln.Valencia II Blok J No.6 , Telp 08125837384, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	-
254	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Rt.10 Kelurahan Sumber rejo Kec.Balikpapan tengah , Kota Balikpapan	-
255	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Podomoro RT 55 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
256	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Soniten RT.26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
257	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Rt.50 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	-
258	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sultan Hasanuddin No.99 RT.39 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
259	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Sultan Hasanuddin No.30 RT.04 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
260	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jln.Wolter Monginsidi No.33 Rukun Tetangga 33, Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
261	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jln. Sumber Rejo 1 RT. 51, Kelurahan sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	-
262	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Sumber Rejo RT. 41 Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	-
263	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 32 Kel. Damai, Kota Balikpapan	-
264	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 18 Kel. Damai, Kota Balikpapan	-
265	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 38 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	-
266	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 24 Kel. Telagasari, Kota Balikpapan	-
267	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 19 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
268	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Telindung Baru I, Pelangi I RT 30 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
269	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Pattimura RT 76 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
270	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 36 No. 27 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
271	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 39 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
272	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 48 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan	-
273	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 24 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
274	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 47 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
275	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Subulus 3 RT 51 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
276	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 42 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
277	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 42 Kelurahan Telagasari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
278	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Gang LKMD 6 (Belakang Masjid Mansyaul Huda) RT 33 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
279	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 03 Kelurahan Telagasari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
280	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Podomoro 2 AW Syahrani RT 75 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
281	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 45 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
282	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 47 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
283	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl AW Syahrani Gang Agrowilis RT 31 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
284	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 39 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
285	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 39 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
286	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 24 Blok A Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
287	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl Padat Karya 2 RT 37 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
288	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 28 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
289	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Soekarno Hatta Gang Nuda 2B dan 2C RT 19 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
290	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 29 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
291	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Perumnas Blok VI RT 18 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
292	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 02 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
293	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 04 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
294	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 04 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
295	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 32 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
296	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 44 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
297	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 32 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
298	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 08 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
299	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 046 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
300	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sepaku RT.1 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
301	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 046 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
302	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 25 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
303	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 25 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
304	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jln.Wolter Monginsidi No Rt.48 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
305	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 38 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
306	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 38 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
307	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 45 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
308	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT. 45 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
309	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Pandan Barat RT.32 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
310	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 01 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
311	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 01 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
312	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT. 01 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
313	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jalan Meranti Raya Perumnas RT 46 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
314	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Meranti Raya Perumnas RT 46 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
315	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT. 42 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
316	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.42 KEL. SUNGAI NANGKA, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
317	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Komplek Ramayana RT 22 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
318	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 35 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
319	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan AW Syahrani RT 58 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
320	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Perumnas Depan Rumah No 23 s/d No 33 RT 12 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
321	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Minangkabau Gang Damai III RT 04 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
322	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jln.Pandan Barat RT.32 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat No Handphone : 082333329995, Kota Balikpapan	-
323	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Perumahan Batu Ampar Lestari Blok C9 RT 60 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
324	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Gang Baruna RT 73 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
325	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jl.Sepaku Laut RT.8 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
326	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Perum Sumber Indah Blok D Gang Fayakun RT 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
327	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Pandan Sari RT.16 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat No Handphone : 08125413258 Balikpapan 76133, Kota Balikpapan	-
328	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan LKMD Sumber Indag Blok M dan K RT 70 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
329	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Pattimura Gang Ardani 1a, Gang Oli, Gang Ardani 3 dan Perum Jaya Makmur RT 42 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
330	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT 29 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
331	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Kruing Raya Timur Batu Ampar RT 13 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
332	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 42 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
333	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Batu Ampar Lestari Tahap IV Blok B RT 50 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
334	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perumnas Blok II RT 09 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
335	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perumnas Blok IV RT 16 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
336	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln.Pandan Sari RT.16 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat No Handphone : 08125413258 Balikpapan 76133, Kota Balikpapan	-
337	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan AW Syahrani No 45 RT 32 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
338	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Mangga RT 69 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
339	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Telindung Baru Depan Mini Market Perdana dan Jalan Lanang Raya Blok I RT 07 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
340	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Subulussalam Asri Barokah II RT 52 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
341	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jln.Pandan Sari RT.16 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
342	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Soekarno Hatta KM 3.5 RT 21 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
343	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT 54 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
344	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Sangga Buana KM 4.5 Blok A RT 15 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
345	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT 36 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
346	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl.Sultan Hasanuddin RT.24 Kelurahan Baru Ulu - Kecamatan Balikpapan Barat kode Pos : 76133, Kota Balikpapan	-
347	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl Sangga Buana II Gang Family dekat sumur umur RT 52 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
348	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Soekarno Hatta KM 6.5 Komp Bangun Reksa Asri Blok EE RT 20 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
349	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Ganesha II RT 66 (tembus RT 46) Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
350	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Patrimura - Batu Ampar arah jembatan RT 48 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
351	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 72 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
352	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Podomoro RT 55 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
353	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Batu Ampar Lestari Tahap IV Blok B RT 50 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
354	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Poros RT 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
355	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jembatan Masjid Nurul Ikhlas Perum Sumber Indah Blok D RT 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
356	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Soniten dan Gang Sadar RT 26 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
357	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Baruna RT 73 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
358	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 22 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
359	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl Pattimura RT 48 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
360	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan LKMD Sumber Indag Blok K1, K2, dan K4 RT 70 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
361	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Manuntung KM 4 RT 41 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
362	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 29 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
363	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang LKMD 2 tembus LKMD 6 RT 33 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
364	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT.40 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
365	Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jl AW Syahrani Gang Argowilis RT 31 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
366	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Kruing Raya RT 14 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
367	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Minangkabau Depan Masjid RT 69 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
368	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan marsma R iswahyudi gg.mandiri depan mesjid NUPUL HIDAYAH RT.02 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
369	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Soekarno Hatta KM 3.5 RT 21 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
370	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Hitam Manis dan Lorong RT 54 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
371	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Tirta Mayang PERum PDAM KM 5.5 RT 51 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
372	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 31 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	-
373	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Balikpapan Regency Blok CD RT 42 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	-
374	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 77 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
375	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.18 Kelurahan sepinggan raya Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
376	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Krayan dan Kerayan 2 RT 49 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
377	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 12 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
378	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Ranah Asri RT 59 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
379	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 20 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
380	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Gang Tower RT 67 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Proposal belum dilengkapi TTD dan Stempel
381	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan RT 55 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	Usulan belum dilengkapi proposal dan foto
382	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 10 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
383	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
384	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Sangga Buana RT 68 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
385	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 10 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
386	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Komplek Perum Asabri Blok D1 RT 03 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
387	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Komplek Perumahan Guru RT.27 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
388	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sepaku Laut RT.8 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat No Handphone : 085247529902 Balikpapan 76131, Kota Balikpapan	-
389	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 14 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Usulan belum dilengkapi Foto dan Proposal
390	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 45 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Usulan belum dilengkapi Foto dan Proposal
391	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 34 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Usulan belum dilengkapi Foto dan Proposal

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
392	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sepaku Laut RT.8 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	-
393	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN RT 6 SEPINGAN, Kota Balikpapan	-
394	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perum Pondok Joang Jalan Batu Ratna RT 54 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
395	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN RT 42 SEPINGAN, Kota Balikpapan	-
396	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan tambora blok S RT.48 Kelurahan sepinggan Kecamatan Balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
397	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN RT 48 SEPINGAN, Kota Balikpapan	-
398	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN RT 47 SEPINGAN, Kota Balikpapan	-
399	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Tepo Gang Merpati KM 10 RT 09 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
400	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN 69 SEPINGAN, Kota Balikpapan	-
401	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 04 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Usulan belum dilengkapi Foto dan Proposal

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
402	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN RT 7 GUNUNG SAMARINDA BARU, Kota Balikpapan	-
403	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN RT 4 GUNUNG SAMARINDA BARU, Kota Balikpapan	-
404	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 8 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
405	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 8 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
406	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN RT 31 GUNUNG SAMARINDA BARU, Kota Balikpapan	-
407	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 34 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
408	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Giri Mulyo KM 14 RT 23 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
409	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 22 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
410	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Wolter Monginsidi RT.32 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
411	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 55 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Usulan belum dilengkapi Foto dan Proposal
412	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Letjend Suprpto RT.06 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
413	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Wolter Monginsidi RT.34 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
414	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 6 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
415	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 17 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
416	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.46 Jl.Sultan Hasanuddin RT.46 No.97 Kelurahan Baru Ulu - Kecamatan Balikpapan Barat Balikpapan 76133, Kota Balikpapan	-
417	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 32 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
418	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Gunung Bubukan RT 37 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
419	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 49 Kel. sepinggan, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
420	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl.Sultan Hasanuddin RT46 No.97 Kelurahan Baru Ulu-Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan 76133, Kota Balikpapan	-
421	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 57 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	-
422	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 45 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
423	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 68 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	-
424	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Blok D7 Ni 1 sd 20 RT 61 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Usulan belum dilengkapi Foto dan Proposal
425	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Letjend Suprpto RT.06 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
426	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 05 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	-
427	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 30 Kel. Sungai Nangka, Kota Balikpapan	-
428	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 64 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
429	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Ranah Asri Blok A Gangg III dan Gang I RT 59 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
430	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.25 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
431	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Purnawirawan RT.37 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
432	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 5 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
433	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.44 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
434	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 17 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
435	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Tepo RT.59 Kel.Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	-
436	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Samping SDN 004, Jl.Semai RT.13 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
437	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 37 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
438	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah	Jl.Sultan Hasanuddin RT.1 No.05 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
439	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 63 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
440	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 1 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
441	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 2 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
442	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jl.Sepaku RT.09 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat , Balikpapan 76133, Kota Balikpapan	-
443	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 19 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
444	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. RT 48 sepinggan, Kota Balikpapan	-
445	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 48 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
446	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jln.Semai Sepaku RT.10 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat 76133, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
447	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Letjen Suprpto No RT.16 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	-
448	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Rukun Tetangga 48 Jl.Patriot Gn.1 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
449	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Rukun Tetangga 48 Jl.Patriot Gn 1 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan 76133, Kota Balikpapan	-
450	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Letjen Suprpto RT.45 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
451	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jl.Sultan Hasanuddin No.30 RT.04 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	Proposal belum dilengkapi TTD dan Stempel
452	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 02 Kelurahan Baru Ilir (Dekat rumah ibu Tati), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
453	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 018 Kelurahan Baru Ilir (Jalan masuk depan rumah ketua RT 018), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
454	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 034 Kelurahan Baru Ilir (Depan rumah ketua RT 034), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
455	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Rt.33 Kel.Graha Indah Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Belum dilengkapi dengan proposal dan foto lokasi

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
456	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 001 Kelurahan Baru Ilir , Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
457	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Rt.41 Kel.Graha Indah KKec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Belum dilengkapi dengan proposal dan foto lokasi
458	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 012 Kelurahan Baru Ilir (Asrama Bukit Blok D), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
459	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 049 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
460	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Karang Jawa RT. 010 Kelurahan Karang Jati. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
461	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 014 Kelurahan Baru Ilir (dibawah rumah ketua RT 014), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
462	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 061 Kelurahan Baru Ilir (Depan rumah ketua RT 061), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
463	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 057 Kelurahan Baru Ilir (Gapura RT 057 Gang Barokah), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
464	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 029 Kelurahan Baru Ilir (Depan pos kampung RT 029), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
465	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 057 Kelurahan Baru Ilir (Tepi jalan dekat parit lingkungan RT 057), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
466	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 047 Kelurahan Baru Ilir (Perbatasan RT 045 dan RT 047), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
467	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 033 Kelurahan Baru Ilir (Samping Posyandu), Kota Balikpapan	Lengkapi Proposal
468	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Lingkungan Jalan RT.036 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
469	Sedimentasi di sungai dan saluran	Sepanjang Jl. Jend. A. Yani dan Jl. Mayjend Sutoyo Kelurahan Gunung Sari Ulu. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
470	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. R.E Martadinata RT. 012 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
471	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. RE. Martadinata RT. 013 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
472	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT. 87 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
473	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT. 43 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
474	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 24 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	-
475	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Indrakila GG Taufik Telp.082158025480 RT.28 Kel.Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
476	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 65 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	-
477	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Indrakila GG Taufik Telp.082158025480 RT.28 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kota Balikpapan	-
478	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 63 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	-
479	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Karya Bhakti RT 41 k Kelurahan graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara. No cp : Samsul (082157872398), Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
480	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Komplek Balikpapan Baru Pesona Den Haag RT.25 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
481	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan perumahan PDAM Blok D No 4 RT 51 Kelurahan graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara. No Cp : Juli (081253503365), Kota Balikpapan	-
482	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan taman sari Km 6 Rt 64 kelurahan Graha Indah kecamatan balikpapan Utara. No cp : Masrian (081346245133), Kota Balikpapan	-
483	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan PDAM No 45 RT 68 Kelurahan Graha Indah Kecamatan balikpapan utara. No cp : Arianto (085752601433), Kota Balikpapan	-
484	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.04 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
485	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.04 Kelurahan Gn.Samarinda Baru,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
486	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 26 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
487	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT.07 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
488	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.07 Kelurahan Gn.Samarinda Baru , Kota Balikpapan	-
489	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Waduk Wonorejo Gang Satria No.20 RT.31, Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
490	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 13 KEL. DAMAI BAHAGIA, Kota Balikpapan	-
491	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 16 KEL. DAMAI BAHAGIA, Kota Balikpapan	-
492	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.32 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
493	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 41 KEL. SEPINGGAN BARU, Kota Balikpapan	-
494	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 05 KEL.SEPINGGAN, Kota Balikpapan	-
495	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 63 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
496	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 64 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan	-
497	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 10 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan	-
498	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 06 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan	-
499	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.32 Kel.Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
500	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.34 Kel.Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
501	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.34 Kel.Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
502	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 12 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan	-
503	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 17 KEL. DAMAI BAHAGIA, Kota Balikpapan	-
504	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 70 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
505	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 38 KEL. SEPINGGAN BARU, Kota Balikpapan	-
506	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	JLN RT 41 MARGOMULYO, Kota Balikpapan	-
507	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN RT 40 MARGOMULYO, Kota Balikpapan	-
508	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah	JLN RT 38 MARGUMULYO, Kota Balikpapan	-
509	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	JLN 24 MARGOMULYO, Kota Balikpapan	-
510	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl.Wolter Monginsidi RT.29 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
511	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. RT. 39 Kelurahan Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
512	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl.Wolter Monginsidi RT.29 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
513	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jln. RT. 30 Kelurahan Batu ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
514	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. RT. 30 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
515	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT.46 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan	-
516	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL. PERJUANAGAN IV RT.62 KEL SEPINGGAN BARU KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	-
517	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.7 KEL SEPINGGAN KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	-
518	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.32 SEPINGGAN RAYA KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	-
519	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.39 KEL. SUNGAI NANGKA KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	-
520	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JL. MUKMIN FAISAL RT.70 KEL SEPINGGAN KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	-
521	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	PRONA RT.69 KEL SEPINGGAN KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	-
522	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.20 SEPINGGAN BARU KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
523	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl Perintis III RT 44 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
524	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl Agustus RT 32 (Lingkungan Musholla Al Hidayah) RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
525	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Kavling V Taman Sari Perum Langit Biru RT 23 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
526	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl A Wahab Syahrani RT 03 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
527	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JLN RT 44 KLAND ILIR, Kota Balikpapan	-
528	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT.62 Perjuangan 6 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan Balikpapan selatan , Kota Balikpapan	-
529	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Letjen Suprpto RT.11 Kelurahan Baru Ulu Balikpapan 76133 Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
530	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Gunung Empat Gang Semeru RT.21 Kode Pos 76131 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
531	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah	Jalan Semoi RT.14 No.46 Telepon (0542) 416392 Balikpapan 76131 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
532	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT.04 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
533	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.04 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
534	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT.07 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
535	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.07 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
536	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
537	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
538	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.32 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
539	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.32 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
540	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT.34 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
541	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.34 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
542	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.36 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
543	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.36 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
544	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Rambai (Perum Raudhah) No.80 Telp : 081350114441 RT.06 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
545	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Rambai (Perum Raudhah) No.80 Telp : 081350114441 RT.06 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
546	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Rambai (Perum Raudhah) No.80, Tlp : 081350114441, Kota Balikpapan	-
547	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Wanayasa Km.10 No. Balikpapan 76125 Tlp.081253087995 RT.64 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
548	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Wanayasa Km.10 No. Balikpapan 76125 Tlp.081253087995 RT.64 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
549	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Lembah Mutiara No.07 RT.27 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kode Pos 76125 kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
550	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Wanayasa Km.10 No Balikpapan 76125 Tlp.081253087995 RT.64 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
551	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Gang Merdeka RT 63 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
552	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jl Ranah Asri RT 59 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
553	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	gang labani rt. 8 kelurahan manggar, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi surat proposal dan foto lokasi
554	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 002 Kelurahan Baru Ilir dekat rumah bu tati rt02, Kota Balikpapan	-
555	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jalan gang mustaqim rt.10 kelurahan lamaru, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi surat proposal dan foto lokasi
556	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 012 Kelurahan baru Ilir (jalan asrama bukit blok D RT 12), Kota Balikpapan	-
557	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 001 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
558	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 049 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
559	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 049 Baru Ilir, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
560	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 049 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
561	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 79 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	-
562	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Beriman RT 64 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
563	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Tepo KM 10 RT 05 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
564	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 01 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
565	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 17 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
566	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 19 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
567	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 11 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
568	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 21 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
569	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 09 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
570	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 02 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
571	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 42 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
572	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT12 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
573	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 24 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
574	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Klamono 1 RT 52 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
575	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Perum Wika Rt.9, Rt.10, Rt.12, Kota Balikpapan	Belum dilengkapi dengan proposal dan foto lokasi
576	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Blok III dan Blok IV RT 57 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
577	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Rt.10 Kel.Gunung Samarinda BAru Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Belum dilengkapi dengan proposal dan foto lokasi
578	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Rt.12 Kel.Gunung Samarinda Baru, Kota Balikpapan	Belum dilengkapi dengan proposal dan foto lokasi

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
579	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 49 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
580	Sedimentasi di sungai dan saluran	Lingkungan RT Kelurahan Karang Rejo. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
581	Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jalan Telagasari RT 37 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-
582	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 014 Kelurahan Baru Ilir Dibawah rumah ketua RT 014, Kota Balikpapan	-
583	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Rt.14 Kel.Karang Joang Kec..Balikpappan Utara, Kota Balikpapan	-
584	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 034 Kelurahan Baru Ilir depan rumah pak rt 34, Kota Balikpapan	-
585	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT 061 Kelurahan Baru Ilir mulai depan rumah pak RT , Kota Balikpapan	-
586	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Lingkungan RT. 037 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
587	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 051 Kelurahan Baru Ilir Depan rumah no. 46 s/d no. 57, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
588	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 051 Kelurahan Baru Ilir Depan rumahh pak Armi no.34, Kota Balikpapan	-
589	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 057 Kelurahan Baru Ilir Tepi jalan sisi parit, Kota Balikpapan	-
590	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 057 Kelurahan Baru Ilir Gapura RT 57 gang Barokah, Kota Balikpapan	-
591	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 029 Kelurahan Baru Ilir Depan Posyandu, Kota Balikpapan	-
592	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. RE. Martadinata RT. 028 Kel. Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
593	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 047 Kelurahan Baru Ilir Perbatasan RT 045 dan RT 047, Kota Balikpapan	-
594	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 061 Kelurahan Baru Ilir Depan rumah ketua RT 061, Kota Balikpapan	-
595	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 033 Kelurahan Baru Ilir Samping Posyandu, Kota Balikpapan	-
596	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 028 Kelurahan Baru Ilir Depan pintu gerbang Patriot, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
597	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Karang Jawa Dalam RT. 06 kel. Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
598	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 028 Kelurahan Baru Ilir , Kota Balikpapan	-
599	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 028 Kelurahan Baru Ilir Jalan tembus ke SD 016, Kota Balikpapan	-
600	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 056 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
601	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 056 Kelurahan Baru Ilir , Kota Balikpapan	-
602	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 028 Kelurahan Baru Ilir Samping Rumah no,19, Kota Balikpapan	-
603	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 016 Kelurahan Baru Ilir Depan Posyandu, Kota Balikpapan	-
604	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 016 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
605	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 035 Kelurahan Baru Ilir Samping rumah ibu Sri muhartini No.11, Kota Balikpapan	-
606	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 024 Kelurahan Baru Ilir Depan rumah ketua RT 024, Kota Balikpapan	-
607	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 037 Kelurahan Baru Tengah Jalan masuk SMP 4, Kota Balikpapan	-
608	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 037 Kelurahan Baru Tengah Depan seberang jalan SMP 4, Kota Balikpapan	-
609	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT 037 Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan	-
610	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 037 Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan	-
611	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 027 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
612	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 027 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
613	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 027 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
614	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 027 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
615	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 041 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
616	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 018 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Belum dilengkapi dengan Proposal
617	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 025 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
618	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
619	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
620	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
621	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
622	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
623	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
624	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
625	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
626	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 015 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
627	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 020 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
628	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 043 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
629	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 004 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
630	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 048 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
631	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 030 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
632	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 012 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
633	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 012 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
634	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 037 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
635	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 037 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
636	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 030 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
637	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 19 Kel. Damai, Kota Balikpapan	-
638	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 48 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	-
639	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 69 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	-
640	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 03 Kel. Damai Bahagia, Kota Balikpapan	-
641	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 06 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
642	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 07 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	-
643	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 18 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	-
644	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 37 Kel. Sungai Nangka, Kota Balikpapan	-
645	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 42 Kel. Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	-
646	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	-
647	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 57 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	-
648	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 63 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	-
649	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 05 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	-
650	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 24 Kel. Sungai Nangka, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
651	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 65 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	-
652	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT.29 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	-
653	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan AMD IV RT 44 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
654	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan AMD II RT 44 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
655	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 014 Kelurahan Baru Ilir Samping rumah ketua RT 004, Kota Balikpapan	Usulan yang di input di SIPD berbeda dengan Proposal
656	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Komando Daerah Militer VI/Mulawarman - Komando Distrik Militer 0905/BPP , Kota Balikpapan	-
657	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Lembah Mutiara No.07 RT.27 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kode Pos 76125, Kota Balikpapan	-
658	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl.Lembah Mutiara No.07 RT.27 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kode Pos 76125 Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
659	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 46 Kel.Marga Mulyo, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
660	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 36 Kel. Baru Ulu, Kota Balikpapan	-
661	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 49 KEL SEPINGGAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	-
662	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Diponegoro Blok I No.1 RT.35 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kode Pos 76125 Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Lokasi, Proposal dan Foto tidak sesuai dengan Usulan
663	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	sungai angka RT 2. GPS -1.271314,116.880058, Kota Balikpapan	Mohon untuk dilengkapi dengan surat proposal
664	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT 23 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan	-
665	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Diponegoro Blok I No.1 RT.35 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kode Pos 76125 Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Lokasi, Proposal dan Foto tidak sesuai dengan Usulan
666	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perum Pelangi Pesona Residence Blok B12 Rukun Tetangga 36,Kelurahan Gn.Samarinda Baru,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
667	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Perum Pelangi Pesona Residence Blok B12 Rukun Tetangga 36 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
668	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT 50 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	-
669	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Indrakilla Gg. Mekarsari RT.07 No.09 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kodepos 76125, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
670	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Waduk Wonorejo Gang Satri No.20 RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
671	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Prona 3 Gang Perjuangan RT 70 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Usulan belum dilengkapi Foto dan Proposal
672	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Waduk Wonorejo Gang Satria No.20 RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
673	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Waduk Wonorejo Gang Satria No.20 RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
674	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Nusa Indah Belakang Posyandu RT 47 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	-
675	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT 26 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
676	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Gang Setia di RT.08 Salok Baru Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	-
677	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Gang Setia di RT.09 Salok Baru Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
678	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Swadaya RT 34 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
679	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 71 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	-
680	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 86 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	-
681	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 043 Kelurahan Baru Ilir Depan rumah ketua RT 43, Kota Balikpapan	-
682	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah	Jl. Telaga Sari RT. 37 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
683	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 020 Kelurahan Baru Ilir Gang depan rumah ketua RT, Kota Balikpapan	-
684	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Perbatasan RT 30 dan RT 12 menuju gang radial, Kota Balikpapan	-
685	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Jalan menuju SMP 9, Kota Balikpapan	-
686	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Jalan arah menuju SMP 9, Kota Balikpapan	-
687	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Jalan tembus menuju RT 12, Kota Balikpapan	-
688	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Jalan menuju ke SMP (, Kota Balikpapan	-
689	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Pemukiman warga di atas SMP 9, Kota Balikpapan	-
690	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Samping lapangan RT 18 hingga tembus jalan menuju SMP 9, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
691	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo dibelakang poskamling RT 18 , Kota Balikpapan	-
692	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Jalan akses menuju SMP 9, Kota Balikpapan	-
693	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 025 Kelurahan Baru Ilir Belakang kos kosan, Kota Balikpapan	-
694	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 004 Kelurahan Baru Ilir Samping rumah ketua RT 001, Kota Balikpapan	-
695	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 48 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Belum dilengkapi dengan Proposal
696	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jl. Pangeran Antasari Gang Kesatuan RT. 15 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	-
697	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. Sumber Rejo RT. 54 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	-
698	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 43 Gang Karzenda Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	-
699	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT. 26 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
700	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Blok D7 No 1 - 20 RT 61 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
701	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 048 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	-
702	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sultan Hasanuddin RT.05 Balikpapan 76134 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
703	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 030 Kelurahan Bargo Mulyo, Kota Balikpapan	-
704	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 048 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	-
705	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sultan Hasanuddin RT.06 Balikpapan 76134 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
706	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 048 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	-
707	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 030 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
708	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 030 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	-
709	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah	Jl.21 Januari RT.01 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
710	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Brantas RT 36 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	-
711	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 037 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
712	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 037 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
713	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sultan Hasanuddin RT.07 Balikpapan 76134 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
714	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Sumber Makmur I RT.16 Balikpapan Kelurahan Kariangau kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
715	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl.Sumber Makmur I RT 16 Balikpapan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
716	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.02 Jalan Samratulangi Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	-
717	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Srikandi RT.01 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	-
718	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Manuntung RT.03 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
719	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Salok Baru Gg.P Nusu RT.15 Balikpapan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
720	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln.Sumber Makmur RT.04 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	-
721	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl.Mastora RT.04 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
722	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Mastora RT.04 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
723	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sultan Hasanuddin RT 04 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	-
724	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 026 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
725	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 025 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
726	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jl. Banjar RT. 07 Kelurahan Gunung Sari Ilir. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
727	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 38 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	-
728	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. RE. Martadinata Gg. Selecta RT.026 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
729	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 012 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	-
730	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 012 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	-
731	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	RT 012 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan	-
732	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 018 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	-
733	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT. 62 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	-

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
734	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Sultan Alauddin RT. 01 Gg. Puskesmas dan Gg. Amanah Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah. , Kota Balikpapan	-
735	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan	Jl. Jend. A. Yani Gg. Selamat Lingkungan RT. 07 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan	-
736	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Rt.32 Kel.Gunung Samarinda Baru, Kota Balikpapan	Belum dilengkapi dengan proposal dan foto lokasi
737	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Rt.32 Kel.Gunung samarinda Baru , Kota Balikpapan	Belum dilengkapi dengan proposal dan foto lokasi

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Bantuan Keuangan (BANKEU) Tahun 2025 Kota Balikpapan

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Kelurahan Manggar	Pembangunan Gudang Limbah B3		1.500.000.000					DED TA. 2023
			Kelurahan Karang Joang	Lanjutan Pembangunan TPST KM.12 Kel. Karang Joang		7.500.000.000					DED TA. 2023
			Kelurahan Graha Indah	Pembangunan TPST Kel. Graha Indah		9.000.000.000					Usulan DED TA. 2024 (APBDP)
2	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) dan Terpusat (IPAL)		Kelurahan Graha Indah	Pembangunan IPAL KM.7		2.500.000.000					Usulan DED TA. 2024 (APBDP)
3	Penyediaan Drainase Skala Perkotaan		Kelurahan Sungai Nangka	Saluran Sekunder Inhutani (Lanjutan)		40.000.000.000		v	v	v	DED TA. 2019
			Kelurahan Sumber Rejo	Drainase Jl. P. Antasari		100.000.000.000		v	v	v	DED TA. 2019

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Permukaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Luasnya dibawah 1000 Ha)		Kelurahan Teritip	Pembangunan Jaringan D.I Gunung Binjai		5.000.000.000		v	v	v	DED TA. 2016
5	Normalisasi Sungai Kewenangan Provinsi		Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kelurahan Gunung Sari Ulu	Normalisasi Saluran Primer Ampal		3.000.000.000				v	
6	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat	Kelurahan Karang Joang	Rekonstruksi Jalan Mukmin Faisal/Jalan Sepinggian Baru-Transad	2,5 km	75.000.000.000		v	x	v	Reviu DED tahun 2023
7	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat		Rekonstruksi Jalan Alam Baru	0,7 km	23.000.000.000		v	x	v	DED tahun 2024
8	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat		Rekonstruksi Jalan Perumahan HER 2 Tembus Jalan Prona	0,6 km	7.500.000.000		v	x	v	DED tahun 2023
9	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat		Rekonstruksi Jalan Prona 3	0,65 km	3.000.000.000		v	x	v	DED tahun 2023
10	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat	Kelurahan Kariangau	Rekonstruksi Jalan KPIK (Lanjutan)	1,5 km	20.000.000.000		v	x	v	

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat		Rekonstruksi Jalan Tembus Mukmin Faisal - Mulawarman (lanjutan)	1,5 km	20.000.000.000		v	x	v	
12	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat		Rekonstruksi Jalan Traktor VI (Lanjutan)	3,8 km	40.000.000.000		v	x	v	
13	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat		Rekonstruksi Jalan Gunung Binjai	5,8 km	46.000.000.000		v	x	v	
14	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat		Rekonstruksi Jalan Padat Karya dan Salok Lay (Lanjutan)	7,4 km	75.000.000.000		v	x	v	
15	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota										
15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kondisi jaringan pipa transmisi yang mengalirkan air baku dari Waduk Manggar ke IPA Km. 8 saat ini sering mengalami kebocoran yang disebabkan pipa telah mengalami korosifitas karena usia pipa telah tua sehingga mengganggu kuantitas dan kontinuitas air baku	Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Graha Indah	Penggantian Jaringan Pipa Transmisi KM. 12- KM. 8		59.710.095.000					Usulan PTMB

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		yang diolah IPA Km. 8.									
		Tingginya permintaan pelayanan air bersih di Kecamatan Balikpapan Barat, maka perlu dilakukan optimalisasi kapasitas produksi IPA Baru Ulu dengan membangun sumur bor dalam agar IPA dapat beroperasi dengan maksimal.		Pembuatan 1 (satu) Unit Sumur Bor di IPA Unit VI Kp. Baru Balikpapan		3.201.951.000					Usulan PTMB
		Kondisi jaringan pipa transmisi air baku dari Waduk Manggar ke IPA Kampung Damai dan distribusi air bersih dari IPA Km. 8 ke pelanggan ke sebagian Kecamatan Balikpapan Selatan berada di area Perumahan Grand City kondisi sering mengalami kebocoran yang disebabkan korosifitas pada pipa dan kedalaman		Pemindahan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi di Perumahan Grand City Kota Balikpapan		35.399.236.000					Usulan PTMB

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pipa sekitar 8-12 meter dari permukaan tanah akibat pembukaan lahan menjadi perumahan sulit dilakukan perbaikan yang mengganggu kuantitas dan kontinuitas air baku yang diolah oleh IPA Kampung Damai dan air bersih yang didistribusikan ke pelanggan di Kecamatan Balikpapan Selatan									
											DED Tahun 2019
											DED Tahun 2019
											DED Tahun 2019
											DED Tahun 2017
											DED Tahun 2015
											DED Tahun 2021
	TOTAL USULAN					576.311.282.000					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan konektivitas transportasi jalan adalah meningkatkan konektivitas koridor utama logistik dan kawasan-kawasan prioritas melalui:

- 1) Mendorong penyusunan rencana umum jaringan jalan, dan kriteria pemilihan program/kegiatan untuk pembangunan/ penanganan jalan nasional, dan daerah;
- 2) Penyusunan standar teknis dan kualitas jalan nasional dan daerah;
- 3) Peningkatan kapasitas SDM daerah melalui pendanaan DAK dan memperluas pelaksanaan skema pendanaan hibah jalan daerah yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pemeliharaan jalan daerah;
- 4) Membangun jaringan jalan arteri utama nasional di tiap pulau terintegrasi dengan kawasan (KEK, KI, dan KSPN, daerah 3T);
- 5) Membangun jalan akses menuju simpul transportasi
- 6) Preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung; dan
- 7) Meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi, kabupaten/kota).

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan infrastruktur jalan perkotaan, adalah:

- 1) Penyediaan infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan aspek tata gubahan, melalui pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan; pembangunan jalan lingkar kota untuk jalur logistik; serta peningkatan kapasitas jalan dan penataan sistem drainase jalan perkotaan;
- 2) Mengurangi bottleneck pada persimpangan dan perlintasan sebidang, melalui pembangunan flyover/underpass untuk mengatasi kemacetan lalu

lintas dan mengurangi gangguan samping pada koridor jalan arteri perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPU Kota Balikpapan adalah:

- 1) Konektivitas Transportasi Jalan
 - a. Membangun jalan akses menuju simpul transportasi;
 - b. Preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung;
 - c. Meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah;
- 2) Pengembangan Infrastruktur Jalan Perkotaan
 - a. Pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan
 - b. Pembangunan Plyover/Underpas
- 3) Perumahan
 - a. Peningkatan kapasitas jalan
 - b. Penataan sistem drainase jalan Lingkungan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan visi dan misi dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN KINERJA UTAMA	TARGET				
				2022	2024	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Poin	83	84	85	86	87
	S1 :Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	IS 1: Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	55,79	57,48	59,18	60,87	62,56
	S2 :Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	IS 2: Persentase penurunan luas genangan banjir	%	47,25	46,80	46,36	45,92	45,48
	S3: meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	(IS 3 : Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik)	%	97,85	97,93	98,14	98,31	98,53
	S4: Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	IS 4: persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	79,95	81,25	82,55	83,76	84,91
	S5: Meningkatnya keandalan bangunan gedung	IS 5: Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	45	65	85	105	125
	S6: Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi	IS 6: persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	29,12	30,72	33,11	35,51	37,90
	S7: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	IS 7: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mempertimbangkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan program prioritas kepala daerah yang tercantum di dalam RPJMD 2021-2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Balikpapan

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Poin	Balikpapan	86	943.927.420.000			85	880.846.848.900
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
					S1: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	IS 1: Presentase Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Air	%	Balikpapan	60,87%	27.320.500.000			62,56%	72.750.000.000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Balikpapan	%	Balikpapan	67,65%	27.320.500.000			70,59%	72.750.000.000
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Bangunan SDA berfungsi dengan baik	%	Balikpapan	95,83%	22.050.000.000			100%	72.750.000.000
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dok	Balikpapan	1	5.000.000.000	APBD		1	1.000.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	2	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dok	Balikpapan	1	50.000.000	APBD		1	250.000.000
1	3	2	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	Unit	Balikpapan	1	-	APBD		1	35.000.000.000
1	3	2	2.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit	Balikpapan	1	6.000.000.000	APBD		1	21.000.000.000
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	Balikpapan	3	14.478.867.000	APBD		3	10.000.000.000
1	3	2	2.01	7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun	Titik	Balikpapan	4	-	APBD		1	1.500.000.000
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang terpelihara	Unit	Balikpapan	8	3.000.000.000	APBD		10	4.000.000.000
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Balikpapan	58%	5.270.500.000			0%	-
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang Dibangun	KM	Balikpapan	0,3	5.270.500.000	APBD		-	-
					S2 :Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	IS 2: Persentase penurunan luas genangan banjir	%	Balikpapan	45,92%	147.554.883.000				429.500.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	Balikpapan	53,58%	147.554.883.000				429.500.000.000
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	Balikpapan	71,56%	147.554.883.000				429.500.000.000
1	3	6	2.01	30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dok	Balikpapan	1	578.670.000	APBD		1	1.000.000.000
1	3	6	2.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	Meter	Balikpapan	2300	42.000.000.000	APBD		2.400	254.500.000.000
1	3	6	2.01	24	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	Meter	Balikpapan	800	52.198.213.000	APBD		900	129.000.000.000
1	3	6	2.01	28	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhab	Meter	Balikpapan	0	4.150.000.000	APBD		-	-
1	3	6	2.01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	Balikpapan	95000	16.675.000.000	APBD		97000	25.000.000.000
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun	Meter	Balikpapan	1000	26.715.000.000	APBD		1.000	10.000.000.000
1	3	6	2.01	21	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun yang ditingkatkan	Meter	Balikpapan	1000	21.913.000.000	APBD		1.000	10.000.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					S3: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan	IS 3: Presentase infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	Balikpapan	98,31	48.725.000.000				22.750.000.000
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	Balikpapan	97,39	8.650.000.000				2.150.000.000
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)	%	Balikpapan	92,76	8.650.000.000				2.150.000.000
1	3	5	2.01	41	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dok	Balikpapan	7	2.450.000.000	APBD		-	-
1	3	5	2.01	22	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	Balikpapan	100	900.000.000	APBD		150	2.000.000.000
1	3	5	2.01	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	Balikpapan	100	200.000.000	APBD		10	150.000.000
1	3	5	2.01	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	Balikpapan	150	5.100.000.000	APBD		-	-

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	%	Balikpapan	99,05	1.350.000.000				4.000.000.000
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	%	Balikpapan	82,49	1.350.000.000				4.000.000.000
1	3	3	2.01	33	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumla sambungan rumah yang terlayani SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	Balikpapan	16	100.000.000			-	-
1	3	3	2.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dok	Balikpapan	3	700.000.000			1	400.000.000
1	3	3	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	Balikpapan	400	650.000.000			400	4.000.000.000
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%	Balikpapan	98,00%	39.725.000.000				16.600.000.000
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	%	Balikpapan	63,82%	39.725.000.000				16.600.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	4	2.01	15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kotali	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	Dok	Balikpapan	6	375.000.000	APBD		-	-
1	3	4	2.01	10	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	Balikpapan	2000	28.350.000.000	APBD		28050	16.500.000.000
1	3	4	2.01	13	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	Balikpapan	15300	11.000.000.000	APBD		2000	100.000.000
					S4: Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	IS 4: persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	Balikpapan	83,76	446.802.393.000			84,91	#REF!
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	%	Balikpapan	91,47	446.802.393.000			93,42%	#REF!
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jalan dalam kondisi baik	%	Balikpapan	76,3	410.302.393.000			78,25%	138.831.000.000
1	3	10	2.01			Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	Balikpapan	93	36.500.000.000			97,00%	#REF!
1	3	10	2,01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dok	Balikpapan	5	61.700.000.000	APBD		4	24.000.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	10	2,01	30	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dok	Balikpapan	10	5.800.000.000	APBD		10	6.800.000.000
1	3	10	2,01	31	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Unit	Balikpapan	10	9.000.000.000	APBD		4	7.000.000.000
1	3	10	2,01	32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	Balikpapan	2	3.500.000.000	BANKEU		2500	52.700.000.000
1	3	10	2,01	33	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	Balikpapan	9,69	97.600.000.000	DAK		850	22.431.000.000
1	3	10	2,01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	Balikpapan	5200	166.585.455.000	APBD		4000	14.000.000.000
1	3	10	2,01	37	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	Balikpapan	0,8	7.500.000.000	APBD		1000	10.000.000.000
1	3	10	2,01	39	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Unit	Balikpapan	20	4.500.000.000	APBD		2	4.500.000.000
1	3	10	2,01	40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Meter	Balikpapan	0,2	22.000.000.000	APBD		1	17.000.000.000
1	3	10	2,01	43	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dok	Balikpapan	2	275.000.000	APBD		2	700.000.000
1	3	10	2,01	44	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	Balikpapan	7,7	59.641.938.000	APBD		1500	15.000.000.000
1	3	10	2,01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Meter	Balikpapan	4950	7.700.000.000	APBD		5100	6.000.000.000
1	3	10	2,01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	Balikpapan	40	1.000.000.000	APBD		40	500.000.000
					S5: Meningkatnya keandalan bangunan gedung	IS 5: Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	Balikpapan	105	213.921.787.000			125	69.960.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan yang memiliki ijin	%	Balikpapan	94,41	213.921.787.000			94,91	69.960.000.000
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentase bangunan layak teknis	%	Balikpapan	97,21	213.921.787.000			97,77%	69.960.000.000
1	3	8	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dok	Balikpapan	300	1.200.000.000	APBD		1100	600.000.000
1	3	8	2.01	17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	Balikpapan	4	35.471.787.000	APBD		2	14.360.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	8	2.01	21	Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dok	Balikpapan	5	177.250.000.000	APBD		2	55.000.000.000
					S6: Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi	IS 6: persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	Balikpapan	35,51	4.000.000.000			37,9	1.950.000.000
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	Balikpapan	100	4.000.000.000			100	1.950.000.000
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Balikpapan	14,01	3.700.000.000			17,20%	1.750.000.000
1	3	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator. Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	Balikpapan	500	2.500.000.000	APBD		500	1.500.000.000
1	3	11	2.01	11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	Balikpapan	100	1.200.000.000	APBD		100	250.000.000
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia	%	Balikpapan	80	300.000.000			100,00%	200.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dok	Balikpapan	2	300.000.000	APBD		2	200.000.000
					NON URUSAN									
					S7: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	IS 7: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	DPU	32,25	30.028.750.000			32,25	16.014.287.000
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	DPU	86	30.028.750.000			86	16.014.287.000
X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPU	Nilai	DPU	2	188.750.000			83,28%	-
X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dok	DPU	2	188.750.000	APBD		2	-
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan	Nilai	DPU	85,9	14.250.000.000			85,95%	11.270.131.800
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Dok	DPU	61	14.250.000.000	APBD		26	11.270.131.800
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumne dan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	DPU	83,65	1.000.000.000			83,70%	200.000.000
X	XX	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Orang	DPU	61	200.000.000	APBD		70	50.000.000
X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Orang	DPU	61	800.000.000	APBD		70	150.000.000

Kode				Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai	DPU	85,65	3.250.000.000		85,70%	1.489.155.200
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	DPU	9	50.000.000	APBD	9	25.000.000
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis	DPU	5	1.600.000.000	APBD	5	500.000.000
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis	DPU	59	650.000.000	APBD	59	435.000.000
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Jenis	DPU	7	175.000.000	APBD	7	135.304.000
X	XX	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitas kunjungan tamu	Porsi	DPU	300	50.000.000	APBD	300	15.000.000
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Kali	DPU	100	450.000.000	APBD	100	378.851.200
X	XX	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	DPU	2	125.000.000	APBD	2	-
X	XX	1	2.06	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah implementasi SPBE pada SKPD	Aplikasi	DPU	6	150.000.000	APBD	6	-
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Nilai	DPU	82,15	6.279.608.000		82,20%	1.700.000.000
X	XX	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	Unit	DPU	2	4.704.608.000		2	1.200.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	DPU	25	1.575.000.000			25	500.000.000
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	DPU	85,6	4.330.632.000			85,65%	
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	DPU	48	972.392.000			48	432.972.800
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Orang	DPU		3.358.240.000				
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	DPU	81,2	2.050.000.000			81,25%	1.355.000.000
X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit	DPU	6	200.000.000			6	250.000.000
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	Unit	DPU	58	1.050.000.000			58	450.000.000
X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan yang dipelihara	Jenis	DPU	8	400.000.000			8	310.000.000
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Unit	DPU	1	200.000.000			1	200.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	DPU	2	200.000.000			2	145.000.000

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2021–2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir. Apabila terjadi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 maka Program dan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah Program-Program dan Kegiatan-Kegiatan yang dapat mengatasi banjir di Kota Balikpapan.

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2025, masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun 2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas;
2. Menerapkan system *reward and punishment* terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan TAPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat;
5. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

D. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa perlu dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD, RKPD, Renstra PD, hingga Renja PD.

Program Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan seperti yang tertuang dalam visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu :

VISI:

***TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN
DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN***

MISI:

- 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik**
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi**
- 3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai**
- 4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan**
- 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif**

Pada misi tersebut urusan bidang perumahan dan permukiman terkait dengan misi ke-3 yaitu **"Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai"**. Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Nomor: 900/132/ Disperkim Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
12. Surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 050/0580_/Bappeda-Litbang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sehingga dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman TA.2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025 secara khusus disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025;
- b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025;
- c. Menjadi landasan sarana pengendali program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, visi dan misi, Tugas Pokok dan Fungsi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah lain .

BAB III . TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan, sasaran, dan inikator sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan rencana kerja, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2025

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun 2023. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pada APBD tahun 2023, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan pagu murni sebesar **Rp. 23.171.999.815 menjadi** melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) dengan pagu sebesar **Rp. 28.023.816.668,00** pada mekanisme perubahan. Adapun realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel .2.1
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
Kota Balikpapan
Tahun 2023

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
23.171.999.815	28.023.816.668,00	23.870.222.903,00	85.18

Adapun Tabel pencapaian kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan	90	77.08	75	77.39	103.19	80	80	88.89
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130	26	26	33	126.92	45	45	34.62
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	73.93	75	74.32	99.09	80	80	88.89
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	45	45	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Bimbingan Teknis implementasi/peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	43	43	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	78.54	75	78.54	104.72	80	80	88.89
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40	8	1	1	100	1	10	25.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik kantor	5	56	4	4	100	1	61	1220.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	10	15	2	2	100	1	18	180.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan	0	0	0	40	-	0	40	0.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	195	87	40	181	453	1	269	137.95
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	88.07	75	76.39	101.85	80	80	88.89

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	0	0	0	0	3	3	25
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25	12	6	25	416.67	5	42	168
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	77.12	75	75.01	100.01	80	80	88.89
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	2	4	4	100	1	7	35.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	12	4	4	100	1	17	85.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1100	12	12	12	100	1	25	2.27
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	73.54	75	74.32	99.09	80	80	88.89

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	165	33	33	33	100.00	35	101	61.21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	2	2	2	100.00	2	6	60.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	6	111	111	100.00	111	228	651.43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	60.68	0	0.59	0	0	0	28	46.14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan	100	11.82	0.59	0	0	0	28	28.00
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6	6	0	0	0	1	1	16.67
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5	1	0	0	0	0	1	20.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	5	1	0	0	0	0	1	20.00
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5	1	0	0	0	1	2	40.00
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat. Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat. Rumah Susun dan Rumah Khusus	7	1	1	1	100.00	1	3	42.86

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	2.84	0	0.59	0	0	0	0	0
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	800	0	100	100	100	200	300	37.50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	250	0	50	50	100.00	100	150	60.00
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	0	0	0	0	0.00	100	100	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0.00	35	35	0.00
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru Dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan		0	0	0	0	100.00	100	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.84	0	0.59	0	0	1.42	1.42	50
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhabilitasi	32	0	5	0	0.00	35	35	109.38

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang disusun	12	0	1	1	100.00	1	2	16.67
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	40	0	10	10	100.00	1	11	27.50
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang dikelola	81.38	59.05	70.83	70.83	100.00	78.65	79	96.65

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dikelola	9	6	1	1	100.00	1	8	88.89
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Kamar Rusunawa yang terhuni	625	437	1	1	100.00	1	439	70.24
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	25	4.39	11.84	89.04	89.04	13.16	107	426.34

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekomendasi siteplan	38	3	1	1	100.00	1	5	13.16
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	86	86	1	1	100.00	1	88	102.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	0	1	1	100.00	1	2	200.00
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KSPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	4	0	0	0	0.00	1	1	25.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah rekomendasi teknis sarusun yang diterbitkan	40	0	10	10	100.00	10	20	50.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	4	0	1	1	100.00	1	2	50
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh	0	100.88	74.4	96.89	130.23	24.4	24.4	72.49

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	100	16.67	0	0	0.00	50	50	50.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	24	0	0	0	0.00	1	1	4.17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	153	52.42	78.90	56.41	71.50	127.88	128	83.58
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survey Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh yang disusun	4	0	1	1	100.00	1	2	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun	5	0	2	2	100.00	0	2	40.00
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah KSM/KPP yang dibentuk dan dibina	30	6	6	7	116.67	1	14	46.67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Diseminasi Informasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	36	0	0	0	0.00	1	1	2.78
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100	26.11	100.00	100.00	100.00	42.44	169	168.55
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	24	4	1	1	100.00	0	5	20.83

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah perbaikan RTLH	288	0	100	100	100.00	258	358	124.31
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	51	0	0	0	0.00	1	1	1.96
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah masyarakat yang diberikan Bantuan uang sewa rumah tinggal	200	0	0	0	0.00	1	1	0.50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan permukiman kumuh	5.4	1.41	3.99	3.99	100.00	11.08	16	305.19
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	10	3	1	1	100.00	1	5	50.00
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	0.12	0.03	0	0	0.00	0.00	0	25.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Yang dilakukan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	6	1	0	0	0.00	1	2	33.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	252	70	0	0	0.00	0	70	27.78

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kerjasama	3	0	0	0	0.00	0	-	0.00
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah masyarakat penerima bantuan	115	0	0	0	0.00	0	-	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	2.78	1.39	2.14	0.04	2.00	5.21	5.21	187.56
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	7	3	1	1	100.00	1	5	71.43
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	7	3	1	1	100.00	1	5	71.43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	90	77.29	75	72.55	96.73	80	80	88.89
	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	26	3	3	3	100.00	3	9	34.62
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan	60	12	1	1	100.00	1	14	23.33

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Utama Perangkat Daerah

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	Persen	99,32	99,11	99,79
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.83	99.83	100.00
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	14.5	12.18	84
3	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	51.47	36.80	71.49
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	Nilai	75	72.55	96.73

Pada table 2.3 diperoleh pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator tujuan dan indicator kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian sebagai berikut:

- 1. Tujuan " Meningkatkan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas,** dengan indikator **'Persentase Permukiman Layak Huni,** terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau capaian sebesar 99,79% dengan **kriteria" Sangat Tinggi"**.
- 2. Sasaran I " Meningkatkan cakupan rumah layak huni",** dengan Indikator **"Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni",** dengan realisasi sebesar **99,83** dari target **99,83** sehingga capaian sebesar **100%** dengan **kriteria" Sangat Tinggi"**
- 3. Sasaran II " Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai" dengan Indikator "Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU",** terdapat realisasi sebesar **12,18%** dari target **14,5%** atau capaian sebesar **84%** dengan **kriteria " Tinggi"**.
- 4. Sasaran III" Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh" dengan Indikator 'Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh,** terdapat realisasi sebesar **36.80%** dari target **51,47%** atau capaian sebesar **71,49%** dengan **kriteria " Tinggi"**.

5. Sasaran IV ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah’, dengan realisasi sebesar **72,55** dari target **75** sehingga capaian sebesar **96,75%**, dengan **kriteria ”Sangat Tinggi”**.

Berdasarkan analisis capaian setiap indikator maka dapat dijelaskan untuk Tujuan “Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas, dengan indikator ‘Persentase Permukiman Layak Huni, terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau capaian sebesar 99,79% dengan kriteria” Sangat Tinggi”. Hal ini didukung oleh capaian kinerja kegiatan dalam Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 11 Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 yaitu: 1. Kelurahan Karang Rejo 2. Kelurahan Karang Jati 3. Kelurahan Gunung Sari Ulu 4. Kelurahan Sumber Rejo 5. Kelurahan Sungai Nangka 6. Kelurahan Baru Ilir 7. Kelurahan Manggar Baru 8. Kelurahan Karang Joang 9. Kelurahan Damai 10. Kelurahan Prapatan 11. Kelurahan Klandasan Ilir.

Pada capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator dengan kriteria penilaian realisasi kinerja ”Sangat Tinggi”, namun hanya 1 (satu) indikator yang mencapai target 100%.

Adapun capaian yang belum 100% adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran II kriteria kinerja “sangat tinggi” namun belum tercapai 100% karena masih banyaknya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan data, baru sebesar 4963 unit rumah dalam perumahan atau 3 perumahan yang difasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dari 40,152 unit rumah.
2. Pada sasaran III diperoleh kriteria penilaian realisasi kinerja ”sedang” atau belum tercapai karena capaian penanganan Kawasan kumuh untuk di target 2023 sebesar 3,99 sudah tercapai namun masih terdapat kawasan kumuh di atas 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pada tahun 2023 hanya terdapat penanganan dari

Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun penanganan kumuh tahun 2023 berupa Pekerjaan Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan berupa Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman, Perbaikan saluran Drainase, dan Jalan Lingkungan. Pada tahun 2023 terdapat luasan kawasan kumuh baru sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan.

3. Pada sasaran IV tidak tercapai 100% karena nilai LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022 mengalami penurunan yang semula tahun 2021 sebesar 74,57 di tahun 2022 menjadi 72,55. . Terdapat penurunan nilai pada komponen nilai Perencanaan Kinerja.

2.2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Utama Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh Disperkim Kota Balikpapan ,sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Jenis Pelayanan Dasar ,terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas :
 - a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana /kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
 - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

- c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
 - e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
3. Penerima Pelayanan terdiri atas:
- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
 - b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) dan Indikator Kinerja Hasil (IKK *Outcome*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 20 IKK *Output* dan 5 IKK *Outcome*.

Berikut dilampirkan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diampu Disperkim Kota Balikpapan pada Tahun 2023:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	√		0	18	36	54	72	0	8	Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023, Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan, namun belum terdapat SK Penetapan Bencana.
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	√		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%	Berdasarkan hasil pendataan SPM tahun 2023 tidak terdapat warga negara yang harus direlokasi akibat program Pemerintah Daerah
3	Persentase Permukiman Layak Huni		√	99,05	99,32	99,55	99,78	100,00	99,11	99,55	Persentase permukiman layak huni sampai dengan akhir tahun 2023 telah mencapai 9,11% dari target kinerja. Disperkim Kota Balikpapan memiliki kewenangan mengurangi kawasan kumuh seluas 5,4 Ha. Luasan tersebut ditangani sebesar 1,41 Ha pada tahun 2022 dan 3,99 di tahun 2023.
4	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni		√	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,00	0,02	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
5	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU		√	16.7 5	12.18	18.18	28.26	36.42	12,18	18.18	Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 12,18% . Pencapaian ini didukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU namun belum seluruh PSU diserahkan ke Pemerintah Kota
6	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh		√	32,5 6	51,4 7	67,7 8	84,0 8	100, 00	36,80	51,47	Target Penanganan kumuh ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha, Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha, dan penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha. Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penanganan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Kota. Tahun 2023 terdapat 3,99 Ha penanganan kumuh.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		√	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,00	0,01	.Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah, namun tidak terdapat SK penetapan bencana
8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai pendataan SPM Tahun 2023, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi
9	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani		√	26,11	100,00	0,00	0,00	0,00	3,99	11,08	Penanganan kawasan kumuh Kota Balikpapan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai
10	berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)		√	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,002	0,003	pada 2023 terverifikasi menjadi sebanyak 517 RTLH. kemudian ditangani sebanyak 66 ditahun 2022 dan 100 unit ditahun 2023 RTLH yang bersumber dari APBD
11	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		√	16.75	12.18	18.18	28.26	36.42	12,18	18.18	Target penambahan unit rumah yang dilengkapi PSU dan diserahkan adalah sebesar 4,963 unit rumah namun berdasarkan pendataan total unit rumah diperumahan yang dilengkapi PSU adalah 40.755 unit rumah di perumahan di Kota Balikpapan.
12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		√	0	18	36	54	72	14.074	15	7.146 unit pada daerah resiko bencana longsor 4.898 unit pada daerah resiko rawan abrasi 2.030 unit pada daerah resiko

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											kebakaran hutan
13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tahun 2023 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah namun belum terdapat SK Penetapan bencana
14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156	0	4 unit rumah korban bencana angin laut 8 unit rumah korban bencana alam angin puting beliung 144 unit rumah rusak akibat longsor
15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0	8	sesuai pendataan SPM Tahun 2023 Tidak terdapat kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana
16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10	sesuai pendataan SPM Tahun 2023 Tidak terdapat kegiatan pembangunan kembali untuk rumah korban bencana
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2023 Tidak terdapat kegiatan pembangunan baru untuk korban bencana
18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	7	1. Rusunawa Sepinggian 2. Rusunawa Perusda 3. Rusunawa

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	korban bencana										Manggar 4. Rusunawa Siaga 5. Rusunawa Sumber 6. Rusunawa KM7 7. Rusunawa Beriman
19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2023, Tidak terdapat kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota
20	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	116,81	116,81	sesuai pendataan SPM Tahun 2023, Lokasi 1 : Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota Lokasi 2 , 3 & 4 : Kel. Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan Lokasi 5 : Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur Lokasi 6 & 7 : Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur Lokasi 8 : Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara
21	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak ada kegiatan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM
22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak ada kegiatan fasilitasi ganti hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM
23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan		√	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada rumah tangga yang menerima layanan subsidi

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM										sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM
24	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	0	Tidak terdapat kegiatan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2023
25	Jumlah rumah tangga penerima layanan belum mendapatkan penyediaan rumah pemenuhan SPM layak huni berdasarkan rencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	74	Lokasi 74KK tersebar di 23 Kelurahan dan 6 Kecamatan. Tahun 2023 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan rumah yang terkena bencana alam akan menjadi 59 unit akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
26	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk relokasi pada tahun 2023
27	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		√	3,99	0,00				29,92	0	apaian Pengurangan Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2023 seluas 3,99 Ha. Luas Kumuh di Kota Balikpapan per Tahun 2023 seluas 0 Ha (SK.Walikota Tahun 2020), namun erbit SK.Walikota Nomor : 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan dengan Luasan Kumuh baru seluas 29,92 dikarenakan pada tahun 2023

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											terdapat penanganan kawasan kumuh seluas 3.99 Ha maka sisa luasan kawasan kumuh seluas 25.93 Ha
28	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		√	26	355	251	499	389	100	250	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian.
29	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		√	49,91	78,90	103,90	128,90	153,30	3,99	11,08	Pekerjaan Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai berupa Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman, Perbaikan saluran Drainase, dan Jalan Lingkungan.
30	Jumlah rumah di kab/kota		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202539		Jumlah rumah formal dan swadaya tahun 2022 dari pendataan RP3KP tahun 2022
31	Jumlah unit PK RTLH		√	26	355	251	499	389	100	250	11 Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 : 1. kelurahan karang rejo 2. kelurahan karang jati

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi	Proyeksi	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											3. kelurahan gunung sari ulu 4. kelurahan sumber rejo 5. kelurahan sungai angka 6. kelurahan baru ilir 7. kelurahan manggar baru 8. kelurahan karang joang 9. kelurahan damai 10. kelurahan prapatan 11. kelurahan klandasan ili
32	Jumlah rumah tidak layak huni		√	5565	5210	4959	4460	4071	351	258	Jumlah Data Baseline Rumah Tidak Layak Huni yang akan ditangani di Kota Balikpapan sesuai Target Renstra Disperkim
33	Jumlah rumah yang tidak dihuni		√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	Belum dilakukan pendataan
34	Rasio rumah dan KK		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202539:2249748		
35	Jumlah rumah pembangunan baru		√	13176	18176	23176	28176	33176	240		109 unit Rumah Swadaya 131 unit Rumah Formal
36	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		√	35524	37300	39165	41123	43179	4963	2446	Perumahan yang terfasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Kota
37	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		√	22245	43145	48873	53760	59136	116.014 unit		jumlah unit rumah yang terlayani: s.d akhir tahun 2022 = 115.049 unit tahun 2023 = 965 unit
38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		√	0	0	0	0	0	202539		Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2022
39	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		√	0	0	0	0	0	0	0	Kewenangan SPM Akses Sanitasi (On Site/Off Site) Tahun 2023 sudah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
40	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		√	0	0	0	0	0	6	6	Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan
41	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		√	0	0	0	0	0	40755		Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2023
42	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak ada pengembang yang tersertifikasi di

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											tahun 2023
43	Jumlah pengembang yang terregistrasi		√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak ada pengembang yang yang terregistrasi di tahun 20223 karena TIM SRP2 belum terbentuk
44	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		√	50	50	50	50	50	16	50	13 Perusahaan Pengembang 3 Asosiasi Perumahan
45	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		√	0	0	0	0	0	0	0	Tidak terdapat update data
46	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		√	0	0	0	0	0	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2023, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi
47	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		√	2,75	2,57	2,45	2,22	2,01	16,81	0,26	Tahun 2023 terdapat 3,99 penanganan kumuh, terdapat SK kumuh baru tahun 2023 sebesar 29,92 untuk di bawah 10 Ha
48	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		√	97,25	97,43	97,55	97,88	97,99	99,83	99,95	Terdapat 351 rumah tidak layak huni

2.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan

Anggaran belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota T.A. 2023 semua bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2023. Adapun jumlah rincian pelaksanaan anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel .2.5

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Balikpapan
Tahun 2023

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
23.171.999.815	28.023.816.668,00	23.870.222.903,00	85.18

Adapun rincian program dan kegiatan dalam belanja langsung sebagai berikut:

Tabel 2.6

Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan
Kota Balikpapan
Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Keuangan (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)	(%)
			(%)		
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN					
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.127.990.000,00	5.686.420.901,00	79,78	1.441.569.099,00	20,22
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
(2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.975.000,00	14.741.000,00	98,44	234.000,00	1,56
(3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	365.869.200,00	325.608.300,00	89,00	40.260.900,00	11,00
(4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.972.650,00	95.437.000,00	90,92	9.535.650,00	9,08
(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000,00	458.246.492,00	99,62	1.753.508,00	0,38
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
(6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.162.275.400,00	1.140.983.800,00	98,17	21.291.600,00	1,83
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
(7) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
(8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.785.000,00	94.593.000,00	75,20	31.192.000,00	24,80
(9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	848.717.368,00	706.775.680,00	83,28	141.941.688,00	16,72
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
(10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	380.769.750,00	227.193.848,00	59,67	153.575.902,00	40,33
(11) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.157.000,00	78.797.088,00	68,43	36.359.912,00	31,57
(12) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.247.500,00	47.839.250,00	54,83	39.408.250,00	45,17
(13) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	197.915.607,00	98,96	2.084.393,00	1,04

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)			Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Keuangan (Rp)	(%)		
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
(14) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60	100.000,00	0,40
1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
(15) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	59.700.000,00	55.383.600,00	92,77	4.316.400,00	7,23
(16) Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	66.950.000,00	57.706.960,00	86,19	9.243.040,00	13,81
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
(17) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	250.000.000,00	27.081.900,00	10,83	222.918.100,00	89,17
(18) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.354.880,00	98,35	1.645.120,00	1,65
(19) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	455.000.000,00	71.355.888,00	15,68	383.644.112,00	84,32
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					
(20) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4.272.903.500,00	3.764.814.399,00	88,11	508.089.101,00	11,89
(21) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.820.000.000,00	1.245.169.594,00	68,42	574.830.406,00	31,58
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					
(22) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	650.000.000,00	575.276.127,00	88,50	74.723.873,00	11,50
(23) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	155.000.000,00	152.852.420,00	98,61	2.147.580,00	1,39
1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)					
(24) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	50.000.000,00	43.823.800,00	87,65	6.176.200,00	12,35
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)			Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Keuangan (Rp)	(%)		
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
(25) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	55.646.000,00	55.195.300,00	99,19	450.700,00	0,81
(26) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	524.699.600,00	489.740.261,00	93,34	34.959.339,00	6,66
(27) Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	99.008.700,00	96.456.500,00	97,42	2.552.200,00	2,58
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
(28) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	103.128.500,00	102.155.600,00	99,06	972.900,00	0,94
(29) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.303.388.000,00	2.294.869.680,00	99,63	8.518.320,00	0,37
(30) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1.001.909.800,00	867.444.541,00	86,58	134.465.259,00	13,42
(31) Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	77.868.200,00	76.064.350,00	97,68	1.803.850,00	2,32
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
(32) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100.000.000,00	87.046.945,00	87,05	12.953.055,00	12,95
(33) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.824.855.500,00	4.581.643.292,00	94,96	243.212.208,00	5,04
(34) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	30.000.000,00	23.334.900,00	77,78	6.665.100,00	22,22
TOTAL KESELURUHAN	28.023.816.668,00	23.870.222.903,00	85.18	4.153.593.765,00	14.82

Adapun identifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Renja Tahun 2023

Adapun faktor pendorong untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program-program, dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi renja Dinas Perumahan Dan

Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang profesional yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang kerja;
2. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku.
3. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan perencanaan.
4. Koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal dan eksternal dengan instansi terkait serta pihak terkait lainnya.
5. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
6. Adanya data permukiman yang telah update
7. Adanya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan
8. Telah disusun dokumen Peraturan Wali Kota Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan
- 9.

a. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Renja Tahun 2023

Adapun identifikasi faktor penghambat pelaksanaan renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidakkonsistenan antara jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran antara dokumen Renstra, Renja dan APBD dikarenakan adanya penyesuaian anggaran KUA-PPAS yang lebih rendah dari anggaran program dan kegiatan pada Dokumen Renstra dan Renja Akhir
2. Adanya penyesuaian anggaran sesuai KUA-PPAS maka target kinerja juga menyesuaikan anggaran, apabila anggaran kegiatan lebih sedikit dari usulan renja maka target kinerja pun akan berkurang jika pada kegiatan yang anggaran dan kinerja saling tergantung.
3. Adanya program dan kegiatan terkait perencanaan dan evaluasi pada dokumen Renstra yang tidak dilaksanakan pada APBD karena dianalisis kurang prioritas karena menyesuaikan anggaran KUA-PPAS.
4. Kurangnya komitmen untuk merealisasikan target kinerja dan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas.
5. Penyusunan draf penyusunan RKA Tahun 2025 sebagai bahan perencanaan yang disusun pada awal tahun 2024 berdasarkan pada standarisasi tahun 2024 sedangkan penyusunan standarisasi tahun 2025 ditetapkan sekitar triwulan IV Tahun 2024 sehingga pada saat penyusunan RKA Tahun 2025 berubah menyesuaikan standar tahun 2025 dan terdapat selisih jumlah.
6. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan satandar pelayanan penanganan Kawasan kumuh.
7. Belum disusunnya peraturan terkait penerapan SPM
8. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman

Terintegrasi.

9. Pencegahan dan penanganan permukiman kumuh belum dilakukan secara terpadu.
10. Belum optimalnya kolaborasi antar dinas terkait (Bappedalitbang, Dinas PU, BPBD, DPPR, dan DLH) dalam penanganan kumuh)
11. Terdapat permukiman kumuh di atas 10 Ha-15Ha yang belum diintervensi Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang belum diintervensi Pemerintah Pusat.
12. Adanya perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kota Balikpapan akibat perpindahan Ibu Kota Negara menimbulkan potensi permukiman kumuh baru.
13. Belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta rendahnya ketersediaan utilitas pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
14. Masih adanya permukiman illegal.
15. Masih terdapat sarana dan prasarana permukiman yang belum terpenuhi.
16. Proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan rumah tidak layak huni yang memerlukan waktu relatif lama.
17. Masih adanya PSU Perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan
18. Sarana dan prasarana pemeliharaan PSU Perumahan yang belum memadai.
19. Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dan sarana prasarananya
20. Pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif
21. Masih adanya *backlog* kepemilikan rumah;
22. Masih adanya rumah yang berada pada rawan risiko bencana.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025 dilakukan terlebih dahulu inventarisasi isu-isu strategis untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan urusan perumahan dan permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Adapun isu-isu utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang harus diselesaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Isu-isu Bidang Permukiman Tahun 2025

No	Isu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih terdapat rumah tidak layak huni	Masih terdapat Rumah Masyarakat yang Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh
2	Masih terdapat kawasan permukiman yang termasuk dalam kategori Kumuh dan Resiko Kumuh baru	Masih terdapat kawasan Kumuh	Melakukan Penanganan/Pemugaran Permukiman Kumuh dan melakukan tindakan pencegahan untuk Resiko munculnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Baru
3	Dampak dari perpindahan IKN	Potensi munculnya Kawasan kumuh Baru	Pencegahan untuk menghindari munculnya Kawasan Kumuh baru akibat penambahan penduduk
4	Pentingnya update data secara digital Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) terutama data RTLH pada kawasan Kumuh dan diluar Kumuh	Belum tersedianya data lengkap rumah tidak layak huni yang terverifikasi dan update periodik secara digital	Pelaksanaan <i>updating</i> data secara digital

15

2. Isu-isu Bidang Perumahan

NO	ISU	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Pentingnya update data perumahan, data rumah pada kawasan rawan bencana;	Belum tersedianya data perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang ter-update secara periodik	Pelaksanaan <i>updating</i> data secara periodik
2	Perencanaan dan pengembangan perumahan yang belum optimal	belum sesuai perencanaan perumahan dengan data topografi/kontur kawasan perumahan dan data kepemilikan lahan, adanya alih fungsi pemanfaatan lahan non komersial di dalam kawasan perumahan, rendahnya pelaksanaan pengawasan pengembangan perumahan	Bersinergi antar OPD terkait dan internal DISPERKIM dalam hal perizinan dan pengawasan pengembangan perumahan
3	Perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan dilayani ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai;	Belum optimalnya penyediaan rumah yang memenuhi standar rumah layak huni serta fasilitas PSU dalam kawasan perumahan dan permukiman yang belum memadai	Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
4	Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun/vertical di masih di tempat yang jauh dari perkotaan;	Adanya peningkatan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan permukiman	Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;

17

2. Isu-isu Bidang Perumahan

NO	ISU	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
5	Masih adanya masyarakat yang membeli rumah tidak berizin	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait data perumahan yang berizin	Sistem informasi penyediaan data secara elektronik melalui Master Data Perumahan Berizin di Kota Balikpapan
6	Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	- Belum tersedianya Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan - Belum optimalnya informasi kepada perangkat pemerintah setempat dan masyarakat terkait adanya layanan SPM Bidang Perumahan Rakyat	- Saat ini telah ada draft Nasmik dan Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan - Meningkatkan edukasi kepada perangkat pemerintah setempat dan masyarakat baik secara langsung melalui sosialisasi maupun melalui website
7	Belum tersedianya wadah untuk melindungi hak dan kewajiban penghuni RUSUNAMI	Belum terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di RUSUNAMI	Meningkatkan koordinasi dan memberi layanan konsultasi/pendampingan bagi masyarakat dan pengembang RUSUNAMI dalam pembentukan P3SRS
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa	Kurangnya SDM di UPTD Rusunawa	Terpenuhinya SDM di UPTD Rusunawa sehingga bisa berjalan secara optimal
9	Peningkatan pelayanan penghunian rusunawa	Belum terintegrasinya data realtime jumlah penghunian yang dapat diakses oleh masyarakat umum	Pengintegrasian layanan secara elektronik/digital

18

3. Isu –isu Bidang Pertamanan Dan Permukiman (PSU)

No	Isu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum semua prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan yang ada di Balikpapan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan	Pengembang belum mengajukan permohonan penyerahan PSU	Peningkatan Sosialisasi Kewajiban Penyerahan PSU oleh Pengembang
2	Keterbatasan Ketersediaan Layanan Penyerahan PSU	Ketersediaan SDM terbatas	Penambahan layanan dengan tenaga outsourcing
3	Kurangnya kualitas informatif data PSU Perumahan	Kemampuan kelola data statistik yang rendah	Peningkatan Informatif Data Sektor PSU Perumahan
4	Potensi Ketidaksihinggaan pemanfaatan PSU Perumahan	Belum intensifnya pelaksanaan monitoring pemanfaatan PSU	Peningkatan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam monitoring kawasan perumahan
6	Masih terdapat kawasan perumahan yang belum terlayani PSU yang memadai	Tingkat penyerahan PSU rendah	Meningkatkan animo dan kesadaran penyerahan PSU
7	Keterbatasan layanan perbaikan lampu PJU	Ketidaksihinggaan Alat Kerja dan SDM	Penyediaan Alat Kerja dan SDM Teknis
8	Proses Penyerahan PSU masih menjelimet	Ada proses yang masih berpotensi bisa dipercepat dan dipangkas	Evaluasi Bisnis Proses, SOP dan Perwali
9	Kualitas dan Kuantitas Monitoring Pertumbuhan PSU Perumahan	Data kurang update dan informatif	Pengembangan sistem monitoring efektif periodik

20

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022, maka Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

A. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas:

- menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
- b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- c. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
- d. pengoordinasian penataan prasarana, sarana dan utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
- e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
- g. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
- i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
- j. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- m. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- n. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- o. pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- p. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
- q. pembinaan dan pengendalian UPTD;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat; dan
- l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;

- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
 - i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
 - o. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 - p. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
 - q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
 - r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1) rencana strategis;
 - 2) rencana kerja;
 - 3) rencana kerja tahunan;
 - 4) penetapan kinerja; dan
 - 5) laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;

- f. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- i. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- j. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran /dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- l. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- m. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- n. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- o. menyusun laporan keuangan Dinas;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG PERUMAHAN

Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perumahan.

Bidang Perumahan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program dan kegiatan di Bidang Perumahan;
- b. pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pengendalian penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- d. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- e. pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
- f. penyusunan dan pengumpulan data bahan evaluasi dan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan rumah susun umum atau rumah khusus;
- h. pelaksanaan proses rekomendasi rencana tapak pembangunan dan pengembangan perumahan;
- i. penyediaan data, informasi dan kajian mengenai penerbitan izin pembangunan dan pengembangan rumah;
- j. pengoordinasian layanan izin pembangunan dan pengembangan perumahan

- k. melaksanakan persiapan teknis untuk bahan penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun dan pelaksanaan proses penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- l. pelaksanaan pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah tingkat kemampuan kecil;
- m. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;
- n. perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PERMUKIMAN

Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Permukiman.

Bidang Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Permukiman;
- b. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis penataan kawasan kumuh dan rawan bencana di permukiman;
- c. pelaksanaan survei dan penelitian penataan kawasan kumuh dan rawan bencana di permukiman;
- d. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahan penataan permukiman kumuh dan rawan bencana di permukiman;
- e. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. penyusunan dan penyiapan data bahan evaluasi dan pengembangan penataan permukiman kumuh dan rawan bencana di Permukiman;
- g. pengaturan penataan bangunan di kawasan kumuh dan rawan bencana, sarana prasarana dan fasilitas lingkungan;
- h. penyusunan data dan informasi kebijakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan survei lapangan dalam rangka analisis kesesuaian pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- j. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan permukiman;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman untuk menjamin pencegahan permukiman kumuh dan pembangunan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur;
- l. pengoordinasian layanan administrasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pertamanan dan Permakaman.

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Pertamanan dan Permakaman;
- b. penyusunan pedoman operasional perencanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, penyediaan prasarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dan kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. pelaksanaan kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.
- f. pelaksanaan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dari pengembang;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan tim verifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Perumahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Permukiman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pertamanan dan Permakaman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. UPTD.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi



1.4 Review tentang Rancangan Akhir SKPD

Review Rancangan Akhir Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan sebagaimana tersebut pada tabel review terhadap rancangan Akhir RPKD Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

1.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan tidak terdapat usulan dari masyarakat. Namun telah dilaksanakan forum perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025 yang dihadiri oleh peserta dari perangkat daerah sebagaimana terlampir.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunan, secara operasional bidang permukiman rakyat dan kawasan permukiman. Adapun telaah urusan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang urusan Perumahan dan Permukiman tercantum dalam Urusan Wajib pembangunan nasional. Berdasarkan UU no. 23 tahun 2014 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1

Pembagian Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.
3	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota
4	Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU Perumahan
5	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Disperkim Tahun 2025 didasari pada arah

kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tabel 4.

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
1	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	0%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2024 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	2.13%	
3	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani	23.61 Ha	
4	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	150 unit	
5	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	18.18%	

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Disperkim Kota Balikpapan , sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 adalah Meningkatkan infrastruktur yang terpadu dan berkualitas.

Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu

pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks kepuasan layanan infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Indeks kepuasan layanan infrastruktur didukung oleh indikator yang dihasilkan oleh Disperkim Kota Balikpapan, yaitu indikator tujuan persentase permukiman layak huni.

a. Sasaran

Upaya pencapaian tujuan Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 , didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni.
2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU.
3. Berkurangnya luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.
4. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran ini memiliki indikator Nilai SAKIP Disperkim.

Tabel 5.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,05%	99,32%	99,50%	99,78%	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,00%	99.83%	99.95%	100%	akan menggunakan akan Baseline baru di pendataan tahun 2024 karena rencana sudah tercapai di tahun 2025
1.2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,70%	16,75%	12.18%	18.18%	28.26%	36.42%
1.3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0,00%	32,56%	51.47%	67.78%	84.00%	100.00%
1.4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	NA	27	75	76	78	80

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2025 , Dinas Perumahan dan Permukiman mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Memperhatikan rancangan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 , rancangan rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 merujuk pada tema pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024 yaitu Mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif. Program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan masuk ke misi ke 3 RPJMD Tahun 2021 -2026 yaitu **“Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai”**

b. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Target TPB yang diampu dan menjadi salah satu indikator program pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Target 11.1 yaitu Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.1

TPB memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

c. Pengentasan Kemiskinan.

Salah satu tujuan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2025 adalah pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung tujuan pengentasan kemiskinan ini terdapat perbaikan rumah tidak layak huni dan juga memberikan kemudahan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2025 terintegrasi dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

e. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diampu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada rancangan renja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2025 terdiri atas 4 Program, 14 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan rancangan renja Akhir Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025, sebagaimana terlampir

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang terdapat pada urusan yaitu urusan bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menyusun rancangan akhir rencana kerja tahun 2025 dan menguraikan dalam 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) Sub kegiatan yang terdapat Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **49.999.977.311,00** yang berasal dari APBD Kota Balikpapan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Program Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Merupakan Prioritas Program yang menjadi Urusan Wajib pada Belanja Langsung, dengan usulan program dan pagu anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.1

Usulan Program Prioritas

NO	PROGRAM	PAGU DANA
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	14,120,877,650.00
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,464,451,500.00
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6,295,548,500.00
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11,860,036,950.00
	JUMLAH	34,740,914,600.00

Tabel 4.2

Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Prioritas

PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN PAGU RENJA Akhir 2025
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	275.000.000,00
1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	50,000,000.00
1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	50,000,000.00
1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	75.000,000.00
1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000.00

PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN PAGU RENJA Akhir 2025
1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000.00
1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	350.000.000,00
1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100,000,000.00
1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	75,000,000.00
1.04.02.2.02.0007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25,000,000.00
1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	100,000,000.00
1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50,000,000.00
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	425.000.000,00
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	180,000,000.00
1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	225,000,000.00
1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3.259.969.000,00
1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50,000,000.00
1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2,834,969,000.00
1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	375,000,000.00
1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	50.000.000,00
1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	50,000,000.00
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.464.451.500,00
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	625.000.000,00
1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	625,000,000.00

PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN PAGU RENJA Akhir 2025
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	89.451.500,00
1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	89.451.500,00
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.1750.000.000,00
1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	100,000,000.00
1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1.650.000.000.00
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.295.548.500,00
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.295.548.500,00
1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.066.693.500
1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	500,000,000.00
1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	728.855.000.00
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.860.036.950,00
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.860.036.950,00
1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.289.706.800.00
1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.394.314.150.00
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	265,000,000.00
1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	1.911.016.000.00
1.04.0.00.0.00.01.0001 UPTD RUSUNAWA	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	9.760.908.650,00
1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2,585,908,650.00
1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2.575.000.000,00

b. Program Pendukung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Merupakan program untuk mendukung pelaksanaan program utama (Urusan Wajib / Belanja Langsung), dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Usulan Program Pendukung

NO	PROGRAM	PAGU DANA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	15,259,062,711.00
	JUMLAH	15,259,062,711.00

Berdasarkan tabel diatas, program penunjang Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2025 terdiri dari 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pendukung

PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN PAGU RENJA Akhir 2025
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,259,062,711,00
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,868,017,00
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,868,017,00
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,318,157,775.00
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,318,157,775.00
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	546.800.000,00
1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46,800,000.00
1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500,000,000.00
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	974,990,775,00
1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	464,992,670.00
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114,999,806.00
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000.00
1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75,000,000.00

PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN PAGU RENJA Akhir 2025
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,135,996,553,00
1.04.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,062,651,500.00
1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,963,147,000.00
1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	420,887,775.00
1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	689,310,258.00
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.001.594.250
1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,600,000.00
1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000.00
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	794,994,250.00
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.655.885
1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	635,320,500.00
1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300,446,250.00
1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	999,985,135.00
1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,904,000.00

4.2 RENCANA ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2024

Adapun rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2025 hasil input melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam bidang urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga harus mengambil kebijakan yang ditindaklanjuti oleh serangkaian kegiatan yang komprehensif sehingga benar-benar dapat merealisasikan tanggung jawabnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan, maka pada tahun anggaran 2025 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan merencanakan program kerja yang terdiri dari 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) Sub kegiatan yang terdapat pagu APBD. Program kerja tersebut akan menjadi acuan bagi setiap bidang-bidang dalam menjalankan rencana aksi pelaksanaan kegiatan dengan harapan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025, semoga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2025 sesuai perencanaan program kerja dan menghasilkan outcome yang berkualitas.

E. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk menyikapi hal tersebut, Rencana Kerja mencakup:

- a) Pernyataan strategi, tujuan dan sasaran organisasi;
- b) Rumusan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c) Uraian tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan;
- d) Uraian tentang permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun ke depan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi penanggungjawab sekaligus pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun BPBD Kota, dimana hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi, komando dan pelaksana teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 alinea ke empat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Disamping itu berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa konsekuensi Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah dan dokumen pengelolaan keuangan daerah, serta mengacu pada Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Maka dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Perencanaan Strategi Organisasi Perangkat Daerah tetap harus berpedoman pada Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman” serta BPBD Kota Balikpapan mendukung misi ke empat RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026, yaitu “Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang Berwawasan Lingkungan” serta melaksanakan dan mendukung salah satu dari sembilan program prioritas kepala daerah terpilih pada point enam (6), yaitu nyaman lingkungan dan sosial dengan program OPD yaitu “Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, sebagai acuan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2025.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang baik perlu disusun Renja Tahun 2025 yang sistematis dan akuntabel. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 disusun mengacu pada tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan 2021- 2026 yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD tahun 2021- 2026, yaitu “Meningkatkan Nilai Indeks Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana dan Kebakaran”. Renja juga disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan

Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 dilengkapi

dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2025 di Kota Balikpapan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4723);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
15. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan

- reformasi birokrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang jabatan fungsional analis kebakaran;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan;
 19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 22. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 23. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 tahun anggaran.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD

TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi Walikota Terpilih adalah **“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”** serta BPBD Kota Balikpapan mendukung misi ke empat RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026, yaitu **“Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang Berwawasan Lingkungan”** serta melaksanakan dan mendukung salah satu dari sembilan program prioritas kepala daerah terpilih pada point enam (6), yaitu nyaman lingkungan dan sosial yang di tuangkan dalam **“Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Serta Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran”**

memiliki Tujuan ” **Meningkatkan Nilai Indeks Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana dan Kebakaran** “ Sedangkan Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan Yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan Yang Menjadi Korban Bencana
2. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 dijabarkan mengenai rencana kegiatan kerja yang telah menjadi komitmen perangkat daerah untuk dicapai dalam tahun 2023 melaksanakan 1 (satu) urusan, 3 (Tiga) Program dan 18 (Delapan Belas) kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75 %)	Rendah (50,01% ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	98 %	√				
	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Tingkat waktu Tanggap	111 %	√				
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	92%	√				

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			PAKi x Cki	(PAKi x Cki)-RAKi	Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	5 %	4,93 %	98	4.136.090.000	4.004.828.449	97	409.472.910.000	405.468.081.551	99,022%
	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap	90	100 %	111	38.919.964.900	38.267.533.263	98	4.320.116.103.900	4.281.848.570.637	99,114%
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan an Bencana Daerah Kota Balikpapan	55	60	92	36.305.428.100	34.901.921.378	96	3.340.099.385.200	3.305.197.463.822	98,955%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

1. Penanggulangan Bencana Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah
3. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut untuk semakin mengedepankan sumber daya manusia yang tangguh.

Tugas BPBD

Berdasarkan Perda Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tabel T-C.30
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kota Balikpapan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	Persen	5 %	4,93 %	98 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap	Persen	90 %	100 %	111 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	Nilai	60	55	92 %	Sangat Tinggi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penentuan isu – isu penting atau strategis pelayanan BPBD perluidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yang menjadi hambatan baik secara internal maupun eksternal dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan. Hambatan secara internal dan Eksternal adalah sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Belum semua petugas penanggulangan bencana dan kebakaran tersertifikasi;

- b. Kekurangan jumlah personil penanggulangan bencana dan kebakaran untuk tenaga operasional lapangan dan supir pemadam kebakaran;
- c. Adanya sertifikasi di bidang damkar dan kebencanaan dengan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sehingga banyak personil damkar yang tidak bisa ikut sertifikasi di beberapa bidang diklat;
- d. Tidak adanya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran yang berada di wilayah Indonesia bagian timur; dan
- e. Kurangnya SDM yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran.

B. Sarana Dan Prasarana

- a. BPBD belum mempunyai gedung kantor yang layak;
- b. Bangunan gedung UPTD PBD yang masih kurang memenuhi standar;
- c. Mobil tangga pemadam kebakaran di BPBD hanya menjangkau 32 meter (maksimal 8 lantai), sementara ada bangunan di Kota Balikpapan mencapai 96 meter (24 lantai);
- d. Beberapa unit damkar sudah berusia lebih dari 25 tahun perlu penggantian;
- e. Melihat kondisi topografi dan kelas jalan di Kota Balikpapan mobil damkar dengan kapasitas di bawah 5.000 liter harus lebih diperbanyak agar mampu menjangkau gang sempit;
- f. APD petugas operasional masih belum mencukupi untuk semua personil;
- g. Penggunaan IT sebagai penunjang kelancaran tugas harus dikembangkan;
- h. Belum semua acaman bencana mempunyai *Early Warning System* (EWS);
- i. Belum mempunyai unit yang mampu mengendalikan bahan beracun dan berbahaya (B3);
- j. Perlu pengembangan pencegahan kebakaran di kawasan yang dianggap rawan dengan membangun sistem pemadam kawasan; dan
- k. Belum adanya dermaga.

C. Dokumen Dasar Kebencanaan.

- a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
- b. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB);
- c. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Peta Rawan Bencana (PRB);
- d. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
- e. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKDB); dan
- f. Dokumen Rencana Kontinjensi harus disusun setiap jenis ancaman bencana.

D. Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

- a. Masih ada beberapa kawasan yang tidak masuk dalam WMK karena tidak mampu dijangkau dalam waktu maksimal 15 menit (*response time*) yaitu Kariangau, Teritip;
- b. Masih banyak kawasan yang tidak bisa di akses mobil damkar (gang sempit/ kawasan perbukitan); dan
- c. Belum ada UPTD Pesisir sehingga tidak bisa mengendalikan kebakaran dari wilayah pesisir.

E. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran.

- a. Pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB);

- b. Belum banyak terbentuknya Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran);
 - c. Belum banyak adanya sekolah aman bencana;
 - d. Belum banyak adanya rumah sakit aman bencana; dan
 - e. Belum banyak adanya kampung siaga bencana.
- F. Antisipasi dampak peningkatan ancaman bencana dan kebakaran akibat dari sebagai salah satu kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
- a. Peningkatan jumlah penduduk dengan pemindahan IKN; dan
 - b. Terus bertambahnya jumlah dan ketinggian bangunan.

2.3 Isu – Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu – isu strategi adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan kota yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

➤ Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Belum semua petugas penanggulangan bencana dan kebakaran tersertifikasi;	Kurangnya sertifikasi
		b. Kekurangan jumlah personil penanggulangan bencana dan kebakaran untuk tenaga operasional lapangan dan supir pemadam kebakaran;	Kurangnya personil
		c. Adanya sertifikasi di bidang damkar dan kebencanaan dengan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sehingga banyak personil damkar yang tidak bisa ikut sertifikasi di beberapa bidang diklat;	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi
		d. Tidak adanya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran yang berada di wilayah Indonesia bagian timur; dan	Kurangnya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran
		e. Kurangnya SDM yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran.	Kurangnya kompetensi
2.	Sarana dan Prasarana	a. BPBD belum mempunyai gedung kantor yang layak;	Kondisi kantor kurang layak
		b. Bangunan gedung UPTD PBD yang masih kurang memenuhi standar;	Kondisi bangunan belum standar
		c. Mobil tangga pemadam kebakaran di BPBD hanya menjangkau 32 meter (maksimal 8 lantai), sementara ada bangunan di Kota Balikpapan mencapai 96 meter (24 lantai);	Kurangnya kemampuan sarana dan prasarana
		d. Beberapa unit damkar sudah berusia lebih dari 25 tahun perlu penggantian;	Kurangnya peremajaan kendaraan
		e. Melihat kondisi topografi dan kelas jalan di Kota Balikpapan mobil damkar dengan kapasitas di bawah 5.000 liter harus lebih diperbanyak agar mampu menjangkau gang sempit;	Akses jalan kurang memadai
		f. APD petugas operasional masih belum mencukupi untuk semua personil;	Kurangnya jumlah APD
		g. Penggunaan IT sebagai penunjang kelancaran tugas harus dikembangkan;	Kurangnya pemanfaatan IT

		h. Belum semua acaman bencana mempunyai <i>Early Warning System</i> (EWS);	Kurangnya pengadaan EWS
		i. Belum mempunyai unit yang mampu mengendalikan bahan beracun dan berbahaya (B3);	Kurangnya pengadaan kendaraan
		j. Perlu pengembangan pencegahan kebakaran di kawasan yang dianggap rawan dengan membangun sistem pemadam kawasan; dan	Kurangnya sistem pemadam kawasan
		k. Belum adanya dermaga.	Belum adanya dermaga
3.	Dokumen Dasar Kebencanaan	a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);	Perlunya pembaharuan RISPK
		b. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKDB); dan	Belum adanya dokumen RPKDB
		c. Dokumen Rencana Kontinjensi harus disusun setiap jenis ancaman bencana.	Belum lengkapnya dokumen Rencana Kontinjensi per bencana
		d. Masih ada beberapa kawasan yang tidak masuk dalam WMK karena tidak mampu dijangkau dalam waktu maksimal 15 menit (<i>response time</i>) yaitu Kariangau, Teritip;	Kurangnya jumlah UPTD
		e. Masih banyak kawasan yang tidak bisa di akses mobil damkar (gang sempit/ kawasan perbukitan); dan	Badan jalan kurang lebar
		f. Belum ada UPTD pesisir sehingga tidak bisa mengendalikan kebakaran dari wilayah pesisir.	Belum adanya UPTD pesisir
4.	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	a. Pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB);	Kurangnya legalitas forum PRB
		b. Belum terbentuknya Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran);	Kurangnya Redkar
		c. Belum adanya sekolah aman bencana;	Belum adanya sekolah aman bencana
5.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran	a. Belum adanya rumah sakit aman bencana; dan	Belum adanya rumah sakit aman bencana
		b. Belum adanya kampung siaga bencana.	Kurangnya kampung siaga bencana
		c. Peningkatan jumlah penduduk dengan pemindahan IKN; dan	Pertambahan penduduk
		d. Terus bertambahnya jumlah dan ketinggian bangunan	Pertambahan jumlah dan tinggi bangunan
		e.	
6.	Antisipasi dampak peningkatan ancaman bencana dan kebakaran akibat dari sebagai salah satu kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN)	a.	
		b.	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan masih banyak terdapat kegiatan – kegiatan yang tidak terlaksana, ini diakibatkan tidak pahamnya atau mengertinya tentang bencana tersebut. Dalam proses perumusan program kegiatan pada BPBD telah dirancang sesuai dengan jenis bencana dan besar dampak yang terjadi akibat bencana.

Tabel T-C.31
REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA BALIKPAPAN

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 20224												
Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan												
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					42.401.500.000					42.401.500.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		33.156.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		33.156.500.000		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	76 Nilai	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	76 Nilai	10.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Dokumen	22.700.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Dokumen	22.700.000.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Paket			
		Balikpapan	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		120.000.000		Balikpapan	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		120.000.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	20 Laporan	2.850.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	20 Laporan	2.850.000.000		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	9 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	9 Unit			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	0 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	0 Unit			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	1 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	1 Unit			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1 Unit			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	12 Unit	1.525.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	12 Unit	1.525.000.000		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Orang		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Orang			
		Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah		200.000.000		Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah		200.000.000		
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 Orang		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 Orang			
		Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		150.000.000		Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		150.000.000		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92,5 %	6.610.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92,5 %	6.610.000.000		
		Balikpapan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1.000.000.000		Balikpapan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1.000.000.000		
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	200.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	200.000.000		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	250 Orang		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	250 Orang			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10Jenis	900.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10Jenis	900.000.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	0		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pola pikir penyusunan Renja diawali oleh kegiatan untuk membuat suatu perencanaan yang melibatkan komitmen dan penerahan tenaga serta diikuti oleh pengumpulan data dan analisis sehingga diperoleh rumusan yang disepakati. Dalam penyusunan renstra ini diperlukan tahap perumusan yaitu :

1. Diawali oleh keinginan untuk merencanakan yang diikuti dengan penerahan tenaga untuk pengumpulan data serta menganalisisnya sehingga diperoleh rumusan yang disepakati.
2. Mengimbas tata nilai yang merujuk kepada lima prinsip yaitu : kualitas, responsibilitas/tanggap dan bertanggungjawab, mutualbersama dan saling menguntungkan, efektif dan efisien serta kebebasan/ inovasi.
3. Meformulasi visi dan misi sehingga tergambar tujuan dan sarana serta strategis kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan dan perubahan.
4. Menetapkan modal strategis mengikuti sistem, organisasi dan mekanisme yang relevan dengan pelaksanaan.
5. Berkaca diri untuk menilai kinerja dan membandingkannya dengan sasaran atau keadaan yang ideal berdasarkan pencapaian tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dan ketersediaan sumber daya.
6. Mengintegrasikan rencana tindakan dalam bentuk program dan kegiatan.
7. Menyusun skenario alternatif/kemungkinan dengan merujuk kepada hasil analisa SWOT, sehingga ditentukan strategis kebijakan yang tepat berdasarkan kelayakan dari segi sumber daya dan dampaknya.
8. Implementasi berdasarkan kepada program/ kegiatan yang telah ditetapkan termasuk mengembangkan sistem informasi dan peningkatan kualitas sumber daya (peningkatan kemampuan aparat sebagai tujuan antara)

Dari hasil kegiatan Musrenbang Kota Balikpapan yang telah lalu, adapun yang diusulkan oleh pihak kecamatan terkait dengan program atau kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Balikpapan**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan							
No	Program / Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Alamat	Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3			4	5	6
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON						
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	RT 012 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kelurahan Baru Ilir	Balikpapan Barat	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Unit Instalasi Hydrant kering/ Tangki Tanam	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2025 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rencana program dan kegiatan didasari kepada ***Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara***. Disini BPBD berperan serta dalam proses melindungi segenap bangsa dalam penanggulangan bencana, dan memberikan kenyamanan pada warga dari semua faktor – factor penyebab bencana yang ada di Kota Balikpapan. Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut penanggulangan bencana serta pembangunan baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara konkrit dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi BPBD Kota Balikpapan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan dukungan kelembagaan yang handal dalam mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana yang handal.
- 2) Terlindunginya masyarakat Kota Balikpapan dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
- 3) Terlindunginya masyarakat Kota Balikpapan pada saat tanggap darurat.

- 4) Merehabilitasi dan merekonstruksi daerah terdampak bencana.


Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah :

1. Tersedianya dukungan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparaturnya serta dokumen – dokumen perencanaan dan evaluasi;
2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana;
3. Terpenuhinya kebutuhan korban bencana;
4. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana;

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam penentuan atau pengambilan bahan pertimbangan pembuatan program dan kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menentukan faktor – faktor yang menjadi rumusan program dan kegiatan sesuai dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian standar pelayanan minimum, pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah:

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - c. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- 
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan BPBD tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026
BPBD Kota Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		SUMBER DANA
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	15	16	11
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				39.118.999.100,00		45.649.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39.118.999.100,00		45.649.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				39.118.999.100,00		45.649.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	76 Nilai	76 Nilai	31.804.828.015,00	76 Nilai	36.044.000.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	-	73 Nilai	100.000.000,00	73 Nilai	60.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		1 Laporan	0,00	1 Laporan	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	100 %	25.000.000.000,00	100 %	25.000.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		170 Orang/bulan	25.000.000.000,00	170 Orang/bulan	25.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-	100 %	1.019.328.015,00	100 %	2.250.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>		10 Unit	289.328.015,00	10 Unit	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>		0 Paket	160.000.000,00	0 Paket	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		100 Orang	250.000.000,00	100 Orang	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 Unit	0,00	10 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	800.000.000,00	100 %	1.000.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Laporan	600.000.000,00	48 Laporan	650.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	200.000.000,00	12 Laporan	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	2.600.000.000,00	100 %	3.095.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		25 Unit	600.000.000,00	25 Unit	650.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		50 Unit	1.800.000.000,00	50 Unit	1.900.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		0 Unit	0,00	0 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	0,00	15 Unit	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	100.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	50.000.000,00	12 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	50.000.000,00	12 Unit	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		1 Ha	0,00	1 Ha	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2,	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	92 %	92 %	1.454.171.085,00	92 %	2.605.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	100 %	200.000.000,00	100 %	160.000.000,00	

1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>		1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>		1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>		5 Kawasan	250.000.000,00	5 Kawasan	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	-	100 %	150.000.000,00	100 %	570.000.000,00	
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas</i>		2 Laporan	50.000.000,00	2 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>		300 Orang	100.000.000,00	300 Orang	520.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	-	90 %	704.171.085,00	90 %	550.000.000,00	
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>		1 Dokumen	104.171.085,00	1 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>		3 Dokumen	150.000.000,00	3 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>		1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>		5 Laporan	200.000.000,00	5 Laporan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal</i>		30 Lembaga	250.000.000,00	30 Lembaga	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>		12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3,	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</i>	92,5 %	92,5 %	5.860.000.000,00	92,5 %	7.000.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran</i>	-	98 %	5.460.000.000,00	98 %	5.890.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i>		12 Dokumen	4.615.000.000,00	12 Dokumen	4.750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		365 Laporan	500.000.000,00	365 Laporan	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal</i>		3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>		20 Orang	200.000.000,00	20 Orang	160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya</i>		34 Desa/Kelurahan	0,00	34 Desa/Kelurahan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	<i>Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)</i>		1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>		300 Unit	145.000.000,00	300 Unit	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</i>		3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	<i>Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	-	90 %	100.000.000,00	90 %	160.000.000,00	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>		12 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	<i>Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran</i>	-	100 %	0,00	100 %	80.000.000,00	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian</i>		7 Dokumen	0,00	7 Dokumen	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	<i>Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</i>	-	79 %	0,00	79 %	450.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	<i>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</i>		250 Orang	0,00	250 Orang	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya</i>		4 Desa/Kelurahan	0,00	4 Desa/Kelurahan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	<i>umlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar</i>		Dokumen	0,0	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	<i>Persentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</i>	-	100%	300.000.000		420.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal</i>		12 Laporan	200.000.000		120000000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis</i>		100 Unit	100.000.000		300.000.000,0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah disusun berdasarkan tabel sebagai berikut:

1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah
a	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
b	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
e	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana
a	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
b	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
c	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
d	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
3	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
a	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran
b	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
c	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran
d	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
e	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

F. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan merupakan dokumen Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan Satuan polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Dalam Periode Tahun Anggaran 2025, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun .

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Satpol PP Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ;
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan ;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan Satpol PP dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 penyelenggaraan pemerintah di Bidang linmas, Penegakan, Trantibum, yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas dan indikasi kegiatan program dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN,

I.1 Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, *“Menyelenggarakan urusan penegakan perda dan perwali, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”*

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun, akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Kinerja Pemerintah Dalam rangka pencapaian visi misi walikota terpilih dan sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun 2023, menjalankan 2 (dua) urusan, 2 (dua) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 20 sub Kegiatan dengan total pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp. **40.102.500,00**

Dengan tabel sebagai berikut

Formulir E81

**Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2023**

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RKPD

1. Nilai reformasi birokrasi Perangkat Daerah Satpol.PP : 28
2. Ideks Kepuasan Masyarakat Satpol.PP : 77

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4a	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7 X 100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Satpol PP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKM internal Perangkat Daerah	77	81	134.058.268.845	26.859.788.736	78	29.198.724.053	0	28.746.284.809	0%	98,45%	0	55.606.073.545	0	41,48%	Satpol PP		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			117.573.268.845	24.463.871.358	78	26.328.120.857	0	25.437.374.619	0%	96,62%	0	49.901.245.977	0%	42,44%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				24.463.871.358	174	26.328.120.857	162	25.437.374.619	93%	96,62%	162	49.901.245.977					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum perang			4.540.000.000	522.852.482	77	631.180.200	0	862.088.150	0%	136,58%	0	1.384.940.632	0%	30,51%			

		kat daerah																
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				17.047.600	6	24.878.800	6	24.631.900	100%	99,01%	6	41.679.500				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				16.650.000	10	24.893.000	10	23.230.000	100%	93,32%	10	39.880.000				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				225.711.850	3	294.838.500	8	312.571.200	267%	106,01%	8	538.283.050				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan				44.896.750	7	86.569.900	7	85.566.500	100%	98,84%	7	130.463.250				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				218.546.282	24	200.000.000	43	416.088.550	179%	208,04%	43	634.634.832				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			695.000.000	19.717.500	100%	30.000.000	0%	27.972.000,00	0%	93,24%	0%	47.689.500	0%	6,86%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang				19.717.500	2	30.000.000	2	27.972.000	100%	93,24%	2	47.689.500				

		disediakan															
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layan an Penye diaan Jasa Penun jang Urusa n Pemer intaha n Daera h			3.430.000.000	595.714.099	100%	651.922.996	0%	607.505.633	0%	93,19%	0%	1.203.219.732	0%	35,08%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			172.582.470	4	200.000.000	4	179.647.101	100%	89,82%	4	352.229.571				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			423.131.629	12	451.922.996	12	427.858.532	100%	94,68%	12	850.990.161				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layan an Pemeli haraa n Baran g Milik Daera h Penun jang Urusa n Pemer intaha n Daera h			6.875.000.000	1.257.633.297	100%	1.557.500.000	0%	1.811.344.407	0%	116,30%	0%	3.068.977.704	0%	44,64%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar			1.135.125.782	59	1.232.500.000	59	1.190.237.891	100%	96,57%	59	2.325.363.673				

		pajak dan perizinannya																
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				49.229.500	3	50.000.000	16	49.309.100	533%	98,62%	16	98.538.600				
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				73.278.015	1	275.000.000	1	571.797.416	100%	207,93%	1	645.075.431				
Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								3,28	-			3,28	-				
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Personase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda		15%	29.411.124.512	3.481.278.000	13,5%	4.670.516.000	28%	8.557.165.305	207,41%	183,22%	28%	12.038.443.305	187%	40,93%		
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Personase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat		100%	24.866.124.512	3.375.265.500	100%	4.227.516.000	267,99%	7.984.218.443	267,99%	188,86%	267,9%	11.359.483.943	268%	45,68%		

	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan			291.125.000	365	647.575.000	134	809.806.750	360%	125,05%	1314	1.100.931.750				
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			2.244.940.500	144	1.635.476.000	30	2.559.551.693	21%	156,50%	30	4.804.492.193				
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan			792.000.000	12	1.740.750.000	8	4.480.414.000	67%	257,38%	8	5.272.414.000				

		ketertiban umum															
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				47.200.000	233	203.715.000	60	134.446.000	26%	66,00%	60	181.646.000			
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	98,50%	4.295.000.000	92.328.500	100%	373.000.000	163%	477.498.200	163%	128,02%	163%	569.826.700	165%	13,27%		
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/keompok masyarakat/pelembaga usaha				27.995.500	156	130.000.000	157	92.114.200	101%	70,86%	157	120.109.700			
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah					240	168.000.000	367	311.598.000	153%	185,48%	367	311.598.000			

		dan peraturan bupati/wali kota															
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP				64.333.000	10	75.000.000	11	73.786.000	110%	98,38%	11	138.119.000			
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	33,33%	250.000.000	13.684.000	33%	70.000.000	36%	95.448.662	109%	136,36%	0	109.132.662	108%	43,65%		
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perdatan perkada			13.684.000	1	70.000.000	7	95.448.662	700%	136,36%	7	109.132.662				
Rata-rata capaian kinerja (%)										139%	124,98%		73%	34%			

Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	162 %	118,03%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	104 %	140,83%			93,33 %	41,21 %		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan, memiliki sumber daya alam dengan kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sangat memungkinkan menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai penegakan perda Kota Balikpapan.

Dalam Lampiran peraturan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Bidang Dalam negeri di kabupaten kota disebut bahwa pelayanan standar minimum dan Kota adalah Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu, maka langkah yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

- a. Melakukan monitoring terhadap gangguan trantibum dengan instansi terkait dijalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang ketertiban, ketentraman dan keindahan.
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui piket pelayanan masyarakat/call center.
- e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan instansi terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
- f. Monitoring dan evaluasi

Untuk dapat melakukan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja		69,65	60,98	70	71	72	70,09	69,05	60,98	-	-	
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP		75	77	79	81	83	-	81,25	93,13	-	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas fungsi dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan permasalahan perangkat, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah digambarkan sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Belum idealnya sarana dan prasarana	1.	Belum ada Kejelasan Kepemilikan Aset Gedung Kantor	Keterbatasan Anggaran	
		2.	Keterbatasan Kendaraan Operasional		
		3.	Keterbatasan Perlengkapan Operasional		
2	Belum idealnya personel Satpol PP	1.	Jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk	1.	Kurangnya Sosialisasi Kinerja Satpol PP
		2.	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personel Satpol PP	2.	Adanya Moratorium pegawai
		3.	Kurangnya Kepercayaan terhadap Satpol PP	3.	Jumlah Personil Satpol PP
3	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Linmas Dalam Membantu Penyelenggaraan Trantibum	1.	Jumlah personel Linmas	Keterbatasan Anggaran Linmas	
		2.	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personil Linmas		
		3.	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Tugas Kelinmasan		
4	Belum maksimalnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1.	Kurangnya Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Sosialisasi) Kepada Masyarakat terkait Perda dan Perkada	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah	
		2.	Kurangnya Personel Satpol PP dan PPNS Selaku Penegak Perda		
		3.	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Tugas Pembinaan, Pengawasan dan		

			Penyuluhan (Sosialisasi) Kepada Masyarakat terkait Perda dan Perkada	
5	Belum optimalnya penegakan perda dan perkada	1.	Terjadinya Gangguan Trantibum	1. Tidak Mudah nya Merubah Prilaku Masyarakat
		2.	Belum Terlaksananya SOP	
		3.	Kurangnya Sinergitas dan Koordinasi Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	2. Lingkup Lingkungan Wilayah/Masyarakat
		4.	Adanya Kejadian Luar Biasa (Pandemi) Sehingga Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada Terhambat	3. Kurang pemahaman terhadap pandemi covid
6	Terbatasnya kewenangan Satpol PP dalam penegakan perda dan perkada	Bahwa Personel Satpol PP Tidak Secara Otomatis Menjadi PPNS, Sehingga Proses Penyidikan Sampai dengan ke Persidangan, Terhambat Dikarenakan Tidak Adanya Kewenangan Personil Pol PP yang Bukan Merangkap Sebagai PPNS		Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
7	Bertambahnya beban cakupan penyelenggaraan trantibum terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	1.	Adanya Penambahan Mobilisasi Masyarakat Pendatang	Adanya Keterbatasan Lahan dan Fasilitas

Isu isu strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

No	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Belum ada Kejelasan Kepemilikan Aset Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana yang ada memang sudah tidak layak pakai namun masih bisa dimanfaatkan / dipergunakan.
2	Keterbatasan Kendaraan Operasional	Pengadaan Kendaraan Operasional
3	Keterbatasan Perlengkapan Operasional	Pengadaan Peralatan Operasional
4	Jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk	Penambahan jumlah personil setiap tahun

5	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personel Satpol PP	SDM yang ada dapat melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan.
6	Adanya Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Satpol PP	Kurangnya Pengetahuan tentang Produk Hukum Daerah.
7	Jumlah personel Linmas	Penambahan jumlah personil linmas masing masing kelurahan
8	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Tugas Kelinmasan	Penambahan pengadaan sarana dan prasarana linmas
9	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personil Linmas	Pelatihan peningkatan SDM Linmas
10	Kurangnya Personel Satpol PP dan PPNS Selaku Penegak Perda	Penambahan personil satpol PP dan PPNS
11	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Tugas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Sosialisasi) Kepada Masyarakat terkait Perda dan Perkada	Meningkatkan pendukung sarana dan prasarana
12	Terjadinya Gangguan Trantibum	Melakukan Sosialisasi Ke masyarakat dalam kesadaran trantibum
13	Belum Terlaksananya SOP	Membuat SOP

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, berkembangnya teknologi informasi, keterbatasan anggaran dalam mendukung program, meningkatnya jumlah penduduk Kota Balikpapan sebagai penyanggah Ibu Kota Negara (IKN).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Renstra 2021-2026					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SATPOL PP	IKM Internal Perangkat Daerah	0,86	32.540.054,00	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	SATPOL PP	IKM Internal Perangkat Daerah	100%	24.115.634.965,00	
				88	27,901,929.156.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Masukan : Dana yang dibutuhkan	86	24,085,634,965.00	
								Keluaran : Jumlah jenis layanan	3 Jenis		

								Keluaran	:	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	5 Jenis		
								(Output)		Administrasi umum perangkat daerah			
								Hasil	:	IKM layanan Administrasi umum perangkat daerah	75%		
								(OutCome)		Administrasi umum perangkat daerah			
				100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Internal Perangkat Daerah			100%	0,00	

					898,590.00							
								Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		0,00
								Keluaran	:	jumlah jenis layanan pengadaan BMD	2 Jenis	
								(Output)		Pengadaan Barang milik daerah		
								Hasil	:	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
								(OutCome)		Pengadaan Barang milik daerah penunjang		

								Hasil	:	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
								(OutCome)	:	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
				100	2.801.553.718,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Internal Perangkat Daerah			100	0,00	
								Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		0,00	
									:				
								Keluaran	:	jumlah jenis layanan pengadaan BMD	3 Jenis		

								(Output)	Jenis layanan pengadaan barang milik daerah			
								Hasil	: IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
								(OutCome)	layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
2	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	Persentase Penegakan Perda	15,0%	7.562.445.690,00	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	Persentase Penegakan Perda		15,00%		0,00

				100%	6.766.404.910,00	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		0,00	
								Keluaran	:	Angka pelanggaran perda/perkada	4700 pelanggaran		
								(Output)	:	pelanggaran perda/perkada yang diselesaikan	4250 Pelanggaran		
								Hasil	:	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban	100%		
								(OutCome)	:	umum dan ketentraman masyarakat			

				98%	745.158.050,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP	Persentase penurunan Kasus pelanggaran Perda		98,50%		0,00	
								Masukan	:	Dana yang dibutuhkan			
								Keluaran	:	Jumlah pelanggaran perda	26 Perda		
								(Output)		jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	16 Perda		
								Hasil	:	persentase penegakan perda	97,60%		
								(OutCome)		Persentase jumlah pelanggaran			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. sejak diberlakukannya undang undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan satuan polisi pamong praja

Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 2 peran yaitu :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah nantinya adalah penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian tantangan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan ke depan akan semakin berat diantaranya kemungkinan terjadinya konflik horizontal maupun konflik vertikal serta berbagai bentuk gangguan lainnya yang mengancam kenyamanan masyarakat dan kekayaan daerah dan harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang.

Tujuan

Tujuan merupakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang profesional dan humanis, semua program dan kegiatan yang dicanangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas;

2. Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap aturan/produk hukum yang berlaku;
3. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum;
4. Meningkatnya perasaan aman dan nyaman di lingkungan masyarakat;
5. Meningkatnya Koordinasi untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan Kondisi yang solid di antara Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
7. Menciptakan profesionalisme dan humanis Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat agar mempunyai kompetensi dan inovasi dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Sasaran

Sasaran adalah terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang profesional dan humanis

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengelolaan barang, pengelolaan keuangan dan pelaporan, administrasi surat-menyurat dan kebutuhan operasional kantor yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum terhadap Masyarakat;
3. Terlaksananya Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah yang berlaku
4. Terlaksananya Perlindungan Masyarakat secara optimal;
5. Terlaksananya Orientasi dan koordinasi yang baik dengan instansi/lembaga/aparat terkait;
6. Terlaksananya kerjasama dan disiplin yang tinggi di antara personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
7. Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang profesional dan humanis.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	69,65	60,98	70	71	72
2		Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	75	77	79	81	83

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan memiliki 2 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong praja sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka mencapai tujuan Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja **Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan**

RENJA TAHUN 2025		
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKM internal Perangkat Daerah	32.540.054,00 Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntable untuk mendukung transformasi pelayanan publik meningkatkan kualitas kota yang berwawasan Lingkungan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP	71

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Jumlah dokumen perencanaan	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.901.929.156,00 Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerjasama meningkatkan Kualitas Kota yang berwawasan Lingkungan.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	27.901.929.156,00 (270 org)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	306.800,00 Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik meningkatkan kualitas kota yang berwawasan Lingkungan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	306.800,00 (300 paket)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat	869.907.306,00 Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik meningkatkan kualitas kota yang berwawasan Lingkungan
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kaltim	99.995.070,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	69.913.095,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistic kantor	399.999.891,00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	99.999.250,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	898.590,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya	898.590,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	951.143.240,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	352.482.000,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor Yang Dilayani	598.661.240,00 Luas Gedung (3.0000 M2)
	Jumlah Tenaga Non PNS	158 orang
	Jumlah Tenaga Non ASN + Naban	112 orang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.801.553.718,00 Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik meningkatkan kualitas kota yang berwawasan Lingkungan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	101.870.000,00 Komputer 42 Printer 39

		Laptop 12 AC Unit 19 Mesin Absen 4 Kendaraan 47 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	199.892.000,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	81
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran	(Jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n-1 – Jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n / Jumlah kasus keseluruhan pelanggaran perda tahun n-1) x 100%
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	6.766.404,00 (Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan / (Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat + yang teridentifikasi Satpol PP) x 100% 10 Laporan

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM	261.926.695,00 (270 orang)
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	665.363.925,00 100%
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	2.734.712.725,00 192 Laporan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	745.158.050,00 (Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan / Jumlah pelanggaran perda) x 100%

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.370.850,00 156 Laporan
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	131.037.000,00 10 Laporan
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	603.750.200,00 240 Laporan
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	50.882.730,00 (Jumlah PPNS eksisting / Jumlah ideal PPNS)
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	50.882.730,00 26 Laporan
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.104.401.565,00 365 Dokumen
Jumlah		40.102.500,00

Tabel T-C.33

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2025

No	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M/KEGI ATAN/S UBKEG IATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RE NS TRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHU N 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA TAHU N 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		14	TARGET	PAGU INDIKATI F (Rp)	17
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						40.102.50 0.000,00							24.115.63 4.965,00	
	1	URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANA N DASAR						40.102.50 0.000,00							24.115.63 4.965,00	
	1.05	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIBA N UMUM SERTA PERLINDUN GAN MASYARAK AT						40.102.50 0.000,00							24.115.63 4.965,00	
1	1.05.0 1	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH		-			-	32.540.05 4.310,00						-	24.085.63 4.965,00	

											Pemerintah yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
1.05.0 1.2.02 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 dokumen	14.315.500,00	Kota Balikpapan semua Kecamatan semua kel/desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7	-	. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

												akun- ta- bel untuk penin- gkatan pelayan- an publik Mewaju- dka n Birokra- si Pemer- ntah an yang Bersih, Profesio- nal dan Berorie- ntasi Pelayan- an Publik				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

1.05.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	27.901.929 .156,00			M memper kua t Penyela ra san Kehidu pan yang Harmon is dengan Lin gkunga n, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleran si Antaru mat Beraga ma untuk Mencap ai Masyar	8 p enguat an kapasit as wilayah yang berbata san dengan IKN Mening katk an Kualita s Kota yang Berwaw asa n Lingku ngan	-	-	24.085.63 4,965,00	SAT UAN POLI SI PAM ONG PRA JA
------------------	---	---	---	--	--	---	-----------------------	--	--	---	--	---	---	-----------------------	---

										akat Yang Adil dan Makmu r					
1 .05.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		<i>jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				170	27.90 1.929.156,00	ota Balik papan , Balik papan Kota, Kland asan Ulu	ENDA PATA N ASLI DAER AH (PAD)	emperk ua t Penyela ra san Kehidu pan yang Harmon is dengan Lin gkunga n, Alam dan Budaya,	M 8 P			24.08 5.634.965,00	ATUA N POLIS I PAMO NG PRAJ A

										serta Penin gkatan Toleran si Antaru mat Beraga ma untuk Mencap ai Masyar akat Yang Adil dan Makmu r	Kualita s Kota yang Berwaw asa n Lingku ngan				
1.05.0 1.2.05	Adninistrasi Kepegawaia n Perangakat Daerah						306.800,00			m emperk ua t Penyela ra san Kehidu pan yang	8 P enguat an kapasit as wilayah	Peg awa i yan g me nda pat		0,00	ATUA N POLIS I PAMO NG

										Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	yang berbata sandengan IKN Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	kan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.			PRAJA
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

	1.05.0 1.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				300 Paket	306.800,00	Kota Bali kpa pan, semua Kecamatan, semua Kel/ Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memp erkua t Penyel ara san Kehid upan yang Harmo nis denga n Lin gkung an, Alam dan Buday a, serta Penin gkatan Tolera nsi Antar umat Berag ama untuk	7.Peni ngkat an tata kelola pemer intaha n daera h yang profes ional akunt abel untuk mend ukung transf ormas i pelaya nan publik menin gkatk an kualit as	- Peg awa i yan g me nda pat kan laya nan ad ministr asi kepa wai an per ang kat dae rah		0,00	SAT UAN POLI SI PAM ONG PRA JA

										Menca pai Masya rakat Yang Adil dan Makm u	Kota yang berwa wasan Lingk ungan				
1.05.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	'-	-			-	869.907.30 6,00			-	7.Peni ngkat an tata kelola pemer intaha n daera h yang profes ional akunt abel untuk mend ukung transf ormas i pelaya nan	-	-	0,00	SAT UAN POLI SI PAM ONG PRA JA

												publik menin gkatk an kualit as Kota yang berwa wasan Lingk ungan					
1.05.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
			<i>Jum lah Pak et Kom pon en Inst alasi Listr ik/P ener angan Ban</i>				6 Pa ket	99.995.070, 00	Kota Balik papa n, Balik papa n Kota Klan dasa n Ulu	PEN DAP ATA N ASL I DA ERA H (PA D)	-	7.Peni ngkata n tata kelola pemer ntaha n daerah yang profesi onal akunt abel untuk mendu kung	-			0,00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A

			<i>gunan Kantor yang Disediakan</i>								transfo rmasi pelaya nan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan				
1.05.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jum lah Paket Pera latan dan Perl eng kap an Kan</i>			10 Pa ket	69.913.095, 00	Kota Balik papa n, Balik papa n Kota Klan dasa n Ulu	PEN DAP ATA N ASL I DA ERA H (PA D)	-	7.Peni ngkata n tata kelola pemeritaha n daerah yang profesi onal dan akunt	-		0,00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A

			<i>tor yan g Dise diak an</i>									abel untuk mendu kung transfo rmasi /pelay anan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan				
	1.05.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jum lah Pak et Bah an Logi stik Kan tor</i>				3 Pa ket	399.999.89 1,00	Kota Balik papa n, Balik papa n Kota Klan	PEN DAP ATA N ASL I DA ERA H	-	7.Peni ngkata n tata kelola pemer ntaha n daerah yang profesi	-		0,00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A

			<i>yang Dise diak an</i>						dasa n Ulu	(PA D)		onal dan akunt abel untuk mendu kung transfo rmasi /pelay anan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan				
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-----------	--	---	--	--	--	--

	1.05. 01.2. 06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				7 Paket	99.999.250,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota Klondong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi /pelayanan publik meningkatkan kualitas Kota yang	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJANA

												berwasan Lingkungan				
1.05. 01.2. 06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>				26 Laporan	200.000.00 0,00	Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntable untuk mendukung transformasi/pelay	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			SKP D								anan publik meningkatkan kualitas Kota yang berwawasan Lingkungan				
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin	-			-	898.590,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Buda	7.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntable untuk mendukung transformasi pelaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			<i>tah Dae rah</i>								ya, serta Penin gkata n Toler ansi Antar umat Bera gama untu k Menc apai Masy araka t Yang Adil dan Mak mur	nan publik menin gkatka n kualita s kota yang berwa wasan Lingku ngan.				
	1.05. 01.2. 07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

						4 Unit	898.590,00	Kota Balik papan Kota, Kaln dasa n Ulu	PEN DAP ATA N ASL I DA ERA H (PA D)	Mem perk ua t Peny elara san Kehi dupa n yang Harm onis deng an Lin gkun gan, Alam dan Buda ya, serta Penin gkata n Toler ansi Antar umat Bera gama untu k	7.Peni ngkata n tata kelola pemer ntaha n daerah yang profesi onal dan akunt able untuk mendu kung transfo rmasi /pelay anan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan.	-		0,00	SATU AN POLI SI PAM ONG PRAJ A
--	--	--	--	--	--	-----------	------------	--	---	--	--	---	--	------	---

										Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.						
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	951.143.240,00			-	7.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntable untuk mendukung transformasi /pelayanan publik	-	-	825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

												meningkatkan kualitas Kota yang berwawasan Lingkungan.				
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air			4 Laporan	352.482.000,00	Kota Balikpapan Klانداسان Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntable untuk mendukung transfo	-		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

			<i>dan Listrik yang Disediakan</i>															rmasi /pelayanan publik meningkatkan kualitas Kota yang berwasan Lingkungan.				
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum</i>				8 Laporan	598.661.240,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota Klondasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntable	-		550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						

			<i>um Kantor yang Disediakan</i>								untuk mendukung transformasi /pelayanan publik meningkatkan kualitas Kota yang berwasan Lingkungan				
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.801.553.718,00			Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis deng	7.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional akuntable	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

										an Lin gkun gan, Alam dan Buda ya, serta Penin gkata n Toler ansi Antar umat Bera gama untu k Menc apai Masy araka t Yang Adil dan Mak mu	untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan				
1.05. 01.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

	09.00 01																
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan paja</i>				63 Unit	2.499.791.7 18,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota Klانداسان Ulu	PEN DAP ATA N ASL I DA ERA H (PA D)	Mempertukarkan Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik meningkatkan kualitas Kota yang berwasan Lingkungan	Sarpras yang mendapatkan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJANA	

			<i>knya</i>							Menca pai Masya rakat Yang Adil dan Makm u		Dae rah.			
1.05. 01.2. 09.00 01	Penyediaan dan Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jum lah Ken dar aan pero ran gan dina s ata u ken dar aan dina s jaba tan</i>			63 Un it	2.499.791.7 18,00	Kota Balik papa n, Balik papa n Kota Klan dasa n ulu	PEN DAP ATA N ASL I DA ERA H (PA D)	Memp erkua t Penyel ara san Kehid upan yang Harm onis denga n Lin gkung an, Alam dan Buday a,	7.Peni ngkata n tata kelola pemer intahan daerah yang profesi onal akunta ble untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan	Sar pras yan g men dap atka n laya nan pem elih araa n bara ng mili k		0,00	SATU AN POLI SI PAM ONG PRAJ A

			<i>yang dipelihara dan dibayarkannya.</i>								serta Peningkatan Tolerasi Antarumat Beragama untuk Mencanaipai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	publik meningkatkan kualitas Kota yang berwasan Lingkungan	daerah penjurusan Pemerintahan Daerah.		
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin</i>				3 Unit	101.870.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota	PEN DAP ATAN ASL I DA ERA	Mempertahankan Penyelenggaraan Kehidupan	7.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Sarpras yang mendapatkan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			<i>Lain nya yang dipe liha ra</i>						Klan dasa nulu	H (PA D)	yang Harm onis denga n Lin gkung an, Alam dan Buday a, serta Penin gkata n Tolera nsi Antar umat Berag ama untuk Menca pai Masya rakat Yang Adil dan Makm ur	profesi onal akunta ble untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan	laya nan n pem elih araa n bara ng mili k daer ah pen unja ng uru san Pem erin taha n Dae rah.			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	----------------------	----------------	--	--	---	--	--	--

1.05. 01.2. 09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	199.892.00 0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota Klondong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi/pelayanan publik meningkatkan kualitas Kota yang	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

										umat Bera gama untu k Menc apai Masy araka t Yang Adil dan Mak mur	berwa wasan Lingku ngan				
2 ,	1.05. 02	PROGRA M PENING KATAN KETENT ERAMAN DAN KETERT IBAN UMUM	-	-			-	7.562.445. 690,00					-	0,00	

1.05. 02.2. 01	Penangan Gangguan Ketenter aman dan Ketertiba n Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupat en/Kota	-	-			-	6.766.404.9 10,00			Mem perku a t Peny elara san Kehi dupa n yang Harm onis deng an Lin gkun gan, Alam dan Buda ya, serta Penin gkata n Toler ansi Antar umat Bera gama untu k	7.Peni ngkata n tata kelola pemer ntaha n daerah yang profesi onal dan akunt able untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan publik menin gkatka n kualita s kota yang berwa wasan Lingku ngan.	Mas yara kat yan g terd amp ak gan ngu an kete rtia ban um um dan kete ntra ma n mas yara kat	-	0,00	SATU AN POLI SI PAM ONG PRAJ A
----------------------	---	---	---	--	--	---	----------------------	--	--	--	---	--	---	------	---

										Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur					
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Meletak Hasil Pemberdayaan Perli			365 Dokumen	3.104.401.565,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota Klانداسان Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan,	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesio			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			<i>ndu nga n Mas yar aka t dala m ran gka Kete nter ama n dan Kete rtib an Um um</i>							Alam dan Buda ya, serta Penin gkata n Toler ansi Antar umat Bera gama untu k Menc apai Masy araka t Yang Adil dan Mak mur	nal dan aku nta ble unt uk men duk ung tran sfor mas i / pela yan an pub lik men ingk atka n kua litas kota yan g ber waw asa n link				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												ung an.				
1.05. 02.2. 01.00 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia															
			<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perli ndu nga n Mas</i>				23 3 Or an g	261.926.69 5,00	Kota Balik papa n Kota, Klan dasa n Ulu	PEN DAP ATA N ASL I DA ERA H (PA D)	Mem perk ua t Peny elara san Kehi dupa n yang Harm onis deng an Lin gkun gan, Alam dan Buda	7.Peni ngkata n tata kelola pemer ntaha n daerah yang profesi onal akunt able untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan	Mas yara kat yan g terd amp ak gan ggu an kete rtib an um um dan kete ntra ma		500.000. 000,00	SATU AN POLI SI PAM ONG PRAJ A

			<p>yarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</p>						<p>ya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</p>	<p>publik meningkatkan kualitas Kota yang berwawasan Lingkungan</p>	<p>n masyarakat.</p>			
1.05.02.2.01.0015	<p>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</p>													

			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenraman dan Kertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pem</i>			100% laporan	665.363.925,00	Kota Balikpapan, Klانداسان Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaksanaan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik meningkatkan kualitas Kota yang berwawasan Lingkungan	Masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat.		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
--	--	--	---	--	--	-----------------	----------------	--------------------------------	------------------------------	--	---	---	--	------	----------------------------

			<i>bina an dan Pen yulu han, Patr oli, Pen gam ana n, dan Pen gaw alan</i>							Menc apai Masy araka t Yang Adil dan Mak mur						
1.05. 02.2. 01.00 16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa															
			<i>Jum lah Lap ora n Gan gu an Kete nter ama</i>				19 2 La po ra n	2.734.712.7 25,00	Kota Balik papa n Kota, Klan dasa n Ulu	PEN DAP ATA N ASL I DA ERA H (PA D)	Mem perk ua t Peny elara san Kehi dupa n yang Harm	7.Peni ngkata n tata kelola pemer ntaha n daerah yang profesi onal	Mas yara kat yan g terd amp ak gan gu an		0,00	SATU AN POLI SI PAM ONG PRAJ A

			<p>n dan Kete rtib an Um um ber das ark an Per da dan Perk ada Mel alui Pen ertib an dan Pen ang ana n Unj uk Ras a dan Ker usu</p>							<p>onis deng an Lin gkun gan, Alam dan Buda ya, serta Penin gkata n Toler ansi Antar umat Bera gama untu k Menc apai Masy araka t Yang Adil dan Mak mur</p>	<p>akunt able untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan</p>	<p>kete rtib an um um dan kete ntra ma n mas yara kat.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

			han Mas sa yan g Dila kuk an Peni nda kan													
1.05. 02.2. 01.00 18	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum															
			Ju mla h sara na dan pras ara na kete ntra ma n dan kete rtib				1 un it	0,00	Kota Balik papa n, Balik papa n Kota Klan dasa n Ulu	Pen dap ata n Asli Dae rah (PA D)	Mem perk ua t Peny elara san Kehi dupa n yang Harm onis deng an Lin gkun	7.Peni ngkata n tata kelola pemer ntaha n daerah yang profesi onal akunt able untuk mendu kung	Mas yara kat yan g terd amp ak gan gu an kete rtib an um um		0,00	SATU AN POLI SI PAM ONG PRAJ A

			an um um							gan, Alam dan Buda ya, serta Penin gkata n Toler ansi Antar umat Bera gama untu k Menc apai Masy araka t Yang Adil dan Mak mur	transfo rmasi pelaya nan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan	dan kete ntra ma n mas yara kat.			
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-				745.158.,00		Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk	7.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional akuntable untuk mendukung transformasi pelayanan publik meningkatkan kualitas Kota yang berwawasan Lingkungan	Masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda.	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
--------------	--	---	---	--	--	--	-------------	--	---	--	--	---	------	----------------------------

										Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur						
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Sosialisasi Penegakan</i>				156 Laporan	10.370.850,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota Klانداسان Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaksanaan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional akuntabel untuk mendukung transformasi	Masyarakat yang terdampak gangguan ketertibum dan		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			<i>Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>							Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	rmasi pelayanan publik meningkatkan kualitas Kota yang berwawasan Lingkungan	keterntraman masyarakat.			
	1.05. 02.2. 02.00 11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													

			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaannya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Ses</i>			10 Lap ora n	131.037.00 0,00	Kota Balik papa n, Balik papa n Kota Klan dasa n Ulu	PEN DAP ATA N ASL I DA ERA H (PA D)	Mem perk ua t Peny elara san Kehi dupa n yang Harm onis deng an Lin gkun gan, Alam dan Buda ya, serta Penin gkata n Toler ansi Antar umat Bera gama untu k	7.Peni ngkata n tata kelola pemer ntaha n daerah yang profesi onal akunt able untuk mendu kung transfo rmasi pelaya nan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan	Mas yara kat yang terd amp ak gan gu an kete rtib an um um dan kete ntra ma n mas yara kat.		0,00	SATU AN POLI SI PAM ONG PRAJ A
--	--	--	---	--	--	-----------------------	--------------------	--	---	--	---	---	--	------	---

			<i>uai SOP</i>							Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur						
1.05. 02.2. 02.00 12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang</i>			24 0 Lap ora ra n	603.750.20 0,00	Kota Balik papa n,	PEN DAP ATA N ASL I DA ERA H (PA D)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan,	7.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional akuntabel untuk mendukung transfo	Masyarakat yang terdampak gangguan ketertibannya dan		0,00	SATU AN POLI SI PAM ONG PRAJ A	

			<i>Dila kuk an Terh ada p Kep atu han Terh ada p Pela ksa naa n Pera tura n Dae rah dan Pera tura n Kep ala Dae rah</i>							Alam dan Buda ya, serta Penin gkata n Toler ansi Antar umat Bera gama untu k Menc apai Masy araka t Yang Adil dan Mak mur	rmasi pelaya nan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan	kete ntra ma n mas yara kat.			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	50.882.730,00			Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk	7.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional untuk mendukung transformasi pelayanan publik meningkatkan kualitas Kota yang berwawasan Lingkungan	Masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat.		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
--------------	---	---	---	--	--	---	---------------	--	--	---	--	---	--	------	----------------------------

										Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur						
1.05. 02.2. 03.00 06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningk</i>				26 Lap ora n	50.882.730, 00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klانداسان Ulu	PEN DAP ATAN ASL I DA ERA H (PA D)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan	7.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional akuntable untuk	Masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			<i>ata n Kap asit as Peja bat PPN S Pen ega k Per da</i>								Lin gkun gan, Alam dan Buda ya, serta Penin gkata n Toler ansi Antar umat Bera gama untu k Menc apai Masy araka t Yang Adil dan Mak mur	mendu kung transfo rmasi pelaya nan publik menin gkatka n kualita s Kota yang berwa wasan Lingku ngan	um um dan kete ntra ma n mas yara kat.			
	- JUM LAH	40.102.500.000,00								24.115.634.965,00						

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tahun 2025.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan akan melaksanakan 2 program dengan jumlah kegiatan sebanyak **10 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.**

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN 2025	
			Target	
3	4	5	9	10
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota		32.540.054.310,00
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	365 Dokumen	7.562.445.690,00

1 0 0 5 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	-	32.540.054 .310,00
1 0 0 5 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	27.901.929 .156,00
1 0 0 5 2 2 0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 org/bl n	27.901.929. 156,00
1 0 0 5 2 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	869.907.30 6,00
1 0 0 5 2 2 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	99.906.070, 00
1 0 0 5 2 2 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	69.913.095, 00
1 0 0 5 2 2 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	399.999.891 ,00
1 0 0 5 2 2 0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	99.999.250, 00
1 0 0 5 2 2 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Lapor an	200.000.000 ,00
1 0 0 5 2 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		898.590,00

1 0 0 2 0 5 2 , 6 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan	4 Unit	4.128.000.0 00,00
1 0 0 2 5 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	951.143.24 0,00
1 0 0 2 0 5 2 , 2 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lapor an	352.482.000 ,00
1 0 0 2 0 5 2 , 4 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yangDisediakan	8 Lapor an	598.661.240 ,00
1 0 0 2 5 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.801.553. 718,00
1 0 0 2 0 5 2 , 2 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	2.499.791.7 18,00
1 0 0 2 0 5 2 , 6 1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	101.870.000 ,00
1 0 0 2 0 5 2 , 9 1	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1 Unit	199.892.000 ,00
1 0 0 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	-	7.562.445. 690,00

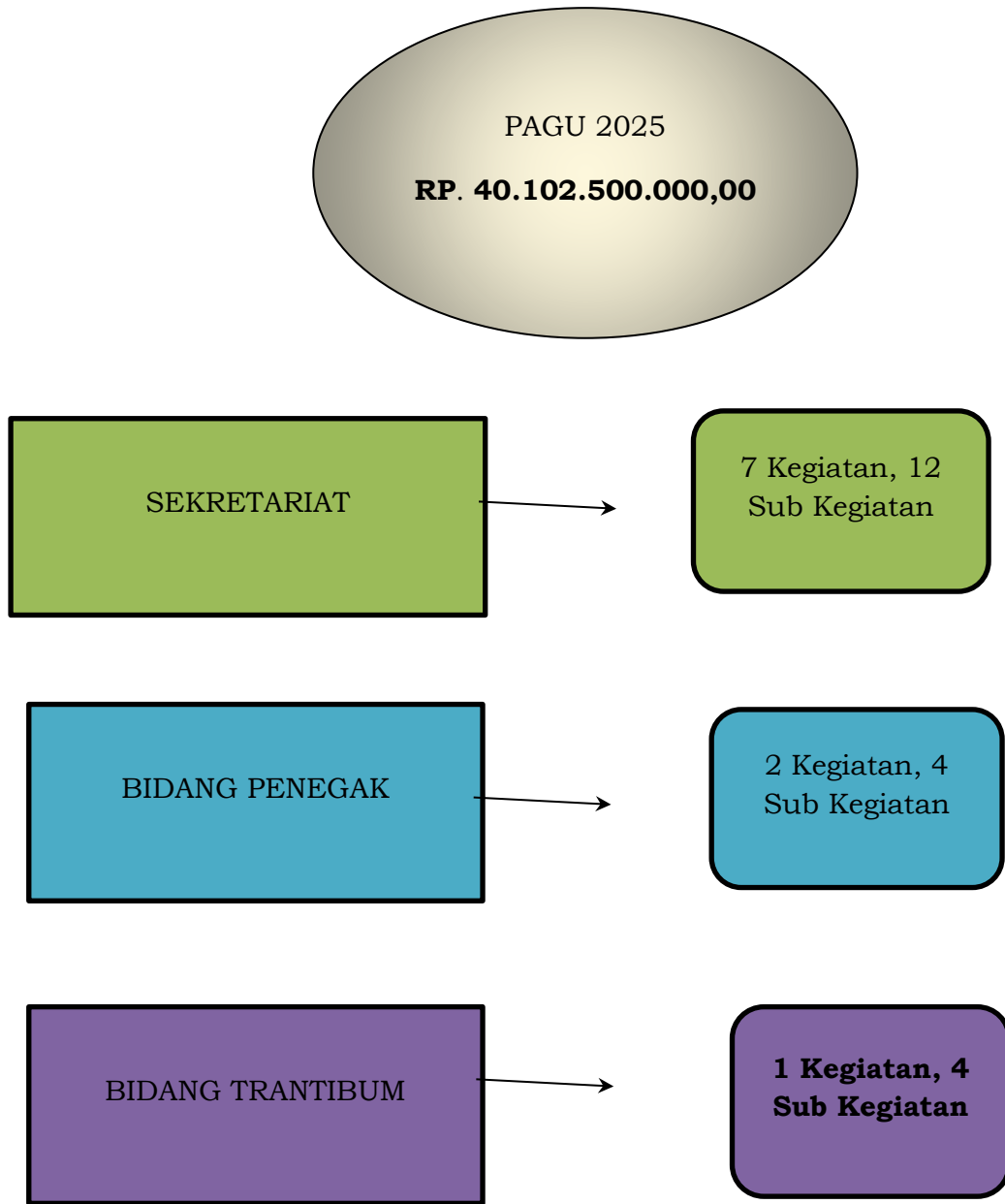
1 0 0 2 5 2 2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman	-	6.766.404.910,00
1 0 0 0 0 5 2 2 1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Tramtibum	Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka tramtibum	365 Dokumen	3.104.401.565,00
1 0 0 2 0 5 2 2 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	233 Orang	261.926.695,00
1 0 0 2 0 5 2 2 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100%	665.363.925,00
1 0 0 2 0 5 2 2 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	192	2.734.712.725,00

1	0	0	2	0	1	Pengadaan dan pemeliharaan Sarpras Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarpras Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 unit	0,00
1	0	0	2	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	-	745.158.050,00
1	0	0	2	0	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	156 Laporan	10.370.850,00
1	0	0	2	0	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	131.037.000,00
1	0	0	2	0	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	240 Laporan	603.750.200,00
1	0	0	2	2		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	-	50.882.730,00

1	0	0	2	0	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	20 Laporan	50.882.730,00
---	---	---	---	---	---	--	---	------------	---------------

	Jumlah Total.....			40.102.500 .000,00
--	------------------------------	--	--	-------------------------------

GRAFIK DAN PAGU TAHUN 2025



BAB V PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN

Dokumen Renja OPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Satpol PP serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kota Balikpapan.

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun 2020 sebagai berikut di dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2023 memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di dalam penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 ini masih belum sempurna, sehingga dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Propinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan unntuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, yaitu dengan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur rencana.
- b. Perlu menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif melaksanakan koodinasi dengan instansi terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- e. Dalam menerapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan ammanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025 ini kami susun sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

G. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Balikpapan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sosial sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.1.1. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja tersebut dapat dikerjakan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja

dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan yang disesuaikan.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program / kegiatan, target keluaran kegiatan dan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan dokumen resmi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana anggaran dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

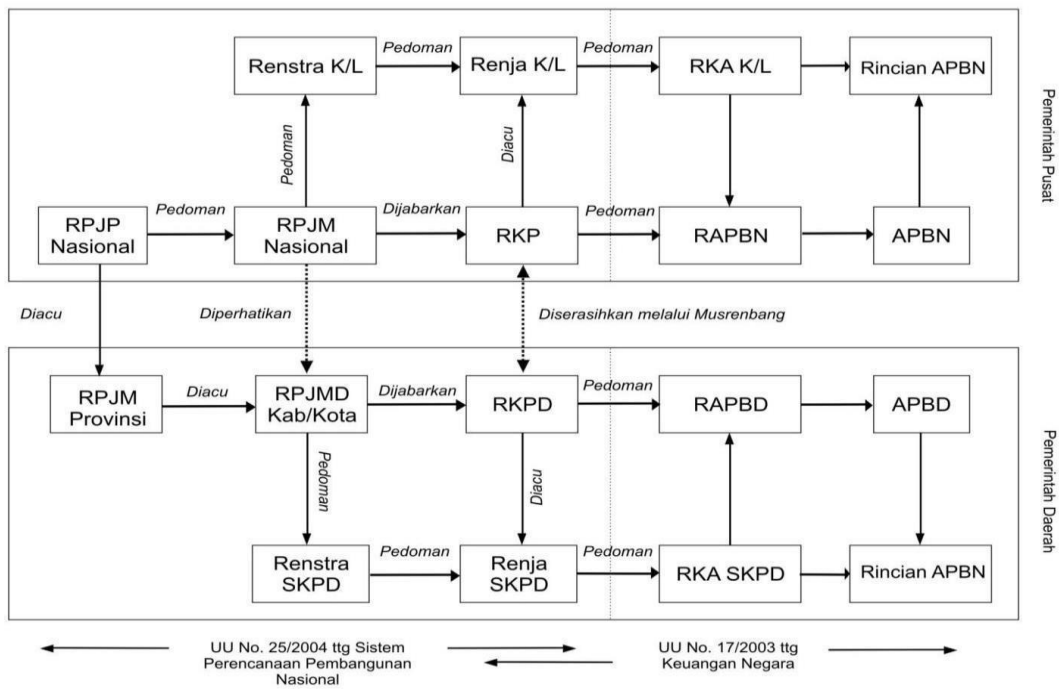
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial Kota Balikpapan;
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Balikpapan
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan;
 - Penyempurnaan rancangan kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan;
 - Pembahasan di forum Perangkat; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

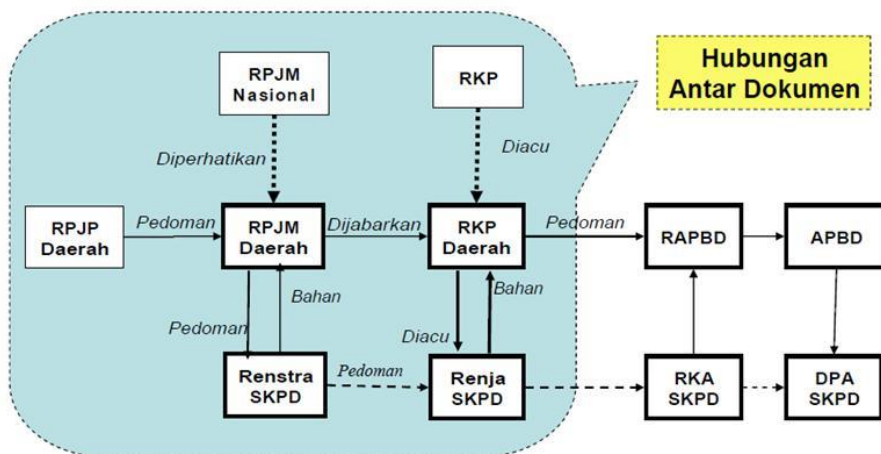
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



1.1.2. Keterkaitan Antara Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rancangan Awal RENJA Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjiwai keseluruhan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1. Maksud Penyusunan Renja

Renja Dinas Sosial tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing- masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan serta untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai perwujudan terselenggaranya pemerintah yang baik

1.4.2. Tujuan Penyusunan Renja

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial;
2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial;
4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2025.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIALKOTA BALIKPAPANTAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2023.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam tabel T-C.29 di bawah ini :

TABEL T - C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 (n-2)			Target Kegiatan Renja PD Berjalan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi	81.81	43.43	78.94	83	105.14	80	80	100
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	64.18	12.05	61.06	80.69	132.15	62.03	80	100
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan	94.05	70.22	91.63	99.06	108.11	92.44	80	100

		Dasarnya								
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN	96.68	84	86.66	80	92.31	90	80	100
3	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor	100	100	100	67	67.00	100	80	100
4	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan	84	84	70	80	114.29	80	80	100
C	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	92.68	81.46	85.36	73.92	86.60	87.8	80	100
5	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS	88.65	17.2	95	95	100.00	93	80	100
D	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN	85	100	82	100	121.95	100	80	100

		SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA A								
6	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota	85	100	82	100	121.95	100	80	100
7	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana	67	89.55	62	60	96.77	64	80	100
E	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	87	79	80	80	100.00	82	80	100
8	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	60	60	55	100	181.82	57	80	100
F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT	74	93	71	92	129.58	94	80	100

		DAERAH								
9	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50	92	50	93	186.00	50	80	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80	93	75	90	120.00	76	80	100
10	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	93	75	90	120.00	77	80	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		85	92	79	93	117.72	80	80	100
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	95	75	93	124.00	78	80	100
12	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	92	75	95	126.67	77	80	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kota Balikpapan sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja. Adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial
2. Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola
3. Nilai SAKIP Dinas Sosial

Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

TABEL T-C.30										
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BALIKAPAPAN										
No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan
		N-2 (2023)	N-1 (2024)	N	N+1 (2026)	N-2 (2023)	N-1 (2024)	N	N+1 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial	82	64	65	67	73.42				
2	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	80	82	85	87	80				
3	Nilai SAKIP Dinas Sosial	70	-	-	-	62.74				

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Balikpapan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

1. Kondisi kantor Dinas Sosial yang tidak ramah difabel serta ruang pelayanan yang tidak representatif
2. Rumah singgah untuk penanganan PPKS masih belum representatif
3. Kekurangan SDM untuk menjaga dan merawat ODGJ dan Lanjut Usia terlantar
4. Masih adanya beban kerja tambahan khususnya bagi tenaga Puskesmas untuk melakukan proses verifikasi dan validasi peserta BPJS Kelas 3 sehingga tugas utama mereka menjadi kurang optimal

Seluruh permasalahan dan tantangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada serta memanfaatkan peluang yang tersedia, misalnya :

1. Meningkatkan peran serta lembaga CSR dan lembaga sosial lainnya
2. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran khususnya untuk pembangunan/renovasi rumah singgah PPKS
3. Meningkatkan Peran Aktif PSKS dalam menanggulangi PPKS
4. Keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah dan lembaga masyarakat sebagai mitra dalam memecahkan permasalahan sosial, khususnya di Kota Balikpapan
5. Meningkatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjaring informasi seluas-luasnya dari berbagai sumber terkait penanganan masalah di bidang sosial;
6. Adanya kesempatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan lain-lain yang disediakan oleh berbagai instansi dan organisasi masyarakat.
7. Tersedianya dana-dana tambahan yang bersumber dari level pemerintahan yang lebih tinggi.

Peluang-peluang ini perlu diberdayakan agar program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal. Hal ini telah diupayakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan sepanjang Tahun 2023. Terbukti dengan terselenggaranya beberapa kegiatan hingga tingkat capaian 100 %. Kondisi ini dapat dicapai berkat koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan di samping kerja keras para staf Dinas Sosial untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Kondisi ini perlu terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, agar kinerja yang ditargetkan dapat dipenuhi semaksimal mungkin.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Sosial kota Balikpapan kemudian dibandingkan dengan rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak baik terpisah dalam tahapan penyusunan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA- OPD).

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kota Balikpapan, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial yaitu : *"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman"*. Dalam Tabel T-C.31, review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL T-C.31

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

No	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Keterangan
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Balikpapan	PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN	persen	93.33	1,780,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Balikpapan	PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN	persen	93.33	1,780,000,000	
A	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor	persen	100	710,000,000	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor	persen	100	710,000,000	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen	12	710,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen	12	710,000,000	
B	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan	persen	80	1,070,000,000	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan	persen	80	1,070,000,000	
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	34	850,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	34	850,000,000	
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	6	160,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	6	160,000,000	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	keluarga	40	60,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	keluarga	40	60,000,000	

II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Balikpapan	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi	persen	80	3,783,500,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Balikpapan	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi	persen	80	3,783,500,000	
C	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Balikpapan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	orang	62.03	2,403,000,000	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Balikpapan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	orang	62.03	2,403,000,000	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai denga standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	1,610,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai denga standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	1,610,000,000	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	25	95,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	25	95,000,000	
7	Penyediaan Alat Bantu	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	orang	30	118,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	orang	30	118,000,000	
8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota	orang	2	160,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota	orang	2	160,000,000	
9	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	10	145,000,000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	10	145,000,000	
10	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	275,000,000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	275,000,000	

D	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Balikpapan	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	92.44	1,380,500,000	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Balikpapan	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	92.44	1,380,500,000	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	475,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	475,000,000	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	25,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	25,000,000	
13	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	23,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	23,000,000	
14	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	31,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	31,000,000	
15	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	28	20,500,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	28	20,500,000	
16	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	112	126,000,000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	112	126,000,000	
17	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	30	625,000,000	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	30	625,000,000	
18	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	dokumen	12	55,000,000	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	dokumen	12	55,000,000	

III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Balikpapan	PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persen	87.8	3,985,500,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Balikpapan	PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persen	87.8	3,985,500,000	
E	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS	persen	93	3,985,500,000	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS	persen	93	3,985,500,000	
19	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	54885	1,710,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	54885	1,710,000,000	
20	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	keluarga	30000	1,810,000,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	keluarga	30000	1,810,000,000	
21	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	keluarga	6273	375,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	keluarga	6273	375,000,000	
22	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten / Kota	orang	50	90,500,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten / Kota	orang	50	90,500,000	
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Balikpapan	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	persen	83	744,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Balikpapan	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	persen	83	744,000,000	
F	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota	persen	83	418,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota	persen	83	418,000,000	
23	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	12230	200,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	12230	200,500,000	

24	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	407	100,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	407	100,500,000	
25	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Balikpapan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	unit	57	41,000,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Balikpapan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	unit	57	41,000,000	
26	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	50	50,500,000	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	50	50,500,000	
27	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Balikpapan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	7	25,500,000	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Balikpapan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	7	25,500,000	
G	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana	persen	64	326,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana	persen	64	326,000,000	
28	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	kampung	100	25,500,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	kampung	100	25,500,000	
29	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	104	300,500,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	104	300,500,000	

V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Balikpapan	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persen	82	1,051,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Balikpapan	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persen	82	1,051,000,000	
H	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	persen	57	1,051,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	persen	57	1,051,000,000	
30	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional	dokumen	2	350,500,000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional	dokumen	2	350,500,000	
31	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /	makam	1	700,500,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /	makam	1	700,500,000	
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Balikpapan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH	nilai	72	12,198,400,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Balikpapan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH	nilai	72	12,198,400,000	
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	50	6,300,000,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	50	6,300,000,000	
32	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	50	6,300,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	50	6,300,000,000	
J	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	76	101,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	76	101,000,000	
33	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	53	50,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	53	50,500,000	
34	Pendidian dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	35	50,500,000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Sosial	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	orang	35	50,500,000	

K	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	77	2,362,400,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	77	2,362,400,000	
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	22,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	22,000,000	
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	310,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	310,000,000	
37	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	paket	11	45,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	paket	11	45,000,000	
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	500,000,000	
39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangann yang disediakan	Dokumen	3	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangann yang disediakan	Dokumen	3	10,000,000	
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	1,395,400,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	1,395,400,000	
40	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	5	30,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	5	30,000,000	
41	Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	2	50,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	2	50,000,000	
L	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	80	1,250,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	80	1,250,000,000	
42	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	2	950,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	2	950,000,000	
43	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	unit	1	300,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	unit	1	300,000,000	

M	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	80	1,175,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	80	1,175,000,000	
45	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	130,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	130,000,000	
46	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	1,045,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	1,045,000,000	
			2. Jumlah Tenaga Non PNS	orang	27					2. Jumlah Tenaga Non PNS	orang		27
N	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	78	1,010,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	78	1,010,000,000	
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	41	350,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	41	350,000,000	
48	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	15	210,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	15	210,000,000	
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	1	450,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	1	450,000,000	
TOTAL						23,542,400,000	TOTAL					23,542,400,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kota Balikpapan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, serta melayani dan memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di sisi lain, dalam era globalisasi, dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya di Kota Balikpapan.

Agar program dan kegiatan tersebut lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satu caranya adalah menyerap aspirasi atau usulan masyarakat yang disampaikan secara langsung melalui lembaga atau kelompok yang menjadi wadah organisasi mereka. Tahapan usulan program dari masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi usulan program dan kegiatan yang masuk ke Dinas Sosial
2. Meneliti kelengkapan proposal tersebut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
3. Melakukan verifikasi tentang usulan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tahun perencanaan
4. Menetapkan jumlah hibah yang akan diberikan kepada setiap lembaga yang telah memenuhi syarat, sesuai dengan anggaran yang tersedia di Dinas Sosial Kota Balikpapan
5. Menginput usulan hibah tersebut ke dalam Aplikasi SIPD untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja pada tahun berikutnya

Jenis usulan masyarakat yang telah diterima oleh Dinas Sosial untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN PADA TAHUN 2025

NO	TANGGAL PROPOSAL	LEMBAGA PENERIMA	TUJUAN	NILAI PROPOSAL (Rp)	ALAMAT
1	26 Februari 2024	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	Untuk Menunjang Operasional Kegiatan	86,697,000	Terminal BP, Ruko Balikpapan Permai, Jl. Jenderal Sudirman, Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
2	29 Januari 2024	Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI)	Untuk Menunjang Operasional Kegiatan	90,564,000	Jl. Jend Sudirman Komp Balikpapan Permai Blok A1 No.11 RT.21
3	15 Februari 2024	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	Untuk Menunjang Operasional Kegiatan	400,000,000	Jl. RE Martadinata No.9 RT 37 Balikpapan
4	30 Januari 2024	Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (PAPABRI)	Untuk Menunjang Operasional Kegiatan	250,000,000	Jl. APT Pranoto No.6 Klandasarn Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota. Balikpapan
5	15 Februari 2024	Forum Peduli Masyarakat Kota Balikpapan (FPMKB)	Untuk Menunjang Operasional Kegiatan	305,000,000	Jl. Marsma R. Iswahyudi No.121 Gn.Bahagia. Kecamatan Balikpapan Selatan. Balikpapan
6	27 Januari 2024	Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)	Untuk Menunjang Operasional Kegiatan	132,500,000	Jl. Telaga sari II RT.36 No.007 Kelurahan Telagasari. Balikpapan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunannasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:
 - a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
 - c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
 - d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
 - e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;

- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Program Nasional yang menjadi prioritas terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yaitu dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan antara lain kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kota Balikpapan sudah sangat baik, misalnya dengan memfasilitasi penyaluran bantuan baik itu bantuan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bantuan – bantuan lain yang tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kota Balikpapan.

Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, maka pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Sosial Kota Balikpapan telah memverifikasi dan memvalidasi keluarga – keluarga miskin calon penerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Adapun Tujuan Akhir yang akan dicapai Dinas Sosial melalui penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Adalah:

1. Penurunan tingkat kemiskinan; dan
2. Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dari masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis. Adapun Sasaran strategis Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial tersebut adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial dasar orang dengan disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna social
2. Pemulihan nilai – nilai luhur (restorasi sosial)
3. Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Sosial

3.3 Program/Kegiatan/Subkegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Penyusunan program dan kegiatan sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan, khususnya masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Masukan-masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kota Balikpapan;
3. Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026.

A. Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Visi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yaitu “ Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Berkemajuan yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”. Sedangkan Misi Kota Balikpapan adalah:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan

5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Dinas Sosial kota Balikpapan mendukung Misi ke III yaitu Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai dan misi V yaitu Mengembangkan Ekonomi yang Kreatif.

B.Pencapaian SDG'S

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SDG'S di sektor Sosial, adalah; Meningkatkan Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui peningkatan kapasitas PSKS dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kota Balikpapan

C.Pengentasan Kemiskinan

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Balikpapan antara lain:

1. Melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Memberikan bantuan sembako kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar
3. Mendekatkan akses pemberian bantuan sosial berupa program PKH, BPNT dan KUBE
4. Meningkatkan kapasitas pelayanan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam rangka menghimpun, memverifikasi dan memvalidasi data – data PPKS yang ada sehingga bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran.
5. Meningkatkan program pemberdayaan sosial kepada fakir miskin

D.Program Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan di Kota Balikpapan, Dinas Sosial Kota Balikpapan telah Menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun 2025 yaitu sebagai berikut

TABEL T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026						
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Balikpapan	PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN	persen	93,33	1.640.000.000	APBD	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Balikpapan	PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN	persen	93,33	1.770.000.000	APBD
A	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor	persen	100	687.000.000	APBD	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor	persen	100	700.000.000	APBD
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen	12	687.000.000	APBD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen	12	700.000.000	APBD
B	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan	persen	80	953.000.000	APBD	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan	persen	80	1.070.000.000	APBD
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	34	764.000.000	APBD	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	34	850.000.000	APBD
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	6	134.000.000	APBD	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	6	160.000.000	APBD
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	keluarga	40	55.000.000	APBD	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	keluarga	40	60.000.000	APBD
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Balikpapan	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi	persen	80	3.036.980.000	APBD	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Balikpapan	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi	persen	80	3.763.000.000	APBD
C	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Balikpapan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	orang	62,03	1.815.500.000	APBD	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Balikpapan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	orang	62,03	2.403.000.000	APBD
5	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	1.340.000.000	APBD	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	1.610.000.000	APBD
6	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	25	92.000.000	APBD	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	25	95.000.000	APBD
7	Penyediaan Alat Bantu	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	orang	30	96.000.000	APBD	Penyediaan Alat Bantu	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	orang	30	118.000.000	APBD
8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota	orang	2	42.000.000	APBD	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota	orang	2	160.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	10	40.500.000	APBD	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	10	145.000.000	APBD

10	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	205,000,000	APBD	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	275,000,000	APBD
D	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Balikpapan	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	92.44	1,221,480,000	APBD	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Balikpapan	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	92.44	1,360,000,000	APBD
11	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	474,500,000	APBD	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	475,000,000	APBD
12	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	23,400,000	APBD	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	25,000,000	APBD
13	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	22,900,000	APBD	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	23,000,000	APBD
14	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	30,680,000	APBD	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	31,000,000	APBD
16	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	112	125,000,000	APBD	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	112	126,000,000	APBD
17	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	30	500,000,000	APBD	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	30	625,000,000	APBD
18	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	dokumen	12	45,000,000	APBD	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	dokumen	12	55,000,000	APBD
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Balikpapan	PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persen	87.8	3,613,160,000	APBD	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Balikpapan	PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persen	87.8	3,985,500,000	APBD
E	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS	persen	93	3,613,160,000	APBD	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS	persen	93	3,985,500,000	APBD
19	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	54885	1,606,000,000	APBD	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	54885	1,710,000,000	APBD

20	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	keluarga	30000	1,544,160,000	APBD	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	keluarga	30000	1,810,000,000	APBD
21	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	keluarga	6273	373,000,000	APBD	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	keluarga	6273	375,000,000	APBD
22	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten / Kota	orang	50	90,000,000	APBD	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten / Kota	orang	50	90,500,000	APBD
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Balikpapan	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	persen	83	515,631,725	APBD	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Balikpapan	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	persen	83	542,000,000	APBD
F	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota	persen	83	237,281,765	APBD	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota	persen	83	241,500,000	APBD
23	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanaan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	12230	199,968,965	APBD	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanaan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	12230	200,500,000	APBD
25	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Balikpapan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	unit	57	37,312,800	APBD	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Balikpapan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	unit	57	41,000,000	APBD
G	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana	persen	64	278,349,960	APBD	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana	persen	64	300,500,000	APBD
29	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	104	278,349,960	APBD	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	104	300,500,000	APBD
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Balikpapan	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persen	82	900,000,000	APBD	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Balikpapan	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persen	82	1,051,000,000	APBD
H	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	persen	57	900,000,000	APBD	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	persen	57	1,051,000,000	APBD
30	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional	dokumen	2	200,000,000	APBD	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional	dokumen	2	350,500,000	APBD

31	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	makam	1	700,000,000	APBD	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	makam	1	700,500,000	APBD
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Balikpapan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH	nilai	72	11,793,860,000	APBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Balikpapan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH	nilai	72	12,157,400,000	APBD
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	50	6,500,000,000	APBD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	50	6,300,000,000	APBD
32	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	50	6,500,000,000.00	APBD	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	50	6,300,000,000	APBD
J	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	76	406,000,000	APBD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	76	410,000,000	APBD
33	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	53	28,500,000	APBD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	53	30,000,000	APBD
34	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	40	27,500,000	APBD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	35	30,000,000	APBD
35	Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan dan perundang - undangan	orang	35	350,000,000	APBD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan dan perundang - undangan	orang	35	350,000,000	APBD
K	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	77	2,087,600,000	APBD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	77	2,312,400,000	APBD
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	17,000,000	APBD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	22,000,000	APBD
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	320,000,000	APBD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	310,000,000	APBD
37	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	paket	11	39,000,000	APBD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	paket	11	45,000,000	APBD
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	500,000,000	APBD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	500,000,000	APBD
39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangann yang disediakan	Dokumen	3	10,000,000	APBD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangann yang disediakan	Dokumen	3	10,000,000	APBD
40	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	1,176,600,000	APBD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	1,395,400,000	APBD
41	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	5	25,000,000	APBD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	5	30,000,000	APBD
L	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	80	710,500,000	APBD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	80	950,000,000	APBD

42	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	2	710,500,000	APBD	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	2	950,000,000	APBD
43	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	80	1,239,760,000	APBD	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	80	1,175,000,000	APBD
44	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	130,000,000	APBD	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	130,000,000	APBD
N	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	1,109,760,000	APBD	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	1,045,000,000	APBD
			2. Jumlah Tenaga Non PNS	orang	27		APBD			2. Jumlah Tenaga Non PNS	orang	27		APBD
47	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	78	850,000,000	APBD	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	78	1,010,000,000	APBD
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	41	250,000,000	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendalaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	41	350,000,000	APBD
49	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	135	150,000,000	APBD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	15	210,000,000	APBD
50	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	2	450,000,000	APBD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	1	450,000,000	APBD
TOTAL						21,499,631,725							23,268,900,000	APBD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rangka mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka perlu dibuat Program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan, sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan untuk tahun 2025 yang bersumber dari APBD. Program dan Kegiatan Dinas sosial pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PAGU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)			
DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN			
TAHUN 2025			
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025	Keterangan
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,640,000,000	
A	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	687,000,000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	687,000,000	- Sosialisasi PUB dan UGB - Hibah uang bagi 5 lembaga : 1. LVRI : 86.697.000 2. PIVERI : 77.500.000 3. PWRI : 200.000.000 4. PEPABRI : 100.000.000 5. FPMB : 100.000.000
B	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	953,000,000	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	764,000,000	Uang Transport 34 PSM & Rakor PSM, Rakor + Sosialisasi kelembagaan LKS untuk pengurus panti
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	134,000,000	Uang Transport 6 TKSK
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55,000,000	Sosialisasi kepada PSKS Keluarga (keluarga pionner) selama 2 hari
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3,036,980,000	
C	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,815,500,000	
5	Penyediaan Permakanan	1,340,000,000	- Bantuan Bahan Kebutuhan Pokok untuk Lansia Tdk Mampu (80 orang) - Bantuan Bahan Kebutuhan Pokok untuk Penyandang Disabilitas Berat (80 orang) - Kegiatan Sosialisasi SENANDUNG SAJAK (8 kali kegiatan)

6	Penyediaan Sandang	92,000,000	- Memfasilitasi kebutuhan sandang, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, lampu untuk klien ABH di 2 LPKS
7	Penyediaan Alat Bantu	96,000,000	Alat bantu untuk penyandang disabilitas (20 unit)
8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42,000,000	Transport petugas (pekerja sosial) dalam rangka penanganan, assessmen, pendampingan dan penjangkauan thd PMKS anak
9	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	205,000,000	Kegiatan Peringatan HLUN Tingkat Kota Tahun 2025 terdiri atas : ATK, spanduk, penjiilidan laporan, makanan dan minuman pada saat rapat, gladi kotor, gladi bersih dan acara puncak, honorarium pendukung kegiatan (duta wisata, pembaca doa, MC, dirigen, petugas kebersihan dan petugas keamanan), jasa tenaga kesenian dan kebudayaan (sanggar seni tari), dekorasi, jasa hiburan (sewa alat musik dan penyanyi band), sewa meja.
10	Pemberian Layanan Rujukan	40,500,000	Transport petugas (pekerja sosial) dalam rangka penanganan, assessmen, pendampingan dan penjangkauan thd lansia terlantar
D	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1,221,480,000	
11	Penyediaan Permakanan	474,500,000	Makan dan minum untuk klien di Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) PMKS dan Makan Petugas
12	Penyediaan Sandang	23,400,000	Penyediaan sandang/pakaian dan keperluan keluarga untuk klien di Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) PMKS, belanja penggandaan/fotocopy
13	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	22,900,000	Makan dan minum untuk kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Spiritual untuk PMKS lainnya, honorarium instruktur senam serta honorarium penceramah, belanja penggandaan/fotocopy
14	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	30,680,000	Alat Tulis Kantor (Spanduk, Leaflet, Fotocopy), Paket Meeting untuk Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya, Honorarium Narasumber Kegiatan Bimbingan Sosial, Uang Transportasi Peserta Kegiatan
15	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	500,000,000	Belanja alat/perengkapan lapangan untuk Rumah Penampungan ODGJ dan RPTC Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja alat listrik Belanja alat/perengkapan lapangan Belanja bahan/perengkapan kamar Belanja bahan pelayanan kesehatan dasar, Belanja jasa pelayanan kesehatan tindakan perawatan kesehatan di rumah sakit pemerintah bagi PMKS terlantar/non identitas, Belanja pemulangan/penjemputan merujuk PMKS ke lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS0 atau ke daerah asal menggunakan transport lokal, darat, laut dan udara
16	Pemberian Layanan Rujukan	125,000,000	Belanja penggandaan/fotocopy Belanja koordinasi/konsultasi/studi tiru/pendampingan/pengiriman/penjemputan terhadap PMKS dari, ke atau kementerian sosial, Dinas Sosial, Balai, Loka, RSJD, LPKS dan atau ke daerah asal bagi PMKS yang memerlukan pendampingan khusus
17	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	45,000,000	Belanja pengangkutan/pemakaman jenazah PMKS non identitas

III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3,613,160,000	
E	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3,613,160,000	
18	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,606,000,000	Pelaksanaan kegiatan survey kemiskinan, Pembuatan Aplikasi Kemiskinan, Bimtek untuk Tim survey Kemiskinan, Pemeliharaan/penambahan Modul aplikasi PMKS
19	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,544,160,000	Honorarium 70 org Puskesmas, Rakor dan bimtek Puskesmas dalam daerah, Kegiatan rekonsiliasi data, belanja makanan dan minuman rapat
20	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	373,000,000	Transport SDM PKH, ATK, Mamin Rapat, Rakor PKH tingkat kota
21	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	90,000,000	Belanja Barang untuk WRSE , Belanja Bimtek/Sosialisasi
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	515,631,725	
F	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	237,281,765	
22	Penyediaan Makanan	199,968,965	60 paket sembako bencana dan 12,000 nasi bungkus bencana
24	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	37,312,800	tenda keluarga untuk korban bencana
G	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	278,349,960	
25	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	278,349,960	Belanja ATK petugas gudang, Kegiatan sosialisasi/bimtek bagi anggota Tagana, Belanja transport pengerahan bagi anggota Tagana, Belanja perjalanan menghadiri undangan jambore Tagana dan pengambilan barang logistik bencana
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	900,000,000	
H	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	900,000,000	
26	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200,000,000	Rehab Fisik Taman Makam Pahlawan Dharma Agung dan Belanja Modal TMP (siring/urug tanah jurang+perbaikan jalan setapak sekitar makam)
27	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	700,000,000	Balanja Perawatan rutin TMP, Belanja Pelaksanaan Hari Pahlawan, Pelaksanaan Ramah Tamah Veteran dalam rangka Hari Pahlawan, Penambahan Belanja Jasa Tenaga penanganan Sarana dan Prasarana Umum (Petugas Taman Makam Pahlawan 2 orang), Belanja Modal untuk kelengkapan TMP
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	11,652,524,000	
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,300,000,000	
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,300,000,000	Gaji dan Tunjangan ASN

J	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	406,000,000	
29	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28,500,000	Baju putih/seragam taktikal Dinsos
30	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27,500,000	Kontribusi untuk diklat undangan yg diadakan oleh Pemkot
31	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Sosial	350,000,000	Bimtek peningkatan kapasitas pegawai Dinas Sosial
K	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,087,600,000	
32	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,000,000	Belanja Komponen Listrik dan Bangunan Kantor
33	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,176,600,000	Pengadaan Komputer + Printer (Dinsos), Pengadaan 40 laptop dan 17 Printer untuk puskesmas
34	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000	Pengharum ruangan kantor (sewa dengan rekanan) dan refill gas
35	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320,000,000	Penambahan biaya konsumsi rapat (paket meeting dlm kota), Forum OPD (paket meeting Hotel)
36	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39,000,000	Belanja cetak, spanduk, dsb
37	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	Langganan koran
39	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,000,000	Perjalanan Dinas Ke Dalam dan Luar Daerah
L	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769,164,000	
40	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	769,164,000	pengadaan mobil atau sewa (1 unit mobil kerangkeng, 5 unit mobil dinas jabatan)
M	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,239,760,000	
41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130,000,000	Belanja air dan listrik
42	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,109,760,000	Gaji Non PNS dan Pihak ketiga (Cleaning Service dan Jasa Keamanan Kantor)
N	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850,000,000	
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250,000,000	BBM untuk kendaraan operasional, kendaraan dinas jabatan, by service dan suku cadang
44	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150,000,000	Pemeliharaan komputer, printer, AC dan peralatan kantor lainnya
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450,000,000	Pemeliharaan Gedung Kantor (partisi), Kitchen Set dan perbaikan di rumah penampungan
		21,358,295,725	

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

A. PROGRAM INOVASI DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Inovasi yang dibangun oleh Dinas Sosial saat ini ada 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Panji Berbakat Program Anak Jalanan Berbasis Masyarakat);
2. Senandung Sajak (Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak);
3. Teropong Jiwa (Tanggap Ketuk Rumah Pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa); dan
4. Arlin Kobana (Aksi Perlindungan Sosial Terhadap Korban Bencana).

Sekilas mengenai program inovasi Dinas Sosial ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Panji Berbakat.

(Penanganan Anak Jalanan Integratif Berbasis Masyarakat).

Sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dalam penanganan Anak Jalanan. Selama ini pelaksanaan penanganan anak jalanan dilaksanakan secara parsial sesuai dengan tupoksi OPD dan LSM yang berkaitan dengan anak, sehingga dengan kondisi ini OPD dalam pelaksanaan kegiatan masing – masing tanpa arah dan pola yang terintegrasi. Dampak yang muncul adalah terjadinya disparitas terhadap psikologi anak jalanan. Anak Jalanan jadi takut dengan Satpol PP karena Satpol PP suka merazia, Anak Jalanan jadi suka dengan Dinas Kesehatan karena selalu diperiksa kesehatannya, Anak Jalanan jadi Suka dengan Dinas Sosial karena selalu dibimbing dan diberi bantuan. Anak Jalanan suka dengan LSM Anak karena mereka selalu dibantu dan diajak bermain. Begitu juga dengan instansi lainnya.

Maka dengan di bentuknya Program Panji Berbakat ini diharapkan semua OPD dan LSM yang menangani anak jalanan dapat bekerjasama dengan membuat sebuah sarana pertemuan, menyusun jadwal kegiatan dan koordinasi terhadap permasalahan yang muncul dalam penanganan anak jalanan di Kota Balikpapan. Saat ini sudah berjalan kegiatan Panji Berbakat ini dengan melibatkan 4 (empat) komunitas yaitu:

- a) Sekolah Rakyat (SR) di Jl. Syarifuddin Yoes Kel Sepinggian Raya
- b) Lembaga Rumah Singgah Nurul Ilmi, di Jl. Perumahan Balikpapan Baru Blok F1. No. 5 Rt. 19 Kel. Gn. Samarinda Baru
- c) Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KOPAJA) J. Manunggal Rt. 20 Kel. Sungai Nangka,
- d) Peduli Anak Penerus Bangsa, Jl. Sultan Hasanudin Komp. Perumahan Guru Rt.39 Kel. Baru Ulu.

Kegiatannya dilaksanakan secara sinergi Bersama OPD terkait dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti Narasumber dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Instansi terkait.

2. Senandung Sajak.

“SistEm penangaNAN terpaDU penyandaNG maSAlah keseJahteraan sosiAl anaK”

Dasar Hukum SENANDUNG SAJAK adalah Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak. Senandung Sajak merupakan pola usaha terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan

pemerintah dan masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Contoh PMKS Anak itu seperti Anak Balita Terlantar (ABT), Anak Terlantar (AT), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Anak yang Diperlakukan Salah, Anak Korban Tindak Kekerasan, dan Anak Korban NAPZA.

Tujuan SENANDUNG SAJAK adalah untuk menjalin kerja sama dan sinergitas antara perangkat daerah terkait dan masyarakat dalam hal penanganan PMKS Anak berdasarkan amanat UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perangkat Daerah dan Stakeholder yang terlibat dalam SENANDUNG SAJAK meliputi : Dinas Sosial, Badan Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Balikpapan, Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan, Kementerian Agama, Pengadilan Negeri Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Lembaga Masyarakat Kelas IIA Balikpapan, Balai Masyarakat Kelas II Balikpapan, Pengacara Anak dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. PANJI BERBAKAT (Penanganan ANak Jalanan Integratif BERBASIS masyarakat).

PANJI BERBAKAT merupakan upaya terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar anak jalanan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.

Terdapat 4 (empat) komunitas yang bersinergi dalam kegiatan PANJI BERBAKAT yaitu:

a. Sekolah Rakyat (SR)

Jl. Syarifuddin Yoes RT. 13 Kelurahan Sepinggan Raya
Kecamatan Balikpapan Selatan
0811 5405 181 (Dyta)

b. Lembaga Rumah Singgah Nurul Ilmi

Komp. Perumahan Balikpapan Baru Blok F1 No. 5 RT. 19 Kelurahan
Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara
0821 5356 4023 (Imam Muhib)

c. Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KOPPAJA)

Jl. Manunggal RT. 20 Kelurahan Sungai Nangka
Kecamatan Balikpapan Selatan
0822 5461 8858 (Abi)

d. Peduli Anak Penerus Bangsa

Jl. Sultan Hasanuddin Komp. Perum Guru RT. 39
Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
0852 8348 2846 (Nur Sukmawati)

2. SABAH (Sayang Anak Berhadapan dengan Hukum).
SABAH berupa kegiatan pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum pada saat diversi dan persidangan. Pendampingan dilakukan oleh tim Dinas Sosial Kota Balikpapan terhadap pelaku dengan usia termasuk kategori anak (0 s.d 18 tahun).
3. RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA)
Merupakan rumah yang berfungsi untuk melindungi, mengamankan, menampung sementara dan merehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak korban NAPZA/ngelem, anak jalanan dan anak punk hasil razia Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
4. Teropong Jiwa.
TEROPONG JIWA “ Tanggap Ketuk Rumah Pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa “

Isu yang Diangkat : Belum optimalnya dukungan sosial keluarga terhadap pemulihan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) .Gagasan Pemecahan Isu : Optimalisasi dukungan sosial keluarga terhadap pemulihan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Pelaksanaan kegiatan Aktualisasi Teropong Jiwa (Tanggap Ketuk Rumah Pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa) ini turut membantu Dinas Sosial Kota Balikpapan khususnya Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan dalam menjalankan visi Dinas Sosial Kota Balikpapan yaitu terwujudnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang profesional dan berkualitas dan misi meningkatkan upaya – upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan adanya kegiatan Teropong Jiwa penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) membantu perjalanan Tupoksi dari Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dengan dibuatnya kegiatan Teropong Jiwa dapat mewujudkan kemandirian dan sisi humanistik dari keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam menangani/memperlakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca rawat inap di Rumah Sakit Jiwa atau pun pasca rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental. Adanya Teropong Jiwa ini meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Balikpapan yang tidak hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi mampu mengoptimalkan pelayanan secara administratif maupun sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa melalui keluarga.

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pendataan Orang dengan Gangguan Jiwa.
Merekapitulasi data Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mendapatkan pelayanan di Dinas Sosial Kota Balikpapan ke dalam aplikasi spreadsheet dan mensikronisasi data Orang dengan Gangguan Jiwa yang diperoleh dari Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.
2. Membuat buku pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa.
Daftar isian buku yang pertama adalah lembar identitas yang berisi identitas Orang Dengan Gangguan Jiwa, identitas keluarga (orang tua) dan identitas wali (istri/suami/keluarga lainnya). Daftar isian yang kedua berisi form pernyataan persetujuan keluarga terhadap pelayanan pekerja sosial dan 9 (sembilan) hal lainnya yang memerlukan persetujuan keluarga. Ketiga adalah lembar asesmen BPSS yang berisi 4 aspek penilaian diri Orang Dengan Gangguan Jiwa yaitu aspek biologis,

psikologis, sosial dan spiritual. Keempat adalah lembar intervensi yang berisi mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh keluarga dalam penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Kelima adalah lembar monitoring terhadap pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh keluarga. Keenam adalah lembar terminasi berisi lembar keputusan pelayanan pekerja sosial kepada orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang digunakan apabila keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) telah mampu secara mandiri mengurus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Terakhir berisi lembar kontrol rawat jalan, rawat inap dan pelayanan rehabilitasi yang diterima Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hasil referensi yang telah didapatkan kemudian diolah untuk dimasukkan ke rancangan buku sesuai dengan daftar isi yang telah dibuat. Tema buku ini adalah jurnalku yang menjelaskan perjalanan/riwayat Orang Dengan Gangguan Jiwa. Buku ini digunakan sebagai arsip yang memudahkan untuk melihat riwayat Orang Dengan Gangguan Jiwa baik dari segi biologis, sosial, psikologis, spiritual dan riwayat pengobatan/rehabilitasi ODGJ.

3. Membuat leaflet dan sticker.

Leaflet dirancang berisi pemahaman dasar mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa seperti definisi mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa / penyandang disabilitas mental yang diambil dari sumber Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, materi-materi yang diberikan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berisi gejala-gejala seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan jiwa, penyebab gangguan jiwa, penyebab kambuhnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan penanganan pertama ketika kambuh. Selanjutnya, leaflet berisi peran keluarga dalam menangani anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, indikator keberhasilan keluarga dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa dan alur penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sticker dirancang dengan menekankan untuk mengkampanyekan bagaimana memperlakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) seperti anggota lainnya terutama dalam hal pelibatan dalam kegiatan keluarga dan perlunya dukungan keluarga secara fisik, psikis dalam mendampingi Orang Dengan Gangguan Jiwa.

4. Sosialisasi melalui home visit ke keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa

Sosialisasi dilaksanakan bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Sepinggan Baru dan Sepinggan Raya. Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan asesmen dasar/asesmen lanjutan terhadap anggota keluarga dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai dengan buku yang telah dibuat. Selain itu dalam sosialisasi dilakukan penyampaian edukasi dan motivasi terkait dengan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dapat dilakukan oleh keluarga.

5. Membuat forum komunikasi keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa

Membuat grup WhatsApp yang bernama Teropong Jiwa sebagai forum komunikasi bagi pendamping/keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Forum ini dibuat sebagai sarana koordinasi, sharing informasi dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa. WhatsApp hanya diperuntukkan bagi keluarga/pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

5. Arlin Kobana.

“ Aksi Perlindungan Sosial terhadap Korban Bencana “

Sebuah inovasi pengelolaan barang logistik bencana melalui Aplikasi guna membantu memudahkan dalam mengetahui ketersediaan barang dan penyalurannya untuk korban bencana dan memfasilitasi organisasi sosial yang terlibat penanganan bencana, sehingga barang-barang bantuan dari masyarakat terarah, transparan dalam penyalurannya.

Kota Balikpapan merupakan daerah yang rawan bencana karena memiliki daerah yang berbukit-bukit, sehingga potensi bencana yang sangat menonjol di Kota Balikpapan adalah Banjir, Tanah Longsor dan Kebakaran, sementara anggaran Pemerintah Kota Balikpapan yang teralokasikan di Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam upaya memberikan perlindungan sosial terhadap Korban bencana sangat terbatas, sehingga diperlukan partisipasi dari masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban terhadap bencana.

Oleh karena itu dalam rangka membantu ketersediaan barang bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban, sehingga perlu adanya Aksi Perubahan dengan judul “ Aksi Perlindungan Sosial terhadap Korban Bencana “, yang didalamnya terdapat 2 (dua) aspek yaitu:

1. Pembuatan Aplikasi Data Barang Logistik Bencana sebagai salah satu upaya untuk mempermudah penginputan data barang bencana yang tersedia dan penyalurannya serta juga untuk transparansi agar stakeholder mengetahui dan dapat berkolaborasi untuk membantu kesiapsiagaan barang logistik bencana.
2. Memfasilitasi organisasi sosial yang terlibat penanganan bencana melalui pembentukan Forum Perlindungan Sosial Korban Bencana. Dengan dilaksanakannya kedua aspek tersebut diharapkan dapat memudahkan transparansi data barang logistik bencana dan membuat pihak terkait serta masyarakat yang menjadi korban bencana lebih percaya dengan kondisi barang di Gudang logistik bencana yang terbatas, dan diharapkan pada akhirnya pihak terkait dapat membantu memenuhi kebutuhan barang logistik bencana yang masih kurang .

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Walikota. Demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, dibutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan di bidang sosial. Untuk mengantisipasi minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Balikpapan, dibutuhkan usaha aktif untuk mencari informasi terkait sumber-sumber dana dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu, kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pihak swasta dan organisasi masyarakat lainnya, dapat menyediakan solusi demi terlaksananya seluruh program/kegiatan Dinas Sosial Kota Balikpapan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Balikpapan ini disampaikan sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2025. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja ini pada masa yang mendatang sangat kami harapkan.

H. RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dinas Ketenagakerjaan senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang, terutama Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut khususnya Dinas Ketenagakerjaan, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025.

Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut :

a. Maksud

- Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis;
- Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Balikpapan.

b. Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Perangkat Daerah (DPPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2023. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketenagakerjaan

Tahun Anggaran 2023

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,140,902,905	7,444,262,286	696,640,619
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,084,572,000	5,754,639,112	329,932,888
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,084,572,000	5,754,639,112	329,932,888
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	319,124,600	287,892,720	31,231,880
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33,204,600	31,185,000	2,019,600
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	285,920,000	256,707,720	29,212,280
Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Administrasi Umum Perangkat Daerah	886,259,471	714,409,529	171,849,942
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,198,800	4,639,000	559,800

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,965,500	15,124,900	840,600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,050,900	18,137,400	913,500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	442,388,021	300,397,300	141,990,721
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,082,250	31,377,750	18,704,500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,574,000	-	8,574,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345,000,000	344,733,179	266,821
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299,442,500	283,608,213	15,834,287
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131,722,400	122,988,213	8,734,187
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167,720,100	160,620,000	7,100,100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157,183,500	146,636,755	10,546,745
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,650,000	3,650,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,127,000	26,249,999	8,877,001
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118,406,500	116,736,756	1,669,744
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394,320,834	257,075,957	137,244,877
Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325,461,034	232,305,957	93,155,077
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68,859,800	24,770,000	44,089,800

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,561,279,000	1,516,089,205	45,189,795
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1,457,804,000	1,420,014,205	37,789,795
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1,457,804,000	1,420,014,205	37,789,795
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	51,775,000	46,716,000	5,059,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	51,775,000	46,716,000	5,059,000
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	51,700,000	49,359,000	2,341,000
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	51,700,000	49,359,000	2,341,000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	114,994,800	114,014,788	980,012
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	114,994,800	114,014,788	980,012
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	114,994,800	114,014,788	980,012
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	370,827,800	295,832,737	74,995,063
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	190,234,800	147,594,238	42,640,562
Pelayanan Antar Kerja	89,366,200	64,703,838	24,662,362
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	50,001,000	48,150,000	1,851,000
Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	50,867,600	34,740,400	16,127,200
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	138,610,500	123,242,120	15,368,380
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	62,600,000	56,272,120	6,327,880

Job Fair / Bursa Kerja	76,010,500	66,970,000	9,040,500
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	41,982,500	24,996,379	16,986,121
Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	41,982,500	24,996,379	16,986,121
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	460,818,120	379,459,910	81,358,210
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	-	-	-
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	-	-	-
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	-	-	-
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	460,818,120	379,459,910	81,358,210
Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	96,874,560	92,690,468	4,184,092

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	89,996,500	64,715,701	25,280,799
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	101,264,560	67,203,731	34,060,829
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	172,682,500	154,850,010	17,832,490
	10,648,822,625	9,749,658,926	899,163,699

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, besar anggaran (DPPA) Dinas ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar Rp. 10,648,822,625,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9,749,658,926 sehingga terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 899,163,699-.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Disnaker Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 e.81

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2023
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
							I		II		III		IV					
		2023	2023			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		83.5	8,140,902,905		1,748,107,502	76	2,091,886,865		1,752,543,111	91.3	1,851,724,808	83.53	7,444,262,286	100%	91%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	83.7	6,084,572,000		1,273,872,921	75	1,843,775,531		1,309,112,929	91.5	1,327,877,731	83.35	5,754,639,112	99%	95%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	30	6,084,572,000	0	1,273,872,921	0	1,843,775,531	30	1,309,112,929	0	1,327,877,731	30	5,754,639,112	100%	95%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	82.1	319,124,600		256,707,720	76	-		31,185,000	91.2	-	83.72	287,892,720	102%	90%

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	31	33,204,600	-	31	-	31,185,000	0	-	31	31,185,000	100%	94%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Orang	31	285,920,000	31	256,707,720	-	-	0	-	31	256,707,720	100%	90%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	81.93	886,259,471		76	126,964,751	312,440,376	91.21	204,421,617	83.7	714,409,529	102%	81%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	5,198,800	0.199	0.1	-	0.221	4,639,000	0.48	1	4,639,000	100%	89%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	15,965,500	0.325	0.37	-	0.605	15,124,900	0.7	2	15,124,900	100%	95%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	5	19,050,900	0.99	1.5	-	0.21	10,700,400	2.3	5	18,137,400	100%	95%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3	442,388,021	0.9	0.95	67,541,800	0.58	102,844,700	0.57	3	300,397,300	100%	68%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	20	50,082,250	4	5	7,198,300	1.66	19,940,000	9.34	20	31,377,750	100%	63%

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	8,574,000	0			-		0		0				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	226	345,000,000	65	62,409,585	105	52,224,651	51	159,191,376	5	70,907,567.00	226	344,733,179	100%	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	79.6				76			91.21		83.7		105%	95%	
					2	299,442,500		92,400,000		29,631,933		956,280		160,620,000		283,608,213		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	2	131,722,400	1.52	92,400,000	0.1	29,631,933	0.1	956,280	0.28		2	122,988,213	100%	93%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	16	167,720,100	1.6		4.5	-	1.1	-	8.8	160,620,000	16	160,620,000	100%	96%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	83.1		0		76			91.21		83.7		101%	93%	
					5	157,183,500		24,177,276		45,447,563		35,167,864		41,844,052		146,636,755		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,650,000	0.4	1,000,000	0.5	300,000	0.1	2,350,000			1	3,650,000	100%	100%

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	6	35,127,000	1.8	5,124,900	0.5	9,646,499	1.12	5,739,300	2.58	5,739,300	6	26,249,999	100%	75%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	13	118,406,500	4.5	18,052,376	2.5	35,501,064	2.854	27,078,564	3.146	36,104,752	13	116,736,756	100%	99%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	79.3	394,320,834		30,366,800	76	46,067,087		63,680,662	91.21	116,961,408	83.7	257,075,957	106%	65%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	325,461,034	3	30,366,800	2	46,067,087	2.32	45,900,662	4.68	109,971,408	12	232,305,957	100%	71%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	16	68,859,800	3.2	-	3.2	-	1.52	17,780,000	5	6,990,000	12.92	24,770,000	81%	36%
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari Kerja Yang Mendapat Palatihan yang Tersalur	%	55	1,561,279,000	1.8	31,125,293	6.3	43,468,309	3.6	427,292,195	19.7	1,014,203,408	51.52	1,516,089,205	94%	97%

		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	%	100	1,457,804,000	11.71	25,725,293	17	27,260,309	81	385,714,195	9.01	981,314,408	118.919	1,420,014,205	119%	97%
		Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Orang	111	1,457,804,000	13	25,725,293	19	27,260,309	90	385,714,195	10	981,314,408	132	1,420,014,205	119%	97%
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	%	15	51,775,000	7	-	-	-	5	22,275,000	3	24,441,000	15	46,716,000	100%	90%
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPK Swasta yang dibina	Lembaga	30	51,775,000	2	-	12	-	11	22,275,000	1	24,441,000	26	46,716,000	87%	90%
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	20	51,700,000	18	5,400,000	20	16,208,000	20	19,303,000	0	8,448,000	58	49,359,000	290%	95%
		Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	Kali	1	51,700,000	0.24	5,400,000	0.3	16,208,000	0.46	19,303,000		8,448,000	1	49,359,000	100%	95%

		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	%	3.3	114,994,800			-		4,886,080	2.80	109,128,708	2.80055	114,014,788	85%	99%	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	Dokumen	1	114,994,800			0		4,886,080	1	109,128,708	1	114,014,788	100%	99%	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Orang	43	114,994,800			-		4,886,080	43	109,128,708	43	114,014,788	100%	99%	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	23.5	370,827,800	27.53	1,239,000	43.8	57,991,253	28	93,949,600	60.92	142,652,884	38.1	295,832,737	162%	80%
		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	%	23.5	190,234,800	27.5	1,239,000	44	57,991,253	28	25,479,600	60.92	62,884,385	38.1	147,594,238	162%	78%
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1,058	89,366,200	272	1,239,000	445	32,191,253	432	2,702,000	541	28,571,585	1690	64,703,838	160%	72%
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	480	50,001,000	86		142	15,800,000	160	17,050,000	0	15,300,000	388	48,150,000	81%	96%
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	1	50,867,600	0.1		0.26	10,000,000	0.13	5,727,600	0.43	19,012,800	0.92	34,740,400	92%	68%

		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	%	5	138,610,500					68,470,000	4.4	54,772,120	4.42225	123,242,120	88%	89%	
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	62,600,000	0.09		0.15	-	0.23	1,500,000	0.53	54,772,120	1	56,272,120	100%	90%
		Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Orang	500	76,010,500	47		273	-	137	66,970,000	429		885	66,970,000	177%	88%
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	%	100	41,982,500	40		40		80		0	24,996,379	160	24,996,379	160%	60%
		Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	5	41,982,500	2		2	-	4		0	24,996,379	8	24,996,379	160%	60%
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	70	460,818,120	50	61,346,694	40	110,829,356	30	115,340,010	100	91,943,850	60.53	379,459,910	86%	82%

		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	%	80		10			61		9		80		100%	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen pengesahan, pembaharuan, dan pelaporan Peraturan Perusahaan (PP)	Dokumen	40		10	10	-	35		1		56		140%	
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	1			0.5	-	0.5				1		100%	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah dokumen pendataan sarana hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan pengupahan	Dokumen	20		12		-			8		20		100%	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	%	80	460,818,120	10	40	110,829,356	30	115,340,010	100	91,943,850	60.53	379,459,910	76%	82%

		Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota																
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perkara	200 96,874,560	108	40,223,843	20	52,466,625	78				206	92,690,468	103%	96%	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan dengan PB	Perkara	40 89,996,500	8	21,122,851	9	3,159,000	10	14,850,000	25,583,850	27	64,715,701	68%	72%		

		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi	1	101,264,560			0.78	55,203,731	0.08	12,000,000	0.14		1.00	67,203,731	100%	66%
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	172,682,500			0.26	-	0.33	88,490,010	0.41	66,360,000	1.00	154,850,010	100%	90%
						10,648,822,625	1,841,818,489			2,304,175,783		2,394,010,996		3,209,653,658.00	0	9,749,658,926.00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	110%	86%
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	105%	85%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	Sangat Tinggi	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																	122%	86%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																	Sangat Tinggi	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	105%	90%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi	Tinggi

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa urusan ketenagakerjaan bukan merupakan urusan wajib yang bersifat dasar, sehingga untuk pengukuran kinerja pelayanannya tidak mempergunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk pengukuran kinerja pelayanan mempergunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Capaian Kinerja	Rasio Capaian Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64.7	65.58	101%
		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3.3	2.80	85%
		Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan yang Tersalur	%	55	51.52	94%
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.	%	23.5	38.11	162%
		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	70	60.53	86%
2	Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	Nilai Sakip Dinas Ketenagakerjaan	Nilai	65	63.81	98%
		Nilai RB Dinas Ketenagakerjaan	%	33.1	N/A	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Dinas Ketenagakerjaan	Nilai	85	91.78	108%
Rata - Rata Capaian						105%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hampir seluruh sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan mencapai nilai di atas target yang telah ditentukan. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 104%. berdasarkan hasil evaluasi capaian terdiri atas 2 Sasaran Strategis, yaitu:

1. **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja** yang terdiri atas 5 indikator kinerja, masing-masing adalah:

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** Memperoleh capaian kinerja sebesar 101% dengan realisasi sebesar 65.58% dari target 64.7%. Data ini diperoleh dari Berdasarkan Balikpapan Dalam Angka 2023.
- **Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)** yang tersusun sebesar 2.8% dari target 3.3 % sehingga capaian kinerjanya mencapai 85%. Data tersebut diperoleh dari jumlah Perusahaan yang telah menyusun RTK Mikro tahun 2023 sebanyak 41 Perusahaan, sementara Data Perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2023 sebanyak 1.464 Perusahaan.
- **Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan yang Tersalur** , kegiatan tersebut mencapai realisasi sebesar 51.52 % dari target 55 %. Sehingga besar capaian kinerjanya sebesar 94%. Data tersebut diperoleh dari data Realisasi Pencari kerja yang mendapat Pelatihan pada tahun 2023 sebanyak 132 Peserta dan Jumlah pencari kerja difasilitasi magang selama tahun 2023 sebanyak 68 Peserta.
- **Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan** terealisasi sebesar 38.11 % dari target 23.5 %. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 162%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan data Jumlah Pencaker ditempatkan selama tahun 2023 sebanyak 1.690 Pencaker dan Jumlah pencaker terdaftar selama tahun 2023 sebanyak 4.434 Pencaker.
- **Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama** terealisasi sebesar 60.53 % dari target 70 %. Sehingga capaian Kinerjanya sebesar 86%. Data tersebut diperoleh atas data Kasus yang masuk selama Tahun 2023 sebanyak 32 Kasus, dengan Kasus yang diselesaikan dengan PB sebanyak 23 Kasus.

2. **Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel** terdiri atas 2 indikator kinerja, masing-masing adalah :

- **Nilai SAKIP OPD** dengan capaian kinerja sebanyak 98%, Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 68.81 % dari target sebesar 65%. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian Inspektorat dengan data sebagai berikut Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022 :

- Perencanaan Kinerja = 21.17,
 - Pengukuran Kinerja = 21.27
 - Pelaporan Kinerja = 9.77
 - Evaluasi Akuntabilitas = 11.60
- Pengukuran indikator **Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** tidak dilaksanakan dengan telah ditetapkan Permenpan RB No. 3 Tahun 2023
 - **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah** teralisasi sebesar 91.78 % dari target sebesar 85 %. Sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 108%. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan data dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Balikpapan, Disnaker memperoleh Nilai IKM sebesar 92.15 dengan predikat Sangat Baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas, telaah visi dan misi OPD yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi, serta telaah renstra kementerian dan lembaga, maka isu-isu strategis yang akan di respon oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam perencanaan tahun 2025 adalah :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan yang masih diatas rata – rata regional dan nasional;
2. Penyerapan tenaga kerja terdidik yang masih rendah, kompetensi/ ketrampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan pasar kerja yang membutuhkannya;
3. Produktivitas tenaga kerja Kota Balikpapan yang masih rendah;
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas;
5. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penempatan serta pemberdayaan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan peningkatan kepersertaan jaminan social tenaga kerja;
7. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi.

Sebagai upaya penanganan permasalahan di atas, pada tahun 2024 Disnaker Kota Balikpapan akan melaksanakan :

- a. Pemanfaatan aplikasi layanan ketenagakerjaan secara daring melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISKA), dengan konten berupa pendaftaran pencaker, pelaporan pencaker/lowongan kerja, dll.;

- b. Pembuatan AK-I Online dan Bursa Kerja Online;
- c. Pelayanan antar kerja dengan target penempatan sebanyak 1500 orang melalui mekanisme antar kerja local (AKL);
- d. Pelayanan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja bagi perusahaan;
- e. Pelayanan pembinaan / motivasi bagi pencari fresh graduate melalui kegiatan Wednesday Inspiring setiap bulannya pada minggu ke-1 dan minggu ke-3; dan
- f. Pembinaan bagi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik dan pencari korban PHK melalui Kegiatan Perluasan Kerja;
- g. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- h. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK
- i. Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja
- j. Pemasyarakatan Hubungan Industrial
- k. Melaksanakan Seleksi Pelatihan Online
- l. Berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan di Kota Balikpapan untuk penyerapan SDM yang telah dilatih
- m. Berupaya membangun kerjasama dengan BLK Milik Pemerintah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Balikpapan

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.5%	9,372,907,311	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.5%	9,372,907,311
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	Nilai SAKIP OPD	68	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	Nilai SAKIP OPD	68	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	3 Dok	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	3 Dok	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2 Dok	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	2 Dok	-

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.07%	6,917,208,588	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.07%	6,917,208,588
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bln	6,917,208,588	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bln	6,917,208,588
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.55%	470,306,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.55%	470,306,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	45,306,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	45,306,000
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Kota Balikpapan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	34 orang	425,000,000	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Kota Balikpapan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	34 orang	425,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.93%	1,006,800,123	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.93%	1,006,800,123
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	26,091,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	26,091,700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	65,247,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	65,247,500

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	8 Paket	458,635,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	8 Paket	458,635,800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	54,845,600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	54,845,600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226 Laporan	351,979,523	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226 Laporan	351,979,523
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.12%	340,573,300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.12%	340,573,300
Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan	Jumlah Pengadaan Dinas	2 Unit	153,320,200	Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan	Jumlah Pengadaan Dinas	2 Unit	153,320,200

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	16 Unit	187,253,100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	16 Unit	187,253,100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.55%	249,105,500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.55%	249,105,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	4,190,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	4,190,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	6 Lap	42,510,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	6 Lap	42,510,500
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Lap	202,405,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Lap	202,405,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.80%	388,913,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.80%	388,913,800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	319,623,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	319,623,800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	69,290,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	69,290,000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Balikpapan	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	3.5%	202,654,139	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Balikpapan	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	3.5%	202,654,139
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	1 Dok	202,654,139	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	1 Dok	202,654,139

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	48 Orang	202,654,139	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	48 Orang	202,654,139
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Balikpapan	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	63%	1,389,731,491	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Balikpapan	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	63%	1,389,731,491
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi	Kota Balikpapan	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	100%	1,257,618,077	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi	Kota Balikpapan	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	100%	1,257,618,077
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Balikpapan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	80 Org	1,257,618,077	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Balikpapan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	80 Org	1,257,618,077

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Balikpapan	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	25%	66,056,707	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Balikpapan	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	25%	66,056,707
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Kota Balikpapan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	30 LPK	66,056,707	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Kota Balikpapan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	30 LPK	66,056,707
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Balikpapan	Jumlah Sosialisasi peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 Kali	66,056,707	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Balikpapan	Jumlah Sosialisasi peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 Kali	66,056,707
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Balikpapan	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusaha-an	66,056,707	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Balikpapan	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusaha-an	66,056,707
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Balikpapan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	30.5%	573,170,451	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Balikpapan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	30.5%	573,170,451

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	30.5%	331,026,673	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	30.5%	331,026,673
Pelayanan Antar Kerja	Kota Balikpapan	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	4.500 Pencaker	198,913,259	Pelayanan Antar Kerja	Kota Balikpapan	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	4.500 Pencaker	198,913,259
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Balikpapan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	480 Orang	66,056,707	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Balikpapan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	480 Orang	66,056,707
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Balikpapan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	1 Orang	66,056,707	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Balikpapan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	1 Orang	66,056,707
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Balikpapan	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	5%	192,143,778	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Balikpapan	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	5%	192,143,778

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	20,000,000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	20,000,000
Job Fair / Bursa Kerja	Kota Balikpapan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	2 Kali 500 Orang	172,143,778	Job Fair / Bursa Kerja	Kota Balikpapan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	2 Kali 500 Orang	172,143,778
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	100%	50,000,000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	100%	50,000,000
Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Kota Balikpapan	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	5 Orang	50,000,000	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Kota Balikpapan	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	5 Orang	50,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Balikpapan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	73.4%	682,935,523	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Balikpapan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	73.4%	682,935,523
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	80%	-	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	80%	-
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Kota Balikpapan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan	45 Dokumen	-	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Kota Balikpapan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan	45 Dokumen	-
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Kota Balikpapan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	-	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Kota Balikpapan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	-

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Kota Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	25 Laporan	-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Kota Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	25 Laporan	-
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	80%	682,935,523	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	80%	682,935,523
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Kota Balikpapan	Jumlah Perselisihan yang dicegah	200 Perkara	132,608,839	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Kota Balikpapan	Jumlah Perselisihan yang dicegah	200 Perkara	132,608,839

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Kota Balikpapan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	132,608,839	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Kota Balikpapan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	132,608,839
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Kota Balikpapan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	132,608,839	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Kota Balikpapan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	132,608,839
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	285,109,005	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	285,109,005
				12,221,398,916					12,221,398,916

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi terhadap arah kebijakan nasional maupun provinsi sebagaimana disebutkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional	Peraturan	
1	Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional	Menteri Ketenagakerjaan Republik	
2	Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja	Indonesia Nomor 12 Tahun 2020	
3	Percepatan sertifikasi profesi	tentang Rencana Strategis	
4	Perluasan kesempatan kerja formal	Kementerian	
5	Penguatan wirausaha produktif	Ketenagakerjaan	
6	Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif	Tahun 2020-	
7	Penegakan hukum ketenagakerjaan	2024	
8	Peningkatan perlindungan pekerja migran		
9	Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan, dan akuntabel		
B	Provinsi	Renstra	
1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Disnakertrans Prov. Kaltim	
2	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Periode 2019-	
3	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2023	

Sesuai dengan hasil identifikasi kebijakan nasional, provinsi, maupun reviu terhadap rancangan awal RKPD, maka dirumuskan kebutuhan program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman” serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”. Identifikasi pernyataan tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Identifikasi Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah Terhadap Hasil Evaluasi Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	%Rasio Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Nilai	64.7	65.58	101%
			2.	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3.3	2.80	85%
			3.	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%	55	51.52	94%
			4.	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	23.5	38.11	162%
			5.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	70	60.53	86%
2.	Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel		1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	65	63.81	98%
			2.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	33.1	N/A	
			3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	91.78	108%
Rata - Rata Capaian							105%	

Berdasarkan hasil identifikasi di atas, maka tujuan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan adalah Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat, sedangkan Sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
- 2) Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2025, meliputi 4 program prioritas yang termasuk ke dalam belanja publik sebagaimana berikut :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas 3 Kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - ✓ Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - ✓ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - ✓ Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja, terdiri atas 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan diantaranya:
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - ✓ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja; terdiri atas 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :
 - Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pelayanan Antar Kerja, Penyuluhan
 - ✓ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
 - ✓ Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - ✓ Perluasan Kesempatan Kerja
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - ✓ Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - ✓ Job Fair / Bursa Kerja
 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- d. Program Hubungan Industrial, terdiri atas 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :
 - Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
 - ✓ Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan;

- ✓ Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan;
- ✓ Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial tenaga kerja serta Pengupahan.
- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pencegahan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/Kota,
 - ✓ Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota,
 - ✓ Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha federasi serikat pekerja / serikat buruh serta nonafiliasi
 - ✓ Pelaksanaan Operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota
 - ✓ Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja merupakan kegiatan tambahan di tahun 2025 dari hasil tindak Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Negeri Balikpapan Nomor B – 246/O.4.10/Gs/02/2024 tanggal 2 Februari 2024.

Dinas Ketenagakerjaan sebagai OPD yang diberikan mandat penempatan alokasi pembiayaan bantuan iuran pekerja rentan, maka merasa sangat berkepentingan untuk mendorong agar pembentukan Peraturan Walikota yang mengatur Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan segera dapat diterbitkan, sehingga proses pendataan dapat mulai dilaksanakan sebagai persiapan pelaksanaan program di tahun 2025.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas di atas, maka ditunjang dengan program/kegiatan yang merupakan belaja rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 6 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rincian program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 disebutkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 (T.C-33)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	85,5%	9.392.408.695		Penting	89,5%	10.441.777.001
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Kota Balikpapan	68	-	APBD Kota	Penting	75	22.160.926
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	Kota Balikpapan	3 Dok	-	APBD Kota	Penting	3 Dok	11.080.463
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	Kota Balikpapan	2 Dok	-	APBD Kota	Penting	2 Dok	11.080.463
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	84,07%	7.035.049.000	APBD Kota	Penting	84,67%	7.710.155.576
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan	30 Org/Bln	7.035.049.000	APBD Kota	Penting	30 Org/Bln	7.706.462.088

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Balikpapan	1 Lap	-	APBD Kota	Penting	1 Lap	3.693.488
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	82,55%	485.792.000	APBD Kota	Penting	83,35%	452.745.316
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan	2 Paket	53.792.000	APBD Kota	Penting	2 Paket	49.534.273
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Kota Balikpapan	34 orang	432.000.000	APBD Kota	Penting	34 orang	403.211.043
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	82,33%	894.600.101	APBD Kota	Penting	82,73%	1.174.633.111
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	0	-	APBD Kota	Penting	0	7.386.975
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	19 Paket	26.088.090	APBD Kota	Penting	19 Paket	36.934.877
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Balikpapan	8 Paket	7.313.907	APBD Kota	Penting	8 Paket	51.708.828

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Balikpapan	8 Paket	439.258.825	APBD Kota	Penting	8 Paket	445.808.459
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Balikpapan	2 Paket	57.459.150	APBD Kota	Penting	2 Paket	51.858.138
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	226 Laporan	364.480.129	APBD Kota	Penting	226 Laporan	530.935.833
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan	1 Dokumen	-	APBD Kota	Penting	1 Dokumen	50.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan	80,62%	301.456.094	APBD Kota	Penting	81,12%	316.052.723
Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Dinas	Kota Balikpapan	2 Unit	125.677.000	APBD Kota	Penting	2 Unit	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kota Balikpapan	27 Unit	175.779.094	APBD Kota	Penting	27 Unit	316.052.722,7
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	

		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	83,95%	247.375.500	APBD Kota	Penting	84,35%	315.423.850
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan	1 Laporan	4.190.000	APBD Kota	Penting	1 Laporan	5.170.883
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kota Balikpapan	5 Laporan	40.780.500	APBD Kota	Penting	5 Laporan	51.708.828
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan	3 Laporan	202.405.000	APBD Kota	Penting	3 Laporan	258.544.139
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	80,3%	428.136.000	APBD Kota	Penting	80,80%	450.605.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Balikpapan	14 Unit	361.814.000	APBD Kota	Penting	14 Unit	332.413.893
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Balikpapan	9 Unit	66.322.000	APBD Kota	Penting	9 Unit	118.191.606
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	

		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	Kota Balikpapan	3,5%	222.621.025	APBD Kota	Penting	3,6%	160.120.272
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	Kota Balikpapan	1 Dok	222.621.025	APBD Kota	Penting	1 Dok	160.120.272
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro		48 Orang	222.621.025			50 Orang	160.120.272
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	Kota Balikpapan	63%	1.389.731.491	APBD Kota	Penting	64%	1.548.299.854
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	Kota Balikpapan	100%	1.257.618.077	APBD Kota	Penting	100%	1.401.112.300
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Kota Balikpapan	92 Org	1.257.618.077	APBD Kota	Penting	90 Org	1.401.112.300
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	

		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	Kota Balikpapan	100%	66.056.707	APBD Kota	Penting	30%	73.593.777
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Kota Balikpapan	30 LPK	66.056.707	APBD Kota	Penting	30 LPK	73.593.777
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Sosialisasi peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Balikpapan	1 Kali	66.056.707	APBD Kota	Penting	1 Kali	73.593.777
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Balikpapan	25 Perusahaan	66.056.707	APBD Kota	Penting	25 Perusahaan	73.593.777
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Kota Balikpapan	30,5%	632.670.451	APBD Kota	Penting	31%	704.225.905
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	Kota Balikpapan	30,5%	281.026.673	APBD Kota	Penting	23,6%	442.390.594
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	Kota Balikpapan	4.500 Pencaker	148.913.259	APBD Kota	Penting	4.500 Pencaker	221.609.262
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Balikpapan	480 Orang	66.056.707	APBD Kota	Penting	480 Orang	73.593.777
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kota Balikpapan	1 Orang	66.056.707	APBD Kota	Penting	1 Orang	73.593.777
Perluasan Kerja					APBD Kota	Penting	25 Orang	73.593.777
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	Kota Balikpapan	5%	301.643.778	APBD Kota	Penting	5%	206.835.311
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Balikpapan	1 Dokumen	94.500.000	APBD Kota	Penting	1 Dokumen	88.643.705
Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Kota Balikpapan	2 Kali 500 Orang	207.143.778	APBD Kota	Penting	2 Kali 500 Orang	118.191.606
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	Kota Balikpapan	100%	50.000.000	APBD Kota	Penting	100%	55.000.000

Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kota Balikpapan	5 Orang	50.000.000	APBD Kota	Penting	5 Orang	55.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	Kota Balikpapan	73,4%	2.682.935.522	APBD Kota	Penting	75%	760.858.466
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	Kota Balikpapan	80%	-	APBD Kota	Penting	80%	59.095.803
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan	Kota Balikpapan	45 Dokumen	-	45 Dokumen	Penting	45 Dokumen	-
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Balikpapan	1 Perusahaan	-	100 Dokumen	Penting	100 Dokumen	22.160.926
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Kota Balikpapan	25 Laporan	-	25 Dokumen	Penting	25 Laporan	36.934.877

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Kota Balikpapan	80%	2.682.935.522	APBD Kota	Penting	80%	2.941.762.663
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kota Balikpapan	200 Perkara	132.584.400	APBD Kota	Penting	200 Perkara	147.739.508
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Balikpapan	40 Perkara	132.608.839	APBD Kota	Penting	40 Perkara	147.739.508
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Kota Balikpapan	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	132.042.575	APBD Kota	Penting	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	147.739.508

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kota Balikpapan	1 Lembaga	285.699.708	APBD Kota	Penting	1 Lembaga	258.544.139
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Balikpapan	8.000 Orang	2.000.000.000	APBD Kota	Penting	10.000 Orang	2.240.000.000
				14.320.367.184				13.615.281.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Balikpapan.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai OPD yang bersinggung/berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha/perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Oleh karena itu, secara tidak langsung Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan mendukung prioritas Pemerintah Kota dengan Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kota.

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya. Sementara itu, Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam menyediakan pelayanan publik. Inovasi dimaksud sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan merupakan Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka turut serta melaksanakan pelayanan publik berkualitas, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan beberapa Inovasi. Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Layanan AK-I Online

Kartu Tanda Pencari Kerja yang sering disebut sebagai kartu AK1. Layanan Pembuatan AK-I Online adalah layanan membuat Kartu pencari kerja dimana Pencari kerja yang berdomisili Kota Balikpapan dapat melakukan pendaftaran secara online dan mencetak kartu AK 1 secara mandiri (tanpa harus datang ke kantor). Kartu ini berisi beberapa informasi mengenai pemiliknya seperti Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP, dan data kelulusan pendidikan. Layanan ini dilaksanakan guna Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat. Sehingga Proses pembuatan AK-I dapat lebih cepat dan Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses pembuatan Kartu AK-I.

2. Layanan Buka Line (Bursa Kerja Online)

Sistem Informasi Bursa Kerja Online Berbasis Web adalah sistem yang mampu menampilkan informasi lowongan sesuai dengan masukan dari pelamar kerja untuk memperoleh informasi lowongan yang tersedia dalam bursa kerja. Layanan ini dilaksanakan guna Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat. Sehingga Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses lowongan kerja dan Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja.

3. Layanan Halo HI

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo HI, layanan tersebut merupakan Layanan Konsultasi Bidang Hubungan Industrial yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Layanan Halo HI memberikan dampak positif bagi para pekerja diantaranya :

- a) Tenaga kerja dapat dengan mudah melakukan konsultasi terkait permasalahan Hubungan Industrial
- b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
- c) Memfasilitasi Tenaga Kerja dengan perusahaan terkait permasalahan Hubungan Industrial

4. Layanan Halo Penta

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo Penta. Layanan Halo Penta merupakan Layanan Konsultasi Bidang PPK yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Layanan Halo Penta memberikan dampak positif bagi para pekerja diantaranya :

- a) Para pencari kerja dapat dengan mudah melakukan konsultasi terkait informasi Ketenagakerjaan
- b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
- c) Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja

5. Layanan Halo Lattas

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo Lattas. Layanan Halo Lattas merupakan Layanan Konsultasi Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Adapun dampak positif dari Layanan Lattas adalah sebagai berikut :

- a) Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses informasi terkait Pelatihan dan produktivitas tenagakerja
- b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
- c) Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja

BAB VI

PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketenagakerjaan. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.
- b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (misalnya tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang, Sub Koordinator, Subbag, dan seluruh staf Dinas Ketenagakerjaan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Dinas Ketenagakerjaan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

I. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis (Renstra) OPD lima tahunan yang dituangkan dalam Renja OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Penjabaran yang lebih teknis dari Renstra PD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau Renja PD. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing OPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang

dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat khususnya pada urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (kelurahan) . Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian pada kualitas proses penyusunan dokumen rencana kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan Pembangunan daerah, karena Renja DP3AKB Kota Balikpapan ini adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan pada DP3AKB, yang dalam penyusunannya harus di sinkronkan dan berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan juga dokumen Renstra DP3AKB Kota Balikpapan, khususnya yang terkait indikator kinerja dan target kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun anggaran 2025.

Dokumen Rencana kerja DP3AKB memuat informasi tentang Sasaran Strategi, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 , program dan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun 2025. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan salah satu dinas teknis di jajaran Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang bersifat konkrue pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa (kelurahan).

Proses penyusunan Renja DP3AKB tahun 2025 didahului dengan penyusunan Rancangan Awal Renja yang didasarkan pada Renstra DP3AKB 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas Pembangunan daerah serta tugas dan fungsi DP3AKB dan diselaraskan dengan hasil rapat Forum OPD DP3AKB . Tahun 2025 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan menengah Kota Balikpapan yang berpedoman pada RPJMD 2021 - 2026.

Penyusunan Renja sejalan dengan mengacu kepada Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yaitu : *“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”* dengan lima misi yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;

Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;

Misi 3 : Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;

Misi 4 : Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;

Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Untuk mewujudkan serta menunjang Visi tersebut di atas DP3AKB mendukung pada misi ke dua yaitu *” Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi”*. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut maka akan disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (PD) DP3AKB tahun 2025, antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pementukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pegesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Instruksi Prsiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
16. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja DP3AKB tahun 2025 adalah untuk mengintegrasikan program-program pembangunan dalam rangka melaksanakan

rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis DP3AKB Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 . Program dan Kegiatan dalam rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah ini masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan arah dan kebijakan umum dan prioritas daerah maupun ketersediaan pendanaan APBD Kota Balikpapan pada tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja DP3AKB adalah sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (PD) DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Inovasi Perangkat Daerah

BAB VI : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3AKB TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2024, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dikarenakan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 masih berjalan. Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan 12 Program, 26 Kegiatan yang terdiri dari 56 Sub Kegiatan

Hasil Pengukuran kinerja DP3AKB didasarkan pada sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja DP3AKB Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2023
Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase RKA responsif Gende	8,00%	12,41%
Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	70,63 %	61,02 %
Meningkatnya Kelurahan Katergori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	100 %	100%
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKB	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat	27,30	N/A

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023 sebesar Rp. 31.207.769.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.727.314.967 (88,85%).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	79 Nilai	82,19 Nilai	76 Nilai	83,37 Nilai	109,70%	83 Nilai	83,37 Nilai	105,53%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75 Nilai	80,58 Nilai	75 Nilai	83,53 Nilai	111,37%	75 Nilai	83,53 Nilai	111,37%
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	37 Orang/bulan	36 Orang/bulan	97,30%	39 Orang/bulan	36 Orang/bulan	-
						Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam setiap bulan	-	26 Dokumen	-	-	-	-	-	-
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Nilai	82,16 Nilai	75 Nilai	81,95 Nilai	109,27%	75 Nilai	81,95 Nilai	109,27%
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	2 Paket	2 Paket	100 %	20 Paket	2 Paket	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah Jenis Peralatan Kantor	-	5 Jenis	-	-	-	-	5 Jenis	
						Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	-	6 Jenis	-	-	-	-	6 Jenis	
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	10 Paket	10 Paket	109 %	10 Paket	10 Paket	-
						Jenis bahan logistik kantor (ATK)	-	24 Jenis	-	-	-	-	24 Jenis	
						Jenis bahan logistik kantor (Makan Minum)	-	8053 Kotak	-	-	-	-	8053 Kotak	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket	3 Paket	-
						Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	-	3 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100 %	2 Paket	1 Paket	-
						Jumlah jenis bahan/ material	-	12 Jenis	-	-	-	-	12 Jenis	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	-
						Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	-	24 Kali	-	-	-	-	24 Kali	-
						Frekuensi rapat koordinasi dan	-	16 Kali	-	-	-	-	16 Kali	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)				
		konsultasi ke Luar Daerah												
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75 Nilai	82,16 Nilai	75 Nilai	82,86 Nilai	110,48%	75 Nilai	82,86 Nilai	110,48%
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	4 Unit	4 Unit	100 %	5 Unit	4 Unit	-
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit	-
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Nilai	82,16 Nilai	75 Nilai	83,8 Nilai	111,73%	75 Nilai	83,8 Nilai	111,73%
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
						Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	-	7 Rekening	-	-	-	-	7 Rekening	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	13 Laporan	13 Laporan	100,00%	13 Laporan	13 Laporan	-
						Jumlah Tenaga Non PNS	-	16 Orang	-	-	-	-	16 Orang	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Nilai	82,16 Nilai	75 Nilai	82,57 Nilai	110,09%	75 Nilai	82,57 Nilai	110,09%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	58 Unit	58 Unit	100%	58 Unit	58 Unit	-
						Jumlah Kendaraan yang dipelihara : Roda 4	-	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	
						Jumlah Kendaraan yang dipelihara : Roda 2	-	66 Unit	-	-	-	-	66 Unit	
						BBM	-	17021 Liter	-	-	-	-	17021 Liter	
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	121 Unit	110 Unit	90,91%	144 Unit	110 Unit	-
						Jumlah jenis Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	-	4 Jenis	-	-	-	-	4 Jenis	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	2 Unit	-	-
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender	100 %	77,78 %	88,24 %	91,18 %	103,33%	97,06 %	91,18 %	91,18%
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang Mendukung Pelaksanaan PPRG	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	40 %
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	-	-	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100 %	12 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)				
		Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota												
		Terselenggaranya Pendampingan Penyusunan PPRG di OPD (pendampingan pihak ketiga)		8 OPD					8 OPD					
		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Balikpapan Tahun 2021-2024		1 Dokumen					1 Dokumen					
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan	-	-	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100 %	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Terlaksananya Sosialisasi PUG termasuk PPRG di Instansi Pemerintah	-	36 OPD	-	-	-	-	36 OPD	
						Penerbitan Modul PPRG	-	0	-	-	-	-	0	
						Pencetakan Leaflet	-	1000 Leaflet	-	-	-	-	1000 Leaflet	
						Pencetakan Banner	-	60 Banner	-	-	-	-	60 Banner	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahan yang Dibina	113 Industri Rumahan	16 Industri Rumahan	20 Industri Rumahan	20 Industri Rumahan	100 %	23 Industri Rumahan	36 Industri Rumahan	31,86%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	-
						Terselenggaranya Pelatihan bagi Pengelola Industri Rumah Tangga (Jumlah orang pelaku industri rumah tangga terbina)	-	60 Orang	-	-	-	-	60 Orang	
						Jumlah Organisasi Perempuan Terbina	-	20 Organisasi	-	-	-	-	20 Organisasi	
						Jumlah Profil Industri Rumah Tangga yang disusun	-	0	-	-	-	-	0	
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan	-	-	2 Organisasi	2 Organisasi	100 %	3 Organisasi	2 Organisasi	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan	8,01 per 100.000 penduduk perempuan	21,06 per 100.000 penduduk perempuan	8,5 per 100.000 penduduk perempuan	31,85 per 100.000 penduduk perempuan	-174,70%	8.36 per 100.000 Penduduk Perempuan	31,85 per 100.000 Penduduk Perempuan	-197,53%
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT Terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	62,24 %	9,08 %	13,33 %	12,33 %	92,50%	16.00 %	21,41 %	34,40%
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah Rapat Koordinasi	-	12 Kali	-	-	-	-	12 Kali	
						Jumlah Seksi PPA tingkat RT terlatih	-	100 Orang	-	-	-	-	100 Orang	
						Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Regulasi Perlindungan Perempuan termasuk PKDRT	-	150 Orang	-	-	-	-	150 Orang	
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapatkan layanan komperhensif	-	100,00	84,1 %	98,26 %	116,84%	-	98,26 %	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	-	38 Orang	115 Orang	302,63%	-	115 Orang	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK yang mendapatkan Layanan Pendampingan Tenaga Ahli	-	82 Orang	-	-	-	-	82 Orang	
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK yang mendapatkan Pelayanan Medikolegal	-	3 Orang	-	-	-	-	3 Orang	
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK yang mendapatkan Layanan Penjangkauan dan Pendampingan	-	82 Orang	-	-	-	-	82 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Rapat Gelar Kasus Kekerasan yang dilaksanakan	-	12 Kali	-	-	-	-	12 Kali	
						Tersedianya Rumah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan AMPK	-	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	24 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100 %	5 Lembaga	9 Lembaga	37,50%
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	-	40 Orang	40 Orang	100 %	45 Orang	40 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah Kemitraan UPTD PPA dengan Pihak lainnya	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	100 %	83,33	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA	1,35 %	3,14	3 %	3,69 %	123 %	1.25 %	3,69 %	273,33%
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	1 Dokumen	6 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
		Terselenggaranya Koordinasi Lintas Sektor dalam Pendampingan Pengasuhan Anak dan Remaja	-	2 Kali	-	-	-	-	2 Kali	
		Jumlah Klien yang mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA	-	9827 orang	-	-	-	-	9827 orang	
		Jumlah Calon Pengantin usia anak yang Mendapat Layanan Penguatan Pranikah	-	54 Pasangan Catin	-	-	-	-	54 Pasangan Catin	
		Jumlah Kemitraan PUSPAGA dengan Pihak Lain	-	6 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	
		Terselenggaranya Psychological First Aid/Trauma Healing dalam situasi bencana/krisis	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Terkait Penyediaan Data Terpilah dan pelatihan pemanfaatan aplikasi SIGA	-	10 OPD	-	-	-	-	10 OPD	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	50 %	67,10 %	32 %	70,05 %	218,91%	80 %	70,05 %	140,10%
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai Tindak Lanjut dari Hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	40 %
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	-	-	25 Organisasi	30 Organisasi	120 %	25 Organisasi	30 Organisasi	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Kewenangan Kabupaten/Kota	pada Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha								
						Jumlah Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA	-	2 Kali	-	-	-	-	2 Kali	
						Terselenggaranya proses evaluasi KLA (Rekomendasi Gugus Tugas KLA)	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	
						Tersusunnya RAD Balikpapan menuju KLA Tahun 2021-2024	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dibina	120 Lembaga	15 Lembaga	21 Lembaga	21 Lembaga	100 %	25 Lembaga	36 Lembaga	30 %
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi. Informasi dan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
		Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Terselenggaranya Pembinaan di lapangan terkait kebijakan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	-	12 Puskesmas	-	-	-	-	12 Puskesmas	-
		Terselenggaranya Pembinaan Forum Anak di Kota Balikpapan	-	1 Forum Anak	-	-	-	-	1 Forum Anak	-
		Terselenggaranya pembinaan ke sekolah terkait kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) & Pelaksanaan Outdoor Classroom Days (OCD)	-	10 SRA/OCD	-	-	-	-	10 SRA/OCD	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	71,50 %	66,37	67 %	98,08%	146,38%	68 %	98,08%	137,17 %
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	21,33 %	1,47 %	13,34 %	13,9 %	104,20%	2,67 %	15,37 %	72,06%
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	15 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	73,33%	-	11 Perangkat Daerah	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terselenggaranya KIE yang terkait dengan AMPK (Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus) di Wilayah RT (Lautan RT)	-	26 RT	-	-	-	-	26 RT	
						Terselenggaranya penguatan peran dan fungsi PPATBM ditingkat Kelurahan	-	34 Kelompok PPATBM	-	-	-	-	34 Kelompok PPATBM	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	-	-	-	-	114 Orang	-	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0,009 %	0,03 %	0,012 %	0,058 %	-283,33%	0,011 %	0,058 %	-444,44%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Daerah Kabupaten/Kota									
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	81 Orang	138 Orang	170,37%		138 Orang	
						Terlaksananya Fungsi Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-	30 Orang	-	-	-	-	30 Orang	
						Tersedianya Rumah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
						Terselenggaranya Fungsi Mediasi dalam	-	4 Orang	-	-	-	-	4 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Penanganan Klien UPTD PPA								
						Terselenggaranya Penanganan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-	82 Orang	-	-	-	-	82 Orang	
						Terselenggaranya Pengelolaan Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-	82 Orang	-	-	-	-	82 Orang	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	-	-	-	-	-	82 Orang	-	-
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi	25 Lembaga	4 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100 %	15 Lembaga	14 Lembaga	56 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina								
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-	1 Dokumen	-
						Jumlah peserta Pelatihan SIMFONI PPA	-	25 Orang	-	-	-	-	25 Orang	
						Jumlah peserta Sosialisasi regulasi perlindungan khusus anak bagi penyedia layanan anak yang	-	30 Orang	-	-	-	-	30 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						memerlukan perlindungan khusus								
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	-	-
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	58,82 %	5,88	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	170 %
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Sesuai Dengan Regulasi	20 Kelurahan	2 Kelurahan	34 Kelurahan	34 Kelurahan	100,00%	10 Jumlah Kelurahan	34 Kelurahan	170 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		1 Dokumen	
						Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	-	0	-	-	-	-	0	
						Terselenggaranya Pendampingan Penginputan Data di Aplikasi Profil Kelurahan oleh Kelurahan Piloting	-	4 Jml Kelurahan	-	-	-	-	4 Jml Kelurahan	
						Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penginputan Data Profil Kelurahan	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)				
		serta Lomba Desa dan Kelurahan												
		Terselenggaranya Lomba Kelurahan Berprestasi	-	0	-	-	-	-	0					
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pendampingan Persiapan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi/Tkt Nasional	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan					
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	Rp. 420.600.000.00	85.176.853.583 Rupiah	83.950.000.00 0 Rupiah	85.377.255.459 Rupiah	101,70%	86.000.000.000 Rp	170.554.109.042 Rupiah	40,55%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	70,51 %	76 %	64,7 %	64,69 %	99,98%	66.64 %	64,69 %	91,75%
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang	-	-	35 Dokumen	33 Dokumen	94,29%	35 Dokumen	33 Dokumen	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
						Hibah Untuk LPM		22 Ormas				22 Ormas		
						Hibah Untuk Karang Taruna		1 Ormas				1 Ormas		
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	10 Lembaga	10 Lembaga	100 %	5 Lembaga	10 Lembaga	
						Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota dibina (PKK, Pokjanal	-	10 Jumlah Lembaga	-	-	-	-	10 Jumlah Lembaga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
		Posyandu, LPM dan Karang Taruna)								
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi POKJANAL Posyandu Tingkat Kota	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	
		Terselenggaranya Pembinaan kepada POKJANAL Posyandu Tingkat Kecamatan	-	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	
		Terselenggaranya Lomba Posyandu Tingkat Kota dan Pendampingan persiapan lomba Posyandu di Tingkat Provinsi/Tingkat Nasional	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	
		Terfasilitasinya Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Rakorda Pemberdayaan Masyarakat		1 Kegiatan					1 Kegiatan	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	3 Laporan	3 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	
						Terselenggaranya Pembinaan kepada POSYANTEK (Pos Pelayanan Teknologi) Tingkat Kecamatan	-	0	-	-	-	-	0	
						Terselenggaranya Lomba POSYANTEK	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	
						Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota dan Keikutsertaan/Tuan Rumah di Tingkat Provinsi	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100 %	1 Laporan	4 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
		Gotong Royong Masyarakat								
		Terselenggaranya Pelaksanaan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota (Pencanangan dan Penutupan)	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	
		Terselenggaranya Fasilitasi Rakor LPM Tingkat Kota	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	
		Terselenggaranya Fasilitasi Rakor Karang Taruna Tingkat Kota	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	
		Terselenggaranya Lomba BBGRM Tingkat Kota dan Pendampingan keikutsertaan /Tuan Rumah dalam di Tingkat Propinsi/Nasional	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	
						Terfasilitasinya Pelaksanaan 10 kegiatan Pokok PKK : a. Sekretariat, b. Pokja I,c. Pokja II, d. Pokja III,e. Pokja IV	-	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	
						Terselenggaranya Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi/Nasional	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk	70 %	64 %	64 %	68 %	106,25%	66 %	132 %	188,57%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan Jalur Formal Terbentuk dijenjang SD/MI	31,25 %	0,00 %	15,63 %	15,46 %	98,91%	20,83 %	15,46 %	49,47%
						Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan Jalur Formal Terbentuk dijenjang SLTP/MTS	48,19%	-	12,05 %	13,16 %	109,21%	24,10 %"	27,31%	27,31%
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang		9 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	200,00%	60 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Nonformal dan Informal	SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Non Formal dan Informal								
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	14	2	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %	-	12 Laporan	
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	14 Dokumen	12 Dokumen	
						Tersedianya Data Lapangan (Dallap) dan Telahaan pemanfaatan data lapangan	-	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)				
		Penyusunan Kajian Grand Desain Pengendalian Penduduk Tahun 2022 - 2027	-	0	-	-	-	-	0					
		Seminar Pemanfaatan Hasil Kajian Grand Desain Pengendalian Penduduk		0	-	-	-	-	0					
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Faskes yang Teregistrasi dalam Pelayanan KB	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %	-	12 Laporan	-
						Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100 %	-	2 Laporan	-
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Program Bangga Kencana		12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN	Prosentase PUS yang ingin ber-KB tidak	11,2 %	30,57	13,4 %	17,59%	68,73%	13.10 %	17,59%	42,95%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					KELUARGA BERENCANA (KB)	terpenuhi (Unmet Need)								
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77400 PUS	52731,00	77100 PUS	65019 PUS	84,33%	77.200 PUS	65019 PUS	84,00%
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	5 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	100 %	-	11 Organisasi	
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK	Jumlah Sarana Promosi KB Momentum Strategis	-	295 Buah	-	-	-	-	295 Buah	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					sesuai kearifan budaya lokal									
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	-	3 Dokumen	
						Pengadaan sarana Promosi dan KIE Program BANGGA KENCANA melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	3 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	-	-	-	-	-	3 Dokumen	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					dan Elektronik serta Media Luar Ruang	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minlok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok)	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	-	2 Laporan	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	-	10 Laporan	10 Laporan	100,00%	-	10 Laporan	
						Jumlah Kader yang terpapar program Bangsa Kencana	-	61 Orang	-	-	-	-	61 Orang	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		-	1 Laporan	1 Laporan	100 %	9 Laporan	1 Laporan	
						Terselenggaranya rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	10 Dokumen Laporan	-	-	-	-	10 Dokumen Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	100 %	34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	100%
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	34 Organisasi	34 Organisasi	100 %	-	34 Organisasi	-
						Terselenggaranya pembinaan oleh PKB pada IMP terkait 6 peran IMP dengan klasifikasi IMP :	-	34 Organisasi	-	-	-	-	34 Organisas	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						c. IMP tingkat Mandiri								
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	-	-	-	34 Organisasi		
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan. penggerakan. pelayanan dan pengembangan program bangga		-	34 Laporan	34 Laporan	100 %		34 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	kencana (pembangunan keluarga. kependudukan. dan keluarga berencana) untuk petugas keluarga berencana/ penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)								
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan promosi dan KIE kegiatan BANGGA KENCANA oleh PKB		3.830 Orang						
						Pengadaan sarana promosi dan KIE kegiatan BANGGA KENCANA untuk PKB		34 Paket	-	-	-	-	34 Paket	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP)	-	-	1700 Orang	1700 Orang	100 %	-	1700 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)				
		Jumlah Pelaksanaan KIE Oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD	-	408 Kali	-	-	-	-	408 Kali					
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	-	-	34 Laporan	-	-		
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Persentase Kepesertaan KB MKJP	28,75 %	31,41 %	26,75 %	30,01 %	112,19%	27,50 %	30,01 %	104,38%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring	Jumlah Faskes terbina regulasi tentang standar layanan KB	-	66 Faskes	-	-	-	-	66 Faskes	
						Jumlah Pasangan Usia Subur Dalam Status Kawin yang dilayani dalam pelayanan KB momentum	-	779 Orang	-	-	-	-	779 Orang	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	2321 Orang	1427 Orang	61,48%	-		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)	
						Jumlah Faskes terbina regulasi tentang standar layanan KB	-	66 Faskes	-	-	-	-			
						Jumlah Pasangan Usia Subur Dalam Status Kawin yang dilayani dalam pelayanan KB momentum	-	779 Orang	-	-	-	-			
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	-	12 Unit	12 Unit	100 %				
						Jumlah tenaga kesehatan pemberi layanan KB yang terlatih	-	30 Orang	-	-	-	-	-	30 Orang	
						Indeks Kepuasan Faskes terhadap layanan Distribusi Alat & Obat Kontrasepsi KB	-	86,27 Nilai	-	-	-	-	-	86,27 Nilai	
						Jumlah Faskes terbina regulasi tentang Standar Layanan KB	-	66 Faskes	-	-	-	-	-	66 Faskes	
						Jumlah Pasangan Usia Subur dalam status	-	779 Orang	-	-	-	-	-	779 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)					
		kawin yang dilayani dalam pelayanan KB Momentum													
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan			
						Jumlah tenaga kesehatan pemberi layanan KB yang terlatih							30 Orang		
						Indeks Kepuasan Faskes terhadap layanan Distribusi Alat & Obat Kontrasepsi KB							86,27 Nilai		
						Jumlah Faskes terbina regulasi tentang Standar Layanan KB							66 Faskes		
						Jumlah Pasangan Usia Subur dalam status	-	779 Orang	-	-	-	-	-	779 Orang	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						kawin yang dilayani dalam pelayanan KB Momentum								
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	34 Jumlah Intervensi	34 intervensi	34 intervensi	34 intervensi	100 %	34 Jumlah Intervensi	34 intervensi	100 %
2	14	3	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	-	-	34 Kampung	34 Kampung	100 %	-	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam peningkatan Ketahanan Keluarga	-	340 Kegiatan	-	-	-	-	340 Kegiatan	
						Jumlah Rencana Kerja Masyarakat yang dihasilkan pada pertemuan di Kampung KB	-	34 Rencana Kerja	-	-	-	-	34 Rencana Kerja	
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	-	-	34 Laporan	34 Laporan	100,00%	34 Laporan	34 Laporan	
						Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	-	34 Rumah Data KB	-	-	-	-	34 Rumah Data KB	
						Jumlah Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) yang terbina	-	34 Kampung KB	-	-	-	-	34 Kampung KB	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Persentase keluarga yang menjadi anggota	20,35 %	8,25	12,75 %	8,4 %	65,88%	15,8 %	8,4 %	41,28%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					KELUARGA SEJAHTERA (KS)	kelompok kegiatan/ poktan								
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok BKB Terbentuk	10,28 %	8,60 %	9,69 %	9,67 %	99,79%	9,76 %	9,67 %	94,07%
						Persentase kelompok BKR terbentuk	5,31 %	0,07 %	2,28%	1,33%	58,33%	3,07 %	1,33%	25,05%
						Persentase kelompok BKL terbentuk	7,19 %	0,026 %	7,00%	4,85%	69,29%	7 %	4,85%	67,45%
						Persentase kelompok UPPKA terbentuk	2,44 %	0,05 %	2,37%	2,97 %	125,32%	2,37 %	2,97 %	121,72%
						Persentase kelompok PIK-R terbentuk	26,9 %	33,7 %	24,7%	28,41 %	115,02%	25,1 %	28,41 %	105,61%
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB). Bina Keluarga Remaja (BKR). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL). Unit Peningkatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB). Bina Keluarga Remaja (BKR). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL). Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga		-	17 Kelompok	16 Kelompok	94,12%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)				
		Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk											
			Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : 1. Bina Keluarga Balita	0	-	-	-	-	0					
			Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : 2. Bina Keluarga Remaja	0	-	-	-	-	0					
			Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : 3. Bina Keluarga Lansia	0	-	-	-	-	0					
			Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : 4. UPPKA	0	-	-	-	-	0					
			Terbentuknya Kelompok Kegiatan Baru : 5. PIK-Remaja	0	-	-	-	-	0					
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan			20 Unit	20 Unit	100 %		20 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
		Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk								
		Tersedianya sarana prasarana bagi kelompok kegiatan : 1 Bina Keluarga Balita		9 Kelompok	-	-	-			
		Tersedianya sarana prasarana bagi kelompok kegiatan : 2. Bina Keluarga Lansia		0	-	-	-			
		Tersedianya sarana prasarana bagi		0	-	-	-			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						kelompok kegiatan : 3. Bina Keluarga Remaja								
						Tersedianya sarana prasarana bagi kelompok kegiatan : 4 UPPKA		0	-	-	-			
						Tersedianya sarana prasarana bagi kelompok kegiatan : 5. PIK-Remaja		9 Kelompok	-	-	-			
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		-	5 Laporan	5 Laporan	100 %	-	5 Laporan	
						Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis		34 Kelompok	-	-	-	-	34 Kelompok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
		Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 1. Bina Keluarga Balita								
		Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 2. Bina Keluarga Remaja		34 Kelompok	-	-	-	-	34 Kelompok	
		Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 3. Bina Keluarga Lansia		34 Kelompok	-	-	-	-	34 Kelompok	
		Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan		2 Kelompok	-	-	-	-	2 Kelompok	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						dan Kesejahteraan Keluarga : 4. UPPKA								
						Jumlah kelompok yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 5. PIK-Remaja		34 Kelompok	-	-	-	-	34 Kelompok	
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana /Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)			372 Orang	371 Orang	99,73%	-	371 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
		Terlaksananya Orientasi/ Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 1. Kader UPPKA		30 Kelompok	-	-	-	-	30 Kelompok	
		Terlaksananya Orientasi/ Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 2. Guru BK		40 Kelompok	-	-	-	-	40 Kelompok	
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 3. PS/KS		49 Kelompok	-	-	-	-	49 Kelompok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
		Terlaksananya Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan (Jumlah Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 4. Bina Keluarga Balita		68 Kelompok	-	-	-	-	68 Kelompok	
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 5. Bina Keluarga Remaja		55 Kelompok	-	-	-	-	55 Kelompok	
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan		68 Kelompok	-	-	-	-	68 Kelompok	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Kesejahteraan Keluarga : 6. Bina Keluarga Lansia								
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPK S,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		606 Orang	606 Orang	606 Orang	100 %	-	606 Orang	
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		-	1 Laporan	1 Laporan	100 %	-		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
						Terselenggaranya rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional.		1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	
						Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk lomba- lomba (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA		7 Kegiatan	-	-	-	-	7 Kegiatan	
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta		-	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2 Laporan		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pengelolaan Keuangan Keluarga)								
						Terselenggaranya pembinaan kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).		4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	-	-	6 Laporan		
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	-	-	-	-	-	14 Unit		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia								
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	-	-	-	481 Orang		
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan	-	-	-	-	-	5 Laporan		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = (10/4)
					Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)								
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	-	-	-	-	-	19 Kelompok		

Realisasi target Program/Kegiatan Tahun 2023 secara keseluruhan tercapai, walaupun ada beberapa program/ kegiatan yang belum dapat mencapai target. Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangka tidak terlepas dari faktor pendorong antara lain :

1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah berupa Kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota No.27 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, dan Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor : 910/1230/BPKD Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Tahun Anggaran 2023 dimana pada saat pelaksanaan Asistensi RKA, SKPD menyertakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan berbasis Gender, Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Kegiatan, Pelatihan Penyusunan PPRG bagi OPD secara berkelanjutan, Pendampingan dalam penyusunan ARG bagi OPD, Review Inspektorat terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG serta Peran Serta Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan yang responsif gender.
 2. Banyaknya mitra kerja DP3AKB (LPM,PKK,Karang Taruna,PPATBM,Forum Puspa, APSAI; Pemerhati Anak;Forum Anak,Kader) sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berbasis masyarakat
 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan konseling dengan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
 4. kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan antar unit kerja di DP3AKB Kota Balikpapan
- Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

1. Belum optimalnya pendataan tentang kepesertaan KB Non MKJP di seluruh faskes dan jejaringnya
2. Masih rendahnya respon masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan (Poktan) karena kesibukan kegiatan sehari-hari dan pekerjaan dari keluarga.
3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meskipun ada kemungkinan bahwa meningkatnya jumlah data korban karena semakin banyak korban yang berani melapor yang merupakan efek dilaksanakannya Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak secara massif.

Hal - hal yang perlu dilakukan oleh DP3AKB dalam meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut

1. Melakukan pengawalan dan evaluasi terhadap target-target yang belum tercapai sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat ditingkatkan.

2. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai DP3AKB untuk meningkatkan kinerja masing-masing dan mempelajari /memahami serta meimplemetasikan regulasi teknis terkait tupoksi masing-masing , sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD dapat dilakukan secara efektif dan efisien ;
3. Penyusunan perencanaan dengan baik yang mengacu pada SMART Goals.
4. peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 DP3AKB diamanahkan untuk melaksanakan 1 urusan Pemerintahan lagi yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa sehingga Tahun 2023 DP3AKB mengemban 3 Urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa. Adapun pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DP3AKB				Realisasi capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Prosentase RKA Responsif Gender			4 %	8 %	10%	15 %	8,64 %	12,41 %	-		
2	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)			70,61 %	70,63 %	70,65 %	70,65 %	52.81 %	61,02 %	-		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DP3AKB				Realisasi capaian				Catatan Analisis
				Tahun n 2022	Tahun n 2023	Tahun n 2024	Tahun n 2025	Tahun n 2022	Tahun n 2023	Tahun n 2024	Tahun n 2025	
3	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang			5,88%	11,7 6%	29,41 %	44,12 %	38.24 %	100 %	-		
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB			27 Nilai	27,3 0 Nilai	27,75 Nilai	28 Nilai	32.99 Nilai	N/A	-		Sudah tidak dilakuk an perhitu ngan kembali

Tahun 2023 adalah tahun kedua realisasi kinerja pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026. Berdasarkan data tabel 2.3 dapat diketahui bahwa capaian kinerja DP3AKB Kota Balikpapan secara keseluruhan tercapai, kecuali untuk Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR). Dan untuk Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB sudah tidak dilakukan perhitungan Kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-202. Tingkat capaian Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) adalah sebesar 86,39% dari target yang ditetapkan. Hal ini menjadi tantangan untuk ditingkatkan tahun berikutnya. Hal yang perlu dilakukan DP3AKB adalah Meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi modern; Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) alat kontrasepsi modern; Meningkatkan akses terhadap layanan dan alat kontrasepsi moderen yang berkualitas dan terjangkau; Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang melayani kebutuhan alat kontrasepsi modern serta Meningkatkan layanan paska pemakaian alat kontrasepsi moderen khususnya yang menangani masalah kesehatan atau efek samping.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DP3AKB Kota Balikpapan melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Masih tingginya angka Unmet Need di Kota Balikpapan;
 - Masih rendahnya angka kesertaan PUS ber-KB
 - Pemahaman PUS tentang kesertaan ber-KB dan pilihan alat kontrasepsi KB MKJP masih rendah
 - Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dimana dominan disebabkan faktor migrasi
 - Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan stakeholder/mitra kerja terkait permasalahan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
 - Masih tingginya angka Stunting di Kota Balikpapan
 - Belum optimalnya cakupan keluarga yang menjadi anggota BKB,BKR dan BKL
 - Belum optimalnya cakupan remaja yang menjadi anggot PIK-R
 - Belum optimalnya cakupan PUS Peserta KB yang menjadi anggota UPPKA
 - Belum optimalnya cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan tentang 8 fungsi keluarga
 - Belum optimalnya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di setiap Kecamatan
 - Belum semua Kecamatan memiliki Balai Penyuluhan yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan dan program Bangga Kencana
 - Masih banyaknya remaja yang belum memahami tentang Kesehatan reproduksi
 - Kurangnya pemodalan untuk pengembangan Kelompok UPPKA
 - Masih tingginya angka Median Usia Kawin Pertama (MuKP) di Kota Balikpapan yaitu sebesar 22,7 pada tahun 2023
 - Jumlah Penyuluh KB yang setiap tahun berkurang tanpa adanya pengganti
 - Kurangnya partisipasi dari Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Masyarakat (TOMA) untuk menyukseskan Program Bangga Kencana
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Belum ada nya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Kota Layak Anak;
 - Belum adanya Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak;
 - Belum maksimalnya Perempuan Wirausaha;

- Masih adanya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - Masih rendahnya keterwakilan Perempuan yang duduk di Parlemen;
 - Kurangnya sarana prasarana yang ramah anak;
 - Belum tersedianya layanan dan fasilitas bagi anak terlantar maupun anak yang berkebutuhan khusus hingga anak yang berhadapan dengan hukum;
 - Masih terdapat anak yang putus sekolah yang belum terfasilitasi dengan baik;
 - Diperlukannya dukungan kurikulum sekolah dengan muatan lokal untuk Perlindungan Anak;
 - Kurangnya Psikolog dalam pembinaan psikologis anak dilingkungan sekolah maupun yang berbasis Masyarakat;
 - Diperlukan peran aktif Masyarakat dalam rangka turut mengawasi tumbuh kembang anak dilingkungannya;
 - Belum adanya sanksi terhadap orang tua atas pembiaran terhadap anaknya
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Belum maksimalnya peran pokjandal posyandu di Kota Balikpapan;
 - Pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) masih rendah;
 - Belum optimalnya Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Kesekretariatan
- Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah;
 - Belum optimalnya PPID;
 - Jumlah SDM belum mencukupi sesuai perhitungan Anjab ABK

Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh DP3AKB mencakup lingkup yang luas. DP3AKB mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa, kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal Renja dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian

target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka pagu indikatif rancangan akhir renja mengalami penyesuaian. Pagu Indikatif yang diusulkan pada rancangan awal renja sebesar Rp. 31.692.651.538,- mengalami penyesuaian pada pagu indikatif rancangan akhir renja menjadi Rp. 27.500.000.000,- terjadi pengurangan sebesar Rp. 4.192.651.538. Rancangan akhir Renja tahun 2025 dibuat berdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD, sedangkan program/kegiatan/sub kegiatan pada hasil analisa kebutuhan adalah program – program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi DP3AKB dan isu –isu strategis dengan menyesuaikan pagu indikatif yang diberikan.

Secara keseluruhan hasil telaah terhadap rancangan awal renja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
I.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Balikpapan	Prosentase Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender	100 %	986.174.000	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Balikpapan	Prosentase Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender	100 %	930.000.000	
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	1 Dokumen	575.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	1 Dokumen	405.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Rankir Renja 2025
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Balikpapan	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	34 Orang	300.000.000	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota</i>	Balikpapan	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	34 Orang	275.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Balikpapan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	275.000.000	<i>Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota</i>	Balikpapan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	130.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Balikpapan	Jumlah Industri Rumahan yang dibina	25 Industri Rumahan	411.174.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan	Balikpapan	Jumlah Industri Rumahan yang di bina	25 Industri Rumahan	525.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota					Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota					
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	410.174.000)	<i>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Renja 2025
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partispasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Balikpapan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	1.000.000	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partispasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	Balikpapan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	125.000.000	Penambahan Anggaran untuk Hibah kepada Organisasi Wanita
II.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Balikpapan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	8,19 per 100.000 penduduk	639.836.074	PROGRAM PERLINDUNG	Balikpapan	Rasio Kekerasan Terhadap	8.19 per 100.000 Pendudu	420.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	perempuan		AN PEREMPUAN		Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	Perempuan		
3	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	18,67 %	499.197.765	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	18.67 %	300.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	1 Dokumen	499.197.765	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	1 Dokumen	300.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	5 lembaga	140.638.309	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	5 Lembaga	120.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota</i>		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120 Orang	140.638.309	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	120.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
III.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Balikpapan	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran	100 %	953.960.811	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Balikpapan	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran	100 %	775.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Keluarga (PUSPAGA)					Keluarga (PUSPAGA)			
5	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	4 %	953.960.811	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	4 %	775.000.000	
	<i>Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi</i>	Balikpapan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan	6 Dokumen	953.960.811	<i>Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan</i>	Balikpapan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG)	6 Dokumen	775.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			<i>Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Balikpapan	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah	38,89 %	348.676.354	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Balikpapan	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	38,89 %	225.000.000	
6	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Balikpapan	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	14 OPD	348.676.354	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Balikpapan	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	14 OPD	225.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	348.676.354	<i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	225.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Renja 2025
V.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Balikpapan	Persentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	70%	2.688.233.108	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Balikpapan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	70 %	1.631.430.812	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
7	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	1	530.652.108	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	1 Dokumen	530.652.108	
	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>	Balikpapan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada	30 Organisasi	530.652.108	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan</i>	Balikpapan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan	30 Organisasi	530.652.108	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			<i>Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	30 Lembaga Penyedia Layanan	2.157.581.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak dibina	30 Lembaga Penyedia Layanan	1.100.778.704	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.157.581.000	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.100.778.704	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
VI.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Balikpapan	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	90 %	2.048.739.188	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Balikpapan	Persentase Penyelesaian Penanganan	90 %	1.998.739.188	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Klien pada UPTD PPA			
9	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	10 %	841.110.188	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	10 %	841.110.188	Kegiatan Sosialisasi AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) (Lautan RT), serta Belanja Publikasi

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Perlindungan Anak
	<i>Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>	Balikpapan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	250 Orang	841.110.188	<i>Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>	Balikpapan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	250 Orang	841.110.188	Kegiatan Sosialisasi AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) (Lautan RT), Kegiatan Worksh

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											op/Sosialisasi Bagi Pemerhati Anak/Komunitas Anak, Rapat Monitoring dan Evaluasi PPATB M serta Belanja Publikasi Perlind

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											ungan Anak
10	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (0,010 %	870.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0.010 %	820.000.000	
	<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan</i>	Balikpapan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan	110 Orang	870.000.000	<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang</i>	Balikpapan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan	110 Orang	820.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			<i>Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	20 Jumlah Lembaga	337.629.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Balikpapan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	20 Jumlah Lembaga	337.629.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Kabupaten/Kota					
	<i>Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota</i>	Balikpapan	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	337.629.000	<i>Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota</i>	Balikpapan	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	337.629.000	
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Balikpapan	Prosentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait	68 %	1.044.863.462	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Balikpapan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait	68 %	1.021.183.462	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Pengendalian Penduduk					Pengendalian Penduduk			
12	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Balikpapan	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS		394.863.462	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Balikpapan	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS		371.183.462	
			1.SD/MI (%) 2.SLTP/MTS (%)	26,04 % 36,14 %				1.SD/MI (%) 2.SLTP/MTS (%)	26,04 % 36,14 %		
	<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi</i>	Balikpapan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan	80 Satuan Pendidikan	394.863.462	<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi</i>	Balikpapan	Jumlah Satuan Pendidikan yang	80 Satuan	371.183.462	Penyesuaian pagu

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			<i>Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>		Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Pendidikan		indikator Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
13	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Balikpapan	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	650.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan	Balikpapan	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait	1 Dokumen	650.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota					Daerah Kabupaten/ Kota		Pengendalian Penduduk			
	<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	650.000.000	<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	650.000.000	
VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Balikpapan	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	11,25 %	1.127.689.410	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Balikpapan	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	11.25 %	1.037.466.538	
14	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Balikpapan	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77.300 PUS	150.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Balikpapan	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77.300 PUS	145.934.176	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	<i>Pengendalian Program KKBPK</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	50.000.000	<i>Pengendalian Program KKBPK</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	50.000.000	
	<i>Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	Balikpapan	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	100.000.000	<i>Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	Balikpapan	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	95.934.176	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Rankir Renja 2025
15	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Balikpapan	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP	477.689.410	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Balikpapan	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP	417.495.037	
	<i>Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	Balikpapan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	12 Organisasi	177.689.410	<i>Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	Balikpapan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	12 Organisasi	170.210.992	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			Rankir Renja 2025
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan	34 Laporan	300.000.000	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas	34 Laporan	247.284.045	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
16	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Kepesertaan KB MKJP	27,75 %	350.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase Kepesertaan KB MKJP	27.75 %	332.000.000	
	<i>Pembinaan Pelayanan</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	1 Laporan	350.000.000	<i>Pembinaan Pelayanan</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil	1 Laporan	332.000.000	Penyesuaian

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>		Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			<i>Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
17	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam	Balikpapan	Jumlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	34 Intervensi	150.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Balikpapan	Jumlah intervensi pada Kampung KB	34 Jumlah Intervensi	142.037.325	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
	<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	34 Laporan	150.000.000	<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	34 Laporan	142.037.325	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Renja 2025
IX.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Balikpapan	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	20,35 %	2.004.861.734	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Balikpapan	Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	20,35 %	1.904.618.647	
18	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	1. Persentase kelompok BKB terbentuk	9,91 %	2.004.861.734	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	1. Persentase kelompok BKB terbentuk	9,91 %	1.904.618.647	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif
			2. Persentase kelompok BKR terbentuk	4,15 %				2. Persentase kelompok BKR terbentuk	4,15 %		

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			3. Persentase kelompok BKL terbentuk	7,00 %				3. Persentase kelompok BKL terbentuk	7 %		f Rankir Renja 2025
			4. Persentase kelompok UPPKA terbentuk	2 %				4. Persentase kelompok UPPKA terbentuk	2 %		
			5. Persentase kelompok PIK-R terbentuk	25,60 %				5. Persentase kelompok PIK-R terbentuk	25.60 %		
	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	1 Laporan	200.000.000	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,	1 Laporan	200.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>		Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			<i>Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>		Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	1 Laporan	500.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1 Laporan	500.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>		Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	<i>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	33 Unit	300.000.000	<i>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga</i>	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	33 Unit	300.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						<i>Akseptor (UPPKA)</i>					
	<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	Balikpapan	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	456 Orang	479.570.000	<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	Balikpapan	<i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan</i>	456 Orang	379.326.913	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								<i>Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>			
	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Laporan	225.000.000	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Laporan	225.000.000	0

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
	<i>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan</i>	Balikpapan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	20 Kelompok	300.291.734	<i>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor</i>	Balikpapan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	20 Kelompok	300.291.734	4	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Ekonomi Keluarga)</i>					<i>(UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</i>		Ekonomi Keluarga) yang dibentuk			
X.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Balikpapan	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	100 %	1.050.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Balikpapan	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	100 %	800.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
19	Pembinaan dan Pengawasan	Balikpapan	Jumlah kelurahan yang melakukan	34 Kelurahan	1.050.000.000	Pembinaan dan	Balikpapan	Jumlah kelurahan yang	34 Jumlah	800.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi			Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	Kelurahan		
	<i>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	450.000.000	<i>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	325.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	600.000.000	<i>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	475.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Balikpapan	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	Rp. 85.550.000.000	6.873.450.273	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA	Balikpapan	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Rp 85.550.000.000	5.677.561.353	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	MASYARAKAT HUKUM ADAT					ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
20	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Balikpapan	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	68,57 %	6.873.450.273	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan	Balikpapan	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	68.57 %	5.677.561.353	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota					Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	<i>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	35 Dokumen	950.000.000	<i>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraha	35 Dokumen	610.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikati

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>dan Karang Taruna), lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>		dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			<i>RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>		n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			f Rankir Renja 2025
	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga</i>	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	10 Lembaga	2.327.393.979	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang</i>	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	10 Lembaga	2.372.561.353	Mengakomodir Kegiatan Lomba RT Tingkat Kota Balikpapan

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>		Ditingkatkan Kapasitasnya			<i>Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	<i>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	635.256.294	<i>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	795.000.000	Penambahan cabang Lomba TTG menjadi 5 Kategori (Inovasi, Unggulan, Posyantik,

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Stand booth dan Produk Olahan tradisional daerah
	<i>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	350.000.000	<i>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	300.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Renja 2025
	<i>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	2.610.800.000	<i>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.600.000.000	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
XII.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Balikpapan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	84 Nilai	11.926.167.124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	84 Nilai	11.079.000.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA					AN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perangkat Daerah			
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	84,45	10.189.640	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.189.640	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	84 Nilai	8.157.725.989	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84 Nilai	7.711.446.905	Penyesuaian pagu indikatif

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	8.157.725.989	<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang/bulan	7.711.446.905	Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82 Nilai	1.592.011.135	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82 Nilai	1.425.278.755	
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	842.000.000	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	532.499.512	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	335.000.000	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	430.561.395	Mengakomodir belanja bahan kebersihan kantor dari sub kegiatan <i>Penyedi</i>

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											<i>aan Bahan Logistik Kantor</i>
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	90.000.000	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	89.999.540	
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	-	-	-	-	-	Belanja di alihkan ke sub kegiatan penyediaan Bahan Logistik Kantor

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.011.135	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	372.218.308	Penambahan Anggaran untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83 Nilai	838.357.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	83 Nilai	757.872.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Pemerintah Daerah			
	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	838.357.000	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	757.872.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84 Nilai	438.430.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84 Nilai	351.931.200	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	97.000.000	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi,</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	74.311.200	Sesuai dengan kebutuhan

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			dan Listrik yang Disediakan			<i>Sumber Daya Air dan Listrik</i>		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	341.430.000	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	277.620.000	Sesuai dengan kebutuhan. Adanya Pegawai Non PNS yang menjadi PPPK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	83 Nilai	899.643.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	83 Nilai	822.281.500	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah			
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	58 Unit	575.000.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	58 Unit	497.638.500	Penyesuaian pagu indikatif Ranwal Renja 2025 dengan Pagu Indikatif Rankir Renja 2025
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	124.643.000	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan	160 Unit	124.643.000	

No.	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Mesin Lainnya yang Dipelihara			
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
	TOTAL	31.692.651.538				27.500.000.000					

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya perubahan target maupun pagu indikatif untuk Rumusan rencana program dan kegiatan pada Rancangan akhir Renja Tahun 2025 dengan rancangan awal Renja antara lain :

1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.

- a) Pagu Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan berkurang dari rancangan awal renja. Pada Rancangan Awal Renja sebesar Rp. 986.174.000 menjadi Rp. 930.000.000 pada Rancangan Akhir Renja dikarenakan Adanya penyesuaian pagu indikatif Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 berupa pengurangan pagu indikatif, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami pengurangan pagu sebesar Rp, 170.000.000,- semula Rp. 575.000.000 menjadi Rp. 405.000.000
- b) Pagu kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota menjadi bertambah dari Ranwal Renja dimana semula Rp. 411.174.000 menjadi Rp. 525.000.000. penambahan pagu pada kegiatan ini akan dialokasikan untuk mengakomodir pemberian hibah bagi organisasi Wanita
- c) Penyesuaian target indikator Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang semula 3 organisasi menjadi 1 organisasi. Penentuan target disesuaikan dengan jumlah organisasi yang telah terverifikasi usulan aspirasi masyarakat pada aplikasi SIPD.

2) Program Perlindungan Perempuan

- a) Pagu Indikatif Program Perlindungan Perempuan berkurang dari Pagu Rancangan Awal Renja 2025. Semula Rp. 639.836.074 menjadi 420.000.000 pada rancangan akhir renja, dikarenakan adanya penyesuaian pagu indikatif Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk kegiatan dan Sub kegiatan :
 - Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terjadi pengurangan pagu pada rankir renja 2025. Semula Rp. 499.197.765 menjadi 300.000.000

- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota terjadi pengurangan pagu indikatif yang semula Rp. 140.638.309,- menjadi 120.000.000
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga :
- a) Pagu Indikatif Program mengalami pengurangan dari rancangan awal Renja
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Rancangan Awal Renja | : Rp. 953.960.811 |
| Rancangan Akhir Renja | : Rp. 775.000.000 |
- dikarenakan adanya pengurangan pagu indikatif untuk *kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* sebesar Rp, 178.960.811, semula Rp. 953.960.811 menjadi Rp. 775.000.000. Pengurangan terjadi karena adanya penyesuaian pagu indikatif sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- a) Pagu Indikatif Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak berkurang dari rancangan awal Renja.
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Rancangan Awal Renja | : Rp. 348.676.354 |
| Rancangan Akhir Renja | : Rp. 225.000.000 |
- dikarenakan adanya penyesuaian pagu indikatif sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sehingga *kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota berkurang* sebesar Rp. 123.676.354 semula Rp. 348.676.354 menjadi Rp. 225.000.000
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak
- a) Pagu Indikatif Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak berkurang sebesar Rp. 1.056.802.296 semula 2.688.233.108 menjadi 1.631.430.812 pada rancangan akhir renja, dikarenakan adanya penyesuaian pagu indikatif sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sehingga *kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*

Kewenangan Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota berkurang sebesar Rp. 1.056.802.296 semula Rp. 2.157.581.000 menjadi Rp. 1.100.778.704

- 6) Program Perlindungan Khusus Anak
 - a) Pagu Indikatif Program Perlindungan Khusus Anak berkurang sebesar Rp. 50.000.000,- dimana semula Rp. 2.048.739.188 menjadi Rp. 1.998.739.188. Hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan pagu pada *kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* dimana semula Rp. 870.000.000 berkurang Rp. 50.000.000,- sehingga pagu indikatif pada rancangan akhir renja 2025 menjadi Rp. 820.000.000. penyesuaian pagu indikatif ini karena menyesuaikan dengan pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2025 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

- 7) Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a) Pagu Indikatif Program Administrasi Pemerintahan Desa dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa berkurang sebesar Rp. 250.000.000,- dimana semula Rp. 1.050.000.000,- menjadi Rp. 800.000.000 pada rancangan akhir renja Tahun 2025. Hal ini karena menyesuaikan dengan pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2025 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sehingga terjadi pengurangan pagu indikatif pada sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

- 8) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - a) Adanya surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 , menyebabkan dilakukan penyesuaian pagu indikatif pada Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2025. Penyesuaian yang dilakukan adalah berupa :

- Pengurangan Pagu Sub Kegiatan : (1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; (2) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ; (3) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- b) Adanya penambahan pagu sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat untuk mengakomdir kegiatan Lomba RT Tingkat Kota Balikpapan
- c) Adanya penambahan pagu sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, untuk mengakomodir penambahan cabang Lomba TTG menjadi 5 Kategori (Inovasi,Unggulan, Posyantek, Stand booth dan Produk Olahan tradisional daerah)
- 9) Program Pengendalian Penduduk
- a) Pengurangan Pagu Indikatif Program Pengendalian Penduduk sebesar Rp.23.680.000,- pada rancangan akhir renja Tahun 2025 menjadi Rp. 1.021.183.462, Perubahan pagu indikatif program pada rankir renja terjadi karena adanya pengurangan pagu pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dimana semula Rp.394.863.462 berkurang sebesar Rp. 23.680.000,- sehingga pagu indikatif pada rancangan akhir renja 2025 menjadi Rp. 371.183.462. Pengurangan pagu indikatif ini karena menyesuaikan dengan pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2025 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
- 10) Program Keluarga Berencana
- a) Pagu Indikatif Program Keluarga Berencana yang semula Rp.1.127.689.410 pada Ranwal Renja berkurang menjadi Rp.1.037.466.538 pada rancangan akhir renja Tahun 2025 berkurang sebesar Rp.90.222.872,-, Perubahan pagu indikatif program pada rankir renja terjadi karena pagu kegiatan berkurang menyesuaikan dengan pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2025 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penyesuaian pagu, yaitu :
- Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, yang semula Rp.150.000.000,- pada rancangan akhir renja berkurang sebesar

Rp. 4.065.824,- menjadi Rp. 145.934.176, dan pagu sub kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang berkurang dari Rp. 100.000.000 menjadi Rp. 95.934.176 berkurang sebesar Rp. 4.065.824,-

- Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB) berkurang sebesar Rp. 60.194.373, yang semula Rp. 477.689.410 menjadi Rp. 417.495.037. Sub Kegiatan yang mengalami penyesuaian adalah: Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB berkurang sebesar Rp. 7.478.418 sehingga menjadi Rp. 170.210.992 dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) berkurang sebesar Rp. 52.715.955 sehingga pada Rancangan akhir renja menjadi Rp. 247.284.045
- Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang semula Rp. 350.000.000,- menjadi Rp. 332.000.000 pada rancangan akhir renja berkurang sebesar Rp. 18.000.000
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan sub kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB yang pada Rancangan Awal Renja sebesar Rp. 150.000.000 berkurang Rp. 7.962.675 sehingga pagu indikatif Rancangan Akhir Renja menjadi Rp.142.037.325

11) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a) Pagu Indikatif Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dan Pagu Indikatif Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berkurang sebesar Rp. 144.120.541,- dimana semula Rp. 2.048.739.188 pada rancangan akhir renja Tahun 2025 menjadi Rp. 1.904.618.647, Hal ini karena pengurangan pagu sub kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang semula Rp. 479.570.000 menjadi Rp. 379.326.913 berkurang Rp.100.243.087 menyesuaikan dengan pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2025 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025,

12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a) Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/0580/Bappeda-Litabang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Maka dilakukan Penyesuaian pagu indikatif Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2025 berupa :

- Pengurangan pagu indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp.847.167.124, sehingga menjadi Rp. 11.079.000.000
- Penambahan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan penyusunan Renstra OPD sesuai instruksi Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.189.640
- Pengurangan untuk Pagu indikatif Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 446.279.084 sehingga menjadi Rp. 7.711.446.905 dari semula Rp. 8.157.725.989
- Perubahan Target Indikator Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dikarenakan penyesuaian cara perhitungan dimana target didapatkan dari perhitungan jumlah pegawai per bulan dikali dengan 14 bulan, sesuai dengan hasil rapat dengan Bappeda Litbang
- Pengurangan sebesar Rp. 166.732.380 untuk pagu indikatif kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sehingga menjadi Rp.1.425.278.755.
- Pengurangan pagu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 80.485.000 sehingga menjadi Rp.757.872.000 dari semula Rp. 838.357.000
- Penyesuaian Pagu Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp. 438.430.000 menjadi Rp. 351.931.200 ,- berkurang sebesar Rp. 86.498.800,- Pengurangan dilakukan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor karena Adanya Pegawai Non PNS yang menjadi PPPK dan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- Pengurangan Pagu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.77.361.500 sehingga menjadi Rp. 822.281.500 dari semula Rp.899.643.000. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi pagu indikatif sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang berkurang sebesar Rp. 77.361.500 yang semula Rp. 575.000.000 menjadi Rp.497.638.500 pada rancangan akhir renja 2025

- b) Sesuai saran dari TAPD pada asistensi Pra RKA Tahun 2025, belanja bahan/alat kebersihan pada sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material dapat dialihkan pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sehingga sub kegiatan pada Kegiatan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berkurang menjadi 4 Sub Kegiatan.
- c) Penyesuaian Pagu Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp. 438.430.000 menjadi Rp. 301.931.200,- berkurang sebesar Rp. 136.498.800,- Pengurangan dilakukan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor karena Adanya Pegawai Non PNS yang menjadi PPPK dan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.5
T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi DP3AKB Kota Balikpapan yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) maupun kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Dalam Negeri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan memiliki keinginan kuat untuk mengimplementasikan Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih. Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam RPJMD Kota Balikpapan Periode Tahun 2021–2026 adalah

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman “.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AKB mendukung pencapaian misi ke-2, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang sesuai dengan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan , yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DP3AKB Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas Pembangunan berbasis pengarusutamaan gender	Persentase Anggaran yang responsif Gender	45%	1	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme	Prosentase RKA responsif Gender	15 %

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
					Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)		
				2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	70,65 %
				3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	100 %
				4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKB	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	28,00 Nilai

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil pemetaan dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian disempurnakan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan disempurnakan lagi dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021, disempurnakan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 Kota Balikpapan, dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rumusan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AKB untuk tahun 2025, yaitu :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Kesiambungan kegiatan;
4. Isu Prioritas Nasional;
5. Program dan Kegiatan rutin setiap tahun

Rumusan rencana program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran secara keseluruhan terdiri dari 12 Program , 25 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan, dan lokasi kegiatan di Kota Balikpapan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 27.500.000.000,- dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Balikpapan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel T-C.33 di bawah ini :

Tabel 3.2

**T-C .33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Balikpapan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.500.000.000					
2	0	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			17.054.170.000					

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	84 Nilai	11.054.000.000			84 Nilai	12.564.310.485
2	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	84 Nilai	7.711.446.905			84 Nilai	7.931.122.490
2	0	0	2	0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	602 Orang/bula n	7.711.446.905	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		53 Orang/Bula n	7.931.122.490
2	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	82 Nilai	1.4.25.278.755			82 Nilai	1.823.187.995

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	18 Paket	532.499.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23 Paket	700.000.000
2	0	0	2	0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	12 Paket	430.561.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	427.000.000
2	0	0	2	0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	3 Paket	89.999.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	146.187.995
2	0	0	2	0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	12 Laporan	372.218.308	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	500.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	83 Nilai	757.872.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		83 Nilai	850.000.000
2	0	0	2	0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Balikpapan	6 Unit	757.8772.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		6 Unit	850.000.000
2	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	84 Nilai	351.931.200	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		84 Nilai	560.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	74.311.200	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	110.000.000
2	0	0	2	0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	13 Laporan	227.620.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		13 Laporan	450.000.000
2	0	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	83 Nilai	822.281.500			83 Nilai	1.050.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	58 Unit	497.638.500	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		58 Unit	650.000.000
2	0	0	2	0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan	160 Unit	124.643.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		180 Unit	200.000.000
2	0	0	2	0	001	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	1 Unit	200.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		2 Unit	200.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							yang Dipelihara / Direhabilitasi							
2	0	0				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	Balikpapan	100 %	950.000.000			100%	1.225.000.000
2	0	0	2	0		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	Balikpapan	1 Dokumen	405.000.000			1 Dokumen	650.000.000
2	0	0	2	0	000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan	Balikpapan	34 Orang	275.000.000	Pendapata n Asli		-	-

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				Daerah (PAD)			
2	0	0	2	0	000	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Balikpapan	34 Orang	130.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		34 Orang	650.000.000
2	0	0	2	0		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahan yang dibina	Balikpapan	25 Industri Rumahan	525.000.000			30 Industri Rumahan	575.000.000
2	0	0	2	0	000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan	Balikpapan	1 Dokumen	400.000.000	Pendapata n Asli		3 Organisasi	1.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				Daerah (PAD)			
2	0	0	2	0	000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Balikpapan	1 Organisasi	125.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	574.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	0	0				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	Balikpapan	8.19 per 100.000 Penduduk Perempuan	420.000.000			8,01 per 100.000 penduduk perempuan	1.184.545.991
2	0	0	2	0		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	Balikpapan	18.67 %	300.000.000			21,33%	866.632.928
2	0	0	2	0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Balikpapan	1 Dokumen	300.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	866.632.928

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	0	0	2	0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	Balikpapan	5 Lembaga	120.000.000			5 Lembaga	317.913.063
2	0	0	2	0	000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	Balikpapan	40 Orang	120.000.000	Pendapata n Asli		120 Orang	317.913.063

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				Daerah (PAD)			
2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Balikpapan	100 %	775.000.000			100%	1.701.605.368
2	0	0	2	0	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	Balikpapan	4 %	775.000.000			4,20%	1.701.605.368

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	0	0	2	0	000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Balikpapan	6 Dokumen	775.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		6 Dokumen	1.701.605.368
2	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah	Balikpapan	38,89 %	225.000.000			41,67%	369.131.772

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	Balikpapan	14 OPD	225.000.000			15 OPD	369.131.772
2	0	0	2	0	000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Balikpapan	1 Dokumen	225.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	369.131.772
2	0	0				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	Balikpapan	70 %	1.631.430.812			70%	1.137.334.282

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	0	0	2	0		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	Balikpapan	1 Dokumen	530.652.108			1 Dokumen	581.304.282
2	0	0	2	0	000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	Balikpapan	30 Organisasi	530.652.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Organisasi	581.304.282

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha							
2	0	0	2	0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	Balikpapan	30 Lembaga Penyedia Layanan	1.100.778.704			30 Lembaga Penyedia Layanan	556.030.000
2	0	0	2	0	000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	Balikpapan	1 Dokumen	1.100.778.704	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	556.030.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	Balikpapan	90 %	1.998.739.188			90%	2.085.706.623
2	0	0	2	0	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	Balikpapan	10 %	841.110.188			10 %	819.213.623
2	0	0	2	0	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan	Balikpapan	250 Orang	841.110.188	Pendapata n Asli		250 Orang	819.213.623

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			Daerah (PAD)				
2	0	0	2	0		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Balikpapan	0.010 %	820.000.000			0,009	875.000.000
2	0	0	2	0	000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Balikpapan	110 Orang	820.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD) Pendapata n Asli		82 Orang	875.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Daerah (PAD)			
2	0	0	2	0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	Balikpapan	20 Jumlah	337.629.000			25 Lembaga	391.493.000
2	0	0	2	0	000	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Balikpapan	2 Kegiatan	337.629.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		2 Kegiatan	391.493.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Balikpapan		6.477.561.353			7.425.817.722	
2	1	0			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	Balikpapan	100 %	800.000.000			100%	1.366.317.722
2	1	0	2	0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan	Balikpapan	34 Jumlah Kelurahan	800.000.000			34 Kelurahan	1.366.317.722

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							kelurahan sesuai dengan regulasi								
2	1	0	2	0	001	3411	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Balikpapan	1 Dokumen	325.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	608.146.812
2	1	0	2	0	001	3418	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Balikpapan	2 Dokumen	475.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	758.170.910
2	1	0				35	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	85.550.000.000 Rp	5.677.561.353			85.800.000.000	6.059.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					MASYARAKAT HUKUM ADAT								
2	1	0	2	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	Balikpapan	68.57 %	5.677.561.353			70,51%	6.059.500.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Balikpapan	35 Dokumen	610.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		35 Dokumen	950.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Balikpapan	10 Lembaga	2.372.561.353	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Lembaga	2.150.000.000
2	1	0	2	0	000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikpapan	4 Laporan	795.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	525.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Balikpapan	1 Laporan	300.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	425.000.000
2	1	0	2	0	000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	1 Dokumen	1.600.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	2.009.500.000
2	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN		Balikpapan		3.963.268.647				4.419.895.438

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	Balikpapan	68 %	1.021.183.462			70%	1.144.720.844
2	1	0	2	0	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenzang SD/ MI	Balikpapan	26,04 %	371.183.462			31,25%	494.720.844

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
							Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SLTP/ MTS	Balikpapan	36,14 %			48,19%					
2	1	0	2	0	000	4	2	1	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS,	"Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan	Balikpapan	80 Satuan Pendidikan	371.183.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60 SD, 40 SMP	494.720.844

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Jalur Nonformal dan Informal"								
2	1	0	2	0		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	Balikpapan	1 Dokumen	650.000.000			1 Dokumen	650.000.000
2	1	0	2	0	001	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	"Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya"	Balikpapan	12 Dokumen	650.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	650.000.000
2	1	0				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Balikpapan	11.25 %	1.037.466.538			11,20%	1.115.174.594

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	0	2	0		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	Balikpapan	77.300 PUS	145.934.176			77.400 PUS	170.000.000
2	1	0	2	0	000	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Balikpapan	1 Laporan	50.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	50.000.000
2	1	0	2	0	001	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Balikpapan	3 Dokumen	95.934.176	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	120.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
2	1	0	2	0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	Balikpapan	34 Kelompok IMP	417.495.037			34 Kelompok IMP	445.174.594
2	1	0	2	0	000	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Balikpapan	12 Organisasi	170.210.992	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		12 Organisasi	145.174.594

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB							
2	1	0	2	0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Balikpapan	34 Laporan	247.284.045	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		34 Laporan	300.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
2	1	0	2	0			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Balikpapan	27.75 %	332.000.000			30,01%	350.000.000
2	1	0	2	0	000		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga	Balikpapan	1 Laporan	332.000.000	Pendapata n Asli		1 Laporan	350.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				Daerah (PAD)			
2	1	0	2	0	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB	Balikpapan	34 Jumlah Intervensi	142.037.325			34 Intervnsi	150.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Balikpapan	34 Laporan	142.037.325	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		34 Laporan	150.000.000
2	1	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan	Balikpapan	20,35 %	1.904.618.647			20,35%	2.160.000.000
2	1	0	2	0		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok BKB terbentuk	Balikpapan	9.91 %	1.904.618.647			10,28 %	2.160.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Persentase kelompok BKL terbentuk	Balikpapan	7 %				7,19%		
							Persentase kelompok BKR terbentuk	Balikpapan	4.15 %				5,31%		
							Persentase kelompok PIK-R terbentuk	Balikpapan	25.60 %				26,90%		
							Persentase kelompok UPPKA terbentuk	Balikpapan	2 %				2,44%		
2	1	0	2	0	000	4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	Balikpapan	1 Laporan	200.000.000			1 Laporan	200.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)							
2	1	0	2	0	001	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Balikpapan	1 Laporan	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	500.000.000
2	1	0	2	0	001	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Balikpapan	33 Unit	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Unit	400.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia							
2	1	0	2	0	001	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Balikpapan	456 Orang	379.326.913	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		456 Orang	500.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
2	1	0	2	0	002	002	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Balikpapan	5 Laporan	225.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		5 Laporan	210.000.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	002	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Balikpapan	20 Kelompok	300.291.734	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		20 Kelompok	350.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
TOTAL					27.500.000.000			32.113.347.681	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AKB adalah Misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan tujuan Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan gender yang ukuran indikatornya Persentase Anggaran Responsif Gender.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu : Meningkatkan Anggaran yang Responsive Gender. Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatkan Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
2. Meningkatkan Kesertaan PUS ber-KB (mCPR);
3. Meningkatkan Kelurahan Kategori Berkembang;
4. Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Program , kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perangkat Daerah DP3AKB pada dasarnya masih tetap mengacu pada tahun 2024 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman sedangkan untuk pendanaan bersumber dari Dana APBD tahun anggaran 2025.

Dalam rangka melaksanakan rencana kerja 2025,Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp. 27.500.000.000 (Dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembiayaan 12 (dua belas) Program, 25 (dua puluh lima) Kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, Rancangan Awal Rencana Kerja dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang mendukung Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2025, adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Program,Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)				Prosentase RKA responsif Gender	15,00 %	6.000.170.000	DP3AKB
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan kapasitas kelembagaan pengarusuamaan gender	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	100 %	950.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.02.2.0 1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebijakan, Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	1 Dokumen	405.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.02.2.0 1.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan	34 Orang	275.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota	Pendampingan Penyelenggaraan PUG			
	2.08.02.2.0 1.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota bagi perangkat daerah/ lembaga masy/profesi,/ dunia usaha,/ media	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	34 Orang	130.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.02.2.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan produktivitas perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik	Jumlah Industri Rumahan yang dibina	25 Industri Rumahan	525.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.08.02.2.0 2.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.02.2.0 2.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	125.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	8.19 per 100.000 Penduduk Perempuan	420.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.03.2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	18.67 %	300.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.03.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	5 Lembaga	120.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	120.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Fasilitasi Pemenuhan Hak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100 %	775.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.08.04.2.0 1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya keluarga yang berkualitas	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	4 %	775.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.04.2.0 1.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Dokumen	775.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pemenuhan data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah	38,89 %	225.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.08.05.2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data gender dan anak	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	14 OPD	225.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.05.2.0 1.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	225.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Implementasi Pengembangan KLA	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	70 %	1.631.430.812	Bidang Perlindungan Anak
	2.08.06.2.0 1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	1 Dokumen	530.652.108	Bidang Perlindungan Anak

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.08.06.2.0 1.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	530.652.108	Bidang Perlindungan Anak
	2.08.06.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	30 Lembaga Penyedia Layanan	1.100.778.704	Bidang Perlindungan Anak
	2.08.06.2.0 2.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan	1 Dokumen	1.100.778.704	Bidang Perlindungan Anak

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan upaya penanganan dan perlindungan kekerasan	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	90 %	1.998.739.188	Bidang Perlindungan Anak
	2.08.07.2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	10 %	841.110.188	Bidang Perlindungan Anak
	2.08.07.2.0 1.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan	Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan	250 Orang	841.110.188	Bidang Perlindungan Anak

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		/program/ kegiatan pencegahan KTA	kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	/program/ kegiatan pencegahan KTA			
	2.08.07.2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0.010 %	820.000.000	Bidang Perlindungan Anak
	2.08.07.2.0 2.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	110 Orang	820.000.000	UPTD PPA
	2.08.07.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	20 Jumlah Lembaga	337.629.000	Bidang Perlindungan Anak

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Perlindungan Khusus Terbina			
	2.08.07.2.0 3.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	337.629.000	Bidang Perlindungan Anak
Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB (mCPR)				Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	70,65 %	3.963.268.647	DP3AKB
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	68 %	1.021.183.462	Bidang Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
			pengendalian penduduk				
	2.14.02	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas institusi Pendidikan kependudukan	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI	26,04 %	371.183.462	Bidang Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1			Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SLTP/ MTS	36,14 %		Bidang Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	80 Satuan Pendidikan	371.183.462	Bidang Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jalur Formal di Satuan Pendidikan			
	2.14.02.2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga untuk pembangunan kependudukan	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	650.000.000	Bidang Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	"Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya"	12 Dokumen	650.000.000	Bidang Keluarga Berencana
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11.25 %	1.037.466.538	Bidang Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.14.03.2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77.300 PUS	145.934.176	Bidang Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 1.0008	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	50.000.000	Bidang Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 1.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	95.934.176	Bidang Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
			serta Media Luar Ruang				
	2.14.03.2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP	417.495.037	Bidang Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 2.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	12 Organisasi	170.210.992	Bidang Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 2.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan	34 Laporan	247.284.045	Bidang Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan	Terwujudnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	Persentase Kepesertaan KB MKJP	27.75 %	332.000.000	Bidang Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pelayanan KB				
	2.14.03.2.0 3.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	332.000.000	Bidang Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB	34 Jumlah Intervensi	142.037.325	Bidang Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.14.03.2.0 4.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	34 Laporan	142.037.325	Bidang Keluarga Berencana
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Meningkat	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan	20,35 %	1.904.618.647	Bidang Ketahanan Keluarga
	2.14.04.2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter, dalam masa perkembangan remaja	Persentase kelompok BKB terbentuk	9.91 %	1.904.618.647	Bidang Ketahanan Keluarga
Persentase kelompok BKL terbentuk				7 %		Bidang Ketahanan Keluarga	
Persentase kelompok BKR terbentuk				4.15 %		Bidang Ketahanan Keluarga	
Persentase kelompok PIK-R terbentuk				25.60 %		Bidang Ketahanan Keluarga	

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
			dan penguatan karakter, dan Meningkatnya kualitas hidup lansia dan kualitas keluarga rentan melalui pendampingan keluarga dan kualitas hidup keluarga rentan , Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Keluarga serta Meningkatanya Pusat informasi dan konseling bagi Remaja mengenai kesehatan reproduksi dan juga tentang perencanaan	Persentase kelompok UPPKA terbentuk	2 %		Bidang Ketahanan Keluarga

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
			kehidupan berkeluarga				
	2.14.04.2.0 1.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	200.000.000	Bidang Ketahanan Keluarga
	2.14.04.2.0 1.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	1 Laporan	500.000.000	Bidang Ketahanan Keluarga

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		Keluarga Akseptor (UPPKA))	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	2.14.04.2.0 1.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	33 Unit	300.000.000	Bidang Ketahanan Keluarga
	2.14.04.2.0 1.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-	456 Orang	379.326.913	Bidang Ketahanan Keluarga

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		Keluarga Akseptor (UPPKA)	BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
	2.14.04.2.0 1.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Laporan	225.000.000	Bidang Ketahanan Keluarga
	2.14.04.2.0 1.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	20 Kelompok	300.291.734	Bidang Ketahanan Keluarga

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk			

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	100 %	6.477.561.353	DP3AKB
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	100 %	800.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.13.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	34 Jumlah Kelurahan	800.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.13.04.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	325.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.13.04.2.0 1.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	575.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	85.550.000.000 Rp	5.677.561.353	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.13.05.2.0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Balikpapan Meningkatkan	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	68.57 %	5.677.561.353	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	2.13.05.2.0 1.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35 Dokumen	610.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.13.05.2.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	10 Lembaga	2.372.561.353	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	2.13.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	795.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.13.05.2.0 1.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	300.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
	2.13.05.2.0 1.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	1 Dokumen	1.600.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
		Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKB				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	33 Nilai	11.054.000.000	DP3AKB
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan DP3AKB	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84 Nilai	11.054.000.000	Sekretariat
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan di DP3AKB	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84 Nilai	7.711.446.905	Sekretariat

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.08.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	7.711.446.905	Sekretariat
	2.08.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum DP3AKB	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82 Nilai	1.379.885.895	Sekretariat
	2.08.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	542.000.000	Sekretariat
	2.08.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	335.000.000	Sekretariat
	2.08.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	90.000.000	Sekretariat

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.08.01.2.0 6.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Sekretariat
	2.08.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	387.885.895	Sekretariat
	2.08.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83 Nilai	838.357.000	Sekretariat
	2.08.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	838.357.000	Sekretariat
	2.08.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84 Nilai	301.931.200	Sekretariat

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.08.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.311.200	Sekretariat
	2.08.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	227.620.000	Sekretariat
	2.08.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 Nilai	822.379.000	Sekretariat
	2.08.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	58 Unit	497.736.000	Sekretariat

Sasaran Strategis	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator (Sasaran,Program,Kegiatan, Sub Kegiatan)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
					2025		
					Target	Rp	
	2.08.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	124.643.000	Sekretariat
	2.08.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Sekretariat
						27.500.000.000	

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menjadi bagian tak terpisahkan dari misi 1 Kota Balikpapan tentang Peningkatan kinerja profesionalitas dan transparansi birokrasi pemerintahan yang perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, mendorong perangkat daerah untuk menciptakan inovasi tiap tahun. Inovasi yang diciptakan tiap perangkat daerah dipandang sebagai optimalisasi menuju good governance atau tata laksana pemerintahan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, berkeinginan melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik. Inovasi yang dilakukan DP3AKB terkait dengan pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Inovasi Yang Dilakukan DP3AKB Kota Balikpapan

Inovasi	Tujuan	Sasaran
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Kota Balikpapan Menuju Kota Layak Anak (PIN EMAS)	Meningkatkan Sumber daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing serta tersedianya dokumen rencana aksi daerah Kota Layak Anak (KLA), pemenuhan kota layak anak dan terintegrasinya system layanan informasi konsultasi layanan keluarga dan pelaporan masalah anak	Masyarakat
Sinergi & Kolaborasi Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Akseptor (SIRSAK)	Mengembangkan kelompok UPPKA agar semakin dikenal oleh masyarakat luas sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bagi keluarga akseptor	kelompok UPPKA
Pendekatan yang dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak dalam berbagai konteks (Sistem Manajemen Perlindungan Anak (SIMAPAN))	memberikan lingkungan yang aman, mendukung perkembangan optimal mereka, dan mencegah segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi.	Anak di Kota Balikpapan
Kolaborasi pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi tepat Guna (Kopy Tetangga)	Melakukan pengelolaan Posyantek secara kolaborasi dengan instansi terkait, membuat pemetaan secara digital untuk memperkenalkan posyantek dan	Posyantek dan Inovator

Inovasi	Tujuan	Sasaran
	mempromosikan produk teknologi tepat guna	
Optimalisasi Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) DP3AKB Kota Balikpapan Melalui Registrasi Klien Secara Online	Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama mengenai proses registrasi dan rekapitulasi data klien di Puspaga	Masyarakat Pengguna Layanan Puspaga DP3AKB Kota Balikpapan
Sistem Informasi Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SIDAK KtPA)	Media informasi data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masyarakat
LAPOR PAK BALIKPAPAN	Layanan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan Perempuan dan Anak dan yang ingin berkonsultasi dengan Psikolog	Masyarakat
Delivery Service Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Berbasis Online Menuju Pelayanan Prima (Di DISKON OM PRIMA)	Meningkatkan pelayanan prima untuk permintaan obat kontrasepsi dan alat kesehatan penunjang KB	Mitra Kerja Fasilitas Kesehatan yang melayani KB

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2025. Penyusunan Renja Tahun 2025 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas Pembangunan berbasis pengarusutamaan gender sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan.

Adanya Kebijakan terkait Pemilihan kepala daerah (PILKADA) Serentak di Tahun 2024, maka Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026, sehingga Renja Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

- a. Pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan
- b. Mendapatkan gambaran untuk dijadikan salah satu referensi dalam penentuan pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.
- c. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan tahun 2025;
- d. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2025.
- e. Pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 sekaligus sebagai dasar laporan Tugas dan Fungsi Organisasi pada tahun yang sama.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2025 diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Kesuksesan dalam pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025, adalah:

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang – Undang (Lembar Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk periode tahun 2025 sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun hal-hal yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan evaluasi renja yakni :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada ABPD tahun 2024 yang telah disahkan. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			37	37	100%	38		
2 10 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84 nilai	78 Nilai	81	82	101%	82 Nilai	82 Nilai	98%
	2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			8	8	100%	20	20	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai			2	2	100%	0	2	
2 10 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84 nilai	76 Nilai	80	76	95%	81 Nilai	81 Nilai	96%
	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1	1	100%	1	3	
	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	8	8	83%	6	17	
	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	1	1	100%	-	1	

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		Cat.			
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12			
	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	6	6	100%	6	18				
	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan		1	1	1	100%	1	3				
	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	2	2	100%	2	6				
	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	12	12	100%	12	24				
	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		145	150	138	92%	150					
2	10	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 Nilai	68 Nilai	81	80	99%	82 Nilai	82Nilai	98%	
			2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			6	6	100	3	9		
			2.07.032	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan			1	1	100	-	1		
			2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2	3	3	100%			
2	10	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84 Nilai	80 Nilai	80	80	100%	81 Nilai	81 Nilai	96%	
			2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat			1	1	100%	-	-	-	

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	1	1	100%			
	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		1	1	100%			
	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24	36	36	100%	36	96	
2 10 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84 Nilai	69 Nilai	81	79	97%	82 Nilai	82 Nilai	98%
	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		16	17	14	82%			
	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6	9	7	78%	22		
	2.09.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4	30	12	40%	30		
2 10 04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	37,5%	56%	40%	44%	111%			

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi	37,5%	100%	41,7%	36%	86%				
	2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		10	8	4	50%	10			
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang Diberikan Ganti Rugi yang Dilaksanakan oleh DPPR	80,24%	62.96%	69,49% %	80,20%	115%				
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR	100%	62%	41,67%	55%	132%				
	2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah			3	3	100%	2	5		
	2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1	1	100%	2	3		

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		Cat.		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12		
2	10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	92%	63,12%	89%	80%	90%	90%	90%	98%		
2	10 05	2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	92%	63%	89%	87%	98%	89%	97%		
		2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		218	240	121	50%	230	569		
		2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		-	12	0	0%				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	03 09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	33%	20%	22%	27,27%	124%	31%	31%	94%	
1	03 09	2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya yang Ditetapkan	42%	28,57%	33%	54,55%	165%				
		2.01.01	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		5	9	7	78%				
		2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan		1	2	2	100%				

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		Cat.	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12	
		Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata										
	2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil monitoring penataan/ pemelahaaraan bangunan dan lingkungan			1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.	2 dok.	nomenklatur berubah tahun 2024	
		Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan parawisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya		-	2	2	100%				
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan parawisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya			2	2	100%			nomenklatur tidak ada tahun 2024	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan			300	204	68%			nomenklatur tidak ada tahun 2024	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	0,14	0,15	0,195	130%	0,21	0,55	55%
1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan	100%	33,33%	75%	50%	67%	75%	75%

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		Cat.		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12		
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1	1	100%	0	1	100%	nomenklatur tidak ada tahun 2025	
	2.01.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi			0	0	0%	1	1			
1	03	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	100%	22%	20%	22%	111%	40%	40%	40%
			2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		-	1	1	100%	-	-	
			2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		2	4	4	100%			
			2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		18	14	24	171%			
1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	94%	87,16%	91%	89,37%	98%	92%	92%	98%
				Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi penataan ruang			1	1	100%	1	2	

Nama PD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4*	12
	2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		1052	900	1226	136%	900	3178	
1 03 12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	95%	60%	91%	60%	66%	92%	92%	97%
	2.04.02	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah		347	265	478	180%			

Berdasarkan tabel T-C.29 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sampai dengan Tahun 2024, maka analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

2.1.1 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, BBM dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, BBM dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
-	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan

		Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
-	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-

2.1.2 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kot	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

		Perundang-undangan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah-	Pengadaan Mebel
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		Pengadaan Aset Tak berwujud
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
-	-	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan

		Penataan bangunan dan lingkungan
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
		Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
	-	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
-	-	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah

2.1.3 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Kinerja PD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-
Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-
Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang
-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
-	-	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/sesuai/melebihi target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Capaian target kinerja			Faktor-faktor penyebab
	Tidak Tercapai	Sesuai	Melebihi	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		√		peningkatan pelayanan internal pada urusan penunjang pemerintahan
Perencanaan, penganggaran, dan Eavaluasi Perangkat Kinerja Perangkat Daerah			√	Peningkatan kinerja dan kualitas serta tambahan bukti dukung dalam laporan LKJIP DPPR
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			√	peningkatan pelayanan internal pada urusan penunjang pemerintahan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			√	peningkatan pelayanan internal pada urusan penunjang pemerintahan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Administrasi Umum Perangkat Daerah	√			Masih kurangnya pemahaman responden kuesioner IKM Internal DPPR terhadap substansi pertanyaan kuesioner yang disampaikan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Capaian target kinerja			Faktor-faktor penyebab
	Tidak Tercapai	Sesuai	Melebihi	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√		√	Penyesuaian pelaksanaan rapat dengan tingkat kebutuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√			Masih kurangnya pemahaman responden kuesioner IKM Internal DPPR terhadap substansi pertanyaan kuesioner yang disampaikan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Pengadaan Mebel		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Pengadaan Aset Tak Berwujud		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√			Masih kurangnya pemahaman responden kuesioner IKM Internal DPPR terhadap substansi pertanyaan kuesioner yang disampaikan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√			Dilakukannya pemeliharaan kendaraan menyesuaikan dengan permohonan dari pemakai kendaraan dinas jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√			Dilakukannya pemeliharaan kendaraan menyesuaikan dengan permohonan dari pemakai kendaraan dinas operasional.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√			Terdapat 1 jenis peralatan kantor yang masih dalam kondisi baik
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			√	- permohonan fasilitasi/mediasi sengketa tanah telah menurun signifikan
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam	√			

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Capaian target kinerja			Faktor-faktor penyebab
	Tidak Tercapai	Sesuai	Melebihi	
Daerah Kabupaten/Kota				- berkurangnya permasalahan tumpang tindih pada IMTN
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	√			
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			√	- penyelesaian seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan Embung Aji Raden dengan realisasi ganti rugi tanah seluas 31 Ha - menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan penataan simpang muara rapak dengan realisasi ganti rugi tanah seluas 92 M2 - Melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendali II dengan realisasi ganti rugi seluas 731 M2
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			√	
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	√			Tidak tercapainya kinerja dikarenakan masih terdapat beberapa permohonan rekomendasi IMTN yang masih terkendala dalam pemenuhan dokumen administrasi hal ini berdampak pada capaian kinerja pada kegiatan dan sub kegiatan dibawahnya sehingga tidak dapat mencapai target kinerjanya
Penerbitan Izin Membuka Tanah	√			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	√			
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	√			Belum dapat dilaksanakan karena belum adanya revisi Perkada IMTN
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			√	- kerjasama tim dalam menyelesaikan progres pekerjaan fisik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan - koordinasi intensif dengan PD terkait serta instansi vertikal sehingga
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			√	

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Capaian target kinerja			Faktor-faktor penyebab
	Tidak Tercapai	Sesuai	Melebihi	
				pembangunan fisik terlaksana tepat waktu
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	√			Seluruh pihak yang terkait melakukan pekerjaan secara optimal demi merealisasikan proses pekerjaan penataan bangunan dan lingkungan
Penataan bangunan dan lingkungan		√		
Supervisi penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategi lainnya		√		
Pemeliharaan bangunan dan lingkungan		√		
Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		√		
Pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan	√			terdapat beberapa peserta yang berhalangan hadir
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			√	Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	√			Masih belum terselesaikannya penyusunan substansi RTRW Kota Balikpapan karena masih proses pelaksanaan lintas sektoral
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			√	Tingginya tingkat kinerja tim FPR yang mendongkrak kinerja pada kegiatan perencanaan tata ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			√	- Tingginya tingkat kinerja pelaksanaan forum FPR dari target pelaksanaan 14 dokumen telah terealisasi 24 dokumen - Tim FPR ikut aktif dalam pelaksanaan rapat KKPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Capaian target kinerja			Faktor-faktor penyebab
	Tidak Tercapai	Sesuai	Melebihi	
Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rencana Strategis Dinas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			√	Masih banyaknya permohonan ITR, KRK, KKPR, dan Site Plan sehingga melebihi target kinerja yang ditetapkan
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang		√		Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	√			Rendahnya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang Kota Balikpapan sehingga hanya terdapat 6 dokumen yang dilakukan tindak lanjut untuk pelanggaran pemanfaatan ruang dari target 10 dokumen.
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			√	Banyaknya berkas pemanfaatan ruang yang dilakukan pengawasan terhadap dokumen administrasi dari target 310 dokumen telah terealisasi 347 dokumen

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

1. Dalam bidang sekretariat tingkat pencapaian pada sub kegiatan telah tercapai sesuai dengan perencanaan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang di- harapkan;
2. Dalam Pencapaian Program Perencanaan Tata Ruang yang tidak tercapai akan mempengaruhi program prioritas dari visi dan misi Walikota Balikpapan sehingga mengurangi nilai laporan Dinas dan Pemerintah Kota serta laporan akhir RPJMD Kota Balikpapan;
3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan target capaian telah sesuai dengan target di dalam Renstra;
4. Pada urusan Pembebasan Lahan terdapat peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dengan melebihi target kinerja di dalam Renstra.

2.1.6 Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

1. Lebih sigap untuk mendapatkan adanya bantuan dana dari Pemerintah Pusat / Provinsi
2. Melakukan penyusunan jadwal rencana kegiatan untuk tiap kegiatan yang ada di anggaran DPPR

3. Dalam perencanaan anggaran TAPD hendaknya jangan melakukan pendekatan anggaran melainkan melalui pendekatan kepentingan atau analisis kebutuhan (*money follow program*).
4. Melakukan pelayanan legalisasi tanah/IMTN dalam rangka mendukung catur tertib pertanahan.
5. Melakukan follow up secara berkala dan intensif untuk proses pengurusan persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN sehingga bisa terselesaikannya proses Perda Revisi RTRW
6. Melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan untuk menyediakan data yang diperlukan pada proses pertanahan serta perencanaan dan pemanfaatan ruang kota.
7. Melaksanakan pelatihan/diklat teknis mengenai pertanahan serta perencanaan dan pengawasan Tata Ruang bagi aparat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta pengusulan pemenuhan pembentukan pegawai (*formasi bezetting*).
8. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang pada pertanahan, tata ruang dan bangunan secara intensif serta penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Penamaan Program dan Kegiatan antara Renstra 2021-2026 dan Renja 2025 telah sesuai (konsisten) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Meskipun pada akhir tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menetapkan indikator sub kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan didasarkan pada evaluasi hasil capaian Program Tahun 2023 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2023), adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 1. **111,73%**.
2. Predikat kinerja **“Sangat Tinggi”**.

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Indikator program :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 81 Nilai, terealisasi sebesar 81 Nilai.

Pada program ini terdapat tujuh kegiatan, yaitu :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 103% dari target yang ditetapkan sebesar 65,95%, terealisasi sebesar 67,88%.

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen perencanaan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 Dokumen, terealisasi sebesar 1 Dokumen

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen evaluasi kinerja

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 Dokumen, terealisasi sebesar 2 Dokumen

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 103% dari target yang ditetapkan sebesar 81 Nilai, terealisasi sebesar 83,33 Nilai.

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 37 orang, terealisasi sebesar 37 Orang

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 101% dari target yang ditetapkan sebesar 81 Nilai, terealisasi sebesar 82 Nilai

1.3.1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 unit, terealisasi sebesar 2 unit

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99% dari target yang ditetapkan sebesar 81%, terealisasi sebesar 80,56%.

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 paket, terealisasi sebesar 1 paket.

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 8 paket, terealisasi sebesar 8 paket

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 paket, terealisasi sebesar 1 paket

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 paket, terealisasi sebesar 6 paket.

1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 paket, terealisasi sebesar 1 paket.

1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen.

1.4.7 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 12 laporan, terealisasi sebesar 12 laporan.

1.4.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 92% dari target yang ditetapkan sebesar 150 laporan, terealisasi sebesar 138 laporan.

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99% dari target yang ditetapkan sebesar 81 Nilai, terealisasi sebesar 80,3 Nilai.

1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 unit, terealisasi sebesar 6 unit.

1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 Unit, terealisasi sebesar 1 unit.

1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket mebel yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 paket, terealisasi sebesar 3 paket

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 81 Nilai, terealisasi sebesar 81 Nilai.

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 laporan, terealisasi sebesar 1 laporan.

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 laporan, terealisasi sebesar 1 laporan.

1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 36 laporan, terealisasi sebesar 36 laporan.

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai IKM Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 97% dari target yang ditetapkan sebesar 81 Nilai, terealisasi sebesar 79 Nilai.

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 82% dari target yang ditetapkan sebesar 17 unit, terealisasi sebesar 14 unit.

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 78% dari target yang ditetapkan sebesar 9 unit, terealisasi sebesar 7 unit.

1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 30 unit, terealisasi sebesar 4 jenis.

2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator program :

Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 130% dari target yang ditetapkan sebesar 0,15 Indeks, terealisasi sebesar 0,195 Indeks. Pada program ini terdapat empat kegiatan, yaitu :

2.4 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 67% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, terealisasi sebesar 50%.

2.2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

2.5 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 138% dari target yang ditetapkan sebesar 40%, terealisasi sebesar 55%.

2.5.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen

2.5.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 dokumen, terealisasi sebesar 4 dokumen

2.5.3 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 171% dari target yang ditetapkan sebesar 18 dokumen, terealisasi sebesar 24 dokumen

2.6 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 98% dari target yang ditetapkan sebesar 91%, terealisasi sebesar 89,37%.

2.6.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 136% dari target yang ditetapkan sebesar 900 dokumen, terealisasi sebesar 1.226 dokumen.

2.6.2 Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dan sistem informasi penataan ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen

2.7 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 109% dari target yang ditetapkan sebesar 92%, terealisasi sebesar 100%.

2.7.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

2.7.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 180% dari target yang ditetapkan sebesar 265 dokumen, terealisasi sebesar 478 dokumen.

3 Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya

Indikator program :

Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 124% dari target yang ditetapkan sebesar 22%, terealisasi sebesar 27,27%.

Pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

3.4 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase RTBL yang ditetapkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 165% dari target yang ditetapkan sebesar 33%, terealisasi sebesar 54,55%.

3.4.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 78% dari target yang ditetapkan sebesar 9 dokumen, terealisasi sebesar 7 dokumen..

3.4.2 Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 kawasan, terealisasi sebesar 2 kawasan

3.4.3 Sub Kegiatan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 kawasan, terealisasi sebesar 2 kawasan.

3.4.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 kawasan, terealisasi sebesar 2 kawasan.

3.4.5 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan.

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 68% dari target yang ditetapkan sebesar 300 orang, terealisasi sebesar 204 orang.

3.4.6 Sub Kegiatan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen hasil monitoring penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen

4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator program :

Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 111% dari target yang ditetapkan sebesar 40%, terealisasi sebesar 44%.

pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

4.4 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kegiatan :

Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 86% dari target yang ditetapkan sebesar 40%, terealisasi sebesar 44%.

4.4.1 Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 8 berita acara, terealisasi sebesar 5 berita acara

5 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Indikator program :

Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 89%, terealisasi sebesar 80%.

Pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

5.4 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah

Indikator Kegiatan :

persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 98% dari target yang ditetapkan sebesar 89%, terealisasi sebesar 87%.

5.4.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 240 dokumen, terealisasi sebesar 121 dokumen.

5.4.2 Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 0 kegiatan, terealisasi sebesar 0 kegiatan (rasionalisasi anggaran).

6 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Indikator program :

Persentase luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 115% dari target yang ditetapkan sebesar 69,49%, terealisasi sebesar 80,20%.

Pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

6.4 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 131,99% dari target yang ditetapkan sebesar 41,67%, terealisasi sebesar 55%

6.4.1 Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah keputusan Bupati/Wali Kota tentang penetapan penerima santunan tanah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 3 dokumen.

T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan

No	Indikator Sasaran Strategis	SPM/Standar nasional	IKK	Target RENSTRA DPPR				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (Izin lokasi, IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah)	-	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (Izin lokasi, IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah)	80%	81%	81,5%	82%	88,86%	75%	-	-	
2	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	-	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	66,33%	69,40%	72,65%	76,44%	62,96%	67%	-	-	
3	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	-	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89,205	89,40%	89,60%	89,80%	89,74%	89,74%	-	-	
4	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	-	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	14%	22%	27%	31%	20%	25%	-	-	
	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	-	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	27 nilai	27,5 nilai	28 nilai	28,5 nilai	29,38 nilai	-	-	-	
5	Nilai SAKIP DPPR	-	Nilai SAKIP DPPR	-	-	-	-	67,69	67,88			

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Pertanahan dan Penataan ruang tidak terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Adapun isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- a. Fasilitasi pengadaan tanah yang merupakan salah satu tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Pada tahun 2025 terdapat rencana untuk penyelesaian pengadaan tanah pada embung aji raden sebagai dukungan terhadap pembangunan embung aji raden yang akan dilaksanakan berdasarkan adanya Surat Tugas pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dari Bappeda Litbang.
- b. Peningkatan pelayanan administrasi di bidang pertanahan melalui kegiatan pemberian rekomendasi IMTN dan fasilitasi sengketa tanah. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi Pertanahan diharapkan mampu ditingkatkan melalui sisi kualitas maupun kuantitas. Salah satu indikator penyelenggaraan pelayanan publik yang baik tentunya dapat meminimalisir berbagai keluhan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan. Untuk itu diharapkan setiap tahunnya angka kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi di bidang Pertanahan dapat diukur melalui survey kepuasan pelayanan administrasi pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
- c. Penetapan Ibu Kota Negara “Nusantara” oleh Presiden Joko Widodo melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Hal ini berdampak pada penyesuaian fungsi kawasan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berkomitmen menyelesaikan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024 - 2034, sehingga perlu dilakukan penyesuaian / peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan yang memuat ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dalam skala yang lebih detail dengan dilakukan penyusunan peta dasar sebagai tahap awal RDTR sendiri dapat dijadikan acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.
- d. Peningkatan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan Penataan ruang. Kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan dokumen perencanaan ruang yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang bahwa untuk dapat mewujudkan tertib tata ruang, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tertib tata ruang, yaitu penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan penilaian pernyataan mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Pelaku UMK). Berkenaan hal tersebut, pada tahun 2025 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota

Balikpapan akan membentuk Tim Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

- e. Penataan bangunan dan lingkungan sebagai salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu yang mengacu pada dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Penyusunan RTBL berguna untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun dengan harapan dapat mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan. Untuk itu, perlu disusun dokumen RTBL sebagai salah satu aspek legal formal dalam kegiatan Penataan bangunan dan lingkungan, sehingga dengan adanya RTBL diharapkan mendapatkan gambaran tentang kemampuan daya dukung fisik dan lingkungan sehingga mampu membuat perencanaan pengembangan bangunan yang mengangkat nilai kearifan maupun karakter khas lokal sesuai dengan spirit dan konteks kawasan perencanaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Balikpapan

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang															
Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bpp	IKM Internal Perangkat Daerah	82 nilai	12.862.154.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bpp	IKM Internal Perangkat Daerah	82 nilai	12.862.154.000	
2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82 nilai	9.072.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	82 nilai	9.072.000.000	
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	9.072.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	9.072.000.000	
2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	82 nilai	400.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	82 nilai	400.000.000	
2	10	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39 Paket	50.000.000	
2	10	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	350.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	350.000.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bpp	IKM Internal Perangkat Daerah	82 nilai	12.862.154.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bpp	IKM Internal Perangkat Daerah	82 nilai	12.862.154.000	
2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82 nilai	9.072.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	82 nilai	9.072.000.000	
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	9.072.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	9.072.000.000	
2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	82 nilai	400.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	82 nilai	400.000.000	
2	10	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39 Paket	50.000.000	
2	10	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	350.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	350.000.000	

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dok.	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dok.	10.000.000	
2	10	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	24.468.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	24.468.000	
2	10	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 laporan	450.000.000	
2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpp	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82 nilai	466.686.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bpp	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82 nilai	466.686.000	
2	10	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	436.686.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	436.686.000	1 unit mobil dan 3 unit motor
2	10	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Bpp	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	30.000.000	Pengadaan Mebel	Bpp	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	30.000.000	
2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82 nilai	1.111.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82 nilai	1.111.000.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	70.000.000	
2	10	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	30.000.000	
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	1.011.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	1.011.000.000	
2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82 nilai	720.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpp	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82 nilai	720.000.000	
2	10	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	420.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	420.000.000	

2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Ops	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	240.000.000
---	----	----	------	----	--	-----	--	---------	-------------	--	-----	--	---------	-------------

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lo ka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	10	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	60.000.000	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Bpp	Persentase Fasilitas Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	39%	20.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Bpp	Persentase Fasilitas Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	39%	20.000.000	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Bpp	Persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi	50%	20.000.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Bpp	Persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi	50%	20.000.000	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita acara	20.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah permasalahan tanah yang dilakukan fasilitasi/mediasi	5 Berita acara	20.000.000	
2	01	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	Bpp	Persentase Luas Tanah yang Diberikan Ganti Rugi yang	72,65%	2.500.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Bpp	Persentase Luas Tanah yang Diberikan Ganti Rugi yang	72,65%	2.500.000.000	

				UNTUK PEMBANGUNAN		Dilaksanakan oleh DPPR					Dilaksanakan oleh DPPR			
--	--	--	--	------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang															
RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING				
Kode		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12			
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Bpp	Rata-rata Persentase Tahapan Pengadaan Tanah yang Sudah Dilaksanakan oleh DPPR	60,26 %	2.500.000.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Bpp	Rata-rata Persentase Tahapan Pengadaan Tanah yang Sudah Dilaksanakan oleh DPPR	60,26 %	2.500.000.000	
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2 Dokumen	400.000.000	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2 Dokumen	400.000.000	1 sk tim persiapan, 1 sk penlok
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Bpp	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	54.550.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Bpp	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	54.550.000.000	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bpp	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	27%	28.000.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bpp	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	27%	28.000.000.000	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase RTBL yang Ditetapkan	38%	28.000.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Persentase RTBL yang Ditetapkan	38%	28.000.000.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang															
Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 dokum en	975.150.000	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 dokum en	975.150.000	
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Bpp	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	5 dokum en	1.533.850.000	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Bpp	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	5 dokum en	1.533.850.000	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Bpp	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	7 Kawasa an	25.441.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	7 Kawasa an	25.441.000.000	Pemel. Utara dan Sudirman, Jl. A. Yani, Batu Ampar, Jl.Letjen Suprpto

1	03	09	2.01	04	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 dokumen	50.000.000	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 dokumen	50.000.000	pendataan bangunan yang masuk kawasan rawan longsor
---	----	----	------	----	---	-----	---	-----------	------------	---	-----	---	-----------	------------	---

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Bpp	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,21 nilai	3.750.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Bpp	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,21 nilai	3.750.000.000	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/ Kota	Bpp	Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	60%	1.100.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/ Kota	Bpp	Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	60%	1.100.000.000	
1	03	12	2.02	01	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.500.000.000	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.500.000.000	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	6 kegiatan	400.000.000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	6 kegiatan	400.000.000	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Bpp	Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	92%	380.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Bpp	Persentase Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	92%	380.000.000	
					Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bpp	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	30 Layanan	30.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bpp	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	30 Layanan	30.000.000	
1	03	12	2.03	01	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Bpp	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	600 dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Bpp	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	600 dokumen	50.000.000	
1	03	12	2.03	02	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Bpp	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 sistem informasi	300.000.000	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Bpp	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 sistem informasi	300.000.000	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Bpp	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	93%	470.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Bpp	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	93%	470.000.000	

1	03	12	2.04	01	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Bpp	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	365 dokumen	470.000.000	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Bpp	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	365 dokumen	470.000.000
---	----	----	------	----	---	-----	--	-------------	-------------	---	-----	--	-------------	-------------

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Bpp	Persentase Luas Tanah yang Sudah Dimanfaatkan	90%	400.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Bpp	Persentase Luas Tanah yang Sudah Dimanfaatkan	90%	400.000.000		
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Bpp	Persentase Rekomendasi IMTN yang Diterbitkan	90%	400.000.000	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Bpp	Persentase Rekomendasi IMTN yang Diterbitkan	90%	400.000.000		
2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Bpp	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	220 dokumen	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Bpp	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	220 dokumen	400.000.000		
TOTAL RANCANGAN AWAL RKP									99.982.154.000	TOTAL PAGU HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					99.982.154.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

Tabel T.C-32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Balikpapan**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat.

Tema RKPD 2025 :

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Arah Kebijakan Prioritas RKP 2025 :

- 1) Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- 2) Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
- 3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Adapun tema dan prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

Tema Pembangunan : **“Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”.**

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur :

1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya;
4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar;
5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin;

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik;
8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN..

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 tidak mendukung secara langsung prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan pertanahan dan urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun rencana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada Tahun 2025, salah satunya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyesuaian fungsi kawasan Kota Balikpapan dengan melakukan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan sebagai tindak lanjut telah dilakukannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan, penyelesaian pengadaan tanah embung aji raden untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku melalui Sumber Air Baku Aji Raden dengan dibangunnya Embung Aji Raden oleh Badan Wilayah Sungai IV Provinsi Kalimantan Timur serta melaksanakan penataan kawasan terintegrasi melalui penataan bangunan dan lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Formulasi	Capaian Tahun Sebelumnya (2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah)	Survei Pelayanan Administrasi Pertanahan	88,86%	81,5%
		Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	Luas lahan yang dibebaskan / luas lahan yang dibutuhkan x 100%	62,96%	72,65%
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	luas lahan yang telah sesuai pemanfaatan ruang / luas lahan keseluruhan yang terbangun x 100%	89,74%	89,60%
		Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	Jumlah kawasan yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan / jumlah dokumen perencanaan kawasan pada penataan bangunan dan lingkungan yang disusun/ ditetapkan x 100%	20%	27%
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	Nilai perhitungan LKE	29,38	28

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana akhir pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, kemudian disempurnakan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023.

Dalam perumusan program dan kegiatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang mendukung Misi ke-4 dari visi Kepala Daerah Kota Balikpapan yakni : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan.
2. Mempertimbangkan beberapa isu strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu :
 - Era industri 4.0 sebagai bentuk transformasi digital tata kelola dan layanan pemerintah, agar lebih efektif, efisien dan responsif;
 - Mendukung Balikpapan sebagai kota Penyangga Ibu Kota Nusantara, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melakukan peninjauan kembali terhadap RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Balikpapan melalui tahapan penyusunan peta dasar yang dilaksanakan mulai tahun 2025 dan dukungan infrastruktur penataan kawasan terintegrasi melalui penataan bangunan dan lingkungan.
3. Capaian target indikator kinerja pada beberapa program dan kegiatan untuk mendukung sasaran prioritas Kepala DPPR.

a.Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah program dan kegiatan

Dalam rangka melaksanakan fungsi tugas urusan penataan ruang dan pertanahan, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang akan melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan deskripsi sebagai berikut:

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penataan bangunan dan lingkungannya	1. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 2. Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 3. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 4. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
2	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	5. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	7. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 9. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 10. Sistem Informasi Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	11. Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21. Fasilitasi Kunjungan Tamu 22. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	12. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 32. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
5	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	13. Penerbitan Izin Membuka Tanah	33. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

2. Penyebaran, kelompok program dan kegiatan

Penyebaran kelompok program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai berikut:

- ✓ urusan penataan bangunan dan lingkungan: Jl. A. Yani, Stadion Batakan, Jl. Letjend Suprpto, Batu Ampar, Gerbang Utara, dan Kawasan Revitalisasi Sudirman
- ✓ Urusan penataan ruang: seluruh kecamatan di Kota Balikpapan
- ✓ Urusan pertanahan: Embung Aji Raden, Jalan Masuk ITK, Penataan Simpang Muara Rapak dan Perangkat Daerah yang membutuhkan fasilitasi tanah
- ✓ Urusan Sekretariat: seluruh pegawai ASN dan Non ASN DPPR

3. Pendanaan Indikatif

Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sesuai dengan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 pada format tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG						130.417.200.000,00								98.829.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						28.840.071.000,00							15.855.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						28.840.071.000,00							15.855.000.000,00		
1.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	31 %			31 %	22.923.737.000,00						31 %	13.150.000.000,00		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTBL yang ditetapkan	-			40 %	22.923.737.000,00			-	-	Kota Balikpapan	-	13.150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan															
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kota Balikpapan		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya															
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				6 Kawasan	20.092.737.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan Mewujudka n Pemerata an Infrastru ktur yang berkualitas	Kota Balikpapan		10.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan</i>				4 Dokumen	1.589.210.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kota Balikpapan		1.800.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	1.191.790.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan		1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	5.916.334.000,00						-	2.705.000.000,00	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.639.000.000,00					Kota Balikpapan	-	1.800.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1.239.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kota Balikpapan		1.200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat</i>				6 Kegiatan	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kota Balikpapan		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang</i>	-			93 %	3.807.334.000,00					-	-	600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</i>				1 Dokumen	2.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>				400 Dokumen	1.034.334.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				1 Sistem Informasi	573.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah</i>	-			94 %	470.000.000,00			-	-	-	-	505.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan														
			<i>Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan</i>				365 Dokumen	470.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		505.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						101.577.129.000,00							82.974.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						101.577.129.000,00							82.974.000.000,00	
1.	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	83 nilai			83 nilai	12.886.872.575,00						83 nilai	12.124.000.000,00	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen Pelaporan SAKIP yang Mencakup Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			1 Dokumen	57.100.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	57.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			83 nilai	9.072.000.000,00			-	-	-	-	9.072.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	9.072.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.072.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			83 nilai	628.267.300,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	78.267.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				46 Orang	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			83 nilai	1.311.629.500,00			-	-	-	-	980.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	293.661.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	455.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	73.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	24.468.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				150 Laporan	450.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			83 nilai	252.237.225,00			-	-	Pegawai DPPR	-	158.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	158.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPPR		158.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	96.237.225,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPPR		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			83 nilai	853.582.000,00			-	-	-	-	1.111.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	44.999.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				36 Laporan	778.583.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.011.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			83 nilai	712.056.550,00			-	-	-	-	720.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	72.598.650,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		420.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	579.775.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	59.882.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	76,44 %			76,44 %	88.370.256.425,00						76,44 %	70.400.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR	-			79,86 %	88.370.256.425,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Tanah di Kota Balikpapan	-	70.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				2 Dokumen	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Tanah di Kota Balikpapan		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	87.970.256.425,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tanah di Kota Balikpapan		70.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
3.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	91 %			91 %	320.000.000,00						91 %	450.000.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	-			91 %	320.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-	-	450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				220 Dokumen	320.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	-		450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
J U M L A H								130.417.200.000,00							98.829.000.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

RENJA TAHUN 2025

SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
					Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
2.10.01.2.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	38 orang/ bulan	9.072.000.000	
2.10.01.2.05.01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bpp	2 unit	20.000.000	
2.10.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bpp	2 paket	40.000.000	
2.10.01.2.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	31 orang	310.000.000	
2.10.01.2.06.01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bpp	1 paket	10.000.000	

2.10.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp	6 paket	200.000.000	
2.10.01.2.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bpp	2 paket	40.000.000	
2.10.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bpp	7 paket	298.000.000	
2.10.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bpp	3 paket	70.000.000	
2.10.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bpp	2 dok.	6.000.000	
2.10.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	2 laporan	24.468.000	
2.10.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	140 laporan	400.000.000	
2.10.01.2.07.01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bpp	4 unit	436.686.000	
2.10.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bpp	5 unit	30.000.000	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2.10.01.2.08.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bpp	1 laporan	45.000.000	
2.10.01.2.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp	1 laporan	30.000.000	
2.10.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bpp	36 laporan	1.011.000.000	
2.10.01.2.09.01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bpp	18 unit	420.000.000	
2.10.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bpp	10 unit	175.000.000	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2.10.01.2.08.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bpp	30 unit	60.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.03.09.2.01.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANN YA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Bpp	4 dokume n	2.000.000.000	
1.03.09.2.01.00 07			pengawasan Penataan Bangunan dan lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bpp	1 Dokume n	50.000.000,00	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.03.09.2.01.0 008	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya, kawasan Pariwisata, kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Startegi Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sisem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya yang diminta	Bpp	6 kawasan	20.092.737.000,0 0	
1.03.09.2.01.0 009			Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Startegi Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan, Kawasan Nasional dan mendapatkan Supervisi dalam penataan	Bpp	4 Dokume n	1.589.210.000,00	

1.03.09.2.01.0 010	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yan Disusun di Kawasan Startegis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Startegis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	4 Dokume n	1.191.790.000,00	
-----------------------	---	--	---	--	-----	------------------	------------------	--

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.12.2.02.00 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Bpp	1 Dokume n	1.239.000.000	
1.03.12.2.02.00 08			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung jawab Masyarakat	Bpp	6 kegiatan	400.000.000	
1.03.12.2.03.00 03			Koordinasi Penyelenggaraann Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordnasi penyelenggaraan penataan ruang	Bpp	1 Dokume n	2.200.000.000	
1.03.12.2.03.00 05			Pelaksana Sinkronis Program Pemanfatan Ruang	Jumlah Dokumen sinkronisasi program pemanfataatan ruang	Bpp	400 Dokume n	1.034.334.000	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.12.2.03.00 07	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kordinasasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlaj sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Bpp	1 Sistem Informasi	537.000.000	
1.03.12.2.04.00 10			Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil penilaian kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Bpp	365 dokumen	470.000.000	
2.10	URUSAN PERTANAHAN							
2.10.04.2.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bpp	2 Dokumen	57.100.000	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
2.10.01.2.02.00 01	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	39 Orang/Bu lan	9.072.000.000	
2.10.01.2.05.00 02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bpp	2 Paket	78.267.300	
2.10.01.2.05.00 11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Bpp	46 Orang	550.000.000	
2.10.01.2.06.00 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bpp	1 Paket	15.000.000	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
2.10.01.2.06.00 02	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp	3 Paket	293.661.500	
2.10.01.2.06.00 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bpp	7 Paket	455.000.000	
2.10.01.2.06.00 05			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	Bpp	1 Paket	73.500.000	
2.10.01.2.06.00 08			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bpp	12 Laporan	24.468.000	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
2.10.01.2.06.00 09	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	150 Laporan	450.000.000	
2.10.01.2.07.00 01			Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bpp	1 Unit	156.000.000	
2.10.01.2.07.00 02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bpp	3 Unit	96.237.225	
2.10.01.2.08.00 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bpp	2 Laporan	44.999.000	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
2.10.01.2.08.00 03	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp	1 Laporan	30.000.000	
2.10.01.2.08.00 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bpp	36 Laporan	778.583.000	
2.10.01.2.09.00 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	1 Unit	72.598.650	
2.10.01.2.09.00 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bpp	34 Unit	579.775.400	

KODE	Program	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
2.10.01.2.09.00 06	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bpp	50 Unit	59.682.500	
2.10.05.2.01.00 01	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penepatan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penepatan Penerima Santunan Tanah	Bpp	2 Dokumen	400.000.000	
2.10.05.2.01.00 02			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	2 Dokumen	87.970.256.425	

2.10.09.2.01.00 01	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Bpp	220 Dokumen	320.000.000	
-----------------------	---	----------------------------------	---	--	-----	----------------	-------------	--

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka peningkatan kualitas rencana kerja (Renja) dan pembangunan serta keselarasan dengan program prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki inovasi dalam urusan Penataan Ruang yang tertuang sesuai gambar dibawah ini:

Gambar 5.1

Inovasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA BALIKPAPAN**

INOVASI DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

01 Penguatan simpul jaringan informasi geospasial dan peta 3 dimensi kota Balikpapan

02 Integrasi layanan tata ruang dengan OSS

03 Percepatan layanan administrasi pertanahan

SATU PETA, SATU DATA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Berkeadilan | Kompeten
komitmen | loyal | inovatif | transparan

**#bangga
melayani
bangsa**

Instagram: [dppr_bpn](#) | Website: [dppr.balikpapan.go.id](#)

BAB VI

PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2. Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

K. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun sebagai penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, Renja yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya. Renja juga harus mengantisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta mempertimbangkan hasil penjangkauan aspirasi masyarakat.

Periode penyusunan Renja DLH disusun untuk satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2025 yang baik, maka perlu disusun Renja DLH yang sistematis dan akuntabel.

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2025 di Kota Balikpapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
14. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan;
17. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
18. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, program pembangunan, sasaran-sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai DLH Kota Balikpapan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 tahun anggaran.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG, Mengemukakan gambaran umum tentang Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2025;
- 1.2 LANDASAN HUKUM, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DLH serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH;
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025;
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja DLH sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun-tahun sebelumnya;
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DLH, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH, memuat uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan DLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DLH, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DLH, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan;
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPDP TAHUN 2025, memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPDP untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DLH dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DLH;

- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DLH.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

- 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DLH;
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja DLH didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DLH;
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH

Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2023. Kinerja DLH mengacu pada target pencapaian RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH merupakan indikator penting mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari tiga indikator yaitu : Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA).

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2023 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2023), adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 50%, terealisasi sebesar 50%.

1.1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah dokumen RPPLH yang menjadi acuan lingkungan hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen

1.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

1.2. Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah dokumen KLHS yang menjadi acuan lingkungan hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 3 dokumen.

1.2.1. Sub Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen.

1.2.2. Sub Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator Program :

Persentase RTH yang dikelola

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10.59%, terealisasi sebesar 11.00%.

2.1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan :

Luasan tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6802,43 Hektar, terealisasi sebesar 6802 hektar.

2.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya

Indikator Sub Kegiatan :

Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 309,22 Ha, terealisasi sebesar 309 ha.

2.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator Sub Kegiatan :

Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 390,46 ha, terealisasi sebesar 390 ha.

2.1.4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 67% dari target yang ditetapkan sebesar 15 orang, terealisasi sebesar 10 orang.

3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

3.1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

3.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 30 dokumen, terealisasi sebesar 30 dokumen.

4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Presentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

4.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah akumulasi upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 23 kegiatan, terealisasi sebesar 23 kegiatan.

4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 20 dokumen, terealisasi sebesar 20 dokumen.

4.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

4.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

4.2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah upaya penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 9 kegiatan, terealisasi sebesar 9 kegiatan.

4.2.1. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 laporan, terealisasi sebesar 6 laporan.

4.2.2. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 titik, terealisasi sebesar 3 titik.

4.3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah upaya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 kegiatan, terealisasi sebesar 4 kegiatan.

4.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau sector lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen.

4.3.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 3 dokumen.

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator Program :

Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

5.1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 26 Penghargaan, terealisasi sebesar 26 Penghargaan.

5.1.1 Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 entitas, terealisasi sebesar 4 entitas.

6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Indikator Program :

persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 44,74%, terealisasi sebesar 44,80%.

6.1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Indikator Kegiatan :

Jumlah pelaku usaha yang melaporkan limbah B3

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 20 usaha/kegiatan, terealisasi sebesar 18 usaha/kegiatan.

6.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10 dokumen, terealisasi sebesar 10 dokumen.

6.2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengumpulan limbah B3

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 usaha/kegiatan, terealisasi sebesar 3 usaha/kegiatan.

6.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengolahan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Penolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 3 dokumen.

7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator Program :

Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 29,27%, terealisasi sebesar 29%,

7.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 120 kegiatan, terealisasi sebesar 120 kegiatan.

7.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85 dokumen, terealisasi sebesar 85 dokumen.

7.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 4 Orang, terealisasi sebesar 2 Orang.

7.1.3. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 35 laporan, terealisasi sebesar 35 laporan.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator Program :

Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

8.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah akumulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 62 Kegiatan, terealisasi sebesar 62 Kegiatan.

8.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat/Institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 32 lembaga, terealisasi sebesar 32 lembaga.

8.1.2. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 30 dokumen, terealisasi sebesar 30 dokumen.

8.1.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 150 Orang, terealisasi sebesar 150 Orang.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Program :

Presentase pengelolaan persampahan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 101% dari target yang ditetapkan sebesar 99%, terealisasi sebesar 100%.

9.1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Indikator Kegiatan :

Jumlah sampah yang tertangani

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 83% dari target yang ditetapkan sebesar 174106,6 Ton, terealisasi sebesar 174107 Ton.

9.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

9.1.2. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah di proses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99% dari target yang ditetapkan sebesar 140293,9 ton, terealisasi sebesar 138858 ton.

9.1.3. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (TPAS Manggar)

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah di proses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99% dari target yang ditetapkan sebesar 140293,9 ton, terealisasi sebesar 138858 ton.

9.1.4. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 8 kelompok, terealisasi sebesar 8 kelompok.

9.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 15 unit, terealisasi sebesar 15 unit.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 77,66 Nilai, terealisasi sebesar 77,66 Nilai.

10.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai SAKIP

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 72 Nilai, terealisasi sebesar 72 Nilai.

10.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 Laporan, terealisasi sebesar 1 Laporan.

10.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 Laporan, terealisasi sebesar 2 Laporan.

10.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 78,59 Nilai, terealisasi sebesar 79 Nilai.

10.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75 orang, terealisasi sebesar 75 orang.

10.3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan administrasi retribusi perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 82,06 Nilai, terealisasi sebesar 82 Nilai.

10.3.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

10.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 78,93 Nilai, terealisasi sebesar 78,93 Nilai.

10.4.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 40% dari target yang ditetapkan sebesar 20 orang, terealisasi sebesar 8 orang

10.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan administrasi umum perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75,11 nilai, terealisasi sebesar 75,11 nilai.

10.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5 Paket, terealisasi sebesar 5 Paket.

10.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket peralatan dan jumlah perlengkapan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 8 paket, terealisasi sebesar 8 paket.

10.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 paket, terealisasi sebesar 6 paket.

10.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 paket, terealisasi sebesar 4 paket.

10.5.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 140 laporan, terealisasi sebesar 140 laporan.

10.5.6. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

10.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 72,32 nilai, terealisasi sebesar 72,32 nilai.

10.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket mebel yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10 unit, terealisasi sebesar 10 unit.

10.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 unit, terealisasi sebesar 2 unit.

10.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 79,63 nilai terealisasi sebesar 79,63 nilai.

10.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 laporan, terealisasi sebesar 2 laporan.

10.7.2. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 laporan, terealisasi sebesar 6 laporan.

10.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 8 laporan, terealisasi sebesar 8 laporan.

10.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 73,37 nilai, terealisasi sebesar 73,37 nilai.

10.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 71 unit, terealisasi sebesar 71 unit.

10.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100 unit, terealisasi sebesar 100 unit.

10.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 unit, terealisasi sebesar 1 unit.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Capaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Lingkungan Hidup.

Hasil analisis kinerja pelayanan DLH disajikan dalam tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terlampir di bawah ini:

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	48,91	75%
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,12	89,98	101%
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,42	54,50	115%
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,18	79,21	97,57%
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	72	*70,85	*99,8%

Sumber : DLH

Catatan : *angka belum rilis, menggunakan nilai Tahun 2022

Hasil analisis anggaran DLH disajikan dalam tabel 2.2. Realisasi Anggaran DLH Tahun 2023 terlampir di bawah ini :

Tabel 2.2.

Realisasi Anggaran DLH Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran Murni TA.2023	Anggaran perubahan TA.2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Anggaran TA.2023	Persentase Realisasi Anggaran TA.2023
				I	II	III	IV		
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1,454,998,700	1,454,998,700	23,619,974	41,494,787	326,476,956	1,002,874,843	1,394,466,560	96%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	58,180,667,500	52,341,436,966	3,845,744,416	6,830,087,292	8,673,721,989	28,092,301,906	47,441,855,603	91%
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	124,602,950	124,602,950	-	20,430,800	30,205,000	55,269,500	105,905,300	85%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,532,331,650	2,552,791,650	33,759,636	189,317,391	393,379,285	1,792,965,029	2,409,421,341	94%
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	247,519,700	247,519,700	6,600,000	16,153,300	21,780,000	195,723,000	240,256,300	97%
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	580,000,000	580,000,000	4,717,911	14,486,585	29,054,535	36,166,610	84,425,641	15%
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	194,017,100	335,097,100	7,849,450	39,868,400	59,373,300	158,238,618	265,329,768	79%
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	569,997,700	1,565,589,300	26,400,000	46,551,900	401,924,280	1,053,021,904	1,527,898,084	98%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	76,794,826,841	80,359,644,841	13,512,802,831	21,013,985,055	17,204,263,034	24,966,749,546	76,697,800,466	95%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	19,614,822,800	19,982,635,334	3,281,518,474	4,720,141,973	3,891,368,513	4,999,987,856	16,893,016,816	85%
	TOTAL	159,293,784,941	159,544,316,541	20,743,012,692	32,932,517,483	31,031,546,892	62,353,298,812	147,060,375,879	92%

Sumber : DLH 2024

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH

Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun rencana kerja Tahun 2025, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan serta merujuk pada data DIKPLHD, Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH adalah sebagai berikut :

- a. Alih Fungsi Lahan Dampak IKN
 - Peningkatan Limpasan air hujan;
 - Penurunan tutupan lahan dari Vegetasi;
 - Erosi dan Sedimentasi;
 - Penurunan kualitas air permukaan;
 - Tanah Longsor;
 - Kerusakan Mangrove dari kegiatan pembukaan dan alih fungsi lahan.
- b. Meningkatnya Timbulan Sampah dampak IKN dan Kegiatan Investasi
 - Peningkatan volume timbulan sampah yaitu dari 187.875 ton/tahun pada tahun 2022 menjadi 193.038 ton/tahun pada 2023.
- c. Meningkatnya Kejadian Bencana (Banjir dan Tanah Longsor)
 - Pengupasan Lahan yang Tidak Terkendali, Baik yang Berizin Apalagi Yang Tidak Berizin.
 - Aktivitas pengupasan lahan, baik yang berizin maupun tidak diidentifikasi sebagai penyebab utama dari tingginya sedimentasi yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya beberapa titik lokasi banjir. Di samping itu, minimnya pengendalian pemanfaatan ruang pada beberapa wilayah daerah aliran sungai (DAS) di Balikpapan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir yang kerap melanda Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir.
 - Curah Hujan yang Tinggi.
 - Berkurangnya kapasitas drainase.
 - Penyebab lain terjadinya banjir adalah berkurangnya kapasitas drainase sebagai akibat dari sedimentasi dan penumpukan sampah. Berkurangnya kapasitas drainase dapat mengurangi kemampuan untuk mengalirkan aliran permukaan sesuai dengan perhitungan teknis pada saat drainase terbangun.
 - Pemanfaatan Lahan pada Kontur Berbukit.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD DLH Tahun 2025 dapat dijelaskan dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD DLH Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21,747,291,518
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	210,000,000
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5,655,783,500
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	79,112,130,000
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	200,000,000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	725,764,950
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,187,916,045
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	770,000,000
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	191,172,570
10	Program Pengelolaan Persampahan	88,080,821,417
	TOTAL PAGU	197,880,880,000

Sumber : DLH 2024

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari hasil forum OPD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 usulan yang masuk sudah terakomodir di rencana program dan kegiatan yang ada di Tahun 2025 dan ada beberapa usulan yang masuk namun Dinas Lingkungan Hidup bukan sebagai pengampu.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Dengan mengacu pada Misi Presiden tahun 2020-2024 dan juga dua pilar dari KLHK di atas, maka dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan KLHK, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas telah diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG's*). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitannya dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK diatas, maka rumusan sasaran strategis KLHK adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023 mempunyai peran penting. Peran penting Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung komitmen nasional untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26% dari Business as Usual (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 30% pada tahun 2030 dari tingkat emisi pada tahun tersebut, merupakan tujuan paling strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Mendukung upaya pemerintah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sebagai satuan kerja dengan memerhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan lima tahun.

ke depan, menetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni: Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline, dengan sasaran jangka menengahnya yaitu Menurunnya emisi gas rumah kaca, dengan indikator sasaran Penurunan Emisi (ton Co₂ eq Juta).

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu dilaksanakan kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan target pengurangan sampah sebesar 30% dan target penanganan sampah sebesar 70% hingga tahun 2025.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan membantu Wali Kota Balikpapan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi keempat, yaitu : **Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan.**

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran DLH Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Indeks Kualitas Lahan	1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	2. Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air
		3. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah partisipasi masyarakat	4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH - persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan
4. Meningkatkan Kebersihan Kota	persentase kenaikan tingkat pengelolaan sampah	5. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Persentase Pengurangan Sampah
			- Persentase Penanganan Sampah

Sumber : DLH

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan DLH adalah sekumpulan rencana kerja suatu DLH, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah.

Adapun rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2025		2026	
			K	Rp	K	Rp
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	persen	87.50 %	210,000,000	100.00%	190,000,000

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan lingkungan hidup	Dokumen	1	175,000,000	1	150,000,000
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		-		-
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	175,000,000	1	150,000,000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan lingkungan hidup	dokumen	1	35,000,000	1	40,000,000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen		-		-
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	dokumen	1	35,000,000	1	40,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	persen	10.63	79,112,130,000	10.65	38,950,000,000
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2025		2026	
			K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota	hektar	6,802.43	79,112,130,000	6,802.43	38,950,000,000
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	275,000,000	1	300,000,000
Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	309.22	7,300,000,000	309.22	6,500,000,000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	392.46	71,387,130,000	392.46	32,000,000,000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	20	150,000,000	20	150,000,000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	persen	100	191,172,570	100	350,000,000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	100	191,172,570	100	350,000,000

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	dokumen	40	191,172,570	45	350,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan	Persen	100	5,655,783,500	100	3,475,000,000
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	23	1,269,783,500	23	800,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	20	383,441,500	20	250,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	586,342,000	3	250,000,000
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2025		2026	
			K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1	300,000,000	1	300,000,000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan	9	2,486,000,000	9	2,200,000,000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Laporan	6	1,750,000,000	6	2,000,000,000
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	3	736,000,000	3	200,000,000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan	5	1,900,000,000	5	475,000,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	2	100,000,000	2	125,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	3	1,800,000,000	3	350,000,000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	persen	100	770,000,000	100	400,000,000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penghargaan	30	770,000,000	30	400,000,000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	4	770,000,000	4	400,000,000
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2025		2026	
			K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	persen	65.79	200,000,000	76.32	350,000,000
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku Usaha yang melaporkan Limbah B3	usaha/kegiatan	20	200,000,000	20	100,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	20	200,000,000	20	100,000,000
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengumpulan limbah B3	usaha/kegiatan	3	-	3	250,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka	Dokumen	3	-	3	250,000,000

Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan dengan Kewenangannya					
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	persen	32.93	725,764,950	34.15	575,000,000
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	usaha/ kegiatan	135	725,764,950	140	575,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	90	183,441,500	90	225,000,000
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2025		2026	
			K	Rp	K	Rp
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang	4	50,000,000	4	50,000,000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	45	492,323,450	50	300,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	persen	100	1,187,916,045	100	1,075,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kegiatan	62	1,187,916,045	62	1,075,000,000

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	32	350,000,000	32	250,000,000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	30	362,916,045	30	450,000,000
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Orang	200	475,000,000	200	375,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	persen	100	88,080,821,417	100	93,875,000,000
Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	17586 5.3	88,080,821,417	17586,2 5	93,520,000,000
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	5	200,000,000	5	500,000,000
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2025		2026	
			K	Rp	K	Rp
Pengurangan Sampah melalui Pendaauran Ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Laporan	4	600,000,000		
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	14656 7.1		4	500,000,000
Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	ton	14029 3,9	14,078,031,917	148407	90,000,000,000
Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	14472 7,5	65,202,789,500	11	350,000,000
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	11	-	2	90,000,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	2	-	1	80,000,000
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	dokumen	1	-	-	-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	100	8,000,000,000	100	2,000,000,000
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2025		2026	
			K	Rp	K	Rp
Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	dokumen	1	-	1	40,000,000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/ Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	1	-	1	40,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	kegiatan	3	-	3	315,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	4	-	1	40,000,000

Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	4	-	4	175,000,000
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	1	100,000,000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78.66	21,747,291,518	78.66	22,666,000,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP	Nilai	73	102,702,090	77.65	105,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		102,702,090	1	50,000,000
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2025		2026	
			K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	-	1	20,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	-	2	35,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	79.59	13,475,000,000	80.09	14,150,905,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	13,475,000,000	80	14,150,905,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi retribusi perangkat daerah	Nilai	83.06	1,750,000,000	83.56	1,800,000,000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	1,750,000,000	1	1,800,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	79.93	200,000,000	80.43	213,750,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			85	63,750,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	25	200,000,000	30	150,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	76.11	1,813,196,118	76.61	1,473,845,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	15,000,000	5	20,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	625,033,718	10	250,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dokumen	6	275,000,000	6	300,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	120,317,500		
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2025		2026	
			K	Rp	K	Rp
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	70,344,900	4	60,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	550,000,000	155	658,845,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	157,500,000	3	185,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	73.32	225,000,000	73.82	1,060,000,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			1	335,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit			1	450,000,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	unit	6	830,100,000		

Dinas Jabatan	disediakan					
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	20	130,888,275	20	125,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	153,913,000	2	150,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80.63	2,079,745,135	81.13	1,967,500,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	15,000,000	2	17,500,000
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	623,520,000	6	650,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	1,441,225,135	8	1,300,000,000
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET			
			2025		2026	
			K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	74.37	1,211,746,900	74.87	1,895,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	71	683,816,000	71	1,550,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125	116,615,000	150	145,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	411,315,900	1	200,000,000
TOTAL ANGGARAN			197,880,880,000		161,906,000,000	

Sumber : DLH

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran.

Dalam prosesnya, Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Rencana Strategis (RENSTRA), serta mempertimbangkan isu strategis lingkungan hidup yang mengemuka dan target pencapaian Jakstrada Kota Balikpapan Tahun 2024.

Renja DLH ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025. Dengan harapan Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup .

L. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonis dengan Bappeda dan Pemangku Kepentingan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun menjabarkan visi dan misi

pembangunan Kota Balikpapan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota, Oleh karena itu penyusunan RKPD Tahun 2025 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen RPJMD Kota Balikpapan sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan;
28. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor: 01 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
33. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor: 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
34. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor: 188-46/08/Disdukcapil/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
35. Keputusan Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 188.46/22/Disdukcapil/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 188.46/09/Disdukcapil Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah untuk mengetahui arah pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk usulan program dan kegiatan skala prioritas yang memuat rencana kerja tahunan, kerangka

pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan Kota Balikpapan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan Kota Balikpapan ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RKA) dan anggaran tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RKA) dan anggaran tahun 2025, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan hasil dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun Sebelumnya.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Disdukcapil
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Disdukcapil
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun Sebelumnya dan Renstra Disdukcapil

Evaluasi hasil capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2023). Dengan membandingkan target dan realisasi Kinerja tahun 2023 capaian kinerja dapat dijabarkan bahwa program prioritas yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 terdiri dari 3 program prioritas dan 1 program penunjang. Program yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dengan target 89.78% realisasi 91.63% dengan capaian 102.06% dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dengan target 100% realisasi 100% dengan capaiannya 100%
- b. Cakupan Penerbitan KTP dengan target 99.34% realisasi 99.71% dengan capaian 100.37%
- c. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan target 70% realisasi 75.18% dengan capaian 102.40%

2. Program Pencatatan Sipil :

Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil dengan target 96.53% realisasi 99.82% dengan capaian 103.41% dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun dengan target 98.05% realisasi 99.64% dengan capaian 191.62%.
- b. Cakupan Penerbitan akta Kematian dengan target 95% realisasi 95.11 dengan capaian 100.12%.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik dengan penjabaran sebagai berikut :

- Persentase Pengolahan Data Administrasi Kependudukan secara elektronik dengan target 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100%.

4. Program Kegiatan/Non urusan (program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten Kota).

Program ini dengan indikator kinerja IKM Perangkat Daerah dengan target nilai 79.00 realisasi 84.16 dengan capaian 106.53%.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil tahunan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2023 pagu Belanja operasional (APBD Murni TA.2023) sebesar Rp 15.281.325.000,- terdiri dari Belanja Pegawai Rp 7.201.452.000,- belanja barang jasa sebesar Rp 6.151.068.900,- belanja hibah Rp 879.047.400,- dan belanja modal sebesar Rp 1.049.756.700,-.

APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp 15.614.325.000,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 7.201.452.000,- Belanja barang dan jasa sebesar Rp 6.110.277.400,- belanja hibah Rp 879.047.400,- dan Belanja modal sebesar Rp 1.450.548.200,-.

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada akhir tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		MURNI	PERUBAHAN	JUMLAH	(%)
A.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	87.100.000	111.724.500	81.876.600	73,28%
I	KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	87.100.000	111.724.500	81.876.600	73,28%
	1 SUB KEGIATAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	87.100.000	111.724.500	81.876.600	73,28%
B.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	95.700.000	88.000.000	83.260.000	94,61%
II	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	95.700.000	88.000.000	83.260.000	94,61%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		
		MURNI	PERUBAHAN	JUMLAH	(%)	
	2	SUB KEGIATAN SOSIALISASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL	95.700.000	88.000.000	83.260.000	94,61%
C.		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	996.925.000	996.903.000	887.829.014	89,06%
III		KEGIATAN PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA BASE KEPENDUDUKAN	656.175.000	656.175.000	586.942.716	89,45%
	3	SUB KEGIATAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	656.175.000	656.175.000	586.942.716	89,45%
IV		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	340.750.000	340.728.000	300.886.298	88,31%
	4	SUB KEGIATAN FASILITAS TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	340.750.000	340.728.000	300.886.298	88,31%
D.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.101.600.000	14.444.697.500	13.200.993.711	91,39%
V		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.201.452.000	7.201.452.000	6.820.473.521	94,71%
	5	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.201.452.000	7.201.452.000	6.820.473.521	94,71%
VI		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	20.350.000	22.779.000	22.725.000	99,76%
	6	SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	20.350.000	22.779.000	22.725.000	99,76%
VII		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.519.710.800	5.093.833.500	4.644.252.517	91,17%
	7	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000	5.000.000	4.605.390	92,11%
	8	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	775.280.000	1.196.126.700	1.149.499.526	96,10%
	9	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.219.697.700	2.137.184.600	1.792.361.528	83,87%
	10	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGADAAN	1.120.295.400	1.120.295.400	1.072.422.240	95,73%
	11	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28.070.000	8.070.000	6.486.000	80,37%
	12	SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	18.750.000	24.539.100	17.278.000	70,41%
	13	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	352.617.700	602.617.700	601.599.833	99,83%
VIII		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	447.800.000	427.469.600	397.859.784	93,07%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		
		MURNI	PERUBAHAN	JUMLAH	(%)	
	14	SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	262.800.000	260.540.000	244.430.284	93,82%
	15	SUB KEGIATAN PENGADAAN MEBEL	145.000.000	129.723.000	125.929.500	97,08%
	16	SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	40.000.000	37.206.600	27.500.000	73,91%
IX		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN DAERAH	1.387.562.200	1.184.136.600	1.017.045.029	85,89%
	17	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	80.000.000	80.000.000	48.247.600	60,31%
	18	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	204.000.000	98.580.000	83.306.361	84,51%
	19	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.103.562.200	1.005.556.600	885.491.068	88,06%
X		KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	524.725.000	515.026.800	298.637.860	57,98%
	20	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	409.725.000	415.026.800	261.945.260	63,12%
	21	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN MEBEL	15.000.000	-	-	0,00%
	22	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	100.000.000	100.000.000	36.692.600	36,69%
4 PROGRAM, 10 KEGIATAN DAN 22 SUB KEGIATAN TOTAL ANGGARAN			15.281.325.000	15.641.325.000	14.253.959.325	91,13%

Tabel 2.2.
Penjabaran Capaian Kinerja Renja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	79,00	14.444.697.500	84,16	13.200.993.711	106,53%	91,39%	Capaian sangat tinggi (106.53%) Alasan : kepuasan intern menjadi pokok sarana prasarana penting dalam mendukung pelayanan
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	81,75	7.201.452.000	84,06	6.820.473.521	102,83%	94,71%	Capaian sangat tinggi (102,83%) Alasan : penilaian SKM internal tentang administrasi keuangan telah sesuai peraturan yang ditentukan dan pencairan tepat waktu
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	7.201.452.000	43	6.820.473.521	100,00%	94,71%	Tercapai 100%
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Nilai	83,50	22.779.000	84,65	22.725.000	101,38%	99,76%	Capaian sangat tinggi (101,38%) Alasan : Capaian tercapai dan capaian termasuk kategori sangat baik. Penilaian SKM internal tentang layanan administrasi kepegawaian yang meliputi KGB, Kenaikan pangkat, dll
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	22.779.000	1	22.725.000	100,00%	99,76%	Tercapai 100%

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	81,00	5.093.833.500	84,33	4.644.252.517	104,11%	91,17%	Capaian sangat tinggi (104.11%) Alasan : Survei internal kepuasan pegawai sangat tinggi karena terpenuhinya kebutuhan logistik kantor dan layanan administrasi umum kantor lainnya
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	1	4.605.390	100,00%	92,11%	Tercapai 100%

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.196.126.700	13	1.149.499.526	108,33%	96,10%	Capaian terlalu tinggi 108,33% Alasan : Dikarenakan ada penambahan pagu anggaran pada perubahan sehingga target bertambah pada DPA sehingga realisasi lebih dari target rensyra dan Pada Triwulan I - IV Sudah terealisasi 13 paket terdiri dari belanja Alat Pembersih, Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) / TV, dan Personal Computer, Power Supply, Komputer Jaringan, Peralatan Personal Computer , Peralatan Jaringan dan Peralatan Komputer Lainnya dan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dan sewa tanaman kantor
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	2.137.184.600	8	1.792.361.528	100,00%	83,87%	Capaian 100.00% Pada Triwulan I - IV Sudah terealisasi 8 paket terdiri dari belanja Alat ATK, Kertas & Cover , Tali Rafia dan Alat Listrik, dan Belanja natura & pakan, manmin rapat dan daya tahan tubuh
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan	Paket	4	1.120.295.400	4	1.072.422.240	100,00%	95,73%	Capaian 100.00% Pada Triwulan I-IV Sudah terealisasi 4 paket terdiri dari belanja Blanko KIA dan Hibah Blanko KTP-el dan penjiilidan serta belanja cetak

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	8.070.000	1	6.486.000	100,00%	80,37%	Capaian 100.00% Di Renja SIPD tidak ada Sub Kegiatan ini, Karena awalnya sub ini tidak diadakan & tidak ada anggaran, namun setelah RDP di masukkan kembali. Pada Triwulan I-IV telah direalisasikan langganan Surat Kabar setiap bulannya
1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	24.539.100	2	17.278.000	100,00%	70,41%	Capaian 100.00% Pada Triwulan I-IV terdapat pelayanan kunjungan tamu seperti makanan & snack
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	602.617.700	12	601.599.833	100,00%	99,83%	Capaian 100.00% Pada Triwulan I-IV terdapat perjalanan dinas Dalam Daerah (DD) sebanyak 31 Surat tugas dan Dinas Luar (DL) sebanyak 28 surat tugas, Realisasi lebih dari 100% dikarenakan masih adanya anggaran untuk perjalanan dinas dan adanya undangan untuk melakukan perjalanan dinas
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	79,00	427.469.600	83,74	397.859.784	106,00%	93,07%	Capaian sangat tinggi (106.00%) Alasan : Survei internal kepuasan pegawai sangat tinggi karena terpenuhinya pengadaan barang secara tepat waktu

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	260.540.000	4	244.430.284	100,00%	93,82%	Capaian 100.00% Pada Triwulan I - IV telah direalisasikan sewa kendaraan sebanyak 2 unit dan telah direalisasikan pengadaan kendaraan sebanyak 2 unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	33	129.723.000	33	125.929.500	100,00%	97,08%	Capaian 100.00% Telah direalisasikan pengadaan mebel sebanyak 13 unit kursi, 13 meja dan 7 set meja cafe
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	37.206.600	1	27.500.000	100,00%	73,91%	Tercapai 100%
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	81	1.184.136.600	84,60	1.017.045.029	104,44%	85,89%	Capaian sangat tinggi (104,44%) Alasan : Capaian telah tercapai dan capaian termasuk kategori sangat baik. Penilaian SKM internal tentang layanan penunjang urusan pemerintah daerah meliputi Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	80.000.000	2	48.247.600	100,00%	60,31%	Capaian 100.00% Pada Triwulan I sudah terealisasi belanja Materai, dan pada triwulan IV realisasi belanja pengiriman
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	98.580.000	12	83.306.361	100,00%	84,51%	Capaian 100.00% Pada Triwulan I-IV telah dilakukan pembayaran belanja tagihan Telepon, Faksimile dll yang dibayarkan setiap bulannya.
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.005.556.600	12	885.491.068	100,00%	88,06%	Capaian 100.00% Pada Triwulan I-IV ada pembayaran gaji Non PNS yang direalisasikan setiap bulannya
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Nilai	81	515.026.800	83,80	298.637.860	103,46%	57,98%	Capaian sangat tinggi (103.46%)Alasan : IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sangat mendukung operasional kantor
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	415.026.800	23	261.945.260	95,83%	63,12%	Capaian 95.83% Pada Triwulan I-IV ada pembayaran perpanjangan STNK Sebanyak 23 unit kendaraan, dan pembayaran Belanja BBM

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	-	-	0,00%	0,00%	Tidak ada anggaran pada sub kegiatan ini, dikarenakan anggaran di tarik di perubahan
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	100.000.000	22	36.692.600	84,62%	36,69%	Capaian 84,62% Telah direalisasikan pemeliharaan AC sebanyak 20 Unit dan 2 Unit CCTV, untuk mesin lainnya tidak dipelihara dikarenakan masih dalam kondisi baik
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	%	89,78%	111.724.500	91,63%	81.876.600	102,06%	73,28%	Capaian sangat tinggi (102.06%) adanya kegiatan jemput bola perekaman KTP-el ke Sekolah, Universitas dll dan pencetakan KIA serta pelayanan Drive thru pencetakan KTP-el menjadi faktor utama target terlampaui.
	Breakdown	- Cakupan penerbitan KK		100,00%		100,00%		100,00%		Cakupan penerbitan KK diambil dari jumlah KK terbit dibagi jumlah pemohon ; 957.777/957.777
		- Cakupan penerbitan KTP		99,34%		99,71%		100,37%		Cakupan penerbitan KTP diambil dari jumlah KTP El terbit dibagi Jumlah wajib KTP ; 519.599/ 521.119

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
		- Cakupan penerbitan KIA		70,00%		75,18%		107,40%		Cakupan penerbitan KIA diambil dari jumlah KIA terbit dibagi Jumlah anak (<17 Tahun) ; 160.679/ 213.726
2.1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	%	1	111.724.500	1,00	81.876.600	100,00%	73,28%	Tercapai (100%) jumlah permohonan dokumen kependudukan yang dilayani dibagi jumlah pemohon x 100% (343.038/343.038)
2.1.1	Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	3.440	111.724.500	3.201	81.876.600	93,05%	73,28%	Capaian 93.05% Permohonan pengajuan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui online dan juga adanya pelayanan jemput bola dengan anggaran didukung pada anggaran sekretariat
	Breakdown	- Jumlah penduduk non permanen yang terdata	orang	3.400	-	3.097		91,09%		
		- Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan yang diterbitkan NIK	orang	40	-	104		260,00%		Pelayanan jemput bola bagi penduduk rentan yang tidak bisa datang ke kantor Disdukcapil, maka petugas Disdukcapil mendatangi kediaman penduduk

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	%	96,53%	88.000.000	97,38%	83.260.000	100,88%	94,61%	Capaian sangat tinggi (100.88%) Dengan adanya pelayanan online masyarakat dengan mudah melakukan pengajuan permohonan dokumen pencatatan sipil
	Breakdown	- Cakupan penerbitan akta kelahiran		98,05%		99,64%		101,62%		Cakupan penerbitan akta kelahiran diambil dari jumlah akta kelahiran terbit dibagi Jumlah kelahiran ; 225.953/ 226.774
		- Cakupan penerbitan akta kematian		95,00%		95,11%		100,12%		Cakupan penerbitan akta kematian diambil dari jumlah akta kematian terbit dibagi Jumlah kematian ; 44.292/ 46.568
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil melalui layanan online	%	1	88.000.000	1,00	83.260.000	100,00%	94,61%	Tercapai (100%)Jumlah berkas permohonan penyelesaian dokumen pencapil dibagi jumlah berkas yang dimohon penyelesaiannya kali 100%
3.2.1	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	88.000.000	1	83.260.000	100,00%	94,61%	Capaian 100.00% Telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Bulan 17 Mei 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	%	100,00%	996.903.000	100,00%	887.829.014	100,00%	89,06%	Tercapai (100%) (jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola/jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola secara elektronik) x 100% ; (4/4) 1. Data agregat 2. Data hasil pelayanan online 3. Data Lampir (Lahir Mati Pindah Datang) 4. Data Capaian Akta Pencatatan Sipil
4.1	Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	%	1	656.175.000	1,00	586.942.716	100,00%	89,45%	Tercapai (100%) Jumlah data yang dimanfaatkan oleh OPD dibagi jumlah data yang ada di Disdukcapil kali 100% Telah tersusunnya dokumen LPPD, DKB Semester 2, Lap. Permintaan Data Statistik OPD, Agregat 1 dan 2, Data hasil pelayanan online (Lampid) dan data dukungan data sektoral satu Balikpapan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.1.2	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	6	656.175.000	-	586.942.716	0,00%	89,45%	Capaian belum tercapai 0.00% Dikarenakan dalam melakukan kerja sama dengan OPD lain belum bisa dilakukan dikarenakan OPD belum mampu memenuhi syarat untuk melengkapi ISO , namun dalam anggaran telah direalisasikan untuk ATK, Honorarium Narasumber, Makan & Minum Isbat Nikah, namun
4.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang di kelola	%	1	340.728.000	1,00	300.886.298	100,00%	88,31%	Tercapai (100%) Jumlah sistem informasi yang dikelola dibagi jumlah keseluruhan sistem informasi Disdukcapil 1. Layanan online dan monev layanan online 2. Siak 3. Perekaman dan pencetakan ktpel 4. Arsip fisik yang didigitalkan 5. Wacat
4.2.1	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	3	340.728.000	3	300.886.298	100,00%	88,31%	Capaian 100.00% Telah direalisasikan untuk pemeliharaan komputer, pemeliharaan Jaringan, dan pengembangan aplikasi Pantai Balikpapan
Rata-rata capaian kinerja (%)								99,40%	82,57%	

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7=6/5X100%		8
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi	
TOTAL ANGGARAN DAN REALISAI SELURUH SUB KEGIATAN					15.641.325.000		14.253.959.325			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN								90,08%	79,82%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN								Sangat Tinggi	Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN								102,22%	86,82%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN								Sangat Tinggi	Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								102,37%	87,09%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Tinggi	Tinggi	

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun	Realisasi Capaian Kinerja RKPD	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)	Target Program dan Kegiatan	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)
------	---	-------------------	------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------	--

			2026	Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target Renja PD Tahun (n- 2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)	Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	88,00	86,20	79,00	84,16	106,53%	87,00	87,00	98,86%
2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84	86,23	81,75	84,06	102,83%	82,00	82,00	97,62%
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			43	43	100,00%	46	46	
2.12.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	85	87,35	83,50	84,65	101,38%	84,00	84,00	98,82%
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1	1	100,00%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						43	43	
2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	85,89	81,00	84,33	104,11%	82,00	82,00	97,62%
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	1	100,00%	-	-	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	13	108,33%	12	12	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			8	8	100,00%	8	8	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4	4	100,00%	4	4	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1	1	100,00%	2	2	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			2	2	100,00%	2	2	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	12	100,00%	12	12	
2.12.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82	85,62	79,00	83,74	106,00%	80,00	80,00	97,56%
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4	4	100,00%	3	3	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			33	33	100,00%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1	1	100,00%	-	-	
2.12.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	84	86,81	81	84,60	104,44%	82,00	82,00	97,62%
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	2	100,00%	2	2	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	100,00%	12	12	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	12	100,00%	12	12	
2.12.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	84	85,99	81	83,80	103,46%	82,00	82,00	97,62%
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		24	23	95,83%	28	28	
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			-	-	0,00%	36	36	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			26	22	84,62%	26	26	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	94,79%	91,12%	89,78%	91,63%	102,06%	91,45%	91,45%	96,48%
	Breakdown	- Cakupan penerbitan KK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		- Cakupan penerbitan KTP	99,36%	98,95%	99,34%	99,71%	100,37%	99,35%	99,35%	99,99%

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
		- Cakupan penerbitan KIA	85,00%	74,41%	70,00%	75,18%	107,40%	75,00%	75,00%	88,24%
2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
2.12.02.201.01	Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			3.440	3.201	93,05%	3.560	3.560	
	Breakdown	- Jumlah penduduk non permanen yang terdata			3.400	3.097		3.450	3.450	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		8 = (7/6)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
		- Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan yang diterbitkan NIK			40	104		110	110	
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan						3	3	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96,60%	95,76%	96,53%	97,38%	100,88%	100,00%	100,00%	103,52%
	Breakdown	- Cakupan penerbitan akta kelahiran	98,20%	99,57%	98,05%	99,64%		98,10%	98,10%	99,90%

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
		- Cakupan penerbitan akta kematian	95,00%	91,96%	95,00%	95,11%		95,00%	95,00%	100,00%
2.12.03.202	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil melalui layanan online	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
2.12.03.202.08	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			1	1	100,00%	-	-	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.04.2.01	Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
2.12.04.2.01.0002	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			6	-	0,00%	1	1	
2.12.04.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang di kelola	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan			3	3	100,00%	3	3	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN %							90,08%			

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
PREDIKAT KINERJA							Sangat Tinggi			

Capaian kinerja untuk keseluruhan kinerja telah mencapai target dan melampaui target, dimana capaian untuk sub kegiatan hampir keseluruhan mencapai target dikarenakan pelaksanaan kegiatan dijalankan dengan baik. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target atau realisasi 0,00% dan terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang melampaui target. Diantaranya sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dikarenakan adanya drop anggaran sehingga target menjadi 0 (nol) dan anggaran juga tidak ada.
2. Sub Kegiatan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan, untuk pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun untuk capaian kinerja tidak mencapai target dikarenakan dalam melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan, pihak luar atau OPD lain harus memenuhi syarat ketentuan yaitu memiliki ISO 27001.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 108,33%, realisasi melebihi target dikarenakan adanya penambahan anggaran sehingga realisasi kinerja bertambah.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja/hasil keluaran adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
 - b. Target output yang terlalu tinggi pada saat penyusunan Renja dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Perumusan indikator yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target;
 - d. Penyesuaian terhadap kemampuan APBD serta program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Langkah dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan reuiu serta penelaahan indikator kinerja program dan kegiatan;
 - b. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Menentukan target secara realistis dan berdasar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mengacu pada Renstra 2021-2026, adapun kinerja utama yang tertuang dalam Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sebelum Perubahan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
			2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	81,16	81,97	82,79	83,62	84,45	90,86	93,75				Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	84,1	84,94	85,79	86,65	87,51	93,75	94,38				Tercapai
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	75	77,25	79,56	81,95	84,41	78,47	80				Tercapai
4	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	35,3	79,07	79,57	80,07	35,5	35,66	N/A				Tercapai
5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)												Tercapai
		Perekaman KTP Elektronik	99,33	99,34	99,35	99,36	99,37	91,63	99,99				Di isi Jumlah 530,794 dibagi 530,837 dikali 100% = 99,99%
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	65	70	75	80	85	66,2	80,17				Tercapai, Diisi Jumlah 137.689 dibagi 208.002 dikali 100% = 66,20%
		Kepemilikan akta kelahiran	98	98,05	98,1	98,15	98,2	99,58	99,65				Tercapai, Di isi Jumlah 225,068 dibagi 225,857 dikali 100% = 99,65%
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	41,18	55,88	70,59	85,29	94,12	25	30,56				Belum Tercapai, Diisi 11 OPD dibagi 36 dikali 100% = 30,56%
6	SDGs : Sustainable	Persentase penduduk umur 0-17	98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65				Tercapai,

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	
	Development Goals (tujuan pembangunan berkelanjutan)	tahun dengan kepemilikan akta kelahiran											Di isi Jumlah 225,068 dibagi 225,857 dikali `100% = 99,65%
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	99.15	99.20	99.25	99.30	99.35	99,9	99,93				Tercapai,
													Diisi jumlah 69652 dibagi 69704 dikali 100% = 99,93%
		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65				Tercapai
													Di isi Jumlah 225,068 dibagi 225,857 dikali `100% = 99,65%
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65				Tercapai
											Di isi Jumlah 225,068 dibagi 225,857 dikali `100% = 99,65%		
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada						

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Setelah Perubahan Perangkat Daerah

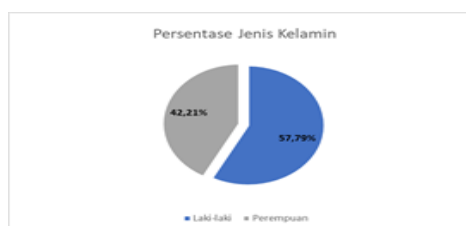
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	81.16	81.97	94.00	94.25	94.50	90,86	93,75				Tercapai
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	88,11	89.78	91.64	91.68	91.71	91,12	91,63				Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	84.1	84.94	94.50	94.75	95.00	93,75	94,38				Tercapai
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	96,5	96.53	97.33	97.33	97.34	95,76	97,38				Tercapai
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	75	77.25	79,56	81,95	84,41	78,47	80				Tercapai
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N/A	79.07	79.57	80.07	80.57	N/A	71,58				Tidak Tercapai
5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Perekaman KTP Elektronik	99.33	99.34	99.35	99.36	99.37	91,63	99,99				Tercapai Di isi Jumlah 530,794 dibagi 530,837 dikali 100% = 99,99%
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	65	70	75	80	85	66,2	80,17				Tercapai, Diisi Jumlah 137.689 dibagi 208.002 dikali 100% = 66,20%
		Kepemilikan akta kelahiran	98	98,05	98,1	98,15	98,2	99,58	99,65				Tercapai, Di isi Jumlah 225,068 dibagi 225,857 dikali `100% = 99,65%
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	41,18	55,88	70,59	85,29	94,12	25	30,56				Belum Tercapi, Diisi 11 OPD dibagi 36 dikali 100% = 30,56%
		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65				Tercapai, Di isi Jumlah 225,068 dibagi 225,857 dikali `100% = 99,65%
6	SDGs : Sustainable Development Goals (tujuan pembangunan	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65				Tercapai, Di isi Jumlah 225,068 dibagi 225,857 dikali `100% = 99,65%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	
	berkelanjutan)	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	99.15	99.20	99.25	99.30	99,35	99,9	99,93				Tercapai, Diisi jumlah 69652 dibagi 69704 dikali 100% = 99,93%
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65				Tercapai Di isi Jumlah 225,068 dibagi 225,857 dikali `100% = 99,65%	
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		98.00	98.05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65				Tercapai Di isi Jumlah 225,068 dibagi 225,857 dikali `100% = 99,65%	
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada					

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan Sipil berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2023 dengan jumlah responden 5.091 orang dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

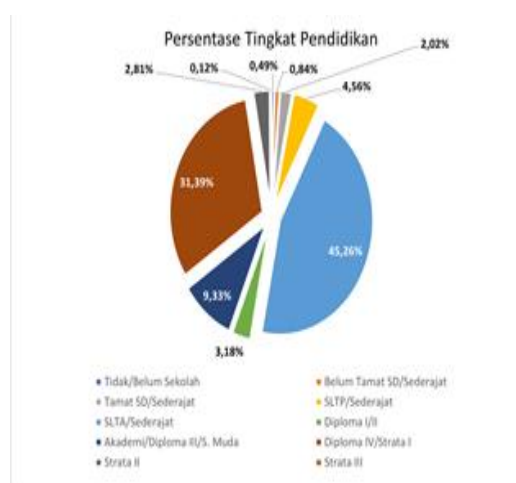
Uraian	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	2942	57.79%
Perempuan	2149	42.21%
Jumlah	5091	100,00%



Responden Sebagian besar laki-laki (57,79%) dan Perempuan (42,21%) dalam melayani Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak membedakan jenis kelamin dalam permohonan online maupun offline.

b. Tingkat Pendidikan

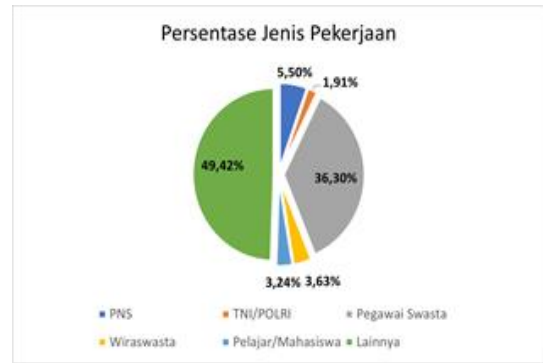
No	Uraian	Jumlah Responden	%
1	Tidak/Belum Sekolah	25	0.49%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	43	0.84%
3	Tamat SD/Sederajat	103	2.02%
4	SLTP/Sederajat	232	4.56%
5	SLTA/Sederajat	2304	45.26%
6	Diploma I/II	162	3.18%
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	475	9.33%
8	Diploma IV/Strata I	1598	31.39%
9	Strata II	143	2.81%
10	Strata III	6	0.12%
TOTAL		5091	100%



Sedangkan untuk kelompok tingkat Pendidikan yang paling banyak Pendidikan tamat SMA sebesar 45,26% dan paling sedikit tamat S3 (0,12%).

c. Jenis Pekerjaan

No	Uraian	Jumlah Responden	Persentase
1	PNS	280	5.50%
2	TNI/POLRI	97	1.91%
3	Pegawai Swasta	1848	36.30%
4	Wiraswasta	185	3.63%
5	Pelajar/Mahasiswa	165	3.24%
6	Lainnya	2516	49.42%
	Jumlah	5091	100.00%



Dari komposisi pekerjaan responden paling banyak dengan uraian pekerjaan lain (ibu rumah tangga, buruh, petani, bengkel, sopir dll) dengan jumlah responden 5.091 orang (49,42%). Ini merupakan bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat, karena dalam layanan online maupun offline peran petugas sangat membantu dalam pelayanan publik yang ada di tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan.

1. Sasaran I Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

1.1. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk** dengan target 81.97 nilai dan realisasi 93.75 nilai dengan capaian keberhasilan 114.37% tahun 2023 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi**”.

Hasil survei Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk (**indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk** periode tahunan (Januari s/d Desember 2023) sebagai berikut :

No.	Unsur pelayanan	Nilai
1	Kejelasan persyaratan	9.59
2	Kemudahan pelayanan	9.54
3	Kesesuaian waktu pelayanan dengan standar pelayanan	9.32
4	Komitmen petugas pelayanan terhadap aturan antipungli dan antigratifikasi	9.46
5	Kesesuaian antara produk layanan pada standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	9.39
6	Kompetensi petugas pelayanan	9.36
7	Etika dan perilaku petugas pelayanan	9.29
8	Respon petugas pelayanan terhadap pengaduan pengguna layanan	9.35
9	Kondisi sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan	9.17
10	Sistem antrian yang disediakan	9.27
	IKM Internal	93.75
	Mutu	Sangat Tinggi

Dalam survei pelayanan yang dilakukan secara intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 menunjukkan nilai melampaui target hal ini disebabkan respon dari semua pegawai Disdukcapil sangat tinggi dalam menjalankan kinerja begitu pula sebaliknya masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan. Kejelasan persyaratan mendapat

nilai yang paling tinggi 9.59 hal ini menunjukkan apa yang menjadi persyaratan dalam permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan aturan, dan kondisi sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan dengan nilai 9.17 yang akan diajukan sebagai bahan perbaikan untuk tahun depan.

Adapun jenis layanan layanan bidang pendaftaran penduduk melalui pelayanan online capil.balikipapan.go.id.

Dengan jenis layanan :

- a) Permohonan Kartu Keluarga
 - 1). Kartu Keluarga Baru (menikah)
 - 2). Pisah Kartu Keluarga akibat perceraian
 - 3). Pecah Kartu Keluarga
 - 4). Numpang Kartu Keluarga
 - 5). Penambahan anggota keluarga karena kelahiran
 - 6). Pergantian Kartu Keluarga karena hilang atau rusak
 - 7). Pergantian Kartu Keluarga karena perubahan data
 - 8). Penanganan pengaduan.
- b) Permohonan KTP-el
 - 1). KTP-el baru
 - 2). Pergantian KTP-el karena perubahan data
 - 3). KIA (kartu identitas anak)
- c) Pindah Luar Daerah
 - 1). SKPWNI baru
 - 2). SKPWNI pergantian
 - 3). SKPWNI hilang/rusak
 - 4). Pembatalan SKPWNI

- 1.2. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator **Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk** dengan target 89.78% nilai dan realisasi 91.63% nilai dengan capaian keberhasilan 102.06 % tahun 2023 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi**". Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk terdiri dari 3 unsur yakni : Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Cakupan Penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan KIA (kartu Identitas Anak) dengan penjumlahan yang komposit, dengan capaian sebagai berikut :

Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

No	Uraian	Rumus Hitung	Target	Rumus Hitung	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1	Cakupan penerbitan KK	$\frac{\text{Jumlah Kartu Keluarga Terbit}}{\text{Jumlah Pemohon Kartu Keluarga}} \times 100\%$	100%	$\frac{957.777}{957.777} \times 100\% = 100\%$	100,00%	100,00%
2	Cakupan penerbitan KTP	$\frac{\text{Jumlah KTP-el Terbit}}{\text{Jumlah Wajib KTP-el}} \times 100\%$	99,34%	$\frac{519.599}{521.119} \times 100\% = 99,71\%$	99,71%	100,37%
3	Cakupan penerbitan KIA	$\frac{\text{Jumlah KIA Terbit}}{\text{Jumlah anak (<17 Tahun)}} \times 100\%$	70,00%	$\frac{160.679}{213.726} \times 100\% = 75,18\%$	75,18%	107,40%
		Total target	89,78%	Total Realisasi	91,63%	102,06%

Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari 3 (tiga) cakupan yaitu :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK).

Analisa :

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, memiliki target 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100%. Perhitungan cakupan penerbitan Kartu Keluarga yaitu jumlah Kartu Keluarga terbit dibagi jumlah pemohon. Pada tahun 2023 jumlah Kartu Keluarga terbit sebanyak 957.777 dan jumlah pemohon sebanyak 957.777.

Capaian penerbitan Kartu Keluarga dapat mencapai target dikarenakan mudahnya masyarakat untuk mengajukan permohonan Kartu Keluarga, dengan adanya layanan online masyarakat dapat melakukan pengajuan permohonan penerbitan Kartu Keluarga dari mana saja, dan hasil dari pengajuan layanan tersebut dapat di cetak mandiri oleh Masyarakat, dan pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kerja sama dengan pihak lintas sektor seperti Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA dan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, dimana Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama dapat mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga sesuai dengan permohonan yang diminta.

Penetapan target untuk indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga pada Tahun 2023 sebesar 100%, dan realisasi 100% dengan capaian sebesar 100%. Penerbitan Kartu Keluarga oleh masyarakat dikarenakan adanya beberapa perubahan data yang dilakukan oleh warga masyarakat seperti perubahan nama, tambah anak, pisah KK karena menikah/meninggal atau perubahan status, adanya pendatang dari luar Kota Balikpapan dan perubahan biodata lainnya. Bagi Penduduk Balikpapan setiap Kepala Keluarga harus/wajib memiliki Kartu Keluarga oleh karenanya Jumlah Kartu Keluarga yang dimiliki Masyarakat Balikpapan sama dengan Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Balikpapan.

2. Cakupan Penerbitan KTP

Analisa :

Cakupan penerbitan KTP-El, memiliki target 99,34% dan realisasi 99,71% dengan capaian 100,37%. Perhitungan cakupan penerbitan KTP-el yaitu jumlah KTP-el terbit dibagi jumlah wajib KTP-el. Pada tahun 2023 jumlah penerbitan KTP-el sebanyak 519.599 dan jumlah wajib KTP-el sebanyak 521.119

Penetapan target untuk indikator Cakupan Penerbitan KTP pada tahun 2023 sebesar 99.34% dan realisasi sebesar 99.71% sehingga capaian sebesar 100.37%. Besaran jumlah KTP-el yang diterbitkan merupakan penjumlahan dari masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dengan pembandingan jumlah wajib KTP di Kota Balikpapan, mengalami kenaikan dari target yang ditentukan hal tersebut dikarenakan karena ketersediaan Blanko KTP-elektronik yang yang didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta melalui HIBAH DALAM BENTUK UANG dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui DPA Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebanyak 86.000 keping blanko KTP-el telah terpenuhi untuk dilakukan pencetakan, meningkatnya permohonan KTP-el sebagai wujud kesadaran masyarakat untuk mendapatkan identitas diri dengan ketersediaan blanko KTP-el. Meningkatnya permohonan KTP-el tersebut berkaitan dengan semua urusan-urusan yang kaitanya dengan birokrasi baik pemerintahan maupun swasta selalu bersentuhan dengan dokumen kependudukan.

Capaian penerbitan KTP-el melebihi target dikarenakan salah satunya adanya pelayanan drive thru pencetakan KTP-el keliling, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah melakukan kerja sama dengan Gojek dimana pengambilan KTP-el dapat di Gosend-kan, jemput bola perekaman ke Sekolah-sekolah "Disdukcapil Go To Campuas".

3. Cakupan Penerbitan KIA

Analisa :

Cakupan penerbitan KIA, memiliki target 70,00% dan realisasi 75,18% dengan capaian 107,40%. Perhitungan cakupan penerbitan KIA yaitu jumlah KIA terbit dibagi jumlah anak <17 Tahun. Pada tahun 2023 jumlah penerbitan KIA sebanyak 160.679 dan jumlah anak <17 Tahun sebanyak 213.726.

Capaian penerbitan KIA melebihi target dikarenakan adanya pelayanan jemput bola ke Sekolah di Kota Balikpapan. Dimana pihak sekolah mengajukan permohonan pencetakan KIA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak KIA dan mengantarkan hasil cetakan KIA ke masing-masing sekolah dengan dikirim melalui Gosend.

Penetapan target untuk indikator Cakupan Penerbitan KIA pada Tahun 2023 sebesar 70.00% dan realisasi sebesar 75.18% sehingga capaian

sebesar 107.40%. Penerbitan KIA sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan program Disdukcapil Kota Balikpapan (Permendagri) *three In One* yakni bayi yang baru lahir di rumah sakit langsung memiliki Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA.

Pada tahun 2023 penerbitan KIA mencapai target hal ini disebabkan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Komitmen Bersama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Balikpapan dengan no. 420/295/Disdikbud dan Nomor 470/2159/Disdukcapil.

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan mengutamakan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD, SMP) dengan mendatangi sekolah dasar (SD) dan kerjasama dengan pihak Kelurahan se-Kota Balikpapan, dengan pencetakan massal dengan Penerbitan KIA tersebut dikirim ke Sekolah-Sekolah melalui Gosend dan diantar langsung ke Sekolah. Adapun pelayanan rutin yang dilaksanakan melalui permohonan pembuatan akta kelahiran melalui online. Anak-anak juga harus mempunyai kartu identitas sehingga ketika dewasa nanti anak-anak langsung punya identitas yang terdaftar, supaya anak-anak mandiri, mengurus sekolah sudah punya KTP anak.

2. Sasaran II Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil.

- 2.1. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan Sipil** dengan target 84.94 nilai dan realisasi 94.38 nilai dengan capaian keberhasilan 111.11% tahun 2023 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi**.

Hasil survei Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil periode tahunan (Januari s/d Desember 2023) sebagai berikut :

No.	Unsur pelayanan	Nilai
1	Kejelasan persyaratan	9.68
2	Kemudahan pelayanan	9.57
3	Kesesuaian waktu pelayanan dengan standar pelayanan	9.35
4	Komitmen petugas pelayanan terhadap aturan antipungli dan antigratifikasi	9.55
5	Kesesuaian antara produk layanan pada standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	9.51
6	Kompetensi petugas pelayanan	9.44
7	Etika dan perilaku petugas pelayanan	9.32
8	Respon petugas pelayanan terhadap pengaduan pengguna layanan	9.46
9	Kondisi sarana prasarana penunjang	9.23

No.	Unsur pelayanan	Nilai
	penyelenggaraan pelayanan	
10	Sistem antrian yang disediakan	9.27
	IKM Internal	94.38
	Mutu	Sangat Baik

Dalam survei pelayanan yang dilakukan secara intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 menunjukkan nilai melampaui target hal ini disebabkan respon dari semua pegawai Disdukcapil sangat tinggi dalam menjalankan kinerja begitu pula sebaliknya masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan. Kejelasan persyaratan mendapat nilai yang paling tinggi 95.68 hal ini menunjukkan apa yang menjadi persyaratan dalam permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan aturan, dan nilai terendah ada pada kondisi sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan dengan nilai 9.23 yang akan diajukan sebagai bahan perbaikan untuk tahun depan.

Adapun jenis layanan bidang pelayanan pencatatan sipil melalui pelayanan online capil.balikipapan.go.id.

Dengan jenis layanan :

- a) Kutipan Akta Kelahiran :
 - 1) Pencatatan kelahiran WNI
 - 2) Akta kehilangan/rusak
 - 3) Pencatatan Kelahiran orang asing
 - 4) Penanganan pengaduan
- b) Kutipan akta kematian :
 - 1) Akta kematian baru
 - 2) Akta kematian hilang/rusak
- c) Kutipan akta perkawinan
 - 1) Pencatatan perkawinan WNI
 - 2) Pencatatan Perkawinan WNA
 - 3) Akta perkawinan hilang/rusak
- d) Kutipan akta kematian :
 - 1) Akta kematian baru
 - 2) Akta kematian hilang/rusak

2.2. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target 96,53% dan realisasi 97,38% dengan capaian keberhasilan 100,88% tahun 2023 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi**". Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan

Sipil terdiri dari 2 unsur yakni : Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dan Cakupan Penerbitan Akte Kematian dengan penjumlahan yang komposit, dengan capaian sebagai berikut :

Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil

No	Uraian	Rumus Hitung	Target	Rumus Hitung	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1	Cakupan penerbitan akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran Terbit}}{\text{Jumlah Kelahiran}} \times 100\%$	98.05%	$\frac{225.953}{226.774} \times 100\% = 99,64\%$	99.64%	101.62%
2	Cakupan penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah Akta Kematian Terbit}}{\text{Jumlah Kematian}} \times 100\%$	95.00%	$\frac{44.292}{46.568} \times 100\% = 95,11\%$	100.00%	100.12%
		Total target	96.53%	Total Realisasi	99.82%	103.41%

Cakupan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil terdiri dari 2 (dua) cakupan yaitu :

1. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran,

Analisa :

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran memiliki target 98,05% dan realisasi 99,64% dengan capaian 101,62%. Perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran yaitu jumlah akta kelahiran terbit dibagi jumlah kelahiran. Pada tahun 2023 jumlah akta kelahiran terbit sebanyak 225.953 dan jumlah kelahiran sebanyak 226.774.

Capaian penerbitan Akta Kelahiran dapat mencapai target dikarenakan adanya kerja sama dengan pihak rumah sakit, sehingga pihak rumah sakit dapat langsung melaporkan peristiwa kelahiran yang terjadi dan mengajukan permohonan akta kelahiran dan dengan adanya layanan online untuk permohonan akta kelahiran mempermudah masyarakat untuk mengajukan dokumen akta kelahiran tanpa perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kesadaran yang tinggi untuk memiliki akte kelahiran.

2. Cakupan penerbitan Akta Kematian,

Analisa :

Cakupan Penerbitan Akta Kematian memiliki target 95,00% dan realisasi 95,11% dengan capaian 100,12%. Perhitungan cakupan penerbitan Akta Kematian yaitu jumlah akta kematian terbit dibagi jumlah kematian. Pada tahun 2023 jumlah akta kematian terbit sebanyak 44.292 dan jumlah kematian sebanyak 46.568.

Capaian penerbitan akta kematian melebihi target dikarenakan adanya layanan online untuk permohonan akta kematian yang

mempermudah masyarakat untuk mengajukan dokumen akta kematian tanpa perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adanya Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan untuk pelaporan peristiwa kematian yang belum dilaporkan sehingga bisa langsung dimohonkan melalui pelayanan online sehingga adanya peristiwa kematian dapat dilaporkan untuk mendapatkan dokumen akte kematian.

Penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk keperluan warga untuk pembuatan ahli waris, silsilah keluarga, penghentian pembayaran BPJS, claim asuransi, urusan di Bank dan pengajuan pensiun PNS/BUMN/perusahaan dan lain-lain.

3. Sasaran III Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi.

Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data** dengan target 77,25 nilai dan realisasi 80.00 nilai dengan capaian keberhasilan 103.55% tahun 2023 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi**". Dengan responden 9 OPD yang ada di Pemerintah Kota Balikpapan : Dinas Kesehatan Kota, Bappeda Litbang, Dinas Ketenagakerjaan, Diskominfo, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DPOP, BKPSDM, BPPDRD.

Indeks kepuasan masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, dengan unsur-unsur penilaian :

No.	Unsur pelayanan	Nilai
1	Kemudahan prosedur permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data.	9.44
2	Kemudahan persyaratan permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data	9.44
3	Kemudahan kejelasan dan kepastian jawan surat permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data	9,17
4	Kemudahan tanggung jawab petugas dalam memberikan izin hak akses dan pemanfaatan data	8.61
5	Kemudahan kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan tentang izin hak akses dan pemanfaatan data	8.33
6	Kemudahan kecepatan dalam pelayanan apabila terjadi kerusakan pada penginputan hak akses dan pemanfaatan data	8.33
7	Kemudahan keadilan untuk mendapatkan pelayanan terjadi kerusakan pada penginputan hak akses dan pemanfaatan data	8.89
8	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	8.89
9	Ketepatan terhadap jadwal waktu pelayanan	8.89
	IKM Internal	80.00
	Mutu	BAIK

Yang mendapatkan nilai tinggi ada di kemudahan persyaratan permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data (9.44) dan Kemudahan persyaratan permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data (9.44).

Analisa :

1. Kepuasan Perangkat Daerah dalam mengakses pemanfaatan data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan saat ini, kemudahan dalam mengakses data.
2. Respon yang tanggap oleh pegawai Disdukcapil jika terjadi kendala teknis atau jaringan.
3. Data yang diberikan kepada Perangkat Daerah merupakan data yang terus di update secara berkala.
4. Dengan sistem web portal maka keamanan data lebih terjaga karena elemen data hanya dapat dilihat dan tidak dapat disalin.
5. Adanya pembatasan hak akses bagi pengguna sehingga tidak semua pegawai dapat mengakses data pada web.

4. Sasaran IV Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan target 79,07 nilai dan realisasi nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 71,58 nilai dengan capaian keberhasilan 90,53% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **“sangat tinggi”**, tetapi belum mencapai target.

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan IKK sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 4 (empat) indicator outcome dan 1 IKK output dengan rincian sebagai berikut :

- 5.1. IKK Outcome : Perekaman KTP Elektronik, target 99.34% dengan realisasi 99.99% dan capaian 100.66%.
- 5.2. IKK Outcome : Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, target 70% dengan realisasi 80.17% dan capaian 114.53%.

- 5.3. IKK Outcome : Kepemilikan akta kelahiran, target 98.05% dengan realisasi 99.65% dan capaian 101.63%.
- 5.4. IKK Outcome : Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, target 55.88% dengan realisasi 30.56% dan capaian 54.68%.
- 5.5. IKK Output : - Penerbitan Akta Perkawinan, realisasi 100%
- Penerbitan Akta Perceraian, realisasi 100%
 - Penerbitan Akta Kematian, realisasi 100%
 - Penyajian Data Kependudukan, realisasi 100%

➤ Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Perekaman KTP Elektronik

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota	
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	$\frac{530.794}{530.837} \times 100\% = 99.99\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</u> 	

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus		Keterangan
Perekaman KTP-el	1)	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{457}{457} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$	sda
	3)	Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{4.200}{4.200} \times 100\% = 100\%$	sda
	4)	Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun}}{2 \text{ tahun}} \times 100\%$	$\frac{3}{2} \times 100\% = 150\%$	Sda

2) IKK Outcome : Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	$\frac{172.128}{214.705} \times 100\% = 80.17\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</u> 	

3) IKK Outcome : Kepemilikan akta kelahiran

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	$\frac{225.068}{225.857} \times 100\% = 99.65\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</u> 	

4) **IKK Outcome : Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{11}{36} \times 100\% = 30.56\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. ▪ <u>PD adalah perangkat daerah PD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah Perangkat Daerah yang sudah menggunakan data administrasikependudukan yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat</u> ▪ <u>daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u> 	

6. SDGs : Sustainable Development Goals (tujuan pembangunan berkelanjutan) dengan indikator :

6.1. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran memiliki target 98,05% dengan realisasi 99,65% dan capaian sebesar 101,63%.

6.2. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur memiliki target 99,20% dengan realisasi 99,93% dan capaian sebesar 100,74%

6.3. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah memiliki target 98,05% dengan realisasi 99,65% dan capaian sebesar 101,63%.

6.4. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran memiliki target 98,05% dengan realisasi 99,65% dan capaian sebesar 101,63%.

6.5. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil

Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Dalam mencapai solusi permasalahan yang ada yakni dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam rangka memuaskan keinginan masyarakat sehingga masyarakat akan tergerak hati bagi yang belum memiliki dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil untuk memperoleh dokumen tersebut.

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Interprestasi (belum tercapai, sesuai, melampaui)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya sosialisasi Administrasi Kependudukan khususnya Perubahan Kebijakan Pelayanan Kependudukan	Cakupan kepemilikan e-KTP :99.71%	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan	Pemanfaatan website, media sosial dalam mensosialisasikan pentingnya kepemilikan KTP
		Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 Tahun : 99.65%	Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat dalam memanfaatkan/menggunakan pelayanan "DARING"	Optimalisasi program 3 in 1
		Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) : 80.17%	Adanya perubahan aturan terkait administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat	Koordinasi dan membangun jejaring dengan institusi pendidikan
		Cakupan Penerbitan akta kematian : 100%	Masih adanya pemahaman masyarakat tentang manfaat kepemilikan akta kematian dalam pengurusan dokumen penting	Semakin tinggi permintaan terhadap akta kematian sebagai prasyarat ahli waris pengurusan dokumen oleh Instansi/Perbankan/Jasa keuangan lainnya.

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terdapat 4 (empat) cakupan :

1. Cakupan kepemilikan/perekaman KTP-el

Besaran jumlah KTP-el yang diterbitkan merupakan penjumlahan dari masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dengan pembandingan jumlah wajib KTP di Kota Balikpapan, mengalami kenaikan dari target yang ditentukan hal tersebut dikarenakan karena ketersediaan Blanko KTP-elektronik yang didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta telah terpenuhi untuk dilakukan pencetakan, meningkatnya permohonan KTP-el sebagai wujud kesadaran masyarakat untuk mendapatkan identitas diri yang tidak sebanding dengan ketersediaan blanko KTP-el. Meningkatnya permohonan KTP-el tersebut berkaitan dengan semua urusan-urusan yang kaitannya dengan birokrasi baik pemerintahan maupun swasta selalu bersentuhan dengan dokumen kependudukan.

2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-18 Tahun.

Realisasi tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kota Balikpapan meningkat dikarenakan adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh akte kelahiran. Dalam upaya untuk terus meningkatkan agar masyarakat Balikpapan memiliki dokumen kependudukan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah melakukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas Pemerintah/Swasta, yaitu memberi kemudahan bagi warga yang melakukan proses persalinan di 8 (delapan) Rumah Sakit/Puskesmas se Kota Balikpapan tersebut dapat langsung mengurus Penerbitan Akta Kelahiran bayinya dan penerbitan akta kelahiran yang terlambat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan juga melakukan Pencetakan Akta Kelahiran secara masal bagi Warga yang sudah terdaftar dalam Database Kependudukan Kota Balikpapan tetapi belum mencantumkan Nomor Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun. Melampauinya target yang ditetapkan atau peningkatan jumlah penerbitan akta kelahiran karena kesadaran yang tinggi untuk memiliki akta kelahiran.

3. Cakupan Penerbitan/Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di dalam Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan program Disdukcapil Kota Balikpapan (Permendagri) *three In One* yakni a bayi yang baru lahir di rumah sakit langsung memiliki Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA. Adapun pelayanan rutin yang dilaksanakan melalui permohonan online dimana masyarakat dalam pengurusan akte lahir mendapatkan Akte Kelahiran, perubahan KK dan KIA.

4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Pembuatan Akta Kematian atas peristiwa kematian yang dilaporkan oleh masyarakat karena kegunaan Akta Kematian berkaitan dengan Hak Waris dan dihapusnya Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Camat dan adanya kerjasama pembuatan melalui Akta Kematian Online, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan melakukan jemput bola dalam pembuatan akta kematian online

dimana masyarakat cukup membuat permohonan melalui jaringan “Daring”. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Juga bekerja sama dengan Dinas Pemakaman dan Pemukiman dalam pembuatan Buku Pokok Pemakaman untuk membantu masyarakat dalam membuat akta kematian.

Dari permasalahan yang ada disetiap tahun akan adanya faktor-faktor pendukung guna mencapai target yang diharapkan, dengan memperhatikan kendala-kendala yang dialami masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah untuk mendorong pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat.

1. Kemajuan teknologi menuntun respon kebijakan yang antipatif, adaptif, dan cepat dan lompatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui layanan digital/daring, pelayanan publik yang cepat dan akurat.
2. Dengan ditetapkannya Kabupaten PPU sebagai Ibu Kota Negara (IKN), Balikpapan sebagai pintu gerbang serta kota penyangga Ibu Kota Negara tentunya akan terdampak dari akan terjadinya peningkatan mobilitas penduduk yang datang sehingga Disdukcapil Kota Balikpapan perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang representatif untuk mengantisipasi lonjakan permohonan pelayanan kependudukan di Kota Balikpapan.
3. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan menuju satu data.
4. Penguatan Tata Kelola Kependudukan, dengan peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan percepatan kepemilikan dokumen penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
5. Adanya kebijakan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memerlukan upaya khusus dalam pelayanan untuk mencapai target yang ditetapkan mengingat belum dirasakannya kebutuhan kepemilikan IKD di tengah masyarakat.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Permasalahan :

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut.

Permasalahan :

1. Belum terlaksana secara maksimal pelayanan Disdukcapil Kota Balikpapan melalui daring, Masyarakat masih ada yang belum memahami beberapa perubahan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Rata-rata pelayanan per hari di Kantor Disdukcapil adalah sebanyak 800 s/d 1.000 permohonan per hari dengan beberapa pelayanan yang tidak bisa dilakukan secara daring yaitu pengambilan KTP el, perekaman KTP el, pencatatan perkawinan dan pelayanan konsultasi dan pengaduan, maka masyarakat masih datang secara langsung ke Kantor Disdukcapil
Ruang pelayanan di Kantor Disdukcapil yang ada saat ini dipandang masih belum cukup nyaman dan representative baik itu dari sisi kapasitas ruangan untuk masyarakat, maupun sarana pendukung lainnya seperti tersedianya ruang khusus konsultasi, ruangan pelayanan pengambilan KTP el yang saat ini dilakukan di area ruang pengaduan offline, terlebih ketersediaan satuan ruang parkir yang minim juga turut mempengaruhi kenyamanan masyarakat yang datang berpelayanan. Mobilitas penduduk non permanen belum terdata dengan lengkap
3. Data yang diberikan pusat melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diperoleh dari data SIAK terpusat, sehingga data yang diperoleh masih belum menunjang permohonan data dari OPD lain.
4. IKD belum bisa digunakan di seluruh Instansi Pemerintah maupun Swasta, masyarakat masih banyak tidak memiliki smarphone terutama masyarakat yang sudah uzur/tua, koneksi jaringan SIAK kadang terganggu dan kurangnya sosialisasi pentingnya IKD bagi masyarakat.
5. Masih terdapat pemilih pemula (17 tahun) yang belum melakukan perekaman.
6. Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait

Hambatan :

- a. Permohonan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilayani melalui "DARING" karena adanya masyarakat yang belum memiliki HP android, dan masyarakat belum familiar dengan LINK PELAYANAN ONLINE Disdukcapil :
 - Salah input data.
 - Merasa belum mendapatkan balasan atas permohonannya.Dari hambatan tersebut menimbulkan persepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Masyarakat masih belum mengetahui bahwa dokumen yang dimohonkan bias dicetak mandiri dalam kertas HVS A 4 ukuran 80 gram.

- c. Belum familiarnya ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yang bias mencetak dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (suistunable Development Goals).

- a. Terpenuhinya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat membuat rasa nyaman.
- c. Pola pelayanan jemput bola yang akan menghasilkan inovasi pelayanan.
- d. Masyarakat merasa puas akan layanan yang diberikan.
- e. Tertib administrasi Kependudukan menuju penduduk yang berkualitas.

Dalam upaya pencapaian target pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan selalu menghadapi berbagai tantangan dalam pencapaian tujuan. Oleh karenanya perlu dirancang suatu strategi dengan memanfaatkan peluang yang ada agar tujuan dapat tercapai dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

1. Tantangan :

- a. Pertumbuhan penduduk yang akan terjadi peningkatan cukup tinggi sebagai dampak IKN.
- b. Peningkatan jumlah masyarakat yang berpendidikan.
- c. Pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat kewenangan tunggal.
- d. Dukungan Pemerintah Kota atas rencana peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau.
- e. Kemajuan teknologi dan informasi dalam menunjang pelayanan “DARING”
- f. Integrasi data kependudukan dengan pelayanan publik lain.

1. Peluang :

- a. Adanya dukungan nasional tentang penerapan KTP-el
- b. Kerjasama dengan instansi lain.
- c. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (GISA).
- d. Permohonan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis.
- e. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bisa cetak sendiri dengan kertas A 4 80 gram.
- f. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bias diantar ke rumah melalui aplikasi “GOJEK”.

- g. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan terkait kependudukan dan pencatatan sipil.
- h. Semakin berkembangnya teknologi informasi, arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tersimpan dalam DIGITALISASI ARSIP.
- i. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan sehingga Disdukcapil Kota Balikpapan dapat melaksanakan pelayanan Pencetakan KTP-el DRIVE TRUE.
- j. Adanya dukungan dari Instansi – Instansi Pemerintah terkait yang dapat menunjang peningkatan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 yang direncanakan.

Dari analisis perkembangan dan masalah kependudukan dan pencatatan sipil dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka permasalahan yang masih dihadapi oleh Disdukcapil Kota Balikpapan tahun 2025 adalah:

- Dengan ditetapkannya Kabupaten PPU sebagai Ibu Kota Negara (IKN), Balikpapan sebagai pintu gerbang serta kota penyangga Ibu Kota Negara tentunya akan terdampak dari akan terjadinya peningkatan mobilitas penduduk yang datang sehingga Disdukcapil Kota Balikpapan perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang representatif untuk mengantisipasi lonjakan permohonan pelayanan kependudukan di Kota Balikpapan dengan menyiapkan kebutuhan Blanko KTP-el, Ribbon colour dan peremajaan software dan hardware penunjang SIAK TERPUSAT.
- Adanya kebijakan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memerlukan upaya khusus dalam pelayanan untuk mencapai target yang ditetapkan mengingat belum dirasakannya kebutuhan kepemilikan IKD di tengah masyarakat, dengan upaya melalui sosialisasi, forum konsultasi publik dan jemput bola di masyarakat.

Formulasi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tahun 2025 yakni :

- a. Jumlah penduduk Kota Balikpapan akan mengalami peningkatan akibat mulai dilaksanakannya perpindahan IKN (Ibu Kota Nusantara) ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Kemajuan teknologi informasi yang akan diperlukan dalam peningkatan layanan publik baik pemerintah maupun swasta tanpa harus membawa KTP manual.

Untuk menghadapi formulasi isu-isu tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan direncanakan dalam mensukseskan DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK, maka pada tahun 2025 diprioritaskan untuk :

- ✓ Mempermudah semua jenis layanan dalam bentuk Online kecuali perekaman dan pengambilan KTP-el/KIA.
- ✓ Pendekatan layanan pada masyarakat melalui pelayanan di tingkat Kecamatan se-Balikpapan dengan layanan pencetakan KTP-el
- ✓ Digitalisasi permohonan Akta-akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk melalui TTE (Tanda tangan elektronik).
- ✓ Bimbingan teknis tentang administrasi kependudukan menuju era digitalisasi.
- ✓ Hibah Pengadaan Blanko KTP.
- ✓ Forum Konsultasi Publik (FKP, Sosialisasi ke masyarakat).
- ✓ Penambahan sarana dan prasarana kantor.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Review terhadap rancangan awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sesuai hasil analisis kebutuhan tahun 2025 dengan memperhatikan kegiatan skala prioritas kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai table berikut :

Tabel 2.7
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wajib Pemerintahan							Wajib Pemerintahan							
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Bpp	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	93,12%	635.120.133		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Bpp	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	93,12%	1.948.362.425		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	3.560	110.000.000		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	3.560	1.474.596.075		
				- Jumlah penduduk non permanen yang terdata (Orang)	3.450							- Jumlah penduduk non permanen yang terdata (Orang)	3.450		
				- Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan yang diterbitkan NIK (Orang)	110	-						- Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan yang diterbitkan NIK (Orang)	110	-	
		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	31.000	-			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	31.000	-	
				- Jumlah permasalahan pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan (Masalah)	31.000	-						- Jumlah permasalahan pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan (Masalah)	31.000	-	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	-			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	-	
				- Jumlah penerbitan perubahan kartu keluarga (lembar)	56.000	-						- Jumlah penerbitan perubahan kartu keluarga (lembar)	56.000	-	

No	Rancangan Awal RKPd Tahun 2025						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				- Jumlah penerbitan surat keterangan pindah penduduk /SKPWNI (lembar)	20.500	-					- Jumlah penerbitan surat keterangan pindah penduduk /SKPWNI (lembar)	20.500	-	
				- Jumlah penerbitan kartu domisili (lembar)	-	-	Kartu domisili tidak ada lagi				- Jumlah penerbitan kartu domisili (lembar)	-	-	Kartu domisili tidak ada lagi
				- Jumlah penerbitan surat keterangan tempat tinggal/SKTT WNA (lembar)	500	-					- Jumlah penerbitan surat keterangan tempat tinggal/SKTT WNA (lembar)	500	-	
				- Jumlah surat permohonan penduduk pendatang luar daerah yang diterbitkan	11.000	-					- Jumlah surat permohonan penduduk pendatang luar daerah yang diterbitkan	11.000	-	
		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporaon)	1	375.120.133			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporaon)	1	473.766.350			
				- Jumlah perekaman KTP elektronik (orang)	13.000		- Jumlah perekaman KTP elektronik (orang)		13.000					
				- Jumlah Pencetakan KTP elektronik (lembar)	91.000		- Jumlah Pencetakan KTP elektronik (lembar)		91.000					
				- Jumlah penerbitan surat keterangan KTP elektronik sementara (lembar)	-	ada hibah blanko, jadi tidak ada suket	- Jumlah penerbitan surat keterangan KTP elektronik sementara (lembar)		-					
			- Jumlah penerbitan kartu identitas anak (lembar)	61.000		- Jumlah penerbitan kartu identitas anak (lembar)	61.000			ada hibah blanko, jadi tidak ada suket				

No	Rancangan Awal RKPd Tahun 2025						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	150.000.000		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	-	
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Bpp	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96.58%	381.072.041		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Bpp	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96.58%	491.846.975	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	30.000	100.000.000		Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	30.000	-	
				- Jumlah penerbitan akta kelahiran (lembar)	16.000						- Jumlah penerbitan akta kelahiran (lembar)	16.000		
				- Jumlah penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun (lembar)	14.000						- Jumlah penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun (lembar)	14.000		
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Bpp	Bpp	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	12	156.072.041		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Bpp	Bpp	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	12	-	
				- Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan nama (lembar)	120						- Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan nama (lembar)	120		
				- Jumlah penerbitan akta pengangkatan anak (lembar)	8						- Jumlah penerbitan akta pengangkatan anak (lembar)	8		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				- Jumlah penerbitan kutipan ke dua akta perkawinan (lembar)	30						- Jumlah penerbitan kutipan ke dua akta perkawinan (lembar)	30		
				- Jumlah penerbitan akta pengesahan anak (lembar)	65						- Jumlah penerbitan akta pengesahan anak (lembar)	65		
				- Jumlah penerbitan akta pengakuan anak (lembar)	1						- Jumlah penerbitan akta pengakuan anak (lembar)	1		
				- Jumlah penerbitan akta perubahan nama dari Pengadilan Negeri (lembar)	120						- Jumlah penerbitan akta perubahan nama dari Pengadilan Negeri (lembar)	120		
				- Jumlah penerbitan akta perubahan kewarganegaraan (lembar)	2						- Jumlah penerbitan akta perubahan kewarganegaraan (lembar)	2		
				- Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran kedua, ketiga dan seterusnya (lembar)	695						- Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran kedua, ketiga dan seterusnya (lembar)	695		
				- Jumlah penerbitan kutipan kedua akta kematian (lembar)	10						- Jumlah penerbitan kutipan kedua akta kematian (lembar)	10		

No	Rancangan Awal RKPd Tahun 2025						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				- Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan (lembar)	460						- Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan (lembar)	460		
				- Jumlah penerbitan akta perceraian (lembar)	42						- Jumlah penerbitan akta perceraian (lembar)	42		
				- Jumlah penerbitan akta kematian (lembar)	4.000						- Jumlah penerbitan akta kematian (lembar)	4.000		
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	125.000.000				Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	-
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	35.253	-		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	35.253	-	
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	-			Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	491.846.975	
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100.00 %	1.139.784.262		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	100.00%	2.264.688.875	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	6	654.784.262		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	6	-	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Bpp	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat	100%	75.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Bpp	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat	100,00%	-	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Bpp	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	-	75.000.000		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Bpp	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	-	-	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			IKM Internal Perangkat Daerah	87,50	16.159.063.367		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			IKM Internal Perangkat Daerah	87,50	20.666.858.075	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	7.300.000.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	7.758.699.041	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	100.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	72.454.000	

No	Rancangan Awal RKPd Tahun 2025						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	83	350.000.000			Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	85	808.500.000	
	Administras Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000		Administras Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	950.000.000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	4.136.204.875	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	25.000.000			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	3.500.000.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	2.495.757.271	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	550.000.000			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	1.527.797.178	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	15.000.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	20.728.500	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	20.000.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	51.102.550	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	400.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	500.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	993.947.000	
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	32	80.000.000			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	32	294.265.440	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	80.000.000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	125.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	81.445.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	275.000.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	116.402.400	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	30.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	954.063.367			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	946.428.220	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	570.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	641.635.500	

No	Rancangan Awal RKPd Tahun 2025						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	36	20.000.000			Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	36	15.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48	290.000.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	106.491.100	
JUMLAH						18.390.039.803							25.371.756.350	

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dilakukan untuk membandingkan Rancangan awal (Renstra) terhadap analisis kebutuhan setelah diadakannya musyawarah antar OPD dengan pemangku kepentingan, dan mengingat kebutuhan sarana dan prasarana yang harus terpenuhi untuk mendukung pelayanan masyarakat. Pada rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2025 anggaran sebesar Rp 18.390.039.803,00 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dan analisa kebutuhan Rp 25.371.756.350,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2025 disamping berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan menyediakan melalui website : capil.balikpapan.go.id. Melalui website dan Wa bisnis tersebut akan menjadi perhatian dalam rangka perbaikan mutu pelayanan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Dalam melaksanakan tugas pokok pelayanan kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan tidak mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang, tetapi melalui Forum OPD dengan memperhatikan OPD pendukung pelayanan (Kecamatan se-Balikpapan) dan Lintas Sektor yang lain.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
-	-	-	nihil	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat realisasi kinerja yang mengacu pada Standar Nasional/Lainnya.

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7 = 5 / 6 * 100$
		N I H I L				

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan dengan standar nasional/ lainnya, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

3.1.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas data base kependudukan.
- 2) Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 5) Meningkatkan penataan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

3.1.2. Sasaran Renja SKPD

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengolahan data berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang transparan dan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur.
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, memiliki integritas dan

profesional.

- 4) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan.
- 5) Meningkatnya pengelolaan dokumen kependudukan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Balikpapan yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Tujuan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan konsisten dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategik dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan sesuai tabel 3.2. yaitu:

Tabel 3.2a
Tujuan dan Sasaran Renstra dan Penambahan Indikator
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

VISI Walikota Balikpapan : "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"			
MISI I : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik			
Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah			
No	Tujuan (Disdukcapil)	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan & Sasaran
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terhadap Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk
		Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil
		Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
		Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Sesuai dengan hasil Rapat koordinasi Pengawasan dengan agenda rapat Sosialisasi Penilaian Mandiri AKIP dan Penguatan AKIP Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Samarinda pada tanggal 27-28 Juli 2023 dengan penyelenggara

Inspektorat Kota Balikpapan dan nara sumber dari KemenPAN RB melalui zoom meeting bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebaiknya ditambahkan satu indikator lagi yang menguatkan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdasarkan hasil rapat intern yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 disepakati dengan penambahan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2b
Tujuan dan Sasaran Renstra dan Penambahan Indikator
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Balikpapan

VISI Walikota Balikpapan : "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"			
MISI I : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah			
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan & Sasaran
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terhadap Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
		Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil
		Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
		Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mendapatkan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2025 menggunakan data base dari aplikasi siak sebagai berikut:

1. Kepemilikan Kartu Keluarga.

Jumlah Kepala keluarga penduduk Kota Balikpapan tahun 2023 sebanyak 253.601 KK, untuk mendapatkan cakupan penerbitan kartu keluarga setiap tahun yang diperolehan adanya permohonan masyarakat dari beberapa perubahan data yang dilakukan oleh warga masyarakat seperti perubahan nama, tambah anak, pisah KK karena menikah/meninggal atau perubahan status, adanya pendatang dari luar Kota Balikpapan dan perubahan biodata lainnya. Bagi Penduduk Balikpapan setiap Kepala Keluarga harus/wajib memiliki Kartu Keluarga oleh karenanya Jumlah Kartu Keluarga yang dimiliki Masyarakat Balikpapan sama dengan Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Balikpapan, tersaji data sebagai berikut:

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk dan KK Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepemilikan KK
1	Balikpapan Timur	102.959	34.178
2	Balikpapan Barat	97.821	34.021
3	Balikpapan Utara	188.605	63.337
4	Balikpapan Tengah	105.749	37.994
5	Balikpapan Selatan	158.320	53.405
6	Balikpapan Kota	85.078	30.666
TOTAL		738.532	253.601

Dari data diatas digambarkan bahwa pelayanan pencetakan kartu keluarga mencakup setiap kepala keluarga yang ingin melakukan perubahan di dalam kartu keluarga maka di layani pencetakan kartu keluarga yang di mohonkan.

2. Kepemilikan/perekaman KTP-el

- a. Jumlah Penduduk yang sudah melakukan perekaman di tiap-tiap kecamatan perbandingan nya tidak sama dikarenakan penduduk yang sudah melakukan perekaman karena adanya penduduk yang pindah/datang antar kecamatan dan luar daerah serta adanya Perpres 96 Tahun 2018 dengan tujuan agar pelayanan kependudukan dipermudah dan cepat selesai.
- b. Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman dan sudah memiliki KTP-el di Kota Balikpapan mencapai 99.99% dari jumlah penduduk wajib KTP-el, :

Tabel 3.4
Perekaman KTP Elektronik
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	Jumlah penduduk berumur 17 Tahun ke atas yang memiliki KTP			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	BALIKPAPAN SELATAN			110.446	57.115	55.921	113.036
2	BALIKPAPAN UTARA			130.730	68.090	66.198	134.288
3	BALIKPAPAN TIMUR			69.749	36.846	34.743	71.589
4	BALIKPAPAN BARAT			69.215	36.403	34.101	70.504
5	BALIKPAPAN TENGAH			77.297	39.614	38.654	78.268
6	BALIKPAPAN KOTA			65.525	32.037	31.115	63.152
Jumlah				522.962	270.105	260.732	530.837

Sumber Data : Disdukcapil

3.3. Program dan kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2025 akan melaksanakan Program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung dengan melakukan INOVASI percepatan pencapaian pelayanan dengan melaksanakan Inovasi. Jenis layanan berbasis online “DARING” terdiri dari :

1. Perubahan Data Kartu Keluarga
2. Pindah tempat tinggal
3. Kedatangan di Balikpapan
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA
5. Akte Kelahiran
6. Akte Kematian
7. Akte Perkawinan
8. Update data: (keperluan BPJS, PERBANKAN, INSTANSI LAINNYA)
9. Permohonan Dokumen Kependudukan Karena Kehilangan
10. Permohonan Cetak Ulang Kartu Keluarga tanpa ada perubahan data (bukan karena Kehilangan)
11. Pelayanan jemput bola perekaman KTP, pelayanan IKD (identitas kependudukan digitalisasi

Pelayanan tersebut diatas pada tahun 2023 bisa diakses sekaligus melalui web capil.balikipapan.go.id. Link tersebut diperlukan sesuai kebutuhan pelayanan, Silahkan mengisi secara lengkap dan no HP yang di input adalah nomor yang aktif (bisa di SMS),

Setelah permohonan di proses maka untuk permohonan perubahan data Kartu Keluarga (KK) dan permohonan akta-akta pencatatan sipil maka :

1. Berdasarkan Permendagri No 19/2019 diterbitkan kertas putih pengganti kertas security printing.
2. Memiliki kekuatan hukum.
3. Seluruh dokumen kependudukan menggunakan kertas putih ukuran A4 80 gram kecuali KTP-el dan KIA.
4. Semua layanan dokumen kependudukan bisa dikirimkan langsung ke warga dalam bentuk file PDF lewat Smart Phone atau Email.
5. Penandatanganan dokumen oleh Kepala Dinas dalam bentuk QR CODE.
6. Penduduk dapat mencetak sendiri di rumah melalui file PDF yang telah diberikan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025 tergambar dalam tabel 3.

Tabel 3.5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025				RENCANA AKHIR TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IKM Internal Disdukcapil	Nilai	Balikpapan	87,50	20.666.858.075	APBD	87,50	17.251.753.450	88,00	23.050.374.020
X.XX.01.2,01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaoran SAKIP yang mencakup perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	Balikpapan	5	-	APBD	5	14.568.875	5	-
X.XX.01.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Balikpapan	-	-	APBD	5	14.568.875	5	-
X.XX.01.2,02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	Balikpapan	83,00	7.758.699.041	APBD	83,00	8.189.553.000	84,00	7.800.000.000
X.XX.01.2,02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Balikpapan	46	7.758.699.041	APBD	714	8.189.553.000	714	7.800.000.000
X.XX.01.2,05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Nilai	Balikpapan	84,50	880.954.000	APBD	84,50	986.474.000	85,00	910.100.000
X.XX.01.2,05.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Balikpapan	1	72.454.000	APBD	1	72.454.000	1	70.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025				RENCANA AKHIR TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01.2,05.11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Balikpapan	85	808.500.000	APBD	79	914.020.000	85	840.100.000
X.XX.01.2,06	Kegiatan Administras Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	Balikpapan	83,00	8.831.590.374	APBD	83,00	5.678.640.435	84,00	10.292.780.118
X.XX.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Balikpapan	7	4.136.204.875	APBD	10	884.194.787	7	4.335.010.390
X.XX.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Balikpapan	8	2.495.757.271	APBD	7	2.575.532.138	8	3.750.000.000
X.XX.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Balikpapan	4	1.527.797.178	APBD	4	1.626.282.460	4	1.527.797.178
X.XX.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Balikpapan	1	20.728.500	APBD	2	41.528.500	1	28.870.000
X.XX.01.2,06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Balikpapan	2	51.102.550	APBD	2	51.102.550	2	51.102.550
X.XX.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Balikpapan	12	600.000.000	APBD	12	500.000.000	12	600.000.000
X.XX.01.2,07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	Balikpapan	81,00	1.288.212.440	APBD	81,00	360.554.000	82,00	1.330.447.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025				RENCANA AKHIR TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Balikpapan	3	993.947.000	APBD	5	360.554.000	1	993.947.000
X.XX.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Balikpapan	32	294.265.440	APBD	5	-	32	336.500.000
X.XX.01.2,08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Nilai	Balikpapan	83,00	1.144.275.620	APBD	83,00	1.267.030.640	84,00	1.727.046.902
X.XX.01.2,08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Balikpapan	2	81.445.000	APBD	2	81.850.000	2	150.000.000
X.XX.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Balikpapan	12	116.402.400	APBD	12	236.786.400	12	350.000.000
X.XX.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Balikpapan	12	946.428.220	APBD	12	948.394.240	12	1.227.046.902
X.XX.01.2,09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	Balikpapan	83,00	763.126.600	APBD	83,00	754.932.500	84,00	990.000.000
X.XX.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Balikpapan	26	641.635.500	APBD	27	649.667.500	26	650.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025				RENCANA AKHIR TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Balikpapan	36	15.000.000	APBD	36	15.000.000	36	40.000.000
X.XX.01.2,09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Balikpapan	26	106.491.100	APBD	21	90.265.000	48	300.000.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	%	Balikpapan	93,12% = KK 100%, KTP 99,36% KIA 80,00%	1.948.362.425	APBD	93,12% = KK 100%, KTP 99,36% KIA 80,00%	1.448.362.425	94,79% =kk 100%, ktp 99,36%, kia 85,00%	1.945.013.375
2.12.02.201	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	%	Balikpapan	100%	1.948.362.425	APBD	100%	1.448.362.425	100%	1.945.013.375
2.12.02.201.01	Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi ependudukan	Dokumen	Balikpapan	3.560	1.474.596.075	APBD	3.330	974.596.075	3.220	1.474.596.075
2.12.02.201.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	orang	Balikpapan	31.000		APBD	31.000	-	31.500	-
2.12.02.201.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Balikpapan	1		APBD	1	-	1	-
2.12.02.201.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	Balikpapan	1	473.766.350	APBD	1	473.766.350	1	470.417.300

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025				RENCANA AKHIR TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
2.12.02.203	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	%	Balikpapan	100%	-	APBD	100%	-	100%	-
2.12.02.203.05	Sosialisai Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisai Pendaftaran Penduduk	Laporan	Balikpapan	1	-	APBD	1	-	1	-
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	%	Balikpapan	96,58% = akte lahir 98.15, akte kematian 95.00	491.846.975	APBD	96,58% = akte lahir 98.15, akte kematian 95.00	-	96,60% = kate lahir 98.20%, akte kematian 95.00%	658.193.308
2.12.03.201	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	%	Balikpapan	100%	-	APBD	100%	-	100%	-
2.12.03.201.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	Balikpapan	30.000	-	APBD	30.000	-	30.600	-
2.12.03.201.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	Balikpapan	12	-	APBD	12	-	12	-
2.12.03.202	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil melalui layanan online	%	Balikpapan	100%	491.846.975	APBD	100%	-	100%	658.193.308
2.12.03.202.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan		1	-	APBD	1	-	1	-
2.12.03.202.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen		35.253	-	APBD	35.253	-	35.996	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025				RENCANA AKHIR TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
2.12.03.202.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	Balikpapan	1	491.846.975	APBD	1	-	1	658.193.308
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	%	Balikpapan	100%	2.264.688.875	APBD	100%	1.299.884.125	100%	2.264.688.875
2.12.04.201	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	%	Balikpapan	100%	297.700.000	APBD	100%	759.315.250	100%	297.700.000
2.12.04.201.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	Balikpapan	6	-	APBD	6	-	6	-
2.12.04.201.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Balikpapan	15	297.700.000	APBD	15	759.315.250	15	297.700.000
2.12.04.203	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	%	Balikpapan	100%	1.966.988.875	APBD	100%	540.568.875	100%	1.966.988.875
2.12.04.203.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Balikpapan	3	662.248.875	APBD	3	540.568.875	3	662.248.875
2.12.04.203.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Balikpapan	1	1.304.740.000	APBD	1	-	1	1.304.740.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025				RENCANA AKHIR TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase dokumen profil kependudukan yang tersusun	%	Balikpapan	100%	-	APBD	100%	-	100%	-
2.12.05.201	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan	Buku	Balikpapan	60	-	APBD	60	-	60	-
2.12.05.201.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen		1	-	APBD	1	-	1	-
JUMLAH ANGGARAN						25.371.756.350			20.000.000.000		27.918.269.578

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung visi dan misi Walikota Balikpapan yaitu “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman” dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Dengan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi.
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai.
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan Misi no. 1 yakni “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”. Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sejalan dengan Sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yakni “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah Terhadap Administrasi Kependudukan “.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah disusun untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan pertimbangan terhadap rencana kinerja dan tercapainya target kinerja dan pendanaan yang dirumuskan dengan tujuan utama yakni untuk memenuhi:

1. Pencapaian Visi, Misi Walikota, Sasaran RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yakni Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terhadap Administrasi Kependudukan.
2. Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil;
 - c. Meningkatkan pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi;
 - d. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Pencapaian target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai target kinerja dan pendanaan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan merumuskan:

1. Program Penunjang Perangkat Daerah, 6 Kegiatan, 17 Sub Kegiatan.
2. Program Pendaftaran Penduduk, 1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan.
3. Program Pencatatan Sipil, 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 2 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan.

Dari rumusan program terdapat alokasi anggaran Renstra Tahun 2025 sebesar Rp 18.390.039.803,00 dan Renja 2025 sebesar Rp 25.371.756.350,00 terdapat selisih sebesar Rp 6.981.716.547,00. Sesuai dengan kebutuhan Rencana Kerja tahun 2025 dan Forum OPD yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 serta penginputan Ranwal Renja OPD Tahun 2025 melalui SIPD-RI, dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RANWAL RENSTRA		KEBUTUHAN	
				2025	2025	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			Rp 16.159.063.367	Rp 20.666.858.075		
		1	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 7.300.000.000	Rp 7.758.699.041		
		1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.300.000.000	Rp 7.758.699.041		
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 450.000.000	Rp 880.954.000		
		2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 100.000.000	Rp 72.454.000		
		3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 350.000.000	Rp 808.500.000		
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 5.485.000.000	Rp 8.831.590.374		
		4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 25.000.000	Rp -		
		5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 950.000.000	Rp 4.136.204.875		
		6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 25.000.000	Rp -		
		7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 3.500.000.000	Rp 2.495.757.271		
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Rp 550.000.000	Rp 1.527.797.178		
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 15.000.000	Rp 20.728.500		
		10	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 20.000.000	Rp 51.102.550		
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 400.000.000	Rp 600.000.000		
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 660.000.000	Rp 1.288.212.440		
		12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 500.000.000	Rp 993.947.000		
		13	Pengadaan Mebel	Rp 80.000.000	Rp 294.265.440		
		14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 80.000.000	Rp -		
		5	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	Rp 1.384.063.367	Rp 1.144.275.620		
		15	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp 125.000.000	Rp 81.445.000		
		16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 275.000.000	Rp 116.402.400		
		17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 30.000.000	Rp -		
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 954.063.367	Rp 946.428.220		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RANWAL RENSTRA		KEBUTUHAN	
				2025		2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 880.000.000	Rp 763.126.600		
			19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 570.000.000	Rp 641.635.500		
			20 Pemeliharaan Mebel	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000		
			21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 290.000.000	Rp 106.491.100		
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Rp 635.120.133	Rp 1.948.362.425		
		7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 485.120.133	Rp 1.948.362.425		
			22 Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Rp 110.000.000	Rp 1.474.596.075		
			23 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp 375.120.133	Rp 473.766.350		
		8	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 150.000.000	Rp -		
			24 Sosialisai Pendaftaran Penduduk	Rp 150.000.000	Rp -		
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Rp 381.072.041	Rp 491.846.975		
		9	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 256.072.041	Rp -		
			25 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokument atas Peristiwa Penting	Rp 100.000.000	Rp -		
			26 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 156.072.041	Rp -		
		10	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp 125.000.000	Rp 491.846.975		
			27 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp 125.000.000	Rp -		
			28 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Rp -	Rp 491.846.975		
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Rp 1.139.784.262	Rp 2.264.688.875		
		11	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp 704.784.262	Rp 297.700.000		
			29 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp 654.784.262	Rp -		
			30 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp 50.000.000	Rp 297.700.000		
		12	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 435.000.000	Rp 1.966.988.875		
			31 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 360.000.000	Rp 662.248.875		
			32 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 75.000.000	Rp 1.304.740.000		
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Rp 75.000.000	Rp -		
		13	Penyusunan Profil Kependudukan	Rp 75.000.000	Rp -		
			33 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp 75.000.000	Rp -		
JUMLAH ANGGARAN				Rp 18.390.039.803	Rp 25.371.756.350		

Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan nomor : 050/0898/Bappeda-Litbang tanggal 03 Juli 2024 tentang Penyampaian Pagu dan Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sesuai dengan pagu indikatif rancangan akhir Renja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan perincian penggunaan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENSTRA	RANWAL	RANKHIR	
				2025			
1	2	3	5	6	7	8	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				20.666.858.075	17.251.753.450	
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.568.875	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	14.568.875	
		2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah			7.758.699.041	8.189.553.000
		2	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.300.000.000	7.758.699.041	8.189.553.000	
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			880.954.000	986.474.000
		3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	72.454.000	72.454.000	
		4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000	808.500.000	914.020.000	
		4	Adminstras Umum Perangkat Daerah			8.831.590.374	5.678.640.435
		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	-	-	
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	950.000.000	4.136.204.875	884.194.787	
		7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	-	-	
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.000.000	2.495.757.271	2.575.532.138	
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	550.000.000	1.527.797.178	1.626.282.460	
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	20.728.500	41.528.500	
		11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	51.102.550	51.102.550	
		12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	600.000.000	500.000.000	
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			360.554.000	
		13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	993.947.000	360.554.000	
		14	Pengadaan Mebel	80.000.000	294.265.440	-	
		15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	-	-	
		6	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah			1.267.030.640	
		16	Penyediaan Jasa surat menyurat	125.000.000	81.445.000	81.850.000	
		17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	116.402.400	236.786.400	
		18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	-	-	
		19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	954.063.367	946.428.220	948.394.240	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENSTRA	RANWAL	RANKHIR	
				2025			
1	2	3	5	6	7	8	
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			754.932.500	
			20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	570.000.000	641.635.500	649.667.500
			21	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	15.000.000	15.000.000
			22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.000.000	106.491.100	90.265.000
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			635.120.133	1.948.362.425	1.448.362.425	
		8	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.948.362.425	1.448.362.425
			1	Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	110.000.000	1.474.596.075	974.596.075
			2	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	-	-
			3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-
			4	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	375.120.133	473.766.350	473.766.350
		9	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			-	-
			1	Sosialisai Pendaftaran Penduduk	150.000.000	-	-
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			381.072.041	491.846.975	-	
		10	Pelayanan Pencatatan Sipil			-	-
			1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokument atas Peristiwa Penting	100.000.000	-	-
			2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	156.072.041	-	-
		11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			491.846.975	-
			1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	125.000.000	-	-
			2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	-	-	-
			3	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	-	491.846.975	-
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
		12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				
			1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	654.784.262	-	-
			2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	50.000.000	297.700.000	759.315.250
		13	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
			1	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	360.000.000	662.248.875	540.568.875

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENSTRA	RANWAL	RANKHIR
				2025		
1	2	3	5	6	7	8
			Kependudukan			
		2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.000.000	1.304.740.000	-
05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				-	-
		14	Penyusunan Profil Kependudukan		-	-
		1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	75.000.000	-	-
JUMLAH ANGGARAN				18.390.039.803	25.371.756.350	20.000.000.000

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja yang disusun dengan kegiatan prioritas dan rutin (sekretariat) sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN.
2. Belanja operasional :
 - a. Belanja Bimtek.
 - b. Belanja barang : ATK, Pakaian, suku cadang, cetakan, penjilidan, makanan dan minuman, alat-alat listrik, belanja peralatan kebersihan, koran.
 - c. Belanja Jasa : gaji naban, lembur Non PNS, honorarium lintas sektor (kepala PA, operator PA, Kepala KUA se-Balikpapan dan operator), telpon, fax, SMS center, SMS Gateway, paket pengiriman/surat, pajak kendaraan dinas.
 - d. Belanja pemeliharaan : Pemeliharaan kendaraan, penggantian suku cadang, BBM, pemeliharaan peralatan komputer dan jaringan, pemeliharaan peralatan kantor.
 - e. Belanja Hibah (hibah uang).
 - f. Belanja perjalanan dinas.
 - g. Belanja Modal.

Program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap pencapaian target kinerja dan anggaran tahun 2025 berguna untuk semua masyarakat pada umumnya dan Kota Balikpapan pada khususnya, rumusan Rencana Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Renstra 2021-2026 Tahun ke-3 dengan alasan bahwa kegiatan prioritas di tahun 2025 yakni:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Dengan memperhatikan Inventarisasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan jumlah ASN sebanyak 46 orang

terdiri dari 35 orang PNS dan 9 orang P3K dan nantinya di tahun 2025 penambahan 2 orang P3K orang maka tahun 2025 jumlah pegawai ASN berjumlah 46 orang. Anggaran ranwal/renstra untuk pembayaran gaji PNS dan P3K masih terdapat kekurangan.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Pengadaan Pakaian Dinas untuk seluruh pegawai yang meliputi ASN (PNS & PPPK) serta Naban. Pengadaan pakaian dinas untuk bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dalam kerapian pegawai.
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
Kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan SDM bagi pegawai Disdukcapil tentang perubahan peraturan/kebijakan Administrasi Kependudukan dan optimalisasi DUKCAPIL GO DIGITAL dalam konteks kelembagaan, pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

3. Kegiatan Administrasi Umum.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, merupakan kegiatan administrasi umum penunjang kegiatan kantor rutin yang harus tersedia.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Tahun 2025, sewa tanaman, belanja modal home use, pengadaan komputer, printer menuju SIAK TERPUSAT (layanan Adminduk dalam genggam), printer fargo pencetak KTP dan pengadaan Belanja Modal UPS (server).
- Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan ATK (kertas dan cover, tinta toner,) Natuna (gula pasir, kopi,teh), makanan dan minuman.
- Sub Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Pengalokasian Bantuan Keuangan atau Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan) dengan mekanisme Hibah Barang Pembelian Blanko KTP-el.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Jasa berlangganan koran dan iklan di koran lokal dan publikasi iklan di koran lokal.
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
Penyediaan makanan dan minuman tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Knsultasi SKPD
Pagu Renstra masih terdapat kekurangan karena tahun 2025 merupakan tahun politik maka Disdukcapil sebagai pengelola Administrasi Kependudukan direncanakan kegiatan luar daerah akan bertambah.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan.
Kendaraan dinas yg dipergunakan untuk pelayanan jemput bola bagi penduduk rentan administrasi kondisinya sudah tidak layak pakai untuk dipergunakan sehingga di Tahun 2025 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil bermaksud untuk kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit dan belanja sewa kendaraan roda 4 yang diperuntukan untuk jabatan sebanyak 2 unit (kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil).
5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat.
Pengiriman jasa surat menyurat, pengiriman blanko KTP, pengiriman peralatan yang perlu diperbaiki.
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Belanja jasa telpon, fax, internet, SMA center, SMS gateway dan SMS/ WA Broadcast.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.
Dengan belum adanya penyesuaian gaji Non PNS (asumsi sesuai UMK, gaji/honor Naban, belanja lembur digitalisasi arsip, belanja peralatan kebersihan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan.
Belanja BBM (bahan bakar minyak), penggantian suku cadang, pemeliharaan kendaraan/servise/perawatan, dengan kendaraan dinas R2 sebanyak 18 unit, R4 sebanyak 9 unit total 27 Unit kendaraan dinas.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan meubel.
Dipergunakan untuk perbaikan meubel.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Pemeliharaan peralatan : Mesin foto copi, CCTV, mesin absensi, sound system.

b. Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Sub Kegiatan Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan.
Tahun 2025 akan diadakan pendataan non permanen dan rentan administrasi dengan melakukan kerjasama dengan RT untuk melakukan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan.
- Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa

Kependudukan.

Akan mengadakan pelayanan jemput bola dengan melakukan perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah dan gerakan DUKCAPIL GOES TO CAMPUS. Perekaman KTP bagi lansia, dan difabel.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

- Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan akan melakukan pengadaan brosur, spanduk dan cetak lainnya, video pelayanan, makanan dan minuman lapangan dan kegiatan FKP.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dengan kegiatan pemeliharaan komputer, peralatan computer, peralatan personal komputer :

- a. Belanja pemeliharaan pemeliharaan komputer/komputer unit personal komputer.
- b. Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer.
- c. Belanja pemeliharaan peralatan jaringan.
- d. Belanja pemeliharaan peralatan komputer lainnya
- e. Belanja Modal Pengembangan aplikasi SIAK (penunjang layanan online).

BAB V INOVASI

Inovasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk memenuhi Indikator Capaian Kinerja.

Dalam upaya untuk melaksanakan Rencana Aksi dan Inovasi untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan menuju “Tertib Administrasi Kependudukan Menuju Penduduk yang berkualitas” langkah-langkah yang akan dilakukan merupakan INOVASI percepatan pencapaian pelayanan dengan melaksanakan Inovasi sebagai berikut :

- a. Pelayanan Dokumen Kependudukan *One Day Service*
- b. Pelayanan Integrasi Data Perkawinan *One Stop Service*
- c. Pelayanan Mobil Keliling “GLAMOR”, Gerai Layanan Mobil Ramah
- d. Pelayanan Akta Kelahiran, kematian dan dokumen pencatatan sipil lainnya secara *online* .
- e. Pelayanan dokumen kependudukan (perubahan KK, pindah datang) secara Online.
- f. Jum’at berbagi
- g. Inovasi pelayanan perekaman/pengambilan KTP-el antrian online.
- h. Pelayanan TTE (Tanda Tanda Elektronik) melalui Akta-akta dan dokumen kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kartu Keluarga.

Adapun inovasi sebagai berikut :

1. **GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk).**

Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat “GISA” adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintah yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal yakni :

1. Kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan.
2. Kesadaran pemanfaatan data kependudukan.
3. Pentingnya pemutakhiran data kependudukan.
4. Pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

“GISA” diharapkan akan terbangunnya ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, dengan target sasaran “GISA” adalah masyarakat, aparatur petugas aparatur petugas pelayanan Dukcapil, dan lembaga pengguna (pemerintah dan swasta). Puncak akhir dari “GISA” adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

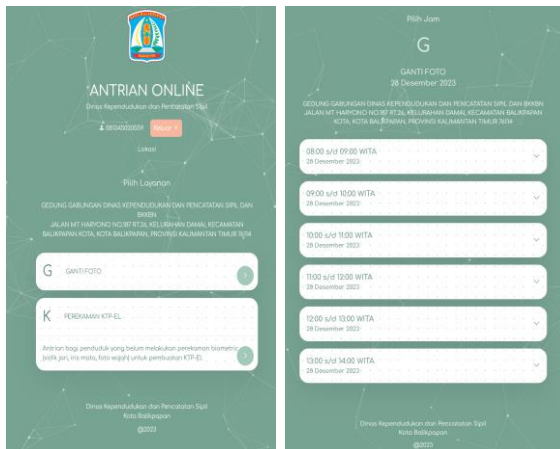
Gerai layanan Mobil Ramah



1. Antrian Online Perekaman KTP el



2. Identitas Kependudukan Digital (IKD)



3. Konsep Café Pelayanan



4. Jumat Berbagi



5. Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)



6. Link Pelayanan Online

PENGAMBILAN DOKUMEN MELALUI GOJEK WACAT (Wargaku KeCapil, Aku Tau)



WaCAT

No Telepon


Kata Sandi

Login →

← Back to capil.balikipapan.go.id

PENDAFTARAN PENDUDUK NON PERMANEN


YOUTUBE OFFICIAL DISDUKCAPIL



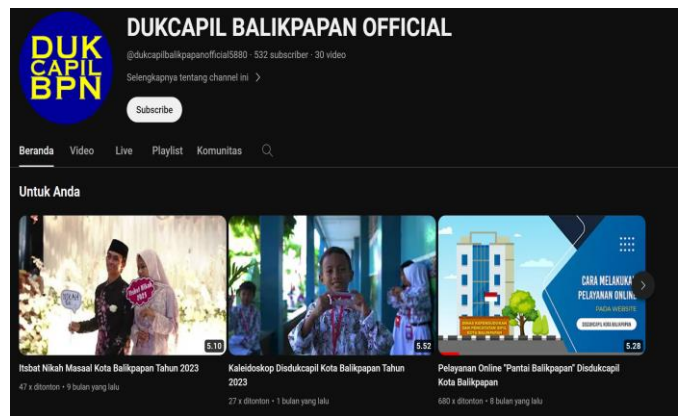
Pendaftaran Penduduk Non Permanen
 Belum Punya Akun? [Buat Disini](#)

Email

Kata Sandi [Lupa kata sandi ?](#)

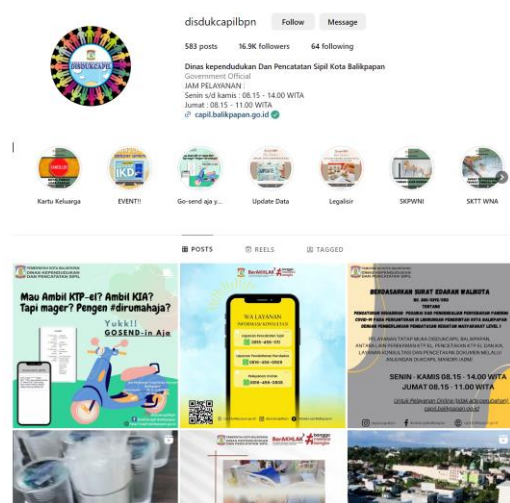
Captcha


Masuk

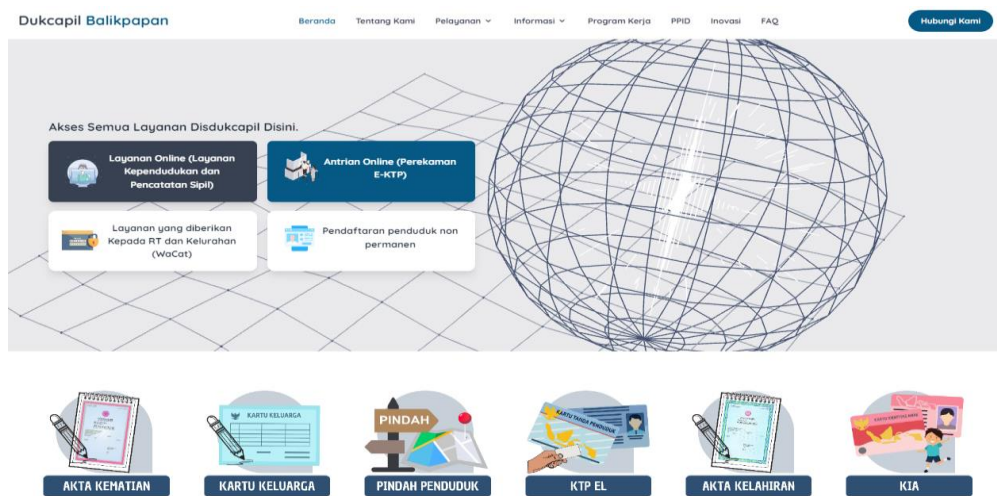


FACEBOOK DISDUKCAPIL

INSTAGRAM DISDUKCAPIL



WEBSITE DISDUKCAPIL



LAYANAN PENGADUAN KONSULTASI



LOKET PENGADUAN / KONSULTASI OFFLINE



15. Pelayanan kegiatan pembuatan akte 3 in 1 (akte kelahiran, KIA, KK)

Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) masih menjadi salah satu focus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang di tahun 2022 ini mulai melayani penerbitan KIA dengan jemput bola di sekolah-sekolah di Balikpapan dan kerjasama dengan pihak Kelurahan se-Kota Balikpapan.

16. Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pihak ketiga

Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pihak Ketiga

No	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	Nama dan Bidang Kerjasama
1	RSUD Kanujoso Djatiwibowo	Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2014	Persyaratan dan tata cara pelayanan Akta Kelahiran Online di Rumah Sakit dan Puskesmas 24 Jam
2	RSU Tk. II Dr. H. Hardjanto		
3	RSUD Balikpapan		
4	RS Restu Ibu		
5	RS Pertamina		
6	RS Siloam		
7	RS Balikpapan Baru		
8	RSKB Sayang Ibu		
9	RS Bhayangkara		
10	RSIA Permata Hati		
11	RSB Kasih Bunda		
12	RS HERMINA		
13	Poliklinik IBNU SINA		
14	Klinik Kesehatan Ibu & Anak Nabila		
15	Klinik Mitra Sehat		
16	Puskesmas 24 Jam		

17. Rekapitulasi Pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dengan OPD Terkait Dengan Pemanfaatan Data

No	OPD	Dasar Hukum	Nama dan Bidang Kerjasama
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam layanan Sistem Interkoneksi Data Kepegawaian antar Perangkat Daerah dengan Stakeholder (SIDAK PEDAS)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam layanan Aplikasi e-Planning
3	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el untuk pelayanan PBB – P2
4	Dinas Kesehatan Kota	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) dan lingkup tugas DKK
5	Dinas Tenaga Kerja	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISKA)
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam aplikasi seleksi beasiswa (Perguruan Tinggi) secara online bagi penduduk Kota Balikpapan
7	Dinas Perdagangan	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam layanan aplikasi e-retribusi
8	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam layanan Sistem Informasi Manajemen IMTN
9	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Surat persetujuan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI	Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP el dalam layanan aplikasi sistem informasi pemuda Balikpapan

Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dilakukan yakni rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2023 dengan melakukan kegiatan pelayanan:

1. Pelayanan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1, sampai 6 in 1 layanan dalam 1 paket (KTP, KK, Akta Kematian, akta perkawinan, akta lahir dan KIA)
2. Pembuatan KTP melalui on line.
3. Perekaman pembuatan KTP-el yang tidak merubah elemen data boleh diluar domisili.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) dipergunakan untuk percepatan pembuatan akte kelahiran.
5. Bangun Ekosistem : Data dan dokumen kependudukan dapat digunakan untuk semua keperluan.
6. Akta Kelahiran Online.
7. Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan
8. Pindah penduduk tidak perlu pengantar RT dimohonkan melalui online
9. Penyajian data penduduk sampai tingkat kelurahan.
10. Face Recognition dengan foto KTP el untuk penegakan hukum.
11. DUKCAPIL GO DIGITAL yaitu semua dokumen ditandatangani secara elektronik.
12. Melakukan jemput bola pengambilan data anak sia Sekolah Dasar (SD) dengan mendatangi langsung ke sekolah.

Inovasi lain yang akan dilakukan pada tahun 2025 yakni :

- Pendataan Penduduk non permanen.
- Digitalisasi arsip pencatatan sipil.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berhubungan dengan kepemilikan dokumen penduduk dan pencatatan sipil yang tersimpan dalam arsip/berkas yang memerlukan waktu dalam pencocokan data kependudukan, untuk menindak lanjuti hal tersebut maka Dinas Kependudukan di tahun 2025 akan melakukan DIGITALISASI BERKAS ARSIP KEPENDUDUKAN (DUKCAPIL GO DIGITAL).

BAB VI PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan bertekad untuk semakin Go Digital dalam pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di era digital sekarang masyarakat menginginkan pelayanan publik yang serba cepat termasuk layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Melalui pelayanan yang serba cepat dan tidak bertele-tele, standar layanan yang diberikan Disdukcapil Kota Balikpapan mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. "Masyarakat senang misalnya membuat KTP elektronik dan akte kelahiran "tidak memerlukan waktu yang lama.

Dengan pelayanan yang berbasis elektronik (TTE) pelayanan yang cepat dan aman juga menjadi faktor kunci yang membawa perubahan paradigma pelayanan sehingga masyarakat dapat dilayani dari mana saja. Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, mendorong instansi/lembaga pemerintah untuk pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan aman.

6.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Renja 2025

Dalam penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan secara Nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 siap melaksanakan untuk :

1. Pembenahan sistem pelayanan agar mendapatkan data kependudukan yang akurat.
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil, diantaranya dengan pelayanan gerai mall pelayanan publik (MPP), dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
3. Data kependudukan dan pencatatan sipil dipergunakan untuk merencanakan dan mengeksekusi program pemerintah.
4. Membuat sistem yang transparan agar meminimalisir kontak dengan petugas untuk mencegah adanya pungutan liar (pungli).
5. Meningkatkan kualitas SDM dengan memperbaiki mentalitas, integritas, dan kompetensi aparatur.
6. Menciptakan budaya kerja yang kompetitif dengan penerapan reward and punishment yang dilakukan secara terus menerus dan terukur.
7. Menghilangkan paradigma lama "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah" untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan.

Dari 7 point tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sudah dan telah melakukan pembenahan sistem pelayanan, menyiapkan Drive Thru layanan mobile dan jemput bola, tersedia ADM di kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data kependudukan dan pencatatan sipil dipergunakan untuk merencanakan dan mengeksekusi program pemerintah, pelaksanaan permohonan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui “DARING” sehingga akan mengurangi tatap muka dengan masyarakat, dan mempermudah layanan kepada masyarakat peningkatan kualitas SDM dengan memperbaiki mentalitas, integritas, dan kompetensi aparatur akan diusulkan dalam Bimbingan Teknis Aparatur pada tahun 2025, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung SIAK Terpusat (pengadaan komputer).

6.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 :

1. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan untuk pelaporan peristiwa kematian yang belum dilapor sehingga bisa langsung diterbitkan akta kematian dengan Buku Pokok Pemakaman (BPP).
2. Membuka layanan online pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA).
3. Jemput bola perekaman di Sekolah tingkat SLTA untuk pencapaian tingkat perekaman, dan di Lapas Balikpapan.
4. Jemput bola pelayanan pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan KTP bagi masyarakat yang terkena musibah/bencana.
5. Melaksanakan percepatan program Identitas Kependudukan Digital (IKD).
6. Pencetakan dokumen kependudukan dalam pelayanan terintegrasi tidak dilakukan terpisah di pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, tetapi dilakukan oleh 1 (satu) operator.
7. Penuntasan target perekaman wajib KTP-el utama, yaitu wajib KTP melalui jemput bola, perekaman ke sekolah-sekolah dan gerakan Dukcapil Goes To Campus.
8. Melakukan pelayanan pendekatan kepada masyarakat dengan membuka layanan di Kecamatan se-Balikpapan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja yang disusun dengan kegiatan prioritas dan rutin sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik dengan rencana kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Hibah Pengadaan Blanko KTP-El
2. Forum Konsultasi Publik
3. Bimtek Pegawai
4. Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil
5. Pendataan Penduduk Non Permanen
6. Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk
7. Belanja Pegawai yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN.

Usulan Lintas Instansi yang diusulkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dalam Forum Perangkat Daerah pada tanggal 12 Februari 2024 yakni :

1. Penggantian Plafon Kantor.
2. Rehab untuk ruang kerja.
3. Pembangunan Parkir kendaraan roda 2 (sepeda motor).
4. Rehab ruang kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang.
5. Pemasangan pintu otomatis lobby masuk kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2025 dengan melakukan kegiatan pelayanan dan terus berbenah baik dalam hal pelayanan maupun dalam penyederhanaan prosedur/birokrasi. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas serta usulan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025 untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						20.000.000.000,00							26.650.636.708,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.000.000.000,00							26.650.636.708,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						20.000.000.000,00							26.650.636.708,00		
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	87.5 Nilai			87.5 Nilai	17.251.753.450,00						87.5 Nilai	23.309.313.683,00		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen Pelaporan SAKIP yang mencakup Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			5 Dokumen	14.568.875,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	14.568.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				714 Orang/bulan	8.189.553.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		7.965.511.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</i>	-			84.50 Nilai	986.474.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	1.312.801.188,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	72.454.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		72.454.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				79 Orang	914.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		1.240.347.188,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			83 Nilai	5.678.640.435,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	10.305.438.618,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	884.194.787,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		4.335.010.390,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	2.575.532.138,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		3.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	1.626.282.460,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		1.527.797.178,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	41.528.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		41.528.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	51.102.550,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		51.102.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			81 Nilai	360.554.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	993.947.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	81.850.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	236.786.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	948.394.240,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		1.227.046.902,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</i>	-			83 Nilai	754.932.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	990.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				27 Unit	649.667.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		650.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				36 Unit	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				21 Unit	90.265.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<i>Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk</i>	93,12 %			93,12 %	1.448.362.425,00						93,12 %	1.948.362.425,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Persentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan</i>	-			100 %	1.448.362.425,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	1.948.362.425,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</i>				3560 Dokumen	974.596.075,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		1.474.596.075,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan</i>				1 Laporan	473.766.350,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		473.766.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik</i>	100 %			100 %	1.299.884.125,00						100 %	1.392.960.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<i>Presentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan</i>	-			100 %	759.315.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	730.711.725,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</i>				15 Dokumen	759.315.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		730.711.725,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Presentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dikelola</i>	-			100 %	540.568.875,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	662.248.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				3 Laporan	540.568.875,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		662.248.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
J U M L A H								20.000.000.000,00							26.650.636.708,00	

M. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknis lalu lintas dan parkir, tekni sangkutan dan terminal, teknis sarana dan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2025 dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan stakeholders yang ada. Rencana Kerja ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, kemudian menyusun agenda kerja tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai Ketua Tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai Sekretaris Tim, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi, Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Sarana Lalu Lintas dan PJU, Kepala Seksi Data Informasi dan Sistem Kontrol Kawasan Lalu Lintas, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus, Kepala Seksi Angkutan Orang, Kepala Seksi Pengendalian

Operasional, Kepala Bidang Perairan dan Udara, Kepala Seksi Angkutan Laut Sungai Danau dan Penyeberangan, Kepala Seksi Kepelabuhanan & Kebandarudaraan sebagai Anggota Penyusun, Kepala UPTD. dan Kepala Sub Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, Kepala UPTD. dan Kepala Sub Tata Usaha Pengelola Parkir, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai Anggota Penyusun serta staf perwakilan dari bidang, seksi dan UPTD sebagai Anggota Pengumpul Data dan Pengetikan.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain : Peraturan Perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen seperti RTRW Kota Balikpapan, Renstra Kementerian Perhubungan serta Rencana Strategis Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan periode lalu.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 050/1754/Bappeda-Litbang Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024.

7. Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-202/2024 tentang Tim Penyusunan Rancana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 dan Perubahan Rancana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategis pembangunan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja PD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Capaian kinerja renja perangkat daerah , merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Renja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada akhir tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel T-C.29. berikut ;

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2023 KOTA BALIKPAPAN**

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW 1 tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	80	76,00	77,00	1,02	0,01	78,00	0	0
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	86,00	87,00	0,96	0,01	88	0,00	0,00
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	86,00	87,00	1,00	0,01	87	0,00	0,00

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW 1 tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	86,00	87,00	1,40	0,02	88	0,00	0,00
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82	0,00	81,00	1,23	0,02	0	0,00	0,00
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	86,00	87,00	0,98	0,01	88	0,00	0,00
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	81,00	80,00	1,00	0,01	83	0,00	0,00
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi	93	113,64	87,00	1,64	0,02	91	0,00	0,00
		Persentase load faktor angkutan orang umum	62					57		

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW 1 tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	30	0,00	31,00	0,17	0,01	32	0,00	0,00
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	65	113,92	50,00	1,18	0,02	31	0,00	0,00
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase penyediaan terminal penumpang angkutan jalan Type-C	55,00	33,23	40,00	0,67	0,02		0,00	0,00
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	75	93,00	71,00	1,00	0,01	73	0,00	0,00
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	75	92,08	69,00	0,51	0,01	71	0,00	0,00
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	45	41,00	42,00	1,00	0,02	43	0,00	0,00

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW 1 tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	14	14,22	12,00	1,00	0,08	12	0,00	0,00
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27	7,60	23,00	1,00	0,04	23	0,00	0,00
2 15 02 2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	55	52,24	53,00	1,00	0,02	53	0,00	0,00
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	55	50,00	51,00	1,00	0,02	53	0,00	0,00

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW 1 tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	80	62,00	59,00	1,19	0,02	66	0,00	0,00
2 15 03 2.19	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	85	87,95	82,00	1,00	0,01	83	0,00	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran. Suatu Indikator Kinerja Utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian Indikator Kinerja Utama daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Uraian rincian tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, beserta targetnya dapat disajikan sebagai Tabel T-C.30. dibawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Balikpapan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan.			77,84	78,08	78,32	78,56						Indikator Tujuan
2			VC Ratio di Jalan Kota.	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,51	0,50			IKK OUTCOME (Indikator Sasaran)
3	Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola.			0,57	0,57	0,59	0,63	0,57	0,62	0,63			Indikator Sasaran
4	Nilai SAKIP OPD.			76,79	76,79	77,25	78,75	76,97	76,14	69,42			Indikator Sasaran
5	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.			N/A	27,00	28,75	30,50	27,00	33,46	-			Indikator Sasaran
6	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.			0,83	0,85	0,87	0,89	-	1,13				Indikator Program
7	Persentase load faktor angkutan orang umum.			0,42	0,42	0,47	0,52	-	0,37	0,30			Indikator Program
8		Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan.		0,03	4,2%	4,4%	4,8%	-	3,50%	3,39%			Indikator SDGs Indikator Nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran Perpres).

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
9		Jumlah dermaga penyeberangan.		1	1	1	1	1	1	1			Indikator SDGs Indikator Nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran Perpres).
10		Jumlah pelabuhan strategis.		4	4	4	4	4	4	4			Indikator SDGs Indikator Nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11			Rasio konektivitas kabupaten/kota.	0,54	0,62	0,62	0,62	110,9	0,52	0,50			IKK OUTCOME
12			Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C.	0,33	0,35	0,4	0,45	38,5	0,68	0,74			IKK OUTPUT (Indikator kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C)
13			Terlaksananya pelayanan uji berkala.	13000	15500	16000	16500						IKK OUTPUT

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
14			Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.	0	0	0,01	0						IKK OUTPUT (Penetapan tarif angkutan orang dalam kota)
15			Persentase pelaksanaan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota.	0,4	0,41	0,42	0,43						IKK OUTPUT (Indikator Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab./ Kota)
16	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan.			0,69	0,7	0,71	0,72						Indikator kegiatan
17	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan.			65,4%	0,67	0,69	0,71						Indikator kegiatan
18	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.			0,3	0	0,31	0,32						Indikator kegiatan
19	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan.			0,4	0,45	0,5	0,55						Indikator kegiatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
20	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan.			0,1	0,1	0,11	0,12						Indikator kegiatan
21	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.			0,17	0,19	0,21	0,23						Indikator kegiatan
22	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota.			0,5	0,51	0,52	0,53						Indikator kegiatan
23	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.			0,5	0,51	0,52	0,53						Indikator kegiatan
24	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan.			0,8	0,81	0,82	0,83						Indikator kegiatan
25	Persentase TUKS yang dilakukan pengawasan.			0,31	0,31	0	0	0	0	0			Indikator kegiatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Penyediaan Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan yang Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman bagi Masyarakat Kota Balikpapan;
2. Pembangunan Parkir, Depo Kontainer, Pergudangan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Pembangunan Dermaga eks Paradiso;
4. Pengadaan Marka Jalan Perkotaan;
5. Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan;
6. Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan;
7. Pengadaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan;
8. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU);
9. Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU);

2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja PD

Dalam rangka mencapai Visi ***“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman di Huni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”*** dan Misi ke-3 (tiga) Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai leading sektor merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Pelayaran;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari perencanaan awal untuk dapat melaksanakan program/kegiatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran **Rp. 110.581.302.652,-** (*seratus sepuluh milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*). Perencanaan awal program/kegiatan dapat dilihat pada tabel T-C.31. berikut;

Tabel T-C.31
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rancangan Awal Renja Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan	
									Target	Rp	Target	Rp
Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas.	Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota.	VC Ratio di Jalan Kota	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi	91	47.160.884.620	91	69.405.820.000
								Persentase load faktor angkutan orang umum	57	19.705.000.000	57	4.530.000.000
			2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	75	5.650.000.000	75	8.650.000.000
			2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	73	10.275.000.000	73	11.275.000.000
			2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	60	39.080.884.620	60	59.995.820.000
			2	15	2	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	50	5.000.000.000	50	4.500.000.000
			2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab./Kota	Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kab./Kota	44	2.430.000.000	44	760.000.000
			2	15	2	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	13	3.160.000.000	13	3.160.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rancangan Awal Renja Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan	
									Target	Rp	Target	Rp
			2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	25	1.150.000.000	25	1.250.000.000
			2	15	02	2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kab./Kota	54	70.000.000	54	70.000.000
			2	15	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	54	50.000.000	54	50.000.000
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa pelayanan penyeberangan.	Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola	2	15	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan.	68	5.425.000.000	68	3.675.000.000
			2	15	03	2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	84	5.425.000.000	84	3.675.000.000
			2	15	03	2.19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase TUKS yang dilakukan pengawasan	0	-	0	-
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	2	15	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	79	38.290.418.033	79	50.210.115.380
			2	15	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89	17.294.520.793	89	17.294.520.793

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rancangan Awal Renja Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan	
									Target	Rp	Target	Rp
	Perangkat Daerah		2	15	1	02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88	5.000.000.000	88	4.967.711.920
			2	15	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89	1.459.920.000	89	1.311.905.427
			2	15	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	89	2.163.177.943	89	2.163.177.943
			2	15	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81	400.000.000	81	12.900.000.000
			2	15	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89	7.986.863.297	89	6.114.535.297
			2	15	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	3.985.936.000	84	5.458.264.000
									110.581.302.653		144.515.935.380	

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan di diskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan Rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dapat dilihat pada Tabel T-C.32 ;

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah lokasi ZoSS yang dibangun	2 lokasi	Usulan melalui Forum OPD: DP3AKB permohonan ZoSS (Zona Selamat Sekolah) di SMP Negeri 1 dan SD Negeri 003 Balikpapan Kota.
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Alat Penerangan Jalan dipelihara		Laporan Monitor Usulan Aspirasi melalui SIPD RI: (Kanti Suharjo, Jl. Jendral Sudirman RT. 2, Kota Balikpapan) lampu jalan tidak menyala dikarenakan jaringan listrik tidak ada
3	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Penyediaan Alat Penerangan Jalan		Laporan Monitor Usulan Aspirasi melalui SIPD RI: (Kanti Suharjo, Jl. Jendral Sudirman RT. 2, Kota Balikpapan) tidak ada lampu jalan dan wilayah RT. 2 gelap
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Penyediaan Alat Penerangan Jalan	10 titik	Laporan Monitor Usulan Aspirasi melalui SIPD RI: Jalan Gelap (10 TITIK)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam hal ini Dinas Perhubungan merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur transportasi. Transportasi merupakan sistem yang utuh, terdiri dari berbagai sub sistem yang berkaitan satu sama lain. Sub sistem ini meliputi jaringan pelayanan, jaringan infrastruktur dan fasilitas penunjang, sarana atau kendaraan/armada, peraturan dan pengaturan operasional serta manusia sebagai pelaku maupun pengguna yang menikmati manfaat. Sub sistem ini saling mempengaruhi satu sama lain di dalam suatu aturan tertentu, sehingga tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Keterpaduan ini pada hakekatnya dapat menciptakan efisiensi dan efektifitasnya dalam bentuk kegunaan waktu, kegunaan tempat dan kegunaan wujud.

Dengan demikian transportasi yang merupakan sarana sangat penting dan strategis dalam berbagai perspektif yang tercermin pada semakin lancarnya mobilitas, baik orang maupun barang. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong serta penggerak bagi pertumbuhan wilayah potensial tetapi belum berkembang. Pembangunan perhubungan dalam realita berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang ini berperan penting pada kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perhubungan harus senantiasa berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional maupun pada tatanan perekonomian global.

Dalam rangka pencapaian Tujuan 9 SDGs yaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur, maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, yaitu;

1. Jumlah dermaga penyeberangan;
2. Jumlah pelabuhan strategis.

Sedangkan Tujuan 11 SDGs (Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan), maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, yaitu;

1. Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan.

Perwujudan Tujuan 9 dan Tujuan 11 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu;

1. Meningkatnya tingkat pelayanan jalan, dengan indikator VC Ratio di Jalan Kota;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa pelayanan penyeberangan, dengan indikator Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berdasarkan Tema Perencanaan Pembangunan RPJMD 2021-2026, tema pembangunan masuk pada Tahun Ke-IV/ 2025 yaitu Pengembangan Seluruh Sektor Untuk Pementapan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kota. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu;

1. Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa pelayanan penyeberangan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Program pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Pelayaran;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk memperoleh hasil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai suatu sasaran tertentu. Penentuan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja memegang peran yang sangat penting berdasarkan prinsip, pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan berkelanjutan, keberadilan, akuntabilitas, transparan dan kepastian hukum.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk periode Tahun 2025 merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut;

I PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

- 1 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- 2 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 4 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- 5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- 6 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- 7 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 8 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 9 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

II PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

- 1 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mendukung Visi Kota Balikpapan “*Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman*”, dan Misi ke-3 (tiga) Kota Balikpapan: Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai, serta tema pembangunan Tahun Ke-IV/ 2025 yaitu Peningkatan Kualitas SDM dan pemerataan akses layanan dasar berkualitas untuk mendukung pengembangan ekonomi, dengan Fokus Pembangunan Percepatan Ekonomi Daerah dan Infrastruktur untuk Pemerataan Akses Pelayanan Dasar.

Dengan adanya penyusunan Rencana Kerja program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun perencanaan program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel T-C.33. berikut;

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Balikpapan

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	0 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi	Balikpapan	91		93	44.482.360.000
					Persentase load faktor angkutan orang umum		57		62	16.405.000.000
2	15	0 2	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	Balikpapan	75	5.650.000.000	75	6.215.000.000
2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	Balikpapan	73	6.275.000.000	75	9.525.000.000
2	15	0 2	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Balikpapan	-	-	33	650.000.000
2	15	0 2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Balikpapan	60	44.195.820.000	65	36.157.360.000
2	15	2	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Balikpapan	50	315.000.000	55	1.250.000.000
2	15	0 2	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLM untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Balikpapan	44	760.000.000	45	2.110.000.000
2	15	2	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	Balikpapan	13	3.160.000.000	14	3.160.000.000

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	25	5.397.500.000	27	1.700.000.000
2	15	02	2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	54	70.000.000	55	70.000.000
2	15	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	54	50.000.000	55	50.000.000
2	15	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan.	Balikpapan	68	3.805.000.000	70	925.000.000
2	15	03	2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	Balikpapan	84	3.805.000.000	85	925.000.000
2	15			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	79	37.517.915.380	80	61.381.030.087
2	15	1	02.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	4	79.718.100	4	79.718.100
2	15	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	89	19.731.006.000	90	17.813.356.417
2	15	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	88	2.249.634.600	89	26.000.000.000

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	89	1.264.799.657	90	1.605.912.000
2	15	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	89	2.865.375.842	90	2.344.295.737
2	15	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	81	0	82	838.473.290
2	15	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	89	5.782.586.500	90	8.414.463.044
2	15	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	84	5.594.619.917	85	4.364.529.600
								107.246.060.616		123.193.390.087

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ditentukan oleh fungsi perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan memberikan arah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan ditetapkan untuk menjembatani antara penelitian kebijakan dengan perumusan kebijakan, dan antara perumusan kebijakan dengan penerapan kebijakan. Disamping itu perencanaan dilakukan karena terbatasnya sumber daya dan dalam rangka untuk memperkecil atau mengurangi resiko yang timbul karena ketidakpastian dimasa mendatang.

Perencanaan perhubungan selalu berpegang kepada pendekatan kesisteman agar keterpaduan perangkat keras (*hardware*) seiring dan sejalan dengan perangkat lunak (*software*) serta pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Proses perencanaan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan bagian dari proses perencanaan secara makro nasional yang mempertemukan kepentingan sektoral dengan kepentingan regional dan lokal.

Semoga rencana Kerja ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan bersama seluruh unit dan perangkat dalam lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN

6.1 Surat Keputusan Walikota Balikpapan Tentang Tim Penyusun Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024 Dinas Perhubungan Kota Balikpapan



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-202/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, perlu membentuk Tim Penyusun Renja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Renja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 dan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Renja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 dan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Renja tahun 2025 dan perubahan Renja tahun 2024, baik dalam hal persiapan, mekanisme, penyelenggaraan, pelaksanaan, penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Renja tahun 2025 dan perubahan renja tahun 2024; dan
 - b. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi keseluruhan mekanisme dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja tahun 2025 dan Perubahan Renja tahun 2024.
 2. Ketua:
 - a. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja;
 - b. membantu Pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja;
 - c. memimpin penyusunan Renja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2021-2026; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan Renja kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
 3. Anggota:
 - a. mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
 - b. melakukan analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
 - c. melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan; dan
 - d. merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2021-2026.
- KETIGA : Tim Penyusun Renja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terhitung mulai bulan Januari 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Februari 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,


RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-202/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONEL TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Kepala Dinas Perhubungan
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kabid Lalu Lintas Jalan2. Kabid Angkutan3. Kabid Perairan dan Udara4. Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi5. Kasi Pemeliharaan, Prasarana, Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum6. Kasi Angkutan Orang7. Kasi Pengendalian Operasional8. Kasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan9. Kasi Kepelabuhanan dan Kebendarudaraan10. Kepala UPTD Pengelolaan Parkir11. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor12. Kasubbag Program dan Keuangan13. Kasubbag Umum14. Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Parkir15. Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor16. Urip Hartono17. Mahfuzh Yazid18. Azizah19. Ning Umianah20. Leni Hardianti21. Hariyani22. Elia Octo Bernandus23. Raihan Daffa24. Ta Krisla Dyan Putriana25. Dyah Nurmila26. Leo Hermansyah27. Alberto Sinaga

WALI KOTA BALIKPAPAN,


RAHMAD MAS'UD

6.2 Surat Rekapitulasi Renja Penetapan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 (SIPD 10 JULI 2024)

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						95.271.235.380,00							102.477.850.086,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						95.271.235.380,00							102.477.850.086,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						95.271.235.380,00							102.477.850.086,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	37.517.915.380,00						-	61.381.030.086,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	79.718.100,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	79.718.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	2.249.634.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk perin gkatan pelayanan publik Mewujudka n Pemerata an Infrastru ktur yang berkualitas	-		26.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			89 Nilai	1.264.799.657,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk perin gkatan pelayanan publik Mewujudka n Pemerata an Infrastru ktur yang berkualitas	-	-	1.605.912.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				160 Paket	954.799.657,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk perin gkatan pelayanan publik Mewujudka n Pemerata an Infrastru ktur yang berkualitas	-		1.254.528.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	310.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		351.384.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			89 Nilai	2.865.375.842,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		2.344.295.737,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				19 Paket	38.413.830,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		127.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	1.439.760.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Mewujudka n Pemerata an Infrastru ktur yang berkualitas	-		2.525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Mewujudka n Pemerata an Infrastru ktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	4.337.826.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Mewujudka n Pemerata an Infrastru ktur yang berkualitas	-		4.264.902.243,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>JKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			84 Nilai	5.594.619.917,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	5.984.090.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				120 Unit	3.124.264.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		3.025.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				42 Unit	884.485.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.619.560.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi</i>				8 Unit	1.585.870.817,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.339.529.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi</i>	93% 62Persen 62%			57 % 91 %	53.948.320.000,00						93% 62Persen 62%	40.171.820.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan perlengkapan jalan</i>	-			60 %	44.195.820.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	32.831.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				25 Unit	3.325.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				242 Unit	6.260.064.620,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				169 Unit	1.428.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.558.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan														
			<i>Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				19500 Unit	33.182.255.380,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		30.648.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C</i>	-			50 %	315.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)															
			<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara</i>				2 Unit	315.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</i>	-			44 %	760.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	2.110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	215.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>				7 Dokumen	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>				2 Laporan	525.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan</i>	-			13 %	3.160.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		3.160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>				16 Laporan	360.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		360.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				227 Laporan	2.800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		2.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			25 %	5.397.500.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				21 Unit	5.397.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			54 %	70.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Persentase Pelayanan Kepelabuhanan</i>	68 %			68 %	3.805.000.000,00						68 %	925.000.000,00	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan</i>	-			84 %	3.805.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	925.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				1 Unit	3.380.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>				2 Laporan	425.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		425.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR								6.275.000.000,00							9.525.000.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.275.000.000,00							9.525.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						6.275.000.000,00							9.525.000.000,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi</i>	93% 62Persen 62%			57 % 91 %	6.275.000.000,00						93% 62Persen 62%	9.525.000.000,00	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan</i>	-			73 %	6.275.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	9.525.000.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>				11 Unit	1.948.037.940,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		5.000.000.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				7 Orang	492.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		200.000.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				55000 Dokumen	308.891.925,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.625.000.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				4 Unit	3.214.529.135,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		2.500.000.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				2 Laporan	311.041.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		200.000.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
		UPTD PENGELOLAAN PARKIR							5.650.000.000,00							6.215.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.650.000.000,00								6.215.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						5.650.000.000,00								6.215.000.000,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi</i>	93% 62Persen 62%			57 % 91 %	5.650.000.000,00							93% 62Persen 62%	6.215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan</i>	-			75 %	5.650.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	-	6.215.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PARKIR	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	5.650.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		6.215.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN PARKIR	
J U M L A H									107.196.235.380,00							118.217.850.086,00	

N. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (*comon goals*) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak pada Perangkat Daerah. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemuakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2022 adalah untuk merumuskan rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1. Tersedianya Dokumen Penjabaran Renstra Diskominfo Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada akhir tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah melakukan Evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Dari hasil evaluasi tersebut dapat kita lihat capaian baik pada Renja Tahun 2023 maupun capaian Renstra Dinas komunikasi dan informatika Kota Balikpapan tahun 2017 – 2021.

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama dan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, maka capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada akhir tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut :

Untuk capaian dari sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Kinerja IKU
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88	95,16	108%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	2,6	4,60	177%	Sangat Tinggi
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,70	4,07	110%	Sangat Tinggi
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,3	3,70	112%	Tinggi
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,2	2,27	103%	Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	65,5	70,38	107%	Sangat Tinggi

Dari data capaian pada tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator adalah **120%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Sangat Tinggi**. Dengan demikian, dari rata-rata capaian kinerja diatas secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Tabel E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Balikpapan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daera h Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	9.109.108.990	86,89	5.139.841.914	85	7.296.713.000	0	1.253.955.956	0	1.739.394.952	0	1.359.485.538	86,91	1.963.289.204	86,91	6.316.125.650	102,24%	86,56%	86,91	6.316.125.650	102%	69,34%	Diskominfo	Target capaian pada kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Nilai	85	6.655.000.000	86,65	4.234.283.899	85	5.500.000.000	0	1.059.549.148	0	1.531.076.318	0	1.063.052.331	87,22	1.114.077.426	87,22	4.767.755.223	102,61%	86,69%	87,22	4.767.755.223	103%	71,64%		Target capaian pada kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit per angkat daerah Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					26	5.500.000.000	25	1.059.549.148	24	1.531.076.318	26	1.063.052.331	30	1.114.077.426	30	4.767.755.223	115,38%	86,69%	30	4.767.755.223	0%	0%		Pada tw IV sub kegiatan ini terealisasi sebesar 30 orang dari target perubahan renja sebesar 26 orang dan melebihi target yang ditetapkan karena adanya tambahan 4 orang PPPK pada bulan Oktober 2023
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	85	165.000.000	86,98	37.050.000	85	40.000.000	0	-	0	-	0	-	86,92	33.245.094	86,92	33.245.094	102,26%	83,11%	86,92	33.245.094	102%	20%		Target capaian pada kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					41	40.000.000	0	-	0	-	0	-	52	33.245.094	52	33.245.094	126,83%	83,11%	52	0	0%	0%		Pada tw IV sub kegiatan ini terealisasi sebesar 52 orang dari target perubahan renja sebesar 41 orang dan melebihi target yang ditetapkan karena adanya tambahan 4 orang PPPK pada bulan Oktober 2023 dan pegawai 112 yang

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit per angkat daerah Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
																												dapat mengikuti kegiatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85	1.121.000.000	86,98	358.673.899	85	980.213.000	0	92.145.863	0	117.349.767	0	217.220.740	86,38	501.542.540	86,38	928.258.910	101,62%	94,70%	86,38	928.258.910	0%	82,81%		Target capaian pada kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	1	19.999.500	1	19.999.500	100,00%	100,00%	1	19.999.500	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					2	209.800.000	0	-	0	-	0	-	2	209.413.710	2	209.413.710	100,00%	99,82%	2	0	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	paket					3	300.070.000	1	2.570.000	0	79.781.500	1	78.637.900	1	93.447.900	3	254.437.300	100,00%	84,79%	3	254.437.300	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit per angkat daerah Pena nggu ng jawab	Penjelasan		
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %				16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket					2	29.468 .000	0	-	0	-	0	-	2	29.077. 000	2	29.077. 000	100,0 0%	98,67 %	2	29.077. 000	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lapor an					1	20.875 .000	0	-	0	-	0	1.747.5 00	1	13.583. 900	1	15.331. 400	100,0 0%	73,44 %	1	15.331. 400	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan		
		Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an					4 8	400.00 0.000	1 8	89.575 .863	8	37.568 .267	10	136.835 .340	15	136.020 .530	51	400.000 .000	106,2 5%	100,0 0%	51	400.000 .000	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan melebihi target yang ditetapkan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Nilai	85	344.108 .990	86,93	231.116. 932	8 5	436.50 0.000	0	40.103 .032	0	59.072 .593	0	51.453. 309	86, 97	149.635 .660	86,97	300.264 .594	102,3 2%	68,79 %	86, 97	300.264 .594	0%	87,26 %		Target capaian pada kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Lapor an					1	500.00 0	0	0	0	0	0	34.000	1	466.000	1	500.000	100,0 0%	100,0 0%	1	500.000	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daera h Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Lapor an					1 2	200.00 0.000	3	17.591 .968	3	14.955 .997	3	17.652. 713	3	21.174. 632	12	71.375. 310	100,0 0%	35,69 %	12	71.375. 310	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Lapor an					1	16.000 .000	0	0	0	0	0	-	1	15.750. 000	1	15.750. 000	100,0 0%	98,44 %	1	0	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an					1 2	220.00 0.000	3	22.511 .064	3	44.116 .596	3	33.766. 596	3	112.245 .028	12	212.639 .284	100,0 0%	96,65 %	12	212.639 .284	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit per angkat daerah Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	504.000 .000	86,93	229.923. 414	8 5	340.00 0.000	0	62.157 .913	0	31.896 .274	0	27.759. 158	87, 05	164.788 .484	87,05	286.601 .829	102,4 1%	84,29 %	87, 05	286.601 .829	10 2%	56,87 %		Target capaian pada kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit					3	123.00 0.000	3	26.308 .393	0	11.947 .185	0	15.075. 446	3	45.705. 650	3	99.036. 674	100,0 0%	80,52 %	3	99.036. 674	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	unit					6	161.00 0.000	6	35.849 .520	0	19.949 .089	0	12.683. 712	6	63.442. 834	6	131.925 .155	100,0 0%	81,94 %	6	131.925 .155	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daera h Pena nggu ng jawab	Penjelasan		
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %				16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit					21	31.000.000	0	0	0	0	0	-	21	30.640.000	21	30.640.000	100,00%	98,84%	21	30.640.000	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan		
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Gedung Kantor					1	25.000.000	0	0	0	0	1	-	0	25.000.000	1	25.000.000	100,00%	100,00%	1	25.000.000	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan		
	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;	Persentase	80%	5.221.500.000	100%	4.164.604.263	80%	3.988.858.200	95%	107.428.244	95%	343.083.165	100%	2.907.893.485	100%	522.074.280	100%	3.880.479.174	125,00%	97,28%	100%	3.880.479.174	125%	74,32%		Target capaian program ini telah direalisasikan pada TW I dan telah melampaui target yang telah ditetapkan		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daera h Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Persentase	90 %	5.221.500.000	100%	4.164.604.263	90 %	3.988.858.200	95 %	107.428.244	95 %	343.083.165	100 %	2.907.893.485	100 %	522.074.280	100%	3.880.479.174	111,11 %	97,28 %	100 %	3.880.479.174	111 %	74,32 %		Target capaian kegiatan ini telah direalisasikan pada TW I dan telah melampaui target yang telah ditetapkan
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	domain					1	102.500	0	-	0	-	1	-	1	102.500	1	102.500	100,00 %	100 %	1	102.500	0 %	0 %		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit					1	3.988.755.700	0	107.428.244	0	343.083.165	1	2.907.893.485	1	521.971.780	1	3.880.376.674	100,00 %	97,28 %	1	3.880.376.674	0 %	0 %		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit per angkat daerah Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	Persentase	80%	4.030.908.304	90%	2.405.047.651	80%	4.957.776.900	90%	91.974.928	90%	748.954.300	93%	895.115.233	96,5%	2.995.234.331	96,5%	4.731.278.792	120,6%	95,43%	97%	4.731.278.792	121%	117,38%		Target capaian program ini telah direalisasikan pada TW I dan telah melampaui target yang telah ditetapkan
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	Persentase	80%	4.030.908.304	100%	2.405.047.651	80%	4.957.776.900	80%	91.974.928	80%	748.954.300	93%	895.115.233	100%	2.995.234.331	100%	4.731.278.792	125,0%	95,43%	100%	4.731.278.792	125%	117,38%		Target capaian kegiatan ini telah direalisasikan pada TW I dan telah mencapai target yang ditetapkan
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	104.840.500	0	19.074.384	0	9.921.266	0	18.281.916	1	33.322.428	1	80.599.994	100,0%	76,88%	1	80.599.994	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daera h Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah n Berbasis Elektronik	Doku men					1	46.194 .500	0	50.000	0	10.765 .000	1	20.664. 000	0	9.684.3 22	1	41.163. 322	102,0 0%	89,11 %	1	41.163. 322	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	Unit					1	350.00 0.000	1	-	1	349.41 6.900	1	-	1	-	1	349.416 .900	100,0 0%	99,83 %	1	349.416 .900	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Doku men					1	9.000. 000	0	-	0	-	1	-	0	8.930.0 00	1	8.930.0 00	100,0 0%	99,22 %	1	8.930.0 00	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daera h Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah					6	40.000.000	0	0	0	-	6	9.967.800	0	29.967.800	6	39.935.600	100,00%	99,84%	6	39.935.600	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW III dan mencapai target yang ditetapkan
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit					10	913.000.000	5	57.498.700	0	286.793.368	14	120.083.226	1	366.717.088	20	831.092.382	200,00%	91,03%	20	831.092.382	0%	0%		Target capaian pada sub kegiatan ini akan direalisasikan pada TW IV dan melampaui target yang telah ditetapkan
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen					1	3.205.354.500	0	10.200.000	0	81.805.000	0	606.380.917	1	2.426.925.103	1	3.125.311.020	100,00%	97,50%	1	3.125.311.020	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan	Dokumen					1	100.000.000	0	-	0	-	0	56.553.119	1	23.190.556	1	79.743.675	100,00%	79,74%	1	79.743.675	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daera h Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	an dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																								target yang ditetapkan	
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Doku men					1	70.000.000	0	0	0	0	1	28.989.229	0	40.000.000	1	68.989.229	100,00%	98,56%	1	68.989.229	0%	0%	Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	doku men					1	119.387.400	0	5.151.844	0	10.252.766	1	34.195.026	0	56.497.034	1	106.096.670	100,00%	88,87%	1	106.096.670	0%	0%	Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan	
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	Perse ntase	80%	3.728.736.796	65%	3.225.877.104	80%	8.203.251.400	0%	196.378.618	0%	1.730.116.111	0%	1.333.265.631	71%	4.348.570.017	71%	7.608.330.377	88,75%	92,75%	71%	7.608.330.377	89%	204,05%	Target capaian program ini telah direalisasikan pada TW IV dan telah melampaui target yang telah ditetapkan	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daera h Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
			mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota																									
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	persentase	80%	3.728.736.796	80%	3.225.877.104	80%	8.203.251.400	0%	196.378.618	20%	1.730.116.111	41%	1.333.265.631	94,4%	4.348.570.017	94,4%	7.608.330.377	118,00%	92,75%	94,4%	7.608.330.377	118%	204,05%	Target capaian program ini telah direalisasikan pada TW IV dan telah melampaui target yang telah ditetapkan	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daera h Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	doku men					1	581.34 8.000	2	27.459 .738	3	179.59 5.661	3	135.125 .835	3	179.541 .092	11	521.722 .326	100,0 0%	89,74 %	11	521.722 .326	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Daerah	doku men					1	113.40 8.000	0	-	0	17.820 .366	0	5.797.7 95	1	85.268. 481	1	108.886 .642	100,0 0%	96,01 %	1	108.886 .642	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	doku men					1	829.26 9.000	0	16.483 .688	0	99.427 .199	0	105.078 .932	1	389.595 .340	1	610.585 .159	100,0 0%	73,63 %	1	610.585 .159	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media	doku men					1	5.612. 071.40 0	0	152.43 5.192	0	1.185. 562.88 5	0	909.109 .620	1	3.130.1 83.845	1	5.377.2 91.542	100,0 0%	95,82 %	1	5.377.2 91.542	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit per angkat daerah Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
			Komunikasi Publik																									
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	doku men					1	55.275 .000	0	-	0	-	0	43.377. 200	1	5.468.1 00	1	48.845. 300	100,0 0%	88,37 %	1	48.845. 300	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layan an					3	91.280 .000	0	-	0	-	3	630.000	0	28.620. 000	3	29.250. 000	100,0 0%	32,04 %	3	29.250. 000	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW III dan mencapai target yang ditetapkan
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang					7 2	52.000 .000	0	-	0	-	72	12.680. 519	0	34.705. 534	72	47.386. 053	100,0 0%	91,13 %	72	47.386. 053	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW III dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit per angkat daerah Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Penyediaan/Pe ngadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Unit					2 3	868.60 0.000	1 9	0	4	247.71 0.000	0	121.465 .730	12	495.187 .625	35	864.363 .355	152,1 7%	99,51 %	35	864.363 .355	0%	0%		Realisasi capaian pada TW IV telah melampaui target yang ditetapkan pada Renja Perubahan 2023 dan realisasi juga telah mencapai dan sesuai pada target DPPA tahun 2023
	Mening katnya Keterbu kaan Informa si Publik	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang mengguna kan data statistik dalam menyusun perencanaan pembanguna n daerah	Perse ntase	90 %	401.829 .005	95%	249.536. 297	8 0 %	205.65 2.500	0 %	-	5 0 %	77.922 .900	70 %	12.765. 700	10 0%	109.251 .508	100%	199.940 .108	125,0 0%	97,22 %	10 0%	199.940 .108	11 1%	49,76 %		Capaian telah memenuhi target yang ditetapkan karena seluruh PD telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
		Penyelenggara n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase PD yang menyelengga rakan statistik melalui Portal Satu Data	Perse ntase	80 %	401.829 .005	95%	249.536. 297	5 0 %	205.65 2.500	0 %	-	5 0 %	77.922 .900	70 %	12.765. 700	10 0%	109.251 .508	100%	199.940 .108	200,0 0%	97,22 %	10 0%	199.940 .108	12 5%	49,76 %		Capaian telah memenuhi target yang ditetapkan karena seluruh PD telah melakukan pengisian data melalui portal satu data

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit per angkat daerah Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen					1	89.907.500	0	-	0	3.322.900	0	12.765.700	1	69.443.508	1	85.532.108	100,00%	95,13%	1	85.532.108	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Perangkat Daerah					37	75.020.000	37	-	37	74.600.000	37	-	37	-	37	74.600.000	100,00%	99,44%	37	74.600.000	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit					1	25.000.000	0	-	0	-	0	-	1	24.420.000	1	24.420.000	100,00%	97,68%	1	24.420.000	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	dokumen					1	15.725.000	0	-	0	-	0	-	1	15.388.000	1	15.388.000	100,00%	97,86%	1	15.388.000	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daerah Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	Presentase	80 %	688.656.259	100%	395.853.000	80 %	410.550.000	0 %	-	25 %	81.663.200	64 %	8.583.400	80 %	281.077.077	80%	371.323.677	100,00%	90,45 %	80 %	371.323.677	100%	53,92 %		Target capaian program ini telah direalisasikan pada TW IV dan telah melampaui target yang telah ditetapkan
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	Presentase	80 %	688.656.259	100%	395.853.000	80 %	410.550.000	70 %	-	70 %	81.663.200	82 %	8.583.400	90 %	281.077.077	90%	371.323.677	112,50%	90,45 %	90 %	371.323.677	112,50%	53,92 %		Target capaian program ini telah direalisasikan pada TW IV dan telah mencapai target yang telah ditetapkan
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	dokumen					1	29.200.000	0	-	1	-	0	-	0	29.000.000	1	29.000.000	100,00%	99,32 %	1	29.000.000	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit per angkat daerah Pena nggu ng jawab	Penjelasan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %													
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					1	24.225.000	0	-	0	-	0	-	1	24.000.000	1	24.000.000	100,00%	99,07%	1	24.000.000	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan					1	207.125.000	0	-	0	-	0	-	1	201.058.100	1	201.058.100	100,00%	97,07%	1	201.058.100	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW IV dan mencapai target yang ditetapkan
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah					2	150.000.000	1	-	2	81.663.200	3	8.583.400	0	27.018.977	22	117.265.577	100,00%	78,18%	22	117.265.577	0%	0%		Target capaian subkegiatan ini telah direalisasikan pada TW III dan mencapai target yang ditetapkan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit peran gkat daera h Pena nggu ng jawab	Penjelasan
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		16	17	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				107,37%	90,28%			25,78%	23,11%			
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				104,61%	90,15%			0%	0%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				118%	89,07%			89,89%	82%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				110%	93,28%			108%	94,79%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat menganalisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dapat dilakukan penjabaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja yang telah dilaksanakan, yakni berdasarkan Tabel 2.1 Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2023 diatas yang merupakan evaluasi hasil Renja Sampai dengan akhir Triwulan IV, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Total rata – rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh sub kegiatan adalah 104,61 % dengan predikat kinerja “sangat tinggi”
2. Total rata – rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan adalah 118 % dengan predikat kinerja “sangat tinggi”
3. Total rata – rata capaian kinerja dengan anggaran dari seluruh program adalah 110 % dengan predikat “sangat tinggi”

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indicator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2023 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2023), adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Program : IKM Internal Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 102,24% dengan realisasi nilai 86,91 dari target IKM Internal Perangkat Daerah dengan nilai 85.

Dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 4 (empat) kegiatan yakni :

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 102,61% dengan realisasi kinerja nilai IKM 87,22 dari target kinerja Nilai IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 85.

Dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 1 (satu) sub kegiatan yakni :

1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 115,38% dengan realisasi kinerja 30 orang dari target kinerja dokumen gaji dan tunjangan ASN sebanyak 26 orang. Capaian kinerja pada sub kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan karena adanya tambahan 4 orang PPPK pada bulan Oktober 2023.

1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 102,26% dengan realisasi kinerja nilai IKM 86,92 dari target kinerja nilai IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 85.

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 1 (satu) sub kegiatan yakni :

1.2.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 126,83% dengan realisasi 52 pegawai dari target kinerja Jumlah pegawai yang mendapatkan baju dinas beserta atributnya kelengkapannya sebanyak 41 pegawai. Capaian kinerja ini melebihi target yang ditetapkan karena adanya tambahan 4 orang PPPK pada bulan Oktober 2023 dan pegawai 112 yang dapat mengikuti kegiatan.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 101,62% dengan realisasi kinerja nilai IKM 86,38 dari target kinerja IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 85.

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 1 (lima) sub kegiatan yakni :

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 paket dari target kinerja Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket.

1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 2 paket dari target kinerja Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 2 paket.

1.3.3 Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 3 paket dari target kinerja Jumlah paket bahan logistik kantor yang sediakan sebanyak 3 paket.

1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat baik” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 2 paket dari target kinerja Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket.

1.3.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan.

1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 106,25% dengan realisasi kinerja 51 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 48 laporan.

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 102,32% dengan realisasi kinerja nilai IKM 86,97 dari target kinerja IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 85.

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yakni :

1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat sebanyak 1 laporan.

1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 12 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan.

1.4.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan.

1.4.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 12 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 102,41% dengan realisasi kinerja nilai IKM 87,05 dari target kinerja IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 85.

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yakni :

1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Keegiatan :

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 3 unit dari Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 3 unit.

1.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 6 unit dari target kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya sebanyak 6 unit.

1.5.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara **Evaluasi Hasil :**

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 21 unit dari target kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 21 unit.

1.5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 gedung kantor dari target kinerja Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 gedung kantor.

2. Program Aplikasi Informatika

Indikator Program I :

Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 125% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara sebesar 100%.

Indikator Program II :

Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 120,63% dengan realisasi kinerja 96,5% dari target kinerja Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi sebesar 80%.

Dari Program Aplikasi Informatika terdapat 2 (dua) kegiatan yakni :

2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015

Evaluasi Hasil :

Predikat Kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 111,11% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 sebesar 90%.

Pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yakni :

2.1.1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 domain dari target kinerja Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 1 domain.

2.1.2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 unit dari target kinerja Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebanyak 1 unit.

2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 125% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah sebesar 80%.

Pada kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 8 (delapan) sub kegiatan yakni:

2.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 dokumen.

2.2.2 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 1 dokumen pada Triwulan III.

2.2.3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola **Evaluasi Hasil :**

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 unit dari target kinerja Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola sebanyak 1 unit.

2.2.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi sebanyak 1 dokumen.

2.2.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 6 Perangkat daerah dari target kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik sebanyak 6 perangkat daerah.

2.2.6 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 200% dengan realisasi kinerja 20 unit dari target kinerja Dokumen hasil audit aplikasi sebanyak 10 unit.

2.2.7 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City sebanyak 1 dokumen.

2.2.8 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) sebanyak 1 dokumen.

2.2.9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE sebanyak 1 dokumen.

3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Program :

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “tinggi” dengan capaian kinerja 88,75% dengan realisasi kinerja 71% dari target kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 80%. Indikator pada program ini tidak tercapai dikarenakan kurangnya SDM Publikasi sehingga publikasi yang dilaksanakan belum maksimal dalam mempublikasikan program prioritas. Adapun kerjasama yang dilakukan dengan media massa dan media online belum dapat memenuhi cakupan publikasi program prioritas tersebut.

Dari Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdapat 1 (satu) kegiatan yakni :

3.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM).

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 118% dengan realisasi kinerja 94,4% dari target kinerja Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) sebesar 80%.

Dari kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 8 (delapan) sub kegiatan yakni :

3.1.1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 11 dokumen dari target kinerja yakni

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sebanyak 11 dokumen.

3.1.2 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dari realisasi 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen.

3.1.3 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebanyak 1 dokumen.

3.1.4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebanyak 1 dokumen.

3.1.5 Pelayanan Informasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik sebanyak 1 dokumen.

3.1.6 Layanan Hubungan Media

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Layanan Hubungan Media

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dan realisasi kinerja 3 layanan dari target kinerja Jumlah Layanan Hubungan Media sebanyak 3 layanan.

3.1.7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 72 Orang dari target kinerja Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya sebanyak 72 orang.

3.1.8 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 152,17% dengan realisasi kinerja 35 unit dari target kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 23 unit. Realisasi capaian pada TW IV telah melampaui target yang ditetapkan pada Renja Perubahan 2023 dan realisasi juga telah mencapai dan sesuai pada target DPPA tahun 2023

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator Program :

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 125% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebesar 80%.

Dari Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdapat 1 (satu) kegiatan yakni :

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 200% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data sebesar 50%.

Dari Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdapat 4 (empat) sub kegiatan yakni :

1.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebanyak 1 dokumen.

1.1.2 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pelatihan Statistik Sektoral dari BPS

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 37 perangkat daerah dari target kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pelatihan Statistik Sektoral dari BPS sebanyak 37 perangkat daerah.

1.1.3 Pengembangan Infrastruktur

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Infrastruktur Statistik

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 unit dari target kinerja sebanyak 1 unit.

1.1.4 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun sebanyak 1 dokumen.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Indikator Program :

Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 80% dari target kinerja Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah sebesar 80%.

Dari Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdapat 1 (satu) kegiatan yakni :

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 112,5% dengan realisasi kinerja 90% dari target kinerja Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian sebesar 80%.

Dari kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 4 (empat) sub kegiatan yakni :

2.1.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen.

2.1.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen.

2.1.3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebanyak 1 dokumen.

2.1.4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 22 perangkat daerah dari target kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi sebanyak 22 perangkat daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting atau isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

2.1 Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan;
- Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;

- Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
- Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Balikpapan;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
- Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju e-commerce;
- Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City;
- Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

2.2 Statistik

- Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
- Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.

2.3 Persandian

- Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Pada rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2023 terdapat 5 (lima) program yakni 4 (empat) program urusan dan 1 (satu) program penunjang). Dari kelima program tersebut telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan disusun berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, serta berdasarkan pada sasaran strategis Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Capaian tujuan dan sasaran kota dihasilkan dari tujuan dan sasaran OPD yang telah selaras dengan RPJMD Kota. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian terhadap keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim kepada kabupaten/kota	Hasil Evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim terkait keterbukaan informasi publik yang terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kualitas Informasi; 2. Aspek Jenis Informasi; 3. Inovasi dan Strategi; 4. Komitmen Organisasi; 5. Sarana dan Prasarana ; 6. Aspek Digitalisasi. 	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika

	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain kebijakan SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen dan audit TIK SPBE	<p>Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Rintisan b. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Terkelola c. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Terdefinisi d. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Terpadu dan terukur Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum 	Kementerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika
--	--	------------------------------	---	--	---------------------------------------	----------------------------------

		Indeks domain layanan SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas, kinerja, pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan publik unggulan lainnya.	Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut : e. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Informasi f. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Interaksi g. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Transaksi h. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Kolaborasi Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum	Kemenerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika
--	--	----------------------------	--	---	--------------------------------------	----------------------------------

		<p>Indeks Domain Tata Kelola SPBE</p>	<p>Penilaian tingkat kematangan indikator arsitektur, peta rencana, anggaran, proses bisnis SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinator SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE</p>	<p>Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Rintisan j. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Terkelola k. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Terdefinisi l. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Terpadu dan terukur Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum 	<p>Kementerian PAN-RB Republik Indonesia</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---

		Indeks Domain Manajemen SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator manajemen resiko, keamanan informasi, data, aset, SDM, pengetahuan, perubahan, layanan SPBE, audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE	Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut : m. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Rintisan n. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Terkelola o. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Terdefinisi p. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Terpadu dan terukur Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum	Kementerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika
--	--	------------------------------	---	--	---------------------------------------	----------------------------------

	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Balikpapan	Inspektorat Kota Balikpapan	Dinas Komunikasi dan Informatika
--	---	------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------

Tabel diatas telah menjelaskan mengenai formulasi perhitungan serta sumber data guna mencapai IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan selain itu pada penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan target dari IKU tersebut, adapun target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 adalah :

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	nilai	90
2	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain kebijakan SPBE	nilai	3,0
		Indeks domain layanan SPBE	nilai	3,80
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	nilai	3,7
		Indeks Domain Manajemen SPBE	nilai	2,4
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	nilai	66,50

Tabel Tc. 31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM Internal Perangkat Daerah	85	10.186.986.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM Internal Perangkat Daerah	85	10.186.986.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP DISKOMINFO	66,5	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP DISKOMINFO	66,5	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	-	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen RKA SKPD					Dokumen RKA SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan	1 Dokumen	-	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Keuangan	85	6.000.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Keuangan	85	6.000.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perangkat Daerah)					Perangkat Daerah)			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	6.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	6.000.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Laporan	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Laporan	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	12 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	12 Laporan	-	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		anan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85	-	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balikpapan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balikpapan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	1 Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	1 Laporan	-	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Milik Daerah pada SKPD					Milik Daerah pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	727.359.340	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	700.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	65 Pegawai	62.574.340	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	65 Pegawai	150.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Pegawai	598.785.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Pegawai	250.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	66.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	300.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85	1.974.124.760	Administrasi Umum Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85	1.651.486.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	11.923.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	1.015.174.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	250.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	5 paket	299.641.650	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	5 paket	335.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	26.485.910	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	26.486.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	19.982.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	600.916.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1.000.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87	381.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85	260.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	93.600.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	187.200.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Balikpapan	Jumlah Unit aset tak berwujud yang Disediakan	40 unit	101.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Balikpapan	Jumlah Unit aset tak berwujud yang Disediakan	40 unit	200.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87	1.195.507.850	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	1.215.500.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	1 Laporan	2.499.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	1 Laporan	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	828.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	848.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	349.508.850	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	87	372.301.450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	85	360.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 unit	137.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 unit	135.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	6 unit	181.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	6 unit	170.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	29.301.450	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	30.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	25.000.000	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;	90%	10.000.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;	80%	10.000.000	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub	90%	10.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan	90%	10.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015					domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015			
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 dokumen	10.000.000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 dokumen	10.000.000	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	85%	12.676.950.700	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online	80%	13.046.500.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dan atau terintegrasi			
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	80%	12.676.950.700	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	80%	13.046.500.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Balikpapan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Balikpapan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	100.000.000	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	655.000.000	
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Balikpapan	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Balikpapan	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	35.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	180.249.410	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	370.000.000	
	Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Balikpapan	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	75.000.000	Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Balikpapan	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	100.000.000	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Balikpapan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	10 Aplikasi	1.150.000.000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Balikpapan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE	10 Aplikasi	1.308.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								pemerintah daerah			
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan	1 Dokumen	100.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								keuangan daerah			
	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Balikpapan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	604.945.590	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Balikpapan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	750.000.000	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Balikpapan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	7.448.755.700	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Balikpapan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	4.600.000.000	
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Balikpapan	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah	4 Layanan	20.000.000	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Balikpapan	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan	4 Layanan	150.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional					Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional			
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Balikpapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 dokumen	75.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Balikpapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	-	
	Implementasi inovasi program kota cerdas sesuai dengan masterplan kabupaten atau kota cerdas	Balikpapan	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan	4 Program	2.283.000.000	Implementasi inovasi program kota cerdas sesuai dengan masterplan kabupaten atau kota cerdas	Balikpapan	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan	4 Program	2.250.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten/Kota Cerdas					Kabupaten/Kota Cerdas			
	Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Balikpapan	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Balikpapan	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	475.000.000	
	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Balikpapan	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	20.000.000	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Balikpapan	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	50.000.000	
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	-	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	2.008.500.000	
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Balikpapan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah	-	-	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Balikpapan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang	5 Aplikasi	45.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ditempatkan di Pusat Data Nasional					sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional			
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	-	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	21.168.720.320	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	80%	20.142.938.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								daerah kabupaten/kota			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80%	21.168.720.320	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80%	20.142.938.000	
	Relasi Media	Balikpapan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo,	2 aktivitas	130.340.000	Relasi Media	Balikpapan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas	2 aktivitas	130.340.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media					Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media			
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	0 Komunitas	64.650.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	0 Komunitas	64.650.000	
	Pelayanan Informasi Publik	Balikpapan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 permohonan	186.770.000	Pelayanan Informasi Publik	Balikpapan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 permohonan	200.000.000	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Balikpapan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan	6 rekomendasi	1.196.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Balikpapan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang	6 rekomendasi	1.341.375.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah					dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	49 Media	16.087.405.320	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	49 Media	16.055.347.000	
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Strakom	198.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Strakom	199.245.000	
	Penyusunan Konten	Balikpapan	Jumlah Konten Informasi Publik	1920 Konten	3.305.555.000	Penyusunan Konten	Balikpapan	Jumlah Konten Informasi Publik	1920 Konten	2.151.981.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang	90%	700.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah (PD)	90%	500.581.400	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	70%	700.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	70%	500.581.400	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	68 Orang	403.804.835	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	68 Orang	211.580.000	
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Balikpapan	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan statistik untuk Perencanaan, monitoring dan	80%	282.495.165	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Balikpapan	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan statistik untuk Perencanaan, monitoring dan	Persentase (80%)	275.301.400	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			evaluasi pembangunan atau penyusunan kebijakan					evaluasi pembangunan atau penyusunan kebijakan			
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data	1 Dokumen	13.700.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data	1 Dokumen	13.700.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	80%	400.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	80%	538.035.341	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	80%	400.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan	80%	538.035.341	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								oleh persandian			
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	53.035.341	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	150.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	200.000.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah	24 PD	100.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang	25 PD	285.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			
	TOTAL				Rp. 45.606.764.420					Rp. 44.425.040.741	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini berisi tentang usulan dari para pemangku kepentingan yang terkait dan dapat mendorong capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Adapun usulan yang masuk dan telah diverifikasi oleh bidang terkait dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Tc.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Aplikasi Informatika	Balikpapan	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi		
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah		
	Implementasi inovasi program kota cerdas sesuai dengan masterplan kabupaten atau kota cerdas		Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	22 titik	Penyediaan Wifi Diruang Publik Kota Balikpapan

Usulan ini merupakan usulan pokok pikiran DPRD Kota Balikpapan melalui SIPD-RI yakni usulan untuk pemasangan jaringan Wifi gratis di 22 titik di ruang publik wilayah kota Balikpapan dengan nilai usulan sebesar Rp. 200.000.000. Dari usulan ini selanjutnya telah di lakukan verifikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam hal ini adalah Bidang Egovernment dan hasil verifikasi tersebut nilai yang dibutuhkan untuk mengakomodir 22 titik wifi adalah sebesar Rp. 283.000.000. Setelah hasil verifikasi oleh perangkat daerah selanjutnya usulan ini diteruskan untuk dilakukan verifikasi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN Tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan

3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan keterkaitan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kota Balikpapan	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	-	-		Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2.	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah ▪ Tersedianya Infrastruktur Bidang Komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat 	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Skor hasil nilai Kepuasan Masyarakat. • Persentase pemanfaatan SPBE atau e 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik 	Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode dan mutu penyebarluasan serta pelayanan	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kota Balikpapan	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
	government pada perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat 	informasi kepada masyarakat.	
4.	-	-		Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta RKPD, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Sasaran :

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan;
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran jangka menengah seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026, tertuang program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Pada program ini terdapat kegiatan :

1.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
- Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
- Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media;
- Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis;
- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
- Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Aplikasi Informatika

Pada program ini terdapat kegiatan :

2.1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2.2 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;
- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada program ini terdapat kegiatan :

3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
- Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
- Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral;

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
- Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pada program ini terdapat kegiatan :

4.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada program ini terdapat kegiatan :

5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

5.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

5.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pada proses penginputan rancangan awal rencana kerja tahun 2025 ke dalam SIPD-RI 2025 terdapat pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan, adapun pemutakhiran sub kegiatan tersebut menjadi sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Pada program ini terdapat kegiatan :

1.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Relasi Media;
- Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
- Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;
- Sub Kegiatan Diseminasi Informasi
- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik;
- Sub Kegiatan Penyusunan Konten;
- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

2. Program Aplikasi Informatika

Pada program ini terdapat kegiatan :

2.1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.

2.2 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional;
- Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan proses bisnis;
- Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah;
- Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE;
 - Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;
 - Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominformasi dan Komunikasi;
 - Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada program ini terdapat kegiatan :

3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional;
- Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral.

4. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pada Program ini terdapat kegiatan :

4.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada program ini terdapat kegiatan :

5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

5.8 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

5.9 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

5.10 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5.11 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5.12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5.13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dengan sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini :

Tabel Tc. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	87 nilai	Rp 10.651.093.400	APBD		-	Rp 8.689.108.990
2	1	01	2.0		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	87 nilai	Rp 6.000.000.000	APBD		-	Rp 6.655.000.000
2	1	01	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	37 orang	Rp 6.000.000.000	APBD		-	Rp 6.655.000.000
2	1	01	2.0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	87 nilai	Rp 727.359.340	APBD		-	Rp 165.000.000
2	1	01	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Balikpapan	65 paket	Rp 62.574.340	APBD			Rp 45.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						beserta Atribut Kelengkapan							
2	1	01	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikpapan	65 orang	Rp 598.785.000	APBD		-	Rp 120.000.000
2	1	01	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Balikpapan	30 orang	Rp 66.000.000	APBD			Rp -
2	1	01	2.0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	87 nilai	Rp 1.974.124.760	APBD		-	Rp 1.071.000.000
2	1	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 paket	Rp 11.923.800	APBD		-	Rp 12.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	3 paket	Rp 1.015.174.900	APBD		-	Rp 380.000.000
2	1	01	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Balikpapan	5 paket	Rp 299.641.650	APBD		-	Rp 220.000.000
2	1	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	2 paket	Rp 26.485.910	APBD		-	Rp 29.000.000
2	1	01	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikpapan	1 Laporan	Rp 19.982.000	APBD		-	Rp 30.000.000
2	1	01	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	120 Laporan	Rp 600.916.500	APBD		-	Rp 400.000.000
2	1	01	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik	Balikpapan	87 Nilai	Rp 381.800.000	APBD			Rp -

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah							
2	1	01	2.0		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Balikpapan	1 unit	Rp. 93.600.000	APBD			Rp -
2	1	01	2.0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikpapan	1 unit	Rp. 187.200.000	APBD			Rp -
2	1	01	2.0	000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Balikpapan	2 Unit	Rp 101.000.000	APBD			Rp -
2	1	01	2.0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran	Balikpapan	87 nilai	Rp 1.195.507.850	APBD		-	Rp 344.108.990

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Pemerintahan Daerah							
2	1 6	01	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Balikpapan	1 Laporan	Rp 2.499.000	APBD		-	Rp 3.200.000
2	1 6	01	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp 828.500.000	APBD		-	Rp 115.908.990
2	1 6	01	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Laporan	Rp 15.000.000	APBD		-	Rp 15.000.000
2	1 6	01	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp 349.508.850	APBD		-	Rp 210.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	01	2.0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	87 nilai	Rp 372.301.450	APBD		-	Rp 454.000.000
2	1	01	2.0	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	3 unit	Rp 137.000.000	APBD		-	Rp 213.000.000
2	1	01	2.0	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	Balikpapan	6 unit	Rp 181.000.000	APBD		-	Rp 210.000.000
2	1	01	2.0	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan	23 unit	Rp 29.301.450	APBD		-	Rp 31.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	01	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Balikpapan	1 unit	Rp 25.000.000	APBD		-	Rp -
2	1	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;	Balikpapan	90%	Rp 10.000.000	APBD		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	03	2.0		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Balikpapan	90%	Rp 10.000.000	APBD		-	Rp -
2	1	03	2.0	000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Balikpapan	1 dokumen	Rp 10.000.000	APBD		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	Balikpapan	85%	Rp 12.676.950.700	APBD		-	Rp 5.200.000.000
2	1	03	2.0 2		Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	Balikpapan	80%	Rp 12.676.950.700	APBD		-	Rp 5.200.000.000
2	1	03	2.0 2	001 5	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Balikpapan	1 Laporan	Rp 100.000.000	APBD		-	Rp -
2	1	03	2.0 2	001 6	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Balikpapan	1 dokumen	Rp 500.000.000	APBD		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	03	2.0	001	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Balikpapan	1 dokumen	Rp 20.000.000	APBD		-	Rp -
2	1	03	2.0	001	Koordinasi penyusunan dan/atau revisi arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Balikpapan	1 dokumen	Rp 180.249.410	APBD		-	Rp -
2	1	03	2.0	001	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Balikpapan	1 dokumen	Rp 75.000.000	APBD		-	Rp -
2	1	03	2.0	002	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau	Balikpapan	10 Aplikasi	Rp 1.150.000.000	APBD		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah							
2	1 6	03	2.0 2	002 2	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi	Balikpapan	1 dokumen	Rp 50.000.000	APBD	-	Rp -	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						anggaran dan keuangan daerah							
2	1 6	03	2.0 2	002 3	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Balikpapan	34 Unit	Rp 604.945.590	APBD		-	Rp -
2	1 6	03	2.0 2	002 4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Balikpapan	34 Perangkat Daerah	Rp 7.448.755.700	APBD		-	Rp 5.200.000.000
2	1 6	03	2.0 2	002 5	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah	Balikpapan	4 layanan	Rp 20.000.000	APBD		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional							
2	1	03	2.0	002	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Balikpapan	1 dokumen	Rp. 75.000.000	APBD		Rp. -	
2	1	03	2.0	002	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Balikpapan	4 Program	Rp 2.283.000.000	APBD		Rp -	
2	1	03	2.0	002	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi	Balikpapan	1 dokumen	Rp 150.000.000	APBD		Rp -	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					kolaborasi penyelenggaraan SPBE	SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE							
2	1 6	03	2.0 2	002 9	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Balikpapan	4 Aplikasi	Rp 20.000.000	APBD		Rp -	
2	1 6	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Balikpapan	80%	Rp 21.168.720.320	APBD		Rp -	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	02	2.0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Balikpapan	80%	Rp 21.168.720.320	APBD		-	Rp -
2	1	02	2.0	001	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	Balikpapan	2 Laporan	Rp 130.340.000	APBD		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	02	2.0	001	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Balikpapan	0 Komunitas	Rp 64.650.000	APBD		-	Rp -
2	1	02	2.0	001	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Balikpapan	4 Permohonan	Rp 186.770.000	APBD		-	Rp -
2	1	02	2.0	001	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Balikpapan	6 Rekomendasi	Rp 1.196.000.000	APBD		-	Rp -
2	1	02	2.0	002	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah	Balikpapan	49 Media	Rp 16.087.405.320	APBD		-	Rp -

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis							
2	1	02	2.0	002	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Balikpapan	1 dokumen	Rp 198.000.000	APBD		-	Rp -
2	1	02	2.0	002	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Balikpapan	1920 Konten	Rp 3.305.555.000	APBD		-	Rp -
2	2	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	2	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Balikpapan	90%	Rp 700.000.000	APBD		-	Rp 150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	2	02	2.0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	Balikpapan	60%	Rp 700.000.000	APBD		-	Rp 150.000.000
2	2	02	2.0	000 1 7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	Balikpapan	68 Orang	Rp 403.804.835	APBD		-	Rp -
2	2	02	2.0	000 1 8	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Balikpapan	80 %	Rp 282.495.165	APBD		-	Rp 150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	2	02	2.0	001	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 13.700.000	APBD		-	Rp -
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	2	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	Balikpapan	80%	Rp 400.000.000	APBD		-	Rp 717.000.000
2	2	02	2.0		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	Balikpapan	80%	Rp 400.000.000	APBD		-	Rp 717.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	2	02	2.0	000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	1 laporan	Rp 150.000.000	APBD	-	Rp 75.000.000	
2	2	02	2.0	000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	1 Laporan	Rp 150.000.000	APBD	-	Rp 142.000.000	
2	2	02	2.0	000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Balikpapan	24 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	APBD	-	Rp 500.000.000	
TOTAL									Rp 45.606.764.420	TOTAL		Rp 14.756.108.990	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Setiap kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan saat ini didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	87 nilai	Rp 10.651.093.400	APBD
2	1	0	2.0		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	87 nilai	Rp 6.000.000.000	APBD
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	30 orang	Rp 6.000.000.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikipapa n	87 nilai	Rp 727.359.340	APBD
2	1	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikipapa n	65 paket	Rp 62.574.340	APBD
2	1	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikipapa n	65 orang	Rp 598.785.000	APBD
2	1	0	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Balikipapa n	30 orang	Rp 66.000.000	APBD
2	1	0	2.0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikipapa n	87 nilai	Rp 1.974.124.760	APBD
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikipapa n	1 paket	Rp 11.923.800	APBD
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikipapa n	3 paket	Rp 1.015.174.900	APBD
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Balikipapa n	5 paket	Rp 299.641.650	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Balikipapan	2 paket	Rp 26.485.910	APBD
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikipapan	1 Laporan	Rp 19.982.000	APBD
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikipapan	120 Laporan	Rp 600.916.500	APBD
2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikipapan	87 Nilai	Rp 381.800.000	APBD
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Balikipapan	1 unit	Rp 93.600.000	APBD
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikipapan	1 unit	Rp 187.200.000	APBD
2	1	0	2.0	000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Balikipapan	2 Unit	Rp 101.000.000	APBD
2	1	0	2.0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikipapan	87 nilai	Rp 1.195.507.850	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Balikpapan	1 Laporan	Rp 2.499.000	APBD
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp 828.500.000	APBD
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Laporan	Rp 15.000.000	APBD
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp 349.508.850	APBD
2	1	0	2.0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	87 nilai	Rp 372.301.450	APBD
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	3 unit	Rp 137.000.000	APBD
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	Balikpapan	6 unit	Rp 181.000.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapa n	23 unit	Rp 29.301.450	APBD
2	1	0	2.0	001	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Balikpapa n	1 unit	Rp 25.000.000	APBD
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggara n negara;	Balikpapa n	90%	Rp 10.000.000	APBD
2	1	0	2.0		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Balikpapa n	90%	Rp 10.000.000	APBD
2	1	0	2.0	000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Balikpapa n	1 dokume n	Rp 10.000.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	Balikpapan	85%	Rp 12.676.950.700	APBD
2	1	0	2.0		Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	Balikpapan	80%	Rp 12.676.950.700	APBD
2	1	0	2.0	001 5	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE dilingkungan Pemda	Balikpapan	1 Laporan	Rp 100.000.000	APBD
2	1	0	2.0	001 6	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Balikpapan	1 dokumen	Rp 500.000.000	APBD
2	1	0	2.0	001 7	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Balikpapan	1 dokumen	Rp 20.000.000	APBD
2	1	0	2.0	001 8	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Balikpapan	1 dokumen	Rp 180.249.410	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	001	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Balikpapan	1 dokumen	Rp 75.000.000	APBD
2	1	0	2.0	002	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Balikpapan	10 Aplikasi	Rp 1.150.000.000	APBD
2	1	0	2.0	002	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Balikpapan	1 dokumen	Rp 50.000.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0	002	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Balikpapa n	34 Unit	Rp 604.945.590	APBD
2	1	0	2.0	002	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Balikpapa n	34 Perangk at Daerah	Rp 7.448.755.700	APBD
2	1	0	2.0	002	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Balikpapa n	4 layanan	Rp 20.000.000	APBD
2	1	0	2.0	002	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraa n Audit TIK sesuai	Balikpapa n	1 dokume n	Rp 75.000.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
						kewenangan Dinas Kominfo				
2	1	0	2.0	002	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Balikipapa n	4 Program	Rp 2.283.000.000	APBD
2	1	0	2.0	002	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraa n SPBE	Balikipapa n	1 dokume n	Rp 150.000.000	APBD
2	1	0	2.0	002	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Balikipapa n	4 Aplikasi	Rp 20.000.000	APBD
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kot a	Balikipapa n	80%	Rp 21.168.720.320	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	1	0	2.0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Balikpapa n	80%	Rp 21.168.720.320	APBD
6	2	1								
2	1	0	2.0	001	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	Balikpapa n	2 Laporan	Rp 130.340.000	APBD
6	2	1	4							
2	1	0	2.0	001	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Balikpapa n	0 Komunit as	Rp 64.650.000	APBD
6	2	1	5							
2	1	0	2.0	001	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Balikpapa n	4 Permoh onan	Rp 186.770.000	APBD
6	2	1	7							
2	1	0	2.0	001	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu	Balikpapa n	6 Rekome nd asi	Rp 1.196.000.000	APBD
6	2	1	9							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
						publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				
2	1	0	2.0	002	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Balikpapan	49 Media	Rp 16.087.405.320	APBD
2	1	0	2.0	002	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Balikpapan	1 dokumen	Rp. 198.000.000	APBD
2	1	0	2.0	002	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Balikpapan	1920 Konten	Rp 3.305.555.000	APBD
2	2	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Balikpapan	90%	Rp 700.000.000	APBD
2	2	0	2.0		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	Balikpapan	70%	Rp 700.000.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	2	0	2.0	000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Balikpapan	68 Orang	Rp 403.804.835	APBD
2	2	0	2.0	000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Balikpapan	80 %	Rp 282.495.165	APBD
2	2	0	2.0	001	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Balikpapan	1 dokumen	Rp 13.700.000	APBD
2	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	Balikpapan	80%	Rp 400.000.000	APBD
2	2	0	2.0		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	Balikpapan	80%	Rp 400.000.000	APBD
2	2	0	2.0	000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan	Balikpapan	1 laporan	Rp 150.000.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
					Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2	2	0	2.0	000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapa n	1 Laporan	Rp 150.000.000	APBD
2	2	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Balikpapa n	24 Perangk at Daerah	Rp 100.000.000	APBD
TOTAL									Rp 45.606.764.420	

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang- Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Program, Kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk matrik masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, yakni sebagai berikut :

6. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar evaluasi setiap triwulan, terutama membahas terkait capaian kinerja dan serapan keuangan agar sesuai dengan tata Kelola dan perencanaan;
7. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai pada setiap Bidang di Dinas Komunikasi Informatika Kota Balikpapan agar perencanaan dapat dilakukan dengan matang sehingga pelaksanaannya pun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah;
8. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025.

O. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen Rancangan akhir Renja tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, guna menindak lanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan menyusun Dokumen Renja 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan.

Setiap tahun DKUMKMP Kota Balikpapan membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Balikpapan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan akhir Renja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD.

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (selanjutnya disingkat DKUMKMP) Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dibidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja tersebut dapat dikerjakan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan. Tahap penetapan rancangan akhir Rancangan akhir Renja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

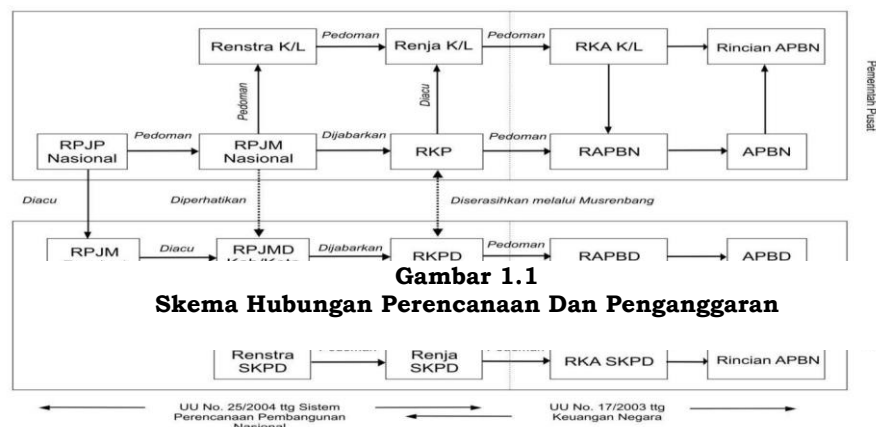
1. Substansi Renja DKUMKMP Kota Balikpapan merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan yang disesuaikan.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program / kegiatan, target keluaran kegiatan dan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja DKUMKMP Kota Balikpapan merupakan dokumen resmi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana anggaran dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi mengenai Renja

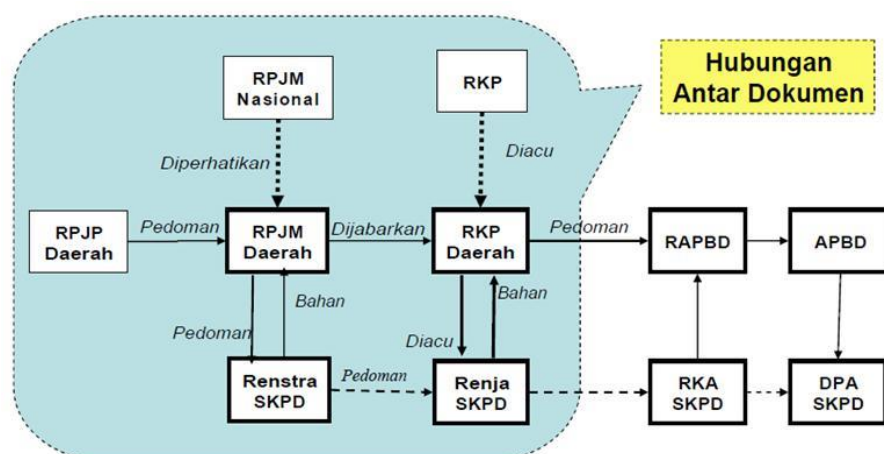
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi
- Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
- Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan;
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan tahun lalu berdasarkan Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DKUMKMP Kota Balikpapan
 - Telaah terhadap rancangan akhir RKP
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan;
 - Penyempurnaan rancangan kerja DKUMKMP Kota Balikpapan;
 - Pembahasan forum DKUMKMP Kota Balikpapan; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKP
- f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rancangan akhir Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sbb :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan akhir Renja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024;
10. KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang dimutakhirkan Kembali dengan KEPMENDAGRI No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rancangan akhir Renja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Kota Balikpapan Nomor : 835/34/DKUMKMP tanggal 28 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Nomor : 835/07/DKUMKMP Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
15. Surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 050/0580_/Bappeda-

Litbang Tanggal 17 April 2024 Perihal Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA DKUMKMP Kota Balikpapan adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan akhir Renja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan.

1.3.2. Tujuan

Rancangan akhir Renja DKUMKMP Kota Balikpapan disusun dengan tujuan untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun dan untuk memasukkan program / kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran yang ada di Rancangan akhir Renja (RENJA) Tahun 2025 yang dananya bersumber dari APBD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja DKUMKMP Kota Balikpapan terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rancangan akhir Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Inovasi Perangkat Daerah

Bab VI : Penutup

BAB.II.

HASIL EVALUASI RENJA 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan

Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal / mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang, baik keberhasilan pencapaian indikator, sasaran, realisasi penyerapan anggaran keuangan dan fisik terhadap pelaksanaan RENJA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

Pada Tahun Anggaran 2023, DKUMKMP Kota Balikpapan melaksanakan 10 program , 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 23.459.499.548,- Adapun target Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 144.000.000,00,- serta Realisasi anggaran di tahun 2023 sebesar Rp 20.511.662.146 (87,43%) dengan persentase capaian fisik kegiatan sebesar 95,23%. Sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 160.330.000,-. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Realisasi program/kegiatan yang tidak/telah/melebihi memenuhi keluaran, yang direncanakan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	70	82	117.14%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	78	79	101.28%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	70	73	104.29%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	70	76.00	108.57%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	70	75.00	107.14%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	70	77.00	110.00%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	persen	5.65	5.44	96.28%	Tidak memenuhi keluaran yang direncanakan
2.6	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	persen	100	0.00	0.00%	Tidak memenuhi keluaran yang direncanakan
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	persen	20.92	15.69	75.00%	Tidak memenuhi keluaran yang direncanakan
3.7	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	persen	12.55	13.81	110%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	Persen	51.85	44.44	85.72%	Tidak memenuhi keluaran yang direncanakan
4.8	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Persen	32	48.00	150.00%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi sehat	Persen	5.02	2.51	50.01%	Tidak memenuhi keluaran yang direncanakan
5.9	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	5.23	5.23	100.00%	Telah memenuhi keluaran yang direncanakan
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	83.32	78.33	94.01%	Tidak memenuhi keluaran yang direncanakan
6.10	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Persen	1.05	0.94	89.52%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Persen	5.25	8.00	152.38%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
7.11	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persen	0.24	0.33	137.50%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	1.31	7.86	600.00%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan
7.12	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	persen	57.7	56.58	98.06%	Tidak memenuhi keluaran yang direncanakan
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	12.96	12.74	98.30%	Tidak memenuhi keluaran yang direncanakan
9.13	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	Persen	70	34.00	48.57%	Tidak memenuhi keluaran yang direncanakan
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	Persen	58.33	29.02	49.75%	Tidak memenuhi keluaran yang direncanakan
9.14	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	Persen	10.64	13.08	122.93%	Melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

Program :

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
- d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- f. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- g. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- c. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:

Program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Umkm
- c. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Kegiatan :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- g. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- h. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- i. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- j. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- k. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

- a. Masih terdapatnya ketidaksesuaian indikator keluaran antara dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- b. Masih terdapatnya beda satuan pada indikator dalam perencanaan di dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- c. Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
- d. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD;
- e. Target output yang rendah pada saat penyusunan Renstra dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
- f. Perumusan indikator dan metode perhitungan yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target dikarenakan kesulitan untuk melakukan perhitungan

5. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab tersebut

- a. Melakukan rewiu serta penelaahan indikator kinerja program, kegiatan, Sub Kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis yang akan datang;
- b. Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan rumusan perhitungan pencapaian targetnya;
- c. Memiliki data dasar pada setiap indikator kinerja sehingga dapat terukur dan dipertanggung jawabkan;
- d. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
- e. Komitmen bersama seluruh DKUMKMP Kota Balikpapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (2022)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan renstra Tahun 2023		Penjelasan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80		67	82.00	122.4	70	82	117.1	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85		75	77.56	103.4	78	79	101.3	
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78		68	73.21	107.7	70	73	104.3	
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78		68	71.59	105.3	70	76	108.6	
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78		68	73.54	108.1	70	75	107.1	
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78		68	75.78	111.4	70	77	110.0	
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	6.28		5.44	0.00	0.0	5.65	5.44	96.3	
2.6	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	100.00		100	0.00	0.0	100	0	0.0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (2022)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan renstra Tahun 2023		Penjelasan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	24.06		19.87	20.00	100.7	20.92	15.69	75.0	
3.7	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	62.76		12.55	20.00	159.4	12.55	13.81	110.0	
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	56.67		50	0.00	0.0	51.85	44.44	85.7	
4.8	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	56.00		24	0.00	0.0	32	48.00	150.0	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi sehat	15.06		3.35	0.00	0.0	5.02	2.51	50.0	
5.9	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	8.37		5.23	0.00	0.0	5.23	5.23	100.0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (2022)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan renstra Tahun 2023		Penjelasan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	88.41		81.68	70.52	86.3	83.32	78.33	94.0	
6.10	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	2.14		0.69	0.72	104.3	1.05	0.94	89.5	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	5.36		5.12	3.19	62.3	5.25	8.00	152.4	
7.11	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.33		0.22	0.05	22.7	0.24	0.33	137.5	
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	2.60		1.1	4.61	419.1	1.31	7.86	600.0	
7.12	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	72.5		52.5	56.58	107.8	57.7	56.58	98.1	
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	15.69		12.1	7.02	58.0	12.96	12.74	98.3	
9.13	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	93		60	87.00	145.0	70	34.00	48.6	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (2022)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan renstra Tahun 2023		Penjelasan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	66.67		45.45	40.68	89.5	58.33	29.02	49.8	
9.14	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	11.31		10.24	12.37	120.8	10.64	13.08	122.9	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKUMKMP Kota Balikpapan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 dan Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2023	Tahun (n-1) 2024	tahun (n) 2025	tahun (n+1) 2026	Tahun (n-2) 2022	Tahun (n-1) 2023	tahun (n) 2024	tahun (n+1) 2025	
1	Persentase Koperasi Berkualitas			100%	100%	100%	100%	-	75.00%	100%	100%	
2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal			4,07%	4,13%	4,17%	4,21%	-	6.71%	4,13%	4,17%	
3	Persentase Kontribusi PDRB Industri pengolahan			48,2%	48,70%	49,20%	49,70%	-	0.00%	48,70%	49,20%	
4	Nilai SAKIP DKUMKMP			78,90	78.95	78.00	80.00	-	0.00%	78.95	78.00	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan, maka DKUMKMP Kota Balikpapan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi OPD.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan Dalam menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja DKUMKMP Kota Balikpapan dapat

menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang DKUMKMP Kota Balikpapan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Tentang Koperasi UMKM dan Industri bagi pelaku usaha sudah sangat baik. 2. Terdapatnya produk unggulan UMKM-IKM di Kota Balikpapan 3. Harga jual produk usaha kecil relative terjangkau oleh Masyarakat dan dapat diperdagangkan lagi. 4. Industri agro di Kota Balikpapan cukup menjanjikan. 5. Industri pengolahan merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan 6. Tersedianya pengembangan Kawasan Peruntukan Industri 7. Keberadaan Institut Teknologi Kalimantan dan lembaga pendidikan vokasi lainnya di Kota Balikpapan, baik swasta maupun negeri 8. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi terkait pemabngunan dan pengembangan baik dari SDM sampai infrastruktur Koperasi UMKM dan Perindustrian 9. Pengembangan Sentra Industri Kecil Sumber (SIKS) dan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Koperasi UMKM dan Industri bagi pelaku usaha mikro kecil menengah masih sangat terbatas. 2. Beberapa bahan baku industri yang tersedia di Kota Balikpapan masih terbatas dan mahal. 3. Inovasi produk masih rendah sehingga produk mudah ditiru oleh pelaku UMKM lain. 4. Produk belum memiliki daya saing. 5. Sarana produksi cenderung tradisional. 6. Tempat produksi cenderung memanfaatkan tempat tinggal. 7. Keterbatasan informasi peluang pasar dalam dan luar negeri karena UMKM masih belum optimal memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). 8. Keterbatasan permodalan serta terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank karena aspek legalitas usaha. 9. Kurangnya pendampingan terhadap IKM setelah pelatihan. 10. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan.

Threats (Ancaman)

1. Terbatasnya aparatur dan sumber daya manusia pelaku koperasi, UMKM dan industri yang berkualitas.
2. Pendataan koperasi, UMKM, dan industri yang masih kurang optimal.
3. Belum semua Koperasi memiliki kesadaran untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin.
4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri maupun sentra Industri.
5. Kurangnya anggaran sehingga menyebabkan tidak terlaksananya beberapa pelatihan teknis atau program lainnya yang dapat membantu memperbaiki kualitas usaha UMKM/IKM agar memiliki daya saing lebih tinggi.
6. Semakin majunya IKM dari Jawa baik dari segi produk, kemasan maupun pemasaran .
7. Pandemi Covid-19 yang tidak dapat ditentukan dengan pasti masa berakhirnya.

Opportunities (Peluang)

1. Secara regional Kota Balikpapan terletak di tengah jaringan transportasi darat Trans Kalimantan serta merupakan lintas Trans Nasional. Selain itu Kota Balikpapan juga memiliki Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sepinggan.
2. Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara baru yang berpeluang menjadikan produk-produk koperasi/UMKM/IKM sebagai produk unggulan
3. Digitalisasi pendataan/pelaporan koperasi, UMKM, dan industri yang masih dapat dikembangkan sehingga penyajian data dapat dilakukan secara real time.
4. Sinergitas program/kegiatan antar OPD.
5. Dukungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung pelaku ekonomi dalam membangun usahanya.
6. Kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengembangan sektor koperasi, UMKM dan perindustrian.
7. Upaya pengembangan sektor koperasi, UMKM dan perindustrian melalui sumber dana selain APBD Kota, seperti DAK dan Bankeu. Pemanfaatan digital marketing bagi pelaku UMKM/IKM dalam mempromosikan produk/jasanya.

Adapun permasalahan pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan secara umum dapat digambarkan pada table dibawah ini:

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Data koperasi, UMKM (KUMKM) dan industri di Kota Balikpapan masih dilakukan secara manual (belum akurat / valid)	<ul style="list-style-type: none"> - Data koperasi, UMKM dan industri baik yang ada di dalam data ODS maupun OSS masih perlu divalidasi dan diverifikasi ulang karena tidak dapat dipilah berdasarkan kebutuhan. - Sinkronisasi data dan pelaporan antar OPD di dalam penerbitan perizinan belum tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang menguasai IT tidak ada
2	Pemanfaatan teknologi masih terbatas dan Produk UMKM masih kalah bersaing dengan produk dari luar Rendahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM pelaku UMKM - Rendahnya manajemen dan pemasaran serta akses permodalan bagi UMKM - Terbatasnya pemanfaatan teknologi oleh koperasi dan UMKM - Belum adanya produk UMKM yang menjadi branding kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran kegiatan peningkatan pengetahuan SDM UMKM - Terbatasnya tenaga pendamping bagi koperasi dan mentor bagi UMKM - Terbatasnya akses pasar bagi produk UMKM
3	Belum tercapainya kegiatan industri yang berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya IKM yang memanfaatkan teknologi terbaru di dalam kegiatan industrinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepedulian pelaku industri terhadap resiko lingkungan

		<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dan terbarukan - Rendahnya pengelolaan hasil limbah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi industri yang masih rendah, termasuk industry 4.0 - Tidak adanya pejabat pengawas industri
--	--	---	---

Tabel 2.4

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
		Internal	Eksternal	
Kebutuhan jumlah dan kualitas SDM	Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai	- Minimnya alokasi anggaran di OPD untuk meningkatkan kualitas aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Analisa jabatan aparatur guna menentukan jumlah dan kompetensi aparatur yang ditempatkan - Belum adanya rekrutmen pegawai yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya - Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan
Data	Data Belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas. -Akses	Kurangnya kesadaran akan pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Validitas dan	Data di Pemerintah Kota Balikpapan belum terintegrasi	- Database yang belum optimal

	informasi Data masih lemah.	kecukupan data kurang memadai.		
Pembangunan dan pemeliharaan Sarana di sentra	-Rumah Produksi belum terpenuhi	Terbatasnya anggaran	-Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Balikpapan	Kondisi bangunan dan fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan kurangnya kenyamanan
Belum dimilikinya sistem informasi berbasis web dan android	Aplikasi belum tersedia	SDM pengelola Aplikasi belum tersedia	-Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Balikpapan	Tidak seimbangnya SDM aparat Dibanding dengan Koperasi yang dilayani.
Pengawasan Koperasi	Pengawasan Koperasi dilakukan secara rutin.	Keterbatasan SDM aparat pengawas koperasi sehingga tidak semua koperasi dapat dimonitoring.	Banyak koperasi yang tidak sesuai alamat. Rendahnya SDM pengurus dan pengawas koperasi	Belum memadai karena terbatasnya SDM dan prasarana penunjang
Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM masih belum memiliki e-marketplace skala Kota Balikpapan	Belum didukung tenaga ahli/staf yang kompeten di bidang IT dan desain kemasan	Terbatasnya anggaran untuk membuat e-marketplace. Belum adanya wadah secara offline untuk membantu memasarkan produk UMKM	Belum memadai karena terbatasnya SDM dan prasarana penunjang

Isu-isu strategis ditentukan berdasarkan faktor-faktor pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengolahan dan pelaporan data Koperasi, UMKM dan Perindustrian masih dilakukan secara manual.

2. Perlunya meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen kelembagaan koperasi yang belum aktif.
3. Perlunya peningkatan jumlah sertifikasi pengurus/pengawas/pengelola koperasi.
4. Perlunya peningkatan dan pengembangan kualitas produk wirausaha baru dan UMKM.
5. Rendahnya kemitraan pelaku UMKM dan pengembangan sektor industri kecil dan menengah.
6. Rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) bagi Koperasi dan pelaku UMKM.
7. Rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM.
8. Belum optimalnya akses peminjaman permodalan bagi pelaku UMKM
9. Belum optimalnya kerjasama UMKM dengan area publik untuk promosi produk.
10. Belum optimalnya sentra industri yang berwawasan lingkungan.
11. Belum tuntasnya capaian pembangunan SIKS dan SIKT.
12. Perlunya fasilitasi peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang Industri kecil dan menengah.
13. Terbatasnya ketersediaan bahan baku dan bahan penolong di bidang Industri kecil dan menengah.
14. Perlunya peningkatan Teknologi produksi bagi industri kecil dan menengah.
15. Belum tersedianya pejabat fungsional pembina industri dan pengembang kewirausahaan.
16. Perlunya peningkatan fasilitasi kepemilikan sertifikasi produk.
17. Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan, koperasi dan UMKM.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses yang dilakukan dalam membandingkan rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, DKUMKMP Kota Balikpapan melakukan berbagai tindakan yaitu :

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Kota. Tercemin dari adanya

- a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih.
- b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.
- c. Mempertimbangkan hasil forum OPD.

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat-rapat

koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi dan Kota. Pendekatan perencanaan ini tercemin pada RKPD berupa :

- a. Sinergi dengan RKPD dan Renja Provinsi Kalimantan Timur dan Renja Kementrian
- b. Konsistensi dengan Renja Kota Balikpapan
- c. Sinergi dan Komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan

DKUMKMP Kota Balikpapan menitik beratkan pada pemberdayaan dari segi ekonomi maupun pendapatan masyarakat yang terwujud melalui kegiatan pelatihan, temu usaha, maupun bimbingan teknis bagi gerakan Koperasi, Pelaku UMKM dan Pelaku Industri di Kota Balikpapan. Dari proses kegiatan yang berjalan tersebut akan menghasilkan output dan outcome yang benar-benar meningkatkan taraf hidup maupun perekonomian masyarakat seperti berkurangnya pengangguran, tumbuhnya iklim usaha yang kondusif, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Akhir RKPD						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	-9		10	11	
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Balikpapan	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	persen	23.01	356,478,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Balikpapan	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	persen	23.01	356,478,000	1. Belanja Jasa Subsidi Pembiayaan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi melalui sistem AHU 2. Kegiatan Pemeringkatan Koperasi 3. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	persen	15.90	356,478,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	persen	15.90	356,478,000	
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Balikpapan	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	46,03	821,478,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Balikpapan	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	46,03	821,478,000	Pelatihan Manajemen Resiko, Manajer Koperasi (Sertifikasi SKKNI), Pelaporan Keuangan Koperasi, Pengawasan dan Penilaian Koperasi, SOP dan SOM Koperasi, Penyelenggaraan RAT
2.2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan	Persen	12,55	821,478,000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan	Persen	12,55	821,478,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Balikpapan	persentase koperasi sehat	Persen	10.88	350,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Balikpapan	persentase koperasi sehat	Persen	10.88	350,000,000	1. Penyuluhan hukum tentang perkoperasian 2. Acara Peringatan Harkopnas
3.3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	7.32	350,000,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	7.32	350,000,000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Balikpapan	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	86.68	1,450,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Balikpapan	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	86.68	1,450,000,000	1. Kegiatan Kemitraan Usaha Mikro 2. Sosialisasi/Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro 3. Sosialisasi Halal, Informasi Nilai Gizi, KI, SNI Bina UMK 4. Registrasi Hak Cipta, halal, Merek, Pendugaan Umur Simpan, PP 5. Operasional Dekranasda 6. Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Usaha Mikro 7. Pendataan UMKM
4.4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Balikpapan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Persen	1.78	1,450,000,000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Balikpapan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Persen	1.78	1,450,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Akhir RKPD						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	-9		10	11	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Balikpapan	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Persen	8.65	6,123,315,628	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Balikpapan	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Persen	8.65	6,123,315,628	1.Bazaar UMKM 2.Gebyar UMKM 3.Lomba Motif Batik Khas Balikpapan 4.Pelatihan Kerajinan bagi UMKM 5.Pelatihan Non Kerajinan Bagi UMKM 6.Kegiatan Promosi di Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan 7.Kegiatan Promosi di Gedung Parkir Klandasan 8.Kegiatan Promosi di Pantai Manggar 9.Kegiatan Promosi di Rumah Batik Tenun dan Bordir (BATEBOR) 10.Berita Media Online 11.Promosi Dalam dan Luar daerah (sewa Tempat, Display, DLL)
5.5	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Balikpapan	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persen	0.29	6,123,315,628	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Balikpapan	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persen	0.29	6,123,315,628	
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Balikpapan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	8.98	4,942,846,057	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Balikpapan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	8.98	4,942,846,057	1.Pelatihan Peningkatan SDM IKM 2.Jasa Tenaga Laboratorium Pengambilan Contoh dan Uji Air Minum Dalam Kemasan (Standar Kualitas/ SNI Wajib) 3.Penyusunan Kajian Pengembangan Industri Kota 4.Pemeliharaan Alat Bantu Produksi di Sentra Industri Kecil 5.Alat Bantu Operasional Perbaikan Prasarana di Sentra Industri 6.Penyusunan Review DED Pembangunan Prasarana di SIK 7.Penyempunaan Gedung/ Sarana Prasarana/ Fasilitas di Sentra Industri Kecil 8. Sosialisasi/ FGD Pengembangan Industri 9.Jasa Tenaga Laboratorium (Pemeriksaan Uji Lab Air Bersih & Uji Lab Sampel Air Limbah 10.Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan 11.Belanja Jasa Tenaga Maintenance 12.Belanja Jasa Tenaga Operasional IPAL Komunal dan IPAL Digester 13.Belanja Tenaga Operasional Cold Storage 17.Belanja Tagihan Air, Listrik, Telpon 14.Pemeliharaan Mesin Chainsaw, CCTV, Alat Pendingin di SKS, Komputer/Notebook, printer, Cold Storage beserta fasilitasnya di SIKT 15.Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Bangunan Sentra 16.Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Produksi SIK 17.Pemeliharaan IPAL Sentra dan Jaringan 18.Pemeliharaan Taman Sentra di Sumber dan Teritip 19.Belanja Modal Peralatan Pengangkat Barang Untuk Cold Storage SIKT 20.Pembuatan Rak Besi Untuk Penyimpanan Cold Storage
6.6	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	persen	67.5	4,942,846,057	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	persen	67.5	4,942,846,057	

No	Rancangan Awal RKP						Rancangan Akhir RKP						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	-9		10	11	
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	14.80	115,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	14.80	115,000,000	Tenaga Ahli Programmer Pengelola Data Industri
7.7	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	Persen	90	115,000,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	Persen	90	115,000,000	
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Balikpapan	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	Persen	64.29	210,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Balikpapan	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	Persen	64.29	210,000,000	1.Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi 2.Tablet untuk Pelayanan Pendampingan SIINas 3.Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Pengelola Media Sosial 4.Cetak Media Publikasi dan Informasi 5.Pembuatan Video Edukasi 6.Publikasi Media Online) 7.Publikasi Radio 8. Jasa Konsultasi Laporan Industri Kota Balikpapan Tahun 2025
8.8	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	Persen	13.86	210,000,000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	Persen	13.86	210,000,000	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78	10,755,303,400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78	10,316,198,000	
9.9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	83	6,518,703,400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai	83	6,450,598,000	Gaji dan tunjangan ASN
9.10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	75	375,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	75	325,250,000	1.Pakaian Olahraga 2.Belanja Pakaian Adat Daerah (Baju Adat Mahligai Balikpapan) 3. Belanja Bimbingan Teknis
9.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	75	1,300,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	75	1,132,303,000	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (lampu stop kontak, dll) 2. Belanja Monitor Informasi di Ruang Pelayanan (smart TV) 3. Belanja Laptop 4. Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5. Alat Tulis Kantor 6..Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh(harian pegawai) 7.Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Kotak Arsip, Kop Dinas, foto copi, perijidan, NCR, umbul2, dll) 10.Adventorial Media Cetak Regional Balikpapan(Iklan Ucapan HUT Kota dan Kaleidoskop) 11.Belanja Jasa Iklan/Reklame 12.Konten Informasi Media Elektronik 13.Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14.Belanja Souvenir Produk UMKM Lokal 15.Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Akhir RKPD						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	-9		10	11	
9.12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	75	449,600,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	77	299,600,000	1. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Ess II dan Ess III 2. Belanja Mebel (Kursi, lemari, sofa)
9.13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	75	1,312,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	75	1,237,000,000	1. Materai 2. Pengiriman Paket 3. Listrik, Air, Telpon 4. Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5. Belanja Suvenir/Cendera Mata Produk UMKM Lokal 6. Honorarium Instruktur Senam 7. Honorarium Rohaniawan 8. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
9.14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	75	800,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	77	871,447,000	1. Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional 2. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional 3. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 4. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional 5. Belanja Pemeliharaan Mebel (Meja Resepsionis, Meja Tamu, Meja Kerja, Sofa, dll) 6. Belanja BBM Generator 7. Belanja Pemeliharaan Genset, Mesin Absensi, Mesin Fotokopi, Audio Video, CCTV, AC, Komputer/Laptop, Printer 8. Pemeliharaan Gedung Kantor 9. Renovasi Ruang Rapat LL1 10. Pemeliharaan Videotron
Jumlah						25,124,421,085	Jumlah						24,685,315,685

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun hasil pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kota, dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi usulan–usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- b. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku
- c. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan
- d. Memeriksa usulan program/kegiatan sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD membuat rekapitulasi usulan program / kegiatan yang sudah di verifikasi baik yang sudah diterima maupun yang ditolak disebabkan kerana tidak mencantumkan Proposal, lokasi, usulan yang diminta, dll)

Tabel 2.5

**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Balikpapan**

No	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Alamat
1	Eddy Moelyono	Banyak usaha mikro warga dikelola sekedarnya dan manajemen yang baik dan kuat tapi hanya tradisional, Pembentukan Kelompok Usaha dan Pendampingan Profesional (Pra Koperasi), Pembentukan 1 sampai 2 kelompok usaha dan Pendampingan Profesional	Fasilitasi kemudahan berusaha dan sertifikasi usaha mikro/UMKM	Jl. Bukit Pelajar RT.38, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah
2	Kanti Suharjo	UMKM	Fasilitasi kemudahan berusaha dan sertifikasi usaha mikro/UMKM	jl. jendral sudirman rt 16, Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai

3	Kanti Suharjo	kader atau masyarakat perlu belajar membuat	Pelatihan Membatik	jl.jendral sudirman rt 16, Kota Balikpapan, Balikpapan Kota.
4	M Yuniansya h	Dilingkungan Kel. Baru Iilir banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan usaha mereka	Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil (naik kelas)	Kelurahan Baru Iilir, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Iilir
5	Eddy Moelyono	Banyak usaha mikro warga dikelola sekedarnya dan manajemen yang baik dan kuat tapi hanya tradisional, Paket Pelatihan Manajemen Usaha Rumahan (Pengelolaan Warung Sembako, warung makan/kantin) 1 (satu) Paket Pelatihan Manajemen Usaha Rumahan (10 sampai 20 orang)	Fasilitasi kemudahan berusaha dan sertifikasi usaha mikro/UMKM	Jl. Bukit Pelajar RT.38, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah
6	SARIFAH MAYASAR I	Untuk meningkatkan SDM masyarakat sehingga bisa untuk meningkatkan hasil usaha dan ekonomi para pelaku usaha, Volume = 100 Orang	Pelatihan Cake and Pastry	Jl. SMAN 4 Sepingga Baru RT. 33, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingga
7	AJI SYARIFAH NUR ALIFAH	Pelatihan Manajemen UMKM sangat dibutuhkan agar usaha dapat berjalan dengan baik	Pelatihan Manajemen Usaha	kelurahan margo mulyo, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo
8	SHELI SEFTIANA NINGRUM	perlunya umkm yang lebih meningkatkan ekonomi masyarakat	Fasilitasi kemudahan berusaha dan sertifikasi usaha mikro/UMKM	Perumahan Puskopat RT 38 Kelurahan Teritip -1.166375, 117.003724 , Kota Balikpapan, Balikpapan Timur,

				Teritip
9	SINGGIH AJI WIBOWO	perlunya pengembangan UMKM	Fasilitasi kemudahan berusaha dan sertifikasi usaha mikro/UMKM	RT 11, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau
10	SHELI SEFTIANA NINGRUM	meningkatkan umkm	Pelatihan Cake and Pastry	RT 14 GUNUNG BINJAI □ Cafe Taman Pringgondani Jl. Gn. Binjai Rt. 14, Teritip, Balikpapan Timur, Teritip, Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 75271 -1.138525, 116.986324, Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip
11	SHELI SEFTIANA NINGRUM	kertertinggalan umkm teritip	Fasilitasi kemudahan berusaha dan sertifikasi usaha mikro/UMKM	□ Jl. Mulawarman 4 Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76118 -1.164938, 117.003741 RT 6 Kelurahan teritip, Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip
12	Reza Dipa Pradeka	Kurangnya Keterampilan Warga sehingga Perlu adanya Pelatihan Pelatihan	Pelatihan Membatik	Wilayah Kelurahan Prapatan , Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan
13	Reza Dipa Pradeka	Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan Warga Kelurahan Prapatan sehingga sulit untuk membuat usaha UMKM	Pelatihan Cake and Pastry	Wilayah Kelurahan Prapatan , Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan

14	SINGGIH AJI WIBOWO	Perlunya pelatihan bagi kader untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui pelatihan cake and pastry	Pelatihan Cake and Pastry	Sekretariat PKK Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau
----	--------------------------	--	---------------------------	---

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Koperasi, UMKM dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Koperasi, UMKM dan Perindustrian sebagai berikut:

1.1.1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

Visi Kementerian Koperasi dan UMKM

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

1.1.2. Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian :

Pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.

2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

1.1.3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan adalah sebagai berikut

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan sektor Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka DKUMKMP Kota Balikpapan sesuai dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan visi. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Visi dan misi Rencana Startegis Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026, berpedoman pada visi kota Balikpapan yaitu:

“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Sebagaimana Visi Pembangunan Kota Balikpapan tersebut diatas, untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui **Misi ke 5 yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif**

3.2.1. Tujuan

Penetapan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka DKUMKMP dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan lebih mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi, sebab itu tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Dari uraian di atas, maka DKUMKMP Kota Balikpapan dengan tujuannya **“MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH”**

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koperasi Berkualitas
2. Meningkatnya Transformasi usaha mikro dari informal ke formal
3. Meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor industri Pengolahan
4. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.3. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Renja 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam draf dokumen Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi.

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas di Tahun 2025 adalah Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Berikut ini:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	target capaian kinerja	Satuan	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	Balikpapan	23.01	persen	356,478,000	APBD	1. Belanja Jasa Subsidi Pembiayaan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi melalui sistem AHU 2. Kegiatan Pemeringkatan Koperasi 3. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	24.06	350,000,000
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Balikpapan	15.90	persen	356,478,000	APBD		12.55	350,000,000
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Balikpapan	46.03	Persen	821,478,000	APBD	Pelatihan Manajemen Resiko, Manajer Koperasi (Sertifikasi SKKNI), Pelaporan Keuangan Koperasi, Pengawasan dan Penilaian Koperasi, SOP dan SOM Koperasi, Penyelenggaraan RAT	55.09	800,000,000
2.2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan	Balikpapan	12,55	Persen	821,478,000	APBD		13.60	800,000,000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi sehat	Balikpapan	10.88	Persen	350,000,000	APBD	1. Penyuluhan hukum tentang perkoperasian 2. Acara Peringatan Harkopnas	15.06	250,000,000
3.3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Balikpapan	7.32	Persen	350,000,000	APBD		8.37	250,000,000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	Balikpapan	86.68	Persen	1,450,000,000	APBD	1. Kegiatan Kemitraan Usaha Mikro 2. Sosialisasi/Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro 3. Sosialisasi Halal, Informasi Nilai Gizi, KI, SNI Bina UMK 4. Registrasi Hak Cipta, halal, Merek, Pendugaan Umur Simpan, PP 5. Operasional Dekranasda 6. Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Usaha Mikro 7. Pendataan UMKM	88.41	1,450,000,000
4.4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Balikpapan	1.78	Persen	1,450,000,000	APBD		2.14	1,450,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	target capaian kinerja	Satuan	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Balikpapan	8.65	Persen	6,123,315,628	APBD	1.Bazaar UMKM 2.Gebyar UMKM 3.Lomba Motif Batik Khas Balikpapan 4.Pelatihan Kerajinan bagi UMKM 5.Pelatihan Non Kerajinan Bagi UMKM 6.Kegiatan Promosi di Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan 7.Kegiatan Promosi di Gedung Parkir Klandasan 8.Kegiatan Promosi di Pantai Manggar 9.Kegiatan Promosi di Rumah Batik Tenun dan Bordir (BATEBOR) 10.Berita Media Online) 11.Promosi Dalam dan Luar daerah (sewa Tempat, Display, DLL)	5.36	3,200,000,000
5.5	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Balikpapan	0.29	Persen	6,123,315,628	APBD		0.33	3,200,000,000
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Balikpapan	8.98	Persen	4,942,846,057	APBD	1.Pelatihan Peningkatan SDM IKM 2.Jasa Tenaga Laboratorium Pengambilan Contoh dan Uji Air Minum Dalam Kemasan (Standar Kualitas/ SNI Wajib) 3.Penyusunan Kajian Pengembangan Industri Kota 4.Pemeliharaan Alat Bantu Produksi di Sentra Industri Kecil 5.Alat Bantu Operasional Perbaikan Prasarana di Sentra Industri 6.Penyusunan Review DED Pembangunan Prasarana di SIK 7.Penyempurnaan Gedung/ Sarana Prasarana/ Fasilitas di Sentra Industri Kecil 8. Sosialisasi/ FGD Pengembangan Industri 9.Jasa Tenaga Laboratorium (Pemeriksaan Uji Lab Air Bersih & Uji Lab Sampel Air Limbah 10.Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan 11.Belanja Jasa Tenaga Maintenance 12.Belanja Jasa Tenaga Operasional IPAL Komunal dan IPAL Digester 13.Belanja Tenaga Operasional Cold Storage 17.Belanja Tagihan Air, Listrik, Telpo 14.Pemeliharaan Mesin Chainsaw, CCTV, Alat Pendingin di SIKS, Komputer/Notebook, printer, Cold Storage beserta fasilitasnya di SIKT 15.Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Bangunan Sentra 16.Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Produksi SIK 17.Pemeliharaan IPAL Sentra dan Jaringannya 18.Pemeliharaan Taman Sentra di Sumber dan Teritip 19.Belanja Modal Peralatan Pengerangkat Barang Untuk Cold	2.60	6,260,699,926
6.6	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	Balikpapan	67.5	persen	4,942,846,057	APBD		72.5	6,260,699,926

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	target capaian kinerja	Satuan	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Balikpapan	14.80	Persen	115,000,000	APBD	Tenaga Ahli Programmer Pengelola Data Industri	15.69	200,000,000
7.7	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	Balikpapan	90	Persen	115,000,000	APBD		93	200,000,000
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	Balikpapan	64.29	Persen	210,000,000	APBD	1.Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi 2.Tablet untuk Pelayanan Pendampingan SIINas 3.Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Pengelola Media Sosial 4.Cetak Media Publikasi dan Informasi 5.Pembuatan Video Edukasi 6.Publikasi Media Online) 7.Publikasi Radio 8. Jasa Konsultasi Laporan Industri Kota Balikpapan Tahun 2025	66.67	300,000,000
8.8	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	Balikpapan	13.86	Persen	210,000,000	APBD		11.31	300,000,000
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	78	Nilai	10,316,198,000	APBD		80.00	10,952,605,700
9.9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	83	nilai	6,450,598,000	APBD	Gaji dan tunjangan ASN	85.00	6,518,703,400
9.10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	75	nilai	325,250,000	APBD	1.Pakaian Olahraga 2.Belanja Pakaian Adat Daerah (Baju Adat Mahligai Balikpapan) 3. Belanja Bimbingan Teknis	78	425,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun 2026	
			Lokasi	target capaian kinerja	Satuan	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
9.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	75	nilai	1,132,303,000	APBD	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (lampu stop kontak, dll) 2. Belanja Monitor Informasi di Ruang Pelayanan (smart TV) 3. Belanja Laptop 4. Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5. Alat Tulis Kantor 6. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh(harian pegawai) 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Kotak Arsip, Kop Dinas, foto copi, penjiilidan, NCR, umbul2, dll) 10. Adventorial Media Cetak Regional Balikpapan(Iklan Ucapan HUT Kota dan Kaleidoskop) 11. Belanja Jasa Iklan/Reklame 12. Konten Informasi Media Elektronik 13. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14. Belanja Souvenir Produk UMKM Lokal 15. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78	1,283,902,300
9.12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	77	Nilai	299,600,000	APBD	1. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Ess II dan Ess III 2. Belanja Mebel (Kursi, lemari, sofa)	78	425,000,000
9.13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	75	nilai	1,237,000,000	APBD	1. Materai 2. Pengiriman Paket 3. Listrik, Air, Telpon 4. Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5. Belanja Souvenir/Cendera Mata Produk UMKM Lokal 6. Honorarium Instruktur Senam 7. Honorarium Rohaniawan 8. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	78	1,505,000,000
9.14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	77	nilai	871,447,000	APBD	1. Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional 2. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional 3. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 4. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional 5. Belanja Pemeliharaan Mebel (Meja Resepsionis, Meja Tamu, Meja Kerja, Sofa,, dll) 6. Belanja BBM Generator 7. Belanja Pemeliharaan Genset, Mesin Absensi, Mesin Fotokopi, Audio Video, CCTV, AC, Komputer/Laptop, Printer 8. Pemeliharaan Gedung Kantor 9. Renovasi Ruang Rapat Lt.1 10. Pemeliharaan Videotron	78	795,000,000
Total						24,685,315,685				23,763,305,626

BAB IV.

RANCANGAN AKHIR RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program DKUMKMP Kota Balikpapan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKUMKMP Kota Balikpapan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan DKUMKMP Kota Balikpapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan DKUMKMP Kota Balikpapan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi DKUMKMP Kota Balikpapan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan namun juga diharapkan bersumber pendanaan lainnya (APBN, BANKEU, DEKON, TP, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif TA. 2025 adalah sbb :

Tabel 2.6

RANCANGAN AKHIR RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	356,478,000	APBD
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	356,478,000	APBD
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	821,478,000	APBD
2.2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan	821,478,000	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi sehat	350,000,000	APBD
3.3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	350,000,000	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1,450,000,000	APBD
4.4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	1,450,000,000	APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	6,123,315,628	APBD
5.5	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	6,123,315,628	APBD
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	4,942,846,057	APBD
6.6	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	4,942,846,057	APBD
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	115,000,000	APBD
7.7	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	115,000,000	APBD
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	210,000,000	APBD
8.8	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota	210,000,000	APBD
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	10,316,198,000	APBD
9.9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,450,598,000	APBD
9.10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325,250,000	APBD
9.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,132,303,000	APBD
9.12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299,600,000	APBD
9.13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,237,000,000	APBD
9.14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	871,447,000	APBD
Total			24,685,315,685	

BAB V.






INOVASI PERANGKAT DAERAH



Selain Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. DKUMKMP Kota Balikpapan, terdapat beberapa Inovasi yang mana Diharapkan dengan inovasi tersebut dapat memberikan informasi tentang Koperasi, UMKM dan Perindustrian yang lebih akurat, meningkatkan kinerja pegawai, memberikan efektivitas dalam pelayanan DKUMKMP, serta memudahkan bagi pelaku usaha untuk melaporkan dan memasarkan hasil Produknya dan stakeholders terkait lebih mudah mengetahui dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Tabel 2.7

Inovasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian

Kota Balikpapan

NO	Gambar	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Terkait Inovasi (Tujuan)	Latar Belakang/Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak (M manfaat)
1		OPTIMALISASI PROMOSI PRODUK UNGGULAN	sarana promosi produk unggulan diperusahaan swasta dan Menyusun regulasi daerah yang mn di harapkan tersedianya showcase produk unggulan di perusahaan swasta dan implementasi perwali di instansi pemerintah, BUMN, swasta dan sekolah	Menyusun regulasi bagi kegiatan promosi produk unggulan pelaku usaha IKM, serta pengelolaan pemasaran produk di perusahaan jasa pelayanan, dalam rangka mensosialisasikan produk unggulan Kota Balikpapan	Pemerintah Kota Balikpapan, dan stek holder terkait	Mempermudah promosi dan menciptakan identitas yang dikenal di msyarakat melalui produk unggulan olahan panganan dan kerajinan
2		" SIKOPIN" Strategi Peningkatan Pelayanan Melalui Pembangunan Sistim Informasi Koperasi, Umkm Dan Perindustrian Di Kota Balikpapan (Sikopind)	SIKOPIND merupakan layanan sistim Koperasi UMKM dan Perindustrian yang dapat memfasilitasi keperluan pelaku usaha serta pendataan secara digital	Kebutuhan akan layanan data yang berbasis digital sudah bukan hal yang baru saat ini. Pelayanan yang berbasis digital sudah menjadi trend baik di sektor pemerintah maupun non pemerintah, oleh karenanya pemenuhan kebutuhan atau ketersediaan data suatu layanan berbasis digital sudah tidak bisa dihindari	Pemerintah Kota Balikpapan, dan stek holder terkait	Memberikan informasi tentang data Koperasi,UMKM dan Perindustrian yang lebih akurat
3		*SIYANTI* (Sistem Informasi Pos Layanan Teknologi Tepat Guna)	Untuk menyediakan informasi yang cepat, mudah diakses dan lengkap mengenai masil inovasi dan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna di masyarakat	Perlunya aplikasi yang memudahkan dalam pengelolaan data serta akses informasi mengenai inovasi dan teknologi tepat guna	Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat	Memberikan kemudahan bagi pos layanan teknologi tepat guna dalam mengelola data serta memberikan kemudahan akses informasi teknologi tepat guna dan inovasi bagi masyarakat
4		"PERIUK NASI" (Pembayaran Digital Retribusi Kekayaan Daerah di Sentra Industri)	"PERIUK NASI" yang merupakan akronim dari Pembayaran Digital Retribusi Kekayaan Daerah di Sentra Industri Kecil	suatu inovasi yang mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia serta bagian dari target Kepala DKUMKMP di Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2D yang mana sangat diperlukan dalam rangka satu QR CODE untuk semua aplikasi dompet digital (e-wallet) atau digital banking.	Pelaku IKM di Sentra	memberikan kemudahan bagi IKM di Sentra dalam melakukan pembayaran secara praktis dan aman,
5		Sobat UMKM Balikpapan (APK)	Aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pelaku UMKM Kota Balikpapan untuk memasarkan produknya secara digital dengan mengunduh melalui Playstore Android . "Jual Beli dalam Genggaman"	Belum adanya sistem aplikasi digital pemasaran produk UMKM yang memudahkan pengguna untuk memasarkan produknya.	Pelaku UMKM, Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat	mempermudah pelaku UMKM untuk memasarkan/Mempromosikan produknya secara digital sehingga masyarakat dapat dengan mudah membeli produk umkm Kota Balikpapan

6		<p>“KE SIK SOMBER BERPRODUKSI” Kebijakan sentra industri kecil sumber berkonsep produksi, edukasi dan rekreasi</p>	<p>Sentra Industri Kecil (SIK) Sumber merupakan Kawasan sentra industri kecil, mengolah produk bahan baku kedelai, khususnya tahu dan tempe di Kota Balikpapan, yang akan dijadikan sebagai Kawasan Baru berkonsep Produksi, Edukasi dan Rekreasi.</p>	<p>revitalisasi dan modernisasi alat produksi, sehingga tercipta produksi bersih, higienis dan ramah lingkungan</p> <p>Produksi : mengutamakan produksi bersih dan hygiene, meningkatkan efisiensi, kualitas, keamanan kerja dan mengurangi dampak lingkungan.</p> <p>Edukasi : Pengembangan edukasi pengolahan, diversifikasi berbahan kedelai ruang, rumah contoh produksi, workshop, pendidikan dan pelatihan</p> <p>Rekreasi : Pengembangan pusat wisata: membuat pusat wisata, tur pabrik, pendidikan interaktif dan kreatif, membuat tempat rekreasi dan kuliner.</p>	<p>Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat</p>	<p>Penerapan implemtasi kebijakan dengan kolaborasi dan sinergikan konsep produksi, edukasi, dan rekreasi di SIK Sumber dengan stake holder, dapat menjadi daya tarik sebagai tujuan wisata yang unik, menarik dan edukatif</p>
7		<p>“FITS BALIKPAPAN” FROM IDEA TO STARTUP (FITS) BALIKPAPAN</p>	<p>Peningkatan peran Koperasi, UMKM dan Industri dalam pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan</p> <p>a. Digitalisasi pendukung data dan informasi OSS (Kemeninves/BKPM) dan ODS (KemenkopUKM).</p> <p>b. Penumbuhan UMKM dan wirasaha baru sebagai indikator capaian target kinerja baru.</p> <p>c. Pengembangan kawasan pengolahan industri kecil menjadi industri kreatif penopang kebutuhan masyarakat dan daerah lainnya</p>	<p>inovasi baru Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan berupa program kerja baru kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat menciptakan wirasaha dan UMKM baru menjadi startup (perusahaan yang sedang mencari dan mengembangkan pasar berbasis internet, teknologi dan web, yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan jasa dengan tujuan masyarakat dapat mandiri dan mapan)</p>	<p>Pelaku UMKM, Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat</p>	<p>Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja, perlu dilakukan upaya percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirasaha.</p>

BAB VI.

PENUTUP

Rancangan akhir Renja DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rancangan akhir Renja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feed-back terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan DKUMKMP Kota Balikpapan :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja DKUMKMP Kota Balikpapan.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Kontribusi pelaku usaha sektor Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Demikian Rancangan akhir Renja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.

BAB I
PENDAHULUAN

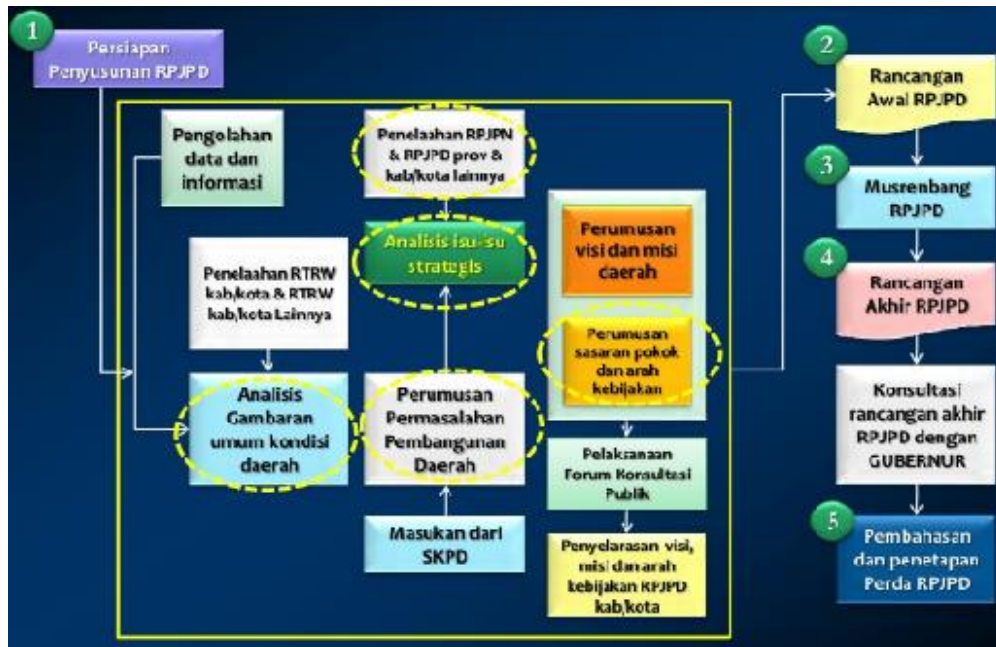
1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara teknis, penyusunan RENJA SKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sebagai dokumen rencana tahunan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Balikpapan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Gambar 1.1
Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota



Mengingat arti strategis Rancangan Akhir RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPMPSTSP Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dari Progran, Kegiatan hingga Sub Kegiatan dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 DPMPSTSP Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT);
14. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023, DPMPTSP Kota Balikpapan menjalankan 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian target, tujuan dan sasaran dinas pada tahun berjalan sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP tahun 2021-2026. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 4.** Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5.** Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1.** Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pagu Anggaran DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2023 (murni) sebesar Rp 17.064.300.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dan berdasarkan dokumen APBD-P Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 11 Oktober 2023 Perwali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Oktober 2023, Pagu Anggaran Perubahan DMPTSP Kota Balikpapan menjadi sebesar Rp 25.064.300.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Perubahan dilakukan pada dana kegiatan – kegiatan yang dianggap prioritas untuk dilakukan penambahan.

Program dan Kegiatan DMPTSP Kota Balikpapan yang mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari Rp 199.927.000 menjadi Rp 5.199.927.000
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari Rp 470.000.000 menjadi Rp 726.660.000
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari Rp 0 menjadi Rp 452.010.000
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Rp 550.000.000 menjadi Rp 580.000.000

5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari Rp 350.000.000 menjadi Rp 504.330.000
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari Rp 250.000.000 menjadi Rp 350.000.000
7. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dari Rp 2.500.000.000 menjadi Rp 4.101.000.000
8. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dari Rp 154.300.000 menjadi Rp 560.300.000
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dari Rp 344.300.000 menjadi Rp 0
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mendapatkan tambahan pagu dari dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari BKPM RI dengan pagu semula Rp 110.448.000 menjadi Rp 405.436.000
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mendapatkan tambahan pagu dari dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dari BKPM RI dengan pagu semula Rp 120.512.000 menjadi Rp 169.824.000

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan s/d Tahun 2023, berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan

dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2023 telah mencapai target yang telah direncanakan dengan level capaian target dalam rentang 80 – 100 % dengan level capaian antara tinggi hingga sangat tinggi. Tahun 2023 Realisasi Pekerjaan Fisik sebesar 89,30 % dengan Realisasi Keuangan DPMPTSP sebesar 89,48 % (level capaian dalam kategori Baik) . Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target Keuangan namun tercapai realisasi fisiknya seperti:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 95,04%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 95%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 89,16%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

4. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 90,06%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 104% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 96,72%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

6. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 80,42%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 93,37%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,41%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 56,24%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
 10. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 89,26%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
 11. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 99,07%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
 12. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 87,66%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
 13. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 221% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 92,21%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
 14. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 130% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 88,02%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
 15. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 144% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,21%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
 16. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 101% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 92,56%. Terdapat SILPA, karena terdapat paket sosialisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan sumber dana DAK Non Fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan.

17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 225% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 94,26%. Terdapat SILPA, karena terdapat paket sosialisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan sumber dana DAK Non Fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan.

18. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,66%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2 pada Rencana Kerja ini.

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah DPMPSTSP Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2023

- | | |
|--|-------|
| 1. Presentase Pencapaian Nilai realisasi investasi | 100% |
| 2. Nilai Reformasi Birokrasi Pada DPMPSTSP Kota Balikpapan | 0.11% |
| 3. Presentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat | 34.13 |

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
I	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentas Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	85	4,101,000,000	85	3,594,843,635	100%	87.66%	Tingkat capaian tercapai 100% karena terdapat peningkatan minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kota Balikpapan yang ditandai oleh beberapa audensi peninjauan peluang investasi dari Singapore dan China
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	5	4,101,000,000	5	3,594,843,635	100%	87.66%	Tingkat capaian tercapai 100% karena kegiatan promosi dilaksanakan secara maksimal baik yang menggunakan dana PAD maupun Non PAD
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	4,101,000,000	5	3,594,843,635	100%	87.66%	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target (Triwulan II : telah dilaksanakan event promosi Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah di Jakarta , Triwulan III : telah dilaksanakan event promosi APEKSI Expo di Kota Makassar, Untuk Triwulan IV telah mengikuti 3 event promosi dalam daerah di Kota Balikpapan (Nusakraf, ALKI II Zone Investment Expo, One on One Meeting sebagai rangkaian acara pada ALKI II)

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	5	167,500,000	0	156,864,000	0%	93.65%	Telah dilakukan pembahasan Raperda Insentif oleh Dewan dan menunggu pembahasan dan sinkronisasi dengan OPD Terkait
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	%	20	167,500,000	20	156,864,000	100%	93.65%	Dokumen Peta Potensi telah selesai pengembangannya pada tahun 2023 dan akan dilakukan berkelanjutan tahun 2024
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	92,500,000	1	82,564,000	100%	89.26%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	75,000,000	1	74,300,000	100%	99.07%	Capaian kinerja telah tercapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya (%)	%	100	575,260,000	100	375,271,174	100%	65.24%	Fasilitasi permasalahan perusahaan dengan jumlah investasi yang besar (debottlenecking) bekerjasama dengan BKPM/Kementerian Investasi, dan sampai saat ini sudah masuk periode penyampaian LKPM Triwulan 4 Tahun 2023 (1 - 10 Januari 2024)
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM (LKPM)	LKPM	315	575,260,000	5614	375,271,174	111%	65.24%	Capaian kinerja telah tercapai 1782 %. Data LKPM sampai pelaporan Tw 4 Tahun 2023 (penyampaian LKPM tgl 1 - 10 Januari 2024) Catatan : Data Proyeksi diolah dari Data DPMPSTP Provinsi Kaltim untuk Capaian LKPM tahun 2023 sejumlah 5614 LKPM
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD) (Kegiatan Usaha)	Kegiatan Usaha	4	-	0	-	0%	0%	Telah dilakukan Pergeseran anggaran dan anggaran Pemantauan telah didistribusikan ke sub kegiatan sesuai Juknis DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal (Pembinaan dan Pengawasan)
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD) (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	100	405,436,000	100	375,271,174	100%	92.56%	Capaian kinerja telah tercapai 100 %, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kemudahan Berusaha pada tgl 7 September 2023, pendampingan pengisian LKPM Online secara online (via zoom dan via no WA konsultasi LKPM Dalak PM) dan secara offline (loket pelayanan LKPM, pembinaan langsung ke Perusahaan).

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
			Jumlah Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Penyelesaian permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha (DAK NF FPM) (Kegiatan Usaha)	Kegiatan Usaha	9		9		100%		Capaian kinerja telah tercapai 100 %, telah dilaksanakan kegiatan Fasilitas Penyelesaian permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
			Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha (DAK NF FPM) (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	251		260		103.59%		Capaian kinerja telah tercapai 103,59 %. Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebanyak 2 kegiatan, pada tgl 9 & 10 Agustus 2023 dan 23 & 24 Agustus 2023
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (PAD) (Kegiatan Usaha)	Kegiatan Usaha	6	169,824,000	15	160,069,800	250%	94.26%	Capaian kinerja telah tercapai 250 %. Telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan OSS RBA untuk 15 kegiatan usaha.
			Jumlah Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha yang memperoleh Pengawasan Penanaman Modal (DAK NF FPM) (Kegiatan Usaha)	Kegiatan Usaha	16		32		200%		Capaian kinerja telah tercapai 200 %. Telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan OSS RBA untuk 32 kegiatan usaha.

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	%	85	374,320,000	94.44	365,557,325	111.11%	98%	Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penerbitan izin via oss.go.id
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang Terpenuhi	%	100	374,320,000	100	365,557,325	100%	98%	Rasio data capaian mencapai 100%
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	374,320,000	1	365,557,325	100%	98%	Capaian kinerja telah tercapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17
II	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	%	68	751,939,000	96.63	698,923,717	142%	93%	Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penerbitan izin via oss.go.id dan non OSS
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	11596	751,939,000	17,794	698,923,717	153%	93%	Data berdasarkan hasil input dari Koordinator PTSP I dan II
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1,500	560,300,000	3,309	516,628,605	221%	92%	Data berdasarkan hasil input dari Koordinator PTSP I dan II
		Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	96	43,550,000	125	38,334,262	130%	88%	Data berdasarkan hasil input dari Koordinator PTSP I dan II
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	10,000	148,089,000	14,360	143,960,850	144%	97%	Capaian Kinerja melebihi 100% (Diambil dari angka jumlah pengunjung di loket DPMPPTSP dan Bidang, Konsultasi via CS, SiJempol dan Pengaduan via SPAN LAPOR)

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
III	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Skor	79	19,094,281,000	92.77	16,711,927,517	117.43%	87.52%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Skor	77.5	8,875,431,000	96.74	7,519,020,779	125%	84.72%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	8,875,431,000	45	7,519,020,779	75%	84.72%	Sesuai update data pada aplikasi SimGAJI (sesuai update data sejumlah 45 orang PNS)	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Skor	77	6,605,789,000	96.25	6,525,433,286	125%	98.78%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	39,993,000	1	38,008,000	100%	95%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	39	5,199,927,000	39	5,183,085,000	100%	100%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	536,625,000	3	509,785,700	100%	95.00%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	74,999,000	2	66,870,950	100%	89.16%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	27,585,000	1	24,842,500	100%	90.06%	Capaian kinerja telah tercapai 100%	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	81	726,660,000	84	702,841,136	104%	96.72%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	79	452,010,000	81.77	363,518,936	104%	80.42%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	4	452,010,000	4	363,518,936	100%	80.42%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	79	2,306,721,000	95.48	2,223,726,24	120.86%	96.40%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10,000,000	1	10,000,000	100%	100.00%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	580,000,000	12	541,537,833	100%	93.37%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	1,716,721,000	3	1,672,188391	100%	97.41%	Capaian kinerja telah tercapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Penjelasan
					7	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	17			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	77.5	854,330,000	94.79	43,747,228	122%	51.94%	Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	504,330,000	24	83,630,978	100%	56.24%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	284	50,000,000	151	160,116,250	53%	45.75%	Pemeliharaan yang telah dilaksanakan adalah pemeliharaan Mesin Foto Copy, CCTV, Mesin absensi, Lift, AC, Komputer, Laptop, Printer, Instalasi Air dan Mesin Genset (Pemeliharaan belum maksimal disebabkan oleh kondisi Peralatan dan perlengkapan yang masih cukup baik
TOTAL						25,064,300,000		22,426,976,104			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN									105.96%	81.73%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN									Sangat Tinggi	Tinggi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN									114.63%	77.22%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN									Sangat Tinggi	Tinggi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									71.59%	87.45%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									Sedang	Tinggi	

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan tingkat capaian kinerja 0% dan capaian keuangan 93,65% dengan target indikator program yaitu Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal dengan target kinerja sebesar 5% namun realisasi kinerja pada tahun 2023 belum tercapai (0%) karena belum tercapai karena telah dilakukan pembahasan Raperda Insentif oleh Dewan dan masih menunggu pembahasan dan sinkronisasi dengan OPD Terkait

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

- Program Promosi Penanaman Modal dengan tingkat capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 87.66% dengan target indikator program yaitu Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah dengan target kinerja sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100% karena terdapat peningkatan minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kota Balikpapan yang ditandai oleh beberapa audiensi peninjauan peluang investasi dari Singapore dan China
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tingkat capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 65,24% dengan target indikator program yaitu Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100% karena Fasilitasi permasalahan perusahaan dengan jumlah investasi yang besar (debottlenecking) bekerjasama dengan BKPM/Kementerian Investasi.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan tingkat capaian kinerja 142% dan capaian keuangan 93% dengan target indikator program yaitu Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang

diterbitkan dengan target kinerja sebesar 68% dan terealisasi sebesar 96,63% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 142% dengan jumlah penerbitan sejumlah 17.794 dokumen jika dibandingkan dengan target jumlah penerbitan Perizinan sebesar 11.596 dokumen

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 117,43% dan capaian keuangan 87,52% dengan target indikator program yaitu IKM Internal Perangkat Daerah dengan target kinerja Skor IKM sebesar 79,00 dan terealisasi sebesar 92,77 sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 117,43% dengan hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas tercapai cukup baik.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

- Masih terdapatnya ketidaksesuaian indikator keluaran antara dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- Masih terdapatnya beda satuan pada indikator dalam perencanaan di dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
- Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD;
- Target output yang rendah pada saat penyusunan Renstra dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
- Perumusan indikator dan metode perhitungan yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target dikarenakan kesulitan untuk melakukan perhitungan

5. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program, kegiatan, Sub Kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis yang akan datang;
- Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan rumusan perhitungan pencapaian targetnya;
- Memiliki data dasar pada setiap indikator kinerja sehingga dapat terukur dan dipertanggung jawabkan;

- Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
- Komitmen bersama seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan merupakan instansi teknis dan tidak memiliki SPM, sehingga capaian kerjanya merupakan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tupoksinya. Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran nomor : 060.4/01799/Org tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dalam menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dimana tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU, namun menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai IKU dan menyesuaikan target dengan realisasi dari Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Sesuai dengan .Adapun capaian kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan periode yang lalu digambarkan pada tabel T-C .30 di bawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian / PROYEKSI				Catatan Analisis
			Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	100%	100%	100%	100%	463,26%	156,39%	Sesuai Target Renstra	Target dan Realisasi IKU pada tahun 2021 tidak dapat diinput karena perbedaan indikator dengan Renstra yang baru	
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	77,57	75	75,5	76	-	98,55%			

3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	4278%	1827%		
---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Berdasarkan tabel tersebut di atas, capaian kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan secara keseluruhan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Indikator I “Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi”**, dengan realisasi sebesar **156,39 %** dari target 100% sehingga capaian indikator I sebesar **156,39 %** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi
- **Indikator II “Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan”** , dengan realisasi sebesar 73,91 dari target 75 sehingga capaian sebesar **98,55%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi
- **Indikator III “Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat”** , dengan realisasi sebesar 2,01 dari target 0,11 sehingga capaian sebesar **1827%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam urusan penanaman modal secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Tingkat Pelayanan DPMPTSP

Secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP kota Balikpapan terus menerus mengalami peningkatan, beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan tersebut meliputi :

1. Isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan pada tahun 2024 adalah terbentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan yang telah diresmikan secara nasional pada tanggal 5 Desember 2022 sebagai pengembangan yang lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMD dan swasta dan pada pengembangannya akan di *upgrade* menjadi Mal Pelayanan Publik Digital;
2. Pelayanan Pendampingan OSS (Online Single Submission), Antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan perusahaan melalui OSS, maka diperlukan pendampingan secara intensif untuk melakukan proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Jumlah Izin yang melalui OSS DPMPTSP Kota Balikpapan adalah

sebanyak 33 Jenis Izin dari total 80 Jenis Izin yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan);

3. Mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan melalui beberapa inovasi pelayanan yaitu : SiJempol (Sistem Jemput Bola), Reklame Prioritas, dan sebagainya;
4. Melakukan sosialisasi pelayanan perizinan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial serta melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung kepada stakeholder terkait;
5. Penyederhanaan proses perizinan;
6. Memfasilitasi investor apabila ada permasalahan dengan masyarakat;
7. Beberapa pelayanan perizinan hanya dilakukan satu pintu DPMPTSP sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengurusan;
8. Meningkatkan investasi disektor pariwisata dengan kegiatan promosi/pameran baik yang dilaksanakan pada event skala regional maupun event berskala nasional;
9. Meningkatkan sasaran penyelenggaraan promosi investasi dan sosialisasi investasi di Kota Balikpapan.

b. Permasalahan dan hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan tersebut, dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan antara lain :

1. Masih terdapat beberapa Peraturan Menteri yang belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS);
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait perizinan sehingga jika terjadi masalah teknis perijinan tidak mendapat jawaban yang pasti;
3. Belum terbaharuinya beberapa Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan zaman;
4. Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan tentang perizinan;
5. Belum optimalnya pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin atau izin yang sudah kadaluarsa;
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas sehari-hari tidak maksimal;
7. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi yang memberikan pelayanan perizinan;

8. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi sumber daya manusia di DPMPTSP melalui pelatihan-pelatihan, kursus-kursus serta diklat fungsional;
9. Belum terkininya atau terbaharuinya Standard Operational Procedure (SOP), Standar Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP dan dokumen Pedoman Pelayanan DPMPTSP sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
10. Sengketa Kepemilikan tanah sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan Izin Prinsip dan IMTN;
11. RTRW dan RDTR yang belum baku sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan perizinan seperti izin prinsip, IMB dan sebagainya.

c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

Disamping permasalahan yang telah disebutkan pada poin b di atas, DPMPTSP memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal meningkatkan pertumbuhan Investasi di Kota Balikpapan. Dengan terus menggiatkan inovasi, DPMPTSP memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut :

- **Pengembangan aplikasi SICANTIK** (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) bekerjasama dengan Diskominfo Kota Balikpapan dengan tujuan untuk mempermudah proses penyampaian informasi pelayanan dan transparansi biaya pengurusan izin.
- **Tracking Barcode dalam SICANTIK** (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) sehingga *tracking* proses perizinan dapat diketahui langsung oleh pemohon dengan mudah, cepat dan transparan.
- **SPONTAN (Sistem Pendaftaran Online tanpa antrian)**
Inovasi SPONTAN aplikasi untuk pemenuhan komitmen dimasa pandemic. Pengajuan dan penerbitan izin bisa didownload langsung via email pemohon.
- **SIBER (sistem Antar Izin Terbit)**
Inovasi SIBER (sistem antar izin terbit) yang dibuat untuk izin yang tidak terbit sesuai SOP dan bekerjasama dengan Ojek Online untuk pengantaran berkasnya.
- **SiJEMPOL (Sistem Jemput Bola Langsung)**
Merupakan Inovasi yang dirilis bulan Februari 2018, dimana Petugas Perijinan DPMPTSP langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pelayanan perijinan baik perijinan usaha, IMB dan Perijinan lainnya di lokasi yang telah ditetapkan sehingga memperdekat jarak antara masyarakat yang ingin mengurus izin.
- **Simpananku Kopi**

Merupakan layanan Memudahkan difabel dan manula dalam mengajukan perizinan berusaha dimasa pandemic.izin bisa dijemput dan diantar.

- **Mimbari Online**

Merupakan layanan untuk mempermudah pengurusan IMB rumah ibadah lebih cepat dan mudah terbit tanpa retribusi

- Kualitas SDM DPMPTSP yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan teknologi yang memadai;

Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan Perizinan dan Penanaman Modal baik secara pengendalian dan pengawasan beserta evaluasinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 DPMPTSP Kota Balikpapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	DPMPTSP	5	575,000,000	APBD	5	775,018,000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	%	DPMPTSP	20	575,000,000	APBD	20	375,018,000
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten.kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	DPMPTSP	1	200,000,000	APBD	1	175,000,000
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	DPMPTSP	1	375,000,000	APBD	1	200,018,000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	DPMPTSP	95	3,137,340,471	APBD	100	800,000,000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	DPMPTSP	5	3,137,340,471	APBD	5	800,000,000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	DPMPTSP	6	3,137,340,471	APBD	6	800,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (Debottlenecking) yang di Fasilitas Pemasalahan Penanaman Modalnya	%	DPMPTSP	100	295,248,000	APBD	100	984,150,000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	DPMPTSP	345	295,248,000	APBD	360	984,150,000
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	DPMPTSP	4	110,248,000	APBD	4	5,000,000
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	DPMPTSP	150	85,000,000	APBD	200	450,000,000
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	DPMPTSP	14	100,000,000	APBD	15	529,150,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Presentase Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	%	DPMPTSP	70	1,699,994,614	APBD	71	2,214,337,500
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)	Dokumen	DPMPTSP	11610	1,699,994,614	APBD	11620	2,214,337,500
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	DPMPTSP	1500	1,203,260,000	APBD	1500	1,200,000,000
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	DPMPTSP	10000	199,994,614	APBD	10000	614,337,500
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	DPMPTSP	110	296,740,000	APBD	120	400,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	%	DPMPTSP	87	478,000,000	APBD	88	1,291,696,000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan Informasi yang Terpenuhi	%	DPMPTSP	100	478,000,000	APBD	100	1,291,696,000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	DPMPTSP	1	478,000,000	APBD	1	1,291,696,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	DPMPTSP	81	15,814,416,915	APBD	82	14,359,482,000
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	DPMPTSP	77.8	142,574,475	APBD	78	75,000,000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	DPMPTSP	1	142,574,475	APBD	1	25,000,000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	DPMPTSP	80.5	9,807,133,965	APBD	81	9,986,482,000
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	DPMPTSP	60	9,807,133,965	APBD	60	9,986,482,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	DPMPTSP	80.5	1,573,415,336	APBD	81	1,398,000,000
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	DPMPTSP	1	60,000,000	APBD	1	70,000,000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	DPMPTSP	13	84,885,925	APBD	13	350,000,000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	DPMPTSP	4	575,000,000	APBD	4	408,000,000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	DPMPTSP	3	100,000,000	APBD	3	150,000,000
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	DPMPTSP	1	80,400,000	APBD	1	20,000,000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DPMPTSP	45	673,129,411	APBD	50	400,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DPMPTSP	77.5	249,600,000	APBD	79	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		DPMPTSP	2	249,600,000	APBD	-	

2.18.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	DPMPTSP	81	2,653,441,500	APBD	82	1,910,000,000
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	DPMPTSP	1	10,000,000	APBD	1	10,000,000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	DPMPTSP	4	650,000,000	APBD	4	900,000,000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	DPMPTSP	3	1,993,441,500	APBD	3	1,000,000,000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	DPMPTSP	80	1,388,251,639	APBD	80.5	990,000,000
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	DPMPTSP	36	822,701,564	APBD	36	470,000,000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	DPMPTSP	8	200,484,080	APBD	8	320,000,000
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	DPMPT	1	365,065,995	APBD	1	200,000,000
TOTAL						22,000,000,000			20,424,683,500

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Untuk Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) tahun 2024 tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan DPMPTSP berperan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berhubungan langsung dengan masyarakat dunia usaha.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan Tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Jika diselaraskan dengan Sembilan program Presiden yang terpilih yaitu yang disebut Nawa Cita, Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2018 adalah **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**.

Maka dapat disusun hubungan antara Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada Rancangan Awal RKP Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas
1. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata	1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
	2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
	3. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
	4. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
	5. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
	6. Reforma Agraria
	7. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
	8. Percepatan Pembangunan Papua

Dalam Program Prioritas diatas dapat bahwa Program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Balikpapan terdapat pada Program Nasional ke-4 yaitu Pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Sedangkan pada pada Program Prioritas pada rancangan awal RKP tahun 2024 termasuk pada program ke-11 yaitu perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Tabel 3.1

Telaahan Misi BKPM dan DPMPTSPSP Provinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Balikpapan
1	2	3	4
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1 Teridentifikasinya dan Terinfokannya Potensi dan Peluang Investasi di Kalimantan Timur serta Terselenggaranya MoU 2 Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Meningkatkan nilai realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam Modal	3 Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Kebijakan yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi Provinsi	2 Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	4 Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Lebih Mudah dan Cepat 5 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	

Dari tabel diatas maka dapat dilihat keselarasan antara Misi DPMPTSP Kota Balikpapan dengan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan Misi Kementerian terkait yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP

Pendekatan Penyusunan RKP 2025 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Priority Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dengan memperhatikan pada :

- Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
- Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Pendekatan Holistik Tematik berarti pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas DPMPTSP Kota Balikpapan, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar bidang yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas DPMPTSP Kota Balikpapan yang didukung oleh antar bidang.

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses.

Jika dihubungkan dengan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas antar bidang lainnya dalam mendukung meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu baik dari segi kemudahan pelayanan, kemudahan akses informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta transparansi dalam hal biaya dan tracking berkas untuk mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan.

Penerapan dalam dokumen Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, pendekatan indikatif dapat diaplikasikan dengan menggabungkan dan mengkombinasikan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai satu sasaran strategis.

Sedangkan pendekatan spasial digunakan saat pembahasan usulan kegiatan dan sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit dari Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dirasakan baik masyarakat kota Balikpapan pada umumnya maupun masyarakat dunia usaha pada khususnya.

Hubungan yang selaras antara Renja dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja Tahun 2054 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DPMPTSP Tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode 2021-2026 sebagai berikut

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan

Sasaran Misi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kota Balikpapan dan visi dan misi Walikota terpilih periode 2021-2026 terdiri dari tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan

Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Balikpapan dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	100%	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota <p>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota <p>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya 2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha 3. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM & KEGIATAN
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota</p> <p>1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pelayanan Perizinan</p> <p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>3. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025, Program dan Kegiatan tahun 2025 disusun berdasarkan :

- a. Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025;
- b. Berkolerasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan DPMPTSP

Adapun program / Kegiatan / Sub Kegiatan teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
 - c. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

V. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- c. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

VI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berdasarkan data Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan maka terdapat jumlah program sejumlah 6 program, 11 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
I	Bidang Penanaman Modal				6,185,583,085				6,976,526,000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			5%	575,000,000	APBD		5%	775,018,000
A	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			20%	-	APBD		20%	400,000,000
	1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Input 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Outcome (Hasil) : Presentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali) yang disahkan	Orang Rp Paket Bulan Dokumen persen	1 6 - 1 12 1 20%	-	APBD	1	200,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan			20%	575,000,000	APBD		20%	375,018,000
	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Input 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Outcome (Hasil) : Presentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	Orang Rp Paket Bulan Dokumen persen	0 6 200,000,000 1 12 0 20%	200,000,000 APBD		1	175,000,000	
	2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Input 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Outcome (Hasil) : Presentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	Orang Rp Paket Bulan Dokumen persen	1 6 375.000.000 1 12 1 20%	375.000.000 APBD		1	200,018,000	

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
II	Program Promosi Penanaman Modal			95%	3,137,340,471	APBD		100%	1,096,987,000
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5%	3,137,340,471	APBD		5%	1,096,987,000
	1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Outcome (Hasil) : Presentase Kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Orang Rp event bulan Dokumen Persen	6 6 3,137,340,471 5 12 6 5%	3,137,340,471	APBD	6	800,000,000	
III	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			100%	295,248,000	APBD		100%	984,150,000
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			345 LKPM	295,248,000	APBD		360 LKPM	984,150,000
	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya Outcome (Hasil) : Jumlah Penyampaian LKPM	Orang Rp Paket Bulan Kegiatan Usaha LKPM	4 6 110,248,000 1 12 4 345	110,248,000	APBD	4	5,000,000	
No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Input : 1. SDM	Orang	150 6	85,000,000	APBD	200	450,000,000	

	<p>2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu</p> <p>Output (Keluaran) :</p> <p>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Outcome (Hasil) :</p> <p>Jumlah Penyampaian LKPM</p>	<p>Rp Paket Bulan</p> <p>Pelaku Usaha</p> <p>LKPM</p>	<p>85,000,000 1 12</p> <p>150</p> <p>345</p>					
3. Pengawasan Penanaman Modal	<p>Input</p> <p>1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu</p> <p>Output (Keluaran) :</p> <p>Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</p> <p>Outcome (Hasil) :</p> <p>Jumlah Penyampaian LKPM</p>	<p>Orang Rp Paket Bulan</p> <p>Kegiatan Usaha</p> <p>LKPM</p>	<p>14 6 100,000,000 1 12</p> <p>14</p> <p>345</p>	100,000,000	APBD		15	529,150,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
IV A	Program Pelayanan Penanaman Modal			70	1,699,994,614	APBD		71	2,828,675,000
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			11610	1,699,994,614	APBD		11620	2,828,675,000
	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Outcome (Hasil) : Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)	Orang Rp Paket Bulan Pelaku Usaha Dokumen	1500 21 1,203,260,000 1 12 1500 11610	1,203,260,000	APBD		1500	1,200,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
	2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Outcome (Hasil) : Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)	Orang Rp. Paket bulan Orang Dokumen	10000 7 199,994,614 2 12 10000 11610	199,994,614 296,740,000	APBD APBD	10000 120	614,337,500 400,000,000
	3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Outcome (Hasil) : Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)	Orang Rp Paket Bulan Unit usaha Dokumen	110 40 296,740,000 1 12 110 11610	296,740,000 296,740,000	APBD APBD	120 120	400,000,000 400,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
V	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			87	478,000,000	APBD		88	1,291,696,000
A	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota			100	478,000,000	APBD		100	1,291,696,000
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Outcome (Hasil) : Rasio Jumlah Permintaan Data dan Informasi yang Terpenuhi	Orang Rp Paket Bulan Dokumen Persen	1 12 478,000,000 1 12 1 100	478,000,000	APBD	1	1,291,696,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
VI A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah			81	15,814,416,915	APBD		82	14,309,482,000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			77.8	142,574,475	APBD		78	25,000,000
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Outcome (Hasil) : Nilai SAKIP	Orang Rp Paket Bulan Dokumen Nilai	1 12 142,574,475 1 12 1 77.8	142,574,475 142,574,475	APBD		1	25,000,000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80.5	9,807,133,965	APBD		81	9,986,482,000
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Outcome (Hasil) : IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Orang/bulan Nilai	60 12 9,807,133,965 1 12 60 80.5	9,807,133,965 9,807,133,965	APBD		60	9,986,482,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
C	Administrasi Umum Perangkat daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Input :		80.5	1,573,415,336	APBD		81	1,398,000,000
			1. SDM	Orang	1	60,000,000	APBD		1	70,000,000
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2. Dana	Rp.	12					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1					
			Outcome (Hasil) :			0				
			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80.5					
			Input :		13	84,885,925	APBD		13	350,000,000
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	84,885,925					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran) :							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80.5					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Outcome (Hasil) : IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan	4 12 575,000,000 1 12	575,000,000	APBD		4	408,000,000
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Outcome (Hasil) : IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan	3 12 100,000,000 1 12	100,000,000	APBD		3	150,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Outcome (Hasil) : IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	1 57 80,400,000 1 12 1 80.5	80,400,000	APBD		1	20,000,000
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran): Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Outcome (Hasil) : IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	45 57 673,129,411 1 12 45 80.5	673,129,411	APBD		50	400,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			81	249,600,000	APBD		0	-
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Outcome (Hasil) : IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	 Orang Rp. Jenis Bulan Unit Nilai	 1 12 249,600,000 1 12 2 77,5	 249,600,000	 APBD		0	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81	2,653,441,500	APBD		82	1,910,000,000
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Outcome (Hasil) : IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Jenis Bulan Laporan Nilai	1 12 10,000,000 1 12 1 81	10,000,000	APBD		1	10,000,000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Outcome (Hasil) : IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	4 12 650,000,000 1 12 4 81	650,000,000	APBD		4	900,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Outcome (Hasil) : IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	3 13 1,993,441,500 1 12 3 81	1,993,441,500	APBD		3	1,000,000,000
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80	1,388,251,639	APBD		80.5	990,000,000
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Outcome (Hasil) : IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp. Paket Bulan Unit Nilai	36 12 822,701,564 2 12 36 80	822,701,564	APBD		36	470,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Outcome (Hasil) : IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp Paket Bulan Unit Nilai	8 12 365,065,995 1 12 8 80	365,065,995	APBD		8 320,000,000
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Input : 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu Output (Keluaran) : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Outcome (Hasil) : IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang Rp Paket Bulan Unit Nilai	1 12 200,484,080 1 12 1 80	200,484,080	APBD		1 200,000,000
			TOTAL			22,000,000,000			20,471,670,500

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun berdasarkan tabel sebagai berikut :

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting (8)
		Lokasi (4)	Satuan	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP	%	5	575,000,000	APBD	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	%	20	575,000,000	APBD	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Dokumen	0	200,000,000	APBD	
2.18.02.2.02.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Dokumen	1	375,000,000	APBD	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	%	95	3,137,340,471	APBD	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	%	5	3,137,340,471	APBD	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Dokumen	6	3,137,340,471	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	%	100	295,248,000	APBD	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	LKPM	345	295,248,000	APBD	
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	Kegiatan Usaha	4	110,248,000	APBD	
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Pelaku Usaha	150	85,000,000	APBD	
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Kegiatan Usaha	14	100,000,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPPTSP	%	70	1,699,994,614	APBD	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	Dokumen	11610	1,699,994,614	APBD	
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPPTSP	Pelaku Usaha	1500	1,203,260,000	APBD	
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPPTSP	Orang	10000	199,994,614	APBD	
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPPTSP	Kegiatan Usaha	110	296,740,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Nilai	87	478,000,000	APBD	
2.18.06.2.01	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota	DPMPTSP	Nilai	100	478,000,000	APBD	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Dokumen	1	478,000,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Nilai	81	15,814,416,915	APBD	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Nilai	77.8	142,574,475		
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Dokumen	1	142,574,475		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Nilai	80.5	9,807,133,965	APBD	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Orang/Bulan	60	9,807,133,965	APBD	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	DPMPTSP	Nilai	80.5	1,573,415,336	APBD	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Paket	1	60,000,000	APBD	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Paket	13	84,885,925	APBD	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Paket	4	575,000,000	APBD	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Paket	3	100,000,000	APBD	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Laporan	1	80,400,000	APBD	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Laporan	45	673,129,411	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rankhir Renja 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Nilai	77.5	249,600,000	APBD	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Unit	2	249,600,000	APBD	
2.18.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	DPMPTSP	Nilai	81	2,653,441,500	APBD	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Laporan	1	10,000,000	APBD	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Laporan	4	650,000,000	APBD	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Laporan	3	1,993,441,500	APBD	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Nilai	80	1,388,251,639	APBD	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Unit	36	822,701,564	APBD	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Unit	8	200,484,080	APBD	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Unit	1	365,065,995	APBD	
TOTAL					22,000,000,000		

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam menyediakan pelayanan publik. Inovasi dimaksud sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebagai salah satu pengampu kewenangan bidang perizinan di Kota Balikpapan mengajukan beberapa inovasi yang nantinya diharapkan dapat terus meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Inovasi tersebut antara lain adalah :

1. Pembangunan Digitalisasi Perizinan dan Aplikasi Manajemen Kinerja DPMPTSP
2. Penyelenggaraan ALKI II Zone Investment Forum #2 melalui Bussiness Matching dan Mini Expo
3. Sinkronisasi Peta Potensi Investasi daerah dengan Pusat
4. Identifikasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal ke Kementerian terkait

BAB VI

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan implementasi dari perencanaan strategis yang ditetapkan dan tersusun sebagai penjabaran dari tahapan-tahapan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, baik kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik menyatu dan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan pada input, output, outcome, benefit dan impact sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, skala prioritas serta anggaran yang tersedia.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis;
4. Kontribusi pelaku usaha di segala sektor ekonomi di Kota Balikpapan dalam membantu meningkatkan Investasi dan berpengaruh luas pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berimbas pada makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya agar selalu dikembangkan yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Q. RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan merupakan dokumen Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan DPOP Kota Balikpapan Dalam Periode Tahun Anggaran 2025, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun .

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPOP Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) DPOP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam RENJA perangkat daerah akan diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1. 2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Sistem Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Daerah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 ;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mewujudkan sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2025. Penyelenggaraan pemerintah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

I.1 Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33,

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Walikota Balikpapan terpilih periode 2021-2026 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026, yaitu dengan VISI “**TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL** “ dan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi

Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai

Misi 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada tahun 2023 maka melaksanakan 2 (dua) urusan, **8 (Delapan) program** dan **20 (Dua Puluh) Kegiatan** dan **43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan** dengan total pagu perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.68.790.195.750**, dengan jumlah rincian sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Sa tu an	Target Renstra perangk at daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangk at) daerah)		Realisas i Capaian Kinerja Renstra perangk at daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggara n Renja PD Tahun berjalan yg dievalua si (2023)		Realisa si Kinerja Pada Triwul an		Realisa si Kinerj a Pada Triwul an		Realisa si Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangka t daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit pera ngka t daer ah Pena nggu ng jawa b	Penjelasa n				
					I	II	III	IV	12=8+9+10 +11		13=12/7X 100%		14=6+12		15=14/5X 100%													
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17				
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Poin	7	17.8 29.4 48.0 00	8 2 , 0 5	10.4 97.8 51.9 89	7	6.51 2.83 3.09 2		1.4 66. 916 .91 7		2.3 58. 387 .76 7		2.0 71. 860 .03 0	86 , 4 8	2.48 2.27 8.17 2	86, 48	8.37 9.44 2.88 6	12 0,1 1%	128 ,66 %	16 8,5 3	18.8 77.2 94.8 75	22 4,7 1%	105 ,88 %	DPO P	

Pariwisata																												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Poin	77	9.541.448.000	81,17	5.884.246.503	74	6.512.833.092		1.331.570.210	0	1.930.782.307	-	1.327.716.171	88,29	1.382.523.230	88,29	3.262.352.517	119,31%	50,09%	169,46	9.146.599.020	220,08%	95,86%	DPO P	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	-		26	5.884.246.503	34	6.676.217.392	34	1.331.570.210	0	1.930.782.307		1.327.716.171		1.382.523.230	34,00	5.972.591.918	100,00%	89,46%	60,00	11.856.838.421	0,00%	0,00%	DPO P	Gaji dan tunjangan ASN DPOP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	77	2.493.000	84	1.585.673.019	74	1.229.316.400		107.614.707		252.023.210		344.341.753	87,50	420.451.842	87,50	1.124.431.512	118,24%	91,47%	171,50	2.710.104.531	222,73%	108,71%	DPO P	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-		53	50.417.500	1	30.000.000	1	-	0	16.141.500	1	6.480.500		6.198.000	2,00	28.820.000	200,00%	96,07%	55,00	79.237.500	0,00%	0,00%	DPO P	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25	562.506.210											0,00	0	0,00%	0,00%	25,00	562.506.210	0,00%	0,00%	DPO P	Tahun 2023 tidak dianggarkan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-		53	327.927.800	7	452.527.000	7	27.732.000	0	119.781.750	7	95.586.950		171.542.100	14,00	414.642.800	200,00%	91,63%	67,00	742.570.600	0,00%	0,00%	DPO P	Paket Bahan Logistik Kantor

																											yang Disediakan
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	-	23	307.512.000	3	175.800.000	3	2.586.300	3	43.184.500	3	74.953.200	35.927.500	9,00	156.651.500	300,00%	89,11%	32,00	464.163.500	0,00%	0,00%	DPO P	Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	2706	17.594.000	3800	15.000.000	715	2.024.000	684	2.848.000	768	2.880.000	3.984.000,00	2.167,00	11.736.000	57,03%	78,24%	4873,00	29.330.000	0,00%	0,00%	DPO P	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	38	71.148.500	4	55.000.000	3	8.855.450	4	16.568.500	4	12.944.550	11.290.300	11,00	49.658.800	275,00%	90,29%	49,00	120.807.300	0,00%	0,00%	DPO P	Paket Bahan/Material yang Disediakan	
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	63	248.567.009	125	500.989.400	23	66.416.957	21	53.498.960	52	151.496.553	191.509.942	96,00	462.922.412	76,80%	92,40%	159,00	711.489.421	0,00%	0,00%	DPO P	Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis				3	95.033.200									0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	95.033.200	0,00%	0,00%	DPO P	Tahun 2023 tidak dianggarkan		

		Elektronik pada SKPD																								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Po in	77	3.687.000	85	2.110.063.502	2.236.100.408	419.221.369	384.567.002	12	574.816.051	87,69	593.093.830	99,69	1.971.698.252	0,00%	88,18%	184,52	4.081.761.754	239,64%	110,71%	DPO P		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	La po ran	-	9.661.300	2	10.000.000	1	2.330.000	1	2.330.000	2.330.000	3,00	9.320.000	150,00%	93,20%	5,00	18.981.300	0,00%	0,00%	DPO P	Belanja benda pos/materai, paket pengiriman			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	La po ran	-	1.072.727.230	64	1.190.182.908	6	261.778.959	6	122.640.887	323.594.237	258.908.078	12,00	966.922.161	300,00%	81,24%	18,00	2.039.649.391	0,00%	0,00%	DPO P	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	La po ran	-	1.027.674.972	295	1.035.917.500	5	155.112.410	5	259.596.115	248.891.814	331.855.752	15,00	995.456.091	300,00%	96,09%	44,00	2.023.131.063	0,00%	0,00%	DPO P	Gaji Non ASN, Jasa keamanan, jasa kebersihan, tenaga IT dan mekanik		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Po in	79	1.456.000	79	917.868.965	920.374.500	124.348.904	99.859.712	232.181.300	83,67	404.978.700	83,67	861.368.616	0,00%	93,59%	163,27	1.779.237.581	206,67%	122,20%	DPO P			

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-		25	414.557.829	25	538.926.000	25	124.348.904	0	87.191.212	25	167.824.800		110.067.866	50,00	489.432.782	200,00%	90,82%	75,00	903.990.611	0,00%	0,00%	DPO P	Pembayaran Pajak, BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (11 Unit R2, 2 Unit R3, 11 Unit R4 dan 2 Unit R6)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-		9	164.232.788	16	131.448.500	35	-	70	12.668.500	63	64.356.500		52.145.000	168,00	129.170.000	100,00%	98,27%	17,700	293.402.788	0,00%	0,00%	DPO P	Bahan Bakar Solar Genset Listrik, Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan AC dan Suku Cadang AC, Pemeliharaan Komputer dan Printer, Pemeliharaan Laptop/Notebook, dll
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-		4	339.078.348	1	250.000.000	0	0	0	-	1	0		242.765.834,00	1,00	242.765.834	100,00%	97,11%	5,00	581.844.182	0,00%	0,00%	DPO P	Renovasi Lobi Kantor DPOP TW IV

2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri	%	2,7	9.915.000.000	1,036	5.429.070.029	2,4	7.555.914.050	0	137.351.420	2.360.285.996	-	4.129.891.969	2,70	10.529.489.658	2,70	17.157.019.043	112,50%	227,07%	3,74	22.586.089.072	138,37%	227,80%	DPO P	
		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	1,83	6.915.000.000	1,34	4.157.145.158	1,83	3.489.618.400	0	54.616.420	403.631.800		1.835.147.867	2,75	859.377.180	2,75	3.152.773.267	150,27%	90,35%	4,09	7.309.918.425	223,50%	105,71%	DPO P	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	-		2.527	904.842.744	5	827.980.600	0		43.132.000		239.858.656		455.616.000	5,00	282.990.656	100,00%	34,18%	2532,00	1.187.833.400	0,00%	0,00%	DPO P	(Kegiatan Pemuda Pelopor + JPD + Bakti Sosial + Upacara HSP + PKP, Lomba HSP dan Pepelingsih)

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Organis	-	265	654.785.091	400	350.175.000	100	25.800.000	100	195.127.700	250	30.390.000	38.950.180	450.000	290.267.880	112,50%	82,89%	715,00	945.052.971	0,00%	0,00%	DPO P	Sosialisasi/Pelatihan Kewirausahaan/Kegiatan Lapangan, Nara Sumber dari Kemenpora RI, Nara Sumber dari Dispora Provinsi, Sosialisasi/Pelatihan, belanja jasa Event Organizer Pameran Produk Wirausaha Muda, Menghadiri Pameran-Pameran Wirausaha di Dalam dan Luar Daerah
--	--	--	---	---------	---	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------	-----	-------------	-----	------------	------------	---------	-------------	---------	--------	--------	-------------	-------	-------	-------	---

		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	-		200	485.556.074	1	224.109.000	0	28.816.420	0	59.990.000	1	74.472.000		5.009.000	1,00	168.287.420	100,00%	75,09%	201,00	653.843.494	0,00%	0,00%	DPO P	Kegiatan Sosialisai /Pelatihan/Kegiatan Lapangan (Pelatihan Bordir,Pelatihan Pembuatan Cinderamata) namun Pengembangan Aplikasi SIPEWIRA 1630 tidak terealisasi karena hasil asistensi SPBE, dipusatkan ke diskominfo
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	-		0	0	120	106.353.800	0	0	0		-		84.300.000	0,00	84.300.000	0,00%		0,00	84.300.000	0,00%	0,00%	DPO P	Pelaksanaan di twiv pada puncak peringatan hari sumpah pemuda	

		Penyelenggara an Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Or an g	-	4 3	2.11 1.96 1.24 9	4 3	1.981 .000. 000	4 3	0	105. 382. 100	1.4 90. 427 .21 1	275.5 02.00 0	43, 00	1.871 .311. 311	100 ,00 %	94, 46 %	86, 00	3.983 .272. 560	0,0 0%	0,0 0%	DPO P	Pelaksana an sosialisasi dan seleksi di tw i dan pelatihan /pengasr amaan tw iii , dan pelaksana an HUT RI Agustus 2023	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/Kot a	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	2 , 3	3.00 0.00 0.00 0	9	1.27 1.92 4.87 1,00	2	4.06 6.29 5.65 0	82. 735 .00 0	1.9 56. 654 .19 6	2.2 94. 744 .10 2	8, 47	9.67 0.11 2.47 8	8,4 7	14.0 04.2 45.7 76	42 3,5 0%	344 ,40 %	17, 05	15.2 76.1 70.6 47	74 1,3 0%	509 ,21 %	DPO P	
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Do ku me n	-	1	1.27 1.92 4.87 1	1	4.066 .295. 650	0	82. 735 .00 0	1.95 6.65 4.19 6	1.1 90. 213 .30 0	740.6 54.98 0	1,0 0	3.970 .257. 476	100 ,00 %	97, 64 %	2,0 0	5.242 .182. 347	0,0 0%	0,0 0%	DPO P	Dana hibah KNPI akhir tw II, kegiatan OICCA juli 2023, Diklatsar November 2023 dan fasilitasi kegiatan kepemud aan	

3	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Persentase atlet yang berprestasi	%	26,2	26.737.000.000	32,6	0	7,00	27.193.282.000,00	1.493.577.501	6.163.385.268	-	2.862.178.403	7,00	17.423.525.845	7,00	27.942.667.017	10,00%	102,76%	39,64	27.942.667.017	15,30%	104,51%	DPO P	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Atlet Pelajar Yang Mendapatkan Pembinaan	%	32,00	0	-		24,00	200.000.000	-	-			21,32	199.999.623	21,32	199.999.623	88,83%	100,00%	21,32	199.999.623	66,63%	0,00%	DPO P	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	-	0		1	200.000.000	0			0	1	199.999.623	1,00	199.999.623	100,00%		1,00	199.999.623	0,00%	0,00%	DPO P	Kajian PPLD kerjasama dengan UNESA	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Prestasi dibidang Olahraga	%	38,00	18.400.000.000	52,5	14.097.480	3,00	3.527.072.000	369.923.14	1.035.660.338		920.475.750	30,08	1.142.635.125	30,08	3.468.694.327	10,27%	98,34%	82,58	17.566.191.507	21,732%	95,47%	DPO P	

		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	-	3	2.606.898.712	4	977.500.000	1	152.500.00	1	325.680.000	1	22.818.200		438.692.100	3,00	939.690.300	75,00%		6,00	3.546.589.012	0,00%	0,00%	DPO P	Terlaksana event sepakbola, bulutangkis dan renang
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Organis	-	1200	11.490.598.468	150	2.549.572.000	129	196.808.812	254	709.980.338	271	897.657.550	259	703.943.025	913,00	2.508.389.725	608,67%	98,38%	2113,00	13.998.988.193	0,00%	0,00%	DPO P	Pengiriman atlet mengikuti kejuaraan keluar daerah yang difasilitasi oleh DPOP karena hibah KONI 2023 tidak diakomodir TAPD
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet yang dibina	%	32	837.000.000	-0	24	12.390.390.000	6	20.614.302		1.336.006.820		1.200.743.122		9.079.456.238	6,00	11.636.820.482	25,00%	93,92%	6,00	11.636.820.482	18,75%	1390,30%	DPO P	
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatihan	-			1	554.545.000	0			252.866.820		96.212.320		149.998.740	0,00	499.077.880	0,00%		0,00	499.077.880	0,00%	0,00%	DPO P	Pelatihan SDM Wasit/Pelatih Tingkat Dasar, dan Kajian DBOD kerjasam

																																			a dengan UNESA
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Oran g	-							800	11.835.845.000	0,07	20.614,302	275	1.083.140,000	1.104.530,802	479	8.929.457.498	754,07	11.137.742,602	94,26%	94,10%	754,07	11.137.742,602	0,00%	0,00%		DPO P	Pemberian Bonus Atlet dan pelatih untuk event POPDA 2022, PORPROV 2022, SEA GAMES Kamboja 2023 dan Asean Paragames Kamboja 2023 (620 atlet dan 133 pelatih) dan ada 62 atlet non SK yang akan dibayarkan tahun depan/2024 melalui hibah KONI				

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	-					0				0				0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	DPO P	Pergeseran untuk dana kegiatan Muaythai (hibah 75jt)
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Presentase Induk Organisasi Cabang cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	%	100	5.050.000	100	1.148.459.020	100	1.375.000	0	761.471.890	38.528.110	83.380.000	-	1.342.033.260	0,00	2.225.413.260	0,00%	161,85%	100,00	3.373.872.280	100,00%	66,81%	DPO P		
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	-		8	1.148.459.020	3	1.375.000	0	761.471.890	2	38.528.110		83.380.000	1.342.033.260	2,00	21.955.741.197	66,67%	1596,78%	10,00	23.104.200.217	0,00%	0,00%	DPO P	Pemberian hibah KORMI (300jt) dan NPC TW I, dan fasilitasi Bapopsi tw iii-iv, penambahan pagu perubahan untuk Hibah Binaraga Fitness Indonesia (PBFi) Balikpapan 300jt , Hibah Muaythai Indonesia (MI) Balikpapan 75jtdan

																									Hibah Kepada KORMI Balikpapan tambahan 50jt	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dan Rekreasi	Persentase Olahraga Rekreasi Yang Dibina	%	95	2.450.000	81	7.562.348	80	9.700.820	341.568.195	3.753.190.000	657.579.531	5.659.401.599	0,00	10.411.739.325	0,00%	107,33%	81,45	17.977.641.673	85,74%	733,78%	DPO P			
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	-		2	5.851.636.588	2	1.175.820.000	1	9.795.000	399.560.000	1	218.950.906	379.176.559	2,00	1.007.482.465	100,00%	85,68%	4,00	6.859.119.053	0,00%	0,00%	DPO P	Terlaksana kegiatan Formasi di tw i dan akan dilaksanakan Haornas di tw iii
		Penyediaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	-			1.714.265.760	3	8.525.000.000	0	331.773.195	3.353.630.000		438.628.625	5.280.225.040	0,00	9.404.256.860	0,00%	110,31%	0,00	11.118.522.620	0,00%	0,00%	DPO P	Kegiatan rutin operasional venue tennis, venue dayung, lapangan tennis manutunng serta pembangunan lapangan bulutangkis namun tidak

																										selesai sampai dengan akhir anggaran 2023 sehingga diusulkan hutang di tahun 2024 pada perubahan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan aktif	%	1000	1.415.000.000	1000	1.000.000	1000	1.676.815.000	1000	-	1.676.815.000	-	-	-	-	100,000	1.676.815.000	100,000%	100,000%	200,000	2.676.815.000	200,000%	189,17%	DPO P	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwardcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	1000	1.415.000.000	1000	1.000.000	1000	1.676.815.000	1000	-	1.676.815.000					200,000	1.676.815.000	200,000%	100,000%	300,000	2.676.815.000	300,000%	189,17%	DPO P	
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi			1	1.000.000	1	1.676.815.000	0		1.676.815.000	0	-			1,000	1.676.815.000	100,000%	100,000%	2,000	2.676.815.000	0,000%	0,000%	DPO P	Terlaksana Hibah Pramuka TW I
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%	6	11.363.000.000	11	6.742.657.168	3	8.172.585.060	0	119.241.521	709.615.230	1.544.026.027	3,9	5.502.233.035	3,90	7.875.115.813	130,000%	96,36%	14,71	14.617.772.981	245,17%	128,64%	DPO P		

		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Strategis Yang Terasilitasi Pengembangannya	%	24	8.023.000	10	6.568.347.772	13	7.847.460.060	0	107.111.021	642.395.230	1.536.226.027	20	5.268.633.972	20,00	7.554.366.250	153,85%	96,27%	30,00	14.122.714.022	125,00%	176,03%	DPO P		
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	-		1	99.589.200	1	118.750.000	0		500.000	0	1	102.048.780	1,00	102.548.780	100,00%	86,36%	2,00	202.137.980	0,00%	0,00%	DPO P	Kajian Road Map Pengembangan Obyek Wisata Kota Balikpapan	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	-	0	10	6.180.435.222	10	7.403.710.060	0	31.111.021	496.645.230	3	1.536.226.027	7	5.073.367.280	10,00	7.137.349.558	100,00%	96,40%	20,00	13.317.784.780	0,00%	0,00%	DPO P	Pembangunan parkir (dana Bankeu), Jasa Pembersihan dan penebangan pohon di PMSS,Belanja jasa hiburan di obyek wisata, Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Barang UPTD PMSS,Pemeliharaan

																																						<p>Gazebo/Lamin di PMSS, Belanja Pemeliharaan Toilet, Belanja modal fasilitas wisma/cottage baru di PMSS, Belanja Modal Pengadaan Tenda, Belanja pembangunan Kios di PMSS, Belanja Modal Pembuatan Ground Tank, Belanja Modal Pembuatan Wisma/Guest House/Cottage di PMSS, Belanja modal pemsangan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																										sambung an baru listrik 1300 VA di wisma dan pujasera baru PMSS	
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	-	0	16	288.323.350	20	325.000.000	0	76.000.000	1	145.250.000	0	93.217.912	1,00	314.467.912	5,00%	96,76%	17,00	602.791.262	0,00%	0,00%	DPO P	kegiatan Jambore Pokdarwis ,Kegiatan lapangan, kegiatan sadar wisata dan sapta, pesona	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Destinasi yang dikelola dengan baik	%	12,0	3.040.000	5,0	40.883.695	6,6	150.125.000	0	12.130.500		67.220.000	7.800.000	6,6	61.311.600	6,60	148.462.100	100,00%	98,89%	11,60	189.345.795	96,67%	6,23%	DPO P	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	-	0	16	40.883.695	20	150.125.000	0	12.130.500		67.220.000	20.000	61.311.600	20,00	148.462.100	100,00%	98,89%	36,00	189.345.795	0,00%	0,00%	DPO P	Belanja peralatan penunjang fasilitas obyek wisata (Pokdarwis)/tenda,	

																												Belanja peralatan penunjang sadar wisata dan sapta pesona yang di serahkan ke Pokdarwis /tempat sampah, Belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan sapta pesona,
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	%	13	300.000.000	17	133.425.701	10	175.000.000	-	-	-	-	-	19,16	172.287.463	19,16	172.287.463	19,160%	98,45%	35,88	305.713.164	27,600%	101,90%	DPOP		
		Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	-	0		133.425.701	1	175.000.000	0		0			172.287.463	0,00	172.287.463	0,00%	98,45%	0,00	305.713.164	0,00%	0,00%	DPOP	Mengikuti pameran investasi pariwisata (Indokraft expo di Bali 5 - 8 Oktober 2023 dan Indokraft expo di		

																										n Video Promosi Pariwisata, Jasa Team Media DPOP dan Belanja Modal videotron 4 unit	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kotora	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	-	0	1	3.94 2.93 3.06 7	1	2.981 .894. 500	2	16. 276 .71 5	5	528. 582. 162	200 .81 0.6 52	3	2.111 .216. 024	10, 00	2.856 .885. 553	100 ,00 %	95, 81 %	20, 00	6.799 .818. 620	0,0 0%	0,0 0%	DPOP	Honorarium Jasa Duta Wisata, Seragam Balikpapan City Tour, Belanja Pakaian Adat Daerah, Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Balikpapan City Tour, Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, Belanja Jasa Event Organizer Balikpapan

																										Souvenir Kegiatan Balikpapan Tourism Board, Belanja Jasa Event Organizer Balikpapan Tourism Board, Jasa EO PHRI (penambahan pagu perubahan Pokir DPRD)	
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	%	35	1.217.000.000	-	187.552.360	18	567.256.000	0	36.998.129	173.820.687	44.339.338	280.458.516	0,00	535.616.670	0,00%	94,42%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	DPO	P		
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromisi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di	Jumlah Ruang Kreasi Yang Dikelola	Unit	1	502.000.000	1	187.552.360	1	360.000.000	0,00	36.998.129	73.820.687	44.339.338	1,00	173.552.516	1,00	328.710.670	10,00%	91,31%	2,00	516.263.030	20,00%	102,84%	DPO	P	

		Daerah Kabupaten/Ko ta																									
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	-	0	3	187. 552. 360	1	360.0 00.00 0	0	36. 998 .12 9	0	73.8 20.6 87	44. 339 .33 8	1	173.5 52.51 6	1,0 0	328.7 10.67 0	100 ,00 %	91, 31 %	4,0 0	516.2 63.03 0	0,0 0%	0,0 0%	DPO P	Fasilitasi Sapras di gedung ekraf (Dekorasi Ruang Kreatif, Ba ckground Foto Ruang Kreatif, Tenaga Administra si Sekretaria t Ekraf (2 Orang), da n Best Practice Forum Ekraf Balikpapa n keluar daerah
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Presentase Sub Sektor Ekraf Yang Dikembangkan	%	3 5	715. 000. 000	- 0	1 8	207. 256. 000	0 0 0	0	100 .00 0.0 00	-	33 ,5 3	106. 906. 000	33, 53	206. 906. 000	18 6,2 8%	99, 83 %	33, 53	206. 906. 000	95, 80 %	28, 94 %	DPO P			

		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	-	0		1	207.256.000	0			100.000.000		-	1	106.906.000	1,00	206.906.000	100,00%	99,83%	1,00	206.906.000	0,00%	0,00%	DPO P	Pelaksanaan Mini Expo Ekraf
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	16	1.203.000.000	-	866.159.059	10	967.156.000	0	262.862.712	206.394.038	92.825.049	50	489.998.528	50,00	1.052.080.327	50,00%	108,78%	50,00	1.918.239.386	312,50%	929,41%	DPO P		
		Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	%	20	903.000.000	11	866.159.059	12	967.156.000	0	262.862.712	206.394.038	92.825.049	22,5	489.998.528	22,50	1.052.080.327	45	108,78%	90	1.918.239.386	450,00%	212,43%	DPO P		
		Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	-	4	474.684.251	150	437.156.000	50	7.985.662	30	84.290.038	22.285.440	70	441.328.086	150,00	555.889.226	100,00%	127,16%	154,00	1.030.573.477	0,00%	0,00%	DPO P	1. Pelatihan MC 30 Orang 2. Pelatihan Barista 20 Orang 3. Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Hotel Non Bintang (50 Orang) 4. Pelatihan Digitalisasi	

																										Marketing (50 Orang)		
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	-	0	1	199.889.910	10	230.000.000	10	223.785	-	0	5.826.000	100,00	229.823.850	100,00%	99,92%	101,00	429.713.760	0,00%	0,00%	DPO P	Pemilihan Putra dan Putri Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan			
		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	-	0	100	191.584.898	150	300.000.000	70	30.879.200	30	122.104.000	30	70.539.609	20	42.844.442	150,00	266.367.251	100,00%	88,79%	250,00	457.952.149	0,00%	0,00%	DPO P	Sertifikasi Barista, Hotelier, Waiter/Waitress, Master Of Ceremony
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata																												
	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%	6,0	3.040.000	10,61	1.857.250.000	1	3.617.493.440	1	373.812.471	-	675.181.509	550.871.652	-	1.939.379.922	1,00	3.539.245.554	100,00%	97,84%	11,61	5.396.495.554	193,50%	177,52%	DPO P		
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	%	12,0	3.040.000	5,0	1.857.250.000	1	3.617.493.440	1	373.812.471	0	675.181.509	550.871.652	0	1.939.379.922	1,00	3.539.245.554	100,00%	97,84%	6,00	5.396.495.554	50,00%	177,52%	DPO P		

	Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	UP TD	3.040.000	1	1.857.250.000	1	3.617.493.440	1	373.812.471	Rp675.181.509	550.871.652	1.939.379.922	1,00	3.539.245.554	100,00%	97,84%	2,00	5.396.495.554	0,00%	177,52%	DOPP	Kegiatan rutin operasional UPTD PMSS
Rata-rata capaian kinerja (%)																177,91%	118,78%			77,95%	90,85%		
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																116,38%	123,29%			0,00%	4,03%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																332,86%	106,17%			195,87%	219,29%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																128,76%	105,42%			194,34%	119,65%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	<p>Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target</p> <p>Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 yang dikoordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan</p>	
	<p>Komitmen Pimpinan dan Dukungan Staf, serta adanya regulasi yang mendukung kinerja organisasi, Optimalisasi pemanfaatan SDM DPOP dalam meningkatkan peran pemuda, olahraga dan pariwisata</p> <p>Optimalisasi peran masyarakat dan mitra kerja DPOP dalam mendukung pelaksanaan program kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kota Balikpapan</p> <p>Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Balikpapan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal.</p>	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja	<p>Kurangnya personil/SDM yang kompeten untuk mendukung kegiatan atau event-event yang dilaksanakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata baik bersifat teknis dan administrasi</p>	
Tindak Lanjut Yang Diperlukan :	<p>Menjadi bahan evaluasi untuk pencapaian kinerja pada rencana kerja tahun berikutnya</p> <p>Memotivasi seluruh tim yang terlibat dalam pencapaian kinerja untuk menjadi lebih baik tahun berikutnya</p>	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	<p>Penyesuaian indikator program, satuan dan target dengan yang ada di RPJMD</p> <p>Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah</p> <p>Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD</p>	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat melakukan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	IKM Internal Perangkat Daerah				71	72	73	74	75	82,06	86,48				
2.	Presentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri				2,30%	2,40%	2,50%	2,60%	2,70%	1,036%	2,7				
3.	Presentase Atlet yang Berprestasi				25%	7%	6,2%	7,4%	26,2%	32,64%	7%				
4.	Presentase Organisasi Kepramukaan aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata				3%	3%	4%	6%	6%	10,61%	3,9%				
6	Presentase Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata				17%	20%	21%	24%	29%	21,42%	25%				
7	Presentase Sub Sektor Ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual				12%	18%	24%	29%	35%	0%	0%				
8	Presentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif				8%	10%	12%	14%	16%	0%	50%				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Hubungan Renstra Kementerian, Provinsi dan Dinas

Kementerian	Provinsi	DPOP
Meningkatnya kapasitas dan potensi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga
Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam berwirausaha.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Meningkatnya Atlet Berprestasi	Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga
Jumlah spending wisman	Meningkatnya kualitas Pemasaran destinasi strategis pariwisata	Meningkatnya lama tinggal wisatawan
Rasio usaha bidang pariwisata dan eko nomikreatif yang terstandarisasi dan ter sertifikasi	Meningkatnya kualitas potensi ekraf di kawasan strategis pariwisata	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada dasarnya pelayanan program perangkat daerah diharapkan berhasil mewujudkan kondisi ideal yang telah ditetapkan dalam target tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas dan fungsi. Namun demikian pada pelaksanaannya untuk mencapai kondisi tersebut menghadapi kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dalam melaksanakan pelayanan untuk setiap bidang urusan antara lain sebagai berikut :

Bidang Non Urusan (sekretariat) :

- 1) Keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas
- 2) Kurangnya pengawasan intern organisasi
- 3) Budaya kerja pegawai belum optimal

Bidang Kepemudaan :

- 1) Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam mendorong percepatan pembangunan Kota Balikpapan
- 2) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan

Bidang Keolahragaan :

- 1) Kurangnya prestasi keolahragaan Kota Balikpapan di event-event Kejuaraan regional provinsi Kaltim maupun Nasional
- 2) Kurangnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Kota Balikpapan
- 3) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan

Bidang Kepariwisata :

- 1) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD maupun PDRB Kota Balikpapan masih kurang
- 2) Belum berkembangnya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan Kota Balikpapan yang mampu menarik minat pengunjung wisata setidaknya dari berbagai daerah di sekeliling Kota Balikpapan
- 3) Belum adanya event seni dan budaya unik yang mampu menjadi magnet wisata Kota Balikpapan;
- 4) Masih rendahnya kesadaran warga kota dalam menciptakan kota ramah wisata yang dapat menarik minat kunjungan wisata;

Faktor yang menghambat pencapaian pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung program nasional adalah :

- 1) Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan untuk meningkatkan potensi maupun prestasi kepemudaan dan keolahragaan Kota Balikpapan
- 2) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat maupun swasta serta media dalam upaya peningkatan aktifitas kepemudaan maupun keolahragaan
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga bagi kesehatan dan kebugaran
- 4) Faktor yang mendorong pencapaian pelayanan Perangkat daerah dalam rangka mendukung program nasional adalah :
- 5) Tersedianya pemuda yang dapat dikembangkan bakat dan potensinya dalam bidang kepemudaan maupun keolahragaan
- 6) Adanya perkumpulan/klub olahraga yang akan menjadi tempat atau sarana untuk mendidik atau membina atlet berprestasi

- 7) Adanya dukungan perangkat daerah lain/mitra/organisasi kemasyarakatan terkait terhadap program kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

Tantangan Bidang Kepemudaan :

Perkembangan teknologi informasi pada (era digital) berdampak terhadap kehidupan sosial bagi pemuda baik yang bersifat positif maupun negative. Maraknya hoax, kenakalan remaja, kehidupan sex bebas penyalahgunaan narkoba dan lain-lain merupakan bagian dari dampak negative perkembangan teknologi, yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepemudaan ke depan.

Tantangan Bidang Olahraga :

- 1) Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlet atlet berbakat dan berprestasi
- 2) Perlu diciptakan system yang baik dalam mengoptimalkan pembinaan dan pembibitan atlet berbakat dan berprestasi, salah satunya dengan meningkatkan tenaga pembina yang professional

Tantangan Bidang Pariwisata :

- 1) Belum tertata dan tergali sepenuhnya potensi kepariwisataan Kota Balikpapan
- 2) Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dari sektor Pariwisata
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan promosi pariwisata;
- 4) Tuntutan wisatawan terhadap kebersihan dan kesehatan tempat wisata
- 5) Kurang baiknya amenities di destinasi wisata
- 6) Kurangnya atraksi kepariwisataan
- 7) Kurangnya SDM pariwisata yang handal yang dapat mengembangkan kepariwisataan Kota Balikpapan

Peluang Kesempatan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam bidang urusan kepemudaan dan olahraga dan urusan Pariwisata dalam mencapai tujuan organisasi, adalah berupa peluang-peluang sebagai berikut :

Bidang Kepemudaan :

Jumlah Penduduk usia produktif/Pemuda merupakan potensi/asset yang dapat dikembangkan menjadi motor penggerak pembangunan Kota Balikpapan

Bidang Olahraga :

- 1) Potensi pemuda/bibit atlet yang memungkinkan dapat berpartisipasi dalam pencapaian prestasi disetiap event tingkat wilayah, daerah maupun nasional
- 2) Lembaga Pendidikan/Sekolah dapat dijadikan ujung tombak kegiatan cabang olahraga usia dini

- 3) Organisasi perkumpulan olahraga menjadi tempat pembibitan atlet olahraga yang potensial untuk meraih prestasi

Bidang Pariwisata :

- 1) Letak Kota Balikpapan sebagai daerah perlintasan yang memiliki bandara udara Internasional dan Pelabuhan sehingga strategis sebagai Kota Transit bagi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN
- 2) Tersedianya teknologi yang dapat membuka akses promosi potensi kepariwisataan Kota Balikpapan
- 3) Adanya situs-situs cagar budaya yang belum digali untuk dikembangkan

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah:

No	Tingkat Isu	Isu Strategis		Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)		(4)
Urusan Kepemudaan				
1.	Internasional :	Peran aktif pemuda dalam pembangunan yang berkelanjutan atau <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	1.	Keterlibatan Pemuda Balikpapan dalam pembangunan yang berkelanjutan atau <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .
			2.	Pemuda Balikpapan berperan aktif dalam event-event internasional.
			3.	Di era globalisasi dan modernisasi Pemuda Balikpapan menguasai iptek dan dapat bersaing di Internasional.
			4.	Pemuda Balikpapan meraih penghargaan tingkat Internasional.
2.	Nasional:	Peningkatan Kualitas Pemuda	1.	Penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi lintas pemangku kepentingan serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi.
			2.	Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di Forum Internasional, pertukaran pemuda dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.

			3.	Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.
		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia	1.	Keterlaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan di daerah
			2.	Optimalisasi peran pemuda melalui OKP dan Komunitas Pemuda
			3.	Implementasi Grand Design/ Road Map Pembangunan Kepemudaan 2020 - 2029
3.	Daerah:	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara DPOP Kota Balikpapan dengan lembaga dan stakeholders terkait dalam implementasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang berkelanjutan	1.	Meningkatkan kinerja kelembagaan penyelenggara pelayanan kepemudaan
			2.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara OPD, lembaga, instansi, dunia usaha dan masyarakat.
		Peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan daya saing pemuda	1.	Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberdayaan pemuda untuk peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda(IPP).
			2.	Peningkatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
		Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila	1.	Meningkatkan peran Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa.
			2.	Meningkatkan upaya pencegahan pemuda dari perilaku berisiko mencakup bahaya narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi, penurunan kualitas moral, perpecahan bangsa serta

				hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.
Urusan Keolahragaan				
1	Internasional :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kuantitas atlet yang berprestasi pada level internasional ▪ Even-even internasional untuk Sport Tourism (Wisata Olahraga) berkolaborasi dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa atlet di Kota Balikpapan memperoleh medali pada tingkat Olimpiade, SEA Games, Asian Games, Paralympic Games ▪ Tersedianya pelatih profesional pada cabang tertentu ▪ Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga (bonus) ▪ Lengkapnya infrastruktur pendukung seperti bandara, pelabuhan, hotel, dsb. ▪ Balikpapan sebagai daerah utama penyangga IKN ▪ Berkembangnya Industri Ekonomi Kreatif di Kota Balikpapan
2	Nasional:	Peningkatan kuantitas atlet yang berprestasi pada level Nasional		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa atlet di Kota Balikpapan memperoleh medali pada tingkat Nasional ▪ Tersedianya pelatih profesional pada cabang tertentu ▪ Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga (bonus) ▪ Lengkapnya infrastruktur pendukung ▪
3	Daerah:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kuantitas atlet yang berprestasi pada level Daerah/Region (POPDA, POPWIL, PORPROV, PEPARPROV) ▪ Pekan Olahraga Tingkat Kota Pelajar SMA/SMK sederajat 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa atlet di Kota Balikpapan memperoleh medali pada tingkat Nasional ▪ Tersedianya pelatih profesional pada cabang tertentu ▪ Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga (bonus) ▪ Lengkapnya infrastruktur pendukung
Urusan Kepariwisata				
	Internasional :	Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Internasional	1.	Penguasaan Teknologi bagi pelaku pariwisata & ekonomi kreatif

			2.	Sertifikasi profesi standard internasional bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
			3.	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai Kompetensi dan Daya saing yang mumpuni.
		Event-event Internasional Pariwisata	1.	Balikpapan sebagai daerah penyangga IKN
	Nasional:	Event-event Nasional Pariwisata	1.	Balikpapan sebagai daerah penyangga IKN
	Daerah:	Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisata	1.	<p>Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan, Penentu Keberhasilan:</p> <p>Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi</p> <p>2.Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata.</p> <p>3.Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan.</p> <p>4. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata</p> <p>5. Mengikuti kegiatan pameran/ kegiatan pemasaran pariwisata baik didalam dan luar negeri</p> <p>6. Melaksanakan event-event pariwisata</p>

Mapping Program dan Kegiatan terhadap Isu Pembangunan

URUSAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Masih rendahnya kualitas pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri (2020 = 0,02%)	- Peningkatan kualitas Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, - Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	Belum adanya pola pemetaan dan arah pembangunan olahraga prestasi Kota Balikpapan	- Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi
	Ketersediaan sarpras olahraga terbatas dan belum memenuhi standar	- Peningkatan sarpras olahraga
	Masih rendahnya daya tarik wisata	- Menyelenggarakan kegiatan olahraga yang dikolaborasikan dengan promosi pariwisata (<i>sport tourism</i>)

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Terbatasnya SDM kepariwisataan yang berkualitas/memiliki kualifikasi	- Pelatihan SDM pariwisata dan perhotelan
		Masih rendahnya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif)	- Pembangunan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif
		Masih rendahnya daya tarik wisata	- Pengembangan sarpras Pantai Manggar Segara Sari
			- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata
			- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi sektor ekonomi kreatif

Tagging Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri/	2.6 %	6.807.204.540,00			√			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan/	1 Doku men 1000 Oran g 75 Oran g 500 Oran g	2.817.286.000,00			√			

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng ang guran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
Kabupaten/Kota/									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	1000 Orang	1.414.729.903 ,00			√			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	500 Orang	1.102.556.097 ,00			√			
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	300.000.000,0 0			√			
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi	2 Dokumen	3.989.918.540 ,00						

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng ang gura n	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
Daerah Kabupaten/Kota	Kepemudaan								
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Organisasi	3.989.918.540,00						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	7.4 %	19.086.395.000,00	√				√	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	4 Dokumen 350 Orang	6.400.000.000,00						
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	1.750.000.000,00	√				√	

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng ang guran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	350 Orang	4.650.000.000,00	√				√	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dibina	1 pelat da 350 Orang	1.500.000.000,00	√				√	
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	<i>Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>	1 Pelat da	1.000.000.000,00	√				√	
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	<i>Jumlah penerima Penghargaan olahraga</i>	350 Orang	500.000.000,00	√				√	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan	5 Organisasi	4.000.000.000,00	√				√	

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng angg uran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
	Kabupaten/ Kota								
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/K ota dengan Lembaga Terkait	<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaa n Kabupaten/K ota</i>	5 Doku men	4.000.000.000 ,00						
Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	-	7.186.395.00 0,00	√				√	
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembang an, dan pengawasan	<i>Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaa n kabupaten/k ota yang Tersedia dan Termanfaatk an</i>	1 Unit	5.800.000.000 ,00	√				√	
Pemassalan olahraga dan penyelenggara an festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	<i>Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembang an dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</i>	2 Lemb aga	1.386.395.000 ,00	√				√	
PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS	Persentase Organisasi Kepramukaa n Aktif	100 %	983.530.000, 00	√				√	

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng angg uran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
KEPRAMUKAAN									
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwartir kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	983.530.000,00	√				√	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	983.530.000,00	√				√	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74 Nilai	16.113.865.460,00	√					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40 Orang	8.151.168.000,00	√					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	8.151.168.000,00	√					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan Administrasi Kepegawaia	2 Paket	40.000.000,00	√					

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng angg uran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
	n Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	40.000.000,00	√					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum Perangkat Daerah	1 Dokumen 54 Laporan 2928 Dokumen 9 Paket 2 Paket 1 Paket 5 Paket 6 Paket	2.687.490.428,00	√					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	91.500.000,00	√					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	500.000.000,00	√					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	250.000.000,00	√					

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng ang guran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	600.000.000,0 0	√					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	767.121.428,0 0	√					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2928 Doku men	16.800.000,00	√					
Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	2 Paket	12.069.000,00	√					
Fasilitasi Kunjungan Tamud	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamud	55 Lapor an	50.000.000,00	√					
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	130 Lapor an	350.000.000,0 0	√					
Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1 Doku men	50.000.000,00	√					
Pengadaan Barang Milik	IKM layanan	-	391.212.500,0 0	√					

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng angg uran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	391.212.500,0 0	√					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	76 POI N	3.721.211.172 ,00	√					
Penyediaan Jasa Surat Menyura	<i>Jumlah Laporan Penyediaan</i>	2 Lapor an	13.428.000,00	√					

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng ang guran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
	<i>Jasa Surat Menyurat</i>								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Lapor an	2.289.544.800 ,00	√					
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Lapor an	9.000.000,00	√					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Lapor an	1.409.238.372 ,00	√					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	IKM layanan pemelihara an BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78 POI N	1.122.783.36 0,00	√					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	707.783.360,0 0	√					

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng angg uran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	15.000.000,00	√					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	150.000.000,0 0	√					
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	250.000.000,0 0	√					
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	6 %	2.005.416.525 ,00	√				√	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembang annya	1 Doku men	1.805.416.525 ,00	√				√	
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	1 Doku men	120.000.000,0 0	√				√	
Pengadaan/Pe meliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	5 Unit	1.082.540.546 ,00	√				√	

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng angg uran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
Pariwisata Kabupaten/K ota	Pariwisata Kabupaten/K ota								
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	<i>Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/K ota yang Dikembangka n</i>	150 Oran g	602.875.979,0 0						
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	1 Lapor an	200.000.000,0 0	√				√	
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Lapor an	200.000.000,0 0	√				√	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuha n Jumlah Kunjungan Pariwisata	24 %	4.420.475.000 ,00	√				√	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	3 Doku men 2 Doku men 8 Kegia tan	4.420.475.000 ,00	√				√	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata</i>	2 Doku men	710.000.000,0 0						

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng angg uran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
	<i>Dalam dan Luar Neger</i>								
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Prom osi	756.826.621,0 0	√				√	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/K ota	<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	8 Kegia tan	2.953.648.379 ,00	√				√	
PROGRAM PENGEMBAN GAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAAT AN DAN PERLINDUNG AN HAK KEKAYAAN INTELEKTUA L	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual	29 %	954.805.000,0 0	√				√	√
Pengembang an Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembang kan	1 Doku men 1 Kegia tan 1 Lapor an	954.805.000,0 0	√				√	√

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng angg uran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Lapor an	400.000.000,0 0	√				√	√
Pengembang an Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembang an Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Doku men	404.805.000,0 0	√				√	√
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	<i>Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual</i>	1 Kegia tan	150.000.000,0 0						
PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	14 %	1.200.000.000 ,00	√				√	√
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisata n dan Ekraf	150 Oran g 20 Oran g 140 Oran g	1.200.000.000 ,00	√				√	√
Fasilitasi Pengembang an Kompetensi	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang</i>	20 Oran g	500.000.000,0 0	√				√	√

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng angg uran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	<i>Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>								
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	<i>Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI</i>	140 Orang	400.000.000,0 0	√				√	√
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	150 Orang	300.000.000,0 0	√				√	√
UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			5.428.308.475 ,00	√				√	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	6 %	5.428.308.475 ,00	√				√	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	1 Laporan 1	5.428.308.475 ,00	√				√	

Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu Renja 2025 (Rp.)	Tagging					
				SD Gs	Ke mis kina n	Peng angg uran	Peru baha n Iklim	S ma rt Cit y	Ekon omi Kreat if
		UPT D							
Pengadaan/Pe meliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota yang Tersedia dan Terpelihara</i>	1 Unit	5.328.308.475 ,00	√				√	
Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	0 Lapor an	100.000.000,0 0	√				√	
JUMLAH PAGU 2025			57.000.000.0 00						

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Renstra 2021-2026)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Balikpapan	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	2.6 %	6.807.204.540,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Balikpapan	PERSENTAS E PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2.70%	9.915.000.000,00	Kegiatan Tahunan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hibah KNPI
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Balikpapan	Persentase organisasi kepramukaan aktif	100 %	1.270.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Balikpapan	Persentase organisasi kepramukaan aktif	100,00%	1.415.000.000,00	Dana Hibah Pramuka

3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Balickp apan	Persentase atlet yang berprestasi	7.4 %	19.086.39 5.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Balickp apan	Persentase atlet yang berprestasi	26.2%	26.737.000.000,00	Partisipasi keolahragaan pada event POPROV, Formas, Haornas, Dana Hibah KONI,NPC dan KORMI, Peningkatan Sarana Prasaran Olahraga
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Balickp apan	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	6 %	2.005.416 .525,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Balickp apan	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	6%	11.363.000.000,00	Peningkatan Sapras Destinasi Pariwisata dan Kegiatan Operasional UPTD PMSS
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Balickp apan	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	24 %	4.420.475 .000,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Balickp apan	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	26%	7.085.000.000,00	Kegiatan Promosi Pariwisata
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	Balickp apan	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran	29 %	954.805.0 00,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	Balickp apan	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran	35%	1.217.000.000,00	Program Prioritas Walikota 2021-2026

	PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		kekayaan intelektual			PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		kekayaan intelektual			
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Balikip apan	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	14 %	1.200.000 .000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Balikip apan	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	16	903.000.000,00	Program Prioritas Walikota 2021-2026
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikip apan	IKM Internal Perangkat Daerah	74 Nilai	16.113.86 5.460,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikip apan	IKM Internal Perangkat Daerah	75%	17.799.448.000,00	
			TOTAL PAGU		57.000.000.000,00			Total Pagu		76.434.448.000,00	

Tabel T-C.32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/ Volume/Target Kinerja Program dan Kegiatan	Catatan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan / Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif Dan Mandiri/ Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	2,6% / 2,2%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Kepemudaan : KNPI
2.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan/ Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kota Balikpapan	Persentase organisasi kepramukaan aktif / Persentase unit kerja Organisasi Kwardcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100% / 100%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Kepramukaan : Kwardcab Pramuka Kota Balikpapan
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan / Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kota Balikpapan	Persentase atlet yang berprestasi / Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	7,4% / 100%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Olahraga : KONI,KORMI dan NPC
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kota Balikpapan	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya/ Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	29% / 29%	Pemberian Dana Hibah Ekraf
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kota Balikpapan	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif / Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan Ekraf	14%/ 17%	Pelatihan Travel Agen Pariwisata, pelatihan Barista

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **“Indonesia Yang Mandiri, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV (2020-2024) Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkpribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian

dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat Pemerintahan selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Mempertegas kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan lima poin penting untuk bisa mencapai sasaran pembangunan nasional atau rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.

1. Sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2025
2. menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan RKA K/L dan RKPD.
3. Pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara Renja K/L serta RKPD dengan RKP 2024
4. Perencanaan dan anggaran yang disusun K/L dan pemerintah daerah harus terukur, imperatif dan sesuai dengan amanat presiden “making delivered”, diperkuat melalui mekanisme Clearing House dengan menerapkan prinsip Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
5. Memperkuat integrasi dan sinergi sumber pendanaan yang mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, yaitu pendanaan swasta, KPBU, BUMN, dan APBN sebagai sumber terakhir yang digunakan.

6. K/L dan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan Major Project dan didukung sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang andal.

Hal-hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025.

3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan
5. Terciptanya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan Visi dan Misi walikota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan mengemban Tujuan 2 Urusan 2 untuk urusan Kepemudaan, Tujuan 2 Urusan 2 untuk urusan Keolahragaan dan Tujuan 5 Urusan 1 untuk Kepariwisata, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

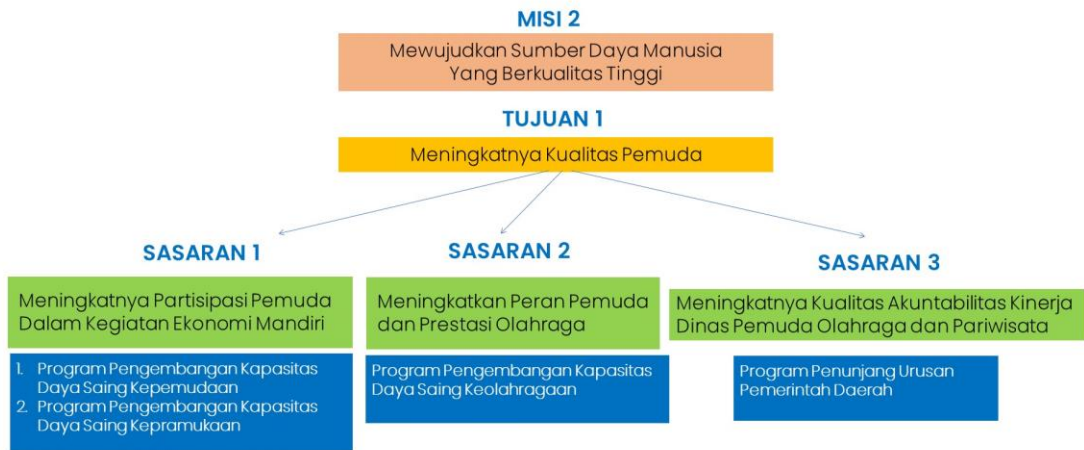
No	Tujua n	Sasara n	Indikat or Tujua n dan Sasara n	Kondisi Awal Perenca naan	Target Capaian					Kon disi Akh ir
					2022	2023	2024	202 5	202 6	
1	Menin gkatny a kualita s pemud a		Indeks Daya Saing Kepem udaan dan Keolahr agaan	0.020	0.021	0.022	0.023	0.02 4	0.02 5	0.02 5
		Mening katnya partisip asi pemud a dalam kegiata n ekonom i mandiri	Tingkat Partisip asi pemud a dalam organis asi, kepemu daan dan organis asi sosial kemasy arakata n	5%	10%	12%	15%	20%	25%	25%
		Mening katkan peran pemud a dan prestasi olahrag a	Pening katan prestasi olahrag a	6%	10.96 %	15.96 %	20.96 %	25.9 6%	30.9 6%	30.9 6%
		Mening katnya Kualita s Pene rapan Reform asi Birokra si Pada Dinas Pemud a,Olahr aga dan Pariwis ata	Nilai Reform asi Birokra si Perang kat Daerah	N/A	27	28,75	30,5	32,2 5	34	34

2	Meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan internasional		Angka kunjungan wisatawan	1,082,273	1,200,000	1,500,000	1,900,000	2,500,000	3,400,000	3,400,000
		Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	26%	30%	36%	45%	50%	53%	53%
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	N/A	2.20%	2.42%	2.66%	2.93%	3.22%	3.22%
		Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	N/A	19.23%	26.92%	34.62%	42.31%	46.15%	46.15%

3. 3 Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



URUSAN PARIWISATA



Tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 digambarkan dengan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra 2021-2026)		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025 (Pagu Indikatif)	Tahun 2026 (Renstra 2021-2026)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	74%	75%	16.113.865.460,00	17.799.448.000,00
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	76%	77%	8.151.168.000,00	9.541.448.000,00
1.2	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76%	78%	40.000.000,00	40.000.000,00
1.3	Administrasi Umum perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum Perangkat Daerah	76%	77%	2.687.490.428,00	2.493.000.000,00
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pengadaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	76%	77%	391.212.500,00	582.000.000,00
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76%	77%	3.721.211.172,00	3.687.000.000,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78%	79%	1.122.783.360,00	1.456.000.000,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2.60%	2.70%	6.807.204.540,00	9.915.000.000,00

2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1.83 %	1.83%	2.817.286.000,00	6.91 5.000.000,00
2.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	2.20 %	2.30%	3.989.918.540,00	3.00 0.000.000,00
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	7.4%	26.2%	19.086.395.000,00	26.7 37.000.000,00
3.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	32%	38%	6.400.000.000,00	18.4 00.000.000,00
3.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase atlet yang dibina	30%	32%	1.500.000.000,00	837. 000.000,00
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	100 %	100%	4.000.000.000,00	5.05 0.000.000,00
3.4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	90%	95%	7.186.395.000,00	2.45 0.000.000,00

4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan aktif	100 %	100%	1.27 0.000.000,0 0	1.41 5.000.000, 00
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	100%	1.27 0.000.000,0 0	1.41 5.000.000, 00
5.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	6%	6%	2.005.416.5 25,00	11.3 63.000.000 ,00
5.1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya	22%	24%	1.805.416.5 25,00	8.02 3.000.000, 00
5.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (UPTD PMSS)	Prosentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	11.7 0%	12%	5.428.308.4 75,00	3.04 0.000.000, 00
5.3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	12%	13%	200.000.00 0,00	300. 000.000,00
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	24%	26%	4.420.475.0 00,00	7.08 5.000.000, 00
6.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	1,7	1,7	4.420.475.0 00,00	7.08 5.000.000, 00

7.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual	29%	35%	954.805.000,00	1.217.000.000,00
7.1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang kreasi yang dikelola	1	1	-	502.000.000,00
7.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	29%	35%	954.805.000,00	715.000.000,00
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	14	16	1.200.000.000,00	903.000.000,00
8.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan Ekraf	17	20	1.200.000.000,00	903.000.000,00
	JUMLAH				57.000.000.000,00	76.434.448.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada tahun 2025.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengembangan bidang olahraga, pemuda dan pariwisata.

Pada tahun 2025, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan akan melaksanakan **9 program** dengan jumlah kegiatan sebanyak **19 kegiatan** dan **48 Sub Kegiatan** yang merupakan implementasi dari 2 (dua) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan urusan Bidang Pariwisata. Lokasi kegiatan keseluruhan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan sub kegiatan tersebut dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 57.000.000.000** yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2025. Program tersebut terdiri dari :

4. 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kode	Program.Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2025
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	74 Nilai	16.113.865.460,00
2.19.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	40 Orang	8.151.168.000,00
2.19.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 Orang/bulan	8.151.168.000,00

2.19.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Paket	40.000.000,00
2.19.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	40.000.000,00
2.19.01.02.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum Perangkat Daerah	76 POIN	2.687.490.428,00
2.19.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	91.500.000,00
2.19.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	500.000.000,00
2.19.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	250.000.000,00
2.19.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	9 Paket	600.000.000,00
2.19.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	3 Paket	767.121.428,00
2.19.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan yang disediakan	2928 Dokumen	16.800.000,00
2.19.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	2 Paket	12.069.000,00
2.19.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	50.000.000,00

2.19.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	350.000.000,00
2.19.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 POIN	391.212.500,00
2.19.01.02.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	391.212.500,00
2.19.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 POIN	3.721.211.172,00
2.19.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	13.428.000,00
2.19.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	2.289.544.800,00
2.19.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000,00
2.19.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	10 Laporan	1.409.238.372,00
2.19.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.122.783.360,00

			78 POI N	
2.19.01.02.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	707.783. 360,00
2.19.01.02.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	15.000.0 00,00
2.19.01.02.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	180 Unit	150.000. 000,00
2.19.01.02.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000. 000,00

4. 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2025
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2.60%	6.807.204.5 40,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1.83%	2.817.286.0 00,00

2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1000 Orang	1.414.729.903,00
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang	1.102.556.097,00
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	2.20%	3.989.918.540,00

2.19.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Organisasi	3.989.918.540,00
-----------------	---	---	--------------	------------------

4. 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Kode	Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2025
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	7.4 %	19.086.395.000,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	32%	6.400.000.000,00
2.19.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	1.750.000.000,00
2.19.03.2.02.06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	350 Orang	4.650.000.000,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah penerima	30%	1.500.000.000,00

		Penghargaan olahraga		
2.19.03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	350 Orang	500.000.000,00
2.19.03.2.03.08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1.000.000.000,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	4.000.000.000,00
2.19.03.2.04.06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	4.000.000.000,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	90%	7.186.395.000,00
2.19.03.2.05.09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan,	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	1 Unit	5.800.000.000,00

	pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	yang Tersedia dan Termanfaatkan		
2.19.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Lembaga	1.386.395.000,00

4. 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2025
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan aktif	100 %	983.530.000,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 %	983.530.000,00
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	983.530.000,00

4. 5 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2025
------	-------------------------------	-------------------	----------------	-----------------

3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	6 %	2.005.416.5 25,00
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta	70 %	1.805.416.52 5,00
3.26.02.2.02. 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta	1 Dokumen	120.000.000, 00
3.26.02.2.02. 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta	5 Unit	1.082.540.54 6,00
3.26.02.2.02. 08	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Ko ta yang Dikembangka n	150 Orang	602.875.979, 00

3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	12 %	200.000.000,00
3.26.02.2.04.12	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1 Laporan	200.000.000,00

4. 6 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2025
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	24 %	4.420.475.000,00
3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1,7 %	4.420.475.000,00

3.26.3.2.01 .04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	710.000.000,00
3.26.3.2.01 .06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Kegiatan	2.953.648.379,00
3.26.3.2.01 .07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	756.826.621,00

4. 7 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2025
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	29 %	954.805.000,00
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan	1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Laporan	954.805.000,00

		intelektual Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif		
3.26.04.2.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	400.000.000,00
3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	404.805.000,00
3.26.04.2.02.14	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	150.000.000,00

4. 8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Program,Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu RENJA 2025
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	14 %	1.200.000.000,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga	150 Orang 20 Orang 140 Orang

			Kerja Bidang Pariwisata Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	500.000.000,00
3.26.05.2.01.08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	140 Orang	400.000.000,00
3.26.05.2.01.10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150 Orang	300.000.000,00

	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		6 %	5.428.308.4 75,00
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Laporan 1 UPTD	5.428.308.4 75,00
3.26.02.2.03 .04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	5.328.308.4 75,00
3.26.02.2.03 .06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	100.000.000 ,00
	TOTAL		57.000.000 .000	

Dalam rangka meningkatkan kualitas Renja dan kualitas pembangunan serta keselarasan dengan inovasi OPD yang akan dicantumkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan telah memiliki beberapa inovasi yang telah berjalan dan sedang berlangsung di tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian/Nama Inovasi	Pengampu	Keterangan
1.	SIPAN (<u>Sistem Informasi Pemuda Balikpapan</u>) https://sipan.balikpapan.go.id/	Bidang Kepemudaan	
2.	SIPEWIRA (system Informasi Pemuda Wirausaha) http://sipewira.inotive.id/	Bidang Kepemudaan	Pengadaan Tahun 2022
3.	SIDIA (Sistem Informasi Data Induk Atlet) https://sidia.co.id/	Bidang Olahraga	Informasi Data Atlet, Pelatih dan Insan Olahraga
4.	Cinta Balikpapan http://cinta.balikpapan.go.id/	Bidang Pariwisata	Central Informasi Kota Balikpapan
5.	Nada Alun (Pengendalian Sarana Masuk Pantai Manggar) https://bit.ly/3BhlotI	UPTD PMSS	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi Non Digital • Aksi Perubahan KTU UPTD PMSS PKP II Tahun 2020) kerjasama dengan CSR
6.	Pembayaran Non Tunai dengan QRIS Bank Kaltimtara https://bit.ly/3zoFxx8	Kerjasama DPOP dengan Bank Kaltimtara	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga secara non tunai/digital
7.	Pesitor Burega (Penyederhaan Sistem Penyetoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga) dengan Perwali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga https://bit.ly/LAPORAN_AKPER_RINA_TRIYANTI	Progam dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi Non Digital (Perubahan Perwali Tata Cara Pembayaran Retribusi Tahun 2021) • Aksi Perubahan PKP II Tahun 2020 Sub Koordinator Program dan Keuangan)

8.	Bus Pariwisata City Tour https://bit.ly/3cC9PDv	Hibah dari Bank Kaltimtara Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi Non Digital • Wisata keliling kota Balikpapan untuk masyarakat umum
9.	Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat HUT Kota Balikpapan (FORMAS HUT KOTA) https://bit.ly/FORMAS_HUT_KOTA	Bidang Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Lomba olahraga yang dikemas dalam model festival dalam rangka mengembangkan olahraga rekreasi masyarakat, olahraga tradisional / permainan masyarakat (misalnya: line dance, BMX, skateboard, airsoftgun, layangan, senam, Kungfu tradisional, sumpit, dsb.) di Kota Balikpapan dengan menggunakan momentum HUT Kota Balikpapan. Dapat juga menggerakkan UMKM dengan menjual makanan-minuman atau menjual merchandise olahraga pada saat event
10.	Hari Olahraga Nasional Festival (HAORNAS FEST) https://bit.ly/HAORNAS_FEST	Bidang Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Olahraga Nasional harus diisi dengan berbagai kegiatan keolahragaan, tidak hanya berupa lomba-lomba olahraga, namun dapat juga berupa event lainnya seperti pameran olahraga, parade/pawai olahraga, jalan santai, funbike, funrun, dan

			<p>sebagainya. Selain itu dapat juga bertemakan kreatif, misalnya lomba membuat video konten ucapan HAORNAS, Mural keolahragan, duta Olahraga, dan sebagainya</p>
11.	<p>Balikpapan Menuju Juara Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Timur (BAMARA POPDA) https://bit.ly/BAMARA_POPDA</p>	Bidang Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen pengelolaan olahraga Pendidikan/Atlet Pelajar untuk meningkatkan daya saing Kontingen Kota Balikpapan pada ajang POPDA di Kaltim. • Aksi Perubahan PKP II Tahun 2020 Sub Koordinator Pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat)
12.	<p>Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Kreatif Dalam Pengembangan Pariwisata Balikpapan "SIPERMATA" https://bit.ly/3ImLuOh</p>	Kepala DPOP	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sinergi dan kolaborasi antar elemen masyarakat dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan Program Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan sebagai Kota MICE, Wisata dan Kreatif. • Aksi Perubahan PKN Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2023

13.	<p>Sistem Pembinaan Olahraga Menuju Balikpapan Juara “ Teman Olga Maju” https://bit.ly/49Lx6uE</p>	Kepala Bidang Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan pembinaan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga Kota Balikpapan yakni dari Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Keolahragaan, Sosialisasi/Seminar-seminar keolahragaan untuk mewujudkan prestasi olahraga menuju juara. Adapun ruang lingkup sistem pembinaan olahraga menuju juara adalah seluruh organisasi keolahragaan Kota Balikpapan serta atlet dan pelatih Kota Balikpapan. <p>Aksi Perubahan PKA Angkatan I Tahun 2023 Kepala Bidang Olahraga</p>
14.	<p>Manage Youth Organization (MAYOR) https://bit.ly/3POMxXZ</p>	Kepala Bidang Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan pemuda adalah melalui organisasi kepemudaan yang merupakan wadah pengembangan potensi pemuda serta mengembankan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kreativitas. Melalui organisasi, pemuda dapat

			<p>bersosialisasi, berkegiatan, dan berkreasi sambil meningkatkan kualitas diri dalam membentuk karakter.</p> <p>Organisasi pemuda yang dinamis dipercaya mampu membentuk kualitas dan karakter pemuda unggul .</p> <p>- Aksi Perubahan PKA Angkatan I Tahun 2023 Kepala Bidang Kepemudaan</p>
--	--	--	--

BAB V PENUTUP

5. 1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan progduk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisas antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5. 2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Di dalam penyusunan Renja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- b. Di dalam penyusunan Renja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 ini masih belum sempurna, sehingga dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Propinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).

5. 3. RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan unntuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, yaitu dengan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Perlu menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif melaksanakan koodinasi dengan instansi terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- e. Dalam menerapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan ammanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 ini kami susun sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

R. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

BAB I PENDAHULUAN

3.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari 3 tahapan yakni: tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilaksanakan sebelum dan nantinya akan disempurnakan menjadi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah ini menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan top-down dan bottom-up.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dengan memperhatikan program prioritas dan penyusunannya sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagai pedoman kerja dalam 1 (satu) tahun.

Dalam Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang di lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Sedangkan dalam penyusunan nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatannya menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
23. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

3.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

- a. Maksud penyusunan dokumen adalah:
 - 1) Rencana Kerja disusun untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - 2) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Perangkat Daerah;
 - 3) Menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
 - 4) Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2025.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 adalah:
 - 1) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2025;
 - 2) Menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
 - 3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
 - 4) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.

3.1. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

3.1. **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan**

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023. Dari hasil pengukuran terhadap target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023 diperoleh capaian kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2023

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan					
					5		6		7		8		9		10		11				12=8+9+10+11		13=12/7X100%				14=6+12		15=14/5X100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	%	8	6.379.710.839	5	948.719.345	5	1.236.802.400	0	112.029.869	-	115.515.379	-	151.385.863	6,60	722.190.269	6,60	1.101.121.380	132,00%	89,03%	11,60	2.049.840.725	145,00%	32,13%	Dispustakar				
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	%	18	5.017.710.839	196	748.173.809	12	995.094.900	43	110.107.869,00	27,68	89.854.079,00	43,03	119.739.818,00	53,26	569.297.783,00	167,41	888.999.549	1395,08%	89,34%	363,41	1.637.173.358	2018,94%	32,63%	Dispustakar	Kunjungan ke perpustakaan mengalami peningkatan dari kunjungan sekolah tingkat pendidikan dasar, layan mobil perpustakaan beroperasi kembali ke sekolah-sekolah dan tempat umum. Layanan pustaka baca kembali dibuka karena sudah perubahan anggaran untuk honorarium petugas piket			

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan			1	3.457.415	1	20.000.000	2	947.469		571.329		2.186.568		1.131.621	2	4.836.987	200,00%	24,18%	3	8.294.402	0,00%	0,00%			
		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan			30	98.126.208	5	36.040.000	11	633.000	0	-		6.970.000		25.401.500	11	33.004.500	220,00%	91,58%	41	131.130.708	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang mengikuti Bimtek/Pelatihan/ Seminar	Orang					0		0								0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%			
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Perangkat Koleksi	Layanan			1	591.583.351	2	794.898.000	2	94.575.400	-	78.898.850	-	106.902.850	-	445.300.712	2	725.677.812	100,00%	91,29%	3	1.317.261.163	0,00%	0,00%			

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pembangunan untuk Mewujudkan Keberagaman untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar			3	42.931.835	2.000	54.190.700	916	12.812.000	858	10.383.900	383	3.680.400	273	12.074.200	2430	38.950.500	121,50%	71,88%	2.433	81.882.335	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	dokumen			1	12.075.000	1	89.966.200	0	1.140.000	0	-	0		10	85.389.750	1	86.529.750	100,00%	96,18%	2	98.604.750	0,00%	0,00%			
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	%	15	1.362.000.000	11,98	200.545.536	12	241.707.500	10	1.922.000,00	7,01%	25.661.300,00	10,10%	31.646.045,00	13,58	152.892.486,00	23,75	212.121.831	197,93%	87,76%	35,73	412.667.367	238,21%	30,30%	Dispustakar	Pemanfaatan koleksi mengalami peningkatan karena kunjungan sekolah dan kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dispustakar	
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Lokus			4	200.545.536	4	101.712.500	1	1.062.000	1	23.211.300	-	20.291.368	4	49.437.382	6	94.002.050	150,00%	92,42%	10	294.547.586	0,00%	0,00%			

1	2	3	4	5	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
					6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K		
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan		0	-	1	139.995.000	1	860.000	4	2.450.000	0	11.354.677		103.455.104	5	118.119.781	500,00%	84,37%	5	118.119.781	0,00%	0,00%			
2	Meningkatkan Layanan Kearsipan sesuai standar	2. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	%	100	1.935.078.169	60	288.533.448	70	283.000.000	0	123.408.977	30	43.209.500	20	76.753.406	20	28.232.900	70	271.604.783	100,00%	95,97%	130,00	560.138.231	130,00%	28,95%	Dispustakar	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	%	100	1.291.013.324	42	196.431.148	55	192.000.000	0	122.148.977,00	20	11.885.300,00	15	30.092.906,00	20	20.299.500,00	55	184.426.683	100,00%	96,06%	97,00	380.857.831	97,00%	29,50%	Dispustakar	
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%				0	-									0	-	0,00%	0,00%	0%	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkes			55	27.871.500	100	38.000.000	0	0	100	11.308.500	0	3.857.400	0	19.889.500	100	35.055.400	100,00%	92,25%	155	62.926.900	0,00%	0,00%		
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan			21	140.088.148	1	154.000.000	0	122.148.977	0	576.800	0	26.235.506	1	410.000	1	149.371.283	100,00%	96,99%	22	289.459.431	0,00%	0,00%		Pelaksanaan pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah disusun dalam Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi Tahun 2023

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola	%	100	344.064.845	60	48.233.600	80	30.000.000	0	-	80	20.570.000,00	0	820.000,00	0	6.895.900,00	80	28.285.900	100,00%	94,29%	140,00	76.519.500	140,00%	22,24%			
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Stais yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis.	Arsip			10	48.233.600	50	30.000.000	0	-	60	20.570.000	0	820.000	0	6.895.900	60	28.285.900	1210,00%	94,29%	6060	76.519.500	0,00%	0,00%		Penetapan Arsip Statis Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan dan Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%	100	300.000.000	90	43.868.700	100	61.000.000	100	1.260.000,00	20	10.754.200,00	30	45.840.500,00	30	1.037.500,00	90	58.892.200	90,00%	96,54%	180,00	102.760.900	180,00%	34,25%	Dispustakar		
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna			20	14.803.800	50	20.000.000	100	1.260.000	10	10.508.800	15	5.971.400	15	1.037.500	50	18.777.700	100,00%	93,89%	70	33.581.500	0,00%	0,00%			
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan			10	29.064.900	1	41.000.000	0	0	0	245.400	1	39.869.100	0	-	1	40.114.500	100,00%	97,84%	11,00	69.179.400	0,00%	0,00%			
		3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%	100	967.539.085	7	154.048.260	65	90.000.000	0	10.835.000	15	5.546.700	40	16.276.500		42.282.500	55	74.940.700	84,62%	83,27%	62,00	228.988.960	62,00%	23,67%	Dispustakar		

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%	17	185.539.085	6	38.606.070	8	14.500.000	0	-	0	3.276.200,00	6	3.000.000,00	2	6.817.500,00	8	13.093.700	100,00%	90,30%	14,00	51.699.770	82,35%	27,86%	Dispustakar	Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pemusnahan arsip retensi dibawah 10 tahun yaitu Dispustakar, Disnaker dan DLH	
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip			1	18.973.320	50	14.500.000	0	0	0	3.276.200	3950	3.000.000	724	6.817.500	4674	13.093.700	9348,00%	90,30%	4,675	32.067.020	0,00%	0,00%		Pemusnahan Arsip Dinas Ketenagakerjaan dengan total 3.950 Arsip, dan DLH dengan total 724 Arsip	
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh pemerintah kota	Kegiatan			1	19.632.750											0	-	0,00%	0,00%	1	19.632.750	0,00%	0,00%			
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	%	100	146.000.000	10	18.004.000	20	10.500.000	0	-	0	1.440.000,00	0	2.160.000,00	20	6.597.800,00	20	10.197.800	100,00%	97,12%	30,00	28.201.800	30,00%	19,32%	Dispustakar	Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan telah dilaksanakan di Bulan Oktober 2023	

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Arsip			1	9.680.000	50	10.500.000	0	-	0	1.440.000	0	2.160.000	0	6.597.800	0	10.197.800	0,00%	97,12%	1	19.877.800	0,00%	0,00%		Tidak Ada Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana di Pemerintah Kota Balikpapan karena tidak ada bencana yang berdampak pada kerusakan arsip selama Tahun 2023	
		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Kegiatan															0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%			
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kotora	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	%	85	250.000.000	0	48.569.200	30	35.000.000	0	1.260.000,00	30	643.600,00	0	11.116.500,00	30	20.814.700,00	30	33.834.800	100,00%	96,67%	30,00	82.404.000	35,29%	32,96%	Dispustakar	Arsip yang dilakukan autentikasi adalah arsip Statis Bagian Hukum	
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip			0	23.992.200	20	35.000.000	0	1.260.000	30	643.600	0	11.116.500	0	20.814.700	30	33.834.800	150,00%	96,67%	30	57.827.000	0,00%	0,00%		Arsip yang dilakukan autentikasi adalah arsip Statis Bagian Hukum	
		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentikasi sesuai NSPK	Berkas					0	-									0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%			

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	%	25	386.000.000	0	48.868.990	10	30.000.000	0	9.575.000,00	0	186.900,00	0	-	0	8.052.500,00	0	17.814.400	0,00%	59,38%	0,00	66.683.390	0,00%	17,28%	Dispustakar	Pelaksanaan Workshop Penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) dilaksanakan di TW 4 Bulan Oktober 2023, Hasil dari pelaksanaan workshop tersebut berdasarkan arahan Arsip Nasional bahwa LKD harus mengupayakan pencarian fisik arsip statis tersebut terlebih dahulu di perangkat Daerah sebelum mengumumkan ke publik.	
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip																0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		
		Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Arsip																0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang diumumkan	Arsip			0	48.868.990	5	30.000.000	0	9.575.000	0	186.900	0	-	0	8.052.500	0	17.814.400	0,00%	59,38%	0	66.683.390	0,00%	0,00%		Pelaksanaan Workshop Penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) dilaksanakan di TW 4 Bulan Oktober 2023, Hasil dari pelaksanaan workshop tersebut berdasarkan arahan Arsip Nasional bahwa LKD harus mengupayakan pencarian fisik arsip statis tersebut terlebih dahulu di perangkat Daerah sebelum mengumumkan ke publik.	
		4. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan penggunaan arsip	%	100	241.884.771	0	38.488.800	0	15.000.000	0	5.950.000	0	567.000	0	451.000		7.048.000	0	14.016.000	0,00%	93,44%	0,00	52.504.800	0,00%	21,71%	Dispustakar		
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	50	241.884.771	0	38.488.800	20	15.000.000	0	5.950.000,00	0	567.000,00	0	451.000,00		7.048.000,00	0	14.016.000	0,00%	93,44%	0,00	52.504.800	0,00%	21,71%	Dispustakar	Workshop Penyediaan daftar dan izin penggunaan arsip tertutup telah dilaksanakan di TW 4, namun Perwali terkait SKKAAD (Perwali Instrumen Kearsipan) masih dalam proses penetapan di Bagian Hukum sehingga belum bisa menyediakan daftar dan melakukan penetapan izin arsip yang bersifat tertutup	

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang telah ditetapkan	SOP														0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip yang bersifat tertutup dan ijin penggunaan yang telah ditetapkan	Arsip			0	19.165.300	50	15.000.000	0	5.950.000	0	567.000	0	451.000	0	7.048.000	0	14.016.000	0,00%	93,44%	0	33.181.300	0,00%	0,00%			Workshop Penyediaan daftar dan izin penggunaan arsip tertutup telah dilaksanakan di TW 4, namun Perwali terkait SKKAAD (Perwali Instrumen Kearsipan) masih dalam proses penetapan di Bagian Hukum sehingga belum bisa menyediakan daftar dan melakukan penetapan izin arsip yang bersifat tertutup
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	82	50.666.020.931	79,70	8.052.658.128	79,00	9.397.350.050		1.655.464.782		2.402.859.947		1.806.013.249	92,16	3.000.157.308	92,16	8.864.495.286	116,66%	94,33%	171,86	16.917.153.414	209,59%	33,39%	Dispustakar		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	50.000.000	63,27	53.120.724	72	-		-		-	67,38	-	-	67,38	-	93,58%	0,00%	130,65	53.120.724	167,50%	106,24%	Dispustakar			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			2	14.283.750	2		1		1					2	-	100,00%	0,00%	4	14.283.750	0,00%	0,00%				

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			32	9.888.400	30			30							30	-	100,00%	0,00%	62	9.888.400	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			12	-	30			0							10	-	33,33%	0,00%	22	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			32	9.517.724	30			30							30	-	100,00%	0,00%	62	9.517.724	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			12	-	30										10	-	33,33%	0,00%	22	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Dokumen			1	9.616.400	1			1							1	-	100,00%	0,00%	2	9.616.400	0,00%	0,00%			

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																										
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		4,00	9.814.450	4		1		1		1		1,00		4	-	100,00%	0,00%	8	9.814.450	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	87	24.539.078.375	81,23	4.333.973.447	84	4.657.487.200		1.027.074.539,00		1.447.996.731,00		981.022.659,00	97,83	1.008.218.595,00	97,83	4.464.312.524	116,46%	95,85%	179,06	8.798.285.971	205,82%	35,85%	Dispustakar		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		25,00	4.333.973.447	26	4.657.487.200	26	1.027.074.539	24	1.447.996.731	24	981.022.659	24,00	1.008.218.595	24,00	4.464.312.524	92,31%	95,85%	49,00	8.798.285.971	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan		571,00	-	500		122,4		158		210,00		250,00		742	-	148,40%	0,00%	1.313	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		2,00	-	2				1			1,00		2	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan		12,00	-	1							1,00		1	-	100,00%	0,00%	13	-	0,00%	0,00%					

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan								
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																																	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Laporan			2,00	-	2					1						1,00				2	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan			12,00	-	12					3						3,00				3,00			12	-	100,00%	0,00%	24	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			12,00	-	12					3						3,00				3,00			12	-	100,00%	0,00%	24	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	81	-	78,79	-	78	-										88,98				88,98	-	114,08%	0,00%	167,77	-	207,12%	0,00%	Dispustakar				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			2,00	-	2					1						0,00				2	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%					

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			6,00	-	6		6							6	-	100,00%	0,00%	12	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			4,00	-	4		1		1				1,00	4	-	100,00%	0,00%	8	-	0,00%	0,00%				
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			0,00	-	4		1		1					3	-	75,00%	0,00%	3	-	0,00%	0,00%				
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			2,00	-	2								1,00	2	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen			5,00	-	5		5							5	-	100,00%	0,00%	10	-	0,00%	0,00%				
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1,00	-	1								1,00	1	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%				

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	84	767.600.000	81,23	-	81	-							96,61		96,61	-	119,27%	0,00%	177,84	-	211,71%	0,00%	Dispustakar		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			0,00	-	1	-									0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		Mesin finger masih berfungsi dengan baik	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			0,00	-	0	-									0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			12,00	-	10	-	3		3		3		3,00		12	-	120,00%	0,00%	24	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			2,00	-	2	-			1				1,00		2	-	100,00%	0,00%	4	-	0,00%	0,00%			
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			26,00	-	2	-			1				1,00		2	-	100,00%	0,00%	28	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			0	0	2	-			1				1,00		2	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%			

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan			
					5		6		7		8		9		10		11			12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12				15=14/5X100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			0	0	2										2	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			0,00	-	2			2							2	-	100,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80	3.728.270.615	80,44	937.311.620	77	1.522.216.750		143.696.949,00		251.862.510,00		169.435.222,00	92,52	835.327.388,00	92,52	1.400.322.069	120,16%	91,99%	172,96	2.337.633.689	216,20%	62,70%	Dispustakar			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket			17	49.349.630	1	39.116.800		0	1	12.852.350		12.852.350		11.850.700	1	37.555.400	100,00%	96,01%	18	86.905.030	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			56,00	407.800.450	7	812.410.800		0	6	206.940.000		2,00	4.040.000		12,00	20	729.048.000	285,71%	89,74%	76	1.136.848.450	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0,00	-	0										0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang DisediakanJenis bahan logistik kantor	Paket			73,00	201.943.240	6	192.338.600		6	25.365.150		15.504.600		56.690.350		78.081.350	6	175.641.450	100,00%	91,32%	79	377.584.690	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket			11,00	57.903.100	1	27.285.350		1	7.375.000		3.343.800		8.383.300		1	19.102.100	100,00%	70,01%	12	77.005.200	0,00%	0,00%				

1	2	3	4	5	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan		
					6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11			13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
			yang Disediakan																										
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doku men		3,0 0	14.840 .400	2	16.400. 000	3	2.440.6 20		3.254.1 60		3.486.6 00		4.997.4 60	3	14.178. 840	150,00%	86,46 %	6	29.019.2 40	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapor an		28 7	38474 800	1	34.665. 200		1.885.0 00		675.000		9.562.5 00	1	13.820. 000	1	25.942. 500	100,00%	74,84 %	288	64.417.3 00	0,00%	0,00%				
		Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an		58	167.00 0.000	55	400.00 0.000	1 9	106.631 .179	16	12.636. 400	19	79.459. 622	28	200.126 .578	82	398.85 3.779	149,09%	99,71 %	140	565.853. 779	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	8 1	1.771. 000.00 0	0	-	78						78, 00		78, 00	-	100,00%	0,00%	78,00	-	96,30 %	0,00%	Dispustak ar				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0	0	0									0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	0									0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%					

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	83	14.394.906.000	79,34	1.925.910.810	80	2.487.222.000	436.843.714,00	626.772.276,00	586.650.640,00	94,35	764.066.020,00	94,35	2.414.332.650	117,94%	97,07%	173,69	4.340.243.460	209,27%	30,15%	Dispustakar					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			5	505.102.747	12	625.248.000	3	145.999.831	3	142.150.668	3	147.009.658	3	162.447.376	12	597.607.533	100,00%	95,58%	17	1.102.710.280	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	1.861.974.000	3	290.843.883	3	484.621.608	3	439.640.982	3	601.618.644	12	1.816.725.117	100,00%	97,57%	12	1.816.725.117	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80	5.415.165.941	77,69	802.341.527	77	730.424.100	47.849.580,00	76.228.430,00	68.904.728,00	89,41	392.545.305,00	89,41	585.528.043	116,12%	80,16%	167,10	1.387.869.570	208,88%	25,63%	Dispustakar					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit			10	144.406.667	9	147.000.000	9	26.697.200		23.929.720		36.373.267	9	124.436.854	100,00%	84,65%	19	268.843.521	0,00%	0,00%					

1	2	3	4	Satuan Kinerja	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			3	73.799.265	5	102.281.100	1	21.152.380	1	11.018.210	1	21.222.061	2	27.757.126	5	81.149.777	100,00%	79,34%	8	154.949.042	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			2	29.842.350	2	30.000.000		0					2	29.000.000	2	29.000.000	100,00%	96,67%	4	58.842.350	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			16	357.565.475	30	301.143.000		0	5	41.280.500	8	11.309.400	17	149.062.150	30	201.652.050	100,00%	66,96%	46	559.217.525	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	196.727.770	1	150.000.000		0				1	149.289.362	1	149.289.362	100,00%	99,53%	2	346.017.132	0,00%	0,00%				
										11.022.152.450	-	1.907.688.628	45	2.567.698.526	60	2.050.880.018	118,76	3.799.910.977	223,76	10.326.178.149									
Rata-rata capaian kinerja (%)																				191,51%	42,55%			46,14%	6,31%				
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				223,82%	37,18%			0,00%	0,00%				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				154,03%	74,47%			42,63%	26,87%				

1	2	3	4	5	6	7	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								12=8+9+10+11	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		14=6+12	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		16	Penjelasan					
							8	9	10	11	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																72,21%	76,01%			161,53%	31,49%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sedang	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						

3.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan pada tahun 2023 memiliki 5 (lima) program yang terbagi dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Total pagu anggaran setelah perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 11.022.152.450,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93.69 % atau sebesar Rp. 10.326.178.149,00.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 72,21% dengan kriteria penilaian masuk pada predikat “Sedang”
2. Rata-rata capaian kinerja seluruh kegiatan sebesar 154,03% dengan kriteria penilaian masuk pada predikat “Sangat Tinggi”
3. Rata-rata capaian kinerja seluruh sub kegiatan sebesar 223,82% dengan kriteria penilaian masuk pada predikat “Sangat Tinggi”

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2023 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2023), adalah sebagai berikut:

I. Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator program : Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional

Evaluasi hasil : Predikat Kinerja adalah “Tinggi” dengan nilai capaian kinerja sebesar 132%, terealisasi. 6,60% dari target 5%,

Hasil Analisis : Terdapat peningkatan yang signifikan untuk jumlah perpustakaan yang terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional.

Pada program ini terdapat dua kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 1.395,08%. Terealisasi 167,41% dari target 12%.

Hasil Analisis : Realisasi melampaui target yang ditentukan. Kunjungan ke Perpustakaan mengalami peningkatan dari kunjungan sekolah tingkat pendidikan dasar, layanan mobil perpustakaan keliling yang telah beroperasi kembali ke sekolah-sekolah dan tempat umum. Serta layanan pustaka baca telah dibuka kembali karena terdapat anggaran perubahan untuk honorarium piket.

Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Indikator sub kegiatan : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 200%. Realisasi sebesar 2 Layanan dari target yang ditetapkan sebesar 1 Layanan

Hasil analisis : Terdapat pemanfaatan koleksi bahan pustaka baik secara konvensional maupun digital, yaitu Aplikasi iBalikpapan dan Tugu Baca.

1.2 Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan

Indikator sub kegiatan : Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standard nasional perpustakaan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 220%. Realisasi sebesar 11 perpustakaan sekolah dari target 5 perpustakaan.

Hasil analisis : Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembinaan terhadap 11 perpustakaan sekolah yang akan dilakukan akreditasi perpustakaan.

1.3 Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan : Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui perangkat koleksi

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100 %. Realisasi 2 Layanan dari target yang ditetapkan 2 Layanan.

Hasil Analisis : Realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, terjadi peningkatan pemanfaatan koleksi bahan pustaka baik melalui layanan konvensional maupun layanan koleksi digital

1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Indikator sub kegiatan : Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pembangunan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan.

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 121,50%. Realisasi 2.430 Eksemplar dari target yang ditetapkan 2.000 Eksemplar.

Hasil Analisis : Realisasi melampaui dari target yang ditetapkan pada kegiatan perbaikan bahan pustaka dimana terdapat buku-buku yang perlu perbaikan pada koleksi buku anak dikarenakan intensitas penggunaan buku anak yang tinggi pada saat kegiatan wisata edukasi anak PAUD, TK dan RA.

1.5 Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan : Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Kota Balikpapan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi 1 Dokumen dari target yang ditetapkan 1 Dokumen.

Hasil Analisis : Realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Tersusunnya dokumen Kajian Laporan Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2023

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah

Evaluasi hasil : Predikat Kinerja adalah “sangat tinggi” dan nilai capaian kinerja sebesar 197,93%. Terealisasi 23,75% dari target yang ditetapkan sebesar 12 %,

Hasil Analisis : Terdapat peningkatan yang signifikan untuk pemanfaatan koleksi bahan pustaka, karena terdapat kunjungan sekolah dan kegiatan Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dispustakar.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

2.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

- Indikator sub kegiatan : Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan.
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 150%. Terealisasi 6 Lokus dari target yang ditetapkan 4 lokus.
- Hasil analisis : Target semula hanya 4 lokus, namun dapat terealisasi sebanyak 6 lokus. 2 Lokus merupakan hasil kolaborasi dengan GPMB Kota Balikpapan, sedangkan 4 lokus yang terealisasi pada triwulan IV telah sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Bidang Perpustakaan.

2.2 Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

- Indikator sub kegiatan : Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan.
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 500%. Terealisasi 5 Perpustakaan dari target yang ditetapkan 1 Perpustakaan.
- Hasil analisis : Target semula hanya 1 Perpustakaan, namun dapat terealisasi sebanyak 5 Perpustakaan. Hal tersebut didukung oleh Program dari Perpustakaan Nasional yakni Replikasi program TPBIS.

II. Program Pengelolaan Arsip

- Indikator program : Persentase Arsip yang dikelola
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 70%, terealisasi 70%.
- Hasil analisis : Pelaksanaan pengelolaan arsip secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai target yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN/SIKN) namun masih belum optimal mengingat target kota masih di angka 70%, untuk mencapai target di atasnya perlu komitmen dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan seluruh pencipta arsip dalam mewujudkan pengelolaan arsip sesuai standar di masing-masing perangkat daerah.

Pada program ini terdapat tiga kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- Indikator kegiatan : Persentase Pencipta Arsip yang mengelola arsip dinamis

- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 55%, terealisasi 55%.
- Hasil Analisis : Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis sudah berjalan, namun masih belum optimal mengingat target kota masih di angka 55% dan diperlukan upaya atau langkah-langkah serta komitmen setiap pencipta arsip untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis di tiap perangkat daerah khususnya terhadap pelaksanaan penciptaan dan penyusutan arsip di tiap Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di masing-masing perangkat daerah.

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

- a. Indikator sub kegiatan : Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 100 berkas, terealisasi 100 berkas.

Hasil Analisis : Pelaksanaan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis telah berjalan di Lembaga Kearsipan Daerah dan di tiap perangkat daerah, namun untuk pelaksanaan pemusnahan arsip yang merupakan bagian dari pelaksanaan penyusutan arsip baru dilaksanakan di Unit Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, kedepan khususnya pelaksanaan pemusnahan arsip juga harus dilakukan oleh seluruh Unit Kearsipan di masing-masing perangkat daerah.

1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Indikator sub kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan

Hasil Analisis : Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal dan telah disusun dalam Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi Tahun 2023.

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

- Indikator kegiatan : Persentase arsip statis yang dikelola
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100%. Target 80%, terealisasi 80%.
- Hasil analisis : Pelaksanaan pengelolaan arsip statis sudah berjalan, namun masih belum optimal mengingat realisasi target masih di angka 80% dan kendala yang dihadapi karena penetapan Peraturan Walikota untuk sisa Urusan Jadwal Retensi Arsip yang ada di perangkat daerah baru akan dilakukan di tahun 2023, untuk itu diperlukan komitmen setiap pencipta arsip di perangkat daerah untuk menyerahkan arsip statisnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

2.1 Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

- a. Indikator sub kegiatan : Jumlah arsip statis yang diakuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 1210% dari target 500 arsip, terealisasi 6050 arsip.

Hasil Analisis : Proses pelaksanaan penetapan arsip statis telah berjalan, hal ini dapat dilihat dari jumlah khasanah arsip yang telah ditetapkan sebagai arsip statis yaitu Keputusan Walikota Balikpapan dari Tahun 1970 sampai dengan 2012.

3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kabupaten Kota

Indikator kegiatan : Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam JIKN/SIKN

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 90% dari target 100%, terealisasi 90%.

Hasil analisis : Pelaksanaan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sudah berjalan baik, namun jumlah khasanah arsip yang telah di publikasikan baru sebanyak 2 series yang terdiri dari 8 Unit Kearsipan Perangkat Daerah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah khasanah yang ada di Portal SIKN JIKN Kota Balikpapan.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “sangat tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 50 Pengguna, terealisasi 50 pengguna.

Hasil Analisis : Jumlah khasanah arsip yang dapat diakses oleh publik melalui SIKN JIKN Kota Balikpapan sebanyak 2 series arsip dan perlu dilakukan peningkatan di tahun berikutnya untuk menambah khasanah arsip yang ada di Portal SIKN JIKN Kota Balikpapan.

3.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 Laporan, terealisasi 1 Laporan.

Hasil analisis : Jumlah unit kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui Portal SIKN JIKN Kota Balikpapan sebanyak 8 Unit Kearsipan, hal ini perlu peningkatan mengingat target kinerja masih di angka 10% dan jumlah Unit Kearsipan sebanyak 36 di Kota Balikpapan.

III. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Indikator program : Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 84,62% dari target 65%, terealisasi 55%.

Hasil analisis : Pelaksanaan program perlindungan dan penyelamatan arsip terealisasi 55% dari target yang ditetapkan sebesar 65% hal ini karena belum tercapainya realisasi pada kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dan kegiatan pencarian arsip statis, perlunya langkah-langkah strategis yang diambil untuk dapat mewujudkan target kinerja di tahun berikutnya.

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun

Indikator kegiatan : Persentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 8%, terealisasi 8%.

Hasil analisis : Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah kota Balikpapan telah berjalan baik, namun target kota masih kecil di angka 8%, untuk itu perlu komitmen bersama seluruh pencipta arsip di perangkat daerah untuk secara rutin melaksanakan pemusnahan arsip di tiap unit kearsipan perangkat daerah.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 9348% dari target 50 arsip kegiatan, terealisasi 4.674 arsip.

Hasil analisis : Kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai NSPK. Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) perangkat daerah yang telah melakukan pemusnahan arsip yaitu Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 3.950 arsip dan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 724 Arsip.

2. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 20%, terealisasi 20%

Hasil analisis : Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat bencana di lingkungan pemerintah kota Balikpapan telah berjalan baik sebagai bagian dari upaya preventif akan perlindungan dan penyelamatan arsip di Kota Balikpapan.

2.1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 kegiatan, terealisasi 1 kegiatan.

Hasil analisis : Kegiatan sosialisasi evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana telah dilaksanakan kepada seluruh perangkat daerah di Kota Balikpapan.

3. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan : Persentase Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang telah diautentikasi

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 30%, terealisasi nilai 30%.

Hasil analisis : Pelaksanaan kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media telah terealisasi sesuai dengan target. Arsip yang dilakukan autentikasi adalah arsip statis Bagian Hukum Setdakot Balikpapan.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

3.1 Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Indikator sub kegiatan : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan.

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 150% dari target 20 arsip, terealisasi 30 arsip.

Hasil analisis : Realisasi kinerja pelaksanaan autentikasi arsip statis melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan telah dilakukan autentikasi arsip statis Bagian Hukum Setdakot Balikpapan.

4. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

Indikator kegiatan : Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tidak Tercapai”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target nilai 5%, terealisasi 0%.

Hasil Analisis : Pelaksanaan kegiatan pencarian arsip statis belum terealisasi dikarenakan pengetahuan dan pemahaman arsiparis untuk melaksanakan proses kegiatan tersebut masih belum ada

mengingat kegiatan tersebut baru dilaksanakan di tahun 2022.

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

4.1 Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

- Indikator sub kegiatan : Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tidak Tercapai”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target 10 %, terealisasi 0 %.
- Hasil analisis : Realisasi belum tercapai, hal ini dikarenakan di setelah melaksanakan Workshop Penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) dan berdasarkan arahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bahwa Dis pustakar selaku Lembaga Kearsipan Daerah harus mengupayakan pencarian fisik arsip statis tersebut terlebih dahulu sebelum mengumumkan ke publik.

IV. Program Perizinan Penggunaan Arsip

- Indikator program : Persentase Perizinan Penggunaan Arsip
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tidak Tercapai”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target 0%, terealisasi 0%.
- Hasil analisis : Pelaksanaan program perizinan penggunaan arsip belum terealisasi, faktor utama belum dapat terealisasinya program tersebut karena di Tahun 2023 belum ditetapkannya kebijakan terkait Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) di tingkat Kota Balikpapan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, SKKAAD merupakan dasar untuk menentukan arsip tersebut bersifat terbuka atau tertutup.

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

- Indikator kegiatan : Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tidak Tercapai”, nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target 1 izin, terealisasi 0 izin.
- Hasil analisis : Pelaksanaan kegiatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum terealisasi dikarenakan regulasi terkait dengan penggunaan arsip yang bersifat tertutup masih dalam proses penetapan di Bagian Hukum, sehingga belum bisa menyediakan daftar dan melakukan penetapan izin arsip yang bersifat tertutup.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

- a. Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Daftar Arsip yang bersifat tertutup dan ijin penggunaan yang telah ditetapkan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Tidak Tercapai”, nilai capaian kinerja 0% dari target 50 Arsip terealisasi 0 Arsip.

Hasil analiasi : Realisasi kinerja pelaksanaan penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum tercapai, hal ini dikarenakan regulasi terkait dengan penggunaan arsip yang bersifat tertutup masih dalam proses penetapan

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator program : IKM Internal Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 116,66% dari target nilai 79, terealisasi 92,16.

Hasil analisis : Berdasarkan hasil survey IKM Internal Dipustakar nilai IKM Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang terendah yaitu 78 sedangkan Nilai IKM yang paling tertinggi adalah Pelayanan Administrasi Keuangan yaitu 97,83.

Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 167,50% dari target nilai 72, terealisasi 93,58

Hasil Analisis : Pencapaian Nilai SAKIP OPD melampaui dari target yang ditetapkan.

Pada kegiatan ini terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- a. Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen.

Hasil Analisis : Tercapaiannya realisasi berdasarkan tersusunnya Ranwal Renja 2024 dan Rankhir renja 2024.

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

- Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 30 dokumen, terealisasi 30 dokumen.
- Hasil Analisis : Tercapaiannya realisasi berdasarkan jumlah RKA yang dilakukan asistensi pada pada APBD Murni Tahun 2023.

1.3 Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

- Indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 33,33% dari target 30 dokumen, terealisasi 10 dokumen.
- Hasil Analisis : Realisasi berdasarkan jumlah RKA yang dilakukan asistensi pada pada APBD Perubahan Tahun 2023.

1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- Indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 30 dokumen, terealisasi 30 dokumen.
- Hasil Analisis : Realisasi berdasarkan jumlah DPA yang dilakukan asistensi pada pada APBD Murni Tahun 2023

1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan-SKPD

- Indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 33,33% dari target 30 dokumen, terealisasi 10 dokumen.
- Hasil Analisis : Realisasi berdasarkan jumlah DPA yang dilakukan asistensi pada pada APBD Perubahan Tahun 2023.

1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Indikator sub kegiatan : Jumlah Jumlah Dokumen SAKIP

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

Hasil Analisis : Telah dilakukan penyusunan Dokumen LKjIP Tahun 2022 dengan nilai hasil evaluasi dengan nilai capaian 63,27.

1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.

Hasil analisis : Telah dilakukan penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2023, dimulai dari TW1 sampai dengan TW4.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 116,46% dari target nilai 84, terealisasi nilai 97,83.

Hasil Analisis : Yang mengisi Survey IKM hanya 40 Responden, dari 43 Responden yang seharusnya mengisi survey.

Pada kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan, akan tetapi yang dilakukan analisis hanya 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 92,31% dari target 26 orang, terealisasi 24 orang.

Hasil analisis : Pembayaran dan gaji tunjangan diberikan berdasarkan jumlah ASN di Dinas Perpustakaan dan Arsip

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 114,08% dari target nilai 78, terealisasi nilai 88,98.

Hasil Analisis : Hasil survey menunjukkan kepuasan responden terhadap pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sudah sangat baik.

Pada Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan, akan tetapi tidak dilakukan analisis evaluasi hasil pencapaiannya.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : KM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 119,27% dari target nilai 81, terealisasi nilai 96,61.

Hasil Analisis : Hasil survey menunjukkan kepuasan responden terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sudah sangat baik.

Pada Kegiatan ini terdapat 6 (enam) sub kegiatan, akan tetapi tidak dilakukan analisis evaluasi hasil pencapaiannya.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 120,16% dari target nilai 77, terealisasi nilai 92,52.

Hasil Analisis : Hasil survey menunjukkan kepuasan responden terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sudah sangat baik.

Pada Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan, akan tetapi tidak dilakukan analisis evaluasi hasil pencapaiannya.

5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Indikator sub kegiatan : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 paket, terealisasi 1 paket.

5.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator sub kegiatan : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 285,71% dari target 7 paket, terealisasi 20 paket.

5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan : Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 6 paket, terealisasi 6 paket.

5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan : Jenis paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 paket, terealisasi 1 paket.

5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 150% dari target 2 dokumen, terealisasi 3 dokumen.

5.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan.

5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Evaluasi Hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 149,09% dari target 55 kali, terealisasi 82 kali.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target nilai 78 terealisasi nilai 78.

Hasil Analisis : Hasil survey menunjukkan kepuasan responden terhadap pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sudah sangat baik.

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (sub) sub kegiatan, akan tetapi tidak dilakukan analisis evaluasi hasil pencapaiannya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 117,94% dari target nilai IKM 80, terealisasi nilai 94,35.

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator sub kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 12 laporan, terealisasi 12 laporan.

7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 12 laporan, terealisasi 12 laporan.

8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 116,12% dari target nilai 77, terealisasi nilai 89,41.

Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

5.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 unit, terealisasi 1 unit.

5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

Evaluasi hasil : Sub kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran.

5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator sub kegiatan : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 30 unit, terealisasi 30 unit.

5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 5 unit, terealisasi 5 unit.

5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 10 unit, terealisasi 10 unit.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 10 unit, terealisasi 10 unit.

6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : IKM Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 119,27%.

7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

a. Indikator kegiatan : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 130,65% dari target nilai 72 poin, terealisasi 67,38.

b. Indikator kegiatan : Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan Daerah

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 95% dari target 100%, terealisasi 95%.

Pada kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

7.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen LKjIP

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

7.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi Renstra OPD

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

7.3 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

a. Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan tahunan

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

b. Indikator sub kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dicetak (buku)

Evaluasi hasil : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

3.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Isu-isu penting atau isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menunjukkan pelayanan yang cukup baik pada urusan bidang Perpustakaan dan urusan bidang Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan juga menemui permasalahan-permasalahan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di tahun 2023 digambarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Rendahnya pemanfaatan perpustakaan elektronik oleh masyarakat
2. Rendahnya cakupan perpustakaan yang berstandar nasional
3. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan yang ada di Kelurahan
4. Masih rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat
5. SDM pengelola perpustakaan belum memadai
6. Sarana dan prasarana perpustakaan daerah belum memadai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan arsip dinilai belum optimal, padahal pengelolaan arsip yang benar merupakan hal yang sangat krusial dalam tata kelola kearsipan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya nilai pengawasan kearsipan
2. Belum tersedianya *Record Center* sebagai ruang penyimpanan arsip inaktif di masing-masing perangkat daerah
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah, idealnya SDM Kearsipan Arsiparis di tiap Perangkat Daerah terdapat 1 orang Arsiparis
4. Sebagian besar Perangkat Daerah belum memiliki sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar
5. Kurangnya Diklat Fungsional Arsiparis yang diikuti oleh Arsiparis
6. Kurangnya Diklat Kearsipan bagi Pengelola Arsip di Perangkat Daerah
7. Masih belum optimalnya pengelolaan arsip di Perangkat Daerah
8. Masih Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasional Bidang Kearsipan.

3.1. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses

penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan sasaran pada RPJMD 2021-2026 Kota Balikpapan serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip, maka tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip berkaitan erat dengan sasaran ke-2 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan akhir RKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Arsip

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.325.730.861	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.407.083.115	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					13.294.730.861	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					12.508.468.274	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bpn	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81	Poin	11.110.534.092	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Bpn	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81	Poin	10.674.271.505	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpn	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86	Poin	5.389.730.965	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpn	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86	Poin	5.389.730.965	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Bpn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	27	Orang /Bulan	5.389.730.965	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Bpn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	27	Orang /Bulan	5.389.730.965	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpn	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83	Poin	540.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bpn	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83	Poin	516.000.000	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpn	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang /Paket	540.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpn	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang /Paket	516.000.000	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpn	IKM Administrasi Umum Perangkat Daerah	79	Poin	1.159.096.685	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpn	IKM Administrasi Umum Perangkat Daerah	79	Poin	1.126.159.685	
1	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpn	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Disediakan	747	Paket	48.915.000	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpn	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Disediakan	747	Paket	48.907.000	
2	Sub Keg Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bpn	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10	Paket	346.357.352	Sub Keg Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bpn	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10	Paket	346.308.960	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpn	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	16242	Paket	341.526.900	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpn	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	16242	Paket	314.269.635	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
4	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Bpn	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	18909	Paket	51.551.620	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Bpn	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	18909	Paket	45.984.350	
5	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bpn	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1085	Dokumen	22.176.000	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bpn	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1085	Dokumen	22.176.000	
6	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	Bpn	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	974	Laporan	48.569.375	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	Bpn	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	974	Laporan	48.512.790	
7	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpn	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	300.000.000	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpn	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	300.000.000	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	Poin	350.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	Poin	299.107.500	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpn	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	350.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpn	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	299.107.500	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82	Poin	2.894.578.880	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82	Poin	2.703.806.288	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bpn	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	836.300.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bpn	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	675.900.800	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpn	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	2.058.278.080	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpn	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	2.027.905.488	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79	Poin	777.128.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79	Poin	639.467.067	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpn	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	161.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpn	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	138.744.850	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
2	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Bpn	Jumlah Kendaraan Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya Dan Perizinanya	5	Unit	246.128.000	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Bpn	Jumlah Kendaraan Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya Dan Perizinanya	5	Unit	232.485.300	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Bpn	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	132	Unit	270.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Bpn	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	132	Unit	218.384.917	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Bpn	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Bpn	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	49.852.000	
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bpn	Presentase Layanan Perpustakaan Yang Memenuhi Standar Nasional	7%	%	2.184.196.769	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bpn	Presentase Layanan Perpustakaan Yang Memenuhi Standar Nasional	7%	%	1.834.196.769	
7	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Peningkatan Kunjungan Di Perpustakaan Daerah	16,00%	%	1.779.581.569	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Peningkatan Kunjungan Di Perpustakaan Daerah	16,00%	%	1.497.581.569	
1	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh	Bpn	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Yang Dilakukan	20	Perpustakaan	132.999.800	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh	Bpn	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Yang Dilakukan Pembinaan Dalam	20	Perpustakaan	132.999.800	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Wilayah Kab/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan		Pembinaan Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				Wilayah Kab/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan		Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				
2	Sub Keg Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota	Bpn	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Yang Dikembangkan Tingkat Kab/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2	Layanan	1.123.672.769	Sub Keg Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota	Bpn	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Yang Dikembangkan Tingkat Kab/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2	Layanan	841.672.769	
3	Sub Keg Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan Tenaga	Bpn	Jumlah Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	1	Dokumen	216.485.000	Sub Keg Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	Jumlah Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	1	Dokumen	216.485.000	
4	Sub Keg Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Bpn	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dilakukan Pengelolaan Dan Pengembangan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3000	Eksemplar	286.424.000	Sub Keg Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bpn	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dilakukan Pengelolaan Dan Pengembangan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3000	Eksemplar	286.424.000	
5	Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan	Bpn	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang	1	Layanan	20.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan	Bpn	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang	1	Layanan	20.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Layanan Perpustakaan Elektronik		Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				Layanan Perpustakaan Elektronik		Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				
8	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Pemanfaatan Koleksi Di Perpustakaan Daerah	14,00%	%	404.615.200	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Pemanfaatan Koleksi Di Perpustakaan Daerah	14,00%	%	336.615.200	
1	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bpn	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Kab/Kota Yang Dikembangkan	5	Perpustakaan	211.500.000	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bpn	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Kab/Kota Yang Dikembangkan	5	Perpustakaan	211.500.000	
2	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Bpn	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan	5	Lokus	193.115.200	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Bpn	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan	5	Lokus	125.115.200	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.031.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					898.614.841	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bpn	Presentase Arsip Yang Dikelola	90,00%	%	850.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bpn	Presentase Arsip Yang Dikelola	90,00%	%	817.614.841	
9	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kab/Kota	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Mengelola Arsip Dinamis	83,00%	%	485.000.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kab/Kota	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Mengelola Arsip Dinamis	83,00%	%	476.471.235	
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bpn	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan Dan Penyusutan	300	Berka s	175.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bpn	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan Dan Penyusutan	300	Berka s	140.482.010	
2	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Bpn	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	36	Lapor an	310.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Bpn	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	36	Lapor an	335.989.225	
10	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Arsip Statis Yang Dikelola	90,00%	%	150.000.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Bpn	Presentase Arsip Statis Yang Dikelola	90,00%	%	131.569.550	
3	Sub Kegiatan Akusisi Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	Bpn	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi Dan Akses Arsip Statis	650	Arsip	150.000.000	Sub Kegiatan Akusisi Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	Bpn	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi Dan Akses Arsip Statis	650	Arsip	131.569.550	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
11	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Bpn	Presentase Jumlah Arsip Yang Dimasukan Dalam Sikn/Jikn	100,00%	%	215.000.000	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Bpn	Presentase Jumlah Arsip Yang Dimasukan Dalam Sikn/Jikn	100,00%	%	209.574.056	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui Jikn	Bpn	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN	50	Pengguna	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN	Bpn	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN	50	Pengguna	10.077.000	
2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Bpn	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	1	Laporan	200.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Bpn	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	1	Laporan	199.497.056	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Bpn	Presentase Arsip Yang Dilindungi Dan Terselamatkan	85,00%	%	169.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Bpn	Presentase Arsip Yang Dilindungi Dan Terselamatkan	85,00%	%	69.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
12	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawag 10 (Sepuluh) Tahun	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Melakukan Pemusnahan Arsip	14,00%	%	117.000.000	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawag 10 (Sepuluh) Tahun	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Melakukan Pemusnahan Arsip	14,00%	%	17.000.000	
1	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bpn	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	350	Arsip	17.000.000	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bpn	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	350	Arsip	17.000.000	
13	Kegiatan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Bersekala Kab/Kota	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Mendapatkan Penyuluhan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	60,00%	%	10.000.000	Kegiatan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Bersekala Kab/Kota	Bpn	Presentase Pencipta Arsip Yang Mendapatkan Penyuluhan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	60,00%	%	10.000.000	
1	Sub Keg Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpn	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	50	Arsip	10.000.000	Sub Keg Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpn	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	50	Arsip	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
14	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kab/Kota	Bpn	Presentase Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Yang Telah Diautentikasi	60,00%	%	22.000.000	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kab/Kota	Bpn	Presentase Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Yang Telah Diautentikasi	60,00%	%	22.000.000	
1	Sub Keg Penilaian Dan Penetapan Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpn	Jumlah Daftar Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Yang Dinilai Dan Ditetapkan	50	Arsip	22.000.000	Sub Keg Penilaian Dan Penetapan Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpn	Jumlah Daftar Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Yang Dinilai Dan Ditetapkan	50	Arsip	22.000.000	
15	Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kab/Kota Yang Dinyatakan Hilang	Bpn	Presentase Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang	20,00%	%	20.000.000	Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kab/Kota Yang Dinyatakan Hilang	Bpn	Presentase Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang	20,00%	%	20.000.000	
2	Sub Keg Penetapan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Bpn	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) Yang Dilakukan Penetapan Dan Pengumuman	2	Arsip	20.000.000	Sub Keg Penetapan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Bpn	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) Yang Dilakukan Penetapan Dan Pengumuman	2	Arsip	20.000.000	
V	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Bpn	Presentase Perizinan Penggunaan Arsip	100,00%	%	12.000.000	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Bpn	Presentase Perizinan Penggunaan Arsip	100,00%	%	12.000.000	
16	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat	Bpn	Presentase Penerbitan Izin Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	40,00%	%	12.000.000	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang	Bpn	Presentase Penerbitan Izin Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	40,00%	%	12.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	
	Tertutup Di Kab/Kota						Bersifat Tertutup Di Kab/Kota							
3	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Bpn	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	20	Arsip	12.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Bpn	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	20	Arsip	12.000.000		
TOTAL						14.325.730.861	TOTAL8						13.407.083.115	

3.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi dan dari Perangkat Daerah lain di Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota tidak memuat catatan perubahan untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Tabel 2. 4 T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Balikpapan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional, maka yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4 (empat), yaitu “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dengan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerjasama antar warga, mencakup: pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.
2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui:
 - a. Peningkatan budaya literasi, mencakup: (i) pengembangan budaya gemar membaca; (ii) pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; (ii) peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup: (i) pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*); (ii) pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi.

Arah kebijakan nasional bidang kearsipan berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 mengacu pada agenda ke-4 (empat), yaitu “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dan agenda ke-7 (tujuh), yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.”

Pada agenda “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, sasaran nasional yang terkait dengan kearsipan adalah “Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia”.

Sedangkan arah kebijakannya adalah “Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antar warga” melalui strategi:

1. “Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip” dengan output prioritas nasional:
 - a. jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa; dan
 - b. jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.

2. “Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa” dengan output prioritas nasional: Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi.

Pada agenda “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, sasaran nasional yang terkait dengan kearsipan adalah “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” dengan arah kebijakan:

1. “Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis” melalui strategi “Penerapan SPBE Terintegrasi” dengan output prioritas nasional: Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi;
2. “Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja” melalui strategi “Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan output prioritas nasional: Jumlah K/L dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas dan Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025

Tujuan	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat		
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
Target Tujuan 2025	20,83		
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	Meningkatnya layanan kearsipan sesuai standar	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan layanan perpustakaan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
Target Sasaran 2025	10 %	90,40	76,00

3.1. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam Renja 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan, tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - ii. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - iii. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - iv. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - v. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Khusus serta Masyarakat
 - ii. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

2. Program Pengelolaan Arsip

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - ii. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
- c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
 - ii. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - i. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

- b. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
- c. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
- d. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
 - i. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

4. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Peralatan Kantor
 - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - v. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - vi. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - vii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- iv. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3. 2 T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.407.083.115					15.346.875.726	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					12.508.468.274					14.358.716.129	
2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Bpn	81	Poin	10.674.271.505	PAD	Bpn	82	Poin	12.340.716.129	PAD
2	2	0	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bpn	86	Poin	5.389.730.965	PAD	Bpn	87	Poin	6.000.000.000	PAD
2	23	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Bpn	27	Orang/Bulan	5.389.730.965	PAD	Bpn	27	Orang/Bulan	6.000.000.000	PAD
2	23	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi	Bpn	83	Poin	516.000.000	PAD	Bpn	84	Poin	1.230.000.000	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Kepegawaian Perangkat Daerah										
2	23	2	02.00	001	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpn	45	Orang/Paket	516.000.000	PAD	Bpn	100	Paket	1.230.000.000	PAD
2	23	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpn	79	Poin	1.126.159.685	PAD	Bpn	80	Poin	1.112.651.897	PAD
2	23	02	2.06	0001	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Disediakan	Bpn	747	Paket	48.907.950	PAD	Bpn	747	Paket	48.915.000	PAD
2	23	02	2.06	0002	Sub Keg Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Bpn	10	Paket	346.308.960	PAD	Bpn	10	Paket	200.000.000	PAD
2	23	02	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Bpn	16242	Paket	314.269.635	PAD	Bpn	16242	Paket	341.526.900	PAD
2	23	02	2.06	0005	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Bpn	18909	Paket	45.984.350	PAD	Bpn	18909	Paket	51.551.620	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Pengadaan Yang Disediakan										
2	23	02	2.06	0006	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Bpn	1085	Dokumen	22.176.000	PAD	Bpn	1085	Dokumen	22.176.000	PAD
2	23	02	2.06	0008	Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpn	974	Laporan	48.512.790	PAD	Bpn	974	Laporan	48.482.377	PAD
2	23	02	2.06	0009	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Bpn	40	Laporan	300.000.000	PAD	Bpn	40	Laporan	400.000.000	PAD
2	23	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	80	Poin	299.107.500	PAD	Bpn	81	Poin	285.000.000	PAD
2	23	01	2.07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bpn	2	Unit	299.107.500	PAD	Bpn	2	Unit	285.000.000	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	23	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	82	Poin	2.703.806.288	PAD	Bpn	83	Poin	2.894.578.880	PAD
2	23	01	2.08	000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Bpn	12	Laporan	675.900.800	PAD	Bpn	12	Laporan	836.300.800	PAD
2	23	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Bpn	12	Laporan	2.027.905.488	PAD	Bpn	12	Laporan	2.058.278.080	PAD
2	23	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpn	79	Poin	639.467.067	PAD	Bpn	80	Poin	818.485.352	PAD
2	23	01	2.09	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Bpn	8	Unit	138.744.850	PAD	Bpn	8	Unit	202.357.352	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	23	01	2.09	000 2	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya Dan Perizinanya	Bpn	5	Unit	232.485.300	PAD	Bpn	5	Unit	246.128.000	PAD
2	23	01	2.09	000 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Bpn	132	Unit	218.384.917	PAD	Bpn	132	Unit	270.000.000	PAD
2	23	01	2.09	000 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bpn	1	Unit	49.852.000	PAD	Bpn	1	Unit	100.000.000	PAD
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Layanan Perpustakaan Yang Memenuhi Standar Nasional	Bpn	7%	%	1.834.196.769	PAD	Bpn	8%	%	2.017.616.446	PAD
2	23	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Kunjungan Di Perpustakaan Daerah	Bpn	16,00%	%	1.497.581.569	PAD	Bpn	18,00%	%	1.647.339.726	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	23	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Yang Dilakukan Pembinaan Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Bpn	20	Perpustakaa n	132.999.800	PAD	Bpn	25	Perpustakaa n	146.299.780	PAD
2	23	02	2.01	0012	Sub Keg Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Yang Dikembangkan Tingkat Kab/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Bpn	2	Layanan	841.672.769	PAD	Bpn	2	Layanan	925.840.046	PAD
2	23	02	2.01	0017	Sub Keg Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Bpn	1	Dokumen	216.485.000	PAD	Bpn	1	Dokumen	238.133.500	PAD
2	23	02	2.01	0018	Sub Keg Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dilakukan Pengelolaan Dan Pengembangan Untuk Mewujudkan	Bpn	3000	Eksemplar	286.424.000	PAD	Bpn	3500	Eksemplar	315.066.400	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Keberagaman Koleksi Perpustakaan										
2	23	02	2.01	0020	Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Bpn	1	Layanan	20.000.000	PAD	Bpn	1	Layanan	22.000.000	PAD
2	23	02	2.02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemanfaatan Koleksi Di Perpustakaan Daerah	Bpn	14,00%	%	336.615.200	PAD	Bpn	15,00%	%	370.276.720	PAD
2	23	02	2.02	0007	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Kab/Kota Yang Dikembangkan	Bpn	5	Perpustakaan	211.500.000	PAD	Bpn	5	Perpustakaan	232.650.000	PAD
2	23	02	2.02	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca	Bpn	5	Lokus	125.115.200	PAD	Bpn	6	Lokus	137.626.720	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan										
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		Bpn			898.614.841	PAD	Bpn			988.543.151	PAD
2	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase Arsip Yang Dikelola	Bpn	90,00%	%	817.614.841	PAD	Bpn	100,00 %	%	899.443.151	PAD
2	2	0	2.01		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Presentase Pencipta Arsip Yang Mengelola Arsip Dinamis	Bpn	83,00%	%	476.471.235	PAD	Bpn	100,00 %	%	524.143.934	PAD
2	24	02	2.01	000 2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan Dan Penyusutan	Bpn	300	Berkas	140.482.010	PAD	Bpn	300	Berkas	154.542.036	PAD
2	24	02	2.01	000 3	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Bpn	36	Laporan	335.989.225	PAD	Bpn	36	Laporan	369.601.898	PAD
2	2	0	2.02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Arsip Statis Yang Dikelola	Bpn	90,00%	%	131.569.550	PAD	Bpn	100,00 %	%	144.740.255	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	24	02	2.02	000 4	Sub Kegiatan Akusisi Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi Dan Akses Arsip Statis	Bpn	650	Arsip	131.569.550	PAD	Bpn	700	Arsip	144.740.255	PAD
2	24	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Arsip Yang Dimasukan Dalam Sikn/Jikn	Bpn	100,00 %	%	209.574.056	PAD	Bpn	100,00 %	%	230.558.962	PAD
2	24	02	2.03	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN	Bpn	50	Pengguna	10.077.000	PAD	Bpn	50	Pengguna	11.098.450	PAD
2	24	02	2.03	000 2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Bpn	1	Laporan	199.497.056	PAD	Bpn	1	Laporan	219.460.512	PAD
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase Arsip Yang Dilindungi Dan Terselamatkan	Bpn	85,00%	%	69.000.000	PAD	Bpn	100,00 %	%	75.900.000	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	2	0	2.01		Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawag 10 (Sepuluh) Tahun	Presentase Pencipta Arsip Yang Melakukan Pemusnahan Arsip	Bpn	14,00%	%	17.000.000	PAD	Bpn	17,00%	%	18.700.000	PAD
2	24	03	2.01	0004	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bpn	350	Arsip	17.000.000	PAD	Bpn	500	Arsip	18.700.000	PAD
2	2	0	2.02		Kegiatan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Bersekala Kabupaten/Kota	Presentase Pencipta Arsip Yang Mendapatkan Penyuluhan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Bpn	60,00%	%	10.000.000	PAD	Bpn	100,00 %	%	11.000.000	PAD
2	24	03	2.02	0001	Sub Keg Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Evakuasi Dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpn	50	Arsip	10.000.000	PAD	Bpn	50	Arsip	11.000.000	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	2	0	2.04		Kegiatan Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Presentase Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Yang Telah Diautentikasi	Bpn	60,00%	%	22.000.000	PAD	Bpn	85,00%	%	24.200.000	PAD
2	24	03	2.04	0001	Sub Keg Penilaian Dan Penetapan Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Yang Dinilai Dan Ditetapkan	Bpn	50	Arsip	22.000.000	PAD	Bpn	50	Arsip	24.200.000	PAD
2	2	0	2.05		Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang Dinyatakan Hilang	Presentase Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang	Bpn	20,00%	%	20.000.000	PAD	Bpn	25,00%	%	22.000.000	PAD
2	24	03	2.05	0003	Sub Keg Penetapan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) Yang Dilakukan Penetapan Dan Pengumuman	Bpn	2	Arsip	20.000.000	PAD	Bpn	2	Arsip	22.000.000	PAD
2	2	0			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Presentase Perizinan Penggunaan Arsip	Bpn	100,00%	%	12.000.000	PAD	Bpn	100,00%	%	13.200.000	PAD
2	2	0	2.01		Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Bpn	40,00%	%	12.000.000	PAD	Bpn	50,00%	%	13.200.000	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026								
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokas i	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
2	24	04	2.01	000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Bpn	20	Arsip	12.000.000	PAD	Bpn	20	Arsip	13.200.000	PAD
TOTAL						13.407.083.115		TOTAL					15.346.875.726			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.389.730.965	PAD
		2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	516.000.000	
		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.907.000	PAD
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	346.308.960	PAD
			5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	314.269.635	PAD
			6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.984.350	PAD
			7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.176.000	PAD
			8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.512.790	PAD
			9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	PAD
			2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	299.107.500
		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	675.900.800	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemerintahan Daerah	Sumber Daya Air dan Listrik		
			12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.027.905.488	PAD
		6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.744.850	PAD
			14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.485.300	PAD
			15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	218.384.917	PAD
			16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.852.000	PAD
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	132.999.800	PAD
			18. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	841.672.769	PAD
			19. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	216.485.000	PAD
			20. Sub Kegiatan Pengelolaan dan	286.424.000	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengembangan Bahan Perpustakaan		
			21. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000	PAD
		8. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	211.500.000	PAD
			23 Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	125.115.200	PAD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	9. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	24. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	140.482.010	PAD
			25. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	335.989.225	PAD
		10. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	26. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	131.569.550	PAD
		11. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	27. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	10.077.000	PAD
			28. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	199.497.056	PAD
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	12. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki	29. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di	17.000000	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Bawah 10 (sepuluh) Tahun		
		13. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	30. Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	10.000.000	PAD
		14. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	31. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	22.000.000	PAD
		15. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	32. Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	20.000.000	PAD
5.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	16. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	33. Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12.000.000	PAD

BAB V

PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja (RENJA) OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya di

antaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).

5. RENJA Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB).
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui Pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
5. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

S. RENCANA KERJA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara pembahasan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) DPPP tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Adapun penyusunan nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatannya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU RINomor 23 Tahun 2014.
4. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
6. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
7. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
9. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
10. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
11. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 01/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trwals) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005-2025.
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.
29. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
30. Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2 Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2025;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DPPP) berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas ditetapkan sebagai Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan. DPPP Kota Balikpapan pada tahun 2023 melaksanakan 3 urusan, 10 program, dan 21 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal

III. Program Penanganan Kerawanan Pangan

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

IV. Program Pengawasan Keamanan Pangan

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

VI. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan
- b. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan.

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- c. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

VII. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

2. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- a. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

VIII. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
- b. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil

IX. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- b. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (UPTD)

X. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota

- a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

2. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Pagu Anggaran DPPP Kota Balikpapan Tahun 2023 (murni) sebesar **Rp. 25.198.124.475,- (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).**

Berdasarkan dokumen APBD-P Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomer 16 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023, Pagu Anggaran Perubahan DPPP Kota Balikpapan menjadi sebesar **Rp. 26.498.124.475,- (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).** Perubahan dilakukan pada dana kegiatan – kegiatan yang dianggap prioritas untuk dilakukan penambahan.

Program dan Kegiatan DPPP Kota Balikpapan yang mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dari Rp. 750.000.000 menjadi Rp. 900.000.000
2. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dari Rp. 50.000.000 menjadi Rp. 425.000.000
3. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil dari Rp 150.000.000 menjadi Rp 175.700.000
4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dari Rp. 25.000.000 menjadi Rp. 650.000.000
5. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dari Rp. 74.928.000 menjadi Rp. 224.928.000

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan s/d Tahun 2023, berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2023 telah mencapai target yang telah direncanakan dengan level capaian target dalam rentang 80 – 100 % dengan level capaian antara tinggi hingga sangat tinggi. Tahun 2023 Realisasi Pekerjaan Fisik sebesar **99,82%** dengan Realisasi Keuangan DPPP sebesar **86,81 %** (level capaian dalam kategori Baik) . Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target Keuangan namun tercapai realisasi fisiknya seperti:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 85,67 %. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 60,91 %. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 51,47 %. Terdapat SILPA positif (Penghematan).
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100 % dan penyerapan anggaran hanya sebesar 83 %. Terdapat SILPA positif.
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 78,46 %. Terdapat SILPA karena ada alat yang tidak bisa diadakan yaitu mesin fotocopy, karena terkait TKDN.
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 86,60 %. Terdapat SILPA positif, karena terdapat sisa lelang.
7. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 73,46 %. Terdapat SILPA positif, karena sisa lelang.
8. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 85,44 %. Terdapat SILPA positif, karena sisa pengadaan barang.

9. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 79,31 %. Terdapat SILPA positif, karena sisa saat pengadaan barang.

10. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 75,18 %. Terdapat SILPA positif, karena sisa saat pengadaan barang dan penyediaan jasa.

11. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (UPTD)

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 83,67%. Terdapat SILPA positif, karena sisa lebih lelang.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2 pada Rencana Kerja ini.

**Tabel 2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota
Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan : 2023
TRIWULAN IV**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada sasaran RKPD Tahun 2023:

1. Skor Pola Pangan Harapan (87)
2. Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (10%)
3. Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari) (94,5%)
4. Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari) (100%)
5. Persentase keamanan pangan (89%)
6. Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan (17.800 ton)
7. Total Produksi Sub Sektor Hortikultura (126.600 ton)
8. Total Produksi Sub Sektor Perkebunan (10.193 ton)
9. Total Produksi sub sektor peternakan (20.600 ton)
10. Total Produksi Sub Sektor Perikanan (4.597 ton)
11. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (28)

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																				
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	%	72	17.451.389.100	-	3.298.505.023	-	4.394.804.732		3.543.369.218	75	4.013.177.675	75	15.249.856.648	104,2%	87,4%	DP3	Tercapai
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Point	72	13.250.000.000		2.623.177.542	-	3.677.420.242	-	2.512.466.216	77,9	2.538.844.806	77,9	11.351.908.806	108,2%	85,7%	DP3	Tercapai
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang bulan)	orang / bulan	1.120	13.250.000.000	186	2.623.177.542	298	3.677.420.242	195	2.512.466.216	190	2.538.844.806	869	11.351.908.806	77,6%	85,7%	DP3	Tidak tercapai
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Point	72	801.421.600	-	279.130.544	-	157.431.217	-	228.613.357	77,2	309.682.803	77,2	974.857.921	107,2%	121,6%	DP3	Tercapai
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Paket	1	49.982.000	1	-	-	49.348.000	-	-	-	-	1	49.348.000	100,0%	98,7%	DP3	Tercapai

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penang- gung Jawab	Ket
							I		II		III		IV							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Paket	5	76.445.000	-	-	5	32.350.000	-	39.312.000	-	3.570.000	5	75.232.000	100,0%	98,4%	DP3	Tercapai
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Paket	2	299.998.600	1	150.474.500	-	50.770.000	1	29.790.000	-	104.871.000	2	335.905.500	100%	112,0%	DP3	Tercapai
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Paket	2	50.000.000	-	-	1	-	-	25.476.000	1	23.965.000	2	49.441.000	100%	98,9%	DP3	Tercapai
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	dokumen	2	24.996.000	-	1.435.000	-	2.520.000	-	5.600.000	2	5.670.000	2	15.225.000	100%	60,9%	DP3	Tercapai
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	laporan	120	300.000.000	49	127.221.044	19	22.443.217	32	128.435.357	58	171.606.803	158	449.706.421	132%	150%	DP3	Tercapai
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	point	72	2.035.011.600	-	283.059.489	-	464.408.452	-	407.896.575	77,2	517.538.971	77,2	1.672.903.487	107,3%	82,2%	DP3	Tercapai
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Laporan	36	610.013.000	9	70.988.349	9	66.414.964	9	71.241.077	9	103.961.367	36	312.605.757	100%	51,2%	DP3	Tercapai
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Laporan	3	1.424.998.600	3	212.071.140	-	397.993.488	-	336.655.498	-	413.577.604	3	1.360.297.730	100%	95,5%	DP3	Tercapai
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	point	72	1.165.000.000	-	113.137.448	-	95.544.821	-	250.506.020	76,8	647.111.095	76,8	1.106.299.384	106,6%	95,0%	DP3	Tercapai

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penang-gung Jawab	Ket
							I		II		III		IV							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	unit	99	550.000.000	22	112.538.048	30	94.476.591	48	167.453.630	64	206.538.058	164	581.006.327	165,7%	105,6%	DP3	tercapai
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Unit	9	90.000.000	2	599.400	3	1.068.230	3	34.698.588	1	34.250.969	9	70.617.187	100,0%	78,5%	DP3	tercapai
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	unit	2	525.000.000	-	-	-	-	1	48.353.802	1	406.322.068	2	454.675.870	100%	86,6%	DP3	Tercapai
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Point	70	199.955.900	-	-	-	-	-	143.887.050	75,8	-	75,8	143.887.050	108%	72,0%		Tercapai
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	unit	6	99.998.500	-		6	-	-	98.074.050	-	-	6	98.074.050	100%	98,1%		tercapai
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	unit	5	99.957.400	-		5	-	-	45.813.000	-	-	5	45.813.000	100%	45,8%		Tercapai
2	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	0,053	533.250.000	-	742.750	-	41.892.397	-	60.782.052	0,170	130.147.215	0,170	233.564.414	320,8%	44%	DP3	Tercapai

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I		II		III		IV							
		Kegiatan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD	%	10	500.000.000	-	742.750	-	28.600.572	-	48.421.977	2%	123.507.044	2,0%	201.272.343	20%	40,3%	DP3	Blm tercapai, Karena Perda Pengelolaan CPPD belum terbit, maka dana pengadaan cadangan beras dialihkan utk sub kegiatan yang lebih prioritas
		Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	Ton	20	500.000.000	-	742.750	-	28.600.572	-	48.421.977	4	123.507.044	4	201.272.343	20%	40,3%	DP3	Blm tercapai
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;	Peningkatan konsumsi pangan umbi2an	kkal/pe rkapita/ hari	43	33.250.000	-	-	-	13.291.825	-	12.360.075	40,7	6.640.171	40,7	32.292.071	95%	97,1%	DP3	belum tercapai,
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	Laporan	4	33.250.000	2	-	2	13.291.825	-	12.360.075	-	6.640.171	4	32.292.071	100%	97,1%	DP3	Tercapai
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	55	100.000.000		5.868.282		3.636.750	-	1.430.000	100	84.516.468	100	95.451.500	182%	95,5%		Tercapai
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	dokume n	1	100.000.000		5.868.282	-	3.636.750	-	1.430.000	1	84.516.468	1	95.451.500	100%	95,5%		Tercapai

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
							I		II		III		IV							
		Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)	dokumen	1	100.000.000		5.868.282	-	3.636.750	-	1.430.000	1	84.516.468	1	95.451.500	100%	95,5%		Tercapai
3	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	%	89	196.000.000	-	9.483.688	-	20.432.782	-	83.320.696	100	62.998.794	100	176.235.960	112%	89,9%	DP3	Aman
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	%	89	196.000.000	-	9.483.688	-	20.432.782	-	83.320.696	100	62.998.794	100	176.235.960	112%	89,9%	DP3	tercapai
		Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	dokumen	2	196.000.000	-	9.483.688	-	20.432.782	-	83.320.696	2	62.998.794	2	176.235.960	100%	89,9%	DP3	tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN :																				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	4.300	875.000.000	1.028	7.885.000	1.128,8	28.449.230	923,6	95.619.059	1,227,4	665.445.207	4.308	797.398.496	100,2%	91%	DP3	tercapai
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang diberdayakan	nelayan	61	675.000.000	10	7.885.000	30	11.039.750	10	58.971.000	11	524.005.971	61	601.901.721	100%	89%	DP3	Tercapai
		sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	orang	50	650.000.000		6.865.000	-	10.019.750	30	56.931.000	20	506.005.971	50	579.821.721	100%	89%	DP3	Tercapai
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	Kelompok	6	25.000.000	-	1.020.000		1.020.000	6	2.040.000	-	18.000.000	6	22.080.000	100%	88%	DP3	Tercapai

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I		II		III		IV							
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	100%	200.000.000	-	-	-	17.409.480	-	36.648.059	100%	141.439.236	100%	195.496.775	100%	97,7%	DP3	Tercapai
		Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	layanan	2	200.000.000	-	-	-	17.409.480	-	36.648.059	2	141.439.236	2	195.496.775	100%	97,7%	DP3	Tercapai
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	297	1.224.982.375	109,8	8.903.688	77,54	153.364.732	73,4	336.712.907	96,7	392.121.003	357	891.102.330	120%	73%	DP3	Melampaui Target
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan	Pembudidaya	100	150.000.000	-	1.900.000	60	103.758.700	30	21.067.982	10	17.065.535	100	143.792.217	100%	96%	DP3	tercapai
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	kelompok	5	25.000.000	-	1.900.000	-	1.105.000	5	4.420.000	-	15.050.035	5	22.475.035	100%	90%	DP3	Tercapai
		Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (kelompok)	Kelompok	2	125.000.000	-	-	1	102.653.700	2	16.647.982	-	2.015.500	3	121.317.182	150%	97%	DP3	Tercapai
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	jenis	2	1.074.982.375	-	7.003.688	-	49.606.032	-	315.644.925	2	375.055.468	2	747.310.113	100%	70%	DP3	Tercapai
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	dokumen	12	50.000.000	3	-	3	1.666.500	3	30.402.750	3	17.424.000	12	49.493.250	100%	99%	DP3	Tercapai

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penang-gung Jawab	Ket
							I		II		III		IV							
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Unit	2	949.982.375	-	7.003.688	1	47.939.532	1	285.242.175	-	357.631.468	2	697.816.863	100%	73%	DP3	Tercapai
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (Ha)	hektar	1,8	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	DP3	tidak dilaksanakan, terkait blm ada kepastian luasan dr BKAD bidang aset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																				
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%	20%	1.225.000.000	-	49.803.696	-	140.145.207		243.483.066	44%	1.011.022.418	44%	1.444.454.387	220%	118%	DP3	tercapai
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan / penggunaan sarana pertanian	%	100%	1.075.000.000	-	45.436.150	30%	136.145.207	30%	127.236.278	30%	985.522.418	90%	1.294.340.053	90%	120%	DP3	Belum tercapai, ada bbrp sapras yang tdk termanfaatkan, spt Selang, pompa air (kebesaran)
		Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	laporan	3	900.000.000	-	44.089.950	-	92.925.711	-	127.236.278	3	619.179.554	3	883.431.493	100%	98%	DP3	Ketambahan Dana FCPF, Tercapai
		Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	laporan	3	175.000.000	-	1.346.200	-	43.219.496	-	-	3	366.342.864	3	410.908.560	100%	235%	DP3	Ketambahan Dana FCPF, tercapai
		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)	Ekor	225	150.000.000	59	4.367.546	51	4.000.000	55	116.246.788	66	25.500.000	231	150.114.334	103%	100%	DP3	tercapai

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penang- gung Jawab	Ket	
							I		II		III		IV							
		Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	laporan	2	150.000.000	-	4.367.546	1	4.000.000	-	116.246.788	1	25.500.000	2	150.114.334	100%	100%	DP3	tercapai
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang terlayani	%	70%	744.575.000	33%	5.521.630	41%	42.855.430	50%	407.128.287	219%	143.128.354	343%	598.633.701	490,6%	80%	DP3	tercapai
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	Ekor	3.300	500.000.000	1.102	4.011.146	1.341	36.390.250	1.658	307.879.430	3.933	48.258.510	8.034	396.539.336	243%	79%	DP3	melampaui target karena adanya wabah PMK dan rabies, sehingga hampir semua hewan ternak dan hewan kesayangan dilakukan vaksinasi masif
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	laporan	4	500.000.000	1	4.011.146	1	36.390.250	1	307.879.430	1	48.258.510	4	396.539.336	100%	79%	DP3	tercapai
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan yang dikelola	jenis	2	150.575.000	-	-	-	600.000	-	60.120.517	2	9.953.331	2	70.673.848	100%	47%	DP3	Tercapai
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	4	150.575.000	1	-	1	600.000	1	60.120.517	1	9.953.331	4	70.673.848	100%	47%	DP3	tercapai
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)	UPPH	22	94.000.000	-	1.510.484	-	5.865.180	-	39.128.340	22	84.916.513	22	131.420.517	100%	139,8%	DP3	Tercapai

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penang-gung Jawab	Ket	
							I		II		III		IV							
		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)	Laporan	4	94.000.000	1	1.510.484	1	5.865.180	1	39.128.340	1	84.916.513	4	131.420.517	100%	139,8%	DP3	Tercapai
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	%	45	947.928.000	-	67.037.386	-	84.669.942	-	510.144.481	50,7	254.740.676	50,7	916.592.485	112,7%	97%	DP3	Tercapai
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)	Laku	900	947.928.000	201	67.037.386	245	84.669.942	324	510.144.481	324	254.740.676	1.094	916.592.485	122%	97%	DP3	tercapai
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	unit	6	224.928.000	-	4.792.809	-	-	6	19.609.815	-	189.786.800	6	214.189.424	100%	95,2%		Tercapai
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	Unit	2	600.000.000	-	12.145.688	1	79.644.192	1	448.529.032	-	46.945.876	2	587.264.788	100%	97,9%		tercapai
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	unit	2	123.000.000	-	50.098.889	1	5.025.750	1	42.005.634	-	18.008.000	2	115.138.273	100%	51,2%		tercapai
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	75	2.950.000.000	-	24.703.970	-	253.609.297		880.904.879	150	1.440.098.331	150	2.599.316.477	200%	88%	DP3	tercapai
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	Unit	4	450.000.000			2	175.388.375	1	67.692.750	-	204.756.600	3	447.837.725	75%	100%	DP3	belum tercapai

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
						I	II	III	IV				
1.	Produksi Ubi kayu meningkat karena mutu intensifikasi tinggi, terutama pengolahan tanah dan pemupukan dilakukan sesuai anjuran dengan pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara instensif. Permintaan pasar meningkat maka petani banyak yang memanen hasilnya dan harga pasarannya pun bagus.												
2.	Tanaman sayuran daun mengalami peningkatan luas tanam terutama di wilayah kecamatan Balikpapan Timur meskipun terjadi kemarau selama 3 bulan												
3.	Produksi Buah-buah meningkat terutama buah naga, salak, cempedak, nangka dan durian, karena musim kemarau justru mengakibatkan tanaman mengalami fase generatif/pembuahan, dan juga serangan monyet sdh berkurang.												
4.	Kenaikan pada tanaman karet dan lada serta kelapa, karena harga karet dan lada cukup stabil												
5.	Budidaya ikan mulai bangkit lagi dengan adanya bantuan Saprasi Budidaya Berupa Bioflok, sehingga produksi perikanan budidaya pun berangsur-angsur ikut naik.												
6.	Adanya Pelatihan pembuatan Pestisida Nabati dalam penanggulangan hama dan penyakit tanaman												
7.	Bantuan-bantuan Alsi dari provinsi maupun pusat dan kota												
8.	Dampak Wabah PMK dan Rebias menyebabkan tingkat layanan di klinik dan puskesmas meningkat drastis												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :													
1.	Anggaran Belanja Beras CPPD dialihkan atau digeser ke sub kegiatan lain yang lebih prioritas karena hingga TW 4 Perda Pengelolaan CPPD blm terbit juga												
2.	Umbi-umbian masih dianggap makanan pendamping bukan makanan pokok dan juga masih kurangnya produk olahan turunan dari umbi-umbian												
3.	Kondisi cuaca mempengaruhi produktifitas Budidaya Rumput Laut dan juga jumlah penangkapan ikan di laut.												
4.	Kekurangan sumber air pada lahan2 pertanian												
5.	Tenaga kerja mahal sehingga dibutuhkan alsi yang banyak												
6.	SDM petani yang rata rata diatas 50 tahun dan kurangnya minat masyarakat untuk menjadi petani												
7.	Keterbatasan pupuk bersubsidi dan harga pupuk non subsidi yang semakin mahal												
8.	Serangan hama penyakit pada beberapa tanaman hortikultura												
9.	Modal usaha masih sangat terbatas, saprodi relatif mahal												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : memaksimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga selesai sesuai jadwal													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : berharap anggaran dapat menyesuaikan dengan Renstra atau Renja agar semua indikator bisa tercapai maksimal													
Disusun										Dievaluasi			
Balikpapan, 4 Januari 2024 Kepala Dinas ,										Balikpapan, 4 Januari 2024 Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
						I	II	III	IV				
Ir. Sri Wahjuningsih, M.AP						Murni, ST							

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :

1. Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 20 % dan capaian keuangan 40,3 %
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan tingkat capaian kinerja 95 % dan capaian keuangan 97,1 %.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian tingkat capaian kinerja 75 % dan capaian keuangan 100 %.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian tingkat capaian kinerja 100 % dan capaian keuangan 86 %.
- Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan tingkat capaian kinerja 75% dan keuangan 100 %

2. Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian tingkat capaian kinerja 100 % dan capaian keuangan 88 %.
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian kinerja 100,2 % dan capaian keuangan 91 %

3. Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan tingkat capaian kinerja 320,8 % dan capaian keuangan 44 %
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian kinerja 100,2 % dan capaian keuangan 91 %
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan tingkat capaian kinerja 220 % dan capaian keuangan 119 %
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan tingkat capaian kinerja 120% dan capaian keuangan 73%.
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan tingkat capaian kinerja 490,6% dan capaian keuangan 80%.
- PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN dengan tingkat capaian kinerja 112 % dan capaian keuangan 89,9 %

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan DPPP Kota Balikpapan

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan merupakan instansi teknis dan tidak memiliki SPM, sehingga capaian kinerjanya merupakan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tupoksinya.

TABEL T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Balikpapan

No.	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase penguatan cadangan pangan	100		9%	10%	12%	14%	7,5%	2%	8%	9%	
2	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)			94,5%	94,5%	94,5%	95%	95%	94,9%	95%	95%	
3	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)			100%	100%	100%	100%	115%	116%	100%	100%	
4	Persentase Keamanan Pangan			88%	89%	89%	90%	100%	100%	100%	100%	
5	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan			17.500	17.800	18.000	18.000	14.081	16.956	14.100	14.110	
6	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura			120.500	126.600	133.000	140.000	187.540	185.175	187.600	187.650	
7	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan			9.886	10.193	10.501	10.809	16.087	16.568	16.100	16.150	
8	Total Produksi Sub Sektor Peternakan			20.500	20.600	20.700	20.800	17.714	17.095	17.725	17.730	
9	Total Produksi Sub Sektor Perikanan			4.489	4.597	4.704	4.812	4.800	4.658	4.850	4.900	
10	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			27	28	29	30	27,41	28	28	29	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, capaian kinerja DPPP Kota Balikpapan secara keseluruhan tercapai, kecuali untuk IKK produksi sub sektor Tanaman Pangan dan Produksi sub sektor Peternakan. Beberapa IKK yang belum tercapai bisa menjadi tantangan untuk ditingkatkan tahun berikutnya.

Capaian kinerja tahun 2023 pada beberapa komoditi menurun cukup signifikan karena adanya faktor alam yang mempengaruhi panen serta budidaya pertanian/perikanan dan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi sarana publik lainnya seperti bendungan, pembangunan embung, pembangunan jalan tol dan perumahan.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan yang signifikan pada komoditas tanaman hortikultura (buah-buahan dan sayuran dataran rendah) dan tanaman perkebunan (karet, kelapa, lada).

Realisasi Produksi Padi mengalami penurunan, hal disebabkan karena adanya musim kemarau selama 4 bulan (elnino) sehingga tidak ada masa tanam pada bulan-bulan tersebut dan penurunan luas tanam beberapa komoditas palawija sehingga mempengaruhi jumlah produksi palawija.

Sedangkan produksi tanaman Kelapa dan lada pada tahun 2023 mengalami kenaikan produksi dibandingkan tahun 2022. Meskipun mengalami kenaikan namun harus diantisipasi ditahun mendatang. Hal ini disebabkan Produktifitas tanaman Perkebunan yang semakin turun karena kondisi tanaman Perkebunan yang sebagian besar diatas usia produktif, disisi lain semakin menurunnya luasan lahan kebun tanaman perkebunan karena kurang berminatnya pekebun usia muda untuk meneruskan lahan kebun yang sudah ada.

Produksi Daging Sapi dan telur tahun 2023 mengalami penurunan, antara lain karena masuknya produk daging beku dan dijual di pasar tradisional dengan harga dibawah daging segar dari RPH, serta peternak ayam petelur semakin berkurang di Kota Balikpapan, dikarenakan harga pakan yang melonjak naik, sehingga membuat mereka menghentikan usahanya.

Pada Produksi Perikanan Tangkap mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan karena proses subsidi BBM bagi nelayan yang berjalan sesuai prosesnya.

Untuk Perikanan Budidaya juga mencapai angka target, hal ini disebabkan oleh mulai menggeliatnya pembudidaya rumput laut dan juga usaha ikan budidaya kolam.

Walaupun demikian dengan adanya Peraturan Menteri (Permen-KP) No. 1 Tahun 2015, pembudidaya kepiting Soka banyak yang stop melakukan budidaya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DPPP, kajian hasil evaluasi pelaksanaan DPPP, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra DPPP, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPP. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPP, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPP berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPPP. Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi pertanian dan pangan daerah masih belum mantap, terutama karena produksi komoditas pertanian, pangan dan perkebunan terkendala penurunan luas lahan pertanian secara terus menerus.
- b. Produk hasil pertanian, pangan dan perkebunan kurang berdaya saing dalam perdagangan bebas.
- c. Belum stabilnya tingkat peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan hortikultura.
Beberapa penyebab ketidakstabilan peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas produksi tanaman pangan dan hortikultura adalah :
 - Sumber Daya Manusia (SDM) petani yang belum sepenuhnya dapat mengadopsi teknologi pertanian.
 - Anomali iklim yang tidak dapat diprediksi
 - Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan
- d. Ketersediaan Pangan
Dengan adanya kecenderungan alih fungsi lahan yang semakin meningkat, sementara permintaan akan bahan pangan terus meningkat, dikhawatirkan terjadi penurunan cadangan pangan masyarakat. Maka perlu adanya rumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan melalui program-program yang telah direncanakan seperti Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Kegiatan Penganekaragaman Pangan dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.
- e. Ketersediaan atau jumlah populasi ternak masih kurang memadai.
- f. Ketersediaan pakan ternak sapi dan kambing masih kurang memadai.
- g. Resiko kesehatan hewan dan ternak masih rawan.
- h. Produktivitas budidaya perikanan masih belum optimal.
- i. Tingginya ketergantungan penyediaan bahan pangan dari daerah-daerah pemasok.
- j. Konsumsi dan Keamanan Pangan
- k. Ketergantungan konsumsi pada satu jenis pangan pokok terutama beras, merupakan salah satu titik rawan ketahanan pangan nasional, yang sampai saat ini mindset masyarakat adalah beras sebagai makanan pokok.
- l. Keanekaragaman produk pangan berbasis sumberdaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dan teknologi pengelolaan pangan lokal masih sangat terbatas. Keragaman produk pangan dengan citarasa yang menarik sangat terbatas serta kurangnya jaminan.
- m. Keamanan produk pangan.

2.3.1. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan DPPP Kota Balikpapan

Seiring dengan dinamika perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, maka DPPP Kota Balikpapan menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar dan memanfaatkan peluang yang ada dalam melaksanakan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan kota. Oleh sebab itu, DPPP Kota Balikpapan harus meningkatkan perannya dalam pembangunan tersebut dalam koridor tupoksinya yang telah ditetapkan.

Tantangan

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh DPPP Kota Balikpapan terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, antara lain :

- a. Terbatasnya tenaga teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- b. Kurangnya staf yang memiliki kemampuan teknis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- c. Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang telah berubah /alih fungsi menjadi sarana publik lainnya.
- d. Kurangnya ketersediaan peralatan dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik untuk budidaya, panen, pasca panen maupun perikanan.
- e. Kurangnya prasarana pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Peluang

- a. Penambahan tenaga teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan setara diploma III (D III) dan strata 1 (S1), terutama dalam bidang perencanaan program dan pengolahan data.
- b. Perlunya dilakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui bimtek, pelatihan dan sebagainya.
- c. Perlunya penambahan staf untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan, perbendaharaan dan perencanaan program.
- d. Penambahan peralatan dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- e. Intensifikasi pertanian dengan memanfaatkan luas lahan yang tersedia.

2.3.2. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsinya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

No.	URUSAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Belum Optimalnya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Penguatan Penyediaan CPPD
2	PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terbatasnya Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)
			Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
		Kekurangan sumber air pada lahan2 pertanian	Pengadaan embung-embung mini
		Mahal dan terbatasnya tenaga kerja pertanian	dibutuhkan alsintan yang banyak
		Keterbatasan pupuk bersubsidi dan harga pupuk non subsidi yang semakin mahal	Beralih kepada kompos dan pupuk organik (padat & cair)
3	PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Meningkatkan Saprass Balai Benih Ikan (BBI)
			Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan . Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	22.247.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	22.247.000.000	
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Balikpapan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0.110%	605.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Balikpapan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0.110%	605.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Balikpapan	Persentase Infrastruktur yang tersedia	35%	150.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Balikpapan	Persentase Infrastruktur yang tersedia	35%	150.000.000	
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Balikpapan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	65%	65.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Balikpapan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	65%	65.000.000	
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Balikpapan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	90%	300.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Balikpapan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	90%	300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	55%	480.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	55%	480.000.000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Balikpapan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	312 ton	1.645.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Balikpapan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	312 ton	1.645.000.000	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Balikpapan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4500 ton	825.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Balikpapan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4500 ton	825.000.000	
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	30%	1.200.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	30%	1.200.000.000	
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85%	1.200.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Balikpapan	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85%	1.200.000.000	
11	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Balikpapan	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	80%	750.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Balikpapan	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	80%	750.000.000	
12	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULA	Balikpapan	Persentase Luas Lahan pengendalian dan	55%	75.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULA	Balikpapan	Persentase Luas Lahan pengendalian dan	55%	75.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	NGAN BENCANA PERTANIAN		penanggulangan bencana pertanian			NGAN BENCANA PERTANIAN		penanggulangan bencana pertanian			
13	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Balikpapan	Presentase Rekomendasi yang Diterbitkan	65%	45.000.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Balikpapan	Presentase Rekomendasi yang Diterbitkan	65%	45.000.000	

Rancangan awal RKPD tahun 2025 dibuat berdasarkan rencana strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2021-2026 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD.

Pada rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada tahun 2025 dan upaya pencapaiannya melalui program dan kegiatan. Dengan melihat hasil evaluasi tahun 2023, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan tahun 2025 yang lebih realistis untuk mencapai target-target tersebut. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan terdiri atas 12 program, 22 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan dan kecamatan dilakukan penjaringan aspirasi dan usulan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap program dan kegiatan tahun 2025. Hasil yang dikumpulkan menunjukkan terdapat usulan kegiatan dari seluruh kecamatan di Kota Balikpapan memberikan usulannya untuk program dan kegiatan urusan pertanian dan perikanan. Usulan yang masuk sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 sebanyak 15 (lima belas) usulan Masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Usulan Masyarakat
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK RENJA 2025
KOTA BALIKPAPAN

No.	USULAN	MASALAH	ALAMAT/LOKASI	KELURAHAN	PENGUSUL	Catatan
1	Pengembangan Urban Farming atau Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka kemandirian/ketahanan pangan keluarga/masyarakat	perlu pendampingan untuk warga akan menanam di halaman rumah	Jl. Jendral Sudirman	Damai, Balikpapan Selatan	Kanti Suharjo	
2	Penyuluhan keamanan pangan bagi industri rumah tangga pangan sebagai salah satu pemenuhan komitmen sertifikat PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga)	Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Sertifikat PIRT	Kelurahan Gunung Sari Ulu ,Balikpapan Kota	Gunung Sari Ulu, Balikpapan Kota	Rendra Hermawan	
3	Pelatihan Perikanan Budidaya	Peningkatan pengetahuan anggota, Katana, RT, peningkatan ketahanan pangan	Kelurahan Lamaru	Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur	Hikmatullah Hardian	
4	Pengembangan Urban Farming atau Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka kemandirian/ketahanan pangan keluarga/masyaraka	Pelatihan/pendampingan urban farming, P2L dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman sumber pangan sebagai upaya kemandirian/ketahanan pangan keluarga/masyarakat	Kelurahan Mekar Sari	Kelurahan Mekar Sari, Balikpapan Tengah	EVI NURHARYANTI	
5	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian / Perlengkapan Pembibitan	Direncanakan akan dibentuk kelompok Tani (Kampung Madu Berseri) oleh RT.11,RT.17,RT.27 sehingga diperlukan wadah untuk menambah pengetahuan kelompok tersebut terkait	Jl.RE Martadinata RT.11,RT.17, dan RT.27	Kelurahan Mekar Sari, Balikpapan Tengah	EVI NURHARYANTI	

No.	USULAN	MASALAH	ALAMAT/LOKASI	KELURAHAN	PENGUSUL	Catatan
		dengan kewirausahaan di bidang pertanian				
6	Pelatihan Perikanan Budidaya	perlu pelatihan bagi para nelayan	Jl. jendral sudirman rt 16	Damai, Balikpapan Selatan	Kanti Suharjo	
7	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Perikanan Budidaya di Wilayah Kelurahan Muara Rapak	Wilayah Kelurahan Muara Rapak	Muara rapak, Balikpapan Utara	Bima Wibisono	
8	Pelatihan Perikanan Budidaya	perlunya pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan kolam ikan di pengelolaan GWM RT 13	GWM RT 13	Kariangau, Balikpapan Barat	SINGGIH AJI WIBOWO	
9	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian / Perlengkapan Pembibitan	KURANGNYA PUPUK DAN BIBIT	GANG 7 RT. 36	Manggar, Balikpapan Timur	MUNIR ACHMAD	
10		AREA TIDAK ASRI (25 TITIK)	RT. 84	Manggar, Balikpapan Timur	MUNIR ACHMAD	
11	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	UNTUK MEMPERTAHANKAN ILMU PERTANIAN (6 ORANG)	RT. 84	Manggar, Balikpapan Timur	MUNIR ACHMAD	
12	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	teknis kelompok tani	Kelompok Tani Kelurahan Teritip	Teritip, Balikpapan Timur	SHELI SEFTIANA NINGRUM	
13	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian / Perlengkapan Pembibitan	Perlunya peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyerahan bibit ikan untuk meningkatkan kapasitas produksi	Kelompok warga RT 13,	Kariangau, Balikpapan Barat	SINGGIH AJI WIBOWO	
14		Perlunya bibit lombok untuk kelompok GWM	Kelompok warga RT 13,	Kariangau, Balikpapan Barat	SINGGIH AJI WIBOWO	

No.	USULAN	MASALAH	ALAMAT/LOKASI	KELURAHAN	PENGUSUL	Catatan
15		Peningkatan ekonomi bagi GWM sehingga dibutuhkan pupuk untuk tanaman lombok	GWM Kariangau	Kariangau, Balikpapan Barat	SINGGIH AJI WIBOWO	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Melihat kapasitas anggaran yang ada pada tahun 2024, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan nasional dalam RKP berorientasi pada pendekatan *money follows program*, atau meninggalkan budaya pembangunan berorientasi *money follow function*.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Dinas Pangan dan Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Kalimantan Timur.

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah :

“Penguatan Fondasi Transformasi “

Sedangkan tema pembangunan untuk provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah :

“Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi yang Didukung dengan Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Berdaya Saing”

Dan Tema Pembangunan untuk Kota Balikpapan di Tahun 2025 adalah :

“Pengembangan Seluruh Sektor Untuk Pemanjangan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”

Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan ***Money Follow Program***.

Money Follow Program maksudnya bahwa Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat *incremental*, sekedar penambahan proposional atau *Business As Usual* tetapi sebaliknya benar – benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam.

Holistik (Perencanaan yang menyeluruh), **Tematik** (Jelas dan Focus apa yang mau di bangun), **Terintegrasi** (Menerobos adanya ego sektoral) dan **Spasial** (Ke daerahan atau Ke wilayahan).

Prioritas yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian adalah ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian, sedangkan prioritas yang terkait langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan produksi perikanan .

Tema prioritas ketahanan pangan adalah peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian dan peningkatan pendapatan petani.

Strategi pembangunan pertanian yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian adalah melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan Tujuh Gema Revitalisasi yang terdiri atas 1) lahan, 2) perbenihan dan pembibitan, 3) infrastruktur dan sarana, 4) sumber daya manusia, 5) pembiayaan petani, 6) kelembagaan petani, dan 7) teknologi dan industri hilir.

Target utama Kementerian Pertanian adalah :

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Kebijakan dan strategi ini di tuangkan dalam 12 program yaitu :

1. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.
2. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan.
3. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman perkebunan berkelanjutan.
4. Peningkatan swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal.
5. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
6. Penyediaan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian.
7. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
8. Penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing.
9. Pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani.
10. Peningkatan kualitas perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
11. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementrian Pertanian.
12. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian.

Tema pembangunan nasional yang diangkat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025) “ **Penguatan Fondasi Transformasi** “

1. PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. PN 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. PN 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. PN 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. PN 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. PN 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, sampai tahun 2023 berupaya untuk mendukung terlaksananya prioritas Pembangunan Nasional, khususnya Prioritas 1 ”Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” yaitu pada program nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, serta ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Program nasional lainnya yang masih terus dijalankan yaitu UPSUS Pajale (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedele) dalam rangka swasembada pangan dan SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yang merupakan upaya pemerintah meningkatkan populasi sapi melalui kegiatan optimalisasi reproduksi, menjadikan sapi dan kerbau sebagai komoditas andalan dalam menyediakan pangan hewani secara mandiri untuk seluruh negeri.

Untuk mendukung SIKOMANDAN, kegiatan yang direncanakan yaitu peningkatan produktivitas ternak, peningkatan akseptor inseminasi buatan, penguatan pakan, serta peningkatan kesehatan hewan. Sedangkan untuk mengembangkan kompetensi SDM pertanian, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan pada program kegiatan tahun 2023 akan terus fokus pada pelatihan-pelatihan baik kepada petani maupun penyuluh pertanian. Selain itu pada tahun 2023 juga akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat generasi milenial terhadap sektor pertanian sebagai upaya regenerasi sumber daya manusia pertanian.

Beberapa isu strategis bidang kelautan dan perikanan lima tahun ke depan yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia antara lain masih adanya kegiatan ilegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) dan destructive fishing, perbaikan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan, daya saing sumber daya manusia, inovasi teknologi dan riset, serta pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan.

Lima tahun ke depan, arah kebijakan di bidang kelautan dan perikanan adalah membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, kita akan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Tak kalah penting, meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, KKP akan terus mengembangkan sistem rantai dingin terutama di sentra-sentra produksi dan daerah pinggiran. “Untuk memperkuat daya saing industri perikanan, kita perlu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, standardisasi mutu, sertifikasi, dan kepatuhan. Kita juga perlu membangun sistem rantai dingin dan sistem logistik serta meningkatkan akses pasar terutama untuk meningkatkan nilai dan volume ekspor produk perikanan.

Dalam hal memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan, KKP akan melakukan pengembangan industri dan jasa kelautan. Meningkatkan produktivitas garam rakyat, mendorong investasi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta melanjutkan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu merupakan beberapa prioritas yang akan dilakukan.

Muara dari semua jenis program dan intervensi pembangunan yang dilakukan oleh KKP adalah mewujudkan kesejahteraan stakeholders. Untuk itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kelembagaan pelaku usaha dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi mereka. Untuk mencapainya, dibutuhkan pengembangan kewirausahaan dan perluasan jangkauan penyaluran dana kelolaan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP).

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 adalah :

PP 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non migas dan Batubara, terutama pada hilirisasi industry.

PP 2. Peningkatan daya saing sumberdaya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja.

PP 3. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan Kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya.

PP 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar.

PP 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada Masyarakat miskin.

PP 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

PP 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public.

PP 8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tabel 4. Posisi DPPP Dalam RPJMD 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	OPD
Misi ke-5	Tujuan ke-6	Sasaran ke-2		
Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar : - Pangan Urusan Pilihan - Pertanian - Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)

Adapun **tujuan** yang akan dicapai dalam rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan pemenuhan kecukupan bahan pangan di masyarakat;
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian untuk kesejahteraan petani;
3. Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan , peternakan, dan perikanan

Sasaran Rencana Kerja tahun 2025 yaitu :

1. Bertambahnya sentra komoditas unggulan, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah;
2. Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan pokok di masyarakat;
3. Tercapainya nilai tambah produk pertanian untuk peningkatan pendapatan petani;

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

VISI	"Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman"			
MISI	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan - Memperkuat cadangan pangan daerah - Melaksanakan pemantauan daerah rawan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Pelaksanakan Penanganan Kerawanan Pangan - Pelaksanakan pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 	
	2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan diversifikasi dan ketahanan pangan - Pembinaan dan pengembangan pangan lokal dan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan diversifikasi pangan alternatif - Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi; 	
		Melakukan survey, data Susenas dan BPS	Pelaksanakan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun.	
		Melaksanakan Pengujian Sampel Pangan	Pelaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan	
	3. Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian - Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 	
		Melaksanakan Penyediaan dan pengembangan Sarana Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana pertanian 	
		Pemberdayaan kelompok usaha tani, ternak dan nelayan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan Pertanian - Perizinan Usaha Pertanian 	
		Meningkatkan produksi perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya dan perikanan tangkap	
		4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan anggaran serta meningkatkan kualitas penunjang urusan pemerintah daerah

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan kegiatan adalah cara untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disusun sebagaimana pembahasan tersebut di atas. Program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif merupakan cara untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja DP3 tahun 2025. Oleh sebab itu, program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil, sebagai penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan oleh DP3 Kota Balikpapan dalam Renja Tahun 2025 berdasarkan Permendagri No 90 tahun 2019, kemudian disempurnakan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan disempurnakan lagi dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan pada tahun 2025 melaksanakan **3 urusan, 12 program, 22 kegiatan dan 39 sub kegiatan.**

Tabel 6. Rencana Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

Kota Balikpapan

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PENUNJANG URUSAN									
X XX 01	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	73	20.982.000.000	APBD KOTA		74	23.568.000.000
X XX 01 202	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		74	16.000.000.000			75	16.500.000.000
X XX 01 202 01	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang bulan)		- 4 orang Rp 16.000.000.000 - 1 paket - 14 bulan 1120	16.000.000.000		- 4 orang Rp 16.500.000.000 - 1 paket - 14 bulan 1.120		16.500.000.000
X XX 01 206	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		74	Rp1.104.850.000	APBD KOTA		75	Rp 1.685.000.000
X XX 01 206 01	2.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan (paket)	Balikpapan	- 4 orang 27.000.000 -1 paket - 12 bulan 1 paket	Rp 27.000.000	APBD KOTA	- 6 orang - Rp 100.000.000 -1 paket - 12 bulan 1 paket		Rp 100.000.000

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 206 02	2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Balikpapan	- 4 orang 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 5 paket	Rp 100.000.000	APBD KOTA		- 5 orang 500.000.000 - 1 paket - 12 bulan 5 paket	Rp 500.000.000
X XX 01 206 04	2.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Balikpapan	- 120 pegawai 433.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 paket	Rp 433.000.000	APBD KOTA		- 120 pegawai Rp 500.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 paket	Rp500.000.000
X XX 01 206 05	2.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Balikpapan	- 4 orang 70.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 paket	Rp 70.000.000	APBD KOTA		- 5 orang 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 paket	Rp 100.000.000
X XX 01 206 06	2.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana	Balikpapan	- 4 orang 24.850.000 - 1 paket	Rp 24.850.000	APBD KOTA		- 5 orang - Rp 35.000.000 - 1 paket	Rp 35.000.000

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Waktu Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)		- 12 bulan 3 dokumen				- 12 bulan 3 dokumen	
X XX 01 206 09	2.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Balikpapan	- 120 orang - Rp 450.000.000 - 1 paket - 12 bulan 120 laporan	Rp 450.000.000	APBD KOTA		- 120 orang - Rp 450.000.000 - 1 paket - 12 bulan 120 laporan	Rp 450.000.000
X XX 01 207	3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		72	Rp 299.898.000			73	Rp400.000.000
X XX 01 207 05	3.1 Pengadaan Mebel	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)		4 orang Rp 58.035.600 - 1 paket - 12 bulan 1 paket	Rp 58.035.600			- 5 orang - Rp 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 jenis	Rp 200.000.000
X XX 01 207 06	3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :		4 orang Rp 241.862.400 - 1 paket - 12 bulan	Rp 241.862.400			- 5 orang - Rp 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 200.000.000

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 208	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit) IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 unit 74	2.242.000.000			1 unit 75	3.008.000.000
X XX 01 208 01	4.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Balikpapan	- 4 orang 7.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 laporan	Rp 7.000.000			- 5 orang 8.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 laporan	Rp 8.000.000
X XX 01 208 02	4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		- 4 orang Rp 450.000.000 - 5 bidang, 1 sekretariat, 1 UPTD, BBI dan 2 BPP - 12 bulan 36	Rp 450.000.000			- 3 orang Rp 1.000.000.000 5 bidang, 1 sekretariat, 1 UPTD, BBI dan 2 BPP - 12 bulan 36	1.000.000.000
X XX 01 208 04	4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)		- 4 orang - Rp 1.785.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan (kebersihan, keamanan, Naban)	Rp1.785.000.000			- 7 orang 2.000.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan (kebersihan, keamanan, Naban)	2.000.000.000

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 02	II PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur yang tersedia		35%	Rp 0			40%	Rp 200.000.000
2 09 02 2.01	6 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis infrastruktur yang tersedia		3 jenis	Rp 0			3 jenis	Rp 200.000.000
2 09 02 2.01 03	6.1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (unit)		- 0 orang Rp 0 - 0 paket - 0 bulan 1 unit	Rp 0			- 3 orang - Rp 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 unit	Rp 200.000.000
2 09 03	III PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		0,110%	Rp 800.000.000			0,143%	Rp 750.000.000
2 09 03 2.02	7 Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD		14%	Rp 600.000.000			16%	Rp 500.000.000
2 09 03 2.02 03	7.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana		- 3 orang Rp 600.000.000	Rp 600.000.000			- 15 orang Rp 500.000.000	Rp500.000.000

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 03 2.04	8	- Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton) Peningkatan konsumsi pangan umbi2an		- 1 paket - 12 bulan 25 ton 46 kkal / perkapita /hari				- 1 paket - 12 bulan 35 Ton 47 kkal/perkapita/hari	
2 09 03 2.04 02	8.1	Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)			Rp 200.000.000 Rp 200.000.000				Rp250.000.000 Rp250.000.000
2 09 04	IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		65%	Rp 65.000.000			70%	Rp 75.000.000
2 09 04 2.01	9	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		1 dokumen	Rp 65.000.000			1 dokumen	Rp 75.000.000
2 09 04 2.01 01	9.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu			Rp 65.000.000				Rp 75.000.000
				- 3 orang Rp 65.000.000 - 1 paket - 12 bulan				- 3 orang - Rp 75.000.000 - 1 paket - 12 bulan	

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 05	V PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Output : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)	Balikpapan	1 dokumen				1 dokumen	
2 09 05 2.01	10 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman		90%	Rp 300.000.000			90%	Rp 350.000.000
2 09 05 2.01 05	10.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa		90%	Rp 300.000.000			90%	Rp 350.000.000
		Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu		- 3 orang Rp 300.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 300.000.000			- 5 orang - Rp 350.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp350.000.000
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)		2 dokumen				2 dokumen	
3 25 03	URUSAN PERIKANAN VI PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	balikpapan	4500	Rp 675.000.000			4600 ton	Rp 1.000.000.000
3 25 03 2.02	11 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)		64 kelompok	Rp 325.000.000			66 kelompok	Rp 400.000.000
3 25 03 2.02 01	11.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Input :		- 5 orang Rp 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 200.000.000			- 5 orang - Rp 250.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp250.000.000
		Output :							

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 25 03 2.02 02	11.2 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)		50 - 5 orang Rp 125.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 kelompok	Rp 125.000.000			50 - 5 orang - Rp 150.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 kelompok	Rp150.000.000
3 25 03 2.03	12 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional		100%	Rp 350.000.000			100%	Rp 600.000.000
3 25 03 2.03 02	12.1 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)		- 5 orang Rp 350.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2	Rp 350.000.000			- 5 orang - Rp 600.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2	Rp600.000.000
3 25 04	VII PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2020 : 275 ton	312	Rp 1.440.000.000			319	Rp 1.325.000.000
3 25 04 2.02	13 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan		130 pembudidaya	Rp 185.000.000			140 pembudidaya	Rp 200.000.000
3 25 04 2.02 02	13.1 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :		- 5 orang Rp 60.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 60.000.000			- 5 orang Rp 75.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 75.000.000

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 25 04 2.02 04	13.2 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (kelompok) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (kelompok)	baltim, balut	5 kelompok	Rp 125.000.000			5 kelompok	Rp 125.000.000
3 25 04 2.04	14 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	baltim, balut	2 kelompok				2 kelompok	
3 25 04 2.04 01	14.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)		2 jenis	Rp 1.255.000.000			2 jenis	Rp 1.125.000.000
3 25 04 2.04 02	14.2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :		- 5 orang Rp 55.000.000 - 1 paket - 12 bulan 12 dokumen	Rp 55.000.000			- 5 orang Rp 75.000.000 - 1 paket - 12 bulan 12 dokumen	Rp 75.000.000
		Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :		- 5 orang Rp 1.150.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 1.150.000.000			- 5 orang - Rp 1.300.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 1.000.000.000

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 25 04 2.04 05	14.3 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	balikpapan	2 unit - 5 orang Rp 50.000.000 - 1 paket - 12 bulan 140 orang	Rp 50.000.000			2 unit - 5 orang - Rp 50.000.000 - 1 paket - 12 bulan 150 Pembudidaya	Rp 50.000.000
URUSAN PERTANIAN									
3 27 02	VIII PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sarana Pertanian yang tersedia</i>		30%	Rp1.045.000.000			35%	Rp 1.350.000.000
3 27 02 2.01	15 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Persentase pemanfaatan /penggunaan sarana pertanian</i>		100%	Rp 945.000.000		150.000	100%	Rp 1.100.000.000
3 27 02 2.01 01	15.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)		- 4 orang Rp 695.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	695.000.000			- 4 orang Rp 900.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	Rp900.000.000
3 27 02 2.01 02	15.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana		- 4 orang Rp 150.000.000 - 1 paket	Rp 250.000.000			- 4 orang Rp 200.000.000 - 1 paket	Rp200.000.000

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 02 2.03	16 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Waktu Output : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan) <i>Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)</i>		- 12 bulan 3 laporan 280	Rp 100.000.000			- 12 bulan 3 laporan 300	Rp250.000.000
3 27 02 2.03 01	16.1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	Balikpapan	- 7 orang Rp 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 laporan	Rp 100.000.000			- 7 orang Rp 250.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 laporan	Rp250.000.000
3 27 03	IX PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia		85%	Rp1.435.000.000			90%	Rp 1.500.000.000
3 27 03 2.01	17 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian		4 unit	Rp 180.000.000			4 unit	Rp300.000.000
3 27 03 2.01 01	17.1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :		- 3 orang Rp 180.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp 180.000.000			- 3 orang - Rp 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp300.000.000

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 03 2.02 3 27 03 2.02 07	18 dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Pembangunan Prasarana Pertanian 18.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 18.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen) Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		1 dokumen 2 unit	Rp1.255.000.000 Rp1.200.000.000			1 dokumen 2 unit	Rp 1.200.000.000 1.200.000.000
				- 10 orang Rp 1.200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 unit			Rp. 55.000.000		- 10 orang - Rp 1.000.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 unit
				- 10 orang - Rp. 55.000.000 - 1 paket - 3 bulan 1 unit				- 0 orang - Rp. 0 - 0 paket - 0 bulan 1 unit	

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 04	X PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani		80%	Rp 800.000.000			85%	Rp900.000.000
3 27 04 2.01	19 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)		3450	Rp 500.000.000			3550	Rp650.000.000
3 27 04 2.01 01	19.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)		- 10 orang Rp 550.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4	Rp 500.000.000			- 10 orang Rp 650.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4	Rp650.000.000
3 27 04 2.04	20 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)		26 unit	Rp 300.000.000			28 Unit	Rp250.000.000
3 27 04 2.04 02	20.1 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)		- 4 orang Rp 200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4	Rp 300.000.000			- 4 orang -Rp 250.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4	Rp250.000.000

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 05	XI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		55%	Rp 110.000.000			60%	Rp100.000.000
3 27 05 2.01	21 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		300 Ha	Rp 110.000.000			300 ha	Rp100.000.000
3 27 05 2.01 01	21.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Balikpapan	- 4 orang Rp 75.000.000 - 1 paket - 12 bulan 300 Ha	Rp 110.000.000		- 4 orang Rp 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 300 ha	Rp100.000.000	
3 27 06	XII PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Rekomendasi yang Diterbitkan		65%	Rp 45.000.000			70%	Rp 60.000.000
3 27 06 2.01	22 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian (rekomendasi)		50	Rp 45.000.000			50	Rp 60.000.000
3 27 06 2.01 03	22.1 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)	Balikpapan	- 4 orang Rp 45.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	Rp 45.000.000		- 4 orang Rp 60.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	Rp 60.000.000	

Kode Program /Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 07	XIII PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	Balikpapan	55%	Rp 480.000.000			60%	Rp575.000.000
3 27 07 2.01	23 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)		1000 Laku (latihan dan kunjungan)	Rp 885.000.000			1000 laku (latihan dan kunjungan)	Rp575.000.000
3 27 07 2.01 02	23.1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)		- 60 orang Rp 75.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 unit	Rp 75.000.000			- 60 orang - Rp 75.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 kelompok	Rp 75.000.000
3 27 07 2.01 03	23.2 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)		- 15 orang Rp 350.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	Rp 750.000.000			- 25 orang - Rp 350.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	Rp500.000.000
3 27 07 2.01 05	23.3 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)		- 60 orang Rp 55.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2	Rp 60.000.000			- 60 orang Rp 75.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2	Rp 75.000.000
					28.582.000.000				31.653.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pembiayaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan pada tahun 2025 melaksanakan **3 urusan, 12 program, 22 kegiatan dan 39 sub kegiatan** dengan rincian sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Kegiatan Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Umum

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

II. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota

2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal.

III. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

IV. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

2. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

VI. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

VII. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

VIII. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

IX. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

X. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota.

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

XI. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

XII. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Adapun mapping program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap Isu Pembangunan bisa kita lihat pada table dibawah ini :

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	9	1			I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74 point	22.247.000.000						X
2	9	1	202		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74 point	16.000.000.000						X
2	9	1	202	1	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang bulan)	- 4 orang Rp16.000.000.000 - 1 paket - 14 bulan	16.000.000.000						X
X	XX	1	206		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74 point	1.104.850.000						X
X	XX	1	206	1	2.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang Disediakan (paket)	- 4 orang Rp 27.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 paket	27.000.000						X
X	XX	1	206	2	2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :	- 4 orang Rp100.000.000 - 1 paket - 12 bulan	100.000.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	XX	1	206	4	2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	5 paket 433.000.000						X
X	XX	1	206	5	2,4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	2 paket 70.000.000						X
X	XX	1	206	6	2,5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2 paket 24.850.000						X
X	XX	1	206	9	2,6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana	3 dokumen 450.000.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	XX	1	207		3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Waktu Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- 12 bulan 120 laporan 72	299.898.000						X
X	XX	1	207	5	3,1 Pengadaan Mebel	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	- 4 orang Rp58.035.600 - 1 paket - 12 bulan 1 paket	58.035.600						X
X	XX	1	207	6	3,2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	- 4 orang Rp241.862.400 - 1 paket - 12 bulan 4 unit	241.862.400						X
X	XX	1	208		4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74 point	2.242.000.000						X
X	XX	1	208	1	4.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu	- 4 orang Rp7.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp7.000.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	XX	1	208	2	4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	2 laporan - 4 orang Rp450.000.000 - 5 bidang, 1 sekretariat, 1 UPTD, BBI dan 2 BPP - 12 bulan	Rp450.000.000						X
X	XX	1	208	4	4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	36 - 4 orang Rp1.785.000.000 - 1 paket - 12 bulan	1.785.000.000						X
X	XX	1	209		5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	1.335.252.000						X
X	XX	1	209	2	5,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Input : - SDM - Dana	3 laporan (kebersihan, keamanan, Naban) - 4 orang Rp1.090.252.000	1.090.252.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	XX	1	209	6	5,2 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	- 1 paket - 12 bulan 60 - 4 orang Rp225.000.000 - 1 paket - 12 bulan 9 unit	245.000.000						X
2	9	3			II PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,110%	800.000.000						X
2	9	3	202		6 Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD	14%	Rp600.000.000						X
2	9	3	202	3	6,1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	-5 orang Rp 600.000.000 - 1 paket - 12 bulan 25 ton	Rp600.000.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	9	3	204		7 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;	Peningkatan konsumsi pangan umbi2an	46 kkal/perkapita/hari	200.000.000						X
2	9	3	204	2	7,1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	- 3 orang Rp200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4 laporan	Rp200.000.000						X
2	9	4			III PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	65%	65.000.000						X
2	9	4	201		8 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 dokumen	65.000.000						X
2	9	4	201	1	8,1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)	- 3 orang Rp65.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 dokumen	Rp65.000.000						X
2	9	5			IV PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	90%	300.000.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	9	5	201		9 <i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentasi jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa</i>	90%	300.000.000						X
2	9	5	201	5	9,1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	- 3 orang Rp300.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 dokumen	Rp300.000.000						X
3	25	3			V PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4500 ton	675.000.000						X
3	25	3	202		10 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)	64 kelompok	325.000.000						X
3	25	3	202	1	10,1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	- 5 orang Rp200.000.000 - 1 paket - 12 bulan 50	Rp200.000.000						X
3	25	3	202	2	10,2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana	- 5 orang Rp125.000.000 - 1 paket	Rp125.000.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kelembagaan Nelayan Kecil	- Waktu Output : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	- 12 bulan 6 kelompok							
3	25	3	203		11 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	100%	350.000.000						X
3	25	3	203	2	11,1 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	- 5 orang Rp350.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp350.000.000						X
3	25	4			VI PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	312	1.440.000.000						X
3	25	4	202		12 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan	130 pembudidaya	185.000.000						X
3	25	4	202	2	12,1 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu	- 5 orang Rp60.000.000 - 1 paket - 12 bulan	Rp60.000.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	25	4	202	4	12,2 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Output : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (kelompok) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana Output : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (kelompok) Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	5 kelompok - 5 orang Rp125.000.000 - 1 paket 2 kelompok 2 jenis	125.000.000 1.255.000.000 Rp55.000.000						X	
3	25	4	204		13 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									X	
3	25	4	204	1	13.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	- 5 orang Rp55.000.000 - 1 paket - 12 bulan 12 dokumen	Rp55.000.000						X	
3	25	4	204	2	13,2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana	- 5 orang Rp1.150.000.000 - 1 paket	Rp1.150.000.000							X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	25	4	204	6	13,3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Output : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	- 12 bulan 2 unit - 5 orang Rp50.000.000 - 1 paket - 12 bulan 140 Orang	50.000.000						X	
3	27	2			VII PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	30%	1.045.000.000							X
3	27	2	201		14 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan /penggunaan sarana pertanian	100%	945.000.000							X
3	27	2	201	1	14,1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	- 4 orang Rp695.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	Rp695.000.000						X	

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	2	201	2	14,2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	- 4 orang Rp250.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 laporan	Rp250.000.000						X
3	27	2	203		15 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)	280 ekor	100.000.000						X
3	27	2	203	1	15.1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	- 7 orang 100.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 laporan	100.000.000						X
3	27	3			VIII PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85%	1.435.000.000						X
3	27	3	201		16 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	4 unit	180.000.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	3	201	1	16,1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)	- 3 orang Rp180.000.000 - 1 paket - 12 bulan 1 dokumen	Rp180.000.000						X
3	27	03	2.02	08	17 Pembangunan Prasarana Pertanian		2 unit	Rp.1.255.000.000						X
					17.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Input - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	- 10 orang - Rp1.200.000.00 - 1 Paket - 12 Bulan 1 unit	Rp.1.200.000.000						X
					17.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output :	- 4orang - Rp. 55.000.000 - 1 Paket - 12 Bulan 1 unit	Rp. 55.000.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	4			IX PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit) Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	80%	800.000.000						X
3	27	4	201		18 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	3450	500.000.000						X
3	27	4	201	1	18,1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	- 10 orang Rp500.000.000 - 1 paket - 12 bulan 4	Rp500.000.000						X
3	27	4	204		19 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)	26 unit	300.000.000						X
3	27	4	204	2	19,1	Input :		300.000.000						X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	6	201	3	dalam Daerah Kabupaten/Kota									
3	27	6	201	3	21.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Input: - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	- 4 Orang Rp45.000.000 - 1 paket - 12 bulan 3 Laporan	Rp45.000.000					X
3	27	7			XII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	55%	885.000.000					X
3	27	7	201		22	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)	1000 Laku (latihan dan kunjungan)	885.000.000					X
3	27	7	201	3	22,1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	- 25 orang Rp750.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 unit	Rp750.000.000					X
3	27	7	201	2	22,2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	- 60 orang Rp75.000.000 - 1 paket - 12 bulan 6 unit	75.000.000					X

Kode Program /Kegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif RENJA	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	7	201	5	22,3 <i>Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Ditingkatkan Kapasitasnya (unit) Input : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu Output : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	- 60 orang Rp55.000.000 - 1 paket - 12 bulan 2 Unit	Rp60.000.000						X
								29.582.000.000						

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka peningkatan kualitas Renja dan kualitas pembangunan serta keselarasan dengan inovasi yang akan dicantumkan dalam RKPD Kota Balikpapan, maka Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan memiliki beberapa inovasi sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

DAFTAR INOVASI DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BALIKPAPAN

NO	JUDUL INOVASI	NAMA INOVASI	PENGGAGAS	TAHUN	KETERANGAN
1.	Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Petugas Pembibitan	-	Zulkifli Prawirasaputra, S.Pi	2014	PIM IV / KKP
2.	Pembuatan Pakan Ikan Alternatif	Pa'Ikal	Subadi, S.ST	2015	PIM IV
3.	Paranet Solusi Pelindung Intimidasi Hama Terhadap Sayuran dan Ekosistem Ramah Lingkungan	Paranet Spider	Dwi Handono Suno	2015	PIM IV
4.	Menuju Kelurahan Swasembada Pangan Melalui Program One Day One Rice Di Kelurahan Teritip	-	Ir. M. Yosmianto, M.Si	2015	PIM II
5.	Surat Permohonan Sertifikat Veteriner On Line	SUPER SEVEN	drh. M. Bisri	2015	PIM IV
6.	Sistem Aplikasi Perjalanan Dinas	SIAPEDIS	Jumariani	2016	PIM IV
7.	Satu Mutu, Satu Pintu, Satu Harga Bokar (Bahan Olah Karet Rakyat)	SATU-SATU SAHARGA BOKAR	Mujito	2017	PIM III
8.	Asosiasi Cinta Singkong	ACIKO	Hanna S Rahayu, S.Pi	2018	PIM IV
9.	Petani untuk Lada dan Lingkungan Sehat dengan Bio Fungsida	Pull Sehat dengan BioF	Abdul Wahab, SP	2018	PIM IV
10.	Klinik Keliling Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	KLINIK ReKAT	Sri Winaryanti, S.Pi	2019	PIM IV
11.	Pangan Keluarga Mandiri Terpadu	Pagar Mantep	Ir. Heria Prisni	2020	PIM II
12.	Kolam Pembudidayaan Ikan Kota	KOPIKO	M.Idrus, S.Kel	2020	PIM IV
13.	Kampanye kepada Masyarakat untuk tidak membuang2 makanan agar dihabiskan, diambil seperlunya	Makan_Cerdas	Dicky Hariyono, S.Pi	2020	PIM IV
14.	Sistem Pelaporan Pupuk Bersubsidi Kota Balikpapan	SILAPUBER Kota Balikpapan	Sri Ernawaty, SP	2020	PIM IV
15.	Pangan Lokal Kuliner di Era Milenial	AKALKU MILENIAL	Dharmawaty, S.Pt	2021	PIM IV

NO	JUDUL INOVASI	NAMA INOVASI	PENGGAGAS	TAHUN	KETERANGAN
16.	Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan hewan	SIPKAWAN	Intan Aptri Ranti	2021	PIM IV

Rencana Inovasi Tahun 2025

No.	Bidang	Nama Inovasi	Keterangan
	Semua Bidang	Pagar Mantep	Pangan Keluarga Mandiri Terpadu
1	Perikanan	BU AYI AYU	BUdidAYa Ikan hAruan dan papuYU (Gabus/Haruan dan Pepuyu/betok) Penebaran benih ikan lokal tsb ke perairan umum
2	Pertanian Tanaman Pangan	SI HANI	HilirisaSI HASil PertaNian (pengelolaan Pasca panen dan pemasaran Hasil pertanian)
3	Perkebunan	SI SISCA PADA RIANG	Pengelolaan Pasca Panen Lada (EfisienSI proseSIng paSCA PANen LaDA, meRICA sahANG)
4	Ketahanan Pangan	ADA AKAL	ADA SNACK ADA PANGAN LOKAL

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2026. Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala Pemerintahan Kota Balikpapan, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

1. akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
2. penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2025.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kota Balikpapan tahun 2025.

T. RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026
14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tahun 2025;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;

3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Balikpapan melaksanakan 1 urusan, 7 program dan 21 kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	77,45	78	80,35	103,01%				Nilai IKM = 80,45, masuk dalam kategori baik
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah	88	77,44	82	82,13	100,16%				tercapai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		61	66	61	92,42%				tercapai
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78	77,06	72	78,78	109,42%				tercapai
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD		1	1	1	100,00%				Plang Nama

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83	77,25	77	78,85	102,40%				tercapai
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		4	1	2	200,00%				1. Terdapat dua lokasi yang berbeda, sehingga membutuhkan unit CCTV yang berbeda, 2. Penentuan target renja belum memperhitungkan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		0	1	1	100,00%				tercapai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88	77,25	82	82,26	100,32%				tercapai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		0	1	1	100,00%				tercapai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0	4	8	200,00%				1) Kebutuhan yg mendesak bagi operasional

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantorJumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		0	6	6	100,00%				tercapai
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0	3	3	100,00%				tercapai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		0	1	1	100,00%				tercapai
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		0	1	1	100,00%				tercapai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		0	30	61	203,33%				tercapai

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	77,44	72	78,78	109,42%				tercapai
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		0	8	8	100,00%				tercapai
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			2	0	0,00%				pergeseran anggaran ke belanja lain
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88	77,81	82	82,2	100,24%				tidak tercapai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	1	1	100,00%				tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	1	1	100,00%				tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	2	4,00	200,00%				1) Kebutuhan yg mendesak bagi operasional

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Lembar : 5

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	78	77,91	72	79,45	110,35%				<i>tercapai</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		23	23	23	100,00%				tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8	9	8	88,89%				tercapai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		0	137	123	89,78%				tercapai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi		2	6	6	100,00%				1. Rehab gedung Metrologi, 2 pengecatan gedung, 1 perbaikan jalan masuk kantor , 1. Bangunan aula, 1. Musholla

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	2	2	100,00%				Pembuatan pagar UPTD Pasar Wil I dan rehabilitasi pagar kantor dinas
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi	75	35,06	60	38,10	63,49%				1. Sudah OSS, tidak melakukan verifikasi dari untuk izin usaha, namun akan tetap ada dari TDG dan Minol di Semester II, 2. Dari 63 pengajuan lewat OSS, 24 yang lolos verifikasi, 5 ditolak, 34 butuh perbaikan 3. Karena ada regulasi yang baru, sehingga kewenangannya sudah bukan di perdagangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	75	0	60	0,00	0,00%				1. Karena sudah OSS tidak melakukan verifikasi dari Dinas Perdagangan
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0	10	0	0,00%				1. Karena sudah OSS tidak melakukan verifikasi dari Dinas Perdagangan
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang mempunyai TDG	63	44,76	43	46,67	108,53%				tercapai
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		0	3	9	300,00%				Penentuan target yang masih mengacu kondisi ke Covid-19

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	<i>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</i>	<i>Persentase Rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan</i>	100	0	100	0	0,00%				<i>1. Dinas Perdagangan tidak mengeluarkan rekomendasi, hanya verifikasi</i>
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0	5	15	300,00%				1. Penentuan target yang masih mengacu kondisi ke Covid-19 2. Angka pedagang minuman beralkohol rendah, setelah Covid-19 ternyata meningkat
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	93	80	80	80	100,00%				tercapai
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i>	96	70,83	66	95,83	145,20%				<i>tercapai</i>
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan		1	2	2	100,00%				Revitalisasi Blok A dan Blok B Pasar Klandasan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	100	100	100	100	100,00%				tercapai
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		0	4	4	100,00%				tercapai
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		0	2	2	100,00%				tercapai
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu	5	10,61	5,6	6,22	90,03%				Nilai didapat dari KV Rata-rata 11 bahan pokok, KV 9 bahan pokok (beras, kedelai, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi segar, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar) mencapai target, KV 2 bahan pokok (cabe dan bawang merah) tidak mencapai target

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	12	12	12	12	100,00%				tercapai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		0	12	12	100,00%				tercapai
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	78	27,27	61	30,77	50,44%				Dari 13 komoditi yang memiliki harga acuan, hanya 4 komoditi yang sesuai harga acuan diantaranya beras premium, cabe rawit, cabe keriting, bawang merah
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		1	1	1	100,00%				tercapai

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor bersih non migas	2.050	4029,6	1.350	4.422,09	327,56%				1. Komoditi yang berasal dari usaha mikro baru beberapa yang memasuki pasar ekspor 2. Kualitas dan kuantitas produk masih perlu ditingkatkan 3. Kurangnya fasilitas dan pendampingan, masih dominan perusahaan besar (CPO) 4. Data nilai ekspor dari Bea Cukai
	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk</i>	100	86,67	40	100	250,00%				<i>tercapai</i>
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		5	4	15	375,00%				Target didasarkan pada pelaku usaha yang difasilitasi, sedangkan realisasi pelaku yang dibina adalah pelaku usaha yang difasilitasi serta dimonitoring dan diberi penyuluhan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		4	2	10	500,00%				Keikutsertaan dalam misi dagang sebagian didanai di luar anggaran Disdag
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	76		71	88,26	124,31%				tercapai
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</i>	76	68,96	71	90,54	127,53%				<i>tercapai</i>
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		0	80	2.466	3082,50%				1. Target didasarkan pada pelaku usaha yang melakukan sosialisasi, sedangkan realisasi adalah pelaku yang dibina
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha binaan yang meningkat omsetnya	80		60	70,91	118,18%				tercapai

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran</i>	100	76,92	40	100	250,00%				<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aktivitas UMKM 2. Penentuan target belum mempertimbangkan peningkatan aktivitas UMKM tersebut 3. Pelaksanaanya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan romosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		0	4	55	1375,00%				<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya aktivitas UMKM 2. Penentuan target belum mempertimbangkan peningkatan aktivitas UMKM tersebut 3. Pelaksanaanya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (UPTD Pasar Wilayah I)	persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	93	80	80	80	100,00%				tercapai
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i>	96	70,83	66	95,83	145,20%				tercapai

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		5	5	5	100,00%				tercapai
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (UPTD Pasar Wilayah II)	persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	93	80	80	80	100,00%				tercapai
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96	70,83	66	95,83	145,20%				tercapai
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1	1	1	100,00%				tercapai
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (UPTD Pasar Wilayah III)	persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	93	80	80	80	100,00%				tercapai
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96	70,83	66	95,83	145,20%				tercapai

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Penjelasan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		4	4	4	100,00%				tercapai
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (UPTD Pasar Wilayah IV)	persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	93	80	80	80	100,00%				tercapai
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i>	96	70,83	66	95,83	145,20%				<i>tercapai</i>
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		2	2	2	100,00%				tercapai
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	76	68,96	71	88,26	124,31%				tercapai
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</i>	76	68,96	71	90,54	127,52%				<i>tercapai</i>
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		3103	3.500	3.169,00	90,54%				??

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Mekanisme Kelembagaan

Kelembagaan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Mekanisme Pelaksanaan

Dengan mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional dengan bersendikan:

a. Kesederhanaan

Yang dimaksud dengan kesederhanaan meliputi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan dan kepastian

Kejelasan dan kepastian disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Prosedur atau tata cara pelayanan
2. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif
3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum
4. Rincian biaya/tariff pelayanan umum dan tatacara pembayarannya
5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum
7. Hak dan kewajiban baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan / kelengkapannya, sebagai alat untruk memastikan pemrosesan pelayanan umum
8. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat

c. Keamanan

Keamanan memiliki arti suatu proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan kepastian hukum

d. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

e. Efisiensi

1. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan.
2. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, persyaratan dan satuan kerja / instansi pemerintah lain yang terkait.

f. Ekonomis

1. Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :
2. Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajiban.
3. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Keadilan

Dimaksud dengan sendi keadilan disini adalah keadilan yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

h. Ketetapan waktu

Yang dimaksud dengan ketetapan waktu disini adalah dalam pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

3. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dinas Perdagangan Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan dalam penyusunan Perencanaan, antara Lain :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah terkait urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- c. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Indikator Kinerja Individu dan Rencana Aksi;
- e. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran ;
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- h. Dokumen Rencana Kerja ;
- i. Evaluasi pelaksanaan perencanaan melalui rapat kerja dan koordinasi meliputi tingkat pusat, propinsi, dan kota/kabupaten.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Pertumbuhan nilai ekspor non-migas	-	-	6,52%	6,53%	6,54%	6,55%	-20,81%	N/A	6,54%	6,55%	
2	Persentase wajib tera yang melakukan tera/ tera ulang	-	-	81%	84%	86%	87%	72,81%	N/A	86%	87%	
3	Inflasi pangan bergejolak	-	-	(3 - 5)%	(3 - 5)%	(3 - 5)%	(3 - 5)%	6,76%	N/A	(3 - 5)%	(3 - 5)%	
4	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	-	-	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	N/A	8,33%	8,33%	
5	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	-	-	8,70%	9,40%	10,20%	11,00%	6,34%	N/A	10,20%	11,00%	
6	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	-	-	28,75	30,50	32,25	34,00	N/A	N/A	32,25	34,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kegiatan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu strategis pada Renstra Tahun 2021-2026 OPD Perdagangan didasarkan atas sejumlah permasalahan utama yang berkembang pada bidang urusan perdagangan di Kota Balikpapan. Isu strategis tersebut berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh tugas dan fungsi OPD. Beberapa permasalahan dan hambatan diantaranya:

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu – isu perdagangan
2. Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya
3. Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional
4. Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Kemetropolitan serta Aparatur PPNS
5. Database perdagangan yang belum optimal
6. Belum adanya sistem informasi yang mendukung database (database masih manual)

7. Kondisi bangunan dan fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan kurangnya kenyamanan bagi pedagang dan pembeli
8. Belum maksimalnya penataan pedagang informal dan penyiapan sarana lokasinya mengakibatkan tata kelola pasar kurang baik
9. Tingkat keamanan, ketertiban, kebersihan sarana perdagangan yang sering kurang ditaati oleh pengguna layanan perdagangan
10. Realisasi retribusi pelayanan pasar masih dibawah target retribusi
11. Pelaku usaha sulit memahami informasi terkait ketentuan-ketentuan ekspor
12. kurangnya promosi yang dilakukan untuk mengembangkan ekspor
13. Masih terdapatnya pelaku usaha yang tidak memiliki ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
14. Minimnya pelaku usaha yang memiliki tanda daftar gudang, surat tanda pendaftaran waralaba (STPW), dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B, C
15. Ketersediaan stok dan harga bahan pokok yang sering terjadi kenaikan harga yang dipengaruhi oleh iklim, musim tanam dan hari besar keagamaan
16. Pencapaian target uji tera yang belum tercapai

Dalam rangka usaha meningkatkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan perlu disusun rencana strategi yang berkorelasi dengan Visi dan 5 (lima) Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Bahwa terkait hal tersebut, penyusunan strategi perlu mempertimbangkan faktor-faktor peluang yang merupakan pendorong dalam bentuk potensi/kekuatan dan kesempatan dan faktor-faktor tantangan yang merupakan hambatan dalam pencapaian visi dan misi OPD Dinas Perdagangan. Adapun faktor-faktor peluang dan faktor tantangan terdeskripsi sebagai berikut

Tantangan

Faktor Internal :

1. Belum tersedianya kompetensi pegawai di bidang pengelolaan pasar dan perdagangan.

2. Kurang maksimal sumber daya aparatur mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya.
3. Kurangnya sistem informasi berbasis teknologi dalam mengakomodir kebutuhan sistem perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan sarana perdagangan
4. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan seperti :
 - a) Gedung kantor kurang memadai, hal ini ditinjau dari bangunan dan tata laya out kerja tiap-tiap bagian struktur organisasi,
 - b) Jumlah kendaraan operasional masih kurang memadai terhadap sebaran jumlah pasar di Kota Balikpapan.
 - c) Peralatan kantor di tiap-tiap UPTD kurang memadai berdasarkan jumlah ketersediaannya.
5. Data dan informasi dan pengarsipan berkas OPD kurang terkelola secara baik karena masih berbasis manual
6. Beberapa Pasar Rakyat kurang terkelola dan terpelihara secara baik ditinjau dari bangun, sarana dan prasana, kebersihan ketertiban dan keamanan pasar, TPS pasar dan utiliti pasar.
7. Potensi PAD dari retribusi pasar dan perdagangan kurang digali secara maksimal.
8. Monitoring dan pengawasan OPD terhadap kegiatan perdagangan kurang optimal.
9. Kurang optimalnya sinergisitas pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemantauan serta evaluasi terhadap bahan dagang konsumsi berbahaya bagi masyarakat.
10. Operasi penertiban pedagang informal tidak memberikan efek jera.

Faktor External :

1. Ketergantungan bahan pokok strategis terhadap daerah pemasok
2. Kurangnya potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan potensi unggulan
3. Daya saing pasar rakyat, toko, warung terhadap keberadaan pasar modern dan swalayan modern di Kota Balikpapan.

4. Masih kurang kesadaran pedagang terhadap kewajiban melakukan tera/tera ulang alat ukur

Peluang

Faktor Internal :

1. Dinas Perdagangan memiliki personal yang memiliki keahlian khusus yaitu Fungsional Penera, Pengawas Kemetrolagian, Analis Perdagangan dan Pengawas Perdagangan.
2. Adanya potensi dukungan anggaran Revitalisasi Pasar dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota.
3. Kemitraan yang terjalin baik dengan stakeholder terkait.

Faktor External :

1. Adanya peluang kemitraan sektor perdagangan termasuk internasional dengan rencana beroperasinya Ibu Kota Negara di tahun 2025
2. Kota Balikpapan memiliki fasilitas bangunan Hotel dari bintang 5 hingga bintang 3 dan Guest House.
3. Kota Balikpapan memiliki sejumlah bangunan untuk kegiatan meeting, resepsi perkawinan dan multifungsi.
4. Kota Balikpapan terdapat sejumlah restaurant hingga rumah makan serta resto/café yang tersebar disetiap kawasan kota.
5. Kota Balikpapan memiliki jasa penjualan tiket (travel) baik darat, laut dan udara.
6. Kota Balikpapan memiliki UMKM disetiap kecamatan.
4. Kota Balikpapan memiliki pasar dan swalayan modern yang berada pada kawasan perdagangan.
5. Tersedianya sejumlah pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, antara lain :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
2. Penyediaan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan melalui revitalisasi pasar
3. Kesiapan Kota Balikpapan menghadapi Ibu Kota Negara (IKN) terkait pemenuhan kebutuhan pasokan bahan pokok dan barang penting

4. Pengembangan ekspor dan Peningkatan Promosi produk ekspor
5. Pengendalian Bahan Pokok Strategis
6. Pemetaan sebaran pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan gudang
7. Optimalisasi pengawasan pelaku usaha perdagangan
8. Penguatan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perdagangan
9. Peningkatan PAD melalui Potensi Retribusi Pasar dan Perdagangan
10. Peningkatan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar
11. Perlindungan Konsumen melalui pengawasan metrologi legal
12. Peningkatan tata kelola layanan kemetrologian

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Balikpapan

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Balikpapan	persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi	70%	300.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Balikpapan	persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi	70%	300.000.000	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Balikpapan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	70%	150.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Balikpapan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	70%	150.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 dokumen	150.000.000	
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Balikpapan	Persentase gudang yang mempunyai TDG	58%	100.000.000	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Balikpapan	Persentase gudang yang mempunyai TDG	58%	100.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 dokumen	100.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Balikpapan	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	100%	50.000.000	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Balikpapan	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	100%	50.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Balikpapan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Balikpapan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 dokumen	50.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Balikpapan	persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	87%	19.716.653.210	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Balikpapan	persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	87%	94.423.647.800	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	86%	12.816.653.210	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	86%	84.407.699.920	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 unit	12.066.653.210	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 unit	83.893.831.120	Mengusulkan Revitalisasi Pasar Sepinggian, mohon penambahan dana Rp. 35 Milyar (Estimasi), Tahun 2024 Murni Dibuat Masterplan Pasar Sepinggian

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 unit	750.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 unit	513.868.800	Biaya Operasional UPTD Wilayah Pasar (Makan Minum Kegiatan, Pemeliharaan Ringan (Gerobak/Pintu/Jendela), Pemeliharaan Taman)
	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Balikpapan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	100%	6.900.000.000	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Balikpapan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	100%	10.015.947.880	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen	5.900.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen	9.365.947.880	Usulan Tambahan Rp.500.000.000 untuk Chemical CS dan Rp.500.000.000 tambah anggota satpam upt
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	1.000.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	650.000.000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Balikpapan	persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu	5,2%	650.343.750	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Balikpapan	persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu	5,2%	835.343.750	
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 laporan	385.343.750	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 laporan	385.343.750	
	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Balikpapan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	385.343.750	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Balikpapan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	385.343.750	
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	72%	265.000.000	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	72%	450.000.000	
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	265.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	450.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Balikpapan	nilai ekspor bersih non migas	1785 juta dollar	188.168.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Balikpapan	nilai ekspor bersih non migas	1785 juta dollar	663.168.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	80%	188.168.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	60%	663.168.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Balikipazpan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 pelaku usaha	0	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Balikipapan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	4 pelaku usaha	275.000.000	Dengan adanya usulan tambahan di 2025, akan digunakan untuk mengikuti 3 kali Event Promosi Skala Nasional di Luar darah Indonesia
	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Balikipapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 pelaku usaha	188.168.000	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Balikipapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 pelaku usaha	388.168.000	Dengan adanya usulan Tambahan akan digunakan mengikuti 2 event International Inacraft dan Trade Expo 2025 di Indonesia serta Pelatihan terkait Ekspor bagi Pelaku Usaha
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Balikipapan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	74%	730.750.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Balikipapan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	74%	730.750.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Balikipapan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	74%	730.750.000	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Balikipapan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	74%	730.750.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Balikipapan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4800 unit	560.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Balikipapan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4800 unit	560.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Balikipapan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	110 orang	170.750.000	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Balikipapan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	110 orang	170.750.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Balikpapan	Persentase pelaku binaan yang meningkatkan omsetnya	70%	250.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Balikpapan	Persentase pelaku binaan yang meningkatkan omsetnya	70%	250.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	80%	250.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	80%	250.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	250.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	250.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82 Poin	16.704.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82 Poin	25.783.792.816	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86 Nilai	11.900.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86 Nilai	14.637.126.600	
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	11.900.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	14.637.126.600	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81 Nilai	59.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81 Nilai	1.005.664.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	59.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	69.664.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 orang	936.000.000	Bintek 75 pegawai, mana jemen resiko dan Diklat Jafung
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86 Nilai	1.354.500.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86 Nilai	2.599.173.200	
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	60.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	62.875.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	210.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.131.860.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	340.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	509.972.200	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	220.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	382.859.600	Penambahan belanja Jasa arsip
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	32.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	122.016.000	
Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikipapan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	42.500.000	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikipapan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	39.590.400	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikipapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	450.000.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikipapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	350.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76 Nilai	650.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76 Nilai	2.178.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikipapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	600.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikipapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5 unit	528.000.000	Sewa Kendaraan Esselon II dan III (5 kendaraan)
	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Balikipapan	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 unit	50.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Balikipapan	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 unit	1.650.000.000	Pengadaan mebel dinas dan UPTD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86 Nilai	1.601.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86 Nilai	3.365.271.766	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikipapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	11.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikipapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikipapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	800.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikipapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	876.906.141	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	790.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2.485.365.625	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Nilai	1.140.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 Nilai	1.998.557.250	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 unit	330.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 unit	298.577.950	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	240.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	234.589.300	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 unit	170.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 unit	115.390.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	400.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	1.350.000.000		
Jumlah					38.540.414.960	Jumlah					122.986.702.366	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk Menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin konsistensi pembangunan antar dokumen perencanaan dan menyamakan persepsi arah kebijakan pembangunan tingkat nasional dampai dengan daerah, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan melaksanakan telaahan Renstra pada Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini memiliki maksud agar konsistensi perencanaan yang dituangkan pada Renstra memiliki korelasi dan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan di atasnya. Adapun hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga adalah :

1. Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2021-2026 adalah "meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan" melalui:

- a) Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan system logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;
 - b) Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; serta
 - c) Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah
2. 12 Strategi pembangunan perdagangan dalam negeri selama periode 2021-2026 adalah :

- a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga, terutama melalui: (i) Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat terutama yang telah berumur di atas 25 tahun, rusak berat dan tidak layak digunakan; (ii) pengembangan rantai supply dingin (cold chain) terutama untuk mendukung distribusi barang yang mudah rusak (perishable) di pasar domestik; (iii) pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah; (iv) pembangunan dan pengembangan pusat

distribusi propinsi; (v) pembangunan dan pengembangan pusat distribusi regional sebagai tulang punggung system distribusi bahan pokok nasional melalui pengembangan sistem distribusi yang terpadu dengan pusat distribusi propinsi di wilayahnya serta pusat distribusi regional lainnya; serta (vi) pengembangan gudang konvensional dan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) yang dapat menunjang sistem distribusi nasional khususnya jika diintegrasikan dengan pusat distribusi propinsi yang ada

- b) Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat) melalui pelaksanaan pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat, yang merupakan penyediaan dukungan non fisik untuk pengembangan pasar rakyat yang berkualitas, nyaman, bersih, dan sehat.
- c) Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia melalui promosi produk unggulan daerah antar wilayah di Indonesia serta fasilitasi kerjasama dan penurunan hambatan perdagangan antar wilayah Indonesia.
- d) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah melalui pembinaan dan pelatihan, penataan dan peningkatan status pedagang informal, penciptaan pelaku usaha pemula di bidang perdagangan serta pengembangan sistem informasi potensi pasar domestik.
- e) Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif, terutama terkait dengan pembenahan prosedur perijinan usaha perdagangan dan penataan perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce)
- f) Mendorong penggunaan produk domestik, antara lain melalui: (i) peningkatan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik; (ii) peningkatan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, serta (iii) peningkatan tingkat kesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebih tinggi.
- g) Meningkatkan perlindungan konsumen, terutama melalui: (i) pengembangan standarisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen; (ii) pemberdayaan konsumen; (iii) peningkatan efektivitas pengawasan barang / jasa dan tertib ukur, serta; (iv) penguatan kapasitas kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan lembaga perlindungan konsumen lainnya di Indonesia. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat strategis dalam pemberian perlindungan

kepada konsumen yang dirugikan seiring dengan meningkatnya perekonomian di wilayah kabupaten/kota dan perkembangan global.

- h) Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten, baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor Indonesia di pasar internasional, serta melindungi konsumen dalam negeri dari barang / jasa yang tidak sesuai standar.
 - i) Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok untuk menopang ketahanan pangan nasional.
 - j) Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan.
 - k) Mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sistem resi gudang dan pasar lelang sebagai sarana alternatif pembiayaan, tunda jual dan peningkatan efisiensi distribusi.
 - l) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan, dalam rangka: (i) peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengadaan peralatan, tanah, gedung, dan sarana penunjang perdagangan lainnya; serta (ii) peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
3. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:
- a) Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
 - b) Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional.
 - c) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
 - d) Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional
 - e) Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
 - f) Meningkatkan perlindungan konsumen
 - g) Meningkatkan efisiensi sistem distribusi & logistik

h) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

4. Program rencana Strategis

Program kementerian yang terdiri dari sepuluh program utama, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan; (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan; (5) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (6) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Peningkatan Perlindungan Konsumen; (8) Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional; (9) Pengembangan Ekspor Nasional; dan (10) Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

5. Hasil Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yang sangat luas dan didukung sumber daya alam *renewable* yang melimpah, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan melalui hilirisasi (sawit, karet, kayu, dan perikanan kelautan), terlebih Ibu Kota Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur menjadi tantangan maupun peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur. Upaya yang dilakukan untuk menjawab isu strategis tersebut yaitu penetapan *Major Project* Sektor Indagkop & UKM Tahun 2024-2026 di bidang perdagangan adalah inisiasi pembentukan *food station* yang pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas stok dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merujuk kepada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan periode 2021-2026 “terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman”

Tujuan Dinas Perdagangan	Sasaran dinas perdagangan
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan	1. Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas 2. Meningkatnya perlindungan konsumen

daerah	<p>3. Terjaganya stabilitas harga bahan pokok</p> <p>4. Meningkatnya sarana distribusi yang representatif</p> <p>5. Meningkatnya pelaku usaha yang tertib berusaha</p> <p>6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>
--------	--

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah
- Pencapaian visi misi kepala daerah

Tabel 3.3
Keselarasn Tujuan dan Sasaran Kota Balikpapan dengan Dinas Perdagangan

Visi	Misi	Tujuan Kota Balikpapan	Sasaran Kota Balikpapan	Tujuan Dinas Perdagangan	Sasaran Dinas Perdagangan
Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman	Misi ke 5 yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas
					Meningkatnya perlindungan konsumen
					Terjaganya stabilitas harga bahan pokok
					Meningkatnya sarana distribusi yang representatif
					Meningkatnya pelaku usaha yang tertib berusaha
					Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perdagangan

Sumber data : RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2026	keterangan
Program	7	7	
Kegiatan	16	15	

- c. Total kebutuhan dana / pagu indikatif

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2026	keterangan
APBD	122.985.721.653	42.263.256.651	

DAK Fisik/ Non Fisik/ bankue	-	-	
Total	122.985.721.653	42.263.256.651	

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan selama dua tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERDAGANGAN						57.622.152.487,00							39.582.609.151,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						57.622.152.487,00							39.582.609.151,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						57.622.152.487,00							39.582.609.151,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	82 Poin				82 Poin						82 Poin	17.047.500.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja</i>	-			Nilai 55	53.040.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yahiah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	53.040.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yahiah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			86 Nilai	12.698.344.318,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan	-	12.200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				64 Orang/bulan	12.698.344.318,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		12.200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			81 Nilai	985.317.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan	-	163.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	69.457.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		63.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				75 Orang	915.860.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>JKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			86 Nilai	1.834.353.195,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan	-	1.437.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	346.019.255,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K unggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		230.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	115.440.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K unggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	57.080.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K unggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		47.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			76 Nilai	358.216.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan	-	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	902.336.685,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		850.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	2.083.785.616,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			76 Nilai	1.648.551.250,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan	-	1.430.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				22 Unit	298.577.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	234.589.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				151 Unit	115.550.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	999.834.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Perdagangan		500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi</i>	70 %			70 %	123.348.700,00						70 %	300.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	<i>*Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan *</i>	-			70 %	50.959.700,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	50.959.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	<i>Persentase gudang yang mempunyai TDG</i>	-			58 %	28.359.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			<i>Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang</i>				10 Dokumen	28.359.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	<i>Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan</i>	-			100 %	44.029.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														
			<i>Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				10 Dokumen	44.029.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola</i>	87 %			87 %	35.394.900.173,00						87 %	20.699.056.151,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i>	-			86 %	24.643.964.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	13.599.056.151,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Unit	24.643.964.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Masyarakat		13.599.056.151,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan</i>	-			100 %	10.750.935.673,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Masyarakat	-	7.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				4 Dokumen	9.830.183.113,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudka n Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis K eunggulan Lokal	Masyarakat		6.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				2 Dokumen	920.752.560,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu</i>	5,2 %			5,2 %	592.501.740,00						5,2 %	878.360.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	-			12 dokumen	280.627.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	278.360.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				12 Laporan	280.627.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		278.360.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan</i>	-			72 %	311.874.240,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	225.660.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				5 Laporan	86.214.240,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				1500 Orang	336.648.310,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		175.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Persentase Pelaku Binaan yang Meningkatkan Omsetnya</i>	70 %			70 %	262.809.000,00						70 %	275.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran</i>	-			80 %	262.809.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	275.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>				5 UMKM	262.809.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		275.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PASAR WILAYAH I						139.992.363,00							200.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						139.992.363,00							200.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						139.992.363,00							200.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola</i>	87 %			87 %	139.992.363,00						87 %	200.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i>	-			86 %	139.992.363,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	200.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH I
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				5 Unit	139.992.363,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		200.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH I
		UPTD PASAR WILAYAH II						129.971.300,00							200.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						129.971.300,00							200.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						129.971.300,00							200.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola</i>	87 %			87 %	129.971.300,00						87 %	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i>	-			86 %	129.971.300,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	200.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH II	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
			<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Unit	129.971.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		200.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH II	
		UPTD PASAR WILAYAH III							134.924.250,00							200.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						134.924.250,00								200.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						134.924.250,00								200.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola</i>	87 %			87 %	134.924.250,00						87 %	200.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i>	-			86 %	134.924.250,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	200.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH III
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				4 Unit	134.924.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		200.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH III
		UPTD PASAR WILAYAH IV							108.959.600,00						200.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						108.959.600,00							200.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						108.959.600,00							200.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola</i>	87 %			87 %	108.959.600,00						87 %	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i>	-			86 %	108.959.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	200.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH IV	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
			<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				2 Unit	108.959.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		200.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH IV	
		UPTD METROLOGI							564.000.000,00							593.287.500,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						564.000.000,00							593.287.500,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						564.000.000,00							593.287.500,00		
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku</i>	74 %			74 %	564.000.000,00						74 %	593.287.500,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</i>	-			74 %	564.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat	-	593.287.500,00	UPTD METROLOGI	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang															
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				3600 Unit	564.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat		593.287.500,00	UPTD METROLOGI	
J U M L A H								58.700.000.000,00								40.975.896.651,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan namun juga diharapkan bersumber pendanaan lainnya (APBN, BANKEU, DEKON, TP, dan sumber-sumber pendanaan lainnya)

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif TA. 2025 adalah sebagai berikut :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	123.348.700
1	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</i>	50.959.700
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.959.700
2	<i>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>	28.359.500
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	28.359.500
3	<i>Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</i>	44.029.500

	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	44.029.500
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	35.908.747.686
4	<i>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	25.157.812.013
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	24.643.964.500
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	513.847.513
5	<i>Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	10.750.935.673
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9.830.183.113
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	920.752.560

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	592.501.740
6	<i>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	280.627.500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	280.627.500
7	<i>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	311.874.240
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	225.660.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	86.214.240

4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	345.000.000
8	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	345.000.000
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	170.000.000
	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	175.000.000
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	900.648.310
9	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	900.648.310
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	564.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	336.648.310

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	262.809.000
10	<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	262.809.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	262.809.000
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.566.944.564
11	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	53.040.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.040.000
12	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12.698.344.318
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.698.344.318
13	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	985.317.500

	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	69.457.500
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	915.860.000
14	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.834.353.195
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.872.530
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335.952.225
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	516.988.385
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	346.019.255
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	115.440.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.080.800
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000
15	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	358.216.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	258.216.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	100.000.000
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.989.122.301
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	902.336.685
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.083.785.616
17	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.648.551.250

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.577.950
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234.589.300
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.550.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	999.834.000
	Jumlah	58.700.000.000

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Saat ini sedang dikembangkan beberapa aplikasi dan sistem di Dinas Perdagangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Perdagangan, beberapa diantaranya yaitu :

a. Sistem Informasi Laporan Ketersediaan Bahan Pokok (SI PORTER BAPOK)

Ketersediaan bahan pokok yang mencukupi bagi masyarakat Kota Balikpapan menjadi salah satu prioritas dalam mempersiapkan Kota Balikpapan menjadi kota penyangga Ibu Kota Negara. Dan tingkat ketergantungan Lebih dari 90% kebutuhan pokok masyarakat Kota Balikpapan masih mengandalkan pasokan dari daerah lain seperti Sulawesi, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan monitoring dan pemantauan ketersediaan bahan pokok pada pelaku usaha kurang optimal dimasa pandemic corona virus disease-19, sehingga menyebabkan data laporan stok ketersediaan bahan pokok kurang optimal didapatkan dari pelaku usaha. Padahal kondisi pangan di masa pandemic harus di lakukan pemantauan stok secara konsisten dan periodic. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan sandang dan pokok bagi Manusia. Menjawab permasalahan tersebut maka perlu adanya Sistem Informasi Laporan Ketersediaan Bahan Pokok (SI PORTER BAPOK) adalah Sistem aplikasi yang digunakan untuk menginput laporan stok bahan pokok oleh pelaku usaha secara cepat, tepat sasaran, terintergrasi dan tervalidasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan khususnya pada Dinas Perdagangan. Manfaat dan maksud dari sistem ini adalah untuk menyediakan wadah pelaporan stok bahan pokok dari Pelaku Usaha yang lebih terintergrasi dan sehingga lebih terukurnya data stok bahan pokok yang ada di Kota Balikpapan. Selain itu data base pelaku usaha bahan pokok lebih teratur dan terorganisir dalam satu sistem. Keunggulan dari Sistem Informasi Laporan Ketersediaan Bahan Pokok (SI PORTER BAPOK) ini adalah suatu inovasi layanan pada Dinas Perdagangan yang berkolaborasi dengan pelaku usaha bahan pokok yang ada di Kota Balikpapan bersama dengan Dinas Perdagangan dalam rangka Upaya menjaga stabilisasi Harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok di Kota Balikpapan. Sistem ini informasi ini mempermudah pelaku usaha dalam melaporkan stok pengadaan dan penyaluran bahan pokok di Kota Balikpapan. Inovasi SI PORTER BAPOK ini dapat di akses di alamat situs <https://siporterbapok.balikpapan.go.id/> . Laporan yang tersaji pada aplikasi ini dapat di akses oleh Masyarakat secara luas dan dapat melihat ketersediaan Stok Bahan Pokok yang ada di Kota Balikpapan.

Tampilan Aplikasi Si Porter Bapok

The screenshot displays the SI PORTERBAPOK website, a platform for reporting commodity prices in Balikpapan. The header includes navigation links (Beranda, Laporan, Hubungi Kami, Login, Link Sahabat) and the logo of the Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Kalimantan Timur. The main banner features the title 'SI PORTERBAPOK' and the subtitle 'Sistem Informasi Pelaporan Ketersediaan Bahan Pokok Kota Balikpapan'. Below the banner, there are two main sections: 'STOK BAHAN POKOK KOTA BALIKPAPAN' and 'GALERI PELAKU USAHA'. The 'STOK BAHAN POKOK KOTA BALIKPAPAN' section shows three commodity cards: 'Beras Medium Termurah' (0.00 TON, April 2024), 'Daging Sapi Murni' (1,193,991.84 KG, April 2024), and 'Daging Ayam Ras (Daging)' (261,827.55 KG, April 2024). The 'GALERI PELAKU USAHA' section shows a card for 'Kacang Kedelai Ex. Import' with details: PRIMKOPTI, JL AMD NO 31 SUMBER REJO. The browser's taskbar at the bottom shows the date as 16/04/2024 and the time as 12:39.

b. Seputar Harga Bahan Pokok Terkini Balikpapan (SAHABAT Balikpapan)

Angka inflasi Kalimantan Timur relative lebih tinggi dibanding kebanyakan provinsi lain di Indonesia. Selain disebabkan belum optimalnya fungsi infrastruktur serta ketergantungan terhadap daerah lain, terhambatnya akses informasi harga juga menjadi sulitnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjalankan fungsinya. Untuk itu, pengendalian terhadap berlakunya harga pasar terhadap beberapa kebutuhan, terutama bahan pangan, harus serius dilakukan.

Fluktuasi inflasi yang tinggi bukanlah hal yang positif, meski masyarakat terlihat tak terganggu. Kondisi fluktuasi inflasi akan menyulitkan pemerintah merancang kebijakan, terutama yang berhubungan dengan perekonomian. Untuk menekan angka tersebut, Bank Indonesia Bersama TPID di Balikpapan, Tarakan dan Samarinda tengah mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk mengoptimalkan penghimpunan serta penyampaian informasi mengenai harga kebutuhan.

Tampilan Aplikasi SAHABAT Balikpapan



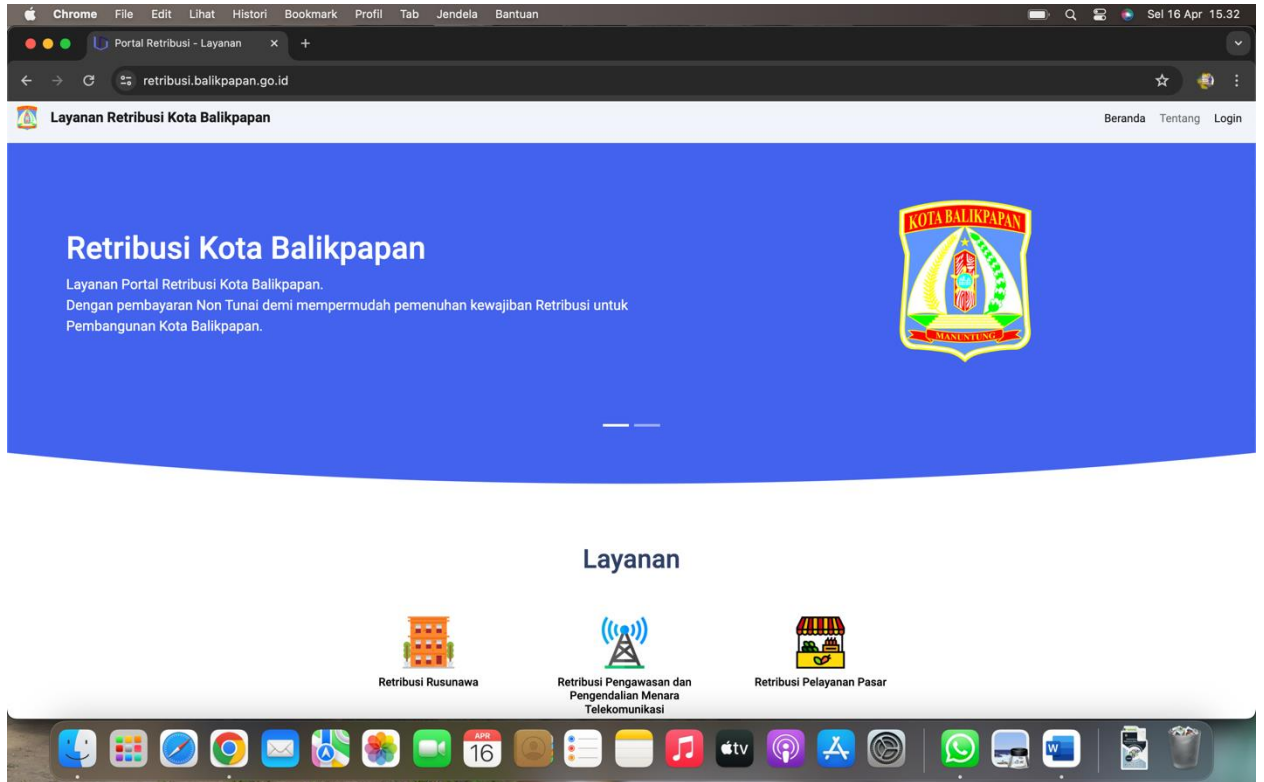
c. Program Digitalisasi Pasar Rakyat

Berdasarkan Peraturan daerah Koata Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pasar merupakan retribusi jasa umum atas pelayanan pasar terhadap sewa kios/petak/los dan PKL di area pasar yang besarnya ditentukan berdasarkan kelas pasar dan lokasi lantai yang tarifnya per M2/hari (Rp).

Dinas Perdagangan melalui Bidang Sarana Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia portal aplikasi dan bankaltimara selaku bank pembangunan daerah, memberikan program digitalisasi pasar rakyat. Yang terdiri dari :

1. Layanan pembayaran retribusi secara non tunai atau e-retribusi pasar. Pembayaran retribusi pasar secara non tunai dapat dilakukan melalui portal <https://retribusi.balikpapan.go.id/> dengan layanan Retribusi Pelayanan Pasar. Pembayaran retribusi pasar secara non tunai atau e-retribusi pasar sudah dilakukan di Pasar Inpres Kebun Sayur dan secara bertahap sudah mulai dilakukan juga di Pasar Klandasan I, terutama di Blok A dan Blok B.

Tampilan Portal retribusi.balikpapan.go.id



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERDAGANGAN**

**PEMBAYARAN E-RETRIBUSI
SECARA DIGITAL YANG EFEKTIF**

PENERAPAN SNI PASAR RAKYAT

Penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) Pasar Rakyat merupakan perwujudan komitmen, khususnya pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di daerah yang juga berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Penerapan SNI pasar rakyat tidak hanya menguntungkan para pedagang, tetapi juga menguntungkan para konsumen. Hal ini yang membuat SNI Pasar Rakyat menekankan faktor kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.

SNI PASAR RAKYAT MENJELASKAN:

- Persyaratan umum yang terdiri dari lokasi pasar; kebersihan dan kesehatan; keamanan dan kenyamanan serta dokumen legalitas.
- Persyaratan teknis diantaranya mengatur mengenai ruang dagang sampai dengan pengelolaan air limbah.
- Persyaratan Pengelolaan yang didalamnya terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengelolaan SDM, SOP pemeliharaan sarana dan prasarana, SOP pengelolaan berkelanjutan dan SOP pemantauan mutu dan keamanan komoditas pasar.

PELAYANANKAMI

- ⚡ Perangkat lunak pemesanan kami bertujuan untuk memudahkan anda dalam pembayaran retribusi petak pasar dengan cepat.
- ☎ Anda juga dapat menghubungi kami melalui nomor tersebut: (0542) 735530
- ✉ Anda juga dapat menghubungi kami melalui E-mail di bawah: disdag@balikpapan.go.id

Jalan Laks. R.E Martadinata No. 01 Kode Pos 76121, Balikpapan - Kalimantan Timur

Isnawati & Devia Kanadita

2. Selain pembayaran retribusi pasar secara non tunai atau e-retribusi

pasar, Dinas Perdagangan juga menghimbau untuk melakukan pembayaran atau transaksi secara non tunai dengan metode menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Diharapkan kedepannya seluruh pasar milik Pemerintah Kota Balikpapan sistem pembayarannya sudah dilakukan secara non tunai.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PERDAGANGAN



AYOK PAKAI QRIS !!



Apa itu Qris ??

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Dengan menggunakan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS.



TAHUKAH KAMU ??

Pasar yang menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) harus melakukan fasilitas pemanfaatan teknologi informasi di pasar rakyat melalui program digitalisasi pasar rakyat, seperti pembayaran nontunai, sehat, inovatif, aman pakai QRIS bersama Bank Indonesia. Keberhasilan penerapan SNI juga di sumbang dengan adanya penerapan situasi pasar, informasi harga, dan penerapan pembayaran retribusi secara elektronik melalui perbankan daerah maupun nasional.

**AYOK MANFAATKAN QRIS UNTUK TRANSAKSI
LEBIH CEPAT, MUDAH, DAN AMAN !!!**

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-3, periode renstra 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangkamenengah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Perdagangan Kota Balikpapan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Dinas Perdagangan Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

U. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan untuk mencapai visi dan misi Kota Balikpapan adalah suatu hal yang sangat kompleks. Untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi.

Peningkatan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan berkembang dinamis sangat pesat, sementara itu di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang, dan kebijakan jangka menengah dan kebijakan tahunan. Oleh karena itu, peran Sekretariat Daerah yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran.

a. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi untuk menerjemahkan Renstra lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja

menjadi mutlak sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran yang ditentukan.

b. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara menyeluruh atau sejajar dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD saat ini, evaluasi renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perwali RKPD
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

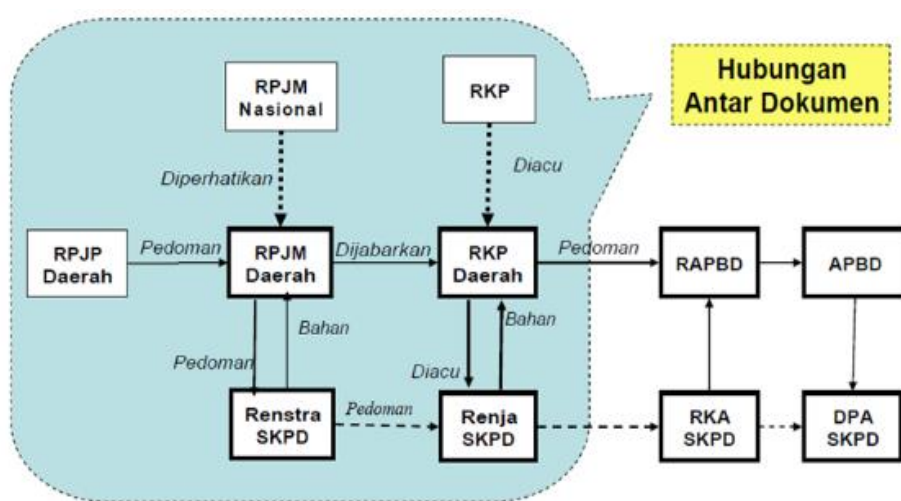
1. Persiapan Penyusunan Renja
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - b. Orientasi mengenai Renja
 - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - d. Pengumpulan Data dan Informasi
2. Pengolahan Data dan Informasi

Pada tahapan ini disajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap perumusan penyusunan rancangan Renja
3. Perumusan Rancangan Renja
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan PD
 - c. Menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

- e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja PD
 - k. Pembahasan Forum PD
 - l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
 5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD
 6. Penetapan Renja

c. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar

1.1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian mencabut PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 11);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada serta untuk Meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai penjabaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan yang selaras dengan Renstra Perangkat daerah
2. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran tahun 2025
3. Sebagai bahan evaluasi capaian keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya
4. Memberikan Pedoman dalam pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Berisi latar belakang
- 1.2 landasan hukum
- 1.3 maksud dan tujuan
- 1.4 sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

- 2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah,
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 telaahan terhadap kebijakan Nasional,
- 3.2 tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

- 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Program
- 4.2 Kegiatan Serta pendanaan Sekretariat Daerah

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

Lampiran.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Sebelum penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2025 terlebih dahulu dilakukan evaluasi Renja Tahun lalu untuk mengetahui sudah sejauh mana capaian keberhasilan sasaran, program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, sehingga penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 sudah berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan tahun sebelumnya.

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan renstra perangkat daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah serta Faktor-faktor keberhasilan atas capaian kinerja perangkat daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil capaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah sebagai mana yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021- 2026 disajikan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.1
Hasil capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi Capaian	Rasio
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Poin	31,89	n/a	n/a
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	98,03%	100,00%	105,26%
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100,00%

Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2/ T-C.29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan)

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2024 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	400	538.559.258.759	79,32	104.458.566.987	79,00	143.717.363.416	76,34	128.329.230.753	96,63%	89,29%	80	142.295.857.633	235,66	375.083.655.373	58,92%	69,65%	Asisten Administrasi Umum
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	395	731.572.186	75,71	94.006.746	78,50	116.000.000	76,05	84.012.468	96,88%	72,42%	79	127.600.000	230,76	305.619.214	58,42%	41,78%	Bagian Keuangan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	395	155.576.956.867	81,17	22.742.257.389	78,00	28.630.368.775	77,17	23.912.538.010	98,94%	83,52%	79	31.493.372.873	237,34	78.148.168.272	60,09%	50,23%	Bagian Keuangan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	424	5.450.000.000	80,17	822.520.520	82,00	1.460.000.000	74,83	796.263.150	91,26%	54,54%	85	1.030.000.000	240	2.648.783.670	56,60%	48,60%	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	424	150.940.441.266	79,22	35.454.198.280	82,00	48.640.329.800	75,83	46.178.284.613	92,48%	94,94%	85	47.900.000.000	240,05	129.532.482.893	56,62%	85,82%	Bagian Umum dan Perlengkapan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2024 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	424	35.275.000.00 0	78,9 4	7.240.237.887	82,00	18.616.803.30 0	75,3 3	17.147.492.09 6	91,87%	92,11 %	85	9.250.000.000	239,27	33.637.729.98 3	56,43 %	95,36%	Bagian Umum dan Perlengkap an
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	424	96.852.200.00 0	80,7 8	21.189.149.37 8	82,00	25.625.439.33 0	77,2 8	24.026.367.99 8	94,24%	93,76 %	85	29.070.519.21 0	243,06	74.286.036.58 6	57,33 %	76,70%	Bagian Umum dan Perlengkap an
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	424	59.005.000.00 0	79,0 5	11.696.405.24 5	82,00	12.768.301.66 0	75,3 3	9.315.729.512	91,87%	72,96 %	85	16.385.000.00 0	239,38	37.397.134.75 7	56,46 %	63,38%	Bagian Umum dan Perlengkap an
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentas e	500%	9.899.813.000	100 %	1.272.508.804	100%	2.120.527.851	100 %	1.959.310.831	100,00 %	92,40 %	100%	2.300.000.000	300%	5.531.819.635	60,00 %	55,88%	Bagian Umum dan Perlengkap an
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	Presentas e	500%	7.695.000.000	100 %	1.466.572.880	100%	2.678.000.000	100 %	2.176.175.029	100,00 %	81,26 %	100%	1.700.000.000	300%	5.342.747.909	60,00 %	69,43%	Bagian Umum dan Perlengkap an
10	Penataan Organisasi	IKM Layanan Penataan	Poin	415	4.906.842.663	77,2 2	705.042.558	82,00	789.945.300	78,6 1	624.852.683	95,87%	79,10 %	83	943.865.550	238,83	2.273.760.791	57,55 %	46,34%	Bagian Organisasi

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	Target Renja PD Tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2024 (%)		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
		Organisasi																		
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	Prsentase	500%	12.226.432.777	100%	1.775.667.300	100%	2.271.647.400	100%	2.108.204.363	100,00%	92,81%	100%	2.095.500.000	300%	5.979.371.663	60,00%	48,91%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	Presentase	497,73%	200.745.038.982	100%	31.146.958.544	100,00%	56.249.166.250	100%	50.046.138.823	100,00%	89,97%	100%	44.388.117.439	300%	125.581.214.806	60,27%	62,56%	Asisten Tata Pemerintahan
12	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	Presentase	500%	111.695.474.672	100%	14.141.934.252	100%	16.673.830.450	100%	15.177.853.526	100,00%	91,03%	100%	15.289.529.300	300%	44.609.317.078	60,00%	39,94%	Bagian Pemerintahan
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Presentase	450%	61.635.176.015	100%	10.223.292.955	90%	31.297.965.400	100%	27.276.034.622	111,11%	87,15%	90%	15.977.161.189	290%	53.476.488.766	64,44%	86,76%	Bagian Kesra

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2024 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase	500%	10.445.474.379	100%	1.398.915.118	100%	2.488.345.800	100%	2.116.124.513	100,00%	85,04%	100%	2.598.457.300	300%	6.113.496.931	60,00%	58,53%	Bagian Hukum
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	Presentase	402,19%	16.968.913.916	100%	5.382.816.219	82,40%	5.789.024.600	100%	5.476.126.162	121,36%	94,59%	83,25%	10.522.969.650	283,25%	21.381.912.031	70,43%	126,01%	Bagian Kerjasama
III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	Presentase	500%	15.506.357.648	100%	2.327.084.150	100,00%	3.895.145.300	100%	2.890.560.679	100,00%	74,21%	100%	3.871.146.500	300%	9.088.791.329	60,00%	58,61%	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	Presentase	500%	4.447.933.901	100%	729.394.851	100%	805.998.800	100%	494.530.807	100,00%	61,36%	100%	860.000.000	300%	2.083.925.658	60,00%	46,85%	Bagian Perekonomian
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	Presentase	500%	6.458.023.091	100%	798.498.596	100%	1.714.146.500	100%	1.205.912.885	100,00%	70,35%	100%	1.714.146.500	300%	3.718.557.981	60,00%	57,58%	Bagian Adm Pembangunan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2024 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	387,8	4.600.400.656	80,6 6	799.190.703	77,00	1.375.000.000	85,2 1	1.190.116.987	110,66 %	86,55 %	77,6	1.297.000.000	243,47	3.286.307.690	62,78 %	71,44%	Bagian PBJ

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang telah ditetapkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2021-2026

Sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 1 tahun 2022 tentang kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsi.

Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan diharapkan dapat mejadi landasan meningkatkan Capaian Kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan indikator serta target yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah 2021-2026. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah dapat dilihat dalam table berikut

Tabel 2.3/ T-C.30

Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian			Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	n/a	31.89	32,00	32,10	32,20	32,30	n/a	33,16	n/a	32,10	32,20	32,30	Pengukuran Indikator RB tidak dilaksanakan dengan telah ditetapkan Permenpan RB Np.3 Tahun 2023
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	n/a	95.53%	98.03%	98.25%	98.47%	98.69%	100%	100%	100%	98.25%	98.47%	98.69%	
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Adm. Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Secara umum ada 3 (tiga) isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun 2025 antara lain:

1. Personil Sumber daya Manusia / Pegawai Pada Setiap bagian Sekretariat Daerah yang terbatas.

Permasalahan SDM yang terbatas ini sangat menjadi perhatian bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal ini karena semakin kompleksnya kebijakan dan aturan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Perangkat Daerah, maka diperlukan juga tenaga menjalankan tugas dengan baik demi mencapai tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah.

salah satu faktor penghambat dalam mencapai target kinerja dalam pelaksanaan program/ kegiatan.

2. Fasilitasi pelayanan Tamu dalam mendukung pembangunan IKN

Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Negara, serta Kota Balikpapan sebagai pintu masuk dan penyangga IKN maka semakin banyak Tamu-tamu kenegaraan baik Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga yang berkunjung ke Kota Balikpapan untuk melihat perkembangan pembangunan IKN tersebut. Hal ini tentunya menjadi perhatian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam melakukan fasilitasi pelayanan tamu dalam mendukung kelancaran pembangunan IKN.

3. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah

Pada tahun 2024 ini Sekretariat Daerah mengusulkan untuk dilakukannya perubahan SOTK melalui Perubahan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana Bagian Humas dan Protokol akan ditiadakan dan Fungsi Protokol akan dialihkan ke Bagian Umum dan Perlengkapan serta Bagian Humas akan di alihkan ke Diskominfo Kota Balikpapan

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Sekretariat Daerah, maka fungsi dan tugas Sekretariat Daerah Kota

Balickpapan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, sesuai dengan hasil Forum OPD Sekretariat Daerah bahwa analisis kebutuhan pendanaan pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah tahun 2025 dibutuhkan dana sebesar Rp. 201.614084.155,- dimana terdapat beberapa kegiatan yang berdasar analisis membutuhkan pagu indikatif yang melebihi pagu renstra 2021-2026 tahun 2025.

hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4/TC.31

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	143.745.869.660	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	144.996.042.050
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	79,50 Poin	294.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	79,50 Poin	293.999.475
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 Poin	31.572.787.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 Poin	31.577.789.008
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87 Poin	1.030.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87 Poin	1.025.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87 Poin	47.900.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87 Poin	50.858.472.390
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Poin	9.250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 Poin	5.132.149.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87 Poin	29.070.519.210	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87 Poin	31.279.936.210
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87 Poin	16.385.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87 Poin	16.585.134.000
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	2.300.000.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	2.300.000.000
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Balikpapan	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	100 %	1.700.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Balikpapan	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	100 %	1.700.000.000
10	Penataan Organisasi	Balikpapan	IKM Layanan Penataan Organisasi	84 Poin	1.147.000.000	Penataan Organisasi	Balikpapan	IKM Layanan Penataan Organisasi	84 Poin	1.146.998.517
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Balikpapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	3.096.563.450	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Balikpapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	3.096.563.450

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	100%	52.454.150.980	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	100%	55.615.357.762
12	Administrasi Tata Pemerintahan	Balikpapan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	100 %	18.962.863.361	Administrasi Tata Pemerintahan	Balikpapan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	100 %	19.962.863.361
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	90 %	17.681.978.225	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	90 %	19.181.978.225
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	2.780.592.638	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	3.441.799.420

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	82,81 %	13.028.716.756	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	82,81 %	13.028.716.756	
III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Balikpapan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 %	5.414.063.515	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Balikpapan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100 %	5.380.134.445	
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Balikpapan	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100 %	1.338.373.372	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Balikpapan	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100 %	1.338.373.372	
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Balikpapan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100 %	1.714.146.500	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Balikpapan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100 %	1.680.217.430	
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	78 Poin	2.361.543.643	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	78 Poin	2.361.543.643	
Total					201.614.084.155	Total					205.991.534.257

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahuludimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai penunjang urusan pemerintahan. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan Perangkat Daerah non teknis, secara umum tugas pokok dan fungsinya adalah pelayanan terhadap administrasi. Administrasi tersebut berupa Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Administrasi Perekonomian dan Pembangunan serta Administrasi Umum.

Tabel 2.5/ T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dalam Rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan serta sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan diatas. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan		Indikator	Sasaran		Indikator
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Kota Komponen Pelaporan	1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah
			2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti
			3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti

3.3. PROGRAM , KEGIATAN dan SUB KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara Kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Adapun program secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan selama satu tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
10	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
11	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
18	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
22	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Kegiatan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
28	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
30	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
32	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
33	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
34	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
35	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
36	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
39	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
10	Kegiatan Penataan Organisasi
40	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
41	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
42	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
43	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
44	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
11	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
45	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan
46	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan
47	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
12	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
48	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
49	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
50	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
13	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
51	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
52	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
53	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
14	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum
54	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
55	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum
56	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
15	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah
57	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
58	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri
III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
16	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
59	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
60	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
61	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
17	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
62	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
63	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
64	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
18	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
65	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
66	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
67	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

TABEL 3.3 / T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	BPP	81,00	144.996.042.050		82,00	126.180.622.451	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	BPP	79,50	293.999.475		80,00	197.972.186	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPP	3 dokumen	33.999.650		2 dokumen	47.640.366	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPP	3 dokumen	160.000.000		3 dokumen	33.877.593	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	BPP	3 dokumen	19.999.825		3 dokumen	33.877.593	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPP	6 Laporan	80.000.000		1 Laporan	82.576.634	
4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPP	80,00	31.577.789.008		81,00	34.401.777.019	
4.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPP	152 Orang/Bulan	31.255.793.203		155 Orang/Bulan	34.045.003.615	
4.01.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPP	2450 dokumen	249.996.570		2500 dokumen	259.375.323	
4.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPP	1 Laporan	21.999.505		1 Laporan	40.229.642	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPP	60 Laporan	49.999.730		60 Laporan	57.168.439	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPP	87,00	1.025.000.000		90,00	1.250.000.000	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPP	2 unit	25.000.000		2 unit	50.000.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPP	8 paket	1.000.000.000		8 paket	1.200.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPP	87,00	50.858.472.390		90,00	37.812.824.866	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPP	3 paket	750.000.000		3 paket	1.000.000.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPP	10 paket	4.233.929.070		10 paket	2.512.824.866	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BPP	3 paket	1.250.000.000		3 paket	1.500.000.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPP	4 paket	16.000.000.000		4 paket	10.000.000.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPP	3 paket	800.000.000		3 paket	1.000.000.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPP	60 dokumen	450.000.000		60 dokumen	500.000.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPP	12 laporan	15.874.543.320		12 laporan	7.500.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPP	1000 laporan	11.500.000.000		1100 laporan	13.800.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPP	87,00	5.132.149.000		90,00	8.250.000.000	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPP	3 unit	800.000.000		3 unit	500.000.000	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BPP	1 unit	750.000.000		3 unit	1.250.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPP	150 unit	500.000.000		100 unit	500.000.000	
4.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPP	100 unit	1.500.000.000		50 unit	1.000.000.000	
4.01.01. 2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	BPP	0 unit			0 unit	-	
4.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPP	0 unit	-		3 unit	3.500.000.000	
4.01.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPP	3 unit	1.582.149.000		3 unit	1.500.000.000	
4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPP	87,00	31.279.936.210		90,00	21.515.000.000	
4.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPP	4 laporan	-		4 laporan	15.000.000	
4.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPP	36 laporan	3.400.000.000		36 laporan	3.500.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPP	12 laporan	27.879.936.210		12 laporan	18.000.000.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPP	87,00	16.585.134.000		90,00	14.230.000.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPP	20 unit	1.500.000.000		20 unit	2.000.000.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPP	155 unit	5.200.000.000		155 unit	5.000.000.000	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BPP	50 unit	160.000.000		100 unit	200.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPP	500 unit	1.500.000.000		500 unit	2.000.000.000	
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	BPP	2 unit	25.000.000		2 unit	30.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPP	3 unit	7.250.000.000		3 unit	3.500.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPP	3 unit	950.134.000		3 unit	1.500.000.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BPP	100%	2.300.000.000		100%	2.075.000.000	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BPP	2 orang/bulan	250.000.000		2 orang/bulan	250.000.000	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	BPP	1 Paket	300.000.000		1 Paket	600.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BPP	2 orang/bulan	1.750.000.000		2 orang/bulan	1.225.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	BPP	100%	1.700.000.000		100%	1.525.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01. 2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	BPP	7 paket	800.000.000		7 paket	800.000.000	
4.01.01. 2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	BPP	7 paket	750.000.000		7 paket	600.000.000	
4.01.01. 2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	BPP	1 paket	150.000.000		1 paket	125.000.000	
4.01.01. 2.13	Penataan Organisasi	IKM Layanan Penataan Organisasi	BPP	84,00	1.146.998.517		85,00	1.240.766.853	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01. 2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	BPP	1 dokumen	269.999.917		1 dokumen	264.668.000	
4.01.01. 2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	BPP	1 laporan	311.999.805		1 laporan	346.186.000	
4.01.01. 2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	BPP	1 dokumen	174.999.576		1 dokumen	195.854.000	
4.01.01. 2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	BPP	1 dokumen	204.999.625		1 dokumen	227.617.853	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.01.2.13.045	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	BPP	1 dokumen	184.999.594		1 dokumen	206.441.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	BPP	100%	3.096.563.450		100%	3.682.281.527	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	BPP	1 Laporan	1.058.000.000		1 Laporan	1.288.089.616	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	BPP	1 Laporan	1.085.125.950		1 Laporan	1.298.965.713	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	BPP	1 Laporan	953.437.500		1 Laporan	1.095.226.198	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	BPP	100%	55.615.357.762		100%	53.414.644.598	ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	BPP	100%	19.962.863.361		100%	26.937.980.011	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	BPP	5 dokumen	10.503.500.000		5 dokumen	25.238.806.974	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	BPP	4 dokumen	2.459.363.361		4 dokumen	1.222.769.382	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	BPP	2 dokumen	7.000.000.000		2 dokumen	476.403.655	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	BPP	90%	19.181.978.225		90%	19.078.378.375	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	BPP	3 dokumen	16.644.268.200		3 dokumen	17.172.763.755	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.02. 2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	BPP	2 dokumen	2.331.077.725		21 dokumen	1.640.945.923	
4.01.02. 2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	BPP	1 dokumen	206.632.300		1 dokumen	264.668.697	
4.01.02. 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	BPP	100%	3.441.799.420		100%	2.634.249.661	BAGIAN HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	BPP	407 dokumen	700.800.000		414 dokumen	646.905.346	BAGIAN KERJASAMA
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	BPP	18 kasus	991.999.420		19 kasus	1.166.871.353	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	BPP	407 dokumen	1.749.000.000		414 dokumen	820.472.962	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	BPP	82,81%	13.028.716.756		84,09%	4.764.036.551	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	BPP	2 dokumen	12.442.206.100		2 dokumen	3.970.030.459	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	BPP	1 dokumen	586.510.656		1 dokumen	794.006.092	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	BPP	100%	5.380.134.445		100%	4.236.565.558	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMABNGUNAN
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	BPP	100%	1.338.373.372		100%	1.111.608.529	BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	BPP	12 dokumen	500.000.000		12 dokumen	741.072.353	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	BPP	12 Laporan	598.373.372		12 Laporan	158.801.218	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	BPP	12 dokumen	240.000.000		12 dokumen	211.734.958	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	BPP	100%	1.680.217.430		100%	1.896.894.274	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Kondisi Kinerja Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Usulan Awal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.01.03. 2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	BPP	1 dokumen	290.312.065		1 dokumen	70.680.263	
4.01.03. 2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	BPP	2 Laporan	358.068.950		2 Laporan	1.482.144.705	
4.01.03. 2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	BPP	12 Laporan	1.031.836.415		12 Laporan	344.069.306	
4.01.03. 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	BPP	78,0	2.361.543.643		78,6	1.228.062.755	BAGIAN PBJ
4.01.03. 2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	BPP	341 dokumen	400.000.000		343 dokumen	370.536.176	
4.01.03. 2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	BPP	38 dokumen	748.043.643		39 dokumen	465.816.907	
4.01.03. 2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan	BPP	121 orang	1.213.500.000		133 Orang	391.709.672	
				TOTAL	205.991.534.257		TOTAL	183.831.832.607	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Untuk mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada.

Program di Sekretariat Daerah adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai bagian daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Pendanaan indikatif adalah sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Perangkat Daerah wajib memegang prinsip keuangan daerah yaitu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, Kejujuran dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pendanaan sendiri nantinya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas atas isi kegiatan yang harus dilaksanakan yang mengutamakan kebutuhan Perangkat Daerah dantentunya harus berdampak pula pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2025 adalah sebagaimana table berikut.

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	PAGU INDIKATIF	PEJABAT PENGAMPU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.996.042.050	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293.99.475	BAGIAN KEUANGAN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.577.789.008	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.025.000.000	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.858.472.390	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.132.149.000	

No	Program/Kegiatan	PAGU INDIKATIF	PEJABAT PENGAMPU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.279.936.210	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.585.134.000	
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.300.000.000	
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.700.000.000	
10	Penataan Organisasi	1.146.998.517	BAGIAN ORGANISASI
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.096.563.450	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	55.615.357.762	ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
12	Administrasi Tata Pemerintahan	19.962.863.361	BAGIAN PEMERINTAHAN
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19.181.978.225	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.441.799.420	BAGIAN HUKUM
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	13.028.716.756	BAGIAN PERKOTAAN
III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.380.134.445	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.338.373.372	BAGIAN PEREKONOMIAN
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.680.217.430	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.361.543.643	BAGIAN PBJ
	TOTAL	205.991.534.257	

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* atau alat dalam mengakselerasi peningkatan daya saing bagi Pemerintah Daerah. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi pada Perangkat Daerah merupakan sarana bagi Perangkat Daerah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mendukung dan mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Adapun beberapa inovasi yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

Tabel 5.1
Inovasi Perangkat Daerah

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
1	Sistem Pengendalian dan Monitoring Belanja (SIPEMBELANJA) Bagian Keuangan	√		Aplikasi yang dapat menampilkan progress Pelaksanaan Belanja dimulai dari pembuatan BA Pembayaran sebagai tahap awal, dan penginputan data SPP, SPM hingga SP2D. Sehingga Pengendalian oleh Stakeholder menjadi lebih optimal.	<p>1. Masih terdapat Realisasi Anggaran Kegiatan yang Masih jauh dari Target yang telah ditetapkan.</p> <p>2. proses pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta Belanja di Lingkungan Sekretariat Daerah yang belum optimal, Pembebanan Rekening Belanja belum mencerminkan Realisasi Belanja Sesungguhnya.</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tentang penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pengguna.</p>	Stakeholder di Lingkungan Sekretariat Daerah (Pengadministrasi Sub Kegiatan (PASK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengguna Anggaran (PA), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK))	<p>Kemudahan Bagi Para Stakeholder dalam mengakses informasi pelaksanaan belanja kegiatannya, dimulai dari tahap amprahan dokumen hingga terlaksananya pembayaran tagihan.</p> <p>Memudahkan dalam pemantauan nilai realisasi belanja berjalan secara real time.</p>
2	Portal Layanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan (Bagian Hukum)	√	-	Portal Layanan menggunakan scan barcode atau tautan https://linktr.ee/bagianhukumbpp untuk dapat megakses layanan tersebut. Portal layanan tersebut terintegrasi dengan website jdih.balikpapan.go.id yang memudahkan perangkat daerah dan masyarakat Kota Balikpapan dalam mengakses peraturan dan informasi seputar produk hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Menu Portal Layanan : Form Kunjungan Bagian Hukum, Penelusuran Dokumen (pengajuan SK), Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota,	Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dalam hal ketersediaan informasi peraturan di Kota Balikpapan, dan memudahkan Perangkat daerah di lingkungan Kota Balikpapan untuk mencari peraturan sehubungan dengan tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah, serta memudahkan dalam mengetahui proses pengajuan Keputusan Wali Kota yang dimohonkan kepada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.	Perangkat daerah dan masyarakat	memberikan informasi atas tahapan alur pengajuan proses produk hukum yang telah di tindaklanjuti oleh Bagian Hukum

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Kontak Person, Alur dan Video Permohonan Pengajuan Perwali dan SK Wali Kota.			
3	jdih.balikipapan.go.id (Bagian Hukum)	-	√ (Badan Pembinaan Hukum Nasional)		<p>Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang bertujuan untuk :</p> <p>a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;</p> <p>b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hokum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;</p> <p>c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan</p> <p>d. meningkatkan kualitas pembangunan hokum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.</p>		memudahkan mencari informasi dan peraturan hukum, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
4	SIMASPRO (SISTEM INFORMASI HUMAS DAN PROTOKOL) (Bagian Humas dan Protokol)	√		Tingginya frekwensi kegiatan Pimpinan Daerah belum didukung dengan aplikasi sistem penjadwalan secara digital. Penjadwalan kegiatan yang menjadi bagian tugas Sub Bagian Protokol masih dikerjakan secara manual dengan birokrasi yang sangat panjang. Penjadwalan masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan penginputan jadwal secara manual hanya bisa dilakukan di kantor, sehingga apabila ada surat yang masuk ke meja Protokol diluar jam dinas maka operator harus ke kantor terlebih dahulu untuk melakukan penginputan.	Birokrasi yang terlalu berbelit kerap menuai komplain dari pejabat yang secara mendadak menerima disposisi yang disampaikan Protokol, bahkan tak jarang Pejabat yang disampaikan disposisi tersebut baru memonitor adanya disposisi setelah acara usai, alhasil acara tidak dihadiri. Hal tersebut tentunya akan membuat citra buruk bagi Pemerintah	meningkatnya kemampuan aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pelaksanaan tugas, memudahkan mekanisme penginputan surat masuk serta meningkatnya kualitas layanan data dan informasi bagi pimpinan. Sedangkan dari sisi eksternal aplikasi ini juga mampu menyajikan layanan informasi publik terkait jadwal kegiatan Pemerintah Kota dan menjadi sumber data untuk tracking kehadiran pejabat	

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
5	Website pengelolaan program beasiswa stimulan pendidikan tinggi (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	---	√	Inovasi ini merupakan layanan pendaftaran, persyaratan, ketentuan pengajuan dan pengumuman hasil seleksi beasiswa pendidikan tinggi yang berprestasi dibidang akademik	1.Banyaknya mahasiswa/i calon penerima beasiswa yang mendaftar program beasiswa stimulan sehingga sulit untuk dilakukan secara manual	Mahasiswa/i berprestasi dibidang akademik asal Balikpapan	Memudahkan proses verifikasi berkas pengelolaan beasiswa stimulan

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (steakholder) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ranwal Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi awal pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 2021-2026, dan akan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta menjamin transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancang akan dilaksanakan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025. Disadari bahwa dalam penyusunan renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja di masa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025.

V. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 50 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersebut, diperlukan adanya rencana kerja tahunan yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun untuk itu Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyusun Renja sebagai salah satu acuan pelaksanaan kegiatan.

Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah yang memuat rencana program dan kegiatan untuk Tahun 202 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun Rencana kerja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan, sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga negara RI Tahun 2015 No 08 Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5670);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
10. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Balikpapan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

b. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025 agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi,

tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Mengemukakan Pengertian Ringkas tentang Renja SKPD keterkaitan antar Renja SKPD dengan Dokumen RKPD Renstra SKPD serta Tindak lanjutnya Proses Penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang Peraturan Perundang undangan serta peraturan Daerah Lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: Jumlah program dan jumlah kegiatan. Serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2025.

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tentang kebijakan serta program inovasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam mendukung terlaksanannya tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja perangkat daerah.

BAB VI PENUTUP

Meliputi hal hal yang perlu ditambahkan sebagai kesimpulan atas dokumen Perencanaan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan fasilitasi tugas pokok DPRD, antara lain dukungan fasilitasi dalam administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 01 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersebut, diperlukan adanya rencana kerja tahunan serta evaluasi rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Evaluasi Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah yang memuat antara lain capaian kinerja rencana kerja terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen evaluasi rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Realisasi dan Evaluasi Program/kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keberhasilan pencapaian target kinerja mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD, sehingga diharapkan anggota DPRD dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Untuk pemenuhan terhadap sasaran tersebut, maka pada tahun 2023 telah dilakukan pembiayaan (APBD) untuk pelaksanaannya, yaitu melalui 2 (dua) Program yang menghasilkan outcome dan 15 (lima belas) Kegiatan yang menghasilkan output dengan anggaran murni sebesar Rp 151.154.695.210,- dan realisasi sebesar Rp 122.318.615.483,.

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dijabarkan bahwa telah terlaksana dengan baik program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2023 dengan capaian fisik sebesar 97,72% dan capaian keuangan sebesar 81%. Adapun pematangan dalam capaian fisik Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih memerlukan perbaikan dan peningkatan

kualitas pelayanan dimasa yang akan datang. Selain itu, capaian realisasi keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan perlu memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas dalam keberlangsungan kegiatan-kegiatan pendukung urusan penunjang tugas dan fungsi DPRD.

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Target kinerja digunakan sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian output yang diinginkan.

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : IKM Internal Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Dari target shasil survey internal kepuasan masyarakat (IKM) Internal sebesar 72, dan yang tercapai sebesar 85,47 atau 118% dari target yang hendak dicapai.

Pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan, antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP

Evaluasi Hasil : Nilai Sakip sebesar 64,86 dengan predikat B Yaitu “Baik”

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 90,62 dengan predikat A yaitu “Sangat Baik”

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil : Kegiatan ini tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 85,66 dengan predikat B yaitu “Baik”

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah

- Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 85,38 dengan predikat B yaitu “Baik”
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja : IKM Layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 84,92 dengan predikat B yaitu “Baik”
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 84,49 dengan predikat B yaitu “Baik”
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 83,62 dengan predikat B yaitu “Baik”
 9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Layanan Keuangan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 73,82 dengan predikat C yaitu “Kurang Baik”
 10. Layanan Administrasi DPRD
Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi DPRD
Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 71,54 dengan predikat C yaitu “Kurang Baik”

2. Program Pelaksanaan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator : Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi

Evaluasi Hasil :

Dari target 100 % yang tercapai adalah 83% hal ini dikarenakan mengikuti rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan DPRD.

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan, antara lain :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Indikator Kinerja : Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 60%

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhiya Fasiitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhiya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 85%

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 75%

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Indikator Kinerja : Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhiya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPR

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

7. Pembahasan Kerjasama Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhiya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 50% dikarenakan kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023

8. Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator Kinerja : Persentase Fasilitasi Tugas DPRD

Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 90%

Adapun dalam evaluasi rencana kerja ini, terdapat kegiatan yang mencapai target, melampaui ataupun yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, berikut adalah faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja.

Faktor Pendorong :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPRD Kota Balikpapan dengan unit kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Sekretariat DPRD dalam mencapai Sasaran;

3. Koordinasi yang sinergis antara unit kerja di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan seluruh kegiatan;
4. Ketersediaan SDM aparatur yang berkompeten;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada Sekretariat DPRD dalam menunjang efektivitas pelayanan fasilitasi Anggota DPRD.

Faktor Penghambat :

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih belum terlaksana secara optimal;
2. Adanya beberapa penyesuaian kebutuhan terhadap fasilitasi DPRD ataupun mengikuti kebutuhan kegiatan dan jadwal kerja DPRD;
3. Penyusunan target pada Renstra dinilai terlalu tinggi, sehingga perlu di evaluasi kembali penentuan target pada setiap kegiatan.

Tabel 1

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Balikpapan**

Nama Perangkat Daerah :

SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4													
4	02												
4	02	01			78	65,85	72	85,47	119%	74	225,32	2,89	
4	02	01	2.01										
4	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74	64,59	68	64,59	95%	70	199,18	2,69

4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78	20	72	90,62	126%	74	184,62	2,37
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78	84	72	85,66	119%	74	243,66	3,12
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78	8	72	85,38	119%	74	167,38	2,15
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	1	72	84,92	118%	74	159,92	2,05
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	5	72	84,49	117%	74	163,49	2,10
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	4	72	83,62	103%	74	161,62	2,07
4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	78	71,43	72	73,82	99%	74	219,25	2,81
4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	78	50	72	71,54	99%	74	195,54	2,51

4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	80%	72,1	74	83	112%	76	231,1	288,88
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100	100	60	60%	100	260	260,00
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100	100	100	100%	100	300	300,00
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	51,82	100	85	85%	100	236,82	236,82
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	75	100	75	75%	100	250	250,00
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	80	100	100	100%	100	280	280,00
4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100	100	100	100%	100	300	300,00

4	02	02	2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	0	100	50	50%	100	150	150,00
4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100%	83,33	100	90	90%	100	273,33	273,33

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menguji indikator yang disesuaikan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, pada saat ini adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagai fasilitator kegiatan DPRD, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berdasarkan Indikator Kinerja pada Renstra 2021-2026 indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Reformasi Birokrasi
3. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD

Namun, seiring berjalannya pelaksanaan kinerja instansi terdapat peraturan yang mengubah indikator kinerja perangkat daerah. Adanya perubahan indikator kinerja ini dikarenakan terdapat indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD sudah tidak lagi dilakukan perhitungan kembali untuk periode berjalan sehingga tidak bisa menjadi target pengukuran kinerja sebagaimana sesuai dengan yang tercantum dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 diperlukan penetapan perubahan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama yang menjadi sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
3. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD

Pengukuran tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah :
SEKRETARIAT DPRD

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN SEKRETARIAT DPRD TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	72	74	76	78					Merupakan Indikator Renstra 2021- 2026
			Nilai Reformasi Birokrasi	27	28	29	30	n/a	-	-	-	Merupakan Indikator Renstra 2021- 2026
			Nilai Sakip Sekretariat DPRD	-	64,85	64,95	72,9	72,86	-			IKU Perubahan
			Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	70	72	74	76	101%	-	100%	100%	Merupakan Indikator Renstra 2021- 2026

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.
2. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
3. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat dinamis sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
4. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
5. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.
6. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya yang perlu ada penyesuaian dengan kebutuhan riil yang berkembang.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
- b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kota Balikpapan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan sesuai tata kala tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Permasalahan-permasalahan yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini memerlukan penyesuaian kedepannya sehingga dapat meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

2. Dinamika sosial politik yang berkembang, adanya masa transisi keanggotaan DPRD periode baru sehingga berpengaruh pada perencanaan kinerja alat-alat kelengkapan DPRD yang kemudian turut mempengaruhi pada capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun masa transisi tersebut;
3. Tugas utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD;
4. Dukungan sarana fasilitas gedung kantor DPRD;
5. Adanya aturan-aturan baru yang mendukung pelaksanaan tugas namun membutuhkan pemahaman aturan serta waktu dalam melakukan penyesuaian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD, maka fungsi dan tugas Sekretariat DPRD terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3

T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah :

SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		5	6	7	9	10	11		12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BALIKPAPAN	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	74	Rp 77.754.836.034	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BALIKPAPAN	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	74	Rp 94.999.214.112	
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	70	Rp 49.533.498	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	70	Rp 60.000.000	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74	Rp 4.496.048.380	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74	Rp 5.934.104.000	
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	74	Rp -	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	74	Rp -	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74	Rp 470.568.232	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74	Rp 588.660.000	

6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	Rp	16.954.033.968	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	Rp	27.819.898.046
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	990.669.961	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	998.250.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74	Rp	5.475.928.212	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74	Rp	6.885.000.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	1.824.483.846	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	Rp	5.500.000.000
10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74	Rp	37.313.197.746	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74	Rp	40.713.302.066
11	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	74	Rp	10.180.372.192	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	74	Rp	6.500.000.000
12	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	BALIKPAPAN	PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	76	Rp	38.114.994.966	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	BALIKPAPAN	PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	76	Rp	52.367.000.000

13	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp	9.623.436.649	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp	11.400.000.000
14	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp	3.137.121.545	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp	6.650.000.000
15	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp	3.962.679.846	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp	4.850.000.000
16	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp	6.046.693.034	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp	10.252.000.000
17	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp	7.017.245.560	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp	12.000.000.000
18	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitas Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp	990.669.961	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitas Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp	680.000.000

19	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp	330.223.320	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp	635.000.000
20	Fasilitasi Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp	7.006.925.050	Fasilitasi Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp	5.900.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 4
Tabel T-C.32
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:

SEKRETARIAT DPRD

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan “Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Fasilitasi dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan“ serta dengan memperhatikan Misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan prima dan memfasilitasi sarana dan prasarana guna peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD
2. Menyelenggarakan Pelayanan yang memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan.
3. Melaksanakan Tertib administrasi sesuai dengan Peraturan dan ketentuan untuk mendukung akuntabilitas akuntabilitas kinerja Setwan dan Anggota DPRD.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Renja Sekretariat DPRD disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dan dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Adapun sasaran dari tersusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Balikpapan terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

serta Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur Program, Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD;

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diberi pendanaan, antara lain :
 1. Jumlah Program sebanyak 2 (dua) Program, Jumlah Kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 64 (enam puluh empat) Sub Kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kota Balikpapan, dikarenakan seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan program dan kegiatan yang sifatnya memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Balikpapan
 3. Pendanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan bersumber dari APBD Kota Balikpapan
- c. Terdapat ketidaksesuaian antara rancangan awal pendanaan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 1. Rencana pendanaan pembangunan Gedung kantor Sekretariat DPRD;
 2. Rencana kebutuhan pendanaan pembelian/ pemeliharaan aplikasi;
 3. Rencana kebutuhan pendanaan Kerjasama dengan media online;
 4. Rencana kebutuhan bimtek DPRD;
 5. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi tenaga ahli;
 6. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi 7 (tujuh) fraksi;
 7. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi pengawasan DPRD.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5

T-C.33

**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Balikpapan**

Nama Perangkat Daerah :
**SEKRETARIAT
DPRD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	02				SEKRETARIAT DPRD							
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	BALIKPAPAN	76	93.193.000.000	APBD	78	114.904.900.000
4	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Balikpapan	72	60.000.000	APBD	74	60.000.000
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Balikpapan	1	15.000.000	APBD	1	15.000.000
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Balikpapan	3	15.000.000	APBD	3	15.000.000

4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Balikpapan	1	15.000.000	APBD	1	15.000.000
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Balikpapan	3	15.000.000	APBD	3	15.000.000
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	76	5.934.104.000	APBD	78	5.830.314.600
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	30	5.934.104.000	APBD	30	5.830.314.600
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	76	603.663.891	APBD	78	358.302.075
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikpapan	30	103.663.891	APBD	30	25.000.000
4	02	01	2.05	0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikpapan	30	500.000.000	APBD	30	333.302.075
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	76	24.912.425.352	APBD	78	22.514.529.593
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	23	70.000.000	APBD	23	219.615.000

4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	10	3.000.000.000	APBD	10	1.800.000.000
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balikpapan	15	1.452.000.000	APBD	15	1.597.200.000
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	5	2.050.000.000	APBD	5	1.500.000.000
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	2	350.000.000	APBD	2	602.126.000
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Balikpapan	4	400.000.000	APBD	4	658.845.000
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	295	4.021.000.000	APBD	295	4.423.943.593
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	4	13.569.425.352	APBD	3	11.712.800.000

4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	76	997.620.000	APBD	78	1.098.075.000
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Balikpapan	1	997.620.000	APBD	5	1.098.075.000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	76	8.129.475.000	APBD	78	8.025.930.000
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jenis Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	4	1.500.000.000	APBD	4	1.171.280.000
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	5	1.150.000.000	APBD	5	2.196.150.000
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	4	5.479.475.000	APBD	4	4.658.500.000
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	76	5.500.000.000	APBD	78	5.457.100.000

4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	29	1.500.000.000	APBD	29	1.464.100.000
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Balikpapan	2	4.000.000.000	APBD	2	3.993.000.000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	76	40.695.711.757	APBD	78	54.313.033.732
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Balikpapan	45	39.525.102.066	APBD	45	53.140.213.732
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Balikpapan	5	949.742.050	APBD	45	880.000.000
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Balikpapan	45	220.867.641	APBD	45	292.820.000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	76	6.360.000.000	APBD	78	9.927.115.000
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Balikpapan	10	600.000.000	APBD	10	219.615.000

4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Balikpapan	7	260.000.000	APBD	7	880.000.000
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Balikpapan	200	1.500.000.000	APBD	270	5.500.000.000
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Balikpapan	10	4.000.000.000	APBD	10	3.327.500.000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PRESENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG TERFASILITASI	BALIKPAPAN	78%	56.807.000.000	APBD	80%	47.656.624.540
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	100%	11.400.000.000	APBD	100%	9.203.435.523
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Balikpapan	5	50.000.000	APBD	5	51.000.000
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Balikpapan	40	3.100.000.000	APBD	40	4.425.315.523

4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan yang diselenggarakan dalam satu tahun	Balikpapan	5	6.200.000.000	APBD	4	2.342.560.000
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Balikpapan	5	1.400.000.000	APBD	4	2.164.560.000
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	650.000.000	APBD	1	220.000.000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	100%	6.650.000.000	APBD	100%	3.000.000.000
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Balikpapan	1	1.300.000.000	APBD	1	500.000.000
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	1	1.300.000.000	APBD	1	500.000.000
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Balikpapan	1	1.800.000.000	APBD	1	500.000.000
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Balikpapan	1	1.300.000.000	APBD	1	500.000.000
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Balikpapan	2	500.000.000	APBD	2	500.000.000

4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Balikpapan	1	450.000.000	APBD	1	500.000.000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	100%	4.850.000.000	APBD	100%	21.800.000.000
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Balikpapan	48	750.000.000	APBD	48	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Balikpapan	24	750.000.000	APBD	24	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	48	750.000.000	APBD	48	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Balikpapan	48	750.000.000	APBD	48	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Balikpapan	24	750.000.000	APBD	24	2.725.000.000

4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Balikpapan	1	500.000.000	APBD	1	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Balikpapan	1	300.000.000	APBD	1	2.725.000.000
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Balikpapan	1	300.000.000	APBD	1	2.725.000.000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	100%	14.692.000.000	APBD	100%	6.299.653.796
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Balikpapan	45	0	APBD	5	220.000.000
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Balikpapan	45	4.000.000.000	APBD	90	1.148.139.017
4	02	02	2.04	0003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Balikpapan	35	9.000.000.000	APBD	12	3.300.000.000
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Balikpapan	5	940.000.000	APBD	6	875.814.779

4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Balikpapan	7	315.000.000	APBD	6	275.000.000
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Balikpapan	4	250.000.000	APBD	48	275.000.000
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	Balikpapan	1	187.000.000	APBD	1	205.700.000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	100%	12.000.000.000	APBD	100%	3.847.035.221
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	8.000.000.000	APBD	1	181.500.000
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Balikpapan	3	4.000.000.000	APBD	3	3.665.535.221
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Persentase Fasilitas Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Balikpapan	100%	680.000.000	APBD	100%	663.000.000
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Balikpapan	1	350.000.000	APBD	1	300.000.000
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Balikpapan	1	330.000.000	APBD	1	363.000.000

4	02	02	2.07		Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	100%	635.000.000	APBD	100%	5.225.000.000
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Balikpapan	2	275.000.000	APBD	2	302.500.000
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Balikpapan	2	360.000.000	APBD	2	220.000.000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	Balikpapan	100%	5.900.000.000	APBD	100%	2.321.000.000
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	450.000.000	APBD	1	495.000.000
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	Balikpapan	16	4.000.000.000	APBD	16	1.650.000.000
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Balikpapan	12	650.000.000	APBD	12	176.000.000
4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pansus	Terlaksanannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Balikpapan	5	800.000.000	APBD		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan. Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Adapun rancangan akhir Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Rancangan Akhir RKPD

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BALIKPAPAN	IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH	76	Rp 93.193.000.000
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	72	Rp 60.000.000
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76	Rp 5.934.104.000
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	76	Rp -
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76	Rp 603.663.891

6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76	Rp 24.912.425.352
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76	Rp 997.620.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76	Rp 8.129.475.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76	Rp 5.500.000.000
10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	76	Rp 40.695.711.757
11	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	76	Rp 6.360.000.000
12	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	BALIKPAPAN	PERSENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	78	Rp 56.807.000.000
13	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp 11.400.000.000
14	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp 6.650.000.000
15	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp 4.850.000.000
16	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp 14.692.000.000
17	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp 12.000.000.000

18	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp	680.000.000
19	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp	635.000.000
20	Fasilitasi Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp	5.900.000.000

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sendiri adalah perpanjangan tangan Pemerintah Kota, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas utama yakni memfasilitasi tugas fungsi dan wewenang DPRD, sehingga erat kaitannya keaktifan kinerja DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD. Begitupun juga kinerja Sekretariat selaku OPD bergantung kepada kinerja seluruh Anggota DPRD yang terbagi fungsi kerjanya melalui Alat Kelengkapan Dewan atau yang biasa disebut dengan AKD yang terdiri dari Pimpinan, Komisi, Badan dan Panitia Khusus. Pola kerja DPRD yang terencana dan sistematis akan mempengaruhi performa kualitas tugas fasilitasi Sekretariat DPRD.

Dalam memfasilitasi kinerja anggota DPRD tantang terberat Sekretariat DPRD adalah pada perbedaan regulasi dan budaya kerja yang menjadi acuan bagi anggota DPRD, serta factor politis yang secara hukum diluar kendali pegawai pemerintah. Berikut gambaran kebijakan dan regulasi yang mengatur tata kerja antara ASN dan Non ASN dan DPRD dilingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Selain dari perbedaan yang fundamental pada tata cara dan budaya kerja terdapat juga perbedaan pada perencanaan kerja antara DPRD dengan Pemerintah Kota baik secara kelembagaan maupun individu. DPRD belum memiliki rencana kerja yang berbasis target pada pencapaian kinerja, waktu dan atribut penting lainnya, tidak seperti instansi maupun pegawai pemerintah yang terikat regulasi dan juga perjanjian kinerja.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman, dan mewujudkan misi ke 1 Pemerintahan yang baik maka diperlukan sebuah strategi

peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital, modern, adaptif, mengikuti era dan perkembangan zaman yang di mulai dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada DPRD Kota Balikpapan dalam menjalankan Fungsi dan kewenangannya (Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penganggaran) maka dilaksanakan pembahasan antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan seluruh elemen Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk merumuskan isu strategis yang menjadi fokus penguatan pemberian layanan dan fasilitasi DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, dengan hasil sebagai berikut.

1. Pelayanan dan Fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih bersifat Konvensional;
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM sehingga pelayanan dan fasilitasi sangat lambat, tidak efektif dan efisien serta tidak transparan;
3. Pendokumentasian, pengarsipan dokumen penting belum berjalan dengan baik;
4. Belum optimalnya sinergitas antar lembaga;
5. Belum tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi antara Eksekutif, Legislatif dan masyarakat.

Sistem Informasi Agenda kerja (SIAK) DPRD merupakan inovasi dalam bentuk web base yang kedepannya akan dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi agenda kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan, sehingga dapat memonitor progress dan proses sampai dengan evaluasi kegiatan. Stakeholder utama yakni peserta yang terkait dalam setiap agenda kegiatan DPRD dapat menggunakan SIAK DPRD. Hal ini bermanfaat bahwa pengguna SIAK DPRD dapat mengakses kapanpun, dimanapun melalui link yang ditautkan pada seluruh platform social media milik DPRD. Dengan mengakses link yang telah digunakan, dan memasukan kode sandi user dari tiap jenis agenda kerja, stakeholders dapat memantau proses, progress serta dokumen hasil agenda kegiatan DPRD.

SIAK merupakan sebuah terobosan yang dihadirkan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka menciptakan sebuah layanan yang berbasis digital guna memberikan layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Terobosan ini juga merupakan sarana dalam rangka membangun harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif yang muaranya mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Kota Balikpapan.

Dalam konsep besar SIAK merupakan perwujudan dari rencana implementasi RPJMN Pemerintah Republik Indonesia dalam Agenda prioritas ke 8 yang lebih di kenal sebagai Nawacita ke 2 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Sejalan dengan itu Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Balikpapan dalam RPJMD telah menetapkan Visi Kota Balikpapan sebagai Kota

Terkemuka dan Kota Modern dengan Misi ke 1 adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai Misi ke 1 Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik maka di butuhkan strategi dan terobosan untuk memulai dan mengubah sistem layanan pemerintahan dari konvensional menjadi layanan digitalisasi. Sistem Digital ini merupakan alat dalam rangka menghadirkan layanan yang memenuhi prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Prinsip tersebut yaitu layanan cepat, tepat, efektif dan efisien serta transparan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan penyusunan KUA PPAS Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan sebagai instrument pengukuran capaian kinerja organisasi. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan yang berkualitas.

Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dan segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

W. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Bappeda Litbang melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rankhir Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2025;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rankhir Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD serta Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda Litbang

Capaian kinerja Renja Bappeda Litbang, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Bappeda Litbang.

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Bappeda Litbang untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, maka capaian kinerja Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada akhir tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Bappeda Litbang Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab
					I		II		III		IV										
					8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12	15=14/5X100%									
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	85,55	11.362.009.150	0	2.608.596.038	0	2.737.933.456	78,61	1.955.139.728	0	2.961.833.389	78,61	10.263.502.611	92%	90,33%	78,61	19.104.729.132	92%	31,07%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	85,80	7.250.000.000	0	1.467.200.629	0	2.085.090.110	76,85	1.417.676.847	0	1.427.400.957	76,85	6.397.368.543	90%	88,2%	158,32	12.408.147.015	184%	28,72%	Bappeda Litbang
	* Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35	7.250.000.000	34	1.467.200.629	34	2.085.090.110	32	1.417.676.847	32	1.427.400.957	32	6.397.368.543	91%	88,2%	32	12.408.147.015	0%	0%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	83,55	615.000.000	0	614.313.883	0	-	78,46	-	0	-	78,46	614.313.883	94%	99,9%	161,37	614.313.883	193%	19%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	90	615.000.000	90	614.313.883	0	-	0	-	0	-	90	614.313.883	100,0%	99,9%	90	614313883	0%	0%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum perangkat daerah	85,55	2.272.915.154	0	375.714.956	0	469.480.771	78,24	313.331.935	0	1.044.522.851	78,24	2.203.050.513	91%	96,9%	161,15	4.014.114.731	188%	49,08%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000	1	-	0	7.542.500	1	-	0	-	1	7.542.500	100,0%	75,4%	1	14.330.150	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	603.612.600	4	44.289.000	0	69.208.500	-	47.378.130	9	416.072.400	13	576.948.030	100,0%	95,6%	13	1.086.220.930	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	404.072.554	7	59.468.700	7	106.513.205	7	109.165.300	7	110.951.572	7	386.098.777	100,0%	95,6%	7	819.968.492	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	76.216.000	2	30.010.000	2	-	2	29.501.500	2	12.707.000	2	72.218.500	100,0%	94,8%	2	180.028.950	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	264	1.740.000	66	240.000	52	210.000	50	228.000	96	720.000	264	1.398.000	100,0%	80,3%	264	3.873.000	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	26.774.000	0	240.000	1	6.894.050	-	2.537.700	-	12.370.050	1	22.041.800	100,0%	82,3%	1	52.916.300	0%	0%	Bappeda Litbang

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	
					I		II		III		IV			12=8+9+10+11		14=6+12		15=14/5X100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		14=6+12		15=14/5X100%		16		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	1.150.500.000	45	241.467.256	35	279.112.516	10	124.521.305	30	491.701.829	120	1.136.802.906	100,0%	98,8%	120	1.856.776.909	0%	0%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	85,50	512.774.900	0	85.643.991	0	127.490.898	81,69	113.909.515	0	149.936.693	81,69	476.981.097	96%	93,0%	163,43	967.374.659	191%	31,63%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	4.000.000	0	2.640.000	1	172.000	0	133.000	0	89.000	1	3.034.000	100,0%	75,9%	1	5.648.725	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	24.000.000	0	5.104.971	1	2.614.562	0	1.796.014	0	4.894.894	1	14.410.441	100,0%	60,0%	1	28.971.578	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	29.240.000	0	3.929.400	1	5.894.100	0	6.947.490	0	9.185.250	1	25.956.240	100,0%	88,8%	1	52.397.160	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	455.534.900	0	73.969.620	1	118.810.236	0	105.033.011	0	135.767.549	1	433.580.416	100,0%	95,2%	1	880.357.196	0%	0%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	81,1	711.319.096	0	65.722.579	0	55.871.677	80,16	110.221.431	0	339.972.888	80,16	571.788.575	99%	80,4%	162,17	1.100.778.844	200%	46,45%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	262.435.000	2	41.417.638	2	33.831.057	2	49.968.328	0	84.839.808	6	210.056.831	100,0%	80,0%	6	370.114.240	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	181.297.896	3	24.304.941	2	22.040.620	9	30.966.953	2	32.262.819	16	109.575.333	100,0%	60,4%	16	208.954.905	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	232	66.000.000	0	0	0	0	0	-	232	65.552.160	232	65.552.160	100,0%	99,3%	232	95513835	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	188	58.000.000	0	0	0	0	94	29.286.150	94	27.354.750	188	56.640.900	100,0%	97,7%	188	102.889.050	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	143.586.200	0	0	1	0	0	-	0	129.963.351	1	129963351,00	100,0%	90,5%	1	323306814	0%	0%	Bappeda Litbang

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab
					I		II		III		IV										
					8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12	15=14/5X100%									
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16
	dan Bangunan Lainnya		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,769	3.759.867.778	0	168.148.541	0	566.759.948	0	823.205.170	20,2 6	1.619.700.559	20,26	3.177.814.218	61,83%	84,52%	50	5.945.864.875	153%	32,00%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	1,82	1.503.867.778	0	10.988.250	0	376.908.897	0	260.132.300	2,39	832.170.820	2,39	1.480.200.267	131%	98,4%	477%	2.417.961.233	241%	39,34%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	1.503.867.778	1	10.988.250	0	376.908.897	0	260.132.300	1	832.170.820	2	1.480.200.267	100,0%	98,4%	2	2.417.961.233	0%	0%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	100	1.436.000.000	0	47.081.050	50	165.480.560	25	171.835.300	25	505.514.741	100	889.911.651	100%	62,0%	200	1.905.242.941	200%	22,40%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan daerah)	43	1.327.550.000	22	10.900.000	11	158.727.560	2	117.542.250	8	502.434.741	43	789.604.551	100,0%	59,5%	43	1.614.904.551	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	108.450.000	0	36.181.050	1	6.753.000	0	54.293.050	0	3.080.000	1	100.307.100	100,0%	92,5%	1	152.218.470	0%	0%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	2,89	820.000.000	0	110.079.241	0	24.370.491	0	391.237.570	2,57	282.014.998	2,57	807.702.300	89%	98,5%	505%	1.684.838.701	161%	42,84%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	820.000.000	1	110.079.241	1	24.370.491	1	391.237.570	1	282.014.998	4	807.702.300	100,0%	98,5%	4	936.311.090	0%	0%	Bappeda Litbang
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	2.415.000.000	0	57.000.000	50	492.324.386	25	707.735.238	25	1.047.613.044	100	2.304.672.668	100%	95,43%	200	5.468.764.391	200%	32,73%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	100	275.000.000	0	-	50	-	25,00	82.493.400	25,0 0	192.484.600	100,00	274.978.000	100%	100,0%	200,00	673.215.903	200%	44%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan	1	-			0,00				0,00		0	-	0,0%	0,0%	0	-	0%	0%	Bappeda Litbang

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab
					I		II		III		IV										
					8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12	15=14/5X100%									
1	3	4	7 K Rp		8 K Rp		9 K Rp		10 K Rp		11 K Rp		12=8+9+10+11 K Rp		13=12/7X100% K Rp		14=6+12 K Rp		15=14/5X100% K Rp		16
	Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelmebagaan dan Ketatalaksanaan																			
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	275.000.000	0	-	0	-	1	82.493.400	0	192.484.600	1	274.978.000	100,0%	100,0%	1	673.215.903	0%	0%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	100	100.000.000	0	-	50	-	0	19.999.400	50	79.997.600	100	99.997.000	100%	100,0%	200	549.148.882	200%	14,12%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	100.000.000	0	-	0	-	0	19.999.400	1	79.997.600	1	99.997.000	100,0%	100,0%	1	99.997.000	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	199.432.962	0%	0%	Bappeda Litbang
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	0	249.718.920	0%	0%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	1.290.000.000	-	50	252.000.000	25	483.650.252	25	540.543.439	100	1.276.193.691	100%	98,9%	200	2.908.783.172	200%	43,27%	Bappeda Litbang	
	Sub kegiatan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	420.000.000	0	-	120.000.000		180.000.000	0	108.817.000	1	408.817.000	100,0%	97,3%	1	508.694.800	0%	0%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	250.000.000	0	-	0	1	49.050.252	0	198.326.439	1	247.376.691	100,0%	99,0%	1	247.376.691	0%	0%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2	470.000.000	0	-	132.000.000	1	254.600.000	0	83.400.000	2	470.000.000	100,0%	100,0%	2	1.053.710.681	0%	0%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1	150.000.000	0	-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	100,0%	100,0%	1	949.117.000	0%	0%	Bappeda Litbang	

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab		
					I		II		III		IV			12=8+9+10+11				13=12/7X100%			15=14/5X100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp		K	Rp
1	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12	15=14/5X100%	16										
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	4	750.000.000	0	57.000.000	2	240.324.386	2	121.592.186	0	234.587.405	4	653.503.977	100,0%	87,1%	8	1.337.616.434	32%	29,35%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Mode I replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	175.000.000	0	57.000.000	1	70.681.250	0	29.800.000	0	17.300.000	1	174.781.250	100,0%	99,9%	1	338.633.569	0%	0%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	175.000.000	0	-	1	125.000.000	0	-	0	17.546.400	1	142.546.400	100,0%	81,5%	1	236.936.400	0%	0%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	300.000.000	0	-	0	44.643.136	1	62.426.386	0	147.896.005	1	254.965.527	100,0%	85,0%	1	287.532.625	0%	0%	Bappeda Litbang	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	100.000.000	0	-	0	-	1	29.365.800	0	51.845.000	1	Rp 81.210.800	100,0%	81,2%	1	Rp 124.530.840	0%	0%	Bappeda Litbang	
Rata-rata capaian kinerja (%)											92,69%	84,50%			52,7%	10,12%						

Penjabaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja yang Telah dilaksanakan

Berdasarkan Tabel 2.1. Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2023 di atas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2023, diperoleh evaluasi hasil bahwa Secara umum, Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada Tahun 2023 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari tiga sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja yang menjadi target pada Tahun 2023 dengan rata-rata capaian sebesar 93,84% dengan predikat Sangat Tinggi . Capaian indicator tersebut terlaksana melalui empat program yaitu: 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan juga peran masyarakat yang ikut serta dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan Kota Balikpapan. Sedangkan pada akuntabilitas keuangan realisasinya mencapai 84,50% dari total Anggaran Belanja Langsung, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,15%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian

perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
- Melaksanakan penyusunan Teknokratis Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMD) Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025-2029;
- Melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Melaksanakan desk verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Melaksanakan pendampingan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Melaksanakan desk verifikasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA PD);
- Memastikan keterkaitan, sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA PD) Pemerintah Kota Balikpapan dengan dokumen perencanaan di level Nasional, dan level Provinsi;
- Memastikan keterkaitan, sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan di level Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA PD) Pemerintah Kota Balikpapan;

- Melaksanakan proses penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA PD) sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku dan menggunakan pendekatan teknokratis (FGD dan Konsultasi Publik), partisipatif (Usulan Masyarakat Perseorangan/ Lembaga) , top down (keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi, dan Kota Balikpapan), bottom up (Rakorrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota), dan politik (Usulan Pokok-pokok Pikiran);
- Melakukan penginputan data baru dan pemutakhiran data pada aplikasi E-Database di seluruh kelurahan pada kecamatan Balikpapan Tengah. Data tersebut digunakan untuk melakukan analisis penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga dilakukan Penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023;
- Melaksanakan desk penyusunan kertas kerja evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Melaksanakan desk penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023;
- Bersinergi bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam mengembangkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pengukuran kinerja untuk pelaksanaan evaluasi hasil perencanaan dan evaluasi pelaksanaan SAKIP dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan mengembangkan aplikasi REAKSI;
- Melaksanakan rapat koordinasi terkait penggunaan aplikasi REAKSI dalam penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
- Melaksanakan sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Terintegrasi;
- Penyusunan dokumen indeks kulaitas perencanaan Kota Balikpapan;
- Penyusunan Dokumen Kjaian Museum Kota Balikpapan;
- Penyusunan profil bisnis kota Balikpapan;
- Penyusunan dokumen kajian survey indeks pelayanan infrastruktur dan kota layak huni tahun 2023;
- Penyusunan analisis kajian data metocean, hidrodinamika dan sedimentasi pantai auri, sepinggan dan lamaru;
- Penyusunan rekomendasi stasiun curah hujan;
- Penyusunan kajian pengembangan produk unggulan berorientasi ekspor di kota Balikpapan;
- Penyusunan zonasi data center kota Balikpapan;
- Pelaksanaan Lomba Inovasi;

- Pelaksanaan kegiatan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovasi kepada stakeholder terkait;
- Publikasi hasil kajian ke Jurnal;
- Pelaksanaan proses hak kekayaan intelektual.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	42,36	42,76	100.94%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	62	60,91	98.24%
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	83,08	68,43	82.36%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Balikpapan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan

lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam perencanaan pembangunan Nasional isu strategis yang diusung adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas. Selaras dengan tema tersebut, Provinsi Kalimantan Timur dalam perencanaan pembangunannya menetapkan tema Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Nilai tambah Ekonomi.

Isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan dengan mengacu pada tema pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, Pengendalian Kuantitas Penduduk Dan Perluasan Lapangan Kerja;
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Serta Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Dan Berketahanan Bencana;
3. Peningkatan Ketersediaan Infrastuktur Yang Berorientasi Pada Konsep Hijau (Green City);
4. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Yang Berwawasan Lingkungan (Green Economy);
5. Pemantapan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Setelah memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan serta isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan tersebut di atas, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan Perencanaan pembangunan yang baik sehingga akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik yang diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Peningkatan Kualitas SDM dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Berkualitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi menjadi tema dalam penyusunan perencanaan pembangunan (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2025. Pada tahapan ini perlu diperhatikan isu strategis yang berkaitan dengan penunjukkan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara serta serta isu lingkungan yang harus tetap menjadi prioritas pembangunan karena dampak degradasi lingkungan di kota Balikpapan sangat terasa.

Beberapa arahan penting dalam penyusunan rencana pembangunan kedepan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, dan Profesional;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

3. Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Kota yang Aman, Tertib, dan Ramah Lingkungan;
5. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Merata;
6. Peningkatan Sektor Ekonomi yang Kreatif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai unsur perencana, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik. Salah satunya dengan mengawal proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan dan memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota.

Bappeda Litbang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu menyampaikan konsep perencanaan tahun 2025 kepada Perangkat Daerah dengan peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan konsep *Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial* (HITS) dan *Inklusif*, antara lain sebagai berikut:

- Money Follow Program : Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat *incremental*, sekedar penambahan proposional atau *Bussines As Usual*
- Sebaliknya : Benar –benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam.
- Holistik : Perencanaan yang menyeluruh;
- Tematik : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun;
- Terintegrasi: Menerobos adanya ego sektoral;
- Spasial : Ke daerahan atau Ke wilayahan
- Inklusif : Menyeluruh, meliputi segala aspek dan usia

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan,,Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesess*), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (*opportunity*) dan peluang (*treaths*). Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini.

Analisa Lingkungan (Internal Dan Eksternal)

Analisa SWOT Bappeda Litbang

Kota Balikpapan

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL		S. STRENGTH (KEKUATAN)		W. WEAKNESSES (KELEMAHAN)	
		1	Adanya sistem perencanaan di seluruh bidang	1	Data dasar (basic data) perencanaan belum optimal
ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL					

		2	Adanya komitmen seluruh komponen perencanaan	2	Data hasil pembangunan kota terbatas
		3	Jumlah sdm secara umum memadai	3	Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian
		4	Koordinasi cukup baik antar PD	4	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
O. OPPORTUNITY (PELUANG)		SO		WO	
1	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	1	Adanya SDM perencanaan yang memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	1	Meningkatkan kerjasama dalam analisa data hasil pembangunan
2	Adanya kesempatan untuk mengembangkan atau meningkatkan profesionalisme aparatur	2	Adanya dana untuk mengembangkan profesionalisme aparatur	2	Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi basic data
3	Adanya kepercayaan eksternal terhadap perencanaan pembangunan	3	Melaksanakan system perencanaan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan	3	Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dan peneliti
4	Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas	4	Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan reformasi, transparansi dan tingkat akuntabilitas	4	Mengoptimalkan data hasil pembangunan kota untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencana pembangunan
T. THREATS (ANCAMAN)		ST		WT	

1	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	1	Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan	1	Mengoptimalkan data hasil pembangunan untuk mengurangi persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah
2	Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan	2	Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir ego sektoral	2	Mengoptimalkan data dasar dan menghilangkan ego sektoral dalam proses perencanaan pembangunan
3	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan	3	Menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat	3	Meningkatkan kinerja aparatur
4	Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat	4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	4	Meningkatkan proses perencanaan yang tepat waktu

Sumber : Hasil Analisa

Hasil Analisa Lingkungan tersebut diatas yang merupakan isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pokok Bappeda Litbang Kota Balikpapan antara lain :

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama daerah dengan daerah lain, lembaga swasta maupun lembaga lain dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik, termasuk di dalamnya dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan di dalam menyusun perencanaan pembangunan di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin meningkat kualitasnya sesuai dengan

kebutuhan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

3. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar didalam melakukan perencanaan pembangunan. Namun kondisi kesiapan data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal, ketersediaannya masih terbatas. Sehingga dapat memperlambat perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu solusinya adalah perlu dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data.

4. Adanya komitmen seluruh komponen perencanaan.

Komitmen komponen perencanaan ini sangat penting untuk mewujudkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan faktor yang dirasa perlu dibenahi dan dianggap sebagai penghambat dari pelaksanaan pemerintahan di Bappeda Litbang Kota Balikpapan antara lain :

- 1) Data Dasar (*Database*) dan data pembangunan belum optimal;
- 2) Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Rankhir Renja Bappeda Litbang Tahun 2025 merupakan tahun ke tiga untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Dalam perencanaan pembangunan kota Balikpapan terdapat beberapa permasalahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel.

Adapun prioritas pembangunan kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Ketahanan bencana dan kondusifitas daerah;
5. Pembangunan ekonomi inklusif;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan bertemakan mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan, fokus pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi inklusif;
2. Pembangunan sumber daya manusia;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
4. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
5. Kondusifitas daerah.

Sedangkan program prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi inklusif;
 - Pengendalian harga dan stok bapokting
 - Prog. Sarana distribusi perdagangan
 - Prog. Stabilisasi harga bapokting
 - Prog. P3DN
 - Prog. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
 - Wirausaha baru dan umkm berkelas
 - Program pemberdayaan umkm
 - Program pengembangan umkm
 - Program perlindungan & jaminan sosial
 - Pengembangan kota mice, pariwisata dan ekonomi kreatif
 - Prog. Peningkatan daya tarik destinasi
 - Prog. Pengembangan sumber daya pariwisata & ekonomi kreatif
 - Prog. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
 - Iklim dunia usaha dan investasi
 - Prog. Pengembangan iklim pm
 - Prog. Pengendalian pelaksanaan pm prog
 - Promosi penanaman modal
2. Pembangunan sumber daya manusia
 - Bina mental
 - Prog. Pengelolaan pendidikan
 - Prog. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
 - Prog. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
 - Penurunan angka stunting
 - Prog. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - Prog. Pengelolaan pendidikan
 - Prog. Peningkatan kualitas keluarga
 - Prog. Pembinaan keluarga berencana
 - Penurunan angka tpt dan kemiskinan ekstrem

- Prog. Pengembangan iklim pm
- Prog. Penempatan tenaga kerja
- Prog. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- Prog. Promosi penanaman modal
- Peningkatan gemar membaca
 - Prog. Pembinaan perpustakaan
 - Prog pengelolaan pendidikan
- Integrasi aids, tuberkolosis, malaria
 - Prog. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - Prog. Kawasan permukiman
 - Prog. Rehabilitasi social

3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;

- Pengendalian banjir
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- Penataan kawasan terintegrasi
 - Program Kawasan Permukiman(DAK Integrasi);
 - Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Pengelolaan Persampahan& Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Penataan wajah kota
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - Program Penyelenggaraan Jalan
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

4. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;

- Aparatur Birokrasi yang Kapebel
 - Prog. Kepegawaian daerah
 - Prog. Pengembangan sumber daya manusia
- Sadar Tertib Arsip
 - Prog. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - Prog. Pengelolaan arsip
 - Prog. Perlindungan dan penyelamatan arsip
- Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
 - Prog. Penyelenggaraan pengawasan
 - Prog. Kebijakan, pendampingan dan asistensi

- Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Prog. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - Prog. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

5. Kondusifitas daerah

- Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - Program Penanggulangan Bencana
- Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik
 - Program Penanggulangan Bencana
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Serta Etika Budaya Politik
- Antisipasi Persiapan Kota sebagai Mitra IKN
 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran
 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Bappeda Litbang Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Bappeda Litbang berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Litbang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi **Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan tujuh agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan, yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 – 2025, RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan RKP Tahun 2024.

Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”. Misi dari Kepala Daerah Terpilih adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Terdapat 9 prioritas Kepala Daerah Terpilih antara lain sebagai berikut:

7. Penguatan birokrasi pemerintahan
8. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
9. Pengentasan kemiskinan
10. Penyediaan air minum yang sehat dan merata
11. Pengendalian banjir
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kondisi sosial yang nyaman
13. Pengembangan Balikpapan sebagai kota mice dan wisata:
14. Pengembangan Balikpapan sebagai kota kreatif
15. Revitalisasi perusda

Dalam mendukung prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2025 dengan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Bappeda Litbang melaksanakan unsur penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, maka Bappeda Litbang pada tahun 2025 menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - 1.1. Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - 1.1. Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.2. Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.1. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - 1.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
 - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 1.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 1.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- c. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - 1.1. Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
 - 1.2. Sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - 1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan aspek sosial
 - 1.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian
 - 1.2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1.1. Sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - 1.2. Sub kegiatan Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
 - 1.3. Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
 - 1.4. Sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Selain melaksanakan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan Bappeda Litbang juga melaksanakan program non urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.1. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logisyyik Kantor
 - 1.4. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
 - 1.6. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.8. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2. Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - 1.4. Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.3. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.4. Sub kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Balikpapan

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL				DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					22.625.000.000,00							0,00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					22.625.000.000,00							0,00	
PERENCANAAN					5.401.073.950,00							0,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	85,65 nilai			85,65 nilai	605.000.000,00					85,65 nilai	0,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP OPD</i>	-			83,28 nilai	5.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	0,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			85,65 nilai	600.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	0,00	

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja</i>	32,787 nilai			32,787 nilai	4.766.073.950,00						32,787 nilai	0,00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses</i>	-			1,92	2.680.250.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				2 Berita Acara	2.680.250.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan</i>	-			100 %	1.310.823.950,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1 Dokumen	1.050.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
	<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>				1 Buku	260.823.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut</i>	-			3,06	775.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				4 Laporan	775.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	23,478 nilai			23,478 nilai	30.000.000,00						23,478 nilai	0,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													

	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
KEPEGAWAIAN						12.368.926.050,00							0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.368.926.050,00						-	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			85,90 nilai	9.000.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	9.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			83,65 nilai	500.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			85,65 nilai	790.850.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	-	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	404.090.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				267 Dokumen	6.760.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu													

	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			82,15 nilai	650.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	650.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			85,6 nilai	490.672.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Masyarakat	-	0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Masyarakat		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	21.612.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat		0,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	33.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	431.860.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			81,2 nilai	937.403.550,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	365.974.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	278.907.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Pemeliharaan Mebel													
	Jumlah Mebel yang Dipelihara				232 Unit	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Masyarakat		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				188 Unit	67.521.450,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						4.855.000.000,00							0,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						4.855.000.000,00						-	0,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti				100 %	1.205.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi													

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	1.190.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan													
	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				13 Laporan	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	-			100 %	500.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial													
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat													
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti</i>	-			100 %	2.000.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan													
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>				3 Dokumen	1.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum													
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</i>				2 Dokumen	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00

Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	-			4 dokumen	1.150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi													
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	650.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif													
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual													
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00
						22.625.000.000,00							0,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rankhir Renja

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2021 – 2026. Dimana Rankhir Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Rankhir Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025 ini terdiri dari 4 Program, 17 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam Rancangan Renja Perubahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selain itu Rankhir Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Serta untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda Litbang, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rankhir Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Renja 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
2. Rankhir Renja Bappeda Litbang tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
3. Rankhir Renja 2025 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Bappeda Litbang);
4. Rankhir Renja 2025 akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Rankhir Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek,

pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;

3. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

X. RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rancangan Rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan merupakan dokumen Rancangan Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan BKAD Kota Balikpapan Dalam Periode Tahun Anggaran 2025, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) BKAD Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) BKAD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (dalam proses penyusunan), dimana program dan kegiatan dalam RENJA perangkat daerah akan diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana RENJA BKAD Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Sistem Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Daerah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan BKAD dalam rangka mewujudkan sinegritas antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025. Penyelenggaraan pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra BKAD Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja BKAD Kota Balikpapan Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) BKAD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Petunjuk Teknis, Jadwal dan tahapan Penyusunan dokumen RKPD dan Reja PD Tahun 204 serta Perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

1.1 Latar Belakang:

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

1.4 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Lintas OPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1.3 Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidaksesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Strategis BKAD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan pada tahun 2023 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) Program 15 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. 3 Program terdiri dari :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milk Daerah

2. 15 Kegiatan terdiri dari :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 10) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- 11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- 12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 13) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 14) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- 15) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah BKAD Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RKP

1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	80	79
2	Nilai SAKIP BADAN Keuangan dan Aset Daerah	58,66	27
3	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	13,57	W TP
4	Pengalokasian Anggaran belanja dalam APBD	19,13	
5	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	12,2	
6	Penyerapan Anggaran	13,333	
7	Kondisi Keuangan Daerah	6,88	
8	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100 %		14=6+12		15=14/5X100 %		16	17				
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang dikelola	Prese ntase	100 %	90.023.928.000,00	100 %	26.648.633.805,00	100 %	65.640.568.950,00	4.580.326.812,00	8.071.745.704	11.470.043.579,00	39.944.058.794,00	0%	64.066.174.889	0%	97,60%	100%	90.714.808.694,00	100%	100,77%	BKAD		
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prese ntase	100 %	90.023.928.000,00	100 %	26.648.633.805,00	100 %	65.640.568.950,00	4.580.326.812,00	0	8.071.745.704,00	11.470.043.579,00	39.944.058.794,00	0%	64.066.174.889	0%	97,60%	100%	90.714.808.694,00	100%	100,77%	BKAD	tercapai

		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola	laporan		11	26.648.633.805,00	11	65.640.568.950,00	0	4.580.326.812,00	8.071.745.704	11.470.043.579	11	39.944.058.794	11	64.066.174.889	100%	97,60%	22	90.714.808.694,00	0	0	BKAD	(Gedung yang dikelola sebagai berikut :BIC, BSCC Dome, Squash, GKB, Stadion Batakana, Capil & DP3AK B, Gadis, Asmaba Makasar, Asmaba Malang, Asmaba Jogjakarta)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek kepuasan masyarakat (IKM) Internal perangkat Daerah	poin	82,5	195.366.176.500,00	74,5	13.308.610.556,00	76	28.622.474.181,00	2.894.173.348,00	4.115.682.412,00	3.903.204.586,00	6.752.487.377,00	76,00	17.665.547.723,00	100%	61,72%	76,00	30.974.158.279,00	0,00%	15,85%	BKAD	tercapai	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	poin	75	1.434.100.000,00	55	129.587.333,00	60	373.000.000,00	47.937.181,00	150.121.551,00	39.176.980,00	60,00	77.862.961,00	60,00	315.098.673,00	100%	84,48%	115	444.686.006,00	153,33%	31,01%	BKAD	tercapai

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			89	24.491.300,00	2	30.000.000,00	1	15.540.400,00		0	4.000.000	1	10.345.480	2	29.885.880,00	100%	99,62%	91	54.377.180,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA	Dokumen			89	24.492.021,00	89		89							89	-	100%	0,00%	178	24.492.021,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					89	0		0		0				89	-	100%	0,00%	89	-	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen					89	0		0		0				89	-	100%	0,00%	89	-	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					89									89	-	100%	0,00%	89	-	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			1	24.492.289,00	1	50.000.000,00		9.766.381,00	1	22.550.400		10.306.100		6.700.000	1	49.322.881,00	100%	98,65%	2	73.815.170,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			4	56.111.723,00	4	293.000.000,00	1	22.630.400,00	1	127.571.151	1	24.870.880	1	60.817.481	4	235.889.912,00	100%	80,51%	8	292.001.635,00	0%	0%	BKAD	tercapai

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prese ntase	100 %	163.671.561.000,00	100 %	8.047.923.095,00	100 %	19.357.259.803,00		1.895.496.674,00		3.199.686.007,00		2.274.556.261,00		2.237.703.656,00	0%	9.607.442.598,00	0%	49,63%	100%	17.655.365.693,00	100%	10,79%	BKAD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan			55	8.047.923.095,00	55	19.222.795.603,00	0	1.855.815.287,00		3.178.259.357		2.240.224.588	55	2.201.722.076	55	9.476.021.308,00	100%	49,30%	110	17.523.944.403,00	0%	0%	BKAD	tercapai
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen administrasi	Doku men			60	-	60	-		0		0		60		60		-	100%	0,00%	120	-	0%	0%	BKAD	tercapai
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doku men			12	49.163.239	12	82.584.100,00	3	33.018.187,00	3	14.659.989	3	34.331.673	3	-	12	82.009.849,00	100%	99,30%	24	131.173.088,00	0%	0%	BKAD	tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an			5	14.787.800	5	29.940.400,00						5	27.475.110	5	27.475.110,00	100%	91,77%	10	42.262.910,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lapor an			36	19.807.400	36	21.939.700,00	9	6.663.200	9	6.766.661	9	-	9	8.506.470	36	21.936.331,00	100%	99,98%	72	41.743.731,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Jumlah laporan keuangan Semesteran								0								-	-	0%		0	-	0%	0%	BKAD	
		jumlah laporan keuangan Triwuwulanan																-	-	0%		0	-	0%	0%	BKAD	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prese ntase	100 %	95.000.000			100 %	19.970.800,00		6.352.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%	6.352.471,00	0%	31,81%	0%	6.352.471,00	0%	7%	BKAD	

		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	Dokumen			2	19.970.800	1	6.352.471,00	0	0	-	1	-	2	6.352.471,00	100%	31,81%	200%	6.352.471,00	0%	0%	BKAD	tercapai			
4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Preesentase	100%	365.255.000	100%	49.643.900	100%	55.436.900	23.114.925	8.079.617	9.873.300	100%	13.951.575	100%	55.019.417,00	100%	99,25%	200%	104.663.317,00	200%	28,65%	BKAD				
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen		1	-							1		1	-	0%	0,00%	200%	-	0%	0%	BKAD				
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah surat tanda setoran (sts)retribusi daerah SKPD	Dokumen		410	19.800.000									-	-	0%	0,00%	410	19.800.000,00		0%	BKAD				
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen		1	29.843.900	12	55.436.900,00	3	23.114.925,00	3	8.079.617	3	9.873.300	13.951.575	12	55.019.417,00	100%	99,25%	13	84.863.317,00		0%	BPKD	tercapai		
5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Preesentase	100%	2.296.785.000	100%	206.786.826,00	100%	568.875.000,00	4,00	44.269.469,00	80,00	143.418,487,00	-	-	-	206.380.000,00	0%	394.067.956,00	0%	69,27%	100%	600.854.782,00	100%	26,16%	BKAD	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket				80	221.875.000,00						80	206.380.000,00	80	206.380.000,00	100%	93,02%	80	206.380.000,00				tercapai		

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang			8	74.139.950	20	100.000.000,00	4	44.269.469,00						4	44.269.469,00	20%	44,27%	12	118.409.419,00	0%	0%	BKAD	Tidak tercapai	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang			14	132.646.876	80	247.000.000,00		80	143.418.487					80	143.418.487,00	100%	58,06%	94	276.065.363,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Preesentase	100%	12.271.251.000	100%	2.128.405.686,00	100%	5.152.458.490,00		468.649.335,00		392.894.000,00		832.858.404,00	100%	3.060.248.699,00	100%	4.754.650.438,00	100%	92,28%	200%	6.883.056.124,00	200%	56,09%	BKAD	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket			9	62.797.000	1	150.360.400,00		30.001.080,00			29.713.590	1	89.851.500	1	149.566.170,00	100%	99,47%	10	212.363.170,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis			28	744.523.600	16	2.267.517.910,00			111.666.000		280.330.500	16	1.726.873.000	16	2.118.869.500,00	100%	93,44%	44	2.863.393.100,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	Jenis			3	38.849.500	2	162.127.380,00	1	36.287.980,00		577.200	17.644.900	1	105.066.500	2	159.576.580,00	100%	98,43%	5	198.426.080,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis			6	541.367.030	7	865.902.500,00	3	202.730.424,00		116.704.696	138.064.330	4	338.084.657	7	795.584.107,00	100%	91,88%	13	1.336.951.137,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis			10	54.300.070	1	91.650.400,00		29.549.450,00			-	1	51.500.000	1	81.049.450,00	100%	88,43%	11	135.349.520,00	0%	0%	BKAD	tercapai	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang yang tersedia	Dokumen			3	28.540.373	6000	45.000.000,00	0	6.611.535,00		3.307.500		11.812.500	5124	16.695.000	5.124	38.426.535,00	85%	85,39%	5127	66.966.908,00	0%	0%	BKAD	Tidak tercapai
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan			1	20.000.000	2	98.299.900,00				9.920.000		12.108.047	2	49.860.736	2	71.888.783,00	100%	73,13%	3	91.888.783,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan			181	568.728.113	80	1.280.200.000,00		132.218.866,00		150.718.604		311.934.537	80	556.317.306	80	1.151.189.313,00	100%	89,92%	261	1.719.917.426,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen			1	69.300.000	1	191.400.000,00		31.250.000,00				31.250.000	1	126.000.000	1	188.500.000,00	100%	98,48%	2	257.800.000,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Preesentase	100%	5.250.386.000	100%	875.410.000,00	100%	779.874.300,00	21	116.654.200,00	22.499.700,00	-	405.300.000,00	100%	110.884.500,00	0%	655.338.400,00	0%	84,03%	100%	1.530.748.400,00	100%	29,15%	BKAD		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangandinas ataukendaraan dinas jabatan	Unit																0%	0%	0	-	0%	0%	BKAD		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan	Unit			6	459.900.000	1	474.686.000,00					405.300.000	1		1	405.300.000,00	100%	85,38%	7	865.200.000,00	0%	0%	BKAD	tercapai	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit			1	415.510.000	39	305.188.300,00	21	116.654.200,00		22.499.700	-	11	110.884.500	32	250.038.400,00	82%	81,93%	33	665.548.400,00	0%	0%	BKAD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Preesentase	100%		4.456.723.000	100%	707.870.964,00	100%	717.391.000,00	214.937.593,00	56.024.341,00	170.833.208,00	100%	215.707.322,00	100%	657.502.464,00	100%	91,65%	200%	1.365.373.428,00	200%	30,64%	BKAD		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan			3	31.611.120	3	82.699.500,00				14.985.000	3	56.083.378	3	71.068.378,00	100%	85,94%	6	102.679.498,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan			3	676.259.844	3	634.691.500,00	0	214.937.593,00	56.024.341	155.848.208	3	159.623.944	3	586.434.086,00	100%	92,40%	6	1.262.693.930,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Preesentase	100%		5.525.115.500	100%	1.162.982.752,00	100%	1.598.207.888,00	76.761.500,00	142.958.709,00	170.606.433,00	100%	829.748.664,00	100%	1.220.075.306,00	100%	76,34%	200%	2.383.058.058,00	200%	43,13%	BKAD		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit			30	423.892.918	28	850.468.888,00		76.761.500,00	77.857.209	140.969.433	32	254.233.200	32	549.821.342,00	114%	64,65%	62	973.714.260,00	0%	0%	BKAD	Beram bahnya jumlah kendaraan dinas	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			5	167.597.099	5	335.295.000,00			65.101.500	22.144.500	5	198.623.400	5	285.869.400,00	100%	85,26%	10	453.466.499,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Jenis			1	20.000.000	2	17.500.000,00				7.492.500	2	-	2	7.492.500,00	100%	42,81%	3	27.492.500,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit			1	259.350.000	1	195.052.000,00					1	194.644.050	1	194.644.050,00	100%	99,79%	2	453.994.050,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit			1	292.142.735	1	199.892.000,00					1	182.248.014	1	182.248.014,00	100%	91,17%	2	474.390.749,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	Prosentase	100%		100%	126.753.096.000,00	100%	6.158.681.644,00	100%	53.645.375.120,00	548.168.919,00	6.312.290.410,00	100%	15.789.651.082,00	100%	11.859.083.508,00	100%	64,33%	200%	40.667.875.563,00	200%	32,08%	BKAD		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase	100%		100%	14.396.985.000	100%	2.848.122.635,00	100%	5.728.219.500,00	299.008.971,00	176.437.630,00	100%	773.132.588,00	100%	3.082.765.841,00	100%	75,61%	200%	7.179.467.665,00	200%	49,87%	BKAD		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen			2	126.148.000,00	2	45.050.000,00				2	9.866.160		25.860.125	2	35.726.285,00	100%	79,30%	4	161.874.285,00	0%	0%	BKAD	tercapai

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen		2	36.064.300,00	2	49.860.000,00				2	7.458.160		33.564.975	2	41.023.135,00	100%	82,28%	4	77.087.435,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen		36	525.433.096	464	955.030.500,00						36	576.848.686	822	576.848.686,00	177%	60,40%	858	1.102.281.782,00	0%	0%	BKAD	Banyaknya Perubahan APBD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	DPA		2876	273.617.540	464	547.843.000,00	0	55.701.000			19.400.000	822	464.583.310	822	539.684.310,00	177%	98,51%	3698	813.301.850,00	0%	0%	BKAD	Banyaknya Perubahan APBD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	DPA		1698	234.729.112,00	464	917.691.000,00				822	261.594.508	0	532.674.038	822	794.268.546,00	177%	86,55%	2520	1.028.997.658,00	0%	0%	BKAD	Banyaknya Perubahan APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		2	221.612.896,00	2	414.135.900,00	2	84.984.700,00		47.110.050	7.594.660		80.274.479	2	219.963.889,00	100%	53,11%	4	441.576.785,00	0%	0%	BKAD	tercapai

		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen			2	234.666.650,00	2	371.624.700,00				117.650.740	2	148.543.475	2	266.194.215,00	100%	71,63%	4	500.860.865,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Dokumen			28	462.077.717,00	11	1.028.343.900,00	214.024.271,00	4	20.174.000	66.639.925	24	420.673.017	28	721.511.213,00	255%	70,16%	56	1.183.588.930,00	0%	0%	BKAD	1.Melebi target karena banyak SK Walikota untuk pemberian BSTT yang diterbitkan. 2.Perubahan TIM Verifikasi RKA dan DPA
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Dokumen			2	58.716.725,00	2	55.230.500,00			30.307.780	4.794.500	2	6.070.000	2	41.172.280,00	100%	74,55%	4	99.889.005,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Dokumen			2	-	2	50.000.000,00	-	1	17.504.800	22.445.182	1	-	2	39.949.982,00	100%	0,00%	4	39.949.982,00	0%	0%	BKAD	tercapai

		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen		2	-	2	50.000.000,00	1		5.640.000	1	34.188.753		2	39.828.753,00	100%	0,00%	4	39.828.753,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang		1	675.056.599	600	1.243.410.000,00					221.500.000	600	793.673.736	600	1.015.173.736,00	100%	81,64%	601	1.690.230.335,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Preesentase	100%	8.089.257.500	100%	1.825.362.663,00	100%	2.200.000.000,00	180.665.500,00	155.794.660,00	554.273.238,00	100%	964.009.695,00		1.854.743.093,00		84,31%	100%	3.680.105.756,00	100%	45,49%	BKAD		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen dan koordinasi pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		4	72.092.561,00	13	100.000.000,00	3	24.531.500,00	29.966.060	6	28.183.200	4	6.253.500	13	88.934.260,00	100%	88,93%	17	161.026.821,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	jumlah dokumen penyiapan hasil pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran Kas SPD	Dokumen		216	48.884.372	144	400.000.000,00	36		8.950.000	72	71.757.224	36	261.323.322	144	342.030.546,00	100%	85,51%	360	390.914.918,00	0%	0%	BKAD	tercapai

		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	dokumen			23159	545.119.27,00	23000	350.000.000,00	2287	104.672.700,00	5130	-	6273	195.976.703	10393	10.000.000	24.083	310.649.403,00	105%	88,76%	47242	855.768.630,00	0%	0%	BKAD	Banyaknya penerbitan SP2D berbanding lurus dengan bertam bahnya alokasi belanja SKPD pada mekanisme Perubahan Anggaran 2023
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen			2	75.794.329	4	110.000.000,00	1			3.200.000	2	78.124.300	1	15.983.400	4	97.307.700,00	100%	88,46%	6	173.102.029,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dokumen			1	-	2	50.000.000,00	2					16.797.183		8.801.000	2	25.598.183,00	100%	0,00%	3	25.598.183,00	0%	0%	BKAD	tercapai

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan Aliran Kas dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	Laporan	71 2	108.494.016	2	165.000.000,00	15.000.000,00	5.999.000	1	120.603.274	1	12.135.200	2	153.737.474,00	100%	93,17%	714	262.231.490,00	0%	0%	BKAD	tercapai
--	--	---	---	---------	---------	-------------	---	----------------	---------------	-----------	---	-------------	---	------------	---	----------------	------	--------	-----	----------------	----	----	------	----------

		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen			0	-	1	50.000.000,00			3.480.000	-	1	22.196.091	1	25.676.091,00	100%	0,00%	1	25676091	0%	0%	BKAD	tercapai
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		1	117.526.964	2	200.000.000,00			1			1	120.038.000	2	120.038.000,00	100%	60,02%	3	237.564.964,00	0%	0%	BKAD	tercapai

		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	jumlah petunjuk teknis administrasi keuanganyang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Dokumen			0	24.764.582	4	75.000.000,00	36.461.300,00	-	-	888.000	-	37.349.300,00	0%	49,80%	0	62.113.882,00	0%	0%	BKAD	karena perwal tentang sisdur pengel olaan keuang an yang mengacu pada aturan terbaru blm terbit			
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang			36	832.686.612,00	384	700.000.000,00		130	104.199.600	250	42.831.354	4	506.391.182	384	653.422.136,00	100%	93,35%	420	1.486.108.748,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Preesentase	100%	16.277.430,000	100%	1.485.196.346,00	100%	3.075.645.200,00	0	68.494.448,00	353.378.356,00	1.036.862.286,00	100%	892.622.157,00	100%	2.351.357.247,00	100%	76,45%	200%	3.836.553.593,00	200%	23,57%	BKAD		
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah hasil laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan			2	66.021.044	24	165.000.000,00	34.954.348,00	18.225.680	12	56.157.500	12	9.894.958	24	119.232.486,00	100%	72,26%	26	185.253.530,00	0%	0%	BKAD	tercapai	

		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	dokumen			36	24.021.310	13	110.000.000,00	1.590.000,00	-	6	24.185.120	7	3.990.289	13	29.765.409,00	100%	27,06%	49	53.786.719,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan			36	84.973.797	13	115.000.000,00	6.432.000,00	60.742.863		22.368.300	13	1.590.000	13	91.133.163,00	100%	79,25%	49	176.106.960,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan			7	4.900.000,00	1	454.700.000,00	10.880.600,00	2.734.558		200.000.000	1	110.783.600	1	324.398.758,00	100%	71,34%	8	329.298.758,00	0%	0%	BKAD	tercapai

		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen			2	268.483.956	2	68.270.100,00				2	3.899.500	39.166.377	2	43.065.877,00	100%	63,08%	4	311.549.833,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen			1	20.327.000	1	47.989.900,00			20.148.800	1	-	-	1	20.148.800,00	100%	41,99%	2	40.475.800,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen			0	-	1	149.945.200,00				1	1.530.000	1.530.000,00	1	1.530.000,00	100%	1,02%	1	1.530.000,00	0%	0%	BKAD	tercapai

		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen analisis laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Doku men			1	-												1	-	0%	0%	BKAD	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan panduan teknik operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintaahan daerah	Doku men			1	68.702.125	1	-				1	1	-	100%			2	68.702.125,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Doku men			0	-	1	-							0%			0	-	0%	0%	BKAD	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang			1	781.032.944	105	1.699.640.000,00	5.087.500,00	21.897.953	105	728.101.866	725.666.933	105	1.480.754.252,00	100%	87,12%	106	2.261.787.196,00	0%	0%	BKAD	tercapai
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	lembaga			1	166.734.170	28	265.100.000,00	9.550.000,00	229.628.502	28	2.150.000	-	28	241.328.502,00	100%	91,03%	29	408.062.672,00	0%	0%	BKAD	tercapai

		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen statistik keuangan pemerintahan daerah			0	-												0	-	0%	0	0%	0%	BKAD	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prese ntase	100%	84.631.618.500	100%	33.625.006.109,37	100%	40.480.510.420,00	-	5.392.047.392,00	13.216.336.180,00	100%	5.455.281.000,00	100%	24.063.664.572,00	100%	59,45%	200%	57.688.670.681,37	200%	68,16%	BKAD		
		Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah	Doku men		1		1										0%	1	-	0%	0%	BKAD			
		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Lapor an		1	99.000.000	3	300.000.000,00				1	99.000.000	1	99.000.000,00	33%	33,00%	2	198.000.000,00	0%	0%	BKAD	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang - Keuangan Belanja Jasa Konsultasi Non Kontribusi Analisis Investasi Daerah pada Bank Kaltim tara		
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	jumlah dokumen analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Doku men				1										0%	0	-	0%	0%	BKAD			

		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Alokasi subsidi	Laporan				1								-	-	0%		0	-	0%	0%	BKAD		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan			1	33.526.006.109	1	40.180.510.420,00	0		5.392.047.392	13.216.336.180	1	5.356.281.000	1	23.964.664.572,00	100%	59,64%	2	57.490.670.681,37	0%	0%	BKAD	tercapai
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara	prese ntase	100%	3.357.805.000	100%	1.571.997.389	100%	2.161.000.000	0	-	234.632.372	209.046.790		1.464.404.815	0%	1.908.083.977,00	0%	88,30%	100%	3.480.081.366,00	100%	103,64%	BKAD	
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	dokumen					1	50.000.000,00			1	49.500.000		1	49.500.000,00	100%	99,00%	1	49.500.000,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintahan daerah bidang keuangan daerah	Dokumen			1	324.800.000	1	75.000.000,00						-	-	0%	0,00%	1	324.800.000,00	0%	0%	BKAD		

		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang		1	1.247.197,389	190	2.036.000,00			234.632,372	190	159.546,790	1.464.404,815	190	1.858.583,977,00	100%	91,29%	191	3.105.781,366,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Peningkatan BMD yang dikelola	Presentase	100%	25.763.522.000,00	100%	2.713.628.384,20	100%	10.339.859.600,00	160.575.115,00	850.024.561,00	897.287.386,00	2.487.140.294,00	0%	4.395.027.356,00	0%	42,51%	100%	7.108.655.740,20	100%	27,59%	BKAD			
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase	100%	25.763.522.000	100%	2.713.628.384,20	100%	10.339.859.600,00	160.575.115,00	850.024.561,00	897.287.386,00	2.487.140.294,00	0%	4.395.027.356,00	0%	42,51%	100%	7.108.655.740,20	100%	27,59%	BKAD			
	heri	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar satuan harga pemerintah daerah	Dokumen		1	353.341,140,00	1	630.000,000,00		1	224.180,050	88.155,710	2	242.020,000	3	554.355,760,00	300%	87,99%	4	907.696,900,00	0%	0%	BKAD	Karena Peegeseran APBD dan Perubahan APBD 2023	
	tika	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Dokumen		1	109.690,576	1	143.200,000,00			6.250.000	1	114.089,515	1	120.339,515,00	100%	84,04%	2	230.030,091,00	0%	0%	BKAD	tercapai		
	tika	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Dokumen		2	126.880,571,00	2	260.800,000,00			26.477,385	1	9.220,215	1	128.101,800	2	163.799,400,00	100%	62,81%	4	290.679,971,00	0%	0%	BKAD	tercapai
	yusri	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		0	-	5	350.000,000,00				4	306.082,300	4	306.082,300,00	80%	87,45%	4	306.082,300,00	0%	0%	BKAD	tercapai		

heri	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan			2	421.318.218,00	2	859.050.000,00				32.291.220	1	530.061.863	1	24.158.600	2	586.511.683,00	100%	68,27%	4	1.007.829.901,00	0%	0%	BKAD	tercapai
heri	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMD	Laporan			36	120.349.007	36	570.000.000,00						36	48.524.630	36	48.524.630,00	100%	8,51%	72	168.873.637,00	0%	0%	BKAD	tercapai	
yusri	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan			41	752.005.313,20	50	5.036.957.200,00	21	98.559.075,00	8	402.635.932	3	206.875.048	10	635.038.104,00	42	1.343.108.159,00	84%	26,67%	83	2.095.113.472,20	0%	0%	BKAD	7 dokumen Masih proses
tika	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan			4	280.507.745,00	3	700.000.000,00				9.490.500	2	7.775.550	3	247.660.115	5	264.926.165,00	167%	37,85%	9	545.433.910,00	0%	0%	BKAD	tercapai
tika	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen			15	245.040.696,00	15	564.852.400,00		24.591.370,00		41.601.978	10	14.765.000	5	139.072.591	15	220.030.939,00	100%	38,95%	30	465.071.635,00	0%	0%	BKAD	tercapai
heri	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan			36	29.622.370	2	165.000.000,00		32.344.670,00			1	26.984.000	1	71.759.670	2	131.088.340,00	100%	79,45%	38	160.710.710,00	0%	0%	BKAD	tercapai

heri	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	laporan		1	152.375.928	1	250.000.000,00	5.080.000,00	113.347.496	-	1	96.597.711	1	215.025.207,00	100%	86,01%	2	367.401.135,00	0%	0%	BKAD	tercapai
heri	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang		1	122.496.820,00	72	810.000.000,00		72	7.200.000		434.035.258	72	441.235.258,00	100%	54,47%	73	563.732.078,00	0%	0%	BKAD	tercapai
Rata-rata capaian kinerja (%)																84,84%	65,48%			23,48%	7,46%		
Predikat Kinerja																Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH SUB KEGIATAN					437.906.722.500,00	77,5	48.829.554.389,20	79	158.248.277.851,00	0	8.183.244.194,00	0	19.349.743.087,00	0	32.060.186.633,00	1	61.042.769.973,00	77	120.635.943.887,00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																94,09%	64,04%			0%	0%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																50%	70,76%			133%	40,08%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																Sangat Rendah	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																40%	53,23%			80%	35,26%		

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--------	---------------	--	--

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja		Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Instansi dan Mulainya penerapan teknologi aplikasi pada beberapa program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja		Lemahnya/ kurang pemahaman para aparatur terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah; Lemahnya tingkat koordinasi antar bidang;Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/ provinsi	
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	Peningkatan pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan regulasi pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan keterampilan penggunaan teknologi aplikasi pengelolaan keuangan daerah		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Semua pegawai harus saling mendukung dan mengerti tupksi dalam pelaksanaan pekerjaan dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia		

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Untuk dapat melakukan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentukformat sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKD Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	27	28,75	30,5	32,25	32,16		30,5	32,25	
2	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel		Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada BKAD

Isu strategis BKAD Kota Balikpapan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan dimasa yang akan datang dan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat sebagai entitas. Isu strategis akan berdampak buruk apabila hal yang menjadi kelemahan dan kendala tidak terantisipasi dengan baik. Dan akan menghilangkan potensi positif apabila kekuatan dan peluang tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka isu-isu strategis Badan BKAD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

No	Isu Strategis BKAD Tahun 2025 dan Tahun 2026	Pengaruh	Dampak
1	PERUBAHAN DATABASE DAN DOMAIN APLIKASI SIPD (SIPD.GO.ID menjadi SIPD.RI) di Tahun Anggaran 2024	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah berpotensi terganggu dan mengalami keterlambatan	Penurunan Nilai RB dan MCP KPK
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpotensi terganggu	Penurunan Opini WTP
2	PENYESUAIAN KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN BARU (UU NO. 1 TAHUN 2022 HKPD PENERAPAN TA 2024)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pengelolaan Perbendaharaan, dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Khususnya terkait Penyesuaian Regulasi Pegelolaan Daerah yang berdampak	Penurunan Opini WTP
3	PENGGUNAAN SIPD PENUH di Tahun 2023 (TANPA APLIKASI PENDAMPING LAIN)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah berpotensi terlambat.	Penurunan Opini WTP

4	PENERAPAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah berpotensi	Penurunan Opini WTP
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah akan terhambat	Penurunan Opini WTP
5	PENERAPAN DAN PENYUSUNAN SSH, SBU, HSPK & ASB	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penurunan Nilai MCP KPK dan Opini WTP
6	PENERAPAN PENENTUAN MASA BMD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penurunan Opini WTP

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,5	24.943.143.300,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,5	24.943.065.685,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	65	288.101.825,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	65	288.057.620,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	27.499.365,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	27.459.640,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75 dokumen	27.499.520,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75 dokumen	27.499.370	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75 dokumen	27.799.550,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75 dokumen	27.874.550	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	38.495.710,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	38.520.710,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	166.807.680,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	166.703.350	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16.999.605.605,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16.999.600.545,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/bulan	16.516.858.015,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/bulan	16.516.858.015	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	378.756.200,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	378.756.200,00	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	60.628.260,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	60.628.260,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	23.363.130,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	23.363.130,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 laporan	19.994.940,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	20.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	20.000.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balikpapan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balikpapan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	20.000.000,00	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	60.325.985,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	60.297.635,00	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	245 Dokumen	24.149.810,00	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	245 Dokumen	24.149.810,00	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	36.176.175,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	36.147.825,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	781.920.100,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	781.920.100,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 paket	161.920.100,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 paket	161.920.100,00	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 orang	310.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 orang	310.000.000,0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	310.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	310.000.000,0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.197.869.735,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.425.269.735,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	56.027.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	56.027.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	1.287.534.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	1.287.534.500	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia yang tersedia yang tersedia	3 paket	30.229.300,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia yang tersedia yang tersedia	3 paket	30.229.300,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	613.946.010,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	613.946.010,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	71.763.825,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	71.763.825,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6650 dokumen	43.225.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6650 dokumen	43.225.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	60.334.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	60.334.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan	786.500.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan	1.013.900.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	248.309.600,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	248.309.600,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	709.755.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	709.755.000,00	

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	468.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	468.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	51 unit	241.755.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	51 unit	241.755.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	943.284.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	715.884.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	156.786.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	156.786.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	786.498.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	559.098.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.942.281.050,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.942.281.050,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	995.241.050,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	995.241.050,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	179.165.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	179.165.000,00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Balikpapan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 unit	17.875.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Balikpapan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 unit	17.875.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	400.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	400.000.000,00	

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	350.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	350.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Balikpapan	Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisasi APBD yang tepat waktu	100%	17.898.391.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Balikpapan	Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisasi APBD yang tepat waktu	100%	32.898.390.750,00	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Balikpapan	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	6.603.033.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Balikpapan	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	6.603.032.550,00	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Balikpapan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	237.043.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Balikpapan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	237.042.700,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	70.982.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	70.981.850,00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1500 dokumen	275.490.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1500 dokumen	275.490.000,00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1000 dokumen	134.910.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1000 dokumen	134.910.000,00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1500 dokumen	520.100.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1500 dokumen	520.100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	1.263.630.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	1.263.630.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	807.266.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	807.266.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Balikpapan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	918.632.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Balikpapan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	918.632.000,00	

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 dokumen	1.539.410.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 dokumen	1.539.410.000,00	
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	835.570.000,00	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	835.570.000,00	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Balikpapan	capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	3.416.235.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Balikpapan	capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	3.416.235.000,00	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	96 dokumen	671.017.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	96 dokumen	671.017.000,00	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	34 dokumen	402.091.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	34 dokumen	402.091.000,00	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	420 orang	2.343.127.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	420 orang	2.343.127.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Balikpapan	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100%	2.826.620.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Balikpapan	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100%	2.826.620.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	181.500.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	181.500.000,00	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	13 Dokumen	34.000.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	13 Dokumen	34.000.000,00	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Balikpapan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	181.500.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Balikpapan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	181.500.000,00	

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	195.350.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	195.350.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	181.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	181.500.000,00	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	90.750.000,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	90.750.000,00	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	38.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	38.000.000,00	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	111.460.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	111.460.000,00	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	1.534.560.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	1.534.560.000,00	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	28 lembaga	278.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	28 lembaga	278.000.000,00	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Balikpapan	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	2.565.003.200,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Balikpapan	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	17.565.003.200,00	

Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3 laporan	240.000.000,00	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3 laporan	240.000.000,00	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	2.325.003.200,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	17.325.003.200,00	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara	100%	2.487.500.000,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara	100%	2.487.500.000,00	
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 dokumen	50.000.000,00	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 dokumen	50.000.000,00	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	2.337.500.000,00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	2.337.500.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Balikpapan	Persentase peningkatan BMD yang dikelola	100%	51.458.065.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Balikpapan	Persentase peningkatan BMD yang dikelola	100%	54.958.065.484,00	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	51.458.065.500,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	54.958.065.484,00	
Penyusunan Standar Harga	Balikpapan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	780.377.900,00	Penyusunan Standar Harga	Balikpapan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	780.377.900,00	
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	325.000.000,00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	325.000.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	664.997.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	664.997.000,00	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	150.000.000,00	

Penatausahaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	484.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	484.000.000,00	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 laporan	350.000.000,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 laporan	350.000.000,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 laporan	5.284.288.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 laporan	5.284.288.000,00	
Penilaian Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 laporan	804.999.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 laporan	804.999.000,00	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola	11 Gedung	40.441.903.600,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola	11 Gedung	43.941.903.584,00	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	940.000.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	940.000.000,00	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	381.500.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	381.500.000,00	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	265.000.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	265.000.000,00	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	586.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	586.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Lintas OPD

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah

Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan

Tahun 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Vol	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jkJWjUT6UtPb3Pbx-npoH4P3OXEHGhD0cLDmDlc1x64206961/edit?gid=1764206961#gid=1764206961	Gabungan Dinas Dinas	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Pembangunan daerah menjadi pondasi dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sehingga, pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri memiliki visi sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif"

Berdasarkan visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tersebut, terkandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, berarti mewujudkan penyusunan anggaran dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan berarti menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

c. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien berarti memperoleh hasil sesuai dengan target yang ditetapkan serta memperoleh hasil yang maksimal dengan menggunakan masukan yang minimal.

d. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berarti mewujudkan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Pengelolaan keuangan daerah yang kompetitif

Pengelolaan keuangan daerah yang kompetitif merupakan bentuk implementasi pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang dapat dibandingkan dengan yang lain.

3.2 Tujuan dan Sasara Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi walikota Balikpapan yang telah ditetapkan, maka BKAD Kota Balikpapan menetapkan tujuan selama periode 2022 -2026, yaitu:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79	80	81	82	83
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BKAD	n/a	58,66	65	70	75
		Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	13,570	13,570	13,570	13,570	13,570
			pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	19,138	19,138	19,138	19,138	19,138
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	11,638	12,200	12,200	12,500	12,500
			Penyerapan Anggaran	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333
			Kondisi Keuangan Daerah	6,552	6,88	6,880	7,000	9,000

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiran maju Tahun 2026 digambarkan dengan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun		Perkiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah	Lokasi				
			2025		2026							
			Target	Rp	Target	Rp						
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81	94.299.600.000,00	82	95.874.910.000,00	BKAD	Baikpapan				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100%	94.299.600.000,00	100%	95.874.910.000,00	BKAD	Baikpapan				
5	2	KEUANGAN	100%	94.299.600.000,00	100%	95.874.910.000,00	BKAD	Baikpapan				
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BKAD	65	24.943.143.300,00	70	27.153.050.855,00	BKAD	Baikpapan				
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,5	24.943.143.300,00	79,5	27.153.050.855,00	BKAD	Baikpapan		
5	2	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	65	288.101.825,00	70	314.599.560,00	BKAD	Baikpapan	
5	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	27.499.365,00	2 dokumen	30.249.560,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75 dokumen	27.499.520,00	89 dokumen	30.250.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75 dokumen	27.799.550,00	89 dokumen	30.250.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	38.495.710,00	1 laporan	42.350.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	166.807.680,00	4 dokumen	181.500.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16.999.605.605,00	100%	18.534.791.040,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/bulan	16.516.858.015,00	61 orang/bulan	18.000.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	378.756.200,00	60 Dokumen	416.631.820,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	60.628.260,00	12 dokumen	66.549.230,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	23.363.130,00	5 laporan	26.609.990,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 laporan	20.000.000,00	36 laporan	25.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	20.000.000,00	100%	22.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	20.000.000,00	2 dokumen	22.000.000,00	BKAD	Baikpapan

5	2	1	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	60.325.985,00	100%	66.549.560,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	245 Dokumen	24.149.810,00	245 Dokumen	26.620.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	36.176.175,00	12 Dokumen	39.929.560,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	781.920.100,00	100%	860.112.110,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 paket	161.920.100,00	80 paket	178.112.110,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 orang	310.000.000,00	20 orang	341.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	310.000.000,00	80 orang	341.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.197.869.735,00	100%	3.521.098.660,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	56.027.500,00	1 paket	61.630.250,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	1.287.534.500,00	16 paket	1.416.287.950,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia yang tersedia yang tersedia	3 paket	30.229.300,00	2 paket	33.275.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	613.946.010,00	7 paket	677.700.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	71.763.825,00	1 paket	80.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6650 dokumen	43.225.000,00	6000 dokumen	47.547.500,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan	60.334.000,00	2 laporan	66.367.400,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan	786.500.000,00	80 laporan	865.150.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	248.309.600,00	1 dokumen	273.140.560,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	709.755.000,00	100%	765.930.500,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	468.000.000,00	4 unit	500.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	51 unit	241.755.000,00	39 unit	265.930.500,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	943.284.000,00	100%	1.037.612.345,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	156.786.000,00	3 laporan	172.464.600,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	786.498.000,00	3 laporan	865.147.745,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.942.281.050,00	100%	2.030.357.080,00	BKAD	Baikpapan

5	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	995.241.050,00	28 unit	1.005.432.580,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	179.165.000,00	5 unit	185.674.500,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 unit	17.875.000,00	2 unit	19.250.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	400.000.000,00	1 unit	440.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	1	02.09	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	350.000.000,00	1 unit	380.000.000,00	BKAD	Baikpapan
						Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	13,57	69.356.456.700,00		78.579.682.120,00	BKAD	Baikpapan
						pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	19,138					
						Transparansi pengelolaan keuangan daerah	12,2					
						Penyerapan Anggaran	13,333					
						Kondisi Keuangan Daerah	6,88					
						Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP		WTP			
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisasi APBD yang tepat waktu	100%	17.898.391.200,00	100%	20.978.836.120,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	6.603.033.000,00	100%	7.759.397.600,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	237.043.000,00	2 Dokumen	250.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	70.982.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1500 dokumen	275.490.000,00	464 dokumen	300.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1000 dokumen	134.910.000,00	464 dokumen	185.477.600,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1500 dokumen	520.100.000,00	464 dokumen	589.710.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	1.263.630.000,00	2 Dokumen	1.396.813.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	807.266.000,00	2 Dokumen	1.105.920.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	918.632.000,00	11 Dokumen	1.235.665.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 dokumen	1.539.410.000,00	2 dokumen	1.693.350.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	835.570.000,00	600 Orang	902.462.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	3.416.235.000,00	100%	3.650.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	96 dokumen	671.017.000,00	13 dokumen	700.000.000,00	BKAD	Baikpapan

5	2	2	02.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	34 dokumen	402.091.000,00	2 dokumen	450.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	420 orang	2.343.127.000,00	384 orang	2.500.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100%	2.826.620.000,00	100%	3.008.775.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	181.500.000,00	24 Laporan	199.650.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	13 Dokumen	34.000.000,00	13 Dokumen	40.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	181.500.000,00	13 Laporan	199.650.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	195.350.000,00	1 laporan	210.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	181.500.000,00	2 dokumen	199.650.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	90.750.000,00	1 Dokumen	99.825.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	38.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	111.460.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	1.534.560.000,00	105 orang	1.600.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	28 lembaga	278.000.000,00	28 lembaga	300.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	2.565.003.200,00	100%	3.686.653.520,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.04	2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3 laporan	240.000.000,00	3 laporan	264.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	2.325.003.200,00	1 laporan	3.422.653.520,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara	100%	2.487.500.000,00	100%	2.874.010.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	55.000.000,00	BKAD	Baikpapan

5	2	2	02.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	2	02.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	2.337.500.000,00	190 orang	2.669.010.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan BMD yang terkelola	100%	51.458.065.500,00	100%	57.600.846.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	51.458.065.500,00	100%	57.600.846.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	780.377.900,00	1 dokumen	1.067.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	325.000.000,00	1 dokumen	357.500.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	664.997.000,00	2 dokumen	731.497.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	150.000.000,00	5 dokumen	200.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	484.000.000,00	2 laporan	532.400.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 laporan	350.000.000,00	36 laporan	385.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 laporan	5.284.288.000,00	50 laporan	5.500.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 laporan	804.999.000,00	3 laporan	885.499.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola	11 Gedung	40.441.903.600,00	11 Gedung	45.000.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	940.000.000,00	15 Dokumen	1.265.000.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	381.500.000,00	2 laporan	419.650.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	265.000.000,00	1 laporan	291.500.000,00	BKAD	Baikpapan
5	2	3	02.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	586.000.000,00	72 orang	965.800.000,00	BKAD	Baikpapan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disusun susai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan yaitu melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Pada tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan akan melaksanakan 3 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 dan 75 Sub Kegiatan. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dengan pagu indikatif sebesar Rp. 112.799.521.919,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2025. Program tersebut terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian	Pagu
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,5	24.943.143.300,00
5	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	65	288.101.825,00
5	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	27.499.365,00
5	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75 dokumen	27.499.520,00
5	2	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75 dokumen	27.799.550,00
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	38.495.710,00
5	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	166.807.680,00
5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16.999.605.605,00

5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/bulan	16.516.858.015,00
5	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	378.756.200,00
5	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	60.628.260,00
5	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	23.363.130,00
5	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 laporan	20.000.000,00
5	2	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	20.000.000,00
5	2	1	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	20.000.000,00
5	2	1	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	60.325.985,00
5	2	1	02.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	245 Dokumen	24.149.810,00
5	2	1	02.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	36.176.175,00
5	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	781.920.100,00
5	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 paket	161.920.100,00
5	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 orang	310.000.000,00
5	2	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	310.000.000,00

5	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.197.869.735,00
5	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	56.027.500,00
5	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	1.287.534.500,00
5	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia yang tersedia	3 paket	30.229.300,00
5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	613.946.010,00
5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	71.763.825,00
5	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6650 dokumen	43.225.000,00
5	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	60.334.000,00
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan	786.500.000,00
5	2	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	248.309.600,00
5	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	709.755.000,00
5	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	468.000.000,00
5	2	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	51 unit	241.755.000,00
5	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	943.284.000,00
5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	156.786.000,00

5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	786.498.000,00
5	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.942.281.050,00
5	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	995.241.050,00
5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	179.165.000,00
5	2	1	02.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 unit	17.875.000,00
5	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	400.000.000,00
5	2	1	02.09	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	350.000.000,00

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian	Pagu
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisasi APBD yang tepat waktu	100%	17.898.391.200,00

5	2	2	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	6.603.033.000,00
5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	237.043.000,00
5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	70.982.000,00
5	2	2	02.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1500 dokumen	275.490.000,00
5	2	2	02.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1000 dokumen	134.910.000,00
5	2	2	02.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1500 dokumen	520.100.000,00
5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	1.263.630.000,00
5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	807.266.000,00
5	2	2	02.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	918.632.000,00
5	2	2	02.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 dokumen	1.539.410.000,00
5	2	2	02.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	835.570.000,00
5	2	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	3.416.235.000,00
5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	96 dokumen	671.017.000,00

5	2	2	02.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	34 dokumen	402.091.000,00
5	2	2	02.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	420 orang	2.343.127.000,00
5	2	2	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100%	2.826.620.000,00
5	2	2	02.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	181.500.000,00
5	2	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	13 Dokumen	34.000.000,00
5	2	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	181.500.000,00
5	2	2	02.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	195.350.000,00
5	2	2	02.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	181.500.000,00

					Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
5	2	2	02.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	90.750.000,00
5	2	2	02.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	38.000.000,00
5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	111.460.000,00
5	2	2	02.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	1.534.560.000,00
5	2	2	02.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	28 lembaga	278.000.000,00
5	2	2	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	2.565.003.200,00
5	2	2	02.04	2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3 laporan	240.000.000,00
5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	2.325.003.200,00
5	2	2	02.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara	100%	2.487.500.000,00
5	2	2	02.05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 dokumen	50.000.000,00

5	2	2	02.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00
5	2	2	02.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	2.337.500.000,00

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian	Pagu
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan BMD yang dikelola	100%	51.458.065.500,00
5	2	3	02.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	51.458.065.500,00

5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	780.377.900,00
5	2	3	02.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	325.000.000,00
5	2	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	664.997.000,00
5	2	3	02.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	150.000.000,00
5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	484.000.000,00
5	2	3	02.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 laporan	350.000.000,00
5	2	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 laporan	5.284.288.000,00
5	2	3	02.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 laporan	804.999.000,00
5	2	3	02.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola	11 Gedung	40.441.903.600,00
5	2	3	02.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	940.000.000,00
5	2	3	02.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	381.500.000,00

5	2	3	02.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	265.000.000,00
5	2	3	02.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	586.000.000,00

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Inovasi BKAD adalah upaya mengenalkan sesuatu yang baru, sebuah proyek, praktik atau ide, yang nantinya akan digunakan untuk peningkatan kinerja, pengukuran kinerja tata pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dalam periode tertentu. Beberapa bentuk inovasi yang diterapkan di BKAD sampai dengan saat ini, sebagai berikut:

No	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Terkait Inovasi
-----------	---------------------	---

(1)	(2)	(3)
1	Penerbitan Regulasi Dan Dokumentasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (PROPAGANDA)	Pengumpulan dan penyediaan dokumen-dokumen pendukung operasional aplikasi SIPKD seperti dokumentasi sistem dan regulasi teknis untuk mengatur ruang lingkup kerja admin dan operator
2	Stop Kelebihan Gaji Dan Tunjangan Asn Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (SATU ASPIRASI)	menyusun regulasi berupa Keputusan Wali Kota yang memberikan hak akses kepada BPKD sebagai pengelola gaji ASN dengan cara mengaktifkan menu "BUP Diaktifkan" pada aplikasi SIM Gaji Taspen (aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola gaji ASN)
3	Standar Pelayanan Dan Sumber Informasi – BPKD (TRANSFORMASI)	Kemudahan informasi dalam alur pelayanan dan jaminan kualitas pelayanan BPKD
4	Peningkatan Tertib Administrasi Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan BLUD (Tiba Si Julak)	penerbitan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah sebagai payung hukum acuan dari sistem dan prosedur pengelolaan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kota Balikpapan
5	Pedoman Tata Cara Pembayaran Belanja Daerah	Penerbitan pedoman yang berfungsi : Sebagai Alat Pengendali ,pengawasan dan pemeriksaan ,khususnya dalam pelaksanaan pembayatan belanja daerah; Upaya untuk meningkatkan kinerja Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam melaksanakan Pembayaran belanja daerah, Mewujudkan keterpaduan dan keserasian administrasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah.
6	Sistem Pelayanan Secara Online (SYMPOL)	Sistem Informasi Secara Online adalah sistem informasi yang dirancang bangun berbasis web berfungsi untuk mempermudah dalam pelayanan informasi khususnya dalam penyewaan Gedung Pemeintah kepada masyarakat secara online.

7	Rekonsiliasi Dan Analisa Pendapatan Pajak Dan Retribusi (RELEPANSI)	Sistem berbasis web yang menyajikan format rekonsiliasi antara BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) selaku konsolidator dengan Perangkat Daerah penyusun Laporan Keuangan OPD, yang didalamnya menyajikan komponen perhitungan nilai realisasi dan nilai piutang pendapatan yang dilaksanakan OPD secara berkala.
8	Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan	rangkaian system dan gagasan guna terciptanya pencatatan asset yang riil dan akuntabel terutama di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan
9	Sistem Aplikasi Dokumen Pemusnahan dan Penghapusan BMD (SIAPKU PESAN BAMDA)	Aplikasi baru berbasis web yang memiliki berbagai macam template yang bisa diupdate untuk pengajuan usulan pemusnahan ataupun penghapusan BMD juga menyediakan informasi proses pengajuan usulan
10	Sistem Informasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana Gedung (SIPP SPG) Pada UPTD PPGP Kota Balikpapan	Sistem Informasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana Gedung adalah aplikasi berbasis web untuk pelaporan data pemeliharaan dan perawatan terhadap asset, sarana dan prasarana pada gedung yang dikelola oleh UPTD PPGP BPKAD Kota Balikpapan
No	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Terkait Inovasi
11	Sistem Informasi Pengesahan Belanja Operasional Sekolah	Sistem Informasi Pengesahan Belanja Operasional Sekolah yang terintegrasi dan berbasis web
12	Sistem Informasi Pemetaan Aset Tanah (SIPANAH)	Sistem Informasi berbasis web yang terintegrasi secara keruangan dengan peta digital mealui rancang bangun Sistem Informasi Geografis yang mengakomodir informasi aset tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai Pedoman, Landasan dan referensi dalam melaksanakan kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian program dan kegiatan.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention). Menekankan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara instansi dengan tetap diperhatikan peran tanggungjawab/ tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah di programkan dapat di manfaatkan antara lain melalui perencanaan.

Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

Selain itu, Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran program, dan kegiatan.

Demikian kami sampaikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2025 ini kami susun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Y. RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk arah bagi program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan. Sebagai suatu dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan, maka wajar apabila Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja perangkat daerah diikuti proses pemantauan, evaluasi dan review bertahap atas pelaksanaannya/implementasinya.

Rencana Kerja merupakan juga komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target – target capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus sinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra OPD.

Dokumen rencana kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan perlu menetapkan Rencana Kerja tahun 2025. Penetapan Rencana Kerja merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang akan menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu maka perlu disusun rencana pembangunan Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran dengan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan yang merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan saat penyusunan RKPD.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan perangkat daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra BPPDRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

3.3 Program dan Kegiatan Usulan 2025

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian RENSTRA BPPDRD

Dalam rangka penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025, diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang diuraikan dalam lampiran 1 Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja BPPDRD dan pencapaian Renstra BPPDRD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam mengukur keberhasilan Program dan Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPDRD Tahun 2023 serta Program dan Kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap Program dan Kegiatan, antara lain :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra BPPDRD s/d Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
							I		II		III		IV												
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		16	17	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai	83	51,486,000,110.00	-	10,583,612,280.00	-	6,866,064,662.00	-	8,545,878,524.00	-	6,437,316,995.00	-	32,432,872,461.00	-	62.99	88.93	64,504,883,219.00	-	172.26	BPPDRD		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	88	47,488,991,000.00	-	10,183,635,004.00	-	6,379,781,803.00	-	7,835,354,613.00	82.08	5,121,927,314.00	82.08	29,520,698,734.00	93.27	62.16	161.35	59,646,790,224.00	161.35	198.55	BPPDRD		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	70	47,488,991,000.00	70	10,183,635,004.00	-	6,379,781,803.00	-	7,835,354,613.00	-	5,121,927,314.00	70	29,520,698,734.00	100.00	62.16	70.00	59,646,790,224.00	-	-	BPPDRD	Indikator kinerja tahun 2022 dan 2023 berbeda	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	79	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	-	-	-	78.54	-	78.54	80,000,000.00	99.42	100.00	78.54	80,000,000.00	92.40	16.33	BPPDRD		
		Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	80,000,000.00	25	80,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25	80,000,000.00	100.00	100.00	25.00	80,000,000.00	-	-	BPPDRD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	81	2,074,185,510.00	-	116,587,501.00	-	668,329,228.00	-	388,796,537.00	79.17	845,114,081.00	79.17	2,018,827,347.00	97.74	97.33	157.92	3,423,899,500.00	179.45	105.51	BPPDRD		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Su b kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/S ub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perang kat daerah Penan ggung jawab	Penjelasan
							I		II		III		IV											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	552,427,010.00	-	-	1	250,166,250.00	-	-	-	303,860,000.00	1	554,026,250.00	100.00	100.29	2.00	843,307,750.00	-	-	BPPDRD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	499,998,500.00	-	36,690,500.00	1	182,407,691.00	-	37,427,000.00	1.00	189,418,800.00	2	445,943,991.00	100.00	89.19	4.00	877,013,836.00	-	-	BPPDRD	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	471,760,000.00	-	-	1	178,413,352.00	-	99,184,327.00	1.00	191,591,350.00	2	469,189,029.00	100.00	99.46	4.00	1,006,259,329.00	-	-	BPPDRD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	550,000,000.00	-	79,897,001.00	-	57,341,935.00	1.00	252,185,210.00	-	160,243,931.00	1	549,668,077.00	100.00	99.94	2.00	909,482,232.00	-	-	BPPDRD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	89	940,758,600.00	-	142,825,467.00	-	292,233,193.00	-	212,411,593.00	78.54	261,932,319.00	78.54	909,402,572.00	88.25	96.67	157.77	1,737,076,603.00	164.34	119.80	BPPDRD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	162,338,600.00	-	23,724,615.00	-	59,011,915.00	-	29,580,315.00	3.00	23,730,615.00	3.00	136,047,460.00	100.00	83.80	3.00	274,401,481.00	-	-	BPPDRD	Indikator kinerja tahun 2022 dan 2023 berbeda
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	4	778,420,000.00	-	119,100,852.00	-	233,221,278.00	-	182,831,278.00	4.00	238,201,704.00	4.00	773,355,112.00	100.00	99.35	7.00	1,611,341,312.00	-	-	BPPDRD	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Su b kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/S ub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perang kat daerah Penan ggung jawab	Penjelasan								
							I		II		III		IV												12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100%		16	17								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Nilai	86	902,065,00 0.00	-	177,151,80 9.00	-	194,049,6 66.00	-	109,315,7 81.00	79.3 8	208,343,2 81.00	79.38	688,860,5 37.00	92.30	76. 36	15 7.3 0	1,145,1 05,984. 00	165. 58	99.40	BPPDR D									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	74	701,495,000 .00	20	177,151,809 .00	15. 00	92,085,066 .00	16	93,387,281 .00	23.0 0	132,651,27 1.00	74	495,275,42 7.00	100.0 0	70. 60	15 1.0 0	930,14 4,065.0 0	-	-	BPPDR D									
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	100	200,570,000 .00	10	-	40. 00	101,964,60 0.00	20	15,928,500 .00	30.0 0	75,692,010 .00	100	193,585,11 0.00	100.0 0	96. 52	10 0.0 0	325,79 7,610.0 0	-	-	BPPDR D	Indikator kinerja tahun 2022 dan 202 3berbeda								
1	Meningk atnya Pendapat an Asli Daerah yang bersumb er dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Milyar	852. 37	9,701,290,4 40.00	159 .10	891,643,07 4.00	16 1.7 6	905,946,1 86.00	26 0.6 2	1,830,757, 878.00		4,160,352, 619.00	581.4 8	7,788,699, 757.00	68.22	80. 29	1,5 20. 48	12,189, 308,92 8.00	1,82 5.09	71.69	BPPDR D									
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pedapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	8.04	9,701,290,4 40.00	0.1 9	891,643,07 4.00	1.0 2	905,946,1 86.00	1.6 1	1,830,757, 878.00	-	4,160,352, 619.00	2.81	7,788,699, 757.00	35.01	80. 29	7.5 9	12,189, 308,92 8.00	44.4 6	71.69	BPPDR D									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Su b kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/S ub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perang kat daerah Penan ggung jawab	Penjelasan								
							I		II		III		IV												12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100%		16	17								
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Pajak Daerah	Dokume n	1	139,600,000 .00	-	30,822,920. 00	1	34,004,093 .00	-	20,118,360 .00	-	42,675,600 .00	1	127,620,97 3.00	100.0 0	91. 42	1.0 0	127,62 0,973.0 0	-	-	BPPDR D	Indikator kinerja tahun 2022 dan 202 3berbeda								
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis Pajak Daerah serta pengembang an Pajak Daerah dan kebijakan Pajak Daerah	Dokume n	2	1,345,628,0 00.00	-	10,322,500. 00	2	13,567,000 .00	-	367,339,50 0.00	-	534,872,00 0.00	2	926,101,00 0.00	100.0 0	68. 82	4.0 0	1,154,0 13,476. 00	-	-	BPPDR D									
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluas an kebijakan Pajak Daerah	Laporan	8	1,360,095,6 00.00	1	23,088,000. 00	3	163,443,57 0.00	1	327,566,70 4.00	3.00	624,529,85 1.00	8	1,138,628, 125.00	100.0 0	83. 72	10. 00	1,484,0 87,271. 00	-	-	BPPDR D									
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	378,381,000 .00	2	52,515,758. 00	1	53,948,760 .00	-	51,226,511 .00	-	200,894,02 3.00	3	358,585,05 2.00	100.0 0	94. 77	3.0 0	745,54 3,912.0 0	-	-	BPPDR D	Indikator kinerja tahun 2022 dan 202 3berbeda								
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak darah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	300,000,000 .00	-	192,086,810 .00	1	49,091,740 .00	-	41,088,500 .00	-	15,913,000 .00	1	298,180,05 0.00	100.0 0	99. 39	2.0 0	546,53 4,848.0 0	-	-	BPPDR D									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Su b kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/S ub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perang kat daerah Penan ggung jawab	Penjelasan
							I		II		III		IV											
							8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7X100 %											
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah	Laporan	1	1,560,000,0 00.00	-	406,425,450 .00	1.0 0	96,190,560 .00	-	401,842,02 4.00	-	521,914,38 7.00	1	1,426,372, 421.00	100.0 0	91. 43	2.0 0	2,836,6 36,860. 00	-	-	BPPDR D	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang d disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	15,0 00	3,289,500,4 00.00	-	79,876,660. 00	-	339,460,84 0.00	-	226,797,97 5.00		1,602,394, 756.00	5,250. 00	2,248,530, 231.00	35.00	68. 35	5,2 50.00	2,301,9 53,758. 00	-	-	BPPDR D	Indikator kinerja tahun 2022 dan 202 3berbeda
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah	Dokume n	200, 000	166,699,400 .00	205 ,84 0	31,733,790. 00	666	-	-	-	115,108,50 0.00	206,50 6	146,842,29 0.00	103.2 5	88. 09	20 6,5 06. 00	328,77 5,783.0 0	-	-	BPPDR D	Jumlah Wajib Pajak yg mendaftar mengalami kenaikan dan melebihi target yg ada. Hal ini bisa disebabkan oleh sosialisasi dan penyuluha n terkait pajak daerah yg sudah mulai tepat sasaran.	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Su b kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/S ub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perang kat daerah Penan ggung jawab	Penjelasan								
							I		II		III		IV												12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100%		16	17								
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Layanan	11	74,999,700.00	11	33,812,343.00	-	10,720,000.00	-	21,161,572.00	-	8,576,000.00	11	74,269,915.00	100.00	99.03	11.00	74,269,915.00	-	-	BPPDR D									
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pPajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	1	149,996,500.00	-	7,716,181.00	1.00	34,161,420.00	-	35,994,000.00	-	63,984,992.00	1	141,856,593.00	100.00	94.57	2.00	280,202,013.00	-	-	BPPDR D									
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	Dokumen	18,112	150,000,000.00	1,410	1,497,000.00	2,198.00	35,688,103.00	3,265	45,068,426.00		61,012,420.00	6,873	143,265,949.00	37.95	95.51	205,181.00	241,643,967.00	-	-	BPPDR D									
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak daerah	Dokumen	550	80,000,000.00	126	1,632,500.00	94.00	17,057,540.00	152	36,477,513.00		21,250,940.00	372	76,418,493.00	67.64	95.52	372.00	156,336,923.00	-	-	BPPDR D	Indikator kinerja tahun 2022 dan 2023 berbeda								
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	2	99,999,900.00	-	11,863,162.00	-	6,466,560.00	1	69,774,000.00	4.00	7,539,310.00	5	95,643,032.00	250.00	95.64	5.00	95,643,032.00	-	-	BPPDR D									
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	2	456,392,940.00	-	8,250,000.00	-	16,500,000.00	1	138,683,793.00	1.00	276,194,840.00	2	439,628,633.00	100.00	96.33	4.00	1,188,387,447.00	-	-	BPPDR D									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Su b kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/S ub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perang kat daerah Penan ggung jawab	Penjelasan
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100 %		14=6+12		15=14/5X100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembang an elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	149,997,000 .00	-	-	-	35,646,000 .00	-	47,619,000 .00	1.00	63,492,000 .00	1.00	146,757,00 0.00	100.0 0	97. 84	1.0 0	146,75 7,000.0 0	-	-	BPPDR D	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Capaian Realisasi Kinerja Instansi BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	14.20	12.87	90.6%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP BAdan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	69	65	94.2%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data, BPPDRD Tahun 2023

Berdasarkan Capaian Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi BPPDRD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023, selanjutnya dilakukan analisis capaian realisasi terhadap target IKU tahun 2023, Adapun analisis terdeskripsi sebagai berikut.

a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi capaian dari target indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 14.20% sampai Tahun 2023 terealisasi sebesar 12.87% dengan tingkat capaian kinerja 90.6 % artinya kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala BPPDRD pada tahun 2023 dinyatakan "TERCAPAI" dengan kriteria penilaian Realisasi Kinerja "SANGAT TINGGI". Realisasi tersebut berdasarkan data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.3 Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Uraian	2022	2023	Peningkatan / Penurunan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	811,249,650,355.18	892,824,394,215.84	81,574,743,860.66
Pajak Daerah	623,584,889,978.40	715,889,547,764.50	92,304,657,786.10
Retribusi Daerah	40,110,966,976.50	52,196,511,543.82	12,085,544,567.32
Pajak dan Retribusi Daerah	663,695,856,954.90	768,086,059,308.32	104,390,202,353.42

2. Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada Tahun 2022 Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperoleh nilai 61.02 atau 93.8% dari target yang ditetapkan dan meningkat pada Tahun 2023 memperoleh nilai 65 dan relisasi 93.4%, peningkatan dalam capaian ini dikarenakan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Perbandingan Realisasi Capaian dan Target Renstra pada Tahun 2021-2025 sebagai berikut :

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2022	2023	2025	2025	2022	2023	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)				780.71	852.37	1,062.03					
2	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)				5.02	8.04	11.05					
3	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1	1	1					
4	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1	1	1					
5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan				6	8	8					

	Kebijakan Pajak Daerah											
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1	1	1					
7	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1,438	3,851	8,415					
8	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1	1	1					
9	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				9,000	9,000	9,000					
10	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				9,690	9,884	10,082					
11	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5,280	5,544	5,821					

12	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1	1	1					
13	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				18,112	18,112	18,113					
14	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				500	550	600					
15	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2	2	2					
16	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4	2	2					
17	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1	1	1					

18	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)				82	83	84					
19	Nilai SAKIP				65	69	71					
20	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	1	1					
21	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	1					
22	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	1	1					
23	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1	1	1					

24	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	1	1					
25	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1	1	1					
26	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	1	1					
27	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)				84	88	92					
28	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				888	888	888					
29	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				1	1	1					

	Pelaksanaan Tugas ASN											
30	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				41,119	41,942	42,780					
31	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				296	296	296					
32	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5	5	5					
33	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10	10	10					
34	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan				20	20	20					

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
35	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2	2	2					
36	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)				80	85	90					
37	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1	1	1					
38	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75	80	85					
39	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				65	70	75					

40	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				64	68	72					
41	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1	1	1					
42	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75	80	85					
43	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				75	80	86					
44	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)				77	79	81					
45	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2	2	2					

46	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1	1	1					
47	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1	1	1					
48	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1	1	1					
49	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1	1	1					
50	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-	-					
51	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)				-	-	-					
52	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				15	15	15					

	Kantor yang Disediakan											
53	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15	15	15					
54	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30	30	30					
55	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5	5	5					
56	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15	15	15					
57	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15	15	15					
58	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	-	45					

59	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				3	3	3					
60	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2	2	2					
61	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12	12	12					
62	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	3	5					
63	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)				80	82	84					
64	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	6					
65	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3	3	3					

66	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2	-	-					
67	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	1	-					
68	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				85	86	89					
69	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36	36	36					
70	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	3	3					
71	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				85	86	89					

72	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	-	-					
73	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3	3	3					
74	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				-	0	0					
75	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				-	-	-					
76	Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	2	2					
77	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3	3	3					

78	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	-	-					
79	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				-	-	-					
80	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-	-					
81	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2	2					
82	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2	2					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Permasalahan pada Rancangan Awal RKPD pada badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan terkait Urusan Pemerintahan Bidang keuangan, yaitu :

No.	Urusan	Permasalahan	Solusi
1	Keuangan	Belum optimalnya Pembayaran Retribusi Non Tunai	Penguatan Aplikasi Pembayaran Non Tunai (Retribusi)
		Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 2. Permasalahan RKPD BPPDRD

Berdasarkan Peraturan Wali Nomor 43 Tahun 2016 Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BPPDRD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;

5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan sosialisasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, BPPDRD Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung pada Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;

- d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
- h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
- j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
- k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
- m. Pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
- o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
- p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang

terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
- f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
- i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
- i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;

- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
- m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- o. Pengendalian penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;

- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Merujuk pada tugas dan fungsi BPPDRD Kota Balikpapan, terdapat beberapa isu- isu Penting, antara lain :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau peningkatan kualitas aparatur daerah bidang perpajakan adalah mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel
2. Menggali sumber sumber pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan peningkatan akurasi data potensi penerimaan pajak
3. Pertumbuhan ekonomi kreatif kota adalah menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja, magnet bagi wisatawan, mampu menumbuhkan potensi ekonominya dan menampung gerakan ekonomi baru bagi warganya. Kota menjadi rumah bagi bisnis, organisasi, dan individu kreatif, karakter lokal, dan kerarifan lokal merupakan kekuatan kreatif warga dan kota
4. Optimalisasi peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD
5. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas
6. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

- a. Perlunya penyesuaian dan orientasi tugas pokok dan fungsi yang baru terhadap Pejabat Struktural dan staf, dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah baru,
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki;

- c. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam memberikan informasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun Peluang Badan Pengelola Pajak daerah dan retribusi Daerah adalah Sebagai berikut :

- a. Dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak/ Retribusi Daerah;
- b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- d. Dukungan dari salah satu BUMN dan BUMD bidang perbankan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telahaan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan kepala Daerah sesuai prioritas program /kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review rancangan awal RKPD BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah seperti table 2.4 berikut ini :

Tabel. 2.4
Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Ke giatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Balik pap an	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.192.01	12.594.996.760	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Balik pap an	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.192.01	14.708.523.275	
2	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Balik pap an	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	14.07	12.594.996.760	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Balik pap an	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	14.07	14.708.523.275	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Balik pap an	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	85	36.298199.086	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Balik pap an	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	85	55.571.645.694	
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balik pap an	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	73	60.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balik pap an	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	73	80.000.000	
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balik pap an	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	96	28.341.199.086	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balik pap an	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	96	49.029.133.894	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)	95	315.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)	95	50.000.000	
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	83	565.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	83	400.000.000	
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	85	3.430.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	85	2.662.911.800	
9	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	86	900.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	86	1.040.000.000	
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	93	1.425.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	93	1.109.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	93	1.262.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	93	1.200.000.000	
TOTAL						TOTAL					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada wajib pajak, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.5
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan (***)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Program dan kegiatan Pelayanan Terhadap Wajib Pajak yang terkait dengan Kebutuhan Wajib Pajak dan untuk pencapaian target PAD Kota Balikpapan tidak diusulkan melalui Proses Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Forum OPD yang dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1 TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan IK (Indikator Kinerja) di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Telaahan Misi Kementerian Keuangan, dan Badan Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Misi Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Misi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan
Menarik dan mempertahankan Talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai	Meningkatkan Profesionalisme aparatur
	Meningkatkan Kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mencapai tingkat kepatuhan Pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat	Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat
	Meningkatkan Kontribusi yang optimal bagi APBD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN

3.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota, yaitu :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah;

3.2.2. SASARAN

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan lebih spesifik.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

dengan indikator sasaran :

Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

dengan indikator sasaran :

Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 3.2 :Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi akhir Capaian Tujuan /Sasaran
					2023	2025	2025	2025	2026	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indikator Tujuan: Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	24,21	36,88	41.42	44.17	44.74	44.40	44.40
			Indikator Sasaran: Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	17.99	26.40	35.57	60.17	72.41	83.31	83.31

Program Dan Kegiatan Usulan Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Balikpapan	1.192,01	6.776.642.761	APBD		1,192.01	15.426.245.625
5	2	4	2	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Balikpapan	14.07	6.776.642.761	APBD		14.07	15.426.245.625
5	2	4	20 1	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	782.872.000	APBD		1	2.000.000.000
5	2	4	20 1	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	249.800.000	APBD		1	1.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	20 1	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	8	587.643.213	APBD		8	750.000.000
5	2	4	20 1	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	Balikpapan	1	605.083.200	APBD		1	573.000.000
5	2	4	20 1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	1	300.875.635	APBD		1	750.000.000
5	2	4	20 1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	1	2.001.381.780	APBD		1	2.200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	20 1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	Balikpapan	13.000	749.655.000	APBD		13.000	1.800.000.000
5	2	4	20 1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	249.987.200	APBD		1	750.000.000
5	2	4	20 1	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	Balikpapan	11	228.000.000	APBD		11	700.000.000
5	2	4	20 1	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	Balikpapan	10.150	200.000.000	APBD		10.150	600.000.000
5	2	4	20 1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	164.951.833	APBD		1	850.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	20 1	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	100.000.000	APBD		1	800.000.000
5	2	4	20 1	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	2	100.000.000	APBD		2	600.000.000
5	2	4	20 1	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Balikpapan	2	456.392.900	APBD		2	2.053.245.625
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	84	53.223.357.239	APBD		85	35.038.278.645

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	02	01	2		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	73	122.814.862	APBD		73	25.000.000
	02	01	20 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	10.674.772	APBD		-	-
	02	01	20 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	1	99.594.000	APBD		1	25.000.000
	02	01	20 1	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	12.546.090	APBD		-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Perangkat Daerah								
02	01	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	96	49.029.133.894	APBD		96	28,286,199,086
02	01	20 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Balikpapan	70	49.029.133.894	APBD		-	30.396.278.645
02	01	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	85	1.995.254.183	APBD		85	2.140.000.000
02	01	20 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	2	366.421.383	APBD		2	200.000.000
02	01	20 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	5	553.911.800	APBD		5	500.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
02	01	20 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	1	475.000.000	APBD		1	750.000.000	
02	01	20 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh (Laporan)	Balikpapan	1	99.921.000	APBD		1	100,000,000.00	
5	02	01	20 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Balikpapan	1	500.000.000	APBD		1	500.000.000
5	02	01	2	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)	Balikpapan	85	32.302.400	APBD		85	0
02	01	20 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Balikpapan	5	32.302.400	APBD		0	0	
02	01	2	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Balikpapan	93	961.189.700	APBD		93	1.150.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Daerah								
02	01	20 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Balikpapan	1	174.978.200			1	250.000.000
02	01	20 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Balikpapan	1	786.211.500	APBD		1	900.000.000
02	01	2	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Balikpapan	93	1.082.662.200	APBD		93	1.002.000.000
02	01	20 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Balikpapan	84	757.822.200	APBD		84	802.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	01	20 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Balikpapan	20	324.840.000	APBD		20	200.000.000

3.4 Mapping Program dan Kegiatan terhadap Isu Pembangunan

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguan	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.192,01	7,931,393,340						
5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	14.07		√					
5	02	04	201	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1		√					
5	02	04	201	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1		√					

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguan	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04	201	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	8						√	
5	02	04	201	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1						√	
5	02	04	201	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1		√					
5	02	04	201	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1						√	

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguan	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04	201	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	13.000		√					
5	02	04	201	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1		√					
5	02	04	201	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	11						√	
5	02	04	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	10.150		√					
5	02	04	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	1		√					

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguan	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Daerah (Dokumen)								
5	02	04	201	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1		√					
5	02	04	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2		√					
5	02	04	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2		√					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN

4.1 RENCANA KERJA

Pada Tahun 2025 Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan memiliki 2 Program dan 8 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif sebesar Rp. 60.000.000,-, sebagaimana table berikut ini :

Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya BPPDRD dalam rangka pencapaian target. Renstra Organisasi Perangkat Daerah BPPDRD Kota Balikpapan disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2025. Harapan yang ingin dicapai adalah agar segenap Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.

Tabel Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH						60.000.000.000,00							50.514.524.270,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						59.446.088.200,00							49.964.524.270,00	
	5.02	KEUANGAN						59.446.088.200,00							49.964.524.270,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	85 Nilai			85 Nilai	52.669.445.439,00						85 Nilai	34.538.278.645,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP (Poin)</i>	-			73 Poin	99.594.000,00			-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	99.594.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			96 Nilai	49.029.133.894,00			-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	30.396.278.645,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				70 Orang/bulan	49.029.133.894,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		30.396.278.645,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			85 Nilai	0,00			-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	325.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		125.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			85 Nilai	1.496.865.645,00			-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	1.640.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	421.944.645,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		90.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	475.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	99.921.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			85 Nilai	0,00			-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			93 Nilai	961.189.700,00			-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	1.150.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	174.978.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		250.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	786.211.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		900.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			93 Nilai	1.082.662.200,00			-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	1.002.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				84 Unit	757.822.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		802.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	324.840.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.192,01 Milyar			1.192,01 Milyar	6.776.642.761,00						1.192,01 Milyar	15.426.245.625,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)</i>	-			14,07 %	6.776.642.761,00			-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan	-	15.426.245.625,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	782.872.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	249.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				8 Laporan	587.643.213,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				1 Unit	605.083.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		573.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Laporan	300.875.635,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				1 Laporan	2.001.381.780,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				13000 Obyek Pajak	749.655.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		1.800.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	249.987.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>				11 Layanan	228.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		700.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>				10150 Dokumen	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		600.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	164.951.833,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		850.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		800.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		600.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				2 Laporan	456.392.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kota Balikpapan		2.053.245.625,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB V
INOVASI

Adapun inovasi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Antara lain :

No.	Nama Inovasi	Fungsi
1.	Sipawlin	Pendaftaran Wajib Pajak Online
2.	e-sptpd	Pelaporan Pajak Online
3.	Portal Payment	Digitalisasi Pembayaran Pajak (non-Tunai)
4.	Display Pajak	Digitalisasi Pelayanan Pajak
5.	Satgas Monalisa	Satuan Tugas Monitoring Alat Perekam Transaksi

BAB V

P E N U T U P

Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responded oleh semua stake holdersnya. Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni top-down dan bottom-up approach.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Rencana Kerja yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Rencana Kerja adalah salah satu bagian terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). Perjanjian Kinerja merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Rencana Kerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Z. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu

a. Persiapan penyusunan;

Pada tahapan ini perangkat daerah membentuk tim Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan melakukan penyiapan data dan informasi perencanaan perangkat daerah.

b. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan Rancangan Awal Renja dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Rancangan Awal Rancangan Akhir Renja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

c. Penyusunan rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.

e. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja Perangkat merupakan proses penyempurnaan rancangan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah menjadi

Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

f. Penetapan.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah lainnya.

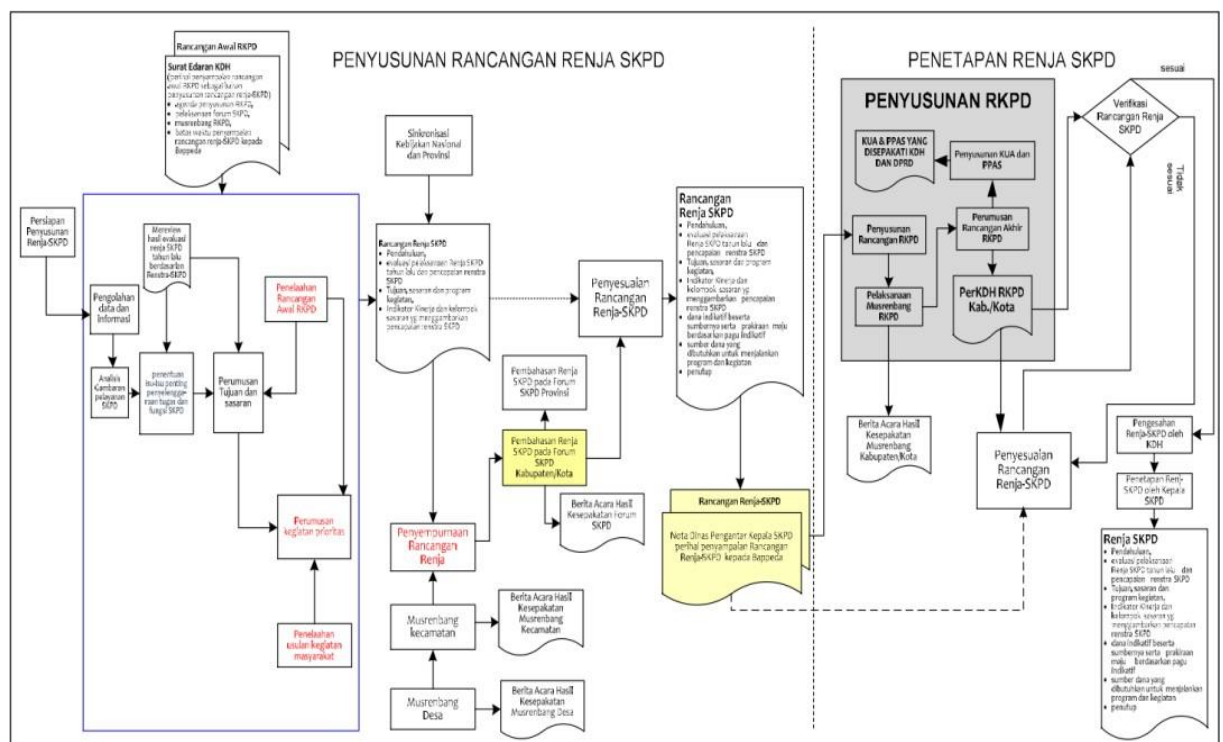
Dalam hal hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA tersebut, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada Penetapan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tersebut kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Berikut adalah gambar tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir

Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota



Untuk dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 , BKPSDM Kota Balikpapan menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2025. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di muktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah dimuktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimuktahirkan; sebagaimana telah dimuktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 -5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/098/BKPSDM Tanggal 22 Desember 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Nomor 800/096/BKPSDM Tentang Indikator Utama Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025, disusun dengan maksud untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah :

- 1) Pedoman kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2025.
- 2) Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi kinerja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025
- 3) Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.

Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja (Rancangan Akhir Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja selama tahun 2025. Sistematika penyajian Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Menjelaskan secara ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran kinerja Rancangan Akhir Renja OPD, Program dan Kegiatan OPD, dan Menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan OPD.

BAB IV. RANCANGAN AKHIR RANCANGAN AKHIR RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan secara ringkas tentang Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan secara ringkas Inovasi Perangkat Daerah

BAB VI. PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seumpama ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

BAB. II. HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Balikpapan. Adapun Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan diatur berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022.

Evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan beberapa hal. Berdasarkan hasil monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023, selanjutnya dilakukan evaluasi Rancangan Akhir Renja 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN;
 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 6. Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai;
 7. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN;
 8. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
 9. Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;
 10. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
 11. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 12. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 13. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

14. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
6. Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;
5. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
6. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
7. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
13. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
14. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

1. Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Ketidacapaian kinerja ini, sering terjadi akibat peserta diklat /bimtek yang mengundurkan diri dari diklat/bimtek atau terjadi ketidaksesuaian jadwal penyelenggaraan diklat/bimtek dari pihak ketiga penyelenggara diklat/bimtek
Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;	Dari target kinerja 650 SK kenaikan pangkat, hanya 614 usulan kenaikan pangkat PNS yang masuk dari perangkat daerah. Dengan demikian hanya 614 usulan yang dapat diproses kenaikan pangkatnya ke KanReg BKN.
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;	BKPSDM membuka 15 formasi untuk tugas belajar, namun dari program studi tersebut hanya 13 PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 0 atau memiliki capaian kinerja sebesar 0,00 % dikarenakan Penghargaan SLKS baru terbit akhir Desember 2023, sehingga belum bisa diberikan di tahun 2023 kepada ASN yang bersangkutan. Adapun penghargaan dalam bentuk uang, Perwali pemberian penghargaan masih proses harmonisasi di bagian hukum. Sehingga belum dapat mengusulkan keputusan Walikota tentang pemberian hadiah. Usulan pemberian penghargaan merupakan hasil studi banding ke pemkab sleman dan penyusunan kajian, yang menyatakan bahwa penghargaan lebih baik diberikan berupa materi (uang)
Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 288 atau memiliki capaian kinerja sebesar 88,62 % dikarenakan Realisasi hanya 288 , krn jumlah tersebut yang disetujui oleh dewan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dibawah naungan sekretariat militer kementerian setneg. Yg usulannya melalui kemendagri.
Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN;	Target kinerja indikator ini adalah sejumlah 250 ASN yang mendapatkan sosialisasi disiplin pegawai. Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 216 ASN atau memiliki capaian kinerja sebesar 86,40%.
Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;	Ketidaktercapaian penyelesaian kasus pelanggaran disiplin, karena pada hal tertentu memerlukan penyelesaian masalah yang tidak biasa dan memerlukan penanganan lebih lama dan melewati 1 (satu) tahun anggaran.
Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;	ketidaktercapaian Proses Izin Perceraian Pegawai, karena pada hal tertentu memerlukan penyelesaian masalah yang tidak biasa dan memerlukan penanganan lebih lama. Kasus perceraian juga salah satu hal yang tidak dapat diprediksi saat penentuan target kinerja, kasus perceraian dapat lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari target yang ditentukan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;	Ketidacapaian kinerja ini, sering terjadi akibat peserta diklat /bimtek yang mengundurkan diri dari diklat/bimtek atau terjadi ketidaksesuaian jadwal penyelenggaraan diklat/bimtek dari pihak ketiga penyelenggara diklat/bimtek
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	Target kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 56 Jumlah ASN yang yang menerima gaji dan tunjangan dan terealisasi 46 orang
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 39 jenis dan terealisasi 23 paket dengan tingkat capaian kinerja sebesar 58,97%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	Ketidaktercapaian disebabkan oleh efisiensi pembelanjaan konsumsi makan minum rapat
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	Target kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah 130 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan realisasi sebesar 104 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Tingkat capaian kurang dari 100% disebabkan karena perjalanan dinas lebih didominasi perjalanan ke luar provinsi Kalimantan Timur sehingga biaya perjalanan dinas hanya bisa

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
	memenuhi 80% dari target kinerja yang ditentukan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Ketidaktercapaian karena kinerja dikarenakan banyak peralatan mesin yang tidak perlu dilakukan perbaikan. Pemeliharaan hanya dilakukan untuk pemeliharaan rutin peralatan mesin.

2. Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan.

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kualitas Data ASN (indikator ini memenuhi capaian karena dari data ASN sebanyak 4.353 , data yang terinput lengkap dan benar adalah 4.353 data ASN atau memiliki capaian 100%). 2. Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar (indikator kinerja ini tercapai karena CASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar) 3. Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri). (Indikator ini memenuhi capaian target kinerja karena semua usulan fasilitasi kegiatan Korpri yang terdiri dari PORNAS, seleksi PORPROV Tahun 2024, MTQ Nasional, pengajian ramadhan, paskah, ibadah bulanan unkris).
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;	Target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen kajian rencana kebutuhan ASN per jenis jabatan 5 tahun kedepan atau memiliki capaian kinerja 100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;	Target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen dan memiliki capaian target kinerja 100 %
Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 100%
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;	Target kinerja sub kegiatan ini adalah dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (termasuk pengembangan aplikasi SIMPEG) sebanyak 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 dokumen atau memiliki capaian 100%
Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawain.	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sistem Informasi Kepegawaian dengan target 12 (dua belas) laporan. Target kinerja ini terealisasi 100 % yaitu berupa Laporan Hasil Sistem Informasi Kepegawaian (data pokok statistik kepegawaian dan rekonsiliasi data).

Terpenuhinya target kinerja program/ Kegiatan adalah karena kemampuan PPTK dalam memahami perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta didukung oleh anggaran yang mencukupi.

3. Faktor kinerja program/ kegiatan yang melebihi target.

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Program Kepegawaian Daerah;	<p>Program ini memiliki 4 (empat) indikator program yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi. Tahun 2023 target indikator kinerja ini adalah sebesar 40 % dan terealisasi 40% dengan capaian target kinerja 100%. Integrasi tersebut adalah terintegrasinya 2 sistem informasi dari 5 sistem informasi ASN . Realisasi sebesar 40 % yaitu terintegrasinya SIMPEG dengan e-kompetensi dan e-disiplin. 2. Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja. Target kinerja program ini pada tahun 2023 adalah sebesar 88,80 % dimana angka tersebut didapat dari $(100\% \text{ penempatan/ pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar} + 80\% \text{ penempapatan/ pengangkatan jabatan fungsional} + 77,78\% \text{ Persentase penempatan/ pengangkatan dalam jabatan administrator} + 100\% \text{ penempatan/ pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi} + 75\% \text{ penempatan/ pengangkatan dalam jabatan pengawas} + 100\% \text{ penempatan jabatn pelaksana (mutasi internal dan PWK)})/6$. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan per triwulan pada tahun 2023 ,bidang mutasi melaporkan bahwa telah dilakukan mutasi, promosi dan rotasi sesuai kriteria indikator tersebut yaitu sebesar 89,44% atau memiliki capaian kinerja 100,72 % 3. Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik. Pada Tahun 2023 target kinerja indikator ini adalah sebesar 97 ,99% atau dapat dikatakan bahwa ditargetkan 4389 ASN berkinerja baik dibandingkan jumlah ASN sejumlah 4479. Realisasi terhadap target yang ditetapkan ketika penyusunan Renstra tersebut pada tahun 2021 adalah senilai 95,26 % . Realisasi ini didapat dari angka 5387 ASN berkinerja baik dibandingkan 5655 jumlah ASN yang menginput SKP pada aplikasi SIAASN (aplikasi BKN) dan merupakan ASN Kota Balikpapan. Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 97,21% 4. Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN. %. Capaian yang sangat melampaui target kinerja ini karena terjadinya lonjakan nilai kualifikasi pendidikan dibanding tahun lalu, yaitu 20,89 . Nilai kualifikasi pendidikan ASN Kota Balikpapan tahun 2022 hanya sebesar 11,67. Hal ini dipengaruhi oleh fasilitasi tugas belajar sebanyak 13 orang dengan menggunakan dana APBD Kota Balikpapan. Selain tugas belajar juga diberikan fasilitasi dalam pemberian izin belajar bagi PNS Kota Balikpapan serta program pemutihan ijazah <p>Tidak semua indikator program ini memiliki capaian diatas 100 % namun, secara rata-rata kinerja Program Kepegawaian Daerah adalah sebesar 611,20%. Terhadap tingginya capaian tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh pemilihan formulasi hitung indikator kinerja yang harus disempurnakan di dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga capaian kinerja dapat lebih andal dan memadai.</p>

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Target kinerja indikator ini 14,91%, angka ini didapat dari 886 ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu tahun (2023) berbanding 5941 jumlah seluruh ASN Kota Balikpapan. Realisasi indikator ini adalah sebesar 18,94 % atau dari 1.132 ASN mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu tahun berbanding dengan 5.941 ASN yang akan memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu periode renstra dan memiliki capaian 127 %. Capaian melebihi target ini , diperoleh dari adanya pengembangan kompetensi yang tidak memerlukan anggaran, seperti pembelajaran daring.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Target kinerja indikator ini adalah nilai 81. Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah nilai sebesar 83,83. Capaian kinerja program ini adalah sebesar 103,49%. Capaian kinerja melebihi target ini dapat dikatakan karena penerima layanan sekretariat BKPSDM merasa puas dengan layanan yang diberikan.
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;	Target kinerja indikator ini adalah 88,20 % dan terealisasi sebesar 91,02 % atau dengan kata lain terjadi TW IV -Jumlah Rotasi dan Mutasi sebanyak 69 orang yang sesuai adalah 65 orang berdasarkan rekom KASN, hasil baperjakat dan Hasil Uji Kompetensi.
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;	Target kinerja tahun 2023 adalah sebesar 13,35 % atau 244 ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam tahun 2023 berbanding dengan 1828 ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu periode renstra. Realisasi kinerja indikator ini adalah sebesar 35,01 % atau didapat dari angka 634 ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam tahun 2023 berbanding dengan 1.828 ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu periode renstra. Capaian melebihi target ini , diperoleh dari adanya pengembangan kompetensi yang tidak memerlukan anggaran, seperti pembelajaran daring
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;	Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1. Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN. Target kinerja indikaor ini pada tahun 2023 adalah sebesar 5,26 % atau didapat dari angka 19 target penjatuhan disiplin tahun 2023-18 (angka target penjatuhan disiplin 2022) berbanding 19 target penjatuhan disiplin tahun 2023. Realisasi dari target kinerja ini adalah 57,1 % dikarenakan pada tahun 2023 terjadi 11 penjatuhan disiplin jika dibandingkan realisasi 7 penjatuhan disiplin pada tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi bidang mutasi, perlu dilakukan reformulasi rumus hitung, agar hasil evaluasi terhadap indikator kinerja ini tidak bias. 2. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan. Target kinerja indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 8,06 % atau didapat dari angka 361 ASN yang diberikan penghargaan berbanding 4479 target jumlah keseluruhan pegawai. Realisasi dari target kinerja ini adalah 0,0 % dikarenakan Penghargaan SLKS baru terbit akhir Desember 2023, sehingga belum bisa diberikan di tahun 2023 kepada ASN yang bersangkutan. Adapun penghargaan dalam bentuk uang, Perwali pemberian penghargaan masih proses harmonisasi di bagian hukum.

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
	<p>Sehingga belum dapat mengusulkan keputusan Walikota tentang pemberian hadiah. Usulan pemberian penghargaan merupakan hasil studi banding ke pemkab sleman dan penyusunan kajian, yang menyatakan bahwa penghargaan lebih baik diberikan berupa materi (uang).</p> <p>Tidak semua indikator kegiatan ini memiliki capaian diatas 100 % namun, secara rata-rata kinerja kegiatan ini adalah sebesar 1085,71%. Terhadap tingginya capaian tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh pemilihan formulasi hitung indikator kinerja yang harus disempurnakan di dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga capaian kinerja dapat lebih andal dan memadai.</p>
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	<p>Target kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah skor IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat BKPSDM sebesar 81 dan terealisasi dengan skor 81,94 dengan tingkat capaian 101,16 % di akhir Desember 2023. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai BKPSDM terhadap layanan internal keuangan Sekretariat BKPSDM. Realisasi skor 81,94 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal keuangan BKPSDM dikatakan berkinerja baik. koordinasi yang baik antara staf sekretariat (PA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Operator Gaji, Admin Ekin) BKPSDM dalam perbaikan pelayanan keuangan BKPSDM.</p>
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;	<p>Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target skor 81 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 84,12 dengan tingkat capaian 103,85 %. Realisasi skor 84,12 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal administrasi umum BKPSDM dikatakan berkinerja baik. Capaian kinerja melebihi target ini dapat dikatakan karena penerima layanan sekretariat BKPSDM merasa puas dengan layanan yang diberikan.</p>
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah; Jasa Urusan	<p>Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja skor IKM sebesar 81 dan terealisasi 85,02 dengan tingkat capaian 104,96 %. Realisasi skor 85,02 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal penyediaan jasa penunjang BKPSDM dikatakan berkinerja baik. Capaian kinerja melebihi target ini dapat dikatakan karena penerima layanan sekretariat BKPSDM merasa puas dengan layanan yang diberikan.</p>
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	<p>Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 81 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 84,22 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 103,98 %. Realisasi skor 84,22 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pemeliharaan barang milik daerah BKPSDM dikatakan berkinerja baik. Capaian kinerja melebihi target ini dapat dikatakan karena penerima layanan sekretariat BKPSDM merasa puas dengan layanan yang diberikan.</p>
Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;	<p>Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Fungsional ASN yang dibina. Target kinerja indikator ini adalah sejumlah 237 ASN . Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 268 ASN atau memiliki capaian kinerja sebesar 113,08%.</p>

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Target kinerja indikator ini adalah sebesar 7 (tujuh) laporan dan terealisasi 8 (delapan) laporan atau memiliki capaian kinerja 114,29 %.
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	Target kinerja sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah 3 (tiga) Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dan terealisasi hingga 31 Desember 2023 adalah sebanyak 4 (empat) paket yang merupakan jumlah keseluruhan barang cetakan dan penggandaan yang digunakan untuk keperluan administrasi kantor BKPSDM.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran pencapaian tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada khususnya dan tersedianya pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya, dan bagi ASN Kota Balikpapan pada khususnya.
 2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdampak pada perlunya usaha yang lebih optimal dari seluruh sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun mendatang agar dapat mengejar ketertinggalan dalam pencapaian target Renstra. Ketidak tercapaian target kinerja tersebut juga dipengaruhi ketidak tepatan dalam penentuan target renstra/ Rancangan Akhir Renja sehingga menyebabkan rendahnya atau bahkan melebihi target kinerja.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
1. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi berkala di tahun berjalan agar dapat menyesuaikan pendekatan terbaik dalam pencapaian tujuan program / kegiatan .
 2. Peningkatan pemahaman perencanaan perangkat daerah ke dalam organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat mengoptimalkan strategi /pendekatan pencapain target kinerja. Peningkatan pemahaman perencanaan pada sumber daya yang ada di di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga di perlukan pada saat penentuan target kinerja. Ketidapkahaman terhadap perencanaan perangkat

daerah, membuat penentuan target terlalu pesimis atau terlalu optimis. Hal ini akan berdampak pada nilai evaluasi perencanaan perangkat daerah dan juga pada ketercapaian tujuan perangkat daerah.

3. Penguatan data dasar (*baseline* kinerja) pada perencanaan perangkat daerah dimasa mendatang. Optimalisasi anggaran hanya untuk pencapaian target kinerja dan bukan untuk hal aksesoris program/ kegiatan.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Rancangan Akhir Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023	Realisasi Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	90,81%	74,89%	88,80%	89,44%	100,72%	89,44%	98,49%
	Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	100,00%	20,00%	40%	40,00%	2.1%	60,00%	60,00%
	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	98,79%	97,81%	97,99%	95,26%	97,21%	95,26%	96,43%
	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	13,76%	0,69%	3,68%	79,01%	2146,90%	79,69%	579,15%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kualitas Data ASN	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	60,00%	60,00%
	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	100,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%
	Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	60,00%	60,00%
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencanan Kebutuhan,Jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5	1,00	1	1	100,00%	200,00%	40,00%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5	1,00	1	1	100,00%	200,00%	40,00%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5	1,00	1	1	100,00%	2,00	40,00%

Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Rancangan Akhir Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5	1,00	1	1	100,00%	2,00	40,00%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12,00	2,00	3	3	100,00%	5,00	41,67%
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Sistem Informasi Kepegawaian	60,00	12,00	12	12	100,00%	24,00	40,00%
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	91,22%	74,89%	88,20%	91,02%	103,19%	91%	99,78%
	Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu	100,00%	20%	40%	40,00%	100,00%	0,60	60,00%
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	80,0	4,00	16	16	100,00%	20,00	25,00%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3750,0	742,00	650	614	94,46%	1356,00	36,16%
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	20	4,00	6	3	50,00%	7,00	35,00%
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi	31,811%	19,35%	22,00%	25,73%	116,94%	45,08%	141,70%
	Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	0,26%	0,29%	0,33%	0,30%	90,07%	0,58%	223,86%
	Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional	20,80%	22,16%	13,50%	62,28%	461,33%		
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	30,0	7,00	6	6	100,00%	13,00	43,33%

Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Rancangan Akhir Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	96,0	13,00	15	13	86,67%	26,00	27,08%
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	1225,0	365,00	237	268	113,08%	633,00	51,67%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	6,25%	12,50%	5,26%	57,1%	1085,71%	69,64%	1114,29%
	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	10,56%	8,72%	8,06%	0,00	0,00%	8,72%	82,54%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5,0	1,00	1	1	100,00%	2,00	40,00%
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	180,0	0,00	3	-	0,00%	0,00	0,00%
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	1750,0	396,00	325	288	88,62%	684,00	39,09%
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1750,0	145,00	250	216	86,40%	361,00	20,63%
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	80,0	7,00	18	11	61,11%	18,00	22,50%
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	76,0	10,00	20	7	35,00%	17,00	22,37%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	100%	9,98%	14,91%	18,94%	127,00%	28,92%	28,92%
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi	100%	15,66%	15,61%	12,04%	77,10%	27,69%	27,69%

Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Rancangan Akhir Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4.113	580,00	1958	495	25,28%	1075,00	26,14%
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5	2,00	2	2	100,00%	4,00	80,00%
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi	100%	4,31%	13,35%	35,01%	262,25%	39,32%	39,32%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7,0	7,00	7	8	114,29%	15,00	214,29%

Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Rancangan Akhir Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Intenal Perangkat Daerah	84,0		81,00	83,83	103,49%	83,83	99,79%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	90,6	89,95	89,75	0,00		89,95	99,33%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,0	77,08	81,00	81,94	101,16%	159,02	189,31%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	235	48,00	56	46,00	82,14%	94,00	40,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,0	77,81	81,00	84,12	103,85%	161,93	192,77%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,0	10,00	39	23,00	58,97%	33,00	73,33%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	65,0	14,00	14	13,00	92,86%	27,00	41,54%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15,0	3	3	4,00	133,33%	7,00	46,67%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	10,0	2,00	2	2,00	100,00%	4,00	40,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440,0	75,00	130	104,00	80,00%	179,00	40,68%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,0	80,07	81,00	85,02	104,96%	165,09	196,54%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60,0	12,00	12	12,00	100,00%	24,00	40,00%

Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Rancangan Akhir Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,0	12,00	12	12,00	100,00%	24,00	40,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60,0	12,00	12	12,00	100,00%	24,00	40,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,0	76,59	81,00	84,22	103,98%	160,81	191,44%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	70,0	14,00	14	14,00	100,00%	28,00	40,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	5,0	1,00	1	1,00	100,00%	2,00	40,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	875,0	45,00	130	61,00	46,92%	106,00	12,11%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma , Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Norma , Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma , Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang urusan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Indeks Manajemen ASN . NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Adapun Manfaat penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN yaitu:

- a. sebagai instrumen untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. sebagai dasar bagi Instansi Pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen ASN sudah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN di lingkungan instansi masing-masing; dan
- c. sebagai instrumen kontrol sosial Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat agar mampu menjalankan peran sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.

Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas:

- a. Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan ASN;
- b. Pengadaan ASN;
- c. Pengangkatan ASN;
- d. Pangkat;
- e. Mutasi;
- f. Jabatan;
- g. Pengembangan Karier ASN;
- h. Pola Karier;
- i. Penggajian, Tunjangan, Dan Fasilitas;
- j. Penghargaan;
- k. Jaminan Pensiun Dan Jaminan Hari Tua;
- l. Perlindungan;
- m. Penilaian Kinerja;
- n. Cuti;

- o. Kode Etik;
- p. Disiplin;
- q. Pemberhentian;
- r. Pensiun.

Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN menggunakan formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Formulasi penghitungan tersebut berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Berdasarkan perhitungan tersebut Kepala BKN menetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul;
 - b. Nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik;
 - c. Nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup;
 - d. Nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan
 - e. Nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) dan Indikator Kinerja Hasil (IKK *Outcome*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa urusan pemerintahan dalam lingkup kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan memiliki 3 (tiga) IKK *Outcome*.

Berikut merupakan IKK urusan penunjang pemerintahan dalam lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang diampu BKPSDM Kota Balikpapan pada tahun 2021- 2026.

- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Rasio ini mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar} = \frac{\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai}} \times 100 \%$$

K

Keterangan =

- Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi negeri dan atau swasta tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi.
- Seluruh jumlah pegawai adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.

b. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Rasio ini melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga Kesehatan. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio pegawai Fungsional} = \frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$$

K

Keterangan=

- Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional.
- Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.

c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi.

Rasio ini Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan . Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio pegawai Fungsional} = \frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$$

2

Berikut dilampirkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam lingkup kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan yang diampu BKPSDM Kota Balikpapan pada Tahun 2023:

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Manajemen ASN	NSPK		60	70	80	90	100	73,5	74	Berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6218/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2022, nilai indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN di Kota Balikpapan adalah 73,50 dengan kategori B predikat Baik . Indeks NSPK Manajemen ASN Kota Balikpapan mengalami peningkatan sebanyak 12,50 poin dari tahun sebelumnya. BKN melalui tim pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN mengapresiasi konsistensi Kota Balikpapan dalam penerapan NSPK manajemen ASN pada ke 18 (delapan belas) elemen NSPK manajemen ASN, namun demikian sehubungan dengan hasil Pengawasan dan Pengendalian Indeks NSPK Manajemen ASN tersebut perlu dilakukan upaya -upaya perbaikan dalam rangka peningkatan indeks NSPK manajemen ASN Kota Balikpapan.
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		IKK	100,8%	110,3%	120,6%	131,6%	144,6%	55,18%	55,92%	Penurunan ini dikarenakan adanya perbedaan pada formulasi perhitungan Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Pada tahun 2022 realisasi tersebut didapat dari rasio antara jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas berbanding dengan seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah sementara pada tahun 2023 melalui penegasan terhadap IKK Provinsi dan kabupaten Kota formulasi tersebut berubah menjadi rasio antara jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas berbanding dengan jumlah seluruh pegawai. Perbedaan formulasi perhitungan tersebut juga mengakibatkan perlu direvisinya target kinerja IKK rasio ini pada perjanjian kinerja tahun 2023 dari 110,30 % menjadi 55 %. Meskipun terjadi penurunan realisasi secara angka namun jumlah pegawai dengan pendidikan PT ke atas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 1097 pegawai menjadi 1155 pegawai. Rasio ini dari tahun ke tahun akan selalu dinamis mengingat adanya angka penerimaan ASN dan pensiun ASN yang terjadi setiap tahun. Atas fenomena tersebut rasio ini tetap berhasil memiliki capaian yang sangat tinggi pada tahun 2023.
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		IKK	12,7%	14,6%	16,4%	18,3%	20,2%	24,65%	25,66%	Terjadi peningkatan realisasi pada Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) di tahun 2023, yaitu dari realisasi 20,16% menjadi 24,65%. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga Kesehatan). Tambahan tersebut dikarenakan adanya tambahan pegawai fungsional yang dilantik pada tahun 2023 dari 426 orang menjadi 517 Orang. Meskipun terjadi peningkatan realisasi pada rasio ini namun terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya yaitu dari 158,75% menjadi 118,7%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan target kinerja pada dokumen Renstra BKPSDM Kota Balikpapan 2021-2026 dari tahun sebelumnya yaitu dari 12,7% dan menjadi 14,6 % pada tahun 2023. Rasio ini dari tahun ke tahun akan

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi	Proyeksi	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											selalu dinamis mengingat adanya angka penerimaan ASN dan pensiun ASN yang terjadi setiap tahun. Atas fenomena tersebut rasio ini tetap berhasil memiliki capaian yang sangat tinggi pada tahun 2023.
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		IKK	89,4%	93,3%	101,9%	105,4%	111,2%	34,04%	58,22%	Terjadi penurunan realisasi pada Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dari angka 59,39% menjadi 34,04%. Penurunan ini terjadi karena dilakukannya updating data pada pegawai fungsional yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2023 dan adanya dinamisasi data akibat penerimaan ASN maupun karena terjadi pensiun ASN pada tahun 2023. Atas fenomena tersebut rasio ini belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis telah sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala BKPSDM Kota Balikpapan dalam dokumen perjanjian kinerja revisi pada tahun 2023 dan telah disesuaikan dengan dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2021 – 2026. Secara rata - rata, capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan adalah sebesar 96,76 % atau masuk dalam predikat sangat tinggi. Berikut disajikan rincian capaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan tahun 2022.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,73	0,68	93,15%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	57	62,72	110,04%	Sangat Tinggi
			Indeks Manajemen ASN	Indeks	70	73,5	105%	Sangat Tinggi
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	55	55,18	100,33%	Sangat Tinggi
			Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	20,76	24,65	118,74%	Sangat Tinggi
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	69,5	34,04	48,98%	Sangat Rendah
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP BKPSDM	Persen	89,75	87,49	97,48	Sangat Tinggi	
							96,76	

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2023, BKPSDM menghadapi isu-isu strategis seperti :

1. Masih adanya gap kompetensi dan kualifikasi ASN;
2. Masih adanya pelanggaran disiplin ASN;

3. Belum ditetapkannya mekanisme penghargaan bagi ASN berprestasi;
4. Belum diterapkannya manajemen talenta;
5. Belum semua ASN mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kota Balikpapan menghadapi permasalahan dan hambatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Tahun 2023 adalah:

1. Indeks profesionalitas ASN

- a. Kesempatan mendapatkan pengembangan kompetensi belum seluruhnya didapatkan oleh ASN Pemerintah Kota Balikpapan;
- b. Manajemen talenta dan pola karir belum tersedia di Kota Balikpapan, salah satunya karena belum tersedianya data kompetensi seluruh pegawai;
- c. Kualifikasi pendidikan ASN Pemerintah Kota Balikpapan, proporsi tertingginya ada pada ASN dengan pendidikan S1, namun masih terdapat ASN dengan kualifikasi pendidikan SLTP. Program tugas belajar juga masih kurang diminati di pemerintah Kota Balikpapan, selain karena alasan berat harus meninggalkan keluarga di Balikpapan juga dikarenakan alasan ASN tugas belajar tidak mendapatkan tunjangan kinerja;
- d. Standar kompetensi jabatan masih dalam tataran Jabatan Tinggi Pratama. Pada tingkatan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Pelaksana, analisis penyusunan kesenjangan kompetensi dan kualifikasinya masih dilakukan secara umum;
- e. Belum optimalnya pemahaman penyusunan SKP berdasarkan Permen PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga penyusunan SKP 2023 belum memenuhi tenggat waktu yang diberikan;
- f. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin pada tahun 2023.

2. Nilai SAKIP BKPSDM

- a. Belum semua pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam pengukuran kinerja untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan *up to date* sehingga progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi aplikasi dalam pelayanan kepegawaian dan terintegrasi secara menyeluruh dengan perangkat daerah.

2.3.3. Dampak Permasalahan dan Hambatan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Pada dasarnya berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan, mengingat semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan rata-rata telah mencapai target kinerjanya dengan kualifikasi sangat baik yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator tujuan yang diturunkan dari indikator sasaran pada Misi 1 (satu) dan capaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, tantangan yang dihadapi BKPSDM Kota Balikpapan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Sistem Manajemen ASN

Sistem manajemen ASN terdiri atas penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan manajemen ASN adalah Pemenuhan kebutuhan ASN. Tantangan pemenuhan kebutuhan ASN di Pemerintah Kota Balikpapan adalah ketidaksesuaian antara ketersediaan ASN dengan analisis kebutuhan ASN.

2. Kompetensi, distribusi, dan pelayanan ASN.

Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan publik yang bergerak semakin cepat, maka kompetensi ASN harus ditingkatkan. Selain peningkatan, isu lainnya adalah pemerataan kompetensi ASN. Distribusi ASN juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Permasalahan kesenjangan jumlah, kualitas, dan ketidaksesuaian antara kompetensi ASN dengan kebutuhan perangkat daerah harus segera dipecahkan agar tujuan perencanaan pembangunan Pemerintah dapat tercapai dengan baik.

3. *Database* dan Sistem Informasi ASN

BKPSDM Kota Balikpapan telah memiliki data ASN, namun informasi yang termuat kurang lengkap dan belum mutakhir. Selain itu, data yang ada belum semuanya terintegrasi baik oleh BKN ataupun dengan sistem informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang seharusnya terintegrasi. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana mengembangkan *database* ASN (*Big Data* ASN) yang memuat informasi yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi. Dengan adanya *Big Data* ASN maka kebijakan yang terkait manajemen ASN akan lebih tepat sasaran karena berlandaskan data yang valid.

4. Penegakan Tata Kelola Manajemen ASN

Penegakan tata kelola manajemen ASN perlu dilakukan agar Manajemen ASN berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan adanya

manajemen ASN adalah sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta berpedoman pada NSPK Manajemen ASN.

Gambar 2. Tantangan BKPSDM Kota Balikpapan



Selain tantangan- tantangan yang dihadapi oleh BKPSDM Kota Balikpapan, terdapat juga peluang -peluang yang dapat dioptimalkan dan dijadikan kekuatan untuk mewujudkan Manajemen ASN yang baik.

1. Mandat BKN yang kuat berdasarkan Undang-Undang;

UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara meneguhkan dan memperkuat Walikota untuk mengurus manajemen ASN di tingkat Pemerintah Kota Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 UU 20/2023, bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada bupati/walikota di kabupaten/kota. Manajemen ASN meliputi 8 (delapan) hal yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian. Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BKPSDM adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Walikota dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Teknologi digital yang semakin canggih yang dapat digunakan untuk mempermudah pelayanan kepegawaian.

BKPSDM sebagai instansi penyelenggaraan manajemen ASN di Pemerintah Kota Balikpapan memiliki sumber daya berupa *big data* ASN Kota Balikpapan yang dapat dijadikan bahan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ASN kedepan. Hal ini perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan data yang mutakhir dan akuntabel.

Peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting terutama untuk mendukung teknologi terbaru. Kecanggihan teknologi tidak dapat ditawar lagi dalam segala aspek kehidupan, sehingga perlu disikapi secara bijak dan tepat sasaran. Hal ini mendorong pentingnya untuk menyiapkan SDM yang memiliki bakat sekaligus keterampilan. Peningkatan SDM dalam kemampuan teknologi dimulai dari pendidikan, pelatihan dan bimbingan bagi SDM . Penguasaan SDM terhadap teknologi dapat mendukung penciptaan inovasi terutama berkaitan dengan inovasi pelayanan publik. Dalam lingkup BKPSDM, inovasi dapat dilakukan dalam mengembangkan ASN yang profesional terutama dalam hal pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN mulai dari sistem rekrutmen, sistem penempatan ASN, *knowledge management*, sistem remunerasi hingga sistem pensiun.

Saat ini BKPSDM dalam hal pelayanan kepegawaian, memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

2.4 Review tentang Rancangan RKPD

Review rancangan Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan disusun sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan urusan penyelenggaraan pemerintah unsur pendukung kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Kota Balikpapan. Berikut adalah tabel review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025.

Tabel 4. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

2025					2025				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	RANCANGAN			Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Balikpapan			8.958.591.250	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Balikpapan			5.301.301.215
	Balikpapan	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	89,16%	790.250.300		Balikpapan	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	89,16%	700.038.000
	Balikpapan	Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	80%	3.643.257.000		Balikpapan	Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	80%	2.302.232.110
	Balikpapan	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	98,36%	1.194.423.950		Balikpapan	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	98,36%	329.999.900
	Balikpapan	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	1,91%	3.330.660.000		Balikpapan	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	1,91%	1.969.031.205
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Balikpapan	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	100%	1.322.364.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Balikpapan	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	100%	845.000.010
	Balikpapan	Persentase Kualitas Data ASN	100%	738.501.000		Balikpapan	Persentase Kualitas Data ASN	100%	678.238.760
	Balikpapan	Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	100%	1.582.392.000		Balikpapan	Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	100%	778.993.340

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	0,00	110.373.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	0,00	45.000.010
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	1,00	1.211.991.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	1,00	800.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (dokumen)		50.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (dokumen)		29.000.000
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Balikpapan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1,00	1.532.392.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Balikpapan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1,00	749.993.340
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	2	413.462.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	2	353.199.980
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (laporan)	12	325.039.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi	12	325.038.780

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
							Kepegawaian (laporan)		
Mutasi dan Promosi ASN		Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	88,74%	695.238.000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	88,74%	650.038.000
		Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	100,00 %	95.012.300			Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	100,00 %	50.000.000
Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	16,00	95.200.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	16,00	50.000.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750	95.012.300	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750	50.000.000
Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	600.038.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	600.038.000

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi	28,68%	1.418.374.000,00	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi	28,68%	594.031.685,00
		Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	0,271%	1.800.000.000,00			Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	0,271%	1.259.999.520,00
		Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional	18,00%	112.286.000,00			Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional	18,00%	115.000.000,00
Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	10	1.418.374.000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	10	594.031.685
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	19	1.800.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	19	1.259.999.520
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	260	112.286.000,00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	260	115.000.000,00
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	9,65%	381.471.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	9,65%	120.000.000
		Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	5,88%	812.952.950			Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	5,88%	209.999.900
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	378.467.600	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	50.000.000
Pengelolaan Pemberian		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	36	313.224.600	Pengelolaan Pemberian		Jumlah ASN yang Diberikan	36	70.000.000

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penghargaan Bagi Pegawai					Penghargaan Bagi Pegawai		Penghargaan		
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	325	68.246.400	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	325	50.000.000
Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	36	182.419.950	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	36	65.000.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15	133.022.400	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15	59.999.900
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12	119.043.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12	35.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	18,95%	9.041.542.700	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	18,95%	5.569.773.574
Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi	0,17	3.016.900.900	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi	0,17	2.100.806.999

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	700	2.971.514.900	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	700	2.075.807.199
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2,00	45.386.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2,00	24.999.800

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi	0,23	6.024.641.800	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi	0,23	3.468.966.575
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7,00	6.024.641.800	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7,00	3.468.966.575
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83,00	13.047.662.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83,00	13.128.925.211
Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	90.25		Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	90.25	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35						
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2						
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83,00	10.702.193.111	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83,00	10.702.194.478
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47,00	10.702.193.111	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47,00	10.702.194.478
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800						

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1						
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12						
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83,00	113.766.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83,00	87.090.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00	92.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00	74.640.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29,00	21.366.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29,00	12.450.000

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Umum Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,00	1.148.712.280	Administrasi Umum Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,00	1.307.654.940
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9,00	258.787.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9,00	363.397.859
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13,00	422.856.280	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13,00	435.998.631
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00	67.068.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00	58.258.450
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2,00	-					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88,00	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88,00	450.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83,00	503.508.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83,00	503.508.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5,00	503.508.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	5,00	503.508.000

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
							Jabatan yang Disediakan		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,00	123.473.593	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,00	124.380.593
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	8.584.593	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	8.362.093
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8,00	114.889.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8,00	116.018.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,00	456.009.016	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,00	404.097.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14,00	272.145.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14,00	281.125.700

2025					2025				
RANCANGAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,00	44.399.966	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,00	39.186.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175,00	139.464.050	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175,00	83.785.500
TOTAL				31.047.795.950	TOTAL				24.000.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rancangan Awal Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini belum terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Balikpapan

Nama Perangkat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya. Dalam cakupan Undang – undang tersebut, secara operasional urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tercantum dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Selain merujuk pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 juga merujuk pada Rencana strategis BKN dimana renstra tersebut memiliki beberapa sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN;
2. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas *Database* Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN);
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima;
6. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan BKPSDM Kota Balikpapan, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 adalah Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel Melalui Penerapan Sistem Merit. Tujuan BKPSDM ini merupakan salah satu sasaran Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks sistem merit. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.

Perhitungan indeks sistem merit didasarkan pada Permen PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil

Negara. Adapun perhitungan indeks sistem merit menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Merit Sistem} = \sum \frac{(\text{Skor Bobot dalam setiap aspek})}{(\text{Skor maksimal} \times \text{bobot maksimal})}$$

Aspek yang terdapat dari indeks sistem merit adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karier;
4. Promosi dan mutasi;
5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan; dan
8. Sistem informasi.

3.2.2 Sasaran

Upaya pencapaian tujuan BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 , didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Pengukuran Indeks Profesionalitas berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Rumus PIP ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban. Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus

$$\begin{aligned} IP_1 &= W_{1j} * R_{1j} \\ IP_1 &= W_{2k} * R_{2k} \\ IP_1 &= W_{3l} * R_{3l} \\ IP_1 &= W_{4m} * R_{4m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\ &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 \end{aligned}$$

Keterangan:

IP= Indeks Profesionalisme

IPi= Indeks Profesionalisme ke-i

IP 1= Indeks Profesionalisme Dimens Kualifikasi

IP 2= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP 3= Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP 4= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel Melalui Penerapan Sistem Merit	Indeks Merit Sistem	0,62	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84
1.1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	47,87	55	57	59	61	62
1.1.1		Indeks Manajemen ASN	41	60	70	80	90	100
1.1.2		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	86,4	100,8	110,3	120,6	131,6	144,6
1.1.3		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,3	12,7	14,6	16,4	18,3	20,2
1.1.4		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	72,2	89,4	93,3	101,9	105,4	111,2
1.2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi BKPSDM	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	32,36	34,03	34,06	34,25	34,42	34,69

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2025 , Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Memperhatikan rancangan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 , Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 merujuk pada tema pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025 yaitu Pengembangan seluruh sektor untuk pemantapan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Program prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan masuk ke misi ke satu (1) RPJMD Tahun 2021 -2026 yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik”

b. Pencapaian Norma , Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)

Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 terintegrasi dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian NSPK Manajemen ASN. . NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas:

- a. Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan ASN;
 - b. Pengadaan ASN;
 - c. Pengangkatan ASN;
 - d. Pangkat;
 - e. Mutasi;
 - f. Jabatan;
 - g. Pengembangan Karier ASN;
 - h. Pola Karier;
 - i. Penggajian, Tunjangan, Dan Fasilitas;
 - j. Penghargaan;
 - k. Jaminan Pensiun Dan Jaminan Hari Tua;
 - l. Perlindungan;
 - m. Penilaian Kinerja;
 - n. Cuti;
 - o. Kode Etik;
 - p. Disiplin;
 - q. Pemberhentian;
 - r. Pensiun.
- c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa urusan penunjang pemerintahan dalam lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan memiliki 3 (tiga) IKK ouput, yaitu
1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
 2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
 3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi.

Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 terdiri atas 3 Program, 13 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan. Berikut disajikan rencana program dan kegiatan Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025.

Tabel 7. Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				24.000.000.000,00								34.465.700.950,00	
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				23.960.814.000,00								34.400.700.950,00	
	5	03	KEPEGAWAIAN				18.391.040.426,00								24.319.130.900,00	
1	5	03	01				83 Nilai	83 Nilai						83 Nilai	15.050.713.400,00	
	5	03	01	2.01			90.25 Nilai	0,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelud	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	-	0,00

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											upan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5030200						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelud	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											upan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	50302	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			83 Nilai	10.702.194.478,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan	ASN	-	11.782.425.500,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5002.001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	10.702.194.478,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan	ASN		11.782.425.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	87.090.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi	ASN	-	91.800.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana Kerja OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5002.00	0010502					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				66 Paket	74.640.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi	ASN		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				66 Orang	12.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi	ASN		91.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5002.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.307.654.940,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan	ASN	-	2.675.139.900,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	0010602														
							9 Paket	363.397.859,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokras	ASN		1.793.115.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												i Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	0010604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	435.998.631,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokras	ASN		412.837.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												i Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	0010605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	58.258.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokras	ASN		87.287.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencan Kerja OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												i Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	0010609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88 Laporan	450.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokras	ASN		381.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												i Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	503107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			83 Nilai	503.508.000,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerin	ASN	-	40.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												tahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	0010701					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	503.508.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan tahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerin	ASN		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												tahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			83 Nilai	124.380.593,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	ASN	-	149.848.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	50310801		Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.362.093,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	ASN		15.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
5	030108002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	116.018.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	ASN		134.148.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	503109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			83 Nilai	364.911.200,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesio	-	-	311.500.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												nal dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5002.00	310901					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	281.125.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Bersih, Profesio	-		210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												nal dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	0310906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				175 Unit	83.785.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesio	-		101.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																nal dan Berorientasi Pelayanan Publik				
2	5	0	0			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	90,81% 100% 98,79% 13,76%			89,16% 98,36%	5.301.301.215,00						90,81% 100% 98,79% 1,59%	9.268.417.500,00	
	5	0	0	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kualitas Data ASN	-			100 %	2.302.232.110,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	-	3.673.475.900,00	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						
	5002.00						Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN											
							1 Dokumen	45.000.010,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		122.263.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK													
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		1.264.069.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	50320106						Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	29.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ntian									akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	0320108	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN													
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	749.993.340,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		1.417.982.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	353.199.980,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		442.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5002.00						Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawai				12 Laporan	325.038.780,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		377.005.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5002.		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan	-		88.74 % 100 %	700.038.000,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembera	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	-	790.250.500,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kinerja Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu								ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana				16 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembera	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		95.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Mutasi ASN antar Daerah								ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	503202	00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				750 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembera	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		95.012.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	600.038.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembera	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		600.038.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	503203		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi Presentase	-		0.271 % 28.68 % 18.00 %	1.969.031.205,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	-	3.558.943.600,00	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemenuhan Jabatan Fungsional								Narkoba, Judi dan Penyeludupan	pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	0302	Pengelolaan Assessment Center													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				6 Dokumen	594.031.685,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		1.169.463.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Narkoba, Judi dan Penyeludupan	pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN											
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				19 Orang	1.259.999.520,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		2.331.866.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											Narkoba, Judi dan Penyeludupan	pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5002.00																Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				260 Orang	115.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		57.614.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Narkoba, Judi dan Penyeludupan	pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			9.65 % 5.88 %	329.999.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	-	1.245.747.500,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Penyeludupan	publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	50320402	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		398.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Penyeludupan	publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	503204	2.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				36 Orang	70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		263.229.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Penyeludupan	atkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing				
	5002.0005						Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				375 Orang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		68.854.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing					
	503	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN												
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				36 Orang	65.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerin	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		211.360.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												tahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00						Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				15 Laporan	59.999.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerin	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		160.151.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												tahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5002.00						Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai										
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				12 Dokumen	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerin	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		143.802.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												tahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	504							5.569.773.574,00							10.081.570.050,00		
3	50402		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	18,95 %			18,95 %	5.569.773.574,00					18,95 %	10.081.570.050,00		
	5040201		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis	-			17,02 %	2.100.806.999,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	-	3.665.903.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai rencana pengembangan kompetensi									profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				700 Orang	2.075.807.199,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		3.640.903.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	5002.00																Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan				7 Dokumen	24.999.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		24.999.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Pemerintahan Umum													
	5002	02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi	-			23.30 %	3.468.966.575,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerin	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	-	6.415.667.050,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												tahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5002.00															Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
							7 Laporan	3.468.966.575,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerin	ASN Pemerintah Kota Balikpapan		6.415.667.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												tahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	X							39.186.000,00							65.000.000,00		
	X	X						39.186.000,00							65.000.000,00		
4	X	X	01				83 Nilai	39.186.000,00						83 Nilai	65.000.000,00		
	X	X	01	2.09				83 Nilai	39.186.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembera	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	ASN	-	65.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	X	X	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
	X	X	1	09	02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan		2 Unit	39.186.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembera	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	ASN		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RANCA NGAN AKHIR RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			nya								ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
J U M L A H								24.000.000.000,00							34.465.700.950,00	

BAB IV

RANCANGAN AKHIR RANCANGAN AKHIR RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja dan pendanaan perangkat daerah Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

Tuntutan pencapaian kinerja perangkat daerah dari para *stakeholders* tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dibutuhkan strategi yang matang serta dinamis mengikuti perkembangan zaman dalam rangka pencapaian kinerja tersebut. Pencapaian kinerja yang tercermin dalam indikator -indikator keberhasilan perangkat daerah merupakan gambaran besar pelayanan yang memuaskan bagi para *stakeholders* perangkat daerah. Demi memberikan kepuasan pelayanan kepada *stakeholders* dan keberlanjutan organisasi maka, BKPSDM Kota Balikpapan perlu membuat beberapa inovasi dalam rangka hal tersebut.

Adapun inovasi-inovasi yang ada pada BKPSDM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Siap Bang ASN

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur administrasi kepegawaian bagi ASN pada umumnya dan jabatan fungsional pada khususnya maka aksi perubahan yang digagas adalah membangun Sistem Layanan Pembinaan dan Pengembangan ASN yang disingkat SIAP Bang ASN yang akan diwujudkan dalam bentuk :

- a. Layanan informasi bagi ASN berupa : o Hotline WA 0821-5574-5916 o Sosialisasi pembinaan Jabatan fungsional dan Pengembangan Kompetensi ASN.
- b. Layanan konsultasi dan/atau konseling pengembangan kompetensi serta pembinaan jafung;
- c. Pengembangan kompetensi ASN dengan metode coaching atau mentoring berdasarkan hasil pemetaan kompetensi yang melibatkan atasan/Kepala OPD masing-masing.

Dengan meningkatkannya pemahaman ASN terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur administrasi kepegawaian dapat mendorong motivasi dan kinerja ASN yang profesional sehingga dapat meningkatkan kinerja layanan publik.

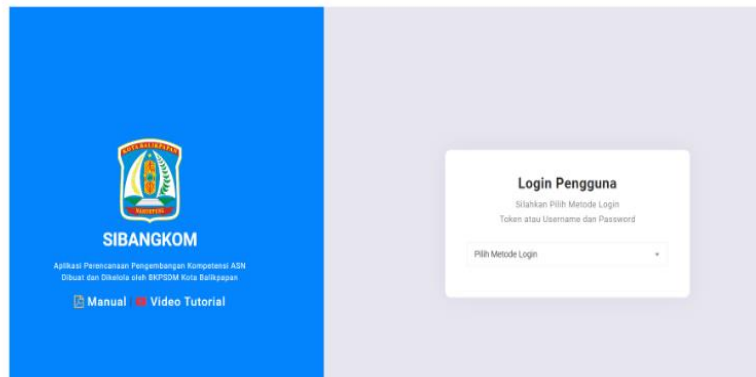
2. Aplikasi Pengembangan Kompetensi (Si BangKom)

Aplikasi Si BangKom di bangun dengan tujuan untuk :

- a. Menginventarisir usulan kebutuhan pengembangan kompetensi setiap ASN;
- b. Verifikasi usulan pengembangan kompetensi oleh atasan/ pimpinan perangkat daerah/ unit kerja;
- c. Penyampaian pelaksanaan pengembangan kompetensi setiap ASN (dilengkapi dengan bukti pendukung);
- d. Penyampaian dokumen pengajuan tugas belajar ASN;
- e. Penyusunan analisis kesenjangan, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (AKPK), Human Capital Development Plan (HCDP).

Aplikasi Sibangkom

<http://103.144.82.15:8907/>

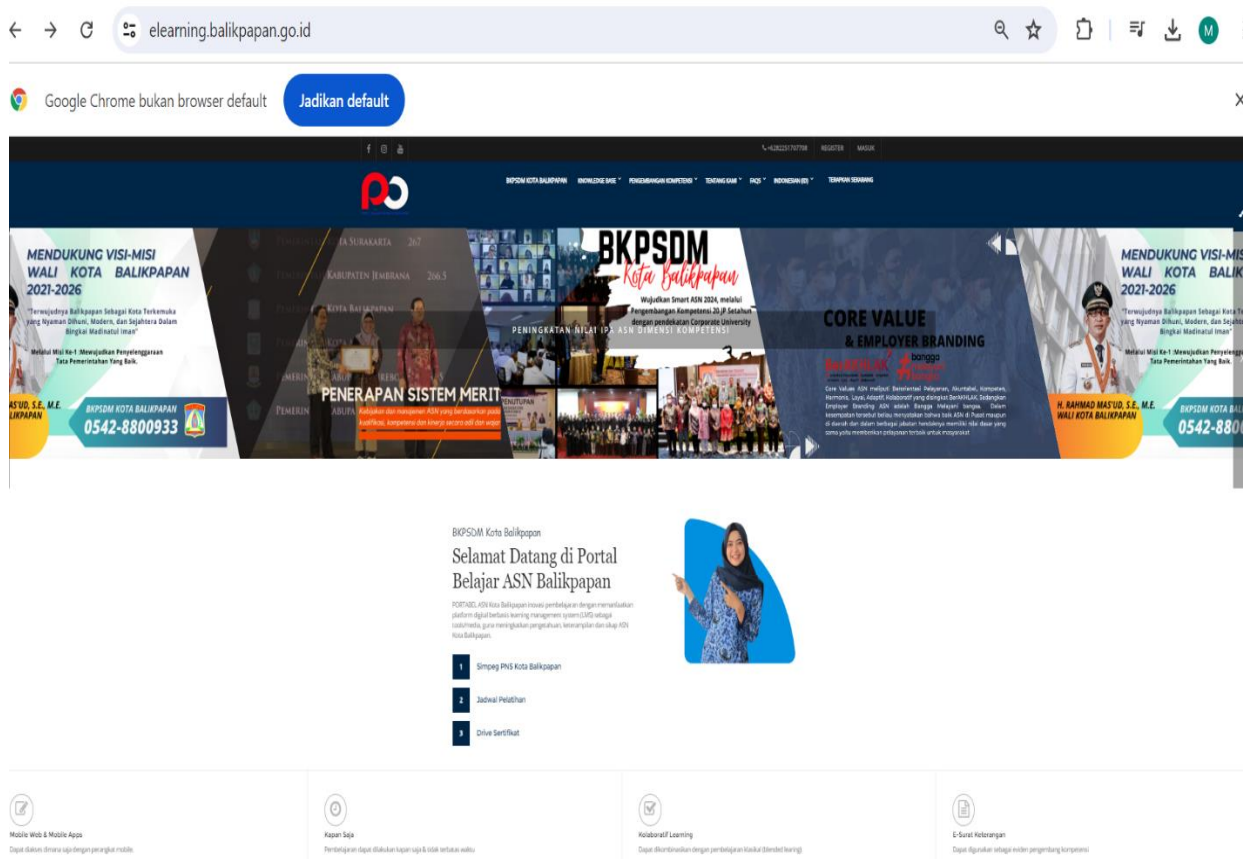


3. Learning Management System (LMS)

Memperhatikan kebutuhan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini, maka BKPSDM Kota Balikpapan mengembangkan sistem pembelajaran berbasis e-elektronik atau e-learning. Diharapkan aplikasi E-learning BKPSDM Kota Balikpapan dapat memberikan manfaat bagi Pengembangan Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Pada aplikasi ini user (pengguna) login terbagi menjadi 3 dengan hak akses/ otorisasi yang berbeda , yaitu:

- a. user admin : memiliki otoritas dalam pengelolaan administrasi website mulai dari perencanaan kursus/pelatihan, pengelolaan user, pengelolaan konten (materi/soal tes), dll;
- b. user peserta : memiliki otoritas untuk mengikuti pelatihan jika telah terdaftar sebagai pengguna;
- c. user pengajar : memiliki otoritas untuk memberikan nilai, mengelola materi/soal, evaluasi peserta, membuat soal tes.

Gambar 4. Learning Manajemen System (LMS)

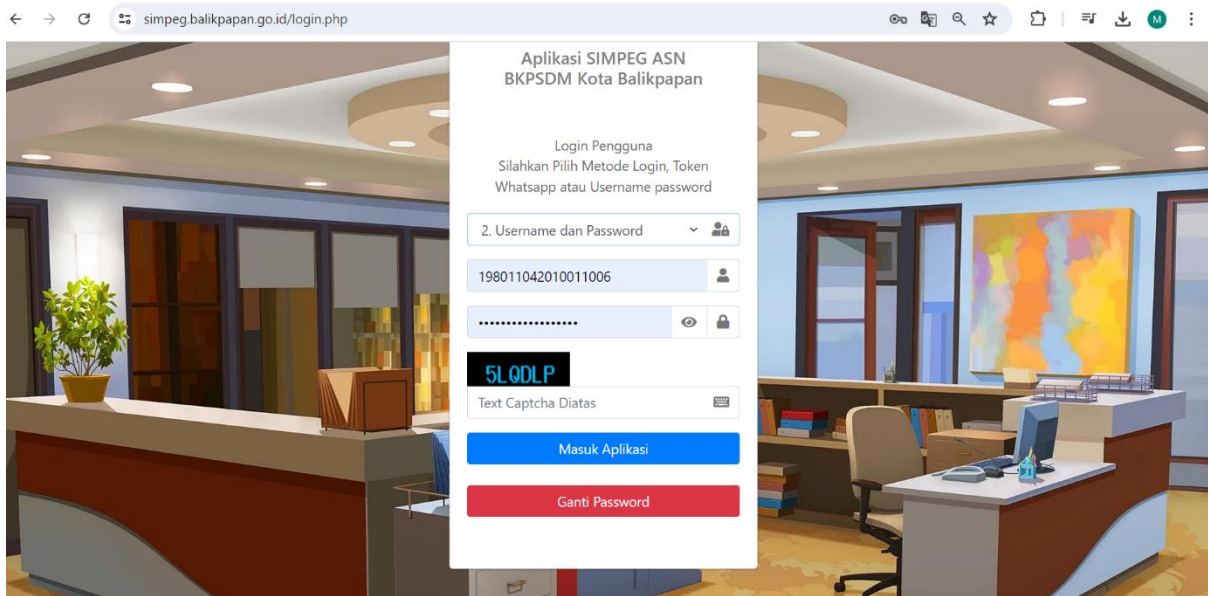


4. Layanan Kepegawaian Bersih dan Mandiri (Beriman)

Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian (PNS/CPNS, PPPK dan Non ASN). Layanan Kepegawaian Beriman merupakan Layanan kepegawaian yang terdapat dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Adapun layanan kepegawaian yang berhasil dilakukan inovasi secara digital dan terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Pencetakan *Badge*
2. Kenaikan Pangkat
3. Pensiun
4. Pemberkasan PNS
5. Cuti
6. Cetak Biodata Pegawai
7. Arsip atau Dokumen Pegawai
8. Rekap Pegawai
9. Formulir Isian Pegawai (FIP)

Gambar 5. SIMPEG ASN Kota Balikpapan



Gambar 6. Layanan Kepegawaian Beriman pada SIMPEG Kota Balikpapan

simpeg.balikipapan.go.id/index.php?module=3_proses_inbox&parent=inbox#

KPSDM KOTA BALIKPAPAN

SIM PNS

- 1. Menu Utama
- 2. Data Pegawai
- 3. Notifikasi** 13
- Notifikasi Anda
- Riwayat Notifikasi

SIM PPPK

- 1. Menu Utama

SIM NON ASN

- 1. Data Pegawai

LAYANAN KEPEGAWAIAN

- Cetak Badge
- Cuti2023
- Karis Karsu
- Pangkat
- Pemberkasan PNS
- Pensiun
- PWK Keluar

Inbox

Jenis Permohonan: Silahkan Pilih Jenis Permohonan

Submit Filter Data

Show 10 entries Search:

No	Instansi Pengusul	Nama Jabatan Nama Unit Kerja	Nip Tujuan Nama Tujuan	Nama Jabatan Nama Unit Kerja	Jenis Permohonan Keterangan	Waktu	Aksi
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengadministrasi Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	198303042009012004 MARLINA	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a3_pns_cuti Verifikasi Cuti Untuk Atasan Langsung, pengajuan dari NIP: 198709252010012016 Sdr.ERNY RAHMAWATY	12-06-2024 11:08:10	Verifikasi
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengadministrasi Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	198303042009012004 MARLINA	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a3_pns_cuti Verifikasi Cuti Untuk Atasan Langsung, pengajuan dari NIP: 198709252010012016 Sdr.ERNY RAHMAWATY	22-05-2024 15:58:55	Verifikasi
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengadministrasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	198303042009012004 MARLINA	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a3_pns_cuti Verifikasi Cuti Untuk Atasan Langsung, pengajuan dari NIP: 199202162015032002 Sdr.RETNO RESMI INDAH	30-04-2024 09:27:44	Verifikasi
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN	Pengadministrasi Keuangan	198303042009012004	Kepala Sub Bagian Program dan	a3_pns_cuti	29-04-	Verifikasi

BAB VI

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam VISI dan MISI Pemerintah Kota Balikpapan. Rancangan Akhir Renja ini berfungsi sebagai sarana peningkatan penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Rancangan Akhir Renja memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah, secara umum Rancangan Akhir Renja OPD dapat menjawab tiga hal mendasar, yaitu :

1. Langkah dan Kebijakan strategis yang akan diambil agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Memberikan arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang akan dicapai dalam satu tahun.
3. Sebagai komitmen OPD dan seluruh unsur didalamnya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 ini diharapkan juga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Rancangan Akhir Renja ini juga dimaksudkan sebagai komitmen pimpinan dan pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan untuk menghasilkan kinerja yang nyata dimasa mendatang dalam upaya mewujudkan Balikpapan yang nyaman dihuni.

AA. RENCANA KERJA INSPEKTORAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Inspektorat Kota Balikpapan melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Inspektorat Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Kota Balikpapan.

Penyusunan Rankhir Renja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Peambangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi rencana program dan kegiatan Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sehingga terwujud sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini memuat Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Periode 2021-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Lampiran tabel Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rencana kerja dan pagu pendanaan indikatif serta perkiraan pada tahun selanjutnya.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Periode 2021-2026

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024, serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi capaian Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 capaian realisasi program/kegiatan untuk fisik sebesar 98.74% dan keuangan sebesar 88.52% . Sedangkan untuk capaian realisasi fisik dan keuangan pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2024 diperkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Bappeda Litbang untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023, dapat dilihat capaian dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan antara lain adalah :

1) Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program: Peningkatan Kualitas Layanan Internal

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada Program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator program: IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator program: IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator program: IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator program: IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator program: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 80,82 dari target yang ditetapkan sebesar 80, terealisasi sebesar 101,02%

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator program: IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 84, terealisasi sebesar 101,19%

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator program: Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 86,50% dari target yang ditetapkan sebesar 85,33%, terealisasi sebesar 101,37%.

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan Internal

Indikator program: Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 85 dari target yang ditetapkan sebesar 85,5, terealisasi sebesar 99,41%

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

- b. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Indikator program: Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 80 dari target yang ditetapkan sebesar 80,5, terealisasi sebesar 99,37%

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- b. Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah

3) Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator program: Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 63,33 dari target yang ditetapkan sebesar 63,33, terealisasi sebesar 100%

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator program: Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan

Evaluasi hasil: : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 86.67 dari target yang ditetapkan sebesar 86.67, terealisasi sebesar 100%

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Indikator program: Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan

Evaluasi hasil: : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 40 dari target yang ditetapkan sebesar 40, terealisasi sebesar 100%

Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- b. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

- d. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penegakan Integritas

Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2023 yaitu

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Inspektorat Kota Balikpapan

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perang kat daerah Penang gung jawab
						I		II		III		IV										
						8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7X1 00%										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal	Nilai	84	16,729,3 11,610	0	2,835,77 6,123	0	4,310,03 0,611	0	3,173,77 8,752	85	5,133,192, 751.00	85	15,452,77 8,237	101 .19	92. 37	1 7 0	27,884,1 31,228	188 .33	34. 60	Inspekt orat
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84	-	0	-	0	-	76. 89	-	0	-	76. 89	-	91. 54	0.0 0	9 1	0	115	0.0 0	Inspekt orat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokume n	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	100 .00	0.0 0	1	0	0.0 0	0.0 0	Inspekt orat

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	2	-	100.00	0.00	2	0	0.00	0.00	Inspektorat
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	2	-	100.00	0.00	2	0	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84	9,389,246,700	0	2,018,148,951	0	3,001,797,627	0	2,084,146,007	85	2,131,601,516.00	85	9,235,694,101	101.19	98.36	99	18,004,004,893	110.09	32.21	Inspektorat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	48	9,389,246,700	45	2,018,148,951	0	3,001,797,627	0	2,084,146,007	3	2,131,601,516.00	48	9,235,694,101.00	100.00	98.36	48	9,235,694,101	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	84	2,989,769,200	0	457,532,859	0	461,135,360	0	47,870,741	85	1,346,311,517.00	85	2,312,850,477	101.19	77.36	99	3,689,876,635	110.09	51.68	Inspektorat

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	29	607,855,200	21	279,824,855	4	-	4	7,800,000	0	181,718,682.00	29	469,343,537.00	100.00	77.21	29	469,343,537.00	0.00	0.00	Inspektorat
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang	48	2,381,914,000	17	177,708,004	24	461,135,360	7	40,070,741	0	1,164,592,835.00	48	1,843,506,940.00	100.00	77.40	48	1,843,506,940.00	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	84	2,124,157,700	0	92,058,669	0	349,986,964	0	582,547,287	85	854,537,904.00	85	1,879,130,824	101.19	88.46	99	2,629,070,943	110.09	52.93	Inspektorat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	18,106,400	0	-	1	-	0	8,105,000	1	8,470,000.00	2	16,575,000.00	100.00	91.54	2	16,575,000.00	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	960,891,000	0	-	3	214,992,500	3	82,565,000	0	620,773,550.00	6	918,331,050.00	100.00	95.57	6	918,331,050.00	0.00	0.00	Inspektorat

	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	8	278,874,600	3	9,832,000	5	56,619,500	0	101,726,000	0	61,940,000.00	8	230,117,500.00	100.00	82.52	8	230,117,500	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	146,285,700	0	-	2	47,696,400	0	57,235,600	0	15,436,000.00	2	120,368,000.00	100.00	82.28	2	120,368,000	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1688	20,000,000	0	-	0	-	0	-	48	20,000,000.00	48	20,000,000.00	2.84	100.00	48	20,000,000	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	36	700,000,000	10	82,226,669	14	30,678,564	14	332,915,687	48	127,918,354.00	86	573,739,274.00	238.89	81.96	86	573,739,274	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	84	159,046,600	0	-	0	-	0	97,700,000	85	55,550,000.00	85	153,250,000	101.19	96.36	85	153,250,000	94.44	3.80	Inspektorat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	23	159,046,600	0	-	0	-	11	97,700,000	12	55,550,000.00	23	153,250,000.00	100.00	96.36	23	153,250,000	0.00	0.00	Inspektorat

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	805,647,400	0	137,522,287	0	186,001,439	0	183,710,699	85	256,569,394.00	85	763,803,819	101.19	94.81	9	1,474,168,983	110.09	33.43	Inspektorat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	6,980,000	1	1,610,500	1	62,000	1	3,547,000	1	1,315,000.00	4	6,534,500.00	100.00	93.62	4	6,534,500	0.00	0.00	Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	203,806,500	3	45,077,767	3	41,245,909	3	43,912,669	3	48,844,654.00	12	179,080,999.00	100.00	87.87	12	179,080,999	0.00	0.00	Inspektorat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	594,860,900	3	90,834,020	3	144,693,530	3	136,251,030	3	206,409,740.00	12	578,188,320.00	100.00	97.20	12	578,188,320	0.00	0.00	Inspektorat
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	1,261,444,010	0	130,513,357	0	311,109,221	0	177,804,018	85	488,622,420.00	85	1,108,049,016	101.19	87.84	9	1,933,759,774	110.09	46.63	Inspektorat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	31	716,531,010	10	130,513,357	16	112,109,221	5	157,564,018	0	188,623,870.00	31	588,810,466.00	100.00	82.18	31	588,810,466	0.00	0.00	Inspektorat

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	50	145,129,000	0	-	2	-	33	20,240,000	15	101,053,500.00	50	121,293,500.00	100.00	83.58	50	121,293,550	0.00	0.00	Inspekt orat
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	Unit	1	399,784,000	0	-	1	199,000,000	0	-	0	198,945,000.00	1	397,945,000.00	100.00	99.54	1	397,945,000	0.00	0.00	Inspekt orat
	PROGRAM PENYELENGGA RAA N PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persentase	85.33	1,730,023,400	11.54	85,250,859	73.46	232,854,544	0	404,229,700	1.50	393,972,316.00	86.50	1,116,307,419.00	101.37	64.53	172	1,595,621,673	188.04	38.39	Inspekt orat
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	Persentase	85.5	1,209,823,400	7.08	78,321,439	10.92	167,738,170	49.46	388,682,200	17.54	288,336,568.00	85	923,078,377	99.42	76.30	123	1,367,942,027	138.54	256.50	Inspekt orat
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	7	-	0	-	1	-	0	-	6	-	7	-	100.00	0.00	7	0	0.00	0.00	Inspekt orat
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	62	575,000,000	6	78,321,439	0	160,997,670	14	18,694,800	40	208,560,610.00	60	466,574,519.00	96.77	81.14	60	466,574,519	0.00	0.00	Inspekt orat
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	37	-	1	-	0	-	36	-	0	-	37	-	100.00	0.00	37	0	0.00	0.00	Inspekt orat

	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	3	-	1	-	0	-	1	-	0	-	2	-	66.67	0.00	2	0	0.00	0.00	Inspektorat
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	4	634,823,400	0	-	2	6,740,500	0	369,987,400	2	79,775,958.00	4	456,503,858.00	100.00	71.91	4	456,503,858	0.00	0.00	Inspektorat
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase	80.5	520,200,000	16	6,929,420	34	65,116,374	27.77	15,547,500	2.23	105,635,748.00	80.00	193,229,042	99.38	37.15	128	227,679,646	152.84	6.28	Inspektorat
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Laporan	3	9,100,000	1	-	1	1,080,000	0	967,500	1	225,000.00	3	2,272,500.00	100.00	24.97	3	2,272,500	0.00	0.00	Inspektorat
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	22	511,100,000	3	6,929,420	0	64,036,374	14	14,580,000	3	105,410,748.00	20	190,956,542.00	90.91	37.36	20	190,956,542	0.00	0.00	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEGIATAN, PEMDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	Persentase	63.33	2,841,751,200	0.45	41,793,659	17.55	818,162,651	35	424,145,134	10.33	1,002,389,366.00	63.33	Rp2,286,490,810	100.00	80.46	148	2,752,306,168	150.85	58.42	Inspektorat

	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	Persentase	86.67	83,820,000	0.00	1,290,000	0	-	50	9,573,500	36.67	-	86.67	10,863,500	100.00	12.96	129	65,948,820	133.62	19.38	Inspektoralat
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	4	83,820,000	0	1,290,000	0	-	1	9,573,500	3	-	4	10,863,500	100.00	12.96	4	10,863,500	0.00	0.00	Inspektoralat
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Persentase	40	2,757,931,200	0.90	40,503,659	35.10	818,162,651	2.00	414,571,634	2.00	1,002,389,366.00	40	2,275,627,310	100.00	82.51	83	2,686,357,348	82.50	61.46	Inspektoralat
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	36	1,582,603,000	0	30,370,000	36	743,322,710	0	360,029,980	0	173,886,000.00	36	1,307,608,690	100.00	82.62	36	1,307,608,690	0.00	0.00	Inspektoralat
	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	158,850,000	0	-	0	-	36	-	0	133,580,520.00	36	133,580,520	100.00	84.09	36	133,580,520	0.00	0.00	Inspektoralat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Balikpapan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Inspektorat merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Balikpapan berfungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2023 telah dilakukan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan untuk mengetahui persepsi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

Hingga berakhirnya survey, responden yang mengisi kuesioner SPKP sebanyak 50 orang responden yang didominasi oleh perempuan sebanyak 34 orang, dan laki-laki sebanyak 16 orang.

Publikasi hasil SPKP Inspektorat Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan-RB No. 90 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menpan-RB No. 04 Tahun 2023 sebagai berikut:



Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Inspektorat Kota Balikpapan menghasilkan capaian sebesar 3,48 atau setelah dikonversi mencapai nilai 86,94 serta masuk pada kategori Sangat Baik. Survey yang dilaksanakan pada periode 23 Oktober hingga 6 November 2023 tersebut berhasil mengumpulkan persepsi 50 orang responden. Adapun berdasarkan latar belakang pendidikan responden, diketahui mayoritas responden memiliki latar belakang S1 sebanyak 33 orang atau sebesar 66%, D1-D3 sebanyak 7 orang atau sebesar 14%, lulusan SD, SMP, SMA sebanyak 6 orang atau sebesar 12%, dan berlatar belakang pendidikan S2- S3 sebanyak 4 orang atau sebesar 8%.

Berdasarkan pekerjaan responden, diketahui bahwa seluruh responden yang berjumlah 50 orang bekerja sebagai PNS. Hal ini karena memang lingkup pengguna layanan atau stakeholder Inspektorat adalah PNS. Salah satu layanan yang disediakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan adalah Layanan Klinik APBD yang merupakan wadah konsultasi, fasilitasi dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Balikpapan. Layanan ini telah disahkan sejak tahun 2015 berdasarkan Perwali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Klinik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada laman Instagram milik Inspektorat, terdapat link yang terhubung pada formulir Klinik APBD dan panduan prosedur Layanan Klinik APBD.

Nilai keseluruhan SPKP pada Inspektorat Kota Balikpapan ialah 3,48 dan masuk pada mutu Sangat Baik. Berdasarkan perhitungan pada setiap unsur, diketahui terdapat 3 unsur dengan nilai terendah yaitu waktu penyelesaian pelayanan (U4), sarana dan prasarana pendukung pelayanan (U6), serta respons petugas/sistem pelayanan (U7). Untuk meningkatkan performa dan kualitas pelayanan pada Inspektorat Kota Balikpapan, maka diperlukan sejumlah rencana tindak lanjut khususnya pada 3 unsur terendah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan mengampu 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dengan berkembangnya peran Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, maka terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain :

- a. SDM yang dimiliki masih belum memadai, terutama dari segi kuantitas;
- b. Banyaknya mandatori pengawasan yang harus dilakukan oleh APIP yang tidak sebanding dengan jumlah APIP sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

Dalam upaya mencapai sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga perlu ditentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kota Balikpapan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Balikpapan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menentukan isu-isu strategis antara lain :

- a. Dukungan *stakeholder* terkait peran Inspektorat Kota Balikpapan dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mengingat Tahun 2013 s.d 2023 Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan opini WTP dari BPK-RI, maka ini menjadi tantangan bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan agar Pemerintah Kota Balikpapan tetap dapat mempertahankan opini WTP tersebut;
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selalu ditingkatkan, namun masih terdapat beberapa temuan yang berulang dari hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI. Kondisi ini merupakan amanat atau tambahan bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang lebih efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance dan clean government*, tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang belum mampu diterapkan dengan baik.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Ranwal Renja Bappeda Litbang Tahun 2025 merupakan tahun kedua untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Dalam perencanaan pembangunan kota Balikpapan terdapat beberapa permasalahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel.

Adapun prioritas pembangunan kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Ketahanan bencana dan kondusifitas daerah;
5. Pembangunan ekonomi inklusif;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan bertepatan mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan, fokus pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi inklusif;
2. Pembangunan sumber daya manusia;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
4. Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK;
5. Kondusifitas daerah.

Program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2025 masuk pada prioritas RKPD Kota Balikpapan dengan penjelasan sebagaimana berikut :

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	89,33 %	1.510.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	89,33 %	1.510.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Balikpapan	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	87,50 %	1.135.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Balikpapan	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	87,50 %	1.135.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase laporan hasil penyelenggara	82,50 %	375.000	Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase laporan hasil penyelenggara	82,50 %	375.000	

	dengan Tujuan Tertentu		aan pengawasan dengan tujuan tertentu			dengan Tujuan Tertentu		aan pengawasan dengan tujuan tertentu			
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	86,67 %	1.999.800	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	86,67 %	1.999.800	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Balikpapan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah dilaksanakan	93,33 %	150.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Balikpapan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah dilaksanakan	93,33 %	150.000	

	Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	80%	1.849.800	Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	80%	1.849.800	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	88%	17.655.150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	88%	17.655.150	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88%	10.334.967,025	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88%	10.334.967,025	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	88%	1.789.079,375	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	88%	1.789.079,375	

			Daerah					Daerah			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88%	1.464.757,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88%	1.464.757,100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88%	1.237.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88%	1.237.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88%	1.404.523,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88%	1.404.523,1	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik	88%	1.424.323,4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik	88%	1.424.323,4	

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
--	---	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Inspektorat Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Inspektorat Kota Balikpapan tidak melaksanakan kegiatan musrenbang.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Balikpapan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung dengan Misi ke 1 (satu), yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik” adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien.
- b. Membangun sistem pengawasan yang handal serta meningkatkan pengawasan fungsional internal pemerintah, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.
- c. Optimalisasi penyusunan APBD yang efektif dan efisien serta optimalisasi penerimaan daerah.
- d. Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah.
- e. Optimalisasi perencanaan pembangunan untuk acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tujuan adalah pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Perumusan tujuan harus spesifik, realistis, dapat menggambarkan fungsi layanan (sesuai tupoksi), serta mampu menjawab/memberikan solusi permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah.

Sebagai penjabaran misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, maka perumusan tujuan Perangkat Daerah disusun berdasarkan kriteria berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi pembangunan
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah
3. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
4. Dirumuskan dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Tujuan Inspektorat Kota Balikpapan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan (2021 – 2026) merupakan penjabaran dari misi pembangunan ke satu, yaitu: “mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik”.

Adapun rumusan tujuan Inspektorat adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dapat dilaksanakan dalam jangka menengah (lima tahun).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan sasaran Perangkat Daerah antara lain : keterkaitan dengan tujuan, tugas fungsi Perangkat Daerah, kelompok sasaran dan profil penyelenggaraan layanan. Ditinjau dari cascading kinerja, maka penetapan sasaran kinerja berada pada level pimpinan Perangkat Daerah (eselon II) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikatornya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan
Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN DAN SASARAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel		Indikator Tujuan : Maturitas SPIP	Level 3
		Indikator Tujuan : Nilai SAKIP	
	Meningkatnya pengendalian internal pemerintah	Indikator Sasaran : Maturitas SPIP	Level 3
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas instansi pemerintah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	80

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2024.

3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Administrasi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun kegiatan/sub kegiatan pada program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - 1.1.5 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Administrasi
 - 2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2.2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - 2.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 2.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 2.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.2.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 3.2.3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 3.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3.4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 3.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3.6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - 3.6.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
 - 3.6.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3.6.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3.7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.7.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3.7.2. Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- OPD di Lingkungan Pemkot Balikpapan Kota Balikpapan

Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- PNS Inspektorat Kota Balikpapan
- Inspektorat Kota Balikpapan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Inspektorat Kota Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
		INSPEKTORAT				21,164,950,000.00					30,278,102,984.00
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				21,164,950,000.00					30,278,102,984.00
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH				21,164,950,000.00					30,278,102,984.00
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>	86	86	17,655,150,000.00				86	25,221,102,984.00
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	86	10,334,967,025.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	11,643,292,000.00
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		46 Orang/bulan	10,334,967,025.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		11,643,292,000.00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-	86	1,789,079,375.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	3,647,650,000.00
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		3 Paket	89,079,375.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		225,000,000.00
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		30 Orang	1,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		1,500,000,000.00
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		52 Orang	700,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		1,922,650,000.00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	86	1,464,757,100.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	1,229,774,084.00
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		2 Paket	21,371,400.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		21,371,400.00
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		3 Paket	450,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		236,016,984.00

6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		8 Paket	415,335,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		294,335,000.00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan										
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</i>		3 Paket	138,050,700.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		138,050,700.00
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>		20 Dokumen	40,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		40,000,000.00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		40 Laporan	400,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		500,000,000.00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-	86	1,237,500,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	6,037,500,000.00
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>		1 Unit	0.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		300,000,000.00
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>		1 Unit	0.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		300,000,000.00
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		5 Unit	437,500,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		437,500,000.00
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>		1 Unit	800,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		5,000,000,000.00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	86	1,404,523,100.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	1,104,523,100.00
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		4 Laporan	7,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		7,000,000.00
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 Laporan	192,950,500.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		192,950,500.00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	1,204,572,600.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		904,572,600.00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	86	1,424,323,400.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai	-	1,558,363,800.00
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		32 Unit	716,531,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		716,531,000.00

	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		50 Unit	207,792,400.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		199,650,000.00
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		1 Unit	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai		642,182,800.00
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan</i>	89.33 %	89.33 %	1,510,000,000.00				89.33 %	2,305,000,000.00
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat</i>	-	86.50 %	1,135,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah	-	1,675,000,000.00
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>		53 Laporan	825,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		825,000,000.00
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>		4 Dokumen	310,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		850,000,000.00
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</i>	-	81.50 %	375,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah	-	630,000,000.00
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>		3 Laporan	75,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		75,000,000.00

							Semua Kel/Desa				
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>		13 Laporan	300,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		555,000,000.00
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan</i>	75 %	75 %	1,999,800,000.00				75 %	2,752,000,000.00
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan</i>	-	90 %	150,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah	-	250,000,000.00
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>		2 Rekomendasi	150,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		250,000,000.00
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan</i>	-	60 %	1,849,800,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah	-	2,502,000,000.00
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>		36 perangkat daerah	675,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		1,000,000,000.00
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>		36 perangkat daerah	87,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		87,000,000.00
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									

			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>		3 Kegiatan	1,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		1,140,000,000.00
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14	15	16
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>		36 perangkat daerah	87,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perangkat Daerah		275,000,000.00
	J U M L A H					21,164,950,000.00					30,278,102,984.00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2021-2026. Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini dijelaskan langkah untuk mencapai target-target yang ingin dicapai, penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan bagi seluruh APIP di Inspektorat Kota Balikpapan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Keberhasilan kegiatan pengawasan dapat mendukung tercapainya Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu , “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi ke 1 (satu), yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik”.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah Kota Balikpapan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya.

BB. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Balikpapan Barat dalam periode Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Barat disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
7. Perwali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Balikpapan Barat Tahun 2025 meliputi:

BAB	I	PENDAHULUAN. Berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
BAB	II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU. Berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD,
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH. Berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. Berisi tentang: Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan berdasarkan Renstra 2025

BAB	IV	PENUTUP Berisi tentang: Kesimpulan, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana
-----	----	--

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Evaluasi Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Barat Tahun Lalu mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor ... Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026, memiliki tujuan yang selaras dengan RPJMD Tahun 2021-2026 yakni” *Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik, dengan Indikator Tujuan adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat “.* **Sasaran Pertama,** “Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum”, sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. **Sasaran Kedua,** “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”, yang akan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Balikpapan Barat.

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Balikpapan Barat melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 19.858.341.084** (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Adapun Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 17.204.732.699** (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Adapun tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Kecamatan Balikpapan Barat dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Adapun hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi capaiannya sebesar 68,56 Poin dengan realisasi keuangan sebesar 83,21% dalam kategori Tinggi pada **Renja 2024** sedangkan **realisasi Renstra 2021-2026** yaitu 98% dalam Kategori *Sangat Tinggi* dan realisasi keuangan 93,43% dalam Kategori Sangat Tinggi. Tingkat capaian **Sub Kegiatan berdasarkan Renja 2024** sebesar 110,40% dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan 110,40% dalam kategori *Sangat Tinggi*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2021-2026** seluruh Sub Kegiatan sebesar 77,39% dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 114,67% dalam kategori Sangat *Tinggi*. Tingkat capaian **Kegiatan** dalam seluruh program **berdasarkan Renja 2024** sebesar 32,93% dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan 64,74% dalam kategori *Rendah*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2021-2026** seluruh kegiatan sebesar 72,00% dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 106,36% dalam kategori Sangat *Tinggi*.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi capaiannya sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 86,44% dalam kategori Tinggi pada **Renja 2024** sedangkan **realisasi Renstra 2021-2026** yaitu 100% dalam Kategori Sangat Tinggi dan realisasi keuangan 102,57% dalam Kategori Sangat Tinggi. Tingkat capaian **Sub Kegiatan berdasarkan Renja 2024** sebesar 78,31% dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan 68,74% dalam kategori *Sedang*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2021-2026** seluruh Sub Kegiatan sebesar 94,50% dalam

kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 93,21% dalam kategori *Sangat Tinggi*. Tingkat capaian **Kegiatan** dalam seluruh program **berdasarkan Renja 2023** sebesar 73,33% dalam kategori *Sedang* dan persentase realisasi keuangan 73,36% dalam kategori *Sedang*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2021-2026** seluruh kegiatan sebesar 146,11% dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 92,60% dalam kategori *Tinggi*. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi capaiannya sebesar 10% dengan realisasi keuangan sebesar 71,08% dalam kategori *Sedang* pada **Renja 2023** sedangkan **realisasi Renstra 2021-2026** yaitu 100% dalam Kategori *Sangat Tinggi* dan realisasi keuangan 62,21% dalam Kategori *Sedang*. Tingkat capaian **Sub Kegiatan berdasarkan Renja 2024** sebesar 78,56% dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan 67,11% dalam kategori *Sedang*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2021-2026** seluruh Sub Kegiatan sebesar 69,42% dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 72,03% dalam kategori *Tinggi*. Tingkat capaian **Kegiatan** dalam seluruh program **berdasarkan Renja 2024** sebesar 80% dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan 82,03% dalam kategori *Tinggi*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2021-2026** seluruh kegiatan sebesar 139,86% dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 78,04% dalam kategori *Tinggi*.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi capaiannya sebesar 89% dengan realisasi keuangan sebesar 11,13% dalam kategori *Sangat Rendah* pada **Renja 2024** sedangkan **realisasi Renstra 2021-2026** yaitu 89% dalam Kategori *Tinggi* dan realisasi keuangan 50,28% dalam Kategori *Sedang*. Tingkat capaian **Sub Kegiatan berdasarkan Renja 2024** sebesar 11,13% dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan 11,13% dalam kategori *Sangat Rendah*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2021-2026** seluruh **Sub Kegiatan** sebesar 50,19% dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan sebesar 50,28% dalam kategori *Sangat Rendah*. Tingkat capaian **Kegiatan** dalam seluruh program **berdasarkan Renja 2024** sebesar 20% dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan 11,13% dalam kategori *Sangat Rendah*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra**

2021-2026 seluruh kegiatan sebesar 68% dalam kategori *Sedang* dan persentase realisasi keuangan sebesar 50% dalam kategori *Sangat Rendah*.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024 berdasarkan Renstra Kota Balikpapan 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Evaluasi Renja Tahun 2024 Beserta Predikat Berdasarkan Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	K		RP		5		6		7		8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	97,94%	Sangat Tinggi/Berhasil	93,43%	Sangat Tinggi/Berhasil	70	Poin	80.787.965.192	63.208.355.083	70	Poin	14.745.022.734	2.395.850.628	5.973.430.395	8.825.325.525	68,56%	12.269.107.870	68,56	98,00%	12.269.107.870	83,21%	68,56	75.477.462.953	98%	93,43%	Kec. Bali Kpapan Barat				
2		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja (RKPD)	88,00%	Tinggi/Berhasil	76,02%	Tinggi/Berhasil	100%		230.000.000	68%	157.000.000	20%	29.999.450	0	6.855.950	15.476.450	20,00%	17.856.450	20%	20%	17.856.450	59,52%	88%	174.856.450	88,00%	76,02%	Kec. Bali Kpapan Barat				
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan 5 tahunan	80,97%	Tinggi/Berhasil	117,96%	Sangat Tinggi/Berhasil	2	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	23.000.000	1	Dokumen	19.999.550	0	0	1	6.855.950	1	12.389.450	1	61,95%	12.389.450	61,95%	2	35.389.450	80,97%	117,96%	Kec. Bali Kpapan Barat	
4			Jumlah dokumen perencanaan tahunan					7	Dokumen	20.000.000	5	Dokumen	14.000.000	1	Dokumen	0															Kec. Bali Kpapan Barat	
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	92,45%	Sangat Tinggi/Berhasil	69,70%	Sedang/Berhasil	6	Dokumen	180.000.000	5	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	9.999.900	0	0	0	1	3.087.000	1	5.467.000	1	54,67%	5.467.000	54,67%	6	125.467.000	92,45%	69,70%	Kec. Bali Kpapan Barat
6			Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Dokumen)					7	Dokumen	180.000.000	6	Dokumen	154.000.000	1	Dokumen	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	6	154.000.000	85,71%	85,56%	Kec. Bali Kpapan Barat	
7		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	96,38%	Sangat Tinggi/Berhasil	-	Poin	64.775.560.000	-	Poin	53.493.467.000	-	Poin	10.559.614.000	2.117.036.207	4.767.029.377	68,56	8.935.05.431	68,56	69%	8.935.005.431	84,61%	68,56	62.428.472.431	69%	96,38%	Kec. Bali Kpapan Barat			
8		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji ASN Kecamatan Balikpapan Barat	107,69%	Sangat Tinggi/Berhasil			24	Dokumen	64.775.560.000	14	Dokumen	53.493.467.000	14	Dokumen	10.559.614.000	3	2.117.036.207	6	4.767.029.377	9	6.886.037.269	12	84,61%	8.935.005.431	84,61%	26	62.428.472.431	107,69%	96,38%	Kec. Bali Kpapan Barat	
9		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	40,00%	Sangat Rendah	194,56%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		56.597.000	40%	110.116.500	20%		0										40%	110.116.500	40,00%	194,56%	Kec. Bali Kpapan Barat			
10		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan (steel)	0,00%	Tidak	0,00%	Tidak	100	Orang	56.597.000	15	Orang	11.250.000	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	0,00%	0,00%	Kec. Bali Kpapan Barat		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
														I				II													III				IV			
														8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 6 x 100%																		
1	2	3	4	K	RP			5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13 / 6 x 100%		15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
11		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian adat daerah yang diadakan	0,00 %	Tidak terakodir dalam Renja 2022	0,00%	Tidak terakodir dalam Renja 2022	35	Orang	139.105.000	14	Orang	98.866.500	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Bali kpapan Barat			
12		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	58,00 %	Rendah	57,24 %	Rendah	100 %	Jenis	5.707.378.692	38 %	Jenis	2.134.397.615	20 %	Jenis	1.687.902.192	18.895.750	193.275.600	429.371.600	20 %	1.275.599.137	75,57 %	58 %	3.409.996.752	58,00 %	59,75 %								Kec.Bali kpapan Barat				
13		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan penerangan bangunan kantor	104,28 %	Sangat Tinggi/Berhasil	97,40 %	Sangat Tinggi/Berhasil	63	Jenis	108.883.000	53	Jenis	87.906.500	13	Jenis	18.585.700	0	0	13	18.147.900	13	18.147.900	97,64 %	66	106.054.400	104,28 %	97,40 %							Kec.Bali kpapan Barat				
14		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Kecamatan	211,33 %	Sangat Tinggi/Berhasil	228,70 %	Sangat Tinggi/Berhasil	20	Jenis	396.355.000	15	Jenis	468.454.800	20	Jenis	321.305.000	0	0	0	8	132.850.000	27	438.022.000	136,33 %	42	906.476.800	211,33 %	228,70 %							Kec.Bali kpapan Barat			
15		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor diketurah (jenis)	40,00 %	Sangat Rendah	16,94 %	Sangat Rendah	100	Jenis	1.371.478.000	40	Jenis	232.260.600	20	Jenis	290.746.000	0	0	0	0	0	0	0,00 %	40	232.260.600	40,00 %	16,94 %							Kec.Bali kpapan Barat				
16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	83,04 %	Tinggi/Berhasil	147,40 %	Sangat Tinggi/Berhasil	605	Jenis	450.068.942	412	Jenis	306.579.300	114	Jenis	450.068.942	2	8.500.000	27	106.934.700	38	150.107.700	79,28 %	502	663.405.700	83,04 %	147,40 %							Kec.Bali kpapan Barat				
17			Jumlah tersedia makanan dan minuman harian dan rapat pegawai (orang)	63,69 %	Rendah	56,98 %	Rendah	784	Orang	1.062.916.500	350	Orang	462.375.000	149	Orang	215.677.500	0	0	0	0	0	149	143.234.500	100,00 %	499	605.609.500	63,69 %	56,98 %						Kec.Bali kpapan Barat				
18			Jumlah kegiatan olahraga melalui kegiatan senam bersama	66,67 %	Sedang/Berhasil	18,26 %	Sangat Rendah	51	Kali	95.730.000	34	Kali	17.480.000	11	Kali	20.316.000	0	0	0	0	0	0	0,00 %	34	17.480.000	66,67 %	18,26 %							Kec.Bali kpapan Barat				
19		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun	68,92 %	Sedang/Berhasil	64,37 %	Sedang/Berhasil	95	Jenis	376.402.250	50	Jenis	179.345.000	19	Jenis	77.294.550	0	1.540.000	4	17.758.000	12	49.136.000	81,45 %	65	242.302.550	68,92 %	64,37 %							Kec.Bali kpapan Barat				
20		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk camat, sekretaris, 4 Kepala seksi dan 2 kasubag	66,39 %	Sedang/Berhasil	175,57 %	Sangat Tinggi/Berhasil	18	Jenis	95.810.000	9	Jenis	46.680.000	3	Jenis	123.552.000	0	0	1	40.171.500	2	68.866.500	98,36 %	12	168.211.500	66,39 %	175,57 %							Kec.Bali kpapan Barat				

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
														I		II		III		IV													
														1	2	3	4	K	RP	5		6		7		8		9			10		11
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp						
21		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	36,44%	Sangat Rendah	26,76%	Sangat Rendah	235	Orang	1.749.735.000	50	Orang	333.316.415	45	Orang	170.356.500	2	8.855.750	3	10.263.500	3	10.263.500	36	134.879.287	36	79,17%	134.879.287	79,17%	86	468.195.702	36,44%	26,76%	Kec.Bali Kpapan Barat
22		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	92,16%	Sangat Tinggi/Berhasil	-	Poin	9.044.748.500	-	Poin	6.656.866.595	-	Poin	1.796.311.092	-	205.932.226	-	728.298.680	-	1.110.713.260	68,56	1.678.784.330	68,56	69%	1.678.784.330	93,46%	68,56	8.335.650.925	69%	92,16%	Kec.Bali Kpapan Barat
23		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya penggunaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang dibayar	49,34%	Sangat Rendah	83,98%	Tinggi/Berhasil	2116	Rekening	1.741.987.000	1015	Rekening	1.205.636.003	35	Rekening	309.500.000	2	49.509.613	5	121.540.477	7	189.088.230	29	257.250.684	29	83,12%	257.250.684	83,12%	1044	1.462.886.687	49,34%	83,98%	Kec.Bali Kpapan Barat
24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non-PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)	88,86%	Tinggi/Berhasil	95,94%	Sangat Tinggi/Berhasil	409	Orang	6.644.970.000	308	Orang	4.953.597.860	58	Orang	1.486.811.092	6	156.422.613	24	606.758.203	36	921.625.030	55	1.421.533.646	55	95,61%	1.421.533.646	95,61%	363	6.375.131.506	88,86%	95,94%	Kec.Bali Kpapan Barat
25		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur (persen)	108,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	118,02%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		973.681.000	88%		656.507.373	20%		671.196.000		53.986.445		277.970.788		383.726.946	20%	505.097.022	20%	20%	505.097.022	75,25%	108%	1.161.604.395	108,00%	119,30%	Kec.Bali Kpapan Barat
26		Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor kecamatan dan kelurahan	131,82%	Sangat Tinggi/Berhasil	105,62%	Sangat Tinggi/Berhasil	20	Paket	285.335.000	8	Paket	241.183.800	5	Paket	16.391.000	0	0	5	16.300.000	5	16.300.000	18	60.200.000	18	367,27%	60.200.000	367,27%	26	301.383.800	131,82%	105,62%	Kec.Bali Kpapan Barat

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																											
														I	II	III	IV																																				
1	2	3	4	K	RP	5		6		7		8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15																									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
30		Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	Jumlah rumah dinas Camat dan Lurah kecamatan Balikpapan Barat (unit)	75,32%	Sedang/Berhasil	104,05%	Sangat Tinggi/Berhasil	35	Paket	289.641.000	0	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	60.200.000	4	26	301.383.800	75,32%	104,05%	Kec.Balikipapan Barat																				
31		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38,36%	Sangat Rendah	59,12%	Rendah	378	Jenis	890.945.960	145	Jenis	526.765.785	224	Jenis	118.478.000	0	0	86	45.220.000	128	67.625.000	0	0	0	0,00%	0	0,00%	145	526.765.785	38,36%	59,12%	Kec.Balikipapan Barat																				
32		Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	jumlah kartu keluarga yang diterbitkan	44,55%	Sangat Rendah	46,74%	Sangat Rendah	6300	KK	149.286.000	23940	KK	57.325.000	10500	KK	31.648.400	0	0	2869	8.645.400	4129	12.445.400	4129	1244500	4129	39,32%	12.445.400	39,32%	28069	69.770.400	44,55%	46,74%	Kec.Balikipapan Barat																				
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				110,40%		110,40%																															
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi		Sangat Tinggi																															
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				32,93%		64,74%																															
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah		Sangat Rendah																															
33		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	100,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	102,57%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		14.919.220.000	85,81%		12.768.035.100	20%		2.927.177.000	222.000.000		840.345.050		1.459.925.850	100,00%		2.505.141.019	100,00%	2.505.141.019	85,58%	100%	15.273.176.119	100,00%	102,37%	Kec.Balikipapan Barat																					
34		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	63,00%	Rendah	56,12%	Rendah	100%		771.669.000	43%		302.017.500	20%		252.295.600	0		1.785.000		5.320.000	20,00%		101.888.050	20%	20,00%	101.888.050	40,38%	63%	403.905.550	63,00%	52,34%	Kec.Balikipapan Barat																				
35		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	99,10%	Sangat Tinggi/Berhasil	101,98%	Sangat Tinggi/Berhasil	320	Usulan	87.001.000	304	Usulan	85.150.000	70	Usulan	19.045.000	0	0	7	1.785.000	13	3.570.000	13	3.570.000	13	18,75%	3.570.000	18,75%	317	88.720.000	99,10%	101,98%	Kec.Balikipapan Barat																				
36		Peningkatan Efektifitas	jumlah peserta pelaksanaan	44,14%	Sangat Rendah	52,42%	Sangat Rendah	720	Orang	601.282.000	260	Orang	216.867.500	120	Orang	204.087.600	0	0	0	1	1.750.000	58	98.318.050	58	48,17%	98.318.050	48,17%	318	315.1	44,14%	52,42%	Kec.Balikipapan Barat																					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
														I		II		III		IV							13 = 6 + 12			14 = 13/6x100%		
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	K		RP		5		6		7		8		9		10		11		12				13 = 6 + 12	14 = 13/6x100%		15			
		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	san sosialisasi kompos					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp			
37			jumlah dokumen profil kecamatan	16,67%	Sangat Rendah	24,18%	Sangat Rendah	90	Dokumen	83.386.000	0	Dokumen	0	15	Dokumen	29.163.000	0	0	0	0	15	20.163.000	15	100,00%	20.163.000	69,14%	15	20.163.000	16,67%	24,18%	Kec. Balikpapan Barat	
38		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase PMKS Miskin yang terlayani	88,00%	Tinggi/Berhasil	68,43%	Sedang/Berhasil	100%		747.960.000	68%		505.780.000	20%		163.475.750	0		2.447.700	2.447.700	20%	6.017.700	20%	20%	6.017.700	3,68%	88%	511.797.700	88,00%	68,43%	Kec. Balikpapan Barat	
39		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	jumlah pelaksanaan sosialisasi program keluarga harapan	166,67%	Sangat Tinggi/Berhasil	65,07%	Sedang/Berhasil	30	Orang	647.552.000	20	Orang	415.372.000	30	Orang	138.013.750	0	0	0	2.447.700	1	2.447.700	30	100,00%	6.017.700	4,36%	50	421.389.700	166,67%	65,07%	Kec. Balikpapan Barat	
40		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Jumlah kegiatan pendataan keluarga miskin	89,99%	Tinggi/Berhasil	90,04%	Sangat Tinggi/Berhasil	7006	Kegiatan	100.408.000	6305	Kegiatan	90.408.000	6	Kegiatan	25.462.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	6305	90.408.000	89,99%	90,04%	Kec. Balikpapan Barat		
41		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	64,00%	Rendah	52,72%	Rendah	100%		334.108.000	44%		147.737.600	70%		72.405.650	0		12.612.350	24.158.150	20%	28.408.150	20%	20,00%	28.408.150	39,23%	64%	176.145.750	64,00%	52,72%	Kec. Balikpapan Barat	
42		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (IMTN)	jumlah IMTN yg diterbitkan	50,54%	Rendah	52,72%	Rendah	9000	Ijin	334.108.000	3960	Ijin	147.737.600	1500	Ijin	72.405.650	0	0	261	12.612.350	501	24.158.150	589	39,23%	28.408.150	39,23%	4549	176.145.750	50,54%	52,72%	Kec. Balikpapan Barat	
43		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Baru Ilir)	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	200,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	113,34%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		3.004.330.000	100%		2.835.000.000	100%		585.000.000	94.500.000		236.250.000	330.750.000	100%	570.132.542	100%	100,00%	570.132.542	97,46%	200%	3.405.132.542	200,00%	113,34%	Kelurahan Baru Ilir	
44		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan	Jumlah RT yang melaksanakan	83,50%	Tinggi/Berhasil	113,34%	Sangat Tinggi/Berhasil	378	RT	3.004.330.000	315	RT	2.835.000.000	63	RT	585.000.000	0	94.500.000	0	236.250.000	330.750.000	1	570.132.542	1	97,46%	570.132.542	97,46%	316	3.405.132.542	83,50%	113,34%	Kelurahan Baru Ilir

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
														I		II		III		IV														
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	K	RP	5		6		7		8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%						
		an Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	layanan di Kelurahan																															
45		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Baru Tengah)	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	200,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	97,15%	Sangat Tinggi/Berhasil																											
						100%	3.004.300.000	100%	2.430.000.000	100%	486.000.000	0		162.000.000		324.000.000	100%	488.685.036	100%	100%	488.685.036	100,55%	200%	2.918.685.036	200,00%	97,15%						Kelurahan Baru Tengah		
46		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang melaksanakan layanan di Kelurahan	100,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	97,15%	Sangat Tinggi/Berhasil																											
						324	RT	3.004.300.000	270	RT	2.430.000.000	54	RT	486.000.000	0	0	18	162.000.000	36	324.000.000	54	488.685.036	54	100,55%	488.685.036	100,55%	324	2.918.685.036	100,09%	97,15%			Kelurahan Baru Tengah	
47		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Baru Ulu)	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	200,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	113,34%	Sangat Tinggi/Berhasil																											
						100%	2.527.491.000	100%	2.385.000.000	100%	477.000.000	79.500.000		198.500.000		318.000.000	100%	479.635.314	100%	100%	479.635.314	100,55%	200%	2.864.635.314	200,00%	113,34%						Kelurahan Baru Ulu		
48		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang melaksanakan layanan di Kelurahan	100,09%	Sangat Tinggi/Berhasil	113,34%	Sangat Tinggi/Berhasil																											
						318	RT	2.527.491.000	265	RT	2.385.000.000	53	RT	477.000.000	9	79.500.000	22	198.500.000	35	318.000.000	53	479.635.314	53	100,55%	479.635.314	100,55%	318	2.864.635.314	100,09%	113,34%			Kelurahan Baru Ulu	
49		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kariangau)	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	200,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	115,93%	Sangat Tinggi/Berhasil																											
						100%	619.801.000	100%	585.000.000	100%	153.000.000	0		29.250.000		60.750.000	100%	133.545.565	100%	100%	133.545.565	87,28%	200%	718.545.565	200,00%	115,93%						Kelurahan Kariangau		
50		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah RT yang melaksanakan layanan di Kelurahan	102,36%	Sangat Tinggi/Berhasil	115,93%	Sangat Tinggi/Berhasil																											
						78	RT	619.801.000	65	RT	585.000.000	17	RT	153.000.000	0	0	3	29.250.000	7	60.750.000	15	133.545.565	15	87,28%	133.545.565	87,28%	80	718.545.565	102,36%	115,93%			Kelurahan Kariangau	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														I		II		III		IV												
														5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	%
1	2	3	4	K		RP		5		6		7		8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15		
		at di Wilayah Kecamatan						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp			
51		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Margasari)	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	200,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	113,37%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%	1.525.670.000	100%	1.440.000.000	100%	288.000.000	48.000.000	96.000.000	192.000.000	100%	289.591.132	100%	100%	289.591.132	100,55%	2	1.729.591.132	200,00%	113,37%					Kelurahan Margasari	
52		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang melakukan layanan di Kelurahan	100,09%	Sangat Tinggi/Berhasil	113,37%	Sangat Tinggi/Berhasil	192	RT 1.525.670.000	160	RT 1.440.000.000	32	RT 288.000.000	5	48.000.000	11	96.000.000	21	192.000.000	32	289.591.132	32	100,55%	289.591.132	100,55%	192	1.729.591.132	100,09%	113,37%			Kelurahan Margasari
53		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Margomulyo)	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional per tahun	100,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	106,75%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%	2.383.861.000	100%	2.137.500.000	100%	450.000.000	0	101.250.000	202.500.000	100%	407.237.530	100%	100%	407.237.530	90,50%	200%	2.544.737.530	100,00%	106,75%					Kelurahan Margomulyo	
54		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang melakukan layanan di Kelurahan	98,42%	Sangat Tinggi/Berhasil	106,75%	Sangat Tinggi/Berhasil	300	RT 2.383.861.000	250	RT 2.137.500.000	50	RT 450.000.000	0	0	11	101.250.000	23	202.500.000	45	407.237.530	45	90,50%	407.237.530	90,50%	295	2.544.737.530	98,42%	106,75%			Kelurahan Margomulyo
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																	78,31%		68,74%				94,50%	93,21%								
Predikat Kinerja																	Tinggi		Sedang				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																	73,33%		73,36%				146,11%	92,60%								
Predikat Kinerja																	Sedang		Sedang				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
55		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase potensi peningkatan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan	10,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	62,21%	Rendah	100%	10.872.685.800	20%	4.219.218.155	3.374.583.400	9.414.500	42.658.300	137.460.900	10,00%	2.398.547.310	10,00%	10,00%	2.398.547.310	71,08%	10,00%	6.617.765.465	10,00%	60,87%					Kec. Balikpapan Barat		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
														I		II		III		IV											
														5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
56		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota	49,91%	Sangat Rendah	52,69%	Rendah	100%	6.147.139.000	30%	1.838.558.375	20%	2.098.831.600	0	11.121.000	11.121.000	20,00%	1.400.477.250	20,00%	20,00%	1.400.477.250	66,73%	50%	3.239.035.625	49,91%	52,69%	Kec.Balikipapan Barat				
57		Perentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitas pembinaan	Persentase sekolah yang mendapatkan fasilitas pembinaan																												
58			Persentase peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Sejahtera																												
59		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KBM)	Jumlah pelaksanaan kerja bakti massal	46,85%	Sangat Rendah	39,68%	Sangat Rendah	18	421.326.000	6	143.000.000	7	69.615.000	0	0	0	0	2	24.200.000	2	34,76%	24.200.000	34,76%	8	167.200.000	46,85%	39,68%	Kec.Balikipapan Barat			
60		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Peserta STQ	49,58%	Sangat Rendah	53,65%	Rendah	240	5.725.813.000	71	1.695.558.375	48	2.029.216.600	0	0	0	11.121.000	0	11.121.000	48	1.376.277.250	67,82%	119	3.071.835.625	49,58%	53,65%	Kec.Balikipapan Barat				
61			jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan RT					6	795.599.000	5	298.900.000	1	RT								0										Kec.Balikipapan Barat
62			jumlah pelaksanaan lomba dan penyuluhan PPKBD, BKB, UP2KS, P2WKSS, BKR, BKL, GSI, PHBS, KB KES.					78	1.873.207.000	65	431.281.500	13	Jenis								0										Kec.Balikipapan Barat

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
														I		II		III		IV													
														8	9	10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15									
1	2	3	4	K		RP		5		6		7		8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			KB Lestari, LBSI, Keluarga Harmonis, Posyandu																														
63			jumlah lomba dan pembinaan kesehatan					24	Kegiatan	345.061.000	16	Kegiatan	2.030.625	4	Kegiatan																	Kec. Balikpapan Barat	
64			jumlah peserta yang terpilih/terseleksi STQ pertahun					270	Orang	1.545.000.000	0	Orang	0	48	Orang																	Kec. Balikpapan Barat	
65			jumlah pelaksanaan lomba administrasi dan Bimtek RT					12	Kegiatan	1.136.744.000	10	Kegiatan	939.346.250	2	Kegiatan																	Kec. Balikpapan Barat	
66			jumlah pembinaan pemerintah melalui pembinaan dan evaluasi Kelurahan					36	Kegiatan	30.202.000	24	Kegiatan	24.000.000	6	Kegiatan																	Kec. Balikpapan Barat	
67		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	56,00%	Rendah	43,33%	Sangat Rendah	100%		1.753.945.500	36%	586.364.500	20%	358.396.800	0	7.547.700	71.886.300	20,00%	173.690.550	20,00%	20,00%	173.690.550	48,46%	56%	760.055.050	56,00%	43,33%			Kec. Balikpapan Barat			
68			Persentase Peran Serta Masyarakat																														
69			Persentase Pengembangan dalam mendukung pelayanan masyarakat																														
70		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (PKK Kecamatan)	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial kemasyarakatan tingkat kecamatan	88,48%	Tinggi/Berhasil	90,62%	Sangat Tinggi/Berhasil	27	Organisasi	284.039.000	15	Organisasi	210.105.000	3	Organisasi	58.459.250	0	0	0	1.320.000	0	1.320.000	10	47.279.250	10	323,50%	47.279.250	80,88%	25	257.384.250	91,50%	90,62%	Kec. Balikpapan Barat
71		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KLA)	Jumlah Peserta sosialisasi Forum Layak Anak	40,67%	Sangat Rendah	39,74%	Sangat Rendah	110	Orang	348.886.000	44	Orang	138.000.000	80	Orang	71.607.750	0	0	0	0	0	0	1	660.000	1	0,92%	660.000	0,92%	45	138.660.000	40,67%	39,74%	Kec. Balikpapan Barat
72		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah izin yang diterbitkan	28,59%	Sangat Rendah	30,60%	Sangat Rendah	600	Izin	861.550.500	120	Izin	173.359.500	100	Izin	175.267.300	0	0	3	4.551.700	37	64.435.300	52	90.315.300	52	51,53%	90.315.300	51,53%	172	263.674.800	28,59%	30,60%	Kec. Balikpapan Barat

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
														I		II		III		IV													
														5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	%	Rp
73		Masyarakat (UMK)	Jumlah Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	36,13%	Sangat Rendah	38,67%	Sangat Rendah	24	Kali	259.470.000	6	Kali	64.900.000	4	Kali	53.062.500	0	0	0	1.676.000	0	6.131.000	3	35.436.000	3	66,78%	35.436.000	66,78%	9	100.336.000	36,13%	38,67%	Kec.Bali Kpapan Barat
74		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Baru Ilir	Peresentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitas pembinaan, persentase peran serta dalam pembinaan keluarga sejahtera	207,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	157,14%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		480.264.300	107%		298.329.000	100%		160.026.500		9.414.500	9.414.500		15.650.500	100%	141.502.810	100%	100%	141.502.810	88,42%	207%	439.831.810	207,00%	91,58%	Kelurahan Baru Ilir	
75		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	89,91%	Tinggi/Berhasil	79,23%	Tinggi/Berhasil	30	Usulan	19.242.300	25	Usulan	13.825.000	5	Usulan	3.601.500	2	1.421.500	2	1.421.500	2	1.421.500	2	1.421.500	2	39,47%	1.421.500	39,47%	27	15.246.500	89,91%	79,23%	Kelurahan Baru Ilir
76		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah hasil kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan (jenis)	160,03%	Sangat Tinggi/Berhasil	285,05%	Sangat Tinggi/Berhasil	56	Jenis	328.841.000	43	Jenis	252.384.000	14	Jenis	128.475.000	0	0	0	0	0	0	12	113.830.310	12	88,60%	113.830.310	88,60%	55	366.214.310	98,94%	111,37%	Kelurahan Baru Ilir
77		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah PKK yang terbinas dan terfasilitasi	65,99%	Sedang/Berhasil	44,16%	Sangat Rendah	27	Organisasi	132.181.000	15	Organisasi	32.120.000	3	Organisasi	27.950.000	1	7.993.000	1	7.993.000	2	14.229.000	3	26.251.000	3	93,92%	26.251.000	93,92%	18	58.371.000	65,99%	44,16%	Kelurahan Baru Ilir
78		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Baru Tengah	Peresentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapa	174,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	106,74%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		514.667.300	74%		357.458.750	100%		162.727.200		0	0		8.434.500	100%	154.839.000	100%	100%	154.839.000	95,15%	174%	512.297.750	174,00%	99,54%	Kelurahan Baru Tengah	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
														I		II		III		IV																
														K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			K		Rp		K	
1	2	3	4	K		RP		5		6		7		8		9		10		11		12				13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15						
			tkan fasilitasi pembinaan, perserta se peran serta dalam pembinaan keluarga sejahtera																																	
79		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	83,33%	Tinggi/Berhasil	83,36%	Tinggi/Berhasil	30	Usulan	18.942.300	25	Usulan	15.790.000	5	Usulan	3.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	25	15.790.000	83,33%	83,36%	Kelurahan Baru Tengah			
80		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah hasil kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan (jenis)	168,94%	Sangat Tinggi/Berhasil	120,47%	Sangat Tinggi/Berhasil	56	Kegiatan	363.544.000	46	Kegiatan	268.127.500	14	Kegiatan	131.275.000	0	0	0	0	0	14	128.012.500	14	97,51%	128.012.500	97,51%	60	396.140.000	106,52%	108,97%	Kelurahan Baru Tengah				
81		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah PKK yang terbina dan terfasilitasi	66,25%	Sedang/Berhasil	75,93%	Tinggi/Berhasil	27	Organisasi	132.181.000	15	Organisasi	73.541.250	3	Organisasi	27.872.200	0	0	0	0	1	8.434.500	3	26.826.500	3	96,25%	26.826.500	96,25%	18	100.367.750	66,25%	75,93%	Kelurahan Baru Tengah			
82		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Baru Utu	Presentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan, perserta se peran serta dalam pembinaan keluarga sejahtera	161,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	88,18%	Tinggi/Berhasil	100%		509.075.300	61%		309.852.700	100%		162.751.800	0			11,89	0,100		11,89	0,100	100%		139,064.650	100%	100%	139,064.650	85,45%	161%	448.917.350	161,00%	88,18%	Kelurahan Baru Utu
83		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	92,33%	Sangat Tinggi/Berhasil	93,02%	Sangat Tinggi/Berhasil	30	Usulan	18.942.300	25	Usulan	15.675.000	5	Usulan	3.600.500	0	0	3	1.944.500	3	1.944.500	3	1.944.500	3	54,01%	1.944.500	54,01%	28	17.619.500	92,33%	93,02%	Kelurahan Baru Utu			
84		Pembangunan Sarana dan	Jumlah hasil kegiatan pembang	147,21%	Sangat Tinggi/Berhasil	104,85%	Sangat Tinggi/Berhasil	77	Jenis	357.952.000	55	Jenis	255.039.500	18	Jenis	131.220.200	0	0	0	0	0	0	0	16	120.274.550	16	91,66%	120.274.550	91,66%	71	375.314.050	92,86%	104,85%	Kelurahan Baru Utu		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
														I		II		III		IV													
														1	2	3	4	K	RP	5		6		7		8		9			10		11
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp						
		Prasarana Kelurahan	jumlah an lingkungan kelurahan (jenis)																														
85		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat	58,55%	Rendah	42,35%	Rendah	27	Organisasi	132.181.000	14	Organisasi	39.138.200	3	Organisasi	27.931.100	0	0	1	9.945.600	1	9.945.600	2	16.845.600	2	60,31%	16.845.600	60,31%	16	55.983.800	58,55%	42,35%	Kelurahan Baru Ulu
86		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kariangau	Perentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan, persentase peran serta dalam pembinaan keluarga sejahtera	159,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	90,30%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		476.433.300	59%		272.810.330	100%		162.511.500	0	0	2.025.000		2.025.000	100%	157.389.650	100%	100%	157.389.650	96,85%	159%	430.199.980	159,00%	90,30%	Kelurahan Kariangau	
87		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	92,81%	Tinggi/Berhasil	102,11%	Sangat Tinggi/Berhasil	30	Usulan	17.442.300	25	Usulan	15.785.000	5	Usulan	3.562.500	0	0	3	2.025.000	3	2.025.000	3	2.025.000	3	56,84%	2.025.000	56,84%	28	17.810.000	92,81%	102,11%	Kelurahan Kariangau
88		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah hasil kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan (jenis)	165,40%	Sangat Tinggi/Berhasil	96,26%	Sangat Tinggi/Berhasil	48	Jenis	326.810.000	27	Jenis	185.259.330	12	Jenis	131.000.000	0	0	0	0	0	0	12	129.339.650	12	98,73%	129.339.650	98,73%	39	314.598.980	80,93%	96,26%	Kelurahan Kariangau
89		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah PKK yang terbina dan terfasilitasi	65,90%	Sedang/Berhasil	73,98%	Sedang/Berhasil	27	Organisasi	132.181.000	15	Organisasi	71.766.000	3	Organisasi	27.949.000	0	0	0	0	0	3	26.025.000	3	93,12%	26.025.000	93,12%	18	97.791.000	65,90%	73,98%	Kelurahan Kariangau	
90		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Margasari	Perentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota,	171,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	91,58%	Sangat Tinggi/Berhasil	100%		499.267.800	71%		355.825.000	100%		106.511.500	0	0	660.000		16.453.500	100%	101.409.000	100%	100%	101.409.000	95,21%	171%	457.234.000	171,00%	91,58%	Kelurahan Margasari	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
														I		II		III		IV													
														5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	%	Rp
91		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	19,75%	Sangat Rendah	22,29%	Sangat Rendah	30	Usulan	18.941.800	5	Usulan	3.562.500	5	Usulan	3.562.500	0	0	1	660.000	1	660.000	1	660.000	1	18,53%	660.000	18,53%	6	4.222.500	19,75%	22,29%	Kelurahan Margasari
92		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah SPGRM	155,09%	Sangat Tinggi/Berhasil	94,78%	Sangat Tinggi/Berhasil	53	Kegiatan	353.565.000	39	Kegiatan	261.662.500	14	Kegiatan	75.000.000	0	0	0	0	0	0	14	73.458.000	14	97,94%	73.458.000	97,94%	53	335.120.500	99,46%	94,78%	Kelurahan Margasari
93		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah PKK yang terbinas dan terfasilitasi	66,41%	Rendah	93,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	27	Organisasi	126.761.000	15	Organisasi	90.600.000	3	Organisasi	27.949.000	0	0	0	0	2	15.793.500	3	27.291.000	3	97,65%	27.291.000	97,65%	18	117.891.000	66,41%	93,00%	Kelurahan Margasari
94		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Margomulyo	Persentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitas pembinaan, persentase peran serta dalam pembinaan keluarga sejahtera	141,00%	Sangat Tinggi/Berhasil	67,13%	Sedang/Berhasil	100%		491.893.300	41%		200.019.500	100%		162.826.500	0	0	0	0	0	100%	130.174.400	100%	100%	130.174.400	79,95%	141%	330.193.900	141,00%	67,13%	Kelurahan Margomulyo	
95		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	91,73%	Sangat Tinggi/Berhasil	84,38%	Sangat Tinggi/Berhasil	30	Usulan	18.742.300	25	Usulan	14.000.000	5	Usulan	3.601.500	0	0	0	0	0	0	3	1.815.000	3	50,40%	1.815.000	50,40%	28	15.815.000	91,73%	84,38%	Kelurahan Margomulyo

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
														I		II											III		IV				
														8	9	10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13/6x100%											
5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/6x100%																								
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
96		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah hasil kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan (jenis)	141,69%	Sangat Tinggi/Berhasil	71,01%	Sedang/Berhasil	57	Jenis	340.970.000	9	Jenis	140.519.500	14	Jenis	131.275.000	0	0	0	0	0	0	11	101.609.400	11	77,40%	101.609.400	77,40%	20	242.128.900	34,80%	71,01%	Kelurahan Margomulyo
97		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah PKK yang terbentuk dan terfasilitasi	66,19%	Sedang/Berhasil	54,66%	Rendah	27	Organisasi	132.181.000	15	Organisasi	45.500.000	3	Organisasi	27.950.000	0	0	0	0	0	3	26.750.000	3	95,71%	26.750.000	95,71%	18	72.250.000	66,19%	54,66%	Kelurahan Margomulyo	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)														78,56%		67,11%		69,42%	72,03%														
Predikat Kinerja														Tinggi		Sedang		Sedang	Sedang														
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)														80,00%		82,03%		139,86%	78,04%														
Predikat Kinerja														Tinggi		Tinggi		Sangat Tinggi	Tinggi														
98		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi transmisi di kecamatan yang optimal	89,00%	Tinggi/Berhasil	50,28%	Sangat Rendah	100%		1.468.257.000	48%		706.244.000	20%		286.999.900	0	0	0	0	14.836.500	89,00%	31.936.500	89,00%	89,00%	31.936.500	11,13%	89,00%	738.180.500	89,00%	50,28%	Kec. Balikpapan Barat	
99		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum	68,00%	Sedang/Berhasil	50,28%	Sangat Rendah	100%		1.468.257.000	48%		706.244.000	20%		286.999.900	0	0	0	0	14.836.500	20,00%	31.936.500	20%	20,00%	31.936.500	11,13%	68%	738.180.500	68,00%	50,28%	Kec. Balikpapan Barat	
100		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor Transmisi di wilayah Kecamatan	50,19%	Sedang/Berhasil	50,28%	Sangat Rendah	240	Kali	1.468.257.000	116	Kali	706.244.000	40	Kali	286.999.900	0	0	0	2	14.836.500	4	31.936.500	4	11,13%	31.936.500	11,13%	120	738.180.500	50,19%	50,28%	Kec. Balikpapan Barat	
101			Jumlah pravelensi jumlah penurunan narkoba	0,00%	Tidak Berhasil	0,00%	Tidak terakomodir dalam renja 2021	24	Kegiatan	109.606.000	0	Kegiatan	0	4	Kegiatan	38.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	Kec. Balikpapan Barat		
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)														11,13%		11,13%		50,19%	50,28%														
Predikat Kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah														
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)														20,00%		11,13%		68%	50%														
Predikat Kinerja														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah														
Rata-rata capaian Program Keseluruhan														74%		63%		74%	77%														
Predikat Kinerja														Sedang		Sangat Rendah		Sedang	Tinggi														

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Keuangan (%)	Predikat	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I	II	III	IV	12		13 = 6 + 12					14 = 13/Sx100%	
1	2	3	4	K		RP		5	6	7	8	9	10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13/Sx100%		15		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian Kegiatan Keseluruhan																52%		58%		106%	82%		
Predikat Kinerja																Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Tinggi		
Rata-rata capaian Sub Kegiatan Keseluruhan																70%		64%		73%	83%		
Predikat Kinerja																Sedang		Sangat Rendah		Sedang	Tinggi		

Sumber Data : Form e81 Evaluasi Renja (Data Diolah)

Tabel 2.4

Realisasi Program RPJMD Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Indikator			Tahun...(thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun(thn n-2)	Tahun (n-1)	Tahun 2021		Tahun 2022	Catatan
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11		12	13
1	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	N/A	N/A	68,15	Poin	68,5	Poin			68,12	Poin		Nilai saking tahun 2020 sedangkan untuk tahun 2021 belum dilaksanakan evaluasi
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	N/A	80,16	80,16	Poin	80,36	Poin			-	Poin		Belum dilaksanakan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Oleh Bagian Organisasi
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	N/A	Poin	27	Poin			25,44	Poin		
4	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	-	-	N/A	100	100	%	100	%			100%	Poin		
5	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	-	-	N/A	N/A	N/A	%	16	%			10%	%		
6	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	-	-	N/A	N/A	100	%	100	%			89%	%		
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	70	Poin	70,5	Poin			68,56	Poin		

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi capaiannya sebesar 68,56 Poin. Realisasi keuangan berdasarkan Renstra 2016-2021 yaitu 93,43% termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar 77,39% dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 114,67% dalam kategori Sangat *Tinggi*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar 72,00% dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 106,36% dalam kategori Sangat *Tinggi*.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi capaiannya sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu 100% dalam Kategori Sangat Tinggi dan realisasi keuangan 102,57% dalam Kategori Sangat Tinggi. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar 94,50% dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 93,21% dalam kategori Sangat *Tinggi*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar 146,11% dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 92,60% dalam kategori *Tinggi*. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi capaiannya sebesar 10% **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu 100% dalam Kategori Sangat Tinggi dan realisasi keuangan 62,21% dalam Kategori *Sedang*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar 69,42% dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 72,03% dalam kategori *Tinggi*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar 139,86% dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar 78,04% dalam kategori *Tinggi*.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi capaiannya sebesar 89% dengan **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu 89% dalam Kategori *Tinggi* dan realisasi keuangan 50,28% dalam Kategori *Sedang*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh **Sub Kegiatan** sebesar 50,19% dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan sebesar 50,28% dalam kategori *Sangat Rendah*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar 68% dalam kategori *Sedang* dan persentase realisasi keuangan sebesar 50% dalam kategori *Sangat Rendah*.

Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021, maka ditemui beberapa faktor penghambat yang merupakan kendala dalam keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

2.2.1 Faktor Penghambat

1. Adanya status PPKM darurat (level 3) menjadi darurat mikro (level 4) pada triwulan pertama hingga kedua menyebabkan terhambatnya kegiatan dilaksanakan;

2. Perubahan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk pemetaan terhadap kode klasifikasi program, kegiatan terbaru sesuai dengan peraturan tersebut sehingga terdapat penggabungan kegiatan menjadi sub kegiatan yang mengakibatkan realisasi kinerja yang kurang maksimal;
3. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran terkait evaluasi renja dikarenakan pergantian pejabat pada triwulan III, menjadikan mereka *shock culture* sehingga sering terjadi human error dalam entri kegiatan;
4. Adanya refocussing anggaran pada sub kegiatan sehingga capaian rata-rata realisasi keuangan menyesuaikan keadaan keuangan, ketika dalam keadaan defisit maka capaian realisasi keuangan menjadi menurun;
5. Adanya sub kegiatan yang telah terakomodir dalam renstra yang tidak dilaksanakan dikarenakan disesuaikan dengan kondisi fiskal keuangan daerah dan program prioritas Kota Balikpapan setiap tahunnya.

2.2.2 Faktor Pendorong

Selain menghadapi faktor penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat juga beberapa hal sebagai faktor pendorong keberhasilan. Adapun faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mendukung pencapaian target kinerja, meliputi:

1. Terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan PPTK untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran yang sudah diinput;
2. Koordinasi yang baik antar unit kerja di dalam Kecamatan Balikpapan Barat dengan membentuk jaringan perencanaan hingga tingkat sub bidang/Sub Bagian, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan langsung di tingkat Subbid/Subbag. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan tinggal mengendalikan, mengevaluasi, dan meng approve secara by sistem;
3. Adanya refocussing anggaran pada sub kegiatan sehingga capaian rata-rata realisasi keuangan menyesuaikan keadaan keuangan, semakin tinggi anggaran yang ditambahkan semakin tinggi realisasinya begitupun sebaliknya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi kecamatan Balikpapan Barat

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Barat berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016-2021.

Sesuai tugas pokok fungsi kecamatan, mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Barat yang mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, kementraman dan ketertiban, maka tantangan yang akan dihadapi kecamatan yaitu:

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini;
2. Kurangnya pengetahuan SDM pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan rendahnya realisasi kinerja yang berimplikasi pada menurunnya anggaran;
3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas; dan
4. Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang ada di wilayah

Kecamatan Balikpapan Barat masih perlu peningkatan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Barat selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Barat, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Balikpapan Barat 5 (lima) tahun kedepan antara lain, seperti dalam tabel 2.3

Tabel 2.3

Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
Pelayanan Publik	Dokumen Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan telah tersedia	Perwal No. 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Keputusan Camat Balikpapan Barat tentang Penetapan SOP dan Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Barat	Komitmen pegawai dalam mematuhi SOP dan SP perlu terus ditingkatkan	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas tinggi
	Media Informasi kepada masyarakat tersedia	Keputusan WaliKota Balikpapan tentang Petugas PPID	Keterbatasan SDM Aparatur dalam penyajian informasi yang belum optimal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Masyarakat menuntut ketersediaan informasi yang dibutuhkan
	Pelayanan responsif gender	Keputusan Camat Balikpapan Barat tentang Penetapan SOP dan Standar Pelayanan di	Keterbatasan sarana pelayanan yang responsif gender	Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum	Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat

Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
		lingkungan Kecamatan Balikpapan Barat		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	
Penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Kecamatan	Usulan Perencanaan Pembangunan telah dilaksanakan setiap tahun	Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan di Kecamatan Berita Acara hasil Musrenbang Tk. Kecamatan	Perbaikan sarana dan prasarana ditentukan dalam skala prioritas dikarenakan anggaran yang terbatas	Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Tidak semua usulan Pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi
Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Masih belum optimalnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan trantibum di Kecamatan Balikpapan Barat	Peraturan Daerah tentang Trantibum Peraturan Daerah tentang Perijinan	Keterbatasan kemampuan (kapasitas) SDM di Kecamatan Balikpapan Barat dalam hal penegakan Sarana dan Prasarana Pengawasan belum maksimal	Pemahaman dan Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan trantibum dan perijinan	Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi menyulitkan pengawasan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban; Belum optimalnya proses pengawasan perizinan oleh Perangkat Daerah Teknis
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sesuai Program dan Kegiatan serta dana yang ada dikecamatan	Aturan terkait Pemberdayaan masyarakat	Program, Kegiatan serta Anggaran Pemerintah yang terkait dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Peran serta pelaku usaha dalam mendukung pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya hasil pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat
Tertib administrasi pemerintahan dan pertanahan	Data administrasi pertanahan terdokumentasikan	Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara Perwali Nomor 33 Tahun 2017	Belum tersedia bank data dokumentasi pertanahan yang terintegrasi Belum tersedianya ruang khusus arsip warkah IMTN yang memadai	PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon) berkaitan dengan persyaratan dan	Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang tumpang tindih Kurangnya pemahaman

Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
		tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ijin Membuka Tanah Negara	Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan IMTN kurang memadai	mekanisme IMTN	masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam tahapan proses IMTN berdampak pada waktu penyelesaian IMTN menjadi lebih lama

No	KELURAHAN		Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	KEL. MARGASARI	a	Penanganan Sampah Kawasan Pemukiman Atas Air Margasari	Adanya penumpukan sampah di bawah pemukiman atas air yang meliputi 16 RT, dengan luas sekitar 25 Ha	Kel. Margasari merupakan muara dari 3 (tiga) Parit Besar yang mengalir ke pemukiman atas air : sungai samping diklat pertamina, sungai sekitar GPMI, sungai pasar pandan sari
		b	Tidak tertibnya bongkar muat barang di sekitar lokasi Pasar Pandansari	Belum tersedianya sarana khusus bongkar muat sembako	Kawasan sekitar Kelurahan Margasari menjadi kumuh, dan bermunculan PKL yang sulit dikendalikan
2	KEL. BARU ILIR	a	Kemacetan Antrian BBM di sepanjang sisi jalan Let. Jend. Soeprapto	Mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta pemilik usaha	Tidak ada jadwal yang tetap untuk pengisian BBM (solar bersubsidi)
		b	Genangan/Banjir di sepanjang Let.Jend. Soeprapto (BNI sd Kecamatan)	Mengganggu kenyamanan pengguna jalan	Drainase tidak menampung air ketika curah hujan tinggi,
					Pembuangan air yang tidak lancar
3	KEL. BARU TENGAH	a	Adanya penumpukan Sampah di area Jl. Let. Jend Soeprapto di Raja Malaysia dan SD 002 Balikpapan Barat	Timbulnya penumpukan sampah di luar areal TPS, Trotoar, Drainase	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan
		b	Tidak tersedianya lahan parkir khusus angkutan umum	Menimbulkan kemacetan di sepanjang Jl. Let Jend Soeprapto	Tidak adanya lahan parkir mandiri bagi pemilik angkutan umum
		c	Beralih fungsinya terminal transit angkutan umum menjadi tempat parkir kendaraan pribadi bagi pekerja yang melakukan penyeberangan ke PPU	Fungsi Terminal transit angkutan umum tidak sesuai peruntukannya	Terjadinya kesemrawutan dan kemacetan arus lalu lintas kendaraan di Jl. 21 Januari
4	KEL. KARIANGAU	a	Banjir yang terjadi di Jl. Sultan Hasanuddin RT 12 dan 13	Akses jalan menuju pelabuhan Ferry dan Kawasan Industri Kariangau tidak dapat dilewati	Adanya banjir kiriman dari Kel. Karang Joang padasaat hujan deras
					Belum tersedianya bendali air
		b	Loket Pelayanan kurang representatif	Kenyamanan pengguna layanan kurang maksimal	Terbatasnya ruang pelayanan baik untuk laktasi maupun ruang tunggu
5	KEL. MARGO MULYO	a	Banjir yang terjadi di kawasan Jl. Gn. Empat RT 13, 14, 15, 16, 17,dan 50	aliran drainase yang tersumbat dan tidak lancar	Sedimentasi di muara aliran primer kawasan mangrove

No	KELURAHAN		Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		b	terjadi penumpukan sampah di sepanjang Jl. Bambang Sutikno	menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat, banjir dan menimbulkan aroma tidak sedap	Tidak tersedianya TPS di sepanjang Jl. Bambang Sutikno kawasan konservasi mangrove
6	SEKSI PEMERINTAHAN	a	Setiap permohonan IMTN memiliki masalah khusus masing-masing	Banyaknya permohonan IMTN yang tertunda	Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan berkas sesuai jadwal yang ditetapkan pasca peninjauan
					Belum adanya instrumen pengingat kepada pemohon
		b	Belum tersedianya gedung arsip vital khusus Warkah IMTN	Tingginya resiko kehilangan dan kerusakan arsip,	Belum tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan arsip

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review awal rancangan RKPD yakni dengan melaksanakan forum OPD Kecamatan Balikpapan Barat. Pelaksanaan forum OPD tersebut bertujuan untuk menyelaraskan target pada indikator Renstra 2021-2026 beserta Pagu Indikatif dengan hasil kebutuhan yang didapatkan dalam Forum OPD. Forum OPD tersebut mengundang seluruh PPTK dan staf Kecamatan dan Kelurahan hingga Bappedalitbang. Berikut hasil rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kota Balikpapan.

Tabel 2.3

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				66 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				27 Unit	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	210.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
7.01.03.2.02.0003		Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	45.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
7.01.03.2.03		Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1.120.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
7.01.03.2.03.0001		Penyenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dianggarkan				117 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.120.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
							0,00	0,00						1.165.000.000,00			
7 UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	0,00							1.165.000.000,00		
7.01 KECAMATAN							0,00	0,00							1.165.000.000,00		
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-	-							-	1.165.000.000,00	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	416.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI		
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				36 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI		
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	350.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI		
7.01.03.2.02.0003		Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.03.2.03.0001		Penyenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dianggarkan				32 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	710.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI		
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Dididatikan				52 Unit	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	29.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI		
							0,00	0,00						1.713.893.000,00			
7 UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	0,00							1.713.893.000,00		
7.01 KECAMATAN							0,00	0,00							1.713.893.000,00		
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-	-							-	1.713.893.000,00	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	733.893.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO		
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				57 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Muljo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.000.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO		
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				46 Unit	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Muljo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	370.000.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO		
7.01.03.2.02.0003		Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Muljo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	323.893.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO		
7.01.03.2.03		Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	960.000.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO		
7.01.03.2.03.0001		Penyenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dianggarkan				57 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Muljo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.000.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO		
							0,00	0,00						890.958.500,00			
7 UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	0,00							890.958.500,00		
7.01 KECAMATAN							0,00	0,00							890.958.500,00		
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-	-							-	890.958.500,00	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	470.958.500,00	KELURAHAN KARIANGAU		
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Karangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	36.500.000,00	KELURAHAN KARIANGAU		
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Karangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	320.000.000,00	KELURAHAN KARIANGAU		
7.01.03.2.02.0003		Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Karangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	114.458.500,00	KELURAHAN KARIANGAU		
7.01.03.2.03		Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	420.000.000,00	KELURAHAN KARIANGAU		
7.01.03.2.03.0001		Penyenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dianggarkan				20 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Karangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	420.000.000,00	KELURAHAN KARIANGAU		
J U M L A H							0,00	0,00							31.645.248.825,00		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan Tahun 2025 dilaksanakan dengan mekanisme Rakor Pembangunan Kelurahan yang dihadiri oleh seluruh ketua RT, LP, hingga Karang Taruna, kemudian usulan dari kelurahan dikumpulkan dan dibahas pada Musrenbang Kecamatan dengan menentukan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah terkait, Kecamatan, bahkan dengan swadaya masyarakat. Hasil usulan

Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
Kelurahan Marga Sari						
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	3 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprpto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	150 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	3 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	4 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprpto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	151 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	4 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	5 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprpto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	152 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	5 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	6 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprpto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	153 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	6 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
21	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
22	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	7 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
23	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprpto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	154 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
24	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	7 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
25	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
26	Program Pemberdayaan Masyarakat	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan,	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Balikipapan Barat, Marga Sari	Marga Sari Yang Terlaksana			
27	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	8 x 8 M	(SPGRM) Perbaiki Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
28	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprpto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	155 M	(SPGRM) Perbaiki drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
29	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	8 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
30	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
31	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaiki Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
32	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	9 x 8 M	(SPGRM) Perbaiki Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
33	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprpto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	156 M	(SPGRM) Perbaiki drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
34	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	9 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
35	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
36	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaiki Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
37	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	10 x 8 M	(SPGRM) Perbaiki Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
38	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprpto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	157 M	(SPGRM) Perbaiki drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
39	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	10 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberdayaan Kelurahan					
40	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
41	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
42	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	11 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
43	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprpto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	158 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
44	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	11 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
45	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
46	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
47	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Barat RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	12 x 8 M	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
48	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Suprpto RT. 17 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	159 M	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
49	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku laut RT. 30 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	12 x 3 M	(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
50	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 18 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
51	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemukiman Atas Air RT. 29 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	P = 800 M L = 5 M	Peningkatan/Perkerasan/semenis asi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	
52	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sepaku Laut RT. 10 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	120 M (3x40)	Peningkatan/Perkerasan/semenis asi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
53	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 21 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	L = 2,5 M P = 50 M	Peningkatan/Perkerasan/semenis asi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	
54	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pandan Sari RT. 29 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	P = ± 400 M L = 2 M	Peningkatan/Perkerasan/semenis asi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	
55	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Semoi Perumahan Guru RT. 13 Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Sari Yang Terlaksana	P = 104 M L = 3,00 M T = 10 CM	Peningkatan/Perkerasan/semenis asi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	
Kelurahan Kariangau						
56	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 15 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Jalan sudah rusak
57	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Ruhui Rahayu RT 6 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (lebar jalan < 4 meter.)	Jalan rawan lakalantas dan kriminal
58	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Kartini RT 5 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Meningkatkan UMKM Hidroponik
59	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 9 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	belum ada pelatihan welder bagi remaja putus sekolah
60	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 9 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan alat berat bagi warga bkerja/phk
61	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 12 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	belum ada pelatihan kuliner
62	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 12 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan montir bagi pemuda putus sekolah
63	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 12 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan pengembangan umkm utk hidroponik
64	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 12 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan kerja budidaya ikan air tawar
65	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 16 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	belum ada pelatihan mengelas untuk remaja putus sekolah
66	Program Pemberdayaan	RT 16 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja	Belum ada pelatihan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	menjahit untuk meningkatkan umkm
67	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 16 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	Belum ada pelatihan hidroponik bagi umkm
68	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 16 Kariangau, Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	pengembangan umkm melalui budidaya tanaman dalam polibag blm ada
69	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sultan Hasanuddin RT 14, mulai gerbang pelabuhan ferry ke kantor lurah Kariangau , Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana	2000 m x 6 m	Peningkatan/Perkerasan/semenis asi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan rusak berat
70	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Selok Baru RT 8 Kariangau , Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana	3000 m x 10 m	Peningkatan/Perkerasan/semenis asi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan masih pengerasan dan berbahaya bagi kendaraan bermotor
71	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Ruhuy Rahayu RT 6 Kariangau , Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana	500 m x 5 m	Peningkatan/Perkerasan/semenis asi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan sudah rusak parah
72	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Sultan Hasanuddin RT 4 Samping SDN 020 Kariangau , Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana	150 m x 0,6 m x 0,4	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Belum ada drainase sehingga air meluap ke jalan
73	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Karya Bakti RT 13 Kariangau , Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kariangau Yang Terlaksana	200 m x 0,5 m x 0,4 m	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Belum tersedia drainase
Kelurahan Baru Ulu						
74	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 53 - 1.2241823623360508, 116.81718829320026, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 35 M Lebar : 50 Cm Tinggi : 10 Cm	(SPGRM) Perbaiki drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
75	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sultan Hasanuddin RT.40 - 1.228895, 116.814958, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 400 M Lebar dalam : 40 Cm Tinggi : 50 Cm Tebal : 15 Cm	(SPGRM) Perbaiki drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
76	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprpto RT. 51 -1.227408, 116.813525, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 30 M Lebar : 0.5 M Tinggi : 80 Cm	(SPGRM) Perbaiki drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
77	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprpto RT. 51 -1.227384, 116.812801, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 70 M Lebar : 0.5 M Kedalaman : 1 M	(SPGRM) Perbaiki drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
78	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprpto RT. 51 -1.227950, 116.813120, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	panjang : 100 M Lebar : 0.5 M Kedalaman : 1 M	(SPGRM) Perbaiki drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
79	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 32 - 1.222494, 116.817714, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 25 M Lebar : 40 Cm Kedalaman : 50 Cm	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
80	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprpto RT.12 - 1.2255615767386872, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 200 M Lebar : 40 Kedalam 50 Cm	(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
81	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Gang SMAN 3 Jl. Wolter Monginsidi RT.53 - 1.222688, 116.817130, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 65 M Lebar : 2 M Tebal : 10 Cm	(SPGRM) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
82	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 22 - 1.222562, 116.812360, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
83	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprpto RT. 51 - 1.227438, 116.812989, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 50 M Lebar : 0,5 M Tinggi : 1 M	(Dana Kelurahan) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
84	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprpto RT. 51 - 1.227797, 116.812932, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 70 M Lebar : 0.5 M Kedalaman : 1 M	(Dana Kelurahan) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
85	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprpto RT. 51 - 1.227438, 116.812989, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang : 50 M Lebar : 3 M	(Dana Kelurahan) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
86	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 53 - 1.2234656403360988, 116.81728398426132, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	4 titik	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (lebar jalan < 4 meter.)	
87	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 42 - 1.226602, 116.812523, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	5 Titik	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (lebar jalan < 4 meter.)	
88	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
89	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Komplek Perumahan Guru RT. 39 (Kelurahan Baru Ulu), Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
90	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jln.Letjen Suprpto RT.04 Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	P:122m L;2m	Peningkatan/Perkerasan/semenis asi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	
91	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Wolter Monginsidi RT 18, 21, 22, 23, 26, 31, 47, dan RT 49, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	Panjang 300 Meter Lebar 6 Meter Tebal 10 Cm	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	
92	Program Pemberdayaan Masyarakat	Jl. Kompleks Perumahan Guru RT 27 Kel.Baru Ulu, Kota	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	P. 120m L.1m	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Baru Ulu Yang Terlaksana			
93	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprpto Jalan Gang RT. 6, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana	P = 10 M L = 7 M	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	
94	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wolter Monginsidi RT. 53 -1.222688, 116.817221, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ulu Yang Terlaksana		Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	
Kelurahan Baru Tengah						
95	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT.05, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
96	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. 21 Januari Baru Arang RT.07 RT.08 RT.47, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
97	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jalan Sultan Hassanuddin RT 35 Kelurahan BaruTengah, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
98	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jl. sultan hasanuddin Gang Aman RT.19, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana	T = 4 M, P = 45 M	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	turap siring ulin rusak
99	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. 15 Oktober Gang Sepakat RT.15, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana		Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Penutup dan Drainase rusak
100	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjend Soeprpto RT.27, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana	P = 220 M, L = 0,5 M, T = 0,5 M	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	
101	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT.50, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana		Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	
102	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jl. Letjend Soeprpto RT.29, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Tengah Yang Terlaksana	P = 120 M L = 2 M	Peningkatan/Perkerasan/semenis asi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	
Kelurahan Baru Ilir						
103	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Letjen Suprpto RT 06 Kel Baru Ilir (- 1.234274,116.820708), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
104	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Gunung Gembira Rt 08 Kel Baru Ilir (- 1.232894,116.820718), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
105	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan /	Jl. Asrama Bukit RT 12 Kel Baru Ilir (- 1.230905,116.821426),	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Balikpapan				
106	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Karang Anyar RT 60 Kel Baru Ilir (- 1.240558,116.830767), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(SPGRM) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
107	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Adil Makmur RT 21 Kel Baru Ilir (- 1.232850,116.823774), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(SPGRM) Perbaikan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
108	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Gunung Gembira RT 04 Kel Baru Ilir (- 1.233978,11.819179), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
109	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Karang Anyar RT 47 Kel Baru Ilir (- 1.236911,116.829015), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
110	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Adil Makmur RT 21 Kel Baru Ilir (- 1.232850,116.823774), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Karang Anyar RT 53 Kel Baru Ilir (- 1.235993,116.829807), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan drainase dan selokan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
112	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Gunung Polisi RT 56 Kel Baru Ilir (- 1.239072,116.831185), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana		(Dana Kelurahan) Perbaikan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat	
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jl. gunung Polisi Rt 47 Kel Baru Ilir (- 1.235696,116.829064), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana	P: 200 M, L :2 M,	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	
114	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Gunung Polisi Rt 45 Kel Baru Ilir (- 11.235532,116.828581), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana	P: 200 M, L : 0,4 M, T: 0,4 M	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	
115	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Sultan Hasanuddin RT 02 Kel Baru Ilir (- 1.233168,116.818807), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana	P: 100 M, L : 1 M, T: 0,6 M	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase RT 02
116	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Sultan Hasanuddin RT 03 Kel Baru Ilir (- 1.233814,116.818870), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana	P: 200 M, L: 2-3 M	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan lingkungan RT 03
117	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Gunung Gembira RT 04 Kel Baru Ilir (- 1.233978,11.819179), Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baru Ilir Yang Terlaksana	P: 80 M, L: 0,75 M, T: 0,5 M	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase RT 04
Kelurahan Margomulyo						
118	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan	RT. 46 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	M2	Perbaikan Posyandu	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberdayaan Kelurahan					
119	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 11 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P : 12 M L : 4 M T : 4 M	Perbaikan Posyandu	
120	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 44 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	M2	Perbaikan Posyandu	
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 24 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P : 4 m L : 6 M T : 4 M	Perbaikan Posyandu	
122	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 38 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P : 4,5 M L : 1 M T : 0,8 M	Gorong-Gorong	
123	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 27 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	L : 5 M T : 4 M	Perbaikan Gapura	
124	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PKK Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	50 Orang	Pelatihan SDM Kader Posyandu	
125	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PPATBM Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	15 Orang	Pelatihan SDM Kader PPATBM	
126	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 11 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	2	PJU	
127	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 42 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	3	PJU	
128	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 18 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	7	PJU	
129	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 48 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	M2	Pelatihan Penjahit	
130	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 11 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	10 Orang	Pelatihan UMKM	
131	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 48 Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	10 Orang	Pelatihan ngelas (WELDER)	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	7
132	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 15 Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P: 100 M, L: 2 M, T: 1 M	Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Normalisasi Saluran Drainase SMAN 8
133	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 49 Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P: 70 M, L: 1,5 M, T: 1,7 M	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan Drainase
134	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 14, RT. 15, RT. 42, RT. 41, dan RT. 40 Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P: 800 M, L: 4 M, T: 0,05M	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Peningkatan Jalan Aspal (Jalan Tepian)
135	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 16 Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P: 125 M, L: 0,5 M, T: 0,6 M	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Drainase Baru
136	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 41 Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margomulyo Yang Terlaksana	P: 20 M, L: 2 M, T: 1,5 M	Pembangunan siring/turap pada pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Tambahan siring

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026, Tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementrian/lembaga dikarenakan Renstra Kecamatan hanya berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Barat

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”, dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Dari kelima misi di atas, ditetapkan Tujuan dari RPJMD yaitu *Tujuan kesatu*, Meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi, tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, *Tujuan kedua*, Meningkatkan SDM yang unggul, sehat dan berdaya saing, tujuan ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia, *Tujuan Ketiga*, Meningkatkan kinerja layanan infrastruktur perkotaan, yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, *Tujuan keempat*, Mewujudkan Lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan, yang diukur dengan indikator Indeks *Liveable City*, *Tujuan kelima*, Terciptanya pembangunan ekonomi inklusif, yang diukur dengan indikator “Indeks Gini”.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 maka Kecamatan Balikpapan Selatan secara fungsi dan tugas Kecamatan terkait erat dengan Misi ke-1, yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.

2.3.1 Tujuan

Dalam menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pelayanan publik, maka tujuan jangka menengah Kecamatan Balikpapan Barat adalah: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik, dengan Indikator Tujuan adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

2.3.2 Sasaran

Sasaran periode tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu *Sasaran kesatu*, Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum, sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. *Sasaran Kedua*, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yang akan

diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Balikpapan Barat.

Tabel 3.2

Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan				
VISI : TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN				
MISI I :				
1. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Kecamatan	Peningkatan fungsi fasilitasi koordinasi dan manajemen internal	Perbaikan tata kelola administrasi dan sarana-prasarana perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik baik dari segi SDM dan Sarana-Prasarana	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Perbaikan tata laksana penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	
			Pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi	
			Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik	
		Penguatan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kecamatan	Program pemberdayaan masyarakat dan kelurahan

		Fasilitasi kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Pembinaan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan lomba tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
		Tingkat pelaksanaan kegiatan trantibum di Kecamatan	Peningkatan koordinasi dan trantibum di Kecamatan yang Optimal	Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: *Renstra Kecamatan Balikpapan Barat 2021-2026*

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Progr am (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan				Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05	Kec. Balbar	Kec. Balbar
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80,16	80,36	80,46	80,51	80,56	80,61	80,61	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.02.2.04	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam	N/A	16%	17%	18%	19%	20%	20%	Kec. Balbar	Kec. Balbar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Progr am (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
				membangun kelurahan									
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.03.2.03.01	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.04.2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
	Meningkatnya Kualitas implementasi reformasi birokrasi di Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	N/A	27	27,25	27,5	28	28,25	28,25	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,15	68,5	69,00	69,50	70,00	70,50	70,50	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan	N/A	70	70,25	70,50	71	71,25	71,50	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	N/A	60	61	62	63	64	65	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	60	61	62	63	64	64	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	65	66	67	68	69	69	Kec. Balbar	Kec. Balbar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Progr am (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	65	66	67	68	69	69	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	65	66	67	68	69	69	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	65	66	67	68	69	69	Kec. Balbar	Kec. Balbar

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Barat yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Balikpapan Barat selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Renstra Kecamatan Balikpapan Barat 2021-2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT						22.997.566.898,00								24.759.397.025,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						22.347.566.898,00								23.959.397.025,00	
7.01		KECAMATAN						22.347.566.898,00								23.959.397.025,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				19.360.848.423,00								20.676.717.625,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				120.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat	-		117.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				63 Dokumen	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		70.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		47.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan	-			71 Poin	10.972.112.423,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat	-	11.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	10.972.112.423,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		11.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.119.519.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat	-	1.230.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan				71 Paket	119.519.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		130.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				102 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		1.100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-			68 Poin	2.200.778.850,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat	-	2.433.452.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	760.106.572,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	106.609.442,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	159.432.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		153.452.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	32.010.010,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		40.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	822.324.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat	-	1.395.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	822.324.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		1.395.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.326.035.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat	-	2.435.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				408 Laporan	409.552.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		470.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1.916.483.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-		Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat	1.965.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.800.078.650,00			-	-	-	-	2.066.265.625,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				44 Unit	634.466.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	44.113.950,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.265.625,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				142 Unit	120.230.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	1.001.268.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %			100 %	884.420.575,00						100 %	1.035.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	-			100 %	669.420.575,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan barat	-	780.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	302.420.575,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan barat		400.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	367.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Meningkatk an Kualitas Kota yang Berwawasa n Lingkungan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan barat		380.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan yang Ada di Kecamatan yang Berkualitas	-			100 %	40.000.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Meningkatk an Kualitas Kota yang Berwawasa n Lingkungan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	55.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Meningkatk an Kualitas Kota yang Berwawasa n Lingkungan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		30.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		25.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	-			100 %	175.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				250 Dokumen	175.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>	19 %			19 %	1.419.176.950,00						19 %	1.500.350.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana</i>	-			100 %	147.819.540,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saling	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				9 Lembaga Kemasyarakatan	861.007.410,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		850.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	360.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		380.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 Laporan	50.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Mewujudkan Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		70.350.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100 %			100 %	683.120.950,00						100 %	747.329.400,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	-			100 %	683.120.950,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	747.329.400,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	683.120.950,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		747.329.400,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	X	NON URUSAN						650.000.000,00							800.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						650.000.000,00							800.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	650.000.000,00						-	800.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			68 Poin	650.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat	-	800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57 Laporan	650.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keselamatan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat		800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
		KELURAHAN BARU ILIR						2.996.166.152,00						2.106.000.000,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2.996.166.152,00						2.106.000.000,00		
7.01		KECAMATAN						2.996.166.152,00						2.106.000.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-		-	2.996.166.152,00						-	2.106.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-		-	1.696.166.152,00			Membangun dan dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	786.000.000,00	KELURAHAN BARU ILIR
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				69 Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dan dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		36.000.000,00	KELURAHAN BARU ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				60 Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		25.000.000,00	KELURAHAN BARU TENGAH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	559.814.935,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		500.000.000,00	KELURAHAN BARU TENGAH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.108.290.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	1.120.000.000,00	KELURAHAN BARU TENGAH	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				54 Lembaga Kemasyarakatan	1.108.290.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		1.120.000.000,00	KELURAHAN BARU TENGAH	
		KELURAHAN BARU ULU						1.804.716.649,00							1.705.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.804.716.649,00							1.705.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN						1.804.716.649,00							1.705.000.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-	1.804.716.649,00						-	1.705.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	704.823.334,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	585.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					66 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		40.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					27 Unit	659.823.334,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		500.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		45.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.099.893.315,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembeda rantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	1.120.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					117 Lembaga Ke masyarakata n	1.099.893.315,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembeda rantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		1.120.000.000,00	KELURAHAN BARU ULU		
		KELURAHAN MARGASARI							1.253.126.297,00							1.445.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.253.126.297,00								1.445.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.253.126.297,00								1.445.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.253.126.297,00								1.445.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	544.130.939,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	666.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				36 Lembaga Kemasyarak atan	14.999.750,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		25.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	508.131.220,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		600.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	20.999.969,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		41.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	708.995.358,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	779.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				32 Lembaga Kemasyarakatan	699.999.903,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		750.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				52 Unit	8.995.455,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		29.000.000,00	KELURAHAN MARGASARI
		KELURAHAN MARGO MULYO						2.162.841.241,00							2.413.893.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.162.841.241,00							2.413.893.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.162.841.241,00							2.413.893.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.162.841.241,00						-	2.413.893.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.188.848.234,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	1.413.893.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				57 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		40.000.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				46 Unit	970.848.234,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		1.150.000.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	198.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		223.893.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
			-				-	973.993.007,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		1.000.000.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				57 Lembaga Kemasyarakatan	973.993.007,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		1.000.000.000,00	KELURAHAN MARGO MULYO	
		KELURAHAN KARIANGAU						1.253.814.930,00							1.170.958.500,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.253.814.930,00							1.170.958.500,00		
	7.01	KECAMATAN						1.253.814.930,00							1.170.958.500,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.253.814.930,00						-	1.170.958.500,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	851.703.290,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	750.958.500,00	KELURAHAN KARIANGAU	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga Kemasyarakatan	16.484.280,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		36.500.000,00	KELURAHAN KARIANGAU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				35 Unit	740.523.010,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		600.000.000,00	KELURAHAN KARIANGAU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	94.716.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		114.458.500,00	KELURAHAN KARIANGAU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-			-	402.111.640,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat	-	420.000.000,00	KELURAHAN KARIANGAU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				20 Lembaga Kemasyarakatan	402.111.640,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembre rantasan Kemiskinan	2. Peningka tan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkat an Pemerat aan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat		420.000.000,00	KELURAHAN KARIANGAU
J U M L A H								34.157.337.102,00							35.245.248.525,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021 – 2026. Dimana Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024 ini terdiri dari 4 Program dan 11 Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Kecamatan Balikpapan Barat yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Serta untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Barat, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Ranwal Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2021 – 2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Seksi baik di Kelurahan maupun yang ada di Kecamatan;
2. Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari

APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

3. Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Kecamatan Balikpapan Barat);
4. Didalam penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024 masih belum sempurna, terkait dengan pemahaman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
5. Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2024 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Balikpapan Barat dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Barat perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien;
2. Perlu adanya penetapan *reward and punishment* terhadap seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Barat;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
4. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Barat , maka seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Barat secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.

CC. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah.

Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Secara legal dan formal penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. tahun 2024 ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Stategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2025 ;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PrioritasPlafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD berjalan. Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap RENJA, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

BAB III HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun Lalu mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023. Adapun realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah

No	URAIAN	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	11.726.368.800,00	11.605.353.730,00	98,97
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	580.843.400,00	570.938.300,00	98,29
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	455.809.400,00	451.569.250,00	99,07
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	297.038.900,00	293.831.625,00	98,92
1.1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	158.770.500,00	157.737.625,00	99,35
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	58.950.000,00	55.203.675,00	93,64

No	URAIAN	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
1.1.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.950.000,00	55.203.675,00	93,64
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	66.084.000,00	64.165.375,00	97,10
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	66.084.000,00	64.165.375,00	97,10
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.247.173.700,00	10.169.224.205,00	99,24
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.271.118.000,00	5.236.583.062,00	99,34
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	329.255.000,00	323.307.000,00	98,19
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	43.279.200,00	42.604.900,00	98,44
1.2.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	118.985.000,00	116.852.300,00	98,21
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.779.598.800,00	4.753.818.862,00	99,46
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.976.055.700,00	4.932.641.143,00	99,13
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4.462.606.900,00	4.425.198.743,00	99,16
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	359.217.000,00	356.390.400,00	99,21
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	154.231.800,00	151.052.000,00	97,94
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	898.351.700,00	865.191.225,00	96,31
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	898.351.700,00	865.191.225,00	96,31
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	898.351.700,00	865.191.225,00	96,31

No	URAIAN	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	17.490.419.400,00	16.302.205.332,00	93,21
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.490.419.400,00	16.302.205.332,00	93,21
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.519.553.200,00	9.648.503.854,00	91,72
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.519.553.200,00	9.648.503.854,00	91,72
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.045.861.450,00	3.004.638.288,00	98,65
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.951.500,00	34.910.000,00	99,88
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.636.558.400,00	1.616.233.000,00	98,76
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.581.100,00	582.825.200,00	97,04
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.155.000,00	176.772.500,00	98,67
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	131.420.000,00	131.134.000,00	99,78
2.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.500.000,00	11.466.000,00	99,70
2.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	451.695.450,00	451.297.588,00	99,91
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.000.000,00	232.500.000,00	99,79
2.1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00
2.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	7.500.000,00	93,75
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.134.397.000,00	1.959.283.935,00	91,80
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426.952.000,00	306.224.860,00	71,72
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.707.445.000,00	1.653.059.075,00	96,81
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.557.607.750,00	1.457.279.255,00	93,56

No	URAIAN	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	285.646.000,00	245.832.017,00	86,06
2.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.269.750,00	176.047.243,00	78,15
2.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.800.000,00	239.150.150,00	96,90
2.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	799.892.000,00	796.249.845,00	99,54
TOTAL		29.216.788.200,00	27.907.559.062,00	95,52

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 49 (Empat puluh sembilan) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebesar Rp. 29.216.778.200,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 27.907.559.062,- (95,52 %).

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86.63	83,57	96.47
2.	Meningkatnya Kualitas Akuintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	70.15	65.56	93.46

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2022 dalam kategori **berkinerja Sangat Baik** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pencapaian Sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 96,47% atau predikat “*Sangat Tinggi*”.

- b. Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah mencapai 93,46% atau predikat “*Sangat Tinggi*”.

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Program yang Memenuhi Target

Sebanyak 2 program yang memenuhi target ditentukan yaitu program pemerintahan dan pelayanan publik dan program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.

- b. Program yang Melebihi Target

Sebanyak 2 program yang melebihi target yang ditentukan yaitu Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2024)							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Progm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4						
		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														
		Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas														
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen				5	5	100	5	5	100
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen				300	82	27,33	300	82	27,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2024)						
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Progm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	12,75	23,37	23,37	23,7	23,7	23,37	23,7	23,7
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas			10	10	100	10	10	100
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Laporan			4	4	100	4	4	100
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	jumlah lembaga			450	450	100	450	450	100

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2024)		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Progm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7	01	03	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit			945	945	100	945	945	100
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	ormas			341	341	100	341	341	100
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan			2	2	100	2	2	100
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan			2	2	100	2	2	100

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2024)		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Progrm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas degan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan			16	16	100	16	16	100
					Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	71,18	69,97	70,15	65,56	93,46	70,15	65,56	93,46

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2024)						
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Progm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70,6	79,44	70,15	77,31	110,2	70,15	77,31	110,2
7	01	01	2.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	71,18	69,97	70,15	65,56	93,46	70,15	65,56	93,46
7	01	01	2.02	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-	-			-
7	01	01	2.05		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	70,6	83,25	70,15	78,16	111,42	70,15	78,16	111,42
7	01	01	2.05	0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang			51	54	105,88	51	54	105,88
7	01	01	2.05	0011	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	70,6	-	70,15	80,81	115,2	70,15	80,81	115,2

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2024)		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Progm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	70,6	75,04	70,15	73,31	104,5	70,15	73,31	104,5
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket			1	1	100	1	1	100
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			7	7	100	7	7	100
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket			7	7	100	7	7	100
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket			2	2	100	2	2	100

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2024)			
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Progm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3			4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			22.900	22.900	100	22.900	22.900	100	
X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah klaporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			5	5	100	5	5	100	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			10	10	100	10	10	100	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	70,6	81,25	70,15	75,94	108,25	70,15	75,94	108,25	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			1	1	100	1	1	100	

Kode	Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2024)							
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Progm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3			4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit			1	1	100	1	1	100	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	70,6	79,03	70,15	79,67	113,57	70,15	79,67	113,57	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan			12	12	100	12	12	100	
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan			12	12	100	12	12	100	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	70,6	78,63	70,15	75,94	108,25	70,15	75,94	108,25	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd tahun berjalan (2024)		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Progm dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit			12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit			29	29	100	29	29	100
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit			210	209	99,52	210	209	99,52
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit			6	6	100	6	6	100

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Thn 2020 (n-2)	Thn 2021 (n-1)	Thn 2022 (n)	Thn 2023 (n+1)	Thn 2020 (n-2)	Thn 2021 (n-1)	Thn 2022 (n)	Thn 2023 (n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			80,55	80,75	80,85	81	80,70	84,13	86,63	86,63		
2	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah			N/A	N/A	70,00	70,15	69,93	N/A	69,97	65,56		

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016. Adapun isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah antara lain :

1. Pelayanan Publik
 - a. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas
 - b. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik

- c. Digitalisasi dan berbagai layanan baik di Kecamatan maupun di Kelurahan
 - d. Tuntutan Pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat yang normal, kebutuhan khusus, pra sejahtera, kesetaraan gender hingga keterbatasan pemahaman online
2. Penyelenggaraan Pembangunan
- a. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara
 - b. Terbatasnya anggaran hingga kurangnya dukungan kepedulian warga tentang fasilitas umum
 - c. Terdapat daerah yang rawan bencana baik, banjir, tanah longsor maupun bencana lainnya
3. Keamanan dan Ketertiban Umum Lingkungan
- a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup
 - b. Diperlukan sinergitas berbagai instansi dan kalangan dalam menjaga secara bersama keamanan yang kondusif
4. Pemberdayaan Masyarakat
- a. Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat
 - b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
 - c. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
 - d. Diperlukannya sinkronisasi pengurusan ijin usaha dari aturan pusat hingga ke daerah
5. Tertib Administrasi Pemerintahan dan pertanahan
- a. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah/ tumpang tindih
 - b. Terbatasnya sarana pendukung baik secara administrasi maupun sarana lainnya yang mendukung tertib administrasi dan lokasi tanah

6. Manajemen Internal

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
- b. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan kurang memadai
- c. Terbatasnya anggaran pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
- d. Perubahan aturan yang harus disinergikan dengan kondisi masyarakat maupun wilayah kerja.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas Staf yang kurang memadai
2. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan dan Kelurahan.
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan;
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini.
5. Kecamatan Balikpapan Tengah telah ditetapkan sebagai perangkat daerah yang termasuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga perlu kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkan Kecamatan Balikpapan Tengah berzona Integritas.
6. Data aset Kecamatan Balikpapan Tengah yang belum tersusun dengan baik.
7. Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yang disebabkan Persepsi yang belum sama antar Pelaku Pembangunan terhadap konsepsi Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
8. Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kelurahan Mekar Sari yang masih menyewa/belum kembali dibangun oleh Pemerintah.

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong bagi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat struktural dengan para staf Kelurahan dan Kecamatan agar tercipta suasana kerja dan pelayanan publik yang harmonis dan kondusif;
2. Koordinasi yang baik dan kepedulian dari lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan swasta yang baik dalam membantu dan mendukung peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
3. Tuntutan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai baik secara klasikal maupun dalam jaringan (daring).
5. Akses informasi yang cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
7. Tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat sebagai pendorong usaha mikro kecil menengah ke atas.

3.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses rancangan RENJA Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kota Balikpapan ditetapkan. Selain ini dalam Menyusun rancangan RENJA SKPD juga mendasari pada Renstra 2021 – 2026 yang telah disahkan pula. Hal tersebut sebagai dasar dalam Menyusun Program dan kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 dimana besaran anggaran yang direncanakan Kecamatan Balikpapan Tengah disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Kecamatan Balikpapan

Tengah dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD

Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan :

Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kota Balikpapan

Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting	
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH				34.990.919	
7							KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH				36.900.194	
7	01						UNSUR KEWILAYAHAN				34.990.919	
7	01						UNSUR KEWILAYAHAN				36.900.194	
7	01						KECAMATAN				34.990.919	
7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70.45 Poin	19.421.156
7	01	01	2.0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70.45 Poin	19.934.826
7	01	01	2.0				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Kecamatan	70.93 Poin	0
7	01	01	2.0				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Kecamatan	70.93 Poin	28.040
7	01	01	2.01	0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan Tengah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0
7	01	01	2.01	0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan Tengah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	28.040
7	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,45 Poin	10.719.600
7	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,45 Poin	10.712.036
7	01	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan Tengah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	10.719.600
7	01	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan Tengah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	10.712.036
7	01	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	70,45 Poin	839.616
7	01	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	70,45 Poin	839.616
7	01	01	2.05	0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan Tengah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64 Paket	79.616
7	01	01	2.05	0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan Tengah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64 Paket	79.616
7	01	01	2.05	0001			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan Tengah		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	760.000
7	01	01	2.05	0001			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan Tengah		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	760.000
7	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70,45 Poin	2.839.290
7	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70,45 Poin	3.220.342
7	01	01	2.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan Tengah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	65.350
7	01	01	2.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan Tengah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	85.267
7	01	01	2.06	0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan Tengah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	350 Paket	815.440
7	01	01	2.06	0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan Tengah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	350 Paket	1.090.278
7	01	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan Tengah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	845.600
7	01	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan Tengah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	894.304
7	01	01	2.06	0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan Tengah		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	281.300
7	01	01	2.06	0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan Tengah		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	281.299
7	01	01	2.06	0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan Tengah		Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22900 Dokumen	131.500
7	01	01	2.06	0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan Tengah		Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22900 Dokumen	131.499

Rancangan Awal RKPDP 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting			
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Undangan yang Disediakan					Undangan yang Disediakan				
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.100	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	44.820
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	650.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	692.872
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.45 Poin	413.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.45 Poin	413.354
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikipapan Tengah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	240.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikipapan Tengah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	173.354
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	173.400	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	240.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.45 Poin	2.814.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.45 Poin	2.808.840
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	460.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	474.408
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.354.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.334.432
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.45 Poin	1.794.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.45 Poin	1.912.598
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikipapan Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	743.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikipapan Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	743.007
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikipapan Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	232 Unit	300.950	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikipapan Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	232 Unit	353.808
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikipapan Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikipapan Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	716.804
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikipapan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikipapan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	98.979

Rancangan Awal RKPД 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025						Catatan Penting		
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
7	0	0	2									12		
7	01	02	2.01	0001	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Balikpapan Tengah	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	815.433	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Balikpapan Tengah	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	815.413
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	100 %	593.175	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	100 %	593.174
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Balikpapan Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	235.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Balikpapan Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	234.999
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Balikpapan Tengah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	358.175	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Balikpapan Tengah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	358.174
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	100 %	137.258	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	100 %	137.240
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Balikpapan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	137.258	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Balikpapan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	137.240
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilyanai Sesuai Standar Pelayanan	100 %	85.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilyanai Sesuai Standar Pelayanan	100 %	84.999
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Balikpapan Tengah	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	300 Dokumen	85.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Balikpapan Tengah	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	300 Dokumen	84.999
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75 %	2.200.183	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75 %	2.669.680
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	100 %	138.183	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	100 %	138.181
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	30 Lembaga Kemasyarakatan	77.183	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	30 Lembaga Kemasyarakatan	77.182

Rancangan Awal RKPDP 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting			
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Pembangunan di Kelurahan					Pembangunan di Kelurahan				
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	61.000	Evaluasi Kelurahan	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	60.999
7	01	03	2.03	0001	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		Persentase Keaktifan Masyarakat Di Kecamatan	100 %	2.062.000	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		Persentase Keaktifan Masyarakat Di Kecamatan	100 %	2.531.499
7	01	03	2.03	0004	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Balikipapan Tengah	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	2 Lembaga Masyarakat	1.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Balikipapan Tengah	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	2 Lembaga Masyarakat	1.569.499
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	500.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	600.000
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	362.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	362.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100 %	899.600	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100 %	899.059
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	100 %	899.600	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	100 %	899.059
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 Laporan	899.600	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Balikipapan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 Laporan	899.059
					KELURAHAN GUNUNG SARI ULU				1.652.600	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU				1.807.802
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75 %	1.652.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75 %	1.807.802
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	100 %	760.500	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	100 %	915.870
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ulu	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 Lembaga Masyarakat	23.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ulu	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 Lembaga Masyarakat	23.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit	548.567	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit	611.807

Rancangan Awal RKPД 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025						Catatan Penting		
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	188.933	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	281.063
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Semua Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	044 Lembaga Kemasyarakatan	892.100	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Semua Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	044 Lembaga Kemasyarakatan	891.932
						KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR			2.380.797	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR				2.536.261
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	73 Lembaga Kemasyarakatan	28.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	73 Lembaga Kemasyarakatan	27.999
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	56 Unit	810.497	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	56 Unit	965.996
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	133.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	133.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	71 Lembaga Kemasyarakatan	1.409.300	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	71 Lembaga Kemasyarakatan	1.409.265
						KELURAHAN KARANG REJO			2.684.500	KELURAHAN KARANG REJO				2.839.973
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	71 Lembaga Kemasyarakatan	2.684.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	71 Lembaga Kemasyarakatan	2.839.973
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	71 Lembaga Kemasyarakatan	943.100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Gunung Sari Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	71 Lembaga Kemasyarakatan	1.098.574

Rancangan Awal RKPDP 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025						Catatan Penting		
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	91 Lembaga Kemasyarakatan	35.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	91 Lembaga Kemasyarakatan	34.982
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	76 Unit	788.100	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	76 Unit	943.591
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	120.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	119.999
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	89 Lembaga Kemasyarakatan	1.741.400	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	89 Lembaga Kemasyarakatan	1.741.399
					KELURAHAN KARANG JATI				1.404.400	KELURAHAN KARANG JATI				1.559.833
7	01	03	2.03	0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75 %	1.404.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75 %	1.559.833
7	01	03	2.02	0001	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Kegiatan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	100 %	659.800	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Kegiatan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	100 %	815.245
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Jati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37 Lembaga Kemasyarakatan	20.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Jati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37 Lembaga Kemasyarakatan	19.999
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Jati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	56 Unit	529.800	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Jati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	56 Unit	685.273
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Jati	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	110.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Jati	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	109.972
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan Tengah,	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	35 Lembaga Kemasyarakatan	744.600	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan Tengah,	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	35 Lembaga Kemasyarakatan	744.588

Rancangan Awal RKPД 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting			
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									Karang Jati					
					KELURAHAN MEKAR SARI			1.517.200		KELURAHAN MEKAR SARI			1.666.866	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.517.200		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.666.866	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	100 %	699.800		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	100 %	847.216	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	41 Lembaga Kemasyarakatan	20.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	41 Lembaga Kemasyarakatan	20.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	529.800	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	341.216
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	150.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	485.999
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	100 %	817.400	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	100 %	819.650
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	39 Lembaga Kemasyarakatan	817.400	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	39 Lembaga Kemasyarakatan	819.650
					KELURAHAN SUMBER REJO					KELURAHAN SUMBER REJO			2.170.481	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75 %	2.015.050	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75 %	2.170.481
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	100 %	790.750	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	100 %	946.181
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63 Lembaga Kemasyarakatan	25.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63 Lembaga Kemasyarakatan	24.995
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	585.250	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	771.186
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	180.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	150.000

Rancangan Awal RKPД 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting			
Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
7	0	0	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	100 %	1.224.300		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	100 %	1.224.300
7	01	03	2.03	000 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61 Lembaga Kemasyarakatan	1.224.300	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61 Lembaga Kemasyarakatan	1.224.300
J U M L A H								34.990.919					36.900.200	

Berdasarkan hasil review pada tabel 2.5 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah kegiatan yang telah tercantum pada Rancangan Akhir RKPD adalah sebanyak 4(empat) Program 12(dua belas) kegiatan dengan 53(lima puluh tiga) Sub Kegiatan Berdasarkan evaluasi, masukan dan saran melalui Forum Perangkat Daerah jumlah kegiatan pada rancangan akhir RKPD tetap 4(empat) Program 12(dua belas) kegiatan dengan 53(lima puluh dua) Sub Kegiatan.
2. Dalam hal perencanaan anggaran, masih dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan.

3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang terkait tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah diperoleh melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan dan Kota. Hasil Musrenbang Kecamatan berupa usulan Prioritas Musrenbang yang disampaikan oleh masing-masing Kelurahan pada saat Forum SPKD/Musrenbang Kota yang diselenggarakan pada tanggal Fisik yang diselenggarakan Tahun 2024. Terdapat beberapa usulan dari delegasi Kelurahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan tengah sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Balikpapan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
1	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	JALAN BERLUBANG SEDALAM HAMPIR 1 METER	JL. DR. SUTOMO RT 64, Kota Balikpapan	Karang Rejo	prioritas dana kelurahan	1	Paket
2	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan masih berupa tanah, p: 75 m, l: 2 m, t: 0,10 m	RT.02 - 1.260729, 116.846395, Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas SPGRM Kelurahan	150	Meter /2
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	Belum memiliki poskamling, p : 2 m , l: 2 m t: 2,5 m	RT.06 , - 1.260707, 116.845008 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas SPGRM Kelurahan	10	Meter /2

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
4	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Atap dan dinding bangunan poyandu rusak, p: 4 m l: 4 m , t: 3 m	RT.08 Gg.Nasri, - 1.262232, 116.839921 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas SPGRM Kelurahan	48	Meter /2
5	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Lantai dan Dinding parit rusak, p:60 m, l:0,5 m , t: 1 m	RT.14 Gg.Sampurna , -1.258665, 116.846213, Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas SPGRM Kelurahan	30	Meter /2
6	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	JALANAN PECAH DAN JALANAN RUSAK	JL. KARANG REJO II RT. 11 KEL. KARANG REJO, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
7	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	JALANAN PECAH PECAH DAN SIRING JALAN RUSAK	JL. DR. SUTOMO RT. 14 KEL. KARANG REJO, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
8	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Lantai dan Dinding parit rusak, p: 100 m , l: 0,30 m, t: 0,40 m	RT.17 Gg. Tiga, - 1.258456, 116.841669 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas SPGRM Kelurahan	300	Meter /2
9	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	jalan , pecah-pecah rusak dan berlubang	jl. p. antasari rt. 04 kel. karang rejo, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
10	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	perbaikan jalan rusak pecah-pecah dan berlubang	jl. swadaya rt. 36 kel. karang rejo, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
11	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	atap, plafon, lantai dan dinding posyandu perlu perbaikan P: 5 M , L: 2 M , T: 3M	RT.30 ,- 1.256581, 116.847805, Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas SPGRM Kelurahan	10	Meter /2
12	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Jalan Lingkungan Gelap, jumlah: 5 titik	RT.30 ,- 1.256581, 116.847805 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas Dana Kelurahan	5	Titik
13	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	lokasi jalan menurun ketika hujan air menggerus tanah dan menyebabkan longsor, p: 80 m, l: 0,4 m, t: 0,4 m	RT.39, - 1.252306, 116.850863, Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas SPGRM Kelurahan	32	Meter /2
14	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Belum ada bangunan posyandu p: 2 m, l: 2 m, t: 3 m	RT.40, - 1.255187, 116.852269 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas SPGRM Kelurahan	12	Meter /2
15	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Belum ada bangunan posyandu p: 6 m, l: 4 m, t: 3 m	RT.41, - 1.255187, 116.852269 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas SPGRM Kelurahan	72	Meter /2
16	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Pembangunan Gorong-gorong	Gang Dayaksa RT.01 Gunung Sari Iilir, Kota Balikpapan	Gunung sari Iilir	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
17	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Tingkat literasi masyarakat rendah sehingga perlunya pelatihan pemberdayaan literasi media dan informasi	Kampung Pustaka RT.16 , - 1.258722, 116.842895 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
18	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Belum efektifnya upaya pencegahan pernikahan dini dan kasus LGBT perlu Edukasi Pendidikan Seks Usia Dini	Kampung Pustaka RT.16 , - 1.258722, 116.842895 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
19	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Tingginya kenakalan pada anak karena pola asuh yang kurang tepat, perlu Pelatihan Bersama Lindungi Anak	Kelurahan Gunung Sari Ulu , - 1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
20	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Belum terfasilitasinya penggiat batik. Pelatihan Mambatik	Kelurahan Gunung Sari Ulu , - 1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
21	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	Banyak pelaku umkm belum memiliki legalitas dan tidak memenuhi standar produksi. Pelatihan pengembangan kompetensi pelaku UMKM	Kelurahan Gunung Sari Ulu , - 1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
22	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Belum adanya kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan seluruh stakeholder kelurahan. Pelatihan Capacity Building	Kelurahan Gunung Sari Ulu , - 1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
23	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Belum adanya edukasi penanganan dan pencegahan bullying dan kesadaran kesehatan mental anak. Penguatan peran anak sebagai pelopor dan pelapor dalam penanganan Bullying dan Kesehatan Mental	Kelurahan Gunung Sari Ulu , - 1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
24	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Belum optimalnya dukungan terhadap pengrajin sulam tumpat di kelurahan gunung sari ulu. Pelatihan Sulam Tumpar	Kelurahan Gunung Sari Ulu , - 1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan	Gunung sari Ulu	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
25	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase RT.6 (Perbatasan RT.6 &7) dengan Volume P=20 M L= 1 M	Perbatasan RT.06 dan RT.07, Kota Balikpapan	Gunung sari Ilir	Prioritas SPGRM Kelurahan	20	Meter /2
26	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Program peningkatan jalan lingkungan, penigkatan Jalan yaitu Semenisasi Jalan yang rusak dengan volume P= 15 M L= 4 M	RT.09 Kelurahan Gunung Sari ilir, Kota Balikpapan	Gunung sari Ilir	Prioritas dana kelurahan	60	Meter /2
27	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Pelatihan Membatik	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
28	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Pelatihan Menjahit	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
29	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Pelatihan Tata Rias	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
30	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	Pelatihan Hidroponik	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
31	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Pelatihan Fardu Kifayah	Kelurahan Mekar Sari , Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
32	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
33	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Usia Remaja	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
34	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Pelatihan Olahan Makanan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	prioritas dana kelurahan	1	Paket
35	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Terdapat usulan masyarakat melalui Ketua RT jalan yang terlalu sempit bila perpapasan antar pengguna kendaraan bermotor sehingga masyarakat mengusulkan untuk dilakukan pelebaran jalan lingkungan Jalan Merdeka. (P= 30 M, L= 3 M, T= 30 CM)	Jl.Merdeka RT.19 Gg.Jurang , Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	90	M2
36	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Terdapat usulan masyarakat melalui Ketua RT yakni Perbaikan siring dikarenakan kondisi siring sudah lapuk termakan	Jl.RE Martadinata RT.19 Gg.Jurang, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
			usia padahal jalan lingkungan seringkali dilewati oleh warga. (P: 30 M, L:3 M, T: 30 CM)					
37	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Pelatihan Ecoprint Jumlah peserta 30 orang (peserta kader PKK Kelurahan dan kader RT)Tempat Pelatihan : SMKN 4 Balikpapan Estimasi biaya Pelatihan : Rp. 15.000.000,-	SMKN 4 Balikpapan, Kota Balikpapan	Gunung sari Ilir	Prioritas Dana Kelurahan	30	Orang /Kali
38	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	Pelatihan Manajerial / Entreprenur; Marketing, Promo, teknik marketing, iklan. Jumlah peserta 30 orang (peserta kader PKK Kelurahan dan kader RT) Estimasi biaya Pelatihan : Rp. 15.000.000,-	Tempat Pelatihan : SMKN 4 Balikpapan, Kota Balikpapan	Gunung sari Ilir	Prioritas Dana Kelurahan	30	Orang /Kali
39	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	perbaikan parit dan pengurukan Rt 45 tepatnya didepan rumah no 37 kel gsi ukuran panjang 5 m lebar 1 m	RT.45, Kota Balikpapan	Gunung sari Ilir	Prioritas dana Kelurahan	5	Meter /2
40	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Lantai dan dinding drainase rusak karena termakan usia sehingga air mengalir tidak terarah, Apabila Hujan air meluap ke Jalan, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. (P: 50 M, L: 30 Cm)	Jl.Hendriawan Sie RT.30, - 1.261434,116 .8372757, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas SPGRM kelurahan	50	meter

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
41	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Badan jalan terdapat beberapa titik kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. (P:60 M, L: 3 M T:10 Cm)	Jl.RE Martadinata RT.25 Gg.Advokat, - 1.2573091,11 6.8374375, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana SPGRM Kelurahan	180	Meter /2
42	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Lantai dan dinding drainase banyak yang mengalami kerusakan, kemudian apabila hujan air meluap ke badan jalan. (P: 25 M, L: 60 M, T:40 Cm)	Jl.RE Martadinata RT.27 Gg.Advokat, - 1.2579459,11 6.8367161, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas SPGRM Kelurahan	1500	Meter /2
43	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Perlu dilakukan penutupan drainase karena area tersebut sering digunakan anak2 bermain dikhawatirkan apabila tidak ditangani akan membahayakan anak-anak takut akan jatuh ke parit dengan kedalaman 3 meter.	Jl.RE Martadinata RT.21 Gg.Masjid Al-Islamiah, - 1.259694,116 .835756, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas SPGRM Kelurahan	1	Paket
44	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan existing berupa jalan alami dan merupakan jalan alternatif bagi pejalan kaki guna kenyamanan warga maka perlu dilakukan perbaikan/peningkatan jalan.(P: 50 M, L:2 M, T:10 Cm)	Jl.Merdeka RT.36 Gg.Al Mutaqqin III, - 1.2590811,11 6.8313789, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas SPGRM Kelurahan	100	Meter /2
45	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan lingkungan perlu dilakukan perbaikan, jalan merupakan jalan alternatif yang hanya bisa digunakan oleh pengguna jalan kaki.	Jl.Cemara RT.33, - 1.2601162,11 6.8381727, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas SPGRM Kelurahan	107	Meter /2

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
			(P: 53,50 M, L: 2 M)					
46	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Penerangan Jalan Pemukiman RT.19	Jl.Merdeka RT. 19, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
47	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Penerangan Jalan Pemukiman RT.01	Jl.Sultan Alauddin RT.01, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
48	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Belum pernah diadakan Pelatihan Membuat Jamu Tradisional di PKK Kelurahan Karang Jati	JL. Jend.A.Yani RT 13 NO 593, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
49	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Parit/Seloka rusak P = 20m L = 50 cm T = 5 cm	Jl. Panorama Atas RT. 19 di samping sumur di belakang rumah warga No. 63, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas Dana Kelurahan	25	meter
50	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	JALANAN RETAK, PECAH DAN BERLUBANG	JL. WIRASWATA I RT. 70, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
51	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	pembuatan drainase jalan	jl. sulawesi rt. 34 kel. karang rejo, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
52	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	jalan rusak dan pecah pecah L = 100 m2	Gang Hidayah Jl. Sultan Alauddin RT. 01, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas SPGRM Kelurahan	1	Paket
53	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	perbaikan drainase rusak dan pecah	jl. p. antasari rt. 65, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
54	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	pelatihan intimidasi bencana	jl. p. antasari rt. 63 aula kelurahan karang rejo, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
55	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	pemasangan PJU	RT. 01 - RT. 88, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
56	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	SIRING JALAN AMBROL	JL. JEND. A. YANI RT. 24, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
57	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	PEMELIHARAAN POSYANDU	JL. RAMBUTAN RT. 10 KELURAHAN KARANG REJO, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
58	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	peningkatan drainase/parit di gang keramik RT. 04 P = 80 m L = 30 cm T = 30 cm	Jl. Jendral Ahmad Yani gang keramik RT. 04, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas Dana Kelurahan	7200	meter

NO	PROGRAM/KEGI- ATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELUR AHAN	REKOM ENDASI SKPD	VOL UME	SATU AN
59	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningk atan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	semenisasi jalan di gang janur sari RT. 04 P= 80 m L= 20 m T= 10 cm	Jl. Jendral Ahmad Yani gang janur sari RT. 04, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas Dana Keluraha n	1600	meter
60	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningk atan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Lantai drainase terdapat banyak kerusakan sehingga air mengalir dan telah menggerus tanah dibawah badan jalan, sehingga perlu penanganan perbaikan drainase dan pekerjaan siring jalan lingkungan. (P: 70 M, L:0,40 M, T: 12 Cm)	Jl.RE Martadinata RT.17 Gg.Anggur/Ju rang, - 1.257698,116 .83285, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana keluraha n	1	Paket
61	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningk atan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	jalan rusak dan pecah pecah, jalan mulai hancur (300m x 120cm)	Samping pos kamling RT. 20. Jl. Pantas No. 34 sampai No. 40, No. 08 dan No. 20 RT. 20, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas Dana Keluraha n	360	meter
62	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pemelih araan Posyandu Kelurahan	pemeliharaa an atap posyandu RT. 21	Jl. Karang Jati Dalam RT. 21, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas SPGRM Keluraha n	1	Paket
63	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Mudahnya anak-anak mengakses informasi dari internet dan social media mengakibatk an anak- anak berpotensi terpapar konten pornografi, kekerasan, dan hoax. Selain itu anak-anak yang saat ini cenderung menyukai bermain gadget atau smartphone dibanding	Forum Anak Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana keluraha n	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
			bermain bersama dengan teman-temannya					
64	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	peningkatan pemberdayaan kader lansia wilayah kelurahan karang jati	puskesmas kelurahan karang jati Jl. sultan alauddin, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
65	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	perbaikan jalan yang tidak rata di RT. 12 (15m x 20m)	Jl. Karang Jawa RT. 12 No. 15, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas SPGRM Kelurahan	1	Paket
66	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	jalan umum kecil sehingga dibutuhkan semenisasi pelebaran jalan di RT. 12 (5m x 20m)	Lapangan voli di Jl. Karang Jawa RT. 12, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas Dana Kelurahan	100	meter
67	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Perlunya dilakukan pelatihan terhadap personil KATANA Kelurahan guna mendukung kesiapsiagaan personil dalam penanganan bencana	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
68	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Setiap kali diselenggarakan kegiatan MTQ, namun tidak dilakukan pembinaan atau pelatihan terhadap TPA/TPQ untuk persiapan mengikuti kegiatan tersebut, sehingga	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
			berdampak minimnya peserta dari Kelurahan Mekar Sari yang mengikuti MTQ					
69	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	renovasi posyandu dan poskamling di RT. 07	Jl. Karang Jawa RT. 07, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas SPGRM Kelurahan	1	Paket
70	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	pemeliharaan PJU 30 titik di Kelurahan Karang jati	Kelurahan karang Jati, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas Dankel 1	30	Titik
71	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	pelatihan penanaman buah dalam pot (tabulampot) Anggur	Kantor kelurahan karang jati Jl. Jend. A. Yani Rt. 13 No. 593, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas Dana Kelurahan	30	Orang /Kali
72	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	Pelatihan pengembangan budidaya ikan lele	Kantor kelurahan karang jati Jl. Jend. A. Yani Rt. 13 No. 593, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
73	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	perbaikan posyandu dan poskamling	Jl. Karang Jati Dalam RT. 15, Kota Balikpapan	Karang Jati	null	1	Paket
74	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	renovasi posyandu RT. 18	Jl. Karang Jati Dalam RT. 18, Kota Balikpapan	Karang Jati	Prioritas SPGRM Kelurahan	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
75	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Sumber daya keterampilan ustadz/ustadzah yang masih belum maksimal, perlu adanya pelatihan/pe mbinaan yang rutin untuk meningkatkan sumber daya manusia (Usulan Majelis TK/TPA Kelurahan)	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Mekar Sari	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
76	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Pembuatan Drainase volume P = 50m, L = 40cm	Jl. S Parman RT. 23, Kota Balikpapan	Sumber Rejo	Prioritas dana kelurahan	50	Meter /2
77	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Atap posyandu Rusak volume P = 6m, L = 4m	Jl. D.I. Panjaitan RT. 26 , Kota Balikpapan	Sumber Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
78	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Rusak volume P = 120m, L = 100m	Jl. D.I. Panjaitan RT. 29 1.249851, 116.845835, Kota Balikpapan	Sumber Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
79	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase volume P = 100m, L = 50cm, T = 50cm	Jl. Sungai Ampall RT. 43 , Kota Balikpapan	Sumber Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
80	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Sertifikasi Pekerjaan Lapangan	Jl. Sumber Rejo I RT 34, Kota Balikpapan	Sumber Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
81	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Pelatihan Pengolahan Sampah 1 Paket	Jl. Sumber Rejo I RT 34, Kota Balikpapan	Sumber Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
82	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Pelatihan Digitalisasi 1 Paket	Jl. Sumber Rejo I RT 34, Kota Balikpapan	Sumber Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
83	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Pelatihan Kader PKK Kelurahan Gunung Sari Ilir	Kelurahan Gunung Sari Ilir , Kota Balikpapan	Gunung sari Ilir	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket
84	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	PERBAIKAN JALAN PECAH DAN BOLONG	RT. 82, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
85	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	PERBAIKAN DRAINASE DAN SIRINGNYA	JL. KARANG REJO II RT. 09, Kota Balikpapan	Karang Rejo	Prioritas dana kelurahan	1	Paket
86	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Pelatihan Khusus Disabilitas. Pelatihan membuat anyaman bambu dan manik-manik. kurang lebih 20 orang usia produktif	Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Gunung sari Ilir	Prioritas Dana Kelurahan	20	Orang /Kali
87	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Pelatihan Mesin Las dan Mesin Bubut bagi warga kurang mampu / yang tidak dapat melanjutkan Kuliah/ Putus sekolah.	Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Gunung sari Ilir	Prioritas Dana Kelurahan	1	Paket

NO	PROGRAM/KEGI- ATAN/SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELUR AHAN	REKOM ENDASI SKPD	VOL UME	SATU AN
88	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	Pelatihan Mengemudi	Gunung Sari Iilir, Kota Balikpapan	Gunung sari Iilir	Prioritas Dana Keluraha n	1	Paket

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 maka Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1.	Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi	1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
		2.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
		3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Berdasarkan hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, maka Kecamatan Balikpapan Tengah dapat berperan untuk mencapai Tujuan Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi, dimana Sasaran Strategis yang mendukung tercapainya tujuan adalah Sasaran Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dan Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah yang berperan dalam pemberian pelayanan publik pada garda terdepan dan melaksanakan urusan kewilayahan, serta berkewajiban untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang ada di Kecamatan agar dapat mendukung pemberian pelayanan publik yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan

Indikator Tujuan/Target :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/84,38

SASARAN 1:

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran/Target :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan/ 83,57

SASARAN 2:

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah

Indikator Sasaran/Target :

Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah/ 70,93

4.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026;
- 2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.

- 3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
- 4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Tengah;
- 5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 3 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
- 2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 6 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
- 3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2025 adalah sebanyak 54 (lima puluh Empat) sub kegiatan;
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 36.900.200.000,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana sebesar Rp 19.934.827.225,- untuk program dan kegiatan penunjang;
 - b) Dana sebesar Rp 16.965.372.775,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Kecamatan Balikpapan Tengah untuk sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini:

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH				24.318.980.855				25.064.000.000
					UNSUR KEWILAYAHAN				20.226.070.174				20.575.000.000
7	01				KECAMATAN				20.226.070.174				20.575.000.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		70.45 Poin	15.841.916.544			70.45 Poin	16.531.000.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan		70.93 Poin	28.040.495			70.93 Poin	32.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan Tengah	4 Dokumen	28.040.495	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	32.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		70.45 Poin	10.712.036.226			70.45 Poin	11.000.000.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan Tengah	58 Orang/bulan	10.712.036.226	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		58 Orang/bulan	11.000.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	839.616.000			-	940.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikpapan Tengah	64 Paket	79.616.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		64 Paket	90.000.000
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan Tengah	80 Orang	760.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Orang	850.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		70.45 Poin	3.220.342.226			70.45 Poin	3.166.000.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan Tengah	7 Paket	85.267.665	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	73.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan Tengah	350 Paket	1.090.278.833	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 Paket	967.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan Tengah	7 Paket	894.304.538	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	910.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Balikpapan Tengah	2 Paket	281.299.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	314.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Balikpapan Tengah	22900 Dokumen	131.499.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22900 Dokumen	147.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikipapan Tengah	12 Laporan	44.820.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	55.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikipapan Tengah	12 Laporan	692.872.990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	700.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		70.45 Poin	413.354.000			70.45 Poin	548.000.000
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Balikipapan Tengah	1 Unit	173.354.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	280.000.000
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	1 Unit	240.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	268.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70.45 Poin	2.808.840.128			70.45 Poin	3.203.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balikipapan Tengah	12 Laporan	474.408.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	503.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikipapan Tengah	12 Laporan	2.334.432.128	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	2.700.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70.45 Poin	1.912.598.150			70.45 Poin	2.131.000.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Balikipapan Tengah	41 Unit	743.007.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41 Unit	814.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikipapan Tengah	232 Unit	353.808.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		232 Unit	337.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikipapan Tengah	12 Unit	716.804.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	880.000.000
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikipapan Tengah	2 Unit	98.979.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	100.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti		100 %	815.413.765			100 %	784.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		100 %	593.174.250			100 %	599.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti							
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Balikpapan Tengah	3 Laporan	234.999.630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	263.000.000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Balikpapan Tengah	3 Dokumen	358.174.620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	336.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas		100 %	137.240.320			100 %	90.000.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Balikpapan Tengah	1 Laporan	137.240.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	90.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan		100 %	84.999.195			100 %	95.000.000
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Balikpapan Tengah	300 Dokumen	84.999.195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Dokumen	95.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		12,75 %	2.669.680.790			12,75 %	2.260.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana		100 %	138.181.270			100 %	135.000.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan Tengah	30 Lembaga Kemasyarakatan	77.182.085	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Lembaga Kemasyarakatan	67.000.000
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Balikpapan Tengah	2 Laporan	60.999.185	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	68.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan		100 %	2.531.499.520			100 %	2.125.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan Tengah	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.569.499.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Balikpapan Tengah	2 Laporan	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	560.000.000
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikpapan Tengah	2 Laporan	362.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	365.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal		100 %	899.059.075			100 %	1.000.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum		100 %	899.059.075			100 %	1.000.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Balikpapan Tengah	19 Laporan	899.059.075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Laporan	1.000.000.000
					KELURAHAN GUNUNG SARI ULU				1.807.802.255				1.752.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		12,75 %	1.807.802.255			12,75 %	1.752.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana		100 %	915.870.085			100 %	852.000.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	45 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Lembaga Kemasyarakatan	26.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	83 Unit	611.807.085	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83 Unit	615.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	1 Pokmas / Ormas	281.063.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Pokmas / Ormas	211.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan		100 %	891.932.170			100 %	900.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Semua Kecamatan	044 Lembaga Kemasyarakatan	891.932.170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000
					KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR				2.536.261.875				2.664.600.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		12,75 %	2.536.261.875			12,75 %	2.664.600.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana		100 %	1.126.996.720			100 %	1.086.600.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	73 Lembaga Kemasyarakatan	27.999.980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		73 Lembaga Kemasyarakatan	31.600.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	56 Unit	965.996.740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56 Unit	907.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	1 Pokmas / Ormas	133.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Pokmas / Ormas	148.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan		100 %	1.409.265.155			100 %	1.578.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	71 Lembaga Kemasyarakatan	1.409.265.155	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		71 Lembaga Kemasyarakatan	1.578.000.000
					KELURAHAN KARANG REJO				2.839.973.780				3.021.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		12,75 %	2.839.973.780			12,75 %	3.021.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana		100 %	1.098.574.030			100 %	1.071.000.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	91 Lembaga Kemasyarakatan	34.982.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		91 Lembaga Kemasyarakatan	39.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	76 Unit	943.591.835	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		76 Unit	882.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo	1 Pokmas / Ormas	119.999.795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Pokmas / Ormas	150.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan		100 %	1.741.399.750			100 %	1.950.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan Tengah, Karang Rejo Balikpapan Tengah	89 Lembaga Kemasyarakatan	1.741.399.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		89 Lembaga Kemasyarakatan	1.950.000.000
					KELURAHAN KARANG JATI				1.559.833.760				1.599.500.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		12,75 %	1.559.833.760			12,75 %	1.599.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana		100 %	815.245.480			100 %	765.500.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Karang Jati	37 Lembaga Kemasyarakatan	19.999.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37 Lembaga Kemasyarakatan	22.500.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikipapan Tengah, Karang Jati	56 Unit	685.273.930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56 Unit	593.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Karang Jati	1 Pokmas / Ormas	109.972.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Pokmas / Ormas	150.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan		100 %	744.588.280			100 %	834.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikipapan Tengah, Karang Jati	35 Lembaga Kemasyarakatan	744.588.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Lembaga Kemasyarakatan	834.000.000
					KELURAHAN MEKAR SARI				1.666.866.175				1.760.400.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		-	1.666.866.175			-	1.760.400.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana		100 %	847.216.175			100 %	845.400.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	41 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41 Lembaga Kemasyarakatan	22.400.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	43 Unit	341.216.825	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43 Unit	655.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	1 Pokmas / Ormas	485.999.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Pokmas / Ormas	168.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan		100 %	819.650.000			100 %	915.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikipapan Tengah, Mekar Sari	39 Lembaga Kemasyarakatan	819.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39 Lembaga Kemasyarakatan	915.000.000
					KELURAHAN SUMBER REJO				2.170.481.300				2.258.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		12,75 %	2.170.481.300			12,75 %	2.258.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana		100 %	946.181.300			100 %	1.088.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	63 Lembaga Kemasyarakatan	24.995.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	38 Unit	771.186.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38 Unit	860.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	1 Pokmas / Ormas	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Pokmas / Ormas	200.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan		100 %	1.224.300.000			100 %	1.170.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikipapan Tengah, Sumber Rejo	61 Lembaga Kemasyarakatan	1.224.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61 Lembaga Kemasyarakatan	1.170.000.000
J U M L A H									36.900.200.000				38.119.500.000

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Balikpapan.

5.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Tengah berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Tengah terus berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan Tengah mendukung prioritas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

BAB VI INOVASI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Balikpapan Tengah beserta Kelurahan berkomitmen terus berupaya meningkatkan pelayanan baik yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat melalui inovasi, adapun beberapa inovasi yang telah dilakukan diantaranya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	INOVASI EKSTERNAL										
1	BERHATI Bersih, Sehat dan Indah	V	X	Inovasi LPM berupa gerakan sadar kebersihan dengan melibatkan CSR untuk menciptakan lingkungan bersih, indah dan warga yang sehat serta strategi peningkatan swadaya masyarakat	Rendahnya kesadaran warga masyarakat terkait kebersihan lingkungan sekitar dan masih banyak laporan kasus penyakit menular seperti demam berdarah	2023	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Gunung Sari Ulu	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan terlaksananya pencegahan penyakit menular	-	https://www.instagram.com/p/CnXC2gAvVwd/?igshid=MDJmNzVkMjY=

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	TBL KAMPUS Taekwondo Balikpapan Lion oleh Kampung Pustaka	V	X	Inovasi Pengurus KAMPUS melalui kegiatan ekstrakurikuler Taekwondo dalam rangka pembinaan anak dan remaja lingkungan kelurahan	Fasilitasi pembinaan anak dan remaja melalui kegiatan ekstrakurikuler yang murah masih minim	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Anak dan Remaja Kelurahan Gunung Sari Ulu	Terlaksananya pembinaan anak dan remaja melalui kegiatan ekstrakurikuler		https://www.instagram.com/reel/ChPHdhhlc4G/?igshid=MDJmNzVkMjY=
3	EDUKASI PENDIDIKAN SEKS USIA DINI PPATBM	V	X	Inovasi PPATBM melalui kegiatan edukasi pendidikan seks usia dini (5-10 tahun)	Masih minimnya kegiatan edukasi yang ditujukan kepada anak-anak	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Anak Usia Dini di Lingkungan Kelurahan Gunung Sari Ulu	Terlaksananya kegiatan edukasi, pencegahan kasus pernikahan dini, asusila dan meningkatnya kemampuan menjaga diri		https://www.instagram.com/reel/CiiTBRcAwOY/?igshid=MDJmNzVkMjY=

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dalam rangka pencegahan kasus pernikahan dini, asusila anak dan peningkatan kemampuan menjaga diri sendiri					sendiri bagi anak usia dini		
4	LES PRIVAT KARANG TARUNA & KAMPUS	V	X	Inovasi Karang Taruna dan Pengurus KAMPUS melalui kegiatan les privat gratis bekerja sama dengan lembaga	Fasilitasi pembinaan anak dan remaja melalui kegiatan ekstrakurikuler yang murah masih minim	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Anak dan Remaja Kelurahan Gunung Sari Ulu	Terlaksananya pembinaan anak dan remaja melalui kegiatan ekstrakurikuler		https://www.instagram.com/p/Cn_1lwiPdo2/?igshid=MDJmNzVkMjY=

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pendidikan dan relawan							
5	SESI QnA Forum Anak	V	X	Inovasi Forum Anak melalui kegiatan sesi Tanya jawab bersama narasumber yang nantinya dikemas menjadi video edukasi via instagram	Belum tersedianya konten edukasi bagi anak dan remaja yang praktis, murah dan dapat diakses kapanpun	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Anak dan Remaja Kelurahan Gunung Sari Ulu	Tersedianya konten edukasi bagi anak dan remaja		https://www.instagram.com/reel/CitpkOIPuBZ/?igshid=MDJmNzVkMjY=
6	SMART 26	V	X	Pelayanan kepada warga tingkat RUKUN TETANGGA 26 Kelurahan Sumber Rejo untuk mendapat	Permasalahan waktu Ketua RT yang bekerja dalam memberikan pelayanan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga RT 26 Kelurahan Sumber Rejo	Pelayanan yang cepat, tepat dan dengan aturan waktu bisa kapan saja dilayani	-	https://linktr.ee/SMART_26

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Surat Pengantar yang akan dipergunakan dalam kepengurusan pelayanan di Kantor Kelurahan Sumber Rejo	kepada warganya						
7	WISATA EDUKASI KANG BEJO	V	X	Kebun kangkung yang dijadikan wisata edukasi Sumber Rejo ini merupakan hasil kerja para kelompok tani yang bersama-sama mengembangkan sayur	peningkatan perekonomian bagi masyarakat sekitar dan mendorong perekonomian warga	2019	Masih berjalan hingga saat ini	Masyarakat Kota Balikpapan	Menambah income ekonomi keluarga masyarakat sekitar		https://www.instagram.com/wisatakangbejo/

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kangkung tersebut. kampung sayur dan wisata edukasi Kelurahan Sumber Rejo ini bisa jadi pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa sebagai bahan dan tempat penelitian untuk mengetahui bagaimana cara bercocok tanam dengan baik. Melalui kampung kangkung yang dijadikan							

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				wisata edukasi ini, harapannya masyarakat sekitar bisa mengembangkan lagi lahan kosong yang tidak dipakai menjadi sentra sayuran							
8	ANYAMAN MAS BEJO (Anjungan Pelayanan Mandiri Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo)	V	X	Sebuah inovasi guna peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses	mempermudah masyarakat serta memberikan link informasi tentang Kota Balikpapan yang dapat diakses oleh masyarakat	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo lebih mudah dalam kepengurusan pelayanan pemerintah kota Balikpapan	-	https://anyamanmasbejo.my.id /

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				berbagai pelayanan online yang ada di Pemerintah Kota Balikpapan, melakukan pencetakan dokumen kependudukan, pencatatan sipil dan perizinan usaha (NIB, IUMK).	Kelurahan Sumber Rejo						
9	HALTE SEDEKAH	V	X	Inovasi Kelurahan dari Inisiatif warga yang ingin berbagi sedekah dan	keinginan dari warga yang tergerak untuk mengajak sesama untuk bersedekah dan	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Karang Rejo dan warga di luar wilayah	Dengan adanya Halte sedekah warga yang mampu dapat menyalurkan sedekahnya	Di resmikan oleh Walikota Balikpapan Kelurahan Karang Rejo sebagai	-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				beramal sholeh kepada warga kurang mampu dan untuk menggerakkan partisipasi swadaya warga yang berekonomi mampu agar berbagi sedekah kebutuhan makanan rumah tangga kepada warga yang membutuhkan	beramal sholeh kepada warga kurang mampu dengan swadaya dari, oleh dan untuk warga berupa barang kebutuhan pokok			Karang rejo yang membutuhkan barang pokok berupa sayur, telur, gula dan lain-lain	sehingga dapat meringankan sedikit beban perekonomian bagi warga kurang mampu terkhusus di hari jum"at	Kampung Sedekah.	
10	BANK SAMPAH RT.78 dan RT.26/27	V	X	Inovasi Pengurus Rukun Tetangga (RT)	Rendahnya kesadaran warga masyarakat	2021	Masih berjalan	Warga seputar wilayah RT.dan	Menambah pendapatan keuangan keluarga dengan		-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				di lingkungan kelurahan terhadap Sampah daur ulang atau sampah anorganik untuk didaur ulang	terhadap Sampah daur ulang atau sampah anorganik yang bisa ditukarkan ke bank sampah sebagai tambahan penghasilan		hingga saat ini	warga Kelurahan Karang Rejo	mengumpulkan sampah yang dapat di jual ke bank sampah sehingga mendapat penghasilan tambahan dari sampah tersebut dan agar meningkatnya pemahaman warga akan pentingnya kebersihan		
11	TTG	V	X	Inovasi Karang Taruna berupa Teknologi Energi Surya di Rumah Tinggal dalam rangka merancang	pengembangan Potensi diri untuk mengembangkan ide dan aplikasi ilmu baik yang	2022	Masih berjalan hingga saat ini	rumah sendiri dan dapat ditularkan keahlian tersebut kepada	Terlaksananya kegiatan edukasi, bagi para remaja dalam mengembangkan ide dan ilmu untuk membuat	juara 1 lomba TTG tingkat Kecamatan balikpapan Tengah dan juara 1 TTG	-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				inovasi dari barang-barang bekas tak terpakai dibuat inovasi teknologi tepat guna untuk diikutsertakan dalam lomba TTG dan dapat mengurangi penggunaan listrik dari PLN dirumah sendiri	didapat disekolah maupun dari pengalaman untuk mengurangi pemakaian listrik PLN dan dapat diikutsertakan dalam lomba TTG			warga khususnya remaja untuk membuat inovasi teknologi energi surya dirumah masing-masing	inovasi dari benda-benda yang tidak terpakai sebagai inovasi, guna menjadi solusi alternatif mengurangi pemakaian listrik PLN	tingkat Kota Balikpapan	
12	PPATBM	V	X	Inovasi PPATBM melalui kegiatan edukasi pendidikan seks usia dini	Masih minimnya kegiatan edukasi yang ditujukan kepada orang tua dan anak-	2022	Masih berjalan hingga saat ini	orang tua dan Anak remaja di Lingkungan Kelurahan Karang Rejo	orang tua dan remaja dapat membentengi diri dari pergaulan bebas dan seks bebas sehingga mengurangi		-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				(5-10 tahun) dalam rangka pencegahan kasus pernikahan dini, asusila anak, KDRT dalam rumah tangga dan peningkatan kemampuan menjaga diri sendiri	anak remaja terhadap seks bebas sebelum menikah				angka kehamilan diluar nikah dan pernikahan dini		
13	DAUN KELOR	V	X	Inovasi warga Kelurahan Karang Rejo yang menjadikan Daun Kelor yang awalnya hanya dikonsumsi di	mensosialisasikan pengolahan daun kelor yang bisa diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman tidak	2019	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Karang Rejo, teman, rekan kerja, keluarga serta semua orang yang sudah	Menambah pendapatan keuangan keluarga dengan adanya usaha rumahan dari olahan daun kelor.		-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				lingkungan keluarga dalam rumah yang pada akhirnya dapat di olah menjadi berbagai macam olahan makanan berbahan baku Daun Kelor seperti Susu Kelor, Brownies Kelor, Kuker Kelor, Puding Kelor, Nugget Kelor dll	hanya untuk di buat Sayur pendamping makan nasi saja.			merasakan olahan daun Kelor			
14	KWT (Kelompok Wanita Tani)	V	X	Inovasi Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Karang Rejo yang	Pemanfaatan lahan kosong yang sebelumnya di	2020	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Karang Rejo khususnya warga	Menambah pendapatan keuangan keluarga dengan menjual hasil		-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				memanfaatkan lahan sebagai media penanaman Sayur mayur yang di mulai dengan Pembibitan, Penyemaian, Penanaman, Pemupukan, perawatan dan Panen	tumbuhin rumput liar .			RT.wilayah sekitar	panen ke warga sekitar dan warga di luar wilayah RT.		
15	Perabot Rumah Tangga dari bahan Bekas	V	X	Inovasi Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Karang Rejo yang menjadikan bahan bahan sisa / bekas berupa koran	adanya bahan bekas/bahan sisa yang tidak terpakai seperti koran dan kain jeans untuk dibuat kerajinan	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Karang Rejo khususnya warga RT.wilayah sekitar	untuk digunakan sebagai bahan perabotan rumah dan dapat menambah pendapatan keuangan keluarga dengan adanya Kegiatan		-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan kain jeans yang sudah tidak terpakai di olah menjadi barang-barang yang dapat di manfaatkan seperti Meja, kursi dll	perabotan rumah tangga				membuat perabotan rumah tangga dari bahan bahan bekas (Daur ulang)		
16	PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS ONLINE BERSAMA CIRO WASTE	V	X	Kecamatan Balikpapan Tengah bekerjasama dengan Ciro Waste yang hadir memberikan edukasi dan kemudahan bagi masyarakat dalam	Akses setor sampah menjadi lebih mudah, proses transaksi cepat dan penentuan harga yang transparan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya	2022	Masih berjalan hingga saat ini dan sudah mulai berjalan pada setiap kelurahan dan rukun tetangga (RT)	Seluruh Masyarakat se-Kecamatan Balikpapan Tengah	Mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA karena sudah dilakukan pemilahan mandiri oleh masyarakat dan dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat	Mulai menjadi percontohan bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dan Barat yang mulai menerapkan di wilayahnya	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cirowaste.ciroapp

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>pengelolaan sampah. Ciro Waste adalah waste management technology yang menghubungkan 3 elemen penting dalam rantai daur ulang sampah yaitu masyarakat, bank sampah dan industri daur ulang. Ciro Waste menawarkan layanan jemput bola sampah sehingga sampah tidak</p>	<p>memiliah sampah sehingga dapat mengurangi volume sampah yang menumpuk. Pemilahan sampah penting dilakukan karena nantinya dapat meningkatkan jumlah sampah yang akan didaur ulang, sehingga mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA karena kapasitasnya</p>				<p>dikarenakan akses dan kemudahan yang didapatkan.</p>		

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>perlu dibuang namun cukup dipilah kemudian dijemput langsung untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Dengan produk digital berupa aplikasi CIROES yang menghadirkan layanan jual beli sampah secara online yang mudah, cepat dan transparan.</p>	yang sudah semakin overload.						

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	INOVASI INTERNAL										
1	DISPOR (Disposisi dan Pelaporan online)	V	X	Pelaksanaan disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi secara online melalui Grup Whats APP khusus surat masuk	Disposisi surat agar lebih cepat mendapatkan respon bawahan, dikarenakan aplikasi Whats App lebih sering dipergunakan sehari-hari	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah	Disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi atasan secara cepat dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti	-	
2	SI GAWAI (SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN)	V	X	Sistem informasi berupa aplikasi yang menjadi wadah dokumen kepegawaian terkait	Masih terjadinya keterlambatan pengajuan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	2021	Masih berjalan hingga saat ini, namun sementara ada gangguan server	Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah	tidak terjadinya keterlambatan pengajuan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala serta memudahkan pegawai dalam	Direplikasi oleh Kecamatan Balikpapan Utara dan dikembangkan oleh kecamatan	http://sigawai.sidingin.com/

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan satya lencana, yang memiliki fitur pengingat dan pemberitahuan melalui email dan whatsapp	dikarenakan kealpaan dalam pengecekan duk berkala serta ketidaklengkapan dokumen pendukung				proses pengajuannya.	Balikpapan Barat	
3	BILIK PENGADUAN	V	X	Inovasi kelurahan dalam menangani angka Pengaduan dan laporan permasalahan warga masyarakat terkait	Banyaknya warga masyarakat penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS), masih ada warga yang buang sampah tidak tepat waktu,	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Karang Rejo	mendengarkan dan mencari solusi dari keluhan/perselisihan warga Kelurahan Karang Rejo yang terdampak PMKS, menjadikan lingkungan wilayah setempat	-	-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kesejahteraan sosial , Infrastruktur, Keamanan Lingkungan , sampah , watas tanah di wilayah kelurahan Karang Rejo	Infrastruktur yang rusak akibat bencana, warga yang berselisih paham masalah tanah perbatasan				menjadi bersih, aman dari segala tindak kejahatan dan memediasi warga berselisih paham .		
4	ONE DAY SERVICE	V	X	Inovasi kelurahan dalam layanan bidang pemerintahan berbasis Whats app	proyek perubahan Kasi pemerintahan dan Pelayanan publik untuk memudahkan warga Kelurahan karang Rejo mengurus surat pengantar atau	2021	2022 karena telah ada aplikasi yankel	Warga Kelurahan Karang Rejo terutama warga yang bekerja	Terciptanya Pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat sehingga memudahkan warga untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan dari		-

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					surat keterangan secara online				Kelurahan Karang Rejo		

BAB VII

PENUTUP

7.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Tengah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.
- b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi;
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.;

4. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RENJA Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RENJA Kota Balikpapan dan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah);
5. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

7.2 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025 ini dapat kami sampaikan, untuk dapat dijadikan bahan seperlunya.

DD. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, bersama ini Kecamatan Balikpapan Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Balikpapan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Penyusunan Renja Perangkaa Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun stakehorders lainnya sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kecamatan Balikpapan Kota untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Balikpapan.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan untuk mencapai visi dan misi Kota Balikpapan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi.

Pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Balikpapan. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Balikpapan akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”, dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa peran Kecamatan Balikpapan Kota akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah dan masyarakat luas. Kecamatan Balikpapan Kota sebagai bagian dari garda terdepan lembaga Pemerintah Kota Balikpapan yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap implementasi program pembangunan Pemerintahan Kota Balikpapan, senantiasa menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RENJA) Tahun 2024 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi, misi, dan agenda pembangunan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun Renja berfungsi untuk menerjemahkan Renstra lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran yang ditentukan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara menyeluruh atau sejajar dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD saat ini, evaluasi renja PD tahun-tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perwali RKPD
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja

- a. Pembentukan Tim Penyusun Renja
- b. Orientasi mengenai Renja
- c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- d. Pengumpulan Data dan Informasi

2. Pengolahan Data dan Informasi

Pada tahapan ini disajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap perumusan penyusunan rancangan Renja

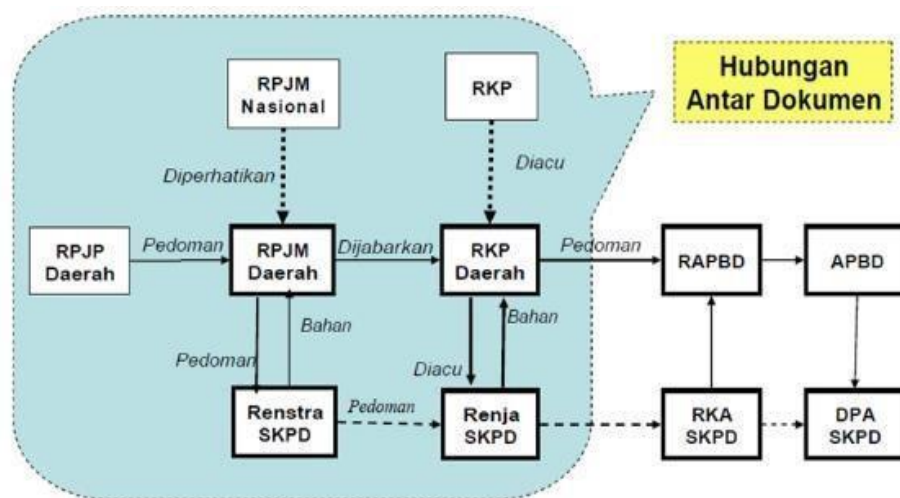
3. Perumusan Rancangan Renja

- a. Pengolahan data dan informasi
- b. Analisis gambaran pelayanan PD
- c. Menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- f. Perumusan tujuan dan sasaran
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

- h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja PD
 - k. Pembahasan Forum PD
 - l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
 5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD
 6. Penetapan Renja

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1.
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 adalah:

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui advokasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan antar PD, Stakeholders, masyarakat.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Kecamatan Balikpapan Kota baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
5. Sebagai pusat informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring data dan bahan baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan revidi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2023. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Kota
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	287.810.625	279.579.875	91,41%
1.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	172.810.625	169.748.000	98,23%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	172.810.625	169.748.000	98,23%
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	25.000.000	21.153.000	84,61%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.000.000	11.155.000	74,37%
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	9.998.000	99,98%
1.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	90.000.000	88.678.875	98,53%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	90.000.000	88.678.875	98,53%

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.067.824.500	7.840.471.259	97,18%
2.1	KECAMATAN	2.947.443.500	2.856.314.375	96,91%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	148.961.000	144.854.800	97,24%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	98.961.000	96.586.000	97,60%
	Evaluasi Kelurahan	50.000.000	48.258.200	96,54%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.798.482.500	2.711.459.575	96,89%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.542.371.500	2.457.496.375	96,66%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	167.536.000	166.184.600	99,19%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	88.575.000	88.778.600	99,10%
2.2	KELURAHAN KLANDASAN ULU	889.312.432	855.716.190	96,22%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	384.411.432	364.516.900	94,82%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.340.000	18.197.200	99,22%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	343.571.432	323.929.800	94,28%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22.500.000	22.389.900	99,51%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	423.999.850	423.328.090	99,85%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	540.901.000	491.199.290	97,29%
2.3	KELURAHAN KLANDASAN ILIR	1.379.138.338	1.340.012.000	97,16%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	644.557.138	621.280.240	96,39%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.950.000	27.595.500	98,73%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	557.857.138	536.013.740	96,80%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58.750.000	57.671.000	98,61%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	734.581.200	718.731.760	97,84%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	734.581.200	718.731.760	97,84%
2.4	KELURAHAN DAMAI	888.158.828	865.358.326	97,43%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	380.171.428	363.588.650	95,64%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.600.000	16.418.875	98,91%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	343.571.428	327.407.375	95,30%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.762.400	98,81%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	507.987.400	501.769,676	98,78%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	507.987.400	501.769,676	98,78%
2.5	KELURAHAN PRAPATAN	981.303.454	954.113.126	97,23%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	508.738.854	497.986.425	97,89%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.597.500	16.491.400	99,36%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	472.141.354	461.608.800	97,77%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.886.225	99,43%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	472.564.600	456.126.701	96,52%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	472.564.600	456.126.701	96,52%
2.6	KELURAHAN TELAGA SARI	982.467.948	968.957.242	98,62%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407.102.548	397.330.725	97,60%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.497.800	20.335.500	99,21%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	357.856.148	348.414.925	97,36%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28.748.600	28.580.300	99,41%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	575.365.400	571.626.517	99,35%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	575.365.400	571.626.517	99,35%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	414.788.200	399.717.800	96,37%
3.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	414.788.200	399.717.800	96,37%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	414.788.200	399.717.800	96,37%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.497.138.086	14.906.083.604	90,36%
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan	19.998.300	18.758.750	93,80%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	19.998.300	18.758.750	93,80%
4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.044.374.186	9.063.772.943	90,24%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.044.374.186	9.063.772.943	90,24%
4.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.660.000	69.660.000	93,35%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.660.000	65.027.000	93,35%
4.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.824.560.900	2.693.922.698	95,37%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.765.000	24.774.000	86,13%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.446.488.000	1.366.375.670	94,46%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	689.572.700	644.280.500	93,43%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	99.429.850	99,43%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	175.780.000	175.602.000	99,90%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	383.955.200	383.460.678	99,87%
4.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.000.000	170.000.000	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.000.000	170.000.000	100%
4.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.191.821.900	1.989.372.044	90,76%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	448.735.500	290.193.854	64,67%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.743.086.400	1.699.178.190	97,48%
4.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.176.722.800	905.230.169	76,93%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	601.972.800	353.775.237	58,77%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.750.000	119.441.010	88,64%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	342.795.580	97,94%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	89.218.342	99,13%
	Jumlah	25.267.561.411	23.425.852.538	92,71%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebesar Rp. 25.267.561.411,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 23.425.852.538,- (92,71 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.841.708.873 (7,86%).

Menindaklanjuti Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Apartur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, serta penerbitan Surat Keputusan Camat Balikpapan Kota Nomor 188.46-156/Balkot tanggal 22 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Balikpapan Kota Nomor 188.43/60/Balkot tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, terjadi perubahan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80,00	84,38	105,48%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	69,45	63,39	91,27%

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2023 dalam mencapai target masih **berkinerja baik** meski terdapat satu target yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. adapun rincian sebagai berikut:

- a. Pencapaian Sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

mencapai 105,48% atau predikat “*sangat tinggi*”.

- b. Pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota mencapai 91,27% atau predikat “*sangat tinggi*”.

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Program yang Memenuhi Target

Sebanyak 1 program yang memenuhi target ditentukan yaitu program pemerintahan dan pelayanan publik;

- b. Program yang Melebihi Target

Sebanyak 2 program yang melebihi target yang ditentukan yaitu Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- c. Program yang Tidak Memenuhi Target

Sebanyak 1 program yang tidak memenuhi target yang ditentukan yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah. Faktor penyebab tidak memenuhi target adalah tidak berjalannya kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan. Implikasi yang timbul adalah realisasi keuangan yang berdampak untuk program tersebut yang hanya mencapai 64,67% dan 58,77%

Untuk perbaikan kedepan, kepala seksi (kasi) yang menangani program tersebut untuk menyusun rencana kegiatan lebih baik menyesuaikan tingkat kebutuhan dan jumlah personil serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
 DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN
 2024 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	398	N/A	79,5	78,75	99%	79,6	158,35	40%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	347,75	N/A	69,45	63,39	91%	69,55	132,94	38%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	398	N/A	79,5	80,9	102%	79,6	160,5	40%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	398	N/A	79,5	78,39	99%	79,6	157,99	40%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	398	N/A	79,5	77,02	97%	79,6	156,62	39%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	398	N/A	79,5	77,82	98%	79,6	157,42	40%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398	N/A	79,5	80	101%	79,6	159,6	40%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	398	N/A	79,5	77,82	98%	79,6	157,42	40%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	52	N/A	10,2	51	500,00	10,4	61,4	118%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200	40%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500	87,5	60	60	100,00	100,00	247,50	50%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	500	96,82	100	100	100,00	100,00	296,82	59%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500	96,82	100	100	100,00	100,00	296,82	59%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota, kinerja pelayanan di Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Kinerja pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat diukur melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Adapun pelayanan publik yang disurvei adalah pelayanan yang diberikan melalui loket pelayanan.

2. Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

Kinerja Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan mencakup partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, SPGRM, dana kelurahan, keikutsertaan dalam Lembaga masyarakat tingkat kelurahan dan lainnya.

3. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal

Kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan mencakup Razia Yustisi/Penertiban Rumah Kos/PKL/Miras /Bangunan Tidak Ber IMB/Pengajuan Lahan/Razia TPS dan koordinasi trantibum dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan IKM Internal dilakukan dengan mengukur pelayanan yang diberikan secretariat kecamatan kepada pegawai internal mencakup pelayanan keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan lainnya.

Tabel T.C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah			79,50	79,60	79,70	79,80	78,75	79,60	79,70	79,80	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			69,45	69,55	69,65	69,75	63,39	69,55	69,65	69,75	
	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah			79,50	79,60	79,70	79,80	80,90	79,60	79,70	79,80	
	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			79,50	79,60	79,70	79,80	78,39	79,60	79,70	79,80	
	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			79,50	79,60	79,70	79,80	77,02	79,60	79,70	79,80	
	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			79,50	79,60	79,70	79,80	77,82	79,60	79,70	79,80	
	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			79,50	79,60	79,70	79,80	80,00	79,60	79,70	79,80	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			79,50	79,60	79,70	79,80	77,82	79,60	79,70	79,80	
	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dilayani sesuai Standar Pelayanan											
	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			10,20	10,40	10,60	10,80	51,00	10,40	10,60	10,80	
	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2022 terhadap indikator utama sudah cukup baik, dimana hampir semua target dapat tercapai kecuali Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan yang tidak mencapai target namun masih dalam taraf yang baik yaitu realisasi sebesar 85,93 dari target 77,96.

Adapun permasalahan dan hambatan utama Kecamatan Balikpapan Kota yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan dan pejabat yang memasuki usia pensiun dalam waktu dekat sehingga dikhawatirkan akan menambah kekosongan pejabat struktural di kecamatan Balikpapan Kota;
2. Jumlah staf baik PNS maupun Non-PNS yang masih kurang memadai baik dari sisi kuantitas yang sangat terbatas dan sisi kualitas yang masih belum menunjang pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya isu pengalihdayaan Tenaga Non-PNS yang apabila dilakukan cukup berdampak bagi Kecamatan. Hal tersebut karena selama ini kekurangan staf PNS di Kecamatan dan Kelurahan dicover oleh Tenaga Non-PNS; dan
4. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan. Hal tersebut cukup berdampak terhadap pelayanan di Kecamatan dimana hasil IKM Kecamatan turun pada tahun 2022 dikarenakan sarpras pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat;

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota, yaitu sebagai berikut:

- a. PPTK kurang proaktif dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditentukan, sehingga dalam realisasi kegiatan agak sedikit terhambat;
- b. Usulan pembangunan (SPGRM dan Dankel) masih terdapat yang belum tertampung dalam penganggaran. Banyaknya usulan yang masuk dengan anggaran yang terbatas sehingga terdapat usulan pembangunan yang tidak dapat diakomodir oleh Kecamatan.

Berdasarkan hambatan serta tantangan dan peluang di atas, berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sistem pelayanan dan TI sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengusulkan usulan pembangunan dalam musrenbang sehingga usulan-usulan masyarakat dapat terakomodir dengan baik;
- c. Melakukan adaptasi yang cepat dan tepat terhadap segala perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti perubahan kebijakan pusat, daerah dan lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil *review* terhadap Rancangan Awal RKPD tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan di luar Rancangan Awal Renja Kecamatan Balikpapan Kota. Masih mengacu dengan Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Kota 2021-2026, Adapun program prioritas Kecamatan Balikpapan Kota adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota
Balikpapan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,70 Poin	19.392.595.526	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,70 Poin	19.392.595.526	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,55 Poin	23.242.585	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,55 Poin	23.242.585	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	23.242.585	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	23.242.585	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,60 Poin	10.044.374.186	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,60 Poin	10.044.374.186	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	10.044.374.186	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	10.044.374.186	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79,70 Poin	1.057.234.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79,70 Poin	1.057.234.900	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	179.234.900	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	179.234.900	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	878.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	878.000.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79,60 Poin	2.644.104.455	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79,60 Poin	2.644.104.455	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	518.560.889	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	518.560.889	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	1.016.972.665	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	1.016.972.665	
	Penyediaan Barang dan Peggandaan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	7 Paket	183.999.775	Penyediaan Barang dan Peggandaan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	7 Paket	183.999.775	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	116.594.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	116.594.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	9.977.126	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	9.977.126	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	748.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	748.000.000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,60 Poin	597.149.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,60 Poin	597.149.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 Unit	246.513.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 Unit	246.513.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	350.636.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	350.636.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,60 Poin	2.994.842.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,60 Poin	2.994.842.900	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	648.735.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	648.735.300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	2.346.107.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	2.346.107.600	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,60 Poin	2.031.647.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,60 Poin	2.031.647.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	234.934.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	234.934.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34 Unit	416.688.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34 Unit	416.688.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 Unit	148.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 Unit	148.700.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	948.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	948.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	283.324.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	283.324.500	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	335.374.270	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	335.374.270	
VIII	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	184.810.600	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	184.810.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	160.810.600	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	160.810.600	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	24.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	24.000.000	
IX	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	60.563.670	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	60.563.670	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	16.294.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	16.294.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	44.269.670	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	44.269.670	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	90.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	90.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	200 Dokumen	90.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	200 Dokumen	90.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	1.505.289.450	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	1.505.289.450	
XI	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	149.999.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	149.999.300	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	49.999.300	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	49.999.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
XII	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.355.290.150	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.355.290.150	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	657.008.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	657.008.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	608.383.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	608.383.000	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	89.899.150	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	89.899.150	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	625.196.600	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	625.196.600	
XII I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	625.196.600	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	625.196.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	625.196.600	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	625.196.600	
	Kelurahan Klandasan Ulu					Kelurahan Klandasan Ulu					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	2.155.399.508	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	2.155.399.508	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	1.238.246.380	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	1.238.246.380	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 Lembaga Kemasyarakatan	38.771.990	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 Lembaga Kemasyarakatan	38.771.990	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.169.474.645	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.169.474.645	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	29.999.745	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	29.999.745	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	917.153.128	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	917.153.128	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	44 Lembaga Kemasyarakatan	917.153.128	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	44 Lembaga Kemasyarakatan	917.153.128	
	Kelurahan Klandasan Ilir					Kelurahan Klandasan Ilir					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	2.590.659.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	2.590.659.600	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	1.261.951.600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	1.261.951.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85 Lembaga Kemasyarakatan	48.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85 Lembaga Kemasyarakatan	48.150.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.183.801.600	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.183.801.600	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	30.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	30.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	1.328.708.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	1.328.708.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66 Lembaga Kemasyarakatan	1.328.708.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66 Lembaga Kemasyarakatan	1.328.708.000	
	Kelurahan Damai					Kelurahan Damai					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	2.058.594.807	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	2.058.594.807	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	1.216.268.827	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	1.216.268.827	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	70 Lembaga Kemasyarakatan	30.959.695	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	70 Lembaga Kemasyarakatan	30.959.695	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.155.379.752	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.155.379.752	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	29.929.380	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	29.929.380	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	842.325.980	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	842.325.980	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Damai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	40 Lembaga Kemasyarakatan	842.325.980	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Damai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	40 Lembaga Kemasyarakatan	842.325.980	
	Kelurahan Prapatan					Kelurahan Prapatan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	2.037.813.027	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	2.037.813.027	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	1.195.487.027	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	1.195.487.027	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 Lembaga Kemasyarakatan	36.797.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 Lembaga Kemasyarakatan	36.797.500	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.128.689.527	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.128.689.527	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	30.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	30.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	842.326.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	842.326.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	40 Lembaga Kemasyarakatan	842.326.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Prapatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	40 Lembaga Kemasyarakatan	842.326.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kelurahan Telaga Sari					Kelurahan Telaga Sari					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	2.368.075.435	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10,40%	2.368.075.435	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	1.349.386.795	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100%	1.349.386.795	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80 Lembaga Kemasyarakatan	40.697.460	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80 Lembaga Kemasyarakatan	40.697.460	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.278.689.475	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1.278.689.475	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	29.999.860	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	29.999.860	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	1.018.688.640	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	1.018.688.640	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	49 Lembaga Kemasyarakatan	1.018.688.640	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	49 Lembaga Kemasyarakatan	1.018.688.640	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Selain itu, usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD-RI. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi berjenjang dari Kelurahan hingga Kecamatan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan.

Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Balikpapan Kota sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Kecamatan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	<i>Kelurahan Klandasan Ulu</i>				
1	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Asrama Sentosa RT. 14 Kld-Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
2	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT. 28 Kld-Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
3	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT. 3 Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
4	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT.23 Kld-Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend. Sudirman RT. 8 Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
6	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wiluyo Puspyudo RT. 22 Kld-Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
7	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. APT. Pranoto Blok D No.10 A RT. 38 Kelurahan Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
8	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	semua RT	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANKEL

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kader	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANKEL
II Kelurahan Klandasan Ilir					
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT. 38	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT. 42	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT. 64	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT. 53	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Bukit Niaga RT. 02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Bukit Niaga RT. 19	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Bukit Niaga RT. 13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Blora RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
9	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
10	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
11	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
12	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
13	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT. 51	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
14	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
III	Kelurahan Damai				
1	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Jendral Sudirman RT 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
2	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jendral Sudirman RT 4	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jendral Sudirman RT 12	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
4	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Penggalang RT 29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jendral sudirma RT 6	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
6	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Al Makmur RT 32	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
7	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Siaga Dalam RT 36	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
8	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Jendral Sudirman RT 22	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
9	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl jendral sudirman RT 13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
10	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jl penggalang rt 28	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
11	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Jendral Sudirman RT 25	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
12	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Markoni Dalam RT 8	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
13	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Jendral sudirman RT 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
14	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Siaga dalam RT 18	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
15	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Jendral sudirman RT 35	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
16	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Jendral Sudirman RT 16	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
17	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
18	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 16	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
IV	Kelurahan Prapatan				
1	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Pagar Ijo Rt. 27 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Rt. 30, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
3	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Rt. 25, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
4	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 29 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 38, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
6	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 38, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
7	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 31, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
8	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
9	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
10	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Pagar Ijo Rt. 32, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Serobong Rt. 23 No. 23 (Depan kontrakan Kuning) dan No. 42 (Depan Rumah Yusransyah), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pelayaran Gang Tidar III Rt. 15 Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Gn. Tehnik Rt. 06, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Gn. Tehnik Rt. 06, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Rt. 30, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
21	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Rt. 30, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
22	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Dalam Gang Damai II Rt. 35, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
23	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Dalam Gang Damai 1 RT. 35 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
24	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Dalam Gg. Damai 1 Rt. 35 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
25	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
27	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	SDN 002 Balikpapan Kota Jl. Prapatan RT.39 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
28	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Dalam Rt. 35, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
29	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 29, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
30	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 29, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
31	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 38, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
32	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 19, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
33	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 19, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
34	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 19, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
35	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 19, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
36	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 14, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
37	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
38	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
39	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
40	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
41	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
42	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
43	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
44	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
45	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
46	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
47	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan pagar Ijo RT. 32, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
48	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Kelurahan Prapatan Jl. Prapatan rt. 26 No. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
49	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pelayaran Rt. 12 Kelurahan Prapatan , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
50	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Dalam Rt. 33 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
51	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Dalam Rt. 33 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
52	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Rt. 29 Lapangan LPM, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
53	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Prapatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
54	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Rt. 25 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
55	ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Rt. 28 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
56	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Rt. 28, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
57	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan Rt. 28, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
V	Kelurahan Telaga Sari				
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 32 KELURAHAN TELAGA SARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jalan pembangunan RT 38 No 57 Kel Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jalan prapatan RT 09	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rt 14 Kel Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT.21 Kelurahan Telga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi PD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritas pelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi PD dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan Akuntabilitas Publik. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan database kecamatan;
4. Pembentukan tim satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan;
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman” serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”. Maka rumusan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Kota adalah “*Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan*”.

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Kota juga menentukan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selanjutnya, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78,20
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	69,65

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026;
- 2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
- 3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
- 4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Kota;
- 5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan di sempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Fasilitasi Kunjungan Tamu
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 12. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 19. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 20. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 22. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
23. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
24. Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
25. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
26. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
27. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Klandasan Ulu
28. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Klandasan Ilir
29. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai
30. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Prapatan
31. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Telaga Sari
32. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klandasan Ulu
33. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klandasan Ilir
34. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai
35. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prapatan
36. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Telaga Sari
37. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klandasan Ulu
38. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klandasan Ilir

39. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai
40. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prapatan
41. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Telaga Sari
42. Evaluasi Kelurahan
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
43. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
44. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Klandasan Ulu
45. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Klandasan Ilir
46. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai
47. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prapatan
48. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Telaga Sari
49. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
50. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
51. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 3 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
- 2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 6 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
- 3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2025 adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) sub kegiatan;
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 33.068.998.223,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana sebesar Rp 19.392.595.526,- untuk program dan kegiatan penunjang;
 - b) Dana sebesar Rp 13.676.402.697,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Kecamatan Balikpapan Kota untuk sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini.

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01	KECAMATAN							
7	0101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	79,70 Poin	19.392.595.526	PAD	79,80 Poin	22.016.036.020,00
7	01012	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	69,65 Poin	23.242.585	PAD	69,65 Poin	45.000.000
7	010120001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	3 Dokumen	23.242.585	PAD	3 Dokumen	45.000.000
7	01012	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	79,70 Poin	10.044.374.186	PAD	79,80 Poin	11.500.000.000
7	010120001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Kota	75 Orang/Bulan	10.044.374.186	PAD	75 Orang/Bulan	11.500.000.000
7	01015	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	79,70 Poin	1.057.234.900	PAD	79,80 Poin	1.162.958.390

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0101	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Balikpapan Kota	86 Paket	179.234.900	PAD			75 Orang	197.158.390
7	0101	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Balikpapan Kota	75 Orang	878.000.000	PAD			75 Orang	965.800.000
7	0101	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	79,70 Poin	2.644.104.455	PAD			79,80 Poin	2.923.687.870
7	0101	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Paket	50.000.000	PAD			1 Paket	70.000.000
7	0101	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	34 Paket	518.560.889	PAD			34 Paket	570.558.560
7	0101	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	37 Paket	1.016.972.665	PAD			37 Paket	1.118.676.020
7	0101	2.06	0005	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	7 Paket	183.999.775	PAD			7 Paket	202.399.890

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	12 Dokumen	116.594.000	PAD		12 Dokumen	128.253.400
7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Kota	20 Laporan	9.977.126	PAD		20 Laporan	11.000.000
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Kota	20 Laporan	748.000.000	PAD		20 Laporan	822.800.000
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	79,70 Poin	597.149.000	PAD		79,80 Poin	660.761.600
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	5 Unit	246.513.000	PAD		1 Unit	275.000.000
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Unit	-	PAD		1 Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0101	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	3 Unit	350.636.000	PAD			1 Unit	385.761.600
7	0101	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	79,70 Poin	2.994.842.900	PAD			79,80 Poin	3.330.718.360
7	0101	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	12 Laporan	648.735.300	PAD			12 Laporan	750.000.000
7	0101	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Kota	26 Laporan	2.346.107.600	PAD			26 Laporan	2.580.718.360
7	0101	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Kota	79,70 Poin	2.031.647.500	PAD			79,80 Poin	2.392.909.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 0 1 0 1 2.0 9 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Balikpapan Kota	34 Unit	234.934.800	PAD		34 Unit	258.428.280
7 0 1 0 1 2.0 9 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Balikpapan Kota	34 Unit	416.688.200	PAD		34 Unit	458.357.020
7 0 1 0 1 2.0 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Balikpapan Kota	165 Unit	148.700.000	PAD		165 Unit	350.000.000
7 0 1 0 1 2.0 9 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Kota	6 Unit	948.000.000	PAD		6 Unit	1.042.800.000
7 0 1 0 1 2.0 9 001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Kota	6 Unit	283.324.500	PAD		6 Unit	283.324.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	335.374.270	PAD		100%	1.254.468.830
7 0 1 0 2 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	184.810.600	PAD		100%	916.537.720
7 0 1 0 2 2.0 1 000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Kota	3 Laporan	160.810.600	PAD		3 Laporan	890.137.720
7 0 1 0 2 2.0 1 000 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Dokumen	24.000.000	PAD		1 Dokumen	26.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 0 1 0 2 2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	60.563.670	PAD		100%	227.931.110
7 0 1 0 2 2.0 2	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	2 Dokumen	16.294.000	PAD		2 Dokumen	179.234.000
7 0 1 0 2 2.0 2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Laporan	44.269.670	PAD		1 Laporan	48.697.110
7 0 1 0 2 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	90.000.000	PAD		100%	110.000.000
7 0 1 0 2 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen NonPerizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Balikpapan Kota	200 Dokumen	90.000.000	PAD		200 Dokumen	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 0 1 0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	10,40%	1.505.289.450	PAD		10,60%	1.720.819.880
7 0 1 0 3 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	149.999.300	PAD		100%	230.000.000
7 0 1 0 3 2.0 2 000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	50 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	PAD		50 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000
7 0 1 0 3 2.0 2 000 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Laporan	49.999.300	PAD		1 Laporan	120.000.000
7 0 1 0 3 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	1.355.290.150	PAD		100%	1.490.819.880
7 0 1 0 3 2.0 3 000 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Balikpapan Kota	2 Lembaga Kemasyarakatan	657.008.000	PAD		2 Lembaga Kemasyarakatan	722.708.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	013	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Kota	2 Laporan	608.383.000	PAD			2 Laporan	669.221.520
7	013	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Kota	1 Laporan	89.899.150	PAD			1 Laporan	98.889.560
7	014			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	625.196.600	PAD			100%	687.716.260
7	014	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	625.196.600	PAD			100%	687.716.260
7	014	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	4 Laporan	625.196.600	PAD			4 Laporan	687.716.260

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kelurahan Klandasan Ulu								
7	KECAMATAN								
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	10,60%	2.155.399.508	PAD		10,80%	2.370.941.141
7	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	1.238.246.380	PAD		100%	1.362.071.741
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	60 Lembaga Kemasyarakatan	38.771.990	PAD		60 Lembaga Kemasyarakatan	42.649.241
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kelurahan Klandasan Ulu	53 Unit	1.169.474.645	PAD		3 Unit	1.286.422.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	013.2.0003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klandasan Ulu	2 Pokmas/Ormas	29.999.745	PAD	2 Pokmas/Ormas	33.000.000
7	013.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	917.153.128	PAD	100%	1.008.869.400
7	013.2.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Klandasan Ulu	44 Lembaga Kemasyarakatan	917.153.128	PAD	44 Lembaga Kemasyarakatan	1.008.869.400
		Kelurahan Klandasan Ilir							
7	013	KECAMATAN							
7	013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	10,60%	2.590.659.600	PAD	10,80%	2.849.725.560
7	013.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	1.261.951.600	PAD	100%	1.388.146.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 0 1 0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	10,60%	2.058.594.807	PAD		10,80%	2.264.532.490
7 0 1 0 3 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	1.216.268.827	PAD		100%	1.337.973.890
7 0 1 0 3 2.0 2 000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai	70 Lembaga Kemasyarakatan	30.959.695	PAD		70 Lembaga Kemasyarakatan	34.056.000
7 0 1 0 3 2.0 2 000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Damai	3 Unit	1.155.379.752	PAD		3 Unit	1.270.917.890
7 0 1 0 3 2.0 2 000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai	2 Pokmas/Ormas	29.929.380	PAD		2 Pokmas/Ormas	33.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 0 1 0 3 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	842.325.980	PAD		100%	926.558.600
7 0 1 0 3 2.0 3	000 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Damai	40 Lembaga Kemasyarakatan	842.325.980	PAD		40 Lembaga Kemasyarakatan	926.558.600
	Kelurahan Prapatan								
7 0 1	KECAMATAN								
7 0 1 0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	10,60%	2.037.813.027	PAD		10,80%	2.241.594.850
7 0 1 0 3 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	1.195.487.027	PAD		100%	1.315.036.250
7 0 1 0 3 2.0 2	000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	54 Lembaga Kemasyarakatan	36.797.500	PAD		54 Lembaga Kemasyarakatan	40.477.250

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.0	000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kelurahan Prapatan	3 Unit	1.128.689.527	PAD		3 Unit	1.241.559.000
7	0	0	2.0	000	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Prapatan	2 Pokmas/Ormas	30.000.000	PAD		2 Pokmas/Ormas	33.000.000
7	0	0	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	842.326.000	PAD		100%	926.558.600
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	Kelurahan Prapatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	842.326.000	PAD		40 Lembaga Kemasyarakatan	926.558.600
					Kelurahan Telaga Sari								
7	0				KECAMATAN								
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	10,60%	2.368.075.435	PAD		10,80%	2.604.883.709

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 0 1 0 3 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	1.349.386.795	PAD		100%	1.484.326.029
7 0 1 0 3 2.0 2 000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	80 Lembaga Kemasyarakatan	40.697.460	PAD		80 Lembaga Kemasyarakatan	44.767.250
7 0 1 0 3 2.0 2 000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Telaga Sari	3 Unit	1.278.689.475	PAD		3 Unit	1.406.558.779
7 0 1 0 3 2.0 2 000 3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	2 Pokmas/Ormas	29.999.860	PAD		2 Pokmas/Ormas	33.000.000
7 0 1 0 3 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Kota	100%	1.018.688.640	PAD		100%	1.120.557.680

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga yang	Kelurahan Telaga Sari	49 Lembaga Kemasyarakatan	1.018.688.640	PAD	49 Lemabaga Kemasyarakatan	1.120.557.680
TOTAL									33.068.998.223,00				38.010.718.740

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Balikpapan.

3.5 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Kota yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Kota berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Kota terus berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan Kota mendukung prioritas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menurut informasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar akan penuh dan di tutup pada tahun 2026 dengan kata lain masa pakai TPA Manggar hanya tersisa 2 tahun lagi ditambah dengan banyaknya sampah yang menumpuk pada TPS-TPS di Kecamatan Balikpapan Kota pada waktu bukan jam pembuangan sampah, maka berdasarkan hal tersebut perlu adanya pengelolaan sampah secara mandiri.

Sejak disahkannya Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga belum adanya sistem pengelolaan sampah secara terpadu atau komprehensif di Kecamatan Balikpapan Kota. Kecamatan Balikpapan Kota bekerja sama dengan DLH Kota Balikpapan memiliki gagasan untuk membangun Tempat Pengelohan Sampah Terpadu (TPST) yang nantinya akan menjadi tempat pengelolaan sampah di Kecamatan Balikpapan Kota, akan tetapi masih belum adanya sistem yang mempermudah masyarakat di lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota untuk menjangkau TPST tersebut.

Adapun Inovasi yang ada di Kecamatan Balikpapan Kota sebanyak 1 (satu) inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nama Inovasi : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sukses Balikpapan Kota
- Inisiasi Inovasi : **Inisiasi Mandiri**
- Penjelasan Singkat Inovasi : Terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sukses Balikpapan Kota dengan dasar Surat Keputusan Camat Balikpapan Kota. Dengan adanya KSM Sukses Balikpapan ini masyarakat dimudahkan dalam membuang sampah rumah tangganya, hanya dengan menaruh sampahnya didepan rumah yang nantinya akan diambil oleh Petugas KSM dan kemudian akan diolah untuk sampah organik diolah dirumah magoot dan sampah anorganik akan dikumpulkan dan dijual kepada pihak ketiga.
- Latar Belakang/ Alasan : 1. Sejak Perda Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan Kota Balikpapan belum melaksanakan pengelolaan sampah secara

- menyeluruh atau komprehensif;
2. Berdasarkan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan TPA akan ditutup pada tahun 2026;
 3. Sebagaimana salah satu fungsi Kecamatan yaitu sebagai pengorganisasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup yang diatur dalam Perwali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 4. Apabila dilaksanakan pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), kita belum memiliki lahan sementara terdapat aset pemerintah yang dapat dimanfaatkan

Waktu Pelaksanaan

Inovasi

Tanggal Pembuatan : Februari 2024

Tanggal Pelaksanaan : Maret 2024

Penerima Manfaat Inovasi : Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota

Dampak : Masyarakat lebih muda dalam membuang sampah, serta mengurangi volume sampah di TPS-TPS karena KSM memilah dan mengolah sampahnya

Apresiasi atau : -

Penghargaan

Tautan Pelaksanaan : -

Inovasi

BAB VI PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Kota tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Kota. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.
- b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian- penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi, Subbag, Kelurahan dan seluruh staf Kecamatan Balikpapan Kota secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi aparatur Kecamatan Balikpapan Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Kota serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

EE. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kecamatan Balikpapan Utara senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang, terutama Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut khususnya Kecamatan Balikpapan Utara, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025.

Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Balikpapan Utara dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Utara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Balikpapan Utara untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah. Serta menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan kecamatan pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan dokumen renja adalah sebagai pedoman:

- Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Rentra Peragkat Daerah

Kegiatan reuiu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2023. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Utara

Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	502.828.150	466.161.800	92,71%
1.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	345.203.500	309.327.000	89,61%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	334.785.700	299.350.000	89,42%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.417.800	9.977.000	95,77%
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	65.624.850	64.942.000	98,96%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.000.000	4.941.500	98,53%
	Peningkatan Efekifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.624.850	60.000.500	98,97%
1.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	91.999.800	91.892.800	99,88%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	91.999.800	91.892.800	99,88%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.143.330.650	9.811.229.185	96,73%
2.1	KECAMATAN	1.013.862.400	996.613.800	98,30%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	84.454.250	76.245.500	90,28%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.549.000	13.999.000	96,22%
	Evaluasi Kelurahan	69.905.250	62.246.500	89,04%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	929.408.150	920.368.300	99,03%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	722.378.400	716.337.000	99,16%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	172.430.750	170.179.500	98,69%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	34.599.000	33.851.800	97,84%
2.2	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	950.703.500	942.863.837	99,18%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	503.996.500	498.295.250	98,87%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.996.800	11.950.800	99,62%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	371.999.700	366.814.450	98,61%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	119.530.000	99,61%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	446.707.000	44.568.587	99,52%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	446.707.000	44.568.587	99,52%
2.3	KELURAHAN KARANG JOANG	1.645.252.400	1.626.685.954	98,87%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	902.092.400	886.715.895	98,30%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	11.844.600	98,96%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	867.092.400	852.106.095	98,27%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.765.200	98,83%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	743.160.000	739.970.059	99,57%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	743.160.000	739.970.059	99,57%
2.4	KELURAHAN GRAHA INDAH	1.835.121.650	1.800.262.887	98,10%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.009.192.700	980.407.200	97,15%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.999.900	14.899.700	99,33%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	994.192.800	965.507.500	97,11%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	825.928.950	819.855.687	99,26%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	825.928.950	819.855.687	99,26%
2.5	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	1.365.990.000	1.288.527.807	94,33%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	668.700.000	599.957.200	89,72%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	14.394.000	95,96%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	663.700.000	585.563.200	92,40%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	0	0%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	697.290.000	688.570.607	98,75%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	697.290.000	688.570.607	98,75%
2.6	KELURAHAN MUARA RPAK	1.709.451.800	1.690.418.949	98,89%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	620.400.000	610.104.210	98,34%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	15.000.000	14.819.500	98,80%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	585.400.000	575.498.210	98,31%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.786.500	98,93%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.089.051.800	1.080.314.739	99,20%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.089.051.800	1.080.314.739	99,20%
2.7	KELURAHAN BATU AMPAR	1.622.948.900	1.465.855.951	90,32%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	640.539.900	536.517.800	83,76%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.953.400	12.170.900	81,39%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	505.586.500	446.560.100	88,33%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	77.786.800	64,82%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	982.409.000	929.338.151	94,60%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	982.409.000	929.338.151	94,60%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	438.624.400	345.671.300	78,81%
3.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	438.624.400	345.671.300	78,81%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	438.624.400	345.671.300	78,81%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.389.492.556	15.887.392.592	91,36%
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.995.000	34.372.500	98,22%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.495.500	12.173.500	97,42%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.980.000	5.902.000	98,70%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.519.500	16.297.000	98,65%
4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.896.490.325	9.666.558.373	88,71%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.896.490.325	9.666.558.373	88,71%
4.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0%
4.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.914.996.691	2.871.901.879	99%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.999.000	30.588.000	98,67%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.706.789.841	1.684.600.000	98,70%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	48.766.000	97,53%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	426.993.100	421.383.800	98,69%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.705.750	91.846.000	99,07%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	148.340.000	135.577.000	91,40%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.169.000	459.141.079	99,99%
4.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.240	62.309.830	89,01%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.240	62.309.830	89,01%
4.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.536.935.500	2.387.950.047	94,13%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510.000.000	437.005.877	85,69%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.026.935.500	1.950.944.170	96,25%
4.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.074.800	864.299.963	92,33%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	392.050.000	334.902.724	85,42%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.024.800	162.023.000	92,57%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	369.000.000	367.374.239	99,56%
	Jumlah	28.474.275.756	26.510.454.777	93,10%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebesar Rp. 26.510.454.777,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 28.474.275.756,- (93,10 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.963.820.879,- (6,90%). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi keuangan tahun 2023 **lebih tinggi** daripada tahun 2022 yang mencapai 87,89%.

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik,	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,30	80,00	98,40%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	74,50	70,84	95,09%

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2023 dalam mencapai target masih **berkinerja baik** meski tak ada satupun realisasi yang mencapai target yang telah ditetapkan. adapun rincian sebagai berikut:

- a. Pencapaian Sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 98,40% atau predikat “*sangat tinggi*”.
- b. Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mencapai 95,09% atau predikat “*sangat tinggi*”.

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Program yang Memenuhi Target

Sebanyak 1 program yang memenuhi target ditentukan yaitu program pemerintahan dan pelayanan publik;

- b. Program yang Melebihi Target

Sebanyak 1 program yang melebihi target yang ditentukan yaitu Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- c. Program yang Tidak Memenuhi Target

Sebanyak 2 program yang tidak memenuhi target yang ditentukan yaitu Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan dan Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Faktor penyebab tidak memenuhi target adalah:

- 1) Tidak berjalannya kegiatan pemberdayaan Masyarakat berupa pelatihan di Kelurahan Gunung Samarinda karena kurang siapnya PPTK dan perencanaan kegiatan yang tidak dijalankan secara sesuai;
- 2) Tidak berjalannya rakor trantibum sesuai perencanaan. Direncanakan sebanyak 1 kali di kecamatan dan 1 kali di kelurahan, kenyataan dilapangan hanya dilaksanakan 1 kali di Kecamatan dan 1 kali di Kelurahan.

Untuk perbaikan kedepan, kepala seksi (kasi) yang menangani program tersebut untuk menyusun rencana kegiatan lebih baik, menyesuaikan tingkat kebutuhan dan jumlah personil serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2025
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1 = 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)					
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
7														
	URUSAN KEWILAYAHAN													
7	01													
	KECAMATAN													
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	365,00	81,83	72	81,98	114%	81,85	245,66	67,30%
7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	373,75	74,20	74,50	70,84	95,1%	74,75	219,79	58,81%
7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi	335,00	81,5	66	83,95	127%	67,00	232,45	69,39%

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1 = 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Keuangan Perangkat Daerah								
7	01	01	2.03		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335,00	83,8	66	84,56	128%	67,00	235,36	70,26%
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	335,00	78,66	66	79,47	120%	67,00	225,13	67,20%
7	01	01	2.07		Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	335,00	0	66	77,68	0%	67,00	144,68	43,19%
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa	335,00	84,09	66	84,62	128%	67,00	235,71	70,36%

Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1 = 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)					
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335,00	81,13	66	81,62	124%	67,00	229,75	68,58%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
7	01	02	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%

Kode	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1 = 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)					
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
7	01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	85%	15,27%	16%	15,90%	99%	17%	48,17%	56,67%

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1 = 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
7	01	03	2.03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	350%	60%	65%	65%	100%	70%	195%	55,71%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	500%	81%	100%	98%	98%	100%	279%	55,80%

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1 = 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2023)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500%	95%	100%	100%	100%	100%	295%	59,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara, kinerja pelayanan di Kecamatan Balikpapan Utara dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Kinerja pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat diukur melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Adapun pelayanan publik yang disurvei adalah pelayanan yang diberikan melalui loket pelayanan.

2. Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

Kinerja Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan mencakup partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, SPGRM, dana kelurahan, keikutsertaan dalam Lembaga masyarakat tingkat kelurahan dan lainnya.

3. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal

Kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan mencakup Razia Yustisi/Penertiban Rumah Kos/PKL/Miras /Bangunan Tidak BerIMB/Pengajuan Lahan/Razia TPS dan koordinasi trantibum dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan IKM Internal dilakukan dengan mengukur pelayanan yang diberikan secretariat kecamatan kepada pegawai internal mencakup pelayanan keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan lainnya.

Tabel T.C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			81,25	81,30	81,35	81,40	81,00	80,00	81,35	81,40	
2	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			15%	16%	17%	18%	15,27%	15,90%	17%	18%	
3	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			71,00	72,00	73,00	74,00	81,83	81,98	82,25	82,25	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2023 terhadap indikator utama sudah cukup baik, meskipun IKU tidak mencapai target namun masih dalam taraf yang baik yaitu realisasi sebesar 81,00 dari target 81,20 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat dan realisasi sebesar 70.84 dari target 74,50 untuk Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara.

Adapun permasalahan dan hambatan utama Kecamatan Balikpapan Utara yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan SDM di kecamatan Balikpapan Utara:
 - Masih adanya kekosongan jabatan struktural di Kelurahan dalam struktur organisasi Kecamatan;
 - Kekurangan SDM baik PNS dan Non-PNS
 - Adanya pengalihdayaan tenaga Non-PNS menjadi PPPK
2. Pelaksanaan Monev dan Keterlibatan PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan anggaran yang belum maksimal;
3. Perubahan dalam proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan waktu untuk adaptasi dan memahami proses tersebut (melalui e-katalog atau konsolidasi);
4. Percepatan pelayanan publik kepada Masyarakat, serta peningkatan publikasi informasi pelayanan publik kepada Masyarakat agar Masyarakat dapat memahami prosedur, persyaratan dan jangka waktu pelayanan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu sebagai berikut:

- a. PPTK kurang proaktif dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditentukan, sehingga dalam realisasi kegiatan agak sedikit terhambat;
- b. Adanya penetapan dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, khususnya Kecamatan Balikpapan Utara. Adanya IKN Baru ini berdampak terhadap ekonomi dan sosial sehingga perlu *treatment* dalam penanganan dampak-dampak tersebut;
- c. Usulan pembangunan (SPGRM dan Dankel) masih yang belum tertampung dalam penganggaran. Banyaknya usulan yang masuk dengan anggaran yang terbatas sehingga terdapat usulan pembangunan yang tidak dapat diakomodir oleh Kecamatan; dan
- d. Adanya Perubahan Kebijakan yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan (seperti Mandatory Spending ataupun pelimpahan sebagian kewenangan ke Kecamatan)

Berdasarkan hambatan serta tantangan dan peluang di atas, berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sistem pelayanan dan Teknologi Informasi sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengusulkan usulan pembangunan dalam musrenbang (dan terinput dalam aplikasi SIPD) sehingga usulan-usulan masyarakat dapat terakomodir dengan baik;
- c. Melakukan adaptasi yang cepat dan tepat terhadap segala perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti perubahan kebijakan pusat, daerah dan lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil *review* terhadap Rancangan Awal RKPD tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan di luar Rancangan Awal Renja Kecamatan Balikpapan Utara. Masih mengacu dengan Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan 2021-2026, Adapun program prioritas Kecamatan Balikpapan Utara adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Namun, terdapat perbedaan besaran pagu dimana pagu rancangan awal Renja Tahun 2025 **melebihi** pagu Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisis kebutuhan, kelebihan pagu tersebut dikarenakan adanya rencana kenaikan pagu untuk dana operasional (DO) bagi Ketua RT, Pelimpahan kewenangan dari OPD ke Kelurahan, Kegiatan Dana Kelurahan (Dankel) dan Rencana Kecamatan Balikpapan Utara menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Kota Balikpapan pada tahun 2025.

Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan akhir RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Balikpapan

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	81,85	19.953.216.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	81,85	19.953.216.000	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai SAKIP Kecamatan	75,00	38.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai SAKIP Kecamatan	75,00	38.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	18.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	18.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	20.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68,00	12.752.500.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68,00	12.752.500.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	12.752.500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	12.752.500.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68,00	500.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68,00	500.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	500.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	500.000.000	
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68,00	2.187.216.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68,00	2.187.216.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	40.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	548.876.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	548.876.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Disediakan	2	100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Disediakan	2	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	580.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	580.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	85.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	85.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	148.340.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	148.340.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	35.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	35.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	650.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	650.000.000	
IV	Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	68,00	300.000.000	Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	68,00	300.000.000	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	300.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	300.000.000	
V	Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	68,00	2.870.000.000	Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	68,00	2.870.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	650.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	650.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.220.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.220.000.000	
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,00	1.305.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,00	1.305.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	600.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	600.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	205.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	205.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	500.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	500.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	1.065.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	1.065.000.000	
VII	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	585.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	585.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	425.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	425.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	160.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	160.000.000	
VIII	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	330.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	330.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3	65.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3	65.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	265.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	265.000.000	
IX	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	150.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	150.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	900	150.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	900	150.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKPД				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	3.830.692.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	3.830.692.000	
X	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	175.692.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	175.692.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85	85.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85	85.000.000	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6	90.692.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6	90.692.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
XI	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	3.655.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	3.655.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	3.275.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	3.275.000.000	Kec. Utara ditunjuk menjadi Tuan Rumah MTQ Tingkat Kota Tahun 2025 dan Anggaran Penurunan Stunting
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	300.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	300.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	80.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	80.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	670.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	670.000.000	
XII	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	670.000.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	670.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	34	670.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	34	670.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vertikal di Wilayah Kecamatan		Vertikal di Wilayah Kecamatan			Vertikal di Wilayah Kecamatan		Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU)				1.592.992.000	KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU)				1.592.992.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	1.592.992.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	1.592.992.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	656.500.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	656.500.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	16.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	16.500.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	600.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	600.000.000	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	40.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	40.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	934.492.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	934.492.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	38	934.492.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	38	934.492.000	1. Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000 2. Penambahan

		RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											untuk honor operator e-database RT
	KECAMATAN (KELURAHAN KARANG JOANG)				3.672.720.000	KECAMATAN (KELURAHAN KARANG JOANG)				3.672.720.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	3.672.720.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	3.672.720.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2.110.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2.110.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	68	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	68	20.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan di Kelurahan			Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	48	2.050.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	48	2.050.000.000	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU dan Pokir
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	40.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	40.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	1.562.720.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	1.562.720.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66	1.562.720.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66	1.562.720.000	1. Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											2. Penambahan untuk honor operator e-database RT
	KECAMATAN (KELURAHAN GRAHA INDAH)				3.995.528.000	KECAMATAN (KELURAHAN GRAHA INDAH)				3.995.528.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	3.995.528.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	3.995.528.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2.228.800.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2.228.800.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	76	22.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	76	22.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelurahan		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	2.166.800.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	2.166.800.000	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU dan Pokir
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	40.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	40.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	1.766.728.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	1.766.728.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	74	1.766.728.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	74	1.766.728.000	1. Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000 2. Penambahan untuk honor operator e-database RT
	KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA)				3.494.340.000	KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA)				3.494.340.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	3.494.340.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	3.494.340.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2.070.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2.070.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63	20.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	2.020.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	2.020.000.000	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU dan Pokir
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	30.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	30.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	1.424.340.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	1.424.340.000	

		RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61	1.424.340.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61	1.424.340.000	1. Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000 2. Penambahan untuk honor operator e-database RT
	KECAMATAN (KELURAHAN MUARA RPAK)				3.995.592.000	KECAMATAN (KELURAHAN MUARA RPAK)				2.635.592.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	3.995.592.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan		3.995.592.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	100%	1.985.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	18%	3.995.592.000	

		RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kelurahan yang terlaksana					Kelurahan yang terlaksana			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	90	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	1.985.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	1.920.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90	25.000.000	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU dan Pokir
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	40.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	1.920.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	1.970.592.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	1.970.592.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	88	1.970.592.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	88	1.970.592.000	1. Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000 2. Penambahan untuk honor operator e-database RT
	KECAMATAN (KELURAHAN BATU AMPAR)				4.116.494.703	KECAMATAN (KELURAHAN BATU AMPAR)				4.116.494.703	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	4.116.494.703	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	4.116.494.703	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2.281.974.703	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2.281.974.703	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81	22.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81	22.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28	2.219.974.703	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28	2.219.974.703	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU dan Pokir
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1	40.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1	40.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	1.834.520.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%	1.834.520.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	79	1.834.520.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	79	1.834.520.000	1. Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000 2. Penambahan untuk honor operator e-database RT
			JUMLAH		46.346.574.703					46.346.574.703	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Selain itu, usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mana penjangkauan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD-RI. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi berjenjang dari Kelurahan hingga Kecamatan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan.

Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Balikpapan Utara sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Kecamatan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila Gang Swadaya RT. 1 : 1.2378453,116.856923, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (8 Titik)	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Indrakila Gang Bahari RT. 3 : 1.2360962,116.8588141, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase - Panjang: 100 m, Lebar: 1m, Tinggi : 1 m, Tebal : 40 cm	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Satria RT. 4 : 1.2352516,116.8591884, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase - Panjang : 28 m, Lebar: 40 cm, Tinggi: 60 cm, Tebal: 20 cm	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Rawa RT. 4 : 1.2347918,116.8582578, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase - Panjang: 50 m, Lebar: 2 m, Tinggi: 1.5 m, Tebal: 0.15 m	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila RT. 5 : 1.2351387,116.859564, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (7 Titik)	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila Gang Mekarsari RT. 7: 1.2342023,116.8614017, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase - Panjang: 60 m, Lebar: 0.4 m, Tinggi: 0.5 m, Tebal: 0.1 m	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila gang mekarsari RT. 7: 1.2340998,116.8611536, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (10 Titik)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. MT. haryono gang aryo penangsang RT. 8: 1.2272355,116.8691612, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase - Panjang: 20 m, Lebar: 1.5 m, Tinggi: 1.5 m	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. MT. haryono gang aryo penangsang RT. 8: 1.2272355,116.8691612, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Lingkungan - Panjang: 40 m, Lebar: 2 m, Tinggi: 10 cm	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. MT. haryono gang aryo penangsang RT. 8: 1.2272355,116.8691612, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (5 Titik)	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari bukit mutiara RT. 9: 1.2322746,116.864577, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Lingkungan	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari bukit mutiara RT.9: 1.2322746,116.864577, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari bukit mutiara RT. 9: 1.2322746,116.864577, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (10 Titik)	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari bukit mutiara RT. 14: 1.2318899,116.8629573, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (5 Titik)	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan MT. Haryono RT. 15: 1.2344895,116.8720548, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (12 Titik)	
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari bukit mutiara blok C1,C2,C3 RT. 15: 1.2344895,116.8720548, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lampu taman: 4 titik, kursi taman: 4	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. balikpapan baru RT. 24: 1.2410464,116.8614587, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase - Panjang: 100 m, Lebar: 2 m, Tinggi: 1.5 m, Tebal: 40 cm	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. balikpapan baru RT. 24 : 1.2410464,116.8614587, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Lingkungan - Panjang: 100 m, Lebar: 2 m, tinggi 10 cm	
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. balikpapan baru RT. 25 : 1.2413336,116.8610979, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(pos keamanan pintu depan)	
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. balikpapan baru RT. 25 : 1.2413336,116.8610979, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Taman - PJU (10 Titik)	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. balikpapan baru RT. 25: 1.2413336,116.8610979, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (3 Titik)	
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. balikpapan baru RT. 25 : 1.2413336,116.8610979, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Lingkungan - Panjang: 100 m, Lebar : 2 m, Tinggi : 1.5 m, Tebal: 40 cm	
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Lembah mutiara blok H RT. 27: 1.2308342,116.8629218, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase - Panjang:140 m, Lebar: 40 cm, Tinggi: 30 cm, Tebal: 8 cm	
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Lembah mutiara blok b RT. 27: 1.2308342,116.8629218, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase - 140 m, Lebar: 40 cm, Tinggi: 30 cm, Tebal: 8 cm	
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Lembah mutiara RT. 27 : 1.2308342,116.8629218, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (3 Titik)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mt. Haryono RT. 29: 1.227721,116.8701244, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan posyandu	
27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. MT. haryono RT. 29 : 1.227721,116.8701244, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Lingkungan - panjang: 70 m, Lebar: 4 m	
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan arjuna RT. 32 (depan maxi): 1.2312898,116.862618,, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Lingkungan - Panjang: 100 m, Lebar: 4 m, Tinggi: 10 cm	
29	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Arjuna RT. 32 (depan maxi): 1.2312898,116.862618,, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Panjang: 120 m, Lebar: 4 m, Tinggi: 0.1 m	
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila gang sadewa RT. 32 (samping yayasan harapan bangsa), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan rusak Panjang: 70 m, Lebar: 4 m, Tinggi: 0.1 m	
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila gang krisna RT. 32 (depan apotik K24): 1.2289471,116.8634023, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan masih tanah, Panjang: 100 m, Lebar: 4 m, Tinggi: 0.1 m	
32.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Arjuna RT. 32 (depan maxi): 1.2312898,116.862618, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit, Panjang: 150 m, Lebar: 1 m, Tinggi: 1 m, Tebal: 10 cm	
33.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Diponegoro Blok K RT. 35 : 1.2295372,116.863103, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Parit kecil dan sempit, Panjang: 6 m, Lebar: 1 m, Tinggi: 1 m	
34.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Diponegoro Blok D RT. 35 : 1.2295372,116.863103, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit/drainase, Panjang: 8 m, Lebar : 1 m, Tinggi : 1 m	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
35.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Diponegoro Blok I RT. 35: 1.2295372,116.863103, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum parit/drainase, Panjang: 8 m, Lebar: 1 m, Tinggi: 1 m	
36.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. diponegoro RT. 35: 1.2295372,116.863103, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit/drainase, Panjang: 50 m, Lebar: 50 cm, Tinggi : 50 cm	
37.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan gang damai RT. 33: 1.2369337,116.8616474, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan masih Tanah, Panjang: 30 m, Lebar: 2 m, Tebal : 10 cm	
38.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan RT. 33: 1.2368849,116.8615748, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Panjang: 100 m, Lebar: 3 m, Tebal: 12 cm	
39.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan gang damai RT. 33: 1.2368849,116.8615748, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Panjang: 40 m, Lebar: 3 m, Tebal: 10 cm	
40.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan RT. 33: 1.2368849,116.8615748, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Panjang: 80 m, Lebar: 80 cm, Tinggi: 90 cm	
41.	(Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pipa PDAM RT. 36 : 1.2336521,116.8705185, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (10 Titik)	
42.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila gang bahari RT. 3 : 1.2361002,116.8589139, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Panjang: 50 m, Lebar: 2.5 m, Tinggi: 10 cm	
43.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila gang taufik RT. 28 : 1.2270005,116.8645764, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Panjang: 120 m, Lebar: 30, Tinggi: 40 cm	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
44.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila gang swadaya RT. 2: 1.2389519,116.8575256, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PJU (10 Titik)	
45.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila No. 60 RT. 5 (1.2342023,116.8606566), Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan kader PKK (50 orang)	
46.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila No. 60 RT. 5 (1.2342023,116.8606566), Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (50 orang)	
47.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila No. 60 RT. 5 : 1.2342023,116.8606566, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keswadayaan Masyarakat (LKM) 50 orang	
48.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila No. 60 RT. 5:1.2342023,116.8606566, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Forum Anak (50 orang)	
49.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila No. 60 RT. 5:1.2342023,116.8606566, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 50 orang	
50.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila No. 60 RT. 5:1.2342023,116.8606566, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Karang Taruna Kelurahan (30 Orang)	
51.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila No. 60 RT. 5:1.2342023,116.8606566, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keagamaan Fardhu Kifayah pada 36 RT (80 Orang)	
KELURAHAN KARANG JOANG					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 04, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. KARYA BHAKTI GANG TERATE RT. 08 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 08, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG. AMANAH RT. 12, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 13 JL. SEHATI , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 GG. SIDO MAKMUR , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 GG. MARDI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA RT. 15 GG. CERIA , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA RT. 15 GG. CERIA, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA RT. 15 GG. TERATAI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA RT. 15 GG. MERPATI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 (PERUM AROFATUNAH) , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PDAM RT. 18 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PDAM RT. 18 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PDAM RT. 18 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. MERANTI GANG BAHAGIA RT. 21 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BANGKIRAI GANG GOLF RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 25, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 27, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 28, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. GIRI REJO KM. 15 RT. 28, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. GIRI REJO KM. 15 RT. 28, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. MAKAM RT. 30, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GANG FAMILI KM. 15 RT. 30 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. MAKAM RT. 30, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 31, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA KM. 15 RT. 31, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
29.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 38, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINDUNG KM. 17 RT. 38 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. AGRO LESTARI KM. 23 RT. 42 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
32.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. AGRO LESTARI KM. 23 RT. 42 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
33.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. AGRO LESTARI 1 KM. 23 RT. 42 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
34.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. AGRO WISATA RT. 42 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
35.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PERJUANGAN I KAMPUNG TATOR RT. 45 KM. 24 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
36.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PERJUANGAN I KAMPUNG TATOR RT. 45 KM. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
37.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 45 KM. 24 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
38.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 45 KM. 25 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
39.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PERBATASAN RT. 45 KM. 24 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
40.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. STRAT JEPANG KM. 24 RT. 45 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
41.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 45 KM. 24 JL. PERJUANGAN GANG ULIN , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
42.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PERJUANGAN 2 KM. 24 RT. 45 JL. KUBUR , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
43.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PERJUANGAN 2 KM. 24 RT. 45 JL. KUBUR , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
44.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. KUBURAN MUSLIMIN KM. 20 RT. 46 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
45.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. TENGAH KM. 20 JL. SOEKARNO HATTA RT. 46 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
46.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GANG BORNEO RT. 46 KM. 20 JL. SOEKARNO HATTA , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
47.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GANG LMP KM. 20,5 RT. 46 JL. SOEKARNO HATTA , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
48.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 48 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
49.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SOEKARNO HATTA KM. 19 GG. H SAYUTY RT. 49 JALAN DIBELAKANG GEDUNG BELAJAR PONPES ALBANJARI KM. 19 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
50.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SOEKARNO HATTA KM. 20 GG. ABUYA SYARWANI RT. 49 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
51.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SOEKARNO HATTA KM. 20 GG. SMP 20 RT. 49 (BELAKANG SDN 029) , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
52.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 53 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
53.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 54 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
54.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINDUNG KM. 17 RT. 55 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
55.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 PERUM GRIYA KARANG JAONG ASDRI 2 RT. 62 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
56.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KARANG JOANG, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	
57.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KARANG JOANG, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan	
58.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 06, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
59.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 43, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
KELURAHAN GRAHA INDAH					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL TAMAN SARI KAV 5 RT 23, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL TAMAN SARI KAVING 5 RT 23, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL PGRI GANG MANGROVE III RT 14, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Graha Indah Blok F1 RT 02, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Graha indah RT 2, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Graha Indah PGRI RT 11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Bangun Reksa Blok AK RT 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Taman Sari Blok G (Gang Samping Masjid AT-Thoriq) RT 28, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Taman Sari 1 Blok A RT 28, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Bangun Reksa Blok D 26 c - D 61 RT 17, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Bangun Reksa Asri Blok I RT 17 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Bangun Reksa Asri Blok D1 RT 17, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JALAN PADAT KARYA KM 9 RT 63, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Graha wiyata asri Km 9 Gang Padat Karya RT 63, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Graha Wiyata asri Blok G Gang Padat karya RT 63, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL Graha Wiyata Asri Gang Padat Karya 1 RT 63, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Soekarno Hatta Km9 Gang Padat karya RT 63, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Padat Karya Km8,5 Blok H2 RT 67, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Graha indah PGRI BLok V RT 8, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan padat karya km 8,5 blok c dan blok h RT 67 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL SOEKARNO HATTA GANG HENDRIK 3 RT 36, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL SOEKARNO HATTA GANG HENDRIK 4 RT 36, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL Soekarno Hatta Gang Hendrik 2 RT 36, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL Bangun Reksa RT 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Bangun Reksa RT 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Bangun Reksa Blok BB, M, dan Blok N RT 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Dase Ponpes RT 53, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Gang AMD IV RT 44, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
29.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL PDAM KM 8 RT 68 (IPAM PDAM), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL PDAM Km 8 RT 68 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekano Hatta Km 8 Inarta RT 68, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
32.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan PDAM Km 8 Gang Padat Karya RT 68, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
33.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Km 8 Gang PDAM RT 68, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
34.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Km 8 RT 38, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
35.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Intan Permai 1 RT 48, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
36.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Projakal Gang Diana RT 29, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
37.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Km 6 Gang Diana RT 29, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
38.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL Taman Sari Gang Beriman 9 RT 64, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
39.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Taman Sari Gang Beriman 4 RT 64, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
40.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Taman Sari Gang Beriman 4A RT 64, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
41.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Taman Sari Gang Beriman 5 RT 64, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
42.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Taman Sari Gang Beriman 11 RT 64, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
43.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Projakal Gang SS RT 55, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
44.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL Projakal Gang Semangka RT 55, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
45.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL Projakal Km 5 Gang Osama RT 55, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
46.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL Ksatrian Km 8 RT 40, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	
47.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Graha Indah Blok B RT 01 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
48.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Batuah RT 71, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
49.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Batuah RT 71, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
50.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Graha Indah Blok B5 Gunung RT 7, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
51.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Graha Indah Blok D RT 3, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
52.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL Perjuangan 1 RT 52, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
53.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL Muamalat 1 RT 52, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
54.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL Perjuangan 2 RT 52, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
55.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Sangga Buana Gang Laba a RT 35, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
56.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Sangga Buana Gang Adon RT 35, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
57.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Sangga Buana Gang Merdeka RT 35, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
58.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Purnawirawan RT 8 RT 37, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
59.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Taman Sari Jalan Utama RT 25, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SUMBER REJO 3 GG. DEPAG 2 RT. 09, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. DUA/PANJAITAN RT. 02, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG. DEPAG, GG. DEPAG 1, GG. DEPAG 4 DAN JL. SUMBER REJO 3 RT. 09, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SUMBER REJO 3 GG. DEPAG 1 RT. 09, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SUMBER REJO 3 GG. DEPAG 1 RT. 09, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SATU GG. ADIKARYA RT. 10, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SATU GG. OLAHRAGA RT. 10, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SATU GG. OLAHRAGA RT. 10, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SATU GG. ADIDAYA RT. 10, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SATU GG. KECAPI RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SATU RT. 14, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SATU RT. 14, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BUBUT RT. 15, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BUBUT GG. PERSAUDARAAN RT. 15, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. DUA RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. DUA LATSITARDA NO. 21 C RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. DUA RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. DUA GG. NURI RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SRAT 2 ANTARA RT. 21 DAN RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. INDRAKILA GG. CAKRA RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. INDRAKILA GG. FAMILY RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. INDRAKILA GG. MANGGA DUA RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
29	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. INDRAKILA RT. 26, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG. ANTASENA DAN GG. MASJID RT. 26, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. INDRAKILA RT. 26, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
32.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG. ANTASENA DAN GG. NAKULA SADEWA RT. 26, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
33.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG. ARIMBI DAN GG. SRIKANDI RT. 26, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
34.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG. SAMPING BAKMI DM GG. PISANG RT. 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
35.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG. MANGGA RT. 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
36.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA GN. STELING GG. FAMILY 1 RT. 39, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
37.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA GN. STELING GG. KELUARGA RT. 39, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
38.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. COBRA GG. SUMUR 7 RT. 40, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
39.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA RT. 40, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
40.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA RT. 40, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
41.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA RT. 40, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
42.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA RT. 40, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
43.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA RT. 40, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
44.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 40, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	
45.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SOEKARNO HATTA KM 2 GG. TELADAN RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
46.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. GN. STELLING VI/ BLOK F RT. 53, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
47.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. GN. STELLING VI/ BLOK F RT. 53, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
48.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 53, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	
49.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA GG. HARMONI RT. 54, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
50.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA GG. PRIJEK JOYO RT. 54, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
51.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA RT. 54, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
52.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. INDRAKILA RT. 55, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
53.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SATU DEPAN MUSHOLLA AL AL-AQSO PERUMAHAN CALADIUM RT. 55, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
54.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SATU PERUMAHAN CALADIUM RT. 55, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
55.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. INDRAKILA GG. PELANGI RT. 56, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
56.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. INDRAKILA GG. WONOMULYO RT. 56 JALAN BARU, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
57.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. INDRAKILA RT. 58, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
58.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LANGGAR RAHMATULLAH RT. 16, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
59.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PERUMAHAN WARGA RT. 16, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	
60.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. DUA GG. AKABRI RT. 19, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
KELURAHAN MUARA RAPAK					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Inpres II RT. 13 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Usulan Perbaikan Drainase RT. 13 LOKASI: Jl. Inpres II RT. 13 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Alasan : gorong-gorong terlalu sempit sehingga saat hujan aliran air meluap ke RT lain Tujuan : Mencegah longsor, banjir dan memperlancar arus air VOLUME: Panjang : 35 m, Lebar 60 cm, Tinggi, 70 cm TITIK KORDINAT: - 1.230144, 116.838343	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(Dana Kelurahan) Pemasangan/Pengadaan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kelurahan Muara rapak	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Kader Keluarga Berencana di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Kader Posyandu di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 12 Jl inpres 3 RT. 12 no. 36, Titk Koordinat (-1, 229412, 116,838427), Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Perbaikan Posyandu, Jl inpres 3 RT. 12 no. 36, Titk Koordinat (-1, 229412, 116,838427), Kondisi :	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
				Posyandu belum sempurna, Atap bocor, lantai 2 kamar belum dikeramik dan pagar halaman, Volume : Panjang : 20 m, Lebar : 10 m, Tinggi : 70 cm, Ketebalan : 50 cm	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Cake dan Pastry di Wilayah Kelurahan Muara Rapak	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Wirausaha Pemuda di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Perikanan Budidaya di Wilayah Kelurahan Muara Rapak	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 15, Lokasi: Jl. Inpres IV Gg Flamboyan Titik Koordinat : -1.2285510, 116.8390600, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Perbaikan Posyandu RT. 15, Lokasi: Jl. Inpres IV Gg Flamboyan RT. 15 Kelurahan Muara Raapak Kecamatan Balikpapan Utara Volume : Panjang: 9 M Lebar: 4 M, Titik Koordinat : -1.2285510, 116.8390600	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Barista di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Content Creator di Wilayah Kelurahan Muara Rapak	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 16, Lokasi : Jl. Inpres IV Gang Akasia, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Perbaikan posyandu RT. 16, Lokasi : Jl. Inpres IV Gang Akasia Kel. Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Volume : Panjang : 16 m Panjang 7 m	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan kerja atau Kewirausahaan di wilayah Kelurahan Muara Rapak	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 21Jl. Inpres I Halaman Parkir Gg. Liverpool RT 21 (PojoK Dalam) Kel. Muara rapak , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Renovasi/Pembangunan Posyandu Semarak 21 (Dinding, Atap, Lantai, Jendela dan Pintu), Jl. Inpres I Halaman Parkir Gg. Liverpool RT 21 (PojoK Dalam) Kel. Muara rapak Titik Koordinat: - 12324403, 116.8382213, Kondisi: Posyandu yang ada sanagt kecil dan sempit (uk. 3x2 m), Volume: Panjang: 5 m atau 6 m (sesuai uk. Tanah), Lebar: 4m, Tinggi: 2,5m atau 3m, Luas 24 m	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kelurahan Muara Rapak	
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 23 Jl. Inpres II NO. 42 RT. 23, Titik Koordinat:Lat -1.233617° Long 116.836677°, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Pembuatan Posyandu, Jl. Inpres II NO. 42 RT. 23, Titik Koordinat:Lat -1.233617° Long 116.836677°, Kondisi: Belum ada Bangunan, RT. 23 Belum memiliki Posyandu Volume: Panjang: 5m, Lebar: 3m, Tinggi: 3m,	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Usaha di Wilayah Kelurahan Muara Rapak	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Borobudur RT. 36 , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Perbaikan Posyandu Jl. Borobudur RT. 36 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Volume: Lebar 4 M, Panjang 3M	
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Eco Enzyme di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan	
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 054 Jl.Klamono III , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Perbaikan Posyandu, Jl.Klamono III RT 054 Kelurahan Muara Rapak Balikpapan utara, Kondisi : tidak layak di gunakan utk kegiatan ibu ibu PKK di lingkungan RT, Posyandu sering di gunakan ibu ibu PKK untuk kegiatan RT 3 sampai 4 kali dalam sebulan untuk kegiatan RT, Volume : Panjang : 7 m, Lebar : 4 m, Tinggi : 3 m, Ketebalan : 13 cm	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Kelompok Pengelola Prasarana (KPP) di Wilayah Kelurahan	
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Public Speaking di Wilayah Kelurahan Muara Rapak	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 55 Jl klamono 3 , Titik Koordinat (- 1,2346939,116,8352400), Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Perbaikan Posyandu, Jl klamono 3 RT 55 kelurahan muara rapak, Titik Koordinat (- 1,2346939,116,8352400), Kondisi : Pos yandu sudah pada rusak, Karena perlu ada perbaikan, Volume : Panjang : 8 m, Lebar : 4 m, Tinggi 3 m, Ketebalan 5 cm	
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 56, Lokasi: Jl. Klamono Titik Koordinat: - 1.2349044, 116.8342141, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Perbaikan Posyandu RT. 56, Lokasi: Jl. Klamono RT. 56 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Volume: Panjang: 8 M Lebar: 6 M, Titik Koordinat: -1.2349044, 116.8342141	
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 57 Jl. Klamono Blok V Titik Koordinat (- 1.239750,116.834403) , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Perbaikan Posyandu, Jl. Klamono RT 57 Blok V Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, Titik Koordinat (- 1.239750,116.834403), Kondisi : Sebahagian bangunan sdh jabuk, Yg ada sekarang pakai bangunan poskamling yg sempit dengan bangunan swadaya warga, Volume: Panjang : 3 m, Lebar : 3 m, Tinggi : 300 cm, Ketebalan 150 cm	
27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Pekerja Konstruksi (Tukang) di Wilayah Kelurahan Muara	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 70 Jl. Arjuna Gunung Polisi , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Perbaikan Posyandu, Jl. Arjuna Gunung Polisi RT. 70, Kondisi: Atap seng sudah banyak bocor, dan plavon rusak/rapuh, Volume: 1 Paket	
29.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 84 Jl. Batu Butok Titik Koordinat: - 1.2266632, 116.8348962, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(SPGRM) Perbaikan Posyandu RT. 84 Lokasi: Jl. Batu Butok RT. 84 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Volume: Panjang: 6 M Lebar: 4 M, Titik Koordinat: -1.2266632, 116.8348962	
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Padat Karya RT. 3 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat: - 1.2255171, 116.8409887 , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(Dana Kelurahan) Pembangunan Drainase RT. 3 dan RT. 4 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kondisi: Masih Berupa Parit alam , Volume: Panjang: 250 M Lebar: 60 CM Tinggi: 80 CM, Titik Koordinat: - 1.2255171, 116.8409887	
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Arjuna Inpres IV RT. 8 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat : -1.2263499, 116.8410824, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(Dana Kelurahan)Perbaikan Drainase RT. 8, Lokasi:Jl. Arjuna IV RT. 8 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kondisi Rusak Volume: Panjang: 150 M Lebar 60 CM Tinggi:1 M, Titik Koordinat: -1.2263499, 116.8410824	
32.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Klamono RT. 52 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat: - 1.2366046, 116.8368420, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(Dana Kelurahan) Pembangunan Drainase RT. 52 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, kondisi : masih berupa parit alam Volume: Panjang: 100 M Lebar:80 CM Tinggi: 60	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
				CM, Titik Koordinat: -1.2366046, 116.8368420	
33.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(Dana Kelurahan) Perbaikan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kelurahan Muara rapak	
KELURAHAN BATU AMPAR					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Batu Ampar Lestari D2 30 RT.62 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Meranti Raya belakang gedung serbaguna RT.10), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komplek Ramayana RT.22, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Ranah Asri RT.59, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komplek Ramayana RT.22, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. A. W. Syahrani Gg. Podomoro 2 RT.75, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Fanwas RT.51, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Mandastana RT.56 Gg Merpati 1, 2, 3, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Minangkabau RT.69, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Perum Batu Ampar Lestari RT.62, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Patimura RT.50, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan	
USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR) DPRD					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sebagian titik Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sebagian Titik Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sebagian di wikayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sebagian titik Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	sebagian titik Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 44 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan LKMD Sumber Indah Nusa Indah RT 70 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	tersebar se kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

BAB III

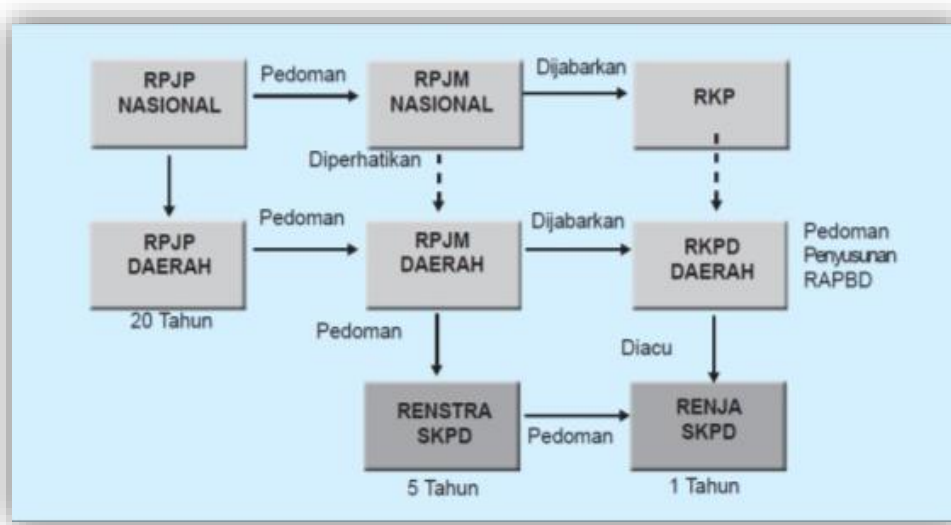
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi PD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut:

Gambar 3.1

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004



Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritas pelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi PD dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan Akuntabilitas Publik. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan database kecamatan;
4. Pembentukan tim satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan;
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman” serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”. Maka rumusan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Utara adalah “*Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan*”.

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Utara juga menentukan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,40
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	75,00

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam

merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026;
- 2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
- 3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
- 4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Utara;
- 5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan di sempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

- 2 Evaluasi Kelurahan
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Samarinda Baru
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karang Joang
- 5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Graha Indah
- 6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Samarinda
- 7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muara Rapak
- 8 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Batu Ampar
- 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Samarinda Baru
- 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Joang
- 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Graha Indah
- 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Samarinda
- 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muara Rapak
- 14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Ampar
- 15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda Baru
- 16 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Joang
- 17 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Graha Indah
- 18 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gn. Samarinda
- 19 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Rapak
- 20 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Ampar
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

- 2 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Samarinda Baru
- 3 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karang Joang
- 4 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Graha Indah
- 5 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Samarinda
- 6 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Muara Rapak
- 7 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Batu Ampar
- 8 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 9 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 3 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
- 2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 6 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
- 3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2025 adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan;
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 46.346.574.703,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana sebesar Rp 19.953.216.000,- untuk program dan kegiatan penunjang;

b) Dana sebesar Rp 26.393.358.703,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Kecamatan Balikpapan Utara untuk sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini.

Tabel T.C-33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 0 1		KECAMATAN							26.047.286.374
7 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Kec. Balikpapan Utara	81,85	19.953.216.000	APBD		74,00	22.288.786.374
7 0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Balikpapan Utara	75,00	38.500.000	APBD		75,00	41.965.000
7	01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Balikpapan Utara	2	18.500.000	APBD		1	19.965.000
7	01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Balikpapan Utara	1	20.000.000	APBD		1	22.000.000
7 0 1	0 0 2.0 1 1 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Balikpapan Utara	68,00	12.752.500.000	APBD		68,00	14.831.071.374
7	01 01 2.01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balikpapan Utara	62	12.752.500.000	APBD		62	14.831.071.374

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Balikpapan Utara	68,00	500.000.000	APBD		68,00	500.000.000
7	01	01	2.05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Balikpapan Utara	50	500.000.000	APBD		50	500.000.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Balikpapan Utara	68,00	2.187.216.000	APBD		68,00	2.090.050.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	1	40.000.000	APBD		1	36.000.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	5	548.876.000	APBD		5	465.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	2	100.000.000	APBD		2	120.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	7	580.000.000	APBD		7	623.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	4	85.000.000	APBD		4	90.250.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	12	148.340.000	APBD		12	150.000.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Balikpapan Utara	12	35.000.000	APBD		12	26.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Balikpapan Utara	14	650.000.000	APBD		15	700.000.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Balikpapan Utara	68,00	300.000.000	APBD		68,00	320.000.000
7	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	2	300.000.000	APBD		2	320.000.000
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Kec. Balikpapan Utara	68,00	2.870.000.000	APBD		67,00	3.543.000.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	12	650.000.000	APBD		12	655.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	12	2.220.000.000	APBD		12	2.888.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Balikpapan Utara	68,00	1.305.000.000	APBD		67,00	1.562.500.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Balikpapan Utara	40	600.000.000	APBD		39	625.500.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Balikpapan Utara	100	205.000.000	APBD		100	237.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Balikpapan Utara	6	500.000.000	APBD		7	700.000.000
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Kec. Balikpapan Utara	100%	1.065.000.000	APBD		100%	960.000.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kec. Balikpapan Utara	100%	585.000.000	APBD		100%	625.000.000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Balikpapan Utara	5	425.000.000	APBD		5	440.000.000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	2	160.000.000	APBD		3	185.000.000
7 0 0 2.0 1 2 2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Kec. Balikpapan Utara	100%	330.000.000	APBD		100%	180.000.000
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	3	65.000.000	APBD		3	75.000.000
7 01 02 2.02 02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	3	265.000.000	APBD		3	105.000.000
7 0 0 2.0 1 2 4	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Balikpapan Utara	100%	150.000.000	APBD		100%	155.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Balikpapan Utara	900	150.000.000	APBD		800	155.000.000
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	18%	3.830.692.000	APBD		19%	1.463.500.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kec. Balikpapan Utara	100%	175.692.000	APBD		100%	180.000.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	85	85.000.000	APBD		85	80.000.000
7	01	03	2.02	07	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	6	90.692.000	APBD		6	100.000.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	75%	3.655.000.000	APBD		80%	1.283.500.000
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Balikpapan Utara	4	3.275.000.000	APBD	Kec. Utara ditunjuk menjadi Tuan Rumah MTQ Tingkat Kota	3	870.000.000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
							Tahun 2025 dan Anggaran Penurunan Stunting						
7	01	03	2.03	03	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Balikpapan Utara	3	300.000.000	APBD		6	350.000.000
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Balikpapan Utara	1	80.000.000	APBD		1	63.500.000
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Kec. Balikpapan Utara	100%	670.000.000	APBD		100%	735.000.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Kec. Balikpapan Utara	100%	670.000.000	APBD		100%	735.000.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	34	670.000.000	APBD		35	735.000.000
7	0				KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU)				1.592.992.000				1.482.500.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	18%	1.592.992.000	APBD		19%	1.482.500.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kec. Balikpapan Utara	100%	656.500.000	APBD		100%	502.500.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	40	16.500.000	APBD		40	17.500.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	12	600.000.000	APBD	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU	4	425.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	1	40.000.000	APBD		1	60.000.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	75%	934.492.000	APBD		80%	980.000.000
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	38	934.492.000	APBD	Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000	1	980.000.000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
							Penambahan untuk honor operator e-database RT					
701		KECAMATAN (KELURAHAN KARANG JOANG)			3.672.720.000				2.257.000.000			
7013		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	18%	3.672.720.000	APBD		19%	2.257.000.000		
70132	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kec. Balikpapan Utara	100%	2.110.000.000	APBD		100%	507.000.000		
7013201	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	68	20.000.000	APBD	68	22.000.000	
7013202	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Karang Joang	478	2.050.000.000	APBD	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU dan Pokir	10	425.000.000
7013203	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	1	40.000.000	APBD		1	60.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	75%	1.562.720.000	APBD		80%	1.750.000.000
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karang Joang	66	1.562.720.000	APBD	Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000 Penambahan untuk honor operator e-database RT	66	1.750.000.000
7	0				KECAMATAN (KELURAHAN GRAHA INDAH)				3.995.528.000				2.410.000.000
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	18%	3.995.528.000	APBD		19%	2.410.000.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kec. Balikpapan Utara	100%	2.228.800.000	APBD		100%	510.000.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	76	22.000.000	APBD		76	25.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Graha Indah	228	2.166.800.000	APBD	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU dan Pokir	10	425.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	1	40.000.000	APBD		1	60.000.000
7	01	03	2.03	01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	75%	1.766.728.000	APBD		80%	1.900.000.000
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Graha Indah	74	1.766.728.000	APBD	Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000 Penambahan untuk honor operator e-database RT	74	1.900.000.000
7	01	03			KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA)				3.494.340.000				2.007.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	18%	3.494.340.000	APBD		19%	2.007.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kec. Balikpapan Utara	100%	2.070.000.000	APBD		100%	507.000.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	63	20.000.000	APBD		63	25.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Gunung Samarinda	230	2.020.000.000	APBD	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU dan Pokir	10	425.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	1	30.000.000	APBD		1	60.000.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	75%	1.424.340.000	APBD		80%	1.500.000.000
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gunung Samarinda	61	1.424.340.000	APBD	Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000 Penambahan untuk honor	61	1.500.000.000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							operator e-database RT		
701	KECAMATAN (KELURAHAN MUARA RAPAK)				3.995.592.000				2.513.000.000
7013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	18%	3.995.592.000	APBD		19%	2.513.000.000
70132	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kec. Balikpapan Utara	100%	1.985.000.000	APBD		100%	513.000.000
7013201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	90	25.000.000	APBD		90	28.000.000
7013202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Rapak	261	1.920.000.000	APBD	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU dan Pokir	10	325.000.000
7013203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	1	40.000.000	APBD		1	60.000.000
70133	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	75%	1.970.592.000	APBD		80%	2.000.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Rapak	88	1.970.592.000	APBD	Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000 Penambahan untuk honor operator e-database RT	88	2.000.000.000
7	0				KECAMATAN (KELURAHAN BATU AMPAR)				4.116.494.703				2.410.000.000
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	18%	4.116.494.703	APBD		19%	2.410.000.000
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kec. Balikpapan Utara	100%	2.281.974.703	APBD		100%	510.000.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	81	22.000.000	APBD		81	25.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Batu Ampar	256	2.219.974.703	APBD	Tambahan Dankel dari Alokasi DPU dan Pokir	10	425.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	1	40.000.000	APBD		1	60.000.000
7	01	03	2.03	01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kec. Balikpapan Utara	75%	1.834.520.000	APBD		80%	1.900.000.000
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Batu Ampar	79	1.834.520.000	APBD	Kenaikan DO RT menjadi Rp1.500.000 Penambahan untuk honor operator e-database RT	79	1.900.000.000
									46.346.574.703				39.246.786.374

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Balikpapan.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Utara yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Utara berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan public guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Utara terus berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan utara mendukung priorotas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara sebanyak 2 (dua) inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nama Inovasi : Sistem Informasi Capaian Gotong Royong (SIMONCONG)
Inisiasi Inovasi : **Inisiasi Mandiri**
Penjelasan Singkat Inovasi : SIMONCONG merupakan gagasan dalam upaya mengatasi keterlambatan pelaporan data swadaya masyarakat dari RT
Latar Belakang/ Alasan : Terlambatnya laporan swadaya masyarakat diterima oleh Kelurahan dan Kecamatan
Waktu Pelaksanaan Inovasi :
Tanggal Pembuatan : Maret 2021
Tanggal Pelaksanaan : April 2021
Penerima Manfaat Inovasi : Ketua RT Se-Kecamatan Balikpapan Utara
Dampak : Tertibnya swadaya masyarakat sesuai kategori bidang kegotong royongan di Kecamatan Balikpapan Utara
Apresiasi atau Penghargaan : -
Tautan Pelaksanaan Inovasi : <http://simoncong.balikipapan.go.id>
2. Nama Inovasi : Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala (SAKALA)
Inisiasi Inovasi : **Inisiasi Mandiri**
Penjelasan Singkat Inovasi : SAKALA adalah sebuah aplikasi yang dijalankan oleh Kepala Sub Bagian Umum, untuk mempermudah proses Kenaikan Gaji Berkala serta mengontrol Tunjangan Keluarga melalui usia anak-anak PNS yang otomatis terhitung melalui SAKALA

Latar Belakang/ Alasan : - Temuan inspektorat terkait kelebihan tunjangan keluarga
- Banyaknya PNS yang melewatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Waktu Pelaksanaan Inovasi

Tanggal Pembuatan : September 2021

Tanggal Pelaksanaan : Oktober 2021

Penerima Manfaat Inovasi : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Balikpapan Utara

Dampak : Tertibnya administrasi Kenaikan Gaji Berkala di Kecamatan Balikpapan Utara

Apresiasi atau Penghargaan : -

Tautan Pelaksanaan Inovasi : <http://sakala.brosoft.id>

BAB VI

PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Utara tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Utara. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.
- b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi, Subbag, Kelurahan dan seluruh staf Kecamatan Balikpapan Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi aparaturnya Kecamatan Balikpapan Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam

menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

FF. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan untuk mencapai visi dan misi Kota Balikpapan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi.

Pembangunanyang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalamkegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Balikpapan. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Balikpapan akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”, dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan

Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa peran Kecamatan Balikpapan Selatan akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah dan masyarakat luas. Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai bagian dari garda terdepan lembaga Pemerintah Kota Balikpapan yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap implementasi program pembangunan Pemerintahan Kota Balikpapan, senantiasa menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RENJA) Tahun 2023 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi, misi, dan agenda pembangunan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun Renja berfungsi untuk menerjemahkan Renstra lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran yang ditentukan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara menyeluruh atau sejajar dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD saat ini, evaluasi renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perwali RKPD
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

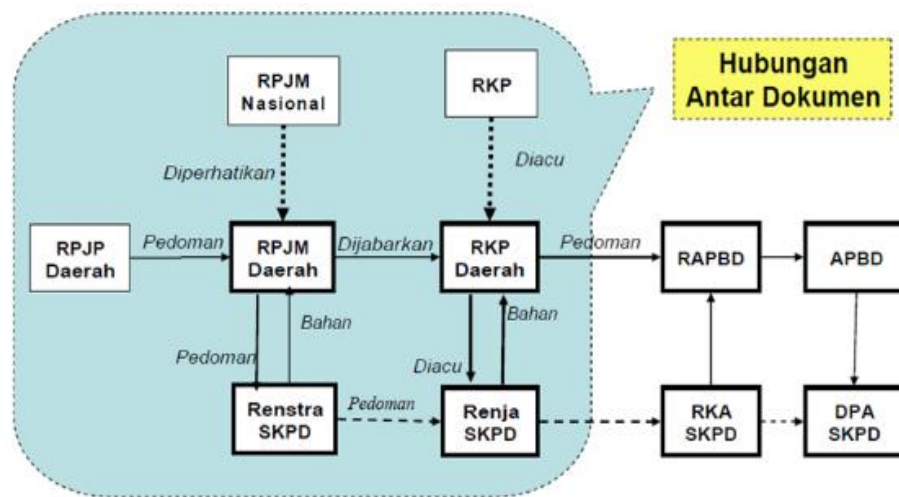
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja

- a. Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - b. Orientasi mengenai Renja
 - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - d. Pengumpulan Data dan Informasi
2. Pengolahan Data dan Informasi
- Pada tahapan ini disajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap perumusan penyusunan rancangan Renja
3. Perumusan Rancangan Renja
- a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan PD
 - c. Menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
 - e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja PD
 - k. Pembahasan Forum PD
 - l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD
6. Penetapan Renja

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi;
17. Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023;
18. Surat Wali Kota Balikpapan Nomor : 050/0180/Bappeda-Litbang Tanggal 28 Januari 2022 Perihal Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui advokasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan antar PD, Stakeholders, masyarakat.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Kecamatan Balikpapan Selatan baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

kal5. Sebagai pusat informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring data dan bahan baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan reuiu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2024. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	500.842.100	472.942.075	27.900.025	94,43%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingka Kecamatan	289.754.900	272.740.300	17.014.600	94,13%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	198.000.000	187.051.500	10.948.500	94,47%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	91.754.900	85.688.800	6.066.100	93,39%

	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	147.841.600	138.992.000	8.849.600	94,01%
	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	9.072.600	8.868.000	380.000	98.42%
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	138.769.000	130.124.000	3.479.500	70.98%
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	63.245.600	61.209.775	2.035.825	96,78%
	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	63.245.600	61.209.775	1.320.200	98.30%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.837.682.600	9.389.777.069	447.905.531	95,45%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.961.545.900	4.705.620.463	255.925.437	94,84%
	Subkegiatan Evaluasi Kelurahan	73.525.300	71.080.100	5.232.500	96.26%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	14.998.000	13.735.500	1.262.500	91,58%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan	12.000.000	11.765.500	234.500	98,05%

	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan Baru	11.969.200	11.740.000	229.200	98,09%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Bahagia	12.000.500	11.538.000	462.500	96,15%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan Raya	12.000.000	11.772.300	90.000	99.25%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sungainangka	12.004.400	11.764.300	724.700	97.58%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Baru	12.000.000	11.850.000	1.260.000	89.50%

	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Bahagia	12.000.000	11.825.000	92.800	99.23%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan	685.847.100	670.366.350	3.751.959	98.17%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Baru	610.009.200	569.879.063	2.104.980	99.27%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Bahagia	371.042.300	276.113.350	14.656.500	92.56%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Raya	111.083.700	110.350.255	8.389.000	96.46%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungainangka	751.163.100	703.308.250	47.854.850	93,63%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Baru	494.520.900	464.775.700	29.745.200	93,99%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Bahagia	873.743.700	860.870.800	12.872.900	98,53%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan	196.403.100	195.118.600	1.284.500	99,35%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	118.957.700	118.166.200	791.500	99,33%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Raya	111.083.700	110.350.255	733.445	99,34%

	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungainangka	181.749.500	178.758.740	2.990.760	98,35%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru	141.500.800	139.835.600	1.665.200	98,82%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	141.943.700	140.656.600	1.287.100	99,09%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.876.136.700	4.684.156.606	191.980.094	96,06%
	Subkegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	134.981.100	34.366.100	100.615.000	25,46%
	Subkegiatan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	34.981.100	34.366.100	615.000	98,24%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	579.818.600	540.098.840	39.719.760	93,15%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Bahagia	510.528.400	507.426.115	3.102.285	99,39%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Raya	436.627.800	432.073.369	4.554.431	98,96%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Baru	314.002.600	307.219.675	6.782.925	97,84%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Baru	722.328.000	717.687.849	4.640.151	99,36%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Bahagia	715.498.000	695.188.280	20.309.720	97,16%

	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan	836.987.000	831.165.274	5.821.726	99,30%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Nangka	590.384.100	584.565.004	5.819.096	99,01%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	350.987.800	331.455.800	19.532.000	94,44%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	350.987.800	331.455.800	19.532.000	94,44%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	350.987.800	331.455.800	19.532.000	94,44%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.751.673.000	15.821.138.900	1.930.534.100	89.12
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.327.854.000	10.872.211.314	1.455.642.686	88.19%
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.846.897.000	11.749.430.249	1.097.466.751	91,46%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.500.000	76.820.000	680.000	99.12%
	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.300.000	22.200.000	100.000	99,55%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.846.233.000	1.724.385.348	121.847.652	93.40%

	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	135.000.000	133.179.500	1.820.500	98,65%
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	507.760.000	454.804.000	52.956.000	89,57%
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	133.081.200	126.862.000	6.219.200	95,33%
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	168.034.000	157.698.000	10.336.000	93,85%
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.785.531.400	1.661.192.320	124.339.080	93,04%
	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	19.994.500	18.367.500	1.627.000	91,86%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.800.000	391.446.750	1.353.250	99,66%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000	200.000.000	0	100%
	Pengadaan Mebel	5.950.000	4.250.000	1.700.000	71,43%
	Sub Kegiatan Pegadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	0	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.359.536.000	2.022.540.366	336.995.634	85.71%
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	392.500.000	371.436.878	21.063.122	94,63%
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.758.024.000	1.733.847.552	24.176.448	98,62%

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.387.756.720	1.274.196.725	113.559.995	91,82%
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	470.000.000	452.765.570	17.234.430	96,33%
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	9.213.970	5.786.030	61,43%
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	178.039.560	1.960.440	98,91%
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	722.756.720	634.177.625	88.579.095	87,74%

Pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan didasarkan pada Sasaran Strategis dan Capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :

*Tabel 2. 2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023*

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	81	80,92
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	69,22

Tabel 2. 3

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	URUSAN KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

	yang ada di Kecamatan	Kecamatan yang berkualitas								
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pelayanan Adminitrasi Terpadu (PATEN) yang dilayani sesuai standar pelayanan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	241%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.04	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksnaakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	365	n/a	71	80,22	112,99%	72	15222%	41,70%
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP kecamatan	360	n/a	68	69,20	101,76%	70	13920%	38,67%
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	365	n/a	71	80,77	113,76%	72	15277%	41,85%
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	365	n/a	71	77,16	108,68%	72	14916%	40,87%
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365	n/a	71	78,29	110,27%	72	15029%	41,18%
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365	n/a	71	81,49	114,77%	72	15349%	42,05%

7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365	n/a	71	78,29	110,27%	72	15029%	41,18%
	Kelurahan			n/a					0%	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%

7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Perwali Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ada beberapa faktor permasalahan kinerja pelayanan sampai dengan tahun 2022 yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas tinggi
2. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik
3. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara
4. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup
5. Masalah sosial yang timbul akibat kepadatan penduduk yang tinggi
6. Kecenderungan timbulnya bencana yang diakibatkan kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit
7. Belum optimalnya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat
8. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
9. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
10. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah
11. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
12. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			71	72	73	74	80,22	80,22	73	74
--	--	--	----	----	----	----	-------	-------	----	----

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada pelaksanaan Musrenbangnas RPJMN Tahun 2020-2024 pada tanggal 16 Desember 2019, disampaikan 5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 – 2024 yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis;
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian;
3. Menyederhanakan Regulasi yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Menyederhanakan Birokrasi melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi;
5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.

Selanjutnya Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur periode 2019-2023, yang menjadi salah satu input bagi perumusan visi, misi dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur pada periode berkenaan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja;
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana;
3. Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city);
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan (green economy);
5. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor- faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, telaah terhadap visi dan misi Wali Kota , maka Isu-Isu strategis di Kecamatan Balikpapan Selatan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi :

1. Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009;
2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keselarasan perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan;
4. Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
5. Ketersediaan sumber daya pemerintahan baik SDM aparatur dan sistem informasi pelayanan publik yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadapkebutuhan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Selatan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2022-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Kecamatan Balikpapan Selatan, maka fungsi dan tugas Kecamatan Balikpapan Selatan terkaiterat dengan pencapaian Misi ke-1: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Balikpapan

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	952.126.180,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	952.126.180,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	426.130.260,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	426.130.260,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	215.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	215.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	211.130.260,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	211.130.260,00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	435.999.055,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	435.999.055,00	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	155.999.695,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	155.999.695,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	279.999.360,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	279.999.360,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	89.996.865,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	89.996.865,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	89.996.865,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	89.996.865,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.366.389.243,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.366.389.243,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	134.994.893,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	134.994.893,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 lembaga kemasyarakatan	34.999.843,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 lembaga kemasyarakatan	34.999.843,00	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	99.995.050,00	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	99.995.050,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.231.394.350,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.231.394.350,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 lembaga kemasyarakatan	873.998.825,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 lembaga kemasyarakatan	873.998.825,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	149.995.730,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	149.995.730,00	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	207.399.795,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	207.399.795,00	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	890.997.645,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	890.997.645,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	890.997.645,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	890.997.645,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 laporan	890.997.645,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 laporan	890.997.645,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	72 poin	26.630.945.935,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	72 poin	26.630.945.935,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	Nilai SAKIP Kecamatan	70 poin	9.982.820,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	Nilai SAKIP Kecamatan	70 poin	9.982.820,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	9.982.820,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	9.982.820,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 poin	16.497.362.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 poin	16.497.362.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	66 orang/bulan	16.497.362.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	66 orang/bulan	16.497.362.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 poin	1.251.545.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 poin	1.251.545.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	1 paket	66.045.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	1 paket	66.045.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	120 orang	1.185.500.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	120 orang	1.185.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 poin	3.143.270.239,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 poin	3.143.270.239,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	134.991.045,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	134.991.045,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 paket	988.092.119,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 paket	988.092.119,00	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis Bahan Logisttik Kantor	29 paket	774.398.255,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis Bahan Logisttik Kantor	29 paket	774.398.255,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 paket	282.922.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 paket	282.922.500,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	12 dokumen	181.365.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	12 dokumen	181.365.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah konsumsi untuk tamu	12 laporan	81.501.320,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah konsumsi untuk tamu	12 laporan	81.501.320,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	18 laporan	700.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	18 laporan	700.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		809.167.585,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		809.167.585,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	343.264.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	343.264.000,00	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	12.500.000,00	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 Unit	12.500.000,00	

	Pengadaan Mebel	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis mebel	1 unit	298.344.585,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis mebel	1 unit	298.344.585,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	200.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	200.000.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Luas bangunan	1 unit	298.323.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Luas bangunan	1 unit	298.323.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 poin	2.779.143.641,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 poin	2.779.143.641,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 laporan	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	12 laporan	601.758.376,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	12 laporan	601.758.376,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah lapooran penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.177.385.265,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah lapooran penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.177.385.265,00	
		Kecamatan Balikpapan Selatan	Kebersihan kantor kecamatan				Kecamatan Balikpapan Selatan	Kebersihan kantor kecamatan			
		Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Non PNS				Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Non PNS			

		Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Profesional				Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Profesional			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.140.474.650,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.140.474.650,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	54 unit	795.223.950,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	54 unit	795.223.950,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	297 unit	195.818.700,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	297 unit	195.818.700,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi Pemeliharaan	4 gedung	1.149.432.000,00		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi Pemeliharaan	4 gedung	1.149.432.000,00
	Kelurahan										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Damai Bahagia	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.446.786.000,00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Damai Bahagia	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.446.786.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	100%	480.000.000,00		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	100%	480.000.000,00

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	400.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	400.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Damai Bahagia	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	966.786.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Damai Bahagia	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	966.786.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	43 lembaga kemasyarakatan	966.786.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	43 lembaga kemasyarakatan	966.786.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sepinggan Raya	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.393.782.810,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sepinggan Raya	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.393.782.810,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan raya	100%	584.919.185,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan raya	100%	584.919.185,00	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 lembaga kemasyarakatan	19.999.625,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 lembaga kemasyarakatan	19.999.625,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	514.599.560,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	514.599.560,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	50.320.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	50.320.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sepinggan Raya	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	808.863.625,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sepinggan Raya	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	808.863.625,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	808.863.625,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	808.863.625,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Damai Baru	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	969.452.470,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Damai Baru	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	969.452.470,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Baru	100%	430.040.915,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Baru	100%	430.040.915,00	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 lembaga kemasyarakatan	19.999.875,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 lembaga kemasyarakatan	19.999.875,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	350.041.040,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	350.041.040,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Damai Baru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	539.411.555,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Damai Baru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	539.411.555,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakatan	539.411.555,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakatan	539.411.555,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sepinggan Baru	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.190.890.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sepinggan Baru	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.190.890.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan Baru	100%	686.900.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan Baru	100%	686.900.000,00	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	606.900.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	606.900.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sepinggan Baru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.503.990.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sepinggan Baru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.503.990.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	66 lembaga kemasyarakatan	1.503.990.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	66 lembaga kemasyarakatan	1.503.990.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Gunung Bahagia	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.785.614.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Gunung Bahagia	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.785.614.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	100%	480.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	100%	480.000.000,00	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	400.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	400.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Gunung Bahagia	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.305.614.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Gunung Bahagia	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.305.614.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	61 lembaga kemasyarakatan	1.305.614.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	61 lembaga kemasyarakatan	1.305.614.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sepinggan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.791.255.211,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sepinggan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.791.255.211,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan	100%	1.161.497.560,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan	100%	1.161.497.560,00	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 lembaga kemasyarakatan	22.999.765,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 lembaga kemasyarakatan	22.999.765,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	1.078.499.040,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	1.078.499.040,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.998.755,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.998.755,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sepinggan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan		1.629.757.651,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sepinggan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan		1.629.757.651,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	46 lembaga kemasyarakatan	1.629.757.651,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	46 lembaga kemasyarakatan	1.629.757.651,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sungai Nangka	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.066.111.403,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sungai Nangka	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.066.111.403,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka	100%	991.997.360,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka	100%	991.997.360,00	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	19.998.289,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	19.998.289,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	911.999.264,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	911.999.264,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.999.807,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.999.807,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sungai Nangka	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.074.114.043,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sungai Nangka	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.074.114.043,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	48 lembaga kemasyarakatan	1.074.114.043,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	48 lembaga kemasyarakatan	1.074.114.043,00	

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Balikpapan

Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pembangunan Jembatan RT. 12	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 12 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 5 m, L : 3.5 m T : 25 cm	
	Perbaiki Siring / Perbaiki Siring RT. 30	Jl. Mulawarman RT. 30 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 8 m L : 5 m	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 6	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 6 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 250 m, L : 2 m T : 15 cm	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 3	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 3 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 150 m, L : 1 m T : 30 cm	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 14	Jl Ratte Daeng RT. 14 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 15 m, L : 50 cm T : 15 cm	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pembangunan Jembatan RT. 10	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 10 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 4 m, L : 2 m T : 20 cm	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 13	Jl. Syarifuddin Yoes RT. 13 Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 200 m, L : 50 cm	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.07 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 500 m Lebar : 60 cm Tinggi : 60 cm	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.08 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 467 m Lebar : 60 cm Tinggi : 60 cm	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.10 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 300 m Lebar : 70 cm Tinggi : 80 cm	

	Infrastruktur/Masyarakat	RT.11 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 100 m Lebar : 4 m	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.16 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 175 m Lebar : 5 m	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.22 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 300 m Lebar : 4 m	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.27 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 35 M, Lebar = 80 Cm, Tinggi = 70 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.18 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 70 M, Lebar = 1 M, Tinggi = 80 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.31 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 80 M, Lebar = 80 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.37 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang= 250 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.56 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 200 , Lebar = 60 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.61 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 375 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.66 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 50 M, Lebar = 40 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.68 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 150 M, Lebar = 40 Cm, Tinggi = 70 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.12 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 80 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm	

	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	RT.19 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 144 M, Lebar = 30 Cm, Tinggi = 40 Cm	
	Pembangunan/Perbaikan drainase dan selokan pemukiman	RT.25 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 56 M, Lebar = 1 M, Tinggi = 1 M	
	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	RT.36 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 70 M, Lebar = 1.5 M, T = 1.5 M	
	Pembangunan/Perbaikan drainase dan selokan pemukiman	RT.21 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 18 M, Lebar = 2 M, Tinggi = 2.75 M	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter) di RT. 24	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	400 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter) di RT. 22 KE TPS RT. 21	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	350 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter) Lanjutan di RT. 15 Perbatasan RT. 10	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	200 Meter	
	Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan / Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter) Jalan utama BDS II	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1500 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter) Arah dari RT. 07 menuju RT. 01	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	400 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter) Lanjutan di Belakang Warung Khoirul RT. 37	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	150 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter) di BJB RT. 30 Belakang Jamrud	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	300 Meter	
	Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan /Perum Poka BAA 26-BAA 34 RT. 12 ,Kota Balikpapan	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	500 Meter	

	Jembatan/Peninggian Jembatan	Gg. Surya 1 RT. 11 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	4 x 6 m	
	Jembatan/Perbaikan Pondasi Jembatan	Jl. Tulip RT. 06 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	
	Drainase/Dinding Drainase Kiri Kanan	Depan Masjid Al Ikhwan RT. 08 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	60 m	
	Drainase/Pelebaran Drainase	Masjid Namira RT. 15 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	118x1.2x1m	
		RT.38 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.39 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.50 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.54 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.13 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.27 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.37 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.20 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.17 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan		

			yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Parit lama ketutupan tanah RT 30, jl Bhineka, Kota Balikpapan P= 500 M	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Parit buntu RT 54, jl batu piruz, Kota Balikpapan P= 120 M	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Jalan Lingkungan / jalan rusak RT 32, Sepinggian baru, Kota Balikpapan P= 200 M L= 5 M KETEBALAN 15 CM	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Parit rusak RT 32, Sepinggian baru, Kota Balikpapan P= 200 M L= 60 cm Kedalaman 60 cm	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Jalan Lingkungan/jalan rusak RT 20, perum her mandiri I blok a, Kota Balikpapan P= 130 M L= 3 M Ketebalan 15 cm	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Parit rusak RT 5, Jl. Kavling Blok I RT.5 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan P= 90 M L= 1 M Kedalaman 80 cm	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Parit rusak RT 29, Jl. Praja Muda I kanan, Kota Balikpapan P= 140 M L= 0,5 M Kedalaman 60 CM	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Parit rusak RT 29 Jl. Praja Muda I kiri , Kota Balikpapan	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2021 berada pada tahap jangka menengah yang kedua yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Visi sebagai berikut :

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Mempermudah Investasi untuk Lapangan Kerja
4. Reformasi Birokrasi
5. APBN yang tepat sasaran.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur terpilih menjadi lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Hal ini menjadikan Kota Balikpapan harus siap dan berbenah diri sebagai Kota Penyangga dari daerah calon IKN. IKN akan menjadi representasi kemajuab bangsa yang unggul, dimana Visi Ibu Kota adalah sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia. Pendekatan dari Visi IKN adalah :

1. Mencerminkan Identitas Bangsa
2. Menjamin keberlanjutan Sosiali, Ekonomi, Lingkungan
3. Mewujudkan Kota yang Cerdas, Modern dan berstandar Internasional

Hal-hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Pemerintah Kota Balikpapan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Selatan

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan serta sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan diatas. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN

	TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentramana dan Ketertiban Umum
		2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program secara keseluruhan yang diselenggarakan Kecamatan Balikpapan Selatan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Kewilayahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
			Pengadaan Aset tak berwujud
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Target			
		KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN												24.119.786.165,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN												24.119.786.165,00		
7	0	KECAMATAN												2.551.111.271,00		
7	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												1.143.854.299,00		
7	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												480.000.000,00		
7	0	0	2.	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
					Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 laporan Laporan	100 %	215.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	7 laporan Laporan	230.000.000,00

							ditindaklan juti							an dengan Perangka t Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
7	0 1	0 2	2. 01	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
					Persentas e Pengadua n Pelayanan Administra tif Yang Ditindakl anjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomenda si hasil koordinasi penyeleng araan kegiatan pemerintah an di tingkat Kecamatan yang ditindaklan juti	- Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	7 dokum en Dokum en	100 %	121.755.000, 00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Dokume n Peningka tan Efektifita s Kegiatan Pe merintah an di Tingkat Kecamat an	7 doku men Doku me n	250.000.000, 00
7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						204.072.000		438.854.299			
	1	2	02								,00				,00	
7	0 1	0 2	2. 02	0 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan											
					Persentas e Pengadua n Pelayanan Administra tif Yang Ditindakl anjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase penyeleng araan urusan pemerintah an yang berkualitas yang tidak dilaksanak an oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokum en	100 %	9.072.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Dokume n Perencan aan Kegiatan Pelayana n kepada Masyara kat di Kecamat an	3 Doku m en	313.854.299, 00
7	0 1	0 2	2. 02	0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											

					Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	195.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	125.000.000,00
7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							63.245.000,00			225.000.000,00	
7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
					Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	790 Dokumen	100 %	63.245.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	225.000.000,00
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.098.550.000,00			941.806.163,00	
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							98.550.000,00			141.806.163,00	
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
					Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	100 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	25.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	100 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00

					Membangun Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan	membangun Kelurahan							dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
7	0	0	2.	0	Evaluasi Kelurahan											
	1	3	02	4	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	2 Laporan	100 %	73.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	126.806.163,00
7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						1.000.000.000,00			800.000.000,00		
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
	1	3	03	1	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	11 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000,00
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											
	1	3	03	4												

					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyara katan di Kecamatan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	1 Lapora n	100 %	150.000.000, 00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pen gembang an Usaha Ekonomi Masyara kat	1 Lapor an	50.000.000,0 0
7	0 1	0 3	2. 03	0 5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyara katan di Kecamatan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	1 Lapora n	100 %	50.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfa atan Teknolog i Tepat Guna	1 Lapor an	50.000.000,0 0
7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						620.000.000 ,00			465.450.809 ,00		
7	0 1	0 4	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						620.000.000 ,00			465.450.809 ,00		
7	0 1	0 4	2. 01	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
					Persentas e Pelaksana an Koordinas i Trantibu m di Kecamata n yang Optimal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomenda si hasil koordinasi yang dilaksanak an oleh Kecamatan untuk penyelengg araan trantibum	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	19 Lapora n	100 %	620.000.000, 00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinergita s dengan Kepolisia n Negara Republik Indonesi a, Tentara Nasional	19 Lapor an	465.450.809, 00

													Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI							20.125.370.000,00		21.568.674.894,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							20.125.370.000,00		21.568.674.894,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10.000.000,00		10.000.000,00		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	4 Dokumen	72 Poin	10.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12.565.556.480,00		14.000.000.000,00		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	68 Orang/bulan	73 Poin	12.565.556.480,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	14.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2.107.367.374,00		2.748.674.894,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	IKM Layanan Administrasi Umum	- Kota Balikpapan, Balikpapan	73 Poin	8 Paket	73 Poin	135.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI	Jumlah Paket Komponen	8 Paket	150.000.000,00

						Internal Perangkat Daerah	an Bangunan Kantor yang Disediakan	Perangkat Daerah	n Selatan, Semua Kel/Desa						DAERAH (PAD)	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	1	1	06	2		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	10 Paket	73 Poin	399.596.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	324.000.000,00
7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	1	1	06	4		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	29 Paket	73 Poin	754.671.374,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	1.319.674.894,00
7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan													
	1	1	06	5		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	3 Paket	73 Poin	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	3 Paket	170.000.000,00

7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
	1	1	06	6		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Dokumen	73 Poin	168.100.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	135.000.000,00
7	0	0	2.	0	Fasilitas Kunjungan Tamu												
	1	1	06	8		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Laporan	73 Poin	20.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000,00
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
	1	1	06	9		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	18 Laporan	73 Poin	430.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	500.000.000,00
7	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							605.000.000,00				910.000.000,00	
7	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
	1	1	07	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	IKM Layanan Pengadaan	- Kota Balikpapan,	73 Poin	1 Unit	73 Poin	250.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI	Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit	250.000.000,00

						at (IKM) Internal Perangkat Daerah	Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikipapan Selatan, Semua Kel/Desa					DAERAH (PAD)	an Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel												
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	10 Unit	73 Poin	100.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	110.000.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	2 Unit	73 Poin	5.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	300.000.000,00
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud												
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	1 Unit	73 Poin	50.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00

7	0	0	2.	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
	1	1	07	9		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	1 Unit	73 Poin	200.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00
7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.766.127.600,00			2.600.000.000,00		
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
	1	1	08	2		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Laporan	73 Poin	490.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	775.000.000,00
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
	1	1	08	4		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Laporan	73 Poin	2.276.127.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.825.000.000,00

7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.071.318.546,00		1.300.000.000,00					
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			09	1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	54 Unit	73 Poin	620.446.146,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	500.000.000,00
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			09	2		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	54 Unit	73 Poin	15.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	150.000.000,00
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			09	6		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	297 Unit	73 Poin	180.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	297 Unit	300.000.000,00

							Urusan Pemerintah an Daerah						Dipelihar a				
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
1	1	1	09	9		Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	IKM Layanan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	7 Unit	73 Poin	1.255.872.40 0,00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Di rehabilit asi	7 Unit	350.000.000, 00
KELURAHAN DAMAI BAHAGIA												1.119.682.0 00,00		865.000.000 ,00			
7	0				KECAMATAN							1.119.682.0 00,00		865.000.000 ,00			
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.119.682.0 00,00		865.000.000 ,00			
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							340.000.000 ,00		365.000.000 ,00			
1	1	3	02		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	43 Lemba ga K emasy arak atan	100 %	15.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Lembaga Ke masyara kata n yang Berpa rtisipasi dalam Forum Musywa rah Perencan aan Pembang una n di	43 Lemb aga Kema sya rakat an	15.000.000,0 0	

					un Kelurahan											
					KELURAHAN SEPINGGAN RAYA						1.012.372.000,00			762.000.000,00		
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						340.000.000,00			362.000.000,00		
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
				1	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	39 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00
7	0	0	2.	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
				2	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00
7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
				3												

					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	1 Pokma s / Ormas	100 %	60.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa naka n Pemberd ayaan Masyara kat di Keluraha n	1 Pokm as / Orma s	80.000.000,0 0	
7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							672.372.000		400.000.000			
	1	3	03									,00		,00			
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
	1	3	03	1		Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyara katan di Kecamatan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	36 Lemba ga K emasy arak atan	100 %	672.372.000, 00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Lembaga Ke masyara kata n yang Disel enggarak an	36 Lemb aga Kema sya rakat an	400.000.000, 00
					KELURAHAN DAMAI BARU							828.412.000		662.000.000			
												,00		,00			
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							340.000.000		362.000.000			
	1	3	02									,00		,00			
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
	1	3	02	1		Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Damai Baru	8.5 %	27 Lemba ga K emasy arak atan	100 %	15.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Lembaga Ke masyara kata n yang Berpa rtisipasi dalam	27 Lemb aga Kema sya rakat an	12.000.000,0 0

					un Keluraha n	Pembangunan di Kelurahan	n Kelurahan						Forum Musywa rah Perencan aan Pembang una n di Keluraha n			
7	0 1	0 3	2. 02	0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Damai Baru	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000, 00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbang un	10 Unit	270.000.000, 00
7	0 1	0 3	2. 02	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Damai Baru	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa naka n Pemberd ayaan Masyara kat di Keluraha n	1 Pokm as / Orma s	80.000.000,0 0
7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							488.412.000			300.000.000	
7	0 1	0 3	2. 03	0 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
					Persentas e Rata-	Jumlah Lembaga	Persentase Keaktifan	- Kota Balikpapa	8.5 %	24 Lemba	100 %	488.412.000, 00	PENDAP ATA N	Jumlah Lembaga	24 Lemb	300.000.000, 00

					rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyara katan di Kecamatan	n, Balikpapa n Selatan, Semua Kel/Desa		ga K emasy arak atan			ASLI DAERA H (PAD)	Ke masyara kata n yang Disel enggarak an	aga Kema sya rakat an		
					KELURAHAN SEPINGGAN BARU							1.487.602.0 00,00					1.062.000.0 00,00
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							340.000.000 ,00					362.000.000 ,00
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sepinggan Baru	8.5 %	69 Lemba ga K emasy arak atan	100 %	15.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Lembaga Ke masyara kata n yang Berpa rtisipasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan Pembang una n di Keluraha n	69 Lemb aga Kema sya rakat an	12.000.000,0 0	
7	0	0	2.	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sepinggan Baru	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000, 00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang	10 Unit	270.000.000, 00	

					Membang un Keluraha n		membangu n Kelurahan						Terbang un				
7	0 1	0 3	2. 02	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membang un Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sepingg an Baru	8.5 %	1 Pokma s / Ormas	100 %	60.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa naka n Pemberd ayaan Masyara kat di Keluraha n	1 Pokm as / Orma s	80.000.000,0 0	
7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1.147.602.0			700.000.000	,00
7	0 1	0 3	2. 03	0 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyara katan di Kecamatan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sepingg an Baru	8.5 %	66 Lemba ga K emasy arak atan	100 %	1.147.602.00 0,00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Lembaga Ke masyara kata n yang Disel enggarak an	66 Lemb aga Kema sya rakat an	700.000.000, 00	
					KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA								1.410.952.0			1.062.000.0	00,00
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								340.000.000			362.000.000	,00
7	0 1	0 3	2. 02	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
					Persentas e Rata-	Jumlah Lembaga	Persentase kegiatan	- Kota Balikpapa	8.5 %	64 Lemba	100 %	15.000.000,0 0	PENDAP ATA N	Jumlah Lembaga	64 Lemb	12.000.000,0 0	

						rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	n, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia		ga K emasy arak atan				ASLI DAERA H (PAD)	Ke masyara kata n yang Berpa rtisipasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan Pembang una n di Keluraha n	aga Kema sya rakat an	
7	0 1	0 3	2. 02	0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Gunungba hagia	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000, 00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbang un	10 Unit	270.000.000, 00		
7	0 1	0 3	2. 02	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Gunungba hagia	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa naka n Pemberd ay aan Masyara kat di	1 Pokm as / Orma s	80.000.000,0 0		

														Kelurahan			
7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							1.070.952.0				700.000.000	
1	3	03														,00	
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
1	3	03	1	1		Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyara katan di Kecamatan	- Kota Balikpapa n, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	8.5 %	61 Lemba ga K emasy arak atan	100 %	1.070.952.00 0,00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Lembaga Ke masyara kata n yang Disel enggarak an	61 Lemb aga Kema syar akat an	700.000.000, 00
					KELURAHAN SEPINGGAN							1.567.252.0				1.102.000.0	
																00,00	
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							343.000.000				402.000.000	
1	3	02														,00	
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
1	3	02	1	1		Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sepinggan	8.5 %	75 Lemba ga K emasy arak atan	100 %	18.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Lembaga Ke masyara kata n yang Berpa rtisipasi dalam Forum Musywa rah Perencan aan Pembang una n di Keluraha n	75 Lemb aga Kema syar akat an	12.000.000,0 0

7	0	0	2.	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1	3	02	2		Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sepinggan	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000, 00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasaran a Keluraha n yang Terbang un	10 Unit	300.000.000, 00
7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1	3	02	3		Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sepinggan	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa naka n Pemberd ayaan Masyara kat di Keluraha n	1 Pokm as / Orma s	90.000.000,0 0
7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							1.224.252.0			700.000.000		
	1	3	03										00,00			,00	
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
	1	3	03	1		Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyara katan di Kecamatan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sepinggan	8.5 %	46 Lemba ga K emasy arak atan	100 %	1.224.252.00 0,00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Lembaga Ke masyara kata n yang Disel enggarak an	46 Lemb aga Kema syara kat an	700.000.000, 00

						Kelurahan													
						KELURAHAN SUNGAI NANGKA										1.196.332.000,00		912.000.000,00	
7	0	0	2.			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										340.000.000,00		362.000.000,00	
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
					Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	8.5 %	51 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	51 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00			
7	0	0	2.	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
					Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00			
7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

					Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberday aan masyaraka t yang berkualitas dalam membangu n Kelurahan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sungainan gka	8.5 %	1 Pokma s / Ormas	100 %	60.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa naka n Pemberd ayaan Masyara kat di Keluraha n	1 Pokm as / Orma s	80.000.000,0 0		
7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							856.332.000		550.000.000				
	1	3	03													,00		,00
7	0	0	2.03	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
	1	3		1	Persentas e Rata- rata Tingkat Partisipas i Masyarak at dalam Membang un Keluraha n	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyara katan di Kecamatan	- Kota Balikpapa n, Balikpapa n Selatan, Sungainan gka	8.5 %	48 Lemba ga K emasy arak atan	100 %	856.332.000, 00	PENDAP ATA N ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Lembaga Ke masyara kata n yang Disel enggarak an	48 Lemb aga Kema sya rakat an	550.000.000, 00		
TOTAL											31.070.596.		30.546.786.					
											000,00		165,00					

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Untuk mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada.

Program di Kecamatan Balikpapan Selatan adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai bagian dari sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Pendanaan indikatif adalah sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Perangkat Daerah wajib memegang prinsip keuangan daerah yaitu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, Kejujuran dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pendanaan sendiri nantinya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas atas isi kegiatan yang harus dilaksanakan yang mengutamakan kebutuhan Perangkat Daerah dan tentunya harus berdampak pula pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan TA 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	target capaian kinerja	Anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	952.126.180,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	426.130.260,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	215.000.000,00

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	211.130.260,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	435.999.055,00
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	155.999.695,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	279.999.360,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	89.996.865,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	89.996.865,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.366.389.243,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	134.994.893,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 lembaga kemasyarakatan	34.999.843,00
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	99.995.050,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.231.394.350,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 lembaga kemasyarakatan	873.998.825,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	149.995.730,00
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	207.399.795,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	890.997.645,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	890.997.645,00

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 laporan	890.997.645,00
	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,25	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	72 poin	26.974.209.935,00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	70 poin	9.982.820,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	9.982.820,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 poin	16.497.362.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	66 orang/bulan	16.497.362.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 poin	1.251.545.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	1 paket	66.045.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Undangan		1.185.500.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan			-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 poin	3.143.270.239,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	134.991.045,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 paket	988.092.119,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	29 paket	774.398.255,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 paket	282.922.500,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	3 dokumen	181.365.000,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu	12 laporan	81.501.320,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	18 laporan	700.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.152.431.585,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	343.264.000,00

Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit	12.500.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	1 unit	298.344.585,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	200.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan	1 unit	298.323.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 poin	2.779.143.641,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 laporan	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	12 laporan	601.758.376,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah lapooran penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.177.385.265,00
	Kebersihan kantor kecamatan		
	Jumlah Tenaga Non PNS		
	Jumlah Tenaga Profesional		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.140.474.650,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	54 unit	795.223.950,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang terpelihara		-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	297 unit	195.818.700,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 gedung	1.149.432.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-
Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		54 unit	-
Total Pagu Kelurahan			30.183.723.003,00
Kelurahan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.446.786.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	100%	480.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	42 unit	400.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	966.786.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	43 lembaga kemasyarakatan	966.786.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.393.782.810,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggang raya	100%	584.919.185,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 lembaga kemasyarakatan	19.999.625,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	58 unit	514.599.560,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	50.320.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	808.863.625,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	808.863.625,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	969.452.470,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Baru	100%	430.040.915,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 lembaga kemasyarakatan	19.999.875,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	60 unit	350.041.040,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	539.411.555,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakatan	539.411.555,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.190.890.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan Baru	100%	686.900.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	48 unit	606.900.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.503.990.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	66 lembaga kemasyarakatan	1.503.990.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.785.614.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	100%	480.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	400.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.305.614.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	61 lembaga kemasyarakatan	1.305.614.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.791.255.211,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Spinggan	100%	1.161.497.560,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 lembaga kemasyarakatan	22.999.765,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	136 unit	1.078.499.040,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.998.755,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan		1.629.757.651,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	46 lembaga kemasyarakatan	1.629.757.651,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.066.111.403,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka	100%	991.997.360,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51 lembaga kemasyarakatan	19.998.289,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	27 unit	911.999.264,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.999.807,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.074.114.043,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	48 lembaga kemasyarakatan	1.074.114.043,00
Total Pagu Kelurahan			12.643.891.894,00
Jumlah Total Pagu Kecamatan Balikpapan Selatan			42.827.614.897,00

BAB V INOVASI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara sebanyak 2 (dua) inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	INOVASI EKSTERNAL										
1	SENANG SAMPAH (Semangat Menabung dan Timbang Sampah)	V	X	Gerakan membangkitkan kembali semangat masyarakat dan pemilik usaha untuk melakukan pemilahan sampah dan pemberdayaan Bank Sampah di Kelurahan Sungai Nangka	Permasalahan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi lingkungan Kelurahan, dengan mendorong warga masyarakat dan pemilik usaha rumah makan untuk menjadi nasabah Bank sampah diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi kelestarian lingkungan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka	Bank Sampah yang sudah ada di Kelurahan Sungai Nangka dapat aktif dan berkembang	-	https://www.instagram.com/senangsampah.id/
2	DIGDAYA SUKA (Digitalisasi Data Swadaya Sungai Nangka)	V	X	Sistem penyampaian usulan masyarakat di bidang pembangunan dan sistem pelaporan swadaya secara online di Kelurahan Sungai Nangka	Data pemberdayaan masyarakat kerap tidak terdata dengan baik, dengan adanya pendataan melalui sistem digital diharapkan dapat dilakukan pencatatan data dengan baik dan tersaji dengan lengkap	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Ketua RT Kelurahan Sungai Nangka	Data Pemberdayaan Masyarakat tersaji dengan baik dan lengkap di Kelurahan Sungai Nangka	-	digdayasuka@gmail.com
3	SISWA MAS (Sistem Informasi Pelaporan Swadaya Masyarakat)	V	X	Sistem pelaporan swadaya masyarakat melalui aplikasi siswamas.balikipapan.go.id	Pelaporan data swadaya masyarakat yang sebelumnya manual dapat tercatat dengan baik melalui suatu sistem aplikasi atau website	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Ketua RT Kecamatan Balikpapan Selatan	Data swadaya masyarakat dapat tercatat dan tersaji dengan lengkap	-	http://103.144.82.54:8873/login.php

4	MAS DARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan Tempat Tinggal Pendatang)	V	X	Gerakan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan penduduk pendatang di Kelurahan Sepinggan Baru	Masyarakat kerap kali tidak mengetahui adanya penduduk pendatang di wilayah tempat tinggal	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Pemilik Rumah Sewa dan Kost Kelurahan Sepinggan Baru	Warga pendatang tercatat dan terdaftar di Ketua RT	-	https://www.youtube.com/watch?v=ohcJNiJGRbM&t=12s
5	ALADIN SERAYA (Anjungan Layanan Aduan dan Informasi Kelurahan Sepinggan Raya)	V	X	Sistem layanan aduan dan informasi versi online yang dapat di akses melalui bit.ly/AladinSeraya.	Masyarakat memerlukan saluran komunikasi yang cepat, efektif dan efisien	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Masyarakat dapat menyampaikan aduan/pertanyaan/informasi secara online melalui link tersebut dan akan direspon/ditanggapi sesuai SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, Aladin Seraya juga menyediakan akses link untuk informasi pelayanan online: 1. Disdukcapil Balikpapan 2. Pelayanan IUMK melalui OSS 3. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi oleh PLKB Sepinggan Raya.	-	https://aladinseraya.wordpress.com/anjungan-layanan-aduan-dan-informasi-kelurahan-sepinggan-raya/
6	SIGRA-PSR (Sinergi Penanganan Ketertiban Warga Pendatang Sepinggan Raya)	V	X	Peningkatan Pola penanganan, pengawasan dan pembinaan terkait pelayanan kepada masyarakat serta ketertarikan dan ketertiban umum dan lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan, dengan memberdayakan unsur masyarakat melalui kerjasama LPM serta RT dari permasalahan ketertiban dan keamanan di dalam wilayah Kelurahan Sepinggan Raya.	Perlu adanya sinergi dalam penanganan masalah trantibum di wilayah Kelurahan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Seluruh unsur masyarakat dapat mengkoordinasikan terkait bidang trantibum secara cepat dan tepat	-	
7	GENETIK SERAYA (Gerakan Nelayan Kreatif Kelurahan Sepinggan Raya)	V	X	Pembentukan Kelompok Nelayan dan pemberdayaan Nelayan di RT. 28 dan RT. 29 Kelurahan Sepinggan Raya	Pantai Seraya dan Nelayan yang berada di sekitarnya perlu terkoordinir dengan baik	2019	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Warga yang bermukim dan menjadi nelayan di arean Pantai Seraya dapat terkoordinir dan terberdayakan dengan baik	-	

8	AYO MANCING (Aksi Gotong Royong Mantap Cegah Stunting)	V	X	Gerakan gotong royong dan menjalin kerjasama seluruh pihak dan masyarakat untuk peduli dalam pencegahan dan penanganan kasus stunting	Masih terdapat kasus Stunting di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kecamatan Balikpapan Selatan	Terdorongnya masyarakat untuk terlibat untuk pencegahan dan penanganan kasus stunting	-	https://www.instagram.com/p/Ci2-InYP04k/
9	BUTIK LOKET (Buku Tamu, link informasi dan Survei Kepuasan Online disediakan di Locket Pelayanan)	V	X	Mengukur tingkat kepuasan layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna secara langsung setelah menerima pelayanan melalui scan barcode yang disediakan di loket pelayanan	Buku Tamu dan survei kepuasan layanan harus ditulis manual	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Data tamu dan hasil survei kepuasan dapat segera diketahui secara cepat	-	http://linktr.ee/kecamatanbalsel
II	INOVASI INTERNAL										
10	Digitalisasi Barang Inventaris	V	X	Memberikan kode barcode pada setiap barang inventaris di kantor Kecamatan Balikpapan Selatan dalam rangka tertib administrasi barang inventaris	Barang Inventaris belum terdokumentasikan dengan baik	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Melalui scan barcode, dapat ditemukan dengan mudah informasi yang ada pada BMD	-	
11	Kendali Serapan Anggaran dan Monitoring Keuangan Online	V	X	Sistem pengendalian serapan anggaran dan monitoring penggunaan APBD oleh PPTK secara online	Penggunaan anggaran belum terpantau dengan baik	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Melalui pemantauan secara online maka akan memudahkan bagi Camat selaku PA untuk memantau kinerja dari setiap PPTK dalam pengelolaan anggaran	-	https://www.youtube.com/watch?v=fcbX4uHIE4&t=59s

12	Basel Belajar	V	X	Komunitas belajar pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan untuk mendorong minat pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan untuk mempelajari hal-hal baru yang mendorong peningkatan produktivitas pegawai dan kinerja organisasi atau mempelajari bidang di luar tugas dan fungsi sehari-hari namun dapat mendukung kinerja organisasi, bentuk kegiatan meliputi sosialisasi, sharing session, kunjungan ke Kecamatan dan Kelurahan berprestasi yang berada di Kota Balikpapan.	Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin cepat yang mengharuskan pegawai Kecamatan dan Kelurahan sebagai garda terdepan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dapat menyampaikan informasi atau menyajikan pelayanan yang tepat ke masyarakat	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Membuka wawasan dan pengetahuan pegawai terkait ilmu dan informasi penunjang tugas dan fungsi inti aparatur Kecamatan dan Kelurahan	-	https://www.instagram.com/p/CnTvCy1BJAb/ https://www.instagram.com/p/CkutXp_v3Wx/
13	Gelora BERAKHLAK	V	X	Penempatan Banner di kantor Kecamatan dan seluruh kantor Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Selatan tentang Core Values ASN BERAKHLAK dan kewajiban Pegawai mengucapkan/Yel-Yel Core Values ASN BERAKHLAK pada setiap Apel Senin	Core Values ASN BERAKHLAK wajib diinternalisasi ke seluruh pegawai, untuk memudahkan pegawai menghafalkan dan memahaminya, dilakukan pengucapan Core Values ASN BERAKHLAK pada setiap Apel di hari senin.	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Pegawai senantiasa mengingat dan mengimplementasikan Core Values ASN BERAKHLAK	-	https://www.instagram.com/p/ClyLLqYv4oD/
14	DISPOR (Disposisi dan Pelaporan online)	V	X	Pelaksanaan disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi secara online melalui Grup Whats APP khusus surat masuk	Disposisi surat agar lebih cepat mendapatkan respon bawahan, dikarenakan aplikasi Whats App lebih sering dipergunakan sehari-hari	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi atasan secara cepat dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti	-	

15	BALKON (Buku Administrasi Layanan Kantor Online)	V	X	Pencatatan nomor surat keluar secara online	Pada saat hari libur, kerap kali terdapat surat yang harus segera dikirimkan melalui eoffice, dan pegawai kesulitan untuk memperoleh nomor surat karena Buku pencatatan berada di kantor	2023	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Kasubbag umum dan pegawai mudah mendapatkan nomor surat dan tidak akan ada penomoran yang ganda	-	-
----	---	---	---	--	---	------	---	--	---	---	---

BAB VI

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Utara. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.
- b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi, Subbag, Kelurahan dan seluruh staf Kecamatan Balikpapan Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

GG. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, bersama ini Kecamatan Balikpapan Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Balikpapan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun stakeholders lainnya sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja PD Kecamatan Balikpapan Timur merupakan dokumen perencanaan PD Kecamatan Balikpapan Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Balikpapan.

Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 harus mengacu pada kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaannya harus disertai tanggung jawab yang nyata agar berdaya guna serta tepat sasaran. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan oleh pelaku pembangunan baik di tingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (Kelurahan/Desa), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negaradisebut sebagai suatu

komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara. Penyusunan Renja OPD Kecamatan harus mengacu pada RKPD Pemerintah Kota, karena RKPD Kota yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Kota. RKPD Provinsi yang ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Provinsi dan rancangan akhir RKPD Kota. RKPD Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah yang memuat uraian dan penjabaran mengenai visi, misidan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan PD yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, renstra, renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 berada di Bappeda Litbang.

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan 35 menyatakan kepala daerah menyusun kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD maka kepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Setelah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) disepakati bersama kepala daerah dan DPRD melalui nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA-PD sebagai acuan/pedoman kepala PD menyusun RKAPD. Pedoman penyusunan RKA-PD dalam bentuk surat edaran yang akan ditandatangani oleh kepala daerah disiapkan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-PD mencakup: (a) prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; (b) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan PD; (c) batas waktu penyampaian RKA-PD kepada PPKD; dan (d) dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan Peraturan Daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah untuk disampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi ke Gubernur untuk

mendapat persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2022 disusun atas dasar:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- j. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- k. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - m. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
 - n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - o. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 - p. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 - q. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021;
 - r. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2021-2026 merupakan Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-PD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-PD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen

perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-PD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

Proses penyusunan RPJMD harus sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengacu pada kaidah penyusunan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu menggunakan 4 pendekatan:

1. Teknokratis adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan logika pikir ilmiah oleh lembaga atau struktur yang secara fungsional bertugas untuk itu berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dan pegawai profesional.
2. Politisi adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan Kepala Daerah terpilih, pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
3. *Top down* adalah Proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga atau departemen atau daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.
4. *Bottom up* adalah Proses perencanaan dimulai dari perencanaan hirarki paling bawah baru ke atas yang diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Tahun 2025 adalah penyusunan rancangan teknokratis, kemudian dilanjutkan di Tahun 2026 dengan pendekatan politis (penyesuaian dengan visi misi Kepala Daerah terpilih) serta pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan *public* melalui Musrenbang RPJMD.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Good Governance*)

serta berdaya guna dan berhasil guna untuk tujuan keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuan dari Renja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Timur
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
A	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instandi Pemerintah	13.215.743.758	12.313.449.564	93,17
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.215.743.758	12.313.449.564	93,17
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	28.458.900	94,86
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	28.458.900	94,86
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.851.525.000	7.200.531.254	91,71
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.851.525.000	7.200.531.254	91,71
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	84.410.000	75.835.200	89,84
	Baju Kaos Lapangan,	8.466.800	8.125.200	95,97
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.943.200	67.710.000	89,16
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.333.205.000	2.283.676.812	97,88

No	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.000.000	20.536.000	93,35
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.169.315.000	1.147.203.870	98,11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	406.890.000	401.878.000	98,77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	56.314.400	93,86
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000	72.918.000	81,02
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585.000.000	584.826.542	99,97
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.903.540.600	1.843.008.392	96,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.418.000	382.961.916	90,02
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.478.122.600	1.460.046.476	98,78
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.063.158	881.939.006	87,06
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	410.209.600	354.124.946	86,33
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.119.058	136.062.925	66,33
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.000.000	97.006.230	95,10
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.734.500	294.744.905	99,67
B	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	10.422.266.150	10.058.690.093	96,51
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	707.931.450	589.763.300	83,31

No	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
7	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	491.700.210	393.508.650	80,03
	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	411.999.810	332.083.400	80,60
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	79.700.400	61.425.250	77,07
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	64.318.440	55.386.100	86,11
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	45.154.440	43.534.000	96,41
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.164.000	11.852.100	61,85
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	151.912.800	140.868.550	92,73
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	151.912.800	140.868.550	92,73
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.112.218.900	8.896.032.793	97,63
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.601.795.500	5.472.705.555	97,70
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	134.797.350	131.950.800	97,89
	Evaluasi Kelurahan	87.898.600	81.172.500	92,35
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.243.474.550	5.129.120.455	97,82
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	135.625.000	130.461.800	96,19
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.510.423.400	3.423.327.238	97,52
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3.210.423.400	3.133.429.088	97,60

No	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	250.000.000	241.310.600	96,52
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	50.000.000	48.587.550	97,18
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	602.115.800	572.894.000	95,15
12	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	602.115.800	572.894.000	95,15
	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	602.115.800	572.894.000	95,15
	Jumlah	23.638.009.908	22.372.139.657	94,64

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebesar Rp. 23.638.009.908,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 22.372.139.657,- (94,64%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.265.870.251,- (5,36%). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi keuangan tahun 2023 lebih tinggi daripada tahun 2022 yang mencapai 90,03%.

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	poin	80.00	81.03	101.29
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	poin	69.45	66.25	95.39

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2023 dalam mencapai target masih **berkinerja sangat baik** karena rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 98.34%. adapun rincian sebagai berikut:

- a. Pencapaian Sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 101.29 % atau predikat “*sangat tinggi*”.
- b. Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencapai 95.39 % atau predikat “*sangat tinggi*”.

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Program yang Memenuhi Target

Belum ada program yang memenuhi target ditentukan;

- b. Program yang Melebihi Target

Belum ada program yang melebihi target ditentukan;

- c. Program yang Tidak Memenuhi Target

Semua program tidak memenuhi target yang ditentukan.

Untuk perbaikan kedepan, kepala seksi (kasi) yang menangani program tersebut untuk menyusun rencana kegiatan lebih baik menyesuaikan tingkat kebutuhan dan jumlah personil serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Sasaran Renstra 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Sasaran Renstra s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target sasaran (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Realisasi Capaian Sasaran s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	500	87.52	100	71.58	71.58	100	259.1	51.82%
7.01.02.2.01	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	500	100	100	75	75.00	100	275.0	55.00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	500	100	100	100	100.00	100	300.0	60.00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	500	62.57	100	39.74	39.74	100	202.3	40.46%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	82.75	11.29	16.45	16.52	100.43	16.55	44.4	53.61%

No	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Sasaran Renstra 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Sasaran Renstra s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target sasaran (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Realisasi Capaian Sasaran s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	100	100	226	226.00	100	426.0	85.20%
7.01.03.2.03.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga masyarakat di kecamatan	500	60	100	100	100.00	100	260.0	52.00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	500	99.18	100	100	100.00	100.00	299.2	59.84%
7.01.04.2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500	99.18	100	100	100.00	100.00	299.2	59.84%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	398.00	79.32	79.5	69.14	86.97	79.60	228.1	57.30%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	347.75	69.06	69.45	67.19	96.75	69.55	205.8	59.18%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	398.00	79.32	79.5	70.1	88.18	79.60	229.0	57.54%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	398.00	79.32	79.5	70.29	88.42	79.60	229.2	57.59%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.00	79.32	79.5	67.69	85.14	79.60	226.6	56.94%

No	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Sasaran Renstra 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Sasaran Renstra s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target sasaran (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Realisasi Capaian Sasaran s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.00	79.32	79.5	69.62	87.57	79.60	228.5	57.42%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.00	79.32	79.5	67.98	85.51	79.60	226.9	57.01%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, kinerja pelayanan di Kecamatan Balikpapan Timur dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Kinerja pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat diukur melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Adapun pelayanan publik yang disurvei adalah pelayanan yang diberikan melalui loket pelayanan.

2. Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

Kinerja Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan mencakup partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kelurahan seperti Musrenbang/Rakorenbang, BBGRM, Prodeskel, Evdeskel, SPGRM, dana kelurahan, pemberdayaan Masyarakat, keikutsertaan dalam Lembaga masyarakat tingkat kelurahan dan lainnya.

3. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal

Kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan mencakup Pembayaran honorarium Babinsa, Babinkamtibmas, Sarpras Tramtibum, Fasilitasi Razia Tramtibum, Rapat Koordinasi Tramtibum, Lomba Poskamling, Fasilitasi Wawasan Kebangsaan, Fasilitasi LinMas, Fasilitasi Satgas Bencana, Fasilitasi Satgas Bersinar, Posko Hari Besar, Fasilitasi CGH, KBM dan koordinasi trantibum dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan IKM Internal dilakukan dengan mengukur pelayanan yang diberikan secretariat kecamatan kepada pegawai internal mencakup pelayanan keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan lainnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2023 terhadap indikator utama sudah cukup baik, dimana hampir semua target dapat tercapai kecuali Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur yang tidak mencapai target namun masih dalam taraf yang baik yaitu realisasi sebesar 66.25 poin dari target 69.45 poin.

Adapun permasalahan dan hambatan utama Kecamatan Balikpapan Timur yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi kelurahan ;
2. Jumlah staf baik PNS maupun Non-PNS yang masih kurang memadai baik dari sisi kuantitas yang sangat terbatas dan sisi kualitas yang masih belum menunjang pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya isu pengalihdayaan Tenaga Non-PNS yang apabila dilakukan cukup berdampak bagi Kecamatan. Hal tersebut karena selama ini kekurangan staf PNS di Kecamatan dan Kelurahan dicover oleh Tenaga Non-PNS; dan
4. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan. Hal tersebut cukup berdampak terhadap pelayanan di Kecamatan dimana hasil IKM Kecamatan turun pada tahun 2023 dikarenakan sarpras pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat;

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, yaitu sebagai berikut:

- a. PPTK kurang proaktif dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditentukan, sehingga dalam realisasi kegiatan agak sedikit terhambat;
- b. Usulan pembangunan (SPGRM dan Dankel) masih terdapat yang belum tertampung dalam penganggaran. Banyaknya usulan yang masuk dengan anggaran yang terbatas sehingga terdapat usulan pembangunan yang tidak dapat diakomodir oleh Kecamatan; dan
- c. Adanya Perubahan Kebijakan yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan (Penundaan Acara tingkat Kota seperti MTQ, Peralihan penggunaan Jenis BBM, Penyesuaian penjabaran sub kegiatan, Kenaikan DO RT dan lain sebagainya);

Berdasarkan hambatan serta tantangan dan peluang di atas, berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sistem pelayanan dan TI sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengusulkan usulan pembangunan dalam musrenbang sehingga usulan-usulan masyarakat dapat terakomodir dengan baik terutama lebih memperhatikan kebutuhan gender;
- c. Melakukan adaptasi yang cepat dan tepat terhadap segala perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti perubahan kebijakan pusat, daerah dan lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil *review* terhadap Rancangan Awal RKPD tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan di luar Rancangan Awal Renja Kecamatan Balikpapan Timur. Masih mengacu dengan Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan 2021-2026, Adapun program prioritas Kecamatan Balikpapan Timur adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Balikpapan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Timur	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	79.7	17,113,607,485	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Timur	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	79.7	17,223,151,005	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.65	127,420,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.65	49,999,930	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	47,420,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	49,999,930	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah dokumen Sakip (KURKIN, LKJIP)	2 dokumen	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah dokumen Sakip (KURKIN, LKJIP)	2 dokumen	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Ev. Renstra dan renja)	2 dokumen	40,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Ev. Renstra dan renja)	2 dokumen	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.7	8,900,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.7	8,900,000,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	8,900,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	8,900,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.7	1,007,168,404	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.7	976,945,800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	84,445,800	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	84,445,800	
	Pengadaan mesin absen	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah unit mesin absen	5 unit	30,222,604	Pengadaan mesin absen	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah unit mesin absen	5 unit	-	
	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	74 orang	892,500,000	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	74 orang	892,500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	2,391,474,631	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	2,478,393,725	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 paket	49,991,130	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 paket	49,991,130	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 paket	1,040,724,300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 paket	1,127,650,335	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	531,544,885	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	531,544,770	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	250 porsi	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	250 porsi	97,464,266	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 paket	97,464,316	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 paket	71,750,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah makanan dan minuman	24 dokumen	71,750,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah makanan dan minuman	24 dokumen	49,993,224	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 laporan	550,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 laporan	550,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	319,010,500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	438,641,500	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 unit	319,010,500	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 unit	187,800,000	
						Pembangunan gudang kantor			1 unit	250,841,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	79.7	2,378,552,950	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	79.7	2,378,552,950	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	550,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	550,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,828,552,950	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,828,552,950	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	1,989,981,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	2,000,617,100	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	450,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	242,956,400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	300,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	481,258,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	340,225,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	210,714,700	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	899,756,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	999,702,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	65,986,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	1,000,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	999,920,900	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	100%	650,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	100%	649,994,915	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	500,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	499,999,865	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	4 dokumen	150,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	4 dokumen	149,995,050	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Tingkat Kecamatan					Tingkat Kecamatan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%	200,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%	199,926,245	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	100,000,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	199,926,245	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	100,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	150,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	149,999,740	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1500 dokumen	150,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1500 dokumen	149,999,740	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	1,305,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	1,304,717,357	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	205,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	204,715,689	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65 lembaga kemasyarakatan	75,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65 lembaga kemasyarakatan	74,975,339	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 laporan	130,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 laporan	129,740,350	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	1,100,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	1,100,001,668	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga kemasyarakatan	500,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga kemasyarakatan	499,999,808	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	500,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	499,997,210	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	100,000,000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	100,004,650	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di	100%	1,000,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di	100%	991,861,325	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Kecamatan yang optimal					Kecamatan yang optimal			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	1,000,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	991,861,325	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	1,000,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	991,861,325	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN LAMARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	1,177,600,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN LAMARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	1,590,099,452	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	470,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	882,499,452	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 lembaga kemasyarakatan	50,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 lembaga kemasyarakatan	49,999,930	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	330,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	742,499,522	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas	90,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas	90,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	707,600,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	707,600,000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	707,600,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	707,600,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR BARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	1,676,280,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR BARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	2,288,553,530	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	640,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1,252,273,530	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 lembaga kemasyarakatan	50,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 lembaga kemasyarakatan	49,999,810	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 unit	500,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 unit	1,112,326,220	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas	90,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas	89,947,500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	1,036,280,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	1,036,280,000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 lembaga kemasyarakatan	1,036,280,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 lembaga kemasyarakatan	1,036,280,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TERITIP	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	1,602,720,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TERITIP	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	2,215,220,000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	640,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1,252,500,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 lembag kemasyarakatan	50,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 lembag kemasyarakatan	50,000,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit	500,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit	1,112,500,000	
				3 pokmas	90,000,000				3 pokmas	90,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	962,720,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	962,720,000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	50 lembag kemasyarakatan	962,720,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	50 lembag kemasyar	962,720,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
									akatan		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	3,085,560,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	3,282,060,000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	895,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1,361,500,000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	102 lembaga kemasyarakatan	75,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	102 lembaga kemasyarakatan	75,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	700,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	1,166,500,000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	120,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	120,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	2,190,560,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	1,920,560,000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	117 lembaga kemasyarakatan	2,190,560,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	117 lembaga kemasyarakatan	1,920,560,000	
					27,960,767,485					29,895,583,569	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Selain itu, usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mana penjarangan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD-RI. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi berjenjang dari Kelurahan hingga Kecamatan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan.

Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Balikpapan Timur sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Kecamatan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUM E	CATATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
I. Sub Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan					
KELURAHAN MANGGAR					
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Jalan RT. 66		Dana Kelurahan
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Jalan RT. 40		Dana Kelurahan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Poskamling RT. 27		SPGRM
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Posyandu RT. 41		SPGRM
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Poskamling RT. 54		SPGRM
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Posyandu RT. 72		SPGRM
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Jalan antara RT. 72 dan RT. 73		SPGRM

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLU M E	CATATAN
KELURAHAN MANGGAR BARU					
1	PJU	RT.25;38;31;36;32,24	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	Dana Kelurahan
2	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Persatuan RT.31	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Mx3 M	Dana Kelurahan
3	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Tengiri RT.24	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
4	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Lumba-lumba RT.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
5	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Persatuan RT.20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
6	Semenisasi Jalan	Jl. Persatuan RT.30	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
7	Perbaikan Jalan	Jl. Lumba-lumba RT.08	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
8	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Banjar RT.43	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
9	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	Jl. Tengiri RT.24	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUM E	CATATAN
10	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan n Jalan Lingkungan	Jl. Persatuan RT.20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
11	Perbaiki Posyandu	Jl. Paus RT.25	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
12	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Persatuan RT.44	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
13	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Baronang RT.21	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
14	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Persatuan RT.48	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
15	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Persatuan RT.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
16	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Persatuan RT.45	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
17	Perbaiki Jalan	Jl. Rekreasi RT.37	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
18	Pembangunan/Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Persatuan RT.32	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
19	Kec. Timur - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya	Jl. Persatuan RT.21	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
20	Kec. Timur - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	Jl. Baronang RT.21	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
KELURAHAN LAMARU					
1	Peningkatan Penerangan jalan lingkungan	RT 3 gg Sampini, gg Warga RT 3, gg Gandaria RT 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
2	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 10 Lamaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
3	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 13 gg Arjuna	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
4	Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan	Gg Setya 2, gg Setya 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
5	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 19 gg Asnawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
6	Rehab Posyandu	RT 33	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8x5m	SPGRM

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
7	Rehab Posyandu	RT 17	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7x5m	SPGRM
8	Semenisasi jalan lingkungan	RT 6	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80x1m	SPGRM
KELURAHAN TERITIP					
1	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	RT Kelurahan Teritip -1.169706, 117.002488	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
2	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	KELURAHAN TERITIP Jl. Mulawarman Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 76118 -1.169835, 117.002493	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
3	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Gang Mndiri RT 44 -1.172357, 117.001618	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
4	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Jl. Mulawarman RT. 46 Teritip Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 75271 -1.136418, 116.998214. P : 250m L : 2m	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Swadesa RT 04	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
6	Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan	KANTOR KELURAHAN TERITIP Jl. Mulawarman Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 76118 -1.169352, 117.002627	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
7	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Sriwijaya RT. 41 Salon Maning Rias Pengantin Jl. Mulawarman No.Rt.30 No.48, Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 76118 -1.163542, 117.004044	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
8	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Gn Binjai RT. 16 Majelis Dzikir Thoriqoh Naqsyabandiyah Kholidiyah Balikpapan VX5V+CV3, Jl. Gn. Binjai, Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 75271 -1.141364, 116.994498 P ; 1000M L: 2M	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
9	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Swadesa Blok IV RT. 04 P; 500 M L 4 M Jl. Swadesa 4 Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 76118 -1.175869, 117.004965	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
10	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Gn Binjai RT. 16 Gg. Jabal Nor Majelis Dzikir Thoriqoh Naqsyabandiyah Kholidiyah Balikpapan VX5V+CV3, Jl. Gn. Binjai, Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 75271 -1.141525, 116.994766 P 500M L 3M	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
11	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Jalan Futsal RT. 17 Teritip Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 75271 -1.138140, 116.977281 P 500M T 1M	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
12	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Jl. Pendidikan P 500 M T1M Jl. Pendidikan Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 75271 -1.143506, 117.000722	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
I. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
KELURAHAN TERITIP					
1	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Perumahan Puskopat RT 38 -1.166375, 117.003944	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUM E	CATATAN
2	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	RT 05 Kelurahan Teritip -1.169991, 117.002454	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan
3	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Kantor Kelurahan Teritip -1.169879, 117.002504	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan
4	Fasilitasi kemudahan berusaha dan sertifikasi usaha mikro/UMKM	Perumahan Puskopat RT 38 Kelurahan Teritip -1.166375, 117.003724	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan
5	Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	kantor kelurahan teritip Teritip Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur -1.169908, 117.002467	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan
6	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	Jl. Pasar Gn Tembak RT. 19 -1.1429890403143752, 116.99953084291536	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan
7	Pelatihan Cake and Pastry	RT 14 GUNUNG BINJAI Cafe Taman Pringgondani Jl. Gn. Binjai Rt. 14, Teritip, Balikpapan Timur, Teritip, Balikpapan, Kalimantan Timur 75271 -1.138525, 116.986324	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUM E	CATATAN
8	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	jL. Mulawarman RT. 07	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut :



Gambar 3.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritas pelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi Perangkat Daerah dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan Akuntabilitas Publik. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan data base Kecamatan;
4. Pembentukan tim / satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan; serta
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman” serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”. Maka rumusan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Timur adalah “*Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan*”.

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Timur juga menentukan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
) (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,00
		Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	69,65

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026;
- 2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
- 3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
- 4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Timur;
- 5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan di sempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pembangunan gudang kantor
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 2. Evaluasi Kelurahan
 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggar
 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggar Baru

- 5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamaru
- 6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Teritip
- 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar
- 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar Baru
- 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lamaru
- 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teritip
- 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar
- 14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar Baru
- 15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamaru
- 16 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teritip
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - 2 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar
 - 3 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar Baru
 - 4 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lamaru
 - 5 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Teritip
 - 6 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 7 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 3 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
- 2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 6 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
- 3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2025 adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) sub kegiatan;

- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 29,895,583,569,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana sebesar Rp 17.223.151.005,- untuk program dan kegiatan penunjang;
 - b) Dana sebesar Rp 12.672.432.564,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Kecamatan Balikpapan Timur untuk sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini.

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	17,223,151,005	APBD		79.7	17,615,213,386
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	69.65	49,999,930			69.65	55,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	4 dokumen	49,999,930	APBD		4 dokumen	55,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Sakip (KURKIN, LKJIP)	Kecamatan Balikpapan Timur	2 dokumen	0			2 dokumen	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Ev. Renstra dan renja)	Kecamatan Balikpapan Timur	2 dokumen	0			2 dokumen	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	8,900,000,000			79.7	9,790,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	50	8,900,000,000	APBD		50	9,790,000,000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	976,945,800			79.7	92,890,380
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Balikpapan Timur	1 paket	84,445,800	APBD		1 paket	92,890,380
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit mesin absen	Kecamatan dan 4 kelurahan	5 unit	-	APBD			-
	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan dan 4 kelurahan	74 orang	892,500,000	APBD			981,750,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	2,478,393,725	APBD		79.7	2,726,240,551

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	2 paket	49,991,130	APBD		2 paket	54,990,243
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	26 paket	1,127,650,335	APBD		26 paket	1,240,415,369
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	2 paket	531,544,770	APBD		2 paket	584,699,247
	Fasilitasi Jamuan tamu (Plus plakat)	Jumlah makan minum tamu	Kecamatan Balikpapan Timur	250 porsi	97,464,266	APBD		250 porsi	107,210,693
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	5 paket	71,750,000	APBD		5 paket	78,925,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	24 dokumen	49,993,224	APBD		24 dokumen	55,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	34 laporan	550,000,000	APBD		34 laporan	605,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	438,641,500			79.7	206,580,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	8 unit	187,800,000	APBD		4 unit	206,580,000
	Pembangunan gudang kantor				250,841,500				
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	2,378,552,950	APBD		79.7	2,616,408,245
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	12 laporan	550,000,000	APBD		12 laporan	605,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	12 laporan	1,828,552,950	APBD		12 laporan	2,011,408,245

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	2,000,617,100	APBD		79.7	2,128,094,210
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Balikpapan Timur	8 unit	242,956,400	APBD		8 unit	267,252,040
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Balikpapan Timur	34 unit	481,258,000	APBD		34 unit	529,383,800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Balikpapan Timur	50 unit	210,714,700	APBD		50 unit	231,786,170
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Timur	12 unit	999,702,000	APBD		12 unit	1,099,672,200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Timur	2 unit	65,986,000	APBD		2 unit	72,584,600

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	999,920,900	APBD		100%	1,099,912,990
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	649,994,915	APBD		100%	714,994,407
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Timur	4 laporan	499,999,865	APBD		4 laporan	549,999,852

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	4 dokumen	149,995,050	APBD		4 dokumen	164,994,555
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	199,926,245			100%	219,918,870
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	2 Dokumen	199,926,245	APBD		2 Dokumen	219,918,870
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	3 laporan		APBD		3 laporan	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	149,999,740			100%	164,999,714
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Balikpapan Timur	1500 dokumen	149,999,740	APBD		1500 dokumen	164,999,714
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	16.65%	1,304,717,357	APBD		16.65%	1,369,953,225
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	204,715,689	APBD		100%	214,951,473

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	65 lembaga kemasyarakatan	74,975,339	APBD		65 lembaga kemasyarakatan	78,724,106
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	3 laporan	129,740,350	APBD		3 laporan	136,227,368
12	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	1,100,001,668	APBD		100%	1,155,001,751
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Balikpapan Timur	5 lembaga kemasyarakatan	499,999,808	APBD		5 lembaga kemasyarakatan	524,999,798
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	2 laporan	499,997,210	APBD		2 laporan	524,997,071
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Timur	2 laporan	100,004,650	APBD		2 laporan	105,004,883

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	991,861,325	APBD		100%	1,041,454,391
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	991,861,325			100%	1,041,454,391
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	12 laporan	991,861,325	APBD		12 laporan	1,041,454,391
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	KELURAHAN LAMARU	16.65%	1,590,099,452	APBD		16.65%	2,110,240,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		membangun kelurahan							
14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100%	882,499,452	APBD		100%	660,000,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		36 lembaga kemasyarakatan	49,999,930	APBD		36 lembaga kemasyarakatan	30,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 unit	742,499,522	APBD		4 unit	600,000,000
15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 pokmas	90,000,000	APBD		1 pokmas	30,000,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan		100%	707,600,000			100%	1,450,240,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		36 lembaga kemasyarakatan	707,600,000	APBD		36 lembaga kemasyarakatan	1,450,240,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	KELURAHAN MANGGAR BARU	16.65%	2,288,553,530			16.65%	2,737,360,000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100%	1,252,273,530			100%	960,000,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		54 lembaga kemasyarakatan	49,999,810	APBD		54 lembaga kemasyarakatan	30,000,000
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		20 unit	1,112,326,220	APBD		9 unit	900,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 pokmas	89,947,500	APBD		1 pokmas	30,000,000
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan		100%	1,036,280,000	APBD		100%	1,777,360,000
18	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		54 lembaga kemasyarakatan	1,036,280,000	APBD		54 lembaga kemasyarakatan	1,777,360,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	KELURAHAN TERITIP	16.65%	2,215,220,000	APBD		16.65%	2,664,580,000
19	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100%	1,252,500,000			100%	960,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		50 lembag kemasyarakatan	50,000,000	APBD		50 lembag kemasyarakatan	30,000,000
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		12 unit	1,112,500,000	APBD		6 unit	900,000,000
20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 pokmas	90,000,000	APBD		1 pokmas	30,000,000
	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga masyarakat di Kecamatan		100%	962,720,000			100%	1,704,580,000
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan		50 lembag kemasyarakatan	962,720,000	APBD		50 lembag kemasyarakatan	1,704,580,000
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	KELURAHAN MANGGAR	16.65%	3,282,060,000			16.65%	4,121,500,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		membangun kelurahan							
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100%	1,361,500,000			100%	1,200,000,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		102 lembaga kemasyarakatan	75,000,000	APBD		102 lembaga kemasyarakatan	50,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 unit	1,166,500,000	APBD		15 unit	1,100,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 pokmas	120,000,000	APBD		1 pokmas	50,000,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan		100%	1,920,560,000			100%	2,921,500,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		117 lembaga kemasyarakatan	1,920,560,000	APBD		117 lembaga kemasyarakatan	2,921,500,000
	JUMLAH.....				29,895,583,569				32,760,213,992

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Balikpapan.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Timur yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Timur berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan public guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Timur terus berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan Timur mendukung priorotas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

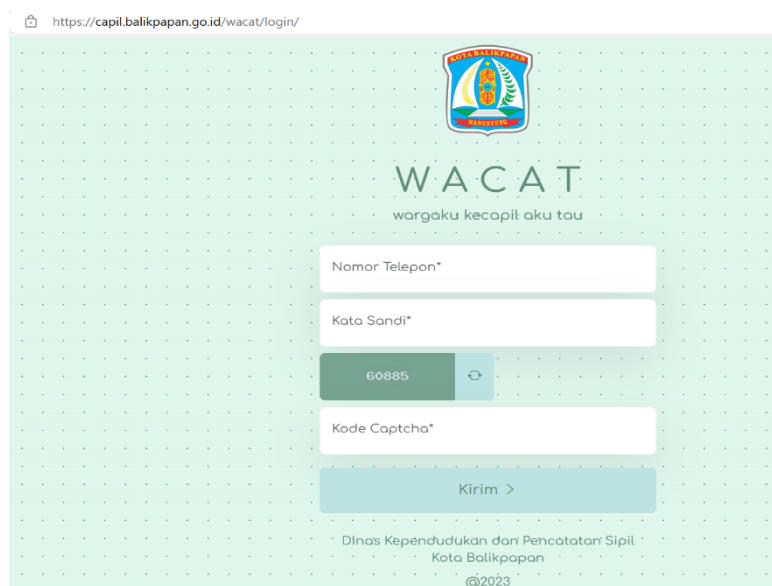
BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur terdapat 1 (satu) inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

INOVASI PELAYANAN

Nama Inovasi	: JAS KERJA RT (<u>Kerjasama</u> Peningkatan Kinerja RT
Inisiasi Inovasi	: Inisiasi Mandiri bekerjasama dengan Disduk Capil melalui aplikasi Wacat
Penjelasan Singkat Inovasi	: JAS KERJA RT merupakan aplikasi sistem pelaporan DO RT secara online.
Latar Belakang/ Alasan Waktu Pelaksanaan Inovasi	: Terkendalanya amprahan pengajuan DO RT
Tanggal Pembuatan	: Oktober 2023
Tanggal Pelaksanaan	: November 2023
Penerima Manfaat Inovasi	: 234 Ketua RT Se-Kecamatan Balikpapan Timur
Dampak	: Kemudahan Ketua RT dalam menyampaikan Laporan DO dan mempercepat serapan anggaran Kecamatan Balikpapan Timur
Apresiasi atau Penghargaan	: -
Tautan Pelaksanaan Inovasi	: Qr Code dan link https://capil.balikipapan.go.id/wacat/login/



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun ke depan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Balikpapan Timur untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerjasecara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian dan pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Balikpapan Timur pada periode Tahun 2025. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Timur yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

HH. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BALIKPAPAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan merupakan dokumen Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Dalam Periode Tahun Anggaran 2024, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun .

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam RENJA perangkat daerah akan diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Sistem Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Daerah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 ;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat

Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2023. Penyelenggaraan pemerintah di bidang politik dan wawasan kebangsaan yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permandagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

I.1 Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, sertasusunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33,

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Walikota Balikpapan terpilih periode 2021-2026 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026, yaitu dengan VISI “**TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL** “ dan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi

Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai

Misi 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada tahun 2022 maka melaksanakan 2 (dua) urusan, 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan total pagu perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 112.420.677.340,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RKPD

1. Persentase Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi
2. Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat
3. Persentase Konflik Sosial yang tertangani

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	Unit perang kat daerah Penan ggung jawab	Penje lasan
						I	II	III	IV						
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12	15=14/5X100%	16	17
					K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K	Rp K	Rp K	Rp K	Rp K	Rp	

1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	80,00	3.380.002.040		864.360.485		1.414.429.418		1.234.824.103	80,02	1.586.694.062	80,02	5.100.308.068	100,03%	150,90%	80,02	4.273.433.175	0,00%	21,31%	Badan Kesbangpol
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,00	-	-	-	-	50,11	-		50,11	-	83,52%	0,00%	50,11	-	64,24%	0,00%			

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun	Dokumen	1,00		1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00%	0,00%	1				TARGET KINERJA telah tercapai di TW I
			Jumlah dokumen perencanaan tahunan	Dokumen	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	100,00%	0,00%	1	-	0	0,00%	TARGET KINERJA telah tercapai di TW I
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan	Dokumen	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1,00	-	100,00%	0,00%		-			Penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2023 sudah rampung di TW III
			Jumlah laporan hasil pelaksanaan RENSTR A OPD	Dokumen	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0,00%	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	80,00	3.643.942.598	-	710.276.125	-	956.967.329	-	958.051.025	80,08	759.819.169	80,08	3.385.113.648	100,10%	92,90%	80,08	3.385.113.648	0,00%	29,69%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan	14,00	3.643.942.598	3,00	710.276.125	4,00	956.967.329	4,00	958.051.025	3	759.819.169	14,00	3.385.113.648	100,00%	92,90%	14	3.385.113.648	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	80,00	63.600.000	-	-	-	-	-	13.320.000	80,45	-	80,45	13.320.000	100,57%	0,00%	80,45	13.320.000	0,00%	3,58%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Orang	25,00	13.600.000	-	-	-	-	25,00	13.320.000	0,00	-	25,00	13.320.000	100,00%	97,94%	25	13.320.000	0,00%	0,00%		

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Tidak tercapai karena anggaran direlokasi pada anggaran perubahan untuk BBM kendaraan operasional
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	78,00	641.725.602	-	107.607.795	-	265.368.159	-	119.947.348	78,47	416.902.560	78,47	492.923.302	100,60%	76,81%	78,47	492.923.302	0,00%	13,55%	Target kinerja kegiatan belum tercapai karena pengukuran IKM akan dilakukan pada TW IV

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	Jenis	8,00	24.989.000	4,00	10.461.000	4,00	12.154.500	-	-	0	-	8,00	22.615.500	100,00%	90,50%	8	22.615.500	0,00%	0,00%	Sudah tercapai
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis	16,00	127.000.000	-	-	9,00	90.780.000	-	-	7	202.224.240	16,00	293.004.240	100,00%	230,71%	16	293.004.240	0,00%	0,00%	Belum tercapai dikarenakan beberapa barang modal yang akan disesuaikan di anggaran perubahan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Jenis	7,00	199.731.100	4,00	65.530.000	3,00	29.206.750	-	44.015.250	0	43.124.550	7,00	181.876.550	100,00%	91,06%	7	181.876.550	0,00%	0,00%	Belum tercapai 100% dikarenakan pelaksanaan belanja kegiatan mengikuti RAK

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Jenis	7,00	76.724.900	-	-	6,00	32.040.150	-	22.216.650	1	14.567.640	7,00	68.824.40	100,00%	89,70%	7	68.824.440	0,00%	0,00%	Belum tercapai 100% dikarenakan pelaksanaan belanja kegiatan mengikuti RAK
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	3,00	19.993.440	3,00	2.832.000	-	4.416.000	-	4.416.000	0	5.856.000	3,00	17.520.00	100,00%	87,63%	3	17.520.000	0,00%	0,00%	Sudah tercapai
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kali	50,00	326.000.000	8,00	28.784.795	14,00	96.770.759	3,00	49.299.448	20,00	151.130.130	45,00	325.985.132	90,00%	100,00%	45	325.985.132	0,00%	0,00%	Sudah tercapai 50% setelah penyelesaian target kinerja di renja Perubahan

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	80,00	271.639.438	-	34.800.108	-	56.187.015	-	90.288.213	80,74	63.852.351	80,74	181.275.336	100,93%	66,73%	80,74	181.275.336	0,00%	11,08%	Target kinerja kegiatan belum tercapai karena pengukuran IKM akan dilakukan pada TW IV
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	60,00	59.998.000	12,00	12.516.206	12,00	12.468.662	9,00	14.155.110	9	17.240.282	42,00	56.380.260	70,00%	93,97%	42	56.380.260	0,00%	0,00%	Tidak tercapai 100% dikarenakan pada dari triwulan III tidak lagi dilakukan pembayaran untuk TV berlangganan

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	Orang	6,00	191.637.000	6,00	22.283.902	-	43.718.353	-	76.133.103	0	46.612.069	6,00	188.747.427	100,00%	98,49%	6	188.747.427	0,00%	0,00%	Sudah tercapai di TW I untuk pembayaran gaji 6 orang tenaga non ASN
			Luasan Gedung Kantor yang dilayani	m ²	874,00		874,00		-		-			874,00			100,00%		874		0,00%	0,00%	Sudah tercapai di TW I untuk pembayaran gaji 6 orang tenaga non ASN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	80,00	274.000.000	-	11.676.457	-	135.906.915	-	53.217.517	80,36	346.119.982	80,36	200.800.889	100,45%	73,28%	80,36	200.800.889	0,00%	9,01%	TARGET kinerja kegiatan belum tercapai karena pengukuran IKM akan dilakukan pada

																							TW IV
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit	12,00	222.000.000	8,00	11.676.457	-	16.648.527	4,00	49.193.767	0	103.944.795	12,00	181.463.546	100,00%	81,74%	12	181.463.546	0,00%	0,00%	TARGET kinerja telah tercapai untuk pemeliharaan kendaraan di TW III sesuai dengan jumlah kendaraan yang aktif
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis	6,00	74.950.000	-	-	5,00	20.258.388	1,00	4.023.750	0	43.325.187	6,00	67.607.325	100,00%	90,20%	6	67.607.325	0,00%	0,00%	TARGET telah tercapai di TW III

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	10,00	100.000.000	-	-	6,00	99.000.000	-	-	4	198.850.000	10,00	297.850.000	100,00%	297,85%	10	297.850.000	0,00%	0,00%		Sudah tercapai 60% dan akan tercapai 100% pada triwulan IV karena anggaran untuk pelaksanaan terdapat di anggaran perubahan
2	Meningkatnya pembangunan demokrasi dan politik di daerah	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat terhadap 4 Konsensus Nasional	%	60,00	395.000.000	-	45.779.540	100,00	232.422.728	-	114.592.812	0,00	334.699.930	100,00	727.495.010	166,67%	184,18%	100,00	727.495.010	0,00%	17,13%	Badan Kesbangpol	Target 60% pelaksanaan yang direncanakan terlampaui sehingga semua kegiatan yang direncanakan

																							dapat terlaksana	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanipulan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	%	100,00	395.000.000	-	45.779.540	121,00	232.422.728	-	114.592.812	0%	334.699.930	121,00	727.495.010	121,00%	184,18%	100%	727.495.010	0,00%	17,13%		Target telah tercapai
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	5,00	9.999.650	-	2.418.130	2,00	2.500.000	1,00	2.500.000	0	2.500.000	3,00	9.918.130	60,00%	99,18%	3	9.918.130	0,00%	0,00%		Belum tercapai 100% dikarenakan pelaksanaan belanja kegiatan mengikuti RAK

		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan	5,00	19.999.300	-	10.536.410	3,00	1.817.000	-	2.500.000	1	4.409.000	4,00	19.262.410	80,00%	96,32%	4	19.262.410	0,00%	0,00%	Belum tercapai 100% dikarenakan pelaksanaan belanja kegiatan mengikuti RAK
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan	5,00	350.000.000	-	32.825.000	5,00	122.581.168	-	29.878.560		159.188.100	5,00	344.472.828	100,00%	98,42%	5	344.472.828	0,00%	0,00%	Sudah tercapai

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan	8,00	349.999.500	-		5,00	105.524.560	-	46.675.992	3	152.478.499	8,00	304.679.051	100,00%	0,87	8	304.679.051	0,00%	0,00%		Belum tercapai 100% dikarenakan pelaksanaan belanja kegiatan mengikuti RAK
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	12,00	64.997.750	1,00	-	3,00	-	-	33.038.260		16.124.331	4,00	49.162.591	33,33%	75,64%	4	49.162.591	#DIV/0!	#DIV/0!		Belum tercapai, akan dilaksanakan sesuai dengan RAK yaitu pada TW IV

3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SERTA ETIKA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan an Politik	%	66, 67	1.554.997.9 60	-	10.210.1 01	-	41.515 .681	66,6 7	63.731 .646	0,00	1.457 .351. 186	66,6 7	1.57 2.80 8.61 4	100 ,00 %	101,1 5%	66, 67	1.572.8 08.614	0 , 0 0 %	16, 73 %	Badan Kesba ngpol	Belu m terca pai dikar enak an pelak sana an kegia tan dilak sana kan sesua i deng an Renc ana Angg aran Kas yaitu TW III
		Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokras i, Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han,	Persenta se Pelaksana an Pendidikan an Politik yang diberikan	%	10 0,0 0	1.554.997.9 60	-	10.210.1 01	-	41.515 .681	50,0 0	63.731 .646	50,0 0	1.457 .351. 186	100, 00	1.57 2.80 8.61 4	100 ,00 %	101,1 5%	20 %	1.572.8 08.614	2 0 , 0 0 %	16, 73 %		Belu m terca pai dikar enak an pelak sana an kegia tan dilak sana kan sesua i deng an Renc ana Angg aran

		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																				Kas yaitu TW III	
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/P emilihan Umum Kepala Daerah,	%	100,00	1.608.215.142	-	10.210.101	-	36.663.931	75,00	28.891.646	25	1.431.191.186	100,00	1.506.956.864	100,00%	93,70%	100	1.506.956.864	0,00%	0,00%	Belum tercapai 100% diaksanakan pelaksanaan belanja kegiatan mengikuti RAK dan penyaluran bank eparpol yang dilaksanakan di TW IV

			serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan realisasi Bantuan keuangan Partai politik																			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan TP3D dan realisasi Bankeu Parpol	Dokumen	2,00	99.995.000	-	-	4.851.750	34.840.000	2	2,00	65.851.750	100,00%	65,86%	2	65.851.750	0,00%	0,00%			Belum tercapai karena penyusunan laporan TP3D akan dilaksanakan pada akhir tahun
		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Monitoring Perkembangan Politik dan situasi lainnya	Kegiatan	12,00		3,00	3,00	3,00	3	12,00		100,00%		12		0,00%	0,00%			Sudah tercapai 50% sampai di Semester I	

		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																						
4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Melaporkan pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	83,00	970.000.000	19,00	9.922.000	36,00	96.813.750	-	115.989.914		1.247.872.049	55,00	222.725.664	66,27%	22,96%	55,00	222.725.664	0,00%	3,80%	Badan Kesbangpol	Sudah tercapai sebesar 66,84% pada TW II
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan Ormas	%	100,00	970.000.000	-	9.922.000	50,00	96.813.750	6,00	115.989.914		1.247.872.049	56,00	222.725.664	56,00%	22,96%	560,00%	222.725.664	0,00%	3,80%		Sudah tercapai
		Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Jumlah dokumen hibah dan bansos yang diverifikasi	Dokumen	4,00	119.999.800	-	900.000	-	51.125.100	2,00	36.804.914	2	16.186.200	4,00	105.016.214	100,00%	87,51%	4	105.016.214	0,00%	0,00%		Sudah tercapai di TW II

		Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																							
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	2,00	150.000.000	-	-	-	39.097.650	1,00	55.403.300	1	41.430.920	1,00	135.931.870	50,00%	90,62%	1	135.931.870	0,00%	0,00%			Target belum tercapai
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan	Kegiatan	10,00	236.025.000	-	9.022.000	6,00	4.551.000	2,00	22.219.200	2	106.131.789	10,00%	141.923.989	100,00%	%	10	141.923.989	0,00%	0,00%			Target kinerja telah tercapai pada TW II

		Pengawas an Ormas dan Ormas Asing di Daerah	mediasi sengketa ormas, pengawa san ormas dan ormas asing didaerah																				
		Pelaksana an Koordinas i dibidang Pendaftar an Ormas, Pemberda yaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas an Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Penyalur an Hibah dan Bansos bidang Kesatuan Bangsa dan Ormas	Berka s	4,00	500.000.000	-	-	-	-	-	4	1.000.000.000	4,00	1.000.000.000	100,00%	200,00%	4	1.000.000.000	0,00%	0,00%		Belu m terca pai dan akan dilak sana sesuai RAK yaitu TW IV
		Pelaksana an Monitorin g Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftar an Ormas, Pemberda yaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Pelaksana an Pemanta uan Pengawas an dan Mediasi sengketa ormas	Kegiat an	12,00	100.000.000	3,00	-	3,00	2.040.000	3,00	1.562.500	3,00	84.123.140	12,00	87,725.640	100,00%	87,73%	12	87.725.640	0,00%	0,00%	Target pelak sana an kegia tan telah terca pai sebes ar 75% samp ai TW III

		Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pendataan kelembagaan Ormas secara digital	Kegiatan	1,00	-	-	-	1	1,00	100,00%	1	-	0,00%	0,00%						Pendataan ormas baru akan dilaksanakan setelah launching aplikasi Satu Ormas di bulan Oktober			
5	Meningkatkan Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN	%	80,00	600.000.000	25,00	13.791.200	25,00	274.190.786	15,00	170.785.149	15,00	525.034.158	80,00	458.767.135	100,00%	76,46%	8000%	458.767.135	0,00%	12,64%	Badan Kesbangpol	Telah tercapai 50% pada TW II
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	%	100,00	600.000.000	25,00	13.791.200	25,00	274.190.786	25,00	170.785.149	25,00	525.034.158	100,00	458.767.135	100,00%	76,46%	10000%	458.767.135	0,00%	12,64%		Target tercapai sesuai dengan rencana pada TW II

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Presentase Pelaksanaan Koordinasi Tim P4GN dan PN dan Fasilitasi Pencegahan Penggunaan Narkoba	%	100,00	517.000.000	15,00	8.150.000	35,00	165.759.500	25,00	149.075.465	25	464.123.270	100,00	787.108.235	100,00%	152,25%	100	787.108.235	0,00%	0,00%	Target tercapai sesuai dengan rencana pada TW II
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	Laporan	24,00	200.000.000	6,00	5.641.200	6,00	108.431.286	6,00	21.709.684	6	60.910.888	24,00	196.693.058	100,00%	98,35%	24	196.693.058	0,00%	0,00%	Target tercapai sesuai dengan rencana pada TW II

		dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																							
6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Monitoring Potensi Konflik	%	80,00	1.200.000.000	15,00	218.000.000	30,00	237.811.800	20,00	494.657.344		933.017.719	65,00	1.883.486.863	81,25%	156,96%	6500%	1.883.486.863	0,00%	25,08%	Badan Kesbangpol	Target tercapai sesuai dengan rencana pada TW II	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	%	100,00	1.200.000.000	20,00	218.000.000	20,00	237.811.800	30,00	494.657.344		933.017.719	70,00	1.883.486.863	70,00%	156,96%	70,00%	1.883.486.863	0,00%	25,08%		Target tercapai sesuai dengan rencana pada TW II	

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	42,00	199.986.100	9,00	-	9,00	47.011.800	18,00	61.261.594	6	88.353.894	42,00	196.627.288	100,00%	98,32%	42	196.627.288	0,00%	0,00%	Target tercapai sesuai dengan rencana pada TW II
--	--	--	---	----------	-------	-------------	------	---	------	------------	-------	------------	---	------------	-------	-------------	---------	--------	----	-------------	-------	-------	--

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	42,00	130.000.000	9,00	-	9,00	15.000.000	18,00	84.708.000	14	30.000.000	50,00	129.708.000	119,05%	99,78%	50	129.708.000	0,00%	0,00%		Target tercapai sesuai dengan rencana pada TW II
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pertemuan Forkopimda	Kegiatan	24,00	1.104.000.000	7,00	218.000.000	5,00	175.800.000	8,00	348.687.750	14	814.663.825	34,00	1.557.157.5	141,67%	141,05%	34	1.557.151.575	0,00%	0,00%		Target tercapai sesuai dengan

																				renca na pada TW II
											92,57 %	93,30 %			0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN											90,38 %	97,41 %			0,00%	0,00%				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN											86,10 %	70,95 %			7,02%	11,86 %				

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	Tinggi	Sedang			Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	102,37 %	115,43 %			0,00%	16,12 %	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah		

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Balikpapan
Faktor Penghambat pencapaian kinerja	1. Pemberlakuan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 menjadi hambatan dalam melakukan penyesuaian indikator kinerja karena berubahnya nomenklatur program dan kegiatan serta adanya sub kegiatan sesuai peraturan tersebut. Sedangkan dalam dokumen Renstra periode tahun 2016-2021 tahun 2021 merupakan periode akhir Renstra Perangkat Daerah;
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	1. Perlu dilakukan percepatan khususnya dalam serapan realisasi anggaran mengingat rata-rata capaian realisasi anggaran pada akhir triwulan I yang masih berada dibawah 20%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat melakukan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Catatan Analisis	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		27	28	28	29	30	33,33						
2.	Presentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat		67%	80%	100%	67%	67%	67%						
3.	Presetase Konflik Sosial Yang Tertangani		80%	83%	88%	88%	89%	80%						

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Berdasarkan Perwali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki fungsi dan tugas yaitu

Bagian Kesatu Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan - 4 - budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dal am negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat;
- dan l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi; melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (tugas

merumuskan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan sebagian tugas Badan di bidang: a. ideologi; b. wawasan kebangsaan; c. bela negara; d. karakter bangsa; e. pembauran kebangsaan; f. bhineka tunggal ika; g. sejarah kebangsaan; h. ketahanan ekonomi; i. sosial; j. budaya; k. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba; l. fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini; m. fasilitasi kerjasama intelijen; n. fasilitasi pemantauan orang asing; o. fasilitasi tenaga kerja asing dan Lembaga asing; p. fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah; q. fasilitasi kewaspadaan perbatasan antar negara; dan r. fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang:

a. pendidikan politik; b. etika budaya politik; c. peningkatan demokrasi; d. fasilitasi kelembagaan pemerintahan; e. fasilitasi perwakilan dan partai politik; f. fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah; g. fasilitasi pemantauan situasi politik; h. pendaftaran organisasi kemasyarakatan; i. pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; j. evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan; dan k. pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada dasarnya pelayanan program perangkat daerah diharapkan berhasil mewujudkan kondisi ideal yang telah ditetapkan dalam target tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas dan fungsi. Namun demikian pada pelaksanaannya untuk mencapai kondisi tersebut menghadapi kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam melaksanakan pelayanan untuk setiap bidang urusan antara lain sebagai berikut :

Bidang Non Urusan (sekretariat) :

- 1) Keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas
- 2) Kurangnya pengawasan intern organisasi
- 3) Budaya kerja pegawai belum optimal

Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Masyarakat :

- 1) Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam melaporkan Organisasi Masyarakat (ORMAS) serta tidak melaporkan ORMAS tersebut yang sudah tidak aktif pada Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan
- 2) Belum optimalnya pelaporan LPJ yang telah diberikan ke masing - masing Politik dan Organisasi Masyarakat yang telah diberikan bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan sehingga banyaknya Laporan LPJ yang terlambat.

c. Faktor yang menghambat pencapaian pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung program nasional adalah :

1. Masih belum ada data yang actual tentang para pekerja asing dan ormas asing dikarenakan masih di bawah naungan Dirjend Imigran dan Kejaksaan sehingga Keterbatasan data - data actual mengenai informasi tersebut di Kota Balikpapan
2. Masih belum dioptimalkan peran FPK dan FKDM yang kegiatannya belum sampai ke kelurahan sehingga perlu sinergisitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Balikpapan sebagai fasilitasi.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD1946, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dilingkungan Masyarakat luas.

Tagging Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Pagu Ranwal Tahun 2025	Tagging					
				Satuan	Tahun 2025		SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
						36.501.090.507						
						36.501.090.507						
8.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		Poin	80	9.255.257.100	√					
8.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Poin	65	-	√					
8.01.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	-	√					
8.01.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	-	√					
8.01.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	-	√					
8.01.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	1	-	√					

8.01.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1	-	√					
8.01.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80,5		√					
8.01.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/Bulan	25	5.500.000.000	√					
8.01.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			81		√					
8.01.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Orang	25	50.000.000	√					
8.01.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	20	350.000.000	√					
8.01.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			80		√					
8.01.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	8	30.000.000	√					
8.01.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan	Paket	Paket		145.000.000	√					

	Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						√					
8.01.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	550.000.000		√					
8.01.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	7	58.850.000		√					
8.01.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	80	200.000.000		√					
8.01.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	20	100.000.000		√					
8.01.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	30	300.000.000		√					
8.01.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80			√					
8.01.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	156.000.000		√					

8.01.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	2	80.000.000	√						
8.01.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Paket	1	50.000.000	√						
8.01.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Poin	82		√						
8.01.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	36	75.000.000	√						
8.01.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	5	700.407.100	√						
8.01.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Poin	80		√						
8.01.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	450.000.000	√						

8.01.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	9	100.000.000	√					
8.01.1.2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	1	30.000.000	√					
8.01.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	280.000.000	√					
8.01.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	50.000.000	√					
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional		%	64	4.973.191.040				√		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional		%	100	4.973.191.040				√		

8.01.02. 2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Dokumen	Dokumen	1	25.000.000				√		
8.01.02. 2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Dokumen	Dokumen	2	500.000.000				√		
8.01.02. 2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	43	2.700.000.000				√		

8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Orang	Orang	300	948.191.040				√		
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Laporan	4	100.000.000				√		
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua	Keluarga	Keluarga	2050	700.000.000				√		

		Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara									
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		Orang	43					√	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SERTA ETIKA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik		%	100	62.499.863.160				√	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan		%	100	62.499.863.160				√	

8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	10.050.000				√		
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	2	54.641.763.960				√		

8.01.03. 1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	100	226.135.600				√		
8.01.03. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	100	106.700.000				√		

8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan	1	7.515.213.600				√		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan		%	85	954.570.700				√		
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas		%	100	954.570.700				√		

8.01.04. 1.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	5	13.400.000				√		
8.01.04. 1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	10.050.000				√		
8.01.04. 1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Orang	Orang	250	370.910.700				√		

8.01.04. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Orang	100	183.400.000				√	
8.01.04. 1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Laporan	Laporan	1	376.810.000				√	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN		%	88	1.360.000.000				√	
8.01.05 .1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyenggaraan sosialisasi konsep P4GN		%	100	1.360.000.000				√	

8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	25.000.000				√		
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	35.000.000				√		
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Orang	Orang	400	350.000.000				√		

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	an Penyalagunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	250	600.000.000					√
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Laporan	Laporan	48	350.000.000					√

		t Kepercayaan di Daerah										
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS I PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Monitoring Potensi Konflik		%	88	4.145.000.000					√	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana		%	100	4.145.000.000					√	
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	30.000.000					√	

8.01.06. 1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	500.000.000				√		
8.01.06. 1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	30	1.250.000.000				√		

8.01.06. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	30	365.000.000				√		
8.01.06. 1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Laporan	192	450.000.000				√		

8.01.06. 1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	48	1.550.000.000				√		
JUMLAH						83.187.882.000						

2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Badan Kesatuan bangsa dan Kota Balikpapan

Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Balikpapan	Indeks Keouasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80 Poin	9.231.535.700,00	Kota Balikpapan	80 Poin	10.675.000.000,00	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Balikpapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus Nasional	64%	4.973.077.900,00	Kota Balikpapan	66%	7.413.400.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Balikpapan	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100%	9.818.761.000,00	Kota Balikpapan	100%	840.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Balikpapan	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang telah melapor pada Pemerintah Kota Balikpapan	85%	632.294.600,00	Kota Balikpapan	89%	975.050.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Balikpapan	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GNFasilitasi	92%	1.359.874.100,00	Kota Balikpapan	98%	1.489.791.040,00	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Balikpapan	Persentase Monitoring potensi konflik	88%	16.144.935.000,00	Kota Balikpapan	88%	4.150.000.000,00	
				42.160.478.300,00			25.093.341.040,00	

Tabel T-C.32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/ Volume/Target Kinerja Program dan Kegiatan	Catatan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Balikpapan	Persentase Fasilitasi Organisasi Masyarakat yang Telah Melaporan pada Pemerintahan Kota Balikpapan	84%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Masyarakat : Hidayatullah
2.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENGANANAN KONFLIK	Kota Balikpapan	Persentase Monitoring Potensi Konflik	84%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Vertikal

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **“Indonesia Yang Mandiri, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV (2020-2024) Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat Pemerintahan selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Mempertegas kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan lima poin penting untuk bisa mencapai sasaran pembangunan nasional atau rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.

1. Sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2025 menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan RKA K/L dan RKPD.
2. Pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara Renja K/L serta RKPD dengan RKP 2025
3. Perencanaan dan anggaran yang disusun K/L dan pemerintah daerah harus terukur, imperatif dan sesuai dengan amanat presiden “making delivered”, diperkuat melalui mekanisme Clearing House dengan menerapkan prinsip Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
4. Memperkuat integrasi dan sinergi sumber pendanaan yang mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, yaitu pendanaan swasta, KPBU, BUMN, dan APBN sebagai sumber terakhir yang digunakan.
5. K/L dan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan Major Project dan didukung sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang andal.

Hal-hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan
5. Terciptanya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan Visi dan Misi walikota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan mengemban Misi ke 4 Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan,yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				(n-2) 2020	(n) 2022	(n+1) 2023	(n+2) 2024	(n+3) 2025	(n+4) 2026	
	Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,56	0,8	0,82	0,85	0,86	0,88	0,88
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27	28	28	29	30	30
		Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	n/a	67%	80%	100%	67%	67%	67%

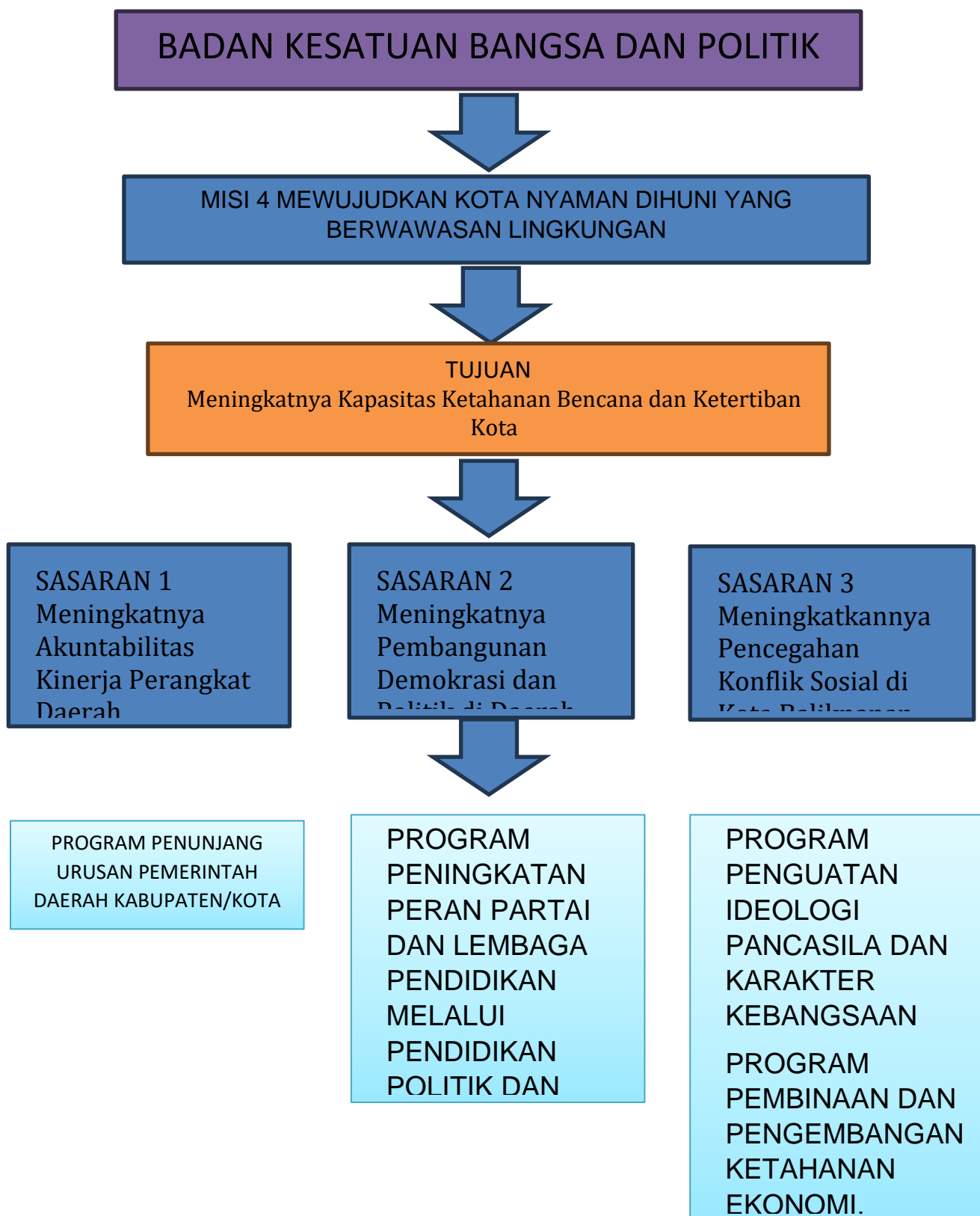
	Meningkatkannya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Presentase Konflik Sosial yang tertangani	64,50%	80%	83%	88%	88%	89%	89%
--	--	---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiran maju Tahun 2026 digambarkan dengan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						42.160.478.300,00		25.543.341.040,00		
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						42.160.478.300,00		25.543.341.040,00		
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						42.160.478.300,00		25.543.341.040,00		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.231.535.700,00		10.675.000.000,00	
8	01	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.500.000.000,00		6.600.000.000,00
8	01	01	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84	25 Orang/bulan	81 Poin	5.500.000.000,00	25 Orang/bulan	6.600.000.000,00
8	01	01	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						248.200.000,00		410.000.000,00
8	01	01	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84	25 Pkt	81 Poin	48.200.000,00	25 Paket	60.000.000,00
8	01	01	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84	25 Org	81 Poin	200.000.000,00	25 Orang	350.000.000,00
8	01	01	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.518.855.500,00		1.690.000.000,00
8	01	01	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	1 Pkt	81 Poin	29.999.800,00	1 Paket	35.000.000,00
8	01	01	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	IKM Layanan Administrasi Umum	84	10 Pkt	81 Poin	292.031.700,00	10 Paket	200.000.000,00

						Perangkat Daerah	Kantor yang Disediakan	Perangkat Daerah						
8	01	01	2	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			.	0		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	9 Pkt	81 Poin	537.965.900,00	9 Paket	660.000.000,00
			6	0										
			0	0										
			6	5										
8	01	01	2	0		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			.	0		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	2 Paket	81 Poin	58.831.600,00	2 Paket	65.000.000,00
			6	0										
			0	0										
			6	6										
8	01	01	2	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			.	0		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	50 Dok	81 Poin	199.876.500,00	50 Dok	250.000.000,00
			6	0										
			0	0										
			6	6										
8	01	01	2	0		Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			.	0		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	20 Lap	81 Poin	100.150.000,00	20 Lap	120.000.000,00
			6	0										
			0	0										
			6	8										
8	01	01	2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			.	0		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	30 Lap	81 Poin	300.000.000,00	30 Lap	360.000.000,00
			6	0										
			0	0										
			6	9										
8	01	01	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						262.451.800,00		200.000.000,00
			.	0										
			7	0										
8	01	01	2	0		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			.	0		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	84	1 Unit	-	156.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00
			7	0										
			0	0										
			7	1										
8	01	01	2	0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			.	0		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	84	2 Unit	-	63.124.000,00	2 Unit	0,00
			7	0										
			0	0										
			7	2										
8	01	01	2	0		Pengadaan Mebel								
			.	0		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	84	5 Unit	-	43.327.800,00	5 Unit	0,00
			7	0										
			0	0										
			7	5										
8	01	01	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						777.553.600,00		800.000.000,00
			.	0										
			8	0										
8	01	01	2	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			.	0		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	37 Lap	82 Poin	86.432.500,00	37 Lap	80.000.000,00
			8	0										
			0	0										
			8	2										

8	01	01	2 0 0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	5 Lap	82 Poin	691.121.100,00	5 Lap	720.000.000,00
8	01	01	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						924.474.800,00		975.000.000,00
8	01	01	2 0 0 9	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	18 Unit	81 Poin	449.771.800,00	18 Unit	490.000.000,00
8	01	01	2 0 0 9	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	78 Unit	81 Poin	105.354.000,00	78 Unit	120.000.000,00
8	01	01	2 0 0 9	0 0 0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	1 Unit	81 Poin	30.000.000,00	1 Unit	35.000.000,00
8	01	01	2 0 0 9	0 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	1 Unit	81 Poin	283.429.000,00	1 Unit	280.000.000,00
8	01	01	2 0 1 9	0 0 1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	1 Unit	81 Poin	55.920.000,00	1 Unit	50.000.000,00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						4.973.077.900,00		7.413.400.000,00
8	01	02	2 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						4.973.077.900,00		7.413.400.000,00
8	01	02	2 0 0 1	0 0 0 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
					Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	1 Dok	100 %	24.991.000,00	1 Dok	35.000.000,00
8	01	02	2 0	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								

			0 1	0 2											
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	2 Dok	100 %	499.950.000,00	2 Dok	500.000.000,00	
8	01	02	2 . 0 1	0 0 0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	43 Org	100 %	400.000.000,00	43 Orang	2.700.000.000,00	
8	01	02	2 . 0 1	0 0 0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	300 Org	100 %	948.137.000,00	300 Org	828.400.000,00	
8	01	02	2 . 0 1	0 0 0 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	4 Lap	100 %	100.000.000,00	4 Lap	100.000.000,00	
8	01	02	2 . 0 1	0 0 0 6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara										
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	2050 Kel	100 %	699.999.900,00	2050 Kel	750.000.000,00	

8	01	02	2 . 0 0 8	0 0 0 8	Pembentukan Paskibraka								
					Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Paskibraka	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	43 Org	100 %	2.300.000.000,00	43 Org	2.500.000.000,00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				9.818.761.000,00		840.100.000,00		
8	01	03	2 . 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				9.818.761.000,00		840.100.000,00		
8	01	03	2 . 0 0 1	0 0 0 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
					Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100	1 Dok	100 %	10.050.000,00	1 Dok	10.050.000
8	01	03	2 . 0 0 1	0 0 0 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
					Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	2 Dok	100 %	2.231.067.800,00	2 Dok	10.050.000
8	01	03	2 . 0 0 1	0 0 0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
					Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	100 Org	100 %	97.646.400,00	100 Org	250.000.000
8	01	03	2 . 0 0 1	0 0 0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								

					Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	100 Org	100 %	106.700.000,00	100 Org	120.000.000	
8	01	03	200015		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
					Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	1 Lap	100 %	7.373.296.800,00	1 Lap	450.000.000	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							632.294.600,00		975.050.000,00
8	01	04	2001		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							632.294.600,00		975.050.000,00
8	01	04	20011		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
					Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	5 Dok	100 %	13.400.000,00	5 Dok	15.000.000,00	
8	01	04	20012		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
					Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85	1 Dok	100 %	10.050.000,00	1 Dok	10.050.000,00	
8	01	04	20013		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									

					Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	250 Org	100 %	189.118.200,00	250 Orang	400.000.000,00	
8	01	04	200014		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
					Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	100 Orang	100 %	183.271.400,00	100 Orang	200.000.000,00	
8	01	04	200051		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
					Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	1 Lap	100 %	236.455.000,00	1 Lap	350.000.000,00	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							1.359.874.100,00		1.489.791.040,00
8	01	05	20011		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							1.359.874.100,00		1.489.791.040,00
8	01	05	20011		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
					Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	1 Dok	100 %	24.991.000,00	1 Dok	35.000.000,00	
8	01	05	20012		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
					Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	1 Dok	100 %	34.962.400,00	1 Dok	35.000.000,00	

					Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	1 Dok	100 %	12.029.960,00	1 Dokumen	35.000.000,00
8	01	06	200012	002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
					Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	1 Dokumen	100 %	499.975.600,00	1 Dokumen	500.000.000,00
8	01	06	200013	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
					Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	30 Org	100 %	1.249.999.400,00	30 Orang	1.250.000.000,00
8	01	06	200014	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
					Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	30 Org	100 %	365.000.000,00	30 Orang	365.000.000,00

						Konflik di Daerah									
8	01	06	2 . 0 1	0 0 0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
					Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	192 Lap	100 %	450.000.000,00	192 Laporan	450.000.000,00		
8	01	06	2 . 0 1	0 0 0 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota										
					Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	24 Dok	100 %	1.550.000.000,00	24 Dokumen	1.550.000.000,00		
TOTAL											42.160.478.300,00		25.093.341.040,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada tahun 2025.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yaitu meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota.

Pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan akan melaksanakan **6 program** dengan jumlah kegiatan sebanyak **11 kegiatan** dan **44 Sub Kegiatan** yang merupakan implementasi dari tujuan renstra 2021-2026 Meningkatkan kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota. Lokasi kegiatan keseluruhan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan sub kegiatan tersebut dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 36.501.090.507,-** yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2025. Program tersebut terdiri dari :

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Pagu Ranwal
				Satuan	Tahun 2024	Tahun 2024
						36.501.090.507
						36.501.090.507
8.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		Poin	80	10.481.903.407
8.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Poin	65	9.990.000
8.01.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1	9.990.000
8.01.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80,5	6.804.623.500
8.01.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang / Bulan	25	6.804.623.500
8.01.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			81	49.784.100
8.01.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Orang	25	49.784.100
8.01.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			80	
8.01.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket		252.960.751
8.01.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	585.287.825
8.01.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	7	59.983.485

8.01.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	80	12.538.500
8.01.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	20	65.131.900
8.01.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	30	450.000.000
8.01.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80	
8.01.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	1	156.000.000
8.01.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Poin	82	
8.01.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	36	254.357.636
8.01.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	5	799.106.700
8.01.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Poin	80	
8.01.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	10	565.889.150
8.01.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	9	365.256.860
8.01.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	75.993.000
8.01.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	298.602.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional		%	64	4.973.191.040
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional		%	100	4.973.191.040
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	25.012.000

8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2	1.300.000.000
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	43	1.250.000.000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Orang	300	750.000.000
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Laporan	4	150.000.000
8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Keluarga	2050	1.750.000.000
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		Orang	43	3.089.803.200
8.01.02.2.01.09	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Dokumen	1	505.769.900
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SERTA ETIKA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitas Pendidikan Politik		%	100	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan		%	100	

	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	25.109.258
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2	3.179.487.482
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	100	477.457.440,
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Orang	100	361.100.000
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan	1	1.643.284.140

8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan		%	85	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas		%	100	
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	5	14.800.000
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	214.800.000
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Orang	250	922.809.760
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Orang	100	323.468.720
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Laporan	1	187.683.200
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN		%	88	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN		%	100	
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Dokumen	Dokumen	1	50.000.000

		di Daerah yang Disusun				
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	1.000.000.000
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	400	500.000.000
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Orang	250	550.000.000
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Laporan	48	500.000.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Monitoring Potensi Konflik		%	88	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana		%	100	
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Dokumen	Dokumen	1	50.000.000

		Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1	2.650.000.000
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	30	1.500.000.000
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Orang	30	500.000.000
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Laporan	192	500.000.000
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	48	1.750.000.000
	JUMLAH					36.501.090.507

Dalam rangka meningkatkan kualitas Renja dan kualitas pembangunan serta keselarasan dengan inovasi OPD yang akan dicantumkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan telah memiliki beberapa inovasi yang telah berjalan dan sedang berlangsung di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian/Nama Inovasi	Pengampu	Keterangan
1.	SIPERKASA (Sistem Perhitungan dan Rekapitulasi Suara untuk mempermudah perhitungan Kotak Suara Pada Pemilu Kada) https://siperkasa.balikipapan.go.id/	Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan	Pengadaan Tahun 2019
2.	PEWIRA (Sistem Peta Kerawanan Wilayah Daerah untuk menghimpun data rawan konflik dan informasi bencana) http://pewirabalikipapan.inotive.go.id/	Bidang Wawasan Kebangsaan	Pengadaan Tahun 2022
3.	PR CAK BIMO (Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Bidang Melalui ON LINE) http://prcakbimo.balikipapan.go.id/	Keuangan	Pengadaan Tahun 2021
4.	Satu Ormas (Sistem Layanan Terpadu Organisasi Kemasyarakatan) http://satuormas.balikipapan.go.id/	Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan	Pengadaan Tahun 2022

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan progduk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembanguanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisas antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Di dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2023 memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Di dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 ini masih belum sempurna, sehingga dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya

(RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Propinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Badan).

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur perencanaan unntuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, yaitu dengan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Perlu menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif melaksanakan koodinasi dengan instansi terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- e. Dalam menerapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan ammanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 ini kami susun sehingga dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



ELYZABETH E.R.L TORUAN